

# MEMBANGUN NEGERI MELALUI INTEGRATED BANKING SOLUTION & TRANSFORMASI UMKM





MEMBANGUN NEGERI  
MELALUI  
INTEGRATED  
BANKING SOLUTION  
& TRANSFORMASI  
UMKM

# SEKAPUR SIRIH



Digitalisasi UMKM merupakan bagian dari terobosan BRI dalam mengembangkan digital banking melalui penerapan 6 pilar, yaitu *New Way of Working*, *Fintech Partnership*, *Mobile First Strategy*, *Open API*, *ChatBot* dan *Innovation Ecosystem*. ”

Bank BRI terus fokus memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta tetap menjaga kepemimpinan untuk pangsa pasar bisnis mikro. Bank BRI melakukan transformasi dengan terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku UMKM agar dapat “naik kelas” melalui akses pembiayaan, digitalisasi dan inklusi keuangan.

Digitalisasi UMKM dilakukan dengan terus mengembangkan *platform digital* seperti *Indonesia Mall*. Layanan ini mendorong pemasaran produk-produk mitra binaan UMKM BRI dari seluruh Indonesia untuk *go online*. Digitalisasi UMKM merupakan bagian dari terobosan BRI dalam mengembangkan *digital banking* melalui penerapan 6 pilar, yaitu *New Way of Working*, *Fintech Partnership*, *Mobile First Strategy*, *Open API*, *ChatBot* dan *Innovation Ecosystem*. Digitalisasi di Bank BRI didukung dengan teknologi satelit, dimana BRI merupakan satu-satunya bank di dunia yang memiliki dan mengoperasikan satelit sendiri, yaitu BRIsat.

Dengan dukungan jaringan yang disediakan oleh satelit BRIsat, Bank BRI hadir di seluruh penjuru negeri, tidak terkecuali di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Keberadaan BRI di *remote area* bertujuan

untuk menyediakan akses keuangan yang terintegrasi dengan kualitas yang sama seperti di wilayah perkotaan. Terbukanya akses perbankan yang terintegrasi bagi masyarakat di *remote area* merupakan komitmen BRI dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

Bank BRI juga terus melakukan penetrasi dan perluasan inklusi keuangan dengan pengembangan agen LAKU PANDAI yang dinamakan agen BRILink. Hingga akhir tahun 2017, BRI memiliki 279.750 agen BRILink yang mampu mencetak transaksi senilai Rp. 298 Triliun di sepanjang tahun 2017. Selain itu, BRI menjadi satu satunya bank yang berpartisipasi dalam Program Desa Nabung Saham yang bertujuan agar masyarakat di pedesaan melek terhadap investasi di instrumen saham. Komitmen Bank BRI terhadap pemberdayaan UMKM terlihat dari portofolio penyaluran kredit. Per akhir Desember 2017, BRI menyalurkan kredit sebesar Rp739,3 triliun dengan 73,5% diantaranya disalurkan ke segmen UMKM. Dengan demikian UMKM menjadi penyokong utama kinerja BRI sehingga mampu mencetak laba sebesar 29,04 triliun di sepanjang 2017. Pencapaian ini menjadikan BRI sebagai Bank pencetak laba terbesar di Indonesia selama 13 tahun berturut-turut.

## TESTIMONI

Joko Widodo  
Presiden Republik Indonesia



BRI mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan, berbagai dinamika, serta melewati berbagai masa. Tidak heran jika BRI selalu menjadi Pioner dengan memberikan pelayanan keseluruh wilayah nusantara. Dengan fokus melayani nasabah UMKM, BRI telah mendukung kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM. Teruslah bekerja membangun Negeri.

H.M. Jusuf Kalla  
Wakil Presiden Republik Indonesia



BRI dari namanya saja Bank untuk kepentingan rakyat dan pencapaian yang begitu besar tentu dapat melayani seluruh rakyat. Pada dasarnya BRI sebagai *agent of development* dalam sistem keuangan kita telah menyentuh begitu banyak orang dan karena itulah maka kepada seluruh Pimpinan dan karyawan saya harapkan dalam perubahan situasi teknologi ini tentu diikuti dengan perubahan prinsip-prinsip pelaksanaan tugas sendiri.



## TESTIMONI

Rini M Soemarno  
Menteri BUMN Republik Indonesia



Saya sangat bangga dengan Bank BRI, karena saya kemana-mana diseluruh pelosok Indonesia saya selalu melihat BRI, itu buat saya kebanggaan yang tersendiri. Tidak ada Bank di Dunia yang bisa berada di seluruh pelosok negerinya dan itulah BRI. Tentunya kedepan yang saya harapkan BRI dapat terus mengemban tugasnya untuk bagaimana mensejahterakan rakyat Indonesia, meningkatkan pembinaannya untuk usaha kecil menengah dan bagaimana yang mikro bisa menjadi kecil, yang kecil bisa menjadi menengah, dan menengah bisa menjadi besar.

Eko Putro Sandjojo  
Menteri Desa PDTT Republik Indonesia



Saya harapkan BRI terus penetrasi ke daerah daerah tertinggal bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa BRI membentuk BRLink, agar diteruskan dan disebarkan karena itu akan membantu akses perbankan buat masyarakat-masyarakat miskin. Kalau yang dulu mungkin masyarakat untuk mendapatkan akses perbankan harus membayar ojek yang mahal karena jaraknya jauh, sekarang dengan BRI membantu BUMDES membuat akses perbankan di setiap BUMDES masyarakat desa bisa jalan kaki saja mendapatkan akses perbankan. Semoga BRI tambah maju dan ikut berperan aktif dalam pembangunan bangsa ini

M. Hanif Dhakiri  
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia



BRI bisa terus melayani rakyat Indonesia dengan setulus hati, dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada BRI selama ini sudah banyak bekerjasama dengan Kementrian Ketenagakerjaan baik itu penanganan TKI melalui berbagai bentuk pelatihan maupun juga melalui Kredit Usaha Rakyat dan juga untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Maju terus BRI, Melayani terus dengan sepenuh hati.

Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen



# DAFTAR ISI



## .01

### IKHTISAR KINERJA UTAMA

- 20 Kinerja Segmen Bisnis 2017
- 22 Ringkasan Kinerja Keuangan 2017
- 24 Ikhtisar Keuangan
- 26 Ikhtisar Saham
- 28 Ikhtisar Obligasi
- 30 Pembayaran Dividen
- 31 Aksi Korporasi
- 32 Peristiwa Penting

- 01 Sekapur Sirih
- 02 Testimoni
- 04 Daftar Isi
- 08 Tematik

## .41

### LAPORAN MANAJEMEN

- 42 Laporan Dewan Komisaris
- 52 Laporan Direktur Utama
- 64 Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2017 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

- 88 Budaya Perusahaan
- 90 Profil Dewan Komisaris
- 95 Profil Direksi
- 101 Profil Senior Executive Vice President (SEVP)
- 104 Demografi Karyawan
- 107 Komposisi Pemegang Saham
- 110 Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi
- 111 Struktur Perusahaan
- 112 Kronologi Pencatatan Saham
- 117 Kronologi Penerbitan Efek Lain
- 119 Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang
- 120 Penghargaan dan Sertifikasi
- 125 Peringkat BRI
- 126 Alamat Kantor dan/atau Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan
- 128 Perusahaan Anak
- 129 Informasi pada Website Perusahaan
- 130 Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

## .67

### PROFIL PERUSAHAAN

- 68 Identitas Perseroan
- 70 Logo BRI
- 72 Riwayat Singkat BRI
- 74 Bidang Usaha
- 76 Produk dan Jasa
- 80 Wilayah Operasional
- 82 Jejak Langkah
- 84 Struktur Organisasi
- 86 Visi, Misi dan Nilai-Nilai Utama



## .135

### ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

- 136 Tinjauan Ekonomi dan Industri
- 139 Tinjauan Industri Perbankan dan BRI
- 142 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
- 144 Bisnis Mikro dan Program
- 147 Bisnis Mikro
- 150 BRILink
- 153 Bisnis Program

- 
- 158 Bisnis Ritel
    - 161 Bisnis Pinjaman Ritel Konsumer
    - 164 Bisnis Pinjaman Ritel Komersial dan Menengah
    - 166 Bisnis Simpanan Ritel
    - 168 Bisnis Jasa Perbankan Ritel
  - 172 Bisnis Korporasi
    - 174 Bisnis Korporasi BUMN
    - 176 Bisnis Korporasi Non BUMN
    - 178 Bisnis Sindikasi dan Jasa Keuangan Non Bank
    - 180 Bisnis Dana Institusi
    - 183 Bisnis Internasional
    - 186 Bisnis Treasury
    - 189 Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal
  - 192 Bisnis Entitas Anak
    - 195 PT Bank BRISyariah (BRISyariah)
    - 199 PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
    - 203 BRI Remittance Company Ltd. (BRI Remittance)
    - 206 PT Asuransi Jiwa Beringin Jiwa Sejahtera (BRI Life)
    - 210 PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance)
  - 214 Tinjauan Keuangan
    - 215 Laporan Posisi Keuangan
    - 215 Aset
    - 220 Liabilitas
    - 222 Ekuitas
    - 222 Laporan Laba/Rugi
    - 227 Laporan Arus Kas
    - 228 Rasio Keuangan
    - 228 Kemampuan Membayar Utang
    - 230 Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif
    - 231 Kebijakan Struktur Modal
    - 232 Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal
    - 233 Kebijakan Lindung Nilai
    - 233 Komitmen dan Kontinjensi
    - 234 Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah
  - 235 Pencapaian dan Target 2017
    - 235 Target 2018
    - 235 Informasi Dan Fakta Material Setelah Tanggal Periode Laporan
    - 235 Prospek Usaha
    - 242 Aspek Pemasaran
    - 245 Kebijakan Dividen
    - 246 Kontribusi Bagi Negara
    - 246 Program Kepemilikan Saham Oleh Manajemen Dan/Atau Karyawan
    - 247 Penggunaan Dana Penawaran Umum
    - 247 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Berelasi
    - 250 Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, Atau Restrukturisasi Hutang Dan Modal
    - 251 Perubahan Peraturan Perundang-Undangan
    - 259 Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi
    - 261 Informasi Kelangsungan Usaha
  - 262 Pengelolaan Human Capital
    - 263 Kebijakan Pengelolaan Human Capital
    - 263 Arsitektur Human Capital
    - 264 Strategi Pengelolaan Human Capital
    - 266 Fokus Pengelolaan Human Capital Tahun 2017
    - 267 Revitalisasi Budaya Kerja
    - 269 Sistem Informasi Manajemen Human Capital
    - 270 Pengembangan Human Capital
    - 273 Implementasi Strategi dan Operasional Pengembangan Human Capital
    - 274 Penilaian Kinerja dan Remunerasi
    - 275 Program Pensiun
  - 275 Kinerja Pengelolaan Human Capital
  - 276 Profil Sumber Daya Manusia BRI
  - 278 Teknologi Informasi dan Operasional
    - 278 Kebijakan Teknologi Informasi
    - 280 BRIsat
    - 282 Pengembangan SDM TI
    - 282 Realisasi Inisiatif TI 2017
    - 283 Strategi dan Rencana Pengembangan TI 2018
  - 284 Digital Banking
    - 284 Pencapaian tahun 2017
    - 285 Strategi dan Rencana Pengembangan 2018
    - 286 Pengembangan Usaha
  - 289 Operasional
    - 289 Pengembangan Operasional tahun 2017
    - 289 Strategi Operasional Tahun 2018
    - 290 Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap
    - 290 Pengelolaan Aktiva Tetap Tahun 2017
    - 290 Realisasi Strategi dan Operasional Tahun 2017
    - 291 Pengadaan Barang dan Jasa





DAFTAR ISI



- 487 Organ Pendukung Dewan Komisaris
- 491 Komite Audit
- 509 Komite Nominasi dan Remunerasi
- 525 Komite Pengawas Manajemen Risiko
- 540 Komite Tata Kelola Terintegrasi
- 553 Komite Direksi
- 572 Sekretaris Perusahaan
- 577 Hubungan Investor
- 579 Satuan Kerja Audit Internal
- 592 Akuntan Publik
- 594 Fungsi Kepatuhan
- 604 Manajemen Risiko
- 626 Sistem Pengendalian Internal
- 630 Perkara Penting Yang Dihadapi Perusahaan
- 632 Akses Informasi dan Data Perusahaan
- 633 Kode Etik
- 636 Whistleblowing System
- 639 Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris Dan Direksi
- 640 Kebijakan dan Prosedur Anti Korupsi
- 649 Rencana Strategis Bank 2017
- 650 Kebijakan Bank Lainnya
- 662 Manajemen Risiko

.293

**TATA KELOLA PERUSAHAAN**

- 295 Komitmen Tata Kelola
- 296 Penghargaan GCG
- 297 Penerapan Tata Kelola 2017
- 298 Prinsip-Prinsip GCG
- 300 Tujuan Penerapan GCG
- 300 Roadmap GCG
- 304 Kebijakan Tata Kelola
- 305 Struktur, Mekanisme dan Hubungan Tata Kelola
- 316 Evaluasi Dan Penilaian GCG 2017
- 316 Evaluasi Dan Penilaian GCG Dari Pihak Internal, Regulator dan Pihak Eksternal
- 317 Penerapan Pedoman GCG
- 330 Self Assessment Tata Kelola Terintegrasi
- 331 Penilaian Penerapan GCG Oleh Pihak Independen
- 332 Corporate Governance Performance Index (CGPI)
- 333 Rencana Peningkatan GCG Tahun 2018
- 334 Rapat Umum Pemegang Saham
- 359 Dewan Komisaris
- 412 Komisaris Independen
- 414 Direksi

- 437 Dewan Pengawas Syariah
- 440 Penilaian Penerapan GCG 2017 Terhadap Dewan Komisaris dan Direksi
- 448 Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi
- 450 Pengungkapan Kebijakan Tata Kelola Remunerasi
- 462 Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan Dewan, & Rapat Direksi
- 486 Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali
- 486 Pengungkapan Hubungan Afiliasi



## .727

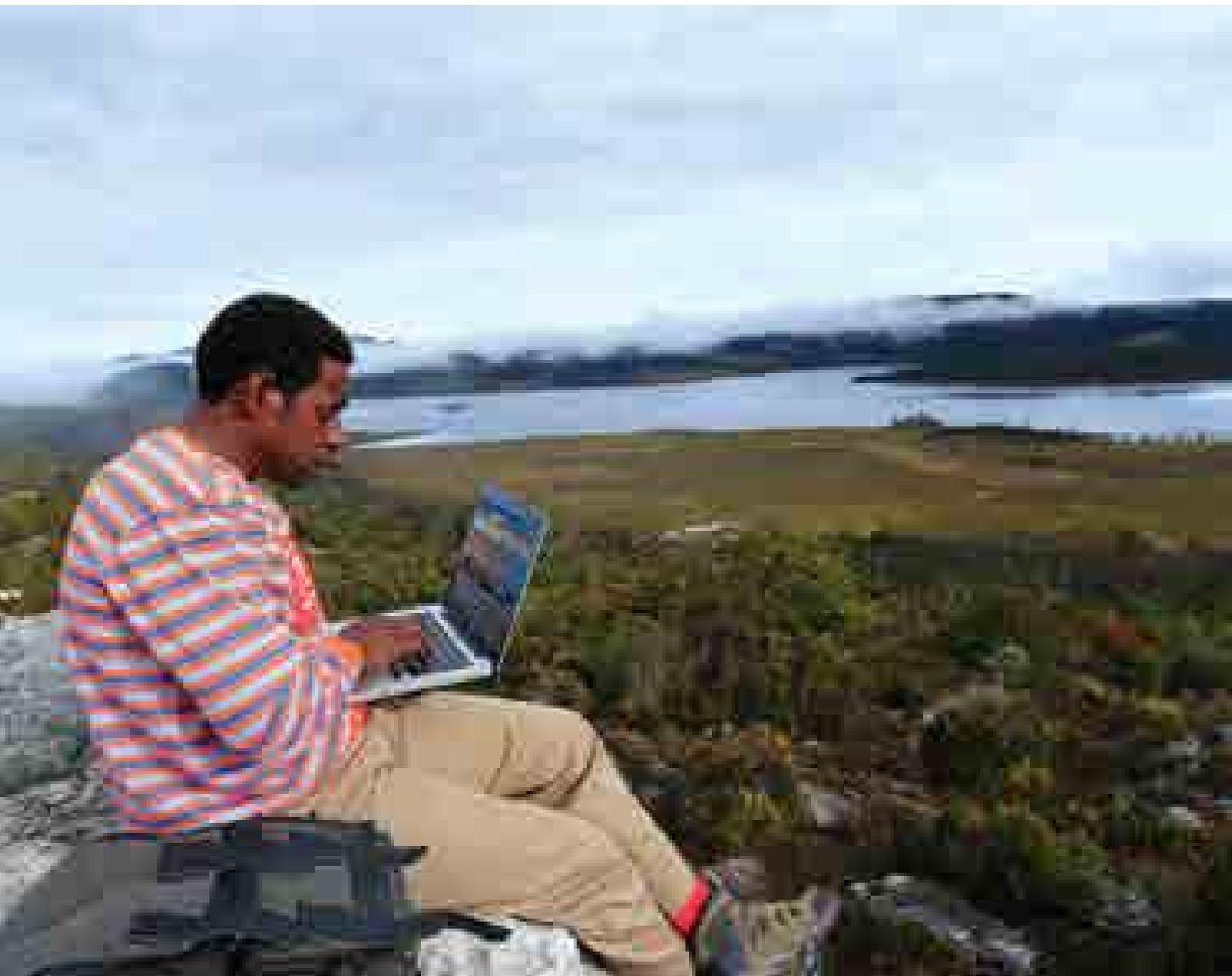
### TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

- 729 Kebijakan dan Acuan Pelaksanaan CSR
- 730 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan
- 734 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja
- 741 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial dan Masyarakat
  - 742 Kenaikan Realisasi Penyaluran Program BRI Peduli Periode 2015-2017
  - 743 Rincian Realisasi Anggaran Program BRI Peduli Periode 2015-2017
  - 743 Alokasi Realisasi Anggaran Program BRI Peduli 2017
  - 744 Indonesia Peduli
  - 745 Indonesia Cerdas
  - 748 Indonesia Sehat
  - 749 Indonesia Membangun
  - 751 Indonesia Takwa
  - 752 Indonesia Lestari
  - 753 Indonesia Sejahtera
  - 754 Total Anggaran BRI Peduli
  - 754 Program Kemitraan
- 757 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen



## .765

### LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 2017



“

Melalui BRIsat, BRI membentuk *financial ecosystem* yang menyatukan seluruh penjuru negeri melalui unit kerja Bank BRI yang tersebar dan terbesar dengan jumlah per akhir tahun 2017 mencapai 10.646 unit kerja konvensional dan 329.654 jaringan e-channel sehingga mampu meningkatkan inklusi dan literasi keuangan, “*reach the unreachable*”.”

# Bank BRI Terdepan Dalam Era Digitalisasi Perbankan

Memasuki era digitalisasi perbankan, Bank BRI terus berinovasi dalam produk dan layanannya. Setelah meluncurkan satelit sendiri yang dinamakan BRIsat, kini BRI semakin mudah untuk menyediakan layanan perbankan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang berada di *remote areas* seperti daerah pegunungan, pesisir maupun pulau-pulau terluar.

Bank BRI juga memanfaatkan BRIsat sebagai *backbone* jaringan untuk membentuk *financial ecosystem* yang menyatukan seluruh penjuru negeri melalui unit-unit kerja Bank BRI yang terus bertumbuh dan tersebar dengan jumlah per akhir tahun 2017 mencapai 10.646-unit kerja konvensional dan 329.654 *jaringan e-channel*. Melalui BRIsat, BRI mampu meningkatkan inklusi dan literasi keuangan, "*reach the unreachable*".

BRI telah memiliki *digital strategy* yang berfokus pada *customer centric*. BRI mengembangkan kapabilitas *Big Data* dan *Analytic* sehingga mampu menawarkan produk dan layanan kepada nasabah sesuai dengan karakteristik profilnya. Di samping itu, BRI juga tengah mempersiapkan dan mengupgrade infrastruktur pendukung *digital banking*. Strategi lain, yakni BRI menjajaki peluang untuk berkolaborasi dengan *fintech* serta yang tak kalah penting meningkatkan kapabilitas SDM untuk menyongsong era *digital banking*. Strategi tersebut diyakini mampu mengakselerasi transformasi digital yang tengah dilakukan oleh BRI.

## Perkembangan Unit Kerja

Outlets	2013	2014	2015	2016	2017
Kantor Pusat	1	1	1	1	1
Kantor Wilayah	18	19	19	19	19
Kantor Cabang Khusus	1	1	1	1	1
Kantor Cabang	452	460	466	466	467
Kantor Cabang Pembantu	565	584	603	609	610
BRI Unit	5.144	5.293	5.360	5.380	5.382
Kantor Kas	950	971	983	984	992
Teras BRI	2.206	2.457	2.543	2.545	2.536
Teras BRI Keliling	465	610	636	638	638
<b>Jumlah Unit Kerja Operasional</b>	<b>9.802</b>	<b>10.396</b>	<b>10.612</b>	<b>10.643</b>	<b>10.646</b>

## Perkembangan E-Channel

E-Channel	2013	2014	2015	2016	2017
ATM	18.292	20.792	22.792	24.292	24.684
EDC	85.936	131.204	187.758	257.712	302.921
CRM	192	392	892	1.392	1.992
E-Buzz	50	55	57	57	57
<b>Total</b>	<b>104.470</b>	<b>152.443</b>	<b>211.499</b>	<b>283.453</b>	<b>329.654</b>

“ Dengan kualitas transmisi data yang mumpuni, Bank BRI bertekad menjadikan BRIsat sebagai *enabler* dalam mengoptimalkan kinerja seluruh jaringan unit kerja dan *e-channel* BRI. ”

# Menghadirkan Solusi Perbankan Untuk Seluruh Nasabah.

Bank BRI sebagai salah satu bank terbesar milik pemerintah menyediakan solusi perbankan melalui produk dan layanan terintegrasi yang didukung teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan seluruh segmentasi nasabah.

Dengan *customer base* lebih dari 50 juta nasabah, BRI memiliki produk simpanan dan pembiayaan yang menyeluruh, dari level mikro sampai korporasi dengan didukung fasilitas dan fitur-fitur modern. Selain itu, jaringan BRI menjangkau seluruh pelosok negeri, dari pedesaan sampai perkotaan, dari pesisir pantai hingga pegunungan.

Dari sisi layanan, BRI melayani nasabah individual maupun institusional di pasar domestik hingga internasional. Produk dan layanan BRI yang terintegrasi sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan literasi keuangan dan pemerataan pembangunan.

## Komitmen Memperluas Inklusi dan Literasi Keuangan

BRI berkomitmen memperluas akses keuangan yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat di seluruh penjuru negeri, baik melalui jaringan konvensional maupun jaringan non konvensional. BRI merupakan bank pertama yang memperkenalkan teknologi perbankan di pedesaan.

Jangkauan unit kerja BRI hingga pelosok negeri dan menyediakan jaringan di *remote area*, BRI menjangkau yang tak terjangkau dan melayani yang tak terlayani. BRI menjadi pionir sebagai penjaga kedaulatan Rupiah di perbatasan dengan melayani masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan memberikan akses keuangan kepada nelayan di kawasan pesisir.





“

BRI menjadi pionir sebagai penjaga kedaulatan Rupiah di perbatasan dengan melayani masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan memberikan akses keuangan kepada nelayan di kawasan pesisir ”



“

Sebanyak 279.750 agen BRILink membantu masyarakat di seluruh pelosok negeri melakukan transaksi perbankan sebagaimana mereka bertransaksi di kantor cabang. ”

### Mendorong Transformasi UMKM

Sebagai bank dengan *core business* UMKM, BRI turut mendorong transformasi UMKM di era digital. Ini sesuai dengan visi Presiden RI Joko Widodo, yang menargetkan Indonesia menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020.

Di tahun 2017, BRI meluncurkan *marketplace* digital yang diberi nama Indonesia Mall. Indonesia Mall merupakan website yang digagas BRI agar mendorong pelaku UMKM menjadi *technopreneurs*, atau dengan kata lain *go digital*. Melalui terobosan ini, BRI ingin memfasilitasi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya sehingga semakin meningkatkan *exposure* produk UMKM lokal.

BRI juga memfasilitasi kemunculan *start up* dengan menggelar *Coworking Festival 2017* untuk mendukung perkembangan ekonomi kreatif.

### Inklusi Keuangan Ke Seluruh Pelosok Negeri

Melalui Agen BRILink, kini masyarakat di daerah *remote* sudah dapat menikmati layanan perbankan tanpa kehadiran cabang konvensional. Sebanyak 279.750 agen BRILink membantu masyarakat di seluruh pelosok negeri melakukan transaksi perbankan sebagaimana mereka bertransaksi di kantor cabang.

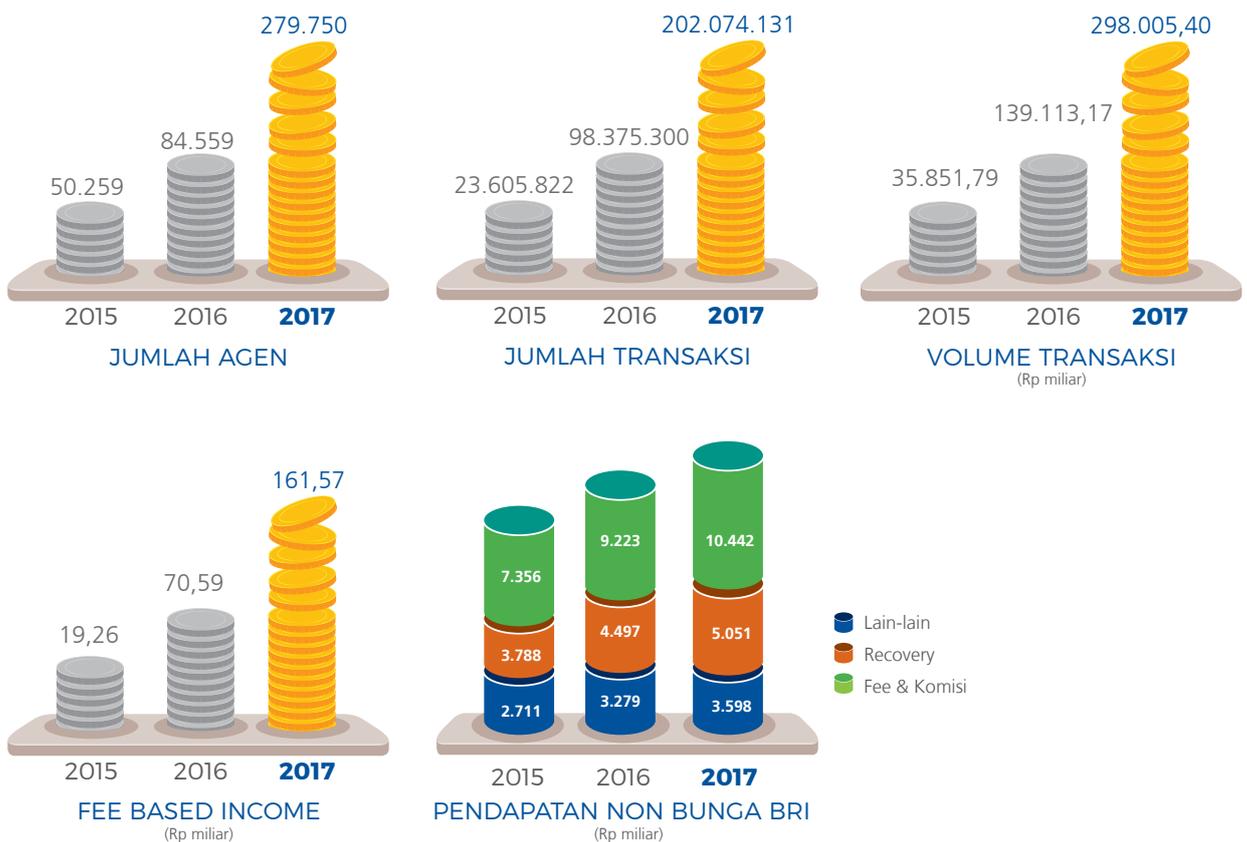
Keberadaan agen BRILink ini turut memberi andil untuk mencapai indeks inklusi keuangan di tahun 2019.

# Transformasi UMKM dan Inklusi Keuangan Ke Pelosok Negeri

Bank BRI terus mendorong pemberdayaan dan peningkatan derajat pengusaha UMKM di Indonesia. Salah satu caranya dengan merintis penyediaan fasilitas Kartu *Co Branding* kepada para pedagang di pasar agar gencar bertransaksi non tunai. Melalui pemanfaatan kartu *co-branding* BRI, diharapkan mereka terbiasa mendapatkan

layanan jasa perbankan yang cepat, nyaman, modern, dan pada akhirnya tergabung kedalam *cash-less society*, yang mampu mengoptimalkan teknologi *online* dalam mendukung pengembangan usaha.

## Perkembangan Jumlah Agen BRILink, Jumlah Transaksi, Volume Transaksi, Fee Based Income BRILink dan Pendapatan Non Bunga BRI

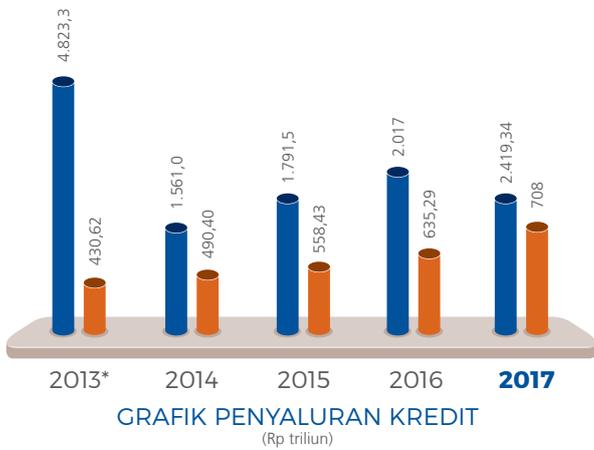


# Menjaga Pertumbuhan Berkelanjutan Melalui Praktik Terbaik GCG

BRI fokus untuk meningkatkan kualitas pengelolaan seluruh portofolio kreditnya melalui perbaikan sistem dan prosedur operasional, peningkatan keandalan infrastruktur teknologi informasi peningkatan kompetensi dan integritas Sumber Daya Manusia berdasarkan praktik terbaik GCG.

Komitmen tersebut membuat BRI mampu mengatasi tantangan dan dinamika kondisi usaha berkat diperolehnya kepercayaan nasabah, baik debitur maupun kreditur yang membuat aset BRI terus bertambah dengan kualitas kredit lebih terjaga dan dengan profitabilitas aset yang tetap baik dibandingkan rerata perbankan umum nasional dikelasnya.

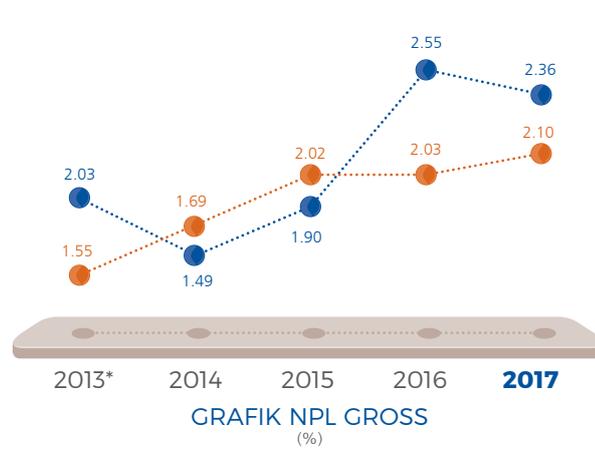
## Kredit BRI VS Rerata Bank Umum Nasional Buku 4



- Perbankan Umum BUKU 4
- Kredit BRI (bank saja)

\*) Pada tahun 2013 menggunakan data perbankan umum, belum tersedia data per kategori buku.

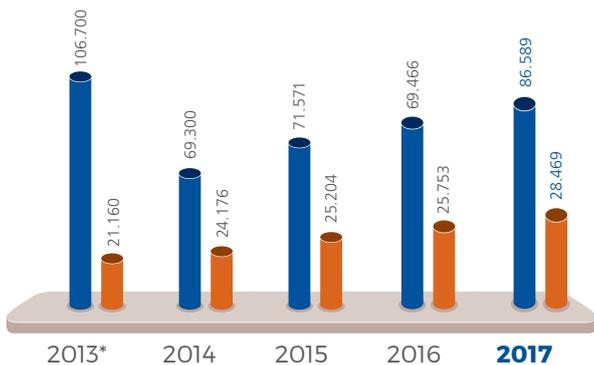
## NPL BRI VS Rerata Bank Umum Nasional Buku 4



- Perbankan Umum BUKU 4
- BRI (bank saja)

\*) Pada tahun 2013 menggunakan data perbankan umum, belum tersedia data per kategori buku.

## Laba Bersih BRI VS Rerata Bank Umum Nasional Buku 4



GRAFIK LABA BERSIH (Rp Miliar)

- Perbankan Umum BUKU 4
- Laba Bersih BRI (bank saja)

\*) Pada tahun 2013 menggunakan data perbankan umum, belum tersedia data per kategori buku.



“

BRI fokus untuk meningkatkan kualitas pengelolaan seluruh portofolio kreditnya melalui perbaikan sistem dan prosedur operasional, peningkatan keandalan infrastruktur teknologi informasi peningkatan kompetensi dan integritas Sumber Daya Manusia berdasarkan praktik terbaik GCG. ”



“

Di tahun 2022, Bank BRI memiliki aspirasi untuk menjadi “The Most Valuable Bank in South East Asia dan Home To The Best Talent”.

”

# Transformasi Untuk Menjadi “The Most Valuable Bank In South East Asia”

- **Bank BRI akan tetap fokus pada bisnis UMKM dengan target portofolio 80%** dari total penyaluran kredit BRI di tahun 2022.
- **Bank BRI menciptakan *integrated financial solution***, melalui peran sertanya dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat diikuti **penguatan dan pemberdayaan Perusahaan Anak**.
- Bank BRI meningkatkan peran Perusahaan Anak untuk **mendiversifikasi pendapatan, sekaligus tempat untuk menempa talent terbaik perseroan**.



Bank BRI terus mendorong pemberdayaan dan peningkatan kelas pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.



---

# IKHTISAR KINERJA UTAMA

- 20 Kinerja Segmen Bisnis 2017
  - 22 Ringkasan Kinerja Keuangan 2017
  - 24 Ikhtisar Keuangan
  - 26 Ikhtisar Saham
  - 28 Ikhtisar Obligasi
  - 30 Pembayaran Dividen
  - 31 Aksi Korporasi
  - 32 Peristiwa Penting
-

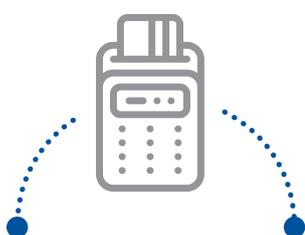


## Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisa &amp; Pembahasan Manajemen

KINERJA SEGMENT  
BISNIS 2017Segmen Bisnis  
Mikro dan Program

- **Bisnis Mikro dan Program** mencatatkan penyaluran kredit sebesar **Rp252,9 triliun** **tumbuh 14%** dibanding tahun 2016 (YoY) sebesar Rp221,8 triliun.

- **Volume transaksi BRILink** mencapai sebesar **Rp298 triliun** **tumbuh 114,2%** dari tahun 2016 (YoY) sebesar Rp139,1 triliun.

- BRILink sebanyak **279.750 agen**, **naik 230,9%** dari tahun 2016 (YoY) sebanyak 84.550 agen. Jumlah transaksi sebanyak **202,1 juta transaksi** **tumbuh 105,4%** dari tahun 2016 (YoY) sebanyak 98,4 juta transaksi.

## KINERJA SEGMENT BISNIS 2017



## Segmen Bisnis Ritel dan Menengah

- **Kredit Usaha Ritel** sebesar Rp129,2 triliun  
tumbuh 11,9% dari tahun 2016 (YoY) sebesar Rp115,4 triliun.

- **Kredit Usaha Menengah** sebesar Rp23,9 triliun  
tumbuh 13,4% dari tahun 2016 (YoY) sebesar Rp21,1 triliun.

- **Kredit Konsumer** sebesar Rp114,6 triliun  
tumbuh 14,4% dari tahun 2016 (YoY) sebesar Rp100,2 triliun.



## Segmen Korporasi

- **Kredit Korporasi** sebesar Rp187,4 triliun  
tumbuh 6,02% dari tahun 2016 (YoY) sebesar Rp176,8 triliun.

- Dari jumlah kredit tersebut, **kredit BUMN** sebesar Rp97,1 triliun  
tumbuh 4,64% YoY dari tahun 2016 (YoY) sebesar Rp92,82 triliun.

- **Kredit Non BUMN** sebesar Rp90,3 triliun  
tumbuh 7,41% dari tahun 2016 (YoY) sebesar Rp84,09 triliun.



## Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen  
 Profil Perusahaan  
 Analisa & Pembahasan Manajemen

## RINGKASAN KINERJA KEUANGAN 2017

Penyaluran kredit sebesar   
**Rp739,3** triliun

Penyaluran kredit sebesar Rp739,3 triliun, **tumbuh 11,4%** dari tahun 2016 (YoY) sebesar Rp663,42 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp841,66 triliun, **tumbuh 11,5%** dari tahun 2016 (YoY) sebesar Rp754,5 triliun. Total Aset sebesar Rp1.126,3 triliun, **tumbuh 12,2%** dari tahun 2016 (YoY) sebesar Rp1.003,6 triliun

Laba bersih sebesar   
**Rp29,04** triliun

Laba bersih sebesar Rp29,04 triliun, **tumbuh 10,7%** dari tahun 2016 (YoY) sebesar Rp26,2 triliun.

Perusahaan Anak berkontribusi sebesar   
**1,98%**

Perusahaan Anak berkontribusi sebesar 1,98% terhadap laba.

## RINGKASAN KINERJA KEUANGAN 2017

## RASIO-RASIO KEUANGAN

(Bank saja)

Loan to Deposit Ratio  
(LDR) sebesar 

88,13%

Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 88,13%, meningkat dari periode sama tahun 2016 sebesar 87,7%.

Non Performing Loan  
(NPL) gross sebesar 

2,1%

Non Performing Loan (NPL) gross sebesar 2,1%

Net Interest Margin  
(NIM) sebesar 

7,93%

Net Interest Margin (NIM) sebesar 7,93%, turun dari periode sama tahun 2016 sebesar 8%.

Cost Efficiency Ratio  
(CER) sebesar 

41,15%

Cost Efficiency Ratio (CER) sebesar 41,15%, turun dari periode sama tahun 2016 sebesar 41,26%.

Capital Adequacy Ratio  
(CAR) sebesar 

22,96%

Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 22,96%, lebih tinggi dibanding tahun 2016 sebesar 22,91%.



## Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen  
 Profil Perusahaan  
 Analisa & Pembahasan Manajemen

## IKHTISAR KEUANGAN

(Rp miliar)

	2013 <sup>1)</sup>	2014 <sup>1)</sup>	2015	2016 <sup>2)</sup>	2017
<b>NERACA</b>					
<b>Total Aset</b>	<b>626.101</b>	<b>801.984</b>	<b>878.426</b>	<b>1.003.644</b>	<b>1.126.248</b>
Total Aset Produktif	568.546	728.094	781.931	991.719	1.128.476
Kredit – Gross	448.345	510.697	581.095	663.420	739.337
Obligasi Rekap Pemerintah	4.511	4.304	3.816	3.318	3.318
Penyertaan Saham Neto	223	252	269	2	73.8
<b>Total Liabilitas</b>	<b>546.526</b>	<b>704.278</b>	<b>765.299</b>	<b>856.832</b>	<b>958.901</b>
Dana Pihak Ketiga	504.281	622.322	668.995	754.526	841.656
- Giro	79.337	90.052	114.367	142.547	147.436
- Tabungan	212.997	236.395	272.471	303.270	349.441
- Deposito	211.948	295.875	282.157	308.709	344.780
Liabilitas berbeban bunga lainnya	20.896	57.435	68.601	70.349	78.739
<b>Modal/Ekuitas</b>	<b>79.574</b>	<b>97.706</b>	<b>113.127</b>	<b>146.813</b>	<b>167.347</b>
Laba/Rugi					
<b>Pendapatan Bunga</b>					
- Dengan Bunga Obligasi Rekap Pemerintah	59.461	75.122	85.434	93.995	102.899
- Tanpa Bunga Obligasi Rekap Pemerintah	59.298	74.876	85.092	93.794	102.821
<b>Pendapatan Bunga Bersih</b>					
- Dengan Bunga Obligasi Rekap Pemerintah	44.106	51.442	58.280	65.418	73.005
- Tanpa Bunga Obligasi Rekap Pemerintah	43.943	51.197	57.937	65.217	72.928
Pendapatan Operasional Lainnya	8.348	9.299	13.855	16.999	19.091
Biaya Operasional Lainnya	(22.381)	(26.715)	(31.276)	(34.941)	(38.442)
CKPN	(3.946)	(5.719)	(8.900)	(13.791)	(17.234)
Laba Sebelum Pajak	27.910	30.804	32.494	33.974	37.022
Laba Bersih Tahun Berjalan	21.354	24.227	25.411	26.228	29.044
Laba yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	21.344	24.215	25.398	26.196	28.997
Laba yang dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali	10.20	11.69	13.05	32.22	47.8
Laba Rugi Komprehensif	19.917	24.482	24.872	41.380	30.877
Laba Komprehensif yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	19.913	24.467	24.861	41.340	30.806
Laba yang dapat Diatribusikan kepada Kepentingan non Pengendali	3,46	14,67	11,05	39,63	71,2
Laba Bersih per Saham (Rp)	865,22	981,59	1.030,43	1.071,51	237
<b>RASIO KEUANGAN (BANK SAJA)</b>					
<b>Permodalan</b>					
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	16,99%	18,31%	20,59%	22,91%	22,96%
<b>Aktiva Produktif</b>					
Aset Produktif dan Non Produktif Bermasalah terhadap total aset produktif dan aset nonproduktif	1,06%	1,09%	1,33%	1,46%	1,38%
Aset Produktif Bermasalah	1,28%	1,26%	1,57%	1,61%	1,59%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	2,90%	2,40%	2,37%	2,75%	3,11%
Kredit Bermasalah (NPL Gross)	1,55%	1,69%	2,02%	2,03%	2,10%
<b>Profitabilitas</b>					
R O A	5,03%	4,73%	4,19%	3,84%	3,69%
R O E	34,11%	31,19%	29,89%	23,08%	20,03%
N I M	8,55%	8,51%	8,13%	8,00%	7,93%
B O P O (Operating Expenses to Operating Income)	60,58%	65,42%	67,96%	68,69%	69,14%
<b>Likuiditas</b>					
L D R	88,54%	81,68%	86,88%	87,77%	88,13%
<b>Kepatuhan</b>					
<b>Persentase Pelanggaran BMPK</b>					
- Pihak Terkait	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
- Pihak Tidak Terkait	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

## IKHTISAR KEUANGAN

(Rp miliar)

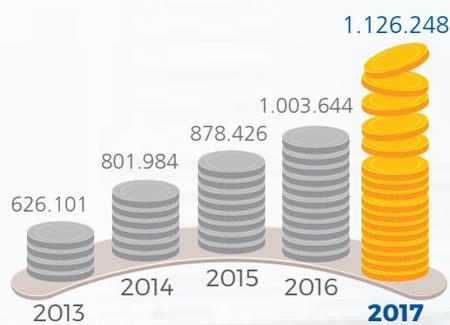
	2013 <sup>*)</sup>	2014 <sup>*)</sup>	2015	2016 <sup>**)</sup>	2017
<b>Persentase Pelampauan BMPK</b>					
- Pihak Terkait	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
- Pihak Tidak Terkait	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Giro Wajib Minimum	8,02%	8,07%	9,31%	6,94%	6,52%
<b>POSISI DEVISA NETO</b>	<b>3,15%</b>	<b>3,86%</b>	<b>2,33%</b>	<b>6,67%</b>	<b>4,22%</b>

Angka kinerja keuangan tersebut di atas merupakan laporan keuangan konsolidasi BRI dengan entitas anak untuk tahun 2013, dan 2014: PT BRISyariah, PT Bank Agroniaga Tbk, BRIngin Remittance Co. Ltd; untuk tahun 2015: PT BRISyariah, PT Bank Agroniaga Tbk, BRI Remittance Company Ltd dan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera; untuk tahun 2016: PT BRISyariah, PT Bank Agroniaga Tbk, BRI Remittance Co. Ltd, PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT BRI Multifinance Indonesia; dan untuk tahun 2017: PT BRISyariah, PT Bank Agroniaga Tbk, BRI Remittance Co. Ltd, PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT BRI Multifinance Indonesia.

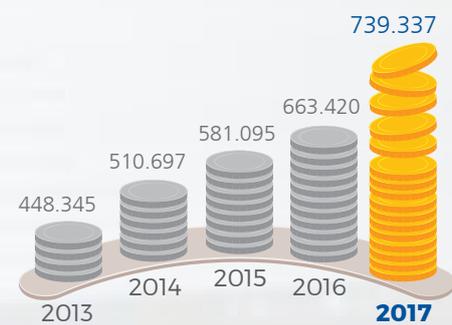
Rasio Keuangan menggunakan data bank saja.

\*) Terdapat Restatement pada Laporan Keuangan Publikasi setelah penyajian kembali karena penerapan PSAK No. 24: Imbalan Kerja

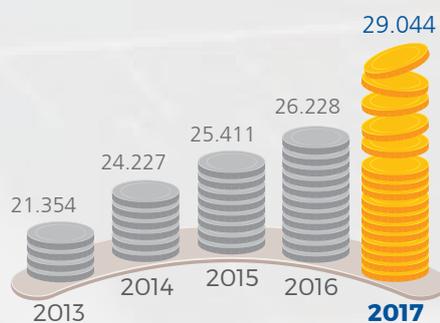
\*\*) Pada tahun 2016 peningkatan aset dan modal dikarenakan adanya revaluasi aset tetap sebesar Rp14,3 triliun



**TOTAL ASET**  
(Rp miliar)



**KREDIT - GROSS**  
(Rp miliar)



**LABA BERSIH TAHUN BERJALAN**  
(Rp miliar)

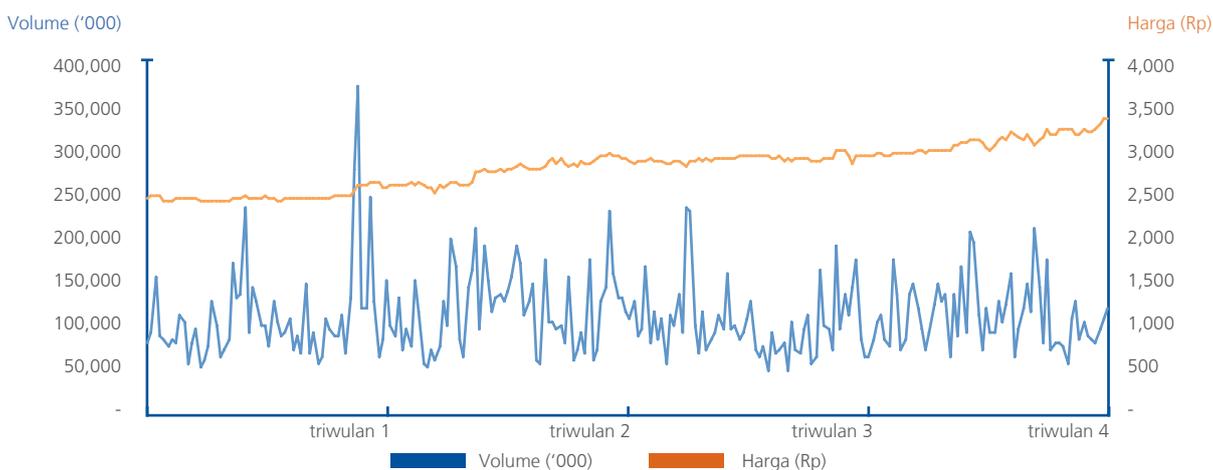


## Ikhtisar Kinerja Utama

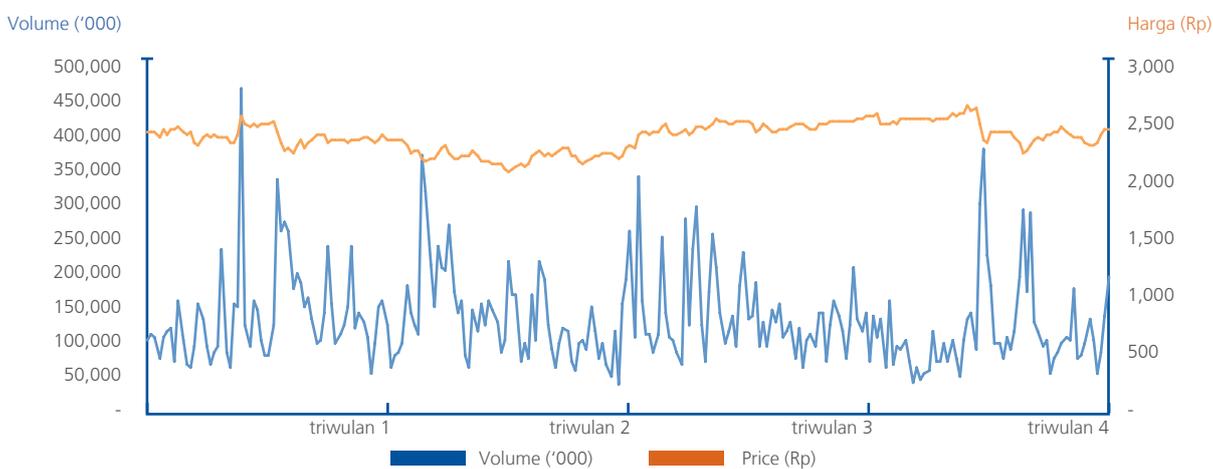
Laporan Manajemen  
 Profil Perusahaan  
 Analisa & Pembahasan Manajemen

# IKHTISAR SAHAM

## Pergerakan Harga Saham, Volume dan Kapitalisasi Pasar Tahun 2017



## Pergerakan Harga Saham, Volume dan Kapitalisasi Pasar Tahun 2016



## Kinerja Saham per 31 Desember 2017 & 2016

Tahun	Harga Lembar/Saham				Jumlah Lembar Saham	Volume Transaksi (Lembar)	Kapitalisasi Pasar (Rp Triliun)
	Pembukaan	Tertinggi	Terendah	Penutupan			
<b>2016</b>	<b>2.280</b>	<b>2.575</b>	<b>1.905</b>	<b>2.335</b>	-	<b>32.143.440.000</b>	-
Triwulan ke-1	2.280	2.460	2.090	2.285	123.345.810.000	8.417.654.500	281,85
Triwulan ke-2	2.260	2.230	1.905	2.160	123.345.810.000	8.472.383.500	266,43
Triwulan ke-3	2.180	2.445	2.150	2.440	123.345.810.000	8.073.172.000	300,96
Triwulan ke-4	2.440	2.575	2.095	2.335	123.345.810.000	7.180.230.000	288,01
<b>2017</b>	<b>2.350</b>	<b>3.640</b>	<b>2.340</b>	<b>3.640</b>	-	<b>23.211.823.300</b>	-
Triwulan ke-1	2.350	2.640	2.340	2.595	123.345.810.000	5.965.294.500	320,08
Triwulan ke-2	2.595	3.060	2.485	3.050	123.345.810.000	5.359.020.000	376,20
Triwulan ke-3	3.000	3.135	2.900	3.055	123.345.810.000	5.878.135.000	376,82
Triwulan ke-4	3.055	3.640	3.050	3.640	123.345.810.000	6.009.373.800	448,98

\*Sudah Harga Stock Split

## IKHTISAR SAHAM

## Indikator Kinerja Saham BRI

Indikator	BRI	
	2016	2017
Harga Penutupan (Rp)	2.335	3.640
Harga Terendah (Rp)	1.905	2.340
Harga Tertinggi (Rp)	2.575	3.640
Rata-rata volume perdagangan harian	130.664.390	97.528.669
PE (x)	10,90	15,3
PBV (x)	1,95	2,7
Kapitalisasi Pasar (Rp triliun)	288,01	448,98

## Kondisi Pasar Modal Dan Kinerja Saham BRI Tahun 2017

Kondisi pasar modal di Indonesia pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 20%, atau mencapai level 6.356 dari posisi tahun sebelumnya yang berada di level 5.297. Kenaikan ini terutama didorong oleh sektor Jasa Keuangan (JAKFIN).

Membbaiknya kondisi pasar modal pada tahun 2017 sejalan dengan kondisi perekonomian di Indonesia yang lebih baik, ditandai dengan tingkat pertumbuhan GDP yang mencapai 5,07%, tingkat inflasi yang rendah dan tingginya pengeluaran pemerintah untuk membangun infrastruktur.

Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian, pada tahun 2017 BRI juga mencatat kinerja yang lebih baik. Pertumbuhan kredit sebesar 11,4% *year on year*, di atas industri perbankan yang sebesar 9,77% *year on year*, sementara pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebesar 11% *year on year*, lebih baik dari rata-rata industri sebesar 9,35% *year on year*. BRI juga berhasil menjaga kualitas kredit dimana NPL terjaga pada level 2,10% (Bank saja) dibawah rata-rata industri yang sebesar 2,36%.

Kinerja tersebut mampu mendorong kenaikan harga saham BRI pada akhir tahun 2017 sebesar 56% dari Rp2.335 pada tahun 2016 menjadi Rp3.640. Harga saham BRI tertinggi sepanjang tahun 2017 yaitu sebesar Rp3.640 pada tanggal 29 Desember 2017 dan yang terendah sebesar Rp2.340 pada 25 Januari 2017. BRI juga menjadi salah satu perusahaan publik yang paling likuid dimana rata-rata volume perdagangan saham BRI adalah sebesar 97.53 juta/hari.



## Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen  
 Profil Perusahaan  
 Analisa & Pembahasan Manajemen

## IKHTISAR OBLIGASI

## Surat Berharga yang Diterbitkan dan Telah Jatuh Tempo

No	Surat Berharga	Mata Uang	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Jangka Waktu (Bulan)	Coupon/Discount Rate	Peringkat	Lembaga Pemeringkat	Tujuan Utama Penerbitan
1	Subordinate Notes due 2013	USD	25 Sept'03	30 Okt'13	150.000.000	120	7.75	B3	Moody's	Memperkuat permodalan
2	Obligasi Subordinasi I Bank BRI Tahun 2004	IDR	9 Jan'04	9 Jan'14	500.000.000.000	120	13.50	AA+	Pefindo	Memperkuat permodalan
3	Obligasi Subordinasi II Bank BRI Tahun 2009	IDR	22 Des'09	22 Des'14	2.000.000.000.000	60	10.95	AA+	Pefindo	Memperkuat permodalan
4	MTN BRI Tahap I Tahun 2014 Seri A	IDR	10 Okt'14	15 Okt'15	300.000.000.000	370 hari	8.75	F1+	Fitch Indonesia	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
5	MTN BRI Tahap I Tahun 2014 Seri B	IDR	10 Okt'14	10 Okt'16	60.000.000.000	24	9.25	AAA	Fitch Indonesia	
6	MTN BRI Tahap I Tahun 2014 Seri C	IDR	10 Okt'14	10 Okt'17	360.000.000.000	36	9.50	AAA	Fitch Indonesia	
7	MTN BRI Tahap II Tahun 2014	IDR	24 Des'14	24 Des'15	520.000.000.000	370 hari	8.90	F1+	Fitch Indonesia	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>Prudential Banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
8	NCD BRI Tahun 2014 Seri A	IDR	2 Des'14	2 Mar'15	165.000.000.000	3	8.00	Tidak ada Rating NCD	-	Ekspansi bisnis melalui Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
9	NCD BRI Tahun 2014 Seri B	IDR	2 Des'14	2 Jun'15	790.000.000.000	6	8.60	Tidak ada Rating NCD	-	
10	NCD II Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri A	IDR	22 Apr'15	22 Jul'15	595.000.000.000	3	7.10	Tidak ada Rating NCD	-	
11	NCD II Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri B	IDR	22 Apr'15	22 Okt'15	1.020.000.000.000	6	8.00	Tidak ada Rating NCD	-	
12	NCD II Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri C	IDR	22 Apr'15	22 Jan'16	265.000.000.000	9	8.10	Tidak ada Rating NCD	-	
13	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri A	IDR	2 Jul'15	7 Jul'16	650.000.000.000	370 hari	8.40	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
14	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri A	IDR	5 Feb'16	8 Feb'17	808.000.000.000	370 hari	8.50	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
15	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri A	IDR	25 Mei'16	30 Mei'17	1.212.000.000.000	370 hari	7.50	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
16	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri A	IDR	1 Des'16	6 Des'17	616.000.000.000	370 hari	7.25	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
17	MTN Bank BRI Tahap I Tahun 2016	IDR	16 Sept'16	21 Sept'17	1.925.000.000.000	370 hari	7.40	AAA	Pefindo	Mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .

## IKHTISAR OBLIGASI

## Surat Berharga yang Diterbitkan dan Belum Jatuh Tempo

No	Surat Berharga	Mata Uang	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Jangka Waktu (Bulan)	Coupon/ Discount Rate	Peringkat	Lembaga Pemeringkat	Tujuan Utama Penerbitan
1	Senior Notes due 2018	USD	28 Mar'13	28 Mar'18	500.000.000	60	2.95	Baa3	Moody's	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
2	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri B	IDR	2 Jul'15	3 Jul'18	925.000.000.000	36	9.20	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
3	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri C	IDR	2 Jul'15	3 Jul'20	1.420.000.000.000	60	9.50	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
4	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri B	IDR	5 Feb'16	4 Feb'19	1.018.500.000.000	36	9.25	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
5	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri C	IDR	5 Feb'16	4 Feb'21	2.823.500.000.000	60	9.60	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
6	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri B	IDR	25 Mei'16	25 Mei'19	2.437.000.000.000	36	8.20	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
7	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri C	IDR	25 Mei'16	25 Mei'21	701.000.000.000	60	8.70	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
8	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri B	IDR	1 Des'16	1 Des'19	964.000.000.000	36	8.00	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
9	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri C	IDR	1 Des'16	1 Des'21	193.000.000.000	60	8.20	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
10	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri D	IDR	1 Dec'16	1 Des'23	477.000.000.000	84	8.65	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
11	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri E	IDR	1 Dec'16	1 Des'26	2.350.000.000.000	120	8.90	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
12	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri A	IDR	11 Apr'17	16 Apr'18	1.131.000.000.000	370 hari	7.20	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
13	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri B	IDR	11 Apr'17	11 Apr'20	1.743.500.000.000	36	8.10	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
14	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri C	IDR	11 Apr'17	11 Apr'22	925.000.000.000	60	8.30	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
15	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri D	IDR	11 Apr'17	11 Apr'27	1.300.500.000.000	120	8.80	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
16	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri A	IDR	24 Agu'17	24 Aug'20	980.500.000.000	36	7.60	AAA	Pefindo	Mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
17	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri B	IDR	24 Agu'17	24 Aug'22	1.652.500.000.000	60	8.00	AAA	Pefindo	Mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .
18	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri C	IDR	24 Agu'17	24 Aug'24	2.517.000.000.000	84	8.25	AAA	Pefindo	Mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> dan <i>good corporate governance</i> .



## Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen  
 Profil Perusahaan  
 Analisa & Pembahasan Manajemen

## PEMBAYARAN DIVIDEN

Penentuan besaran dividen diputuskan dalam RUPST sebagai organ tertinggi perusahaan. Dalam RUPST 2017 untuk tahun buku 2016, telah diputuskan pembayaran dividen sebesar Rp10.478 miliar atau rasio *Dividend Pay Out/DPO* sebesar 40%.

Dalam proses penentuan DPO tersebut, manajemen berhak untuk mengajukan besaran dividen dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta memperhatikan pemenuhan rasio kecukupan modal (CAR). Dengan implementasi Basel III yang dimulai pada Januari 2015 secara bertahap sampai dengan implementasi penuh pada Januari 2019, BRI ingin menjaga tingkat CAR diatas 17,5% sesuai dengan tingkat kebutuhan CAR sesuai ketentuan Basel III.

BRI juga mempertimbangkan faktor *sustainable* ROE dalam tiga tahun kedepan dalam menentukan usulan besaran rasio DPO. Dengan modal yang cukup kuat, BRI bisa memiliki ruang untuk tumbuh secara anorganik baik dengan memberikan suntikan modal ke perusahaan anak maupun akuisisi perusahaan yang akan memberikan nilai lebih bagi BRI.

Tanggal RUPS	Tanggal Pembayaran	Tahun	Dividend Payout Ratio	Dividen (Rp Miliar)	Dividen per Saham
2004*	23 Juli 2004	2003	75,01	990	84,19
2005	5 Juli 2005	2004	50	1.816	152,88
2006	10 Juli 2006	2005	50	1.904	156,18
2007	2 Juli 2007	2006	50	2.129	173,04
2008	7 Juli 2008	2007	50	2.419	196,34
2009	3 Juli 2009	2008	35	2.085	168,82
2010	15 Juli 2010	2009	30	2.192	132,08
2011	15 Juni 2011	2010	20	2.294	70,04
2012	15 Mei 2012	2011	20	3.017	122,28
2013	15 April 2013	2012	30	5.556	225,23
2014	4 Mei 2014	2013	30	6.348	257,22
2015	22 April 2015	2014	30	7.272	294,80
2016**	22 April 2016	2015	40	7.619	311,66
2017	13 April 2017	2016	40	10.478	428,61

\* Dividend Pay Out dihitung berdasarkan Laba Bersih semester 2 tahun 2003

\*\* Tidak memperhitungkan saham Buy Back

Pada tahun 2009 dan 2010, BRI melakukan pembagian dividen interim, masing-masing sebesar Rp45,74 per lembar saham dan Rp45,93 per lembar saham yang pelaksanaannya sesuai dengan UU PT No. 40 tahun 2007. Besarnya dividen interim tersebut sudah masuk di dalam perhitungan dividen tahunan yang telah disebutkan di atas.

Tahun Dividen	Tanggal Pembayaran	Dividen per Saham (Rp)
2009	16 Desember 2009	45,74
2010	30 Desember 2010	45,93

## AKSI KORPORASI

Pada tanggal 22 November 2017, Perseroan melaksanakan aksi korporasi berupa penyertaan saham PT Bahana Artha Ventura ("BAV") sebanyak 71.207 Miliar saham baru yang dikeluarkan oleh BAV atau senilai Rp71,3 miliar atau setara dengan 35% dari seluruh saham BAV. Tujuan penyertaan saham pada perusahaan modal ventura tersebut adalah untuk meningkatkan kolaborasi dengan *start-up fintech*.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 18 Oktober 2017 telah menyetujui antara lain pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari semula Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp50 (lima puluh Rupiah) per saham (Rasio 1:5). Perubahan anggaran dasar sehubungan dengan *stock split* dimaksud sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 54 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang penerimaan pemberituannya berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.03-0187521 tanggal 3 November 2017.

Harga saham sebelum *stock split* sebesar Rp16.450 pada tanggal 9 November 2017 menjadi sebesar Rp3.280 pada penutupan perdagangan 10 November 2017. Dengan adanya *stock split* dimaksud, per 10 November 2017 jumlah lembar saham yang beredar sebelum dan pelaksanaan *stock split* adalah 24.669.162.000 lembar dan 123.345.810.000 lembar.

### Pelaksanaan *Stock Split* Tahun 2017

Keterangan	Pemegang Saham (Jumlah Saham yang Beredar)					Jumlah Saham yang Beredar
	Pemerintah		Publik		Nominal	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Rp	
Sebelum <i>Stock Split</i>	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25	250	24.669.162.000
Setelah <i>Stock Split</i>	70.000.000.000	56,75	53.345.810.000	43,25	50	123.345.810.000



## Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisa &amp; Pembahasan Manajemen

## PERISTIWA PENTING

11 Januari 2017



### Bangun Balkondes, BRI Kembangkan Desa Wisata Di Sekitar Candi Borobudur

BRI Kembangkan Desa Wisata Di Sekitar Candi Borobudur melalui pembangunan Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Bank BRI di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Seremoni peletakan batu pertama pembangunan Balai Ekonomi Desa (Balkondes) dihadiri oleh Menteri BUMN Republik Indonesia Rini M. Soemarno, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Pangdam IV Diponegoro Mayor Jenderal TNI Jaswandi serta Direktur Utama Bank BRI Asmawi Syam.

12 Januari 2017



### Menteri Rini Kunjungi Rumah Kreatif BUMN Plus Di Yogyakarta

Menteri BUMN Republik Indonesia Rini M. Soemarno dan Direktur Utama Bank BRI Asmawi Mengunjungi Rumah Kreatif BUMN Plus Bank BRI

Di Yogyakarta. Bank BRI terus memperkuat dukungannya dalam mendorong dan memajukan sektor usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, salah satunya dengan mendirikan Rumah Kreatif BUMN Plus (RKB Plus) di Jl. Sagan Kidul No.123 Terban Gondokusuman Yogyakarta.

12 Januari 2017



### Kartu Tani BRI Bantu Petani Naik Kelas Nikmati Inklusi Keuangan

Dengan semangat BUMN Hadir Untuk Negeri, BRI turut mendorong mewujudkan program pemerintah Nawacita dalam bidang ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan di Indonesia melalui Launching Program Kartu Tani bertempat di Lapangan Olahraga Drh. Supardi, Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah (12/01), turut hadir dalam acara launching dan distribusi serentak Kartu Tani di 21 Kabupaten / Kota di Provinsi Jateng diantaranya Menteri BUMN RI Rini M. Soemarno, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Magelang Zaenal Arifin dan Direktur Utama Bank BRI Asmawi Syam.

24 Februari 2017



### Presiden Jokowi Kembali Resmikan Teras BRI Kapal

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Teras BRI Kapal Bahtera Seva II dan Teras BRI Kapal Bahtera Seva III di Ambon (24/02).

Teras BRI Kapal adalah salah satu bentuk *financial inclusion* Bank BRI yang bertujuan untuk mendekatkan akses dan sarana layanan perbankan kepada masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan pesisir yang masih sulit / belum mendapatkan akses terhadap layanan perbankan.

27 Februari 2017



### Wakil Presiden Jusuf Kalla Resmikan Center of Microfinance BRI-UNHAS

Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Jusuf Kalla secara simbolis meletakkan batu pertama pembangunan Center of Microfinance BRI-UNHAS, pusat pendidikan microfinance hasil kerjasama antara BRI dengan Universitas

## PERISTIWA PENTING

Hasanuddin (Unhas), di Makassar (27/02). Turut hadir dalam peresmian tersebut Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Direktur Utama Bank BRI Asmawi Syam dan Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu M.A.

9 Maret 2017



#### Outlet Canggih Milik BRI Kini Hadir Di Kota Kasablanka

Bank BRI menghadirkan BRI Digital di Kota Kasablanka, Jakarta (09/03). Peresmian ini dalam rangka transformasi outlet BRI di era digitalisasi. BRI Digital merupakan outlet digital terlengkap dengan memanfaatkan jaringan komunikasi satelit (BRIsat). Outlet ini dapat melayani kebutuhan transaksi produk perbankan, update informasi keuangan (*financial advisory*), investasi, *e-commerce*, dan transaksi perbankan lainnya.

15 Maret 2017



#### Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Bank BRI menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2017. Selain terdapat pergantian Direksi, BRI juga membagikan dividen kepada para pemegang saham sebesar 40% dari laba bersih perseroan tahun lalu.

April 2017



#### BRI Selenggarakan Kelas Inspirasi di Pulau-Pulau Terpencil

Bank BRI menyelenggarakan rangkaian kegiatan BRI Peduli Pendidikan yang dilakukan di beberapa gugus pulau terluar yang tersebar di seluruh Nusantara. Dengan mengusung tema "BRI Mencerdaskan Anak Bangsa", kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Bank BRI dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia untuk memberikan wawasan dan inspirasi kepada anak-anak sekolah dasar (SD) dari wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

12 Mei 2017



#### Bank BRI Berikan Beasiswa S2 Kepada Jurnalis

Bank BRI memberikan beasiswa untuk program Magister (S2) kepada 32 jurnalis dari berbagai media terkemuka nasional, baik cetak, elektronik dan online. Beasiswa Jurnalis Cerdas (BJC), merupakan beasiswa bidang jurnalistik yang diperuntukkan khusus bagi wartawan yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi di Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia.

19 Mei 2017



#### Parade UMKM BRI Kini Hadir Di Kota Malang

Bank BRI menggelar event Parade UMKM di kota Malang, Jawa Timur. Parade UMKM BRI di kota Malang mengusung tema "UMKM Kreatif Berbasis Digital" dan diselenggarakan pada 19-21 Mei 2017 di Lapangan Parkir Stadion Gajayana Malang. Kota Malang menjadi kota kedua dari rangkaian 17 kota dimana akan diadakan Parade UMKM BRI hingga akhir tahun 2017.


**Ikhtisar Kinerja Utama**

Laporan Manajemen  
 Profil Perusahaan  
 Analisa & Pembahasan Manajemen

**PERISTIWA PENTING**
**7 Juni 2017**

**Lima Kementerian dan Lembaga Negara Manfaatkan Slot Transponder Satelit BRIsat**

Bank BRI menyerahkan pemanfaatan 4 slot transponder BRIsat kepada Lima Kementerian dan Lembaga Negara Indonesia. Kementerian dan Lembaga Negara tersebut diantaranya yakni Kepolisian Negara RI, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Badan Intelijen Negara RI, Badan Keamanan Laut dan Kementerian Keuangan RI. Acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan slot BRIsat ini diselenggarakan di Kantor Pusat Bank BRI, Jakarta (07/06) dengan dihadiri oleh sejumlah pejabat negara.

**13 Juni 2017**

**Menteri BUMN RI Rini M Soemarno menyerahkan bantuan sembako dalam rangka bulan Ramadhan dengan disaksikan Presiden RI Joko Widodo dan Direktur Utama Bank BRI Suprajarto**

Melalui program BRI Peduli, Bank BRI turut berpartisipasi dalam pembagian 200.000 paket sembako secara gratis yang dibagikan oleh perusahaan BUMN dalam menyambut Ramadhan di wilayah Jabodetabek. Ini adalah wujud komitmen BRI dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

**15 Juni 2017**

**Berbagi Kebahagiaan, HIMBARA Ajak Ribuan Anak Yatim Piatu Berbuka Bersama**

Himpunan Bank Bank Milik Negara atau yang biasa disebut HIMBARA yang terdiri dari Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BTN kembali mengadakan

kegiatan Buka Puasa Bersama Anak Yatim Piatu di Jakarta Convention Center pada tanggal 15 Juni 2017. Hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Menteri BUMN RI Rini M. Soemarno serta Jajaran Direksi dan Komisaris HIMBARA.

**16 Juni 2017**

**Gencarkan Cashless Society di Lingkungan POLRI, BRI Luncurkan Kartu Co-Branding BRI-POLRI PROMOTER**

Gencarkan Cashless Society di Lingkungan POLRI, BRI Luncurkan Kartu Co-Branding BRI-POLRI PROMOTER

**Juli 2017**

**Kegiatan CSR Mudik Bareng**

Gunakan moda transportasi pesawat udara, kapal laut, kereta api, dan bus, 7.000 nasabah Bank BRI difasilitasi

## PERISTIWA PENTING

untuk mudik lebaran secara gratis. Melalui ritual mudik bareng BRI merupakan wujud *corporate social responsibility* Bank BRI yang diselenggarakan sejak tahun 2004.

18 Juli 2017



### Konsisten Berdayakan UMKM, BRI Raih Penghargaan Dari Bank Indonesia

Bank Indonesia menganugerahkan Bank BRI penghargaan sebagai Peringkat Pertama Bank Pendukung UMKM Terbaik 2017 kategori Buku III dan Buku IV yang diberikan secara langsung oleh Gubernur Bank Indonesia Agus W. Martowardojo kepada Direktur Utama Bank BRI Suprajarto. Bank BRI dianggap telah memberikan kontribusi positif dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap komitmen Bank BRI untuk memajukan sektor UMKM di Indonesia.

27 Juli 2017



### Penghargaan Forbes Global

Forbes Global menganugerahkan Bank BRI penghargaan sebagai The World's Biggest Public Companies 2017. Penghargaan tersebut diterima oleh Direktur Bank BRI Randi Anto pada tanggal 27 Juli 2017 di Jakarta.

27 Juli 2017



### Penghargaan Asian Bankers

Asian Bankers menganugerahkan Bank BRI penghargaan sebagai Best Microfinance Product of The Year 2017. Penghargaan tersebut diterima oleh Direktur Bank BRI Donsuwan Simatupang pada tanggal 27 Juli 2017 di Jakarta.

9 Agustus 2017



### BRI Gelar Public Expose di Bursa Efek Indonesia

Direksi Bank BRI tengah memberikan penjelasan dalam acara paparan publik atau public expose di hadapan para investor dan stakeholders di gedung Bursa Efek Indonesia.

11 Agustus 2017



### Ajak Masyarakat Investasi Saham, BRI Launching Program Desa Nabung Saham

Bank BRI bersama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menandatangani Nota Kesepahaman Program Desa Nabung Saham. Acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah investor aktif, mengembangkan layanan tabungan dan Rekening Dana Nasabah (RDN) untuk Pasar Modal melalui sistem perbankan Bank BRI.



### Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen  
 Profil Perusahaan  
 Analisa & Pembahasan Manajemen

## PERISTIWA PENTING

12 Agustus 2017



### Bank BRI Ajak Generasi Muda Jauhi Narkoba

BRI bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) menggelar rangkaian kegiatan "Sadar Bahaya Narkoba Bersama Bank BRI". Secara simbolis, rangkaian kegiatan tersebut diresmikan di Corporate University Bank BRI, Ragunan, Jakarta Selatan (12/08).

18 Agustus 2017



### Beasiswa Bank BRI Kepada Paskibraka Nasional

Rombongan Tim Paskibraka berkesempatan untuk mendatangi Kantor Pusat Bank BRI di Jakarta (18/08). Nampak hadir dalam acara tersebut Direktur Utama Bank BRI Suprajarto bersama jajaran Direksi Bank BRI lainnya serta Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Joni Mardizal. Dalam kesempatan tersebut,

Bank BRI menyerahkan beasiswa pendidikan senilai Rp. 165.000.000 kepada seluruh anggota tim Paskibraka. Beasiswa ini merupakan salah satu bentuk *Corporate Social Responsibility* BRI dan diharapkan akan semakin memacu generasi muda yang lain ikut bersemangat berlomba menjadi terbaik mewakili daerah asal menjadi anggota paskibra baik ditingkat kabupaten, provinsi maupun nasional.

4 September 2017



### BRI Rayakan Hari Pelanggan Nasional

Jajaran Direksi dan SEVP Bank BRI berkunjung ke Kantor Cabang Bank BRI untuk bertatap muka dan melayani nasabah yang datang di hari Senin tersebut. Diantaranya nampak Direktur Utama Bank BRI Suprajarto mengunjungi Kantor Cabang Khusus BRI di Jalan Jenderal Sudirman dan Kantor Cabang BRI Tanah Abang, Jakarta.

18 September 2017



### Semarakkan Indonesia Banking Expo 2017, Bank BRI Kembangkan Digitalisasi Industri Perbankan

Semarakkan Indonesia Banking Expo 2017, Bank BRI Kembangkan Digitalisasi Industri Perbankan.

24 September 2017



### Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja Migran, BRI Luncurkan Kartu Pekerja Indonesia-Malaysia

Bank BRI menjalin kerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Malaysia di Kuala Lumpur terkait dengan layanan produk perbankan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia (24/09). Penandatanganan Nota Kesepahaman kerja sama ini dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Malaysia Rusdi Kirana, Ketum PB NU Said 'Aqil Siradj, Direktur Utama

## PERISTIWA PENTING

Bank BRI Suprajarto dan Direktur Institusi Bank BRI Sis Apik Wijayanto. Melalui nota kesepahaman ini, Bank BRI berkomitmen untuk menerbitkan Kartu Pekerja Indonesia-Malaysia (KPIM) yang dapat dimanfaatkan oleh para pekerja migran di Malaysia sebagai tabungan serta kartu ATM dan debit BRI yang dilengkapi dengan e-banking BRI.

18 Oktober 2017



### Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Bank BRI menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada 18 Oktober 2017 di Jakarta. Selain terdapat pergantian Direksi dan Komisaris, juga terdapat *corporate action* berupa pemecahan saham (*stock split*) dengan rasio 1:5

19 Oktober 2017



### Penghargaan Forbes Indonesia

Forbes Indonesia menganugerahkan Bank BRI penghargaan sebagai Best Of The Best Awards 2017 kategori The TOP 50 Companies For 2017. Penghargaan tersebut diterima oleh Direktur Human Capital Bank BRI R. Sophia Alizsa pada tanggal 19 Oktober 2017 di Jakarta.

26 Oktober 2017



### Analyst Meeting TW 3 2017

Direksi Bank BRI memberikan keterangan kepada media terkait kinerja keuangan perusahaan. Hingga akhir triwulan III 2017, Bank BRI menghasilkan *net profit* atau laba sebesar Rp 20,5 triliun atau meningkat 8,2% dibandingkan periode yang sama di 2016.

1 November 2017



### Tahun Keenam Sponsor BRIndocomtech, BRI Libatkan *Start Up Fintech*

Bank BRI kembali menjadi sponsor utama penyelenggaraan BRIndocomtech untuk kali keenam secara berturut-turut sejak tahun 2012. Pada gelaran event pameran IT terbesar di Indonesia ini pula, untuk kali pertama BRI menggandeng *Financial Technology (Fintech)* untuk turut ambil bagian dalam rangkaian kegiatan BRIndocomtech 2017.


**Ikhtisar Kinerja Utama**

Laporan Manajemen  
 Profil Perusahaan  
 Analisa & Pembahasan Manajemen

## PERISTIWA PENTING

**4 November 2017**


**Presiden RI Joko Widodo bersama Menteri BUMN RI Rini M Soemarno dan Dirut BRI Suprajarto berbincang dengan salah satu petani.**

Bank Rakyat Indonesia (BRI) ikut berperan aktif dengan menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) kepada para penerima bantuan program perhutanan sosial. Seperti yang dilakukan hari ini di Boyolali, Jawa Tengah.

**10 November 2017**


**Gelar *Opening Bell* di BEI, BRI Rayakan 14 Tahun IPO dan perdagangan perdana Saham BBRI Pasca *Stock Split* 1:5**

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Suprajarto beserta jajaran Direksi dan SEVP Bank BRI lainnya melakukan pembukaan perdagangan saham dalam rangka memperingati 14 tahun Bank BRI melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain merayakan HUT IPO ke 14, dalam acara *opening bell* tersebut secara resmi juga diperdagangkan saham BBRI dengan harga setelah dilakukan *stock split* saham BRI dengan rasio 1:5.

**22 November 2017**


**Direktur Utama Bank BRI Suprajarto Secara Simbolis Serahkan KUR Kepada TKI di Malaysia**

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat bagi para TKI di Malaysia dengan disaksikan Presiden RI Joko Widodo. Ini merupakan salah satu program BRI untuk menyediakan akses layanan perbankan bagi para pekerja migran.

**27 November 2017**


**Penghargaan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) oleh IICD**

Bank BRI menerima penghargaan dari IICD dalam acara The 9th IICD Corporate Governance Conference and Award sebagai Kategori Best Overall Penerapan ACGS. Penghargaan tersebut diterima oleh Direktur Kepatuhan Bank BRI Susy Liestiowaty pada tanggal 27 November 2017 di Jakarta.

## PERISTIWA PENTING

5 Desember 2017



### Rayakan Hari Jadi Ke 122, Bank BRI Gelar BRIRUN 2017 BOGOR SERIES

BRI mengadakan event lari berskala nasional bertajuk BRIRUN2017 BOGOR SERIES. Event ini diselenggarakan untuk merayakan hari jadi ke-122 dan diikuti oleh 5.000 *runners* yang menempuh jarak 5 Km (5K), 10 Km (10K) dan 21 Km (21K)

10 Desember 2017



### BRI Launching Kartu Debit Edisi Spesial Asian Games 2018

Guna semakin menyemarakkan perhelatan Asian Games 2018 yang akan diselenggarakan di Jakarta dan Palembang tahun depan, Bank BRI sebagai *official prestige partner* meluncurkan Kartu Debit Edisi Spesial Asian Games 2018.

19 Desember 2017



### Penghargaan CGPI

Bank BRI menerima penghargaan dari Majalah SWA dan IICG dalam acara Good Corporate Governance Award 2017 sebagai Indonesian Most Trusted Companies Based On Corporate Governance Perception Index (CGPI). Penghargaan tersebut diterima oleh Direktur Kepatuhan Bank BRI Susy Liestiwaty pada tanggal 19 Desember 2017 di Jakarta.

17 Desember 2017



### Rayakan HUT BRI ke-122, 65.000 Keluarga Besar BRI Ikuti BRIFFEST 2017

Memperingati Hari Ulang tahun Bank BRI pada 16 Desember, Bank BRI menggelar acara BRI Family Festival (BRIFEST) pada 17 Desember 2017. Acara tersebut berlangsung meriah dengan dihadiri oleh lebih dari 65.000 anggota keluarga BRI.

27 Desember 2017



### BRI GroundBreaking Menara Baru di Kawasan Segitiga Emas Jakarta

Bank BRI membangun gedung baru di kawasan "Segitiga Emas" Jakarta, yakni di Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 62. Gedung yang diberi nama Menara BRI Gatot Subroto tersebut diharapkan akan menjadi ikon baru di kawasan strategis dan prestisius di ibukota.

Hadir dalam acara *ground breaking* gedung baru tersebut yakni Menteri BUMN Rini M. Soemarno, Komisaris Utama Bank BRI Andrinof A.Chaniago dan Direktur Utama Bank BRI Suprajarto serta Direktur Utama PT.Pembangunan Perumahan Bapak Tumiyana.



Melalui berbagai tantangan selama tahun 2017, BRI masih mencatatkan pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dari pertumbuhan kredit industri perbankan. Hal ini disebabkan oleh disiplin alokasi aset BRI untuk segmen Bisnis Mikro dan Ritel sebagai penopang utama profitabilitas BRI.



---

# LAPORAN MANAJEMEN

- 42 Laporan Dewan Komisaris
  - 52 Laporan Direktur Utama
  - 64 Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2017 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
-



Ikhtisar Kinerja Utama

▶ Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisa &amp; Pembahasan Manajemen

# LAPORAN DEWAN KOMISARIS



CAPAIAN KINERJA PERUSAHAAN YANG BAIK TAK LEPAS DARI KOMITMEN DAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE YANG TELAH BERJALAN SESUAI DENGAN KAIDAH DAN PRAKTIK CHECK AND BALANCE ANTARA ORGAN PENGAWAS DAN ORGAN EKSEKUTIF PERUSAHAAN SERTA ORGAN-ORGAN DIBAWAH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN. ”

Pemegang Saham Yang Terhormat,  
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia yang diberikan sehingga Perseroan dapat melalui tahun 2017 dengan tetap memberikan kinerja terbaik.

Dewan Komisaris merasa puas dan memberikan apresiasi kepada Direksi atas pencapaian-pencapaian Perseroan selama tahun 2017 dimana kinerja Perseroan mengalami pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan Industri Perbankan Nasional.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan terlaksananya ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Adapun secara rinci pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris dapat dilihat di Bab Tata Kelola Perusahaan.

## Evaluasi Kinerja Direksi Perseroan

Kinerja BRI secara konsolidasi dinilai baik. Per Desember 2017 Aset BRI mencapai Rp1.126,24 triliun, meningkat sebesar 12,2% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.003,64 triliun. Dewan Komisaris menilai, Direksi berhasil dalam pelaksanaan strategi pertumbuhan kredit yang *prudent*, terutama dalam kondisi yang sangat kompetitif selama tahun 2017. Hingga Desember 2017, kredit yang disalurkan Perseroan tumbuh menjadi Rp739,33 triliun atau meningkat 11,4% dibandingkan posisi Desember 2016 yang sebesar Rp663,42 triliun. Kualitas kredit terjaga dengan baik yang tercermin dari rasio kredit bermasalah (*NPL Gross*) yang mengalami sedikit peningkatan dari 2,13% pada Desember 2016 menjadi 2,23% pada Desember 2017.

Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) meningkat dari Rp754,52 Triliun pada Desember 2017 menjadi Rp841,65 Triliun pada Desember 2017. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk memelihara likuiditas pada tingkat yang optimal. Perseroan juga terus berupaya untuk meningkatkan porsi dana murah yang ditunjukkan dengan rasio CASA sebesar 59,04% pada akhir 2017.

A professional portrait of Andrinof A. Chaniago, a middle-aged man with a goatee, wearing a dark suit, white shirt, and blue tie. He is looking directly at the camera with a neutral expression.

**ANDRINOF A. CHANIAGO**  
Komisaris Utama



Ikhtisar Kinerja Utama

▶ Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisa &amp; Pembahasan Manajemen

## LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Laba bersih Perseroan meningkat sebesar 10,7% dari sebesar Rp26,22 triliun pada Desember 2016 menjadi sebesar Rp29,04 triliun pada Desember 2017. Imbal hasil atas Aktiva (*Return on Asset /ROA*) mencapai 3,54%, sedangkan imbal hasil atas ekuitas (*Return on Equity/ ROE*) mencapai sebesar 19,73%. Struktur permodalan tetap terjaga dengan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/ CAR*) sebesar 22,96%, jauh di atas ketentuan regulator.

Sepanjang 2017, Perseroan telah mendapat tingkat kesehatan Bank Peringkat Komposit 2 (PK-2) yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

### Rekomendasi dan Apresiasi atas Kinerja Perseroan

Meskipun secara umum kinerja keuangan Perseroan sangat baik, namun terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Dewan Komisaris merangkul beberapa poin yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

- Menata penempatan SDM dan menguatkan nilai-nilai budaya kerja dan menjaga kelancaran adaptasi karyawan dengan tuntutan era digital
- Melanjutkan upaya peningkatan efisiensi kegiatan operasional dan mengendalikan risiko operasional pada tingkat *manageable risk*.
- Peningkatan *fee based income (FBI)* yang bersumber dari *transaction banking* dan sumber-sumber *FBI* lainnya
- Perbaikan struktur dana dengan peningkatan *CASA* agar dilakukan secara terus menerus dengan disertai perbaikan layanan operasional dan peningkatan *transaction banking* melalui digitalisasi layanan dan operasional.
- Strategi ekspansi kredit yang dilakukan secara *prudent* dengan mengutamakan pertumbuhan pada segmen yang menjadi *core competency* Perseroan serta sektor-sektor ekonomi yang tahan terhadap krisis.

- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengembangan *Digital Banking* dan *Fintech* untuk mendukung *sustainability* pengembangan bisnis Perseroan.

Atas prestasi kinerja keuangan tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi yang tinggi dan selamat kepada Direksi berikut seluruh jajaran Perseroan. Dewan Komisaris berharap agar prestasi kinerja keuangan tersebut dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan untuk masa yang akan datang.

### Tinjauan dan Prospek Usaha

Dalam menghadapi dinamika perekonomian global dan domestik serta tantangan persaingan perbankan tahun 2018, Perseroan harus tetap melanjutkan inisiatif strategis untuk tumbuh di segmen perbankan UKM, Konsumer dan Komersial, melakukan restrukturisasi bisnis *mass market* serta meningkatkan sinergi antara Perseroan dan entitas anak serta kegiatan pemasaran yang lebih tepat sasaran. Dewan Komisaris berpendapat bahwa Perseroan harus berinovasi secara berkelanjutan dalam mempersiapkan diri dari segi penguasaan dan pengembangan teknologi digital serta memperkuat sumber daya manusia (SDM) yang handal antara lain melalui penataan dan re-sosialisasi budaya kerja sehingga Perseroan akan lebih fokus dan unggul, serta terdepan dalam penerapan teknologi informasi serta pemanfaatan layanan *digital banking* yang mampu mendorong pertumbuhan bisnis yang lebih besar dan berkesinambungan.

Dewan Komisaris menilai, Rencana Bisnis dan Rencana Kerja serta Anggaran Perseroan (RBB dan RKA) untuk tahun 2018 dan untuk tiga tahun ke depan cukup realistis. Hal itu dilihat dari peluang yang ada di lingkungan bisnis, sumber daya yang dimiliki Perseroan, dan konsep kerja Direksi. Karenanya, Dewan Komisaris berpendapat, target-target positif dan optimis yang dicantumkan di dalam Rencana Bisnis Bank dan RKAP bisa dicapai.

## LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Dengan sumber daya yang sangat besar, jaringan unit kerja yang menyebar dan jangkauan layanan paling luas, Perseroan selanjutnya menekankan perhatian khusus pada penguatan sistem dan pengendalian sistem tata kelola terintegrasi.

Ada beberapa target khusus yang ditetapkan untuk disampaikan kepada Direksi, terkait dengan posisi Perseroan saat ini, antara lain:

- Penguatan Entitas Anak serta peningkatan sinergi bisnis dengan Entitas Anak termasuk penguatan tata kelola terintegrasi yang diharapkan akan mendorong peningkatan nilai Perseroan secara keseluruhan.
- Mengoptimalkan pengembangan *Digital Banking* dan terus melakukan perbaikan layanan operasional dan peningkatan *transaction banking* untuk mendukung *sustainability* pengembangan bisnis dan perbaikan struktur dana dengan peningkatan *CASA*.
- Melakukan ekspansi kredit secara prudent dengan mengutamakan pertumbuhan pada segmen yang menjadi *core competency* Perseroan dan sektor-sektor ekonomi yang tahan terhadap krisis, serta terus menerus melakukan perbaikan kualitas kredit di semua segmen kredit.

Kami berharap, Perseroan terus tumbuh di segmen perbankan UKM, Konsumer dan Komersial serta melaksanakan penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga peran Perseroan sebagai agen pembangunan dan pemerataan pembangunan dapat terwujud secara nyata.

### Penerapan *Good Corporate Governance*

Dalam dunia perbankan, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan satu hal yang wajib dalam *day to day operation*, baik dari sisi *Governance Structure*, *Governance Process*, maupun *Governance Outcome*. Selain untuk melindungi Perseroan dari risiko yang ada, penerapan *Governance* yang baik juga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada Perseroan.

Untuk menyesuaikan implementasi GCG dengan kondisi terkini, Perseroan harus secara konsisten menjalankan dan berpedoman pada *best practices* yang berlaku di industri secara umum, maupun di bidang perbankan. Dalam hal ini Dewan Komisaris dan Manajemen bersama-sama harus berusaha semaksimal mungkin menerapkan standard-standar terbaik dan senantiasa melakukan *benchmarking* terkait penerapan GCG di Industri Perbankan Nasional maupun Internasional.

Beberapa *best practices* yang berlaku di industri yang menjadi acuan Perseroan dalam penerapan GCG yang ada saat ini antara lain:

- Principles of *Corporate Governance* oleh *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD).
- ASEAN *Corporate Governance Scorecard*.
- Pedoman Umum GCG Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
- Pedoman GCG Perbankan Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Selama beberapa tahun terakhir, secara rutin Perseroan melakukan kerjasama dengan *Asean CG Scorecard* dalam upaya meningkatkan GCG. Penilaian dan masukan dari *Asean CG Scorecard* menjadi salah satu bahan perbaikan dalam meningkatkan penerapan GCG. Pada 2016 Perseroan mendapat predikat "The Best Overall" dan penghargaan Top Emiten.

Saat ini, terdapat 4 Komite yang membantu Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantauan Manajemen Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Setiap Komite diketuai oleh Komisaris dan anggotanya terdiri dari Komisaris lain dan Pihak Independen Non Komisaris.



Ikhtisar Kinerja Utama

▶ Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisa &amp; Pembahasan Manajemen

## LAPORAN DEWAN KOMISARIS

### Komite-komite di bawah Dewan Komisaris

Selama tahun 2017 Komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah melaksanakan peran dan tanggung jawab masing-masing secara baik dan telah memberikan dukungan yang signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pengawasan Dewan Komisaris. Beberapa tugas pokok Komite sebagai berikut:

#### Komite Pemantau Manajemen Risiko

- Komite Pemantau Manajemen Risiko telah melakukan *review* terhadap pelaksanaan/penerapan manajemen/profil risiko bank dan entitas anak termasuk pelaksanaan atau penerapan GCG, tingkat kesehatan bank, kepatuhan terhadap ketentuan internal/eksternal termasuk program APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme) melalui forum pertemuan Radirkom (Rapat Direksi dan Komisaris), dan *Risk Management Committee*. Selain itu, juga membantu Komisaris dalam membahas atau berkomunikasi dengan Direksi atau menanggapi issue terkait dengan tata kelola risiko secara luas.

Kemampuan Perseroan dalam mengelola risiko tidak terlepas dari keberhasilan Komite Pengawasan Manajemen Risiko bersama dengan Direktorat Manajemen Risiko dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menelaah dan memantau penerapan manajemen risiko di Perseroan. Peringkat profil risiko yang berada di level "Low to Moderate", kualitas portofolio kredit yang baik dan persentase *NPL* yang rendah pada tahun 2017 merupakan hasil nyata dari sinergi pengelolaan risiko yang baik.

#### Komite Audit

- Komite Audit bertanggung jawab membantu meyakinkan Dewan Komisaris bahwa pelaksanaan pengendalian internal perusahaan telah memadai dalam mencapai tujuan perusahaan yang dibantu oleh SKAI sebagai *3rd Control of Defense*. Secara rutin dilakukan *review* terhadap hasil audit internal dan langkah-langkah perbaikan/koreksinya. Selain itu Komite Audit juga bertanggung jawab melakukan

pengadaan atau menetapkan KAP (Kantor Akuntan Publik) sebagai *Auditor Independent*.

Peranan Komite Audit tercermin dalam memastikan kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit telah melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik serta menelaah laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya dalam rangka memastikan kesesuaiannya dengan standar akuntansi dan aturan yang berlaku.

- Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang beranggotakan unsur-unsur dari anggota Dewan Komisaris Perseroan, anggota Dewan Komisaris Bank BRI Agro, BRI Life, BRI Finance serta anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Bank BRI Syariah. Selama tahun 2017, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, audit terintegrasi dan fungsi Kepatuhan terintegrasi.

#### Komite Nominasi dan Remunerasi

- Komite Nominasi dan Remunerasi telah memberikan kontribusi yang sangat besar terutama terkait dengan evaluasi kebijakan remunerasi pekerja dan ketenagakerjaan, remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, serta pengelolaan SDM secara keseluruhan. Selain itu, Komite Nominasi dan Remunerasi juga telah memberikan saran dan masukan yang konstruktif atas sistem dan prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pihak independen anggota komite Dewan Komisaris.

#### Komite Tata Kelola Terintegrasi

- Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan kontribusi positif terutama mengenai evaluasi atas penerapan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan kerja Audit Intern Terintegrasi, Satuan

## LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. Penerapan fungsi tersebut dibawahkan oleh anggota Dewan Komisaris masing-masing perusahaan anak dalam konglomerasi keuangan BRI yang dilaksanakan secara periodik oleh Komite Komite Tata Kelola Terintegrasi.

### Pengelolaan *Whistleblowing System*

Perseroan telah memiliki dan melaksanakan *Whistleblowing System (WBS)* dengan membuka saluran pengaduan ke nomer telpon dan email tertentu yang dipasang/disediakan di setiap Kantor Perseroan dengan sebagai penanggung jawab akhir adalah Direktur Utama. Dewan Komisaris menilai penerapan *Whistleblowing System (WBS)* telah sesuai dengan kaidah GCG dan membantu menciptakan prinsip transparansi Perseroan. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) bertugas untuk membantu dalam hal ini dan banyak kasus yang telah ditindaklanjuti atau yang sumber informasinya dari pengembangan *WBS*. Setiap 3 bulan sekali, Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa *WBS* berjalan secara efektif dengan antara lain memanfaatkan laporan dari SKAI dan tindak lanjutnya.

### Manajemen Risiko

Upaya peningkatan kualitas manajemen risiko senantiasa dilakukan seiring dengan perkembangan bisnis Perseroan, selain itu Penerapan Manajemen risiko yang baik dapat lebih menjamin tercapainya tujuan Perseroan. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain:

- Penataan organisasi dan tata kelola secara *continue* dengan membentuk Direktur yang khusus membawahi Manajemen Risiko, Direktorat Manajemen Risiko yang dibentuk pada bulan Mei tahun 2017, hal ini dilakukan bersamaan dengan dilakukannya reorganisasi Perseroan secara menyeluruh. Sebelumnya fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan ditangani atau dibawah tanggung jawab Direktur Kepatuhan.
- Perseroan telah melakukan *assesment* manajemen risiko oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan parameter-parameter yang ditetapkan dan menghasilkan profil risiko dan yang memberikan gambaran kepada Manajemen dan Dewan Komisaris untuk hal-hal yang secara prioritas perlu ditangani atau ditindaklanjuti. Termasuk didalamnya adalah pembahasan dalam forum *Risk Management Committe (RMC)* yang rutin diadakan setiap triwulan dan dipimpin langsung oleh Direktur Manajemen Risiko serta dihadiri oleh jajaran manajemen termasuk Dewan Komisaris untuk me-review seluruh risiko perusahaan.
- Secara insidental, pihak independent/konsultan melakukan *review* terhadap pelaksanaan manajemen risiko sebagai bahan masukan perbaikan pengelolaan manajemen risiko.
- Selain menggunakan jasa KAP (Kantor Akuntan Publik) yang bereputasi internasional atau *the big five* untuk melakukan audit tahunan, secara rutin Otoritas Jasa Keuangan secara independen melakukan *review* terhadap manajemen risiko dengan memberikan penilaian dan masukan-masukan dalam rangka penyempurnaan GCG.
- Menggunakan *Balance Score Card* dalam mencapai tujuan perusahaan, antara lain menetapkan tujuan keuangan perusahaan yang tercermin pada penetapan RKAP ke seluruh jajaran unit kerja sebagai salah satu pedoman penilaian kinerja dan juga pelayanan atau *customer focus* yang didukung oleh nilai-nilai integritas dan profesionalisme.
- Secara berkala melakukan kaji ulang atas Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan oleh jajaran Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang dilaksanakan pada tahun 2017.



Ikhtisar Kinerja Utama

▶ **Laporan Manajemen**

Profil Perusahaan

Analisa &amp; Pembahasan Manajemen

## LAPORAN DEWAN KOMISARIS

## Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Pada 2017, telah terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Berdasarkan hasil keputusan RUPSLB tahun 2017 tanggal 18 Oktober 2017, Rapat menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Adhyaksa Dault sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Rofikoh Rokhim untuk mengisi posisi Komisaris Independen. Rapat juga memberhentikan dengan hormat Sunarso sebagai Wakil Direktur Utama dan Randi Anto sebagai Direktur. RUPSLB kemudian mengangkat Handayani sebagai Direktur Konsumer dan R. Sophia Alizsa sebagai Direktur Human Capital dengan masa akhir jabatan sampai dengan ditutupnya RUPST yang diselenggarakan pada 2022 mendatang.

Selain pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi tersebut, dilakukan juga perubahan nomenklatur serta pengalihan tugas Direksi sehingga susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Andrinof A. Chaniago
Wakil Komisaris Utama/Komisaris	: Gatot Trihargo
Komisaris Independen	: Mahmud
Komisaris Independen	: A. Fuad Rahmany
Komisaris Independen	: A. Sonny Keraf
Komisaris Independen	: Rofikoh Rokhim
Komisaris	: Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris	: Vicentius Sonny Loho
Komisaris	: Jeffry J. Wurangian

**Direksi**

Direktur Utama	: Suprajarto
Direktur Kredit Mikro & Retail	: Priyastomo
Direktur Kredit Menengah, Korporasi & BUMN	: Kuswiyoto
Direktur Digital Banking & Teknologi Informasi	: Indra Utoyo
Direktur Jaringan & Layanan	: Mohammad Irfan
Direktur Strategi Bisnis & Keuangan	: Haru Koesmahargyo
Direktur Kepatuhan	: Susy Liestiowaty
Direktur Manajemen Risiko	: Donsuwan Simatupang
Direktur Hubungan Kelembagaan	: Sis Apik Wijayanto
Direktur Konsumer	: Handayani
Direktur Human Capital	: R. Sophia Alizsa

## LAPORAN DEWAN KOMISARIS

### Penutup

Akhir kata, perkenankan kami, mewakili Dewan Komisaris, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemegang saham, nasabah, mitra usaha, seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas atas kepercayaan dan dukungannya selama ini. Kami berkeyakinan bahwa Perseroan akan terus meraih pertumbuhan yang berkelanjutan dan kinerja terbaiknya pada tahun-tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris atas Pelaksanaan usaha Perseroan tahun 2017.

Jakarta, 26 Februari 2018  
Atas Nama Dewan Komisaris



Andrinof A. Chaniago  
Komisaris Utama



Ikhtisar Kinerja Utama

▶ Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisa & Pembahasan Manajemen

## DEWAN KOMISARIS



.01 **ANDRINOF A. CHANIAGO**  
**Komisaris Utama/Komisaris**  
**Independen**

.02 **GATOT TRIHARGO**  
**Wakil Komisaris Utama**

.04 **A. SONNY KERAF**  
**Komisaris Independen**

.03 **AHMAD FUAD RAHMANY**  
**Komisaris Independen**

.05 **MAHMUD**  
**Komisaris Independen**



.06 **ROFIKOH ROKHIM**  
**Komisaris Independen**

.07 **VINCENTIUS SONNY LOHO**  
**Komisaris**

.08 **JEFFRY J. WURANGIAN**  
**Komisaris**

.09 **NICOLAUS TEGUH BUDI HARJANTO**  
**Komisaris**



Ikhtisar Kinerja Utama

▶ Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisa &amp; Pembahasan Manajemen

# LAPORAN DIREKTUR UTAMA



BERBAGAI TANTANGAN SELAMA 2017 MAMPU DIHADAPI DENGAN BAIK, DAN HAL ITU TERCERMIN DARI PENCAPAIAN BEBERAPA INDIKATOR KINERJA KEUANGAN YANG TUMBUH DIATAS RATA-RATA INDUSTRI. BRI MAMPU MEMBUKUKAN LABA TERBESAR DI INDUSTRI PERBANKAN. KEDEPAN, STRATEGI BERKELANJUTAN AKAN DIFOKUSKAN KEPADA PENINGKATAN KINERJA DAN DAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS *HUMAN CAPITAL*, INOVASI PRODUK DAN LAYANAN BERBASIS TEKNOLOGI (*DIGITAL*). ”

Assalamu'alaikum Wr Wb,

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita semua kekuatan untuk melewati perjalanan di tahun 2017. BRI telah berupaya dan berhasil menunjukkan kinerja yang baik di tahun 2017 dengan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh setiap pemangku kepentingan serta meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Pencapaian ini akan semakin memperkokoh pengembangan bisnis BRI yang berkelanjutan. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan ringkasan kinerja BRI tahun 2017.

## Kondisi Makro Ekonomi

### Pertumbuhan Ekonomi Dunia Menunjukkan Peningkatan

Pada tahun 2017 perekonomian global terus mengalami *cyclical recovery* secara menyeluruh. Pertumbuhan global didorong oleh menguatnya aktivitas perdagangan dunia, membaiknya *trend* investasi dan meningkatnya aktivitas produksi. *Trend* tersebut diperkirakan tetap berlanjut hingga tahun 2018.

Harga komoditas yang lebih baik juga turut mendorong pertumbuhan negara pengekspor komoditas, sehingga kondisi ekonomi global yang menguntungkan telah

berhasil mengangkat perekonomian Indonesia, terutama melalui investasi dan ekspor. Pasar uang tetap menunjukkan *yield* yang menarik di tengah membaiknya prospek pertumbuhan global dan ekspektasi suku bunga yang rendah.

*Cyclical recovery* ekonomi global dimulai sejak pertengahan tahun 2016, dan terus berlanjut sampai tahun 2017. Di antara ekonomi negara maju, Amerika Serikat menunjukkan *trend* yang naik dan *Euro Area* tetap tumbuh kuat. Pertumbuhan di Jepang mengalami perlambatan pada Q3 sebesar 1,4% setelah tumbuh 2,6% pada Q2, menandai kuartal ketujuh berturut-turut ekspansi-periode terpanjang pertumbuhan positif sejak 2001. PDB Amerika Serikat mengalami pertumbuhan yang pesat menjadi 2,6% YoY dari 1,6% YoY pada tahun 2016. Sementara, PDB *Euro Area* juga mengalami pertumbuhan sebesar 2,5% YoY. Pertumbuhan ekspor dunia naik dari 7,4% YoY di Q3 menjadi 8,2% YoY pada bulan November, yaitu merupakan tingkat tertinggi sejak Q1 2011.

### Kinerja Ekspor Membaik

Selama tahun 2017, perekonomian nasional relatif lebih baik dari pada tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan 2017 mencapai 5,07% didorong oleh meningkatnya

**SUPRAJARTO**  
Direktur Utama





Ikhtisar Kinerja Utama

▶ Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisa &amp; Pembahasan Manajemen

## LAPORAN DIREKTUR UTAMA

pertumbuhan investasi, baik investasi pemerintah maupun swasta, dan terjaganya konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar terhadap PDB sebesar 56,1%. Beberapa indikator makro ekonomi yang menguat adalah tingkat inflasi yang terjaga, neraca transaksi berjalan pada tingkat yang sehat, aliran masuk modal asing stabil, nilai tukar yang terkontrol, serta cadangan devisa yang meningkat.

Perbaikan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara meningkatkan *volume* perdagangan ekspor dan impor global, termasuk Indonesia. Tahun 2017, pertumbuhan ekspor Indonesia dapat mencapai sekitar 17% sedangkan Impor tumbuh mencapai sekitar 16%. Namun demikian, sejumlah risiko terhadap perekonomian global tetap perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada kondisi perekonomian nasional.

### Kinerja Perbankan Nasional

#### Kualitas Kredit Perbankan Membaik

Selama tahun 2017, perkembangan kondisi industri perbankan cukup dinamis. Bank Indonesia telah memangkas suku bunga acuannya, *7-day reverse repo rate*, 2 (dua) kali pada bulan Agustus dan September. Langkah BI ini dapat dilakukan karena tingkat inflasi yang rendah dan defisit transaksi berjalan yang terjaga. Penurunan suku bunga acuan tersebut turut menurunkan suku bunga rata-rata kredit modal kerja dan kredit investasi sebesar 67 dan 65 bps selama tahun 2017 dan kredit konsumen menurun sebesar 94 bps. Sedangkan, pertumbuhan dana pihak ketiga menurun, tercatat 9,35% YoY, sedikit dibawah pertumbuhan pada 2016 sebesar 9,60%. Meskipun demikian, pertumbuhan kredit industri perbankan dapat mencapai 8,24% YoY, meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 7,87% YoY. Hal ini senada dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tercatat stagnan di kisaran 4.95%. Diperkirakan, kondisi tersebut disebabkan oleh turunnya daya beli di segmen ekonomi bawah karena pengurangan subsidi energi yang terjadi di tahun 2016.

Selain itu, stabilitas industri perbankan terjaga dengan pencapaian 2 (dua) indikator penting kesehatan bank yaitu tingkat *Non-Performing Loans* (NPL) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Sepanjang tahun 2017, NPL mencapai puncaknya pada bulan Februari, atau sebesar 3,16% dan terus membaik hingga akhir tahun pada tingkat 2,59%, sedangkan rasio kecukupan modal (CAR) dapat dijaga pada kisaran 23%.

### Analisis Kinerja Perusahaan Tahun 2017

#### Kebijakan Strategis

##### Pertumbuhan yang Solid Didukung oleh Bisnis Mikro dan Ritel

Dengan berbagai tantangan selama tahun 2017 tersebut, BRI masih mencatatkan pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dari pertumbuhan kredit industri perbankan. Hal ini disebabkan oleh disiplin alokasi aset BRI untuk segmen Bisnis Mikro dan Ritel sebagai penopang utama profitabilitas BRI.

Selama tahun 2017, total pinjaman Mikro BRI tumbuh 14,0% YoY mencapai Rp252,8 triliun sehingga komposisinya terhadap total pinjaman BRI naik dari 34,9% menjadi 35,7%. Demikian pula untuk segmen Bisnis Ritel yang tumbuh 13,8% YoY atau mencapai Rp270,6 triliun sehingga komposisinya mencapai 38,2% dari total pinjaman BRI. Kinerja tersebut turut di apresiasi oleh Bank Indonesia, sehingga BRI mendapat penghargaan sebagai Bank Pendukung UMKM Terbaik 2017 untuk kategori Buku III dan BUKU IV.

##### Mempersiapkan implementasi Transformasi BRI "from Good to Great"

Sesuai rencana jangka panjang BRI 2018-2022, BRI berencana untuk mencapai "*The Most Valuable Bank and Home to the Best Talents*". Untuk itu, di tahun 2017, BRI telah memulai tahapan awal implementasi transformasi dengan melakukan sosialisasi kepada segenap pemangku kepentingan agar proses transformasi dapat berjalan dengan lancar. Proses sosialisasi ini dilakukan oleh seluruh anggota pengurus, yang menunjukkan komitmen terhadap terlaksananya strategi transformasi BRI "*from Good to Great*" untuk tahun 2018 hingga 2022.

## LAPORAN DIREKTUR UTAMA

Transformasi tersebut mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

- **CASA:** fokus pertumbuhan pendanaan yang bersumber dari dana murah atau CASA
- **Consumer Focus:** fokus pada perbaikan kualitas pelayanan nasabah dengan menyediakan layanan keuangan yang terintegrasi
- **Credit Excellence:** memperkuat kapabilitas Manajemen Risiko disemua segmen
- **Capabilities:** meningkatkan produktivitas *Human Capital* melalui optimalisasi teknologi digital dan *data analytic*
- **Culture:** membangun budaya kerja berbasis kinerja (*performance driven culture*)

### Meningkatkan Efisiensi dengan Mengoptimalkan Teknologi

Selain sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan, proses transformasi tersebut telah mulai dilakukan di tahun 2017 dengan digitalisasi bisnis proses prakarsa pinjaman Mikro komersial yang baru yang telah diujicobakan, yaitu BRISPOT.

BRISPOT menggunakan sistem berbasis Android dan koneksi melalui internet, sehingga memungkinkan putusan pinjaman untuk dilakukan di tempat. Dengan implementasi sistem BRISPOT tersebut, *turn-around-time* prakarsa pinjaman turun dari 3 (tiga) hari untuk pinjaman baru menjadi 2 (dua) hari, sedangkan untuk nasabah eksisting, pinjaman baru bisa diputus di hari yang sama. Kedepan, perbaikan disisi bisnis proses ini akan terus dilanjutkan dengan pengembangan disisi *credit scoring* dan diikuti pengembangan lainnya untuk segmen Bisnis Ritel.

Dengan kecepatan putusan pinjaman yang meningkat dan proses *administrative (back-office)* yang berkurang, diharapkan produktivitas *Human Capital* akan meningkat. Selama tahun 2017, BRI tidak melakukan penambahan pegawai maupun Unit Kerja Operasional yang signifikan, sehingga produktivitas dari sisi laba per-pekerja naik dari Rp276 juta di tahun 2016 ke Rp306 juta di tahun 2017 atau naik 10,9% YoY. Selain itu, dari sisi *employee engagement*, 71,9% pekerja BRI menyatakan *engaged* dan 90% pekerja menyatakan puas bekerja di BRI. Kedepan, BRI akan mempertahankan strategi untuk memaksimalkan produktivitas dengan mengoptimalkan teknologi digital dan kemampuan *data analytics*.

### Menjaga Komitmen dalam Mendukung Perekonomian Bangsa

Komitmen BRI dalam membangun perekonomian bangsa tidak perlu diragukan lagi. Selama tahun 2017, BRI telah menyalurkan pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) sebesar Rp69,4 triliun, yang saat ini dinikmati oleh 5,1 juta nasabah. Pinjaman KUR tersebut turut mendukung strategi pemerintah dalam memberdayakan usaha mikro dan kecil, dimana 40% penyaluran KUR di tahun 2017 ditujukan untuk usaha produktif.

BRI juga turut mendukung program pemerintah dibidang penyaluran subsidi non-tunai melalui berbagai program seperti Kartu Tani, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar dan Tabungan Pelajar. Kontribusi BRI dalam keterlibatan program pemerintah tersebut juga memberikan imbal balik yang positif terhadap kinerja seperti terlihat dari peningkatan pertumbuhan total dana Tabungan BRI.

Selain penyaluran program KUR dan subsidi non-tunai, BRI juga terus mempercepat proses *financial inclusion* untuk segmen *un-banked* dengan mengakselerasi akuisisi agen BRILink (*Branchless Banking Agent*). Saat ini BRI memiliki 279.750 agen yang semuanya berasal dari nasabah Pinjaman ataupun Simpanan. Pemilihan agen sangat diperhatikan karena kualitas layanan agen merupakan representasi BRI dalam melayani nasabah, serta produktivitas agen akan turut menunjang kinerja keuangan BRI. Produktivitas agen BRILink ditunjukkan dari kenaikan nominal transaksi sebesar 114,2% YoY dari Rp139,1 triliun di tahun 2016 menjadi Rp298,0 triliun di tahun 2017. Kedepan, optimalisasi agen BRILink ini diharapkan akan terus mendorong efisiensi operasional BRI sehingga akan menunjang profitabilitas yang berkelanjutan.

### Kinerja Perusahaan Anak

BRI memandang perusahaan anak sebagai salah satu pilar penggerak pertumbuhan perusahaan. Pada tahun 2017, BRI fokus mengembangkan bisnis perusahaan anak guna menciptakan sinergi dalam mewujudkan Grup BRI sebagai *Integrated Financial Services*. Komitmen BRI dalam mengembangkan bisnis perusahaan anak juga ditunjukkan dengan penambahan modal sebesar Rp873,23 miliar pada Juli 2017.



Ikhtisar Kinerja Utama

▶ Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisa &amp; Pembahasan Manajemen

## LAPORAN DIREKTUR UTAMA

Sinergi bisnis dengan perusahaan anak diciptakan melalui kerja sama baik dalam program pembiayaan, pemasaran maupun optimalisasi infrastruktur, jaringan kerja dan *Human Capital*. Sinergi tersebut menghasilkan kenaikan kontribusi Laba anak perusahaan terhadap kinerja perusahaan secara konsolidasi, yaitu mencapai 2,0% dari tahun sebelumnya sebesar 1,8%.

Kinerja yang baik ditunjukkan oleh BRI Life dengan pertumbuhan laba sebesar 53% YoY, mencapai Rp327,7 miliar dengan tingkat *Risk Based Capital* (RBC) mencapai 301,15% dan ROE 17,30%. Sementara itu, BRI Finance yang baru bergabung pada tahun 2016 juga menunjukkan perbaikan kinerja yang ditunjukkan dengan penurunan *Non Performing Finance* (NPF) menjadi 4,24% dari tahun sebelumnya sebesar 9,90% dan pencapaian Laba Bersih setelah pajak sebesar Rp51,07 miliar. Sedangkan di bisnis perbankan konvensional, BRI Agro menyumbang laba konsolidasi sebesar Rp140,5 miliar.

### Pengembangan Bisnis Perbankan Syariah

Kinerja perusahaan anak yang bergerak di industri perbankan syariah yaitu BRI Syariah menunjukkan kinerja yang positif dengan peningkatan aset sebesar 13,9% YoY mencapai Rp31,5 triliun dan laba sebesar Rp105,2 miliar. Namun pencapaian kinerja yang baik tersebut tidak lepas dari tantangan yang dihadapi. Kinerja BRI Syariah masih mengalami tekanan pada kualitas kredit, sehingga BRI Syariah memilih untuk fokus pada pertumbuhan yang selektif dan perbaikan kualitas kredit.

### Realisasi Target

Secara umum, target-target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2017 mampu dicapai dengan baik melalui peningkatan kinerja pertumbuhan laba bersih setelah pajak sebesar 10,5% serta diiringi dengan pencapaian target *Non Performing Loan* sebesar 2,1%.

### Perbandingan Hasil yang Dicapai dengan yang Ditargetkan (Angka Bank Saja)

Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Pencapaian	Keterangan
<i>Outstanding Pinjaman</i>	715.294	708.001	99,0%	Dibawah target
LDR	90,88%	88,13%	103,1%	Melampaui target
Marjin Bunga Bersih (NIM)	7,85%	7,9%	101,0%	Melampaui target
CER	43,24%	41,2%	105,0%	Melampaui target
NPL Gross	2,11%	2,1%	100,5%	Melampaui target
Laba Bersih Setelah Pajak	27.755	28.469	102,6%	Melampaui target

Pada tahun 2017, BRI berhasil mencapai laba bersih sebesar Rp28,5 triliun, atau 102,6% dibandingkan target 2017 sebesar Rp27,8 triliun. Keberhasilan ini terutama ditunjang oleh terjaganya tingkat marjin bunga bersih, peningkatan efisiensi operasional, dan terjaganya pertumbuhan pendapatan non-bunga.

Terjaganya marjin bunga bersih terutama didorong oleh penurunan biaya dana dari 3,83% di 2016 menjadi 3,27% di 2017 atau turun 56bps seiring dengan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 50bps pada bulan Agustus dan September lalu. Selain itu, komponen *asset yield* juga terbantu oleh perubahan komposisi pinjaman ke arah Mikro dan Ritel.

Peningkatan efisiensi yang dicapai di tahun 2017 terutama didorong oleh turunnya pertumbuhan beban operasional lainnya yang hanya mencapai 9,9% YoY, jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan rata-rata (CAGR) 3 (tiga) tahun sebesar 17,4%. Hal ini dikarenakan selama tahun 2017, BRI tidak agresif dalam melakukan penambahan Unit Kerja Operasional

## LAPORAN DIREKTUR UTAMA

yang sejalan dengan strategi BRI untuk mengoptimalkan peran teknologi digital dalam mempercepat dan mempermudah operasional perbankan.

Disisi pendapatan non-bunga, BRI berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 12,1% YoY atau mencapai Rp18,7 triliun. Pertumbuhan ini disebabkan oleh naiknya rasio *recovery rate* dari 52,8% di tahun 2016 menjadi 53,1% di tahun 2017. Kenaikan *recovery rate* tersebut terutama disumbang oleh peningkatan *recovery income* di segmen Mikro yang didorong oleh keberhasilan program akselerasi peningkatan kinerja *recovery rate* di triwulan 4 tahun 2017.

### Kendala yang Dihadapi

Pertumbuhan pinjaman tercapai sedikit dibawah target yang disebabkan oleh strategi jangka panjang BRI untuk tidak agresif di segmen Korporasi serta lemahnya permintaan kredit, terutama kredit investasi. Lemahnya permintaan kredit investasi disebabkan oleh nasabah Korporasi yang cenderung untuk mengakses langsung sumber pembiayaan pasar modal seiring dengan perbaikan *credit rating* Indonesia.

Hal ini ditunjukkan dari peningkatan pembiayaan melalui pasar keuangan, seperti penerbitan saham, obligasi, dan *medium term notes (MTN)*, yang tumbuh tinggi hingga mencapai 29,7% (*yoy*) per November 2017. Kedepan, dengan membaiknya kondisi perekonomian, baik global maupun domestik, alternatif pembiayaan akan semakin beragam sehingga menciptakan tantangan bagi industri perbankan.

### Prospek Usaha

Sejalan dengan membaiknya ekonomi domestik yang didukung oleh berlanjutnya pemulihan ekonomi global serta tingkat *loan to GDP* Indonesia yang dibawah 40%, prospek Bisnis UMKM di Indonesia masih cukup besar. Sehingga BRI meyakini bahwa prospek bisnis perbankan di tahun 2018 akan membaik.

Rangkaian peristiwa yang akan berlangsung di Indonesia di tahun 2018, diantaranya Pilkada di daerah Jawa, Asian Games, dan World Bank Annual Meetings juga berpotensi meningkatkan permintaan kredit modal kerja. Namun permintaan kredit konsumsi diperkirakan

masih akan dibayangi dengan kondisi *wait-and-see* dari nasabah segmen ekonomi menengah.

Menyambut potensi tersebut, BRI terus melakukan persiapan untuk menjadi "*Leading MSME and Operational Excellence Through Digital Banking*" di tahun 2018. Untuk itu, BRI fokus dalam mengembangkan digitalisasi bisnis proses kredit serta layanan berbasis teknologi digital lainnya, baik di segmen Ritel maupun Korporasi.

Strategi pengembangan bisnis di tahun 2018 masih akan dititikberatkan kepada segmen Bisnis Mikro dan Ritel dengan optimalisasi pemasaran pada produk unggulan seperti Kupedes, Briguna dan KPR. Optimisme tersebut didukung oleh kebijakan ekonomi Pemerintah terkait pengembangan sektor usaha Mikro seperti terlihat dari peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh BRI dari Rp69 triliun di tahun 2017, menjadi Rp79 triliun di tahun 2018.

Fokus penyaluran kredit terutama di segmen Konsumer dan Mikro tersebut diharapkan akan diimbangi dengan kemampuan BRI dalam menjaga pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui strategi pemasaran yang efektif untuk produk unggulan Simpedes dan Britama. Peningkatan porsi APBN untuk subsidi non-energi dan pos transfer dana ke daerah, juga diharapkan akan menyumbang pertumbuhan Simpanan di segmen Mikro seperti yang terlihat pada 2 (dua) tahun terakhir.

### Pengelolaan Human Capital

Dalam menjaga keberlangsungan bisnis, *Human Capital* berperan penting pada proses eksekusi strategi dan pencapaian target perusahaan. Oleh karena itu, BRI berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan kapabilitas pekerja dengan memasukkan faktor *Capabilities* dan *Culture* sebagai bagian dari area transformasi BRI "*from Good to Great*" di tahun 2018-2022.

BRI menitikberatkan pengelolaan *Human Capital* pada tahun 2017 di beberapa area dalam rangka mempersiapkan *milestone* menuju "*Home to The Best Talent*". Ruang lingkup penyempurnaan kebijakan *Human Capital* ini meliputi sistem manajemen kinerja (SMK), sistem penerimaan pekerja, tunjangan berbasis kinerja, dan revitalisasi budaya kerja.



Ikhtisar Kinerja Utama

▶ Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisa &amp; Pembahasan Manajemen

## LAPORAN DIREKTUR UTAMA

### Peningkatan Produktivitas yang Diiringi dengan Perbaikan Struktur Kompensasi

Pada tahun 2017, total jumlah pekerja BRI yang terdiri dari pekerja tetap (termasuk pekerja dalam masa percobaan), pekerja *trainee* dan pekerja kontrak, mencapai 92.858 orang, dengan produktivitas pekerja yang meningkat. Hal ini menunjukkan dari kenaikan laba per pekerja yang tumbuh dari Rp276 juta ditahun 2016 menjadi Rp306 juta ditahun 2017 atau naik 10,9% YoY. Peningkatan ini merupakan hasil dari komitmen BRI dalam meningkatkan produktivitas pekerja dengan memaksimalkan teknologi.

Di tahun ini, BRI juga menyusun kembali struktur kompensasi dan *benefit* pada tenaga pemasar Mikro yang merupakan ujung tombak eksekusi strategi bisnis BRI yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Selain itu, perbaikan struktur *benefit* juga dilakukan dengan meningkatkan program asuransi kesehatan pensiun pekerja.

### Penyempurnaan Kebijakan *Talent Management*

Pada tahun 2017, BRI telah menyempurnakan Kebijakan *Talent Management* yang dijadikan sebagai dasar fondasi mekanisme *Succession Plan*. Dengan mekanisme *succession plan* yang baik, pengisian jabatan kunci (*key jobs*) diharapkan dapat lebih efektif dan efisien.

Penyusunan kebijakan *talent management* tersebut diikuti dengan penyempurnaan KPI (*Key Performance Indicator*) dalam sistem BSC (*Balanced Scorecard*) yang telah diimplementasikan sejak 2016. Perbaikan yang dilakukan meliputi penambahan dan perubahan parameter agar lebih mudah dinilai secara kuantitatif, sehingga penilaian kinerja dapat dilakukan dengan lebih akurat.

### Menjaga Integritas dengan Meningkatkan *Awareness* mengenai Anti-Fraud Dan Anti-Gratifikasi

Untuk menanamkan *mindset* integritas kepada seluruh pekerja, BRI telah menggagas beberapa ketentuan seperti strategi *antifraud* dan *know your employee*. BRI berusaha meminimalkan risiko terjadinya *fraud* dengan cara menumbuhkan budaya *antifraud awareness* kepada setiap pekerja sesuai dengan Nota Dinas Divisi Kepatuhan nomor B.132.e-DKP/BNP/05/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang *Antifraud Awareness*. Sosialisasi

strategi *antifraud* telah dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan Forum Peningkatan Kinerja (FPK) selama tahun 2017, yang diatur dalam Surat Divisi KHC No. B.61.e-KPS/HBI/02/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang, pedoman pelaksanaan FPK.

BRI juga memanfaatkan *channel Digital Office* untuk mengkampanyekan komitmen manajemen dalam menindak tegas setiap bentuk *fraud* (*zero tolerance*). Kampanye yang dilakukan berupa ajakan kepada Seluruh Pekerja BRI untuk menjadi *whistleblower*; larangan pemberian dan/atau penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun bagi seluruh pekerja; serta informasi layanan pelaporan Unit Pengendalian Gratifikasi BRI (UPG BRI).

### Pengelolaan Teknologi Informasi

Tidak dapat dipungkiri bahwa interaksi nasabah dengan industri perbankan akan berubah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan gaya hidup. Oleh karena itu, pengelolaan dan tata kelola teknologi menjadi aspek yang semakin penting dalam industri perbankan.

### Pengembangan Bisnis *Digital Banking*

Melalui perubahan susunan Direksi di tahun 2017, BRI menambahkan organisasi baru yang membidangi *Digital Banking* untuk menjawab tantangan pertumbuhan bisnis di era digital sebagai *trend* baru di industri keuangan. Kehadiran *fintech* dipandang akan melengkapi pengembangan bisnis *digital banking* ini. Kondisi tersebut menjadi acuan dalam menetapkan 6 pilar pengembangan *digital banking*, yakni *New Way of Working*, *Fintech Partnership*, *Mobile First Strategy*, *Open API*, *ChatBot* dan *Innovation Ecosystem*.

Pada tahun pertama bisnis *digital banking*, BRI masih fokus pada rekrutmen *talents* serta penyusunan strategi jangka panjang. Namun demikian, BRI juga menyelesaikan beberapa pengembangan bisnis proses, produk maupun layanan dalam *pipeline*, antara lain: *New Internet Banking*. *New Internet Banking* merupakan versi baru dari *internet banking* saat ini. Pengembangan *new internet banking* tersebut dilakukan dengan konsep MADP (*Mobile Application Development Platform*) yang lebih dinamis untuk meningkatkan kepuasan nasabah dan penggunaan *internet banking* oleh nasabah.

## LAPORAN DIREKTUR UTAMA

**Mendukung Program *Financial Inclusion* melalui Teknologi**

Selain mengembangkan sistem pendukung bisnis, BRI juga mengembangkan sistem pendukung layanan umum maupun program pemerintah, seperti Sistem Pajak Online, Sistem Penyaluran Bantuan Sosial, Sistem SIM Online dan e-Tilang. BRI juga mengembangkan layanan BRILink berbasis internet yang dapat di unduh secara mandiri untuk pengguna Android, dengan harapan pengembangan layanan laku pandai dapat dilakukan dengan lebih cepat, fleksible dan murah.

**Pembaharuan infrastruktur TI**

Pada 2017, BRI juga melakukan *review* proses dan pembaharuan infrastruktur TI untuk meningkatkan kinerja operasional dalam mencapai kepuasan nasabah dan mendukung strategi bisnis *Digital Banking*. Untuk itu, BRI melakukan beberapa inisiatif pengembangan *platform* teknologi yang *future ready* dengan memperhatikan faktor-faktor seperti teknologi yang terdepan, kemudahan, kenyamanan, sekaligus keamanan informasi.

**Tata Kelola Teknologi Informasi**

Semakin pesatnya penggunaan teknologi di era digital pada layanan bisnis perbankan turut meningkatkan tingkat risiko operasional, sehingga diperlukan tata kelola dan manajemen risiko yang efektif. Kebijakan tata kelola IT tertuang dalam Surat Keputusan Direksi BRI No: S.874-DIR/PPT/10/2017 tentang Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi BRI, yang digunakan sebagai pedoman dan kontrol bagi seluruh Satuan Kerja Teknologi Informasi untuk melaksanakan penatakelolaan dan pengendalian risiko penggunaan IT di BRI.

**Perkembangan Tata Kelola Perusahaan**

Sebagai perusahaan terbuka, BRI wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) pada setiap kegiatan usaha. Untuk itu, BRI terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan GCG pada disetiap lini bisnis. BRI juga telah melakukan *assessment* sesuai dengan ketentuan OJK dan meyakini bahwa disiplin atas penerapan GCG merupakan fondasi utama dalam membangun kinerja bisnis yang berkelanjutan.

Sepanjang 2017, BRI telah menerapkan tata kelola perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan tata Kelola Bagi Bank Umum.

Hasil penilaian *self assessment* GCG BRI pada semester I 2017 adalah Peringkat 2 yang mencerminkan bahwa BRI telah menerapkan GCG dan telah memenuhi semua prinsip-prinsip Tata Kelola. Komitmen BRI dalam menerapkan GCG diwujudkan dalam:

- Visi dan Misi yang menggambarkan tujuan usaha masa mendatang dan cara pencapaiannya.
- Nilai-nilai perusahaan dan *corporate culture* yang sesuai dengan Visi, Misi serta perkembangan dan tantangan dunia usaha.
- Kode Etik sebagai pedoman tentang etika usaha, etika bekerja dan tata perilaku insan BRI, termasuk interaksi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*).
- Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris sebagai acuan dalam pengelolaan dan pengawasan jalannya perusahaan.
- Perjanjian Kerja Bersama sebagai hasil perundingan dan kesepakatan antara BRI dengan serikat pekerja BRI, yang kemudian menjadi pedoman kedua belah pihak dalam melaksanakan hubungan kerja dan sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan hubungan kerja.
- Kebijakan pengendalian gratifikasi, serta dibentuknya unit pengendali gratifikasi.
- Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagai komitmen BRI terkait tanggung jawab sosial perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi BRI sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

***Whistleblowing System***

Pada 2017, BRI menerbitkan kebijakan internal yang baru untuk mendukung Tata Kelola melalui Surat Edaran Direksi BRI NOSE:S.27-DIR/DKP/12/2016 tentang *Whistleblowing System* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi



Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisa &amp; Pembahasan Manajemen

## LAPORAN DIREKTUR UTAMA

BRI No:03-KOM/BRI/03/2017 dan Nokep:S.11-DIR/DKP/03/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Dalam rangka menerapkan program pengendalian gratifikasi, BRI bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk dukungan untuk membangun nilai-nilai GCG dan menanamkan *value integrity* kepada seluruh Insan BRI. Pengendalian Gratifikasi dilakukan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi BRI (UPG BRI) yang dibentuk pada Juli 2017. UPG BRI bertanggungjawab untuk menerima, memproses dan melaporkan Laporan Gratifikasi pekerja BRI ke KPK serta melakukan internalisasi budaya anti korupsi dan anti gratifikasi di lingkungan BRI.

Pada tahun 2017, BRI memperoleh penghargaan *Top 50 The Biggest Market Capitalization PLCs in Indonesia & The Best Overall Asean CG Scorecard* dalam *The 9th IICD Corporate Governance Award 2017* atas komitmen terhadap penerapan dan pengembangan GCG. BRI juga mendapatkan penghargaan *Indonesia Most Trusted Company 2017* dalam *Corporate Governance Perception Index Award 2017*. Penghargaan-penghargaan tersebut memperkuat reputasi BRI sebagai entitas perbankan yang sehat.

### Implementasi Tata Kelola Terintegrasi

BRI memiliki Komite Tata Kelola Terintegrasi di level Dewan Komisaris yang beranggotakan Dewan Komisaris BRI, Dewan Komisaris BRI Agro, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BRI Syariah, Dewan Komisaris BRI Life dan Dewan Komisaris BRI Finance. Di bawah komite tersebut, implementasi tata kelola terintegrasi dimonitor langsung oleh Direktur Kepatuhan melalui evaluasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Audit Intern Terintegrasi.

### Penilaian Kinerja Komite Dibawah Direksi

Sejalan dengan praktik GCG, pelaksanaan tugas direksi dibantu oleh komite-komite sesuai dengan ketentuan OJK. Pembentukan komite ini disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis. Pada Tahun 2017, BRI memiliki tambahan komite baru dibawah Direksi

yaitu Komite Pengadaan Barang dan Jasa. Komite ini memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan evaluasi dan memberi keputusan atas permohonan pelaksanaan dan hasil dari suatu pengadaan dengan nilai tertentu. Direksi menilai, sepanjang 2017, komite-komite tersebut telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki.

### Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dalam menjalankan bisnis, BRI senantiasa memiliki komitmen untuk peduli pada lingkungan sekitar. Selama 2017, program BRI Peduli telah menyalurkan dana CSR sebesar Rp150,35 miliar, meningkat 13,3% dibandingkan Rp132,71 miliar pada 2016. Pelaksanaan program CSR antara lain ditujukan kepada sektor pendidikan, kesehatan, pelestarian alam, peningkatan sarana umum, peningkatan sarana dan kegiatan ibadah, bencana alam, dan bantuan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan.

### Perubahan Komposisi Direksi dan Komisaris

Perubahan komposisi Direksi di tahun 2017 terjadi pada RUPS Tahunan (RUPST) di tanggal 15 Maret 2017 dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) di tanggal 18 Oktober 2017. RUPST telah menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan untuk posisi Komisaris Utama, Komisaris Independen, Direktur Utama dan Direktur Operasional. RUPSLB menyetujui perubahan Komisaris, penghapusan posisi Wakil Direktur Utama, perubahan Direktur Konsumer dan perubahan Direktur Human Capital.

Posisi Direktur Utama yang di tempati oleh Sdr. Asmawi Syam digantikan oleh saya sendiri, Suprajarto. Kemudian, Sdr. Zulfelfi Abidin sebagai Direktur Operasional digantikan oleh Sdr. Indra Utoyo yang selanjutnya menjadi Direktur Digital Banking dan Teknologi Informasi. Pada jajaran Dewan Komisaris, Rapat telah menyetujui perubahan untuk posisi Komisaris utama yang awalnya dipegang oleh Sdr. Mustafa Abubakar, digantikan oleh Sdr. Andrinof A. Chaniago. Selanjutnya pada posisi Komisaris Independen, Sdr. Ahmad Fuad digantikan oleh Sdr. Nicolaus Teguh Budi Harjanto.

## LAPORAN DIREKTUR UTAMA

Perubahan susunan Direksi pada RUPSLB memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Sdr. Sunarso dari posisi Wakil Direktur Utama kemudian menghapuskan posisi tersebut dari susunan kepengurusan. RUPSLB ini juga mengangkat Sdri. Handayani sebagai Direktur Konsumer menggantikan Sdr. Randi Anto, dan menunjuk Sdri. R. Sophia Alizsa sebagai Direktur Human Capital. Selanjutnya, RUPSLB menunjuk Sdri. Rofikoh Rokhim sebagai Komisaris menggantikan posisi Sdr. Adhyaksa Dault.

### Apresiasi

Atas nama Direksi, saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pekerja dan keluarga BRI yang telah bekerja keras dan mampu menjaga kepercayaan yang diberikan, berkomitmen dan menunjukkan kerjasama yang harmonis sehingga BRI mampu meraih kinerja yang baik di tahun 2017.

Kepada Dewan Komisaris, kami sampaikan ucapan terima kasih atas arahan dan nasehat yang diberikan. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada nasabah, mitra usaha dan pemegang saham, maupun segenap pemangku kepentingan lainnya. Kedepan, BRI akan terus berupaya untuk menunjukkan kinerja yang sebaik-baiknya dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. BRI akan terus melayani kebutuhan perbankan masyarakat Indonesia dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Jakarta, 26 Februari 2018  
Atas Nama Direksi



Suprajarto  
Direktur Utama



Ikhtisar Kinerja Utama

▶ Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisa & Pembahasan Manajemen

## DIREKSI



.01 **SUPRAJARTO**  
**Direktur Utama**

.02 **HARU KOESMAHARGYO**  
**Direktur Strategi Bisnis & Keuangan**

.03 **SUSY LIESTIOWATY**  
**Direktur Kepatuhan**

.04 **DONSUWAN SIMATUPANG**  
**Direktur Manajemen Risiko**

.05 **MOHAMMAD IRFAN**  
**Direktur Jaringan dan Layanan**

.06 **KUSWIYOTO**  
**Direktur Kredit Menengah, Korporasi & BUMN**

## DIREKSI



.07 SIS APIK WIJAYANTO  
Direktur Kelembagaan

.08 PRIYASTOMO  
Direktur Kredit Mikro  
dan Ritel

.09 INDRA UTOYO  
Direktur Digital Banking  
& Teknologi Informasi

.10 R. SOPHIA ALIZSA  
Direktur Human Capital

.11 HANDAYANI  
Direktur Konsumer



# SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2017 PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2017 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.  
Jakarta, 26 Februari 2018

## DEWAN KOMISARIS

ANDRINOF A. CHANIAGO  
**Komisaris Utama/Komisaris Independen**

GATOT TRIHARGO  
**Wakil Komisaris Utama**

AHMAD FUAD RAHMANY  
**Komisaris Independen**

A. SONNY KERAF  
**Komisaris Independen**

MAHMUD  
**Komisaris Independen**

ROFIKOH ROKHIM  
**Komisaris Independen**

VINCENTIUS SONNY LOHO  
**Komisaris**

JEFFRY J. WURANGIAN  
**Komisaris**

NICOLAUS TEGUH BUDI HARJANTO  
**Komisaris**

## SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2017 PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2017 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.  
Jakarta, 26 Februari 2018

### DIREKSI



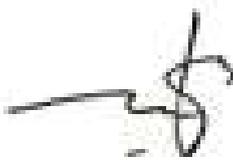
SUPRAJARTO  
Direktur Utama



HARU KOESMAHARGYO  
Direktur Strategi Bisnis  
& Keuangan



SUSY LIESTIWATY  
Direktur Kepatuhan



MOHAMMAD IRFAN  
Direktur Jaringan & Layanan



DONSUWAN SIMATUPANG  
Direktur Manajemen Risiko



KUSWIYOTO  
Direktur Kredit Menengah,  
Korporasi & BUMN



PRIYASTOMO  
Direktur Kredit Mikro & Ritel



SIS APIK WIJAYANTO  
Direktur Kelembagaan



INDRA UTOYO  
Direktur Digital Banking  
& Teknologi Informasi



R. SOPHIA ALIZSA\*  
Direktur Human Capital



HANDAYANI\*  
Direktur Konsumer



BRI Mobile adalah aplikasi yang mengintegrasikan beberapa aplikasi e-banking BRI yang dapat diakses oleh Nasabah Bank BRI melalui smartphone. Aplikasi yang terdapat dalam BRI Mobile di antaranya adalah Mobile Banking BRI, Internet Banking BRI, Call BRI, serta Info BRI. BRI Mobile memberikan berbagai manfaat lebih bagi Nasabah Bank BRI diantaranya lebih fleksibel dan dapat digunakan dimana pun Nasabah berada.



# PROFIL PERUSAHAAN

- 68 Identitas Perseroan
- 70 Logo BRI
- 72 Riwayat Singkat BRI
- 74 Bidang Usaha
- 76 Produk dan Jasa
- 80 Wilayah Operasional
- 82 Jejak Langkah
- 84 Struktur Organisasi
- 86 Visi, Misi dan Nilai-Nilai Utama
- 88 Budaya Perusahaan
- 90 Profil Dewan Komisaris
- 95 Profil Direksi
- 101 Profil Senior Executive Vice President (SEVP)
- 104 Demografi Karyawan
- 107 Komposisi Pemegang Saham
- 110 Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi
- 111 Struktur Perusahaan
- 112 Kronologi Pencatatan Saham
- 117 Kronologi Penerbitan Efek Lain
- 119 Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang
- 120 Penghargaan dan Sertifikasi
- 125 Peringkat BRI
- 126 Alamat Kantor dan/atau Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan
- 128 Perusahaan Anak
- 129 Informasi pada Website Perusahaan
- 130 Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal



## IDENTITAS PERSEROAN



Melayani Dengan Setulus Hati

NAMA PERUSAHAAN  
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk



BIDANG USAHA  
Perbankan



DASAR HUKUM  
PENDIRIAN  
Undang-Undang No 21  
Tahun 1968

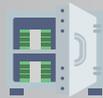


SEGMENT USAHA

- Perbankan Mikro
- Perbankan Ritel
- Perbankan Menengah dan Korporasi



TANGGAL PENDIRIAN  
16 Desember 1895



MODAL DITEMPATKAN DAN  
DISETOR PENUH

Rp6.167.290.500.000



MODAL DASAR

Rp15.000.000.000.000



JUMLAH KARYAWAN

92.858

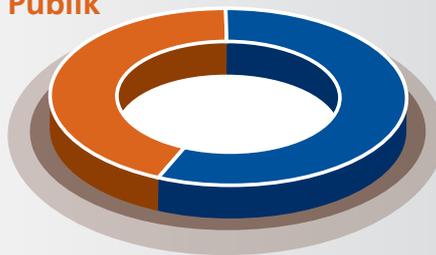
## IDENTITAS PERSEROAN



## JARINGAN

- 1 Kantor Pusat
- 19 Kantor Wilayah
- 1 Kantor Cabang Khusus
- 467 Kantor Cabang
- 610 Kantor Cabang Pembantu
- 5.382 BRI Unit
- 992 Kantor Kas
- 2.536 Teras BRI
- 638 Teras BRI Keliling

43,25%  
Publik



56,75%  
Pemerintah  
Indonesia

KOMPOSISI  
PEMEGANG SAHAM

- Pemerintah Indonesia  
56,75%
- Publik  
43,25%



## BURSA EFEK

Saham Perseroan telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 10 November 2003.



## KODE SAHAM

**BBRI**



## KANTOR PUSAT

Gedung BRI I  
Jl Jend Sudirman Kav 44-46  
Jakarta 10210  
No. Tel. : ( 62-21 ) 251-0244, 251-0254,  
251-0264, 251-0269, 251-0279  
No. Fax : (62-21) 250-0077  
Website : www.bri.co.id

SEKRETARIAT  
PERUSAHAAN

Corporate Secretary Division  
Gedung BRI 1, 20th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta 10210  
Email : humas@bri.co.id

Call center  
Tel. : (021) 5751966  
Fax. : (021) 5700916



## LOGO BRI



LOGO BRI



DIREKSI BANK RAKYAT INDONESIA MELALUI SURAT KEPUTUSAN  
NO.S.3-DIR/2/1985 TANGGAL 28 FEBRUARI 1985 MENETAPKAN  
BERLAKUNYA LOGO BANK RAKYAT INDONESIA.

Bentuk segi empat sama sisi dengan garis sudut lengkung. Empat sisi yang sama menandakan keseimbangan dengan garis legkung yang artinya dinamis/fleksibel dalam menyikapi perkembangan zaman.

Bold huruf BRI dengan huruf capital menandakan ketegasan.

Garis, bentuk dan pewarnaan (bold) secara tegas, sederhana serta terukur dengan maksud untuk menghadirkan kesan-kesan yang merupakan cerminan dari sistem manajemen yang baik, kemudahan-kemudahan maupun keamanan yang tercermin secara imajinatif pada logotype tersebut.

Ungkapan bentuk secara totalitas yang sederhana diharapkan mempercepat proses pengenalan dan mudah untuk diingat.

Bentuk dan pewarnaan secara tegas dan teratur diharapkan akan mampu menampilkan suatu kesan lembaga yang modern dan profesional, sehingga tercermin ciri dunia perbankan yang mementingkan

ketelitian dan ketepatan. Ini berkaitan dengan kesan management modern dalam suatu kegiatan usaha nasional yang mempunyai wawasan internasional dan berlandaskan semangat pembaharuan.

Garis, bentuk dan pewarnaan ditampilkan secara lugas untuk memberi kesan sederhana tetapi mantap dengan harapan mampu mencerminkan salah satu misi BRI sebagai bagian terdepan dalam mengemban kebijaksanaan pemerintah dalam memenuhi pelayanan perbankan bagi seluruh lapisan masyarakat dari yang paling kecil dan terpencil sampai yang besar di kota-kota.

Warna biru melambangkan rasa nyaman, tenang, dan menyejukkan. Sebagai perusahaan yang fokus pada pelayanan jasa keuangan, BRI bertekad dapat memberikan kenyamanan tersebut dengan menyediakan berbagai layanan yang aman, fasilitas yang canggih dan lengkap, serta jaringan terluas untuk para nasabah.



## RIWAYAT SINGKAT BRI

### Perubahan Nama Bank Rakyat Indonesia



Perjalanan bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI", "Bank", atau "Perseroan") dimulai pada tahun 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wiriatmaja yang awalnya mengelola dana kas masjid untuk disalurkan kepada masyarakat dengan skema yang sederhana. Sepanjang sejarah, berbagai nama telah melekat pada BRI, mulai dari De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Indlandsche Hoofden, Hulp en Spaarbank der Indlandsche Bestuurs Ambtenareen, Syomin Ginko, sampai akhirnya resmi ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia sejak 18 Desember 1968 berdasarkan UU No. 21 tahun 1968.

Pada tahun 1992, BRI berubah status hukum menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, kini Bursa Efek Indonesia pada 10 November 2003, dengan kode saham BBRI. Pada tahun 2007, BRI mengambil langkah strategis dengan mengakuisisi Bank Jasa Artha (BJA), yang kemudian dikonversi menjadi PT Bank BRISyariah. Unit Usaha Syariah milik BRI kemudian dipisahkan dari BRI dan digabungkan ke dalam PT Bank BRISyariah (BRI Syariah) pada 1 Januari 2009 dan kemudian pada tanggal 3 Maret 2011 BRI mengakuisisi saham PT Agro Niaga Tbk dari Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun).

Sejak awal berdiri, BRI konsisten fokus pada segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta menjadi pelopor microfinance di Indonesia. Komitmen

ini tetap dijaga sampai saat ini dan dengan dukungan pengalaman memberikan layanan perbankan terutama di segmen UMKM, BRI mampu mencatat prestasi sebagai bank dengan laba terbesar selama 13 tahun berturut-turut. Keberhasilan ini adalah buah kerja keras seluruh insan BRI yang tak pernah berhenti berinovasi dan terus mengembangkan produk dan layanan perbankan bagi semua segmen bisnis.

Dengan berinovasi, BRI mampu merespon setiap perkembangan yang terjadi di masyarakat dan dunia bisnis. Salah satunya adalah perkembangan teknologi. BRI menjadi yang pertama dalam menyediakan layanan self-service banking di Indonesia melalui BRI Hybrid Banking pada tahun 2013.

Layanan perbankan berbasis teknologi juga dibawa BRI sampai ke pelosok negeri, bahkan sampai ke pulau-pulau kecil Nusantara. Di tahun 2015, BRI meluncurkan Teras BRI Kapal, layanan perbankan pertama di dunia yang ada di atas laut. Lalu, di tahun 2016, sejarah baru kembali terukir. Pada 18 Juni 2016 pukul 18.38 waktu Kourou, Guyana Prancis, BRI meluncurkan BRIsat. Ini menjadikan BRI bank pertama di dunia yang memiliki dan mengoperasikan satelit sendiri.

Pengadaan satelit ini adalah bagian dari rencana strategis BRI untuk memperkuat infrastruktur penunjang layanan digital masa depan, yang bisa membawa teknologi perbankan berkualitas dari pusat kota sampai ke pelosok.

## RIWAYAT SINGKAT BRI



Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah, BRI meningkatkan jumlah mesin ATM hingga 24.684 unit, jumlah mesin EDC sebanyak 302.921 unit, serta jumlah mesin CRM sebanyak 1.992 unit. Jaringan e-channel yang tersebar di seluruh Indonesia tersebut menjadi bukti konsistensi BRI dalam menjangkau yang tidak terjangkau.

Perluasan jaringan juga terus dilakukan. Untuk memperkuat eksistensi bisnis di kancah global, BRI membuka unit kerja di luar negeri. Di tahun 2015 BRI membuka kantor di Singapura. Sebelumnya telah berdiri unit kerja di beberapa negara lain seperti BRI New York Agency, BRI Cayman Island Branch, Hong Kong Representative Office, dan BRI Remittance Hong Kong.

Untuk menjawab perkembangan pasar dan keragaman kebutuhan masyarakat akan produk dan layanan perbankan, BRI mengelaborasi segmen bisnisnya menjadi: Bisnis Mikro dan Program, Bisnis Ritel, Bisnis Korporasi, Bisnis Internasional, Treasury dan Jasa Penunjang Pasar Modal, serta Perusahaan Anak yang fokus kepada bisnis Perbankan Syariah, Agribisnis, Remittance, Asuransi dan Pembiayaan.

Elaborasi di segmen asuransi dan pembiayaan kian terlihat pada tahun 2015, BRI menambah anggota baru yang bergerak di bidang asuransi dengan mengakuisisi PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Bringin Life) dan disusul pada tahun 2016 BRI menambah penyertaan saham pada PT BTMU- BRI Finance dari 45% menjadi

99% sehingga BRI menjadi pemegang saham pengendali. Dengan selesainya proses tersebut, PT BTMU BRI Finance kemudian berganti nama menjadi PT BRI Multifinance Indonesia.

Setiap langkah korporasi dan rencana kerja yang dijalankan adalah bagian dari upaya memberikan layanan perbankan yang lengkap bagi para nasabah, terutama sektor UMKM. Setelah kehadiran BRIsat, BRI dapat memaksimalkan layanan digital banking. Berbagai inisiatif digital bagi UMKM mulai beroperasi di tahun 2016, mulai dari pembangunan Teras BRI Digital, pengembangan e-Pasar, sampai pembukaan co-working space. Hal tersebut berlanjut pada tahun 2017 dengan meluncurkan Indonesia Mall dan mengadakan Cowork Festival. Semua inisiatif untuk UMKM dilakukan untuk menciptakan UMKM yang unggul di era ekonomi digital.

Selain itu pada tahun 2017 BRI membuka Unit Kerja Luar Negeri di Timor Leste. BRI juga resmi meluncurkan Teras BRI Kapal Bahtera Seva II dan Teras BRI Kapal Bahtera Seva III untuk menjangkau masyarakat pesisir di kepulauan Labuan Bajo dan Halmahera. Selain itu, pada tahun 2017 BRI mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan pada tanggal 18 Oktober 2017 yang telah menyetujui pemecahan nilai nominal saham (stock split) dari semula Rp250 per saham menjadi Rp50 per saham (Rasio 1:5) dan mulai diperdagangkan pada perayaan 14 Tahun Saham BRI melantai dibursa yakni tanggal 10 November 2017.



## BIDANG USAHA



Kegiatan usaha BRI berdasarkan Akta Perubahan terakhir No. 81 tanggal 23 April 2015 Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Surat Keputusan No. AHU- AH.01.03-0926947 tanggal 23 April 2015, Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar BRI adalah:

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang Perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut:
  - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  - b. Memberikan kredit;
  - c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
  - d. Membeli, menjual atau menjaminkan atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;

## BIDANG USAHA

- Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan selaku Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
  - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
  - Kertas perbendaharaan negara dan Surat Jaminan Pemerintah;
  - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - Obligasi;
  - Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;
- k. Membeli melalui pelelangan atau dengan cara lain agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya -kepada Perseroan selaku Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli --tersebut dapat dicairkan secepatnya;
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan -oleh yang berwenang;
- n. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- p. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan ketentuan otoritas yang berwenang;
- q. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- r. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



# PRODUK DAN JASA

## PRODUK SIMPANAN

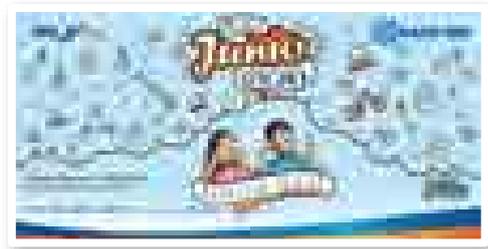
### Tabungan BritAma

Tabungan BRI BritAma dilengkapi fasilitas e-banking yang akan memudahkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun, serta fasilitas perlindungan asuransi kecelakaan diri (personal accident) cuma-cuma. Tabungan BRI BritAma memiliki berbagai jenis varian yaitu BritAma Bisnis, BritAma Rencana, BritAmaX, serta BritAma Valas dengan pilihan mata uang USD, SGD, AUD, EUR, CNY, AED, HKD, GBP, JPY dan SAR.



### Tabungan BRI Junio & Junio Rencana

Tabungan BRI Junio diperuntukkan bagi anak-anak dengan tujuan untuk mendorong budaya menabung serta memperkenalkan produk dan layanan Bank sejak dini. Tabungan BRI Junio dilengkapi dengan fasilitas e-banking, fitur perencanaan keuangan (Junio Rencana), asuransi kecelakaan diri bagi anak serta Kartu Debit desain khusus yang menarik.



### Simpedes

Tabungan Simpedes merupakan produk tabungan BRI yang dirancang untuk masyarakat pedesaan, namun dilengkapi dengan fitur-fitur modern seperti kartu ATM yang dapat digunakan pada jaringan bank lain dalam negeri, serta didukung oleh layanan 24 jam dari Internet Banking dan Mobile Banking. Tersedia juga varian dari Simpedes seperti Simpedes TKI, Simpedes Umum, Simpedes Impian dan Simpedes Kredit Pangan. Selain itu Bank BRI memiliki produk simpanan lainnya yaitu :

1. Tabunganku
2. SimPel (Simpanan Pelajar)
3. Tabungan Haji
4. Deposito BRI (Rupiah dan Valas)
5. Giro BRI (Rupiah dan Valas)



## PRODUK DAN JASA

## PRODUK PINJAMAN

## Kredit Mikro

## Kupedes

Kupedes merupakan kredit usaha dan kredit konsumtif untuk badan usaha mikro maupun perorangan yang memenuhi persyaratan, dengan plafon sampai dengan Rp200 juta.

## KUR Mikro

KUR Mikro merupakan fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha mikro pemula dengan plafon sampai dengan 25 juta rupiah.



## Kredit Konsumer

- Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)
- Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)
- Kartu Kredit

## Kredit Ritel Komersial

- Kredit Agunan Kas
- Kredit Investasi (KI)
- Kredit Modal Kerja (KMK)
- KMK Ekspor
- KMK Konstruksi
- KMK Konstruksi BO-I
- Kredit Waralaba
- Kredit SPBU
- Kredit Resi Gudang
- Kredit Pemilikan Gudang
- KMK Talangan SPBU
- Kredit Pre-Financing
- Kredit Post-Financing
- Distributor Financing
- KMK Dinamis

## Kredit Program

- Resi Gudang (Subsidi & Komersial)
- KUR Ritel BRI
- KUR TKI BRI
- KUR Tanaman Keras

Kredit Menengah/  
Korporasi

- Kredit Modal Kerja (KMK)
- Kredit Modal Kerja Ekspor (KMK-E)
- Kredit Modal Kerja Impor (KMK-I)
- Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-K)
- Kredit Investasi (KI)
- Kredit Sindikasi

## BRIGuna

Kredit multiguna yang ditujukan kepada segmen berpenghasilan tetap. BRIGuna menyediakan 3 jenis produk pilihan, yaitu BRIGuna Karya, untuk karyawan aktif yang masih memiliki penghasilan tetap, kemudian BRIGuna Umum, yaitu kredit yang diberikan sejak pegawai tetap hingga masa pensiun, sedangkan BRIGuna Purna, yaitu kredit yang diperuntukkan bagi pensiunan.





## PRODUK DAN JASA

### JASA

#### Cash Management System

Layanan CMS BRI memungkinkan nasabah korporasi melakukan monitoring dan transaksi keuangan perusahaan secara langsung melalui fasilitas online. Juga menyediakan fasilitas *national pooling*, *added value service* dari GiroBRI untuk nasabah grup korporasi, yang menyediakan saldo terkonsolidasi serta memungkinkan anggota grup melakukan *borrowing* berdasarkan saldo konsolidasi yang diperjanjikan, serta fasilitas *corporate virtual account* berupa layanan tambahan virtual account yang memudahkan nasabah dalam melakukan identifikasi transaksi penerimaan dan pengeluaran secara terintegrasi dengan sistem ERP (*Enterprise Resource Planning*), serta berbagai layanan *cash management* lainnya.



#### Jasa Kelembagaan

- SIM (Surat Izin Mengemudi) - Online
- MPN GII (Modul Penerimaan Negara Generasi II)
- E-Tax (Electronic Tax)
- Hospital Online
- SPP-Online Mahasiswa
- Visa on Arrival (VoA)
- Layanan terkait Nasabah Instansi Kerja Sama (NIK)
- Layanan terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Layanan terkait Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN)
- Kartu Identitas Multifungsi (KIM)
- KTA Elektronik
- SIM Online
- E-Samsat
- E-Tilang (Tilang Online)
- PDAM Online
- BPJS-TK Service Point Office

#### Jasa Bisnis dan Keuangan

- Bank Garansi
- Bank Kliring
- Bill Payment
- Penerimaan Setoran
- Transaksi Online
- Transfer LLG (Lalu Lintas Giro) dan RTGS (Real Time Gross Settlement)

#### E-Banking

- ATM BRI
- Mobile Banking BRI
- Phone Banking BRI
- Internet Banking BRI
- Mini ATM BRI
- BRIZZI (Electronic Money BRI)



## PRODUK DAN JASA

### Jasa Layanan Bisnis Internasional

- Layanan Impor
- Penerbitan Letter of Credit (LC)
- Penerbitan Amendment LC
- Fasilitas Kredit Impor
- Pre-Impor Financing (Penangguhan Jaminan Impor)
- Post-Impor Financing (KMKI & Trust Receipt)
- Layanan Ekspor
- Advising LC
- LC Confirmation
- Jasa Penagihan Ekspor
- Outward Documentary Collection
- Outward Clean Collection
- Pre-Shipment Financing (KMKE)
- Post-Shipment Financing
- Negosiasi Wesel Ekspor
- Diskonto Wesel Ekspor Berjangka
- Rediskonto Wesel Ekspor Berjangka
- Refinancing LC
- Risk Participation
- Banker Acceptance
- USD Local Settlement
- Guarantee (Standby LC)
- Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
- Bill Purchase Financing
- Money Changer

### BRIfast Remittance

BRIfast Remittance adalah layanan remittance BRI untuk melayani pengiriman uang ke luar negeri maupun penerimaan uang dari luar negeri ke Indonesia. Layanan Remittance BRI meliputi fitur *outgoing remittance* ke 144 *currency* di seluruh dunia, fitur *incoming remittance credit to BRI account* (kiriman masuk ke rekening BRI) dan *credit to other bank account* (kiriman masuk ditujukan ke rekening bank lain), serta fitur *incoming remittance cash pick-up* (kiriman masuk tanpa rekening diambil tunai) yang dapat dicairkan di ± 11.000 unit kerja BRI serta ± 279.750 agen BRILink BRI di seluruh Indonesia secara *real time online*.

### BRI Prioritas

Layanan *Wealth Management* dari BRI untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kekayaan dan perencanaan keuangan dari nasabah terpilih BRI. Dengan konsep *one stop financial solution* dalam mengelola keuangan nasabah yang didukung tenaga pemasar yang profesional dan tersertifikasi, layanan *Wealth Management* BRI menawarkan antara lain produk Reksa Dana, Obligasi Negara Ritel, Sukuk Ritel, *Saving Bond* Ritel, Sukuk Tabungan, DPLK, dan produk-produk Bancassurance.

### Jasa Layanan Treasury

- Transaksi Valuta Asing/ Foreign Exchange
- Transaksi Swap
- Transaksi Forward
- Jasa Wali Amanat
- Jasa Agen Penjual Efek
- Jasa Kustodian
- Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI (DPLKBRI)





## WILAYAH OPERASIONAL



### Wilayah Operasi, Jaringan Kantor dan E-Channel

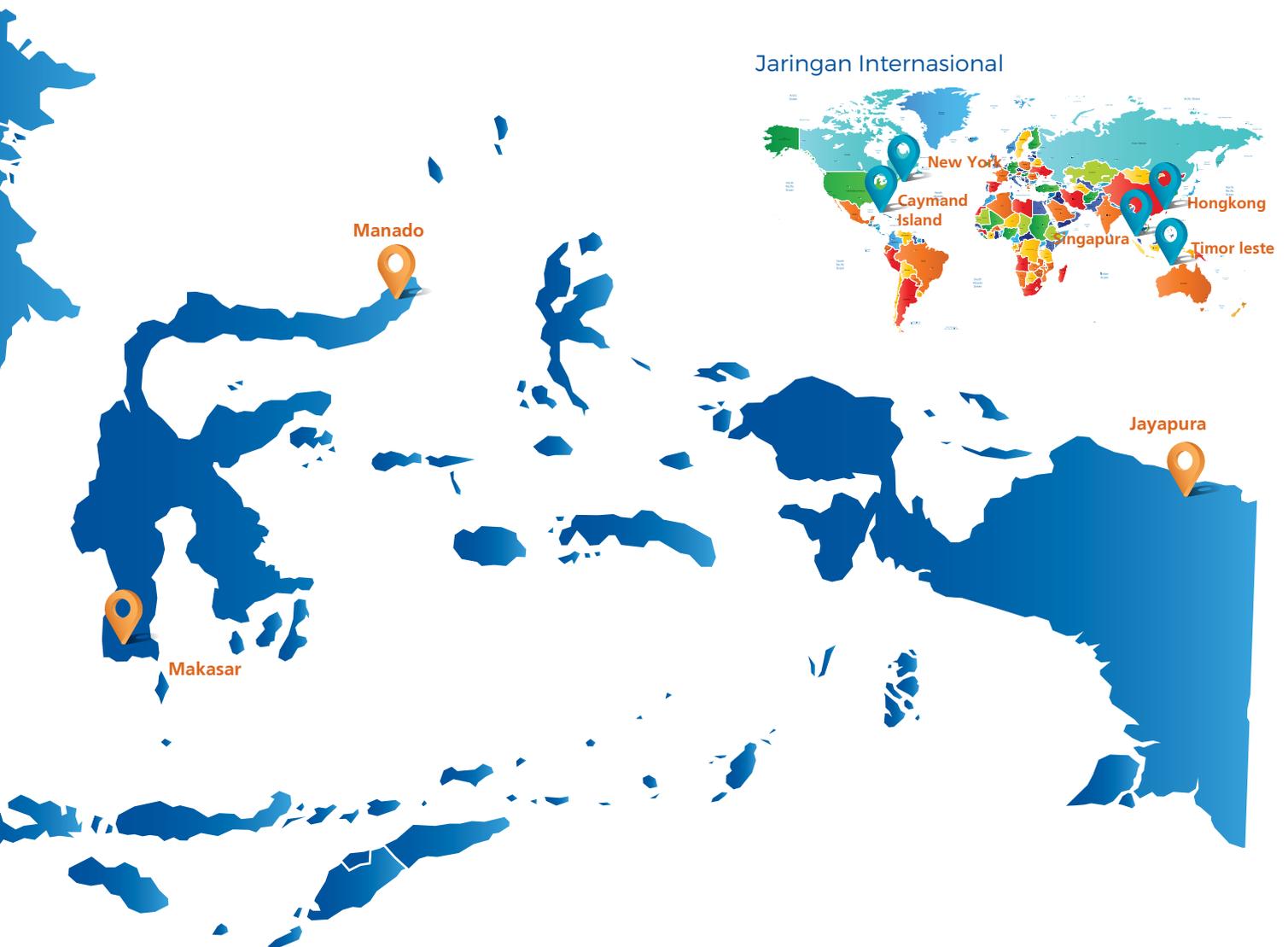
#### Jaringan Kantor Wilayah Indonesia

Saat ini BRI melayani seluruh nasabah melalui lebih dari 11.284 unit kerja dan 329.654 jaringan e-channel yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

BRI mengoperasikan 8 jenjang kantor pelayanan, terdiri dari Kantor Pusat, 19 Kantor Wilayah, 1 Kantor Cabang Khusus, 467 Kantor Cabang (termasuk 5 Unit Kerja Luar Negeri), 610 Kantor Cabang Pembantu, 992 Kantor Kas, 5.382 BRI Unit, 2.536 Teras BRI dan 638 Teras BRI Keliling.

E-Channel	2013	2014	2015	2016	2017	YoY
ATM	18.292	20.792	22.792	24.292	24.684	392
EDC	85.936	131.204	187.758	257.712	302.921	45.209
CRM	192	392	892	1.392	1.992	600
E-Buzz	50	55	57	57	57	-
<b>Total</b>	<b>104.470</b>	<b>152.443</b>	<b>211.499</b>	<b>283.453</b>	<b>329.654</b>	<b>46.201</b>

## WILAYAH OPERASIONAL

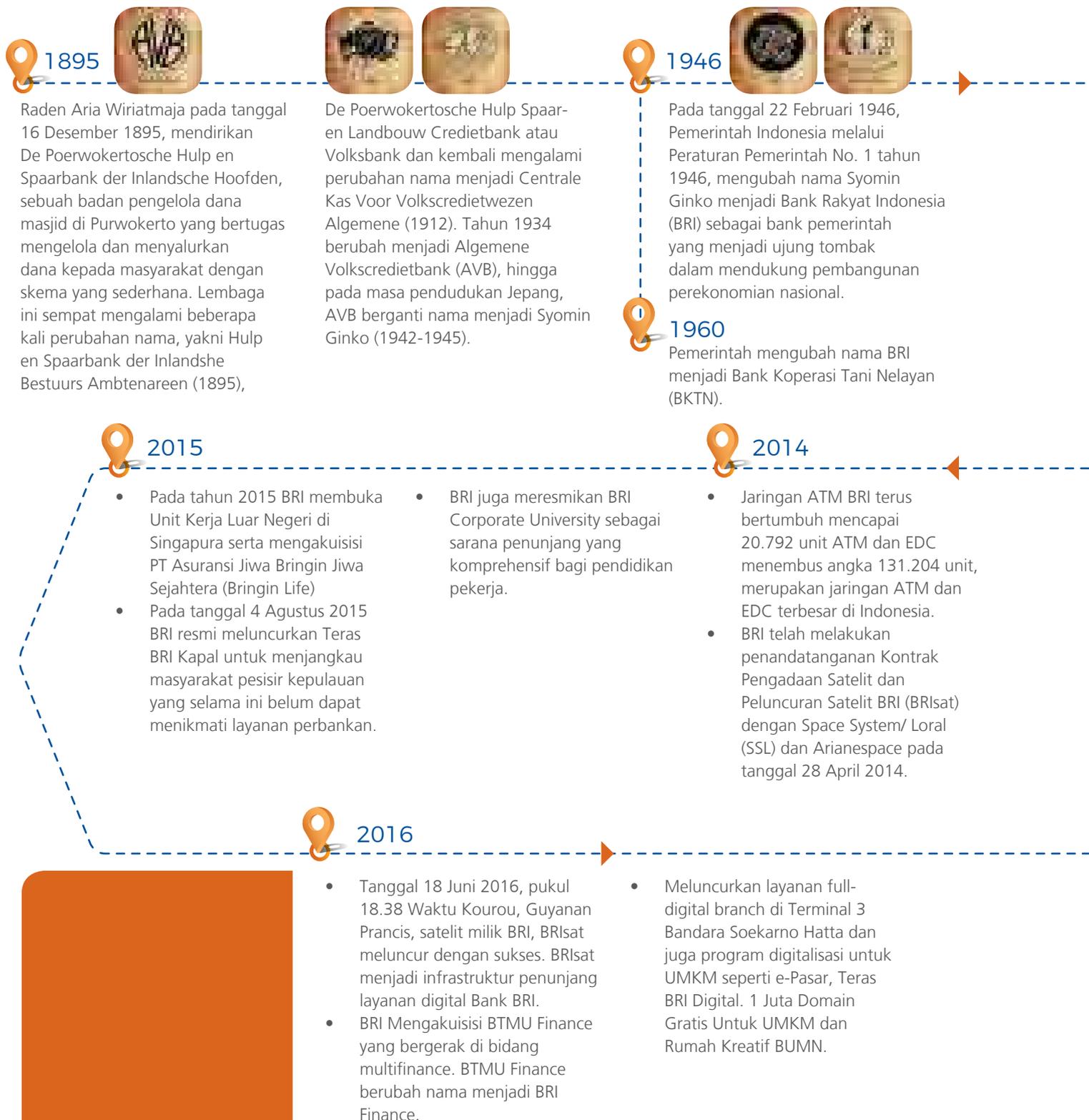


Outlet	2013	2014	2015	2016	2017
Kantor Pusat	1	1	1	1	1
Kantor Wilayah	18	19	19	19	19
Kantor Cabang Khusus	1	1	1	1	1
Kantor Cabang	452	460	466	466	467
Kantor Cabang Pembantu	565	584	603	609	610
BRI Unit	5.144	5.293	5.360	5.380	5.382
Kantor Kas	950	971	983	984	992
Teras BRI	2.206	2.457	2.543	2.545	2.536
Teras BRI Keliling	465	610	636	638	638
<b>Jumlah Unit Kerja Operasional</b>	<b>9.802</b>	<b>10.396</b>	<b>10.612</b>	<b>10.643</b>	<b>10.646</b>

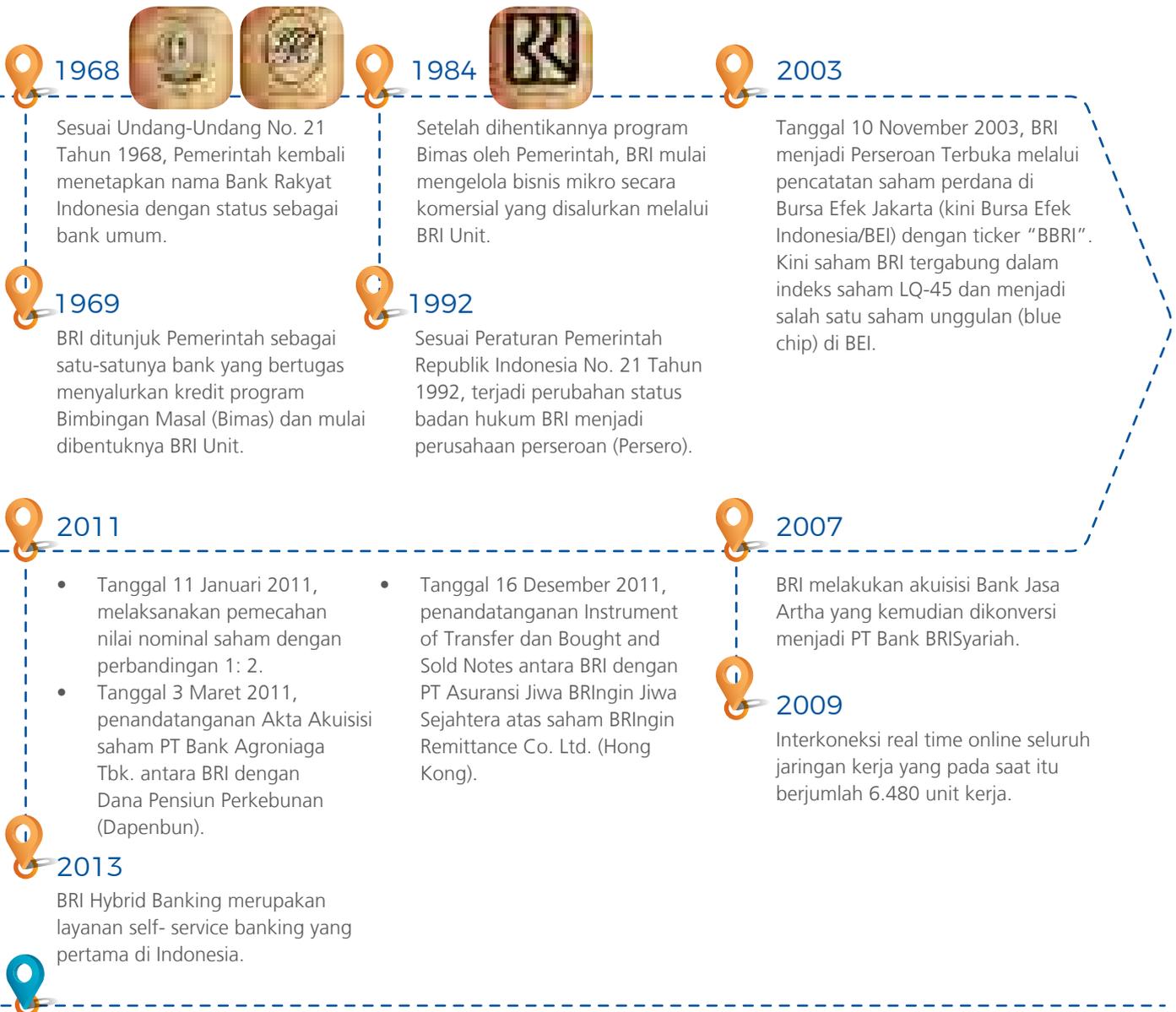
Total Unit Kerja termasuk 5 Unit Kerja Luar Negeri (UKLN)



## JEJAK LANGKAH



## JEJAK LANGKAH





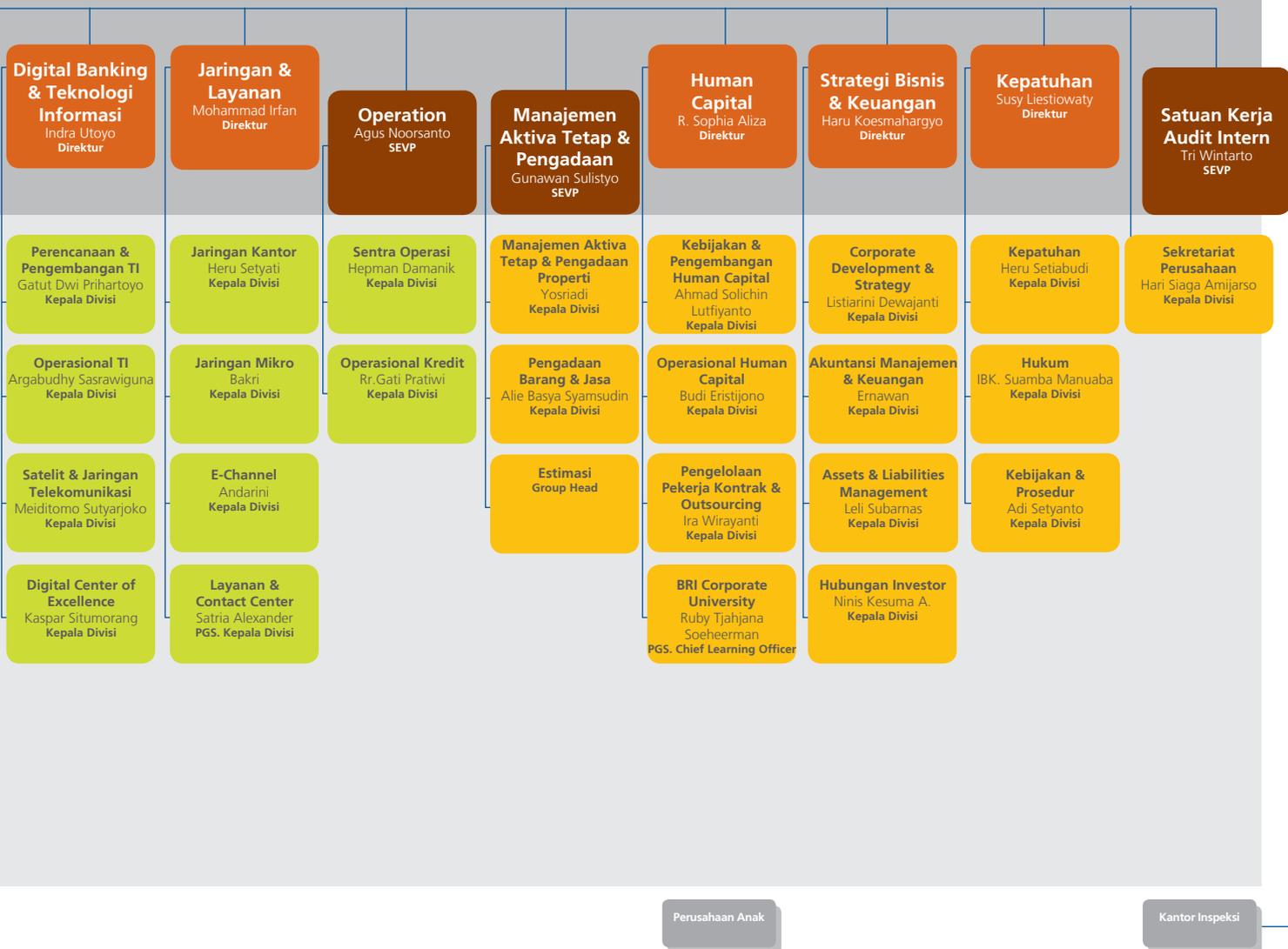
# STRUKTUR ORGANISASI



STRUKTUR ORGANISASI

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama/Independen : Andrinof A. Chaniago  
Wakil Komisaris Utama : Gatot Trihargo  
Komisaris Independen : Ahmad Fuad Rahmany  
A. Sonny Keraf  
Mahmud  
Rofikoh Rokhim  
Komisaris : Vincentius Sonny Loho  
Jeffry J. Wurangian  
Nicolaus Teguh Budi Harjanto



Komite Dewan Komisaris:  
Audit, Nominasi & Remunerasi, Pemantauan Manajemen Risiko, Tata Kelola Terintegrasi

Komite Direksi:  
Manajemen Risiko, Kebijakan Kredit, Kredit, ALCO, Kebijakan HC, TI, Capital & Investment



## VISI, MISI DAN NILAI-NILAI UTAMA

Di tahun 2017, Perseroan telah menetapkan tujuan dalam 5-tahun ke depan yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (Corporate Plan) yaitu menjadi The Most Valuable Bank In Southeast Asia dan Home to The Best Talent pada tahun 2022. Strategi ini, baik strategi jangka pendek maupun menengah, diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi baru BRI, sebagai berikut:

### VISI

Menjadi The Most Valuable Bank di Asia Tenggara & Home to The Best Talent

### MISI

1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada nasabah melalui:
  - a. Sumber Daya Manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja (*performance-driven culture*)
  - b. Teknologi informasi yang handal dan *future ready*
  - c. Jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip operasional dan *risk management excellence*.
3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik *Good Corporate Governance* yang sangat baik.

### Persetujuan Visi dan Misi

Visi & Misi BRI telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan NOKEP. 403-DIR/CDS/05/2017 tanggal 16 Mei 2017.

## VISI, MISI DAN NILAI-NILAI UTAMA

## NILAI-NILAI UTAMA



## Integrity

*Integrity* yang memiliki makna senantiasa berpikir, berkata, dan berperilaku terpuji, menjaga kehormatan, serta taat aturan. Perilaku yang menunjukkan nilai *integrity* adalah terbuka, jujur, dan tulus serta patuh terhadap peraturan



## Innovation

*Innovation* yang memiliki makna senantiasa mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menemukan solusi dan gagasan baru untuk menghasilkan produk/ kebijakan dalam menjawab tantangan permasalahan Perseroan. Perilaku yang menunjukkan nilai *innovation* adalah *visioner* dan pionir perubahan



## Professionalism

*Professionalism* yang memiliki makna senantiasa berkomitmen bekerja tuntas dan akurat dengan kemampuan terbaik dan penuh tanggung jawab. Perilaku yang menunjukkan nilai *professionalism* adalah *continous learner* dan *fairness*



## Customer Centric

*Customer Centric* yang memiliki makna senantiasa menjadikan pelanggan sebagai mitra utama yang saling menguntungkan untuk tumbuh secara berkesinambungan. Perilaku yang menunjukkan nilai *customer centric* adalah melayani lebih dari ekspektasi nasabah dengan setulus hati dan *collaborative*



## Trust

*Trust* yang memiliki makna senantiasa membangun keyakinan dan saling percaya di antara para pemangku kepentingan demi kemajuan Perseroan. Perilaku yang menunjukkan nilai *trust* adalah saling menghargai dan mengutamakan kepentingan Perseroan dan Negeri



Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

**Profil Perusahaan**

Analisa &amp; Pembahasan Manajemen

# BUDAYA PERUSAHAAN



Budaya BRI yakni BRILIAN, 10 Sikap Perilaku, 20 Indikator Perilaku dan 20 Tindakan Budaya Kerja menunjukkan komitmen dan tekad BRI untuk menjadikan BRI sebagai bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah dan terdepan dalam membangun ekonomi bangsa.

## 10 (Sepuluh) Sikap Perilaku Insan BRI



## 20 (Dua Puluh) Indikator Perilaku

## 20 (Dua Puluh) Tindakan Budaya Kerja



BRILian (BRI dengan Lima Nilai) meliputi nilai-nilai pokok yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. INTEGRITY
2. PROFESSIONALISM
3. TRUST
4. INNOVATION
5. CUSTOMER CENTRIC



10 (Sepuluh) Sikap Perilaku Insan BRI adalah sikap dan perilaku setiap insan BRI yang mencerminkan nilai-nilai pokok Budaya Kerja BRI (BRILian)

1. Jujur, dapat dipercaya dan taat pada aturan
2. Selalu menjaga kehormatan, dan nama baik pribadi dan perusahaan
3. Handal, prudent, disiplin dan bertanggung jawab.
4. Berorientasi ke masa depan.
5. Sebagai panutan dan berjiwa besar.
6. Tegas dalam menindaklanjuti adanya penyimpangan.
7. Memberikan pelayanan yang terbaik dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan.
8. Terampil, ramah, senang melayani
9. Memperlakukan pekerja secara terbuka, adil, saling menghargai.
10. Mengembangkan sikap kerja sama dalam menciptakan sinergi untuk kepentingan perusahaan.

## BUDAYA PERUSAHAAN

20 (dua puluh) Indikator Perilaku adalah parameter yang digunakan untuk mengukur implementasi sikap dan perilaku insan BRI yang mencerminkan nilai-nilai pokok Budaya Kerja

1. Mengutamakan kepentingan Perusahaan.
2. Mendorong dan menghargai keberanian menyampaikan apa adanya, termasuk penyimpangan.
3. Menepati janji dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
4. Senantiasa menggunakan etika dalam bekerja.
5. Melaksanakan tugas dengan hati-hati, sesuai ketentuan dan menerima konsekuensinya.
6. Menggunakan sumber daya secara optimal.
7. Selalu meningkatkan kemampuan kompetensi.
8. Berani mencoba gagasan baru dan cara-cara kerja yang lebih baik.
9. Selalu memberikan keteladanan yang baik di lingkungan kerja maupun masyarakat.
10. Mau menerima kritik saran untuk kebaikan.
11. Selalu bertindak tanpa pilih kasih.
12. Yakin dan berani mengambil keputusan yang benar.
13. Memahami dan memenuhi kebutuhan nasabah.
14. Melayani dengan cepat, tepat, akurat dengan tetap sopan santun.
15. Memberikan solusi terbaik untuk nasabah dengan senang hati.
16. Bertindak konsisten dan menjaga mutu layanan dengan memperhatikan kepentingan nasabah.
17. Bertindak objektif berdasarkan sikap, perilaku, dan prestasi dalam mempertahankan dan mengembangkan Pekerja.
18. Saling menghormati antar sesama, atasan dan bawahan.
19. Memberikan penghargaan kepada individu/kelompok berprestasi.
20. Melakukan koordinasi dan kerja sama untuk meningkatkan prestasi dan kontribusi pada Perusahaan.

Selanjutnya terdapat juga 20 (dua puluh) tindakan Budaya Kerja yang merupakan faktor keberhasilan awal (*early success factor*) dalam implementasi Budaya Kerja BRI

1. Berdoa bersama setiap pagi hari.
2. Selalu tepat waktu dalam memenuhi perjanjian (jam kantor, rapat, pertemuan bisnis, penyampaian laporan).
3. Jujur dalam melaksanakan presensi.
4. Tidak merokok di dalam kantor.
5. Menggunakan telepon, komputer dan fasilitas dinas lainnya hanya untuk keperluan dinas.
6. Menggunakan fasilitas kantor secara efektif dan efisien.
7. Menggunakan jam kerja seoptimal mungkin dan beristirahat sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Membantu bawahan dan rekan sekerja apabila yang bersangkutan menghadapi kesulitan.
9. Menyelenggarakan dialog secara berkala dengan staf dan bawahan untuk berbagi informasi & memotivasi.
10. Menanggapi dan menyelesaikan komplain pada kesempatan pertama sesuai dengan kewenangannya.
11. Ramah (senyum & sapa) dalam memberikan pelayanan kepada nasabah (internal & eksternal).
12. Menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kerja (tempat kerja, mushola, gudang, toilet).
13. Memberikan penghargaan secara langsung kepada yang berhasil dengan baik dalam kinerja maupun perilaku (penghargaan tidak harus dalam bentuk finansial).
14. Meningkatkan kepedulian dan pemahaman untuk dapat mengenali dan mengendalikan risiko.
15. Meningkatkan kepedulian terhadap keberadaan dan kondisi sarana penunjang layanan.
16. Meningkatkan pengetahuan tentang produk-produk BRI dan perbankan pada umumnya.
17. Menjaga perilaku & penampilan sebagai bankir profesional sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
18. Memahami dan memenuhi kebutuhan nasabah baik internal dan eksternal.
19. Mengembangkan kompetensi untuk mendukung tuntutan organisasi dan persaingan.
20. Berkoordinasi secara efektif dan efisien dengan pihak internal dan eksternal.



Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisa &amp; Pembahasan Manajemen

## PROFIL DEWAN KOMISARIS



.01

ANDRINOF A. CHANIAGO

**Komisaris Utama/Komisaris Independen**

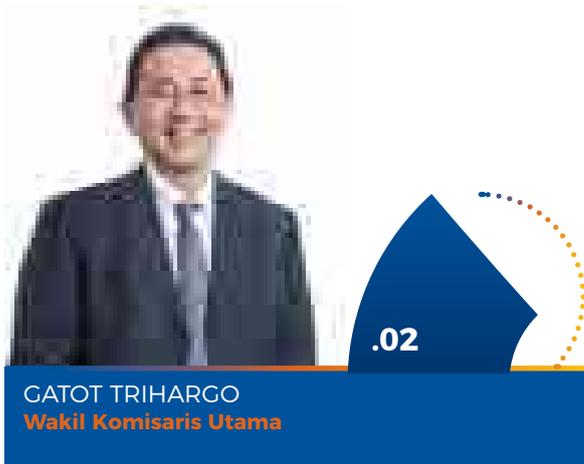
55 tahun, Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Meraih Gelar Master Perencanaan dan Kebijakan Publik dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2004), Gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Indonesia (1990), dan Gelar Diploma dari Fu Hsing Kang College, Taipei, Taiwan (2004).

Saat ini juga aktif sebagai Dosen Kebijakan Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama Angkasa Pura I (2015-2017), dan sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kabinet Kerja (2014-2015),

Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen BRI sejak tanggal 15 Maret 2017 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-123/PB.12/2017 tanggal 21 Juli 2017.

Beliau juga bertugas sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI.

## PROFIL DEWAN KOMISARIS

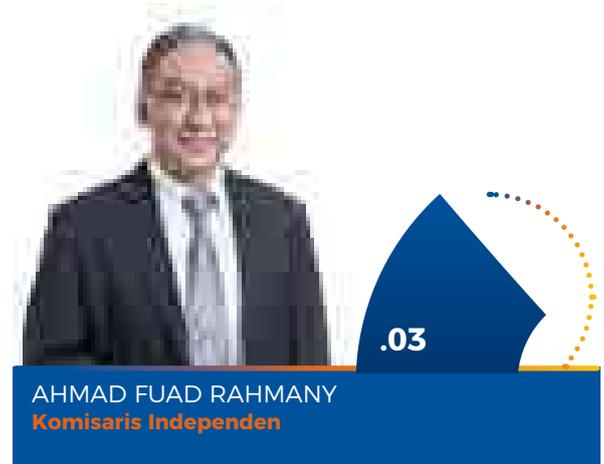


57 tahun, Warga Negara Indonesia berdomisili di Jakarta. Meraih Gelar Doktor Manajemen Strategi dari Universitas Padjajaran, Bandung (2016), Gelar Master Akuntansi dan Sistem Informasi Keuangan dari Cleveland State University, Ohio, Amerika Serikat (1993), Gelar Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1989).

Saat ini juga menjabat sebagai Deputy Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (2015-sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero) (2014-2015), Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (2013-2014), Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2008-2012), dan Komisaris PT Jiwasraya (Persero) (2007-2008).

Diangkat pertama kali sebagai Wakil Komisaris Utama BRI sejak tanggal 19 Maret 2015 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-99/D.03/2015 tanggal 1 Juni 2015.

Beliau juga bertugas sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI.



63 tahun, Warga Negara Indonesia berdomisili di Jakarta. Meraih Gelar Doktor Bidang Ekonomi dari Vanderbilt University, Tennessee, USA (1997), Gelar Master of Art Bidang Ekonomi dari Duke University, North Carolina, AS (1987) dan Gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta (1981).

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (2011-2014), Komisioner ex-officio Lembaga Penjamin Simpanan (2009-2014), Anggota Dewan Direktur Non Eksekutif, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (2013-2014), Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) (2006-2011), dan Komisaris PT Danareksa (Persero) Tbk (2001-2006).

Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen BRI sejak tanggal 19 Maret 2015 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-85/D.03/2015 tanggal 19 Mei 2015.

Beliau juga bertugas sebagai Ketua Komite Audit, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko BRI.



## PROFIL DEWAN KOMISARIS



**A. SONNY KERAF**  
**Komisaris Independen**

59 tahun, Warga Negara Indonesia berdomisili di Jakarta. Meraih Gelar Doktor dari The Higher Institute of Philosophy, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia (1995), Gelar Master Filsafat dari The Higher Institute of Philosophy, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia (1992), dan Gelar Sarjana Filsafat dari Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat Driyarkara (1988).

Saat ini menjabat sebagai Anggota Dewan Energi Nasional (2014-sekarang), Komisaris Independen PT. Gorontalo Sejahtera Mining (2016-sekarang), dan Dosen UNIKA Atmajaya (1988-sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Dosen Luar Biasa Program Pascasarjana S3, Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia (2001-2014), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2004-2009), dan Menteri Lingkungan Hidup (1999-2001).

Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen BRI sejak tanggal 19 Maret 2015 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-98/D.03/2015 tanggal 1 Juni 2015.

Beliau juga bertugas sebagai Anggota Komite Audit, dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BRI.



**MAHMUD**  
**Komisaris Independen**

59 tahun, Warga Negara Indonesia berdomisili di Jakarta. Meraih Gelar Magister Manajemen dari Universitas Padjajaran, Bandung (2003) dan Gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro, Semarang (1982).

Sebelumnya menjabat sebagai Advisor Senior, Grup Dukungan Strategis Dewan Komisioner, Otoritas Jasa Keuangan (2016). Kepala Departemen Pengawasan Bank I, Otoritas Jasa Keuangan (2013-2016), dan Kepala Departemen Pengawasan Bank I, Bank Indonesia (2013).

Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen BRI sejak tanggal 23 Maret 2016 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-40/PB.12/2017 tanggal 3 Maret 2017.

Beliau juga bertugas sebagai Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko, Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BRI.

## PROFIL DEWAN KOMISARIS



46 tahun, Warga Negara Indonesia berdomisili di Jakarta. Meraih Gelar Ph.D. bidang Ekonomi dari Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris (2005), D.E.A (M.Phil) dari Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris (2002), Master Specialist bidang Public Finance dari French Prime Minister, Institute International d' Administration Publique (IIAP)-Ecole National d' Administration (ENA) (2000), Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1990), dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (1993).

Saat ini aktif sebagai Dosen dan Peneliti di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Hotel Indonesia Natour (Persero) (2015-2017), Komite Pelayanan dan Komite Kepesertaan & Kinerja Organisasi dan SDM BPJS Ketenagakerjaan (2015-2017), Satgas Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal (2016-2017), Satgas Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (2014-2015), Komite Audit & Komite Risiko PT. POS Indonesia (2012-2015) dan Kepala Bisnis Indonesia Intelligence Unit (2008-2013).

Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen BRI sejak tanggal 18 Oktober 2017 berdasarkan Hasil RUPS Luar Biasa dan saat ini masih menunggu hasil lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.

Beliau juga bertugas sebagai Anggota Komite Audit, dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BRI.



60 tahun, Warga Negara Indonesia berdomisili di Jakarta. Meraih Gelar Magister Manajemen dan Kebijakan Publik, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Amerika Serikat (1998), dan Gelar Diploma 4 Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1987), dan Diploma 3 Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1980).

Saat ini menjabat sebagai Anggota Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2004-Sekarang). Pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (2015-2017), Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan (2011-2015), Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) (2014-2015), Komisaris PT Merpati Nusantara Airlines (2011-2012), dan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan (2008-2011).

Diangkat pertama kali sebagai Komisaris BRI sejak tanggal 28 Maret 2012 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 14/96/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 3 September 2012.

Beliau juga bertugas sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BRI.



## PROFIL DEWAN KOMISARIS



.08

**JEFFRY J. WURANGIAN**  
Komisaris

63 tahun, Warga Negara Indonesia berdomisili di Jakarta. Meraih Gelar Doktor Bidang Ekonomi dari Universitas Merdeka, Malang (2010), Gelar M.Sc., Agricultural Economics dari Oklahoma State University, Amerika Serikat (1999), Gelar Master Degree in Business Administration (MBA) dari European University, Belgia (1989) dan Gelar Sarjana Ekonomi Pembangunan dari Universitas Sam Ratulangi, Manado (1980).

Saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Kerjasama BUMN, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) (2016-sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Advisor Bisnis dan Investasi, Chairman CT Corp, Grup Bank Mega (2012-2015), Direktur Utama Bank Sulawesi Utara (2010-2012), Direktur Marketing Bank Sulawesi Utara (2008-2009), Direktur Umum Bank Sulawesi Utara (2007-2008), dan Direktur Operasional Bank Mitraniaga (1991-1992).

Diangkat pertama kali sebagai Komisaris BRI sejak tanggal 19 Maret 2015 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-137/D.03/2015 tanggal 3 Juli 2015.

Beliau juga bertugas sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BRI.



.09

**NICOLAUS TEGUH BUDI HARJANTO**  
Komisaris

45 tahun, Warga Negara Indonesia berdomisili di Jakarta. Meraih Gelar Doktor Ilmu Politik dari Northern Illinois University, USA (2010), Gelar Master Ilmu Politik dari Ohio University, Athens, Ohio, USA (2003), dan Gelar Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1996)

Saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi Politik dan Kelembagaan (2016-sekarang). Pernah menjabat sebagai Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (2016-2017), Dosen Universitas Paramadina Jakarta (2012-2017).

Diangkat pertama kali sebagai Komisaris BRI sejak tanggal 15 Maret 2017 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-123/PB.12/2017 tanggal 21 Juli 2017.

Beliau juga bertugas sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BRI.

## PROFIL DIREKSI



.01

**SUPRAJARTO**  
Direktur Utama

61 tahun, Warga Negara Indonesia berdomisili di Jakarta. Meraih Gelar Doktor Manajemen Bisnis, Universitas Padjajaran, Bandung, Gelar Master Manajemen Pemasaran, Universitas Padjajaran, Bandung, dan Gelar Sarjana Ekonomi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".

Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2015-2017), Direktur Bidang Jaringan dan Layanan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2007-2015), Pemimpin Wilayah Jakarta 1, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2006-2007), dan Kepala Divisi, Sekretariat Perusahaan Kantor Pusat, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2005-2006).

Diangkat pertama kali sebagai Direktur Utama BRI sejak tanggal 15 Maret 2017 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-70/PB.12/2017 tanggal 3 Mei 2017.



## PROFIL DIREKSI



50 tahun, Warga Negara Indonesia berdomisili di Jakarta. Meraih Gelar MBA, Investment Banking, Emory University, Amerika Serikat (2000), dan Sarjana Teknologi Industri Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang (1989).

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Strategi & Keuangan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017), Direktur Keuangan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2017), Presiden Komisaris, PT BTMU BRI Finance (2014-2015), Kepala Divisi Treasury, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2014-2015), dan General Manager, Kantor Cabang New York, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2011-2014).

Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 19 Maret 2015 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan berdasarkan Surat OJK No. SR-109/D.03/2015 tanggal 8 Juni 2015. Bertanggungjawab sebagai Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan.



56 tahun, Warga Negara Indonesia berdomisili di Jakarta. Meraih Gelar Doktor, Institut Pertanian Bogor (2011), Gelar MBA, Universitas Case Western Reserve, Amerika Serikat (1993), dan Gelar Sarjana Agronomi, Institut Pertanian Bogor (1983).

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko Kredit, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016-2017), Direktur Kepatuhan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2016), Komisaris, PT Bank BRI Agroniaga Tbk (2011-2015), Kepala Divisi Analisis Risiko Kredit, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2010-2015), Kepala Divisi Agribisnis, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2009-2010), dan Kepala Desk Bidang Investment Banking, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2006-2009).

Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 19 Maret 2015 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan berdasarkan Surat OJK No. SR-108/D.03/2015 tanggal 8 Juni 2015. Bertanggungjawab sebagai Direktur Kepatuhan.

## PROFIL DIREKSI



.04

**DONSUWAN SIMATUPANG**  
Direktur Manajemen Risiko

55 tahun, Warga Negara Indonesia berdomisili di Jakarta. Meraih Gelar MBA, Virginia Tech, Amerika Serikat (1993), dan Gelar Sarjana Ekonomi, Universitas Parahyangan, Bandung (1985).

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Mikro, Kecil & Menengah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017), Direktur Bisnis Komersial, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2017), Kepala Divisi Bisnis Umum, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2013-2015), Pemimpin Wilayah Surabaya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2012-2013), Pemimpin Wilayah Medan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2010-2012), dan Kepala Divisi Bisnis Ritel, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2008-2010).

Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 19 Maret 2015 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-101/D.03/2015 tanggal 1 Juni 2015. Bertanggungjawab sebagai Direktur Manajemen Risiko.



.05

**MOHAMMAD IRFAN**  
Direktur Jaringan dan Layanan

57 tahun, Warga Negara Indonesia berdomisili di Jakarta. Meraih Gelar Magister Manajemen, LPPM, Jakarta (1998), dan Gelar Sarjana Perikanan, Institut Pertanian Bogor (1982).

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Korporasi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017), Direktur Mikro, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2017), Pemimpin Wilayah Jakarta I, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2010-2015), Pemimpin Wilayah Semarang, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2009-2010), Pemimpin Wilayah Padang, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2006-2009), dan Kepala Divisi Teknologi Sistem Informasi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2003-2006).

Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 19 Maret 2015 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-100/D.03/2015 tanggal 1 Juni 2015. Bertanggungjawab sebagai Direktur Jaringan dan Layanan.



Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisa &amp; Pembahasan Manajemen

## PROFIL DIREKSI



51 tahun, Warga Negara Indonesia berdomisili di Jakarta. Meraih Gelar MBA Finance, Washington University, Amerika Serikat (1997), dan Gelar Sarjana Ekonomi, Universitas Airlangga, Surabaya (1986).

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017), Direktur Kelembagaan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2017), Komisaris, PT Bringin Indotama Sejahtera Finance (2013-2014), Pemimpin Wilayah Jakarta 1, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015), Pemimpin Wilayah Makassar, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2014-2015).

Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 12 Agustus 2015 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-207/D.03/2015 tanggal 4 November 2015. Bertanggungjawab sebagai Direktur Kredit Menengah, Korporasi & BUMN.



55 tahun, Warga Negara Indonesia berdomisili di Jakarta. Meraih Gelar Magister Manajemen, Universitas Airlangga, Surabaya (2007), dan Gelar Sarjana Administrasi Niaga, Universitas Brawijaya, Malang (1988).

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Institution, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017), Direktur Konsumer, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016-2017), Direktur Funding & Distribution, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (2015-2016), Pemimpin Wilayah Jakarta 2, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015), Pemimpin Wilayah Banjarmasin, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2014-2015), dan Pemimpin Cabang Khusus, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2012-2014).

Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 23 Maret 2016 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-85/D.03/2016 tanggal 20 Mei 2016. Bertanggungjawab sebagai Direktur Kelembagaan.

## PROFIL DIREKSI



53 tahun, Warga Negara Indonesia berdomisili di Tangerang. Meraih Gelar Magister Management, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2008), dan Gelar Sarjana Peternakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1987).

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Human Capital, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017), Direktur Kepatuhan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016), Pemimpin Wilayah Bandung, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016), Pemimpin Wilayah Yogyakarta, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2016), Kepala Divisi Bisnis Ritel dan Menengah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2014-2015), dan Pemimpin Wilayah Jayapura, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2012-2014).

Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 23 Maret 2016 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-105/D.03/2016 tanggal 21 Juni 2016. Bertanggungjawab sebagai Direktur Kredit Mikro dan Ritel.



55 tahun, Warga Negara Indonesia berdomisili di Jakarta. Meraih Gelar Doktor Strategic Management, Universitas Indonesia, Jakarta, Gelar Magister Communication and Signal Processing, Imperial College, University of London, UK, dan Gelar Sarjana Teknik Elektro Telekomunikasi, Institut Teknologi Bandung, Bandung.

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Digital & Strategic Portfolio Telkom Group, PT Telkom (2016-2017), CEO CFU Digital Service Telkom Group, PT Telkom (2016-2017), Komisaris Utama, PT Metra Digital Innovation (Telkom MDI) (2016-2017), dan Komisaris Utama, PT Multimedia Nusantara (Telkom Metra) (2009-2016).

Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 15 Maret 2017 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan Surat OJK No. SR-123/PB.12/2017 tanggal 21 Juli 2017. Bertanggungjawab sebagai Direktur Digital Banking & Teknologi.



## PROFIL DIREKSI



58 tahun, Warga Negara Indonesia berdomisili di Jakarta. Meraih Gelar Magister Manajemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor, dan Gelar Sarjana Ekonomi, Universitas Jember, Jember.

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional dan Jaringan, Perum Jamkrindo (2015-2017), Pemimpin Cabang Khusus, PT Bank Rakyat Indonesia Persero) Tbk (2010-2015), dan Kepala Divisi Jaringan Kerja Bisnis Ritel PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2011-2014).

Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 18 Oktober 2017 berdasarkan Hasil RUPS Luar Biasa dan saat ini masih menunggu hasil lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK. Bertanggungjawab sebagai Direktur Human Capital.



52 tahun, Warga Negara Indonesia berdomisili di Jakarta. Meraih Gelar Magister Manajemen, Universitas Padjadjaran, Bandung, dan Gelar Sarjana Kedokteran Gigi, Universitas Airlangga, Surabaya.

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Konsumer PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (2016-2017), Direktur Komersial, PT Garuda Indonesia Tbk (2014-2016), Direktur Marketing & Alternate Distribution, PT AXA Mandiri (2013-2014).

Diangkat pertama kali sebagai Direktur Konsumer BRI sejak tanggal 18 Oktober 2017 berdasarkan Hasil RUPS Luar Biasa dan saat ini masih menunggu hasil lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK. Bertanggungjawab sebagai Direktur Konsumer.

## PROFIL SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT (SEVP)



.01

**HEXANA TRI SASONGKO**  
SEVP Treasury & Global Services

53 tahun, Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.

### Riwayat Pekerjaan/Jabatan

Menjabat sebagai SEVP di BRI sejak tanggal 21 Oktober 2015 berdasarkan SK No. 630-DIR/KPS/10/2015. Saat ini menjabat sebagai SEVP Treasury & Global Services, Direktorat Treasury & Global Services PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sebelumnya menjabat sebagai SEVP Strategi TI & Satellite, Direktorat Digital Banking & Teknologi Informasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Memulai karir perbankan di BRI sejak tahun 1988 dan telah menduduki berbagai jabatan manajerial diantaranya Kepala Global Market (1999-2007), Kepala Divisi Perencanaan Strategis & Pengembangan Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2011-2015). Pada tahun 2013 dipercaya menjadi BRIsat Project Manager sekaligus sebagai Satellite Mission Director pada peluncuran BRIsat bulan Juni 2016. Telah mengikuti berbagai kegiatan persatelitan seperti menjadi anggota delegasi RI untuk koordinasi satelit, Ketua tim BRI untuk koordinasi satelit antar operator, mengikuti Asia Pacific Satellite Conference.

### Riwayat Pendidikan

Meraih gelar MBA International Business dari Monash Mt. Eliza Business School, Monash University, Melbourne, Australia (1996) dan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga, Surabaya (1986).



.02

**SUPARI**  
SEVP Transformation

51 tahun, Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.

### Riwayat Pekerjaan/Jabatan

Menjabat sebagai SEVP di BRI sejak tanggal 1 Mei 2016 berdasarkan SK No. 459-DIR/KPS/05/2016. Saat ini menjabat sebagai SEVP Transformation, Direktorat Transformation PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sebelumnya menjabat sebagai SEVP Manajemen Jaringan, Direktorat Jaringan & Layanan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, SEVP UKM & Konsumer, Direktorat UKM & Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pemimpin Wilayah Makassar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pemimpin Wilayah Padang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

### Riwayat Pendidikan

Meraih gelar Master Agribisnis dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2005 dan Sarjana bidang Teknologi Pertanian dari Universitas Brawijaya, Malang 1989.



## PROFIL SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT (SEVP)



.03

**GUNAWAN SULISTYO**  
SEVP Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan

53 tahun, Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.

### Riwayat Pekerjaan/Jabatan

Menjabat sebagai Pejabat Level SEVP Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Direktorat Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan sejak 1 Mei 2017 berdasarkan SK No. 428-DIR/KPS/05/2017 tanggal 24 Mei 2017. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Pengadaan Barang & Jasa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Deputy Chief Learning Officer BRI Corporate University.

### Riwayat Pendidikan

Meraih Magister Management bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



.04

**TRI WINTARTO**  
Kepala Audit Intern

55 tahun, Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.

### Riwayat Pekerjaan/Jabatan

Menjabat sebagai Kepala Audit Intern, Satuan Kerja Audit Intern PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sejak 1 Mei 2017 berdasarkan SK No. 427-DIR/KPS/05/2017 tanggal 24 Mei 2017. Sebelumnya menjabat sebagai Inspektur, Kantor Inspeksi Jakarta 1 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Inspektur, Kantor Inspeksi Jakarta 3 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kepala Divisi Bisnis Program Pangan dan Kemitraan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan Pemimpin Wilayah Bandung PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

### Riwayat Pendidikan

Meraih gelar S2 bidang Manajemen dari Universitas Lampung, Bandar Lampung.

## PROFIL SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT (SEVP)



53 tahun, Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.

**Riwayat Pekerjaan/Jabatan**

Diangkat pertama kali sebagai SEVP di BRI sejak tanggal 1 Mei 2016 berdasarkan SK No. 458-DIR/KPS/05/2016. Menjabat sebagai SEVP Operation, Direktorat Operasional PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk s.d Desember 2017. Sebelumnya menjabat sebagai SEVP Jaringan Dan Layanan, Direktorat Jaringan & Layanan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, SEVP UKM & Konsumer, Direktorat Kredit Mikro & Ritel PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pemimpin Wilayah Jakarta 2 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kepala Divisi Hubungan Lembaga 1 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan Kepala Divisi Hubungan Lembaga 2 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

**Riwayat Pendidikan**

Meraih gelar Master Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor (1990).



# DEMOGRAFI KARYAWAN

## Jumlah Pekerja Berdasarkan Level Organisasi

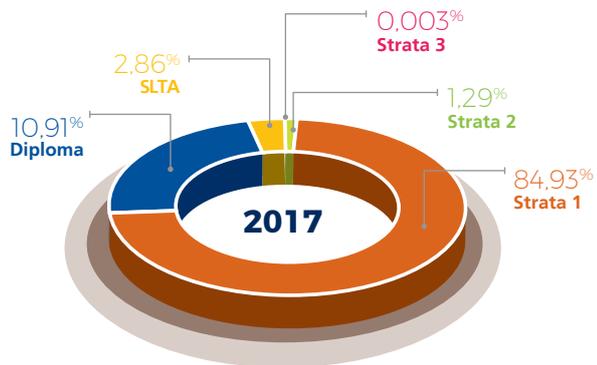
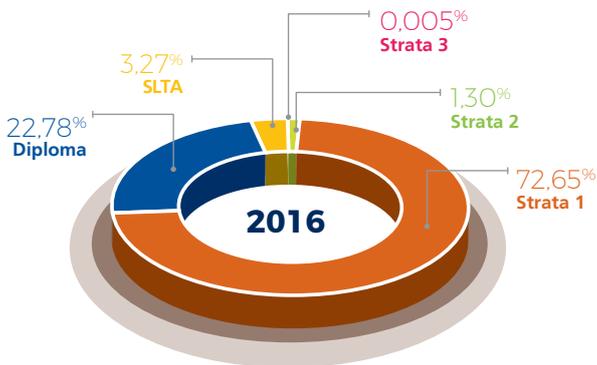
Level Organisasi	2015	2016	2017
Senior Executive Vice President	4	4	5
Executive Vice President	50	86	98
Vice President	198	193	209
Assistant Vice President	395	380	345
Senior Manager	738	747	735
Manager	731	1.248	1.331
Assistant Manager	4.331	4.992	5.410
Officer	11.837	12.214	12.003
Assistant	74.290	73.469	72.722
Total	92.574	93.333	92.858

\*di luar pekerja outsourcing

## Jumlah Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017
Strata 3	7	5	3
Strata 2	1.195	1.212	1.202
Strata 1	67.953	67.805	78.867
Diploma	19.769	21.261	10.134
SLTA/Setingkat	3.650	3.050	2.652
Total	92.574	93.333	92.858

\*di luar pekerja outsourcing

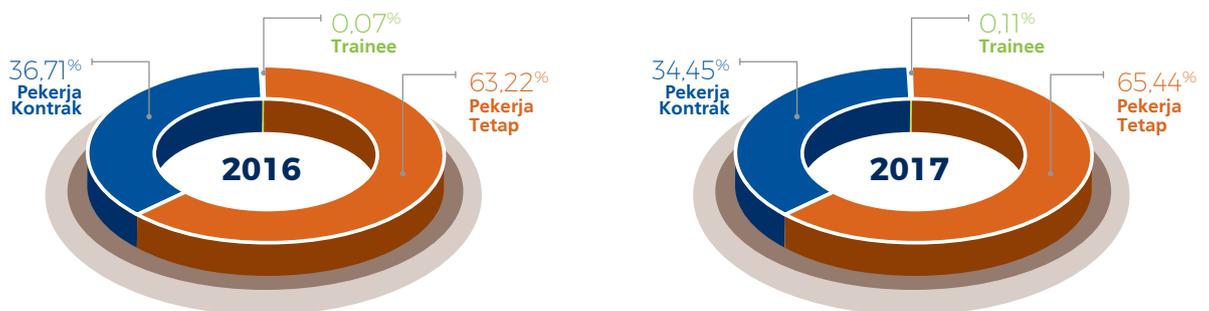


## DEMOGRAFI KARYAWAN

## Jumlah Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian

Status	2015	2016	2017
Pekerja Tetap	54.859	59.007	60.764
Pekerja Kontrak	37.451	34.262	31.994
Trainee	264	64	100
Total	92.574	93.333	92.858

\*di luar pekerja outsourcing



## Pengembangan Kompetensi Pekerja dan Persamaan Kesempatan untuk Masing-Masing Level Organisasi

Terdapat 2 jenis program pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas para pekerja di BRI, yaitu :

1. *Development Learning Program* adalah program pendidikan yang diberikan kepada calon pekerja BRI atau pekerja BRI yang akan menduduki satu jabatan tertentu dengan tujuan memberi bekal kompetensi agar mampu melakukan tugasnya. *Development Learning Program* sendiri terbagi menjadi 3 (tiga), yakni :
  - a. *Management Development Program*  
Adalah program pendidikan dalam rangka pengembangan karir Pekerja BRI, yaitu program pendidikan bagi pekerja BRI yang bertujuan meningkatkan kompetensi Pekerja untuk persiapan menduduki jabatan dengan *corporate title* jabatan yang lebih tinggi mulai dari level jabatan *Assistant* s.d *Executive Vice President*.
  - b. *Competency Development Program*  
Adalah program pendidikan yang disusun berdasarkan hasil analisa kompetensi, kebutuhan perusahaan dan kondisi aktual di unit kerja yang dibagi dalam dua kelompok besar, yakni *hard competency* dan *soft competency* untuk setiap *level Job Title* peserta pendidikan dengan tujuan memberikan bekal kompetensi agar mampu melakukan tugasnya di jabatan tersebut seperti *Development Learning Program* Pinca, Pincapem, MP dan lain-lain
  - c. *Master & Doctoral Degree Program*  
Adalah program pendidikan yang diberikan kepada pekerja BRI dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi melalui jenjang Pendidikan formal antara lain Pasca Sarjana Strata 2 dan Strata 3.



## DEMOGRAFI KARYAWAN

2. *Enhancement Learning Program* adalah program pendidikan yang diberikan kepada pekerja BRI dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam menjalankan tugas saat ini berdasarkan hasil analisis gap kompetensi yang dibutuhkan oleh Pekerja BRI. *Enhancement Learning Program* dibagi menjadi 3 (tiga) *levelling* yaitu *Basic*, *Intermediate* dan *Advanced*. Parameter untuk menentukan *levelling* tersebut antara lain *variety of business product*, *sales mode*, *degree of analysis*, *background* peserta pendidikan, *business scale*, *business model*, *branch level*, dan lain-lain.

## Program Pengembangan Kompetensi

NO	CORPORATE TITLE	DEVELOPING LEARNING PROGRAM	
		Management Development Learning Program	Competency Development Learning Program
1	Executive Vice President	Executive Vice President Development Program	Pemimpin Wilayah, Kepala Divisi dan Inspektur
2	Vice President	Vice President Development Program	Wakil Pemimpin Wilayah, Wakil Kepala Divisi dan Wakil Inspektur
3	Assistant Vice President	Assistant Vice President Development Program	Pemimpin Cabang, Kepala Bagian dan Group Head
4	Senior Manager	Senior Management Development Program	
5	Manager	Manager Development Program	Pemimpin Cabang Pembantu, Wakil Kepala Bagian, Priority Banking Manager, Manajer Pemasaran, Manajer Operasional dan Manajer Bisnis Mikro
6	Assistant Manager	Assistant Manager Development Program	Asisten Manajer Operasional, Asisten Manajer Bisnis Mikro, Asisten Manajer Pemasaran Dana, Asisten Manajer Pemasaran Kredit
7	Officer	Supervisor Development Program	Supervisor, Kepala Unit, Staff dan jabatan setingkat Officer lainnya
8	Assistant	Assistant Development Program	Relationship Manager Kredit & Dana, Mantri, CS, Teller dan jabatan setingkat Assistant lainnya

## Realisasi Biaya Pelatihan dan Jumlah Peserta Pendidikan Tahun 2017

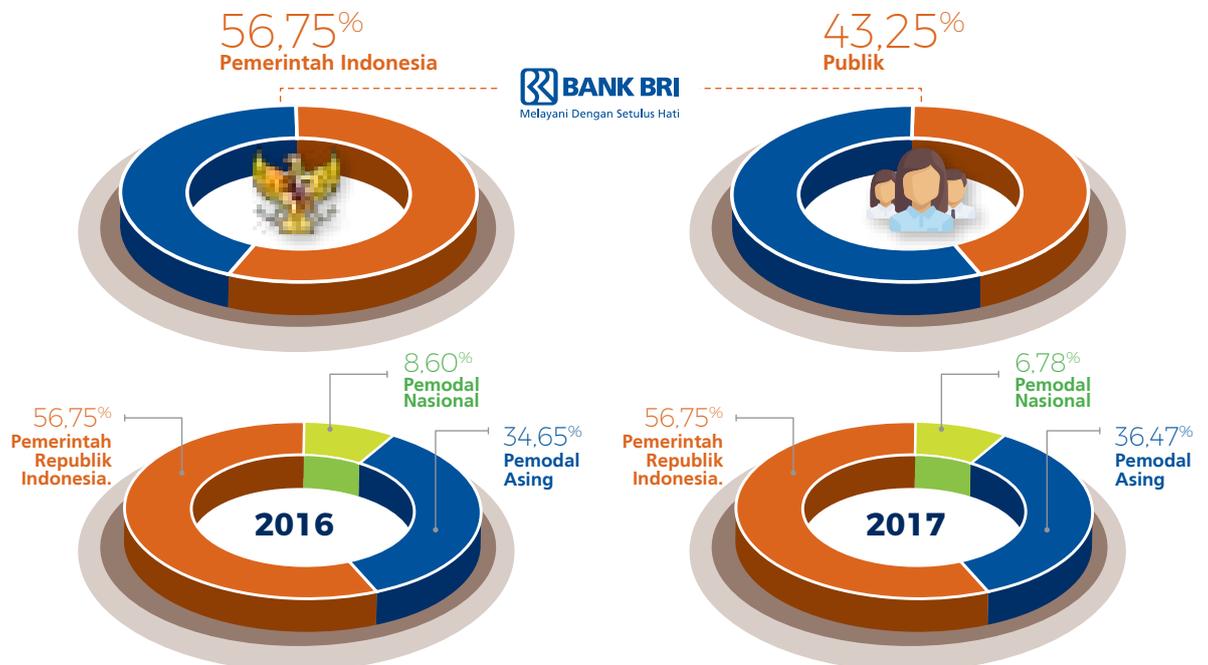
Realisasi anggaran pendidikan dan pengembangan SDM BRI pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp 533,6 milyar. Adapun biaya per pekerja adalah sebesar Rp 301.000/peserta. Sedangkan untuk realisasi jumlah peserta pendidikan pada tahun 2017 tercatat sejumlah 1.773.194 peserta dimana jumlah tersebut merupakan jumlah dari peserta pendidikan *In Class* yaitu 13,6% dan peserta pendidikan *E-Learning* yaitu 86,4%. Berikut rincian biaya pelatihan dan realisasi jumlah peserta pendidikan:

No	Mata Anggaran	Target 2017*) (Dalam Juta Rupiah)	Realisasi Desember 2017*) (Dalam Juta Rupiah)	Persentase Pencapaian Anggaran	Realisasi Jumlah Peserta	Realisasi Biaya/Peserta**) (Dalam Ribu Rupiah)
1	Development	289.640	91.192	31.5%	11,326	8.052
2	Enhancement	416.329	295.527	71.0%	1,604,946	184
3	FPK & FGD	146.901	137.255	93.4%	93,691	1.465
4	Sosialisasi	8.833	3.999	45.3%	63,231	63
5	Literasi	2.500	260	10.4%	-	-
6	Support	12.900	5.379	41.7%	-	-
TOTAL		877.103	533.614	60.8%	1,773,194	301

\*) Dalam Juta Rupiah  
\*\*) Dalam Ribu Rupiah

## KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Jumlah pemegang saham BRI pada akhir tahun 2017 tercatat sebanyak 23.954 pemegang saham yang terdiri dari 21.804 pemodal nasional dan 2.150 pemodal asing. Mayoritas kepemilikan saham BRI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 56,75%. Masyarakat memiliki porsi kepemilikan saham sebesar 43,25% dan tidak terdapat pemegang saham publik yang memiliki lebih dari 5% dari total saham sebagaimana tercatat dalam Biro Administrasi Efek. Pemodal asing memiliki porsi kepemilikan 36,47% dan sisanya pemodal nasional dengan porsi kepemilikan 6,78%.



### Komposisi Pemegang Saham BRI Posisi 31 Desember 2017

Kategori	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham	Komposisi
Negara RI	1	70.000.000.000	56,75%
Publik	23.953	53.345.810.000	43,25%
Pemodal Nasional	21.803	8.358.083.044	6,78%
Perorangan	19.585	944.947.153	0,77%
Karyawan	1.621	186.929.000	0,15%
Pemerintah Daerah	1	1.590.000	0,001%
Bank	1	1.108.590.000	0,90%
Koperasi	5	4.068.400	0,003%
Yayasan	20	101.620.300	0,08%
Dana Pensiun	122	652.842.100	0,53%
Asuransi	83	2.226.410.500	1,81%
Perseroan Terbatas	77	671.568.331	0,54%
Reksa Dana	288	2.459.517.260	1,99%
Pemodal Asing	2.150	44.987.726.956	36,47%
Perorangan	117	44.357.900	0,04%
Badan Usaha Asing	2.033	44.943.369.056	36,44%
Total	23.954	123.345.810.000	100%



## KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Kepemilikan Saham BRI Setelah *Stock Split* Posisi 31 Desember 2017

Keterangan	Pemegang Saham (Jumlah Saham yang Beredar)					Jumlah Saham yang Beredar
	Pemerintah		Publik		Nominal	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Rp	
Sebelum <i>Stock Split</i>	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25	250	24.669.162.000
Setelah <i>Stock Split</i>	70.000.000.000	56,75	53.345.810.000	43,25	50	123.345.810.000

## 20 Pemegang Saham Terbesar BRI Posisi 31 Desember 2017

Rincian 20 nama Pemegang Saham Publik terbesar adalah sebagai berikut:

No	Nama	Saham	Persentase
1	JPMBL SA UCITS CLT RE-FRANKLIN TEMPLETON	1.106.976.500	0,90
2	BBH BOSTON S/A VANGRD EMG MKTS STK INF	893.284.712	0,72
3	JPMCB NA AIF CLT RE-STICHTING DEPOSITARY	812.212.900	0,66
4	PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - REF	804.417.700	0,65
5	HSBC BANK PLC S/A SAUDI ARABIAN MONETARY	790.647.395	0,64
6	GIC S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE	772.118.685	0,63
7	JPMCB NA RE-OPPENHEIMER DEVELOPING MARKE	767.953.500	0,62
8	JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL	694.450.637	0,56
9	NT TST CO S/A GENERATION IM FUND PUBLIC	478.036.000	0,39
10	SSB 24DR S/A FIDELITY INVESTMENT TR:FID	428.578.500	0,35
11	JPMCB NA RE-FIDELITY INVESTMENT TRUST: F	418.348.100	0,34
12	THE NORTHERN TRUST CO S/A CANTILLON FUND	401.719.091	0,33
13	SSB OBIH S/A ISHARES MSCI EMERGING MARKE	401.239.410	0,33
14	THE NORTHERN TST CO SA FIDELITY INVESTME	394.568.100	0,32
15	REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS-9	389.327.100	0,32
16	SSB 2Q27 S/A ISHARES CORE MSCI EMERGING	380.380.600	0,31
17	SSB A52A S/A ARTISAN INTERNATIONAL FUND-	361.541.500	0,29
18	NT TST CO S/A HARDING LOEVNER FUNDS, INC	351.943.000	0,29
19	CITIBANK NA-BANK RAKYAT INDONESIA	351.096.800	0,28
20	BNYM RE VIRTUS VONTOBEL EMERGING MARKETS	347.732.661	0,28

## KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

## Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi BRI

Kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi tidak ada yang melebihi 5% dari total saham sebagaimana tercatat Biro Administrasi Efek.

## Komisaris

Nama	Jabatan	Kepemilikan			
		31 Desember 2016*		31 Desember 2017	
		Lembar Saham	Persentase	Lembar Saham	Persentase
Andrinof A. Chaniago*	Komisaris Utama/ Independen	-	-	-	-
Mustafa Abubakar**	Wakil Komisaris Utama/Komisaris	-	-	-	-
Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama/Komisaris	-	-	-	-
Ahmad Fuad**	Komisaris Independen	-	-	-	-
Adhyaksa Dault***	Komisaris Independen	-	-	-	-
A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	-	-	-	-
A. Sony Keraf	Komisaris Independen	-	-	-	-
Mahmud	Komisaris Independen	-	-	-	-
Rofikoh Rokhim****	Komisaris Independen	-	-	-	-
Vincentius Sonny Loho	Komisaris	-	-	-	-
Jeffry W. Wurangan	Komisaris	-	-	-	-
Nicolaus Teguh Budi Harjanto*	Komisaris	-	-	-	-

\*) Efektif mulai 15 Maret 2017

\*\*\*) Efektif sampai dengan 15 Maret 2017

\*\*\*\*) Efektif sampai dengan 18 Oktober 2017

\*\*\*\*\*) Efektif mulai 18 Oktober 2017

## Direksi

Nama	Jabatan	Kepemilikan			
		31 Desember 2016*		31 Desember 2017	
		Lembar Saham	Presentase	Lembar Saham	Presentase
Suprajarto	Direktur Utama	-	-	-	-
Asmawi Syam**	Wakil Direktur Utama	-	-	-	-
Sunarso***	Wakil Direktur Utama	-	-	-	-
Randi Anto***	Direktur	3.305.000	0.00268	-	-
Sis Apik Wijayanto	Direktur	700.000	0.00057	700.000	0.00057
Susy Liestiowaty	Direktur	2.900.000	0.00235	2.900.000	0.00235
Donsuwan Simatupang	Direktur	142.500	0.00012	142.500	0.00012
Mohammad Irfan	Direktur	170.000	0.00014	170.000	0.00014
Haru Koesmahargyo	Direktur	-	-	-	-
Kuswiyoto	Direktur	-	-	-	-
Priyastomo	Direktur	-	-	-	-
Indra Utoyo	Direktur	-	-	-	-
R. Sophia Alizsa****	Direktur	-	-	25.000	0.00002
Handayani****	Direktur	-	-	-	-
Jumlah		7.217.500	0.00585	3.937.500	0.00319

\*) Jumlah saham memperhitungkan *stock split*

\*\*\*) Efektif sampai dengan 15 Maret 2017

\*\*\*\*) Efektif sampai dengan 18 Oktober 2017

\*\*\*\*\*) Efektif mulai 18 Oktober 2017



Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisa &amp; Pembahasan Manajemen

# DAFTAR ENTITAS ANAK DAN/ATAU ENTITAS ASOSIASI

## Penyertaan Modal BRI Data per 31 Desember 2017

No	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Tanggal Penyertaan BRI	Kepemilikan %	Mulai Beroperasi	Alamat
1	PT Bank BRI Syariah (BRI Syariah)	Bank Umum Syariah	19 Desember 2007	99,999975	16 Oktober 2008 Masih Beroperasi	Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta 10160
2	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. (BRI Agro)	Bank Umum Swasta Nasional	3 Maret 2011	86,82	8 Februari 1990 Masih Beroperasi	Gedung BRI Agro Jl. Warungjati Barat No.139 Jakarta 12740
3	PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance)	Pembiayaan	16 Desember 2011	99,00	7 April 2005 Masih Beroperasi	Wisma 46 Lantai 10-Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta
4	PT Asuransi BRI Life (BRI Life)	Perusahaan Asuransi Jiwa	14 Desember 2015	91,00	28 Oktober 1987 Masih Beroperasi	Graha Rama Lt.2,5,7,11& 15, Jl. H.R.Rasuna Said Blok X-1 Kav 1 & 2, Jakarta 12950, Indonesia
5	BRI Remittance Co. Ltd. (BRI Remittance)	Remittance	1 Agustus 1983	100,00	1 Agustus 1983 Masih Beroperasi	Room 1115, 11/F, Lippo Center, Tower II, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong
6	PT Bahana Artha Ventura	Modal Ventura	21 November 2017	35	5 Agustus 1992 Masih Beroperasi	Graha Niaga Lt 20 Jl Jenderal Sudirman Kav 58 Jakarta 12190 Indonesia

\*) BRI masih memiliki Waran II BRI Agro yang dapat dieksekusi hingga Juni 2018 sebanyak 538.113.617 lembar

## STRUKTUR PERUSAHAAN





## KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM

Pada 31 Oktober 2003, BRI melakukan Penawaran Saham Perdana (*Initial Public Offerings*) sebesar 3.811.765.000 Saham Biasa Seri B kepada investor domestik maupun asing. Jumlah saham tersebut merupakan saham divestasi Negara Republik Indonesia sebesar 2.047.060.000 dan saham portepel sebesar 1.764.705.000.

Penawaran Saham Perdana tersebut berdasarkan pernyataan pendaftaran efektif yang dikeluarkan oleh Bapepam - sekarang OJK (Surat Ketua Bapepam No. S-2646/PM/2003) tanggal 31 Oktober 2003). Saham yang ditawarkan bernominal Rp500,00 dan mulai diperdagangkan pada 10 November 2003 dengan harga penawaran per saham sebesar Rp875,00, serta dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia).

Dengan dilakukannya penawaran saham perdana ini, BRI menerbitkan dua jenis saham; Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B. Saham Seri A Dwiwarna diterbitkan dan dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memiliki hak istimewa sebagai berikut:

Mencalonkan anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris.

- Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris.
- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar, termasuk perubahan modal.
- Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan
- dinyatakan pailit, dan pembubaran Perseroan, dan atau
- Meminta laporan dan penjelasan mengenai hal tertentu kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

Selanjutnya pada 10 November 2003, BRI melaksanakan opsi pemesanan lebih sejumlah 381.176.000 Saham Biasa Seri B milik Negara Republik Indonesia (divestasi) dan pada 3 Desember 2003 melakukan opsi penjatahan lebih sejumlah 571.764.000 Saham Biasa Seri B milik Negara Republik Indonesia (divestasi). Divestasi dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia).

Setelah IPO BRI dan opsi pemesanan lebih serta opsi penjatahan, maka Pemerintah Republik Indonesia memiliki 59,50% saham di BRI.

### Penggunaan Dana IPO

Rincian penggunaan dana yang diperoleh dari IPO yakni sebesar Rp1,47 triliun adalah sebagai berikut:

No.	Penggunaan Proceed IPO (Rp miliar)	Rencana	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Pencapaian
1	Upgrade Core banking dan IT System	883,27	196,24	564,35	646,96	698,87	723,36	883,27	100%
2	Ekspansi jaringan kerja	441,63	213,68	419,34	441,63	441,63	441,63	441,63	100%
3	Riset dan Pengembangan Produk	147,21	147,21	147,21	147,21	147,21	147,21	147,21	100%
Total Proceed		1.472,11	557,13	1.130,90	1.235,80	1.287,71	1.312,20	1.472,11	100%

## KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM

*Management Stock Option Plan (MSOP)*

Berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 3 Oktober 2003, pemegang saham BRI menyetujui pelaksanaan Program Opsi Pembelian Saham bagi Manajemen (*Management Stock Option Plan/MSOP*).

Jumlah saham yang diterbitkan dalam MSOP BRI tercatat sebanyak 588.235.250 lembar. Pelaksanaan MSOP tersebut dilakukan dalam tiga tahap dimana masa *exercise* MSOP Tahap I dan II telah berakhir masing-masing pada tanggal 9 November 2008 dan 9 November 2009, sedangkan MSOP Tahap III berakhir pada 9 November 2010.

Ketiga tahap MSOP tersebut mengacu pada Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.4 dan Peraturan BEI No. 1-A Lamp. Keputusan Direksi BEI No. Kep.305/BEI/07-2004 tentang Pencatatan Efek.

Saham MSOP yang telah di-*exercise* sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan MSOP adalah sebesar 569.876.000 lembar. Sampai dengan berakhirnya masa *exercise*, masih terdapat 18,3 juta lembar saham yang tidak di-*exercise* yang terdiri dari 4,3 juta lembar MSOP Tahap I, 5,2 juta lembar MSOP Tahap II dan 8,8 juta lembar MSOP Tahap III.

Tahapan MSOP	Jumlah Saham MSOP (lembar)	Tanggal dimulainya MSOP	Tanggal Berakhirnya Tahapan MSOP	Harga	Saham di exercise
Tahap I	235.294.100	10 November 2003	9 November 2008	Rp962,50	230.999.000
Tahap II	235.294.100	10 November 2004	9 November 2009	Rp1.750,00	230.047.000
Tahap III	117.647.050	10 November 2005	9 November 2010	Rp20907 s/d Rp8.649*)	108.830.000
Jumlah	588.235.250				569.876.000

\*) MSOP tahap III di eksekusi dalam 8 kali periode dengan harga sesuai aturan Bapepam-LK dan BEI

Keseluruhan opsi yang dialokasikan dalam MSOP Tahap I, II dan III berjumlah 588.235.250 lembar, dimana sampai dengan akhir periode pelaksanaannya, opsi yang di-*exercise* berjumlah 569.876.000 lembar. Eksekusi opsi tersebut menyebabkan tambahan *equity* perusahaan sebesar Rp1.366.089.110.750.

No.		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Jumlah
1	Modal Disetor	115.500	115.024	54.415	284.938
2	Agio	106.837	287.559	474.490	686.886
3	Modal lain-lain (Lembar Saham x Option Value)	27.117	80.889	10.259	212.265
	Jumlah	249.454	483.471	633.164	1.366.089



## KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM

Dengan berakhirnya *exercise* MSOP pada tahun 2010 maka kepemilikan saham pemerintah menjadi 56,75%

Tahun	Pemilik Saham				Nominal (Rp)	Total Jumlah Saham Disetor Akhir Periode	Nilai Modal Disetor Akhir Periode (Rp Juta)	Aksi Korporasi
	Pemerintah		Masyarakat					
	Jumlah	%	Jumlah	%				
2003	7.000.000.000	59,50	4.764.705.000	40,50	500	11.764.705.000	5.882.353	IPO tanggal 10 November 2003 Jumlah saham setelah IPO 11.764.705.000 (tercatat di BEJ)
2004	7.000.000.000	59,07	4.850.090.500	40,93	500	11.850.090.500	5.925.045	Exercise MSOP 85.385.500
2005	7.000.000.000	58,16	5.035.700.500	41,84	500	12.035.700.500	6.017.850	Exercise MSOP 185.610.000
2006	7.000.000.000	56,97	5.286.421.500	43,03	500	12.286.421.500	6.143.211	Exercise MSOP 250.721.000
2007	7.000.000.000	56,83	5.317.800.500	43,17	500	12.317.800.500	6.158.900	Exercise MSOP 31.379.000
2008	7.000.000.000	56,79	5.325.299.500	43,21	500	12.325.299.500	6.162.650	Exercise MSOP 7.499.000
2009	7.000.000.000	56,77	5.329.852.500	43,23	500	12.329.852.500	6.164.926	Exercise MSOP 4.553.000
2010	7.000.000.000	56,75	5.334.581.000	43,25	500	12.334.581.000	6.167.291	Exercise MSOP 4.728.500
2011	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25	250	24.669.162.000	6.167.291	Stock Split 1:2 tanggal 11 Januari 2011
2012	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25	250	24.669.162.000	6.167.291	
2013	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25	250	24.669.162.000	6.167.291	
2014	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25	250	24.669.162.000	6.167.291	
2015	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25	250	24.669.162.000	6.167.291	
2016	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25	250	24.669.162.000	6.167.291	
2017	70.000.000.000	56,75	53.345.810.000	43,25	50	123.345.810.000	6.167.291	Stock Split 1:5 tanggal 10 November 2017

### Stock Split

Dengan berakhirnya *exercise* MSOP pada tahun 2010 maka kepemilikan saham pemerintah menjadi 56,75%. Pada tahun 2017, BRI tidak memiliki Program ESOP/MSOP yang masih berjalan.

Sampai dengan 31 Desember 2017, Perusahaan telah melakukan aksi pemecahan saham (*stock split*) sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2011 dan 2017.

### Stock Split Tahun 2011

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 24 November 2011, pemegang saham telah menyetujui antara lain pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari semula Rp 500,- (Lima ratus rupiah) per saham menjadi Rp 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) per saham (Rasio 1:2).

## KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM

Harga saham sebelum *stock split* sebesar Rp 9.300,00,- pada tanggal 10 Januari 2011 menjadi sebesar Rp 4.800,- pada penutupan perdagangan 11 Januari 2011. Dengan adanya *stock split* dimaksud, per 11 Januari 2011 jumlah lembar saham yang beredar sebelum dan pelaksanaan *stock split* adalah 12.334.581.000 lembar dan 24.669.162.000 lembar. Tidak terdapat perubahan komposisi kepemilikan saham Pemerintah maupun Publik sebelum dan sesudah *stock split*.

**Stock Split Tahun 2017**

Selanjutnya, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 18 Oktober 2017, pemegang saham telah menyetujui antara lain pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari semula Rp 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham (Rasio 1:5).

Harga saham sebelum *stock split* sebesar Rp 16.450,- pada tanggal 9 November 2017 menjadi sebesar Rp 3.280,- pada penutupan perdagangan 10 November 2017. Dengan adanya *stock split* dimaksud, per 10 November 2017 jumlah lembar saham yang beredar sebelum dan pelaksanaan *stock split* adalah 24.669.162.000 lembar dan 123.945.810.000 lembar. Tidak terdapat perubahan komposisi kepemilikan saham Pemerintah maupun Publik sebelum dan sesudah *stock split*.

Kronologi dari pencatatan saham yang terkait dengan aksi korporasi ini adalah sebagai berikut:

**Pelaksanaan Stock Split Tahun 2011**

Keterangan	Pemegang Saham (Jumlah Saham yang Beredar)					Jumlah Saham yang Beredar
	Pemerintah		Publik		Nominal	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Rp	
Sebelum <i>Stock Split</i>	7.000.000.000	56,75	5.334.581.000	43,25	500	12.334.581.000
Setelah <i>Stock Split</i>	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25	250	24.669.162.000

**Pelaksanaan Stock Split Tahun 2017**

Keterangan	Pemegang Saham (Jumlah Saham yang Beredar)					Jumlah Saham yang Beredar
	Pemerintah		Publik		Nominal	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Rp	
Sebelum <i>Stock Split</i>	14.000.000.000	56,75	10,669,162,000	43,25	250	24.669.162.000
Setelah <i>Stock Split</i>	70.000.000.000	56,75	53,345,810,000	43,25	50	123.345.810.000

**Stock Buy Back**

Selama tahun 2017 tidak terdapat aksi *stock buy back*. Perusahaan telah melakukan aksi pembelian kembali saham (*stock buy back*) sebanyak satu kali yaitu pada tahun 2015-2016. BRI melakukan *buy back* selama tiga bulan yaitu dari tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 12 Januari 2016 dengan total pembelian sebanyak Rp 2.419 triliun. Target awal pelaksanaan *buy back* ini direncanakan sebesar Rp 2,5 triliun dengan ketentuan jumlah saham *buy back* BRI tidak melebihi 20% dari jumlah modal disetor dan paling sedikit saham yang beredar 7,5% dari modal disetor.

**Pelaksanaan Buy Back Saham di tahun 2015- 2016**

Total Jumlah saham	Rata-rata Harga Pembelian	Peningkatan Laba per Lembar Saham
210.118.600 lembar	Rp 10.881/lembar	Rp8.8/lembar



## KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM

Dalam melaksanakan pembelian kembali saham dan/atau obligasi, Perseroan mengikuti kebijakan-kebijakan eksternal yang berlaku diantaranya:

1. Undang-undang (UU) RI No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan OJK (POJK) No 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan
3. Surat Edaran OJK (SEOJK) No 22/SEOJK.04/2013 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik
4. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 15/12/PBI/2013 tentang Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara

Dana yang digunakan untuk pelaksanaan buyback ini berasal dari kas internal Perseroan dan diyakini bahwa biaya tersebut tidak mempengaruhi kondisi keuangan untuk membiayai kegiatan Perseroan. Seluruh transaksi *buy back* telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 13 Januari 2016. Saham yang telah dibeli direncanakan untuk program MSOP/ESOP (Management Stock Option/Employee Stock Option).

### *Bond Buy Back*

Sampai dengan 31 Desember 2017, Perseroan belum pernah melaksanakan pembelian kembali obligasi.

### Penghentian Sementara Perdagangan Saham/ Penghapusan Pencatatan Saham

Sampai dengan 31 Desember 2017 tidak terdapat penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) untuk BRI.

## KRONOLOGI PENERBITAN EFEK LAIN

Surat Berharga	Mata Uang	Tanggal Penerbitan	Maturitas	Face value	Jangka Waktu (Bulan)	Coupon/ Discount Rate	Peringkat	Lembaga Pemeringkat	Tujuan Utama Penerbitan
Senior Notes due 2018	USD	28 Mar'13	28 Mar'18	500.000.000	60	2.95	Baa3	Moody's	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance.
Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri B	IDR	2 Jul'15	3 Jul'18	925.000.000.000	36	9.20	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance.
Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri C	IDR	2 Jul'15	3 Jul'20	1.420.000.000.000	60	9.50	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance.
Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri B	IDR	5 Feb'16	4 Feb'19	1.018.500.000.000	36	9.25	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance.
Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri C	IDR	5 Feb'16	4 Feb'21	2.823.500.000.000	60	9.60	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance.
Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri B	IDR	25 Mei'16	25 Mei'19	2.437.000.000.000	36	8.20	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance.
Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri C	IDR	25 Mei'16	25 Mei'21	701.000.000.000	60	8.70	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance.
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri B	IDR	1 Des'16	1 Des'19	964.000.000.000	36	8.00	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance.
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri C	IDR	1 Des'16	1 Dec'21	193.000.000.000	60	8.20	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance.
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri D	IDR	1 Des'16	1 Des'23	477.000.000.000	84	8.65	AAA	Pefindo	
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri E	IDR	1 Des'16	1 Des'26	2.350.000.000.000	120	8.90	AAA	Pefindo	



Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisa &amp; Pembahasan Manajemen

## KRONOLOGI PENERBITAN EFEK LAIN

Surat Berharga	Mata Uang	Tanggal Penerbitan	Maturitas	Face value	Jangka Waktu (Bulan)	Coupon/ Discount Rate	Peringkat	Lembaga Pemeringkat	Tujuan Utama Penerbitan
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri A	IDR	11 Apr'17	16 Apr'18	1.131.000.000.000	370 days	7.20	AAA	Pefindo	Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance.
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri B	IDR	11 Apr'17	11 Apr'20	1.743.500.000.000	36	8.10	AAA	Pefindo	
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri C	IDR	11 Apr'17	11 Apr'22	925.000.000.000	60	8.30	AAA	Pefindo	
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri D	IDR	11 Apr'17	11 Apr'27	1.300.500.000.000	120	8.80	AAA	Pefindo	
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri A	IDR	24 Agu'17	24 Agu'20	980.500.000.000	36	7.60	AAA	Pefindo	Mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance.
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri B	IDR	24 Aug'17	24 Agu'22	1.652.500.000.000	60	8.00	AAA	Pefindo	
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri C	IDR	24 Agu'17	24 Agu'24	2.517.000.000.000	84	8.25	AAA	Pefindo	

## NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ ATAU PROFESI PENUNJANG

Nama & Alamat	Jasa	Biaya	Periode Penugasan
PT Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 – Indonesia Tel. (62-21) 5150515 Fax. (62-21) 5150330 E-mail: callcenter@idx.co.id	Intitusi Pasar Modal  <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggara dan penyedia sistem dan sarana perdagangan efek</li> <li>Penyedia sarana penyebarluasan informasi</li> <li>Pengawasan transaksi perdagangan yang wajar</li> </ul>	Rp160.875.000	sejak 2003 s/d 2017
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building Tower I, Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Tel. (62-21) 5299 1003 Fax. (62-21) 5299 1129 Website :www.ksei.co.id	Kustodian  <ul style="list-style-type: none"> <li>Jasa penyimpanan efek dalam bentuk elektronik</li> <li>Jasa penyelesaian transaksi efek</li> <li>Jasa administrasi efek</li> <li>Jasa distribusi hasil corporate action</li> </ul>	Rp424.277.235	2017
PT Datindo Entrycom Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35 Jakarta 10220 Tel. (62-21) 570 9009	Biro Administrasi Efek  <ul style="list-style-type: none"> <li>Jasa Administrasi Efek</li> <li>Jasa Penyelenggaraan RUPS</li> <li>Jasa Pembayaran Dividen</li> </ul>	Rp413.959.700	2017
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Panin Tower Senayan City Lantai 17 Jl. Asia Afrika Kav. 19 Jakarta	Lembaga Pemeringkat Efek	Rp1.174.500.000	2017
PT Fitch Rating Indonesia Prudential Tower Lantai 20 Jl. Jend Sudirman Kav. 79 Jakarta 12190 Tel. (62-21) 5795 7755 Fax. (62-21) 5795 7750	Lembaga Pemeringkat Efek	Rp704.430.400	2017
Moody's Singapore Pte. Ltd. 50th Raffles Place #23-06 Singapore Land Tower Singapore 048623	Lembaga Pemeringkat Efek	Rp1.232.250.000	2017
Standard & Pools 30 Cecil Street #17-01/08 Prudential Tower Singapore 049712 Tel. (65) 6438 2881 Fax. (65) 6438 2321	Lembaga Pemeringkat Efek	Rp811.666.000	2017
Purwanto, Sungkoro, & Surja (Ernst & Young) Indonesian Stock Exchange Building Tower 2, Lantai 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Tel. (62-21) 5289 5000 Fax. (62-21) 5289 4100	Kantor Akuntan Publik  <ul style="list-style-type: none"> <li>Jasa Audit Laporan Keuangan</li> <li>Jasa Review Audit Terbatas</li> </ul>	Rp13.545.000.000	2017



Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisa &amp; Pembahasan Manajemen

# PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

## PENGHARGAAN NASIONAL

### Periode Januari 2017

- 24 Januari 2017  
**Indonesia Prestise Brand Award**  
Brand Used Most Often 2017  
Majalah Warta Ekonomi

### Periode Februari 2017

- 27 Februari 2017  
**Indonesia Most Innovative Brand Award**  
The Winner of Indonesia Most Innovative Business 2017  
Majalah Warta Ekonomi

### Periode Maret 2017

- 09 Maret 2017  
**Indonesia Netizen Brand Choice Award**  
Top of Mind - Netizen Bank Choice  
Majalah Warta Ekonomi
- 24 Maret 2017  
**The Best Media Relation SOE : PR Award**  
Media Relation Terbaik  
PR Indonesia
- 25 Maret 2017  
**Mens Obsession Award 2017**  
Bank Umum  
Majalah Men's Obsession

### Periode Mei 2017

- 08 Mei 2017  
**Mutual Fund and Customer Choise Award 2017**  
Best Performance In Custodian  
Majalah Warta Ekonomi
- 19 Mei 2017  
**Indonesia Most Admire Company**  
Indonesia Most Admire Company 2017  
Majalah Warta Ekonomi
- 24 Mei 2017  
**Bisnis Indonesia Award 2017**  
Bank BUMN : Emiten Terbaik  
Harian Bisnis Indonesia

### Periode Juni 2017

- 13 Juni 2017  
**Investor Award Best Bank 2017**  
Bank Dengan Kredit UMKM Terbesar dengan Aset di atas 100 triliun  
Harian Investor Daily
- 16 Juni 2017  
**Indonesian Digital Award 2017**  
Bank Buku 4  
Majalah Warta Ekonomi
- 16 Juni 2017  
**Indonesia Digital Innovation Award 2017**  
Bank Buku 4  
Majalah Warta Ekonomi



## PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

### Periode Juli 2017

12. 10 Juli 2017  
**Bank Indonesia 2017**  
Bank Pendukung UMKM Terbaik Kelompok  
Bank Buku 3 dan 4.  
Bank Indonesia
13. 11 Juli 2017  
**Indonesia Best Public Companies**  
BANKS  
Stern Value Management
14. 11 Juli 2017  
**Indonesians Public Companies 2017 : Best  
Whealth Creator**  
Indonesians Public Companies 2017  
Majalah Swa Indonesia
15. 11 Juli 2017  
**Asean Public Companies 2017 : Whealth  
Creator 2017**  
Asean Best Public Companies 2017  
Majalah Swa Indonesia
16. 25 Juli 2017  
**Digital Economic Challenge**  
Digital Economic Challenge  
Majalah Swa Indonesia

### Periode Agustus 2017

17. 28 Agustus 2017  
**Bisnis Indonesia Award 2017**  
Buku IV  
Harian Bisnis Indonesia

### Periode September 2017

18. 07 September 2017  
**Brand Asia 2017**  
Top 3 Most Powerful Finance Institution In  
Indonesia  
MARKPLUS.INC
19. 07 September 2017  
**Indonesia Champions ASEAN 2017**  
In acknowledgement of Significant and  
invaluable Contributions in Building The Market  
In ASEAN Region  
MARKPLUS.INC





## PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

### PENGHARGAAN NASIONAL

#### Periode **September** 2017

20. 14 September 2017  
**Top Bank 2017**  
TOP Bank 2017 - Buku IV  
BusinessNews
21. 14 September 2017  
**Top Bank 2017**  
TOP Bank Bidang GCG 2017  
BusinessNews
22. 14 September 2017  
**Top Bank 2017**  
TOP Internet Banking 2017  
BusinessNews
23. 14 September 2017  
**Top Bank 2017**  
TOP Kredit Mikro/UMKM 2017  
BusinessNews
24. 14 September 2017  
**Top Bank 2017**  
TOP Mobile Banking 2017  
BusinessNews
25. 14 September 2017  
**Top Bank 2017**  
TOP SMS Banking 2017  
BusinessNews

#### Periode **Oktober** 2017

26. 19 Oktober 2017  
**Best Of The Best Awards 2017**  
The TOP 50 Companies For 2017  
Forbes Indonesia
27. 27 Oktober 2017  
**Most Powerful Company 2017**  
Bank  
Majalah Warta Ekonomi

#### Periode **November** 2017

28. 30 November 2017  
**Top 4 Popular SOE In Financial Sector**  
Jasa Keuangan dan Asuransi  
Majalah Warta Ekonomi
29. 30 November 2017  
**Top 5 Business Performance SOE**  
Jasa Keuangan dan Asuransi  
Majalah Warta Ekonomi
30. 30 November 2017  
**Top 5 CSR SOE**  
Jasa Keuangan dan Asuransi  
Majalah Warta Ekonomi
31. 30 November 2017  
**Top 5 Innovation SOE**  
Jasa Keuangan dan Asuransi  
Majalah Warta Ekonomi



## PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Periode **November 2017**

32. November 2017  
**Certificate Of Appreciation**  
Diversity Of The Board  
Indonesia Banking School
33. November 2017  
**Certificate Of Appreciation**  
The Best Bank In Digital Services  
Indonesia Banking School
34. November 2017  
**Certificate Of Appreciation**  
The Best Bank In Retail Banking Services  
Indonesia Banking School
35. November 2017  
**Certificate Of Appreciation**  
The Most Efficient Bank  
Indonesia Banking School
36. November 2017  
**Certificate Of Appreciation**  
The Most Reliable Bank  
Indonesia Banking School
37. November 2017  
**12 Inovasi Untuk Negeri**  
Inovasi Transformasi Digital  
KoranSINDO

Periode **Desember 2017**

38. 05 Desember 2017  
**The Most Popular Company in GCG  
Responsibility Issues**  
Indonesia Corporate Secretary Award 2017  
Majalah Warta Ekonomi

Periode **Desember 2017**

39. 05 Desember 2017  
**The Most Popular Company in  
GCG Fairness Issues**  
Indonesia Corporate Secretary Award 2017  
Majalah Warta Ekonomi
40. 08 Desember 2017  
**Indonesia Most Admired CEO 2017**  
Top 5 Most Admired CEO in Bank Sector  
Majalah Warta Ekonomi
41. 14 Desember 2017  
**BUMN Terbaik 2017**  
Bidang Keuangan Sektor Perbankan  
Majalah Investor
42. 16 Desember 2017  
**Best Banking Brand Award 2016**  
The Winner Of Best Banking Brand 2016  
For Consumer Choice, Best Reputation, Best  
Digital, Most Reliable, Most Efficient, and Best  
Performance Title  
Majalah Warta Ekonomi
43. 19 Desember 2017  
**Indonesian Most Trusted Companies Based  
On Corporate Governance Perception Index  
(CGPI)**  
Good Corporate Governance  
Majalah SWA dan IICG





Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisa &amp; Pembahasan Manajemen

## PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

## PENGHARGAAN INTERNASIONAL

44. 27 Juli 2017

**Best Microfinance Product**

Penghargaan dari The Asian Banker

45. 27 Juli 2017

**The World Biggest Companies 2017**

Penghargaan dari Forbes Global 2000



## SERTIFIKASI

**ISO 9001:2015**

46. Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 dengan ruang lingkup "*Design of Accounting Policy & Accounting Control, Preparation and Verification of Published Financial Statements, Budget Planning and Control, and Corporate Financial & Tax Compliance*" dari Lembaga Sertifikasi PT SGS Indonesia. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa Divisi AMK selalu melakukan peningkatan kualitas penyusunan dan pengawasan Kebijakan Akuntansi untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder* BRI dalam rangka menjamin kewajaran Laporan Keuangan
47. Divisi Sentra Operasi BRI berhasil memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 dengan 8 (delapan) ruang lingkup meliputi: "*Operation Centre System for RTGS, Clearing, Remittance, Card Perso Processing, Payment System Reconciliation, ATM Reconciliation, Treasury and e-Banking Settlement, Cash and Trade Finance*" dari Lembaga Sertifikasi PT Lloyd's Register Indonesia. Melalui sertifikasi ini diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas proses transaksi di BRI sehingga menghasilkan peningkatan kepuasan pelanggan.

48. Divisi Pengadaan Barang dan Jasa telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi PT Lloyd's Register Indonesia terkait dengan "*Provision of Inventory, Purchase Payment and Archiving Service*". Sertifikasi ini juga telah diakui secara nasional dan internasional oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan United Kingdom Accreditation Services (UKAS) Management System.
49. BRI Corporate University berhasil memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi Lloyd's Register. Adapun sertifikasi ini mengakui management System Standard BRI Corporate University dalam hal "*Provision of Banking Training Services*". Hal tersebut merupakan bukti bahwa BRI Corporate University selalu melakukan peningkatan kualitas operasional pendidikan dan mengutamakan kepuasan peserta didik.
50. Divisi Bisnis Internasional berhasil memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi Lloyd's Register Indonesia. Dengan sertifikasi ini management System Standard Divisi Bisnis Internasional diakui dalam hal "*Provision of Trade Processing Centre Service Including Supporting Function of Policy and Development & Monitoring Trade Finance*". Hal tersebut merupakan bukti bahwa BRI selalu melakukan peningkatan kualitas operasional sehingga menjadi perantara perdagangan yang terpercaya.

**ISO 9001:2008**

51. Layanan Contact Center (LCC) BRI telah beroperasi dengan sistem manajemen kualitas yang sesuai dengan ISO 9001:2008 yang meliputi: "*The Operation of Call Center for Banking, Premium Banking, Credit Card, Telemarketing and Supproting Services*" dari Lembaga Sertifikasi Guardian Independent Certification Limited. Dengan sertifikasi ini BRI diharapkan dapat memberikan layanan contact center yang prima terhadap nasabah.
52. Audit Internal BRI telah melaksanakan fungsi audit dengan memperhatikan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang sesuai dengan ISO 9001: 2008 terutama pada "*Risk Based Audit of Internal Audit Services*". Sertifikasi telah berlangsung sejak tahun 2003 dan setiap 3 tahun dilakukan resertifikasi oleh PT SGS Indonesia.

## PERINGKAT BRI

## PERINGKAT BRI

Peringkat BRI	
FITCH	
Long Term Foreign Currency IDR	BBB-, Stable Outlook
Short Term Foreign Currency IDR	F3
Support Rating Floor	BBB-
Support Rating	2
Viability Rating	bb+
National Long-Term Rating	AAA (idn), Stable Outlook
Rupiah Subordinated Debt	A+ (idn)
Senior Unsecured Notes	BBB-
Standard and Poor's	
Outlook	Stable
Long Term Foreign Issuer Credit	BB+
Long Term Local Issuer Credit	BB+
Short Term Foreign Issuer Credit	B
Short Term Local Issuer Credit	B
MOODY'S	
Outlook	Stable
Bank Deposit	Baa3/P-3
Bank Financial Strength	D+
Baseline Credit Assessment	Baa3
Adjusted Baseline Credit Assessment	Baa3
Senior Unsecured Notes	Baa3
PEFINDO	
National Rating	id AAA, Stable Outlook
Peringkat Negara Indonesia	
Standard and Poor's	BB+, Positive Outlook
Fitch	BBB-, Stable Outlook
Moody's	Baa3, Stable Outlook
Japan Credit Rating Agency	BBB-, Stable Outlook



# ALAMAT KANTOR DAN/ATAU KANTOR PERWAKILAN

## ALAMAT JARINGAN KANTOR

### KANTOR PUSAT

Gedung BRI I dan II, Jl. Jend.  
Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210  
Tel. : (021) 2510244, 2510254  
Fax. : (021) 2500065, 2500077

### KANTOR WILAYAH

#### Banda Aceh

Jl. Cut Meutia No. 17  
Banda Aceh  
Tel. : (0651) 22822  
Fax. : (0651) 23487, 22352

#### Bandar Lampung

Jl. Raden Intan No.51 Tanjung  
Karang, Bandar Lampung 35118  
Tel. : (0721) 259340  
Fax. : (0721) 259397

#### Bandung

Gedung Menara BRI Lt.4, Jl. Asia  
Afrika 57 - 59, Bandung  
Tel. : (022) 4200363, 4207977  
Fax. : (022) 4236710

#### Banjarmasin

Jl. Bank Rakyat No. 19 - 21,  
Banjarmasin  
Tel. : (0511) 4365783, 3353986,  
3355050  
Fax. : (0511) 4365768

#### Denpasar

Jl. Dr. Kusuma Atmaja No. 1,  
Denpasar  
Tel. : (0361) 244174, 225402,  
236231  
Fax. : (0361) 225402

#### Jakarta 1

Jl. Veteran No.8, Jakarta Pusat  
Tel. : (021) 3840802  
Fax. : (021) 3453685

#### Jakarta 2

Jl. Gatot Subroto Kav.9-11  
Gedung Mulia Lt.2 No. 72,  
Jakarta Selatan 13330  
Tel. : (021) 52920581,52920585  
Fax. : (021) 52920586, 52920587

#### Jakarta 3

Jl. Kapten Soebianto Djokokusumo  
Kav CBD II No.I, Kel.Lengkong  
Gudang, Kec.Serpong  
Tel. : (021) 29703751 ex 52  
Fax. : (021) 7255732

#### Jayapura

Gedung BRI  
Jl. Pasifik Permai, Kompleks Ruko  
Dok II, Kel. Bhayangkara, Distrik  
Jayapura Utara, Kota Jayapura,  
Papua 99112  
Tel. : (0967) 524652, 524453  
Fax. : (0967) 524862, 537191

#### Makassar

Jl. Jend. Urip Sumoharjo KM 4, Kel.  
Karuwisi Utara, Kec.Panakukkang,  
Kota Makassar  
Tel. : (0411) 312498, 323507  
Fax. : (0411) 312731

#### Malang

Jl. Laksmana Martadinata 80 Lt. 4,  
Malang  
Tel. : (0341) 555422, 555425,  
555620, 555423,  
555420  
Fax. : (0341) 555421

#### Manado

Jl. Sarapung No.4-6, Manado  
Tel. : (0431) 863592, 863378  
Fax. : (0431) 862779, 866966

#### Medan

Jl. Kapten Pattimura No.100, Medan  
Tel. : (061) 4536080, 4536081  
Fax. : (061) 4536082

#### Padang

Jl Bagindo Azis Chan No. 30 Padang  
Tel. : (0751) 7052111, 7052528 /  
(Sementara) (0751) 71045,  
778910 892311, 892312  
Fax. : (0751) 7054995 / (0751)  
72653

#### Palembang

Jl. Kapten A. Rivai No.15, Palembang  
Tel. : (0711) 310173, 310178  
Fax. : (0711) 312343

#### Pekanbaru

Jl. Jenderal Sudirman No. 11-11A  
Rt. 01/RW 01 Simpang Tiga,  
Pekanbaru  
Tel. : (0761) 7865016 - 18  
Fax. : (0761) 7865019

#### Semarang

Jl. Teuku Umar No. 24 Semarang  
Tel. : (024) 8311110  
Fax. : (024) 8318436

#### Surabaya

Jl. Jend A. Yani No. 169 - 171,  
Surabaya  
Tel. : (031) 8438993, 8438850,  
8438728  
Fax. : (031) 8439238

#### Yogyakarta

Jl. Cik Di Tiro No.3 Terban,  
Gondokusuman, Kota Yogyakarta  
Tel. : (0274) 510850,520268  
Fax. : (0274) 514166, 584883

## ALAMAT KANTOR DAN/ATAU KANTOR PERWAKILAN

## KANTOR CABANG KHUSUS

Gedung BRI 2 Lt. 1  
Tel. : (021) 5713105  
Fax. : (021) 5707570

## KANTOR CABANG LUAR NEGERI

**New York Agency**  
140 Broadway 30th Floor  
New York, NY 10005  
Tel. : +1 212 3793840  
Fax. : +1 212 3793850

**Singapore Branch**  
50 Collyer Quay, #08-06,  
Oue Bayfront, Singapore 049321  
Tel. : +65 68050686  
Fax. : +65 65091742

**Hong Kong Representative**  
Room 2211, 22/F Lippo Center  
Tower 2  
89 Queensway, Hong Kong  
Tel. : (852) 25271318  
Fax. : (852) 28623693

**Cayman Island**  
Cayman Island Branch  
190 Elgin Avenue Grand Cayman,  
KY1-9005, Cayman Island

**BRI Timor-Leste Branch**  
Grand Diocese Colmera Complex,  
Rua Nicolau Dos Reis Lobato  
Colmera Dili, Timor Leste  
Tel. : +6703311372

## Kantor Wilayah dan Unit Kerja Dibawah binaan Kantor Wilayah

Kantor Wilayah	Kantor Cabang Khusus	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Kas	BRI Unit	Teras BRI	Teras BRI Keliling	Teras BRI Kapal
Banda Aceh	-	11	15	30	141	44	29	-
Bandar Lampung	-	14	16	33	188	76	21	-
Bandung	-	30	45	80	608	277	42	-
Banjarmasin	-	31	31	55	290	150	56	-
Denpasar	-	31	31	27	58	295	180	421
Jakarta 1	-	26	54	74	96	82	10	-
Jakarta 2	-	32	68	78	191	97	21	-
Jakarta 3	-	36	57	64	260	133	31	1
Jayapura	-	13	12	27	85	48	29	-
Kantor Cabang Khusus	1	-	-	5	-	-	-	-
Makassar	-	36	28	69	348	156	53	-
Malang	-	24	36	43	529	271	37	-
Manado	-	17	18	43	205	68	43	1
Medan	-	24	34	47	271	131	47	-
Padang	-	14	8	31	157	67	21	-
Palembang	-	21	29	43	234	119	33	-
Pekanbaru	-	22	20	36	171	118	34	-
Semarang	-	22	38	60	421	177	27	-
Surabaya	-	25	39	41	290	154	26	-
Yogyakarta	-	33	34	67	600	197	33	-



# PERUSAHAAN ANAK

## PERUSAHAAN ANAK

### PT Bank BRISyariah (BRI Syariah)

Jl. Abdul Muis No. 2-4,  
Jakarta 10160  
Tel. : (021) 3450226, 3450227  
Fax. : (021) 3513812

### PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro)

Gedung BRI Agro  
Jl. Warung Jati Barat No. 139  
Jakarta 12740  
Tel. : (021) 79199980  
Fax. : (021) 79199950

### BRI Remittance Company Ltd Hongkong (BRI Remittance)

Flat 22 G/F Bay View 33  
Moreton Terrace  
Causeway Bay, Hong Kong  
Tel. : +852 25271318  
Fax. : +852 28613693

### PT Asuransi BRI Life (BRI Life)

Kantor Pusat BRI Life  
Gedung Graha Irama  
Lt. 2, 5, 7, 11 & 15,  
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 &  
2, Jakarta 12950  
Tel. : (021) 5261260, 5261261  
Fax. : (021) 5261258, 5261472

### PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance)

Wisma 46 Lt. 10 Jl. Jend.  
Sudirman Kav. 1  
Jakarta  
Tel. : (021) 5745333  
Fax. : (021) 5745444

## INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN

Sebagai perusahaan terbuka, Bank BRI memberikan kemudahan akses informasi kepada seluruh stakeholder melalui situs web resmi Bank BRI dengan alamat [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id) yang berdasar pada peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015. POJK tersebut mewajibkan web perusahaan emiten untuk mencantumkan informasi, yakni:

1. Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Informasi bagi Pemodal atau Investor;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan; dan
4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Selain itu, sesuai dengan prinsip transparansi serta keterbukaan informasi, secara garis besar, website BRI berisi:

- Situs Perusahaan;
- Karir;
- Hubungan Investor;
- Perusahaan Anak;
- GCG; dan
- CSR BRI.

Informasi pada situs perusahaan terdiri dari:

- Informasi umum tentang BRI yang terdiri dari: Sejarah BRI, Visi dan Misi, Informasi Umum Emiten, Manajemen, dan Informasi Bagi Investor.
- Informasi tentang produk Simpanan, yang terdiri dari: Tabungan, Deposito dan Giro BRI.
- Informasi tentang produk Pinjaman, yang terdiri dari: Pinjaman Mikro, Pinjaman Ritel Komersial dan Menengah, serta BRIGuna.
- Informasi tentang produk Internasional, yang terdiri dari: BRI Trade Finance & Services, BRIFast Remittance, Financial Institution, BRI Money Changer, Unit Kerja Luar Negeri.
- Informasi tentang Jasa Bank, yang terdiri dari: Jasa Bisnis, Jasa Keuangan, Jasa Kelembagaan, E-Banking, dan Treasury.
- Informasi tentang Produk Konsumer, yang terdiri dari: Kartu Kredit, Kredit Pemilikan Rumah, dan Kredit Kendaraan Bermotor.
- Informasi tentang Investasi Perbankan, yang terdiri dari: DPLK, ORI & SR, Jasa Wali Amanat, Jasa Kustodian.

- Informasi tentang Layanan Prioritas, yang terdiri dari: Produk Layanan & Privileges, Reksadana, Kartu BRIPrioritas, Outlet, Kriteria Nasabah.
- Informasi tentang Info Lelang, yang terdiri dari: Lelang Aset, Lelang Pengadaan
- Informasi tentang GCG, yang terdiri dari: Rapat Umum Pemegang Saham, Anggaran Dasar, Struktur dan Kebijakan GCG, Kode Etik, Asean Corporate Governance Scorecard, Komite Audit termasuk Piagam Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Whistleblowing System, dan Hak-hak Pemegang Saham.
- Pada bagian Karir, BRI membuka kesempatan berkarir kepada masyarakat yang ingin bergabung menjadi karyawan melalui menu e-recruitment BRI.
- Sementara bagian Hubungan Investor menjelaskan mengenai overview, Informasi Keuangan, GCG, Layanan bagi Pemegang Saham, Event, dan Berita.
- Selanjutnya pada bagian perusahaan anak memberikan informasi umum mengenai perusahaan anak dan dapat disambungkan dengan website masing-masing perusahaan anak.
- Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, Website BRI telah memuat, Struktur Grup Perusahaan, Profil Dewan Komisaris dan Direksi, serta Informasi bagi Pemegang Saham.

Website BRI juga memenuhi standar ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang mencakup:

- Part A. Rights of Shareholders
- Part B. Equitable Treatment of Shareholders
- Part C. Role of Stakeholder
- Part D. Disclosure & Transparency
- Part E. Responsibilities of the Board
- Bonus Items

Secara keseluruhan, Website BRI telah mencerminkan komitmen BRI dalam menjunjung asas keterbukaan dan transparansi.



Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisa &amp; Pembahasan Manajemen

# PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN UNIT AUDIT INTERNAL

## Pendidikan / Pelatihan Direksi, SEVP dan Komisaris Luar Negeri Tahun 2017

NO	Nama Pendidikan	Nama Peserta	Jabatan	Tanggal Training		Lokasi Training	Provider
				Mulai	Selesai		
1	Entrepreneurship Development Program	Jeffry J Wurangian	Komisaris	24 Jan'17	29 Jan'17	Cambridge, USA	MIT Management Executive Education
2	2017 CIB CEO Rountable Hong Kong	Donsuwan Simatupang	Direktur Manajemen Risiko	16 Jan'17	17 Jan'17	Hong Kong	McKenzie & Company
3	Living Wills, Planning for Bank Recovery and Resolution	A. Fuad Rahmany	Komisaris	10 Apr'17	11 Apr'17	London	BSMR
4	Refreshement MR: Risk Culture & Leadership	A. Sonny Keraf	Komisaris	22 Apr'17	30 Apr'17	Eropa	CRMS
5	Refreshement MR: Risk Culture & Leadership	Susy Liestiowaty	Direktur Kepatuhan	22 Apr'17	30 Apr'17	Eropa	CRMS
6	Refreshement MR : Risk Culture & Leadership	Haru Koesmahargyo	Direktur Strategi Bisnis & Keuangan	22 Apr'17	30 Apr'17	Eropa	CRMS
7	Refreshement MR : Risk Culture & Leadership	Donsuwan Simatupang	Direktur Manajemen Risiko	22 Apr'17	30 Apr'17	Eropa	CRMS
8	AGSM General Manager Program	Jeffry J Wurangian	Komisaris	18 Jun'17	23 Jun'17	Sydney	UNSW Business School
9	ASEAN Global Leadership Program	A. Sonny Keraf	Komisaris	11 Sep'17	15 Sep'17	Cambridge	SRW & Co
10	IIA International Conference 2017 & On Site Learning	Sonny Loho	Komisaris	22 Jul'17	29 Jul'17	Sydney	IAIB
11	Intensive Wealth Management and Risk Management Refreshment Programs For Executives	Adhyaksa Dault	Komisaris	23 Agu'17	27 Aug'17	Wina	IBI
12	Enterprise Risk Management and Risk Governance Master Class	Kuswiyoto	Direktur Menengah, Korporasi dan BUMN	16 Sep'17	23 Sep'17	Auckland & Wellington	CRMS
13	Intensive Wealth Management and Risk Management Refreshment Programs For Executives	Tri Wintarto	SEVP	19 Agu'17	27 Agu'17	Frankfurt & Wina	LSPP
14	Living Wills, Planning for Bank Recovery and Resolution	Suprajarto	Direktur Utama	28 Sep'17	29 Sep'17	London	BSMR
15	European Confederation of the Institute of Internal Auditor Conference 2017	Andrinof A. Chaniago	Komisaris	15 Sep'17	24 Sep'17	Italia & Swis	Fias Citra Lestari
16	Effective Execution of Organizational Strategy	Haru Koesmahargyo	Direktur Strategi Bisnis & Keuangan	25 Sep'17	29 Sep'17	Philadelphia	Wharton University of Pennsylvania
17	Brand Leadership: Strategy Management and Performance	Mohammad Irfan	Direktur Jaringan & Layanan	6 Nov'17	8 Nov'17	New York	Columbia Business School
18	Brand Leadership: Strategy Management and Performance	Agus Noorsanto	SEVP Operation	6-Nov-17	8-Nov-17	New York	Columbia Business School
19	Sound Practice ICAAP	Agus Noorsanto	SEVP	17-Oct-17	19-Oct-17	Praha & Wina	BARA

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE,  
SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN UNIT AUDIT INTERNALPendidikan / Pelatihan Direksi, SEVP dan  
Komisaris Luar Negeri Tahun 2017

NO	Nama Pendidikan	Nama Peserta	Jabatan	Tanggal Training		Lokasi Training	Provider
				Mulai	Selesai		
20	Sound Practice ICAAP	Tri Wintarto	SEVP Kepala Satuan Kerja Audit Intern	17-Oct-17	19-Oct-17	Praha & Wina	BARA
21	Brand Leadership: Strategy Management and Performance	Hexana Tri Sasongko	SEVP Treasury & Global Services	6-Nov-17	8-Nov-17	New York	Columbia Business School
22	Innovative Organization	Donsuwan Simatupang	Direktur Manajemen Risiko	13-Nov-17	17-Nov-17	California	Haas School of Business
23	Fintech - Innovation Banking	Indra Utoyo	Direktur Digital Banking & Teknologi Informasi	5-Dec-17	6-Dec-17	London	Imperial Collage Business School

Pendidikan / Pelatihan Direksi, SEVP dan  
Komisaris Dalam Negeri Tahun 2017

NO	Nama Pendidikan	Nama Peserta	Jabatan	Tanggal Training		Lokasi Training	Provider
				Mulai	Selesai		
1	Sertifikasi MR Level 1 Komisaris	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	6 Apr'17		Jakarta	LSPP
2	Sertifikasi MR Level 2 Komisaris	Andrinof A. Chaniago	Komisaris	8 Apr'17		Jakarta	LSPP
3	Risk Management Certification Refresher Program	Mohammad Irfan	Direktur Jaringan & Layanan	23 Mar'17	24 Mar'17	Jakarta	BARA
4	Risk Management Certification Refresher Program	Zulhelfi Abidin	Direksi	23 Mar'17	24 Mar'17	Jakarta	BARA
5	Risk Management Certification Refresher Program	Mustafa Abubakar	Komisaris	23 Mar'17	24 Mar'17	Jakarta	BARA
6	Risk Management Certification Refresher Program	A. Fuad Rahmany	Komisaris	23 Mar'17	24 Mar'17	Jakarta	BARA
7	Risk Management Certification Refresher Program	A. Sonny Keraf	Komisaris	23 Mar'17	24 Mar'17	Jakarta	BARA
8	Risk Management Certification Refresher Program	Adhyaksa Dault	Komisaris	23 Mar'17	24 Mar'17	Jakarta	BARA
9	Risk Management Certification Refresher Program	V. Sonny Loho	Komisaris	23 Mar'17	24 Mar'17	Jakarta	BARA
10	Sertifikasi MR Level 5	Indra Utoyo	Direktur Digital Banking & Teknologi Informasi	27 Mar'17		Jakarta	LSPP
11	Risk Management Certification Refresher Program	Mohammad Irfan	Direktur Jaringan & Layanan	18 Mei'17	19 Mei'17	Bali	LSPP
12	Risk Management Certification Refresher Program	Randi Anto	Direksi	18 Mei'17	19 Mei'17	Bali	BARA
13	Risk Management Certification Refresher Program	Hexana Tri Sasongko	SEVP Treasury & Global Services	18 Mei'17	19 Mei'17	Bali	BARA
14	Risk Management Certification Refresher Program	Supari	SEVP Transformation	18 Mei'17	19 Mei'17	Bali	BARA



Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisa &amp; Pembahasan Manajemen

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN UNIT AUDIT INTERNAL

### Pendidikan / Pelatihan Direksi, SEVP dan Komisaris Dalam Negeri Tahun 2017

NO	Nama Pendidikan	Nama Peserta	Jabatan	Tanggal Training		Lokasi Training	Provider
				Mulai	Selesai		
15	Risk Management Certification Refresher Program	Jeffry J. Wurangian	Komisaris	18 Mei'17	19 Mei'17	Bali	BARA
16	Risk Management Certification Refresher Program	A. Sonny Keraf	Komisaris	18 Mei'17	19 Mei'17	Bali	BARA
17	The 3rd ASEAN Marketing Summit	Kuswiyoto	Direktur Menengah, Korporasi dan BUMN	9 Sep'17		Jakarta	MarkPlus Institute
18	Sertifikasi MR Level 5	Rofikoh Rokhim	Komisaris	28 Okt'17		Jakarta	LSPP
19	The 2nd Indonesian Human Capital Summit 2017	R.Sophia Aliza	Direktur Human Capital	9 Nov'17	10 Nov'17	Jakarta	Forum Human Capital Indonesia
20	Seminar Sukses Transformasi Organisasi	Supari	SEVP Transformation	21 Nov'17	22 Nov'17	Jakarta	PPM Manajemen

### Daftar Pendidikan/Pelatihan Yang Diikuti Jajaran Komite Audit Tahun 2017

Pelatihan/*training* yang diikuti oleh anggota Komite Audit selama tahun 2017 dapat dilihat pada daftar pendidikan/*training* Dewan Komisaris selama Tahun 2017.

### Daftar Pendidikan/Pelatihan yang Diikuti Jajaran Komite Nominasi & Remunerasi Tahun 2017

Pelatihan/*training* yang diikuti oleh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi selama Tahun 2017 dapat dilihat pada daftar pendidikan/*training* Dewan Komisaris selama Tahun 2017.

### Daftar Pendidikan/Pelatihan yang Diikuti Jajaran Sekretaris Perusahaan Tahun 2017

No	Materi	Waktu & Tempat	Penyelenggara
1.	Manajemen Risiko	Jakarta, 3 Mar'17	BRI Corporate University
2.	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)	Jakarta, 14 Apr'17	BRI Corporate University
3.	<i>Good Corporate Governance</i>	Jakarta, 7 Jun'17	BRI Corporate University
4.	Rencana Jangka Panjang BRI 2018 - 2020	Jakarta, 17 Jul'17	BRI Corporate University
5.	<i>Corporate Communication, Media Handling, Keprotokolanan &amp; event management.</i>	Jakarta, 21- 22 Mei'17	<i>In House Training</i> , Divisi Sekretariat Perusahaan BRI
6.	<i>Living Wills, Planning for Bank Recovery and Resolution*</i>	London, 28 Sep'17	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko

\*) Pendidikan yang diikuti oleh *Corporate Secretary*

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE,  
SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN UNIT AUDIT INTERNALDaftar Pendidikan/Pelatihan yang Diikuti  
Jajaran Audit Internal Tahun 2017

No	Nama Pendidikan	Jenis Pendidikan	Jumlah Peserta	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
1	Group Head SKAI dan Kanins BRI Selindo	Enhancement	87 orang	20 Feb'17	22 Feb'17
3	PAI Lateral Joiner Batch 1 Tahun 2017	Development	17 orang	3 Apr'17	13 Apr'17
2	Sertifikasi dan Uji Kompetensi Audit Intern BRI Batch 1	Sertifikasi	30 orang	5 Apr'17	7 Apr'17
4	Sertifikasi dan Uji Kompetensi Audit Intern BRI Batch 2	Sertifikasi	26 orang	29 Mei'17	31 Mei'17
5	Uji dan Sertifikasi QIA Inspektur dan Wakil Inspektur	Sertifikasi	13 orang	10 Jul'17	22 Jul'17
6	Sertifikasi dan Uji Kompetensi Audit Intern BRI Batch 3	Sertifikasi	31 orang	7 Agu'17	9 Agu'17
7	Sertifikasi CIA	Sertifikasi	7 orang	4 Sep'17	4 Sep'17
8	PAI Lateral Joiner Batch 2 Tahun 2017	Development	19 orang	25 Sep'17	5 Okt'17



Kondisi ekonomi sepanjang tahun 2017 yang lebih baik dibandingkan tahun 2016 menciptakan kondisi yang mendukung kinerja BRI dengan perolehan laba bersih sebesar Rp29,04 triliun, tumbuh 10,74% dibanding tahun 2016 sebesar Rp26,23 triliun. Pertumbuhan laba yang tinggi tersebut karena pertumbuhan kredit sebesar 11,44% yang diikuti oleh penurunan biaya baik biaya dana, biaya operasional maupun biaya pencadangan kredit.



# ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

- 136 Tinjauan Ekonomi dan Industri
- 139 Tinjauan Industri Perbankan dan BRI
- 142 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
- 144 Bisnis Mikro dan Program
  - 147 Bisnis Mikro
  - 150 BRILink
  - 153 Bisnis Program
- 158 Bisnis Ritel
  - 161 Bisnis Pinjaman Ritel Konsumer
  - 164 Bisnis Pinjaman Ritel Komersial dan Menengah
  - 166 Bisnis Simpanan Ritel
  - 168 Bisnis Jasa Perbankan Ritel
- 172 Bisnis Korporasi
  - 174 Bisnis Korporasi BUMN
  - 176 Bisnis Korporasi Non BUMN
  - 178 Bisnis Sindikasi dan Jasa Keuangan Non Bank
  - 180 Bisnis Dana Institusi
  - 183 Bisnis Internasional
  - 186 Bisnis Treasury
  - 189 Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal
- 192 Bisnis Entitas Anak
  - 195 PT Bank BRISyariah (BRISyariah)
  - 199 PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
  - 203 BRI Remittance Company Ltd. (BRI Remittance)
  - 206 PT Asuransi Jiwa Beringin Jiwa Sejahtera (BRI Life)
  - 210 PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance)
- 214 Tinjauan Keuangan
- 262 Pengelolaan Human Capital
- 278 Teknologi Informasi dan Operasional
- 284 Digital Banking
- 289 Operasional



## TINJAUAN EKONOMI & INDUSTRI



“

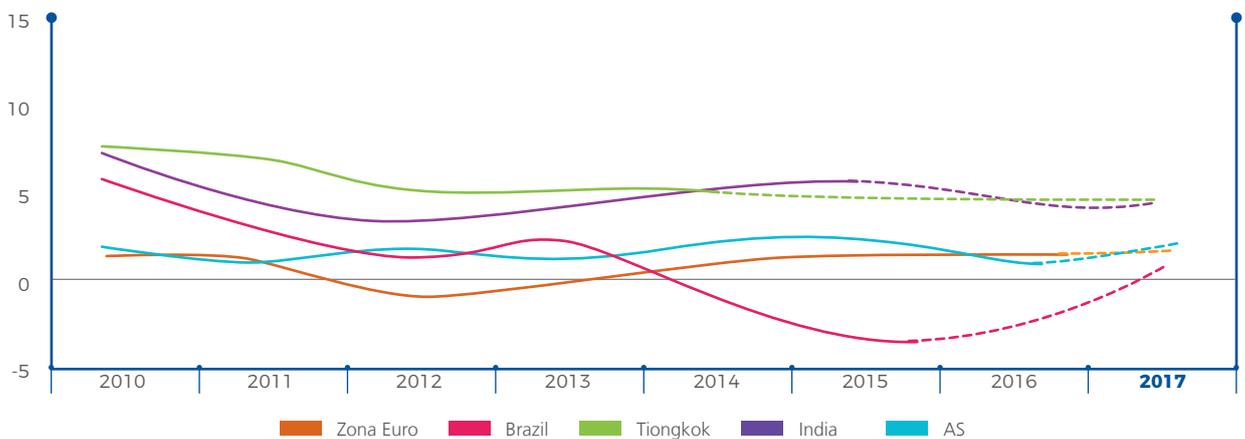
Perekonomian global pada tahun 2018 diprediksi akan terus berkembang secara positif. Hal ini sesuai dengan proyeksi dari Bank Dunia, IMF, OECD yang menyatakan pertumbuhan global tahun 2018 akan lebih tinggi dari tahun 2017.

Ketiganya masing-masing memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,9%, 3,7%, dan 3,7%. ”

## TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI

## Ekonomi Global

Kondisi perekonomian global pada tahun 2017 menunjukkan kinerja yang lebih solid dibanding tahun sebelumnya. Kondisi itu ditopang membaiknya perekonomian negara-negara maju dan negara berkembang. IMF menaikkan angka proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk 2017 dan 2018, masing-masing 0,1% lebih tinggi dari proyeksi pada bulan April dan Juli, yaitu sebesar 3,6% dan 3,7%. Hal ini menandakan sinyal perbaikan pertumbuhan ekonomi yang semakin menguat.



Seperti yang telah diperkirakan sebelumnya, di Amerika Serikat, *Federal Reserve* melanjutkan kebijakan normalisasi, baik dalam hal menaikkan suku bunga acuan (*Fed Funds Rate*) secara bertahap. Hal ini menimbulkan gejolak volatilitas yang mengakibatkan arus modal keluar dari negara berkembang termasuk Indonesia, dan dapat menghambat investasi.

Peningkatan harga komoditas pada tahun 2017 terutama didorong oleh kenaikan harga energi, sementara harga non-energi tetap relatif datar. Kenaikan harga batubara, dimana Indonesia merupakan *net exporter*, lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan harga minyak, dimana Indonesia merupakan *net importer*, sehingga menyebabkan *terms of trade* Indonesia meningkat sepanjang tahun. Hal ini diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2018.

Sumber: IMF, Bank Dunia, OECD - dikutip dari Laporan Akhir Tahun 2017 OJK

## Ekonomi Indonesia

Indikator	2015	2016	2017
Pertumbuhan PDB (%)	4,88	5,03	5,07
Nominal PDB (USD Miliar)	861,94	932,61	1.015,24
PDB/Kapita (USD)	3.373	3.605	3.877
Ekspor (USD miliar)	150,37	144,43	168,73
Impor (USD miliar)	142,69	135,65	156,89
Neraca Perdagangan (USD miliar)	7,68	9,53	11,84
Cadangan devisa (USD miliar)	105,93	116,36	130,20
Suku Bunga Acuan (%)	7,5	4,75 (7 day reverse repo)	4,25 (7 day reverse repo)
Inflasi (%)	3,35	3,02	3,61
IHSG (nilai riil)	4.593	5.297	6.356

Sumber: BPS, BI



## TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI

Perekonomian domestik tumbuh moderat, diiringi dengan sedikit perlambatan pada konsumsi rumah tangga dan penjualan ritel, namun diimbangi dengan laju inflasi yang terkendali. Pergerakan inflasi sepanjang tahun 2017 berada pada *range* target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu  $4\pm 1\%$ . Meskipun inflasi dari komponen *administered price* cukup tinggi karena adanya kenaikan tarif listrik dan BBM non subsidi pada semester I-2017, terjaganya harga pangan sepanjang 2017 dapat menjadi penyeimbang inflasi secara keseluruhan. Selain itu, stabilnya pergerakan nilai tukar juga turut menjaga *imported inflation*.

Pemerintah terus berupaya memperkuat kondisi fundamental perekonomian melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan reformasi kebijakan untuk kemudahan investasi. Untuk mendorong perekonomian, pemerintah telah melakukan sejumlah upaya seperti 16 buah Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dirilis hingga bulan Agustus 2017.

Dengan tercapainya tingkat inflasi pada kisaran 3,61%, Bank Indonesia kemudian mengambil kebijakan ekspansif melalui pelonggaran moneter (*monetary easing*) dengan menurunkan suku bunga acuannya (BI 7 Days Reverse Repo Rate) sebanyak 50 bps sepanjang tahun 2017. Kebijakan pemerintah yang didukung oleh Bank Indonesia dan lembaga-lembaga lain diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit perbankan serta mempercepat roda perekonomian Indonesia.

Di sisi ekspor, membaiknya perekonomian global dan negara-negara tujuan ekspor utama Indonesia seperti AS, Singapura, dan Tiongkok berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi domestik. Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia pada 2017 senilai US\$168,73 miliar atau meningkat 16,22% dibanding periode yang sama tahun 2016.

Selain ekspor, pengeluaran pemerintah juga terus bertumbuh. Realisasi belanja pemerintah (*government spending*) meningkat dari Rp1.860,3 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp2.001,6 triliun pada tahun 2017. Peningkatan realisasi pengeluaran pemerintah didorong kenaikan belanja pegawai dan belanja modal seperti untuk pembangunan infrastruktur.

Posisi Indonesia sebagai tujuan investasi juga semakin kuat dengan meningkatnya penilaian lembaga rating internasional selama tahun 2017. Keberhasilan ini juga terlihat dari meningkatnya realisasi investasi selama tahun 2017 yang meningkat 13,1% YoY atau mencapai Rp692,8 triliun.

Nilai tukar rupiah sedikit melemah sejalan dengan pergerakan nilai tukar hampir seluruh mata uang dunia yang juga mengalami pelemahan terhadap dolar AS. Secara rata-rata harian, rupiah melemah 0,47% menjadi Rp13.548 per dolar AS. Dolar Amerika Serikat menguat secara global sebagai dampak dari respons pasar keuangan terhadap dinamika proses pencalonan pimpinan Bank Sentral, normalisasi kebijakan moneter, meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga, serta rencana reformasi pajak di AS. Sebagai langkah antisipasi, Bank Indonesia tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar.

### Proyeksi Perekonomian Tahun 2018

Perekonomian global pada tahun 2018 diprediksi akan terus berkembang secara positif. Hal ini sesuai dengan proyeksi dari Bank Dunia, IMF, OECD yang menyatakan pertumbuhan global tahun 2018 akan lebih tinggi dari tahun 2017. Ketiganya masing-masing memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,9%, 3,7%, dan 3,7%.

Di tengah optimisme, perekonomian dunia dibayangi risiko ketegangan geopolitik seperti di Semenanjung Korea dan Timur Tengah. Kondisi itu berpotensi untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan memicu kenaikan harga minyak.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global, perekonomian Indonesia diproyeksi akan tumbuh lebih tinggi dari tahun 2017 seperti terlihat pada APBN 2018 yang menargetkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 5,4%. Hal itu diiringi dengan laju inflasi yang stabil di level  $3,5\% \pm 1\%$ .

## TINJAUAN INDUSTRI PERBANKAN DAN BRI

Seiring dengan perkembangan makro ekonomi yang kondusif, industri perbankan nasional tumbuh stabil sepanjang tahun 2017. Hal ini ditandai dengan permodalan yang tinggi dan likuiditas yang memadai untuk menjalankan fungsi intermediasi sebagai bagian dari dukungan industri terhadap pembangunan nasional.

### Pertumbuhan Kredit

Sepanjang tahun 2017, intermediasi perbankan yang ditunjukkan dari penyaluran kredit perbankan mencapai Rp4.605 triliun atau tumbuh sebesar 8,24% *year on year* (YoY) dari tahun 2016. Namun jumlah ini masih dibawah target rencana bisnis bank (RBB) sebesar 11,86%. Hal ini disebabkan oleh konsolidasi yang masih berlanjut di industri perbankan. Beberapa Bank, masih melakukan perbaikan kualitas aset melalui hapus buku terhadap kredit bermasalah.

Selain itu, karena iklim investasi semakin membaik yang diikuti dengan kenaikan *rating* Indonesia, di segmen Korporasi terjadi pula dis-intermediasi perbankan karena beberapa perusahaan memilih akses finansial langsung dari pasar modal.

Sementara itu, penyaluran kredit BRI tercatat sebesar Rp708 triliun, tumbuh 11,45% dari tahun 2016 sebesar Rp635,29 triliun.



8,24%  
Industri

11,45%  
BRI

### Kualitas Kredit

Tingkat kredit bermasalah (*non performing loan* atau NPL) industri perbankan secara umum masih berada dalam level yang terjaga, yakni sebesar 2,59%.

Sedangkan BRI berhasil mengelola kualitas kredit di atas industri yaitu sebesar 2,10%. Keberhasilan itu tidak lepas dari pelaksanaan Program "The Lower the Better", yaitu program kompetisi antar unit kerja di BRI dalam rangka menurunkan NPL serta meningkatkan *recovery ekstrakomtable*.



2,59%  
Industri

2,10%  
BRI

Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

▶ Analisa &amp; Pembahasan Manajemen



## TINJAUAN INDUSTRI PERBANKAN &amp; BRI

### Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan nasional mencapai 9,35% YoY. Pertumbuhan DPK BRI berada di atas pertumbuhan industri perbankan yaitu sebesar 10,98%.



9,35%  
Industri

10,98%  
BRI

### Likuiditas

Industri perbankan mencatat likuiditas yang mencukupi. Hal ini tercermin dari *loan to deposit ratio* (LDR) sebesar 90,04%. Sementara BRI mencatat likuiditas sedikit di bawah industri yakni sebesar 88,13%.

Likuiditas pasar juga terlihat memadai dengan *Excess reserve* perbankan sebesar Rp644,95 triliun dengan rasio alat likuid per *non-core deposit* dan rasio alat likuid per DPK masing-masing sebesar 101,75% dan 21,44%.



90,04%  
Industri

88,13%  
BRI

## TINJAUAN INDUSTRI PERBANKAN &amp; BRI

## Marjin Bunga Bersih

Industri perbankan nasional membukukan marjin bunga bersih (NIM) sebesar 5,32%. Hal ini salah satunya didorong oleh turunnya suku bunga deposito dan kredit perbankan. Sejalan dengan hal tersebut, BRI juga mampu menjaga NIM di kisaran 7,93% dengan menurunkan biaya dana Deposito selama tahun 2017.



5,32%  
Industri

7,93%  
BRI

## Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional

Biaya operasional atas pendapatan operasional (BOPO) industri perbankan sebesar 78,64%. Sementara, BOPO BRI dibawah industri yaitu sebesar 69,14% yang menunjukkan pengelolaan bisnis maupun risiko kredit yang lebih efisien dibanding industri.



78,64%  
Industri

69,14%  
BRI

## Proyeksi Kinerja Perbankan Nasional Tahun 2018

Pada tahun 2018, kinerja perbankan diproyeksi meningkat dibandingkan tahun 2017 sejalan dengan perkembangan makro ekonomi dan kondisi global yang semakin kondusif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan pertumbuhan kredit dan perolehan DPK sebesar 10%-12%.

%YoY	2016		2017		2018	
	Kredit	DPK	Kredit	DPK	Kredit	DPK
OJK					10%-12%	10%-12%
BI	7,87%	9,60%	8,24%	9,35%	10%-12%	9%-11%
LPS					10%	7,60%



## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

BRI membagi segmen pasarnya dalam tiga segmen utama sesuai dengan Visi dan Misi, yaitu Segmen Mikro, Ritel, dan Korporasi. Berdasarkan aktivitas usahanya, BRI mengelaborasi segmen bisnis utama menjadi: Bisnis Mikro dan Program, Bisnis Ritel, Bisnis Korporasi, Bisnis Internasional, Bisnis Treasury, Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal, dan Perusahaan Anak yang bergerak perbankan konvensional dan syariah, layanan remitansi, asuransi jiwa, dan layanan pembiayaan.

### ● BISNIS MIKRO & PROGRAM

- ▶ 1. **Bisnis Mikro**
- ▶ 2. **BRILink**
- ▶ 3. **Bisnis Program**

Bisnis Mikro ditujukan untuk melayani nasabah individual dan pengusaha mikro, sedangkan Bisnis Program ditujukan untuk mendukung program Pemerintah dalam memberdayakan usaha masyarakat.

### ● BISNIS RITEL

- ▶ 1. **Bisnis Pinjaman Ritel Konsumer**
- ▶ 2. **Bisnis Pinjaman Ritel Komersial dan Menengah**
- ▶ 3. **Bisnis Simpanan Ritel**
- ▶ 4. **Bisnis Jasa Perbankan Ritel**

Bisnis Ritel ditujukan untuk melayani wirausaha kecil dan menengah (UKM) antara lain layanan pembiayaan konsumen dan komersial.

## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA



## BISNIS KORPORASI

- ▶ 1. Bisnis BUMN
- ▶ 2. Bisnis Korporasi Non BUMN
- ▶ 3. Bisnis Sindikasi & Jasa Lembaga Keuangan Non Bank
- ▶ 4. Bisnis Dana Institusi
- ▶ 5. Bisnis Internasional
- ▶ 6. Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal
- ▶ 7. Bisnis Treasury

Segmen Bisnis Korporasi BRI melayani korporasi besar dan institusi seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun non-BUMN yang memberikan *trickle down business* bagi segmen UMKM, dengan menyediakan rangkaian lengkap produk kredit dan simpanan serta jasa perbankan meliputi layanan perbankan internasional, treasury dan Jasa penunjang pasar modal. Selain itu segmen bisnis ini melakukan pinjaman sindikasi dan pemberian fasilitas *limit committed* dan *uncommitted* kepada industri keuangan non bank (IKNB) di dalam negeri.



## BISNIS ENTITAS ANAK

- ▶ 1. PT Bank BRISyariah [BRI Syariah]
- ▶ 2. PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk [BRI Agro]
- ▶ 3. BRI Remittance Company Ltd. [BRI Remittance]
- ▶ 4. PT Asuransi Jiwa Beringin Jiwa Sejahtera [BRI Life]
- ▶ 5. PT BRI Multifinance Indonesia [BRI Finance]

Aktivitas bisnis Entitas Anak meliputi perbankan konvensional dan syariah, layanan remitansi, asuransi jiwa, dan layanan pembiayaan.

Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisa &amp; Pembahasan Manajemen



TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

# BISNIS MIKRO DAN PROGRAM



“

Selama tahun 2017, Segmen Bisnis Mikro dan Program menyumbang 53,9% dari Laba Bersih BRI secara konsolidasi atau mencapai Rp15,6 triliun. ”

⊕ **14,0%**

**Pinjaman Mikro Dan Program**

*Outstanding* pinjaman Mikro dan Program tumbuh sebesar 14,0% YoY

⊕ **14,3%**

**Simpanan Mikro dan Program**

*Outstanding* Simpanan Mikro dan Program tumbuh sebesar 14,3% YoY

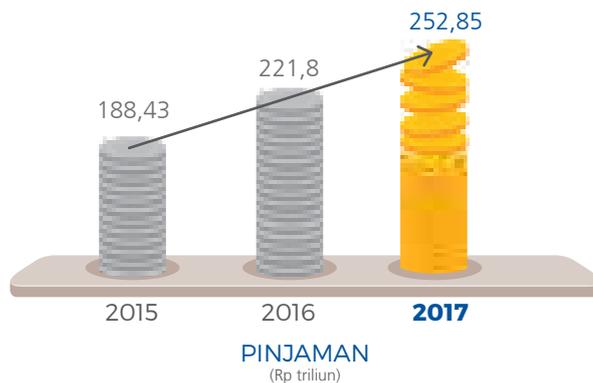
⊕ **114,2%**

**Volume Transaksi BRILink**

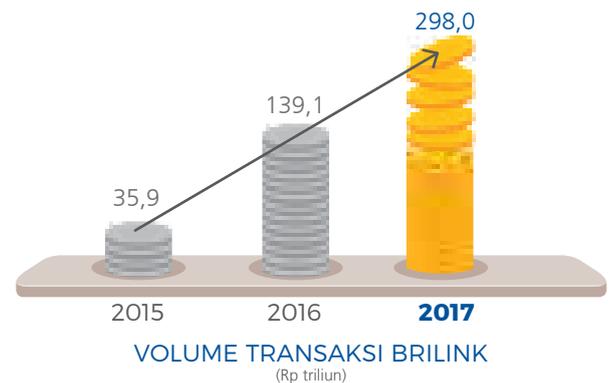
Volume transaksi melalui layanan BRILink meningkat sebesar 114,2% YoY

### Ringkasan Kinerja Bisnis Mikro dan Program 2017

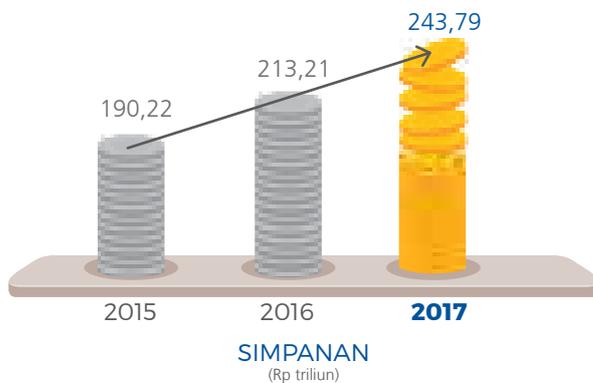
*Outstanding* pinjaman Mikro dan Program tumbuh sebesar 14,0% YoY dari Rp221,8 triliun di tahun 2016 menjadi Rp252,85 triliun di tahun 2017.



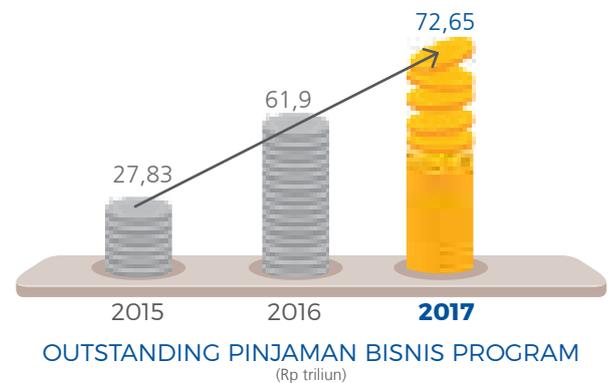
Volume transaksi melalui layanan BRILink meningkat sebesar 114,2% YoY dari Rp139,1 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp298,0 triliun di tahun 2017.



*Outstanding* Simpanan Mikro dan Program tumbuh sebesar 14,3% YoY dari Rp213,21 triliun di tahun 2016 menjadi Rp243,79 triliun di tahun 2017.



*Outstanding* Pinjaman Bisnis Program yang meliputi KUR skema baru, KUR lama, Kredit Pangan dan Kredit Program lainnya sebesar Rp72,65 triliun, tumbuh 17,4% YoY dari tahun 2016 sebesar Rp61,9 triliun.



Pencapaian Laba sebelum pajak untuk Bisnis Mikro dan Program tumbuh sebesar 2,2% YoY dari Rp19,57 triliun di tahun 2016 menjadi Rp19,98 triliun di tahun 2017.





## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Segmen Bisnis Mikro dan Program terdiri dari:

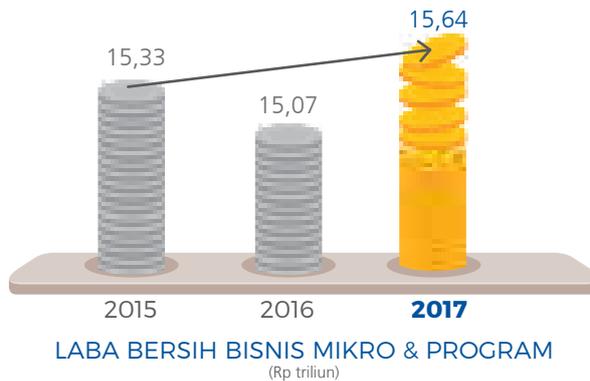
1. Bisnis Mikro
2. BRILink
3. Bisnis Program

### Profitabilitas Segmen Bisnis Mikro dan Program

Selama tahun 2017, Segmen Bisnis Mikro dan Program menyumbang 53,9% dari Laba Bersih BRI secara konsolidasi atau mencapai Rp15,6 triliun. Mayoritas profitabilitas Bisnis Mikro dan Program bersumber dari pendapatan bunga bersih. Hal tersebut diperlukan guna menyeimbangkan besarnya biaya operasional di segmen ini, disaat potensi *cross-selling* dari pendapatan jasa masih terbatas.

Keunggulan jumlah jaringan layanan Bisnis Mikro dan Program BRI terlihat dari banyaknya unit kerja layanan yang tersebar diseluruh Indonesia. Selain itu, Bisnis Mikro dan Program juga memerlukan sumber daya manusia yang banyak dengan kualitas SDM yang handal. Dengan keunggulan kompetitif tersebut, tentu memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit.

Namun demikian, potensi bisnis serta peluang peningkatan produktivitas dengan semakin optimalnya penggunaan teknologi masih terbuka. Oleh karena itu, perusahaan optimis bahwa segmen bisnis Mikro dan Program akan tetap menjadi pendorong utama profitabilitas perusahaan.



## BISNIS MIKRO

⬆️ **12,7%**  
**Pinjaman Mikro**

*Outstanding* pinjaman Mikro pada tahun 2017 sebesar Rp180,20 triliun.

⬆️ **Rp243,8** triliun  
**Simpanan Mikro dan Program**

*Outstanding* Simpanan Mikro dan Program tumbuh sebesar 14,3% YoY

⬆️ **85%**

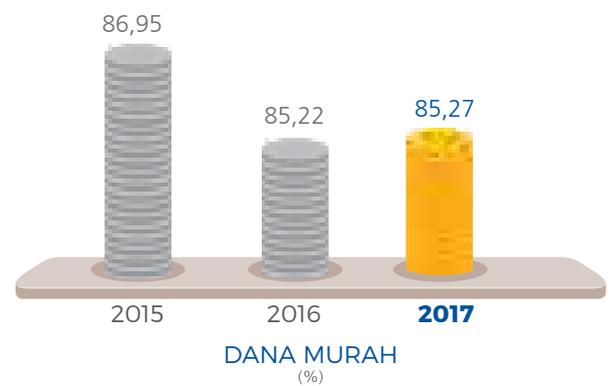
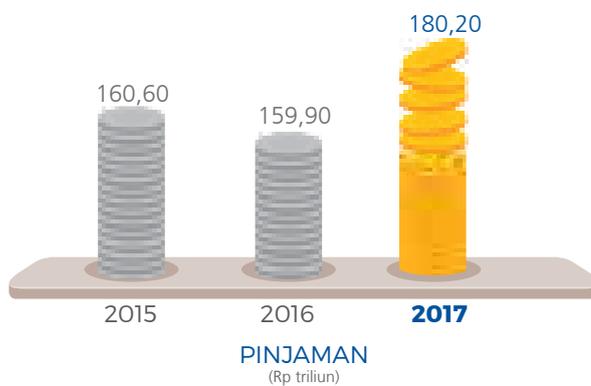
**Dana murah Mikro**

Komposisi Dana murah Mikro stabil dikisaran 85% selama 3 tahun terakhir.

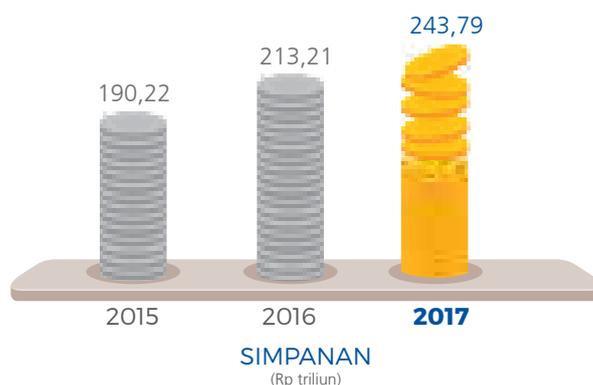
### Ringkasan Kinerja Bisnis Mikro 2017

*Outstanding* pinjaman Mikro pada tahun 2017 sebesar Rp180,20 triliun, tumbuh 12,7% dari posisi tahun 2016 sebesar Rp159,90 triliun.

Komposisi Dana murah Mikro stabil dikisaran 85% selama 3 tahun terakhir.



*Outstanding* Simpanan Mikro dan Program tumbuh sebesar 14,3% YoY dari Rp213,21 triliun di tahun 2016 menjadi Rp243,79 triliun di tahun 2017.





## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Bisnis mikro BRI terus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kerjanya sebagai bisnis inti perusahaan dan pemimpin pasar di industri. Keunggulan segmen bisnis ini adalah memiliki jaringan unit kerja yang terbesar dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia yang didukung oleh SDM handal serta *customer base* yang solid. Saat ini lebih dari 65% pekerja BRI melayani segmen Mikro dan Program melalui beberapa jenis unit kerja sebagai berikut:

Outlet	2015	2016	2017	YoY
BRI Unit	5.360	5.380	5.382	2
Teras BRI	2.543	2.545	2.536	9
Teras Mobile	636	638	638	0
Total	8.539	8.563	8.556	11

### Strategi Bisnis Mikro Tahun 2017

Strategi pengembangan bisnis yang telah dilakukan sepanjang tahun 2017 yaitu:

- Menjaga pertumbuhan pinjaman mikro dengan meningkatkan produktivitas tenaga pemasar melalui perbaikan skema kompensasi sebagaimana dijelaskan pada Tinjauan Operasional SDM di Laporan Tahunan ini.
- Mempertahankan pangsa pasar di segmen golongan berpenghasilan tetap.  
Untuk mempertahankan pangsa pasar, BRI telah melakukan penyesuaian suku bunga agar tetap kompetitif dalam menghadapi persaingan yang meningkat di produk pinjaman untuk golongan berpenghasilan tetap.
- Business process reengineering* dengan optimalisasi IT, terutama pada proses prakarsa dan *monitoring* pinjaman; Implementasi strategi *business process reengineering* dengan pemanfaatan Teknologi Informasi didasari pada kebutuhan proses bisnis yang lebih cepat dan aman. Strategi ini menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kecepatan layanan dan mitigasi risiko. Dalam hal ini, BRI telah membangun BRISPOT, sebuah aplikasi *mobile based* dengan konsep *one stop service* bagi Mantri (petugas kredit) untuk proses kredit *end to end*. Dengan aplikasi ini, Mantri dan Kepala BRI Unit dapat melakukan prakarsa kredit dimanapun dan kapanpun sehingga produktivitas meningkat.
- Pengembangan produk baru berupa Kupedes Keagenan;  
Strategi pengembangan produk Kupedes Keagenan bertujuan untuk mengatasi keterbatasan likuiditas Agen BRILink dalam melakukan layanan keuangan. Melalui inovasi Kupedes Keagenan, BRI berharap seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati layanan dengan nyaman .
- Kajian mengenai penyaluran kredit melalui *referral* Agen BRILink; dan Untuk memperluas inklusi keuangan, BRI mengolah referensi informasi calon debitur potensial dari para Agen BRILink. Kedekatan Agen BRILink dengan masyarakat dapat memberikan *feedback* kepada BRI untuk menilai rekam jejak calon debitur .
- Pengembangan *community banking* melalui pemberdayaan komunitas.  
Bisnis Mikro juga melakukan pengembangan komunitas sebagai cikal bakal dari *community banking* dimana perbankan sudah menjadi bagian dari masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan layanan keuangan secara keseluruhan, seperti konsultasi keuangan, pembiayaan dalam bentuk kredit, layanan simpanan dan kegiatan *capacity building*. Dalam hal ini, secara teknis BRI menempatkan pegawai BRI Unit sesuai dengan domisilinya sehingga diharapkan mampu mempercepat terwujudnya *community banking*. Sebagai langkah awal, pendekatan yang dilakukan adalah berupa pengembangan komunitas-komunitas yang sudah ada dalam masyarakat .

### Kinerja Bisnis Mikro Tahun 2017

Implementasi strategi bisnis berdampak pada pencapaian kinerja Bisnis Mikro sesuai penjelasan berikut:

#### Kinerja Pinjaman Mikro

Sebagaimana dijelaskan pada ringkasan kinerja Bisnis Mikro diatas, pada tahun 2017, Bisnis Mikro BRI mampu meningkatkan *outstanding* kredit menjadi sebesar Rp180,2 triliun atau tumbuh 12,7% dibanding tahun 2016 sebesar

## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

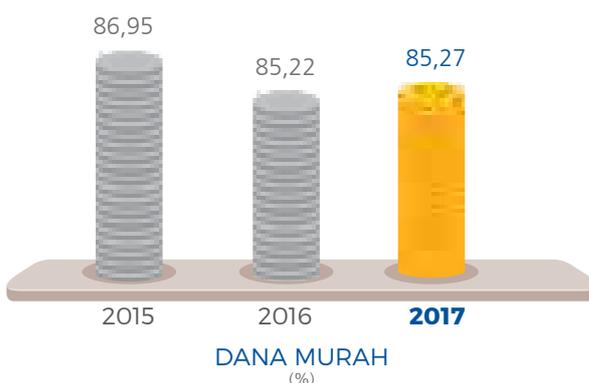
Rp159,90 triliun. *Outstanding* tersebut berasal dari penyaluran produk Kupedes dan Kupedes Rakyat kepada 4,4 juta debitur.



Selain pencapaian pertumbuhan pinjaman, kualitas aset juga menjadi hal yang penting dalam mendukung profitabilitas dan keberlanjutan kinerja bisnis Mikro. Di akhir tahun 2017, tingkat NPL (*Non-Performing Loan*) Bisnis Mikro BRI terjaga di kisaran 1,1% selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Hal tersebut menunjukkan bahwa BRI berkomitmen untuk selalu menjaga tingkat kualitas kredit dengan melakukan penyaluran kredit tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian.

### Kinerja Simpanan Mikro

Sejalan dengan penyaluran kredit, Bisnis Mikro BRI juga melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan, dengan Tabungan Simpedes sebagai produk utama yang ditawarkan. Pada tahun 2017, Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat sebesar 14,3% menjadi Rp243,8 triliun dari Rp213,2 triliun di tahun 2016. Tabel di bawah ini menunjukkan komposisi dana murah pada Simpanan Mikro dalam 3 tahun terakhir.



### Dukungan kepada Program Pemerintah

Sebagai bagian dari upaya mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, Bisnis Mikro juga memasarkan Produk Tabunganku sebanyak 5,9 juta rekening dan Tabungan Simpanan Pelajar sebanyak 14,15 juta rekening kepada masyarakat.

### Strategi Bisnis Mikro Tahun 2018

Bisnis Mikro akan tetap menjadi fokus bisnis utama BRI karena pembiayaan Usaha Mikro di Indonesia masih memiliki ruang yang sangat luas. Beberapa strategi yang akan dilakukan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan penerapan konsep *community banking* melalui realokasi pekerja mikro di daerah asal atau sekitarnya.
2. Fokus kepada peningkatan kapabilitas (keahlian, pengetahuan, dan teknologi) tenaga pemasar dalam hal *cross-selling* dan kemampuan *leadership* di jajaran manajemen bisnis mikro di seluruh Indonesia.
3. Melakukan *review* dan penyempurnaan jenjang karir pekerja bisnis mikro sehingga dapat memberikan motivasi bagi pekerja untuk terus meningkatkan kinerjanya.
4. Mengoptimalkan *cross selling* dengan tujuan untuk pengoptimalan produk yang dapat menghasilkan *Fee-Based Income*.
5. Melakukan revitalisasi/rejuvenasi *product proposition* dan fitur mikro dalam rangka terutama untuk perolehan DPK dan *Fee-Based Income* Mikro pada segmen muda.
6. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas *business process* melalui penyempurnaan layanan fitur produk pinjaman dan simpanan.

Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

▶ Analisa &amp; Pembahasan Manajemen



## BRILINK

⊕ 279.750

Jumlah agen  
BRILink

Jumlah agen BRILink  
meningkat sebesar  
230,9% YoY

⊕ 202,1 juta transaksi

Jumlah transaksi  
BRILink

Jumlah transaksi BRILink  
meningkat sebesar  
105,4% YoY

⊕ 128,9%

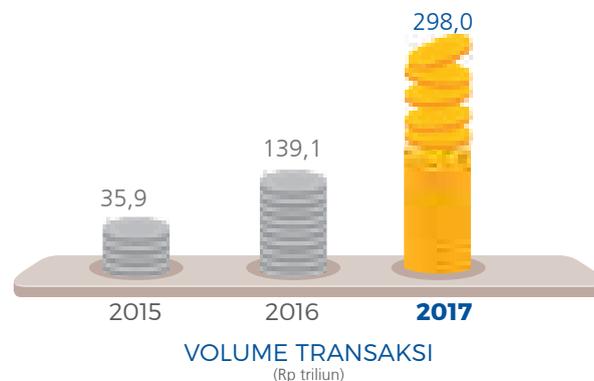
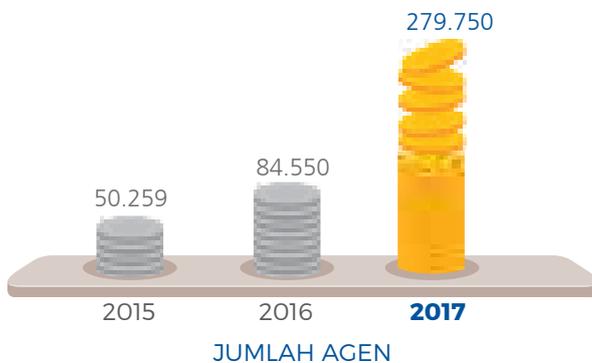
Fee Income  
BRILink

Fee Income BRILink  
pada tahun 2017 sebesar  
Rp161,6 miliar

### Ringkasan Kinerja BRILink Tahun 2017

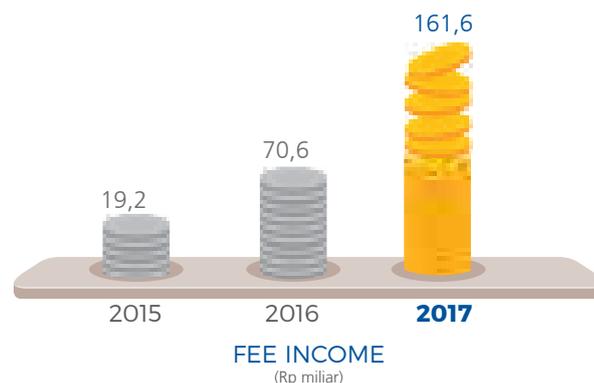
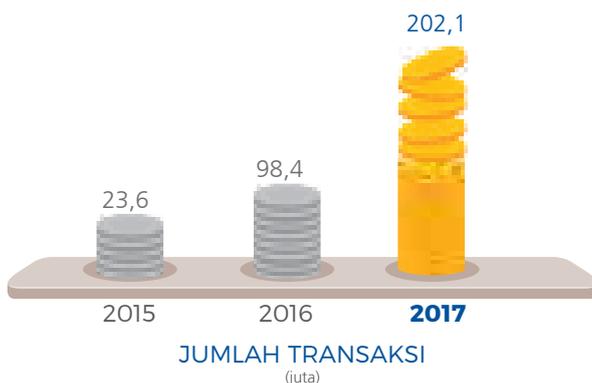
Jumlah agen BRILink meningkat sebesar 230,9% YoY dari 84.550 agen di 2016 menjadi 279.750 agen di tahun 2017.

Nilai transaksi meningkat 114,2% YoY dari Rp139,1 triliun di tahun 2016 menjadi Rp298,0 triliun di tahun 2017.



Jumlah transaksi BRILink meningkat sebesar 105,4% YoY dari 98,4 juta transaksi di tahun 2016 menjadi 202,1 juta transaksi di tahun 2017.

Fee Income BRILink pada tahun 2017 sebesar Rp161,6 miliar, meningkat 128,9% yoy dari fee income di tahun 2016 sebesar Rp70,5 miliar.



## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

BRILink merupakan layanan *branchless banking* BRI yang diluncurkan pada tahun 2014. Inovasi produk ini merupakan salah satu komitmen BRI untuk mendukung program pemerintah dalam hal meningkatkan layanan keuangan inklusif dan menjaga kedaulatan rupiah.

### Strategi BRILink Tahun 2017

#### 1. Menambah jumlah agen untuk meningkatkan *entry barrier*

BRI menerapkan strategi penambahan jumlah agen BRILink dengan memanfaatkan *database* nasabah eksisting. Dengan demikian, Agen BRILink merupakan agen pilihan yang terseleksi (*cherry-picked*) dari nasabah Mikro BRI saat ini. Selain itu, BRI juga mempertimbangkan lokasi calon agen yang tepat sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat disekitarnya dan mendukung pertumbuhan bisnis agen. Penambahan jumlah agen BRILink ditujukan untuk memperluas *delivery channel* BRI agar dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, terutama di segmen *un-bank*.

#### 2. Mengembangkan layanan BRILink versi internet dan *mobile* untuk mempercepat proses akuisisi agen

Untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan BRILink, BRI mengembangkan aplikasi *smartphone* berbasis Android yang digunakan oleh Agen BRILink untuk melayani transaksi keuangan kepada masyarakat. Salah satu keunggulan aplikasi *smartphone* berbasis Android adalah kemudahan penambahan fitur dan lebih aman dari risiko kejahatan *skimming* kartu.

Dengan dikembangkannya layanan Agen BRILink melalui aplikasi berbasis android tersebut, para Agen dapat menggunakan dua perangkat (*device*) dalam melayani transaksi keuangan kepada masyarakat yaitu EDC (*Electronic Data Capture*) dan perangkat Mobile (*smartphone*) yang terhubung secara *real time online* dengan sistem perbankan BRI.

Melalui perangkat tersebut, Agen BRILink dapat melayani kebutuhan masyarakat akan berbagai transaksi perbankan seperti setor dan tarik tunai, pembayaran angsuran pinjaman BRI, dan transfer antar rekening perbankan.

Fitur BRILink juga menawarkan berbagai kemudahan kepada masyarakat seperti pembelian pulsa telepon dan paket data, token listrik PLN, iuran BPJS Kesehatan. Selain itu, inklusi keuangan juga tercermin dari kemudahan masyarakat dalam pembelian asuransi mikro, yang memberikan banyak manfaat berupa santunan atas risiko gangguan kesehatan, kecelakaan dan risiko meninggal dunia.

#### 3. Program promosi dan edukasi untuk meretensi agen dan meningkatkan produktivitas agen

Sejalan dengan penambahan jumlah agen, BRI juga membentuk komunitas atau paguyuban Agen BRILink. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan loyalitas dan kinerja para agen. Komunitas juga berfungsi untuk memberikan edukasi seputar keagenan kepada anggota baru, dan hingga akhir tahun 2017, tercatat sebanyak 466 komunitas/paguyuban Agen BRILink yang telah terbentuk di seluruh Indonesia.

Selain itu, BRI juga melaksanakan program promosi serta pemasaran yang efektif baik bagi agen maupun nasabah agen untuk meningkatkan jumlah transaksi. Dalam hal ini, BRI melibatkan tenaga pemasar khusus BRILink untuk lebih memperkuat kinerja BRILink.

Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

▶ Analisa &amp; Pembahasan Manajemen



## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

### Kinerja BRILink Tahun 2017

Dalam perkembangannya, BRILink terus bertumbuh baik dari jumlah agen maupun transaksi. Pada 2017, jumlah Agen BRILink mencapai 279.750 agen, atau meningkat 230,9% YoY dari tahun 2016 yang sebesar 84.550 agen. Diperkirakan, pangsa pasar jumlah agen BRILink tersebut mencapai 65,2% dari total pasar Laku Pandai (*branchless banking*) di industri perbankan yang mencapai 428.852 agen (September 2017).

Sementara itu, jumlah transaksi finansial meningkat 105,4% YoY atau mencapai sebanyak 202,1 juta transaksi dengan volume transaksi yang tumbuh 114,2% YoY atau mencapai Rp298,0 triliun. Peningkatan aktivitas transaksi melalui BRILink berdampak pada meningkatnya perolehan *fee based income* sebesar Rp161,6 miliar (setelah dikurangi *sharing fee* yang menjadi hak agen), atau meningkat 128,9% YoY dari tahun 2016 sebesar Rp70,6 triliun.

### Strategi Pengembangan BRILink Tahun 2018

Untuk tahun 2018, BRI akan melanjutkan strategi perluasan *delivery channel* dengan menambah jumlah Agen BRILink menjadi sebanyak 500.000 agen secara merata ke seluruh penjuru negeri. Hal ini didukung dengan teknologi BRISat untuk menjangkau daerah yang selama ini belum didukung layanan *provider/perusahaan telco*. Selanjutnya, BRILink akan terus meningkatkan kualitas layanan dengan menambah fitur produk dengan bekerja sama dengan pihak ketiga.

## BISNIS PROGRAM

**↑17,4%**  
**Pinjaman Bisnis Program**  
*Outstanding* pinjaman Bisnis Program sebesar Rp72,7 triliun

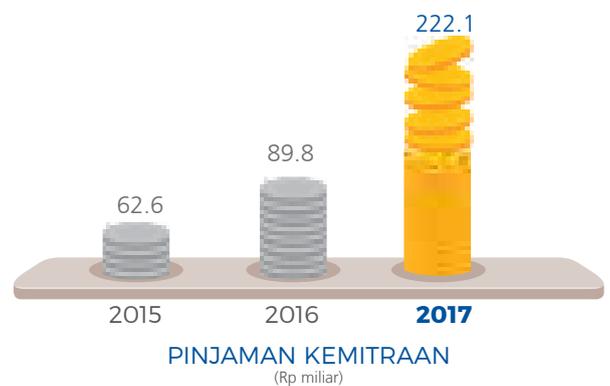
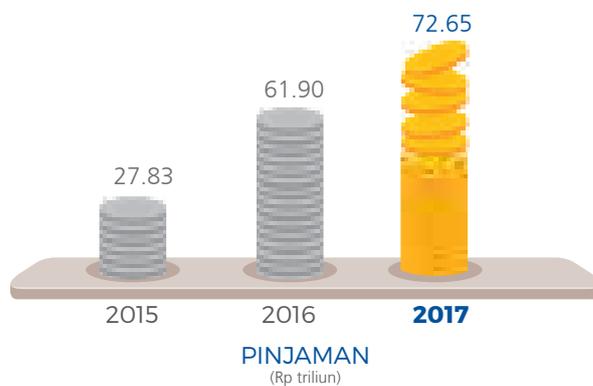
**↑22,75%**  
**Kredit Pangan**  
*Outstanding Kredit* Pangan sebesar Rp3,1 triliun

**↑147,4%**  
**Pinjaman Kemitraan**  
Realisasi penyaluran Pinjaman Kemitraan sebesar Rp222,1 miliar

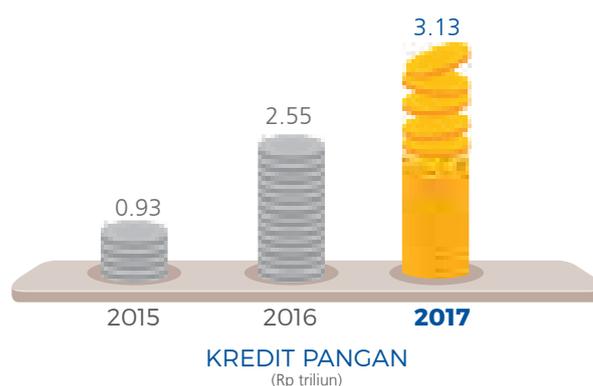
### Ringkasan Kerja Bisnis Program Tahun 2017

*Outstanding* pinjaman Bisnis Program sebesar Rp72,65 triliun, meningkat 17,4% dari tahun 2016 sebesar Rp61,9 triliun. Komposisi pinjaman Bisnis Program saat ini mayoritas berasal dari produk KUR Mikro baru dengan *outstanding* pinjaman di akhir tahun 2017 sebesar Rp59,24 triliun.

Realisasi penyaluran Pinjaman Kemitraan sebesar Rp222,1 miliar, tumbuh signifikan sebesar 147,4% YoY dari tahun 2016 Rp89,8 miliar.



*Outstanding Kredit Pangan* sebesar Rp3,1 triliun, tumbuh 22,75% YoY dari tahun 2016 sebesar Rp2,5 triliun.



Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

▶ Analisa &amp; Pembahasan Manajemen



## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

BRI secara konsisten mendukung upaya pemerintah untuk mengembangkan dan memperbaiki perekonomian, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui penguatan dan layanan usaha mikro kecil dan menengah. BRI merupakan salah satu Bank penyalur program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memberi manfaat antara lain mempercepat pengembangan usaha sektor riil, perluasan kesempatan kerja, dan meningkatkan akses pembiayaan sesuai dengan program Nawa Cita Pemerintah.

Jumlah debitur yang berhasil naik kelas untuk kategori kredit program menjadi kredit komersial posisi selama tahun 2017 adalah sebanyak 2.052 debitur (diluar program KUR baru). Sementara Jumlah debitur yang berhasil naik kelas untuk kategori Pinjaman Kemitraan menjadi kredit program atau komersial adalah sebanyak 226 debitur (diluar program KUR).

### Produk dan Jasa Bisnis Program

Produk Bisnis Program, meliputi:

#### 1. KUR Mikro

Program KUR Mikro ditujukan untuk mempercepat pengembangan sektor produktif (non-perdagangan) dan pemberdayaan usaha mikro. Skema pinjaman KUR berupa modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit. Target nasabah pinjaman ini adalah pemilik bisnis perseorangan dengan kebutuhan kredit maksimum Rp25 juta. Pinjaman ini disubsidi pemerintah dan dijamin oleh asuransi kerugian kredit oleh perusahaan asuransi BUMN.

#### 2. KUR Ritel

Program KUR Ritel bertujuan sama dengan KUR Mikro namun dengan skala usaha yang lebih sedikit diatas KUR Mikro. Besaran pinjaman yang dapat dinikmati oleh nasabah KUR Ritel adalah maksimum plafond Rp500 juta.

#### 3. KUR TKI

KUR TKI merupakan program bantuan pemerintah yang diperuntukkan kepada TKI yang memiliki usaha sampingan di lokasi domisili asal TKI tersebut. Program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan taraf hidup TKI serta menyediakan lapangan kerja sebagai persiapan jika TKI tersebut tidak lagi produktif bekerja di luar negeri.

#### 4. Kredit Pangan

Kredit Pangan merupakan pinjaman yang ditujukan untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah.

#### 5. Kredit Resi Gudang

Pinjaman ini terutama ditujukan untuk membantu petani yang memiliki persediaan yang dapat dijaminkan dalam jangka pendek.

#### 6. Pinjaman Kemitraan

Pinjaman bersuku bunga lunak yang bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat *un-bank* yang memiliki usaha produktif dengan potensi pengembangan lebih lanjut. BRI juga memberikan pelatihan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan kepada mitra binaan penerima pinjaman kemitraan. (Penjelasan lebih lanjut mengenai Pinjaman Kemitraan terdapat pada Bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Laporan Tahunan ini.)

## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

## 7. Program Jaring

Merupakan inisiasi OJK untuk mendukung pembangunan kemaritiman sesuai dengan program Nawa Cita Pemerintah dengan memberikan akses terhadap produk-produk Jasa Keuangan, khususnya akses terhadap pembiayaan.

## Sektor Industri Bisnis Program

BRI berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat golongan ekonomi lemah atau sektor usaha kecil dengan menyediakan sumber pembiayaan usaha yang terjangkau. Hal ini sejalan dengan komitmen BRI kepada pemerintah untuk menyalurkan ke Sektor Produksi (Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Jasa).

### 01. Pertanian

Seluruh usaha di sektor pertanian, termasuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perternakan.

### 02. Perikanan

Seluruh usaha di sektor perikanan, termasuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.

### 03. Industri Pengolahan

Seluruh usaha di sektor Industri Pengolahan, termasuk industri kreatif di bidang perikanan, fesyen, animasi, video, dan alat mesin pendukung kegiatan ketahanan pangan.

### 04. Konstruksi

Seluruh usaha di sektor Konstruksi, termasuk perumahan, konstruksi gedung, bangunan perairan, dll.



### 05. Perdagangan

Seluruh usaha di sektor perdagangan, termasuk kuliner dan pedagang eceran.

### 06. Jasa-Jasa

Seluruh usaha di sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan, sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi, sektor *real estate*, usaha penyewaan, jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya.

## Strategi Bisnis Program Tahun 2017

Untuk mengoptimalkan peran BRI dalam mendukung program pemerintah, perusahaan telah melakukan reorganisasi agar lebih fokus berdedikasi dalam menggali potensi bisnis pertanian/agri bisnis yang ada.

Sepanjang tahun 2017, strategi Bisnis Program yang telah diimplementasikan antara lain:

1. Memaksimalkan penyaluran KUR Mikro dan KUR Ritel baru sesuai target yang diberikan oleh pemerintah.
2. Memanfaatkan potensi dalam menyalurkan pembiayaan untuk komoditi unggulan seperti Kelapa Sawit, Tebu, Jagung, Sapi dan Perikanan dengan membuat skim kredit khusus dan kerjasama bisnis dengan BUMN dan Perusahaan Swasta Nasional Lain.



## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

- Memperluas layanan dengan cara memperluas segmen kredit pangan dari semula Rp500 juta untuk masing-masing jenis kredit (KMK/KI) dengan *plafond* maksimal Rp1 miliar menjadi Rp1 miliar untuk masing-masing jenis kredit. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk dapat memaksimalkan pemasaran segmen kredit pangan.
- Pemanfaatan *Value chain* nasabah korporasi, dengan pola inti dan plasma.

### Kinerja Bisnis Program Tahun 2017

BRI membuktikan komitmennya untuk mendukung program pemerintah terutama dalam memberdayakan perekonomian masyarakat dengan meningkatnya *outstanding* Total Pinjaman Bisnis Program menjadi Rp72,65 triliun, meningkat 17,36% dari tahun 2016 sebesar Rp61,90 triliun. Pencapaian ini didorong oleh:

#### 1. Keberhasilan Penyaluran KUR Mikro dan KUR Ritel baru

BRI merupakan bank dengan porsi penyaluran KUR terbesar di Indonesia. Sejak tahun 2016, BRI menyalurkan sekitar 65% dari total target penyaluran nasional. Sepanjang tahun 2017, BRI telah menyalurkan Rp61,69 triliun KUR Mikro baru dan Rp7,77 triliun KUR Ritel baru atau secara total Rp69,47 triliun. Pencapaian tersebut sebesar 97,85% dari target sebesar Rp71 triliun dengan penyaluran kepada total 3,7 juta nasabah selama tahun 2017 baik untuk KUR Mikro baru maupun KUR Ritel baru, 40,4% dari penyaluran tersebut ditujukan kepada sektor produktif. Hal ini sesuai dengan tujuan Pemerintah untuk memajukan sektor non-perdagangan.

#### 2. Pencapaian *Outstanding* Kredit Pangan dan Resi Gudang

*Outstanding* Kredit Pangan tercapai sebesar Rp3,13 triliun, atau tumbuh 22,75% dari tahun 2016 sebesar Rp2,55 triliun. Sedangkan *outstanding* kredit resi gudang subsidi mencapai Rp28,60 miliar.

#### 3. Pencapaian Penyaluran Pinjaman Kemitraan

Sementara realisasi penyaluran Pinjaman Kemitraan sebesar Rp222,1 miliar, tumbuh signifikan sebesar 147,4% dari tahun 2016 Rp89,76 miliar.

#### 4. Terjaganya Kualitas Aset

Selain keberhasilan dalam penyaluran pinjaman, BRI juga memperhatikan kualitas pinjaman tersebut dengan terjaganya tingkat NPL Pinjaman Bisnis Program dibawah 3% selama 3 (tiga) tahun terakhir.



## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

### Strategi Pengembangan Bisnis Program 2018

Pertumbuhan kinerja yang positif ditahun 2017 diharapkan dapat menjadi lebih baik lagi ditahun 2018. Untuk mempersiapkan hal tersebut strategi yang dipersiapkan adalah sebagai berikut:

- Memaksimalkan penyaluran KUR baru
- Pengembangan skim kredit berbasis komoditi unggulan
- Peningkatan kerjasama dengan lembaga/ instansi pemerintah/ swasta dalam pemasaran
- Penyaluran kredit hasil *value chain* dan *trickledown bussines* dengan perusahaan inti
- Meneruskan kerjasama penyaluran pinjaman kemitraan dengan BUMN

Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisa &amp; Pembahasan Manajemen



TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

# BISNIS RITEL

“

Pada tahun 2017, segmen Bisnis Ritel membukukan profit sebesar Rp8,97 triliun, meningkat 13,88% YoY dari tahun 2016 yang sebesar Rp7,88 triliun. ”



⊕ **12,55%**

**Pinjaman  
BRIGuna**

BRI menyalurkan pinjaman BRIGuna sebesar Rp88,05 triliun

⊕ **11,91%**

**Kredit Ritel  
Komersial**

BRI telah menyalurkan Kredit Ritel Komersial sebesar Rp129,16 triliun

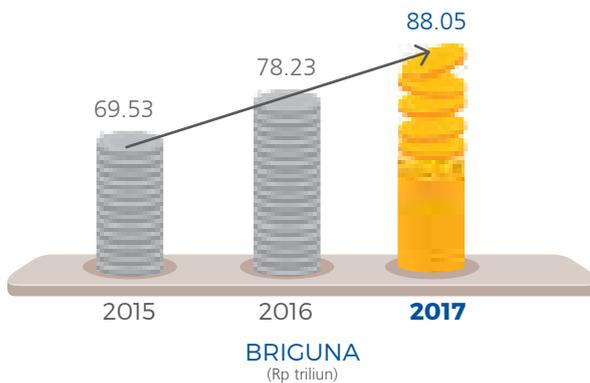
⊕ **13,36%**

**Kredit  
Menengah**

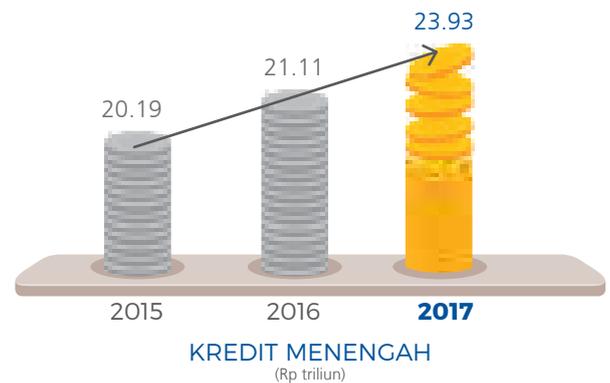
Sementara Kredit Menengah telah disalurkan Rp23,93 triliun

### Ringkasan Kinerja Bisnis Ritel Tahun 2017

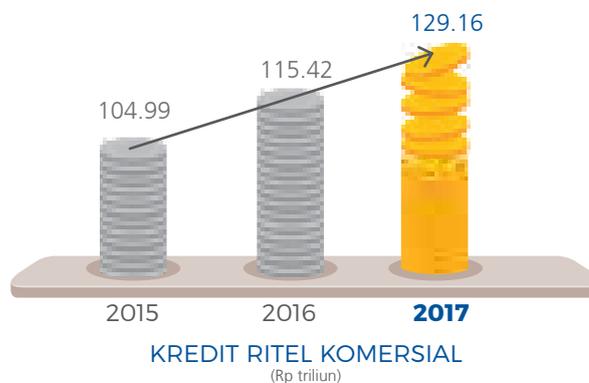
BRI menyalurkan pinjaman BRiguna sebesar Rp88,05 triliun, meningkat 12,55% dibanding tahun 2016 sebesar Rp78,23 triliun.



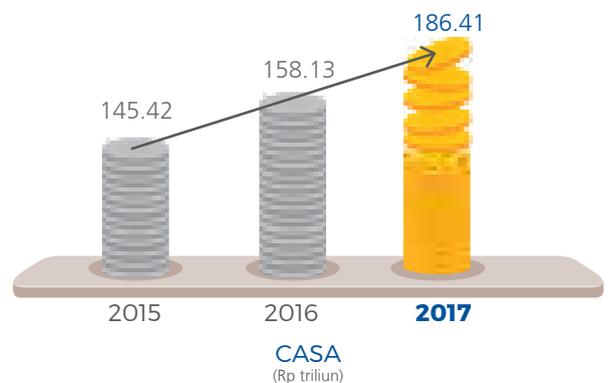
Sementara Kredit Menengah telah disalurkan Rp23,93 triliun, tumbuh 13,36% YoY dari tahun 2016 sebesar Rp21,11 triliun.



BRI telah menyalurkan Kredit Ritel Komersial sebesar Rp129,16 triliun, tumbuh 11,91% YoY dari tahun 2016 sebesar Rp115,42 triliun.



Perolehan dana murah (CASA) BRI dari Bisnis Simpanan Ritel pada tahun 2017 sebesar Rp186,41 triliun, meningkat 17,88% dari tahun 2016 sebesar Rp158,13 triliun.





## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

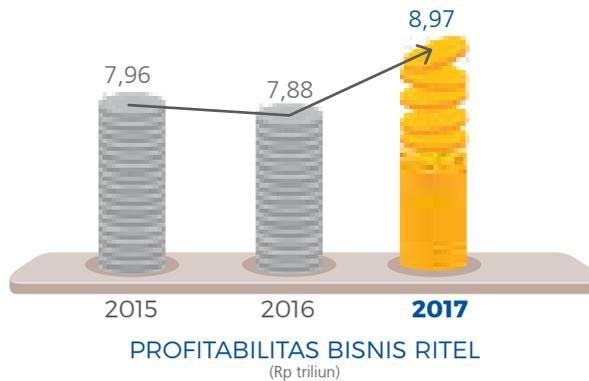
Segmen Bisnis Ritel melayani nasabah komersial ritel seperti usaha kecil dan menengah (UKM), transaksi perbankan dan layanan prioritas (*wealth management*).

Secara operasional, segmen Bisnis Ritel memiliki empat lini bisnis, yaitu:

1. Bisnis Pinjaman Ritel Konsumer
2. Bisnis Pinjaman Ritel Komersial dan Menengah
3. Bisnis Simpanan Ritel
4. Bisnis Jasa Perbankan Ritel.

### Profitabilitas Bisnis Ritel

Pada tahun 2017, segmen Bisnis Ritel membukukan profit sebesar Rp8,97 triliun, meningkat 13,88% YoY dari tahun 2016 yang sebesar Rp7,88 triliun.



Bisnis Ritel baik konsumen dan komersial dilayani di Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kantor	2015	2016	2017	Pertumbuhan
Kantor Cabang	467	467	467	1
Kantor Cabang Pembantu	603	609	610	1
Kantor Kas	983	984	992	8
Jumlah	2.053	2.060	2.069	10

## BISNIS PINJAMAN RITEL KONSUMER

**21,69%**  
Kredit KPR

Penyaluran kredit KPR sebesar Rp22,12 triliun

**22,18%**  
Kredit Kendaraan Bermotor

BRI telah menyalurkan kredit kendaraan bermotor sebesar Rp2,64 triliun

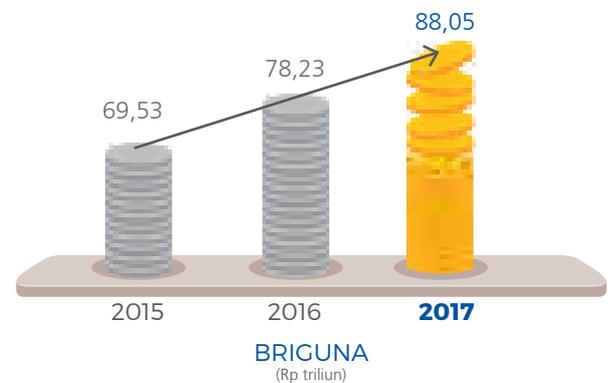
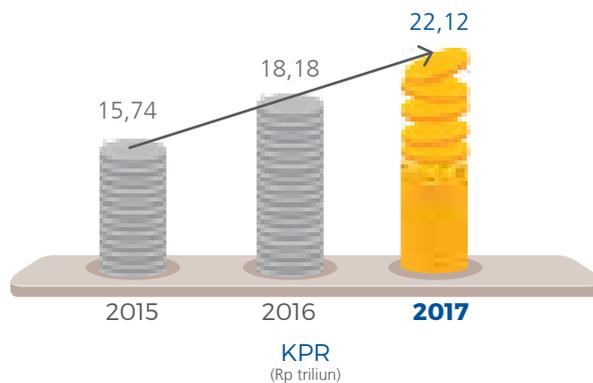
**12,55%**  
Kredit BRIGuna

Penyaluran kredit BRIGuna sebesar Rp88,05 triliun

### Ringkasan Kinerja Bisnis Pinjaman Ritel Konsumer tahun 2017

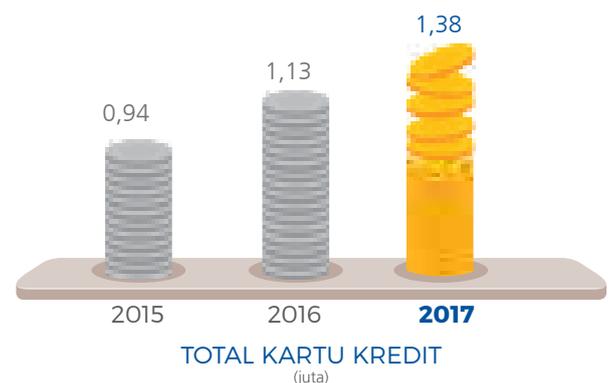
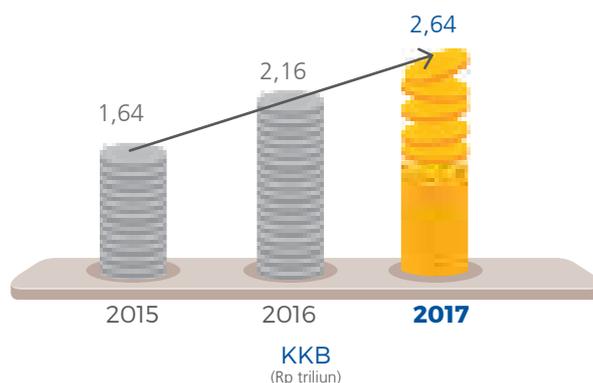
Penyaluran kredit KPR sebesar Rp22,12 triliun di tahun 2017, meningkat 21,69% dibanding tahun 2016 sebesar Rp18,18 triliun.

Penyaluran kredit BRIGuna sebesar Rp88,05 triliun, meningkat 12,55% dibanding tahun 2016 sebesar Rp78,23 triliun.



BRI telah menyalurkan kredit kendaraan bermotor sebesar Rp2,64 triliun, meningkat 22,18% dibanding tahun 2016 sebesar Rp2,16 triliun.

Jumlah kartu kredit BRI pada tahun 2017 telah mencapai 1,38 juta kartu, meningkat 23% dibanding tahun 2016 sebesar 1,13 juta kartu.





TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

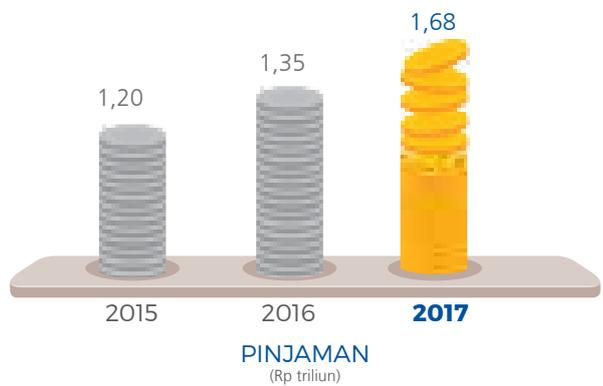
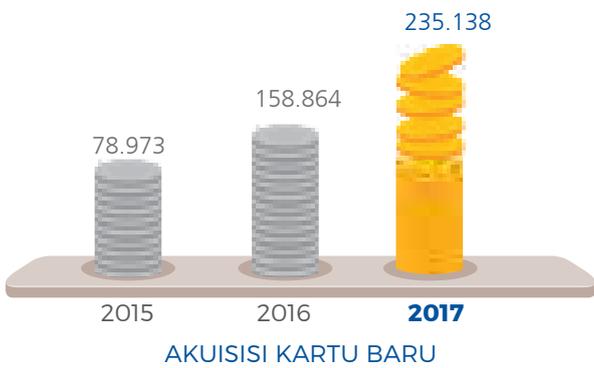
**+23%**  
**Jumlah Kartu Kredit BRI**  
Jumlah kartu kredit BRI pada tahun 2017 telah mencapai 1,38 juta kartu

**+35%**  
**Volume Transaksi Kartu Kredit BRI**  
Volume transaksi kartu kredit BRI pada tahun 2017 sebesar Rp6,29 triliun

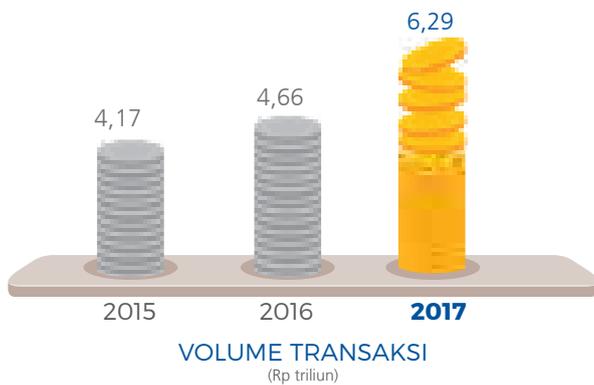
**+25%**  
**Pinjaman Kartu Kredit BRI**  
Pinjaman kartu kredit BRI pada tahun 2017 sebesar Rp1,68 triliun

Akuisisi kartu kredit baru pada tahun 2017 sebesar 235 ribu kartu, meningkat 48% dibanding tahun 2016 sebesar 159 ribu kartu.

Pinjaman kartu kredit BRI pada tahun 2017 sebesar Rp1,68 triliun, meningkat 25% dibanding tahun 2016 sebesar Rp1,35 triliun.



Volume transaksi kartu kredit BRI pada tahun 2017 sebesar Rp6,29 triliun, meningkat 35% dibanding tahun 2016 sebesar Rp4,66 triliun.



## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Produk bisnis Pinjaman Ritel Konsumer BRI terdiri dari:

1. *Salary Based Loan* (Briguna)
2. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)
3. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)
4. Kartu Kredit

### Strategi Bisnis Tahun 2017

- Pengembangan fitur produk, dilakukan untuk Produk Briguna, terutama pada fitur *transfer of branch*.
- Pengembangan sistem *monitoring* dan proses pengajuan kredit.
- Program pemasaran Nasional Tematik dan Program Khusus kepada Instansi, misalnya peluncuran BRI Promoter tanggal 16 Juni 2017. BRI Promoter yaitu kartu kredit untuk jajaran anggota POLRI yang memberikan banyak kemudahan melalui fasilitas cicilan bunga 0%, beragam promo menarik, dan gratis biaya tahunan seumur hidup.
- *Joint target* dengan *developer* besar yang telah memiliki Perjanjian Kerjasama KPR dengan BRI
- Berbagai promosi baik dalam bentuk diskon, *cashback*, maupun cicilan, seperti BRI Easy Card yang diluncurkan tanggal 15 September 2017 menjawab kebutuhan generasi keluarga muda dengan fitur andalan *cashback* TUWAGA untuk tarik tunai dan pembelanjaan di *merchant groceries* dan SPBU.

### Kinerja Bisnis Pinjaman Ritel Konsumer Tahun 2017

#### Peningkatan *Outstanding* Pinjaman

- Sepanjang tahun 2017, total *outstanding* kredit kepemilikan rumah (KPR) BRI sebesar Rp22,12 triliun, tumbuh Rp3,94 triliun atau 21,69% dari tahun 2016 sebesar Rp18,18 triliun. Pertumbuhan KPR ini merupakan pertumbuhan terbesar sejak tahun 2014.
- Total kredit KKB yang disalurkan sebesar Rp2,64 triliun, tumbuh 22,18% dari tahun 2016. Sementara kredit BRIGuna yang telah disalurkan sepanjang tahun 2017 sebesar Rp88,05 triliun, tumbuh 12,55% dari tahun 2016 sebesar Rp78,23 triliun.
- Peningkatan sales volume diikuti dengan kenaikan *outstanding* kartu kredit BRI sebesar 24,57% YoY menjadi Rp1,68 triliun pada tahun 2017 dibandingkan Rp1,35 triliun pada tahun 2016.

### Peningkatan *Fee Based Income*

Dari sisi *fee based income* (FBI), kartu kredit BRI berhasil membukukan kenaikan sebesar 55,48% YoY menjadi Rp180,61 miliar pada 2017 dibandingkan Rp116,16 miliar di tahun 2016.

### Strategi Pengembangan Tahun 2018 Strategi Pertumbuhan

- Fokus penetrasi pada portofolio nasabah payroll dan memaksimalkan pemanfaatan *value chain* nasabah eksisting.
- Mengimplementasikan program *employee get member*, serta mengembangkan *non-organic card growth*.
- *Cross selling* kartu kredit kepada nasabah prioritas.
- Perluasan layanan kredit konsumen melalui penambahan kanca pemrakarsa kredit konsumen diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan kredit konsumen.
- Memperkuat *underwriting* dan *collection capability*.
- Perbaikan Bisnis Proses (*Re-engineering Business Process*) pada area berikut:
  1. Implementasi pengajuan fasilitas kredit consumer berbasis platform digital
  2. *Re-design end-to-end* proses kredit Briguna dan KPR untuk mempercepat TAT (*Turn-Around-Time*).
  3. Membuat bisnis model baru untuk KKB bekerja sama dengan BRI Finance
- Meluncurkan kartu kredit *co-branding*.



## BISNIS PINJAMAN RITEL KOMERSIAL & MENENGAH

⊕ **11,90%**

### Kredit Ritel Komersial

Penyaluran Kredit Ritel Komersial sebesar Rp129,16 triliun

⊕ **13,36%**

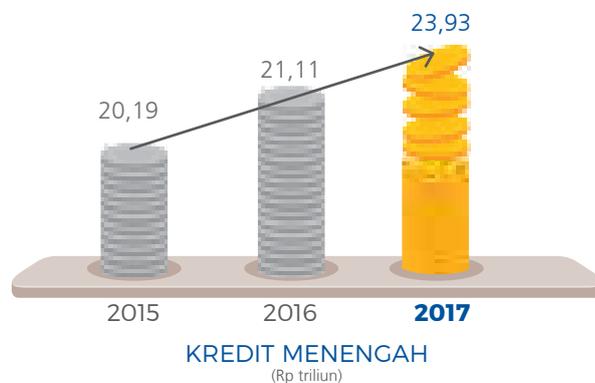
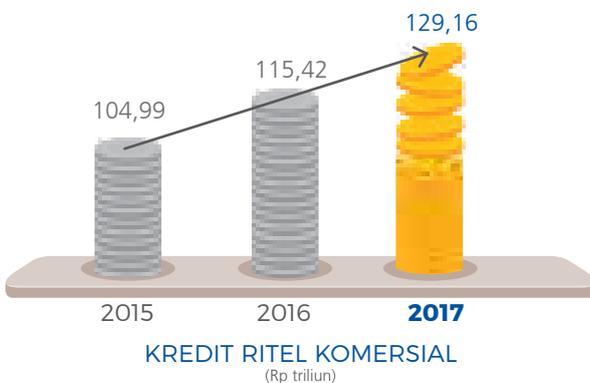
### Kredit Menengah

Penyaluran Kredit Menengah sebesar Rp23,93 triliun

### Ringkasan Kinerja Bisnis Pinjaman Ritel Komersial dan Menengah 2017

Penyaluran Kredit Ritel Komersial sebesar Rp129,16 triliun, meningkat 11,90% dibanding tahun 2016 sebesar Rp115,42 triliun.

Penyaluran Kredit Menengah sebesar Rp23,93 triliun, tumbuh 13,36% dibanding tahun 2016 sebesar Rp21,11 triliun.



### Strategi Bisnis Pinjaman Ritel Komersial dan Menengah Tahun 2017

Pertumbuhan bisnis pinjaman ritel komersial dan menengah pada tahun 2017, tidak lepas dari implementasi strategi pertumbuhan berkelanjutan dan penguatan pasar, menjaga kualitas kredit, dan dukungan *platform IT*.

#### Strategi Pertumbuhan

Strategi pertumbuhan berkelanjutan dan penguatan pasar dilakukan melalui Akuisisi Terfokus dan Peningkatan *Margin*. Sementara perbaikan kualitas kredit dilakukan

melalui evaluasi kualitas kredit, *joint sharing session*, dan pembentukan tim *Adhoc* perbaikan kredit yang mengawal hingga level unit kerja Kantor Cabang.

#### Program Pemasaran

BRI juga melakukan program pemasaran untuk meningkatkan kinerja sub segmen bisnis pinjaman ritel komersial dan menengah. Program marketing yang dilakukan sebagai berikut:

- *Joint Marketing* Bersama Divisi terkait dalam rangka optimalisasi potensi *Value Chain* dari debitur Korporasi BRI.

## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

- Peluncuran program akuisisi tematik, program angsuran tetap *single digit*, program KMK Fleksibel, program take over nasabah prima serta program retensi khusus untuk nasabah prima.

### Kinerja Bisnis Pinjaman Ritel Komersial dan Menengah Tahun 2017

Sepanjang tahun 2017, implementasi strategi diatas mendukung pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Peningkatan *Outstanding* Pinjaman
  - *Outstanding* Kredit Ritel Komersial mencapai Rp129,16 triliun, meningkat 11,90% dibanding tahun 2016 sebesar Rp115,42 triliun.
  - *Outstanding* Kredit Menengah mencapai Rp23,93 triliun, atau tumbuh 13,36% atau Rp2,82 triliun dari tahun 2016 sebesar Rp21,11 triliun.
2. Peningkatan Volume Bank Garansi  
Volume Bank Garansi yang sudah diterbitkan Bank BRI pada 2017 sebanyak 20.630 Warkat dengan plafond sebesar Rp19,68 triliun, naik sejumlah 248 warkat dari volume sebesar Rp20,347 triliun pada tahun 2016.
3. Perbaikan kualitas pinjaman  
Pertumbuhan kredit dan debitur kredit Menengah diikuti dengan perbaikan kualitas NPL yang turun dari 7,09% menjadi 5,17%.

### Strategi dan Target Tahun 2018

Pada tahun 2018, BRI menargetkan kinerja bisnis Ritel Komersial dan Menengah terus bertumbuh dengan strategi berikut:

1. Mengoptimalkan akuisisi *pipeline* dari debitur potensial Korporasi dan BUMN.
2. Fokus akuisisi mitra *Supply Chain Financing* dan kerjasama baru.
3. Menerapkan program pemasaran rutin maupun tematik serta program bundling dengan Divisi lain.
4. Kerjasama penyaluran kredit melalui *platform Digital & Fintech*.
5. Peningkatan kualitas Relationship Manager segmen Ritel Komersial melalui program Pendidikan *enhancement* & profil bisnis.

6. Pengembangan *system monitoring* kinerja tenaga pemasar.
7. Pengembangan dan penyempurnaan produk ritel komersial.
8. Optimalisasi Pemasaran Bank Garansi dalam rangka peningkatan *fee based income*.
9. Penyempurnaan bisnis proses kredit Ritel Komersial dengan dukungan aplikasi IT.



## BISNIS SIMPANAN RITEL

⊕ **10,73%**

### Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel

Perolehan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp303,90 triliun

⊕ **61,3%**

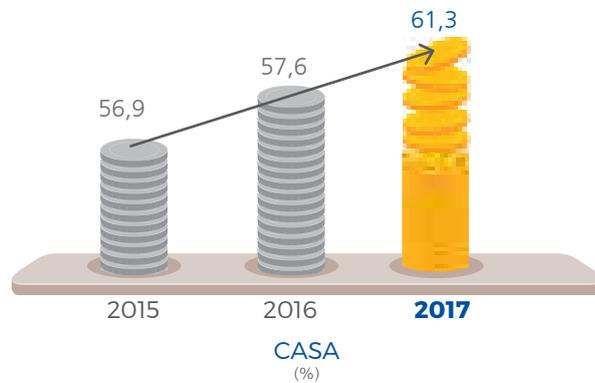
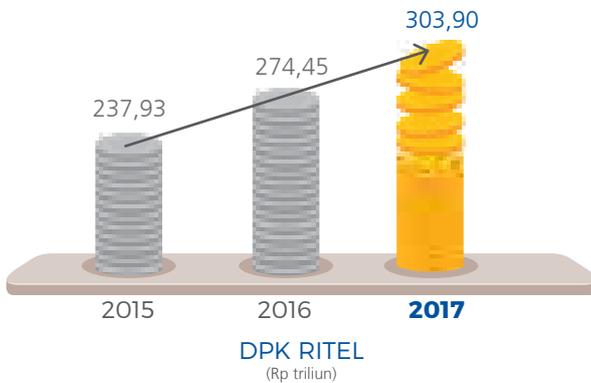
### Rasio CASA Ritel

Rasio CASA Ritel meningkat dari 57,6% di tahun 2016 menjadi 61,3%.

### Ringkasan Kinerja Bisnis Simpanan Ritel Tahun 2017

Perolehan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp303,90 triliun, meningkat 10,73% dari tahun 2016 sebesar Rp274,45 triliun.

Rasio CASA Ritel meningkat dari 57,6% di tahun 2016 menjadi 61,3% di tahun 2017.



### Produk dan Jasa Simpanan Ritel

BRI berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan produk Simpanan Ritel berbasis pada digital *saving* dan rejuvenasi produk di tengah kompetisi perebutan dana masyarakat yang semakin ketat.

Produk simpanan ritel terdiri dari:

1. Giro
2. Tabungan
3. Deposito

### Strategi Bisnis Tahun 2017

Aktivitas pengembangan dan pemasaran produk simpanan pada tahun 2017 difokuskan pada perolehan dana murah yaitu produk Tabungan dan Giro. Untuk itu, aktivitas pemasaran dilakukan baik di lingkup nasional maupun regional dengan berpedoman pada 3 (tiga) pilar strategi yaitu akuisisi, retensi dan maintenance. Aktivitas pemasaran dilakukan melalui akuisisi dan optimalisasi retensi, program *e-commerce* and *start up acquisition*, program komunitas, program *point reward*, *multi product marketing* dan rantai nilai.

## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Selain melakukan program pemasaran, upaya perolehan dana murah melalui aktivitas *cross selling* khususnya dengan nasabah pinjaman ritel, menengah dan konsumen. Berbagai program juga dilakukan, baik lokal (inisiasi dari masing-masing unit kerja) maupun program nasional.

Bank BRI tetap menekankan pada segmen muda (*xenials, millenials*), *professional/white collars worker, community and business cooperation* dan *e-commerce* untuk meningkatkan perolehan dana murah.

### Kinerja Bisnis Tahun 2017

Dengan menjalankan strategi bisnis secara terukur, kinerja Bisnis Simpanan Ritel bertumbuh secara positif.

#### Peningkatan outstanding simpanan

Total Dana Pihak Ketiga meningkat menjadi Rp303.90 triliun, atau naik 10,73% dari tahun 2016 sebesar Rp274,45 triliun di tahun 2016, dengan pendorong pertumbuhan dari produk Giro dan Tabungan sebagai berikut:

- a. **Giro**  
Giro meningkat 19,64% YoY atau menjadi Rp50,87 triliun dari tahun 2016 yang sebesar Rp42,52 triliun.
- b. **Tabungan**  
Tabungan naik 17,24% YoY, menjadi Rp135,54 triliun dari tahun 2016 yang sebesar Rp115,61 triliun.

#### Penurunan Biaya Dana

Dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga yang baik, BRI juga mencatatkan penurunan Biaya Data terutama pada produk Tabungan dan Deposito Rupiah. Rata-rata biaya dana Deposito Rupiah mengalami penurunan dari 7,49% di tahun 2016 menjadi 6,20% di tahun 2017.

### Strategi Bisnis Tahun 2018

Strategi yang akan dilakukan pada tahun 2018 antara lain:

- Melakukan rejuvenasi produk simpanan dan jasa untuk meningkatkan FBI (*Fee Based Income*) dengan menekankan pengembangan produk yang mengarah pada konsep *digital saving*.
- Untuk meningkatkan CASA, BRI akan melakukan optimalisasi *value chain* dan menyediakan solusi yang terintegrasi melalui *cross selling* program.



## BISNIS JASA PERBANKAN RITEL

⊕ **41,21%**

**Fee Based Income BRI Prioritas**

Perolehan fee based income BRI Prioritas sebesar Rp231,10 miliar

⊕ **21,72%**

**Dana Kelolaan BRI Prioritas**

Dana kelolaan BRI Prioritas sebesar Rp82,48 triliun

⊕ **22,89%**

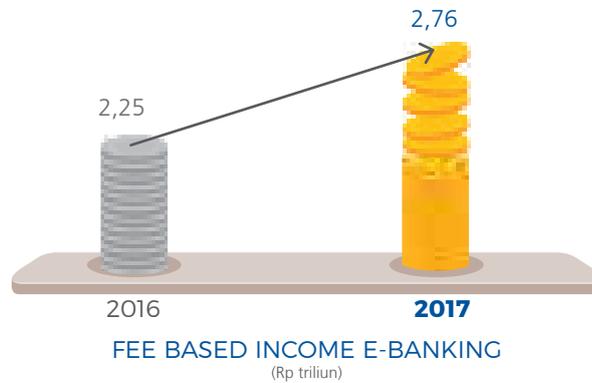
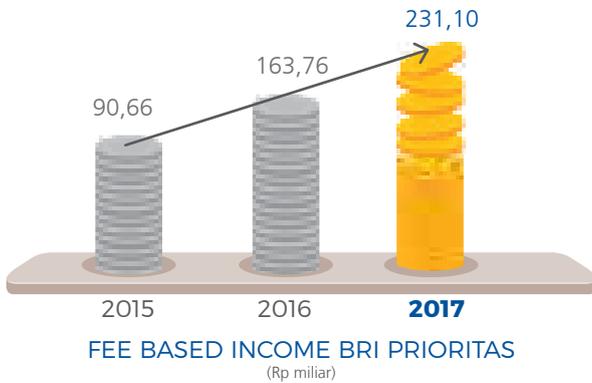
**Fee Based Income e-Banking**

Perolehan fee based income dari jasa e-banking sebesar Rp2,76 trilliun

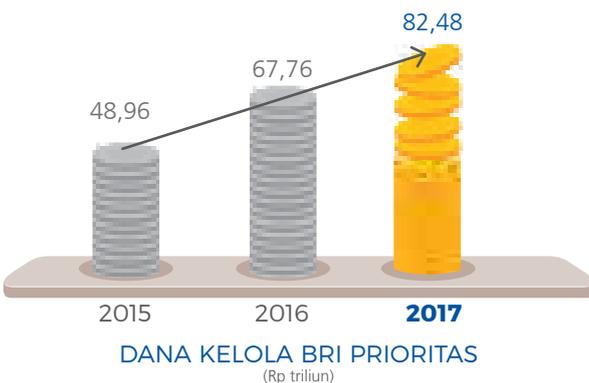
### Ringkasan Kinerja Bisnis Jasa Perbankan Ritel 2017

Perolehan *fee based income* BRI Prioritas sebesar Rp231,10 miliar, meningkat 41,12% dibanding tahun 2016 yang sebesar Rp163,76 miliar.

Perolehan *fee based income* dari jasa e-Banking sebesar Rp2,76 trilliun, meningkat 22,89% dibanding tahun 2016 yang sebesar Rp2,25 trilliun.



Dana kelolaan BRI Prioritas sebesar Rp82,48 triliun, meningkat 21,72% dibanding tahun 2016 yang sebesar Rp67,76 triliun.



## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Tren industri perbankan yang menekankan perolehan dana murah dan peningkatan pendapatan *fee income* menjadi perhatian BRI. Bisnis Jasa Perbankan Ritel merupakan lini usaha untuk mengakomodir tren di industri perbankan tersebut. Dalam hal ini, BRI terus mengembangkan transaction banking di segmen Ritel serta layanan BRI Prioritas (*wealth management*).

### Produk dan Jasa Bisnis Jasa Perbankan Ritel

Produk dan jasa Bisnis Perbankan Ritel antara lain :

- Produk Kartu Debet
- Uang elektronik (BRIZZI)
- Layanan perbankan Ritel seperti jasa transfer, RTGS, BRIVA, serta Safe Deposit

#### **BRIVA**

BRIVA merupakan layanan API (*Application Programming Interface*) BRI melalui teknologi Web Service untuk mendukung otomatisasi sistem *maintenance* dan informasi status pembayaran bagi nasabah. Melalui BRIVA, nasabah pengguna layanan BRIVA tidak perlu lagi melakukan *upload* dan *download* secara manual baik melalui CMS BRI maupun Unit Kerja Operasional.

- Layanan Internet dan Mobile Banking
- Layanan BRI Prioritas

### Strategi Bisnis Tahun 2017

#### Layanan e-Banking

Pengembangan BRI Mobile menjadi New BRI Mobile menggunakan platform MADP (*Mobile Application Development Platform*) dengan penambahan fitur antara lain pembukaan rekening Tabungan Britama secara online, penggunaan teknologi *Near Field Communication* untuk mendukung top-up uang elektronik, dan *pay by QR*.

#### Layanan BRI Prioritas

Pada tahun 2017, sesuai *roadmap* strategi Wealth Management ditekankan pada *Integrated Digital Business Process*, BRI mengimplementasikan strategi sebagai berikut:

1. Penambahan 35 Kantor Cabang yang dapat memasarkan & melakukan transaksi Reksa Dana (APERD).
2. Penambahan outlet BRI Prioritas (Sentra Layanan BRI Prioritas dan Priority Lounge).
3. Peningkatan Kemampuan PBO dan PBM melalui *assessment soft & hard skill*, pelatihan tenaga pemasar, dan pengembangan sistem monitoring kinerja.
4. Penambahan Produk Investasi berupa Reksa Dana Open End (Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Campuran, dan Saham), Reksa Dana Terproteksi, dan Obligasi yang diritelkan.
5. Penambahan Produk Bancassurance (Unit Link Valas, Term Life, dan Endowment).
6. Perbaikan system pada fitur *Top Up online*, Penjualan Produk reksadana secara installment dan Pembayaran Premi Bancassurance.
7. Program Penjualan Wealth Management (Program Simpanan, Investasi, dan Bancassurance).
8. Kerja sama dengan perusahaan yang menyediakan *privilege* dalam hal *travel, lifestyle, education, dan concierge service*.

Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

▶ Analisa &amp; Pembahasan Manajemen



## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

### Layanan Perbankan Ritel Lainnya

Pengembangan BRIVA menggunakan teknologi web service.

## Kinerja Bisnis Tahun 2017

### Kinerja Kartu Debet dan Uang Elektronik

- Jumlah Kartu ATM yang beredar naik menjadi 56,2 juta kartu atau tumbuh 22,6% YoY.
- Jumlah kartu BRIZZI yang beredar pada tahun 2017 mencapai 8,8 Juta user, atau tumbuh 50,79%YoY.

### Layanan e-Banking

- *Fee income* dari layanan e-Banking dan Kartu Debet naik menjadi Rp2,76triliun, atau meningkat 22,9%YoY
- Jumlah pengguna *Mobile Banking* pada tahun 2017 mencapai 18 Juta user, atau naik 21,14% YoY.
- Jumlah transaksi *Mobile Banking*, mencapai 277 Juta transaksi, atau tumbuh 26,37% YoY.
- Jumlah pengguna *Internet Banking* pada tahun 2017 mencapai 7,9 Juta user, atau meningkat 15,62% YoY
- Jumlah transaksi *Internet Banking* mencapai 311juta transaksi, atau meningkat 42,18% YoY.

### Layanan BRI Prioritas

Berdasarkan *Service Quality Index 2017*, Layanan *Priority Banking* BRI menempati urutan ke-5, dan terus menunjukkan pertumbuhan positif dalam tiga tahun terakhir (2015-2017) sebagai berikut:

- Jumlah nasabah meningkat 21,8% YoY menjadi sebesar 49.033 nasabah,
- AUM Simpanan meningkat sebesar 21,5% YoY menjadi Rp73,99 triliun ,
- AUM Investasi meningkat sebesar 31,8% YoY menjadi sebesar Rp4,24 triliun,
- AUM Bancassurance meningkat sebesar 6,4% YoY menjadi Rp4,25 triliun.
- Total *fee income* sepanjang tahun 2017 meningkat 41,12% YoY menjadi sebesar Rp231,10 miliar.

### Layanan Perbankan Ritel Lainnya

*Fee income* layanan perbankan ritel terutama jasa pembayaran naik menjadi Rp393 miliar, atau meningkat 28,53%YoY.

## Strategi Bisnis Tahun 2018

Strategi bisnis pada produk kartu debit, uang elektronik, layanan perbankan ritel dan layanan prioritas lebih dititik beratkan kepada meningkatkan *repeat buying* melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah eksisting serta memaksimalkan akuisisi nasabah baru melalui *cross selling* dari segmen bisnis korporasi. Sedangkan strategi bisnis layanan e-Banking meliputi:

### 1. Increase Transactions

- Memperbanyak jaringan kerjasama dengan beberapa *merchant online*
- Mengadakan berbagai program-program pemasaran dengan tujuan peningkatan transaksi finansial di *e-channel* BRI
- Meningkatkan *brand awareness* produk *Internet Banking & Mobile Banking* BRI.

## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

**2. Improve User Experience**

- Meningkatkan kualitas layanan di *Channel Mobile Banking* dan Internet Banking
- Menambah fitur-fitur transaksi baru yang bertujuan meningkatkan user experience nasabah
- *Updating* fitur-fitur yang sudah ada di *Mobile Banking* dan Internet *Banking*.
- Sosialisasi New BRI Mobile.

**3. Increase User E-Banking**

- Meningkatkan jumlah *user* melalui berbagai program akuisisi dan *shifting*, serta program edukasi kepada nasabah *existing*.

Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisa &amp; Pembahasan Manajemen



TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

# BISNIS KORPORASI

“

Bisnis Korporasi BRI berupaya menciptakan, mengembangkan serta memasarkan produk dan layanan perbankan terpadu baik berupa pemberian fasilitas pinjaman, pengelolaan dana nasabah dan jasa perbankan dengan fokus utama pada bisnis yang dapat memberikan sinergi bagi segmen bisnis lain serta mendukung pertumbuhan *fee based income*. ”

”



Rp187,4 triliun

## Pinjaman

*Outstanding* pinjaman korporasi BRI, termasuk pembiayaan kepada BUMN, naik 6% YoY

Rp937,2 miliar

## Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak segmen Bisnis Korporasi mencapai Rp937,2 miliar

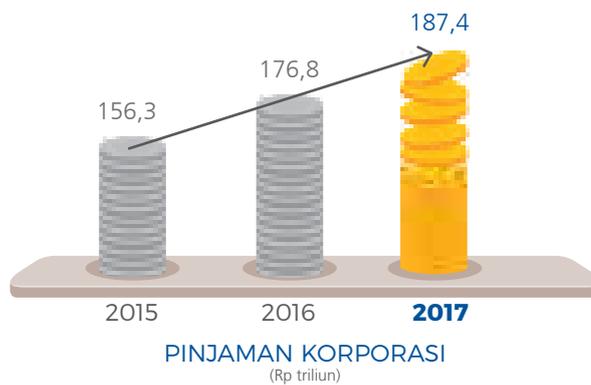
⊕ 25%

## Volume Transaksi Trade Finance

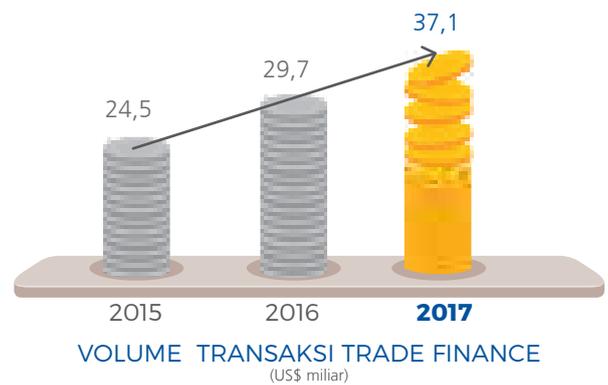
Volume transaksi trade finance tahun 2017 sebesar US\$37,1 miliar

## Ringkasan Kinerja Bisnis Korporasi Tahun 2017

*Outstanding* pinjaman korporasi BRI, termasuk pembiayaan kepada BUMN, naik 6% YoY menjadi Rp187,4 triliun di tahun 2017 dari Rp176,8 triliun di tahun 2016.



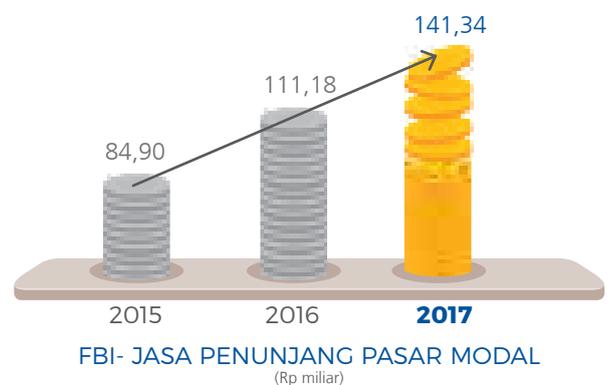
Volume transaksi trade finance tahun 2017 sebesar US\$37,1 miliar, meningkat 25% dari tahun 2016 yang sebesar US\$29,7 miliar.



Laba sebelum pajak segmen Bisnis Korporasi mencapai Rp937,23 miliar, naik 0,15% YoY dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp935,85 miliar.



Pendapatan jasa (fee income) untuk bisnis penunjang pasar modal naik dari Rp111,18 miliar di tahun 2016 menjadi Rp141,34 miliar di tahun 2017 atau tumbuh 27,13% YoY.



Pengelolaan fungsi Treasury BRI, khususnya pada ruang lingkup sumber dana, telah dilakukan dengan baik, yang terlihat dari penurunan biaya dana dari 3,83% di tahun 2016 menjadi 3,27% di tahun 2017.





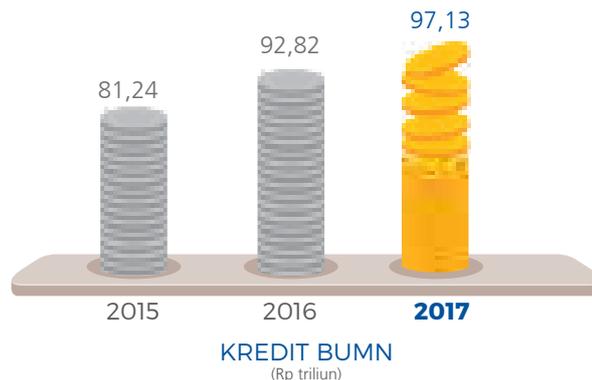
## BISNIS KORPORASI BUMN

Rp97,1 triliun  
Kredit BUMN

Penyaluran kredit BUMN tahun 2017 naik 4,6% dibandingkan tahun 2016

### Ringkasan Kinerja Bisnis BUMN Tahun 2017

Penyaluran kredit BUMN sebesar Rp97,13 triliun pada tahun 2017 atau naik 4,6% dari tahun 2016 sebesar Rp92,82 triliun.



Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara, BRI memiliki tanggung jawab lebih dalam mendukung program-program pemerintah dalam upaya pembangunan perekonomian negara tanpa mengenyampingkan profitabilitas serta prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Dengan mempertimbangkan potensi bisnis yang ada serta *risk weighted asset* yang rendah, BRI fokus membidik perusahaan BUMN terkemuka, baik Induk maupun Anak BUMN dengan tetap memperhatikan arah pengembangan perusahaan yaitu sebagai *driver of growth for microbanking, transaction banking, support subsidiary* dan *implementation to the digital banking*.

### Strategi Bisnis BUMN tahun 2017

Pada tahun 2017 BRI melaksanakan serangkaian inisiatif dan strategi untuk pengembangan bisnis BUMN dengan tujuan meningkatkan *outstanding* kredit,

mempertahankan kualitas kredit, pengelolaan dana nasabah, serta meningkatkan pendapatan non bunga.

### Meningkatkan *Outstanding* Pinjaman dengan fokus pada peningkatan profitabilitas

Peningkatan *outstanding* kredit korporasi BUMN selama tahun 2017 difokuskan pada usaha yang memberikan peluang *trickle down business* dan *cross-selling* untuk pengembangan bagi perusahaan-perusahaan BUMN yang menjadi tulang punggung di sektor infrastruktur, energi, logistik dan transportasi serta untuk mendukung pengembangan perekonomian nasional.

BRI melakukan inisiatif *market development* dan *market penetration* dengan mengoptimalkan aliansi dengan bank lain dalam bentuk pembiayaan sindikasi, club deal serta pemanfaatan fasilitas *Sell down* dari Bank asing dengan tetap memperhatikan *customer profitability analysis*.

## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

**Mempertahankan Kualitas Kredit**

Untuk mempertahankan kualitas kredit di segmen korporasi BUMN yang sampai dengan saat ini masih di level 0%, BRI melakukan berbagai inisiatif diantaranya BRI secara rutin melakukan monitoring baik *offsite* maupun *onsite* kepada nasabah-nasabah BUMN *existing*, serta melakukan inisiatif restrukturisasi kredit kepada debitur yang berpotensi bermasalah.

**Memaksimalkan Pendapatan Non-Bunga**

Dalam upaya pengelolaan dan meningkatkan dana nasabah, BRI selalu berusaha menjadi mitra bisnis yang dapat memberikan solusi bagi nasabah BUMN. Sementara itu, peningkatan pendapatan non bunga diupayakan melalui pengembangan layanan perbankan seperti *cash management*, *host to host*, *BRIVA*, *Payroll*, *Corporate Card*, *Cash Card* dan layanan lainnya.

**Kinerja Bisnis Korporasi BUMN Tahun 2017****Peningkatan *Outstanding* Pinjaman**

Dengan berbagai strategi dan inisiatif diatas, Pada tahun 2017, BRI berhasil meningkatkan *outstanding* korporasi BUMN menjadi Rp97,13 triliun atau meningkat 4,6% YoY dibandingkan tahun 2016 yang didorong oleh sektor infrastruktur, Jasa dan Migas, dan dengan NPL yang masih terjaga di level 0,00%.

**Peningkatan *Outstanding* Dana Pihak Ketiga**

Untuk dana yang di kelola sampai dengan Desember 2017 mencapai Rp115,9 triliun atau tumbuh 0,29% dibandingkan tahun 2016 sebesar 115,6 triliun.

**Peningkatan Pendapatan Non-Bunga**

Sementara itu kontribusi pendapatan non bunga mencapai Rp297 miliar pada tahun 2017 atau meningkat 41.4% YoY dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp210 miliar.

**Strategi Bisnis BUMN Tahun 2018****Peningkatan profitabilitas**

Fokus utama bisnis korporasi baik BUMN dan Non BUMN pada tahun 2018 adalah peningkatan profitabilitas melalui optimalisasi margin, peningkatan fee-based income dan Pengembangan *Value Chain*. Sejumlah inisiatif strategi yang akan diimplementasikan meliputi optimalisasi margin melalui *Risk Based Pricing*, monitoring utilisasi pinjaman dan ekspansi debitur secara selektif.

**Optimalisasi *Integrated Marketing***

BRI akan berupaya untuk meningkatkan *share of wallet* nasabah BUMN melalui penyediaan *integrated banking solution* dan melalui pengembangan *transaction banking* sebagai sumber *fee-based income*. Sedangkan untuk pengembangan *value chain*, BRI akan melakukan penetrasi pasar melalui *closed system financing* dengan mengidentifikasi potensi bisnis baru dan optimalisasi *integrated marketing* dan *trickle down business* untuk membantu kinerja sektor UMKM. Untuk mewujudkan hal tersebut BRI juga akan meningkatkan kompetensi SDM dibisnis korporasi bisnis BUMN yang handal untuk dapat menyediakan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan nasabah.



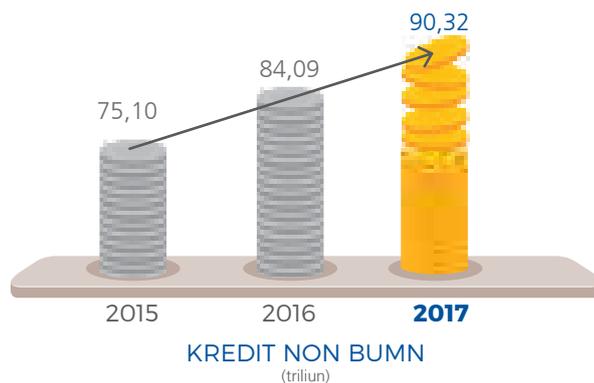
## BISNIS KORPORASI NON BUMN

Rp90,3 triliun  
Kredit Non BUMN

Penyaluran kredit non  
BUMN sebesar Rp90,32  
triliun pada tahun 2017

### Ringkasan Kinerja Korporasi Non BUMN 2017

Penyaluran kredit non BUMN sebesar Rp90,32 triliun pada tahun 2017 atau naik 7,41% dari tahun 2016 sebesar Rp84,09 triliun.



Bisnis Korporasi non BUMN (*private corporate*) BRI terus berkembang dan menjadi salah satu segmen yang menunjang ekspansi bisnis dan meningkatkan *competitive position* BRI. Setiap pemberian kredit kepada korporasi non BUMN harus memiliki peluang *trickledown business* dan *cross-selling* sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan segmen baik Mikro, Ritel maupun menengah.

Saat ini, mayoritas Bisnis Korporasi bersumber dari sektor Agribisnis. Penyaluran kredit kepada perusahaan di sektor agribisnis ditujukan untuk kegiatan usaha pertanian dalam arti luas, baik yang bersifat *on farm* maupun *off-farm*, dari hulu sampai hilir. Selain itu, BRI juga menyalurkan kredit ke petani melalui pola inti-plasma. Sasaran utama pengembangan kredit agribisnis adalah pembiayaan ke komoditi ekspor yang memiliki *competitive advantage* dan *multiplier effect* kepada UMKM. Komoditi yang jadi pilihan diantaranya adalah kelapa sawit dan karet

beserta turunannya, sedangkan untuk sektor industri dan perdagangan meliputi industri pestisida, oleokimia, pengolahan kelapa, gula, beras dan sebagainya.

Untuk sektor non-agribisnis, penyaluran kredit cukup bervariasi ke beberapa sektor, antara lain industry energy yang terkait dengan proyek infrastruktur kelistrikan pemerintah, transportasi dan sebagainya.

### Strategi Bisnis Korporasi non BUMN

Pada tahun 2017, inisiatif strategi pengembangan bisnis korporasi non BUMN difokuskan kepada penyaluran *Indirect Loan* dan *Optimalisasi Existing Customer* yang mengarah kepada pengembangan *Supply Chain Financing* dan peningkatan CASA melalui *Transaction Banking* serta menjaga kualitas kredit dengan melakukan *Exit Strategy* pada *Unprospected Customer*.

## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

## Kinerja Bisnis Korporasi Non BUMN

Peningkatan *Outstanding* Pinjaman

Dengan strategi diatas, kredit korporasi non BUMN selama tahun 2017 mencapai Rp90,31 triliun atau tumbuh 7,41% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp84,09 triliun. Pertumbuhan ini ditunjang dari sektor agribisnis yakni pembiayaan ekstensif kepada perkebunan Kelapa Sawit, Industri Gula, Peternakan, serta Perikanan, dan dari sektor non-agribisnis yaitu sektor properti dan *pulp & paper*.

Peningkatan *Outstanding* Dana Pihak Ketiga

Dana simpanan korporasi non BUMN mencapai Rp30,9 triliun atau meningkat 32.6% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp23,3 triliun

## Peningkatan Pendapatan Non Bunga

Sementara itu kontribusi pendapatan non Bunga di bisnis korporasi non BUMN mencapai Rp37 miliar atau tumbuh 27,59% dibandingkan tahun 2016 yang sebesar Rp29 miliar.

## Strategi bisnis korporasi non BUMN tahun 2018

## Meningkatkan Profitabilitas

Sejalan dengan strategi Bisnis Korporasi BUMN, di tahun 2018, Bisnis Koporasi non-BUMN akan fokus kepada peningkatan profitabilitas melalui optimalisasi margin, peningkatan *fee-based income* dan Pengembangan *Value Chain* nasabah nasabah korporasi non BUMN.

## Exit dari sektor yang berisiko tinggi

Melakukan *exit strategy* kepada nasabah nasabah yang memiliki risiko tinggi.

Mengoptimalkan penggunaan *integrated banking solution*

BRI akan berupaya meningkatkan *share of wallet* nasabah-nasabah korporasi non BUMN melalui penyediaan *integrated banking solution* sebagai sumber *fee based income*. Untuk pengembangan value chain, BRI akan mengembangkan *supply chain financing* yang mengakselerasi pertumbuhan segmen baik Mikro, Ritel maupun menengah.



## BISNIS SINDIKASI DAN JASA KEUANGAN NON BANK

Rp**312,51** miliar  
Pendapatan Bunga  
Non Pinjaman

### Ringkasan Kinerja Korporasi Sindikasi dan Jasa Keuangan Non Bank 2017

Bisnis jasa keuangan non bank berhasil menyumbangkan pendapatan bunga non pinjaman sebesar **Rp312,51 miliar**.

Bisnis Sindikasi dan Jasa Lembaga Keuangan non bank yang secara organisasi dibentuk pada tahun 2017 memiliki dua lini bisnis utama yaitu bisnis jasa sindikasi dan pemberian fasilitas limit baik *committed* dan *uncommitted line* kepada industri keuangan non bank (IKNB) dalam negeri.

Jasa kredit sindikasi ditujukan untuk nasabah korporasi yang membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar dengan lebih dari satu kreditur. Sindikasi BRI telah berpengalaman dalam menangani kredit sindikasi dari berbagai sektor bisnis seperti infrastruktur, kelistrikan, manufaktur, oil & gas, perdagangan/hotel/resto, perkebunan, pertambangan dan properti yang meliputi jasa *arranger*, *facility agent*, *escrow agent*, dan *security agent*.

Jasa keuangan non-bank yang diberikan kepada IKNB meliputi *security line*, *money market line*, *foreign exchange line*, *trade finance line*, penjaminan bank garansi dan kredit mitra, fasilitas *intraday* serta bank garansi. IKNB yang menjadi sasaran bisnis BRI meliputi perusahaan pembiayaan (*multifinance*), asuransi, sekuritas, lembaga keuangan khusus dan lembaga keuangan non bank lainnya.

## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

### Strategi Tahun 2017

Pada tahun 2017, bisnis Sindikasi dan Jasa Keuangan Non bank melakukan strategi pembiayaan ke sektor produktif dan konsumsi. Menjalinkan kemitraan dengan partner-partner strategis juga terus dilakukan BRI untuk mengoptimalkan peluang bisnis.

### Kinerja Bisnis Tahun 2017

Pada tahun 2017, kegiatan Sindikasi telah menghasilkan pendapatan bunga non pinjaman yang mencapai Rp312,51 miliar.

### Strategi Bisnis Tahun 2018

Rencana pengembangan bisnis sindikasi dilakukan melalui sinergi dengan Bank Himbara, Bank Swasta Nasional / Asing, Perusahaan anak BRI dan BPD. Adapun pengembangan bisnis IKNB dilakukan melalui peningkatan limit dan utilisasi limit fasilitas *existing*, perluasan bisnis IKNB khususnya perusahaan sekuritas dan asuransi, optimalisasi *value chain* atas nasabah IKNB BRI, serta peningkatan kompetensi SDM.



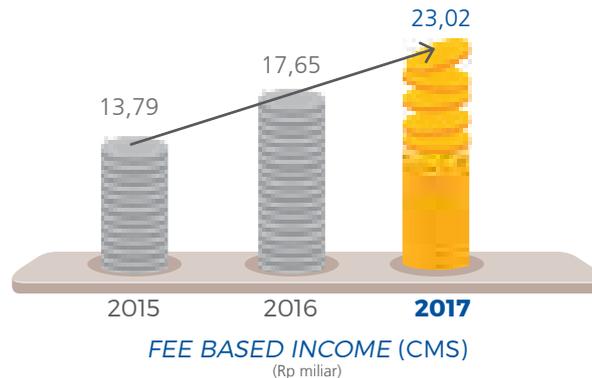
## BISNIS DANA INSTITUSI

⊕ 8,85%

## DPK

Outstanding DPK  
mencapai Rp108,2  
triliun pada tahun 2017

⊕ 30,68%

Fee Based Income  
(CMS)Fee based income dari  
transaction banking  
(CMS) sebesar Rp23,00  
miliarRingkasan Kinerja Bisnis Dana  
Institusi Tahun 2017Fee based income dari transaction banking (CMS) sebesar  
Rp23,02 miliar, tumbuh 30,31% dibanding tahun 2016  
sebesar Rp17,65 miliar

Aktivitas Bisnis Dana Institusi antara lain mengoptimalkan pengelolaan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan melalui kementerian atau lembaga pemerintah dan juga dana dari pemerintah daerah dan swasta. Selain itu, BRI juga menyediakan *Cash Management System* (CMS) yang merupakan solusi layanan keuangan nasabah perbankan berbasis internet yang dilengkapi fitur *Supply Chain Financing*, *Trade Finance* dan *Host-to-host connection*.

## Strategi Bisnis Tahun 2017

Menyediakan *One-Stop Service*

Pada tahun 2017, BRI melaksanakan serangkaian inisiatif dan strategi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dana institusi dan lembaga serta meningkatkan *Fee Based Income*. Beberapa inisiatif

strategi yang dilakukan oleh BRI untuk meningkatkan pertumbuhan dananya ialah melakukan akuisisi dana Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan swasta dengan mengembangkan pola *one stop service*, sehingga pelayanan yang diberikan dapat dilakukan pada satu pintu di seluruh jaringan kerja BRI.

Mengoptimalkan Kerjasama Penyaluran  
Program Pemerintah

Selain itu BRI juga telah melakukan kerjasama program pemerintah berupa Penyaluran dana bantuan social (bansos) dalam program keluarga harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), akuisisi BUMDES dan Dana Desa Selindo, pemberian kartu tani dan akuisisi Kios Pupuk Lengkap (KPL), penyaluran dana program Indonesia pintar (PIP), Mengikuti *beauty contest* atas penempatan dana investasi untuk Badan Layanan Umum

## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

serta Melakukan kerjasama dan Mengembangkan aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk meningkatkan transaksi Modul Penerimaan Negara (MPN Generasi 2).

### Pengembangan Bisnis *Transaction Banking*

BRI tetap fokus pada pengembangan bisnis *Transaction Banking* untuk meningkatkan perolehan dana dan pendapatan *fee based income*. Selama tahun 2017, Layanan *Transaction Banking* telah menjalankan strategi IMFIX (*Improve, Maintain, Focus, Increase, dan eXpand*).

#### 1. **Improve**

Memperkuat produk dan pelayanan, baik kepada nasabah internal maupun eksternal dalam menyediakan *integrated banking solution*.

#### 2. **Maintain**

Memelihara dan meningkatkan kualitas hubungan bisnis dengan nasabah melalui peningkatan kompetensi *relationship managers*

#### 3. **Focus**

Menekankan perhatian pada segmen nasabah yang membawa keuntungan maksimum bagi perusahaan seperti segmen industri/manufaktur, *wholesale, services* berskala besar dan instansi utama pemerintah.

#### 4. **Increase**

Meningkatkan kegiatan transaksional untuk nasabah-nasabah *existing* dengan mengeksplorasi potensi bisnis dari *value chain*-nya.

#### 5. **eXpand**

Melakukan upaya perluasan bisnis untuk menjaring calon-calon nasabah dengan menggunakan *network & influence* perusahaan

## Kinerja Bisnis Tahun 2017

### Peningkatan *Outstanding Dana Pihak Ketiga*

Dengan strategi tersebut diatas, bisnis dana institusi berhasil meningkatkan jumlah dana pihak ketiga yang mencapai Rp108,2 triliun pada tahun 2017 atau meningkat 8,85% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp99,4 triliun.

### Peningkatan Pendapatan Non Bunga

Sementara itu, *fee income* dari bisnis dana institusi mencapai Rp49 miliar atau naik 8,89% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp45 miliar.

### Peningkatan Kinerja CMS

Dalam kurun waktu 2016 hingga 2017, performa CMS BRI dari segi jumlah *customer*, jumlah transaksi, volume transaksi, dan *fee based income* mengalami peningkatan. Dibanding tahun 2016, jumlah nasabah pada 2017 mengalami kenaikan sebesar 23% YoY menjadi 15 ribu nasabah, frekuensi transaksi meningkat sebesar 30% YoY menjadi 15,2 juta transaksi, dan volume transaksi mengalami kenaikan sebesar 41% YoY menjadi sebesar Rp1,193 triliun. Untuk Perolehan *fee based income* dari *transaction banking* (CMS) sebesar Rp23,02 miliar, tumbuh 30,68% dibanding tahun 2016 sebesar Rp17,65 miliar.

Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

▶ Analisa &amp; Pembahasan Manajemen



## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

### Strategi Bisnis Tahun 2018

#### Pengembangan Produk yang *Customer Centric*

Strategi pengembangan bisnis dana institusi pada tahun 2018 adalah berperan aktif untuk melakukan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan nasabah, terutama pada area sistem *rekonsiliasi*, *complaint handling*, dan *early warning system*.

#### Meningkatkan kualitas monitoring kinerja

Dari sisi internal, Bisnis Dana Institusi juga berencana mengembangkan perangkat monitoring portofolio dalam rangka pemantauan kinerja internal, serta meningkatkan kualitas layanan dalam setiap skema kerja sama dengan nasabah.

#### Meningkatkan *Transaction Banking*

*Transaction Banking* pada tahun 2018 akan fokus pada perluasan pangsa pasar dan penyediaan *fully integrated banking services*. Perluasan pangsa pasar akan dilakukan melalui ekstensifikasi *customer base* dengan memperkuat kapabilitas *transaction banking* melalui pengembangan CMS *end-to-end* dan *Supply Chain Financing*. Sedangkan penyediaan *fully integrated banking services* melalui optimalisasi *coverage model* (pemetaan RM, desain *client service team* berdasar segmen dan *product specialist*).

## BISNIS INTERNASIONAL

⬆️ **25%**  
**Volume Transaksi  
Trade Finance**  
Volume transaksi  
*trade finance* sebesar  
US\$37.12 miliar

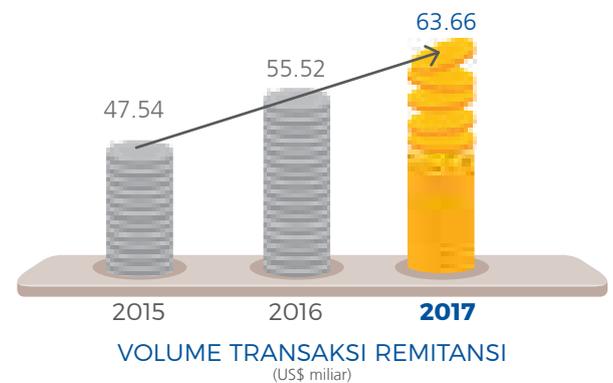
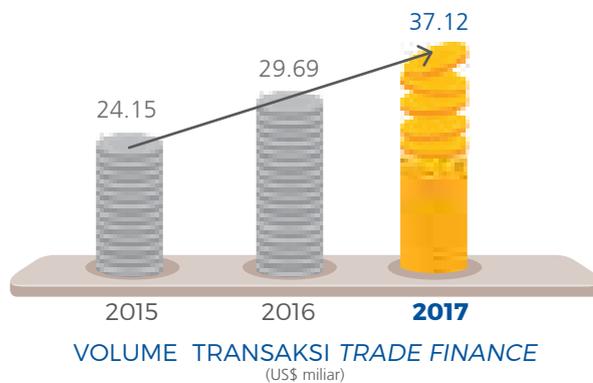
⬆️ **45,5%**  
**Money Changer**  
Volume transaksi dari  
aktivitas *money changer*  
tahun 2017 sebesar  
Rp19,27 triliun

⬆️ **14,7%**  
**Volume Transaksi  
Remitansi**  
Volume transaksi  
remitansi sebesar  
US\$63.66 miliar

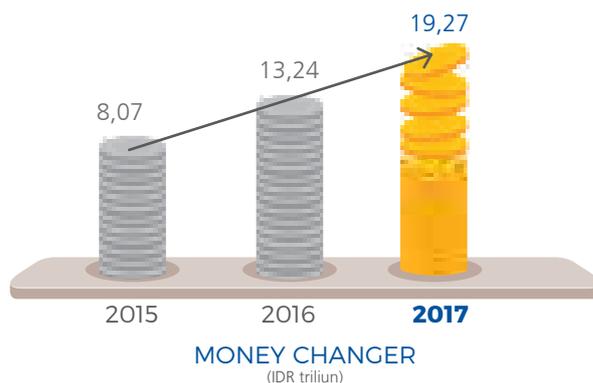
Ringkasan Kinerja Bisnis Internasional  
Tahun 2017

Volume transaksi *trade finance* sebesar US\$37.12 miliar, meningkat 24,99% dari tahun 2016 yang sebesar US\$29.69 miliar.

Volume transaksi remitansi sebesar US\$63.66 miliar, tumbuh 14,66% dari tahun 2016 sebesar US\$55.52 miliar.



Volume transaksi dari aktivitas *money changer* tahun 2017 sebesar Rp19,27 triliun, meningkat 45,54% dari tahun 2016 yang sebesar Rp13,24 triliun





TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Bisnis Internasional BRI mengakomodasi kenyamanan dan terselenggaranya berbagai kebutuhan nasabah yang terkait produk atau jasa di bidang trade finance, bisnis bank koresponden, bisnis remitansi, dan bisnis *money changer*. Selain itu, Bisnis Internasional BRI juga didukung oleh unit kerja luar negeri BRI di New York, Cayman Islands, Singapura, Hong Kong dan Timor-Leste.

Keunggulan Produk dan Jasa Bisnis Internasional

Dukungan dari Pekerja yang Profesional dan tersertifikasi

Dalam rangka penyediaan layanan terbaik untuk nasabah, BRI didukung oleh Pekerja yang profesional di bidang trade finance yang telah memiliki sertifikasi internasional untuk menunjang aktifitas bisnis yang sejalan dengan perkembangan bisnis nasabah yang dinamis.

Dukungan dari counterparts

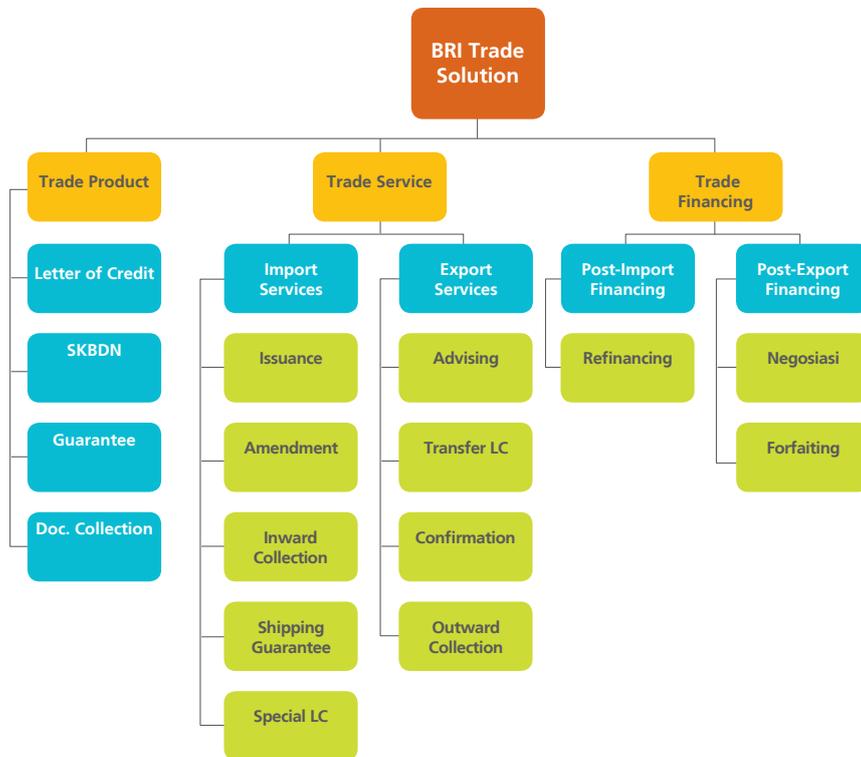
BRI juga didukung dengan kerjasama lebih dari 50 Remittance Company, lebih dari 1300 Bank Koresponden diseluruh belahan dunia dalam 15 mata uang.

Dukungan unit kerja seluruh Indonesia

Selain itu, untuk mengakomodasi kebutuhan nasabah akan mata uang asing, BRI juga menyediakan layanan jual beli mata uang asing dalam 18 jenis mata uang, melalui layanan yang tersedia unit kerja operasional di seluruh Indonesia, yang telah terkoneksi *real time online*.

Trade Finance Solution

BRI *Trade Solution* sebagai bentuk integrasi layanan perdagangan internasional maupun domestik diklasifikasikan menjadi *Trade Product*, *Trade Services*, dan *Trade Finance*. Adapun rincian terkait BRI *Trade Solution* diuraikan sebagai berikut :



## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

## Strategi Bisnis Internasional Tahun 2017

## Meningkatkan kualitas layanan

BRI fokus pada peningkatan pendapatan *fee based income* dan perbaikan kualitas layanan. Untuk mendukung perencanaan bisnis tersebut, BRI telah melakukan sejumlah program kerja, antara lain:

- **Bidang Trade Finance**  
Melakukan penyempurnaan otomasi menyeluruh pada sistem transaksi bisnis internasional.
- **Bidang Money Changer**  
Melakukan beberapa kerja sama dengan perbankan nasional, bank daerah, bank asing, asosiasi biro haji dan umrah, biro perjalanan wisata, asosiasi hotel dan restoran Indonesia, serta pedagang valuta asing (PVA).  
  
Mendorong pertumbuhan bisnis pada gerai *money changer* di Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta sebagai bagian dari penetrasi pasar *bank notes* domestik.
- **Bisnis Bank Koresponden (Financial Institutions Bank)**  
Memperluas kerja sama dengan bank koresponden baik domestik maupun luar negeri, serta melakukan diversifikasi produk yang diperdagangkan.
- **Bisnis Remitansi**  
Mengadakan program pemasaran reward tahunan Mudik Bareng BRIfast Remittance, sebagai salah satu keuntungan dalam layanan *cash pick up* melalui agen BRILink.

## Kinerja Tahun 2017

Pencapaian *fee based income* di bidang bisnis internasional di tahun 2017 sekitar 10% dari pencapaian *fee based income* BRI tahun 2017 yang sebesar Rp10,3 Triliun. Kontributor terbesar untuk *fee based income* tersebut secara berurutan adalah *trade finance*, *money changer*, *remittance*, dan *correspondent banking*. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan volume transaksi dari setiap unit bisnis internasional dengan rincian sebagai berikut:

- Volume transaksi *trade finance* sepanjang tahun 2017 mencapai US\$37,12 miliar meningkat 24,99% dibandingkan tahun 2016 sebesar US\$29,69 miliar.
- Volume transaksi jual beli *bank notes* meningkat sebesar 45,54% YoY menjadi Rp19,27 triliun di tahun 2017 dari tahun 2016 sebesar Rp13,24 triliun.
- Peningkatan volume transaksi Bisnis Bank Koresponden mencapai US\$276,89 juta, tumbuh 107% dibanding 2016 sebesar US\$133,73 juta.
- Pertumbuhan volume transaksi Bisnis Remitansi, khususnya transaksi *incoming remittance*. Volume transaksi mencapai US\$63,66 miliar, atau tumbuh 14,66% dibanding tahun 2016 sebesar US\$55,52 miliar.

## Strategi Pengembangan Tahun 2018

## Bidang Trade Finance

- Melakukan *upgrading* menyeluruh pada sistem transaksi bisnis internasional untuk mendukung penyediaan layanan *supply chain*.
- Mengadakan program *skill enhancement* untuk meningkatkan kualitas jajaran petugas devisa di Unit Kerja Operasional.

## Bidang Money Changer

Memperluas kerjasama *business to business* dengan mitra *wholesale money changer* dan menambah gerai *money changer* di bandara internasional lainnya.

## Bisnis Bank Koresponden (Financial Institutions Bank)

Memperluas kerjasama dengan bank koresponden baik domestik maupun luar negeri, serta meningkatkan status lisensi unit kerja BRI Hong Kong dari *representative office* menjadi *full branch* dalam rangka memperkokoh bisnis internasional BRI sekaligus memperkuat posisi BRI di tingkat regional.

## Bisnis Remitansi

Mengimplementasikan sistem BRIfast Remittance versi 2 dengan sejumlah fitur baru, serta melaksanakan pengembangan bisnis berbasis *Cross Border Payment Solutions*.



## BISNIS TREASURY

⊕ Rp10,93 triliun  
Pendapatan Bunga  
Non Kredit

Imbal hasil rata-rata  
dari aset non-kredit BRI  
mencapai 4,48%

⊕ 3,27%  
Cost of Fund (COF)

BRI berhasil menurunkan  
biaya dana (*cost of  
fund* atau COF) produk  
deposito. Sehingga COF  
BRI menjadi 3,27%

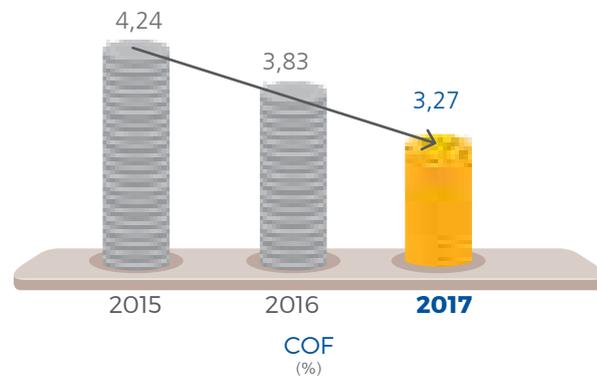
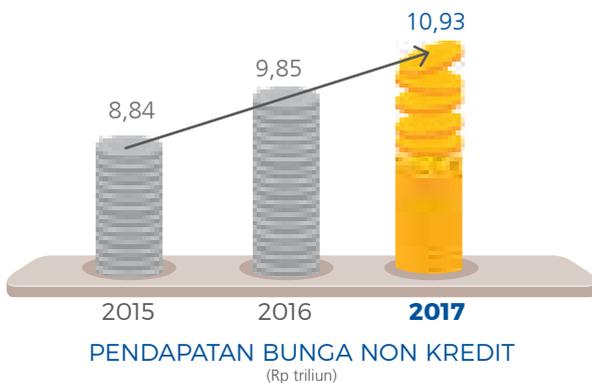
⊕ 22,3%  
Pertumbuhan  
Jumlah Nasabah  
Transaksi Valas

Dengan diluncurkannya BRlex  
Client mampu meningkatkan jumlah  
nasabah transaksi valas sebesar  
22,3% dibanding tahun 2016

Ringkasan Kinerja Bisnis Treasury  
Tahun 2017

Imbal hasil rata-rata dari aset non-kredit BRI mencapai 4,48%, atau sebesar Rp10,93 triliun, tumbuh Rp1,08 triliun dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp9,85 triliun.

BRI berhasil menurunkan biaya dana (*cost of fund* atau COF) produk deposito. Sehingga COF BRI menjadi 3,27%, turun 0,56% dari tahun 2016 sebesar 3,83%.



Untuk mendukung pelayanan nasabah Korporasi, BRI terus melanjutkan pengembangan produk dan jasa Treasury sehingga BRI terus melakukan pengembangan baik produk maupun Sumber Daya Manusia di seluruh unit kerja BRI. Bisnis Treasury BRI meliputi pengelolaan aset dan liabilitas *banking book* dan *trading book*.

## Strategi Bisnis Treasury Tahun 2017

Pada tahun 2017 bisnis Treasury melakukan inisiatif strategi sebagai berikut:

## Optimalisasi eksekusi likuiditas

Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan komposisi penempatan *instrument* likuiditas (jangka pendek) dan jangka panjang. Saat ini mayoritas penempatan instrument jangka panjang BRI mayoritas berada di Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan Korporasi.

## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

**Mengoptimalkan pengelolaan risiko likuiditas**

Untuk mengelola risiko likuiditas, BRI melakukan strategi *Funding Mix* Strategi untuk memenuhi kebutuhan pendana jangka pendek yang berasal dari DPK dengan memprioritaskan dana murah dan deposito. Sedangkan untuk kebutuhan jangka panjang diperoleh dengan cara menerbitkan Surat Berharga.

**Peningkatan Kerjasama Dengan Counterpart**

Sementara itu untuk pelayanan BRI terhadap nasabah terkait transaksi *instrument Treasury*, ditujukan untuk menambah *market share* BRI dan perluasan akses pasar terutama pada Bank, BPD, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan *Asset Management*.

**Kinerja Tahun 2017****Penurunan Biaya Dana**

BRI berhasil menurunkan COF menjadi 3,27% atau turun sebesar 56 bps dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 3,83%. Hal tersebut disebabkan oleh COF deposito yang turun menjadi 5,15% pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 6,09%.

**Peningkatan Yield Aktiva Produktif Non-Pinjaman**

Selama tahun 2017 BRI melakukan optimalisasi akses likuiditas dengan melakukan *switching low yield asset ke high yield asset* namun tetap dengan mempertimbangkan risiko likuiditas dari securities tersebut. Tercatat *Average Outstanding Deposit Facility* Bank Indonesia mengalami penurunan sebanyak 52,67% yang dialokasikan kepada *High-Yield instrument*.

(Rp triliun)

Instrument	2015	%	2016	%	2017	%	Yield	
Low Yield	Depfac	14.1	42.9%	8.5	38.6%	3.7	12.5%	3.50%
	TD IDR	0.03	0.1%	1.51	6.9%	9.48	32.0%	4.02%
	Placement	2.53	7.7%	1.93	8.8%	1.87	6.3%	4.43%
	RR SUN	16.2	49.3%	10.1	45.8%	14.6	49.2%	4.50%
	32.86	100%	22.04	100%	29.65	100%		



## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

(Rp triliun)

Instrument		2015	%	2016	%	2017	%	Yield
High Yield	SDBI	11.8	51.6%	7.2	42.1%	19.6	64.9%	5.29%
	SBI	7.93	34.7%	7.12	41.6%	3.72	12.3%	5.99%
	SPN	2.77	12.1%	1.26	7.4%	5.56	18.4%	5.11%
	NCD	0.35	1.5%	1.54	9.0%	1.33	4.4%	6.86%
		22.85	100%	17.12	100%	30.21	100%	

Komposisi	2015	%	2016	%	2017	%
Total Low Yield	32.86	59.0%	22.04	56.3%	29.65	49.5%
Total High Yield	22.85	41.0%	17.12	43.7%	30.21	50.5%
Total	55.71	100.0%	39.16	100.0%	59.86	100.0%

Dengan optimalisasi portofolio tersebut, imbal hasil rata-rata dari aset non-kredit BRI mencapai 4.48%, atau sebesar Rp10,93 triliun, tumbuh Rp1,08 triliun dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp9.85 triliun.

### Menjadi *Primary Dealer* pada transaksi Surat Berharga

Kegiatan transaksi surat berharga yang meningkat membawa BRI memperoleh peringkat pertama sebagai *primary dealer* pada pasar primer tahun 2017. Peningkatan volume transaksi ini didukung oleh meningkatnya transaksi dengan nasabah dan kegiatan pengelolaan risiko yang baik.

Pertumbuhan transaksi *Treasury* untuk melayani kebutuhan nasabah tumbuh seiring dengan volume jual beli sebagai berikut:

- Volume pelayanan jual-beli surat berharga tumbuh 61%
- Volume pelayanan jual-beli *foreign exchange* tumbuh 12%
- Frekuensi pelayanan jual-beli *foreign exchange* tumbuh 17.9%
- Frekuensi pelayanan jual-beli derivatif tumbuh 34.50%

### Launching layanan baru untuk mengakomodasi transaksi Valas

Dari sisi pengembangan teknologi, Divisi Bisnis *Treasury* telah melakukan inovasi dengan meluncurkan BRIfx Client yang diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan valas. Tercatat pertumbuhan jumlah nasabah yang melakukan transaksi valas selama tahun 2017 sebesar 22.3%.

### Strategi Bisnis Tahun 2018

- *Rebalancing* portofolio *asset* dan *liabilities* untuk mendukung kinerja Bank  
Mengembangkan produk dan layanan *treasury* terkait transaksi valas seperti *Currency Swap Deposit*, Produk *Hedging Syariah* atas nilai tukar.

## BISNIS JASA PENUNJANG PASAR MODAL

**⬆️ 27,13%**  
**FBI- Jasa Penunjang Pasar Modal**  
Total *fee based income* yang diperoleh BRI dari Bisnis Penunjang Pasar Modal tahun 2017 sebesar Rp141,34 miliar

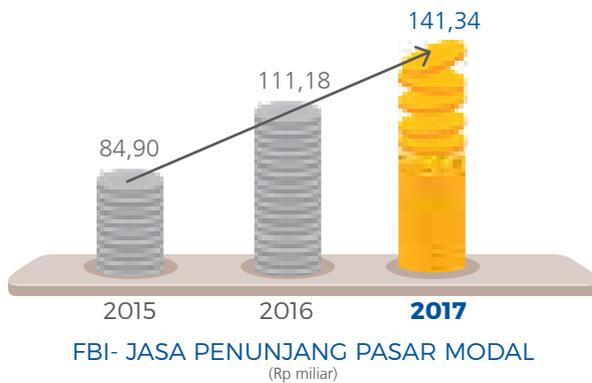
**⬆️ 45,54%**  
**Volume Transaksi Dari Aktivitas Money Changer**  
Volume transaksi dari aktivitas *money changer* tahun 2017 sebesar Rp19,27 trilliun

**⬆️ 50,93%**  
**Aset DPLK**  
Aset DPLK tercatat sebesar Rp8,8 triliun

### Ringkasan Kinerja Jasa Penunjang Pasar Modal Tahun 2017

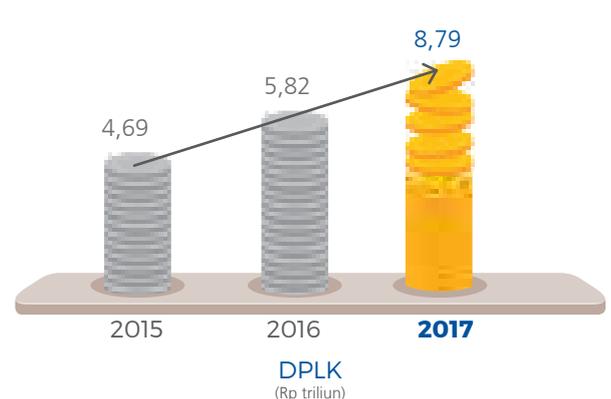
Total *fee based income* yang diperoleh BRI dari Bisnis Penunjang Pasar Modal tahun 2017 sebesar Rp141,34 miliar, tumbuh 27,13% dari tahun 2016 sebesar Rp111,18 miliar.

Aset Kustodian sebesar Rp298,78 triliun di 2017 menurun 6,72% dari Rp320,29 triliun di tahun 2016.



BRI mencatatkan Aset Wali Amanat sebesar Rp69,04 triliun, meningkat 4,4% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp66,10 triliun.

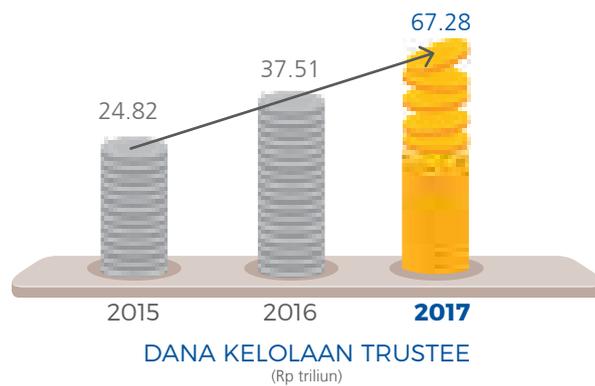
Aset DPLK tercatat sebesar Rp8,79 triliun, tumbuh 50,93% dibanding tahun 2016 sebesar Rp5,82 triliun.





## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Dana kelolaan Trustee BRI tercatat sebesar Rp67,28 triliun, tumbuh 79,36% dibanding tahun 2016 sebesar Rp37,51 triliun.



Sebagai salah satu langkah BRI untuk menjadi *The Most Valuable Bank in South East Asia*, selama tahun 2017 BRI terus mendorong pengelolaan Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal melalui peningkatan layanan jasa Wali Amanat, Kustodian, Trust, Rekening Dana Nasabah (RDN) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia (DPLK BRI), baik untuk nasabah korporasi maupun nasabah ritel.

## Strategi Tahun 2017

### Reorganisasi Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal

Di tahun 2017, organisasi bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal BRI mengalami perubahan, yakni Jasa Agen Sindikasi tidak lagi menjadi bagian dari bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal. Hal ini ditujukan untuk mengoptimalkan fokus pengembangan bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal.

### Mengembangkan kapasitas operasional melalui TI

- Untuk menunjang peningkatan bisnis Kustodian, BRI telah melakukan *pengembangan Core System Custody: CIPS-MEDALLION* untuk penyempurnaan proses transaksi hingga pelaporan.
- Aplikasi TCS Management System pun dikembangkan untuk meningkatkan layanan kepada nasabah Trust dan Wali Amanat.

- Digitalisasi layanan operasional lainnya seperti pengembangan sistem pembukaan RDN untuk transaksi jual-beli saham dan pengembangan Website DPLK BRI (<http://dplk.bri.co.id>) dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang semakin antusias dengan jasa pasar modal.

## Kinerja tahun 2017

Total *Fee Based Income* yang dihasilkan dari bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal tercatat sebesar Rp130,50 miliar pada tahun 2017, atau meningkat 28,69% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp101,41 miliar.

### Kustodian

Sebagai Bank Kustodian pertama yang mengelola Asset Backed Securities/Efek Beragun Aset di Indonesia, Kustodian BRI telah mengelola asset mencapai Rp298,78 triliun pada tahun 2017 atau turun 6,72% dari tahun 2016 sebesar Rp320,29 triliun. Dari pengelolaan aset tersebut, Kustodian BRI mampu membukukan *fee based income* sebesar Rp71,51 miliar atau tumbuh 27,57% dibanding *fee based income* tahun 2016 sebesar Rp56,05 miliar.

### Wali Amanat

Sepanjang tahun 2017, total nilai penerbitan surat berharga yang dikelola oleh Wali Amanat BRI mencapai sebesar Rp69,04 triliun, tumbuh 4,4% dibanding

## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

tahun 2016 sebesar Rp66,10 triliun. Wali Amanat BRI memberikan kontribusi *fee based income* sebesar Rp8,20 miliar pada tahun 2017, tumbuh 20,42% dibanding tahun 2016 sebesar Rp6,81 miliar.

### Trust

Hingga akhir tahun 2017, dana kelolaan Trustee BRI tercatat sebesar Rp67,28 triliun, tumbuh 79,36% dibanding tahun 2016 sebesar Rp37,51 triliun. *Fee based income* yang dihasilkan Trustee BRI mencapai Rp3,91 miliar atau tumbuh 42,27% dari tahun 2016 sebesar Rp2,75 miliar.

### Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Sejak beroperasi pada tahun 2006, DPLK BRI terus menunjukkan kinerja yang baik setiap tahunnya dengan aset kelolaan mencapai Rp8,79 triliun pada tahun 2017, tumbuh 50,93% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp5,84 triliun. *Fee based income* yang berhasil disetorkan kepada BRI sebesar Rp46,87 miliar pada tahun 2017 atau tumbuh 30,97% dari tahun 2016 sebesar Rp35,79 miliar. Kinerja Investasi DPLK BRI ditunjukkan dengan pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan (NAB/UP) masing-masing paket investasi menghasilkan imbal hasil sebesar 7,25% untuk DPLK BRI Pasar Uang, 9,15% untuk DPLK BRI Pendapatan Tetap, 11,05% untuk DPLK BRI Saham, 6,83% untuk DPLK BRI Pasar Uang Syariah dan 7,50% untuk DPLK BRI Berimbang Syariah.

### Rekening Dana Nasabah (RDN)

Untuk keperluan penyelesaian transaksi di pasar modal, BRI menyediakan layanan Giro RDN. Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah rekening terdaftar sebanyak 3.360 rekening.

### Strategi Bisnis Tahun 2018

Di tahun 2018, BRI akan terus mengembangkan bisnis jasa penunjang pasar modal melalui berbagai inisiatif sebagai berikut:

#### Strategi pemasaran

- Akuisisi nasabah baru melalui *joint marketing* dengan unit kerja BRI lain
- Peningkatan *brand awareness* melalui media digital

- Mendorong penjualan DPLK melalui seluruh unit kerja BRI dengan menyelenggarakan program penjualan khusus
- Melakukan sosialisasi dan edukasi produk DPLK kepada pihak internal maupun eksternal BRI serta fokus pada sektor pekerja informal
- Pemasaran jasa Wali Amanat melalui pihak Lembaga Penunjang Pasar Modal untuk melengkapi pemasaran langsung kepada emiten
- Melaksanakan Program Desa Nabung Saham bekerjasama dengan BEI, KSEI, dan Perusahaan-perusahaan Efek.
- Melaksanakan pengelolaan *Escrow Account* untuk beberapa *pipeline* dalam target bisnis.

#### Strategi Penyempurnaan Produk

- Penyempurnaan Sistem DPLK BRI (*Front End sampai dengan Back End*)
- Penyempurnaan aplikasi untuk layanan *Trust & Corporate Services*
- Integrasi sistem internal Kustodian dengan *core system custody*
- Melakukan inovasi produk dan layanan DPLK sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui penambahan manfaat lainnya

Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisa &amp; Pembahasan Manajemen



TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

# BISNIS ENTITAS ANAK

“

Pada tahun 2017, Total Aset Entitas Anak BRI mencapai Rp58,6 Triliun, meningkat 23% dari Rp47,6 Triliun pada tahun 2016.”

⊕ Rp**58,6** triliun

## Aset Entitas Anak BRI

Pada tahun 2017, Total Aset Entitas Anak BRI mencapai Rp58,6 Triliun, meningkat 23% dari Rp47,6 Triliun pada tahun 2016.

⊕ **13,9%**

## Aset BRI Syariah

BRI Syariah membukukan Aset sebesar Rp31,5 Triliun di tahun 2017

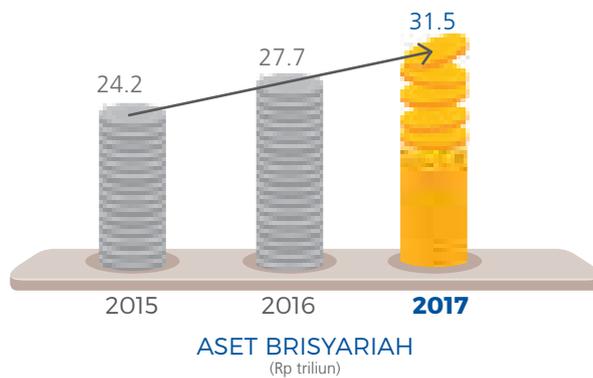
⊕ Rp**16,3** triliun

## Aset BRI Agro

BRI Agro membukukan Aset sebesar Rp16,3 Triliun di tahun 2017

## Ringkasan Kinerja Bisnis Entitas Anak Tahun 2017

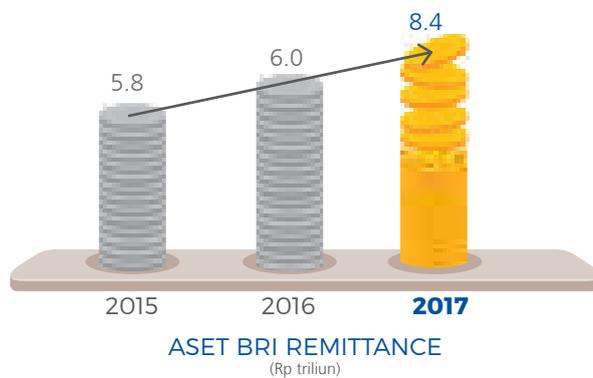
BRI Syariah membukukan Aset sebesar Rp31,5 Triliun atau naik 13,9% dari tahun 2016 sebesar Rp27,7 Triliun.



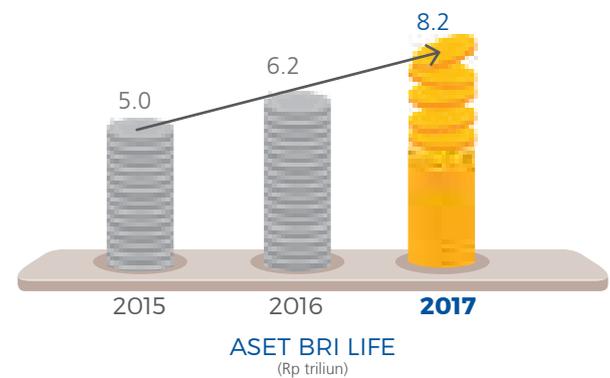
BRI Agro membukukan Aset sebesar Rp16.3 Triliun atau naik 43,5% dari tahun 2016 sebesar Rp11.4 Triliun.



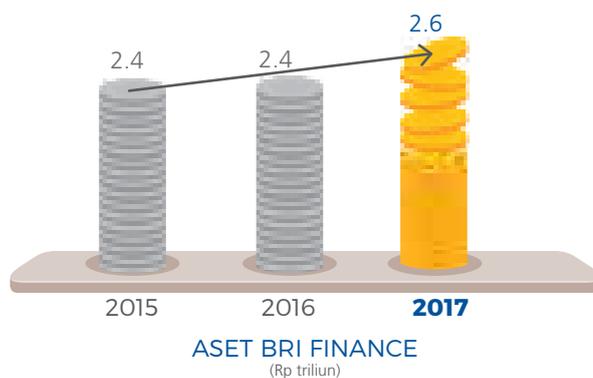
BRI Remittance Hong Kong membukukan Aset sebesar Rp8.4 Miliar atau naik 40.6% dari tahun 2016 sebesar Rp6.0 Miliar.



BRI Life membukukan Aset sebesar Rp8.2 Triliun atau naik 32.1% dari tahun 2016 sebesar Rp6.2 Triliun.



BRI Finance membukukan Aset sebesar Rp2.6 Triliun atau naik 8.7% dari tahun 2016 sebesar Rp2.4 Triliun.



Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

▶ Analisa &amp; Pembahasan Manajemen



## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

BRI adalah induk usaha dari kelompok perusahaan jasa keuangan yang terdiri dari:

1. PT Bank BRISyariah (BRI Syariah)
2. PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro)
3. BRI Remittance Company Ltd (BRI Remittance)
4. PT Asuransi BRI Life (BRI Life)
5. PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance).

Kegiatan entitas anak memberikan sinergi bisnis Bank BRI yang meliputi layanan perbankan konvensional dan syariah, layanan remittance, layanan asuransi jiwa dan layanan pembiayaan.

### Profitabilitas Bisnis Entitas Anak

Pada tahun 2017, segmen bisnis Entitas Anak BRI memberikan kontribusi laba terhadap Entitas Induk sebesar Rp575,10 miliar atau naik 21% dari tahun 2016.

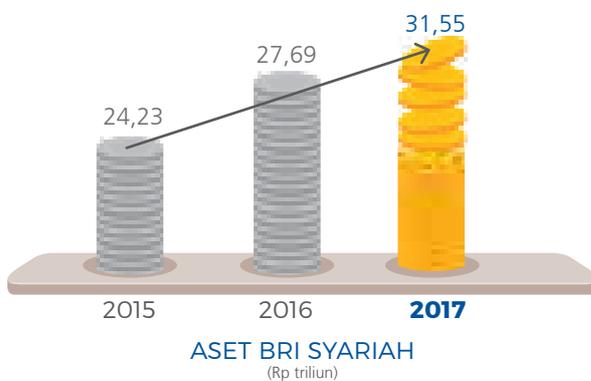
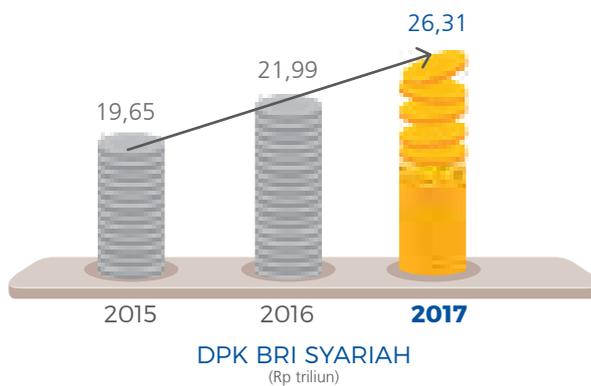
## PT BANK BRI SYARIAH (BRI SYARIAH)

⊕ Rp **26,31** triliun  
DPK BRI Syariah

⊕ Rp **19,01** triliun  
Pembiayaan BRI  
Syariah

⊕ **13,9%**  
Aset BRI Syariah

Ringkasan Kinerja BRI Syariah  
Tahun 2017



Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

▶ Analisa &amp; Pembahasan Manajemen



## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

### Profil Perusahaan

PT Bank BRI Syariah (BRI Syariah) merupakan entitas anak BRI yang bergerak di bidang perbankan syariah, dengan kepemilikan saham mayoritas oleh BRI sebesar 99,99%.

Pada awalnya BRI Syariah didirikan pada tahun 1969 dengan nama PT Bank Jasa Arta berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 3 April 1969. Seiring dengan perkembangan ekonomi Indonesia dan industri perbankan syariah, BRI memandang bahwa bisnis perbankan syariah mempunyai pasar yang cukup potensial, oleh karena itu BRI memutuskan untuk memperkuat positioning Unit Usaha Syariah BRI.

Untuk itu, maka pada tanggal 19 Desember 2007, PT Bank Jasa Arta diakuisisi oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pada tahun 2008, PT Bank Jasa Arta berubah nama menjadi PT Bank Syariah BRI. PT Bank Syariah BRI mendapat persetujuan ijin usaha sebagai bank umum syariah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008.

Selanjutnya BRI melakukan Spin off Unit Usaha Syariah BRI dengan membuat Akta Pemisahan Manajemen pada tanggal 19 Desember 2008 dan menggabungkan Unit Usaha Syariah BRI kedalam PT Bank Syariah BRI yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Dengan fokus pada segmen ritel menengah ke bawah, BRI Syariah memiliki visi untuk menjadi bank ritel modern terkemuka yang menawarkan ragam produk dan layanan perbankan berbasis syariah.

BRI Syariah menawarkan rangkaian produk dan layanan perbankan syariah yang lengkap meliputi produk pembiayaan (untuk segmen mikro, komersial kecil dan menengah serta segmen konsumen) dan produk simpanan (tabungan, tabungan haji, deposito dan giro). BRI Syariah juga merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang menawarkan layanan inklusi keuangan Laku Pandai melalui layanan Brissmart.

### Susunan Manajemen

Dalam melaksanakan kegiatannya, BRI Syariah dipimpin oleh 5 orang Direksi, didampingi oleh 4 orang Anggota Dewan Komisaris, serta 2 orang Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan rincian sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS	
Eko B. Suharno *)	Komisaris Utama
Hermanto Siregar	Komisaris Independen
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen
Eko Suwardi *)	Komisaris Independen
DIREKSI	
Mochammad Hadi Santoso	Direktur Utama
Indra Praseno	Direktur
Wildan	Direktur
Agus Katon Eko Sedyono	Direktur
Hilman Purakusumah *)	Direktur
DEWAN PENGAWAS SYARIAH	
Didin Hafidhuddin	Ketua Dewan Pengawas Syariah
M. Gunawan Yasni	Anggota Dewan Pengawas Syariah

\*) Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atas Fit & Proper Test

## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

**Perkembangan Penting Tahun 2017**

BRI Syariah mencatat beberapa perkembangan penting di tahun 2017, antara lain BRI Syariah terpilih sebagai Bank Persepsi Penerima Pajak dari Kementerian Keuangan RI (Modul Penerimaan Negara/MPN) dan sebagai Bank Syariah Pengelola Rekening Khusus Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Selain itu BRI Syariah juga resmi ditunjuk sebagai salah satu Bank Penyalur Pembiayaan Usaha Rakyat/KUR Syariah untuk Tahun 2017 oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.

Jaringan kantor BRI Syariah juga terus bertambah. Sampai dengan 31 Desember 2017, BRI Syariah telah memiliki 54 Kantor Cabang, 207 Kantor Cabang Pembantu dan 11 Kantor Kas. Layanan Syariah Bank (LSB) di jaringan kantor Bank BRI juga terus dikembangkan, dimana sampai dengan akhir tahun 2017 total LSB mencapai 1.044 unit.

**Tinjauan Keuangan**

Pada tahun 2017, BRI Syariah berhasil membukukan Aset sebesar Rp 31,5 Triliun atau naik 13,9% dari tahun 2016 sebesar Rp27,7 Triliun. Pertumbuhan Aset pada tahun 2017 didorong oleh kenaikan Pembiayaan Syariah sebesar 0,6% atau mencapai Rp17,86 Triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp17,75 Triliun. Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada tahun 2017 juga meningkat 19,6% atau mencapai Rp26.3 Triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp21.99 Triliun. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam memperbaiki kualitas kredit BRI Syariah masih mampu membukukan Laba sebesar Rp105.20 Miliar, sedikit turun dari tahun 2016. BRISyariah juga memiliki rasio kecukupan modal (CAR) yang baik yaitu sebesar 20,45%.

**Strategi Pengembangan di Tahun 2018****Strategi Pendanaan (Funding)****Strategi Penghimpunan Dana**

Pada tahun 2018 BRI Syariah akan fokus pada penghimpunan dana murah (CASA) dengan strategi sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kerja sama dengan Kementerian Agama dalam mengoptimalkan Pengelolaan Dana Haji
- b. Mengembangkan kerja sama dengan lembaga pendidikan di bawah:
  - Kementerian Pendidikan (lembaga pendidikan dasar, menengah, atas dan pendidikan tinggi yang memiliki Fakultas Ekonomi Bisnis Islam)
  - Kementerian Agama (Madrasah dan Universitas Islam)
  - Yayasan Muhammadiyah
- c. Penghimpunan dana operasional Institusi-institusi seperti BAZNAS, PLN, Rumah Zakat, PEMDA dan BUMN (antara lain PERTAMINA dan PEGADAIAN Syariah) dalam rangka BRIS sebagai Bank Operasional 2 (BO 2).
- d. Melakukan kerja sama dengan Mastercard terkait fitur kemudahan transaksi di luar negeri.
- e. Perluasan pengelolaan KLS dengan mengoptimalkan pembukaan rekening tabungan, salah satunya Tabungan Haji.

**Strategi Bisnis Haji dan Umroh**

Pada tahun 2018 BRI Syariah berkomitmen untuk terus mengoptimalkan Bisnis Haji dan Umroh dengan strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penjualan produk haji, baik haji regular maupun haji khusus, antara lain dengan cara:
  - Bekerja sama dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan travel dalam bentuk bank garansi dan pembiayaan modal kerja
  - Melakukan promosi melalui media cetak maupun elektronik
  - Mempermudah pembukaan tabungan haji untuk jamaah migrasi dari BRI
- b. Meningkatkan penjualan produk pembiayaan Talangan Umroh.
- c. Meningkatkan *Fee Based Income* melalui peningkatan transaksi penjualan Saudi Arabia Riyal (SAR) saat musim Haji, mengembangkan dan mengoptimalkan *Cash Management System* (CMS), mengoptimalkan kerja sama dengan Penyelenggara Haji & Umroh (PHU) serta meningkatkan penyaluran pembiayaan produk, halal dan industri kreatif.
- d. Menjajaki pembukaan Bank Koresponden di Arab Saudi



## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

- e. Meningkatkan penetrasi kepada Unit Usaha Muhammadiyah seperti pendidikan dan kesehatan (Rumah Sakit Muhammadiyah)

**Strategi Pembiayaan (*Financing*)****Strategi Pembiayaan Retail - Mikro**

- a. Mengoptimalkan penyaluran produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah diantaranya melalui program Serbu Pasar Mikro.
- b. Optimalisasi Funding dengan penetrasi langsung melalui saranan pemasaran *Open Table* dengan atau Mobile ATM
- a. Memperluas jaringan kerja jaringan baru yang potensial untuk zz Mikro

**Strategi Pembiayaan Retail – Konsumer**

- a. Peningkatan penjualan KMG dan KPR melalui *Employee Benefit Program* (EMBP) kerja sama dengan instansi serta institusi dalam rangka BRIS sebagai Bank Operasional 2 (BO 2).
- b. Meningkatkan penjualan Program KPR Faedah, KPR FLPP dan KMG/KMJ

**Strategi Pembiayaan Retail – SME**

- Prioritas pembiayaan untuk nasabah Mikro yang berpotensi “naik kelas” menjadi nasabah SME.
- Pembuatan skim-skim pembiayaan untuk bisnis tertentu dalam rangka mendorong pertumbuhan pembiayaan di kantor cabang

**Strategi Pembiayaan Segmen Retail - Linkage**

- Optimalisasi *Existing Line Facility* yang belum digunakan secara maksimal khususnya Koperasi Karyawan (Kopkar) atau Koperasi Syariah (Kopsyah) dengan menggunakan skema channeling yang bertujuan untuk optimalisasi ATMR dan penjaminan pembiayaan.
- *Top Up* Plafond Nasabah *Existing* yang berkinerja baik.
- Pembiayaan selektif kepada Multi finance tertentu yang berkinerja baik.

**Strategi Pembiayaan Segmen Komersial**

- Memprioritaskan pembiayaan kepada BUMN Related, industri terkait infrastruktur, energy, agro industry dan transportasi darat berbasis dana APBN/APBD (Pengembangan *value chain* dengan BUMN).
- Kerja sama pembiayaan dengan induk perusahaan (BRI), diantaranya melalui mekanisme *sell down* untuk pembiayaan komersial dalam rangka membiayai portofolio BRI yang memiliki kinerja terbukti baik.

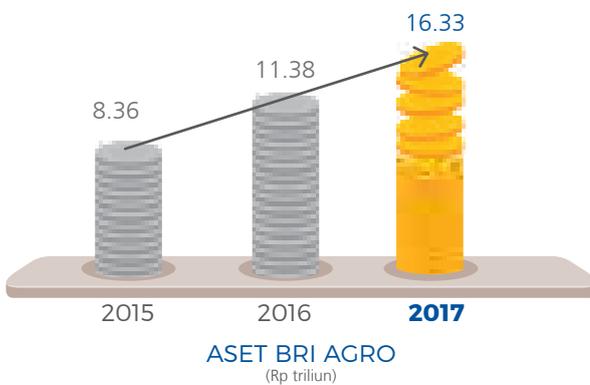
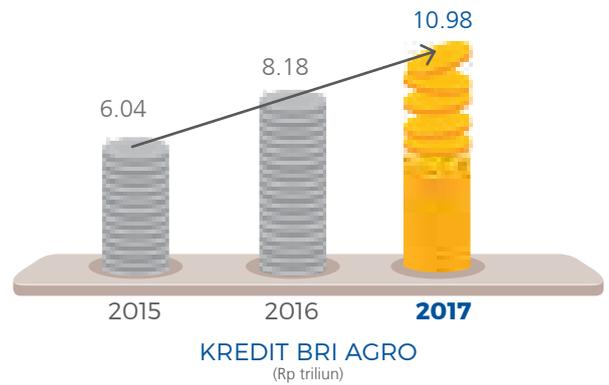
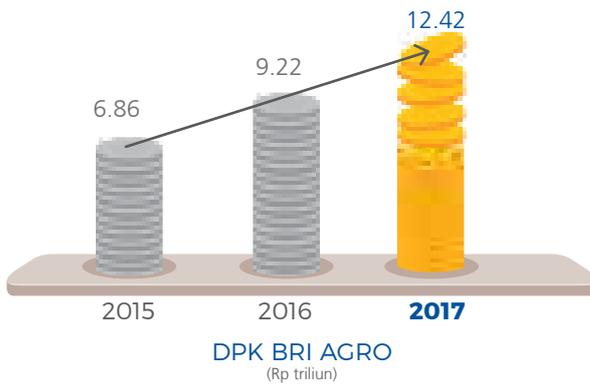
# PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK

⊕ Rp12,42 triliun  
DPK BRI Agro

⊕ Rp10,98 triliun  
Kredit BRI Agro

⊕ 43,5%  
Aset BRI Agro

## Ringkasan Kinerja BRI Agro Tahun 2017





## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

### Profil Perusahaan

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro) merupakan entitas anak BRI yang bergerak di bidang perbankan, dengan kepemilikan saham mayoritas sebesar 86,82%.

Pembentukan BRI Agro berawal dari akuisisi BRI terhadap PT Bank Agroniaga Tbk (Bank Agro). Bank Agro didirikan pada tanggal 27 September 1989 oleh Dana Pensiun Perkebunan (DAPENBUN) dengan kepemilikan saham sebesar 66,23%, Astek sebesar 10,31% dan Yayasan Sarana Wana Jaya (Departemen Kehutanan) sebesar 15,46%. PT Bank Agroniaga didirikan sebagai bank komersial yang fokus pada sektor agrobisnis dan terutama ditujukan untuk mendukung perusahaan-perusahaan perkebunan yang pada saat itu berada di bawah kendali Departemen Pertanian.

Dalam perkembangannya, pada tahun 2003, PT Bank Agroniaga mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Surabaya berdasarkan persetujuan Bapepam-LK No. S-1565/PM/2003 tertanggal 30 Juni 2003, sehingga menjadi PT. Bank Agroniaga Tbk dengan kode perdagangan di Bursa adalah AGRO. Pada tahun yang sama, perusahaan melakukan penambahan modal melalui proses Penawaran Umum Terbatas (PUT) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 305.967.338 lembar saham sehingga total lembar saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa efek setelah PUT I menjadi sebanyak 1.835.205.028 lembar saham.

Pada tahun 2005, Perseroan melakukan penambahan modal kembali melalui PUT II sebanyak 513.857.128 lembar saham, sehingga total saham Perseroan menjadi sebanyak 2.349.061.156 lembar saham atau sebesar Rp234.906.115.600. Seiring dengan penambahan modal, aktivitas Perseroan juga berkembang. Perkembangan ini sangat mendukung Perseroan sehingga pada tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 8/41/Kep.GBI/2006 tertanggal 8 Mei 2006, Perseroan berhasil meningkatkan status menjadi Bank Devisa

Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan pemenuhan modal (capital adequacy), pada tahun 2009 Perseroan

melakukan penambahan modal tanpa HMETD pada bulan Maret 2009 sebanyak 64.000.000 lembar saham dan melalui PUT III pada bulan November 2009 sebanyak 1.005.144.172 lembar saham yang disertai Waran Seri I sebanyak 199.890.250 lembar saham sehingga total saham Perseroan menjadi sebesar 3.618.095.578 lembar. Meskipun penerbitan waran seri I tidak sepenuhnya dieksekusi oleh Pemegang Saham, namun permodalan Perseroan telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan Otoritas Moneter (BI), yaitu CAR sebesar 16,39%

Pada tahun 2011, Bank Agro memasuki era baru. Tepatnya pada tanggal 3 Maret 2011, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengakuisisi saham PT Bank Agroniaga Tbk sebanyak 88,65%. Dengan demikian sejak saat itu Bank BRI menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP). Pada tahun 2012, Perseroan melakukan pergantian nama menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk dengan nama komersial Bank BRI Agro.

Setelah diakuisisi oleh BRI, untuk semakin memperkuat permodalan Bank, Perseroan kembali melakukan proses tambah modal melalui PUT dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 4 kali yaitu PUT IV pada Mei 2013 sebanyak 3.832.685.599 lembar saham, PUT V pada Mei 2015 sebanyak 4.028.934.521 lembar saham, PUT VI pada Oktober 2016 sebesar 3.845.996.122 lembar saham dan PUT VII pada Mei 2017 sebesar Rp 2.515.555.707 lembar saham.

Pada PUT VI, Perseroan juga menerbitkan Waran Seri II sebanyak 616.908.103 lembar. Sampai dengan 31 Desember 2017, jumlah Waran Seri II yang telah dikonversi menjadi saham sejumlah 71.270.431 lembar.

BRI Agro memiliki visi untuk mewujudkan Bank Komersial terkemuka yang fokus pada sektor pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis di Indonesia. Adapun misi BRI Agro adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik pada segmen Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terutama sektor agribisnis untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

- b. Memenuhi kebutuhan pokok jasa dan layanan perbankan yang berkualitas, didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas tinggi dalam melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
- c. Memberikan manfaat yang optimal bagi para stakeholder.

Sampai dengan tahun 2017, BRI Agro memiliki jaringan operasi sebanyak 16 Kantor Cabang dan 19 Kantor Cabang Pembantu dan 4 Kantor Kas. BRI Agro juga memiliki total sumber daya manusia sebanyak 683 orang dengan latar belakang beragam disiplin ilmu yang relevan dalam mendukung kegiatan utama perusahaan.

### Susunan Manajemen

Dalam melaksanakan kegiatannya, BRI Agro dipimpin oleh 5 orang Direksi, didampingi oleh 4 orang Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS	
Bambang Soepeno	Komisaris Utama
Anna Maria Ciadarma *)	Komisaris Independen
Heru Sukanto	Komisaris Independen
Edwind Sinaga *)	Komisaris Independen
DIREKSI	
Agus Noorsanto *)	Direktur Utama
Ebeneser Girsang *)	Direktur
Zainuddin Mappa	Direktur
Herry Prayudi *)	Direktur
Zuhri Anwar	Direktur
DEWAN PENGAWAS SYARIAH	
Didin Hafidhuddin	Ketua Dewan Pengawas Syariah
M. Gunawan Yasni	Anggota Dewan Pengawas Syariah

\*) Berdasarkan hasil RUPSLB BRI Agro tanggal 6 Desember 2017, dinyatakan efektif setelah lulus fit & proper test OJK

### Perkembangan Penting BRI Agro Tahun 2017

Perkembangan penting BRI Agro selama tahun 2017, antara lain:

1. Melakukan penerbitan Obligasi pertama sebesar Rp500 miliar pada Juni 2017.
2. Membuka Kantor Cabang Utama di Jakarta pada bulan Agustus 2017 dan pembukaan Kanca Bintaro pada September 2017
3. Peluncuran produk Agrotama pada Hut BRI Agro ke -28 bulan September 2017.
4. Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda Perubahan Pengurus pada Desember 2017.



## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

### Tinjauan Keuangan Tahun 2017

Pada tahun 2017 BRI Agro membukukan Aset sebesar Rp16,33 Triliun atau tumbuh 44% dari tahun 2016 sebesar Rp11,38 Triliun. Pertumbuhan aset didorong oleh optimalisasi penyaluran kredit dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga. Pada tahun 2017, Kredit naik sebesar 34,2% atau mencapai Rp10,98 Triliun dari tahun 2016 yang sebesar Rp8,18 Triliun. Sementara, Dana Pihak Ketiga juga mengalami kenaikan sebesar 34,7% atau mencapai Rp12,42 Triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp9,22 Triliun. BRI Agro juga mencatatkan tingkat profitabilitas yang lebih baik di tahun 2017, dimana Laba Bersih mampu tumbuh 36% atau mencapai Rp140,50 Miliar dari tahun 2016 yang sebesar Rp103 Miliar. Dengan pertumbuhan Laba Bersih tersebut, BRI Agro mampu mencapai ROA pada level 1,45% dan ROE 5,84%. Tingkat kecukupan modal BRI Agro juga mampu terjaga pada level yang layak yaitu sebesar 29,7%.

### Strategi Pengembangan Tahun 2018

Pada tahun 2018, fokus utama Perseroan yaitu mengoptimalkan bisnis di unit kerja dengan tetap fokus pada segmen ritel khususnya penyaluran kredit plasma dan penguatan CASA. Beberapa strategi yang akan dilakukan antara lain dengan memperluas jaringan kantor, meningkatkan kompetensi tenaga pemasar, mengembangkan jaringan elektronik, dan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam program penjualan (*awareness*, akuisisi dan retensi). Perseroan juga akan tetap fokus dalam menyalurkan kredit pada segmen ritel melalui pembiayaan plasma dengan tetap menjaga kualitas kredit. Perseroan juga akan mengembangkan produk serta fitur *e-channel* antara lain pembukaan rekening online, *virtual account*, dan fitur *e-channel* lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut perseroan akan memperkuat infrastruktur TI termasuk pemanfaatan satelit BRI guna menunjang sistem informasi yang handal.

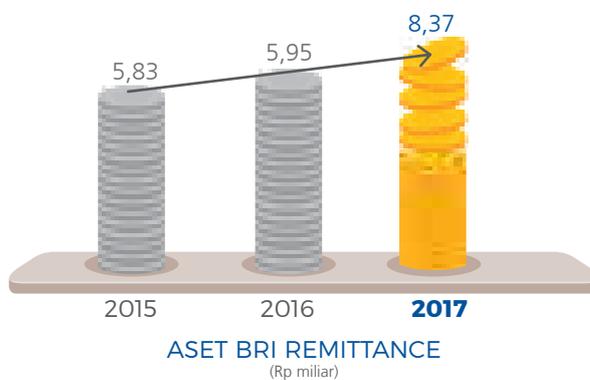
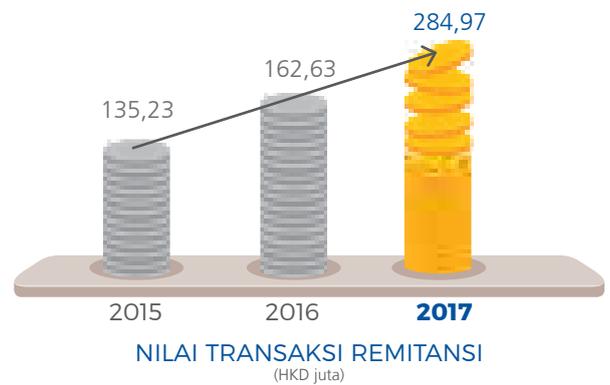
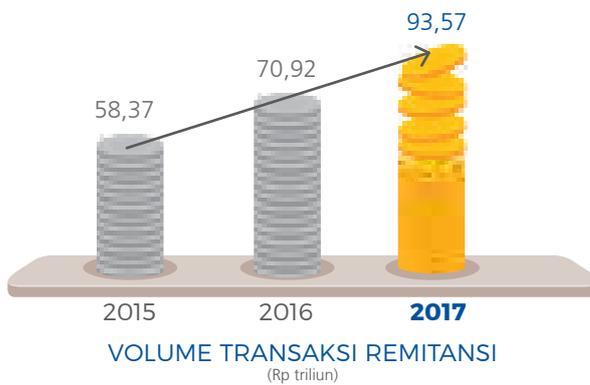
## BRI REMITTANCE COMPANY LTD. (BRI REMITTANCE)

⊕ **93,570** triliun  
Volume Transaksi  
Remitansi

⊕ **Rp284,97** triliun  
Nilai Transaksi  
Remitansi

⊕ **40,6%**  
Aset BRI  
Remittance

### Ringkasan Kinerja BRI Remittance Tahun 2017



Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

▶ Analisa &amp; Pembahasan Manajemen



## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

### Profil Perusahaan

BRI Remittance Company Ltd Hong Kong (BRI Remittance) merupakan salah satu entitas anak BRI yang bergerak di bidang jasa remittance, dengan kepemilikan saham penuh sebesar 100%.

BRI Remittance semula bernama BRI Remittance Company Ltd yang didirikan pada 7 April 2005 oleh PT BRIngin Jiwa Sejahtera (BJS), anak perusahaan dari Dana Pensiun BRI. Pada 16 Desember 2011, BRI menjadi pemegang saham pengendali di BRI Remittance dengan kepemilikan saham sebesar 100% setelah penandatanganan *Instrument of Transfer* dan *Bought & Sold Notes*. Pada 2 Juli 2012 BRI Remittance Company Ltd secara resmi berubah menjadi BRI Remittance Company Limited Hong Kong berdasarkan keputusan Rapat Umum Tahunan BRIngin Remittance Company Limited.

Sesuai dengan License No. 12-08-00742 yang diperoleh dari Hong Kong Customs & Excise Department, BRI Remittance Company Ltd adalah badan usaha yang diijinkan melaksanakan bisnis dalam kriteria layanan keuangan (*money service operator*) secara khusus yaitu bidang bisnis remitansi (pengiriman uang) dari Hong Kong ke Indonesia. BRI Remittance Company saat ini melayani kebutuhan transaksi keuangan (menabung dan pengiriman uang) lebih dari 60.000 nasabah Bank Rakyat Indonesia yang umumnya bekerja sebagai *domestic worker* dan berdomisili di Hong Kong.

Sampai dengan saat ini BRI Remittance memiliki 4 kantor Cabang yang tersebar di berbagai wilayah potensial domisili Indonesian *domestic worker* di Hong Kong sebagai berikut:

No.	Lokasi Kantor Cabang	Alamat
1.	Causeway Bay (Main Branch)	Flat 22 G/F Bayview 33 Moreton Terrace Causeway Bay, Hongkong
2.	Yen Long	Shop 25 1/F Hop Yick Building
3.	Tsuen Wan	Shop 214 2/F Lik Sang Plaza
4.	Mong Kok	137 Sai Yee Street Mongkok

### Susunan Manajemen BRI Remittance

BRI Remittance Hong Kong dipimpin oleh 1 (satu) orang Executive Director dan 1 (satu) orang Non-Executive Director, yaitu:

No.	Nama	Jabatan
1.	Gigieh Perkasa	Executive Director
2.	Roby Firmansjah Sastraatmadja	Non - Executive Director

### Perkembangan Penting Tahun 2017

Pada Mei 2017 BRI Remittance melakukan relokasi dan renovasi Kantor Cabang Utama ke jalan utama (*main street level*). Relokasi kantor cabang utama ini sangat penting mengingat lokasi kantor sebelumnya sangat kecil dan sulit dijangkau, sehingga membuat nasabah tidak nyaman dalam melakukan transaksi.

BRI Remittance juga mengembangkan sistem Brifast versi 2 sehingga lebih memudahkan dalam memproses layanan kiriman ke bank lain dan mengimplementasikan pembukaan rekening online untuk TKI dari luar negeri. Layanan Pembukaan rekening On Line dari luar negeri yang dilaksanakan oleh BRI Remittance Hong Kong ini merupakan yang

## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

pertama kali dilaksanakan oleh BRI, sehingga menjadi benchmark layanan pembukaan rekening on line yang akan digunakan oleh Remittance Representative BRI di koridor negara lain.

### Tinjauan Keuangan Tahun 2017

Pada tahun 2017, BRI Remittance mampu membukukan Aset sebesar HKD 4.82 Juta atau tumbuh 40,52% dari tahun 2016 yang sebesar HKD 3.43 Juta. Pertumbuhan Aset didorong oleh peningkatan jumlah transaksi dan nilai remittance. Sampai dengan tahun 2017 jumlah transaksi remittance tercatat sebesar 93.570 transaksi atau mengalami peningkatan sebesar 31,94% dari tahun 2016 yang sebesar 70.920 transaksi, sementara nilai transaksi naik sebesar 75,23% dari HKD 162,63 Juta pada tahun 2016 menjadi HKD284,97 Juta. Laba BRI Remittance pada tahun 2017 mencapai HKD 114.35 atau tumbuh 18,98% dari tahun 2016 sebesar HKD 96.11.

### Strategi Pengembangan Tahun 2018

Di tahun 2018, BRI Remittance akan fokus pada peningkatan layanan kepada nasabah, yang akan diwujudkan melalui strategi antara lain meningkatkan kemampuan *operating system* sehingga lebih mudah untuk diintegrasikan baik dengan sistem BRIfast maupun aplikasi BRI Remittance Mobile, serta meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas proses *back office* untuk meningkatkan pengembangan bisnis lainnya.

Untuk pengembangan bisnis di Tahun 2018, BRI Remittance berencana akan menambah beberapa *counterpart* kerja sama yang potensial terutama di Macau dan Taiwan untuk meningkatkan *coverage* layanan transaksi remitansi. Strategi *cross selling* produk perusahaan anak BRI lain juga akan lebih diintensifkan pada Tahun 2018 terutama untuk produk DPLK dan produk BRI Syariah.

Strategi pemasaran akan dilaksanakan dengan menambah komunitas-komunitas binaan serta membuat berbagai event marketing berbasis komunitas, serta akan dijangkau pemasaran melalui media sosial yang dikelola secara profesional, sehingga dengan upaya-upaya tersebut diharapkan informasi layanan BRI Remittance akan lebih cepat tersebar.



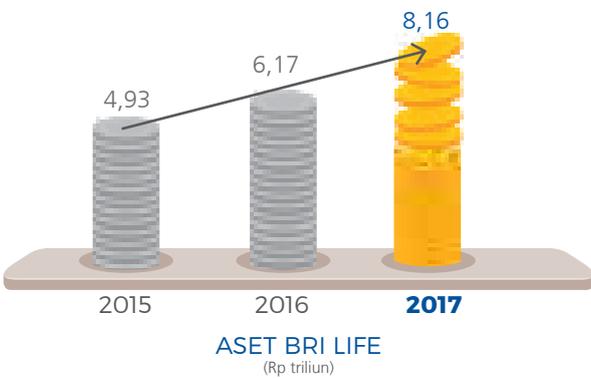
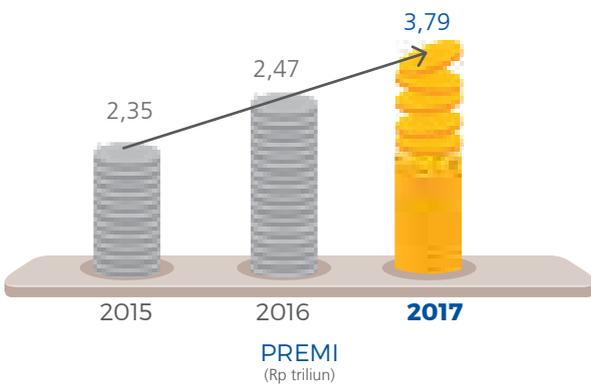
# PT ASURANSI BRI LIFE

⊕ Rp2.82 triliun  
Premi

⊕ Rp2.10 triliun  
Ekuitas

⊕ Rp560.22 triliun  
Hasil Investasi

## Ringkasan Kinerja BRI Life Tahun 2017



## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

### Profil Perusahaan

PT Asuransi BRI Life (BRI Life) merupakan salah satu entitas anak BRI yang bergerak di bidang asuransi jiwa, dengan kepemilikan saham mayoritas sebesar 91%.

PT Asuransi BRI Life (BRI Life) yang semula bernama PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (BRIngin Life) didirikan oleh Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1987 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 116 tanggal 28 Oktober 1987, yang dibuat oleh Notaris Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan izin usaha berdasarkan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep. 181/KM.13/1988 tanggal 10 Oktober 1988.

Pada akhir Desember 2015, telah dilakukan pengambilalihan saham (Akuisisi) PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 91% dan selanjutnya berganti nama menjadi PT Asuransi BRI Life (BRI Life).

BRI Life dibentuk untuk memenuhi kebutuhan serta melengkapi pelayanan kepada nasabah BRI, khususnya nasabah kredit kecil melalui perlindungan Asuransi Jiwa Kredit (AJK). Dalam perkembangannya, setelah melihat besarnya peluang bisnis perasuransian seperti: Asuransi Jiwa, Kesehatan, Program Dana Pensiun, Kecelakaan Diri, Anuitas dan Program Kesejahteraan Hari Tua, BRI Life mulai meluaskan pelayanan dan menambah pasar di luar BRI dengan menawarkan layanan asuransi kepada masyarakat luas, baik individu maupun kumpulan.

Pada tahun 1993 BRI Life pertama kali membuka kantor penjualan untuk melayani nasabah di wilayah Jakarta dan Surabaya. Pada perkembangan selanjutnya seiring dengan pertumbuhan bisnis yang sangat pesat, BRI Life terus mengembangkan sayapnya sehingga menjangkau lapisan masyarakat di beberapa kota besar di Indonesia

Pada tahun 1995, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP - 184/KM.17/1995 BRI Life mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk menjawab tingginya permintaan masyarakat akan kebutuhan pensiun di hari tua. BRI Life terus meluaskan layanannya dengan membuka unit usaha Asuransi Syariah berdasarkan keputusan Menteri

Keuangan RI No. KEP - 007/KM.6/2003 tanggal 21 Januari 2003. Pembukaan unit usaha Syariah ini disertai dengan pembukaan beberapa kantor penjualan Syariah yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia.

Pada bulan Juni 2013 BRI Life melakukan pengembangan saluran bisnis Bancassurance bekerja sama dengan PT BRI (Persero) Tbk dengan menempatkan tenaga penjualan Bancassurance Relationship Officer (BRO) di Bank BRI wilayah Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Malang, Denpasar, Palembang, Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Lampung, Makassar, Manado, Banjarmasin dan Jayapura yang ditujukan untuk menjangkau nasabah perbankan BRI dengan perlindungan Asuransi secara optimal.

Memasuki usia 30 tahun, kiprah BRI Life makin dikenal luas sebagai salah satu perusahaan asuransi jiwa nasional yang telah melayani lebih dari 7 juta nasabah melalui program-program asuransi unggulan yang bermanfaat dan menguntungkan. BRI Life juga didukung dengan beragam produk asuransi BRI Life yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meliputi produk: AJK, Individu, Korporasi, DPLK, Syariah, Bancassurance dan Mikro.

### Susunan Manajemen BRI Life

Pada tahun 2017, BRI Life memiliki 5 anggota Dewan Komisaris dan 6 anggota Direksi. Berikut susunan manajemen BRI Life:



## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

DEWAN KOMISARIS	
Gatot Mardiwastoto	Komisaris Utama
Mahmuddin Yasin	Wakil Komisaris Utama
Siswarin D. Hendarsapti	Komisaris
Mulabasa Hutabarat	Komisaris Independen
M. R. Rizqi R. Nasution	Komisaris Independen
DIREKSI	
Rianto Ahmadi	Direktur Utama
Sugeng Sudibjo	Direktur
Fabiola Noralita Sondakh	Direktur
Ansar Arifin	Direktur
M. Sodo Harisetyanto	Direktur
Khairi Setiawan	Direktur

### Perkembangan Penting Tahun 2017

Tahun 2017 merupakan tahun ke-2 BRI Life sebagai anak Perusahaan Bank BRI. BRI Life terus berbenah untuk meningkatkan pertumbuhan bisnisnya. Berbagai upaya dan inovasi dilakukan BRI Life untuk mempercepat laju pencapaian target perusahaan, diantaranya semakin disempurnakannya layanan berbasis digital bagi nasabah, mulai dari awal pembelian hingga *after sales service*.

BRI Life terus mengembangkan inovasi produk dimana telah meluncurkan 28 produk baru berupa 8 (delapan) produk unit link dan 20 produk Rider yang diterbitkan untuk kanal distribusi *In-Branch Sales Bancassurance* dan distribusi Agency (Konvensional & Syariah). Melalui asuransi mikro, BRI Life akan tetap bersinergi dengan induk perusahaan dengan fokus menggarap kanal distribusi pemasaran *bancassurance*. Untuk mendukung tujuan tersebut, BRI Life melakukan implementasi strategi dengan fokus pada produk unggulan yaitu: Go Unit Link, Go Protection, Go ANP, Go Retail, Go Window dan Go Agency.

### Tinjauan Keuangan Tahun 2017

Pada tahun 2017 BRI Life membukukan Aset sebesar Rp 8,17 Triliun atau tumbuh 31,8% dari tahun 2016 yang sebesar Rp 6,2 Triliun. BRI Life juga membukukan laba bersih sebesar Rp327,67 miliar meningkat sebesar 54,66% dari realisasi tahun 2016 sebesar Rp211,87 miliar. Peningkatan Laba didukung oleh peningkatan Pendapatan Premi sebesar 53,44% atau menjadi sebesar Rp3,79 triliun dibandingkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp2,47 triliun. Hasil Investasi menjadi sebesar 560,22 miliar atau meningkat sebesar 16,68%.

Dengan Laba dan Aset yang tersebut di atas, maka ROA dan ROE BRI Life tahun 2017 masing-masing 4,54% dan 17,30%. Rasio tersebut mengalami peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2016 sebesar 3,81% untuk ROA dan 14,13% untuk ROE. Ekuitas tahun 2017 juga meningkat sebesar 31,25% dari realisasi tahun 2016 dari Rp1,60 triliun menjadi Rp2,10 triliun.

## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

### Strategi Pengembangan Tahun 2018

Pada tahun 2018, BRI Life akan menjalankan inisiatif strategis sebagai berikut:

1. Bancassurance
  - Memperbesar volume bisnis per BFA (*Bancassurance Financial Advisor*), dengan cara meningkatkan jumlah referral MNM dari BRI pada Tahun 2018 menjadi 3 *referral*/hari.
  - Penjualan produk dengan metode *Bank staff selling* (AMKKM/PRISMA, LENTERA dan produk baru lainnya).
  - Pemanfaatan *customer base* BRI sebagai potensi sasaran penjualan produk asuransi & meningkatkan kedalaman pendekatan *customer journey* dalam menentukan produk sesuai dengan kebutuhan dan atua profil dari nasabah.
  - Meningkatkan pemasaran produk asuransi jiwa melalui skema bisnis telemarketing.
2. Mengkaji peluang penjualan bancassurance melalui skema integrasi (*bundle product*) dengan produk perbankan induk (Britama & Simpedes).
3. Sinergi antar perusahaan anak BRI untuk menggarap segmen ritel dengan metode *bank staff selling*.

Untuk mendukung pencapaian strategi perusahaan yang telah ditetapkan untuk tahun 2018, BRI Life membangun budaya kerja perusahaan dan untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan dan pemberian layanan prima kepada nasabah dengan jaringan kerja yang luas, serta membangun infrastruktur IT yang andal.



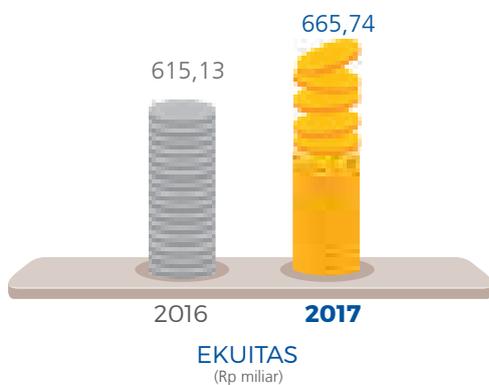
## PT BRI MULTIFINANCE INDONESIA (BRI FINANCE)

⊕ Rp2,61 triliun  
Aset

⊕ Rp2,39 triliun  
Pembiayaan

⊕ Rp51,07 miliar  
Laba Bersih

### Ringkasan Kinerja BRI Finance Tahun 2017



## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

### Profil Perusahaan

PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) merupakan salah satu entitas anak BRI yang bergerak di bidang multifinance, dengan kepemilikan saham mayoritas sebesar 99%.

Pada mulanya BRI Finance berdiri pada tahun 1983 sebagai perusahaan patungan antara The Sanwa Bank Limited, Jepang dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nama perusahaan PT Sari Usaha Leasing. PT. Sari Usaha Leasing adalah salah satu perusahaan perintis untuk industri pembiayaan di Indonesia setelah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-465/KM.11/1983. Pada tahun yang sama Perusahaan melakukan pergantian nama menjadi PT Sanwa-BRI Leasing.

Di tahun 1991, Perusahaan mendapatkan izin usaha untuk menjalankan bisnis multi-finance sehingga Perusahaan melakukan penamaan ulang menjadi PT Sanwa-BRI Finance. Ijin Usaha Perusahaan mengalami perubahan sebanyak beberapa kali, dan yang terakhir adalah Surat Keputusan dari Menteri Keuangan Nomor: KEP-045/KM.102/ 2008 tertanggal 18 Maret 2008.

Seiring dengan terjadinya proses merger yang dilakukan oleh The Sanwa Bank Ltd, Jepang menjadi The UFJ Bank Ltd, Jepang, nama Perusahaan disesuaikan menjadi PT UFJ-BRI Finance di tahun 2002. Dengan nama baru ini memberikan kesempatan bagi Perusahaan untuk berkembang lebih pesat karena mendapatkan dukungan bisnis dan keuangan yang lebih besar dari para pemegang saham. Sekali lagi, proses merger yang dilakukan oleh pihak pemegang saham The UFJ Bank Ltd, Jepang menjadi The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Limited, Jepang membuat Perusahaan melakukan penyesuaian nama perusahaan menjadi PT BTMU-BRI Finance di tahun 2008. Dengan perubahan ini, sebagai perusahaan patungan antara The BTMU Ltd, Jepang dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Perusahaan mendapat keuntungan dengan adanya dukungan yang kuat dari segi jaringan kerja dan keuangan untuk mengokohkan posisi Perusahaan di industri Pembiayaan di Indonesia.

Pada 30 September 2016, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank Rakyat Indonesia membeli saham BRI Finance dari The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd, Jepang. Kepemilikan saham Perusahaan resmi dimiliki PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 99% dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank Rakyat Indonesia sebesar 1%. Seiring dengan peralihan saham, nama Perusahaan berubah dari PT BTMU-BRI Finance menjadi PT BRI Multifinance Indonesia dengan merk dagang BRI Finance. Perubahan ini menjadikan BRI Finance sebagai bagian dari jasa keuangan terintegrasi dan jaringan keuangan terbesar di Indonesia guna memperkuat posisi di industri keuangan Indonesia. BRI Finance memfokuskan bisnis di bidang pembiayaan investasi dengan skema sewa guna usaha. Dari sisi geografis, BRI Finance melakukan bisnis secara menyeluruh dan mencakup seluruh wilayah Indonesia dengan tidak terpaku pada merek, tipe, area atau industri tertentu.



## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

### Susunan Manajemen BRI Finance Tahun 2017

Dalam menjalankan usahanya, BRI Finance memiliki 3 anggota Dewan Komisaris dan 4 Direksi. Susunan manajemen BRI Finance sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS	
Edi Masrianto	Presiden Komisaris
Nandi Hendrian Hamaki	Komisaris
Boyke Budiono	Komisaris Independen
DIREKSI	
Kurnia Chaerudin	Presiden Direktur
Hendrickus	Direktur
Achmad Chairul Ganie	Direktur
Hadi Susanto	Direktur

### Perkembangan Penting Tahun 2017

Pada tahun 2017, BRI Finance telah mengimplementasikan *financing core system* baru "CONFINS" yang akan memperkuat pengembangan bisnis pembiayaan dan meningkatkan kualitas layanan. Sistem ini juga telah terintegrasi dengan sistem pembiayaan konsumen yang dijalankan oleh BRI Finance mulai pertengahan tahun 2017. Pengembangan sistem ini akan terus dilakukan guna menambahkan fitur-fitur baru yang mendukung proses digitalisasi operasional bisnis secara keseluruhan pada tahun 2018.

Jaringan kantor BRI Finance di tahun 2017 juga terus bertambah. Selama tahun 2017, BRI Finance menambah 4 (empat) kantor pemasaran baru yang berlokasi di Palembang, Solo, Makassar dan Denpasar. Total BRI Finance telah memiliki 1 (satu) kantor pusat, 4 (empat) kantor cabang dan 7 (tujuh) kantor pemasaran.

Selain itu BRI Finance juga meraih penghargaan dari Majalah Infobank sebagai salah satu perusahaan pembiayaan yang berkinerja "Sangat Bagus" untuk kategori aset Rp1 triliun sampai dengan Rp5 triliun pada September 2017 dan "Multifinance Company with Very Good Performance" untuk kategori aset Rp1 triliun sampai dengan Rp2,5 triliun pada Oktober 2017 dari Majalah Warta Ekonomi.

### Tinjauan Keuangan Tahun 2017

Pada tahun 2017, BRI Finance membukukan Aset sebesar Rp2.61 Triliun atau tumbuh 8,8% dari tahun 2016 yang sebesar Rp2,40 Triliun. Pertumbuhan Aset didorong oleh kenaikan Piutang Sewa Pembiayaan sebesar 13,18% dari Rp2,20 Triliun pada tahun 2016 menjadi Rp2,49 Triliun di tahun 2017. BRI Finance berhasil memperbaiki kualitas piutang sewa pembiayaan yang ditunjukkan dengan penurunan NPF (Gross) dari 9,90% pada tahun 2016 menjadi 4,24% di tahun 2017. BRI Finance membukukan laba bersih setelah pajak tahun 2017 sebesar Rp. 51,07 miliar.

## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

### Strategi Pengembangan Tahun 2018

BRI Finance bertekad untuk terus mengembangkan usahanya pada tahun 2018. Untuk itu, telah memiliki strategi pengembangan bisnis sebagai berikut:

- Melakukan sinergi pembiayaan dengan BRI sebagai perusahaan induk, antara lain melalui Mengembangkan pembiayaan investasi/komersial yang difokuskan kepada vendor dan Group BRI, Mengembangkan pembiayaan dengan skema Sewa Guna Operasional (*operating lease*) dengan sasaran awal pengadaan kendaraan operasional BRI. Perusahaan akan memperluas jaringan kerjasama dengan dealer dan perusahaan penyedia jasa penyewaan kendaraan, Mengembangkan pembiayaan kendaraan bermotor (mobil dan motor) kepada pada nasabah-nasabah yang terkait dengan BRI antara lain pekerja BRI & Grup BRI, dan nasabah BRI yang berbasis *payroll*.
- Mengembangkan jaringan kerja dengan membuka Kantor Pemasaran baru pada tahun 2018 di Kota Besar di Indonesia dan memanfaatkan jaringan kantor BRI sebagai outlet layanan BRI Life (*office channeling*) dengan menempatkan beberapa staf pemasaran sebagai *representative officer* di Kantor Wilayah dan/atau Kantor Cabang BRI yang potensial.
- BRI Life juga akan terus mengembangkan IT yang handal sehingga mampu mendukung proses operasional bisnis yang dapat diandalkan .



## TINJAUAN KEUANGAN



“

Total aset pada tahun 2017 BRI tumbuh sebesar 12,22%, liabilitas tumbuh 11,91% dan ekuitas meningkat 13,99%. Dengan kenaikan tersebut, proporsi liabilitas dan ekuitas dalam mendanai aset masing-masing sebesar 85,14% dan 14,86%.”

”

## TINJAUAN KEUANGAN

Pada sub Bab ini, Bank BRI menyajikan uraian analisis dan pembahasan mengenai kinerja keuangan sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Indonesia dan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan untuk industri perbankan Indonesia.

Seluruh materi uraian ini disusun berdasarkan pada Laporan Keuangan Audit Konsolidasian BRI yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja (PSS-EY) sesuai dengan Laporan Auditor Independen No. RPC 5581/PSS/2018 tanggal 24 Januari 2018 dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian BRI untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. Laporan Keuangan Audit Konsolidasian BRI tersebut juga disampaikan sebagai Lampiran dalam Laporan Tahunan ini.

## Laporan Posisi Keuangan

## Aset

(Rp juta)

Ringkasan Neraca	2015		2016		2017		Growth (%)	
	Nominal	Komposisi (%)	Nominal	Komposisi (%)	Nominal	Komposisi (%)	2015-2016	2016-2017
Kas	28.771.635	3,28	25.212.024	2,51	24.797.782	2,20	(12,37)	(1,64)
Giro pada Bank Indonesia	61.717.798	7,03	55.635.946	5,54	58.155.479	5,16	(9,85)	4,53
Giro dan Penempatan pada bank lain – netto	58.570.756	6,67	89.165.469	8,88	61.031.371	5,42	52,24	(31,55)
Surat berharga yang dimiliki-netto	132.999.555	15,14	142.966.186	14,24	210.553.421	18,70	7,49	47,27
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	3.815.958	0,43	3.318.434	0,33	3.317.840	0,29	(13,04)	(0,02)
Kredit, Piutang Syariah dan Pembiayaan	581.094.544	66,15	663.420.218	66,10	739.336.520	65,65	14,17	11,44
CKPN kredit -/-	-17.514.435	-1,99	-22.806.452	-2,27	-30.104.137	-2,67	30,22	32,00
Penyertaan –Netto	269.130	0,03	2.439	0,00	73.821	0,01	(99,09)	2926,69
Aset tetap – netto	8.039.280	0,92	24.515.059	2,44	24.746.306	2,20	204,94	0,94
Tagihan derivatif-netto	-	-	91.657	0,01	145.928	0,01	-	59,21
Tagihan akseptasi-netto	5.163.471	0,59	5.692.583	0,57	5.693.425	0,51	10,25	0,01
Aset Pajak Tangguhan	1.983.774	0,23	2.520.930	0,25	3.270.231	0,29	27,08	29,72
Aset lain	13.514.846	1,54	13.909.933	1,33	25.230.455	2,24	(1,37)	81,38
Total Aset	878.426.312	100,00	1.003.644.426	100,00	1.126.248.442	100,00	14,25	12,22

Pada 2017, BRI membukukan pertumbuhan aset sebesar 12,22% menjadi Rp1.126,25 triliun, dibanding tahun 2016 sebesar Rp1.003,64 triliun. Aset yang meningkat terutama ditopang dari tumbuhnya penyaluran kredit sebesar 11,44% dengan komposisi 65,65% terhadap total aset.

## Kas dan Giro Pada Bank Indonesia

Selaras dengan pertumbuhan kinerja investasi posisi kas pada akhir tahun 2017 sebesar Rp24,80 triliun, turun 1,64% dibanding tahun 2016 sebesar Rp25,21 triliun. Sementara Giro pada BI naik 4,53% dari Rp55,63 triliun di tahun 2016 menjadi Rp58,15 triliun di tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI), BRI harus memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) Utama dalam rupiah sebesar 6,5% dan untuk mata uang asing (valas) sebesar 8%. Saldo Giro pada BI tersebut telah merepresentasikan GWM Rupiah sebesar 6,52% dan GWM Valas sebesar 8,15%, sehingga telah memenuhi ketentuan BI.



## TINJAUAN KEUANGAN

## Giro dan Penempatan pada BI dan Bank Lain

Giro pada bank lain dan penempatan pada BI dan bank lain menunjukkan penurunan sebesar 31,55% dari Rp89,16 triliun di tahun 2016 menjadi Rp61,03 triliun di tahun 2017. Penurunan ini merupakan bagian dari peningkatan produktivitas aset dengan menempatkan dana di portofolio aset yang memberikan *yield* lebih besar.

## Efek-efek

Sejalan dengan upaya optimalisasi *yield*, portofolio surat berharga (Efek) yang dimiliki Bank tumbuh signifikan sebesar 47,27% di tahun 2017 atau sebesar Rp67,59 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yang naik 7,49%. Sebagian besar Efek yang dimiliki BRI adalah obligasi pemerintah dan sertifikat deposito Bank Indonesia.

## Obligasi Rekap Pemerintah

Pada akhir tahun 2017, BRI mencatatkan kepemilikan obligasi rekap pemerintah sebesar Rp3,32 triliun, sama seperti tahun 2016 karena tidak ada obligasi rekap pemerintah yang jatuh tempo di tahun 2017. Obligasi rekap pemerintah yang jatuh tempo di tahun 2018 sebesar Rp1,58 triliun, sebesar Rp375 miliar jatuh tempo pada tahun 2019, dan sisanya sebesar Rp1,37 triliun jatuh tempo pada tahun 2020.

## Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah

(Rp juta)

Kategori	Tenor	2015	2016	2017
Tersedia untuk dijual	2018-2020	715.958	718.434	717.840
Dimiliki hingga jatuh tempo	2018-2020	3.100.000	2.600.000	2.600.000
Total		3.815.958	3.318.434	3.317.840

## Kredit yang Disalurkan

Pada 2017, BRI menyalurkan kredit sebesar Rp739,34 triliun, meningkat 11,44% dibanding 2016 yang sebesar Rp663,42 triliun. Pertumbuhan kredit mayoritas terjadi di segmen mikro dan usaha kecil yang masing-masing tumbuh Rp28 triliun dan Rp16,8 triliun. Pertumbuhan di segmen tersebut sejalan dengan komitmen BRI untuk memajukan usaha mikro dan kecil sekaligus meningkatkan layanan keuangan yang inklusif (*financial inclusion*).

Penyaluran kredit di segmen mikro salah satunya ditopang oleh kredit KUR sebagai komitmen BRI dalam mendukung program pemerintah untuk pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Total penyaluran KUR BRI tahun 2017 sebesar Rp71 triliun. Dengan penyaluran tersebut *outstanding* kredit KUR mikro tahun 2017 menjadi Rp59,24 triliun dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp51 triliun (naik Rp8,25 triliun). Sedangkan *outstanding* kredit KUR ritel tahun 2017 naik Rp3,77 triliun menjadi Rp9,7 triliun pada tahun 2017.

Pertumbuhan kredit UMKM yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit korporasi membuat komposisi kredit UMKM pada tahun ini sebesar 73,9% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang sebesar 72,5%. Hal ini sejalan dengan strategi BRI untuk fokus kembali ke kredit UMKM.

## Kredit yang Disalurkan berdasarkan mata uang

(Rp juta)

Segmen	2015	2016	2017	Growth (%)	
				2015-2016	2016-2017
Mikro	188.428.179	221.802.205	252.850.654	17,71	14,00
Rupiah	188.428.179	221.802.205	252.850.654	17,71	14,00
Valas	-	-	-	-	-

## TINJAUAN KEUANGAN

## Kredit yang Disalurkan berdasarkan mata uang

(Rp juta)

Segmen	2015	2016	2017	Growth (%)	
				2015-2016	2016-2017
Ritel	219.785.772	244.880.936	278.706.760	11,42	13,81
Rupiah	212.380.275	235.956.203	268.647.286	11,10	13,85
Valas	7.405.497	8.924.733	10.059.474	20,51	12,71
Korporasi	156.266.587	176.787.834	187.425.254	13,13	6,02
Rupiah	105.359.977	127.418.845	126.119.681	20,94	(1,02)
Valas	50.906.610	49.368.989	61.305.573	(3,02)	24,18
Total Kredit Non Pembiayaan dan Piutang Syariah	564.480.538	643.470.975	718.982.668	13,99	11,74
Rupiah	506.168.431	585.177.253	647.512.256	15,61	10,65
Valas	58.312.107	58.293.722	71.470.142	(0,03)	22,6
Pembiayaan dan Piutang Syariah	16.614.006	17.748.943	17.864.869	6,83	0,65
Piutang Sewa Pembiayaan	-	2.200.300	2.488.983	-	13,12
Total Kredit yang disalurkan	581.094.544	663.420.218	739.336.520	14,17	11,44
CKPN	17.514.435	22.806.452	30.104.137	30,22	32,00
Total Kredit yang Disalurkan dikurangi CKPN	563.580.109	640.613.766	709.232.383	13,67	10,71

## Kredit yang Disalurkan Berdasarkan Segmen Operasi

(Rp juta)

Segmen	2015	2016	2017	Growth (%)	
				2015-2016	2016-2017
Ritel	219.785.772	244.880.936	278.706.760	11,42	13,81
Mikro	188.428.179	221.802.205	252.850.654	17,71	14,00
Korporasi	156.266.587	176.787.834	187.425.254	13,13	6,02
Pembiayaan dan Piutang Syariah	16.614.006	17.748.943	17.864.869	6,83	0,65
Piutang Sewa Pembiayaan	-	2.200.300	2.488.983	-	13,12
Total Kredit yang Disalurkan	581.094.544	663.420.218	739.336.520	14,17	11,44
CKPN	17.514.435	22.806.452	30.104.137	30,22	32,00
Total Kredit yang Disalurkan dikurangi CKPN	563.580.109	640.613.766	709.232.383	13,67	10,71

## Kredit yang Disalurkan Berdasarkan Jenis

(Rp juta)

Segmen	2015	2016	2017	Growth (%)	
				2015-2016	2016-2017
Kupedes	178.759.239	211.417.693	239.446.222	18,27	13,26
Modal Kerja	181.546.071	186.324.358	206.806.224	2,63	10,99
Konsumer	89.621.859	101.031.288	115.320.021	12,73	14,14
Investasi	88.058.790	114.261.862	126.173.046	29,76	10,42
Program	7.064.037	10.547.008	15.132.136	49,31	43,47
Sindikasi	19.384.044	19.845.592	16.066.562	2,38	(19,04)
Karyawan Kunci	46.498	43.174	38.457	(7,15)	(10,93)
Pembiayaan dan Piutang Syariah	16.614.006	17.748.943	17.864.869	6,83	0,65
Piutang Sewa Pembiayaan	-	2.200.300	2.488.983	-	13,12
Total Kredit yang disalurkan	581.094.544	663.420.218	739.336.520	14,17	11,44
CKPN	17.514.435	22.806.452	30.104.137	30,22	32,00
Total Kredit yang Disalurkan dikurangi CKPN	563.580.109	640.613.766	709.232.383	13,67	10,71



## TINJAUAN KEUANGAN

### Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dilakukan dengan pendekatan penentuan penilaian secara *individual impairment* dan *collective impairment*. CKPN dihitung sebagai *individual impairment* untuk kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan yaitu di atas Rp5 miliar dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai atau kredit individual yang direstrukturisasi. Sedangkan *collective impairment* diimplementasikan untuk kredit yang memiliki nilai di atas Rp5 miliar tetapi tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai, kredit yang secara individual dibawah Rp5 miliar dan kredit yang direstrukturisasi dengan nilai dibawah Rp5 miliar.

Membbaiknya kondisi ekonomi sejak tahun 2017 yang ditandai dengan peningkatan harga komoditas dan kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan bisa menurunkan NPL BRI di masa mendatang. CKPN dibentuk untuk menutup kerugian akibat terjadinya penurunan nilai kredit.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) naik 32% lebih tinggi dari tahun 2016 yang hanya tumbuh 30,22% karena kenaikan NPL dari 2,13% pada tahun 2016 menjadi 2,23% pada tahun 2017 sehingga menaikkan Rasio Penutupan Atas Kredit Bermasalah (NPL Coverage Ratio) dari 156,76% pada tahun 2016 menjadi 178,84% pada tahun 2017 untuk kredit yang disalurkan (termasuk piutang syariaah dan pembiayaan).

BRI menjaga kualitas kredit dengan meningkatkan manajemen risiko di proses penyaluran kredit serta melakukan proses restrukturisasi kredit yang bermasalah. Dengan membaiknya kondisi ekonomi sejak tahun 2017 yang ditandai dengan peningkatan harga komoditas dan kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional, diharapkan bisa menurunkan NPL BRI di masa mendatang. CKPN yang telah dibentuk ini ditujukan untuk menutup kerugian akibat terjadinya penurunan nilai kredit.

Selain membentuk CKPN yang memadai, BRI juga melakukan mitigasi risiko kredit dengan memperhitungkan keberadaan agunan, garansi, penjaminan atau asuransi kredit. BRI memperhitungkan agunan sebagai arus kas masa datang apabila kredit bersifat *collateral dependent* atau pelunasan kredit berasal dari agunan atau pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi

dan didukung dengan perjanjian legal atas pengikatan agunan. BRI telah memiliki prosedur untuk memastikan eksekusi agunan, jaminan atau asuransi kredit dilakukan dalam jangka waktu yang wajar. Dalam menetapkan nilai agunan, BRI menggunakan nilai yang lebih rendah di antara nilai pengikatan agunan dengan nilai wajar atau nilai pasar agunan. Penilaian kembali nilai wajar atau nilai pasar agunan dilakukan secara berkala.

Mengenai metodologi perhitungan CKPN dibahas lebih lanjut di bagian Manajemen Risiko.

### Penghapusan Aset Kredit dan Perolehan Kembali (Pendapatan Recovery)

Pada tahun 2017, BRI melakukan penghapusan aset kredit sebesar Rp9,69 triliun, naik dibanding tahun 2016 sebesar Rp8,59 triliun. Penghapusan kredit dilakukan terhadap kredit yang sudah dilakukan restrukturisasi dan usaha penyelesaian lainnya namun bisnis dari nasabah tidak bisa membaik kembali sehingga tidak ada pendapatan dari bisnis nasabah untuk membayar kembali kewajiban terhadap BRI. Untuk segmen mikro, penghapusbukuan kredit dilakukan untuk kredit yang menunggak lebih dari 270 hari sesuai dengan anggaran penghapusbukuan kredit yang telah ditetapkan dengan pertimbangan efisiensi operasional.

Penghapusan aset kredit sebagian besar terjadi di segmen Mikro dan Ritel komersial sesuai dengan *outstanding* kredit Mikro dan Ritel yang mencapai 73,93% dari total kredit BRI. Pendapatan *recovery* yang dihasilkan sebesar Rp5,05 triliun, naik dari tahun 2016 sebesar Rp4,50 triliun, atau mencapai *recovery rate* sebesar 52,12%. Rincian Pendapatan *Recovery* dibahas pada bagian Laporan Laba Rugi.

### Penyertaan Saham

Pada tahun 2017, penyertaan saham BRI sebesar Rp73,82 miliar, tumbuh signifikan dibanding tahun 2016 sebesar Rp2,44 miliar. Peningkatan ini terjadi karena BRI melakukan investasi di perusahaan modal ventura yaitu PT Bahana Artha Ventura dengan memiliki saham sejumlah 71.207 lembar saham atau senilai Rp71,38 miliar. Kepemilikan PT Bahana Artha Ventura pada 31 Desember 2017 adalah 64,65% dimiliki oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, 35% dimiliki oleh BRI dan 0,35% dimiliki oleh Koperasi Karyawan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

## TINJAUAN KEUANGAN

## Penyertaan Saham

Nama Perusahaan	Sektor Bisnis	Persentase	Jumlah Investasi		
		Kepemilikan	2015	2016	2017
		(%)			
PT Bahana Artha Ventura	Modal Ventura	35	-	-	71.382
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Jasa Penitipan Surat Berharga	3	900	900	900
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	Lembaga Keuangan Non Bank	8	536	536	536
PT Jakarta Kyoei Medical Center	Pelayanan Kesehatan	1,68	220	220	220
PT Pemeringkatan Efek Indonesia	Pemeringkat Efek	0,21	210	210	210
PT Menara Proteksi Indonesia	Properti	2	200	200	200
BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara	Perbankan	1,5	77	77	77
BPR Tjoekir Dasa Nusantara	Perbankan	3	77	77	77
BPR Toelangan Dasa Nusantara	Perbankan	1,5	66	66	66
PT Merapi Gelanggang Wisata	Sarana Olahraga	0,64	50	50	50
BPR Cinta Manis Agroloka	Perbankan	1,75	35	35	35
PT Sukapraja Estetika Padang Golf	Sarana Olahraga	0,24	25	25	25
BPR Bungamayang Agroloka	Perbankan	1,13	23	23	23
PT Aplikanusa Lintasarta	Non Bank	0,03	20	20	20
PT BTMU BRI Finance	Pembiayaan	45	262.891	-	-
PT Kelola Jasa Artha	Remitansi	14,22	2.560	-	-
PT Bringin Gigantara	Pengadaan Barang, jasa, dan IT	5,14	1.240	-	-
Total			269.130	2.439	73.821

Penilaian atas penurunan nilai penyertaan dilakukan secara individual dengan adanya bukti obyektif penurunan nilai. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 semua penyertaan diklasifikasikan "lancar". Cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan karena diyakini penyertaan saham dapat diperoleh kembali.

Pada tahun 2016, BRI telah menerima dividen tunai dari PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia dan PT Pemeringkat Efek Indonesia masing-masing sebesar Rp170 juta dan Rp11 juta.

## Aset Tetap

Pada tahun 2017, jumlah aset tetap BRI sebesar Rp33,97 triliun, naik dibanding tahun 2016 sebesar Rp32,26 triliun karena adanya penambahan tanah dan bangunan yang digunakan untuk jaringan kantor yang sebelumnya sewa sebesar Rp957,85 miliar.

BRI telah melakukan reklasifikasi dari pos Satelit dalam pengembangan ke pos Satelit pada tahun 2017 senilai Rp3,28 triliun dan selama tahun 2017 telah disusutkan sebesar Rp127,74 miliar. Satelit BRI (BRISat) diluncurkan pada 19 Juni 2016 dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan BRI akan jaringan komunikasi untuk sebagian besar unit kerja kantor maupun *e-channel* sekaligus meningkatkan kualitas jaringan komunikasi dalam rangka memberikan pelayanan kepada nasabah BRI.

## Aset Lain-lain

Total aset lain-lain sampai akhir tahun 2017 sebesar Rp25,23 triliun, naik 81,38% dibanding tahun 2016 sebesar Rp13,91 triliun. Peningkatan Aset lain-lain ditopang adanya tagihan kepada pemerintah terkait pemberian KUR generasi II sebesar yang naik Rp3,58 triliun dibandingkan tahun 2016 menjadi Rp4,18 triliun, kenaikan wesel tagih sebesar Rp2,80 triliun dan peningkatan uang muka pajak sebesar Rp927,45 miliar.



## TINJAUAN KEUANGAN

## Liabilitas

(Rp juta)

Ringkasan Neraca	2015		2016		2017		Growth (%)	
	Nominal	Komposisi (%)	Nominal	Komposisi (%)	Nominal	Komposisi (%)	2015-2016	2016-2017
Simpanan Nasabah	668.995.379	87,42	754.526.374	88,06	841.656.450	87,77	12,78	11,55
Giro	114.367.088	14,94	142.546.863	16,64	147.435.604	15,38	24,64	3,43
Tabungan	272.470.992	35,6	303.270.288	35,39	349.440.873	36,44	11,3	15,22
Deposito	282.157.299	36,87	308.709.223	36,03	344.779.973	35,96	9,41	11,68
Liabilitas Segera	5.138.562	0,67	5.410.313	0,63	6.584.201	0,69	5,29	21,7
Simpanan dari Bank lain	11.165.073	1,46	2.229.538	0,26	5.593.367	0,58	(80,03)	150,88
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	11.377.958	1,49	7.302.398	0,85	12.136.684	1,27	(35,82)	66,2
Pinjaman diterima	35.480.358	4,64	35.008.170	4,09	29.403.009	3,07	(1,33)	-16,01
Surat Berharga yang Diterbitkan	10.521.103	1,37	24.800.781	2,89	30.619.658	3,19	135,72	23,46
Liabilitas lainnya	22.620.700	2,96	27.554.262	3,22	32.907.579	3,43	21,81	19,43
Total liabilitas	765.299.133	100	856.831.836	100	958.900.948	100	11,96	11,91

Pada tahun 2017, total liabilitas BRI sebesar Rp958,90 triliun, meningkat 11,91% dibanding tahun 2016 sebesar Rp856,83 triliun. Meningkatnya liabilitas terutama didorong oleh naiknya pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp87,13 triliun, atau naik 11,55% dari tahun 2016.

## Dana Pihak Ketiga

(Rp juta)

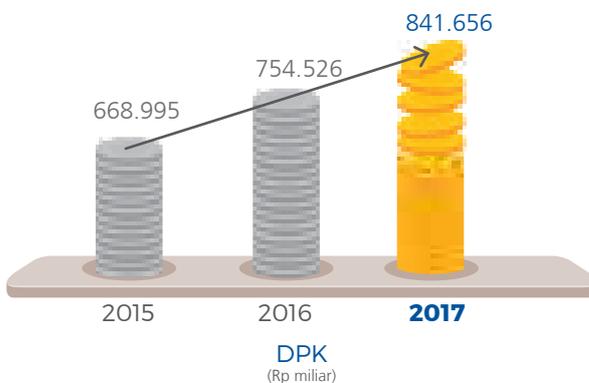
Simpanan Nasabah	2015	2016	2017	Growth (%)	
				2015-2016	2016-2017
Giro	113.429.343	141.419.020	145.529.168	24,68	2,91
Giro wadiah	937.745	1.127.843	1.766.901	20,27	56,66
Giro Mudharabah	-	-	139.535	-	-
Tabungan	268.058.865	298.110.406	343.420.737	11,21	15,20
Tabungan Wadiah	3.715.929	4.176.761	4.749.652	12,4	13,72
Tabungan Mudharabah	696.198	983.121	1.270.484	41,21	29,23
Deposito Berjangka	267.884.404	293.029.378	326.417.937	9,39	11,39
Deposito Berjangka Mudharabah	14.272.895	15.679.845	18.362.036	9,86	17,11
Total simpanan nasabah	668.995.379	754.526.374	841.656.450	12,78	11,55
Komposisi Giro dan Tabungan/CASA	57.82%	59.09%	59.04%	2,20	-0,08
Komposisi Deposito	42.18%	40.91%	40.96%	(3,01)	0,12

Pada tahun 2017, jumlah Simpanan nasabah/DPK BRI sebesar Rp841,66 triliun, tumbuh 11,55% dibanding tahun 2016 sebesar Rp754,53 triliun. Pertumbuhan DPK ini terutama ditopang kenaikan Tabungan sebesar 15,2% dari tahun 2016. Sementara pertumbuhan Giro dan Deposito masing-masing sebesar 3,4% dan 11,7%.

Struktur DPK masih didominasi oleh perolehan dana murah (CASA) sebesar 59,04% dan Deposito sebesar 40,96%. Hal ini sejalan dengan kebijakan BRI untuk menekan biaya dana agar profitabilitas tetap terjaga. Perolehan dana murah juga ditopang oleh keberadaan unit kerja BRI sebesar 10.646 unit kerja yang tersebar hingga ke pelosok Nusantara dan juga dibantu dengan keberadaan agen BRILink yang sudah mencapai 279.750 untuk membantu nasabah BRI dalam melakukan transaksi keuangan melalui rekening tabungan BRI yang dimiliki oleh agen BRILink yang diharapkan akan

## TINJAUAN KEUANGAN

meningkatkan *outstanding* Tabungan BRI. Pada 31 Desember 2017, saldo tabungan agen BRILink mencapai Rp3,1 triliun.



### Liabilitas Segera

Pada tahun 2017, Liabilitas Segera sebesar Rp6,58 triliun, tumbuh 21,70% dibanding tahun 2016 sebesar Rp5,41 triliun. Pertumbuhan terutama ditopang dari titipan *advance payment* sebesar Rp2,13 triliun, tumbuh 42,95% dari tahun 2016 sebesar Rp1,49 triliun.

Beberapa transaksi yang masuk ke dalam pos Liabilitas Segera antara lain titipan *Advance Payment*, titipan setoran pajak, titipan ATM dan Kartu Kredit, titipan kerja sama pihak ketiga, dan lain-lain.

### Simpanan dari Bank Lain dan Lembaga Keuangan Lainnya

Pos ini digunakan untuk mencatat transaksi antar bank dalam rangka operasional dan manajemen likuiditas. Simpanan yang masuk kedalam pos ini yaitu giro, tabungan, deposito berjangka, *interbank call money*, dan *deposit on call*.

Pada tahun 2017, Simpanan dari Bank Lain dan Lembaga Keuangan Lainnya sebesar Rp5,59 triliun, tumbuh signifikan 150,88% dibanding tahun 2016 sebesar Rp2,23 triliun. Peningkatan pos ini terutama berasal dari naiknya *Deposits on Call* pihak ketiga karena likuiditas perbankan yang berlebih sehingga lebih menguntungkan bagi bank untuk menempatkan dananya di simpanan jangka pendek.

### Pinjaman yang Diterima

Pada tahun 2017, jumlah Pinjaman yang Diterima sebesar Rp29,40 triliun, turun 16,01% dibanding tahun 2016 sebesar Rp35 triliun. Pinjaman yang diterima antara lain bersumber dari:

1. Pinjaman dari China Development Bank Corporation sebesar Rp13,40 triliun. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur dan industri di Indonesia yang bersifat jangka panjang, memiliki tenor 10 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 September 2025.
2. Pinjaman Sindikasi *Club Loan* sebesar Rp7,39 triliun atau sekitar USD550 juta. Pinjaman ini digunakan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang dan *maturity profile*. Pinjaman ini akan jatuh tempo dalam beberapa tahap, sebesar USD325 juta akan jatuh tempo pada 30 Maret 2019, sebesar USD155 juta akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2019, dan sebesar USD70 juta akan jatuh tempo pada 30 September 2020.

### Surat Berharga yang diterbitkan

Nilai Surat Berharga yang diterbitkan pada tahun 2017 sebesar Rp30,62 triliun, naik 23,46% dibanding tahun 2016 sebesar Rp24,80 triliun. Hal ini terutama berasal dari penerbitan Surat berharga sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II sebesar Rp5,08 triliun.
2. Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap III sebesar Rp5,13 triliun.
3. Obligasi I BRI Agro tahun 2017 sebesar Rp477,81 miliar.

### Liabilitas Lainnya

Pos ini terdiri dari liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, utang pajak, estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi, liabilitas imbalan kerja dan liabilitas lain-lain.

Pada tahun 2017, Liabilitas lainnya sebesar Rp32,91 triliun, naik 19,43% dibanding tahun 2016 sebesar Rp27,55 triliun. Peningkatan ini terutama karena naiknya liabilitas imbalan kerja dan liabilitas lain-lain.



## TINJAUAN KEUANGAN

## Ekuitas

Komponen	2015	2016	2017	(Rp juta)	
				Growth (%)	
				2015-2016	2016-2017
Modal Saham	6.167.291	6.167.291	6.167.291	0	0,00
Tambahan modal disetor - bersih	2.773.858	2.773.858	2.773.858	0	0,00
Surplus revaluasi aset tetap-bersih	-	13.824.692	13.824.692	0	0,00
Selisih Kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	49.069	23.490	54.199	(52,13)	130,73
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual -bersih	(1.145.471)	75.618	1.813.625	(106,60)	2,298,40
Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih	541.468	665.870	706.403	22,97	6,09
modal saham diperoleh kembali (saham treasury)	(2.286.375)	(2.418.948)	(2.418.948)	5,8	0,00
Total Saldo Laba	106.733.021	125.309.471	143.827.697	17,4	14,78
Total ekuitas yang dapat didistribusikan kepada Pemilik Induk	112.832.861	146.421.342	166.748.817	29,77	13,88
Kepentingan Non Pengendali	294.318	391.248	598.677	32,93	53,02
Total Ekuitas	113.127.179	146.812.590	167.347.494	29,78	13,99

Total aset pada tahun 2017 BRI tumbuh sebesar 12,22%, liabilitas tumbuh 11,91% dan ekuitas meningkat 13,99%. Dengan kenaikan tersebut, proporsi liabilitas dan ekuitas dalam mendanai aset masing-masing sebesar 85,14% dan 14,86%.

Ekuitas tercatat sebesar Rp167,35 triliun, meningkat 13,99% dibanding tahun 2016 yang sebesar Rp146,81 triliun. Peningkatan ekuitas terutama karena meningkatnya saldo laba sebesar Rp18,52 triliun, tumbuh 14,78% dibanding tahun 2016 menjadi Rp143,83 triliun. Pertumbuhan ekuitas sebesar 13,99% lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang sebesar 29,78% karena adanya surplus revaluasi aset tetap pada tahun 2016 sebesar Rp13,82 triliun dan kenaikan pembayaran dividen sebesar 37,52% dari Rp7,62 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp10,48 triliun pada tahun 2017.

Pembagian dividen pada tahun 2017 atas tahun buku 2016 sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2017 adalah sebesar 40%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 30%.

Pos saham *Treasury* tercatat sebesar Rp2,42 triliun untuk 221.718.000 lembar saham, sama seperti tahun 2016 karena berakhirnya program *Treasury Stock* ini berakhir pada 12 Januari 2016.

## Laporan Laba Rugi

Perolehan laba bersih BRI tercatat sebesar Rp29,04 triliun, tumbuh 10,74% dibanding tahun 2016 sebesar Rp26,23 triliun. Pertumbuhan laba yang tinggi tersebut karena didukung oleh pertumbuhan kredit sebesar 11,44% yang diikuti oleh penurunan biaya baik biaya dana, biaya operasional maupun biaya pencadangan kredit.

## TINJAUAN KEUANGAN

(Rp juta)

Komponen	2015	2016	2017	Growth (%)	
				2015-2016	2016-2017
Pendapatan Bunga	83.007.745	91.358.338	100.080.250	10,06	9,55
Pendapatan Bagi Hasil -Syariah	2.426.292	2.636.677	2.819.042	8,67	6,92
Dikurangi : beban bunga dan Syariah	(27.154.270)	(28.576.716)	(29.893.805)	5,24	4,61
Pendapatan bunga dan bagi hasil - netto	58.279.767	65.418.299	73.005.487	12,25	11,60
Pendapatan Premi	-	3.038.864	3.788.965	-	24,68
Biaya klaim	-	(2.760.154)	(3.403.551)	-	23,31
Pendapatan Premi - netto	-	278.710	385.414	-	38,28
Pendapatan Operasional lainnya	13.855.484	16.998.789	19.091.067	22,69	12,31
Beban Penyisihan Penghapusan Kerugian	(8.891.3050)	(13.700.241)	(16.994.115)	54,09	24,04
Penurunan Nilai atas keuangan dan non keuangan - netto					
Beban Pembalikan estimasi kerugian komitmen dan kontingensi -netto	(844)	347	(1.239)	(141,11)	(457,06)
Pembalikan cadangan (beban penyisihan) kerugian penurunan nilai atas aset - non keuangan - netto	(8.056)	(90.757)	(239.132)	1,026,58	163,49
Dikurangi : Beban Operasional Lainnya	(31.275.696)	(34.940.605)	(38.441.648)	11,72	10,02
Laba operasional	31.959.350	33.964.542	36.805.834	6,27	8,37
Pendapatan Non Operasional -netto	534.668	9.228	216.323	(98,27)	2,244,20
Laba sebelum pajak	32.494.018	33.973.770	37.022.157	4,55	8,97
Beban Pajak	(7.083.230)	(7.745.779)	(7.977.823)	9,35	3,00
Laba bersih sebelum pos luar biasa	25.410.788	26.227.991	29.044.334	3,22	10,74
Laba Bersih	25.410.788	26.227.991	29.044.334	3,22	10,74

### Pendapatan dan Beban Bunga

Sebagai bank dengan perolehan aset kredit terbesar di Indonesia, pendapatan BRI didominasi oleh pendapatan bunga. Pendapatan bunga tersebut bersumber baik dari aset kredit maupun aset non kredit seperti surat berharga. Selain itu, dana masyarakat mendominasi liabilitas BRI sehingga beban bunga juga menjadi komponen biaya yang signifikan.

### Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga tumbuh sebesar 9,55% dari Rp91,36 triliun di tahun 2016 menjadi Rp100,08 triliun di tahun 2017 dengan rincian pendapatan bunga kredit sebesar Rp88,11 triliun dan pendapatan bunga non kredit sebesar Rp11,97 triliun. Diluar pendapatan bunga, pendapatan bagi hasil-syariah juga meningkat sebesar 6,92% dari Rp2,64 triliun menjadi Rp2,82 triliun.

Komposisi Pendapatan Bunga secara rinci termuat dalam tabel sebagai berikut:

(Rp juta)

Komponen	2015		2016		2017		Growth (%)	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	2015-2016	2016-2017
Kredit yang diberikan	73.439.072	78,13	81.057.953	78,77	88.108.116	85,63	10,37	8,7
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	242.511	0,26	201.241	0,21	78.020	0,08	(17,02)	(61,23)
Surat Berharga yang dimiliki	6.045.007	6,43	7.609.791	7,4	8.968.586	8,72	25,89	17,86
Penempatan pada Bi dan bank lain	1.174.692	1,25	982.287	0,95	1.144.862	1,11	(16,38)	16,55

Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

▶ Analisa &amp; Pembahasan Manajemen



## TINJAUAN KEUANGAN

## Pendapatan Bunga

(Rp juta)

Komponen	2015		2016		2017		Growth (%)	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	2015-2016	2016-2017
Giro pada Bank Indonesia	247.729	0,26	158.570	0,15	158.770	0,15	(35,99)	0,13
Lainnya	1.191.465	1,27	1.348.496	1,31	1.621.896	1,58	13,18	20,27
Pendapatan bagi hasil-syariah	2.426.292	2,58	2.636.677	2,56	2.819.042	2,74	8,67	6,92
Total Pendapatan Bunga	84.766.768	90,18	93.995.015	91,35	102.899.292	100	10,89	9,47

Pertumbuhan kredit sebesar 11,4% dibandingkan kredit pada tahun 2016 menghasilkan pertumbuhan pendapatan bunga kredit sebesar 8,7%, menunjukkan bahwa BRI telah melakukan penyesuaian suku bunga kredit selama tahun 2017. Hal ini sejalan dengan penurunan suku bunga terutama deposito yang turun sekitar 91 bps selama tahun 2017.

Seiring dengan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan bunga bersih secara berkelanjutan, BRI terus meningkatkan kualitas aset melalui penerapan manajemen risiko yang lebih baik untuk memitigasi risiko kredit dan menekan angka kredit bermasalah.

## Beban Bunga

(Rp juta)

Keterangan	2015		2016		2017		Growth (%)	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	Komposisi	2015-2016	2016-2017
Deposito	18.929.633	66,53%	17.114.973	59,89%	16.429.538	54,96%	(9,59)	(4,00)
Tabungan	2.897.531	10,18%	2.886.158	10,10%	2.703.451	9,04%	(0,39)	(6,33)
Giro	1.260.610	4,43%	1.661.252	5,81%	2.102.010	7,03%	31,78	26,53
Simpanan dari Bank lain & LK lainnya	911.961	3,21%	638.251	2,23%	576.919	1,93%	(30,01)	(9,61)
Surat berharga yang diterbitkan	558.479	1,96%	1.129.485	3,95%	2.226.531	7,45%	102,24	97,13
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	239.564	0,84%	378.230	1,32%	533.985	1,79%	57,88	41,18
Pinjaman yang diterima	335.113	1,18%	1.091.202	3,82%	1.050.731	3,51%	225,62	(3,71)
Pinjaman Subordinasi	3.225	0,01%	2.286	0,01%	0	0,00%	(29,12)	(100,00)
Lain-lain	2.301.459	8,09%	2.639.377	9,24%	3.029.049	10,13%	14,68	14,76
Beban syariah	1.013.170	3,56%	1.035.502	3,62%	1.241.591	4,15%	2,20	19,90
Total Beban Bunga	28.450.745	100,00%	28.576.716	100,00%	29.893.805	100,00%	0,44	4,61

Pada tahun 2017, beban bunga tercatat sebesar Rp29,89 triliun, meningkat 4,61% dari tahun 2016 sebesar Rp28,58 triliun. Meskipun demikian, dana berbiaya BRI tumbuh 11,6% dibandingkan tahun 2016 yang menunjukkan bahwa BRI berhasil menurunkan biaya dana secara signifikan pada tahun 2017. Penurunan biaya dana tersebut terutama berasal dari deposito rupiah yang turun 91 bps dan giro rupiah turun sebesar 5 bps.

Selain itu BRI juga berhasil menjaga komposisi dana murah (CASA) di kisaran 60% sehingga turut mendukung penurunan biaya dana selama tahun 2017.

## Pendapatan Bunga Bersih

BRI mencatatkan pendapatan bunga bersih (termasuk bagi hasil - syariah) sebesar Rp73 triliun, atau tumbuh 11,6% dari tahun 2016 Rp65,42 triliun. Kenaikan ini selaras dengan pertumbuhan kredit yang disalurkan sebesar 11,44% dan biaya bunga yang tumbuh hanya sebesar 4,61%.

## TINJAUAN KEUANGAN

## Pendapatan Operasional Lainnya

Pada tahun 2017, total pendapatan operasional lainnya sebesar Rp19,09 triliun, tumbuh 12,31% dibanding tahun 2016 sebesar Rp17 triliun. *Fee based income* masih mendominasi dengan komposisi sebesar 54,70% dari total pendapatan operasional lainnya. Selain itu, peningkatan juga disebabkan naiknya pendapatan *recovery* dari transaksi penghapusbukuan aset bermasalah.

## Pendapatan Operasional Lainnya

(Rp juta)

Keterangan	2015		2016		2017		Growth (%)	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	2015-2016	2016-2017
<i>Fee Based Income</i>	7.355.973	53,09	9.222.558	53,58	10.442.240	54,70	25,38	13,22
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	3.788.388	27,34	4.496.825	26,12	5.050.713	26,46	18,70	12,32
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi rekap Pemerintah - Netto	-	0,00	31.025	0,18	50.915	0,27	-	64,11
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan obligasi rekap pemerintah - Netto	86.485	0,62	447.580	2,60	784.667	4,11	417,52	75,31
Keuntungan Selisih Kurs - Netto	467.167	3,37	-	0,00	183.974	0,96	(100,00)	-
Lain-lain	2.157.471	15,57	2.800.801	17,52	2.578.558	13,51	39,75	(7,93)
Total Pendapatan Operasional Lainnya	13.855.484	100,00	16.998.789	100,00	19.091.067	100,00	24,23	12,31

## Penerimaan Kembali Aset yang telah Dihapusbukukan (Pendapatan Recovery)

Pendapatan *recovery* meningkat sebesar 12,32% dari Rp4,50 triliun di tahun 2016 menjadi Rp5,05 triliun di tahun 2017. Peningkatan pendapatan *recovery* merupakan cermin keberhasilan atas usaha penagihan yang dilakukan oleh BRI atas kredit yang telah dihapus buku.

Pendapatan Jasa (*Fee Based Income*)

(Rp juta)

Keterangan	2015		2016		2017		Growth (%)	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	2015-2016	2016-2017
Jasa Simpanan	3.907.092	53,11	4.037.187	43,78	4.079.389	39,07	3,33	1,05
Jasa Transaksi E-Channel dan Kartu Debit	1.637.396	22,26	2.246.025	24,35	2.760.110	26,43	37,17	22,89
Jasa Perkreditan	514.566	7,00	1.170.623	12,69	1.492.927	14,30	127,50	27,53
Jasa Transaksi Bisnis Internasional	595.229	8,09	886.671	9,61	921.018	8,82	48,96	3,87
Jasa Kartu Kredit	128.748	1,75	183.511	1,99	222.041	2,13	42,54	21,00
Jasa Transfer	282.806	3,84	306.093	3,32	393.411	3,77	8,23	28,53
Lainnya	290.136	3,94	392.448	4,26	573.344	5,49	35,26	46,09
Total	7.355.973	100,00	9.222.558	100,00	10.442.240	100,00	25,38	13,22

*Fee based income* didominasi oleh jasa simpanan sebesar 39,07% dari total *fee based income*, turun dari tahun 2016 yang mencapai 43,78%. Sementara Jasa transaksi *e-channel* dan kartu debit naik komposisinya dari 24,35% menjadi 26,43% pada tahun 2017. Hal ini sejalan dengan strategi BRI untuk meningkatkan kualitas pelayanan *e-banking* BRI. Dengan *customer base* BRI yang mayoritas belum menggunakan *e-banking*, potensi pendapatan masih bisa diharapkan terus tumbuh di tahun-tahun mendatang.



## TINJAUAN KEUANGAN

### Beban Operasional Lainnya

Pada tahun 2017, Beban Operasional lainnya mencapai Rp38,44 triliun, naik 10,02% dibanding tahun 2016 yang sebesar Rp34,94 triliun. Pertumbuhan ini jauh lebih rendah dibanding pertumbuhan pada tahun 2016 yang sebesar 19,20%. Penurunan ini terutama terjadi di pos biaya umum administrasi yang disebabkan karena BRI mengurangi laju ekspansi unit kerja operasional. Selama tahun 2017, BRI hanya menambah 3 unit kerja, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2016 sebanyak 31 unit kerja. Beban tenaga kerja dan tunjangan serta biaya umum administrasi merupakan komponen terbesar dari beban operasional lainnya yang masing-masing sebesar 52,94% dan 34,20%.

(Rp juta)

Keterangan	2015		2016		2017		Growth (%)	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	2015-2016	2016-2017
Tenaga Kerja dan Tunjangan	16.599.158	56,63	18.485.014	52,90	20.352.004	52,94	11,36	10,10
Umum dan Administrasi	10.380.547	35,41	11.975.745	34,27	13.146.944	34,20	15,37	9,78
Kerugian transaksi mata uang asing - neto	-	-	273.832	0,78	-	-	-	(100,00)
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek dan obligasi rekap Pemerintah - Netto	10.945	0,04	-	-	-	-	-	-
Lain-lain	2.321.302	7,92	4.206.014	12,04	4.942.700	12,86	81,19	17,52
Total Beban Operasional Lainnya	29.311.952	100,00	34.940.605	100,00	38.441.648	100,00	19,20	10,02

### Biaya Provisi

Kenaikan biaya provisi kerugian penurunan nilai atas aset keuangan sebesar 24,04% merupakan bagian dari upaya BRI untuk meningkatkan Rasio Penutupan Atas Kredit Bermasalah (NPL Coverage) untuk kredit yang diberikan, pembiayaan syariah dan pembiayaan dari 156,76% pada tahun 2016 menjadi 178,84% ditahun 2017.

Sebagai bagian dari upaya menjalankan prinsip kehati-hatian, BRI meningkatkan pencadangan kerugian penurunan nilai kredit yang lebih besar pada tahun 2017 untuk mengantisipasi pemburukan kualitas kredit dimasa mendatang.

### Beban Pajak Penghasilan

Pada tahun 2017, beban pajak penghasilan sebesar Rp7,98 triliun, naik 3% dibanding tahun 2016 sebesar Rp7,75 triliun. Hal ini seiring dengan meningkatnya pendapatan yang diraih BRI. Pembayaran tarif pajak BRI sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. BRI dikenakan tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar 25% dan dikurangi 5% karena memenuhi persyaratan yaitu berupa Perusahaan Terbuka yang paling sedikit 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan dimiliki lebih dari 300 orang dan masing-masing hanya boleh memiliki porsi kepemilikan di bawah 5%.

### Laba Bersih

BRI berhasil meningkatkan laba bersih menjadi Rp29,04 triliun atau meningkat 10,74% dibanding tahun 2016 sebesar Rp26,23 triliun. Sejak tahun 2005, BRI berhasil mencetak laba terbesar di industri perbankan Indonesia dan selalu tumbuh sampai dengan tahun 2017, di tengah segala macam kondisi ekonomi baik pada saat pertumbuhan ekonomi tinggi maupun pertumbuhan ekonomi yang melambat seperti beberapa tahun belakangan ini. BRI tetap konsisten dalam mencetak laba terbesar dan terus tumbuh setiap tahun karena didukung oleh strategi untuk fokus di penyaluran kredit sektor UMKM yang terbukti *resilient*.

### Pendapatan Komprehensif Lainnya

Pada tahun 2017, BRI mencatatkan pendapatan komprehensif sebesar Rp1,83 triliun atau turun 727,87% dibanding tahun 2016 sebesar Rp15,15 triliun. Penurunan ini terutama karena tidak adanya surplus revaluasi aset tetap seperti tahun 2016 yang nilainya mencapai Rp14,31 triliun.

## TINJAUAN KEUANGAN

**Total Laba Komprehensif**

Sejalan dengan penurunan pendapatan komprehensif, laba komprehensif BRI sebesar Rp30,88 triliun, turun 34% dibanding tahun 2016 sebesar Rp41,38 triliun.

**Laporan Arus Kas**

<b>Arus Kas</b>				(Rp juta)
Deskripsi	2015	2016	2017	
Kas Bersih yang diperoleh dari Kegiatan Operasi	45.566.447	21.770.833	39.299.109	
Kas Bersih yang digunakan untuk Kegiatan Investasi	(56.726.069)	(3.324.382)	(30.995.996)	
Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	1.804.324	7.081.628	(10.847.132)	
Kenaikan/Penurunan Kas dan Setara Kas	(9.355.298)	25.528.079	(2.544.019)	
Penambahan kas dari akuisisi BRI Finance	0	36.764	0	
Pengaruh Perubahan Kurs	12.8	1.279	(427)	
Kas dan Setara Kas awal tahun	172.731.255	163.388.757	188.954.879	
Kas dan Setara Kas akhir tahun	163.388.757	188.954.879	186.410.433	

Pada akhir tahun 2017, BRI mencatatkan jumlah kas dan setara Kas sebesar Rp186,41 triliun, turun sebesar Rp2,54 triliun atau 1,35% dibanding akhir tahun 2016 atau awal tahun 2017. Penurunan arus Kas terutama digunakan untuk kegiatan investasi seperti pembelian surat berharga dan aktivitas pendanaan seperti untuk pembayaran Pinjaman.

**Arus Kas Dari Kegiatan Operasi**

Pada tahun 2017, arus Kas dari operasi (sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi) sebesar Rp51,52 triliun, naik dari tahun 2016 sebesar Rp39,79 triliun atau naik 29,5% dibandingkan tahun 2016. Hal ini menunjukkan kegiatan operasional Bank yang sehat. Sebagian besar pendapatan yang diterima dalam bentuk kas bersumber dari pendapatan bunga dan investasi sebesar Rp100,17 triliun. Selain dari pendapatan bunga, hasil investasi dan bagi hasil syariah, BRI memperoleh pendapatan *recovery* dalam bentuk kas sebesar Rp5,05 triliun di tahun 2017.

Setelah dikurangi dengan beban yang dibayar dan perubahan aset dan liabilitas operasi, kas neto yang diperoleh dari kegiatan operasional tercatat meningkat dari Rp21,77 triliun di tahun 2016 menjadi Rp39,30 triliun. Peningkatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan arus kas neto dari operasi sebesar Rp17,53 triliun sepanjang tahun 2017.

**Arus Kas Untuk Kegiatan Investasi**

Pada tahun 2017, jumlah kas yang digunakan untuk kegiatan investasi sebesar Rp30,99 triliun, naik signifikan dari tahun 2016 sebesar Rp3,32 triliun. Peningkatan ini terutama karena BRI membukukan kenaikan efek-efek dan obligasi Rekapitalisasi pemerintah yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo (*hold to maturity*) sebesar Rp28,92 triliun. Hal ini merupakan bagian dari strategi BRI dalam meningkatkan produktivitas aset ke portofolio yang menghasilkan *return* lebih tinggi.

**Arus Kas Dari Kegiatan Pendanaan**

BRI mencatatkan pengeluaran kas sebesar Rp21,28 triliun pada tahun 2017. Pengeluaran kas tersebut digunakan untuk membayar pinjaman yang diterima sebesar Rp5,66 triliun, membayar dividen kepada pemegang saham sebesar Rp10,48 triliun, membayar pinjaman dan surat berharga subordinasi sebesar Rp22,06 miliar dan pembayaran atas surat berharga yang jatuh tempo sebesar Rp4,92 triliun.



## TINJAUAN KEUANGAN

Pada sisi lain, BRI memperoleh penerimaan atas surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp10,24 triliun. Sehingga total pengeluaran kas untuk pendanaan sebesar Rp10,85 triliun.

## Rasio Keuangan

		(%)		
URAIAN		2015	2016	2017
1	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	20,59	22,91	22,96
2	Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	1,33	1,46	1,38
3	Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,57	1,61	1,59
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	2,37	2,75	3,11
5	NPL Gross	2,02	2,03	2,10
6	NPL Net*	1,22	1,09	0,88
7	Return on Asset (ROA)	4,19	3,84	3,69
8	Return on Equity (ROE)	29,89	23,08	20,03
9	Net Interest Margin (NIM)	8,13	8,00	7,93
10	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	67,96	68,69	69,14
11	Loan to Deposit Ratio (LDR)	86,88	87,77	88,13
<b>Kepatuhan (Compliance)</b>				
1	a. Persentase pelanggaran BMPK			
	i. Pihak terkait	0,00	0,00	0,00
	ii. Pihak tidak terkait	0,00	0,00	0,00
	b. Persentase pelampauan BMPK			
	i. Pihak terkait	0,00	0,00	0,00
	ii. Pihak tidak terkait	0,00	0,00	0,00
2	Giro Wajib Minimum (GWM)			
	a. GWM Utama Rupiah	9,31	6,94	6,52
	b. GWM Valuta Asing	8,43	8,03	8,15
3	Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	2,33	6,67	4,22

## Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan bank dalam membayar utang dapat dilihat dari berbagai rasio berikut ini:

## Rasio Likuiditas

**Loan to Deposit Ratio (LDR)**

Rasio likuiditas merupakan perbandingan antara pinjaman dengan simpanan (*loan to deposit ratio* atau LDR). Pada tahun 2017, LDR BRI mencapai sebesar 88,13%, naik dibanding 2016 yang sebesar 87,77%. Hal ini sejalan dengan bertumbuhnya penyaluran kredit BRI yang mencerminkan fungsi intermediasi. LDR BRI yang mencapai 88,13% masih berada dikisaran target LDR yang ditetapkan yaitu antara 90%-92% merupakan level yang optimal dalam menjaga efisiensi biaya dana.

**Loan to Funding Ratio (LFR)**

Sementara *loan to funding ratio* (LFR) BRI pada tahun 2017 sebesar 84,93%, turun dibanding tahun 2016 sebesar 86,81%. Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diharapkan LFR perbankan sebesar 80% sampai 92%. Dalam perhitungan LFR, diperhitungkan surat berharga yang diterbitkan dan ditatausahakan oleh KSEI dan tidak dimiliki oleh

## TINJAUAN KEUANGAN

bank minimal 2 bulan sebelum tanggal laporan (surat berharga yang diterbitkan sebelum Oktober 2017). Dengan pencapaian LFR BRI tersebut, maka masih terdapat ruang ekspansi bagi BRI dalam meningkatkan penyaluran kredit.

**Liquidity Coverage Ratio (LCR)**

Sebagai bagian dari implementasi Basel III dan dalam rangka meningkatkan ketahanan likuiditas jangka pendek, BRI melakukan pengelolaan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) yang merupakan rasio antara *high quality liquid asset* (HQLA) dengan total arus kas keluar bersih (*net cash outflow*) selama 30 hari kedepan dalam skenario stres. Pada tahun 2017, LCR Bank sebesar 241,97%, dan LCR konsolidasi sebesar 243,65%. Dalam hal ini BRI berhasil mempertahankan rasio kecukupan likuiditas diatas batas minimal sebesar 100%.

**Rasio Profitabilitas**

Di industri perbankan, rasio profitabilitas umumnya diukur dengan menggunakan tingkat imbal hasil terhadap aset (ROA), imbal hasil terhadap ekuitas (ROE) dan marjin pendapatan bunga bersih (NIM).

Rasio Profitabilitas (%)				
	2015	2016	2017	
ROA	4,19	3,84	3,69	
ROE	29,89	23,08	20,03	
NIM	7,85	8,00	7,93	

- **Return On Assets (ROA)**

Pada tahun 2017, ROA BRI sebesar 3,69%, turun dibanding tahun 2016 sebesar 3,84%. Penurunan ROA sebesar 15 bps terutama disebabkan oleh masih naiknya biaya provisi sebesar 24,04%.

- **Return on Equity (ROE)**

BRI membukukan *return on Equity* (ROE) sebesar 20,03%, menurun dibanding tahun 2016 sebesar 23,08%. Penurunan disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar 14,78% atau sebesar Rp18,52 triliun dan kenaikan keuntungan *mark to market* surat berharga yang dimiliki BRI sebesar Rp1,74 triliun.

- **Net Interest Margin (NIM)**

Marjin Pendapatan Bunga Bersih (NIM) BRI pada tahun 2017 tercapai sebesar 7,93%, menurun dibanding tahun 2016 yang sebesar 8,00% (setelah reklasifikasi biaya premi asuransi dana pihak ketiga dan premi asuransi KUR). Penurunan NIM sebesar 7 bps karena penurunan suku bunga kredit terutama di konsumen sekitar 100 bps selama tahun 2017 karena meningkatnya kompetisi.

**Rasio Efisiensi**

- **Beban Operasional Atas Pendapatan Operasional (BOPO)**

Rasio BOPO sebesar 69,14%, naik sedikit dari tahun 2016 sebesar 68,69%. Hal ini disebabkan oleh naiknya pencadangan risiko kredit (CKPN). Meski demikian, rasio BOPO BRI masih dibawah rata-rata industri perbankan. Berdasarkan pembahasan rasio-rasio tersebut di atas, BRI memiliki kemampuan yang memadai untuk membayar kewajiban karena profitabilitas yang terus meningkat dan tingkat efisiensi yang terjaga.

Rasio Efisiensi (%)				
	2015	2016	2017	
BOPO	67,96	68,69	69,14	



## TINJAUAN KEUANGAN

## Rasio Kualitas Aset

**Non Performing Loan (NPL)**

Pada tahun 2017, kolektibilitas kredit yang direpresentasikan dari angka kredit bermasalah (NPL) meningkat menjadi 2,23% dari tahun 2016 yang sebesar 2,10%. Meskipun demikian, angka NPL BRI masih jauh dibawah ketentuan Bank Indonesia yaitu maksimal sebesar 5%.

Kolektibilitas Kredit Tahun 2015-2017 (Rp juta)				
	2015	2016	2017	
Kredit	581.094.544	663.420.218	739.336.520	
Lancar	540.359.286	619.793.792	692.099.915	
Perhatian Khusus	28.551.121	29.474.869	30.784.126	
Kurang Lancar	2.862.971	3.730.004	2.995.624	
Diragukan	1.411.066	1.756.805	4.229.123	
Macet	7.910.099	8.664.747	9.227.732	
NPL	12.184.137	14.151.556	16.452.479	
NPL(%)	2,10%	2,13%	2,23%	

## Rasio Modal

**Capital Adequacy Ratio (CAR)**

Rasio modal perbankan diukur dari rasio kecukupan permodalan (CAR) yang mencerminkan kemampuan untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional.

Pada tahun 2017, CAR BRI sebesar 22,96%, atau jauh diatas ketentuan regulator perbankan yang sebesar 9%-10%. Pencapaian CAR di tahun 2017 tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2016 sebesar 22,91%. Hal ini mencerminkan kemampuan BRI untuk melakukan ekspansi bisnisnya dan mampu melindungi dari risiko solvabilitas.

## Rasio Kepatuhan

- **Persentase Pelanggaran dan Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)**

Pada tahun 2017, BRI tidak memiliki debitur, baik pihak terkait maupun tidak terkait, yang tidak memenuhi atau melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

- **Rasio Posisi Devisa Neto (PDN)**

PDN merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aset dan liabilitas untuk setiap mata uang asing dengan selisih bersih tagihan dan liabilitas komitmen dan kontijensi dalam rekening administratif untuk setiap mata uang asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah. Pada tahun 2017, BRI membukukan rasio posisi devisa neto (PDN) sebesar 4,22%, turun dibanding tahun 2016 sebesar 6,67%.

## Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif

Untuk melindungi nilai portofolio aset berdenominasi mata uang asing BRI melakukan transaksi lindung nilai, namun demikian BRI tidak menerbitkan transaksi derivatif untuk tujuan perdagangan. Pada praktiknya, transaksi spot dan transaksi derivatif mengacu pada sistem manajemen risiko yang sesuai dengan ketentuan dan praktik terbaik. Seluruh transaksi derivatif yang dilakukan ditujukan untuk kepentingan BRI maupun nasabah.

## TINJAUAN KEUANGAN

Sepanjang tahun 2017, BRI melakukan transaksi spot dan transaksi derivatif dalam bentuk *swap* mata uang dan suku bunga, *swap* suku bunga, *Option*, Pembelian dan Penjualan *Forward* mata uang asing, *Swap* mata uang asing, pembelian dan penjualan *spot* mata uang asing. Secara rinci transaksi spot dan derivatif yang dilakukan BRI termuat dalam tabel berikut:

Transaksi	Tagihan Derivatif		Liabilitas Derivatif	
	2016	2017	2016	2017
Swap mata uang dan suku bunga	32.204	64.708	179.286	115.981
Swap suku bunga	59.443	60.475	53.780	54.261
Option	-	10.218	-	11.341
Pembelian dan Penjualan Forward mata uang asing	-	6.883	1.991	15.156
Swap mata uang asing	-	2.740	112.160	3.334
Pembelian dan penjualan spot mata uang asing	10	904	-	785
Total	91.657	145.928	347.217	200.858

### Kebijakan Struktur Modal

Pengelolaan struktur modal memiliki tujuan untuk memastikan bahwa BRI senantiasa menjaga kecukupan permodalan untuk menutup risiko-risiko yang *inherent* dalam mengelola bisnisnya tanpa mengurangi optimalisasi nilai bagi pemegang saham.

Pada tahun 2017, CAR BRI tercapai 22,96%, naik dibanding tahun 2016 sebesar 22,91%. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2016 dan Peraturan Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2013 tentang kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, menyebutkan bahwa profil risiko level 2 (*satisfactory*) memiliki minimal CAR sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%. Diluar ketentuan minimal CAR tersebut BRI diwajibkan membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) yang terdiri dari:

1. *Capital conservation buffer* sebesar 1,25% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
2. *Countercyclical Buffer* sebesar 0% dari ATMR.
3. *Capital Surcharge* untuk D-SIB sebesar 1% dari ATMR.

Sehingga total CAR minimum BRI berada di level 11,25%-12,25% maka CAR BRI pada tahun 2017 telah memenuhi ketentuan regulator perbankan dan jasa keuangan tersebut.

Secara struktur, pada tahun 2017, BRI memiliki modal inti (Tier-1) sebesar Rp154,67 triliun dan Modal Pelengkap (Tier-2) sebesar Rp7,08 triliun. Sedangkan rasio Tier-1 mencapai 21,95% atau diatas ketentuan minimal rasio Tier-1 sebesar 6%. Tier-1 BRI terdiri dari CET-1 karena sumber utama modal BRI adalah laba ditahan. Oleh karena itu Rasio CET-1 BRI sebesar 21,95% di tahun 2017 jauh diatas ketentuan minimum sebesar 4,5%.

	Konsolidasian (Rp juta)		
	2015	2016	2017
Modal Inti (Tier 1)	93.436.842	139.786.475	159.087.145
Modal Inti Utama (CET 1)	93.436.842	139.786.475	159.087.145
Modal Inti Tambahan (AT 1)	-	-	-
Modal Pelengkap (Tier 2)	20.763.556	7.459.267	8.306.990
Total Modal Tersedia	114.200.398	147.245.742	167.394.135
ATMR untuk Risiko Kredit setelah memperhitungkan risiko spesifik	458.538.460	524.505.486	591.391.731

Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

▶ Analisa &amp; Pembahasan Manajemen



## TINJAUAN KEUANGAN

	Konsolidasian (Rp juta)		
	2015	2016	2017
ATMR untuk Risiko Pasar	2.884.354	9.622.076	6.986.505
ATMR untuk Risiko Operasional	98.655.846	114.841.081	134.420.827
Total ATMR	560.078.660	648.968.643	732.799.063
Rasio CAR	20,39%	22,69%	22,84%
Rasio CET 1	16,68%	21,54%	21,71%
Rasio Tier 1	16,68%	21,54%	21,71%
Rasio Tier 2	3,71%	1,15%	1,13%
Rasio Minimum Tier 1	6,00%	6,00%	6,00%
Rasio Minimum CET 1	4,50%	4,50%	4,5%
CAR Minimum Berdasarkan Profil Risiko	9,42%	9,38%	9,57%

## Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal

BRI memiliki ikatan material dalam pengadaan barang modal yang bertujuan sebagai komitmen pemberian barang modal yang telah direncanakan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) pada tahun 2017. Sumber dana yang digunakan dalam pembelian barang modal berasal dari modal BRI yang telah dianggarkan selama tahun berjalan.

Pada tahun 2017, pengikatan material yang dilakukan oleh BRI terkait pengadaan barang modal adalah terkait dengan pengadaan komputer dan CRM, pengadaan mesin dan jasa IT, pengadaan jasa sewa jaringan komunikasi dan pengadaan EDC. Atas pengadaan tersebut dilakukan ikatan material yang sebagian besar dilakukan dalam mata uang rupiah, sehingga risiko fluktuasi mata uang menjadi minimal dan BRI tidak perlu melakukan langkah perlindungan risiko atas mata uang.

Beberapa ikatan material yang dilakukan antara lain:

- Pengadaan CRM sebesar Rp100,56 miliar.
- Pengadaan jasa *maintenance server* untuk periode tahun 2017-2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp80 miliar.
- Pengadaan mesin *mainframe* sebesar Rp69 miliar.
- Pengadaan jasa sewa perangkat Hub dan Remote VSAT untuk periode 3 tahun dengan nilai kontrak Rp68 miliar.
- Pengadaan EDC dengan nilai kontrak sebesar Rp74,58 miliar.

## Investasi Barang Modal

Secara umum, belanja investasi terdiri dari:

- Investasi ke perusahaan anak/entitas asosiasi, baik dalam bentuk akuisisi maupun tambahan modal sebesar Rp944,54 miliar.
- Belanja barang IT maupun non IT sebesar Rp2,1 triliun.

Pada tahun 2017, BRI melakukan investasi dalam penyertaan saham ke PT Bahana Artha Ventura sebesar Rp71,33 miliar. BRI juga melakukan tambahan modal pada BRI Agro sebesar Rp873,21 miliar.

Sementara untuk belanja barang modal pada tahun 2017, BRI telah membelanjakan sebesar Rp2,10 triliun, turun dibanding tahun 2016 sebesar Rp3,67 triliun. Berikut rincian belanja barang modal:

Belanja Barang Modal	Konsolidasi (Rp juta)		
	2015	2016	2017
Tanah dan Bangunan	1.022.807	903.822	957.857
Meubelair dan Inventaris	184.588	143.069	125.049

## TINJAUAN KEUANGAN

Belanja Barang Modal	Konsolidasi (Rp juta)		
	2015	2016	2017
Kendaraan	146.285	243.909	84.034
Komputer dan Perangkat Lunak	578.344	1.422.607	750.309
Leasing	-	-	-
Satelit dalam Pengembangan	1.484.677	959.041	183.877
Total	3.416.701	3.672.447	2.101.126

### Kebijakan Lindung Nilai

BRI telah menerapkan prinsip lindung nilai sebagai upaya meminimalkan risiko dengan penjelasan sebagai berikut:

#### Kebijakan Umum

Transaksi Lindung Nilai (*hedging*) meliputi transaksi yang dilakukan dalam rangka melindungi nilai aset keuangan, kewajiban keuangan, pendapatan dan biaya serta arus kas baik secara *on balance sheet* maupun *off balance sheet* dari risiko suku bunga dan/atau risiko nilai tukar untuk posisi *Banking Book* dan *Trading Book*.

Pelaksanaan transaksi Lindung Nilai (*hedging*) berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Transaksi dapat dilakukan sebagai salah satu alternatif tindak lanjut dan mitigasi risiko apabila terjadi pelampauan *limit moderate* pada parameter Profil Risiko Pasar.
2. Transaksi dapat dilakukan apabila terdapat indikasi perubahan kondisi ekonomi makro yang dianggap dapat menimbulkan kerugian, yang ditunjukkan antara lain oleh tren perubahan variabel pasar yaitu suku bunga dan nilai tukar.
3. BRI dilarang memelihara posisi atas transaksi Lindung Nilai yang dilakukan oleh pihak terkait.
4. BRI wajib meneruskan (*pass-on*) transaksi pihak terkait pada waktu dan jumlah yang sama secara simultan kepada bank lain yang bukan pihak terkait.

#### Teknik Transaksi Lindung Nilai (*Hedging*)

Transaksi Lindung Nilai dapat dilakukan baik secara makro (*macro hedging*) atau mikro (*micro hedging*).

- **Macro Hedging**

Teknik ini digunakan untuk memitigasi dampak risiko ekonomi terhadap seluruh portofolio BRI. Macro hedging dilakukan melalui usulan Divisi Treasury untuk diputus oleh ALCO.

- **Micro Hedging**

*Micro hedging* dilakukan BRI pada level transaksi secara individual. Transaksi ini dapat dilakukan sendiri oleh Divisi Treasury tanpa usulan divisi bisnis pengelola portofolio terkait, dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya serta kemampuan untuk kontrol atas transaksi Lindung Nilai yang dilakukan.

### Komitmen dan Kontinjensi

Penilaian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit secara individual dengan menggunakan bukti obyektif, kecuali komitmen dan kontinjensi milik BRIS (entitas anak) (berdasarkan prinsip syariah) penilaian dilakukan dengan menggunakan panduan kolektibilitas Bank Indonesia.

Pada tahun 2017, jumlah minimum estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia adalah sebesar Rp2,13 miliar.



## TINJAUAN KEUANGAN

Jumlah liabilitas komitmen pada akhir tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 5,60% dibandingkan tahun 2016. Hal ini terutama diakibatkan turunnya fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik sebesar 11,45%. Dalam periode yang sama, liabilitas kontinjensi meningkat sebesar 38,77% yang dipengaruhi oleh kenaikan pada garansi yang diterbitkan dalam bentuk standby L/C.

## Komitmen dan Kontinjensi

(Rp juta)

Deskripsi	2016	2017
<b>Komitmen</b>		
Tagihan Komitmen	12.219.746	4.038.459
Pembelian Spot dan Mata Uang Asing	12.219.746	4.038.459
<b>Liabilitas Komitmen</b>	136.821.075	129.159.708
Fasilitas Kredit yang diberikan kepada Debitur yang belum digunakan	120.916.072	107.073.032
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	8.541.152	8.980.671
Penjualan Spot dan Mata Uang Asing	7.109.202	13.000.508
Fasilitas Pembiayaan yang diberikan kepada Debitur yang belum digunakan	254.649	105.497
Komitmen - Neto	(124.601.329)	(125.121.249)
<b>Kontinjensi</b>		
Tagihan Kontinjensi	45.208	70.905
Tagihan Bunga dalam Penyelesaian	45.208	70.905
<b>Liabilitas Kontinjensi</b>	24.523.015	34.030.380
Garansi yang diterbitkan dalam bentuk :		
Standby L/C	3.838.190	10.841.726
Garansi Bank	20.684.825	23.188.654
Kontinjensi - Neto	(24.477.807)	(33.959.475)

## Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah

(Prime Lending Rate)

## Berdasarkan Segmen Bisnis

Suku Bunga	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
				KPR	Non KPR
TMT Desember 2017	9,95%	9,75%	17,5%	9,98%	12,5%

- Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh Bank kepada nasabah SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK.
- Dalam kredit konsumsi non KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui Kartu Kredit dan Kredit Tanpa Agunan (KTA)
- Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor Bank dan/atau website [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id).

## TINJAUAN KEUANGAN

## Pencapaian dan Target 2017

(Rp triliun)

Keterangan	Angka Bank Saja			
	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Pencapaian (%)
Aset	964,00	1.054,98	1.076,44	102,03
Laba Bersih	25,75	27,76	28,47	102,56
Kredit yang Diberikan	635,29	715,29	708,00	98,98
Dana Pihak Ketiga	723,85	787,12	803,33	102,06
BOPO	68,69%	69,62%	69,14%	100,68
LDR	87,77%	90,88%	88,13%	103,11
NPL (Gross)	2,03%	2,11%	2,10%	100,48
NPL (Net)	1,09%	1,18%	0,88%	134,09
NIM	8,00%	7,85%	7,93%	101,03
CAR	22,91%	21,29%	22,96%	107,86

Pencapaian kinerja BRI pada tahun 2017 secara umum sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2017. Target yang tercapai untuk aset, laba bersih, DPK, BOPO, LDR, NIM, NPL dan CAR. Sedangkan kredit tidak tercapai karena BRI tidak agresif di segmen korporasi. Selain itu, segmen korporasi mengalami pelemahan permintaan kredit, yang disebabkan oleh kecenderungan korporasi untuk mengakses langsung pendanaan pasar modal.

## Target 2018

Pada tahun 2018, diprediksi kondisi ekonomi akan tumbuh lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi tahun 2017 karena membaiknya harga komoditas, meningkatnya ekspor dan penyelenggaraan beberapa *event* di Indonesia seperti Asian Games. Oleh karena itu, BRI menargetkan pertumbuhan kinerja finansial sebagai berikut:

- Pertumbuhan Kredit 10%-12%
- Posisi LDR dijaga pada level 90% +/-2%
- Pertumbuhan Biaya Operasional 10-12%
- Efisiensi Operasional CER pada level 42% - 43%
- Kualitas kredit atau NPL dijaga pada level 2,0%-2,2%
- Rasio Kecukupan Modal diatas 20%

## Informasi Dan Fakta Material Setelah Tanggal Periode Laporan

Tidak ada peristiwa penting dengan nilai material yang terjadi setelah tanggal periode laporan.

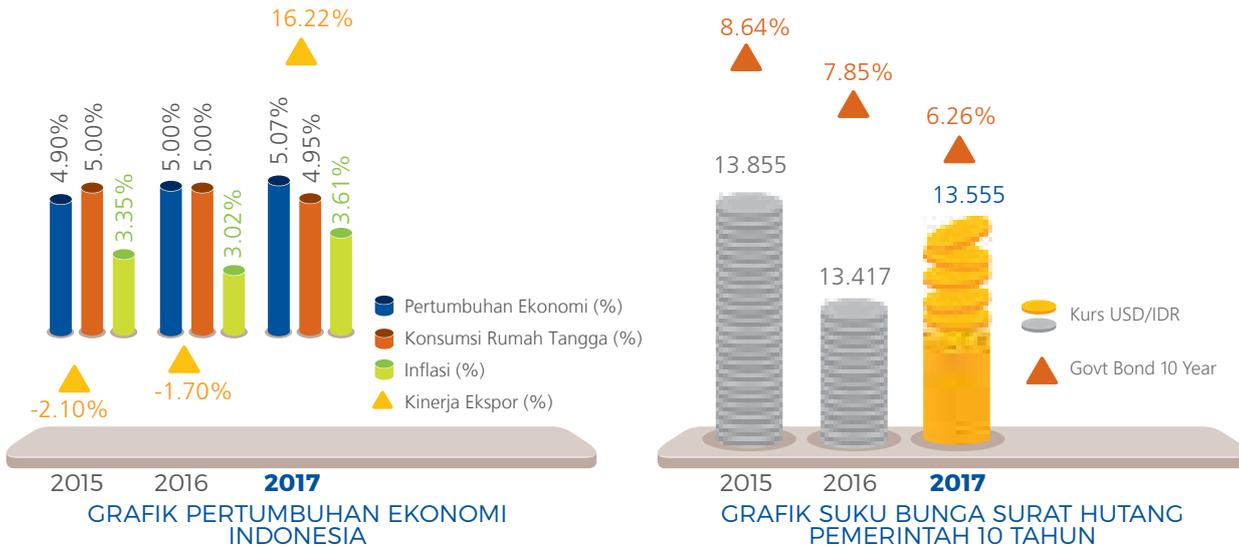
## Prospek Usaha

## Prospek Ekonomi Makro

Pada tahun 2018, ekonomi Indonesia diperkirakan memiliki potensi pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun 2017, dengan target pertumbuhan PDB di APBN sebesar 5,4%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan akan disumbang oleh penguatan sektor riil dengan stabilnya pengeluaran rumah tangga dan peningkatan kinerja ekspor. Sejumlah faktor yang diperkirakan akan berkontribusi pada pertumbuhan PDB antara lain peningkatan harga komoditas, postur APBN dengan porsi pengeluaran untuk dana transfer ke daerah yang lebih besar, serta kondisi politik yang diharapkan cukup stabil dengan pelaksanaan Pilkada serentak serta persiapan Pemilu 2019.



## TINJAUAN KEUANGAN



## Prospek Industri Perbankan

Kinerja industri perbankan tahun 2018 diperkirakan masih akan positif, seperti halnya tahun 2017 lalu. Seiring dengan ekspektasi pertumbuhan ekonomi tahun 2018, penyaluran kredit oleh sektor perbankan pada tahun 2018 diperkirakan akan tumbuh dikisaran 9%-11% dan penghimpunan DPK dikisaran 10%-11%.

Likuiditas perbankan diperkirakan akan stabil dan cenderung membaik, dengan meningkatnya kinerja ekspor yang disertai penurunan laju permintaan kredit korporasi. Penurunan laju permintaan kredit di segmen korporasi diperkirakan masih berlanjut dengan semakin banyaknya korporasi yang memilih pendanaan langsung dari pasar modal mengingat kondisi ekonomi makro yang mendukung yang menghasilkan peningkatan rating surat hutang Indonesia selama tahun 2017.

## Prospek Usaha BRI

Potensi pertumbuhan PDB Indonesia pada tahun 2018 diharapkan berdampak positif pada sektor konsumsi rumah tangga domestik seiring peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini menunjukkan potensi bisnis yang membaik pada penyaluran kredit di segmen Bisnis Mikro dan Konsumer.

• **Bisnis Konsumer**

Potensi di segmen Konsumer akan dimaksimalkan dengan produk unggulan Briguna, yaitu pinjaman untuk segmen pekerja berpenghasilan tetap, serta KPR atau Kredit Kepemilikan Rumah melalui optimasi *cross-sell* dengan segmen Korporasi dan BUMN.

## TINJAUAN KEUANGAN

- **Bisnis Mikro**  
Untuk memaksimalkan potensi bisnis di segmen Mikro, BRI akan tetap serius dalam mengelola produk KUR agar dapat menjadi *pipeline* bagi kredit Mikro komersial, yaitu Kupedes. Optimisme tersebut ditunjang oleh kebijakan ekonomi Pemerintah terkait pengembangan sektor usaha Mikro seperti terlihat dari peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh BRI dari Rp69 triliun di tahun 2016, menjadi Rp79 triliun di tahun 2018. Ini merupakan peluang bagi BRI untuk menjaga pertumbuhan kredit Mikro yang memiliki keunggulan dan terbukti menjadi pemimpin pasar pinjaman Mikro melalui produk Kupedes dan KUR.
- **Dana Murah**  
Peningkatan penyaluran kredit terutama di segmen Konsumer dan Mikro tersebut diharapkan akan diimbangi dengan kemampuan BRI dalam menjaga pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui strategi pemasaran yang efektif untuk produk unggulan Simpedes dan Britama. Dengan meningkatnya porsi APBN untuk subsidi *non energy* dan pos transfer dana ke daerah, diharapkan akan menyumbang pada pertumbuhan Simpanan di segmen Mikro seperti yang terlihat pada 2 tahun sebelumnya.
- **Operasional Bisnis**  
Disisi Operasional Bisnis, BRI akan terus melakukan upaya-upaya efisiensi dengan membatasi pembukaan unit kerja operasional dan rekrutmen pegawai. Sehingga, untuk mempertahankan kualitas layanan dan mendukung pertumbuhan bisnis yang terus meningkat, BRI akan mendorong pertumbuhan bisnis agen BRILink, memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dengan membangun *Big Data* dan menyelaraskan proses bisnis pada berbagai sistem putusan kredit.
- **Kualitas Aset**  
Untuk kualitas kredit, BRI masih akan melakukan strategi menjaga tingkat rasio NPL (*Non Performing Loan*) tahun 2018 dikisaran 2,0% sampai dengan 2,2% dengan memaksimalkan penyelesaian kredit melalui intensifikasi kerjasama dengan kejaksaan untuk pelaksanaan eksekusi agunan.



TINJAUAN KEUANGAN

Rencana Strategis Bank

BRI telah menyusun Rencana Jangka Panjang (RJP) tahun 2018-2022, seiring dengan berakhirnya RJP tahun 2013-2017. Aspirasi yang akan dicapai dituangkan ke dalam visi BRI yaitu menjadi *The Most Valuable Bank* di Asia Tenggara dan *Home to the Best Talent*. *Roadmap* yang dicanangkan sebagai berikut:



Dalam penyusunan *Corporate Plan 2018 – 2022*, selain berpedoman pada pernyataan visi dan misi BRI, Direksi BRI juga mempertimbangkan sejumlah faktor yang akan berpengaruh terhadap perkembangan industri perbankan di Indonesia ke depan, antara lain:

- Kondisi demografis Indonesia dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif kelas menengah dengan daya beli yang semakin tinggi serta didominasi oleh generasi *millennial* yang akrab dengan teknologi digital.
- Arah kebijakan pembangunan nasional Pemerintah melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor energi yang akan membutuhkan pendanaan dari perbankan.
- Integrasi ekonomi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan perdagangan bebas antar-negara ASEAN yang akan berpengaruh terhadap persaingan bank-bank baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan kredit.

Kategori	Strategi
Mikro	Mempertahankan & menumbuhkan segmen mikro mencapai minimal 50% market share
Consumer	Tetap menjadi terdepan dalam salay loan sekaligus menduduki peringkat 3 besar di kategori lain
SME	Menjadi bank SME terdepan di Indonesia dengan minimal 21% market share
Korporasi	Meningkatkan profitabilitas unit perbankan korporasi

## TINJAUAN KEUANGAN

Rencana Jangka Panjang BRI akan diimplementasikan dalam 3 *waves of transformation* sebagai berikut:



### Jangka Pendek

Berbagai strategi jangka pendek untuk tahun 2018 telah kami jabarkan dalam analisis dan pembahasan manajemen per-segmen, yang pada intinya adalah:

#### Tetap menjaga Fokus Pertumbuhan Aset di segmen MKM

BRI akan memprioritaskan strategi pertumbuhan aset bisnis di segmen MKM dengan meningkatkan penetrasi pasar Mikro melalui produk KUR dan Kupedes serta mengelola pangsa pasar bisnis Konsumer terutama untuk golongan pekerja berpenghasilan tetap dan KPR melalui optimasi program *cross selling* dengan segmen Korporasi dan BUMN.

#### Meningkatkan Pertumbuhan Dana Murah dan Menjaga Komposisi CASA

Sementara itu untuk liabilitas, BRI akan menerapkan strategi menjaga pertumbuhan kinerja DPK melalui strategi pemasaran yang efektif baik untuk segmen Mikro maupun Ritel dengan menawarkan produk Simpedes dan Britama, meningkatkan penetrasi BRILink untuk membangun barrier di bisnis *retail payment*, serta

menangkap peluang bisnis *wholesale transaction banking* di segmen Korporasi.

#### Meningkatkan Produktifitas Operasional

Disisi operasional, BRI akan terus melakukan upaya-upaya efisiensi dengan membatasi pembukaan unit kerja operasional dan rekrutmen pegawai. Sehingga, untuk mempertahankan kualitas layanan dan mendukung pertumbuhan bisnis yang terus meningkat, BRI akan mendorong pertumbuhan bisnis agen BRILink, memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dengan membangun *Big Data* dan menyelaraskan proses bisnis pada berbagai sistem putusan kredit

#### Menjaga Kualitas Aset

Kualitas kredit akan dikelola dengan strategi penyelesaian pinjaman. Untuk segmen Korporasi dan BUMN, upaya menjaga kualitas kredit akan diwujudkan dengan target pertumbuhan BRI pada potensi bisnis yang berhubungan dengan proyek-proyek maupun pengeluaran pemerintah dan sektor-sektor yang digerakkan oleh ekonomi domestik.

Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

▶ Analisa &amp; Pembahasan Manajemen



## TINJAUAN KEUANGAN

### Jangka Menengah

Strategi BRI dalam tiga tahun ke depan adalah *Competitive Growth Strategy*, yaitu dilakukan dengan cara:

#### Memperbaiki Struktur Neraca dan Pendapatan

Perbaikan struktur neraca tersebut dilakukan melalui:

- Perbaikan struktur *liabilities*, terutama fokus kepada komposisi dana murah,
- Peningkatan komposisi *earning asset*,
- Diversifikasi *income*, terutama dengan fokus peningkatan *fee/income ratio*
- Pengendalian kualitas *earning asset*

#### Meningkatkan Produktivitas Jaringan Kerja

Strategi tersebut mencakup penetapan KPI unit kerja bisnis dan operasional yang jelas dan terukur, serta struktur organisasi yang efektif dan efisien. Selain itu juga dilakukan perbaikan system evaluasi kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas Sistem Manajemen Kinerja BRI dengan penetapan KPI pekerja yang selaras dengan KPI unit kerja. Upaya perbaikan juga dilakukan di bidang pengelolaan Sumber Daya Manusia dengan pengembangan proses *recruitment*, *development*, *placement* dan *career path* yang jelas dan terarah untuk meningkatkan *engagement* pekerja.

#### Menerapkan *Operational Excellence*

Strategi dalam mencapai tingkat *operational excellence* antara lain melalui *Business Process Re-engineering* terutama di segmen mikro, ritel dan menengah, meningkatkan kemampuan MIS sebagai sumber data yang *reliable* dan mendukung pengambilan keputusan, serta menetapkan *Service Level Agreement* minimal berdasarkan standar industri.

#### Membangun sinergi BUMN untuk meningkatkan daya saing

Perusahaan senantiasa berupaya menciptakan value untuk *stakeholders* termasuk untuk Pemerintah. Salah satu hal yang dilakukan adalah memperkuat sinergi antar BUMN untuk meningkatkan daya saing. Beberapa hal yang dilakukan adalah implementasi ATM dan EDC Merah Putih, pembangunan Rumah Kreatif BUMN dan sindikasi pembiayaan infrastruktur.

### Jangka Panjang

Proses transformasi BRI dari tahun 2018 hingga 2022 ditujukan untuk mencapai aspirasi sebagai *The Most Valuable Bank* di Asia Tenggara serta *Home to The Best Talent*.

#### Target Bisnis

Untuk mendukung aspirasi tersebut, target bisnis yang akan dicapai yaitu :

- Segmen Mikro  
Mempertahankan dan mengembangkan bisnis mikro BRI hingga mencapai pangsa pasar minimal 50%
- Segmen Konsumer  
Mempertahankan *market leader* pada *salary based loan* sekaligus menjadi *Top Player* di sektor konsumer lainnya.
- Segmen SME  
Mewujudkan keinginan BRI sebagai *Leading SME Bank* di Indonesia
- Segmen Korporasi  
Meningkatkan profitabilitas di segmen Korporasi

#### Strategi Transformasi

Transformasi BRI yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang akan diimplementasikan dalam 3 *waves of transformation* sebagai berikut:

#### Mempertahankan dominasi BRI di segmen MKM melalui digitalisasi proses bisnis

Hal yang akan dilakukan untuk mempertahankan dominasi BRI di segmen MKM pada bisnis Mikro terutama adalah melakukan digitalisasi untuk proses bisnis, meningkatkan *monitoring*, *collection* dan *underwriting capability*.

#### Menjawab Tantangan Bisnis Simpanan dengan Pengembangan layanan *Wholesale Transaction Banking* dan *Retail Payment*

Untuk menjawab tantangan perubahan teknologi dan menggarap potensi dari kelas menengah yang semakin meningkat, BRI memperkuat kemampuan dalam hal *retail payment* dan *transaction banking*.

## TINJAUAN KEUANGAN

- Di bisnis *retail payment* yang fokus menasar potensi nasabah segmen individu, terdapat beberapa hal yang akan dilakukan, antara lain memperkuat penetrasi dan produktivitas Agen BRILink BRI yang mulai diperkenalkan di tahun 2014. Selain itu, BRI juga fokus memperbaiki layanan dalam pengelolaan merchant yang dapat menjadi *driver* dalam penghimpunan Simpanan. Untuk mewujudkan hal tersebut,
- Untuk pengembangan bisnis *wholesale transaction banking*, BRI akan fokus menasar institusi baik BUMN maupun Non BUMN. Upaya ini telah dimulai pada tahun 2016 melalui pembentukan bidang *Commercial Transaction Banking* di bawah koordinasi Divisi *Transaction Banking*. Kemudian di tahun 2017, Divisi *Transaction Banking* hanya fokus melayani nasabah Medium dan Korporasi.

**Meningkatkan Produktivitas SDM serta Kualitas Layanan Teknologi Informasi**

Untuk mempersiapkan eksekusi strategi jangka panjang, dari sisi *support*, BRI akan memperkuat kapabilitas teknologi informasi dalam mendukung bisnis dan operasional, pengelolaan risiko yang lebih efisien, membangun kapasitas *data analytics*, membangun *performance-driven culture* serta memperkuat *leadership capability*.



## TINJAUAN KEUANGAN



### Aspek Pemasaran

Kemampuan BRI untuk tetap mencatatkan kinerja yang baik ditengah perubahan lingkungan bisnis tidak hanya bergantung dari kemampuan Bank dalam menciptakan produk dan jasa perbankan yang inovatif dan mampu memberikan solusi keuangan yang komprehensif, namun juga kemampuan Bank dalam melaksanakan aktivitas komunikasi pemasaran (*marketing communication*) yang efektif kepada berbagai pemangku kepentingan.

BRI menerapkan strategi *Integrated Marketing Communication* (IMC) dalam seluruh aktivitas komunikasi pemasaran dengan tujuan untuk meningkatkan *awareness*, *knowledge* dan *activation* dari produk maupun jasa Bank baik kepada nasabah *existing* (meningkatkan loyalitas), maupun kepada calon nasabah

(meningkatkan *purchase intention*). Strategi IMC dilaksanakan dengan melibatkan lintas fungsi untuk mengoptimalkan komunikasi yang konsisten atas brand perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Sejalan dengan upaya Bank BRI di tahun 2017 untuk menjadi Indonesia MSMEs *Bank with Full Banking Services*, maka selama tahun 2017 strategi komunikasi pemasaran BRI difokuskan kepada produk-produk yang secara substansi berbasiskan kepada individu/mass ataupun produk ritel baik *lending* maupun *funding* pada segmen MSME.

Program pemasaran BRI pada tahun 2017, antara lain :

- Pesta Rakyat Slmpedes
- Parade UMKM

## TINJAUAN KEUANGAN

- BRI Poin
- BritAmax Hai Day
- *Launching* Kartu Kredit BRI Easy Card
- *Launching* Innovation Center
- *Sponsorship* Kidzania
- Basket Junio JRBL
- David Foster Concert
- Wednesday It's Lovely day Kahitna
- Indonesian Basket League
- Indonesia Open
- Indonesia Master
- *Launching* BRIZZI Asian Games Series
- *Launching* Kartu Debit Asian Games Series

Dengan adanya pergeseran gaya hidup konsumen di Indonesia yang didominasi oleh generasi millennial, maka saluran komunikasi BRI juga diperkuat dengan adanya *social media* dimana informasi dapat disampaikan lebih efektif. Akun sosial media BRI yang antara lain akun instagram @BankBRI\_ID, akun twitter @BankBRI\_ID, @Kontak\_BRI, @Promo\_BRI, akun facebook bankbri, dan akun youtube bankbri.





## TINJAUAN KEUANGAN

### Pangsa Pasar

Salah satu keberhasilan aktivitas komunikasi pemasaran ditunjukkan dengan dominasi pangsa pasar BRI di industri perbankan nasional. Di pangsa pasar aset, dengan total aset BRI sebesar Rp1.076,44 triliun pada tahun 2017, pangsaannya sebesar 14,10% terhadap total aset perbankan yang sebesar Rp7.387,14 triliun.

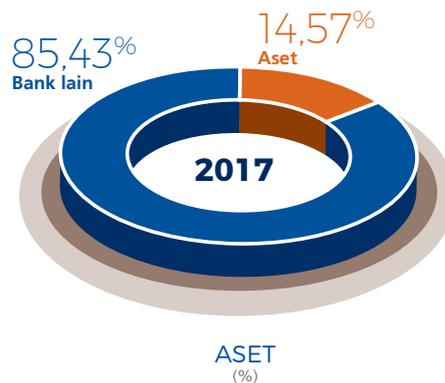
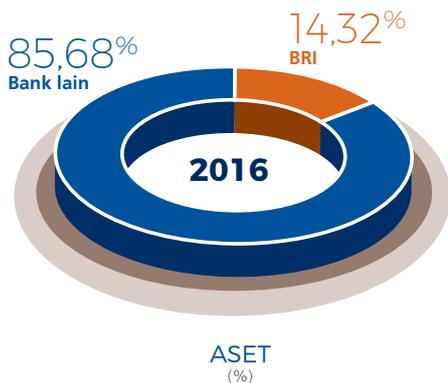
Pada tahun 2017, dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI sebesar Rp803,33 triliun, pangsaannya sebesar 15,19% dari total DPK perbankan sebesar Rp5.289,21 triliun. Dengan kredit BRI sebesar Rp708 triliun, pangsa pasarnya sebesar 14,94% dari total penyaluran kredit perbankan senilai Rp4.737,97 triliun.

### Strategi Komunikasi Pemasaran Tahun 2018

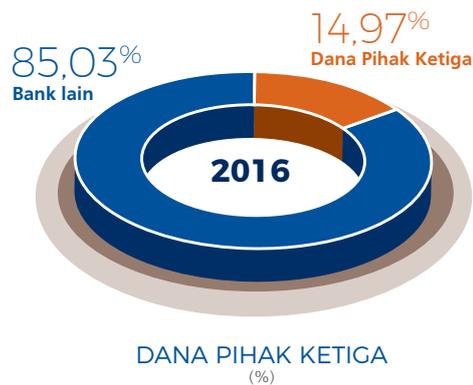
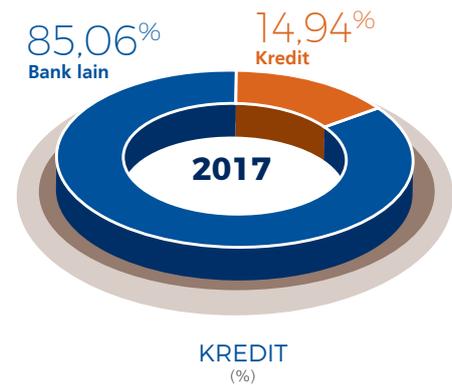
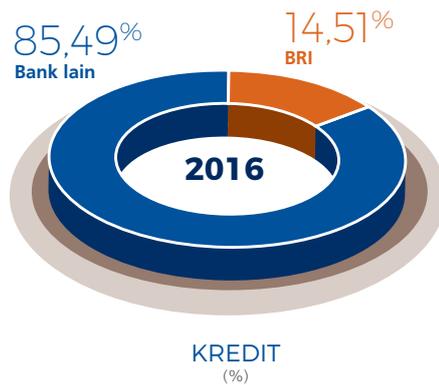
Pada tahun 2018, BRI melihat bahwa aktivitas komunikasi pemasaran akan menghadapi banyak tantangan dalam era digital marketing dimana potensi segmen muda akan semakin meningkat. Sehingga BRI merencanakan kegiatan komunikasi pemasaran sebagai berikut:

- Menciptakan keselarasan antara *Corporate Brand & Product Brand* guna menghindari ketidaksesuaian pandangan pelanggan.
- Menciptakan *value proposition* produk-produk BRI sebagai produk digital dan transaksional
- Menjaga konsistensi dalam berkomunikasi membangun *value proposition* brand produk-produk BRI.
- Mengutamakan komunikasi pemasaran terhadap produk unggulan BRI untuk meningkatkan nilai produk.
- Optimalisasi pencarian *data/insight* sebagai referensi dalam memberikan informasi kepada pelanggan melalui komunikasi pemasaran baik *Above The Line/ Below the Line*.
- Memaksimalkan Omni Channel untuk meningkatkan *awareness* dan *engagement level of customer*
- Memperkuat *campaign* melalui *channel digital* (*digital placement, social media, email blast* dan *sms blast*).

### Kinerja Pangsa Pasar BRI terhadap Industri Perbankan



## TINJAUAN KEUANGAN



### Kebijakan Dividen

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) merupakan organ tertinggi perusahaan yang memutuskan penentuan besaran dividen. Penentuan besarnya dividen ini diputuskan dengan pertimbangan proyeksi pertumbuhan bisnis kedepan, pemenuhan rasio kecukupan modal dan faktor *sustainable* ROE dalam tiga tahun ke depan.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diadakan pada tanggal 15 Maret 2017, Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2016 adalah sebesar Rp28,47 triliun. Pemegang saham menyetujui pembagian dividen sebesar 40% dari Laba Bersih atau Rp10,48 triliun. Jumlah dividen kas per saham sebesar Rp428,61 dan dibayarkan pada tanggal 13 April 2017 kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017.

Keterangan	2016	2017
Laba Bersih (Rp miliar)	25.398	26.196
Persentase Pembagian Dividen (%)	30	40
Dividen Kas per Saham (Rp penuh)	312	429
Tanggal Pembayaran	22 Apr 16	13 Apr 17



## TINJAUAN KEUANGAN

### Kontribusi Bagi Negara

BRI sebagai bank yang fokus pada pembiayaan UMKM telah berkontribusi dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan. Selain menyalurkan pembiayaan, BRI juga terus mengembangkan jaringan layanan terutama berbasis digital untuk meningkatkan akses keuangan (*financial inclusion*) dan literasi keuangan di tengah masyarakat. Sebagai bank dengan jaringan pelayanan terbesar di Tanah Air, BRI telah menjaga kedaulatan bangsa dengan melayani nasabah yang berada di pulau terluar dan terpencil.

Pencapaian usaha BRI yang terus tumbuh positif telah berkontribusi langsung pada pendapatan negara melalui pembayaran pajak rutin setiap tahun, maupun melalui setoran dividen kepada Pemerintah RI sebagai pemegang saham utama BRI.

Rincian pembayaran pajak dan dividen oleh BRI untuk periode tahun 2015 – 2017 adalah sebagai berikut:

(Rp juta)

No	Jenis Pajak	2015	2016	2017
1	PPh Pasal 21	694.089	1.029.521	834.583
2	PPh Pasal 22	24.298	33.817	20.789
3	PPh Pasal 23	106.900	104.646	133.348
4	PPh Pasal 26	494.881	756.000	959.794
5	PPh Final pasal 4 ayat (2)	3.117.009	3.775.381	3.904.048
6	PPN & PPnBM	56.190	62.773	70.607
7	Bea Materai	31.797	53.431	37.764
	Sub Jumlah Pajak Potput	4.525.164	5.815.569	5.960.932
8	PPh Badan (Corporate Tax)	5.914.612	7.461.426	10.364.586
9	PPh Final Revaluasi Aset Tetap	245.357	245.478	-
10	STP PPH Badan 2014 (Pembatalan Th 2016)	1.603.100	-	-
11	Dividen	4.162.776	4.323.965	5.946.440
	Jumlah (Pajak + Dividen)	16.451.009	17.846.438	22.271.959

Sepanjang tahun 2017, BRI senantiasa mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang terkait pembayaran pajak perusahaan, baik dari sisi jumlah pembayaran maupun ketepatan waktu pembayaran. Hal ini merupakan bagian dari praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

### Program Kepemilikan Saham Oleh Manajemen Dan/Atau Karyawan

Pada tahun 2017, BRI tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen dan/atau karyawan yang masih berjalan.

BRI memiliki Program Kepemilikan Saham berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 3 Oktober 2003, pemegang saham BRI menyetujui pelaksanaan Program Opsi Pembelian Saham bagi *Management (Management Stock Option Plan/ MSOP)*. Jumlah saham yang diterbitkan dalam MSOP BRI tercatat sebanyak 588.235.250 lembar. Pelaksanaan MSOP tersebut dilakukan dalam tiga tahap dimana masa *exercise* MSOP Tahap I dan II telah berakhir masing-masing pada tanggal 9 November 2008 dan 9 November 2009 sedangkan MSOP Tahap III berakhir pada 9 November 2010.

Saham MSOP yang telah di-*exercise* sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan MSOP adalah sebesar 569.876.000 lembar. Sampai dengan akhir masa *exercise*, terdapat 4,3 juta lembar MSOP Tahap I, 5,2 juta lembar MSOP Tahap II dan 8,8 juta lembar MSOP Tahap III yang tidak di-*exercise*. Pelaksanaan ketiga tahap MSOP tersebut mengacu pada

## TINJAUAN KEUANGAN

Peraturan Bapepam-LK No.IX.D.4 dan Peraturan BEI No. 1-A Lamp. Keputusan Direksi BEJ No.Kep.305/BEJ/07-2004 tentang Pencatatan Efek.

### Penggunaan Dana Penawaran Umum

BRI melaksanakan penawaran umum perdana saham (*Initial Public Offering* atau IPO) pada 10 November 2003. Sesuai dengan penjelasan pada prospektus IPO, perincian penggunaan dana yang diperoleh dari IPO yakni sebesar Rp1,47 triliun adalah sebagai berikut:

(Rp miliar)

No	Penggunaan Proceed IPO	Rencana	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Pencapaian
1	Upgrade Core Banking dan IT System	883,27	196,24	564,35	646,96	698,87	723,36	883,27	100%
2	Ekspansi jaringan kerja	441,63	213,68	419,34	441,63	441,63	441,63	441,63	100%
3	Riset dan pengembangan produk	147,21	147,21	147,21	147,21	147,21	147,21	147,21	100%
	Total	1.472,11	557,13	1.130,90	1.235,80	1.312,20	1.312,20	1.472,211	100%

Pada 31 Desember 2017, tidak terdapat saldo dana hasil penawaran umum dikarenakan seluruh dana IPO BRI telah digunakan seluruhnya pada tahun 2009.

### Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/ atau Transaksi dengan Pihak Berelasi

BRI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan dalam kegiatan normal usaha. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Tabel berikut menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Perseroan beserta sifat dari transaksi tersebut:

Pihak-pihak berelasi	Jenis Hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	Kepemilikan saham mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI	Efek-efek, Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah
PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur	Hubungan kepemilikan melalui Dana Pensiun BRI	Asuransi atas aset tetap
PT Bahana Artha Ventura	Hubungan kepemilikan	Penyertaan saham
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Asuransi atas aset tetap
BDH Khusus Bialugri Kementerian Pertahanan	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
Bendahara Khusus Direktorat Angkatan Darat (DITKUAD)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek
Perum Bulog	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor, Kredit yang diberikan

Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

▶ Analisa &amp; Pembahasan Manajemen



## TINJAUAN KEUANGAN

Pihak-pihak berelasi	Jenis Hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
Perum Djawatan Angkoetan Motor Republik Indonesia (DAMRI)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan syariah
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi
PT Aero Systems Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor
PT Bank BNI Syariah	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Efek-efek, Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Efek-efek
PT Bank Syariah Mandiri	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor, Kredit yang diberikan, Garansi yang diterbitkan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Indonesia Power	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Inti Pindad Mitra Sejati	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor
PT Inti Konten Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan syariah
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, Garansi yang diterbitkan
PT Koperasi Karyawan BRI Syariah	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan syariah
Koperasi Swakarya BRI	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan syariah
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor, Kredit yang diberikan, Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi
PT Pegadaian (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Kredit yang diberikan, Piutang dan pembiayaan syariah
PT Pembangkitan Jawa Bali	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi, Garansi yang diterbitkan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Pertamina (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor, Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi, Garansi yang diterbitkan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Pertamina Lubricants	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan

## TINJAUAN KEUANGAN

Pihak-pihak berelasi	Jenis Hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, Garansi yang diterbitkan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Pindad (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor, Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Pindad Enjiniring Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Railink	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Semen Indonesia Logistik	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Telekomunikasi Seluler	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi, Garansi yang diterbitkan
PT Waskita Beton Precast Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan syariah
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi, Garansi yang diterbitkan
PT Wijaya Karya Industri Energi	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi,
Karyawan kunci	Hubungan pengendalian kegiatan perusahaan	Kredit yang diberikan, Piutang dan pembiayaan syariah

Adapun transaksi dengan pihak berelasi yang dimiliki oleh Perseroan terdiri dari transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dengan pemerintah Republik Indonesia digambarkan dalam tabel berikut:

	(Rp juta)	
	2016	2017
<b>Aset</b>		
Giro pada Bank Lain	22.848	21.244
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	459.620	332.500
Efek-efek	101.046.956	134.129.616
Tagihan Wesel Ekspor	240.712	10.695
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	3.318.434	3.317.840
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	229.983	-
Kredit yang Diberikan	93.712.615	96.236.121
Piutang dan Pembiayaan Syariah	506.838	997.098
Tagihan Akseptasi	494.645	1.313.237
Penyertaan Saham	-	71.382
Total Aset dari Pihak-pihak Berelasi	200.032.651	236.429.733
Total Aset Konsolidasian	1.003.644.426	1.126.248.442
Persentase Total Aset Pihak Berelasi terhadap Total Aset	19.93%	20.99%
<b>Liabilitas</b>		
Giro	44.508.984	45.096.920
Tabungan	111.485	239.713



## TINJAUAN KEUANGAN

	(Rp juta)	
	2016	2017
Deposito Berjangka	79.990.772	95.445.443
Simpanan dari Bank Lain dan Lembaga	499.475	1.146.162
Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	1.454.477	1.465.014
Liabilitas Akseptasi	494.645	1.313.237
Pinjaman yang Diterima	100.000	-
Kompensasi kepada Manajemen Karyawan	593.984	454.697
Total Liabilitas kepada Pihak-pihak Terelasi	127.753.822	145.161.186
Total Liabilitas Konsolidasian	856.831.836	958.900.948
Persentase Total Liabilitas pihak Berelasi terhadap Total Liabilitas Konsolidasian	14,91%	15,14%
Komitmen dan Kontinjensi pada Rekening Administratif		
Garansi yang diterbitkan	13.999.372	17.517.421
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	6.454.116	5.792.910
Total Garansi yang diterbitkan dan L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	20.453.488	23.310.331
Total Komitmen dan Kontinjensi pada Rekening Administratif	29.225.977	32.169.325
Persentase total Garansi yang diterbitkan dan L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan pada Rekening Administratif pihak berelasi terhadap total Garansi yang diterbitkan dan	69,98%	72,46%
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan pada Rekening Administratif		

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, BRI (Entitas Induk) telah mengasuransikan aset tetap kepada PT Asuransi Bringham Sejahtera Artamakmur dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (pihak berelasi).

## Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, Atau Restrukturisasi Hutang Dan Modal

### Investasi

Pada tahun 2017, BRI melakukan investasi dengan pembelian tanah sebesar Rp340,37 miliar, penambahan bangunan sebesar Rp617,48 miliar, penambahan kendaraan baik roda empat maupun roda dua sebesar Rp84,03 miliar, komputer dan mesin sebesar Rp750 miliar, perlengkapan kantor sebesar Rp125,05 miliar dan belanja modal terkait satelit sebesar Rp183,88 miliar.

### Ekspansi

Selama tahun 2017 perusahaan melakukan pembukaan 1 kantor cabang, 1 kantor cabang pembantu, 2 BRI unit dan 8 Kantor Kas. Namun sebagian dari penambahan jaringan kantor tersebut merupakan upgrade dari Teras BRI sehingga sepanjang tahun 2017, BRI telah menutup sebanyak 9 teras BRI. Kegiatan ekspansi ini diprioritaskan untuk memperluas jangkauan BRI dalam memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat terutama di daerah yang belum memiliki layanan perbankan.

## TINJAUAN KEUANGAN

### Divestasi

Selama tahun 2017, BRI tidak melakukan kegiatan divestasi.

### Akuisisi

Pada tahun 2017, penyertaan saham BRI tercatat Rp73,82 miliar, tumbuh signifikan dibanding tahun 2016 sebesar Rp2,44 miliar. Peningkatan ini terjadi karena BRI melakukan investasi di perusahaan modal ventura yaitu PT Bahana Artha Ventura dengan memiliki saham sejumlah 71.207 lembar saham atau senilai Rp71,38 miliar. Kepemilikan PT Bahana Artha Ventura pada 31 Desember 2017 adalah 64,65% dimiliki oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, 35% dimiliki oleh BRI dan 0,35% dimiliki oleh Koperasi Karyawan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Akuisisi PT Bahana Artha Ventura merupakan langkah yang dilakukan BRI untuk memberikan pelayanan keuangan yang terintegrasi terhadap nasabahnya. Dengan *brand awareness*, *customer base* dan jaringan kerja BRI yang luas diharapkan mampu meningkatkan kinerja dari PT Bahana Artha Ventura melalui sinergi bisnis dengan BRI.

### Restrukturisasi Utang dan/atau Restrukturisasi Modal

Selama tahun 2017, BRI tidak melakukan restrukturisasi utang maupun restrukturisasi modal.

### Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

No.	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak BRI
1.	POJK Nomor 42/POJK.03/2017 Tgl. 12 Juli 2017	Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank secara tertulis yang wajib disetujui oleh dewan komisaris Bank.</li> <li>kebijakan perkreditan atau pembiayaan paling sedikit memuat dan mengatur hal pokok, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan;</li> <li>organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan;</li> <li>kebijakan persetujuan Kredit atau Pembiayaan;</li> <li>dokumentasi dan administrasi Kredit atau Pembiayaan;</li> <li>pengawasan Kredit atau Pembiayaan; dan</li> <li>penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah</li> </ol> </li> <li>Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank yang telah disusun dalam pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan dan pengelolaan perkreditan atau pembiayaan secara konsekuen dan konsisten.</li> <li>Bank dalam melakukan penyusunan kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank wajib memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Adapun dalam pembuatan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) paling sedikit memuat semua aspek-aspek yang ditetapkan dalam lampiran Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) ini.</li> </ol>	Sehubungan dengan terbitnya POJK dimaksud, BRI telah melakukan penyesuaian ketentuan terkait dengan Kebijakan Perkreditan Bank.

Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

▶ Analisa &amp; Pembahasan Manajemen



## TINJAUAN KEUANGAN

No.	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak BRI
2.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI Nomor 19/6/PADG/2017 Tgl. 31 Mei 2017	Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank yang mengalami Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek dapat mengajukan permohonan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) kepada Bank Indonesia dengan syarat tergolong sebagai Bank solven, memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 2 (dua) sesuai penilaian OJK, memiliki agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJP, dan diperkirakan mampu untuk mengembalikan PLJP.</li> <li>2. Bank Indonesia memberikan PLJP untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender untuk setiap periode pemberian PLJP efektif sejak tanggal aktivasi pemberian PLJP oleh Bank Indonesia dan dapat diperpanjang secara berturut-turut untuk jangka waktu PLJP keseluruhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.</li> <li>3. Bank Indonesia mengenakan bunga secara harian kepada Bank atas baki debit PLJP dengan menggunakan tingkat suku bunga repurchase agreement rate untuk lending facility yang berlaku pada tanggal aktivasi pemberian PLJP ditambah margin sebesar 400 (empat ratus) basis poin. Rumus perhitungan bunga PLJP à Bunga = Baki Debet x (Lending Facility + 400 bp) x jumlah hari kalender/360.</li> <li>4. Selama periode pemberian PLJP Bank hanya dapat mengikuti operasi moneter Bank Indonesia yang bersifat ekspansi.</li> <li>5. Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Dewan Anggota Gubernur dimaksud akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, PLJP tidak dapat diperpanjang, tidak dapat mengajukan PLJP dalam jangka waktu tertentu, penghentian sementara dari kepesertaan operasi moneter, dan penurunan status kepesertaan SKNBI, BI-RTGS, dan BI-SSSS.</li> </ol>	Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Anggota Dewan Gubernur tersebut, maka BRI akan memperhatikan peraturan tersebut apabila BRI memerlukan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) kepada Bank Indonesia.

## TINJAUAN KEUANGAN

No.	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak BRI
3.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017	Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.</li> <li>Penerapan Keuangan Berkelanjutan sebagaimana butir 1 di atas dilakukan dengan menggunakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>prinsip investasi bertanggung jawab;</li> <li>prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan;</li> <li>prinsip pengelolaan risiko sosial dan Lingkungan Hidup;</li> <li>prinsip tata kelola;</li> <li>prinsip komunikasi yang informatif;</li> <li>prinsip inklusif;</li> <li>prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas; dan</li> <li>prinsip koordinasi dan kolaborasi.</li> </ol> </li> <li>Untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas, LJK wajib menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</li> <li>Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada butir 3 wajib disampaikan setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> <li>pada waktu yang sama dengan penyampaian rencana bisnis bagi LJK yang diwajibkan untuk menyampaikan rencana bisnis sebagai bagian dari rencana bisnis atau dalam dokumen terpisah; dan</li> <li>paling lambat tanggal 31 Januari bagi LJK yang tidak diwajibkan untuk menyampaikan rencana bisnis.</li> </ol> </li> <li>Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.</li> <li>LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menyusun Laporan Keberlanjutan.</li> <li>Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada butir 6 di atas disusun secara terpisah dari laporan tahunan atau sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan.</li> <li>Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada butir 6 di atas wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun paling lambat sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan yang berlaku untuk masing-masing LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.</li> <li>Dalam hal LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik menyampaikan Laporan Keberlanjutan secara terpisah dari laporan tahunan, Laporan Keberlanjutan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya.</li> </ol>	BRI akan melakukan penyesuaian ketentuan terkait dengan Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik dimaksud.
4.	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/7/2017 Tgl. 5 Juli 2017	Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terdapat perubahan kriteria Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan (butir f dan g) menjadi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Telah Melakukan kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan;</li> <li>belum memenuhi persyaratan perbankan atau Lembaga Keuangan Non Bank.</li> </ol> </li> <li>Terdapat perubahan pengaturan jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan, yaitu semula maksimum sebesar Rp.75.000.000 menjadi maksimum sebesar Rp.200.000.000.</li> <li>Terdapat perubahan penetapan jasa administrasi atas pinjaman dana program kemitraan yang semula 6% menjadi 3%.</li> <li>Terdapat ketentuan perihal mekanisme pemberian pinjaman tanpa bunga atau hibah dana Program Kemitraan kepada BUMN Khusus.</li> </ol>	BRI telah melakukan penyesuaian ketentuan terkait dengan Kebijakan Kredit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

▶ Analisa &amp; Pembahasan Manajemen



## TINJAUAN KEUANGAN

No.	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak BRI
5.	POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tanggal 5 Mei 2017	Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan adanya POJK ini, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.</li> <li>2. Kantor Pusat Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan. Laporan Debitur wajib mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Debitur;</li> <li>b. Fasilitas Penyediaan Dana;</li> <li>c. agunan;</li> <li>d. penjamin;</li> <li>e. pengurus dan pemilik; dan</li> <li>f. keuangan Debitur (dilaporkan dalam hal Debitur merupakan perusahaan atau pihak yang menerima Fasilitas Penyediaan Dana dari 1 (satu) Pelapor dan/atau pembiayaan bersama lebih dari 1 (satu) Pelapor, dengan jumlah seluruh Fasilitas Penyediaan Dana paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000,00).</li> </ol> </li> <li>3. Pelapor baru wajib menyampaikan Laporan Debitur untuk pertama kali kepada OJK paling lambat tanggal 12 pada bulan keempat terhitung sejak ditetapkan sebagai pelapor oleh OJK.</li> <li>4. Pelapor dilarang menggunakan Informasi Debitur yang diperoleh untuk keperluan Pelapor selain dalam rangka: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mendukung kelancaran proses pemberian Fasilitas Penyediaan Dana;</li> <li>b. menerapkan manajemen risiko; dan/atau</li> <li>c. mengidentifikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang berwenang.</li> </ol> </li> <li>5. Pelapor wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.</li> <li>6. Pelapor wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai permintaan dan penggunaan Informasi Debitur.</li> <li>7. Dalam rangka menyelesaikan pengaduan mengenai ketidak-akuratan Informasi Debitur, Pelapor wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis.</li> <li>8. Pelapor wajib menunjuk pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang mencakup fungsi untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyampaikan Laporan Debitur;</li> <li>b. melakukan verifikasi Laporan Debitur;</li> <li>c. mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur;</li> </ol> </li> <li>9. Dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, maka timbul sanksi bagi BRI apabila tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK ini.</li> </ol>	BRI telah melakukan penyesuaian ketentuan terkait beralihnya Sistem Informasi Debitur BI menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK.

## TINJAUAN KEUANGAN

No.	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak BRI
6.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2017 Tgl. 12 Juli 2017	Pembatasan Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Untuk Pengadaan Tanah dan/ atau Pengolahan Tanah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latar Belakang. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laju pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan yang berlebihan pada sektor properti merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kestabilan moneter dan kesehatan perbankan.</li> <li>b. Pemberian kredit atau pembiayaan untuk pengadaan tanah dan pengolahan tanah merupakan unsure yang banyak mendorong pertumbuhan yang berlebihan dari kredit atau pembiayaan sektor properti.</li> </ol> </li> <li>2. Tujuan Pemberian Kredit. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengalihan Kredit atau Pembiayaan dari Pengembang kepada suatu Pengembang lain untuk penyelamatan sepanjang tidak menambah saldo Kredit atau Pembiayaan.</li> <li>b. Perpanjangan jangka waktu Kredit atau Pembiayaan untuk penyelamatan, tanpa menambah saldo Kredit atau Pembiayaan.</li> <li>c. Pemberian Kredit atau Pembiayaan dan/atau pembelian atau penjaminan Surat Berharga atau Surat Berharga Syariah dari Pengembang untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah guna pembangunan Rumah Sederhana.</li> </ol> </li> <li>3. Pelaporan. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bank melaporkan setiap pemberian kredit atau pembiayaan kepada pengembang secara online melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.</li> </ul> </li> </ol> <p>Sanksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank yang memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada Pengembang untuk Pengadaan Tanah/ Pengolahan Tanah bukan bertujuan pembangunan Rumah Sederhana dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% dari jumlah Kredit atau Pembiayaan yang diberikan.</li> <li>• Bank yang memperhitungkan nilai tanah menjadi Sharing Dana Sendiri (SDS) dikenakan sanksi administrative berupa denda 10% dari nilai tanah yang diperhitungkan dalam pembiayaan sendiri.</li> <li>• Bank yang memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada Pengembang dimana bukti pemilikan tanah bukan atas nama Pengembang dan Pengembang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maka bank tersebut dikenakan sanksi administrative berupa denda sebesar 10% dari jumlah Kredit atau Pembiayaan yang disetujui.</li> </ul>	Sehubungan dengan terbitnya POJK dimaksud, BRI akan melakukan penyesuaian ketentuan terkait dengan Pembatasan Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Untuk Pengadaan Tanah dan/ atau Pengolahan Tanah dimaksud.



## TINJAUAN KEUANGAN

No.	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak BRI
7.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2017 Tgl. 4 April 2017	Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik	<ul style="list-style-type: none"> <li>POJK ini mengatur mengenai kewajiban bagi bank sistemik untuk menyusun rencana aksi (recovery plan) serta mengimplementasikan rencana aksi (recovery plan) tersebut dalam hal terjadi trigger level yang telah ditetapkan.</li> <li>Rencana Aksi paling sedikit memuat :               <ol style="list-style-type: none"> <li>Ringkasan eksekutif</li> <li>Gambaran umum Bank Sistemik</li> <li>Opsi Pemulihan (Recovery Options)</li> <li>Pengungkapan Rencana Aksi (Recovery Plan)</li> </ol> </li> <li>Bank sistemik wajib melakukan evaluasi dan pengujian (stress testing) dan pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) secara berkala.</li> </ul>	BRI sebagai salah Bank Sistemik telah menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi (Recovery Plan) kepada OJK.
8.	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-03/MBU/08/2017 Tanggal 21 Agustus 2017	Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Negara	<p>BUMN yang bertindak sebagai pihak yang mencari Mitra dalam sebuah Kerjasama antar BUMN wajib memiliki SOP yang ditetapkan oleh Direksi dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. SOP dimaksud paling sedikit mengatur mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mekanisme pemilihan Mitra, termasuk mekanisme penunjukkan langsung.</li> <li>Dokumen yang diperlukan, antara lain studi kelayakan (mencakup manfaat paling optimal yang diperoleh BUMN), rencana bisnis (meliputi aspek operasional, financial, hukum dan pasar), kajian manajemen risiko dan mitigasi risiko</li> <li>Persyaratan/ kualifikasi mitra</li> <li>Tata waktu proses pemilihan Mitra paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja, sejak dokumen permohonan diajukan calon mitra diterima secara lengkap</li> <li>Mekanisme perpanjangan kerjasama, baik terhadap perjanjian yang telah berakhir, perjanjian yang sedang berjalan, maupun perjanjian yang akan datang; dan/ atau</li> <li>Materi perjanjian kerjasama yang melindungi kepentingan BUMN</li> </ol>	Kebijakan internal BRI yang mengatur mekanisme pemilihan mitra, akan disesuaikan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN.
9.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tgl. 30 November 2017	Penyelenggaraan Teknologi Finansial; ; Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Informasi	Penyelenggara Teknologi Finansial wajib melakukan pendaftaran pada Bank Indonesia. Pendaftaran dikecualikan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dan/atau Penyelenggara Teknologi Finansial yang berada di bawah kewenangan otoritas lain.	<p>Dampak pada Kewajiban-kewajiban baru bagi BRI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>BRI wajib menyampaikan Surat Pernyataan Kepatuhan dengan menggunakan format sebagaimana terlampir.</li> <li>Product Owner yang akan melakukan kerjasama dengan Penyelenggara Teknologi Finansial yang terdaftar wajib terlebih dahulu memintakan persetujuan kepada Bank Indonesia.</li> <li>BRI memiliki kewajiban baru dalam penyampaian laporan berkala terkait Penyelenggaraan Teknologi Finansial kepada Bank Indonesia yang disampaikan secara bulanan dan tahunan.</li> </ol>

## TINJAUAN KEUANGAN

No.	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak BRI
10.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/6/PBI/2017 tanggal 17 April 2017	Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional	GWM Primer Rupiah yang wajib dipenuhi Bank adalah rata-rata 6,5%, selama masa laporan tertentu yang dipenuhi : a. Secara harian 5%; dan b. Secara rata-rata untuk masa laporan tertentu 1,5%	BRI telah menyesuaikan dan memenuhi kewajiban GWM primer Rupiah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/6/PBI/2017 tanggal 17 April 2017.
11.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017	Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di Sektor Jasa Keuangan	Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan membahas antara lain sbb: 1. Dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan PJK wajib : a. memiliki kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, yang disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris. b. memantau penerapan kebijakan, pengawasan dan prosedur dan meningkatkan penerapannya jika diperlukan. c. menetapkan tindakan yang lebih mendalam untuk mengelola dan memitigasi risiko dalam hal risiko yang lebih tinggi teridentifikasi. d. menerapkan program APU dan PPT untuk mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi berdasarkan penilaian risiko dan yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK ini. 2. Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko PJK secara keseluruhan. 3. PJK wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko Pencucian Uang dan/ atau Pendanaan Terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko (meliputi pula Cross Border Correspondent Banking dan Transfer Dana)	BRI telah melakukan penyesuaian terhadap ketentuan tersebut dengan memperbaharui ketentuan tentang penerapan APU PPT di BRI

Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


**Analisa & Pembahasan Manajemen**

## TINJAUAN KEUANGAN

No.	Peraturan	Perihal	Keterangan	Dampak BRI
12.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tgl. 8 Mei 2017	Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan dari lembaga jasa keuangan (LJK) yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.</li> <li>LJK dan LJK lainnya wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasi sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan; dan</li> <li>laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang dikelola oleh LJK, LJK lainnya, dan/atau entitas lain dimaksud selama satu tahun kalender.</li> </ol> </li> <li>Dalam rangka penyampaian laporan, LJK dan LJK lainnya dan/atau entitas lain wajib melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.</li> <li>Bagi LJK, LJK lainnya, dan entitas lain serta Pimpinan dan/atau pegawai LJK, LJK lainnya, dan entitas lain, yang: <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak menyampaikan laporan ;</li> <li>tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar dan/atau</li> <li>tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). b Setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam laporan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</li> </ol> </li> </ol>	BRI akan melakukan identifikasi terhadap nasabah yang memiliki kewajiban pajak asing dan melakukan pelaporan kepada DJP BRI telah melakukan pengembangan sistem terkait dengan implementasi identifikasi nasabah yang memiliki kewajiban pajak asing (embeded) pada <i>core banking system</i> . BRI telah menyusun Petunjuk Pelaksanaan mengenai penerapan identifikasi nasabah yang memiliki kewajiban pajak asing

## TINJAUAN KEUANGAN

## Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi

BRI dan entitas anak telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2017, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan konsolidasian, yaitu:

Peraturan	Keterangan Perubahan	Pengaruh terhadap BRI dan Entitas Anak
Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa dan Pengungkapan"	memberikan klarifikasi terkait penerapan persyaratan materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan. Amandemen PSAK No. 1 ini juga mengakibatkan amandemen terhadap PSAK (consequential amendment) sebagai berikut: PSAK No. 3 "Laporan Keuangan Interim", PSAK No. 5 "Segmen Operasi", PSAK No. 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", dan PSAK No. 62 "Kontrak Asuransi.	BRI telah melakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan standar yang diisyaratkan. Penerapan amandemen PSAK No. 1 (Amandemen 2015) ini tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap pelaporan & pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi.
PSAK 3 (Penyesuaian 2016), "Laporan Keuangan Interim"	mengklarifikasi bahwa pengungkapan interim yang dipersyaratkan harus dicantumkan dalam laporan keuangan interim atau melalui referensi silang dari laporan keuangan interim seperti komentar manajemen atau laporan risiko yang tersedia untuk pengguna laporan keuangan interim dan pada saat yang sama. Jika pengguna laporan keuangan tidak dapat mengakses informasi yang ada pada referensi silang dengan persyaratan dan waktu yang sama maka laporan keuangan interim entitas dianggap tidak lengkap.	BRI telah melakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan standar yang diisyaratkan. Penerapan amandemen PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016) ini tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap pelaporan & pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi.
Amandemen PSAK No. 4, "Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri"	memperkenalkan penggunaan metode ekuitas sebagai salah satu metode pencatatan investasi pada entitas anak, ventura bersama dan entitas asosiasi dalam laporan keuangan tersendiri entitas tersebut.	Investasi BRI pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas yang telah disajikan dalam laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
PSAK 5 (Penyesuaian 2015), "Segmen Operasi"	menambahkan pengungkapan deskripsi singkat segmen operasi yang telah digabungkan dan indikator ekonomik memiliki karakteristik yang serupa.	BRI telah melakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan standar yang diisyaratkan.
PSAK 7 (Penyesuaian 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi"	menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi dan mengklarifikasi pengungkapan imbalan yang dibayarkan oleh entitas manajemen.	Penerapan PSAK 7 (Penyesuaian 2015) telah sesuai dengan perubahan standar yang diisyaratkan.
PSAK 13, (Penyesuaian 2015), "Properti Investasi"	memberikan klarifikasi bahwa PSAK 13 dan PSAK 22 saling mempengaruhi. Entitas dapat mengacu pada PSAK 13 untuk membedakan antara properti investasi dan properti yang digunakan sendiri. Entitas juga dapat mengacu pada PSAK 22 sebagai pedoman apakah akuisisi properti investasi merupakan kombinasi bisnis.	Penerapan penyesuaian PSAK 13 (Penyesuaian 2015) ini tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap pelaporan & pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi.
Amandemen PSAK 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi"	memberikan klarifikasi pada paragraf 36A tentang pengecualian konsolidasi untuk entitas investasi ketika kriteria tertentu terpenuhi.	BRI telah melakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan standar yang diisyaratkan.
Amandemen PSAK 16, "Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi"	memberikan tambahan penjelasan tentang indikasi perkiraan keusangan teknis atau komersial suatu aset. Amandemen PSAK 16 ini juga mengklarifikasi bahwa penggunaan metode penyusutan yang berdasarkan pada pendapatan adalah tidak tepat.	Penerapan amandemen PSAK No. 16 ini tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap pelaporan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi. BRI menerapkan metode penyusutan garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis aset tetap.
Amandemen PSAK 19, "Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi"	Amandemen PSAK 19 memberikan klarifikasi tentang anggapan bahwa pendapatan adalah dasar yang tidak tepat dalam mengukur pemakaian manfaat ekonomi aset takberwujud dapat dibantah dalam keadaan terbatas tertentu.	Penerapan amandemen PSAK No. 19 ini tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap pelaporan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi.



## TINJAUAN KEUANGAN

Peraturan	Keterangan Perubahan	Pengaruh terhadap BRI dan Entitas Anak
PSAK 22 (Penyesuaian 2015), "Kombinasi Bisnis"	<p>mengklarifikasi ruang lingkup dan kewajiban membayar imbalan kontinjensi yang memenuhi definisi instrumen keuangan diakui sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas.</p> <p>PSAK 22 (Penyesuaian 2015) juga mengakibatkan dampak penyesuaian terhadap PSAK sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran."</li> <li>– PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi."</li> </ul>	BRI tidak mengakui imbalan kontinjensi pada saat akuisisi awal ataupun setelah pengakuan awal. Penerapan PSAK No. 22 (Penyesuaian 2015) ini tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap pelaporan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi.
PSAK 24 (Penyesuaian 2016), "Imbalan Kerja"	mengklarifikasi bahwa pasar obligasi korporasi berkualitas tinggi dinilai berdasarkan denominasi mata uang obligasi tersebut dan bukan berdasarkan negara di mana obligasi tersebut berada.	BRI telah melakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan standar yang diisyaratkan. Penerapan PSAK 24 (Penyesuaian 2016) ini tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap pelaporan & pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi.
PSAK 25 (Penyesuaian 2015), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"	memberikan koreksi editorial pada PSAK 25 paragraf 27 tentang keterbatasan penerapan retrospektif.	Penerapan retrospektif PSAK 25 (Penyesuaian 2015) tidak berdampak pada pelaporan & pengungkapan laporan keuangan konsolidasi BRI, karena tidak ditemukan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan periode sebelumnya.
PSAK 53 (Penyesuaian 2015), "Pembayaran Berbasis Saham"	mengklarifikasi definisi kondisi vesting dan secara terpisah mendefinisikan kondisi kinerja dan kondisi jasa.	Penyesuaian PSAK No. 53 "Pembayaran Berbasis Saham" tahun 2015 memberikan klarifikasi definisi vesting dengan lebih jelas. Hal tersebut masih sesuai dengan Opsi saham yang diberikan BRI kepada direksi dan pekerja pada jabatan tertentu.
PSAK 58 (Penyesuaian 2016), "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan."	mengklarifikasi bahwa perubahan dari satu metode pelepasan ke metode pelepasan lainnya dianggap sebagai rencana awal yang berkelanjutan dan bukan sebagai rencana pelepasan baru. Penyesuaian ini juga mengklarifikasi bahwa perubahan metode pelepasan ini tidak mengubah tanggal klasifikasi sebagai aset atau kelompok lepasan.	BRI telah melakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan standar yang diisyaratkan.
PSAK 60 (Penyesuaian 2016), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"	mengklarifikasi bahwa entitas harus menilai sifat dari imbalan kontrak jasa sebagaimana dalam paragraf PP30 dan paragraf 42C untuk menentukan apakah entitas memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan dan apakah persyaratan pengungkapan terkait keterlibatan berkelanjutan terpenuhi.	BRI telah melakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan standar yang diisyaratkan.
Amandemen PSAK 65, "Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi"	Amandemen PSAK 65 ini mengklarifikasi tentang pengecualian konsolidasi untuk entitas investasi ketika kriteria tertentu terpenuhi.	BRI telah melakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan standar yang diisyaratkan.
Amandemen PSAK 66, "Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama"	Amandemen PSAK 66 mensyaratkan bahwa seluruh prinsip kombinasi bisnis dalam PSAK 22: Kombinasi Bisnis dan PSAK lain beserta persyaratan pengungkapannya diterapkan untuk akuisisi pada kepentingan awal dalam operasi bersama dan untuk akuisisi kepentingan tambahan dalam operasi bersama, sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman yang ada dalam PSAK 66.	BRI telah melakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan standar yang diisyaratkan.
Amandemen PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi	Amandemen PSAK 67 ini mengklarifikasi tentang pengecualian konsolidasi untuk entitas investasi ketika kriteria tertentu terpenuhi.	BRI telah melakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan standar yang diisyaratkan.
PSAK 68 (Penyesuaian 2015), "Pengukuran Nilai Wajar"	PSAK 68 (Penyesuaian 2015) mengklarifikasi bahwa pengecualian portofolio, yang memperkenankan entitas mengukur nilai wajar kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan secara neto, diterapkan pada seluruh kontrak (termasuk kontrak non-keuangan) dalam ruang lingkup PSAK 55.	Saat ini BRI tidak memiliki kontrak lain selain aset keuangan dan liabilitas keuangan yang terekspos risiko pasar atau risiko kredit pihak lawan Penerapan PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015) ini tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap pelaporan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi.

## TINJAUAN KEUANGAN

Peraturan	Keterangan Perubahan	Pengaruh terhadap BRI dan Entitas Anak
PSAK 70, "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak"	PSAK 70 memberikan pengaturan perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ("UU Pengampunan Pajak").	BRI telah melakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan standar yang diisyaratkan.
ISAK 31 "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi"	Exposure Draft ISAK 31 menjadi ISAK 31 tentang Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi.  ISAK 31 memberikan interpretasi atas karakteristik bangunan yang digunakan sebagai bagian dari definisi properti investasi dalam PSAK 13:Properti Investasi. Bangunan sebagaimana dimaksud dalam definisi properti investasi mengacu pada struktur yang memiliki karakteristik fisik yang umumnya diasosiasikan dengan suatu bangunan yang mengacu pada adanya dinding, lantai, dan atap yang melekat pada aset.	BRI telah melakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan standar yang diisyaratkan. Penerapan ISAK 31 ini tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap pelaporan & pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi.
PSAK No. 101 (Revisi 2016), "Penyajian Laporan Keuangan Syariah"	revisi terhadap ilustrasi laporan keuangan asuransi syariah sebagai dampak dari revisi PSAK No. 108 "Akuntansi Asuransi Syariah". Dimana penyisihan manfaat polis masa depan disajikan dilaporan posisi keuangan sebagai liabilitas.	BRI telah melakukan penyesuaian. Penerapan PSAK 101 (Revisi 2016) ini tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap pelaporan & pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi.
PSAK No. 102 (Amandemen 2016), "Akuntansi Murabahah", PSAK No. 103 (Amandemen 2016), "Akuntansi Salam", PSAK No. 104 (Amandemen 2016), "Akuntansi Istishna", PSAK No. 107 (Amandemen 2016), "Akuntansi Ijarah"	amandemen ini merubah definisi nilai wajar mengikuti definisi nilai wajar pada PSAK 68 "Pengukuran Nilai Wajar". Nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.	BRI telah melakukan penyesuaian. Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap pelaporan & pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi.
PSAK No. 108 (Revisi 2016), "Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah"	Revisi PSAK ini memberikan perubahan pengaturan terkait akuntansi asuransi syariah seperti pengakuan awal kontribusi peserta, perhitungan penyisihan teknis manfaat polis masa depan, serta penyajian atas revisi PSAK No. 108 pada laporan keuangan.	BRI telah melakukan penyesuaian. Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap pelaporan & pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi.

## Informasi Kelangsungan Usaha

BRI berpandangan bahwa potensi gangguan/bencana baik disebabkan oleh alam, perbuatan manusia maupun dampak teknologi dapat mengancam kelangsungan usaha.

Untuk menjaga kelangsungan usaha operasional, BRI memiliki kebijakan *Business Continuity Management* (BCM) yang dapat melindungi keamanan dan keselamatan jiwa pekerja BRI, nasabah, dan *stakeholders* lainnya yang berada di sekitara unit kerja operasional BRI (Rencana Penanggulangan Bencana), serta mempertahankan kelangsungan aktivitas bisnis operasional terpenting, menjaga aset BRI dan memiliki respons memadai ketika terjadi bencana (Rencana Kelangsungan Usaha). Kebijakan BCM diatur melalui surat edaran BRI No. S.26-DIR/DMR/12/2016.

Implementasi BCM yang mencakup seluruh unit kerja BRI dilakukan antara lain melalui:

- Pembentukan Tim Manajemen Krisis,
- Penyusunan *Call Tree*,
- Penetapan *alternate sites*.

Unit kerja BRI juga telah melakukan penilaian risiko dan ancaman bencana (PRAB) yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk menghadapi risiko bencana. Ujicoba BCM dilaksanakan setiap tahun dan diprioritaskan di unit kerja yang rawan bencana, termasuk didalamnya Gedung Kantor Pusat BRI, Gedung IT, Gedung *Corporate University* serta Asrama Siswa di Ragunan Jakarta Selatan.

Dengan dilakukannya ujicoba BCM setiap tahun, kesiapan BRI dalam memastikan kelangsungan usaha sudah teruji. Hal ini dibuktikan ketika terjadi beberapa bencana pada tahun 2017 seperti aktivitas Gunung Agung Bali dan gempa bumi dengan skala 6,2-SR di selatan Sukabumi yang berdampak pada operasional bisnis unit kerja BRI di Denpasar dan Pangandaran dapat tertangani dengan baik.



## PENGELOLAAN HUMAN CAPITAL



“

Pengelolaan *Human Capital* dilakukan dalam kerangka Transformasi BRIvolution untuk menjadikan BRI sebagai *The Most Valuable Bank In Southeast Asia & Home to The Best Talent*. ”

## PENGELOLAAN HUMAN CAPITAL

Komitmen BRI untuk memberikan layanan terbaik kepada pekerja dibuktikan dengan Sertifikasi ISO 9001:2008 untuk sistem manajemen mutu di bidang pembayaran kompensasi dan *benefit*, pengelolaan data pekerja dan komunikasi *Human Capital* dengan layanan berbasis teknologi yang cepat, tepat dan akurat.

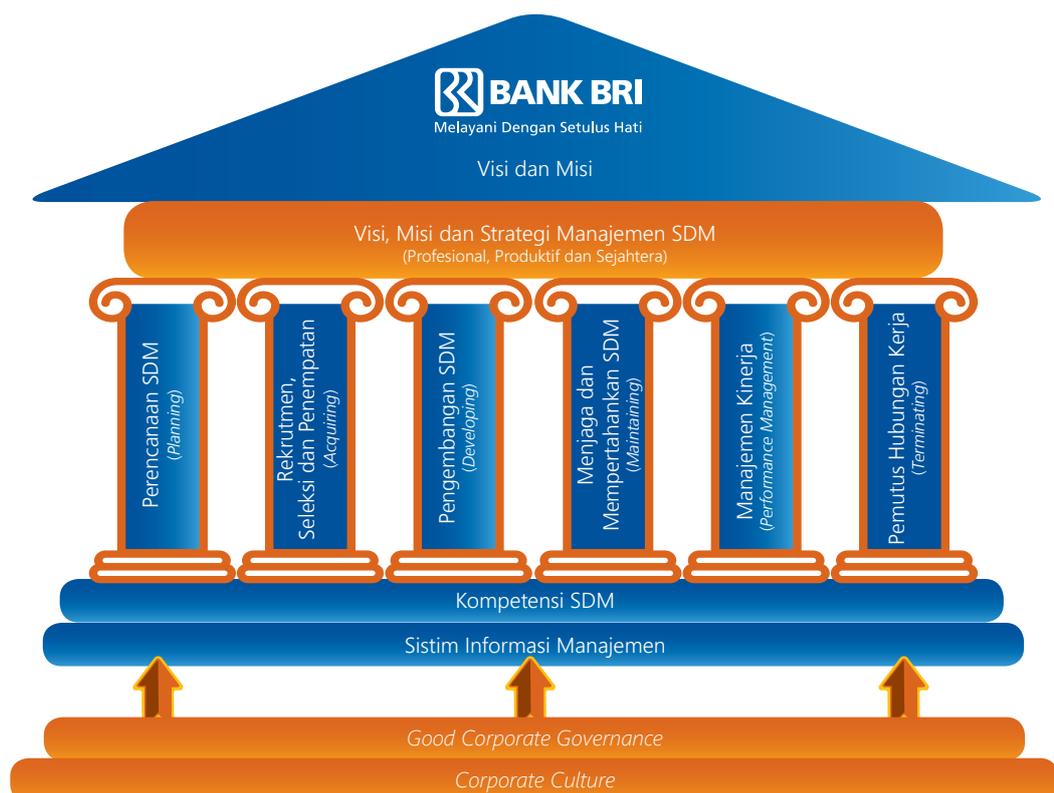
### Kebijakan Pengelolaan *Human Capital*

*Human Capital* berperan penting dalam meningkatkan kinerja dan merealisasikan target bisnis Perseroan. Bank BRI memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan kapabilitas pekerja dengan berlandaskan pada nilai-nilai inti Perseroan. Pengembangan dan pengelolaan *Human Capital* BRI mengacu pada rencana bisnis jangka panjang yang tertuang dalam *Corporate Plan* BRI yaitu menjadi *The Most Valuable Bank In Southeast Asia* dan *Home to The Best Talent* pada tahun 2022. BRI senantiasa menyelaraskan kebijakan dan strategi dalam mengelola *human capital* yang diawali dengan proses Transformasi pada tahun 2017.

BRI menerapkan kebijakan dan strategi pengelolaan *Human Capital* dalam kerangka *Arsitektur Human Capital* BRI dengan pilar-pilarnya yaitu *planning* (perencanaan), *acquiring* (rekrutmen, seleksi dan penempatan), *developing* (pengembangan *Human Capital*), *retaining and maintaining* (menjaga dan mempertahankan), *performance management* (manajemen kinerja), dan *termination* (pemutusan hubungan kerja).

Pengelolaan *Human Capital* yang berpedoman pada *Arsitektur Human Capital* ini disusun dalam peta jalan program kerja pengelolaan *Human Capital* yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan serta didukung oleh Sistem Informasi Manajemen (SIM) *Human Capital* yang *valid* dan akurat.

### Arsitektur *Human Capital*





## PENGELOLAAN HUMAN CAPITAL



Secara umum, strategi dalam mewujudkan “Home to The Best Talent” pada tahun 2022 dengan ukuran keberhasilan sebagai Top 5 *Employer of Choices di Indonesia* serta peningkatan skor *employee engagement* dan tingkat produktivitas pekerja yang kompetitif dibandingkan dengan peers.

### Strategi Pengelolaan *Human Capital*

Untuk memastikan kebijakan pengelolaan *Human Capital* berjalan sesuai dengan rencana, diperlukan strategi operasional yang tepat dan sesuai karakteristik serta budaya kerja Perseroan. Implementasi strategi pengelolaan *Human Capital* yang tepat akan berdampak pada kepuasan (*satisfaction*), keterikatan (*engagement*) dan (*productivity*) produktivitas pekerja yang akan berpengaruh secara langsung terhadap kinerja bisnis Bank.

Pada tahun 2017, BRI menerapkan strategi operasional pengelolaan *Human Capital* meliputi:

#### Komunikasi dengan Pekerja

BRI terus berupaya untuk membangun komunikasi yang efektif antara manajemen dengan pihak pekerja melalui berbagai saluran seperti kegiatan tatap muka secara langsung, *video conference*, Sistem Informasi Portal *Human Capital* (BRISTARS), media *e-learning*, *audio visual*, *call center Human Capital* dan membangun *helpdesk* bidang *Human Capital* dan *call center SD*. *Helpdesk* ini berfungsi untuk memberikan layanan konsultasi mengenai berbagai permasalahan terkait *Human Capital*.

### Hubungan Industrial

Jalinan komunikasi industrial yang harmonis akan berdampak positif dalam menjaga suasana kerja yang kondusif. Dalam hubungan industrial ini BRI senantiasa menjunjung prinsip dasar, yaitu:

- Penghormatan terhadap Hak Asasi Pekerja dimana BRI menjamin hak pekerja untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat.

#### Kebijakan Kebebasan Berserikat

BRI senantiasa berupaya untuk mendorong terciptanya Hubungan Industrial yang berkualitas dan harmonis dengan Serikat Pekerja (SP) sebagai perwakilan dari Pekerja. Melalui Forum Kerjasama Bipartit yang rutin diadakan dengan Serikat Pekerja, Pekerja dapat menyampaikan aspirasi kepada perusahaan sehingga komunikasi dua arah antara perusahaan dan Pekerja tetap terjaga.

Komitmen BRI untuk menjaga keharmonisan hubungan industrial diwujudkan melalui hal-hal berikut:

- a. Penerbitan kebijakan tentang Forum Kerja Sama Bipartit dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang untuk mengomunikasikan kebijakan-kebijakan Bank dan atau menampung segala aspirasi/usulan dari pekerja demi kemajuan Bank; koordinasi antara Manajemen selaku wakil Bank dengan pekerja sehingga dapat menyelaraskan kepentingan BRI dengan kepentingan pekerja; serta mendeteksi secara

## PENGELOLAAN HUMAN CAPITAL

dini adanya permasalahan-permasalahan di setiap Unit Kerja Bank dan mencegah timbulnya perselisihan hubungan industrial.

- b. Pertemuan berkala antara Pengurus Serikat Pekerja Nasional dengan Manajemen tingkat Pusat guna membahas kebijakan-kebijakan Bank dan atau menampung segala aspirasi/usulan dari pekerja demi kemajuan Bank.
  - c. *Monitoring* Forum Bipartit antara Serikat Pekerja dan Manajemen di tingkat wilayah oleh Manajemen tingkat Pusat guna mendeteksi secara dini adanya permasalahan-permasalahan di setiap Unit Kerja Perusahaan dan mencegah timbulnya perselisihan hubungan industrial.
- Penerapan Asas Kesetaraan.

#### Kebijakan Anti Diskriminasi

BRI menuangkan kebijakan anti diskriminasi sejak proses rekrutmen, pengembangan kompetensi dan keahlian, serta penetapan jenjang karir dan remunerasi. Penerapan Asas Kesetaraan dilakukan dengan memberikan kesempatan dan kesamaan hak kepada seluruh pekerja, tanpa membedakan suku, agama, dan ras (SARA), gender, serta kondisi fisik dalam pengelolaan *Human Capital*.

BRI memberikan kesempatan berkarya bagi pekerja yang mempunyai keterbatasan atau penyandang disabilitas. Peluang kerja penyandang disabilitas disesuaikan dengan tingkat keahlian dan keterampilan masing-masing, seperti petugas administrasi, *call center*, *help desk*. Pada tahun 2017, sebanyak 100 orang bekerja sebagai jabatan pelaksana, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 70 orang. Peningkatan ini sesuai dengan target BRI.

Pada pengembangan karir, BRI melakukan evaluasi kinerja kepada seluruh pekerja tetap pria dan wanita di semua lapisan jabatan secara berkala setiap tahun. Penilaian kinerja pekerja tetap dilakukan secara terpadu berbasis *Balanced Score Card* (BSC) melalui Sistem Manajemen Kinerja (SMK), sedangkan pekerja alih daya (*outsource*) dilakukan secara manual.

Penilaian kinerja pekerja tetap mencakup dua sisi, yakni pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) dan pencapaian standar kompetensi.

- Kebijakan Pengelolaan Alihdaya  
Ruang lingkup yang diatur dalam pengelolaan pekerja alih daya meliputi:
  - Pemberian upah minimum sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Regional
  - Penyediaan asuransi kesehatan
  - Penyediaan upah lembur dengan waktu lembur maksimal 16 jam dalam satu minggu.
  - Kebebasan menjadi anggota dan menyalurkan aspirasi dalam Serikat Pekerja BRI
  - Usia minimum sesuai ketentuan UU ketenagakerjaan
  - Penerapan kebijakan anti-diskriminasi
  - Pemberian bonus atau insentif berbasis kinerja
  - Penerapan hukuman disiplin disesuaikan dengan ketentuan internal BRI

#### Program Keberagaman

Dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mendukung program keberagaman, BRI memberikan dukungan kepada pekerja dalam kegiatan keagamaan dan budaya atau adat istiadat. Salah satu bentuk dukungan tersebut melalui alokasi anggaran pengembangan jasmani dan rohani yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan peringatan kegiatan keagamaan tersebut.

#### Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Pada tahun 2017, BRI bersama Serikat Pekerja telah melakukan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2017-2019 di mana dalam PKB ini telah disepakati bersama hal-hal terkait ketentuan administratif kepegawaian, hak, kewajiban, benefit, dan fasilitas Pekerja. Mekanisme hubungan industrial yang diterapkan merupakan upaya yang berkelanjutan dari komitmen pekerja dalam menjaga keselarasan antara BRI dan Pekerja. PKB ini telah mendapat pengesahan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.



## PENGELOLAAN HUMAN CAPITAL

### Penanganan Keluhan Pekerja

Selain melalui Forum Kerjasama Bipartit, BRI juga menyediakan sarana bagi Pekerja yang membutuhkan sumber informasi seputar *Human Capital* ataupun konseling. Perusahaan menyediakan layanan *Call Center Human Capital* yang dapat diakses melalui media komunikasi telepon dan sub-menu Konsultasi *Human Capital* yang dapat diakses melalui aplikasi BRISTARS masing-masing Pekerja. Seluruh layanan yang disediakan oleh BRI ini telah tersertifikasi ISO 9001:2008.

### Monitoring Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin

BRI memfasilitasi pelaporan pelanggaran disiplin oleh pekerja melalui *Whistle Blowing System (WBS)* yang langsung dimonitor oleh manajemen puncak sebagaimana dijelaskan dalam Bab Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Manajemen berkomitmen untuk menegakkan disiplin perusahaan sebagai bagian dalam membentuk suasana dan etos kerja yang baik. Untuk itu, manajemen telah membuat sistem otomatisasi aplikasi portal Hubungan Industrial *online* yang mengintegrasikan seluruh unit kerja BRI. Sistem ini memungkinkan Manajemen Kantor Pusat untuk memantau penyelesaian kasus pelanggaran disiplin di seluruh Unit Kerja.

### Fokus Pengelolaan *Human Capital* Tahun 2017

Perusahaan menitikberatkan pengelolaan *Human Capital* pada tahun 2017 pada beberapa area dalam rangka mempersiapkan milestone menuju "*Home to The Best Talent*". Ruang lingkup penyempurnaan kebijakan *Human Capital* meliputi Sistem Manajemen Kinerja (SMK), Sistem Rekrutmen, Tunjangan Berbasis Kinerja, dan Revitalisasi Budaya Kerja.

### Sistem Rekrutmen

BRI melakukan proses rekrutmen dalam kerangka Arsitektur *Human Capital* untuk mendukung rencana bisnis Bank. Sistem rekrutmen dilakukan melalui aplikasi e-rekrutmen untuk meningkatkan efektivitas sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Sejalan dengan usaha Perseroan untuk merekrut *Best Talent* dari Universitas

ternama, Perseroan mulai menguatkan *Employee Branding* dan *Employee Value Proposition*. Selain itu pada tahun 2017 BRI telah menerapkan *Video Based Assessment* pada proses *Talent Acquisition* untuk Program Pengembangan Staff (PPS) BRI.

Penggunaan *Video Based Assessment* diharapkan dapat mendukung perbaikan bisnis proses dan optimalisasi teknologi dalam mendapatkan dan memenangkan perang talenta di industri, Fokus lain dari implementasi *Video Based Assessment* dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tambahan selain dari CV yang dikirim oleh *Jobseeker*, sehingga *Jobseeker* yang lulus pada tahap awal rekrutmen telah memenuhi atau bahkan melampaui standar kompetensi yang ditetapkan Perseroan.

Pada tahun 2017, jumlah Pekerja BRI adalah sebanyak 92.858 orang, turun sebesar 0.51% dibandingkan akhir tahun 2016 sebesar 93.333. Penurunan tersebut dikarenakan kebijakan *Hiring Freeze* untuk mengoptimalkan produktifitas Pekerja saat ini yang terlihat dari peningkatan *Earning per Employee (EPE)* mencapai Rp. 306 Juta/ Pekerja di tahun 2017 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp. 276 Juta/ Pekerja di tahun 2016

### *Talent Management System*

Pada tahun 2017, BRI telah menyempurnakan Kebijakan *Talent Management* yang dijadikan sebagai dasar fondasi untuk menyempurnakan mekanisme *Succession Plan*. Dengan mekanisme *succession plan* yang baik, pengisian jabatan kunci (*key jobs*) dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

### Pengembangan Karir Berbasis Kinerja

BRI secara prinsip memberi kesempatan yang sama kepada setiap pekerja untuk mengembangkan karirnya. Pengembangan karir ini mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang jenjang karir pekerja. Pengembangan karir pekerja juga dilakukan melalui pelaksanaan pelatihan khusus yang terencana, seperti pengayaan, *job enrichment*, dan *job enlargement*. Manajemen kinerja ini diatur dalam sistem berbasis elektronik untuk mempercepat proses dan mempermudah akses pekerja maupun manajemen BRI.

## PENGELOLAAN HUMAN CAPITAL

### Sistem Manajemen Kinerja

Secara terus menerus perusahaan konsisten dalam menyempurnakan Sistem Manajemen Kinerja (SMK). Pada tahun 2017 BRI telah melakukan standarisasi *Key Performance Indicator* (KPI) untuk seluruh jabatan di BRI bertujuan untuk membuat penilaian kinerja yang objektif untuk seluruh Pekerja BRI. Sehingga BRI dapat memberikan apresiasi kepada Pekerja baik dari segi karier, kompensasi, pendidikan dan lainnya.

Pada tahun 2017, telah terjadi lompatan signifikan dalam SMK khususnya bagi Tenaga Pemasar BRI. Tahun ini BRI telah menyempurnakan modul SMK secara *online* dimana pencapaian dari target-target individu tenaga pemasar dilakukan secara otomatis, sehingga Pekerja dapat langsung memonitor pencapaian targetnya masing-masing.

### Penilaian Kinerja

SMK Tenaga Pemasar BRI pada tahun 2017 telah dilakukan siklus *performance appraisal* per 3 (tiga) bulanan/triwulan. Hal ini sejalan dengan salah satu alat ukur tercapainya aspirasi "*Home to The Best Talent*" yaitu *Performance Driven Culture*. Perusahaan akan menjadikan siklus *performance appraisal* 3 bulanan/triwulan sebagai fondasi untuk membangun budaya peduli pada kinerja sehingga diharapkan strategi tersebut dapat meningkatkan produktivitas Pekerja BRI khususnya Tenaga Pemasar.

### Tunjangan Berbasis Kinerja

Sejalan dengan penyempurnaan SMK Tenaga Pemasar, perusahaan memberikan penghargaan berupa insentif yang bersifat variabel. Skema insentif tersebut merupakan penggabungan dari skema insentif sebelumnya yang dimaksudkan agar Tenaga Pemasar lebih termotivasi dalam mencapai targetnya.

### Revitalisasi Budaya Kerja

Perubahan pada *corporate culture* diharapkan dapat menjadi salah satu pilar yang menyokong pencapaian aspirasi perusahaan dan tantangan bisnis jangka panjang. Budaya Kerja yang baru ini diharapkan dapat menjadi

pijakan perusahaan dan insan BRI dalam berperilaku, bertindak, dan memiliki *value* dalam mendukung kinerja perusahaan.

Implementasi Revitalisasi Budaya Kerja BRI dirumuskan dalam:

- Lima nilai pokok (*core values*) Budaya Kerja yang disebut dengan BRILiaN. Nilai-nilai pokok merupakan nilai penting yang menjadi pedoman bagi pekerja dalam bersikap dan berperilaku, baik dalam berhubungan dengan nasabah, sesama pekerja serta pihak eksternal lainnya.
- Sepuluh sikap perilaku utama insan BRI.
- Dua puluh Indikator Perilaku.

### Core Values Budaya Kerja

Untuk mencapai Budaya Kerja yang terinternalisasi dengan baik maka dibutuhkan perilaku (*behavior*), simbol, dan sistem. Oleh karena itu BRI menggagas lima nilai inti (*core value*) budaya kerja perusahaan sebagai berikut:

1. *Integrity* yang memiliki makna senantiasa berpikir, berkata, dan berperilaku terpuji, menjaga kehormatan, serta taat aturan. Perilaku yang menunjukkan nilai *integrity* adalah terbuka, jujur, dan tulus serta patuh terhadap peraturan.
2. *Professionalism* yang memiliki makna senantiasa berkomitmen bekerja tuntas dan akurat dengan kemampuan terbaik dan penuh tanggung jawab. Perilaku yang menunjukkan nilai *professionalism* adalah *continous learner* dan *fairness*.
3. *Trust* yang memiliki makna senantiasa membangun keyakinan dan saling percaya di antara para pemangku kepentingan demi kemajuan perusahaan. Perilaku yang menunjukkan nilai *trust* adalah saling menghargai dan mengutamakan kepentingan perusahaan dan Negeri.
4. *Innovation* yang memiliki makna senantiasa mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menemukan solusi dan gagasan baru untuk menghasilkan produk/kebijakan dalam menjawab tantangan permasalahan perusahaan. Perilaku yang menunjukkan nilai *innovation* adalah visioner dan pionir perubahan.



## PENGELOLAAN HUMAN CAPITAL

5. *Customer Centric* yang memiliki makna senantiasa menjadikan pelanggan sebagai mitra utama yang saling menguntungkan untuk tumbuh secara berkesinambungan. Perilaku yang menunjukkan nilai *customer centric* adalah melayani lebih dari ekspektasi nasabah dengan setulus hati dan *collaborative*.

Ruang lingkup Revitalisasi Budaya Kerja meliputi:

1. Arsitektur Budaya Kerja BRI
2. Organisasi Budaya Kerja BRI
3. Rumusan Budaya Kerja BRI
4. Nilai-nilai Pokok Budaya Kerja BRI
5. Tindakan Budaya Kerja BRI
6. Program Internalisasi dan Eksternalisasi Budaya Kerja BRI
7. Indikator dan Alat Ukur Budaya Kerja BRI
8. Media Komunikasi Budaya Kerja BRI

Program Revitalisasi Budaya Kerja terdiri dari dua program, yaitu:

- Program Internalisasi Budaya Kerja; dan
- Program Eksternalisasi Budaya Kerja.

### Program Internalisasi Budaya Kerja

Program-program Internalisasi Budaya Kerja BRI diantaranya:

#### Forum Peningkatan Kinerja (FPK)

Merupakan forum yang dibentuk sebagai wadah agar pekerja dapat berpartisipasi aktif dalam penciptaan strategi dan tindakan yang dapat meningkatkan kinerja setiap unit kerja dalam rangka pencapaian target unit kerja.

#### Focus Group Discussion (FGD)

Merupakan forum diskusi yang diselenggarakan dengan pihak internal maupun eksternal sebagai rangkaian dari kegiatan FPK. Forum ini merupakan mekanisme formal untuk meningkatkan budaya keterbukaan dalam rangka peningkatan kinerja unit kerja. Pembahasan dalam FGD antara lain meliputi kualitas layanan, permasalahan, kritik dan saran, serta solusi di suatu unit kerja.

#### SportArtcular

Merupakan kegiatan olahraga dan seni yang diselenggarakan oleh Perusahaan berkolaborasi dengan komunitas yaitu Badan Koordinasi Olahraga dan Seni (Bakors) dalam rangka menyambut HUT BRI.

#### Family Gathering (FG)

Merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perusahaan untuk penyegaran (refreshing) bagi Pekerja dan keluarganya sekaligus sebagai sarana untuk menerapkan prinsip mengenal Pekerja (*Know Your Employee*).

#### Change Agent Forum (CAF)

Merupakan forum yang diselenggarakan pada Unit Kerja BRI dalam rangka menciptakan, menyusun, mengembangkan serta evaluasi dan *monitoring* program-program Budaya Kerja BRI.

#### The Best Change Agent

Merupakan sebuah program penghargaan kepada *Change Agent* terbaik yang dipilih melalui proses seleksi dengan kriteria tertentu.

#### Pendampingan pekerja Baru (PPB)

Merupakan program pendampingan kepada pekerja baru di suatu unit kerja selama 1 (satu) tahun dengan didukung buku pedoman yang telah disiapkan bertujuan untuk membantu proses penyesuaian pekerja baru.

#### BRI Excellent Award (BEA)

Merupakan program penghargaan kepada pekerja dan Unit Kerja yang secara konsisten memiliki kinerja, budaya dan inovasi terbaik pada perusahaan yang diharapkan dapat menjadi sarana untuk mencari talenta terbaik, serta mendorong munculnya budaya-budaya positif untuk mendukung daya saing Perusahaan.

#### Forum BRI Millenials

Merupakan program internalisasi budaya kerja yang ditujukan kepada pekerja *millennials* BRI berupa forum diskusi untuk membahas kondisi perusahaan atau perbankan terkini dengan suasana yang santai.

## PENGELOLAAN HUMAN CAPITAL

**Program Eksternalisasi Budaya Kerja**

Program Eksternalisasi Budaya Kerja BRI diantaranya:

**BRI Communities (BRIComm)**

Merupakan komunitas yang dibentuk oleh pekerja BRI yang memiliki minat ketertarikan terhadap suatu aktivitas atau kegiatan yang sama. Saat ini BRI telah memiliki beragam komunitas antara lain komunitas sepeda, fotografi, basket, golf, lari, band, dance, tenis dan lainnya.

**Bussines Gathering**

Merupakan kegiatan *relationship* yang dilakukan oleh Pekerja BRI dengan nasabah maupun komunitas tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas nasabah BRI.

**Kegiatan Sosial (BRI Peduli)**

Merupakan bentuk kegiatan tanggung jawab sosial BRI terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan.

**Kegiatan Keagamaan**

Merupakan kegiatan keagamaan yang dikelola oleh Badan Pengurus Kerohanian BRI.

**Monitoring Implementasi Budaya Kerja Perusahaan**

Aplikasi Budaya Kerja BRI mampu menghasilkan peningkatan kualitas pengelolaan *Human Capital* yang tercermin dari naiknya tolak ukur berikut ini:

1. Nilai *Corporate Value Self Assessment (CVSA)* yang merupakan pencerminan dari pelaksanaan nilai-nilai Budaya Perusahaan oleh seluruh Insan BRI dan dilaporkan secara *real time on line* oleh *Change Agent (CA)* yang telah ditetapkan di masing-masing Unit Kerja.
2. Nilai *BRI Internal Service Survey (BISS)* yang merupakan hasil survei atau input dari nasabah, baik internal maupun eksternal kepada masing-masing Unit Kerja BRI perihal Kualitas Pelayanan yang diberikan kepada nasabah.
3. Nilai *Corporate Culture Index (CCI)* yang menunjukkan rasio antara kinerja Unit Kerja dengan nilai CVSA dan BISS. Nilai CCI merupakan index pengukuran untuk mengidentifikasi keterkaitan antara besaran kinerja Perusahaan dibanding dengan budaya organisasi.

**Budaya Inovasi dengan BRI *Excellent Award (BEA)***

Dalam rangka meningkatkan *engagement* dan daya saing inovasi, perusahaan secara periodik menyelenggarakan ajang *BRI Excellence Award (BEA)*. Direksi BRI memandang pemberian penghargaan kepada Pekerja dan Unit Kerja yang secara konsisten menunjukkan kinerja unggul adalah suatu hal yang penting.

Melalui program *BRI Excellence Award (BEA)* 2017, Perseroan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi Pekerja untuk berkontribusi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan kinerja bisnis yang berkelanjutan. Antusiasme Pekerja terhadap program ini dinilai cukup tinggi yang diindikasikan dari peningkatan jumlah proposal yang diterima dari 512 proposal di tahun 2016 menjadi 1.675 proposal di tahun 2017.

Program BEA ini diharapkan mampu mendukung peningkatan pertumbuhan kinerja bisnis yang berkelanjutan. Program unggulan yang diseleksi melalui kegiatan ini selanjutnya dikembangkan untuk dapat diwujudkan dan diimplementasikan oleh perusahaan. Salah satu dari penerapan ide inovasi yang telah direalisasikan pada tahun 2017 adalah Aplikasi BRISPOT yang merupakan sebuah transformasi digital di proses bisnis pinjaman Mikro.

**Sistem Informasi Manajemen *Human Capital***

BRI memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk mengelola *Human Capital* berbasis teknologi informasi (TI) yang terintegrasi dalam proses manajemen *Human Capital*, mulai dari perencanaan sampai dengan putusan hubungan kerja.

Prinsip pengelolaan SIM bersifat *dual control* agar dapat menghasilkan data/informasi yang akurat dan komprehensif. Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan *Human Capital*, pengembangan sistem TI terus dilakukan yang mengarah kepada otomasi dan *Employee Self Service (ESS)* dengan dukungan aplikasi BRISTARS, yaitu aplikasi berbasis web yang dapat diakses oleh seluruh Pekerja untuk melakukan layanan secara mandiri dan menjalankan proses bisnis di bidang *Human Capital*.



## PENGELOLAAN HUMAN CAPITAL

Berbagai aplikasi dalam BRISTARS yang telah dibangun untuk mendukung pengelolaan *Human Capital* sesuai dengan arsitektur *Human Capital* mulai dari *planning* (perencanaan), *acquiring* (rekrutmen, seleksi dan penempatan), *developing* (pengembangan), *retaining and maintaining* (menjaga dan mempertahankan), *performance management* (manajemen kinerja) sampai dengan *terminating* (Pemutusan Hubungan Kerja) antara lain: *Recruitment online*, *assesment* secara otomatis, monitoring dan pengajuan benefit yang memudahkan pekerja, serta pengelolaan perjalanan dinas secara *online*. Seluruh aplikasi untuk pembayaran kompensasi dan *benefit* tersebut dijalankan secara mandiri oleh Pekerja untuk mempercepat proses bisnis.

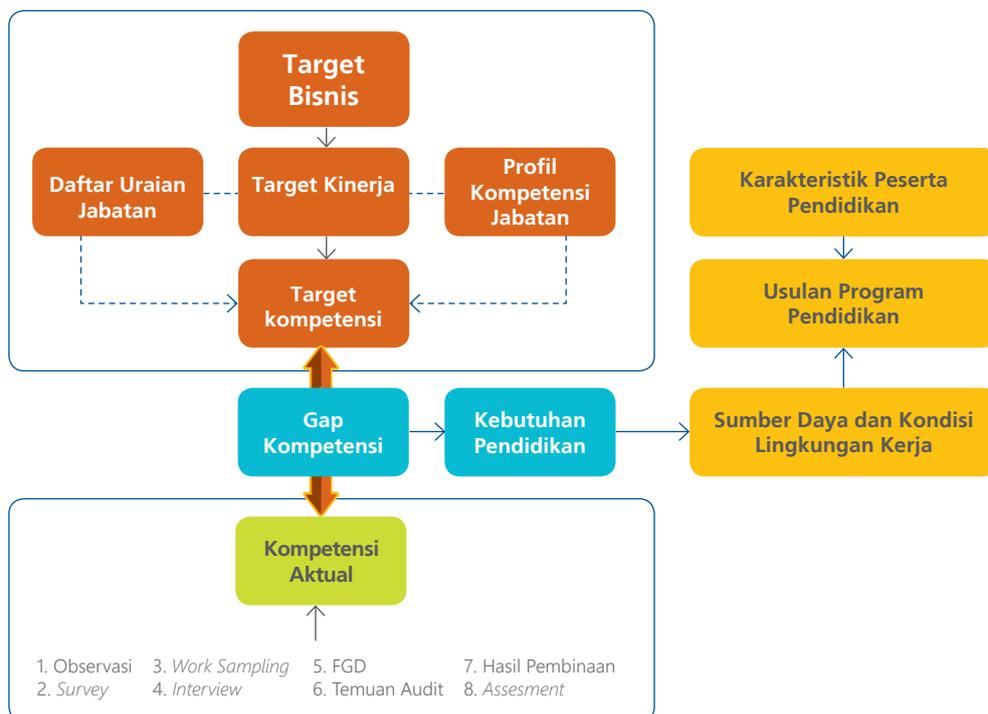
### Pengembangan Human Capital

BRI Corporate University berhasil memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi Lloyd's Register. Adapun sertifikasi ini mengakui management *System Standard* BRI Corporate University dalam hal "*Provision of Banking Training Services*". Hal tersebut merupakan bukti bahwa BRI Corporate University selalu melakukan peningkatan kualitas operasional pendidikan dan mengutamakan kepuasan peserta didik.

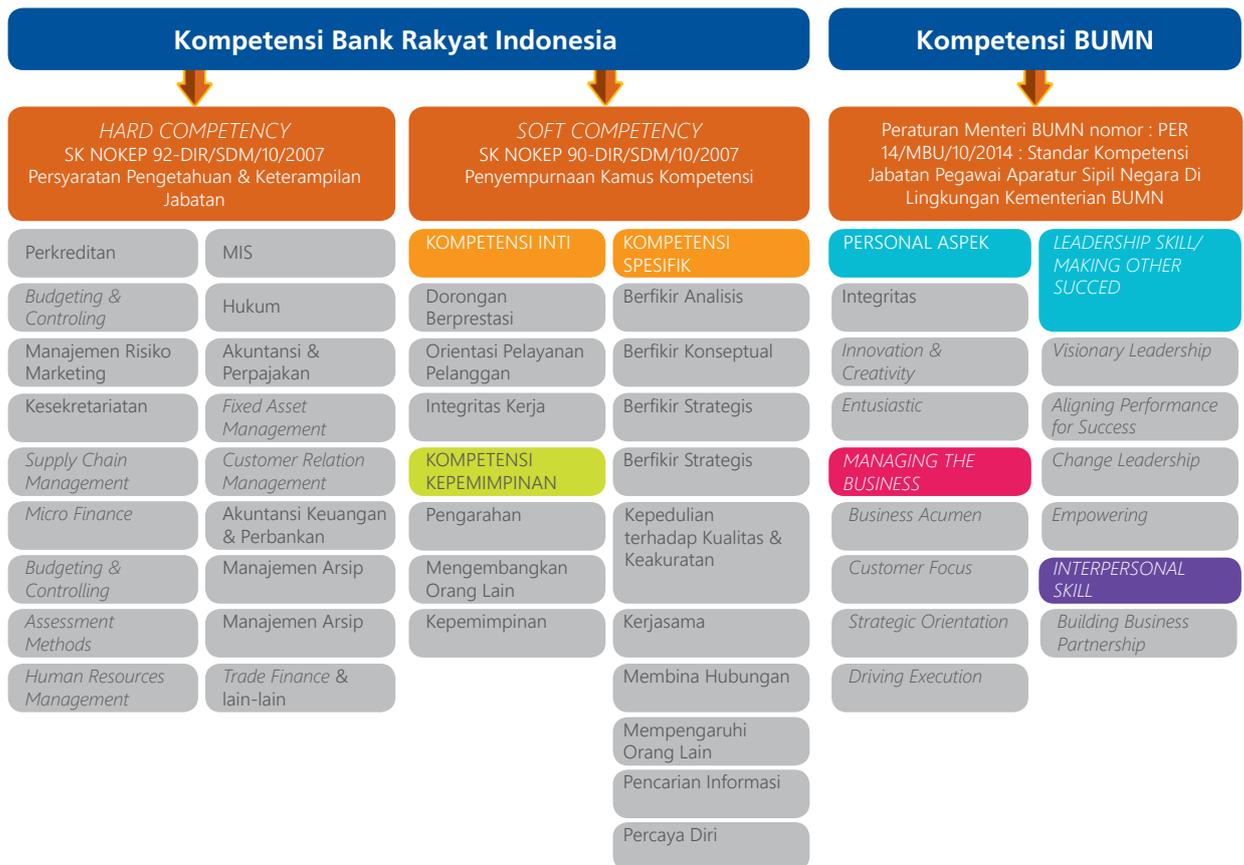
Bank BRI secara reguler mengadakan pelatihan dan pengembangan kompetensi pekerja untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan mengantisipasi tantangan ke depan. Kegiatan pengembangan *Human Capital* didasarkan pada kerangka analisis yang bertumpu pada tiga hal yaitu Analisis Kebutuhan Pendidikan, Analisis Karakteristik Peserta Pendidikan serta Analisis Sumber Daya dan Kondisi Lingkungan Kerja.

### Framework Analisis Pendidikan Pekerja BRI

Untuk analisis kebutuhan pendidikan, BRI Corporate University mengidentifikasi gap antara target kompetensi dan kompetensi aktual dari calon peserta pendidikan. BRI juga menyelaraskan standar kompetensi yang dimiliki dengan standar kompetensi BUMN.



PENGELOLAAN HUMAN CAPITAL



Penyelerasan standar kompetensi BUMN tersebut bertujuan agar kompetensi yang dimiliki pekerja BRI telah sesuai dengan standar kompetensi untuk posisi-posisi strategis di perusahaan BUMN di masa yang akan datang.

Sebagai bentuk komitmen BRI dalam meningkatkan kompetensi pekerjanya serta mendukung penyelarasan standar kompetensi BUMN, BRI telah menyelenggarakan pendidikan Development Program bagi 135 orang Assistant Vice President Development Program dan 82 orang Vice President Development Program selama tahun 2017.

Dalam menyelenggarakan program pendidikan, perusahaan terlebih dahulu menganalisa karakteristik calon peserta pendidikan seperti usia, latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan, jenis kelamin, gaya belajar (*learning style*), budaya, bahasa dan hal lain yang dianggap perlu. Perusahaan juga mempertimbangkan faktor sumber daya dan kondisi lingkungan seperti ketersediaan fasilitas pendidikan, anggaran, *Subject Matter Expert*, *Trainer*, dan teknologi informasi serta tak terlepas juga pada infrastruktur, proses kerja, *teamwork* dan kondisi lainnya baik yang mendukung maupun yang menghambat.

Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

▶ Analisa &amp; Pembahasan Manajemen



## PENGELOLAAN HUMAN CAPITAL

Perseroan memiliki 2 (dua) jenis program pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas para pekerja di BRI, yaitu:

### Development Program

Program pendidikan kepada calon pekerja BRI atau pekerja BRI yang bertujuan untuk memberikan pembekalan kompetensi pada suatu jabatan tertentu. Program ini terbagi menjadi 3 (tiga), yakni:

#### 1. Management Development Program

Program pendidikan yang bertujuan meningkatkan kompetensi pekerja untuk persiapan menduduki jabatan dengan *corporate title* jabatan mulai dari level jabatan *Assistant* sampai dengan *Executive Vice President*.

#### 2. Competency Development Program

Program pendidikan yang disusun berdasarkan hasil analisa kompetensi, kebutuhan perusahaan dan kondisi aktual di unit kerja. Program ini dibagi dalam dua kelompok besar, yakni *hard competency* dan *soft competency* untuk setiap level *Job Title*.

#### 3. Master & Doctoral Degree Program

Program pendidikan kepada pekerja BRI yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pekerja melalui jenjang Pendidikan formal antara lain Pasca Sarjana Strata 2 dan Strata 3.

### Developing Learning Program

No	Corporate Title	Developing Learning Program	
		Management Development Learning Program	Competency Development Learning Program
1	Executive Vice President	Executive Vice President Development Program	Pemimpin Wilayah, Kepala Divisi dan Inspektur
2	Vice President	Vice President Development Program	Wakil Pemimpin Wilayah, Wakil Kepala Divisi dan Wakil Inspektur
3	Assistant Vice President	Assistant Vice President Development Program	Pemimpin Cabang, Kepala Bagian dan Group Head
4	Senior Manager	Senior Management Development Program	
5	Manager	Manager Development Program	Pemimpin Cabang Pembantu, Wakil Kepala Bagian, Priority Banking Manager, Manajer Pemasaran, Manajer Operasional dan Manajer Bisnis Mikro
6	Assistant Manager	Assistant Manager Development Program	Asisten Manajer Operasional, Asisten Manajer Bisnis Mikro, Asisten Manajer Pemasaran Dana, Asisten Manajer Pemasaran Kredit
7	Officer	Supervisor Development Program	Supervisor, Kepala Unit, Staff dan jabatan setingkat Officer lainnya
8	Assistant	Assistant Development Program	Relationship Manager Kredit & Dana, Mantri, CS, Teller dan jabatan setingkat Assistant lainnya

Pada tahun 2017, BRI telah menyelenggarakan berbagai program pendidikan dengan realisasi jumlah peserta pendidikan sejumlah 1.773.194 peserta dengan komposisi 13,6% merupakan pendidikan *In Class* dan 86,4% *e-Learning*, dengan rincian sebagai berikut:

No	Program Pendidikan	2015	2016	2017
1	Development	21.678	12.769	11.326
2	Enhancement	470.274	1.202.377	1.604.946
3	FPK/FGD	124.502	128.163	93.691
4	Sosialisasi	172.323	149.114	63.231
	TOTAL	789.777	1.492.423	1.773.194

## PENGELOLAAN HUMAN CAPITAL

Untuk program pendidikan *enhancement* termasuk pendidikan sertifikasi, *public course* dan *E-learning*, sedangkan untuk Pendidikan *development* termasuk Pendidikan *master degree/S2*.

### Enhancement Program

Program peningkatan kompetensi pekerja dibagi menjadi 3 (tiga) level yaitu *Basic*, *Intermediate* dan *Advanced* yang disesuaikan dengan tingkatan level jabatan pekerja. Parameter yang digunakan untuk menentukan level tersebut antara lain *variety of business product*, *sales mode*, *degree of analysis*, latar belakang peserta pendidikan, *business scale*, *business model*, *branch level*, dan lain-lain.

Dalam menyelenggarakan program pengembangan *Human Capital* tersebut, BRI didukung oleh 8 Learning center di seluruh Indonesia yang dilengkapi kapasitas rata-rata 500 peserta, tenaga pengajar profesional dari berbagai disiplin bisnis BRI, serta fasilitas pendidikan dan pelatihan yang memadai dan terbaru yang didukung secara optimal menggunakan teknologi informasi.

Untuk mendukung operasional pelatihan dan pengembangan kompetensi, BRI menggunakan *Enterprise Learning Management System*. yaitu sistem dan teknologi informasi terpadu untuk pengelolaan pendidikan yang mencakup pengelolaan data peserta pendidikan, data Program Pendidikan, penyimpanan dan distribusi materi pendidikan, evaluasi hasil pendidikan, dan fasilitas pendukung kegiatan pendidikan.

### Implementasi Strategi dan Operasional Pengembangan *Human Capital*

Pada tahun 2017, BRI Corporate University telah melaksanakan beberapa *strategic initiatives* antara lain:

#### Mengembangkan kompetensi *Lecturer & Learning Designer*

BRI Corp telah menyelenggarakan sertifikasi profesi untuk *Lecturer Main Campus* dan *Campus BRI* di seluruh Indonesia yang kemudian akan dilanjutkan dengan sertifikasi *designer* pada tahun 2018.

#### Mengembangkan dan Standarisasi Kurikulum, Silabus, Materi dan Metodologi Pembelajaran

Kurikulum, silabus, materi dan metodologi pembelajaran dengan konsep *blended learning* (30% *e-learning* dan 70% *in class*) dan *continuous learning* (10% *in class*, 20% *learning from others*, 70% *experience*).

#### Mengembangkan *Digital Learning Management System*

BRI telah menerapkan penggunaan *learning delivery system* dan *learning information system* melalui BRISmart. Sebagai *core learning system* BRISmart memungkinkan pekerja untuk dapat mengakses *e-learning*, informasi pendidikan dan tempat pelaksanaan pendidikan pekerja. Selain itu, BRI Corporate University juga melakukan penyelenggaraan seminar melalui Webinar dimana pekerja dapat mengakses siaran tersebut melalui *smartphone*.

#### Menyediaan fasilitas pembelajaran yang *modern (classroom, dormitory)*

BRI telah melakukan pembaharuan pada perangkat komputer serta menyediakan Ipad pada *lobby* Corporate University yang dapat digunakan oleh para pekerja dan peserta didik untuk memperoleh informasi terkait Pendidikan.

#### Mengembangkan *Student Management Policy & Procedure*

BRI secara berkesinambungan melakukan review menyangkut kebijakan manajemen pendidikan.

#### Menyediakan serta mengendalikan *Learning Budget System*

Dengan adanya penggunaan BRISmart sebagai *learning system* membuat pencatatan biaya pendidikan per pekerja dapat terekam oleh sistem sehingga pengawasan *breakdown* anggaran dan realisasi anggaran pendidikan dapat lebih efektif.



## PENGELOLAAN HUMAN CAPITAL

### Biaya Pengembangan *Human Capital*

Realisasi anggaran pendidikan dan pengembangan *Human Capital* BRI pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp 533,6 milyar dengan biaya per pekerja adalah sebesar Rp 301.000/peserta. Melalui implementasi teknologi (*e-learning*) tersebut, BRI berhasil melakukan efisiensi biaya lebih dari 80%. Berikut rincian biaya pendidikan *Human Capital* BRI tahun 2017:

No	Mata Anggaran	Target 2017*) (Dalam Juta Rupiah)	Realisasi Desember 2017*) (Dalam Juta Rupiah)	Persentase Pencapaian Anggaran	Realisasi Jumlah Peserta	Realisasi Biaya/Peserta**) (Dalam Ribu Rupiah)
1	<i>Development</i>	289.640	91.192	31.5%	11,326	8.052
2	<i>Enhancement</i>	416.329	295.527	71.0%	1,604,946	184
3	FPK & FGD	146.901	137.255	93.4%	93,691	1.465
4	Sosialisasi	8.833	3.999	45.3%	63,231	63
5	Literasi	2.500	260	10.4%	-	-
6	<i>Support</i>	12.900	5.379	41.7%	-	-
TOTAL		877.103	533.614	60.8%	1,773,194	301

\*) dalam Juta Rupiah

\*\*) dalam Ribu Rupiah

\*\*) konteks pelaporan literasi dan *support* melibatkan masyarakat

### Penilaian Kinerja dan Remunerasi

BRI senantiasa menerapkan penilaian kinerja berbasis kompetensi untuk memastikan hasil yang obyektif dan fair. Sistem penilaian kinerja pada tahun 2017 terus menerus dilakukan penyempurnaan. Dalam menetapkan *Key Performance Indicator* (KPI) pada proses Sistem Manajemen Kinerja (SMK), BRI selalu mengintegrasikan target Perseroan kepada seluruh Pekerjaannya, sehingga KPI Individu dan KPI Perseroan dapat sejalan.

Perseroan secara konsisten menstandarisasi konten KPI untuk seluruh Jabatan di BRI (kecuali Staff dan Petugas Administrasi), hal ini dimaksudkan untuk mempertajam penilaian kinerja sehingga objektivitas dan keadilan penilaian kinerja dapat terjaga. Selain standarisasi konten KPI pada tahun 2017 Perseroan telah melakukan otomasi pencapaian target KPI untuk Jabatan Tenaga Pemasar dan mengimplementasikan *monitoring* pencapaian KPI dengan siklus *Performance Appraisal* 3 bulanan (Triwulan).

BRI merancang struktur remunerasi pekerja berdasarkan beberapa faktor seperti prestasi kerja, kompetensi, dan tingkat biaya hidup di masing-masing geografis unit kerja untuk memastikan sistem yang adil, kompetitif, serta sesuai kebutuhan dan kemampuan Bank.

### Jenis Kompensasi dan Benefit

Kompensasi dan benefit bagi pekerja BRI, yaitu:

- Kompensasi yang bersifat tetap, terdiri dari Upah Pokok dan Tunjangan;
- Kompensasi yang bersifat variabel yang diberikan kepada pekerja berdasarkan pencapaian kinerja.
- Untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam bekerja, BRI memberikan fasilitas benefit kepada pekerja. Benefit ini diterima selama masa kerja seperti program pemeliharaan kesehatan maupun yang diterima setelah berakhirnya hubungan kerja seperti program pensiun, serta fasilitas lain yang lazim diberikan oleh perusahaan sejenis di industri perbankan.
- Untuk meningkatkan *engagement* Pekerja dan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap perusahaan dan memberikan motivasi/ insentif jangka panjang kepada pekerja agar mencapai target-target kinerja Perusahaan yang telah ditetapkan, BRI memberikan *Management and Employee Stock Ownership Program* (MESOP) kepada pekerja

## PENGELOLAAN HUMAN CAPITAL

BRI di tahun 2017. Pekerja yang diberikan alokasi saham adalah Pekerja Tetap dengan kinerja tertentu. Pemberian hak saham (tanggal *Grant*) ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2016 dengan periode vesting selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

### Kenaikan Kompensasi

BRI menerapkan kebijakan kenaikan upah berdasarkan prestasi kerja (*merit increase*), sehingga pekerja dengan prestasi tinggi akan memperoleh kenaikan upah yang tinggi pula.

### Program Pensiun

Untuk meningkatkan kenyamanan kepada pekerja selama masih aktif bekerja, BRI mempersiapkan program pemberian benefit setelah berakhirnya hubungan kerja atau masa pensiun.

Beberapa program yang dilaksanakan mencakup:

- Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)
- Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP)
- Program Tunjangan Hari Tua (THT)
- Program Jaminan Hari Tua (JHT) Jamsostek
- Program Jaminan Pensiun (BPJS Ketenagakerjaan)
- Program Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan (Prospens).

Dalam masa persiapan pensiun, Pekerja berhak mendapatkan pendidikan kewirausahaan dari Perseroan sebagai bekal untuk memasuki masa pensiun.

### Kinerja Pengelolaan *Human Capital*

#### Tingkat *Turnover*

Kepuasan (*satisfaction*) pekerja BRI terhadap pengelolaan Human Capital salah satunya diukur dari tingkat *turnover*. Pada tahun 2017, tingkat *turnover* mencapai sebesar 1,22%, lebih rendah dari tingkat *turnover* secara industri yang mencapai 14%.

Angka *turnover* tersebut menunjukkan bahwa upaya perseroan untuk menjaga dan mempertahankan pekerja telah menunjukkan hasil yang positif. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan perusahaan untuk menjaga tingkat

*turnover* tersebut diantaranya adalah memberikan kompensasi pada tingkat yang kompetitif dibandingkan industri, benefit yang memberikan rasa aman dan nyaman dalam bekerja, jenjang karier yang memotivasi serta lingkungan kerja yang kondusif.

#### Tingkat Keterikatan

*Employee Survey* tahun 2017 yang diselenggarakan secara internal menunjukkan bahwa 71.9% pekerja menyatakan terikat dengan Perseroan (*engaged*). Hasil tersebut meningkat apabila dibandingkan *survey* tahun 2016 sebesar 69,6. Sedangkan untuk tingkat *satisfaction* di tahun 2017, 90% pekerja menyatakan puas bekerja di BRI.



Perseroan meyakini bahwa keterikatan yang dinyatakan Pekerja tersebut merupakan dampak dari penerapan berbagai inisiatif di bidang pengelolaan sumber daya manusia BRI. Untuk selanjutnya, Perseroan akan tetap berkomitmen untuk menyusun kebijakan yang mampu meningkatkan *engagement* Pekerja terutama Pekerja Generasi Y sebagai mayoritas Pekerja di BRI yang mencapai 75.91% dari total Pekerja.

#### Tingkat Produktivitas

Pada tahun 2017, tingkat produktivitas pekerja yang diukur dari *Earning per Employee* (EPE) mencapai Rp. 306 Juta/ Pekerja. Jumlah ini meningkat dibandingkan pencapaian EPE tahun 2016 sebesar Rp. 276 Juta/ Pekerja.

Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

▶ Analisa &amp; Pembahasan Manajemen



## PENGELOLAAN HUMAN CAPITAL

### Profil Sumber Daya Manusia BRI

Pada tahun 2017, mayoritas profil *Human Capital* BRI berdasarkan generasi adalah generasi Y dengan komposisi sebanyak 75,91%, generasi X sebanyak 18,91% dan *baby boomers* sebanyak 5,17%. Dominasi Gen Y pada komposisi pekerja BRI ini menunjukkan bahwa perusahaan sangat siap untuk bertransformasi menjadi *Digital Banking* yang didukung oleh ciri khas Gen Y sebagai generasi “*tech savvy*”.

### Jumlah Pekerja Berdasarkan Level Organisasi

Komposisi pekerja BRI menurut level organisasi adalah sebagai berikut:

Level Organisasi	2015	2016	2017
Senior Executive Vice President	4	4	5
Executive Vice President	50	86	98
Vice President	198	193	209
Assistant Vice President	395	380	345
Senior Manager	738	747	735
Manager	731	1.248	1.331
Assistant Manager	4.331	4.992	5.410
Officer	11.837	12.214	12.003
Assistant	74.290	73.469	72.722
Total	92.574	93.333	92.858

### Jumlah Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian

Status pekerja BRI umumnya adalah Pekerja Tetap sebanyak 60.764, Pekerja Kontrak sebanyak 31.994, dan Pekerja *Outsourcing* 37.929. Adapun komposisi pekerja BRI menurut status kepegawaian adalah sebagai berikut:

Status	2015	2016	2017
Pekerja Tetap	54.859	59.007	60.764
Pekerja Kontrak	37.451	34.262	31.994
Trainee	264	64	100
Total	92.574	93.333	92.858

### Jumlah Pekerja (Tetap, Kontrak, Trainee) Berdasarkan Pendidikan

Mayoritas pekerja BRI berdasarkan tingkat pendidikan merupakan lulusan Strata-1 dan Diploma. Profil komposisi pekerja BRI menurut pendidikan dan jenjang jabatan adalah sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017
Strata 3	7	5	3
Strata 2	1.195	1.212	1.202
Strata 1	67.953	67.805	78.867
Diploma	19.769	21.261	10.134
SLTA/Setingkat	3.650	3.050	2.652
Total	92.574	93.333	92.858

## PENGELOLAAN HUMAN CAPITAL

**Jumlah Pekerja (Tetap, Kontrak, *Trainee*) Berdasarkan Usia**

Profil komposisi pekerja BRI menurut usia dan jenjang jabatan adalah sebagai berikut:

Usia	2015	2016	2017
< 25	11.824	8.279	6.235
> 50	4.649	4.805	4.805
25 – 30	47.232	48.882	46.616
31 – 35	12.548	14.291	17.638
36 – 40	6.440	7.615	8.503
41 – 45	4.344	4.125	3.940
46 – 50	5.537	5.336	5.121
Total	92.574	93.333	92.858

**Pertumbuhan Jumlah Karyawan Berdasarkan Generasi**

Komposisi pekerja BRI dilihat dari generasi mayoritas merupakan Generasi Y yaitu sebesar 75.91% atau sebanyak 70.489 pekerja

Usia	2015			2016			2017		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
<i>Baby Boomers</i> (> 50 tahun)	3.634	1.015	4.649	3.550	1.255	4.805	3.367	1.438	4.805
Gen X (35-50 tahun)	10.168	6.153	16.321	10.642	6.434	17.076	11.032	6.532	17.564
Gen Y (18-34 tahun)	38.065	33.539	71.604	38.282	33.170	71.452	38.035	32.454	70.489
Total	51.867	40.707	92.574	52.474	40.859	93.333	52.434	40.424	92.858

Perusahaan menyadari bahwa komposisi Gen-Y yang dominan tersebut perlu dikelola dengan baik. Selama tahun 2017 telah diselenggarakan forum-forum komunikasi antara Manajemen BRI dengan kaum Gen-Y untuk menggali aspirasi dan menyerap ide-ide inovasi.

**Jumlah Pekerja (Tetap, Kontrak, *Trainee*) Berdasarkan Gender**

Dukungan BRI terhadap isu kesetaraan *gender* terlihat dalam praktik penerimaan pekerjajanya dengan komposisi yang cukup seimbang antara pekerja wanita 43,53% dan pekerja pria 56,47% dengan rincian sebagai berikut:

Gender	2015	2016	2017
Wanita	40.707	40.859	40.424
Pria	51.867	52.474	52.434
Total	92.574	93.333	92.858



# TEKNOLOGI INFORMASI DAN OPERASIONAL



Untuk mendukung pencapaian program strategis dan kelancaran operasional, BRI secara kontinu mengembangkan teknologi informasi (TI) sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank dan bersifat customer centric. Upaya pengembangan TI juga dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi proses bisnis serta menghasilkan layanan yang berkualitas dan mendukung tata kelola yang baik.

## Kebijakan Teknologi Informasi

Dalam mengembangkan dan mengelola operasional Teknologi Informasi, BRI memiliki dasar acuan berupa Visi dan Misi yang selaras dengan Visi dan Misi Perusahaan, Roadmap Pengembangan kedepan, serta pedoman dalam IT Governance.

## TEKNOLOGI INFORMASI DAN OPERASIONAL

## Visi dan Misi

Rumusan Visi dan Misi TI BRI untuk tahun 2014-2018 mencakup:

## TEMA

Menjadikan BRI sebagai Bank yang paling modern (*the Most Modern Bank*) demi mendukung BRI menjadi bank komersial terdepan.

## VISI

Menjadikan BRI selalu terdepan dengan memadukan keahlian teknologi dan strategi bisnis secara cepat dan akurat untuk mencapai kepuasan nasabah.

## MISI

1. Menerapkan solusi-solusi TI yang mumpuni dan bersifat **terobosan (breakthrough)** untuk memperkuat BRI dalam fokusnya ke pelanggan berdasarkan SLA yang kompetitif.
2. Memastikan bahwa **informasi** dan **data** yang diperlukan bagi BRI dapat diperoleh dengan **mudah, akurat, tepat waktu** dan **konsisten** di sistem manapun.
3. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja fungsi TI secara berkesinambungan dengan penerapan tata kelola yang baik dan menerapkan budaya berinovasi di dalam organisasi TI untuk menguatkan daya saing BRI di pasar.

## Roadmap Pengembangan TI

Untuk merealisasikan visi dan misi TI tersebut, BRI menetapkan roadmap pengembangan TI yang dirumuskan untuk jangka waktu 5 tahun, dengan target pada tahun 2022 menjadi The Most Valueable Bank di Asia Tenggara, sebagai berikut:

## Roadmap Pengembangan TI 2018-2022

2018	2019-2020	2021-2022
Drive Bimodal ( <i>waterfall and agile</i> ) IT Governance	Improve Agile and Dev-Ops maturity for Business and IT	Excellent Bimodal IT Governance
Build future ready ICT platform	Deliver Robust and Secure ICT Architecture and Operations	Best Practice in Agile ICT Infrastructure



TEKNOLOGI INFORMASI DAN OPERASIONAL

IT Governance

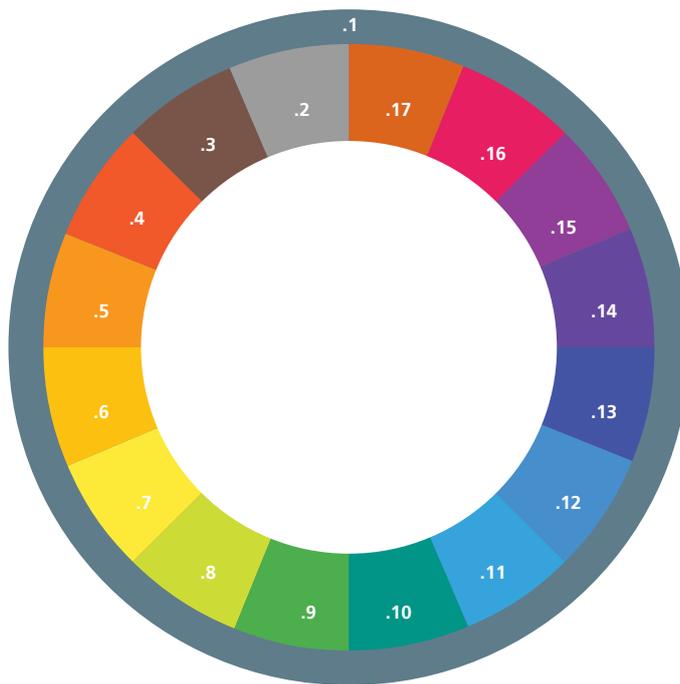
BRI menerapkan kebijakan TI untuk memastikan pengelolaan TI dilakukan dengan berpedoman pada prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) yang mendukung pengelolaan risiko TI dan tetap memberikan nilai strategis bagi perusahaan. Tata kelola TI BRI mencakup standar yang memberikan kerangka kerja tata kelola TI yang efektif dan efisien sehingga mencerminkan suatu proses pengambilan keputusan yang baik serta kepemimpinan dalam penyelenggaraan Tata Kelola TI.

Proses pengelolaan TI di BRI dibagi menjadi dua domain yaitu pengendalian strategis dan pengendalian operasional sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN dan PBI No 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

KERANGKA TATA KELOLA TI

Prinsip-prinsip yang bersifat strategis

1. Penerapan peran TI perusahaan.
2. Perencanaan TI.
3. Kerangka kerja proses dan organisasi TI.
4. Pengelolaan Investasi TI.
5. Pengelolaan Sumber Daya TI.
6. Pengelolaan Risiko TI.
7. Pengelolaan Proyek.
8. Penanganan kebutuhan dan Identifikasi solusi



Prinsip-prinsip yang bersifat operasional

9. Pengelolaan Layanan TI.
10. Pengelolaan Keamanan TI.
11. Pengelolaan Layanan Pihak ketiga.
12. Pengelolaan Operasional.
13. Pengelolaan Kualitas.
14. Knowledge Transfer.
15. Pemantauan dan evaluasi kinerja TI.
16. Pemantauan dan evaluasi pengendalian internal.
17. Pengelolaan compliance external regulation.

## TEKNOLOGI INFORMASI DAN OPERASIONAL

## BRIsat

Setelah diluncurkan pada 18 Juni 2016, BRIsat dikendalikan sepenuhnya oleh BRI sejak 3 Agustus 2016. BRIsat dikendalikan oleh BRI dari stasiun bumi di Ragunan- Jakarta sebagai *Primary Satellite Control Facility* (PSCF) dan di Bali sebagai *Backup Satellite Control Facility* (BSCF) yang dibangun fully redundant.



Primary Satellite Control Facility (PSCF)



Backup Satellite Control Facility (BSCF) TI

BRI terus berupaya mengintegrasikan sistem eksisting ke dalam BRIsat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis. Sampai 31 Desember 2017 BRI telah berhasil mengintegrasikan 12.883 titik remote antenna ke BRIsat. Integrasi tersebut terus berjalan sampai seluruh titik berhasil diintegrasikan.

Dengan adanya BRIsat ini, BRI dapat mengembangkan berbagai layanan baru antara lain Digital Banking, Video Banking, WiFi Zone khusus untuk nasabah BRI, E-Channel di Kapal Laut/Pesiar, Kereta Api, dan Pesawat Terbang, Video Contact Center, dan Video/Audio Conference untuk komunikasi internal BRI serta semakin memperluas jangkauan jaringan kerja BRI ke daerah-daerah seluruh pelosok Indonesia bahkan sampai ke daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan selular (blankspot). Hal ini merupakan bagian dari komitmen BRI untuk membangun negeri dan mendukung program pemerintah dalam meningkatkan *financial inclusion* (misalnya penyaluran Bantuan Sosial melalui Agen BRLink BRI di daerah *blankspot*).

Pengelolaan BRIsat didukung oleh tim inti Divisi Satelit & Jaringan Telekomunikasi yang telah mengikuti pelatihan khusus baik yang diselenggarakan Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) maupun *Teaching Science and Technology, Inc* (TSTI) Amerika Serikat serta mengikuti program internship di perusahaan manufaktur satelit (Space Systems/Loral) yang berlokasi di Palo Alto, CA. Hal ini untuk memastikan bahwa pengelolaan BRIsat dilakukan secara profesional dan didukung oleh para tenaga ahli di bidang satelit.

Teknologi jaringan telekomunikasi BRI meliputi satelit BRIsat, VSAT, fiber optic, MPLS, dan GPRS/3G/4G, dikelola oleh 89 pekerja BRI meliputi fungsi operator, teknisi, engineer, manajerial, dan support yang kompeten di bidangnya masing-masing. Pengelolaannya dilengkapi dengan SOP yang memadai dan dimonitor 24 jam sehari, 7 hari seminggu (24x7) di fasilitas monitoring Integrated Operation Center (IOC). Kondisi BRIsat sendiri hingga saat ini sangat prima dan usianya diperkirakan mencapai 15 tahun sejak peluncuran yaitu 19 Juni 2016.



## TEKNOLOGI INFORMASI DAN OPERASIONAL

## Pengembangan SDM TI

Pada tahun 2017 tercatat 568 orang jumlah SDM TI yang berperan di bidang strategis dan operasional yang terdiri dari:

## Jumlah Pekerja TI

Jumlah Pekerja Organik dan Kontrak		Jumlah
Divisi Perencanaan dan Pengembangan TI		177
Divisi Operasional TSI		112
Divisi Satelit		80
Total		369

## Jumlah Pekerja TI

Status Karyawan	Divisi		
	Perencanaan & Pengembangan TI	Operasional TSI	Satelit
Tetap	173	112	48
Kontrak	4	-	32

Pada tahun 2017, SDM IT BRI telah mengikuti berbagai pelatihan yang bersifat teknis maupun manajerial serta sertifikasi manajemen risiko untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Pelatihan yang diikuti SDM IT BRI adalah sebagai berikut :

## Pengembangan Kompetensi Pekerja TI

Jenis	Judul
Programming	IBM I RPG/AS400 Fundamental and Advanced, EMV and Payment Masterclass, Building Web API with PHP & MYSQL (Advanced), Developing Windows Azure and Web Service, Developing ASP.NET MVC Web Applications, Android Programming Advanced, iOS9 Programming Using Xcode 7 with Objective C, System Analyst and Design.
Database	Administering a SQL Database Infrastructure 2016, Designing Business Intelligence Solutions With Microsoft SQL Server 2014, DBMS Administration 1 With Oracle 10 or 11g , Oracle Database 11g: Administration Workshop I Release 2, DBMS Administration 1 With Oracle 10 or 11g, Designing Business Intelligence Solutions w/ Microsoft SQL Server (+Exam).
Software Testing	Software Quality Assurance (TIOS-39), Software Testing Foundation.
Security	Security Audit & Forensic, Securing Web API, CSX-F (Cyber Security Nexus) Fundamental, PHP Security and Safe Programming.
Risk Management	IT Risk Management, Disaster Recovery and Business Continuity.
Sertifikasi	Certified Data Science Specialist (CDSS), CICPE (Certified IT Capacity Planning Expert), Ethical Hacking - Best Practices, CISSP (Certified Information System Security Professional), IT Architecture (TOGAF 9.1).
IT Governance	ITIL / IT Services Management Foundation, COBIT 5 FOUNDATION, Prince2 Foundation, Project Management Essentials and Project Management Professional (PMP) Preparation, Mastering Business Analysis (BABOK v3), IT Project Management based on PMBOK 5.

## Realisasi Inisiatif TI 2017

Modernisasi infrastruktur dan security TI yang telah dilakukan sepanjang tahun 2017, antara lain sebagai berikut:

## Bidang Jaringan Komunikasi

1. Strategi dan *Re-Design* Arsitektur Jaringan Komunikasi Unit Kerja untuk mengakomodasi integrasi BRISAT dan sekaligus melakukan *enhancement* pada jaringan komunikasi
2. Memperbarui dan mengimplementasikan kembali Tata Kelola IT Enterprise Architecture
3. Mengimplementasikan Integrated Service Management (ITSM) Fase I, II dan III

## TEKNOLOGI INFORMASI DAN OPERASIONAL

**Bidang IT Security**

1. Melakukan asesmen *Cyber security*
2. Menyempurnakan prosedur security TI.

**Bidang Operasional Data Center**

1. Menerapkan *Power Supply Premium Platinum* dan Implementasi Standard Operasional sesuai ISO 9001:2015.
2. Memperbarui *Network Operation Center (NOC)*
3. Memperbarui perangkat mesin dan infrastruktur di Data Center.
4. Menyempurnakan prosedur operasional Data Center.
5. Melakukan asesmen untuk kebijakan *Disaster recovery*

**Investasi TI 2017**

Pada tahun 2017, BRI telah merealisasikan anggaran investasi TI sekitar Rp666.2 miliar yang meliputi 17 proyek. Jumlah anggaran ini merupakan 53% dari belanja modal BRI tahun 2017.

**Strategi dan Rencana Pengembangan TI 2018**

Dalam mengembangkan IT BRI di 2018 BRI memiliki strategi Inisiatif dan Program Utama sebagai berikut:

- 
1. **Drive Bimodal system development, as well as Agile and Dev-Ops method**  
Perencanaan dan pengembangan system dilakukan tidak hanya dengan metode waterfall, namun juga agile dimana banyak pihak berkolaborasi dalam megembangkan satu system. Selain itu, implementasi atau deployment dapat dilakukan dengan cepat dengan metode Dev-Ops.
  2. **Enhancement Core Banking System**  
Pengembangan Core Banking System untuk mendukung digital banking
  3. **Enhancement Middleware**  
Pengembangan middleware untuk mendukung open API architecture
  4. **Improvement in Network and IT Service Delivery**  
Pengembangan infrastruktur jaringan dan kualitas layanan
  5. **Develop Digital Resilience and Fraud Detection System**  
Pengembangan disisi aspek keamanan TI dengan melengkapi deteksi fraud dalam rangka mewujudkan future-ready ICT platform
-



## DIGITAL BANKING



Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan dalam setiap sektor ekonomi termasuk industri perbankan. Kini, fungsi perbankan bukan lagi hanya sebatas lembaga intermediari, tetapi meluas sebagai pintu gerbang sistem pembayaran nasional (*national payment gateway*). Dalam era digital banking seperti saat ini, nasabah mengharapkan layanan perbankan yang mudah, cepat, tanpa batas, dan aman. Selain itu, membutuhkan produk dan jasa perbankan yang terintegrasi.

Untuk mendukung kinerja keuangan terutama pada bisnis Transaction Banking, baik di segmen Ritel (Retail Payment) maupun di segmen Wholesale (Wholesale Transaction Banking), BRI mengubah cakupan tanggung jawab Direktorat Teknologi Informasi menjadi Digital Banking dan Teknologi Informasi. Dengan adanya direktorat baru dan perluasan cakupan tanggung jawab tersebut, diharapkan pengembangan produk perbankan digital akan semakin cepat, dinamis dan *consumer centric*.

### Pencapaian tahun 2017

Selama tahun 2017, Direktorat Digital Banking dan Teknologi Informasi, terutama bidang Digital Banking masih dalam tahap pembentukan dengan fokus pada rekrutmen *talents* serta penyusunan strategi jangka panjang.

## DIGITAL BANKING

**Strategi Jangka Panjang Direktorat Digital Banking dan Teknologi Informasi**

Roadmap Digital Banking Tahun 2018-2022		
2018	2019-2020	2021-2022
Nurture Great Digital Talent	Establish ICT and Digital talent pool program, with impactful performance evaluation	Home for Best ICT and Digital Talent (Holding and Subsidiaries)
Establish Big Data and Leverage Data Analytics	Monetizing Data Analytics	Mature Data Management and Strong Data Analytics
Launch Digital Banking and establish partnership with open API	Leader in Digital Banking and Integrated API Ecosystem	The Best Digital Banking and Integrated API Platform in SEA

Selain program kerja strategis yang dilakukan selama tahun 2017, Direktorat Digital Banking dan Teknologi Informasi juga meneruskan pengembangan produk dalam *pipeline* sebagai berikut:

1. BRISPOT, system berbasis internet yang digunakan untuk memproses pinjaman secara *end-to-end* dan digunakan oleh Petugas Pemasar Mikro BRI (Mantri) yang bertujuan untuk memangkas *paper work* dan kegiatan administrative oleh Unit Kerja Mikro.
2. Consumer Loan Approval System and MYBRI 2.0 sebagai system pendukung bisnis pinjaman consumer BRI.
3. *New Internet Banking* BRI dan *Internet Banking for Business* dengan konsep MADP (*Mobile Application Development Platform*) yang lebih dinamis untuk pengembangan fitur-fitur baru dalam 1 *platform*.
4. *Trust Management System*, BRIPENS Gen2, dan New Cash Management System untuk mendukung pengelolaan dana korporasi.
5. Menyusun blueprint untuk mengakomodasi kolaborasi dengan *Fintech*
6. D-Nets untuk membantu mempersingkat waktu pembukaan Unit Kerja Luar Negeri BRI.
7. BRISMART, suatu system untuk memudahkan fungsi perencanaan dan operasional BRI yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan *Human Capital*.

Selain pembangunan system yang mendukung bisnis, BRI juga mengembangkan system untuk meningkatkan efisiensi penyaluran program pemerintah seperti:

1. Sistem Pajak Online yang mencakup pembayaran PBB, PKB, Pajak Daerah, e-Tax, dan e-Samsat Nasional untuk mendorong serta memudahkan Wajib Pajak dalam membayar pajak kepada pemerintah.
2. Sistem Penyaluran BANSOS (Bantuan Sosial) untuk mendukung program Indonesia Pintar, Kartu TANI, dan lain-lain.
3. Sistem SIM Online dan e-Tilang sebagai solusi bagi Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan operasional pelaksanaan perpanjangan SIM, pembuatan SIM Baru, maupun pembayaran tilang.
4. BRILink Mobile yang berbasis internet dan dapat di download secara mandiri untuk pengguna Android. Sistem ini memberikan alternatif bagi agen untuk menyediakan layanan transaksi perbankan kepada nasabah. Dengan BRILink Mobile ini, pengembangan layanan Laku Pandai dapat dilakukan dengan lebih cepat fleksible dan murah.

**Strategi dan Rencana Pengembangan 2018**

Dalam mengembangkan IT BRI di 2018 BRI memiliki strategi Initiative dan Program Utama sebagai berikut:

**Strategi Jangka Pendek Direktorat Digital Banking dan Teknologi Informasi**

1. ICT Certification and Digital Product Manager
2. Establish Big Data and Data Analytics
3. Enhance Digital Banking for Retail Customer
4. Launch Digital Partnership through Open API

Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

▶ Analisa &amp; Pembahasan Manajemen



## DIGITAL BANKING

## Pengembangan Usaha

## Building Nation Through Digital Initiatives

## A. The Situation

Perkembangan teknologi di era digital telah melahirkan perusahaan finansial maupun retail berbasis teknologi (*fintech & e-commerce*). Kehadiran para pemain baru di industri ini melengkapi *gap* layanan yang belum tersentuh oleh para pelaku industri yang sudah ada (*incumbent*) dengan mengedepankan kemudahan layanan kepada para *customer*. Selain itu, jumlah pengguna internet, media sosial dan *smartphone* yang tumbuh secara eksponensial ikut mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan berbasis teknologi baik *e-commerce* dan *fintech*, sehingga mendisrupsi bisnis yang dimiliki *incumbent*. Kondisi ini mengharuskan Bank BRI melakukan transformasi baik dari sisi strategi bisnis, cara bekerja, *culture* termasuk dalam pengembangan maupun pemasaran produk dan layanan yang dimiliki.

Dibawah ini adalah *snapshot* pertumbuhan digital di Indonesia di Tahun 2017

## Key Digital Statistical Indicators



## B. The Strategy

Dalam menghadapi persaingan di era digital, BRI menerapkan 3 (tiga) strategi kunci, yaitu dengan menentukan *channel* bisnis yang akan digunakan (*Key growth channel*), penyesuaian cara kerja dan *mindset* dalam organisasi (*Organization*), serta perlunya *partnership* dengan pihak ketiga untuk mempercepat pertumbuhan bisnis yang dimiliki BRI (*Collaboration*).

- **Key growth Channel**

Dalam menentukan channel bisnis, BRI akan fokus pada 2 hal yaitu: *mobile first strategy* dan *core competency* bisnis BRI. Pada *Mobile first strategy*, BRI menggunakan aplikasi *smartphone* sebagai sarana utama dalam memasarkan produk dan layanan digital yang dimiliki. Dalam menghadapi persaingan di era *digital banking*, BRI fokus pada pengembangan layanan *digital banking* yang bertolak pada 3 pilar, yaitu mikro, ritel dan konsumen, dengan menempatkan mikro sebagai portofolio terbesar dalam BRI Digital bank.

## DIGITAL BANKING

Selain itu, optimalisasi *big data* untuk mendukung proses pengembangan dan pemasaran produk termasuk putusan bisnis, dan putusan *strategic* lainnya telah dilakukan sehingga dihasilkan putusan yang lebih spesifik terutama dalam menentukan target market yang akan di akuisisi. Untuk mendukung analisa *big data* yang dimiliki, BRI saat ini telah memiliki 11 data *scientist* yang fokus pada pengembangan *modelling* untuk *fraud detection*, *credit scoring*, *churn analysis*, *merchant assessment analysis*, *customer 360*, *risk profile* dan *cross selling analysis*.

- **Organization**

Dalam menghadapi persaingan di era digital, transformasi *culture* dan cara kerja dengan menerapkan *agile & scrum methodology* serta *design thinking*, membawa BRI bergerak lebih lincah dan cepat beradaptasi dengan perubahan bisnis terutama yang disebabkan perubahan teknologi. Pengembangan talenta digital (*digital talent*) melalui program BRI *Digital Talent Accelerator* juga telah dilakukan. Target setidaknya 50 *product managers* yang mempunyai pengetahuan dan kompetensi dalam melakukan *product scooping*, *product roadmap*, serta *product growth* dalam rangka menciptakan produk dan layanan digital yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan nasabah (*customer centric*) telah mulai dilaksanakan dengan program BRI *Digital Talent Accelerator*. Framework BRI *Digital Talent Accelerator* dibagi dalam 3 fase yaitu: *Creative Talk & Digital Workshop*, *Digital Masterclass* dan *Digital Immersion* (Silicon Valley).



- **Collaboration**

BRI menyadari bahwa salah satu kunci sukses dalam persaingan di era digital adalah dengan melakukan *strategic partnership* dengan para pelaku *fintech* dan *e-commerce*. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan men-demokratisasi produk dan layanan yang dimiliki oleh BRI kepada pihak ketiga (*fintech*, *e-commerce* dan *startup digital* lainnya) melalui pengembangan BRlapi. BRlapi adalah layanan open API (*Application Programming Interface*) yang dilakukan oleh BRI untuk memperluas *channel* pemasaran produk dan layanan BRI kepada masyarakat sehingga inklusi keuangan semakin cepat menyebar ke seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Industri kreatif juga merupakan *strategic partner* bagi BRI dalam memperluas segmen bisnis BRI termasuk mendorong pertumbuhan UMKM. Guna mendukung hal tersebut, BRI membangun ekosistem di kalangan industri kreatif dan *startup* dengan menggunakan konsep 3P's yaitu: *People*, *Place* dan *Partnership*.

People; BRI akan melaksanakan program inkubasi dan akselerasi yang ditujukan untuk membantu percepatan bisnis para pelaku UMKM dan *Startup*. BRI *Incubation and Acceleration Project* akan dimulai di Tahun 2018.



## DIGITAL BANKING

Dukungan BRI dalam acara *Coworking Festival* yang diselenggarakan oleh Coworking Indonesia merupakan langkah awal dalam membangun 2P's, yaitu *Place* dan *Partnership*.

BRI telah melakukan penandatanganan *MoU* dengan Coworking Indonesia sebagai asosiasi *Coworking Space* di seluruh Indonesia untuk memberikan *training* dan pelatihan, serta tempat kepada UMKM dan *Startup* di masing-masing daerah di Indonesia dengan berbagai macam *competitive product/bisnis* yang dimiliki. Selain itu, *coworking space* juga menjadi sarana yang efektif untuk *sharing knowledge* dari para komunitas yang ada, sehingga antar pelaku UMKM/*Startup* dapat saling bertukar pikiran untuk meningkatkan potensi bisnis yang dimiliki serta memberikan manfaat bagi perusahaan.



# OPERASIONAL

Pengelolaan Operasional perusahaan tidak terlepas dari transaksi yang disebabkan oleh nasabah yang membutuhkan layanan perbankan. Pengelolaan Operasional diantaranya meliputi *Settlement* dan Manajemen likuiditas dikelola oleh Unit Kerja Sentra Operasi (STO). Unit Kerja tersebut bertanggung jawab mengelola pemrosesan dan monitoring transaksi operasional perbankan di seluruh jaringan kerja BRI.

Dalam membangun Unit Kerja STO, BRI bertujuan untuk menjamin kelancaran transaksi operasional perbankan di 10.658 jaringan kerja konvensional dan 414,576 jaringan e-channel yang terkoneksi secara *real time online*.

## Pengembangan Operasional tahun 2017

Selama tahun 2017, Unit Kerja STO melakukan pengembangan sistem dan operasional dalam berbagai bidang pengelolaan sebagai berikut:

### 1. Settlement

- a. Enhancement Centralised Payment System**  
Divisi Sentra Operasi (STO) senantiasa berkoordinasi dengan divisi terkait dalam hal pengembangan sistem yang mampu membantu memperlanjar/ meningkatkan efisiensi proses operasional, baik di Divisi STO maupun yang melibatkan unit kerja BRI. Program ini telah terealisasi di Tahun 2017 dan akan terus dilakukan dalam rangka perbaikan proses guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan operasional BRI.

STO BRI memiliki sistem operasional yang terpusat, cepat, dan rendah risiko. Sistem operasional ini memiliki sistem kontrol terpadu sesuai kebutuhan BRI, dimana Unit Kerja STO BRI memiliki kemampuan untuk memproses jutaan transaksi per-hari dengan tingkat kompleksitas yang tinggi dan melibatkan jumlah *database* nasabah yang sangat besar.

**b. Investigasi Fraud**

Di tahun 2017, BRI sedang mengembangkan Aplikasi *Two Factor Authentication* untuk user *Customer Service* dan *Teller* di Unit Kerja sebagai bentuk pencegahan *fraud internal* di Unit Kerja BRI. Untuk meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah, BRI juga melakukan re-organisasi Unit Kerja STO dengan memisahkan fungsi investigasi transaksi

bermasalah. Sehingga pengelolaan transaksi bermasalah dilakukan secara terpusat oleh Unit Kerja Layanan & Contact Center.

- c. Stock Management untuk Kartu & Warkat**  
Selama tahun 2017, unit Kerja STO senantiasa menjaga ketersediaan stock kartu maupun warkat (Cek & BG), sehingga permintaan unit kerja dapat segera terpenuhi sesuai dengan kebutuhan.

### 2. Manajemen Likuiditas

Proses pengelolaan kas fisik dilakukan dengan mengalokasikan 19 Kanca BRI menjadi Pengelola Kas Titipan Bank Indonesia selama tahun 2017.

### 3. Operational Excellence

**a. Resertifikasi ISO 9001:2015**

Resertifikasi ini telah memperhitungkan faktor-faktor risiko dalam kegiatan operasional. Inisiatif ini telah terealisasi pada tahun 2017, dengan ruang lingkup:

*"Operation Centre System for RTGS, Clearing, Remittance, Card Perso Processing, Payment System Reconciliation, ATM Reconciliation, Treasury & e-Banking Settlement, Cash Operation and Trade Processing Center"*

**b. STO Live in Holiday**

Selama tahun 2017, Unit Kerja STO melaksanakan kegiatan LIVE IN HOLIDAY, dimana proses rekonsiliasi, penyelesaian komplain dan settlement transaksi diselesaikan setiap hari, tidak hanya hari kerja.

## Strategi Operasional Tahun 2018

BRI telah menyiapkan inisiatif strategis dalam bidang operasional untuk menghadapi tahun 2018, sebagai berikut:

1. Pengkinian system sesuai dengan Regulasi terbaru pada SKNBI (Sistem Kliring Bank Indonesia)
2. Peninjauan kembali limit maksimum kas Unit Kerja BRI dan penyusunan kebijakan pagu dinamis kas ATM.
3. Penambahan Jumlah Mesin Perso Kartu
4. Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk seluruh bagian di Divisi Sentra Operasi
5. Evaluasi efisiensi proses bisnis melalui pengembangan system internal
6. Penentuan dan penyediaan alternate Site



## MANAJEMEN AKTIVA TETAP

Pengelolaan aktiva tetap BRI menjadi tanggung jawab Unit Kerja Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan Properti (MAT). Secara garis besar, Unit Kerja ini memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang Pengadaan Properti seperti pembangunan dan renovasi, maupun sewa dan beli property, serta penyediaan fasilitas gedung seperti genset, AC, pintu kluis, dan sebagainya. Disamping itu, juga bertanggungjawab atas pemeliharaan dan optimalisasi aktiva tetap, pengelolaan sistem informasi aktiva tetap, dan penyusunan perencanaan kebijakan pengelolaan aktiva tetap.

### Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap

Pengelolaan Aktiva Tetap BRI berpedoman pada Kebijakan Umum Manajemen Aktiva Tetap dan Logistik (KEMAL) yang telah ditetapkan oleh Direksi. KEMAL BRI memperoleh pengesahan dari Direksi pada tahun 2011 dan diberlakukan terhitung mulai tahun 2012. KEMAL berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa Badan Umum Milik Negara. Penyempurnaan terhadap KEMAL dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan mekanisme kontrol dan tantangan perusahaan. Dengan demikian diharapkan agar proses pengadaan barang dan jasa di BRI dapat lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis, skala prioritas, ketersediaan anggaran, dan efisiensi anggaran.

### Pengelolaan Aktiva Tetap Tahun 2017

Pengelolaan aktiva tetap BRI dilakukan secara terintegrasi menggunakan satu system utama yaitu BRISMILE. Sistem BRISMILE merupakan aplikasi pengelolaan kelogistikan BRI yang terintegrasi mulai dari perencanaan kebutuhan, usulan anggaran, pengadaan, distribusi, pembayaran dan pengelolaan aktiva tetap yang meliputi depresiasi, asuransi, relokasi dan penghapusbukuan. Manfaat yang didapatkan dari penggunaan BRISMILE adalah:

1. Peningkatan efektifitas dan kecepatan proses perencanaan anggaran karena dilakukan langsung secara online.
2. Peningkatan efektifitas dalam monitoring proses pengadaan aktiva tetap.
3. Peningkatan kecepatan proses penutupan asuransi karena dapat dilakukan secara online dengan pihak penanggung (asuradur).
4. Peningkatan efektifitas pembukuan penyusutan aktiva tetap dengan menurunnya kesalahan pembukuan pada proses penyusutan aktiva tetap karena BRISMILE akan menyusutkan aktiva tetap secara otomatis.
5. Peningkatan fleksibilitas pada saat proses relokasi (perpindahan) aktiva tetap antar unit kerja.
6. Peningkatan efektifitas pada proses monitoring posisi aktiva tetap karena dapat dilakukan secara online sehingga inkonsistensi data dapat diminimalkan.
7. Peningkatan kecepatan dalam penyediaan data yang reliable dan pengambilan keputusan.

### Realisasi Strategi dan Operasional Tahun 2017

Sepanjang tahun 2017, Unit Kerja MAT telah merealisasikan program kerja berikut:

1. **Operational Excellence: Penyempurnaan Sistem BRISMILE**  
Penyempurnaan Aplikasi BRISMILE (penambahan modul biaya amortisasi bangunan sewa dan upgrading bangunan disewa); Pembuatan dan update ketentuan standarisasi barang dan jasa; Penyempurnaan Pelaksanaan Daftar Rencana Pengadaan (DRP); serta Penerapan Pendaftaran Rekanan Online.
2. **Optimalisasi Aset Non-Produktif**  
BRI terus melakukan upaya optimalisasi aset non-produktif agar menjadi produktif untuk mendukung pencapaian kinerja. Optimalisasi aset non-produktif yang dilakukan selama tahun 2017, menghasilkan penurunan jumlah property terbengkalai dari 198 di tahun 2016 menjadi 177, atau turun 21 properti. Sebagian besar penurunan jumlah property terbengkalai tersebut berasal dari penggunaan kembali property terbengkalai menjadi fasilitas penunjang unit kerja seperti Unit Kerja Operasional, Depo Arsip, maupun Rumah Dinas sebagai fasilitas bagi pekerja BRI.

## MANAJEMEN AKTIVA TETAP

### 3. Revaluasi Aktiva Tetap

Sepanjang tahun 2017, BRI tidak melakukan Revaluasi Aktiva Tetap.

#### Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam hal pengadaan barang dan jasa, BRI membentuk Divisi Pengadaan Barang dan Jasa yang mengelola proses pengadaan barang dan jasa secara transparan dan sesuai dengan tata kelola yang baik.

Kinerja pengadaan barang dan jasa BRI selama tahun 2017 antara lain:

1. Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan dan kaidah GCG
2. Msmaksimalikan sinergi BUMN dalam proses pengadaan
3. Upgrade ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015
4. Menyusun Standardisasi barang kebutuhan ruang kerja di Kantor Pusat

#### Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa

BRI berkomitmen untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara transparan sebagai bagian dari implementasi prinsip tata kelola yang baik. Untuk mendukung terlaksananya GCG dan transparansi proses pengadaan, maka di tahun 2017, BRI melaksanakan review atas proses bisnis pada pengadaan barang dan jasa serta menyempurnakan proses bisnis, antara lain untuk sub-proses pembayaran dan jaminan.

Kebijakan GCG dan transparansi proses pengadaan barang dan jasa secara detil diulas lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Perusahaan.



BRI meyakini bahwa disiplin atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) merupakan pondasi utama dalam membangun reputasi BRI sebagai entitas perbankan yang bersih, sehat dan terpercaya.



# TATA KELOLA PERUSAHAAN

- 294 Komitmen Tata Kelola
- 296 Penghargaan GCG
- 297 Penerapan Tata Kelola 2017
- 298 Prinsip-Prinsip GCG
- 300 Tujuan Penerapan GCG
- 300 Roadmap GCG
- 304 Kebijakan Tata Kelola
- 305 Struktur, Mekanisme dan Hubungan Tata Kelola
- 316 Evaluasi Dan Penilaian GCG 2017
- 316 Evaluasi Dan Penilaian GCG Dari Pihak Internal, Regulator dan Pihak Eksternal
- 317 Penerapan Pedoman GCG
- 330 Self Assessment Tata Kelola Terintegrasi
- 331 Penilaian Penerapan GCG Oleh Pihak Independen
- 332 Corporate Governance Performance Index (CGPI)
- 333 Rencana Peningkatan GCG Tahun 2018
- 334 Rapat Umum Pemegang Saham
- 359 Dewan Komisaris
- 412 Komisaris Independen
- 414 Direksi
- 437 Dewan Pengawas Syariah
- 440 Penilaian Penerapan GCG 2017 Terhadap Dewan Komisaris dan Direksi
- 448 Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi
- 450 Pengungkapan Kebijakan Tata Kelola Remunerasi
- 462 Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan Dewan, & Rapat Direksi
- 486 Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali
- 486 Pengungkapan Hubungan Afiliasi
- 487 Organ Pendukung Dewan Komisaris
- 491 Komite Audit
- 509 Komite Nominasi dan Remunerasi
- 525 Komite Pengawas Manajemen Risiko
- 540 Komite Tata Kelola Terintegrasi
- 553 Komite Direksi
- 572 Sekretaris Perusahaan
- 577 Hubungan Investor
- 579 Satuan Kerja Audit Internal
- 592 Akuntan Publik
- 594 Fungsi Kepatuhan
- 604 Manajemen Risiko
- 626 Sistem Pengendalian Internal
- 630 Perkara Penting Yang Dihadapi Perusahaan
- 632 Akses Informasi dan Data Perusahaan
- 633 Kode Etik
- 636 Whistleblowing System
- 639 Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris Dan Direksi
- 640 Kebijakan dan Prosedur Anti Korupsi
- 649 Rencana Strategis Bank 2017
- 650 Kebijakan Bank Lainnya
- 662 Tabel Manajemen Risiko

## TATA KELOLA PERUSAHAAN



“

Tata kelola perusahaan BRI mengatur hubungan antara manajemen perusahaan, termasuk penentuan berbagai peraturan dan pedoman, struktur serta pemantauan kinerja. Dengan demikian, secara konsisten BRI menerapkan aspek kunci tata kelola perusahaan yang baik yang mencakup transparansi struktur dan operasional perusahaan; akuntabilitas Manajemen dan Dewan Komisaris kepada pemegang saham; serta tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan.

”



## TATA KELOLA PERUSAHAAN

## KOMITMEN TATA KELOLA

Komitmen BRI menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) pada seluruh tingkatan organisasi di BRI dalam upaya meningkatkan keberlanjutan dan nilai tambah (*added value*) perusahaan kepada *stakeholders* serta melindungi kepentingan *shareholders*.

Seiring semakin kompleksnya kegiatan bisnis dan perkembangan era digital saat ini, penerapan prinsip GCG wajib menjadi landasan utama dalam menjalankan operasional dan bisnis bank yang *prudent*. Upaya penerapan GCG akan memberikan kontribusi positif kepada perusahaan diantaranya keberlanjutan perusahaan, tercapainya kinerja perusahaan, dan nilai tambah bagi *stakeholders & shareholders*.

BRI berkomitmen tinggi untuk terus meningkatkan penerapan GCG dari *top management* khususnya Dewan Komisaris dan Direksi. Pelaksanaan komitmen tersebut dengan melaksanakan prinsip-prinsip GCG disetiap kegiatan usaha BRI, yang ditunjukkan dalam visi dan misi BRI, *corporate values* dan strategi kebijakan dalam keberlanjutan perusahaan. Komitmen manajemen selama tahun 2017 diantaranya:

1. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor perbankan dan telah *go public*, BRI dituntut untuk mampu mengimbangi perubahan lingkungan industri dan mengakomodasi kebutuhan nasabahnya dengan tetap berdasarkan pada peraturan yang berlaku.
2. Strategi usaha yang berfokus pada pembangunan negeri melalui *Integrated Banking Solution* dan Transformasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan tantangan yang dihadapi BRI tak hanya dari sisi operasional tetapi juga dari sisi penerapan tata kelola. Dengan demikian BRI berkomitmen untuk konsisten menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (GCG) dengan standar terbaik dalam melaksanakan aktivitas usaha berkelanjutan guna mencapai tujuan usaha BRI.

Komitmen Tata Kelola BRI diwujudkan dalam bentuk:

1. Visi dan Misi yang menggambarkan tujuan usaha masa mendatang dan cara pencapaiannya.
2. Nilai-nilai perusahaan yang wajib di tanamkan dan diterapkan oleh insan BRI di seluruh tingkatan sebagai Budaya Kerja.
3. Kode Etik sebagai pedoman tentang etika usaha, etika bekerja dan tata perilaku insan BRI dalam melaksanakan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik, termasuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
4. Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris sebagai acuan dalam pengelolaan dan pengawasan jalannya perusahaan
5. Perjanjian Kerja Bersama syarat kerja sebagai hasil perundingan dan kesepakatan antara BRI dengan serikat pekerja BRI, yang kemudian menjadi pedoman kedua belah pihak dalam melaksanakan hubungan kerja dan sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan hubungan kerja.
6. Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagai komitmen BRI terkait tanggung jawab sosial perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi BRI sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

## TATA KELOLA PERUSAHAAN

## PENGHARGAAN GCG

Pada tahun 2017 BRI mampu menjawab tantangan ini melalui pembuktian komitmen atas konsistensi dan pengembangan mekanisme GCG sehingga memperkokoh reputasi BRI sebagai entitas perbankan yang bersih dan sehat. Keberhasilan penerapan GCG dibuktikan dengan perolehan penghargaan *The Best Overall & Top 50 The Biggest Market Capitalization PLCs in Indonesia* dan *Indonesia Most Trusted Company 2017*.

**The Best Overall &  
Top 50 The Biggest  
Market Capitalization  
PLCs in Indonesia**  
(ASEAN Corporate  
Governance Scorecard)



**Most Trusted Company**  
(Corporate Governance  
Performance Index)



## TATA KELOLA PERUSAHAAN

## PENERAPAN TATA KELOLA 2017

## Dasar Penerapan GCG

BRI memastikan bahwa penerapan GCG telah sesuai dan berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku dari sisi perbankan dan pasar modal. Peraturan-peraturan yang menjadi landasan pelaksanaan GCG tersebut adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik negara (BUMN), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 Tentang Penerapan Tata kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SE.OJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan GCG berdasarkan standar terkini, BRI juga menjalankan dan berpedoman pada *best practices* yang berlaku di industri secara umum maupun di bidang perbankan sebagai berikut:

- Prinsip-prinsip GCG oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
- *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.
- Pedoman GCG Perbankan Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
- *Principles for Enhancing Corporate Governance* oleh *Basel Committee on Banking Supervision*

## TATA KELOLA PERUSAHAAN

Selain itu, dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan *best practice* terkini, BRI juga membentuk kebijakan dan panduan operasional internal yang dijadikan acuan oleh setiap bagian dan unit kerja dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, antara lain:

- Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No.05-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep:S.64-DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No.06-KOM/BRI/07/2015 dan Nokep:S.339-DIR/DKP/07/2015 tanggal 28 Juli 2015 perihal Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Keuangan.



### PRINSIP-PRINSIP GCG

Mekanisme GCG pada BRI dirumuskan dengan menggunakan serangkaian prinsip dasar dalam menopang aktivitas usaha berkelanjutan BRI sebagai berikut:

#### Transparansi

Merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, serta dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip Transparansi BRI berwujud sebagai berikut:

- Bank mempunyai kebijakan untuk mengungkapkan berbagai informasi penting yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.
- Bank mengungkapkan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku diantaranya visi dan misi Bank, nilai-nilai/sasaran usaha dan strategi,

kondisi keuangan, susunan dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham pengendali, struktur organisasi, manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan pelaksanaan GCG serta kepatuhan Bank.

- Prinsip keterbukaan informasi tidak mengurangi kewajiban informasi rahasia Bank dan Nasabah sesuai peraturan yang berlaku.

#### Akuntabilitas

Merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip Akuntabilitas BRI dilaksanakan melalui:

- Bank menetapkan sasaran usaha jangka panjang dan target usaha jangka pendek yang



## TATA KELOLA PERUSAHAAN

dipertanggungjawabkan kepada *shareholders* dan *stakeholders*.

- b. Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan laporan tahunan dan pertanggungjawaban keuangan dalam RUPS.
- c. Bank menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan berlaku kepada otoritas pengawas Bank dan *stakeholders* lainnya sesuai ketentuan berlaku.
- d. Bank menetapkan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing Dewan Komisaris, Direksi dan organ perusahaan serta jajaran dibawahnya yang selaras dengan visi dan misi Bank.
- e. Bank memastikan adanya struktur, sistem dan SOP yang dapat menjamin bekerjanya mekanisme *check and balance* dalam pencapaian visi dan misi Bank.
- f. Bank memastikan adanya struktur, sistem dan SOP yang dapat menjamin bekerjanya mekanisme *check and balance* dalam pencapaian visi dan misi Bank.
- g. Bank memiliki sistem pengendalian internal yang efektif.

### Responsibilitas

Prinsip responsibilitas adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- a. Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan internal Bank.
- b. Bank memelihara kelestarian alam melalui kebijakan perkreditan dan kebijakan lain yang mendukung terpeliharanya sumber daya alam.
- c. Bank bertindak sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*) melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan.

### Independensi

Independensi merupakan suatu kondisi dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Pemenuhan prinsip ini dilaksanakan melalui hal sebagai berikut:

- a. Bank menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas benturan kepentingan dan segala pengaruh atau tekanan sehingga bertindak objektif.
- b. Bank melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai Anggaran Dasar, peraturan internal Bank dan peraturan yang berlaku.

### Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

*Fairness* adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana:

- a. Bank memberikan perilaku yang wajar dan setara kepada *stakeholders* sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Bank.
- b. Bank memberikan kesempatan kepada *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta adanya akses keterbukaan informasi.

## TATA KELOLA PERUSAHAAN

### TUJUAN PENERAPAN GCG

Penerapan prinsip-prinsip GCG sudah lama diterapkan sejak lama di setiap tingkat organisasi BRI ataupun dalam proses bisnis yang dijalankan perusahaan. Komitmen penerapan GCG memberikan dampak positif pencapaian kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Implementasi GCG secara konsisten dan berkesinambungan bertujuan untuk:

1. Mendukung Visi dan Misi Bank.
2. Mendukung pencapaian tujuan bank melalui peningkatan kinerja yang signifikan.
3. Memaksimalkan nilai perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan kepada *shareholders* dan *stakeholders* bahwa pengurusan dan pengawasan Bank dijalankan secara profesional.
5. Menjamin kesehatan dan kemajuan Bank.
6. Memberikan pedoman bagi Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pekerja Bank.
7. Mendukung pengelolaan sumber daya Bank secara efektif dan efisien.
8. Mengoptimalkan hubungan *risk return* yang konsisten dengan strategis Bank.
9. Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh insan Bank didasari prinsip-prinsip GCG.
10. Mendukung penetapan kebijakan Bank yang didasari oleh prinsip-prinsip GCG.
11. Membantu terwujudnya *good corporate citizen*.

### ROADMAP GCG

*Roadmap* GCG merupakan strategi GCG jangka panjang yang dimiliki oleh BRI sebagai acuan pendukung dalam menentukan strategi usaha di masa mendatang. BRI meyakini bahwa keselarasan antara strategi usaha dan strategi tata kelola dapat membantu pencapaian keberhasilan kinerja perusahaan serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam bentuk kepercayaan dari pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Dalam mencapai penerapan GCG yang efektif kepada seluruh *stakeholders*, BRI telah menerapkan prinsip-prinsip GCG sejak tahun 2001 dengan diberlakukan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi mengenai Prinsip-Prinsip GCG BRI. Implementasi penerapan prinsip-prinsip GCG terus berkembang sampai saat ini dengan berpedoman pada prinsip tata kelola standar tingkat Nasional dan Internasional.

Fokus *Roadmap* BRI pada 5 (lima) tahun terakhir adalah meningkatkan kualitas GCG yang dibagi dalam tahapan antara lain:

1. Memperkuat kualitas GCG
2. Sosialisasi/*awareness* dan tinjauan atas GCG
3. Menciptakan tata kelola terintegrasi
4. Memperkuat tata kelola terintegrasi dan optimalisasi GCG berdasarkan standar internasional ASEAN/*ASEAN GC Standard*.





## TATA KELOLA PERUSAHAAN

## Pelaksanaan Roadmap GCG

BRI terus berupaya meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan perusahaan. Tahapan pelaksanaan GCG di BRI adalah sebagai berikut:

TAHUN	AKTIVITAS
2000 s/d 2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Penerapan GCG yang tertuang dalam <i>business plan</i></li> <li>· Komitmen manajemen dalam visi misi, <i>core value</i>, dan <i>corporate culture</i></li> <li>· GCG <i>policy (Charter)</i></li> </ul>
2002 s/d 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kebijakan Kode Etik BRI</li> <li>· <i>Board Manual</i> Dewan Komisaris dan Direksi</li> <li>· Pedoman Sekretariat Perusahaan</li> <li>· Panduan Transparansi dan Pengungkapan</li> <li>· Piagam Komite Audit</li> <li>· Kebijakan Umum Manajemen Risiko</li> <li>· Kebijakan Peraturan Disiplin</li> <li>· Peraturan Ketenagakerjaan</li> <li>· Kebijakan Sekuriti Teknologi Sistem Informasi</li> <li>· Revisi Kebijakan Umum Teknologi dan Sistem Informasi</li> <li>· Revisi Kebijakan Umum Logistik</li> </ul>
2006 s/d 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Panduan Komite Nominasi dan Remunerasi</li> <li>· Panduan Komite Pengawas Manajemen Risiko</li> <li>· Piagam Audit (<i>Audit Charter</i>)</li> <li>· Arsitektur SDM</li> <li>· Revisi GCG <i>Policy</i></li> <li>· Revisi <i>Board Manual</i> Dewan Komisaris dan Direksi</li> <li>· Revisi Panduan Sekretaris Perusahaan</li> <li>· Revisi Panduan Transparansi dan Pengungkapan</li> <li>· Revisi Piagam Komite Audit</li> <li>· Revisi Kebijakan Peraturan Disiplin</li> <li>· Revisi Kebijakan Sekuriti Teknologi Sistem Informasi</li> <li>· Revisi Sistem Monitoring Kualitas Layanan</li> </ul>
2010 s/d 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Piagam Kepatuhan (<i>Compliance Charter</i>)</li> <li>· Kebijakan Penerapan Budaya Kepatuhan</li> <li>· Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan</li> <li>· Kebijakan Strategi Anti <i>Fraud</i></li> <li>· Standar <i>Service Level Agreement (SLA)</i></li> <li>· Revisi GCG <i>Policy</i></li> <li>· Revisi Kode Etik</li> <li>· Revisi <i>Board Manual</i> Dewan Komisaris dan Direksi</li> <li>· Revisi <i>Board Manual</i> dan Panduan Kerja Dewan Komisaris beserta Komite di bawahnya</li> <li>· Revisi Kebijakan Umum Teknologi dan Sistem Informasi</li> <li>· Revisi Kebijakan Umum Manajemen Aktiva Tetap dan Logistik</li> <li>· Revisi Sistem Monitoring Kualitas Standart Layanan <i>Service Level Agreement (SLA)</i></li> </ul>

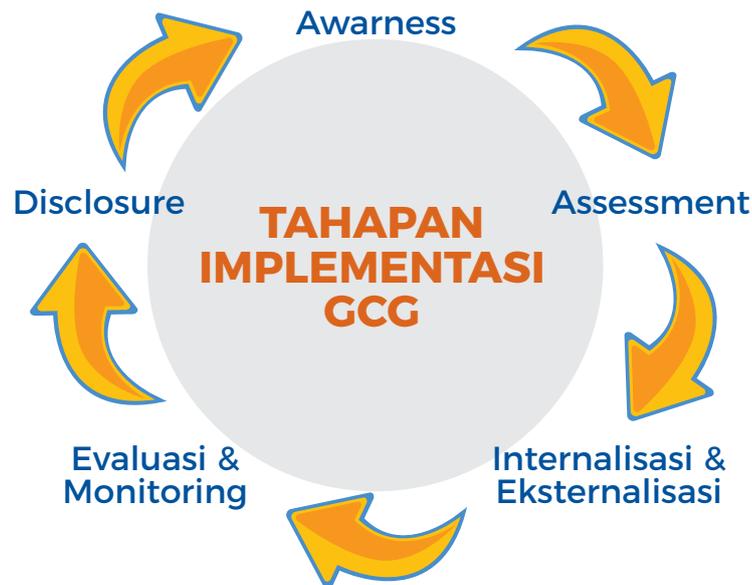
Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

## TATA KELOLA PERUSAHAAN

TAHUN	AKTIVITAS
2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kebijakan Prinsip Mengenal Pekerja (<i>Know Your Employee</i>)</li> <li>· Pelaksanaan Program Bina Lingkungan</li> <li>· Pedoman Penyusunan dan Penggunaan Anggaran Pendidikan</li> <li>· Ketentuan <i>Whistleblowing System</i></li> <li>· Revisi <i>GCG Policy</i></li> <li>· Revisi Kode Etik Kebijakan Gratifikasi</li> <li>· Revisi Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko</li> <li>· Revisi Sistem Pemberian Penghargaan dan Sanksi dalam rangka Peningkatan Kualitas Layanan</li> <li>· Revisi Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan BRI</li> </ul>
2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pengkinian Kebijakan dan Prosedur Audit Intern</li> <li>· Pelaksanaan Program Pendampingan Pekerja Baru</li> <li>· BPO Penerapan APU dan PPT</li> <li>· Pedoman Penilaian peningkatan Kesehatan Bank</li> <li>· <i>Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)</i></li> <li>· Ketentuan <i>Security</i> Teknologi Sistem Informasi BRI</li> <li>· Revisi Kebijakan Benturan Kepentingan</li> </ul>
2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kebijakan Umum Rencana Jangka Panjang BRI</li> <li>· Pedoman Pelaksanaan Rencana Jangka Panjang BRI</li> <li>· Kebijakan Umum Manajemen Aktiva Tetap dan Logistik (KEMAL) BRI</li> <li>· Kebijakan Umum Manajemen Risiko</li> <li>· Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi</li> <li>· Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (<i>Risk Based Bank Rating</i>)</li> <li>· Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)</li> <li>· Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI</li> <li>· Piagam Audit Intern BRI</li> <li>· <i>IT Strategic Plan</i></li> <li>· Penilaian Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko</li> <li>· Revisi Kebijakan Strategi <i>Anti Fraud</i></li> </ul>
2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Komitmen Program Pengendalian Gratifikasi BRI bersama KPK</li> <li>· <i>Disaster Recovery Plan (DRP)</i> Teknologi Informasi BRI</li> <li>· Implementasi aplikasi <i>Knowledge Management</i> yaitu <i>sharing of knowledge</i> (ketentuan internal dan eksternal, publikasi hasil kajian/ riset, dan <i>training</i>) kepada seluruh pekerja.</li> <li>· Implementasi <i>E-learning</i> ke seluruh pekerja BRI</li> <li>· Revisi Ketentuan <i>Whistleblowing System</i></li> </ul>



## TATA KELOLA PERUSAHAAN



### Penerapan GCG Tahun 2017

Pelaksanaan GCG tahun 2017 telah selaras dengan *Roadmap* GCG yang disusun oleh BRI melalui kegiatan Perumusan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan tercapainya tujuan akhir *Roadmap* GCG yang diharapkan, yaitu GCG Excellent.

Pada tahun 2017 BRI telah melaksanakan aktivitas terkait GCG sebagai berikut:

1. Penandatanganan Komitmen Anti *Fraud* oleh seluruh Pekerja.  
Komitmen anti *fraud* menjadi dasar dalam penyusunan setiap kebijakan, sistem, dan prosedur operasional bisnis BRI meliputi penerapan manajemen risiko, prinsip GCG dan sistem pengendalian intern. Sebagai wujud komitmen Direksi dalam Strategi Anti *Fraud*, Direksi BRI tidak memberikan toleransi (Zero Tolerance) pada setiap bentuk *fraud* baik yang berasal dari internal maupun eksternal BRI. Seluruh pekerja BRI bertanggungjawab dalam pencegahan *fraud*, hal ini diwujudkan dalam penandatanganan komitmen anti *fraud* oleh seluruh pekerja BRI.
2. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
  - a. Pengumuman RUPS Tahunan BRI kepada seluruh pemegang saham disampaikan secara terbuka melalui media cetak nasional dan *website* Perseroan pada tanggal 21 Februari 2017. RUPS Tahunan BRI dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2017 dengan 7 (tujuh) agenda rapat. Penjelasan RUPS akan dibahas pada Bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.
  - b. Pelaksanaan RUPS Luar Biasa pada tanggal 18 Oktober 2017.
3. Pembayaran Dividen  
Pembayaran Dividen dilakukan tanggal 13 April 2017 kurang 1 (satu) bulan sejak tanggal RUPS tahunan.
4. Kebijakan dan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi  
Sesuai Komitmen BRI bersama KPK pada tanggal 22 Juli 2016 dalam pengendalian gratifikasi, Pada tahun 2017, BRI telah memiliki Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
5. Partisipasi penilaian GCG dalam ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) dan *Corporate Governance Performance Index* (CGPI).

## TATA KELOLA PERUSAHAAN

6. Pelaksanaan *Self Assessment* GCG dan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI.
7. Penyampaian Laporan Tahunan Tahun buku 2016 kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia.
8. Penyampaian Laporan Tata Kelola Terintegrasi Tahunan dan publikasi pada *website* perseroan.
9. Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi.
10. Kebijakan Umum Teknologi Informasi BRI.
11. Ketentuan Security Teknologi Informasi BRI.
12. Kebijakan dan prosedur penerapan Program APU dan PPT.
13. Kebijakan Umum Keberlanjutan

Dalam meningkatkan keberhasilan dan memperkuat implementasi Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST), BRI memiliki Kebijakan Umum dalam program keuangan berkelanjutan yang bertujuan terhadap pencapaian visi & misi bank, pengelolaan bisnis bank terintegrasi dengan pengelolaan risiko LST dan memberikan nilai tambah (*Value Added*) bagi *stakeholders* dalam jangka panjang.

14. Strategi Implementasi Keberlanjutan (*Sustainability*) BRI.
15. Sosialisasi kebijakan dan prosedur GCG kepada seluruh pekerja BRI.
16. Kebijakan Manajemen Risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) Kelapa Sawit.
17. Kebijakan Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan Gratifikasi dan Pengelolaan Barang Gratifikasi BRI.
18. Revisi Kebijakan Petunjuk Pelaksanaan *Whistleblowing System*.
19. Kebijakan Tata Kelola Remunerasi BRI.

## KEBIJAKAN TATA KELOLA

Dalam implementasi GCG, Bank perlu memiliki kebijakan internal yang mengatur tugas dan tanggung jawab pada setiap level organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan peraturan yang berlaku. Kebijakan GCG yang dimiliki BRI diantaranya:





## TATA KELOLA PERUSAHAAN

1. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep. S.281-DIR/DKP/12/2011 tentang Penerapan Budaya Kepatuhan di Unit Kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No:02-KOM/BRI/15/2012 dan Nokep. S.104-DIR/DKP/05/2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
3. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No. 05-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep. S.64-DIR/DKP/12/2013 tentang Kebijakan *Good Corporate Governance* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
4. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No. 06-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep. S.65-DIR/DKP/12/2013 tentang Kode Etik (*Code of Conduct*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
5. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No. 06-KOM/BRI/07/2015 dan Nokep. S.339-DIR/DKP/07/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
6. Surat Edaran Direksi BRI Nose. S.27-DIR/DKP/12/2016 tentang *Whistleblowing System* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
7. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No. 03-KOM/BRI/03/2017 dan Nokep:S.11-DIR/DKP/03/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
8. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No:09-KOM/BRI/11/2017 dan Nokep:S.1023-DIR/KPS/11/2017 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
9. Pedoman Tata Tertib Komisaris.
10. Kebijakan Dividen.

### STRUKTUR, MEKANISME DAN HUBUNGAN TATA KELOLA

Semakin kompleksnya risiko yang dihadapi Bank, maka semakin meningkat pula kebutuhan akan praktik *Good Corporate Governance*. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan, tidak hanya nasabah dan masyarakat umum namun juga dunia internasional.

Sebagai wujud komitmen terhadap implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, BRI telah memiliki Kebijakan *Good Corporate Governance (GCG Policy/Charter)* yang berlaku bagi seluruh organisasi dan insan BRI, yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB) Dewan Komisaris dan Direksi BRI No.05-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep S.64-DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013.

SKB (*GCG Policy/ Charter*) yang dirumuskan berdasarkan perkembangan bisnis BRI, evaluasi atas pedoman sebelumnya serta *best practice GCG* tersebut mencakup 4 (empat) aspek tata kelola yaitu komitmen, struktur, proses dan hasil yang dijabarkan pada bagan berikut:

## TATA KELOLA PERUSAHAAN

KOMITMEN TATA KELOLA	STRUKTUR TATA KELOLA	PROSES TATA KELOLA	HASIL TATA KELOLA
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Visi dan Misi</li> <li>· Nilai Perusahaan</li> <li>· Board Charter</li> <li>· Kode Etik</li> <li>· Pelestarian Lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Organ Utama</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· RUPS</li> <li>· Dewan Komisaris</li> <li>· Direksi</li> </ul> </li> <li>· <b>Organ Pendukung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Komite</li> <li>· Sekretaris Dewan Komisaris</li> <li>· Sekretariat Perusahaan</li> <li>· Satuan Kerja Kepatuhan</li> <li>· Satuan Kerja Audit Internal</li> <li>· Satuan Kerja Manajemen Risiko</li> </ul> </li> <li>· <b>Kebijakan dan Prosedur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rencana Strategi Bank</li> <li>· Kebijakan Bisnis Bank</li> <li>· Transparansi dan Pengungkapan</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pelaksanaan RUPS</li> <li>· Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</li> <li>· Pelaksanaan Bisnis Bank</li> <li>· Pengelolaan SDM</li> <li>· Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan</li> <li>· Tata Kelola IT</li> <li>· Tata Kelola Terintegrasi</li> <li>· Sosialisasi Kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Keberlanjutan Perusahaan</li> <li>· Kinerja Perusahaan tercapai</li> <li>· Manfaat Bank bagi masyarakat dan lingkungan.</li> </ul>

### Pilar 1. Komitmen Tata Kelola

Sepanjang perjalanan usaha, BRI berkomitmen untuk terus memperbaiki, meningkatkan dan menyempurnakan implementasi GCG agar selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi usaha terkini. Komitmen GCG BRI tertanam dalam visi dan misi, *core value*, serta strategi kebijakan bisnis Bank yang kemudian dituangkan pula ke dalam elemen-elemen fundamental usaha Bank sebagai berikut:

#### Visi dan Misi

BRI mempunyai visi yang mencerminkan tujuan yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Misi kemudian menjelaskan cara BRI dalam mencapai tujuan tersebut. Secara lebih jelas Visi dan Misi dijelaskan pada Bab Profil Perusahaan.

#### Nilai-nilai Perusahaan (Core Value)

*Core Value* BRI mencakup nilai dan budaya yang menjadi landasan cara berpikir, berperilaku dan bertindak, untuk kemudian ditanamkan sebagai Budaya Kerja yang diterjemahkan dalam Tindakan Budaya Kerja. Secara lebih jelas *Core Value* dijelaskan pada Bab Profil Perusahaan.

#### Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi

BRI mempunyai Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi yang memuat struktur, pembagian tugas dan tanggung jawab, etika kerja, tata cara rapat, organisasi, dan

hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi, yang digunakan sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas guna mencapai tujuan usaha Perusahaan. Secara lebih jelas Kode Etik dijelaskan pada Bab Dewan Komisaris.

#### Kode Etik

BRI menyusun Kode Etik Bank sebagai pedoman tentang etika usaha, etika bekerja dan tata perilaku insan BRI dalam melaksanakan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik, termasuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Kode Etik BRI berlaku bagi seluruh insan BRI diseluruh jenjang organisasi. Secara lebih jelas Kode Etik dijelaskan pada Bab Kode Etik.

#### Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Perjanjian kerja bersama (PKB) disusun untuk mengatur syarat-syarat kerja sebagai hasil perundingan dan kesepakatan antara BRI dengan serikat pekerja BRI, yang kemudian menjadi pedoman kedua belah pihak dalam melaksanakan hubungan kerja dan sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan hubungan kerja. PKB merupakan amanat dari Undang-undang Ketenagakerjaan yang pada prinsipnya menjunjung hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan pekerja. Secara lebih jelas Perjanjian Kerja Bersama dijelaskan pada Bab SDM.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

**Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

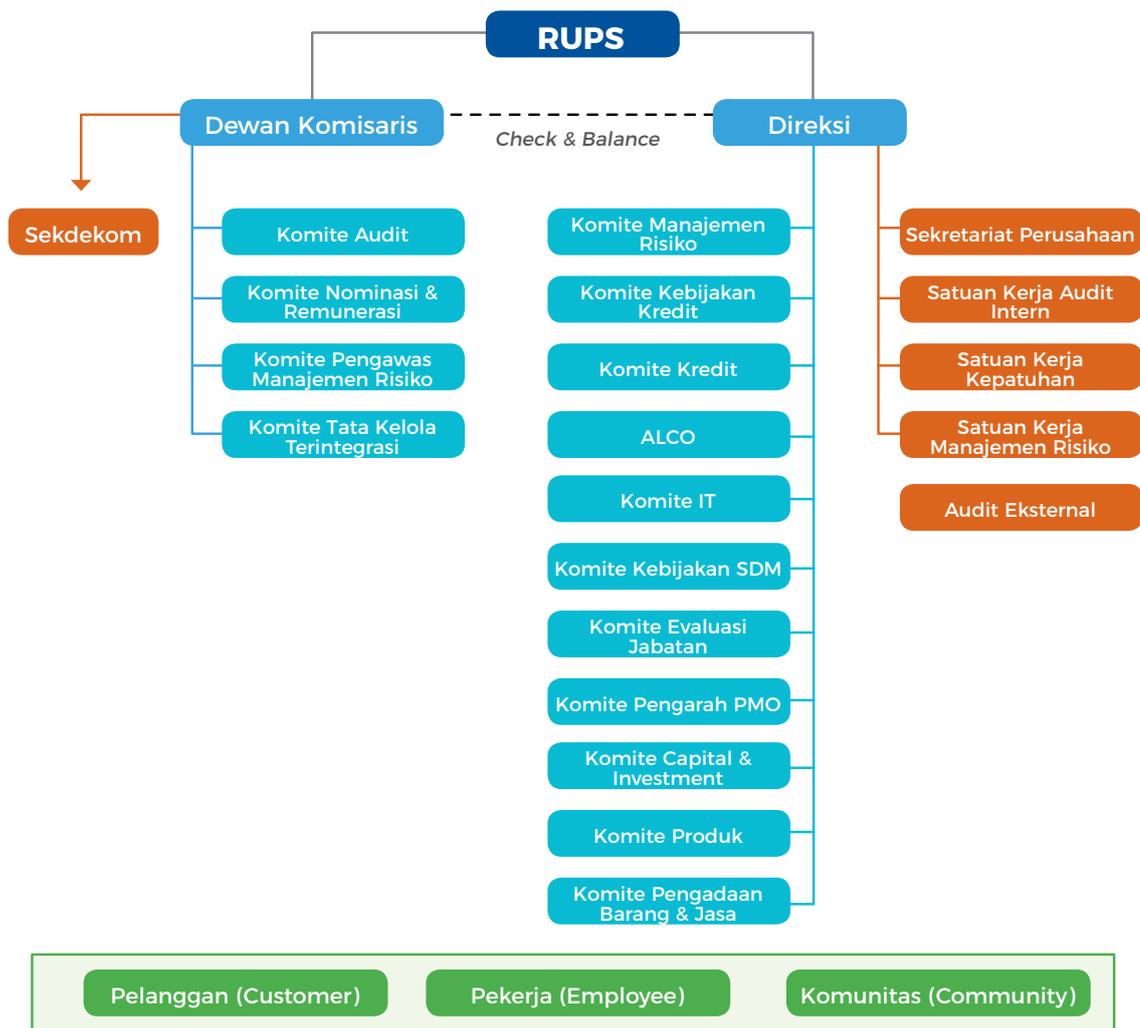
Tanggung jawab terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan komitmen BRI untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi BRI sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan BRI dipublikasikan kepada pemangku kepentingan dalam laporan secara berkala. Secara lebih jelas peran BRI dalam pelestarian sumber daya alam dijelaskan pada Bagian Tanggung jawab Sosial Perusahaan.

**Pilar 2. Struktur Tata Kelola**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur GCG BRI terdiri dari 3 (tiga) organ utama, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi

Organ tata kelola perusahaan di Perseroan dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola Perseroan dapat berjalan dengan efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme kontrol *check and balance*. Struktur Tata Kelola BRI meliputi Organ Utama, Organ Pendukung serta Kebijakan dan Prosedur sebagai berikut:



## TATA KELOLA PERUSAHAAN

### Organ Utama Struktur Tata Kelola

#### Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah organ tertinggi di struktur GCG. RUPS merupakan forum pemegang saham untuk pengambilan keputusan serta meminta pertanggungjawaban atas hal berkaitan dengan kepentingan usaha BRI dengan memperhatikan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan. RUPS terdiri atas:

- **RUPS Tahunan**  
Yang diselenggarakan satu kali dalam setahun, wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Agenda wajib dalam RUPS Tahunan BRI antara lain: persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan laporan keuangan dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta penggunaan laba bersih dan penetapan auditor eksternal.
- **RUPS Luar Biasa**  
Yang dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan. Pelaksanaan RUPS mengacu kepada anggaran dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa agenda yang dapat disahkan dalam RUPS Luar Biasa antara lain pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta tindakan korporasi yang membawa dampak signifikan.

#### Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Bank oleh Direksi. Dewan Komisaris berhak meminta informasi dan pertanggung jawaban dari Direksi dan komite di bawah Direksi perihal berjalannya pengelolaan Bank, termasuk keputusan-keputusan yang diambil dalam rangka mencapai tujuan usaha. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Komisaris Independen ditetapkan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali untuk penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar Bank, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan lebih rinci terkait tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BRI tertuang dalam Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.

#### Direksi

Direksi merupakan organ yang menjalankan pengelolaan Bank serta bertanggung jawab terhadap pencapaian usaha dan wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan Direktur Utama wajib mempunyai independensi terhadap Pemegang Saham Pengendali. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi mengacu pada Anggaran Dasar bank, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan lebih rinci mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi Bank dijelaskan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

#### Organ Pendukung Struktur Tata Kelola

- **Komite Dibawah Dewan Komisaris**
  - a. Komite Audit
  - b. Komite Nominasi dan Remunerasi
  - c. Komite Pemantau Manajemen Risiko
  - d. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Ketentuan lebih rinci terkait Komite dibawah Dewan Komisaris tertuang dalam pedoman dan tata tertib kerja komite Dewan Komisaris dan akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

- **Komite Dibawah Direksi**
  - a. Asset & Liabilities Committee (ALCO)
  - b. Risk Management Committee
  - c. Komite Kredit
  - d. Komite Capital & Investasi
  - e. Komite Kebijakan Perkreditan.
  - f. Komite Pengarah Teknologi Informasi
  - g. Komite Kebijakan *Human Capital*
  - h. Komite Evaluasi Jabatan



## TATA KELOLA PERUSAHAAN

- i. *Project Management Office Steering Committee*
- j. Komite Produk
- k. Komite Pengadaan Barang dan Jasa

Ketentuan lebih rinci terkait Komite dibawah Direksi tertuang dalam pedoman dan tata tertib kerja komite Direksi dan akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

- **Sekretariat Dewan Komisaris**

Merupakan organ yang diangkat oleh Dewan Komisaris dan bertugas membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Penjelasan lebih rinci terkait Sekretariat Dewan Komisaris akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

- **Sekretariat Perusahaan**

Merupakan organ pendukung bertanggungjawab kepada Direktur Utama yang berperan untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing terkait dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan serta sebagai penghubung dan pengelola komunikasi baik antara perusahaan kepada pihak internal maupun pihak eksternal diantaranya pemegang saham, regulator serta pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*).

Penjelasan lebih rinci terkait Sekretariat Perusahaan akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

- **Satuan Kerja Manajemen Risiko**

Penerapan Manajemen Risiko bertugas melaksanakan penerapan Manajemen Risiko Perusahaan (ERM) yang meliputi 4 pilar sebagai berikut:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
- c. Proses Manajemen Risiko dan sistem informasi Manajemen Risiko
- d. Sistem Pengendalian Internal

Penjelasan lebih rinci terkait Satuan Kerja Manajemen Risiko akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

- **Satuan Kerja Kepatuhan**

Merupakan Unit kerja independen yang bertanggungjawab dalam melaksanakan Fungsi kepatuhan di BRI.

Penjelasan lebih rinci terkait Satuan Kerja Kepatuhan akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

- **Satuan Kerja Audit Intern**

Audit Internal merupakan unit kerja yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta memiliki garis komunikasi dengan Komite Audit. Audit Intern bertugas sebagai penyedia *assurance* dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan cara melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian intern dan proses tata kelola perusahaan, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional Bank.

Penjelasan lebih rinci terkait Satuan Kerja Audit Intern akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

- **Audit Ekstern**

Pemeriksaan terhadap Bank dilakukan pula oleh Eksternal Auditor yaitu Bank Indonesia, Badan Pemeriksa keuangan (BPK), pemeriksa lain sesuai regulasi dan kantor akuntan Publik. Bank wajib menunjuk akuntan Publik dan kantor akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank.

### Kebijakan dan Prosedur

- **Kebijakan Penyusunan Rencana Bank**

Rencana Bank meliputi:

- a. Rencana Jangka Panjang (RJP/*Corporate Plan*) yang berfungsi sebagai garis-garis besar haluan usaha atau strategi Bank untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan terkait RJP tertuang dalam kebijakan Umum RJP dan Pedoman Pelaksanaan RJP.

## TATA KELOLA PERUSAHAAN

- b. Rencana Bisnis Bank (RBB) merupakan rincian pelaksanaan strategi dan program kerja serta target-target kinerja Bank jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kebijakan terkait RBB tertuang dalam kebijakan Umum RBB dan Pedoman Pelaksanaan RBB.
- c. Rencana kerja anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan rincian target-target kinerja Bank selama 1 (satu) tahun. Kebijakan terkait RKAP tertuang dalam Surat Edaran Bank tentang RKAP.

- **Kebijakan Usaha**

Kebijakan dan peraturan internal BRI termasuk *Standard Operating Procedure* yang mencakup surat edaran, surat keputusan, Buku Prosedur Operasional dan/atau Petunjuk Pelaksanaan ditetapkan sejalan dengan kebijakan GCG. Asas GCG harus tercermin dalam semua kebijakan dan peraturan internal Bank baik yang berkaitan dengan usaha Bank maupun berkaitan dengan manajemen internal Bank. Setiap pengembangan produk dan/atau aktivitas usaha baru harus dipastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan terkait produk dan/atau aktivitas baru Bank diatur dalam ketentuan tersendiri.

- **Kebijakan Pengawasan**

Pengawasan Bank diimplementasikan melalui konsep 3 (tiga) garis pertahanan/ *Three Lines of Defense* yaitu:

- a. *First Line of defense* merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Unit kerja Bisnis/Operasional sebagai pihak yang bertanggungjawab menjaga kualitas output dan proses bisnis sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. *Second Line of defense* merupakan pelaksanaan fungsi yang dilakukan oleh satuan kerja manajemen risiko dan satuan kerja kepatuhan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.
- c. *Third Line of Defense* merupakan pengawasan yang dilakukan audit intern melalui evaluasi kepada *First Line Dan Second Line of Defense* serta memberikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara independen.

Kebijakan Pengawasan BRI terdiri dari:

- a. Kebijakan pengendalian internal, yang disusun dengan memperhatikan ruang lingkup:
  - 1) Lingkungan pengendalian, contoh: penerapan konsep *three line of defense*
  - 2) Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, contoh: *risk assessment* terhadap produk dan/atau aktivitas bisnis bank
  - 3) Aktivitas pengendalian yang dilaksanakan disetiap tingkatan struktur bank, contoh: kebijakan pengawasan atasan langsung, *dual control* dan sebagainya
  - 4) Sistem informasi dan komunikasi, contoh: informasi yang tersedia di dalam *Data Warehouse (DWH)*
  - 5) Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut atas aktivitas pengendalian intern, contoh: kebijakan penerapan perangkat manajemen risiko.
- b. Kebijakan pengawasan internal, antara lain meliputi kebijakan audit Intern, Strategi *Anti Fraud*, kajian hukum dan pengujian kepatuhan.
- c. Kebijakan pengawasan eksternal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh auditor eksternal dan lembaga pengawas perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- **Kebijakan Transparansi dan Pengungkapan**

Kebijakan internal Bank terkait transparansi dan pengungkapan tertuang dalam:

- a. Panduan transparansi dan pengungkapan (*Transparency and Disclosure Guidelines*)
- b. Kebijakan Rahasia Bank.
- c. Kebijakan tentang pelaporan baik laporan internal maupun eksternal termasuk laporan kepada otoritas pengatur dan pengawas Bank, yang dituangkan dalam kebijakan tersendiri menurut jenis laporan.
- d. Kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi.

Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan internal Bank dilakukan secara berkala oleh unit kerja pembuat kebijakan (*policy owner*) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Bank.



## TATA KELOLA PERUSAHAAN

### Pilar 3. Proses Tata Kelola

Proses Tata kelola suatu perusahaan adalah cara atau mekanisme yang dilakukan oleh organ perusahaan dan jajaran dibawahnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mewujudkan komitmen dan struktur tata kelola, untuk mencapai hasil tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Proses Tata kelola BRI diantaranya meliputi:

1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS Tahunan/RUPS lainnya diselenggarakan sesuai dengan waktu dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil RUPS dipublikasikan kepada *stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan atas dasar pertanggungjawaban, itikad baik, kehati-hatian dan profesional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, serta pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bank Kegiatan usaha Bank dilakukan sejalan dengan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan, dengan mengikuti strategi Bank, menuju ke arah tujuan yang telah ditetapkan dan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelolaan SDM Bank dilakukan dengan mengacu pada anggaran dasar dan rencana kerja bidang SDM, Perjanjian Kerja Bersama, dengan selalu berpedoman prinsip-prinsip GCG, serta mendukung pencapaian tujuan usaha Bank.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tanggung jawab sosial dan lingkungan Bank harus menjadi bagian dari sasaran strategis Bank, dan dilaksanakan dengan didasari prinsip-prinsip GCG.
6. Tata Kelola Teknologi Informasi (*IT Governance*) Kepentingan Bank sangat besar akan adanya teknologi Informasi yang handal, efektif, efisien, akurat dan terpercaya. Untuk itu Bank terus memastikan TI dikembangkan dengan berpedoman pada prinsip GCG, penerapan manajemen risiko yang baik dan dapat memberikan nilai yang strategis bagi perusahaan, serta mendukung pencapaian visi dan misi BRI.
7. Pengelolaan Anak Perusahaan Pengembangan usaha anak Perusahaan dilakukan dalam rangka memberikan nilai tambah dan mendukung bisnis utama Bank. Untuk itu pengelolaan anak Perusahaan harus berpegang pada pedoman dan praktik terbaik GCG, serta berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.
8. Sosialisasi Kebijakan Bank Seluruh kebijakan Bank wajib disosialisasikan/dikomunikasikan kepada pekerja sesuai bidang kerja/tugasnya dengan baik dan lengkap sebagai referensi pelaksanaan pekerjaan, serta kepada pemangku kepentingan lainnya yang terkait melalui Aplikasi BRIShare maupun Sosialisasi secara langsung (tatap muka).
9. Dokumentasi Proses Seluruh proses tata kelola perusahaan selalu didokumentasikan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan serta sebagai bahan evaluasi proses kegiatan. Telah dilakukan pula retensi dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.

### Pilar 4. Hasil Tata Kelola

Perwujudan dari seluruh pilar kebijakan GCG BRI tersebut diatas tercermin pada:

1. Kestinambungan Usaha BRI menjaga keberlangsungan usaha melalui penerapan GCG *best practices* di seluruh elemen organisasi, dengan mengacu kepada prinsip GCG: *Transparency, accountability, Responsibility, Reliability, dan Fairness.*

## TATA KELOLA PERUSAHAAN

2. **Perlindungan Nasabah**  
BRI senantiasa menjaga kepercayaan dan kepuasan nasabah sesuai prinsip GCG yang akan dibahas lebih rinci pada sub Bab Tanggung Jawab terhadap konsumen di Bagian Tanggung Jawab sosial Perusahaan.
3. **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai Good Corporate Citizen**  
BRI tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan laba namun juga berkomitmen untuk berkontribusi kepada masyarakat, yang dilaksanakan melalui program CSR. Program-program tersebut bersifat memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya terhadap segmen Usaha Mikro dan kecil (UMK). Selain itu, BRI juga mendukung program lingkungan yang salah satunya melalui komitmen *Green Banking* dalam operasional harian dan *Green Financing* dalam proses pemberian kredit.
4. **Kemanfaatan Bank Bagi Masyarakat dan Perekonomian Nasional**  
Selaras dengan tujuan visi BRI, yaitu *The Valuable Bank in South East Asia and Home to Best Talent*, BRI berkomitmen memberikan pelayanan yang didukung kehandalan teknologi, jaringan yang luas

serta peningkatan produk dan layanan yang semakin dekat dengan masyarakat. Hal ini telah terbukti melalui keragaman produk, inovasi teknologi dan jaringan diantaranya dengan penyaluran kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menjangkau calon nasabah yang belum *bankable*, Pengoperasian Teras kapal untuk menjangkau daerah terluar dan kerjasama dengan agen BRILink untuk mendukung program *financial inclusion* dengan memperluas jangkauan akses layanan bank kepada masyarakat.

### Mekanisme Implementasi GCG

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan tersebut, BRI mengimplementasikan GCG melalui 3 (tiga) tahapan yaitu: perumusan, implementasi serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan untuk memastikan tercapainya tahapan/tujuan akhir yang diharapkan yaitu GCG *Excellent*.

Tahapan tersebut dilengkapi empat aspek komponen dasar bagi terselenggaranya implementasi tata kelola yang berkualitas, keseluruhannya membentuk *Roadmap Implementasi GCG*, yang secara konsisten diterapkan pada seluruh aspek operasional BRI.

Pelaksanaan mekanisme tata kelola Bank adalah sebagai berikut:





## TATA KELOLA PERUSAHAAN

### Hubungan Struktur, Mekanisme dan Hasil Tata Kelola

Tata kelola Perseroan diterapkan dalam suatu rangkaian terintegrasi yang meliputi 3 (tiga) aspek tata kelola yaitu *structure*, *process*, dan *outcome*. Ketiga aspek tersebut dijalankan oleh Perseroan dalam upaya menjamin tersedianya struktur dan infrastruktur tata kelola yang memadai, memaksimalkan efektivitas proses pelaksanaan tata kelola, dan mendorong terciptanya *outcome* tata kelola yang berkualitas untuk memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan.

Governance Structure	Governance Process	Governance Outcome
Struktur, komposisi, kriteria, jumlah dan independensi Dewan Komisaris, Direksi dan Organ Pendukung perusahaan telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan memenuhi kriteria ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab serta keberagaman Dewan Komisaris & Direksi dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian internal lebih optimal.	Kinerja positif perseroan diantaranya pencapaian laba meningkat, kinerja keuangan yang baik dan kuatnya struktur modal perusahaan.
Perseroan wajib memiliki komite dan satuan kerja dalam menjalankan fungsi pengendalian intern.	Dalam pelaksanaan fungsi pengendalian intern, Dewan Komisaris membentuk 4 (empat) komite dalam pengawasan perusahaan. Direksi membentuk 3 (tiga) Satuan Kerja dalam pengendalian intern perusahaan	Komite dibawah Dewan Komisaris diantaranya Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pengawas Manajemen Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Satuan Kerja dibawah Direksi diantaranya Satuan Kerja Audit, Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
Dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank, Tugas dan tanggung jawab pada setiap fungsi organ perusahaan ditetapkan dalam bentuk Kebijakan, Pedoman, Tata Tertib, dan Prosedur.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerja didasarkan pada level jabatan/bidang tugas serta pemisahan fungsi jabatan ( <i>segregation of duty</i> ) dalam menjalankan fungsi pengendalian intern.	Terdapat Daftar Uraian Jabatan pada setiap level jabatan dalam struktur organisasi perusahaan.
Rencana strategi bisnis Bank sejalan dengan visi dan misi Perusahaan.	Penyusunan rencana strategi bank dilakukan secara komprehensif dan terukur yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan dikomunikasikan kepada <i>shareholders</i> dan seluruh jenjang organisasi.	Rencana strategis Bank menggambarkan keberlanjutan perusahaan dan kontribusi positif kepada <i>shareholders</i> dan <i>Stakeholders</i> .

TATA KELOLA PERUSAHAAN

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

**Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi**

Semakin pesatnya penggunaan teknologi di masyarakat dan era digitalisasi dalam layanan bisnis perbankan, penggunaan teknologi informasi akan meningkatkan risiko yang dihadapi bank sehingga diperlukan tata kelola dan manajemen risiko yang efektif.

Pengelolaan instrumen tata kelola IT tertuang dalam Surat Keputusan Direksi BRI No. S.874-DIR/PPT/10/2017 tentang Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi BRI. Kebijakan tersebut digunakan sebagai pedoman dan kontrol bagi seluruh Satuan Kerja Teknologi Informasi untuk melaksanakan penatakelolaan dan pengendalian risiko penggunaan IT di BRI.

**Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi**

Penerapan tata kelola teknologi informasi terdiri atas kerangka kerja utama (*primary activities*) maupun kerangka kerja pendukung (*supporting activities*) dalam memberikan nilai tambah kepada *stakeholders*.

1. Peran dan Tanggung Jawab Manajemen dalam Pengelolaan Teknologi Informasi.
2. Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi.
3. Aktifitas Operasional Teknologi Informasi.
4. Penyediaan, Pengendalian Risiko dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi.
5. Pengamanan Teknologi Informasi.
6. Rencana Pemulihan Bencana
7. Layanan Perbankan Elektronik.
8. Audit Internal Teknologi Informasi.
9. Penggunaan Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi.
10. Penyediaan Jasa Teknologi Informasi.
11. Pelaporan Teknologi Informasi.

Penerapan Tata Kelola IT Tahun 2017 diantaranya:





## TATA KELOLA PERUSAHAAN

## PENERAPAN GCG TAHUN 2017

Pelaksanaan GCG tahun 2017 telah selaras dengan *Roadmap* GCG yang disusun oleh BRI melalui kegiatan Perumusan, Penilaian, Pelaksanaan melalui Internalisasi dan Eksternalisasi, *Monitoring* dan Evaluasi serta Keterbukaan, yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan tercapainya tujuan akhir *Roadmap* GCG yang diharapkan, yaitu GCG *Excellent*.

Pada tahun 2017 BRI telah melaksanakan aktivitas terkait GCG sebagai berikut:

1. Penandatanganan Komitmen Anti *Fraud* oleh seluruh Pekerja.  
Komitmen anti *fraud* menjadi dasar dalam penyusunan setiap kebijakan, sistem, dan prosedur operasional bisnis BRI meliputi penerapan manajemen risiko, prinsip GCG dan sistem pengendalian intern. Sebagai wujud komitmen Direksi dalam Strategi Anti *Fraud*, Direksi BRI tidak memberikan toleransi (*Zero Tolerance*) pada setiap bentuk *fraud* baik yang berasal dari internal maupun eksternal BRI. Seluruh pekerja BRI bertanggungjawab dalam pencegahan *fraud*, hal ini diwujudkan dalam penandatanganan komitmen anti *fraud* oleh seluruh pekerja BRI.
  2. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
    - a. Pengumuman RUPS Tahunan BRI kepada seluruh pemegang saham disampaikan secara terbuka melalui media cetak nasional dan *website* Perseroan pada tanggal 21 Februari 2017. RUPS Tahunan BRI dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2017 dengan 7 (tujuh) agenda rapat. Penjelasan RUPS akan dibahas pada Bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.
    - b. Pelaksanaan RUPS Luar Biasa pada tanggal 18 Oktober 2017.
  3. Pembayaran Dividen  
Pembayaran Dividen dilakukan tanggal 13 April 2017 kurang 1 (satu) bulan sejak tanggal RUPS tahunan.
  4. Kebijakan dan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi
- Sesuai Komitmen BRI bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 22 Juli 2016 dalam pengendalian gratifikasi, pada tahun 2017, BRI telah memiliki Program Pengendalian Gratifikasi dan Unit Pengendalian Gratifikasi.
5. Partisipasi penilaian GCG dalam ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) dan *Corporate Governance Performance Index* (CGPI).
  6. Pelaksanaan *self assessment* GCG dan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI.
  7. Penyampaian Laporan Tahunan Tahun buku 2016 kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia.
  8. Penyampaian Laporan Tata Kelola Terintegrasi Tahunan dan publikasi pada *website* Perusahaan.
  9. Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi.
  10. Kebijakan Umum Teknologi Informasi BRI.
  11. Ketentuan *Security* Teknologi Informasi BRI.
  12. Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT.
  13. Kebijakan Umum Keberlanjutan  
Dalam meningkatkan keberhasilan dan memperkuat implementasi Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST), BRI memiliki Kebijakan Umum dalam program keuangan berkelanjutan yang bertujuan terhadap pencapaian visi dan misi Bank, pengelolaan bisnis bank terintegrasi dengan pengelolaan risiko LST dan memberikan nilai tambah (*added value*) bagi *stakeholders* dalam jangka panjang.
  14. Sosialisasi Kebijakan dan Prosedur GCG kepada seluruh pekerja BRI.
  15. Kebijakan Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan Gratifikasi dan Pengelolaan Barang Gratifikasi BRI.
  16. Revisi Kebijakan Petunjuk Pelaksanaan *Whistleblowing System*.

## TATA KELOLA PERUSAHAAN

### EVALUASI DAN PENILAIAN GCG 2017

Atas dasar komitmen BRI untuk melaksanakan GCG secara konsisten dengan standar terbaik serta selaras dengan *Roadmap* GCG yang telah di bentuk, BRI melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan GCG (*GCG Assessment*) secara berkala yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas mekanisme GCG di Bank.

Untuk mengukur penerapan GCG yang telah berjalan, BRI senantiasa melakukan evaluasi penerapan GCG di BRI melalui evaluasi dari Pemerintah, *self assessment* dan penilaian GCG oleh pihak independen.

### EVALUASI DAN PENILAIAN GCG DARI PIHAK INTERNAL, REGULATOR DAN PIHAK EKSTERNAL

Evaluasi dan Penilaian penerapan GCG dilaksanakan oleh perusahaan dengan 2 pendekatan yaitu penilaian oleh pihak eksternal dan pihak regulator yang mandatory sesuai POJK Tata Kelola bagi Bank Umum. Evaluasi dilaksanakan secara periodic sesuai dengan ketentuan regulator (semesteran), selanjutnya evaluasi periode 1 (satu) tahun sekali oleh pihak eksternal yang independen. Penilaian dan evaluasi penerapan oleh Komite dibawah Dewan Komisaris secara berkala sesuai prinsip pengawasan yang berlaku. Selain itu penilaian secara *self assessment* dengan penerapan prinsip GCG berdasarkan standar ACGS (*ASEAN Corporate Governance Scorecard*) juga dilakukan dan di *review* untuk senantiasa menuju kearah perbaikan berdasarkan *best practice international*.



## TATA KELOLA PERUSAHAAN

## PENERAPAN PEDOMAN GCG

Evaluasi dari Pemerintah dilaksanakan berdasarkan POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Terdapat 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta 25 rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Adapun rincian penerapan pedoman GCG sebagai berikut:

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
<b>A. Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham</b>				
	<b>Prinsip 1</b> Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	Perusahaan terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara ( <i>voting</i> ) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara ( <i>one share one vote</i> ). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara ( <i>voting</i> ). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara ( <i>voting</i> ) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci.  Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara ( <i>voting</i> ) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara ( <i>voting</i> ) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara ( <i>voting</i> ) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i> .	Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham meliputi RUPS Tahunan, RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan menggunakan metode pemungutan suara dengan alat bantu elektronik.  Perseroan telah menggunakan tata cara pengambilan keputusan melalui pengumpulan suara ( <i>voting</i> ) yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham sesuai ketentuan OJK. Perseroan telah melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas mata acara RUPS yang dituangkan ke dalam Tata Tertib RUPS Bank BRI yang diungkapkan kepada publik, diantaranya melalui <i>website</i> perseroan.</li> <li>- Prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) melibatkan Pihak Independen yaitu Notaris, PT Datindo Entrycom, Kantor Akuntan Publik, Konsultan Jasa Penilai Independen dan Konsultan Hukum.</li> </ul>
		Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.	<b>Keterangan: Comply</b>  RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2017 dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi yaitu 7 (tujuh) orang Dewan Komisaris dan 11 (sebelas) orang Direksi.  RUPS Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2017 dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi.  <b>Keterangan: Comply</b>

## TATA KELOLA PERUSAHAAN

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
		Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs <i>Web</i> Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs <i>Web</i> Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs <i>Web</i> Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs <i>Web</i> dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.	Perseroan telah membuat ringkasan risalah RUPST dan RUPS Luar Biasa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta dipublikasikan dalam <i>website</i> perseroan maksimal 2 (dua) hari kerja yaitu RUPST tanggal 17 Maret 2017 dan RUPS Luar Biasa 19 Oktober 2017. Risalah rapat dipublikasikan pada harian <i>Kontan</i> dan <i>Investor Daily</i> , serta melalui <i>website</i> Perseroan yang tersedia selama lebih dari 1 (satu) tahun ( <a href="http://www.bri.co.id">www.bri.co.id</a> ).
	<b>Prinsip 2</b> Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham dan investor	Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.	BRI telah memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor yang tertuang dalam Surat. Kebijakan ini mencakup aktivitas dengan hubungan investor diantaranya <i>analyst meeting</i> , <i>public expose</i> bertujuan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagaimana yang telah diungkapkan pada Sekretaris Perusahaan, Akses Keterbukaan Informasi Laporan Tahunan ini dan juga diungkapkan melalui <i>website</i> Perseroan ( <a href="http://www.bri.co.id">www.bri.co.id</a> dan <a href="http://www.ir-bri.com">www.ir-bri.com</a> )

**Keterangan: Comply**

**Keterangan: Comply**



## TATA KELOLA PERUSAHAAN

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
		Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.	Pengungkapan kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor telah di upload dalam Situs Web BRI yaitu <a href="http://www.ir-bri.com">www.ir-bri.com</a> dan <a href="http://www.bri.co.id">www.bri.co.id</a> . Selama tahun 2017, terdapat 137 kali korespondensi.  <b>Keterangan: Comply</b>
<b>B. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris</b>				
	<b>Prinsip 3</b> Memperkuat keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka	Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.	Jumlah anggota Dewan Komisaris BRI posisi 31 Desember 2017 adalah 9 (sembilan) orang dengan mempertimbangkan kondisi Bank dan kebutuhan bisnis.  <b>Keterangan: Comply</b>
		Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.	Komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Komposisi dan Pembidangan Tugas Dewan Komisaris BRI.  <b>Keterangan: Comply</b>

## TATA KELOLA PERUSAHAAN

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
	<b>Prinsip 4</b> Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial. <i>Self Assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>Self Assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan.</p> <p>Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi Remunerasi dan Nominasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>BRI melaksanakan penilaian kinerja Dewan Komisaris berlandaskan hukum dan ketentuan yang berlaku agar dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta meningkatkan kinerja BRI secara berkesinambungan.</p> <p>Dewan Komisaris telah memiliki Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) yang tercantum dalam Board Charter sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris Laporan Tahunan ini serta <i>website</i> Perseroan (<a href="http://www.bri.co.id">www.bri.co.id</a>).</p> <p><b>Keterangan: Comply</b></p>
		Kebijakan penilaian sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	<p>Pengungkapan kebijakan <i>Self Assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga, untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris.</p>	<p>Dewan Komisaris telah memiliki Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) yang tercantum dalam <i>Board Manual</i> sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris Laporan Tahunan ini serta <i>website</i> Perseroan (<a href="http://www.bri.co.id">www.bri.co.id</a>).</p> <p><b>Keterangan: Comply</b></p>



## TATA KELOLA PERUSAHAAN

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
		Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	<p>Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris.</p> <p>Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>	<p>BRI telah memiliki kebijakan terkait pengunduran dan pemberhentian Dewan Komisaris yang terdapat pada Anggaran Dasar Perusahaan dan pada Bab Dewan Komisaris pada laporan tahunan BRI tahun 2017.</p> <p><b>Keterangan: Comply</b></p>
		Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Remunerasi dan Nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.	<p>Kebijakan suksesi Direksi mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, sebagai perusahaan terbuka, kebijakan Perseroan juga mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>Kebijakan Suksesi Direksi disampaikan pada Bab Komite Nominasi dan Remunerasi pada laporan tahunan BRI 2017</p> <p><b>Keterangan: Comply</b></p>

## TATA KELOLA PERUSAHAAN

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
<b>C. Fungsi dan Peran Direksi</b>				
	<b>Prinsip 5</b> Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan	Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.	Penentuan jumlah anggota Direksi telah melalui pertimbangan matang dan telah mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang.  <b>Keterangan: Comply</b>
		Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan	Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegal.	Penilaian kemampuan & kepatutan dilakukan untuk meyakini bahwa kompetensi, pengalaman serta latar belakang pendidikan anggota Direksi telah sesuai dengan kelayakan berdasarkan ketentuan yang berlaku maupun kebutuhan Perseroan dan diungkapkan pada bagian Keberagaman Komposisi Direksi Laporan Tahunan ini.  <b>Keterangan: Comply</b>



## TATA KELOLA PERUSAHAAN

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
		Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi	Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan.	Sesuai POJK 06/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan bank. Bahwa Direktur yang membidangi/ membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi, antara lain:  Pendidikan: Meraih gelar MBA, Investment Banking, dari Emory University, Amerika Serikat (2000) Sarjana Teknik Industri Pertanian, dari Universitas Brawijaya, Malang (1989).  Pengalaman: Kepala Divisi Treasury, General Manager Kantor Cabang Luar Negeri BRI New York, Komisaris Utama BTMU-BRI Finance.  <b>Keterangan: Comply</b>
	<b>Prinsip 6</b> Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) untuk menilai kinerja Direksi	Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegial. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	BRI melaksanakan penilaian kinerja Direksi berlandaskan hukum dan ketentuan yang berlaku agar dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta meningkatkan kinerja BRI secara berkesinambungan.  Direksi telah memiliki Kebijakan penilaian sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) yang tercantum dalam <i>Board Charter</i> sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris Laporan Tahunan ini serta <i>website</i> Perseroan ( <a href="http://www.bri.co.id">www.bri.co.id</a> )  <b>Keterangan: Comply</b>

## TATA KELOLA PERUSAHAAN

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
		Kebijakan penilaian sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka	Pengungkapan kebijakan <i>Self Assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Direksi.	Kebijakan <i>Self Assessment</i> atas kinerja Direksi telah diungkapkan pada bagian hasil Penilaian Kinerja Direksi pada Laporan Tahunan BRI Tahun 2016.  <b>Keterangan: Comply</b>
		Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi.	Bank BRI telah memiliki kebijakan terkait pengunduran dan pemberhentian Direksi yang menyatakan Pemberhentian anggota Direksi apabila yang bersangkutan Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara dan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai yang tertera pada <i>Board Charter</i> .  <b>Keterangan: Comply</b>
<b>D. Partisipasi Pemangku Kepentingan</b>				
	<b>Prinsip 7</b> Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>	Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya <i>insider trading</i> tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.	Terdapat dalam peraturan BRI: Kode Etik BRI (Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Nomor 06-KOM/BRI/12/ 2013 dan Nomor S.65 DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013  Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan (Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No.02 – KOM/BRI/05/2012 dan Nokep: S.104-DIR/DKP/05/2012 tanggal 24 Mei 2012)



## TATA KELOLA PERUSAHAAN

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i>	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i>	Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, <i>prudent</i> , dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa ( <i>kickbacks</i> ), <i>fraud</i> , suap dan/ atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.	<p>Pelaksanaan penerapan Strategi Anti <i>fraud</i> di BRI diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI Nomor S.25-DIR/DMR/12/2016 Tentang Strategi Anti <i>Fraud</i> PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.</p> <p>Strategi Anti <i>Fraud</i> yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian <i>Fraud</i>, memiliki 4 (empat) pilar sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan.</li> <li>2. Deteksi.</li> <li>3. Investigasi, pelaporan, dan sanksi.</li> <li>4. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.</li> </ol> <p>BRI juga memiliki kebijakan terkait praktik korupsi yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No:03-KOM/BRI/03/2017 dan Nokep: S.11-DIR/DKP/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi BRI.</p> <p>Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen BRI bersama KPK dalam pencegahan korupsi.</p> <p><b>Keterangan: Comply</b></p>

## TATA KELOLA PERUSAHAAN

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i>	Kebijakan tentang seleksi pemasok atau <i>vendor</i> bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan ( <i>supply chain</i> ) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas <i>output</i> perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau <i>vendor</i> , mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> , dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau <i>vendor</i> .	<p>Perseroan telah memiliki kebijakan terkait pengelolaan vendor sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Direksi No. S.35-DIR/MAT/12/2015 perihal Pendaftaran Rekanan Penyedia Barang dan Jasa PT Bank rakyat Indonesia (Persero) Tbk.</p> <p>Terdapat Sistem Manajemen Rekanan (SMR) mencakup proses pendaftaran dan seleksi Calon rekanan, monitoring, monitoring, pemeliharaan rekanan (<i>Vendor Maintenance</i>) sampai dengan evaluasi performance rekanan, sehingga dengan kegiatan tersebut diharapkan BRI mempunyai database Penyediaan Barang dan/atau Jasa yang siap dan mampu untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BRI.</p> <p><b>Keterangan: Comply</b></p>
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.	<p>Perseroan telah memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur yang dituangkan pada setiap Perjanjian Kredit antara BRI dengan debitur. Pada perjanjian tersebut dicantumkan hak dan kewajiban kedua belah pihak seperti transparansi laporan keuangan kepada kreditur.</p> <p><b>Keterangan: Comply</b></p>



## TATA KELOLA PERUSAHAAN

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan <i>Whistleblowing System</i>	Kebijakan sistem <i>Whistleblowing</i> yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem <i>Whistleblowing</i> mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>Whistleblowing</i> , cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.	Kebijakan mengenai <i>Whistleblowing System</i> di BRI diatur dalam Surat Edaran Direksi No. S.27-DIR/DKP/12/2016. Penerapan <i>Whistleblowing System</i> BRI bertujuan menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong seluruh pihak untuk terbuka dan menyampaikan informasi-informasi pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial termasuk hal-hal yang dapat merusak citra BRI. <b>Keterangan: Comply</b>
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan	Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.	Insentif jangka panjang pekerja terdapat dalam Bagian Kesejahteraan Pekerja dalam Laporan Tahunan BRI Tahun 2017. <b>Keterangan: Comply</b>

## TATA KELOLA PERUSAHAAN

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Penjelasan dan Penerapan di Perseroan
<b>E. Keterbukaan Informasi</b>				
	<b>Prinsip 8</b> Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs <i>Web</i> sebagai media keterbukaan informasi	Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs <i>Web</i> diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.	Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada <i>Stakeholders</i> melalui media teknologi informasi, selain <i>website</i> Perseroan, <i>Omni Channel</i> BRI adalah sarana dan akses tempat nasabah BRI bisa mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan BRI secara lengkap dan menyampaikan keluhan melalui channel yang tersedia yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tatap muka melalui <i>Customer Service</i> di seluruh Unit kerja operasional BRI</li> <li>2. Telepon melalui 14017, 1500017, dan 021-57987400 / <i>Premium call</i> melalui 021-5758899 dan 08001017017</li> <li>3. SMS 0812 12 14017 <i>Web chat</i> melalui <i>website</i> <a href="http://www.bri.co.id">www.bri.co.id</a> Email <a href="mailto:callbri@bri.co.id">callbri@bri.co.id</a> Telegram 0812 12 14017 <i>Internet Banking</i> di <a href="https://ib.bri.co.id">https://ib.bri.co.id</a> <i>Twitter</i> di @kontak_bri</li> <li>4. <i>Facebook</i> di Bank BRI Official</li> </ol>
		Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali	Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.	Pada Laporan Tahunan BRI Tahun 2017 menyampaikan kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. <p><b>Keterangan: Comply</b></p>



## TATA KELOLA PERUSAHAAN

## SELF ASSESSMENT GCG

Berdasarkan POJK No. 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank harus melakukan Penilaian sendiri (*self assessment*) secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek *governance* yaitu:

- *Governance Structure*  
Penilaian bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses prinsip tata kelola yang baik menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan *stakeholders*.
- *Governance Process*  
Penilaian bertujuan untuk menilai efektifitas proses penerapan prinsip tata kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan *stakeholders*.
- *Governance Outcome*  
Penilaian bertujuan untuk menilai *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip GCG serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Penilaian sendiri (*self assessment*) tersebut dilakukan secara berkala terhadap prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari 11 faktor penilaian tata kelola yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi audit intern.
7. Penerapan fungsi audit ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis Bank.

Penilaian *self assessment* GCG dilakukan 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun. Adapun hasil penilaian GCG selama periode tahun 2017 dengan nilai komposit 2 (**baik**) dengan rincian sebagai berikut:

Periode	Peringkat	Definisi
2017 (Individual) (Semester I dan II)	PK-2 (Baik)	Mencerminkan Manajemen BRI telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BRI

Analisa	
<b>Structure</b>	Struktur tata kelola ( <i>Governance Structure</i> ) di BRI telah dilaksanakan secara memadai dengan terbentuknya struktur organisasi dan organ perusahaan serta tersedian rencana bisnis, kebijakan, dan prosedur dalam pelaksanaan GCG.
<b>Process</b>	Proses tata kelola ( <i>Governance Process</i> ) telah dilaksanakan dengan baik, setiap organ perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mendukung pencapaian target perusahaan. BRI senantiasa melakukan <i>review</i> dan evaluasi dalam upaya peningkatan efektifitas tugas dan tanggung jawab organ perusahaan.
<b>Outcome</b>	Hasil tata kelola ( <i>Governance Outcome</i> ) telah dilaksanakan dengan baik, proses pengungkapan & transparansi informasi, data dan laporan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BRI secara kontinyu melakukan evaluasi sistem informasi manajemen dan sistem pelaporan BRI dalam rangka peningkatan kualitas informasi yang diberikan kepada <i>stakeholders</i> .

## TATA KELOLA PERUSAHAAN

## SELF ASSESSMENT TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BRI sebagai entitas utama melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) berdasarkan 3 aspek yaitu struktur, proses dan hasil meliputi 7 indikator yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi.
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
6. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
7. Penyusunan dan pelaksanaan pedoman tata kelola terintegrasi.

Hasil penilaian *self assessment* Tata Kelola Terintegrasi tahun 2017 adalah:

Berdasarkan hasil penilaian Tata Kelola BRI sebagai entitas utama tahun 2017 mendapat Peringkat Komposit (1) atau dengan nilai **Sangat Baik** dengan rincian sebagai berikut:

## Semester I dan Semester II Tahun 2017

Peringkat	Definisi
1	Konglomerasi Keuangan BRI dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum <b>sangat baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Analisa	
Kekuatan	Kelemahan
1. Para anggota Dewan Komisaris BRI memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni dan memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sehingga proses pengawasan aktif Dewan Komisaris EU dapat optimal dijalankan.	1. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi memerlukan waktu terkait penyesuaian terhadap ketentuan internal dan eksternal (regulator).
2. Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan bergerak dalam industri yang saling menunjang sehingga pelaksanaan tata kelola dapat dilaksanakan lebih mudah dan fokus. LJK yang tergabung dalam konglomerasi keuangan BRI saling bersinergi.	2. Belum terdapat Sistem informasi manajemen yang digunakan dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi.
3. Kepemilikan entitas utama pada LJK sangat tinggi (>85%) pada anak perusahaan sehingga memudahkan Entitas Utama untuk mengawasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.	3. LJK belum mengadopsi pedoman laporan yang ditetapkan oleh Entitas Utama.
4. BRI sebagai Entitas Utama secara rutin melakukan evaluasi triwulanan dengan Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Intern Perusahaan Anak.	



## TATA KELOLA PERUSAHAAN

Analisa	
Kekuatan	Kelemahan
5. Adanya transparansi dan budaya kerja yang terstruktur di komite-komite Dewan Komisaris Entitas Utama yang ditunjang dengan kolaborasi yang efektif dengan divisi-divisi terkait dalam Manajemen BRI.	
Tindak Lanjut	
1. Melakukan Koordinasi dengan perusahaan anak terkait dengan penerapan manajemen risiko terintegrasi dan penyesuaian Prosedur Internal tentang Penerapan Manajemen Risiko BRI dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.	
2. Mengembangkan Sistem informasi manajemen yang digunakan dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi. (sistem <i>dashboard subsidiary</i> masih dalam tahap pengembangan).	
3. Melakukan standarisasi Laporan LJK Konglomerasi Keuangan kepada Entitas Utama yang mengakomodir pelaporan spesifik dari LJK.	

## PENILAIAN PENERAPAN GCG OLEH PIHAK INDEPENDEN

*ASEAN Corporate Governance Performance Index (ACGS)*

Dalam penerapan GCG, BRI berpedoman terhadap standar GCG internasional yaitu ACGS yang mengadopsi prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh *the Organization for Economic Cooperation and Development*.

Penilaian penerapan GCG dilakukan oleh pihak independen yaitu *Indonesian Institute of Corporate Directorship (IICD)* sesuai kriteria ACGS Tahun 2017 dan BRI mendapatkan skor 99.53 dengan peringkat **Very Good** dengan rincian penilaian sebagai berikut:

Prinsip	2015	2016	2017
Hak-Hak Pemegang Saham	7.60	8.80	8.80
Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham	10.38	12.50	12.50
Peran Pemangku Kepentingan	9.05	9.52	10.00
Pengungkapan dan Transparansi	22.56	24.39	24.39
Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris	33.51	37.84	37.84
Bonus	7.00	9.00	6.00
Penalty	(2.00)	0	0
Skor ACGS	88.55	102.05	99.53

Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

## TATA KELOLA PERUSAHAAN

### CORPORATE GOVERNANCE PERFORMANCE INDEX (CGPI)

CGPI diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* merupakan program riset dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan tujuan meningkatkan penerapan GCG secara berkesinambungan.

Pelaksanaan CGPI 2017 dengan tema “**Manajemen Perubahan dalam Kerangka GCG**” dilakukan penilaian terhadap 3 aspek yaitu:

1. *Governance Structure* meliputi struktur dan kebijakan tata kelola perusahaan.
2. *Governance Process* meliputi sistem dan mekanisme tata kelola perusahaan.
3. *Governance outcome* meliputi *output*, *outcome* dan *impact* dari proses implementasi GCG.

Hasil penilaian terhadap CGPI berdasarkan penilaian tahun 2017 mendapat skor 88.48 dengan peringkat **Sangat Terpercaya (Most Trusted)** dengan rincian penilaian sebagai berikut:



### Skor CGPI BRI tahun 2011-2017

2012	2013	2014	2015	2016	2017
84.16	85.56	86.43	86.92	87.74	88.48
Trusted Company	Most Trusted Company				

### Penilaian Kinerja Direksi Melalui Pendekatan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN

Kementerian BUMN telah menetapkan penilaian Kinerja Direksi melalui metode Kriteria Penilaian Kinerja Unggul sesuai dengan Surat Kementerian BUMN No: S-153/S.MBU/2012 tanggal 19 Juli 2012 perihal Pelaporan Kinerja Berdasarkan Pendekatan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul yang terdiri dari 6 Kategori Proses dan 1 Kategori Hasil, yaitu sebagai berikut:

1. Kategori 1. Kepemimpinan
2. Kategori 2. Perencanaan Strategis
3. Kategori 3. Fokus Pelanggan
4. Kategori 4. Pengukuran, Analisis, dan Manajemen Pengetahuan
5. Kategori 5. Fokus Tenaga Kerja
6. Kategori 6. Fokus Operasi
7. Kategori 7. Hasil



## TATA KELOLA PERUSAHAAN

Hasil pelaksanaan assesmen KPKU BUMN dibagi kedalam kategori sebagai berikut:



Semenjak tahun 2012, BRI menunjukkan peningkatan Skor KPKU dengan tren positif setiap tahunnya. Berdasarkan Hasil Pelaksanaan Assessment Implementasi KPKU di BRI tahun 2017 yang dilaksanakan pada bulan Januari 2018, BRI mampu mempertahankan predikat sebagai **Industry Leader**. Melalui implementasi KPKU, BRI dapat melihat kinerja proses dan hasil perusahaan yang komprehensif serta mendapatkan timbal balik berupa Company Strength dan Opportunity for Improvement sebagai masukan perusahaan untuk mencapai kinerja unggul berkelanjutan.

### RENCANA PENINGKATAN GCG TAHUN 2018

Penerapan tata kelola yang berkelanjutan membutuhkan perencanaan jangka panjang dalam *Roadmap* GCG serta strategi pelaksanaan di setiap tahun buku berjalan. Rencana peningkatan GCG pada BRI untuk setiap tahun berjalan disusun berdasarkan hasil rekomendasi dari *GCG Assessment* dan diselaraskan dengan rencana bisnis tahunan BRI.

Untuk tahun 2018, rencana peningkatan kualitas GCG BRI adalah sebagai berikut:

- Penyempurnaan dan pengkinian kebijakan GCG BRI.
- Pembuatan dan pengembangan GCG *online system* BRI.
- Transparansi penerapan GCG melalui *website* perusahaan sesuai dengan *best practice* industri perbankan.
- Internalisasi dan eksternalisasi GCG secara berkelanjutan

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat umum Pemegang saham (RUPS) merupakan salah satu organ utama yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi BRI. Melalui RUPS, para pemegang saham dapat menggunakan haknya untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan dengan mengacu pada batasan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar BRI.

### Landasan Hukum RUPS

Pelaksanaan RUPS secara umum mengacu pada ketentuan dalam:

1. Anggaran Dasar Perseroan
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka ("POJK 32/POJK.04/2014").
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka ("POJK 10/POJK.04/2017").
6. Peraturan Bursa efek Indonesia No. I-E tentang kewajiban Penyampaian Informasi.

### Pemegang Saham

Pemegang saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham perusahaan. Pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi.

### Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Pemegang Saham Utama dan Pengendali BRI adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui porsi kepemilikan sebesar 56,75%, saham Seri A Dwiwarna.

### Hak Pemegang Saham

Saham BRI terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B. Saham Seri A Dwiwarna dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dapat

dipindahtangankan kepada siapapun. Kepemilikan Saham Seri A Dwiwarna tersebut memberikan hak istimewa kepada pemerintah sebagai pemegang saham utama sebagai berikut:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal sebagai berikut:
  - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar
  - b. Persetujuan perubahan Permodalan
  - c. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris
  - d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran.
  - e. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
  - f. Persetujuan pemindahtanganan aset berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
  - g. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan prosentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
  - h. Persetujuan penggunaan laba
  - i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
2. Hak untuk mengusulkan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.
3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS
4. Hak untuk meminta dan mengakses data dokumen perusahaan, dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Diluar dari hak istimewa yang dimiliki oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tersebut, Pemegang Saham Seri A dan Pemegang Saham Seri B memiliki hak yang sama sepanjang tidak diatur lain oleh Anggaran Dasar yaitu:

1. Menghadiri RUPS baik secara langsung maupun melalui perwakilan, menyampaikan pendapat dan/atau pengambilan keputusan. Masing-masing pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara dan mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki.
2. Menerima informasi terkait BRI yang akurat dan tepat waktu dengan prinsip kesetaraan informasi terhadap seluruh pemegang saham.



3. Menerima pembagian dividen dan pembagian keuntungan BRI dalam bentuk lainnya sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya.
  4. Menerima pembagian sisa hasil likuidasi Bank dalam hal terjadinya kepailitan.
  5. Meminta diselenggarakannya RUPS oleh seorang atau lebih pemegang Saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, sepanjang dilakukan dengan itikad baik, atas dasar kepentingan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
  6. Memperoleh penjelasan lengkap dan Informasi yang akurat mengenai persyaratan prosedur penyelenggaraan RUPS.
  7. Mengajukan gugatan terhadap Perusahaan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/ atau Dewan Komisaris.
  8. Meminta kepada Perusahaan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/ peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan/aksi korporasi Perusahaan yang merugikan Pemegang Saham atau Perusahaan.
  9. Memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris pada RUPS, sepanjang berkaitan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.
2. Pemegang Saham Pengendali harus dapat:
    - a. Memperhatikan kepentingan Pemegang Saham minoritas dan para pemangku kepentingan sesuai peraturan perundang-undangan.
    - b. Mengungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang Pemegang Saham pengendali yang sebenarnya (*ultimate shareholders*) dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait.
    - c. Mengupayakan akuntabilitas dan hubungan antar perusahaan dapat dilakukan secara transparan, dalam hal Pemegang Saham menjadi Pemegang Saham Pengendali pada beberapa perusahaan.
  3. Pemegang Saham Minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

### Kebijakan Hubungan dengan Pemegang Saham

Hubungan dengan Pemegang saham sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perusahaan yaitu salah satunya sebagaimana diatur dalam pasal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Serta Pemegang Saham segala komunikasi dengan para pemegang saham merupakan tanggung jawab juru bicara perusahaan. Semua pemegang saham harus mendapatkan perlakuan dan informasi yang sama (*equitable treatment*) secara tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Direksi Nomor S.08-DIR/06/2014 tentang Kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk.

### Perlakuan Setara Kepada Pemegang Saham

BRI menjunjung tinggi kesetaraan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham yang tercermin dari:

1. Hak suara dihitung berdasarkan jumlah kepemilikan saham, dengan hak mengajukan RUPS bagi pemegang saham minimal 10%.

### Tanggung Jawab Pemegang Saham

1. Seluruh Pemegang Saham harus dapat:
  - a. Memisahkan kepemilikan harta perusahaan dengan kepemilikan harta pribadi.
  - b. Memisahkan fungsinya sebagai pemegang saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi dalam hal Pemegang Saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

2. Penyediaan akses informasi yang sama melalui kanal Investor Relations antara lain melalui interaksi langsung pada acara *Public Expose, Non-deal Roadshow, Press Conference*, atau *1-on-1 Meeting, Conference Call*, dan *Email*, serta Dokumen yang tersedia pada *website* Perusahaan, Investor Relations, dan Bursa Efek Indonesia meliputi Laporan Tahunan, Laporan Keuangan *Audited*, dan *Highlights* Kinerja Keuangan Perusahaan.
3. Jumlah Komisaris Independen di atas batas minimum Bank Indonesia, yaitu 5 orang Komisaris dari total 8 orang Komisaris.

## PENYELENGGARAAN RUPS TAHUN 2017

Sepanjang tahun 2017, Perseroan telah menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS yang terdiri dari 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada tanggal 15 Maret 2017 dan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa pada tanggal 18 Oktober 2017.

### Tahapan Penyelenggaraan RUPS 2017

Penyelenggaraan RUPS dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan:

Tahapan	Kegiatan
Pemberitahuan kepada OJK	Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pengumuman RUPS.
Pengumuman RUPS	Pengumuman RUPS dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs resmi Bursa Efek Indonesia dan situs resmi Perseroan.
Pemanggilan RUPS	Pemanggilan RUPS dilaksanakan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs resmi Bursa Efek Indonesia dan situs resmi Perseroan.
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS	Pengumuman ringkasan risalah RUPS disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah RUPS, dipublikasikan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs resmi Bursa Efek Indonesia dan situs resmi Perseroan.
Penyampaian Risalah RUPS	Risalah RUPS disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah RUPS.

### Ketentuan Kuorum

No	Mata Acara	Kuorum Kehadiran	Kuorum Putusan
1	Pengalihan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan lebih dari 50 jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain ataupun tidak	Dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah	Disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS



## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

## Ketentuan Kuorum

No	Mata Acara	Kuorum Kehadiran	Kuorum Putusan
2	Persetujuan Transaksi yang mempunyai benturan kepentingan Pemegang Saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan	Dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dengan hak suara yang sah	Disetujui oleh lebih dari 1/2 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
3	Perubahan Direksi Dewan Komisaris Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan/atau Peningkatan modal ditempatkan dan disetor	Dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya/ kuasanya yang mewakili lebih dari (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah	Disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya/ kuasanya yang mewakili lebih dari 1/3 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
4	Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri	Dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya/ kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah	Disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya/ kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
5	Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan Pembubaran Perseroan	Dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya/ kuasanya yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah	Disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya/ kuasanya yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
6	Perubahan Anggaran Dasar yang mengatur perubahan hak atas saham dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham	Dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya/ kuasanya yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut	Disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
7	Di luar dari Mata Acara 1 s.d 6 tersebut di atas	Dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah	Disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

### Tata Tertib RUPS

1. Tata tertib RUPS diberikan kepada Pemegang Saham yang hadir dan dibacakan sebelum RUPS dimulai.
2. Kesempatan diberikan kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan dan/atau usulan pada setiap mata acara RUPS.
3. Pimpinan RUPS atau Direktur yang ditunjuk Pimpinan RUPS akan menjawab atau menanggapi pertanyaan/tanggapan dari pemegang saham.
4. Pemungutan suara dilakukan setelah semua pertanyaan/ tanggapan selesai dijawab. Suara hanya dapat disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah.
5. Penghitungan dan/atau validasi suara dalam RUPS dilakukan oleh pihak Independen yaitu Notaris yang dibantu oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.

### Akses Informasi kepada Pemegang Saham

BRI telah menyediakan akses terhadap Informasi untuk memungkinkan pemegang saham melaksanakan hak dan tanggung jawabnya:

1. RUPS, sebagai media dimana Perusahaan dapat berkomunikasi dengan Pemegang Saham, menyampaikan Informasi mengenai Perseroan dan memungkinkan Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham;
2. Media elektronik seperti Situs *web (website)* Bursa Efek dan Situs *web (website)* Perseroan yang dapat diakses dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dimana tersedia berbagai dokumen, laporan dan publikasi yang dapat dengan mudah diunduh baik oleh Pemegang Saham maupun publik.
3. Email dan Kontak telepon resmi Perseroan untuk menyampaikan dan mengetahui Informasi terkini Perseroan;
4. Media komunikasi lain agar Pemegang Saham dapat terus memperoleh informasi terkini diantaranya *conference call, Investor/Analyst meeting, non deal roadshow, conference, public expose* dan *Investor/Analyst gathering*

### Upaya Mengajak Pemegang Saham Hadir Dalam RUPS

BRI berupaya agar seluruh Pemegang Saham hadir dan menggunakan hak dan kewenangannya dalam RUPS. Upaya tersebut dilakukan dalam bentuk:

1. Pemberitahuan dan pemanggilan RUPS yang disebarakan secara tepat waktu melalui *website* Perusahaan, Bursa Efek serta Koran Berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
2. Memaparkan materi dari setiap mata acara rapat sebagai referensi Pemegang Saham.
3. Membuka akses bagi Pemegang Saham untuk berkomunikasi dengan Perusahaan terkait penyelenggaraan RUPS melalui kontak yang tersedia di *Website* Perusahaan.
4. Berkomunikasi baik dilakukan melalui pertemuan maupun korespondensi via email dengan beberapa pihak/investor mengenai penyelenggaraan dan mata acara RUPS untuk mengajak agar pemegang saham dan/atau kuasanya hadir pada RUPS Perseroan.

### Ketentuan Pemungutan Suara Dalam RUPS

1. Setiap 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
2. Tata cara pemungutan suara dalam RUPS yaitu:
  - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara abstain dan yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
  - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan keputusan mata acara yang sedang dibicarakan;
  - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara;
  - a. Pimpinan RUPS akan mengumumkan hasil pemungutan suara.
3. Setiap Pemegang Saham dapat diwakili pada RUPS oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS namun dilarang bertindak sebagai kuasa dalam pemungutan suara.



## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

4. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk memberikan suara abstain atau suara tidak setuju atau suara apapun, akan tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan RUPS, yang bersangkutan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara abstain atau tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui segala usulan yang diajukan.

### Pemungutan Suara RUPS dengan Alat Elektronik



Mekanisme pemungutan suara melalui sarana *barcode* yang telah terotentifikasi sesuai dengan jumlah saham dan absensi kehadiran pemegang saham tertentu.

### Pemungutan Suara RUPS Melibatkan Pihak Independen

Dalam penyelenggaraan RUPS, BRI tidak hanya mengundang para Pemegang Saham namun juga selalu melibatkan pihak Independen terutama dalam pemungutan dan perhitungan suara, yaitu:

1. Notaris  
Notaris bertugas membuat risalah/berita acara RUPS BRI. Dalam setiap kegiatan RUPS, Notaris secara langsung menyaksikan dan mendengar proses berjalannya RUPS serta memberikan pendapat/saran/koreksi yang diperlukan sehubungan dengan RUPS.
2. Biro Administrasi Efek  
Biro Administrasi Efek Perseroan bertugas untuk melaksanakan pencatatan pemilik efek, dan secara berkala memberikan pengkinian laporan kepada perusahaan. Dalam proses penyelenggaraan RUPS, tugas Biro Administrasi Efek antara lain:
  - a. Menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) bagi karyawan dan pemegang saham yang sahamnya dalam omnibus account serta mendistribusikan KTUR tersebut ke alamat yang bersangkutan.

- b. Melakukan registrasi dan validasi Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS.
- c. Melakukan perhitungan suara baik kuorum maupun pengambilan keputusan pada setiap mata acara dengan sistem elektronik.
- d. Menyediakan materi cetakan sehubungan dengan administrasi pemungutan suara.

Selain Notaris dan Biro Administrasi Efek, RUPS juga dihadiri oleh pihak independen lain sesuai dengan mata acara yang diselenggarakan dalam RUPS diantaranya:

1. Kantor Akuntan Publik  
Kantor Akuntan Publik bertindak sebagai pihak independen yang melakukan audit atas penyajian laporan keuangan BRI secara wajar dan menyampaikan masukan serta saran-saran perbaikan kepada Manajemen.
2. Konsultan Jasa Penilai Independen dan Konsultan Hukum  
Konsultan Jasa Penilai Independen dan Konsultan Hukum adalah pihak independen yang selalu terlibat dalam hal terdapat aksi korporasi seperti penerbitan efek bersifat hutang, merger, akuisisi, pengambilalihan, dan lainnya. Konsultan Jasa Penilai Independen bertugas memastikan kewajaran nilai transaksi sedangkan Konsultan Hukum memastikan transaksi yang akan dilakukan telah sesuai dengan proses dan prosedur berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

### Penyelenggaraan RUPS Tahun Buku

Sepanjang tahun 2017, Perseroan telah melaksanakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali, yaitu 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa.

### Penyelenggaraan RUPS Tahunan (RUPST) 2017

RUPST 2017 diselenggarakan pada tanggal 15 Maret 2017 di Gedung BRI I, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44 - 46, Jakarta Pusat 10210 dengan memenuhi kewajiban Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 beserta perubahannya, sebagai berikut:

Tanggal	Aktivitas	Keterangan	Status
18.01.2017	Pemberitahuan RUPST kepada OJK	Pemberitahuan RUPST kepada OJK kurang dari 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS.	Memenuhi
06.02.2017	Pengumuman RUPST	14 hari sebelum pemanggilan RUPST dan telah dimuat melalui media cetak <i>Investor Daily</i> dan Kontan, <a href="http://www.idx.co.id">www.idx.co.id</a> dan <a href="http://www.bri.co.id">www.bri.co.id</a>	Memenuhi
21.02.2017	Pemanggilan RUPST	Pemanggilan RUPST 21 hari sebelum RUPST dan telah dimuat melalui media cetak <i>Investor Daily</i> dan Kontan, <a href="http://www.idx.co.id">www.idx.co.id</a> dan <a href="http://www.bri.co.id">www.bri.co.id</a>	Memenuhi
15.03.2017	RUPST	Pelaksanaan RUPST 2017 di Gedung BRI I Lantai 21 Jalan Jendral Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat 10210	Memenuhi
17.03.2017	Pengumuman Ringkasan Risalah Hasil RUPST	Pengumuman ringkasan risalah RUPS disampaikan kepada OJK 2 (dua) hari setelah RUPST dan telah dimuat melalui media cetak <i>Investor Daily</i> dan Kontan, <a href="http://www.idx.co.id">www.idx.co.id</a> dan <a href="http://www.bri.co.id">www.bri.co.id</a>	Memenuhi
07.04.2017	Penyampaian Risalah Hasil RUPST ke OJK	Risalah RUPS disampaikan kepada OJK kurang 30 hari kerja setelah RUPST.	Memenuhi

### Mata Acara RUPST

Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:

<b>Mata Acara Pertama</b>	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI (Tahap II dan Tahap III) Tahun 2016 dengan jumlah emisi sebesar Rp 9.000.000.000.000 (sembilan triliun Rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI (Tahap I) Tahun 2016 sejumlah Rp 4.600.000.000.000 (empat triliun enam ratus miliar rupiah) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>volledig acquit et de charge</i> ) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.
<b>Mata Acara Kedua</b>	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016.
<b>Mata Acara Ketiga</b>	Penetapan gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan tantiem serta penetapan tunjangan, fasilitas, dan benefit lainnya bagi segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
<b>Mata Acara Keempat</b>	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2017.



## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

<b>Mata Acara Kelima</b>	Penguatan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN tanggal 16 Desember 2016.
<b>Mata Acara Keenam</b>	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
<b>Mata Acara Ketujuh</b>	Perubahan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi**

RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham yang telah memenuhi persyaratan kuorum serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direksi
Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 20.983.878.884 saham dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perusahaan	Dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mustafa Abubakar Komisaris Utama dan Komisaris Independen</li> <li>- Gatot Trihargo Wakil Komisaris Utama</li> <li>- Adhyaksa Dault Komisaris Independen</li> <li>- A. Sonny Keraf Komisaris Independen</li> <li>- A. Fuad Komisaris Independen</li> <li>- A. Fuad Rahmany Komisaris Independen</li> <li>- Vincentius Sonny Loho Komisaris</li> <li>- Jeffry J. Wurangian Komisaris</li> </ul>	Dihadiri oleh seluruh anggota Direksi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asmawi Syam Direktur Utama</li> <li>- Sunarso Wakil Direktur Utama</li> <li>- Haru Kusmahargyo Direktur</li> <li>- Susy Liestiwaty Direktur</li> <li>- Sis Apik W Direktur</li> <li>- Donsuwan Simatupang Direktur</li> <li>- Randi Anto Direktur</li> <li>- Zulhelfi Abidin Direktur</li> <li>- Mohammad Irfan Direktur</li> <li>- Priyastomo Direktur</li> <li>- Kuswiyoto Direktur</li> </ul>
85.83%	100.00%	100.00%

**Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Para Pemegang Saham memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau Pendapat dalam RUPS terkait dengan masing-masing mata acara rapat. Dalam RUPST jumlah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Mata Acara	Jumlah Pertanyaan/ Pendapat
Mata Acara Pertama	<p>Terdapat 4 (empat) pertanyaan/pendapat dari 2 (dua) orang penanya:</p> <p><b>Pertanyaan 1:</b> Apa yang dilakukan BRI dalam bidang Fintech?</p> <p><b>Jawaban 1:</b> BRI telah memperkuat <i>Device, Networking &amp; Application</i>, salah satunya peningkatan <i>payment system</i> dan merintis full digital branch termasuk untuk sektor mikro telah dibangun beberapa digital pasar.</p> <hr/> <p><b>Pertanyaan 2:</b> NPL BRI berada dibawah rata-rata industri perbankan, namun Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) mengalami peningkatan. Berapa besar nilai CKPN yang dibentuk?</p> <p><b>Jawaban 2 :</b> BRI membentuk CKPN sebesar Rp 21.9 Triliun dengan <i>coverage ratio</i> sebesar 170%. Kami menilai angka tersebut masih berada pada level yang cukup memadai.</p> <p><b>Pertanyaan 3:</b> Bagaimana strategi BRI dalam menghadapi wacana pemerintah atas pembatasan Net Interest Margin (NIM), suku bunga deposito yang <i>single digit</i></p> <p><b>Jawaban 3:</b> BRI akan fokus pada peningkatan dana murah dan transaction banking dengan memperkuat teknologi informasi.</p> <p><b>Pertanyaan 4:</b> Bagaimana rencana pembentukan holding BUMN Keuangan dan Perbankan?</p> <p><b>Jawaban 4:</b> Untuk rencana pembentukan Holding BUMN Keuangan dan Perbankan, disampaikan bahwa rencana tersebut bukan merupakan <i>corporate action</i> melainkan <i>shareholders action</i> yaitu Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN. Pembentukan <i>holding</i> tersebut diharapkan dapat memperkuat permodalan melalui peningkatan kapasitas fundraising. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan peringkat Indonesia secara regional.</p>
Mata Acara Kedua	<p>Terdapat 3 (tiga) pertanyaan dari 2 (dua) orang penanya:</p> <p><b>Pertanyaan 1:</b> Kenapa di tahun ini ada istilah Dividen Spesial?</p> <p><b>Jawaban 1 :</b> Selama 5 (lima) tahun terakhir, <i>Dividend Payout Ratio</i> (DPO) BRI secara konsisten sebesar 30%. Pertimbangan dalam penentuan DPO salah satunya dalam rangka menjaga agar CAR BRI bisa memenuhi Basel III di tahun 2019. Untuk tahun ini, dengan melihat tingkat CAR BRI sebesar 22,63% relatif memadai karena diatas batas ideal dikisaran 16,75% maka diberikan 'tambahan' DPO sebesar 10% sehingga total DPO sebesar 40%. Tambahan tersebut kami sebut dengan istilah 'dividen spesial' hanya sekedar penyebutan saja.</p>



## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Mata Acara	Jumlah Pertanyaan/ Pendapat
Mata Acara Kedua	<p><b>Pertanyaan 2:</b> Berapa besar nominal total dividen yang dibagikan, termasuk juga dividen spesialnya?</p> <p><b>Jawaban 2:</b> Total dividen yang rencananya akan dibagikan adalah sebesar Rp 10,4 Triliun.</p> <p><b>Pertanyaan 3:</b> Diharapkan untuk tahun buku 2017 akan tetap ada dividen spesial kurang lebih 10% - 15%.</p> <p><b>Jawaban 3:</b> Kami akan melihat kebutuhan perusahaan serta tingkat CAR nya terutama untuk pemenuhan Basel III di tahun 2019.</p>
Mata Acara Ketiga	Tidak Ada
Mata Acara Keempat	Tidak Ada
Mata Acara Kelima	Tidak Ada
Mata Acara Keenam	Tidak Ada
Mata Acara Ketujuh	Tidak Ada

### Pemungutan Suara

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah berdasarkan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan. Apabila kesepakatan tidak dapat dicapai maka pengambilan keputusan dilaksanakan dengan pemungutan suara.

### Hasil Pemungutan Suara, Keputusan RUPST dan Tindak Lanjut

Mata Acara Pertama	
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro &amp; Surja sesuai Laporan No. RPC-2879/PSS/2017 tanggal 20 Januari 2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.</li> <li>b. Mengesahkan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro &amp; Surja sesuai Laporan No. RPC-2966/PSS/2017 tanggal 25 Januari 2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.</li> <li>c. Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI (Tahap II dan Tahap III) Tahun 2016 dengan jumlah emisi sebesar Rp 9.000.000.000.000,00 (sembilan triliun rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI (Tahap I) Tahun 2016 sejumlah Rp4.600.000.000.000,00 (empat triliun - enam ratus miliar rupiah).</li> </ol>

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

**Mata Acara Pertama**

	2. yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>volledig acquit et de charge</i> ) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
Hasil Pemungutan Suara	Setuju: 20.899.766.184 Saham (99,599%) Tidak Setuju: 7.006.000 Saham (0,033%) Abstain: 77.106.700 Saham (0,367%)
Realisasi/Tindak Lanjut	Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) serta dipublikasikan pada situs <i>web</i> Perseroan dan BEI masing-masing pada tanggal 1 Februari 2017 dan 21 Februari 2017.
Status	Telah selesai dilaksanakan

**Mata Acara Kedua**

Keputusan	Penetapan penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016 sebesar Rp 26.195.772.245.014 yaitu sebagai berikut:
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dividen sebesar 30% atau Rp 7.858.731.673.504 dan ditambah dividen spesial sebesar 10% atau Rp 2.619.577.224.502 sehingga total dividen sebesar 40% atau Rp10.478.308.898.006 ditetapkan sebagai Dividen Tunai dibagikan kepada para pemegang saham.</li> <li>b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ol> </li> <li>2. Sebesar 60% atau Rp 15.717.463.347.008 akan digunakan sebagai saldo laba ditahan.</li> </ol>
Hasil Pemungutan Suara	Setuju: 20.861.067.062 Saham (99,415%) Tidak Setuju: 51.082.422 Saham (0,243%) Abstain: 71.729.400 Saham (0,342%)
Realisasi/Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme pembayaran dividen telah dipublikasikan pada tanggal 17 Maret 2017 bersamaan dengan pengumuman hasil RUPST melalui situs <i>web</i> Bursa efek Indonesia dan situs <i>web</i> Perseroan.</li> <li>2. Distribusi Dividen telah dilaksanakan pada tanggal 13 April 2017.</li> </ol>
Status	Distribusi dividen telah dilaksanakan pada tanggal 13 April 2017 (tidak melebihi 30 hari kalender)

**Agenda Ketiga**

Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2016, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2017.</li> <li>2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwi Warna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2016, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2017.</li> </ol>
-----------	---



## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

<b>Agenda Ketiga</b>	
Hasil Pemungutan Suara	Setuju: 19.322.810.980 Saham (92,084%) Tidak Setuju: 1.140.726.293 Saham (5,436%) Abstain: 520.341.611 Saham (2,480%)
Realisasi/Tindak Lanjut	Besaran tantiem untuk tahun buku 2016 kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2017 telah diputuskan melalui surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara No 20/D5.MBU/06/2017 tanggal 21 Juni 2017
Status	Telah selesai dilaksanakan

<b>Agenda Keempat</b>	
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &amp; Surja, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017.</li> <li>2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2017 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.</li> <li>3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &amp; Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.</li> </ol>
Hasil Pemungutan Suara	Setuju: 19.855.151.259 Saham (94,620%) Tidak Setuju: 1.049.568.675 Saham (5,002%) Abstain: 79.158.950 Saham (0,377%)
Realisasi/Tindak Lanjut	Surat Perintah Kerja kepada KAP Purwantono, Sungkoro & Surja No. 374/P-PBJ/PJS/03/2017 tanggal 27 Maret 2017.
Status	Telah selesai dilaksanakan

<b>Agenda Kelima</b>	
Keputusan	Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN atas kegiatan Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Perseroan.
Hasil Pemungutan Suara	Setuju: 20.814.320.063 Saham (99,192%) Tidak Setuju: 94.979.121 Saham (0,453%) Abstain: 74.579.700 Saham (0,355%)
Realisasi/Tindak Lanjut	Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan telah berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No PER - 03/MBU/12/2016
Status	Telah selesai dilaksanakan

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

**Agenda Keenam**

Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka program Kementerian BUMN untuk melakukan standarisasi Anggaran Dasar BUMN terbuka.</li> <li>Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas.</li> <li>Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.</li> </ol>
Hasil Pemungutan Suara	<p>Setuju: 15.489.018.114 Saham (73,814%)            Tidak Setuju: 4.957.930.859 Saham (23,627%)            Abstain: 536.929.911 Saham (2,559%)</p>
Realisasi/Tindak Lanjut	Perubahan Anggaran Dasar telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0015594.AH.02.Tahun 2017 tanggal 01 Agustus 2017
Status	Telah selesai dilaksanakan

**Agenda Ketujuh**

Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris             <ol style="list-style-type: none"> <li>Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagai berikut sebagai anggota Dewan Komisaris:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuan Mustafa Abubakar sebagai Komisaris Utama/ Komisaris Independen.</li> <li>Tuan Ahmad Fuad sebagai Komisaris Independen.</li> <li>Tuan Vincentius Sonny Loho sebagai Komisaris</li> </ul>                 Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Dewan Komisaris.             </li> <li>Sdr. Mahmud sebagai Komisaris Perseroan yang diangkat pada RUPS Tahunan Tahun buku 2015 tanggal 23 Maret 2016 dialihkan menjadi Komisaris Independen, dengan meneruskan masa jabatannya.</li> <li>Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>Sdr. Andrinof A. Chaniago sebagai Komisaris Utama.</li> <li>Sdr. Nicolaus Teguh Budi H sebagai Komisaris</li> <li>Sdr. Vincentius Sonny Loho sebagai Komisaris.</li> </ul>                 Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS yang diselenggarakan tahun 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.             </li> </ol> </li> </ol>
-----------	--



## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

## Agenda Ketujuh

## Keputusan

2. Direksi
  - 2.1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi:
    - Sdr. Asmawi Syam sebagai Direktur Utama.
    - Sdr. Zulhelfi Abidin sebagai Direktur
 Pemberhentian anggota Direksi tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Direksi.
  - 2.2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi:
    - Sdr. Suprajarto sebagai Direktur Utama
    - Sdr. Indra Utoyo sebagai Direktur
 Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS yang diselenggarakan tahun 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
 

Dewan Komisaris:

  - Andrinof A. Chaniago, Komisaris Utama/ Komisaris Independen
  - Gatot Trihargo, Wakil Komisaris Utama
  - Adhyaksa Dault, Komisaris Independen
  - A. Fuad Rahmany, Komisaris Independen
  - A. Sonny Keraf, Komisaris Independen
  - Mahmud, Komisaris Independen
  - Jeffry J. Wurangian, Komisaris
  - Vincetius Sonny Loho, Komisaris
  - Nicolaus Teguh Budi Harjanto, Komisaris

Direksi:

  - Suprajarto, Direktur Utama
  - Sunarso, Wakil Direktur Utama
  - Randi Anto, Direktur
  - Susy Liestiwaty, Direktur
  - Donsuwan Simatupang, Direktur
  - Mohammad Irfan, Direktur
  - Haru Koesmahargyo, Direktur
  - Kuswiyoto, Direktur
  - Sis Apik Wijayanto, Direktur
  - Pryastomo, Direktur
  - Indra Utoyo, Direktur

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Agenda Ketujuh	
	Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ( <i>Fit &amp; Proper Test</i> ) terhadap calon-calon Dewan Komisaris dan Direksi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hasil Pemungutan Suara	Setuju: 15.283.081.088 Saham (72,832%) Tidak Setuju: 4.927.322.864 Saham (23,481%) Abstain: 773.474.932 Saham (3,686%)
Realisasi/Tindak Lanjut	<p><b>Dewan Komisaris</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sdr. Andrinof A. Chaniago telah lulus <i>Fit and Proper</i> sesuai surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-123/PB.12/2017 tanggal 21 Juli 2017</li> <li>Sdr. Nicolaus Teguh Budi Harjanto telah lulus <i>Fit and Proper</i> sesuai surat Otoritas Jasa Keuangan SR-123/PB.12/2017 tanggal 21 Juli 2017</li> <li>Sdr. Vincentius Sonny Loho telah lulus <i>Fit and Proper</i> sesuai surat Surat Bank Indonesia No. 14/96/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 3 September 2012</li> </ol> <p><b>Direksi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sdr. Suprajarto telah lulus <i>Fit and Proper</i> sesuai surat Otoritas Jasa Keuangan SR-70/PB.12/2017 tanggal 3 Mei 2017</li> <li>Sdr. Indra Utoyo telah lulus <i>Fit and Proper</i> sesuai surat Otoritas Jasa Keuangan SR-123/PB.12/2017 tanggal 21 Juli 2017</li> </ol>
Status	Telah selesai dilaksanakan

## Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) 2017

Pada tahun 2017, BRI menyelenggarakan RUPSLB sebanyak 1 (satu) kali yang diselenggarakan pada tanggal 18 Oktober 2017 di Gedung BRI I, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44 - 46, Jakarta Pusat 10210 dengan memenuhi kewajiban dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 beserta perubahannya, sebagai berikut:

Tanggal	Aktivitas	Keterangan	Status
30 Agustus 2017	Pemberitahuan RUPSLB kepada OJK	Kurang dari 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS.	Memenuhi
11 September 2017	Pengumuman RUPSLB	14 hari sebelum pemanggilan RUPSLB dan telah dimuat melalui media cetak Kontan dan <i>Investor Daily</i> , <a href="http://www.idx.co.id">www.idx.co.id</a> dan <a href="http://www.bri.co.id">www.bri.co.id</a>	Memenuhi
26 September 2017	Pemanggilan RUPSLB	21 hari sebelum RUPST dan telah dimuat melalui media cetak Kontan dan <i>Investor Daily</i> , <a href="http://www.idx.co.id">www.idx.co.id</a> dan <a href="http://www.bri.co.id">www.bri.co.id</a>	Memenuhi
18 Oktober 2017	RUPSLB	Pelaksanaan RUPST 2017 di Gedung BRI I Lantai 21 Jalan Jendral Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat 10210	Memenuhi
19 Oktober 2017	Pengumuman Ringkasan Risalah Hasil RUPSLB	Ringkasan Risalah telah diupload pada <i>Website</i> Perseroan 1 Hari Setelah RUPSLB	Memenuhi



## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Tanggal	Aktivitas	Keterangan	Status
20 Oktober 2017	Pengumuman Ringkasan Risalah Hasil RUPSLB	Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB disampaikan kepada OJK 2 (dua) hari setelah RUPSLB dan telah dimuat melalui media cetak <i>Investor Daily</i> dan Kontan, <a href="http://www.idx.co.id">www.idx.co.id</a> dan <a href="http://www.bri.co.id">www.bri.co.id</a>	Memenuhi
31 Oktober 2017	Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK	Risalah RUPS disampaikan kepada OJK kurang 30 hari kerja setelah RUPST.	Memenuhi

## Mata Acara RUPSLB

Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

<b>Mata Acara Pertama</b>	Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham ( <i>Stock Split</i> ) Perseroan dari semula Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per saham menjadi Rp 50 (lima puluh rupiah) per saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait <i>stock split</i> tersebut.
<b>Mata Acara Kedua</b>	Perubahan Pengurus Perseroan

## Kehadiran Pemegang Saham Dewan Komisaris dan Direksi

RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham yang telah memenuhi persyaratan kuorum serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direksi
Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 21.333.639.247 saham dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perusahaan	<p>Dihadiri oleh 8 (delapan) dari 9 (sembilan) anggota Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Andrinof A. Chaniago Komisaris Utama/ Komisaris Independen</li> <li>- Gatot Trihargo Wakil Komisaris Utama</li> <li>Note: Adhyaksa Dault tidak menghadiri RUPSLB</li> <li>- A. Sonny Keraf Komisaris Independen</li> <li>- Mahmud Komisaris Independen</li> <li>- A. Fuad Rahmany Komisaris Independen</li> <li>- Vincentius Sonny Loho Komisaris</li> <li>- Jeffry J. Wurangian Komisaris</li> <li>- Nicolaus Teguh Budi H Komisaris</li> </ul> <p>Anggota Dewan Komisaris yang berhalangan hadir adalah Sdr. Adhyaksa Dault.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suprajarto Direktur Utama</li> <li>- Sunarso Wakil Direktur Utama</li> <li>- Susy Liestiwaty Direktur</li> <li>- Sis Apik Wijayanto Direktur</li> <li>- Donsuwan Simatupang Direktur</li> <li>- Randi Anto Direktur</li> <li>- Indra Utoyo Direktur</li> <li>- Mohammad Irfan Direktur</li> <li>- Priyastomo Direktur</li> <li>- Kuswiyoto Direktur</li> <li>- Haru Koesmahargyo Direktur</li> </ul>
87.26%	89%	100%

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

### Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para Pemegang Saham memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau Pendapat dalam RUPS terkait dengan masing-masing mata acara rapat. Dalam RUPSLB jumlah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Jumlah Pertanyaan/ Pendapat
Mata Acara Pertama	<p>Terdapat 1 pertanyaan/pendapat dari 1 (satu) orang penanya:</p> <p>Pertanyaan 1: Apakah ada jatah bagi UMKM/Koperasi binaan BRI untuk mengambil stock split baru dan Apakah ada/bisa diusahakan agar peraturan penjatahan bagi UMKM/ binaan mengambil porsi terlebih dahulu?</p> <p>Jawaban 1: <i>Stocksplit</i> ini bukan penerbitan saham baru/<i>right issue</i>, sehingga pihak yang berhak dan dapat membeli saham harus sesuai dengan mekanisme pasar dan peraturan pasar modal yang berlaku.</p>
Mata Acara Kedua	Tidak terdapat pertanyaan

### Pemungutan Suara

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah berdasarkan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan. Apabila kesepakatan tidak dapat dicapai maka pengambilan keputusan dilaksanakan dengan pemungutan suara.

### Keputusan RUPSLB dan Tindak Lanjut

Agenda Pertama	
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham Seri A Dwiwarna dan Seri B dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per saham menjadi Rp 50,00 (lima puluh rupiah) per saham atau dengan rasio 1:5 (satu banding lima). Hasil pemecahan nilai nominal saham seri A Dwiwarna lama menjadi 5 (lima) saham dengan nominal baru yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna tetap dipertahankan sebagai saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia dengan nominal sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) per saham;</li> <li>b. 4 (empat) saham seri B milik Negara Republik Indonesia dengan nominal sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) per saham.</li> </ol> </li> <li>2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan pemecahan nilai nominal saham (<i>stock split</i>).</li> </ol>



## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

**Agenda Pertama**

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
  - a. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pemecahan nilai nominal saham tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada menentukan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham.
  - b. Menyatakan kembali keputusan mengenai pemecahan nilai nominal saham tersebut diatas sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam suatu akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan/surat tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada sesuatu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju: 21.333.627.347 Saham (99.9999%) Abstain: 11.900 Saham (0.0000%) Tidak terdapat pemegang saham yang tidak setuju.
Realisasi/ Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumuman tata cara dan jadwal pemecahan nilai nominal saham (<i>stocksplit</i>) dilaksanakan pada tanggal 2 November 2017</li> <li>• Saham dengan nilai nominal baru telah didistribusikan pada tanggal 15 November 2017</li> </ul>
Status	Telah selesai dilaksanakan

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

### Agenda Kedua

- Keputusan
- Memberhentikan dengan hormat Sdr. Adhyaksa Dault sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. yang diangkat berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 19 Maret 2015.  
Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Dewan Komisaris.
  - Mengangkat Sdri. Rofikoh Rokhim sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
  - Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai anggota Direksi:
    - Tuan Sunarso sebagai Wakil Direktur Utama
    - Tuan Randi Anto sebagai Direktur
 yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPST tanggal 19 Maret 2015 dan RUPST tanggal 23 Maret 2016. Pemberhentian anggota Direksi tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Direksi.
  - Merubah nomenklatur jabatan Direksi menjadi sebagai berikut:
    - Semula Direktur Utama tetap menjadi Direktur Utama.
    - Semula Wakil Direktur Utama menjadi Direktur Hubungan Kelembagaan.
    - Semula Direktur menjadi Direktur Kredit Mikro dan Ritel
    - Semula Direktur menjadi Direktur Kredit Menengah, Korporasi dan BUMN
    - Semula Direktur menjadi Direktur Digital Banking dan Teknologi Informasi.
    - Semula Direktur menjadi Direktur Jaringan dan Layanan.
    - Semula Direktur menjadi Direktur Konsumer.
    - Semula Direktur menjadi Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan.
    - Semula Direktur menjadi Direktur Human Capital.
    - Semula Direktur menjadi Direktur Kepatuhan
    - Semula Direktur menjadi Direktur Manajemen Risiko



## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

## Agenda Kedua

- Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
  - Tuan Priyastomo semula sebagai Direktur menjadi Direktur Kredit Mikro dan Ritel.
  - Tuan Kuswiyoto semula sebagai Direktur menjadi Direktur Kredit Menengah, Korporasi dan BUMN.
  - Tuan Indra Utoyo semula sebagai Direktur menjadi Direktur Digital Banking dan Teknologi Informasi.
  - Yuan Mohammad Irfan semula sebagai Direktur menjadi Direktur Jaringan dan Layanan.
  - Tuan Haru Koesmahargyo semula sebagai Direktur menjadi Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan
  - Nyonya Susy Liestiowaty semula sebagai Direktur menjadi Direktur Kepatuhan.
  - Tuan Donsuwan Simatupang semula sebagai Direktur menjadi Direktur Manajemen Risiko.
  - Tuan Sis Apik Wijayanto semula sebagai Direktur menjadi Direktur Hubungan Kelembagaan

- Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
  - Nyonya Handayani Sebagai Direktur Konsumer
  - Nyonya R. Sophia Alizsa sebagai Direktur *Human Capital*

Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPST yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPST yang diselenggarakan tahun 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

- Dengan pemberhentian dan pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, perubahan nomenklatur jabatan serta pengalihan tugas Direksi, sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 6, maka susunan Pengurus PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Andrinof A. Chaniago, Komisaris Utama dan Komisaris Independen
- Gatot Trihargo, Wakil Komisaris Utama
- Mahmud, Komisaris Independen
- A. Fuad Rahmany, Komisaris Independen
- A. Sonny Keraf, Komisaris Independen
- Rofikoh Rokhim, Komisaris Independen
- Nicolaus Teguh Budi Harjanto, Komisaris
- Vincetius Sonny Loho, Komisaris
- Jeffry J. Wurangian, Komisaris

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

### Agenda Kedua

#### Direksi:

- Suprajarto, Direktur Utama
- Pryastomo, Direktur Kredit Mikro dan Ritel
- Indra Utoyo, Direktur Digital Banking dan Teknologi Informasi
- Mohammad Irfan, Direktur Jaringan dan Layanan
- Haru Koesmahargyo, Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan
- Susy Liestiowaty, Direktur Kepatuhan
- Donsuwan Simatupang, Direktur Manajemen Risiko
- Sis Apik Wijayanto, Direktur Hubungan Kelembagaan
- Handayani, Direktur Konsumer
- R. Sophia Alizsa, Direktur Human Capital

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) terhadap calon-calon Direksi dan Komisaris tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju: 14.951.633.535 Saham (25.6463%)
	Tidak Setuju: 5.471.300.928 Saham (25.6463%)
	Abstain: 910.704.784 Saham (4.2689%)

#### Dewan Komisaris

Sdri. Rofikoh Rokhim telah lulus Fit and Proper sesuai surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-18/PB.12/2018 tanggal 31 Januari 2018

#### Direksi

Sdri. R. Sophia Alizsa dan Sdri. Handayani saat ini masih dalam proses Fit and Proper Test OJK

Status	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengangkatan Sdri. Rofikoh Rokhim sebagai Anggota Dewan Komisaris Baru Telah selesai dilaksanakan.</li> <li>2. Pengangkatan efektif Sdri. R. Sophia Alizsa dan Sdri. Handayani masih dalam proses.</li> </ol>
--------	---



## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

## PENYELENGGARAAN RUPS TAHUN SEBELUMNYA

Pada tahun 2016, Perseroan melaksanakan 1 (satu) kali RUPS yaitu RUPS Tahunan.

## Keputusan RUPS 2016

Keputusan Mata Acara Pertama	
1.	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja sesuai Laporan No. RPC-250/PSS/2016 tanggal 29 Januari 2016.
2.	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015 yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja sesuai dengan Laporan No. RPC-119/PSS/2016/DAU tanggal 23 Februari 2016.
3.	Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
Hasil Pemungutan Suara	Setuju: 20.400.391.665 saham (99,87%) Tidak Setuju: 2.148.800 saham (0,01%) Blanko/Abstain: 24.402.900 saham (0,11%)
Realisasi/Tindak lanjut	Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) serta dipublikasikan pada situs web Perseroan dan BEI masing-masing pada tanggal 4 Februari 2016 dan 1 Maret 2016.
Status Realisasi	Telah selesai dilaksanakan

Keputusan Mata Acara Kedua	
1.	Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan tahun buku 2015 sebesar Rp25.397.740.886.903,00 sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Sebesar 30,00% atau Rp7.619.322.266.071,00 ditetapkan sebagai Dividen Tahun Buku 2015.</li> <li>Sisanya akan digunakan untuk laba ditahan Perseroan.</li> </ol> Alokasi dana untuk Program Bina Lingkungan untuk tahun 2016 sebesar Rp253.977,42 juta menjadi beban Perseroan.
2.	Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen tahun buku 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hasil Pemungutan Suara	Setuju: 20.327.067.643 saham (99,51%) Tidak Setuju: 73.237.022 saham (0,13%) Blanko/Abstain: 26.638.700 saham (0,35%)
Realisasi/Tindak lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Komponen Cadangan dan laba ditahan dalam struktur modal meningkat</li> <li>· Mekanisme pembayaran dividen telah dipublikasikan pada tanggal 24 Maret 2016 melalui harian Bisnis Indonesia, situs web Bursa efek Indonesia dan situs web Perseroan.</li> <li>· Distribusi Dividen telah dilaksanakan pada tanggal 22 April 2016.</li> </ul>
Status Realisasi	Telah selesai dilaksanakan

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

**Keputusan Mata Acara Ketiga**

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem yang diberikan untuk tahun buku 2015 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun 2015 serta menetapkan besarnya gaji, honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2016.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju: 19.062.472.700 saham (93,32%) Tidak Setuju: 1.013.517.937 saham (4,96%) Blanko/Abstain: 350.952.728 saham (1,72%)
Realisasi/Tindak lanjut	Surat Kementerian BUMN No. S-88/D.5-MBU/06/2016 tanggal 27 Juni 2016 perihal penetapan honorarium/gaji, tunjangan dan fasilitas untuk tahun 2016 serta tantiem atas kinerja tahun buku 2015.
Status Realisasi	Telah selesai dilaksanakan

**Keputusan Mata Acara Keempat**

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) serta KAP Pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku 2016 serta menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP maupun KAP Pengganti tersebut.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju: 19.377.485.540 saham (94,86%) Tidak Setuju: 965.520.331 saham (4,73%) Blanko/Abstain: 83.937.494 saham (0,41%)
Realisasi/Tindak lanjut	Surat Dewan Komisaris No. R.25-KOM/06/2016 tanggal 14 Juni 2016 perihal Penetapan KAP Tahun Buku 2016.
Status Realisasi	Telah selesai dilaksanakan

**Keputusan Mata Acara Kelima**

Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali yang disimpan sebagai saham tresuri (treasury stock) dalam rangka pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Pekerja serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Program Kepemilikan Saham tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis pemegang saham seri A Dwiwarna.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju: 14.936.398.153 saham (73,12%) Tidak Setuju: 4.648.552.386 saham (22,76%) Blanko/Abstain: 841.992.826 saham (4,12%)
Realisasi/Tindak lanjut	Program MESOP masih menunggu keputusan dari Kementerian BUMN terkait dengan penambahan long-term benefit untuk Pengurus Perusahaan.
Status Realisasi	Masih dalam proses

**Keputusan Mata Acara Keenam**

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai anggota Direksi:
  - Sdr. A. Toni Soetirto sebagai Direktur
  - Sdr. Randi Anto sebagai Direktur
  - Sdr. Gatot Mardiwastito sebagai Direktur

Pemberhentian anggota Direksi tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Direksi.



## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

**Keputusan Mata Acara Keenam**

2. Mengusulkan pengangkatan nama-nama berikut sebagai anggota Direksi:

- Sdr. Randi Anto sebagai Direktur
- Sdr. Sis Apik Wijayanto sebagai Direktur
- Sdr. Priyastomo sebagai Direktur

Anggota Direksi yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Mengangkat Sdr. Mahmud sebagai Komisaris Perseroan.

Anggota Komisaris yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama/Komisaris Independen: Mustafa Abubakar

Wakil Komisaris Utama: Gatot Trihargo

Komisaris Independen: Ahmad Fuad

Komisaris Independen: Adhyaksa Dault

Komisaris Independen: A. Fuad Rahmany

Komisaris Independen: A. Sonny Keraf

Komisaris: Vincentius Sonny Loho

Komisaris: Jeffry J. Wurangian

Komisaris: Mahmud

Direksi:

Direktur Utama: Asmawi Syam

Wakil Direktur Utama: Sunarso

Direktur: Mohammad Irfan

Direktur: Zulhelfi Abidin

Direktur: Susy Lestiowaty

Direktur: Donsuwan Simatupang

Direktur: Haru Koesmahargyo

Direktur: Kuswiyoto

Direktur: Randi Anto

Direktur: Sis Apik Wijayanto

Direktur: Priyastomo

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

**Keputusan Mata Acara Keenam**

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) terhadap calon-calon Direksi dan Komisaris tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju: 14.936.398.153 saham (73,12%) Tidak Setuju: 4.648.552.386 saham (22,76%) Blanko/Abstain: 841.992.826 saham (4,12%)
Realisasi/Tindak lanjut	Direksi <ul style="list-style-type: none"> <li>· Sdr. Randi Anto sebagai Direktur telah lulus Fit &amp; Proper sesuai Surat Bank Indonesia No. 13/68/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 4 Juli 2011</li> <li>· Sdr. Sis Apik Wijayanto sebagai Direktur telah lulus Fit &amp; Proper sesuai Surat OJK No. SR-85/D.03/2016 tanggal 20 Mei 2016</li> <li>· Sdr. Priyastomo sebagai Direktur telah lulus Fit &amp; Proper sesuai Surat OJK No. SR-105/D.03/2016 tanggal 21 Juni 2016.</li> </ul> <p>Dewan Komisaris Sdr. Mahmud sebagai Komisaris telah lulus <i>Fit &amp; Proper</i> sesuai Surat OJK No. SR-40/PB.12/2017 tanggal 3 Maret 2017</p>
Status Realisasi	Telah selesai dilaksanakan

### Realisasi Hasil RUPS dan Alasan Dalam Hal Terdapat Keputusan RUPS yang Belum Direalisasikan

#### RUPS Tahun Sebelumnya (RUPS 2016)

Terdapat 1 (satu) dari 6 (enam) mata acara pada RUPST 2016 yang belum sepenuhnya direalisasikan yaitu:

- Mata acara 5 (lima) perihal "Persetujuan pengalihan saham hasil pembelian kembali (Buyback) untuk pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Pegawai" masih dalam proses persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

#### RUPS Tahun Buku 2017

##### RUPS Tahunan 2017

Seluruh keputusan RUPS Tahunan 2017 telah direalisasikan seluruhnya (100%) sehingga tidak ada lagi putusan pada RUPS Tahunan 2017 yang perlu direalisasikan lebih lanjut.

##### RUPS Luar Biasa Tahun 2017

Terdapat 1 (satu) dari 2 (dua) mata acara pada RUPSLB 2017 yang belum sepenuhnya direalisasikan yaitu mata acara kedua perihal "Perubahan Pengurus Perseroan", untuk proses *Fit and Proper* atas Sdri. R. Sophia Alizsa dan Sdri. Handayani yang masih berjalan hingga akhir Tahun Buku 2017.



## DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasehat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

### DASAR HUKUM

Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas terbuka, maka Dewan Komisaris Perseroan tunduk dan patuh pada ketentuan:

- a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang dewan komisaris Badan usaha Milik negara.
- c. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik negara.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27 / POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39 / SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.03/2016 Tanggal 07 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- h. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan & Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
- i. Peraturan Bank Indonesia No. 12/23.PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

### KRITERIA, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

#### Kriteria Dewan Komisaris

Kriteria, prosedur pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris BRI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep: 07-KOM/BRI/07/2015 tentang Kebijakan Nominasi Anggota Komisaris dan Direksi.

Anggota Dewan Komisaris BRI wajib memiliki kualifikasi umum sebagai berikut:

## DEWAN KOMISARIS

**Kualifikasi Umum**

1. Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
  - a. Dinyatakan pailit.
  - b. Menjadi anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
  - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Bank, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
3. Tidak memegang jabatan rangkap sebagai:
  - a. Anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
  - b. Jabatan lainnya yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
  - a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
  - b. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) Perusahaan Anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.
5. Tidak termasuk rangkap jabatan, apabila:
  - a. Anggota Dewan Komisaris non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya.
  - b. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.
6. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan /atau anggota Dewan Komisaris Bank sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Kualifikasi umum tersebut di atas antara lain dapat dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari Bakal Calon yang bersangkutan.

**Persyaratan Integritas**

Dalam rangka memenuhi persyaratan integritas, calon Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki:

1. Akhlak dan moral yang baik.
2. Komitmen untuk mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku.
3. Komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.
4. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.



## DEWAN KOMISARIS

<b>Pemenuhan PBI No. 12/23/2010 tentang Penilaian kemampuan dan kepatutan</b>	Dewan Komisaris sebagai Pengurus Bank wajib mendapatkan predikat lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bank Indonesia). Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.
<b>Pemenuhan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank</b>	<p>Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya.</li> <li>2. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/ atau bidang keuangan.</li> <li>3. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.</li> </ol>

## SISTEM DAN PROSEDUR NOMINASI DEWAN KOMISARIS

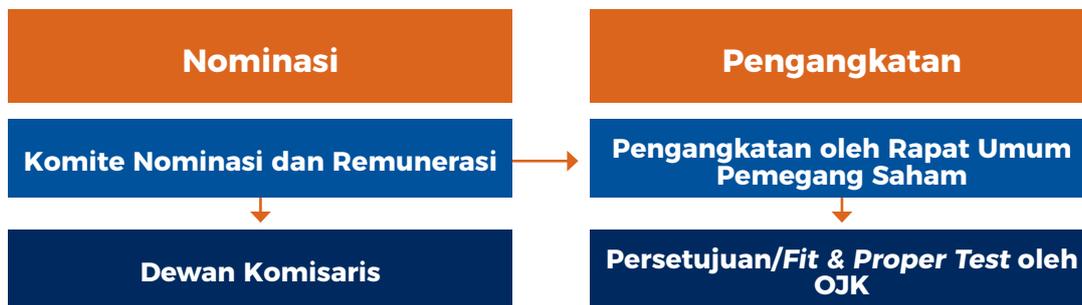
Sistem dan Prosedur pemilihan anggota Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi menjangkau Bakal Calon anggota Dewan Komisaris yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.
2. Bakal Calon anggota Dewan Komisaris yang dianggap layak selanjutnya diusulkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris untuk mengikuti proses Evaluasi.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan proses evaluasi untuk menggali informasi komprehensif mengenai kualifikasi dan kompetensi Bakal Calon, antara lain melalui penelusuran rekam jejak /daftar riwayat hidup yang bersangkutan.
4. Hasil penggalian informasi mengenai Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dibahas dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi untuk memutuskan Bakal Calon yang terpilih menjadi Calon anggota Dewan Komisaris.
5. Hasil pembahasan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) disampaikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi melalui Nota Dinas kepada Dewan Komisaris. Nota Dinas tersebut sekaligus merupakan dokumen rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi atas pencalonan Calon anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
6. Calon anggota Dewan Komisaris yang terpilih diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris yang sekaligus sebagai dasar rekomendasi Dewan Komisaris kepada RUPS melalui Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Sesuai ketentuan Berdasarkan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Calon Pihak Utama (Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris) wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Pihak Utama. Dalam rangka memberikan persetujuan, OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Dewan Komisaris yang meliputi persyaratan: integritas, reputasi keuangan dan kompetensi serta kepemilikan dan kepengurusan/pengelolaan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DEWAN KOMISARIS

Kemudian, mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.



### Prosedur Pengangkatan

Susunan dan perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang diangkat belum disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka pengangkatan dimaksud belum efektif sebelum yang bersangkutan disetujui oleh OJK.

Untuk memperoleh persetujuan atas anggota Dewan Komisarisnya, Perseroan mengajukan permohonan kepada OJK untuk melakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan. Persetujuan atau penolakan atas permohonan dimaksud akan diberikan oleh OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK meliputi penelitian administratif dan wawancara. Dalam hal calon yang dimintakan persetujuan dan telah diangkat dalam RUPS dimaksud ternyata tidak disetujui oleh OJK, maka Perseroan melalui RUPS wajib memberhentikan yang bersangkutan.

Bagi calon anggota Dewan Komisaris Perseroan yang belum mendapat persetujuan OJK, yang bersangkutan dilarang melakukan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dalam kegiatan Bank dan atau kegiatan lain yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan kondisi keuangan Bank, walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.

### Prosedur Pemberhentian

Masa jabatan seorang anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

1. Meninggal dunia
2. Masa jabatannya berakhir
3. Diberhentikan berdasarkan RUPS
4. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampungan berdasarkan suatu keputusan pengadilan
5. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya (termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang, dan pengunduran diri)

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada BRI dan BRI wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

Anggota Dewan Komisaris dapat pula diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan



## DEWAN KOMISARIS

## PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Berdasarkan POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Calon Pihak Utama (Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris) wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Pihak Utama. Dewan Komisaris Perseroan wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi.

Anggota Dewan Komisaris yang telah lulus *fit and proper test* tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

No	Komisaris	Jabatan	Tanggal Efektif Berdasarkan Surat OJK/BI	Pelaksana Fit And Proper Test	Hasil
1	Mustafa Abubakar	Komisaris Utama/ Independen	19 November 2014	OJK	Lulus
2	Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/ Independen	19 Juli 2017	OJK	Lulus
3	Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama	10 Juni 2015	OJK	Lulus
4	Ahmad Fuad	Komisaris Independen	01 Juni 2012	OJK	Lulus
5	Adhyaksa Dault	Komisaris Independen	23 Juli 2010	OJK	Lulus
6	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	26 Mei 2017	OJK	Lulus
7	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	10 Juni 2015	OJK	Lulus
8	Mahmud	Komisaris Independen	28 Februari 2017	OJK	Lulus
9	Vincentius Sonny Loho	Komisaris	05 September 2012	OJK	Lulus
10	Jeffry J. Wurangian	Komisaris	08 Juli 2017	OJK	Lulus
11	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	19 Juli 2017	OJK	Lulus
12	Rofikoh Rokhim*	Komisaris	24 Januari 2018	OJK	Lulus

\*) Berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-15/D.03/2018 tanggal 24 Januari 2018

## PEDOMAN DAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris BRI telah memiliki Panduan Kerja Dewan Komisaris atau *Board Charter* yang disahkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Nota Dinas Sekretariat Dewan Komisaris No. B.41-Sekkom/05/2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang Pedoman dan tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris berisi tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, pembagian kerja, waktu kerja, etika kerja, tata cara rapat, struktur organisasi, dan pelaksanaan tugas berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Buku ini disusun sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya dan sebagai dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Dewan Komisaris.

Buku Panduan Kerja tersebut juga menjelaskan tugas dan tanggungjawab dari organ-organ Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantauan Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Sekretariat Dewan Komisaris.

*Board Charter* Dewan Komisaris telah di publikasikan pada *website* Perseroan.

## DEWAN KOMISARIS

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

#### Tugas Dewan Komisaris

Secara umum Dewan Komisaris secara kolegial melakukan pengawasan terhadap fungsi pengelolaan Perseroan. Peran Dewan Komisaris tersebut juga mencakup memberikan nasehat dan arahan kepada Direksi atas penerapan kebijakan-kebijakan Perseroan dalam melaksanakan aktivitas usaha sesuai strategi dan tujuan BRI.

#### Tugas Komisaris Utama

1. Memimpin pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.
2. Memimpin pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring atas pelaksanaan program Kerja Dewan Komisaris.
4. Mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

#### Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian.
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

#### Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Sesuai dengan *Board Charter*, Dewan Komisaris memiliki hak dan wewenang sebagai berikut:

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen- dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan veri kasi dan lain-lain surat berharga, dan memeriksa kekayaan Perseroan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan seorang sekretaris Dewan Komisaris, atas usul Pemegang saham seri A Dwiwarna;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
8. Membentuk komite audit dan komite-komite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan- pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
12. Memberikan persetujuan tertulis atas perbuatan Direksi meliputi:
  - a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
  - b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk KSO, KSU, kerjasama lisensi, BOT, BTO, BOO dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari nilai yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.



## DEWAN KOMISARIS

- c. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk KSO, KSU, kerjasama lisensi, BOT, BTO, BOO dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari nilai yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
  - d. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris.
  - e. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris.
  - f. Melepaskan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada Perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang.
  - g. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris.
13. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar.

**Kewajiban Dewan Komisaris**

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
2. Memberikan pendapat dan persetujuan terhadap rencana kerja Perseroan yang terdiri dari:
  - a. Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP);
  - b. Rencana Bisnis Bank (RBB);
  - c. Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP), dan
  - d. Rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi sesuai peraturan perundangan harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan;
4. Memberitahukan kepada regulator paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya:
  - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;
  - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan; yang belum atau tidak dilaporkan oleh Perseroan dan/atau oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada regulator.
5. Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri-A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
6. Mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;
7. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
8. Memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan apabila diminta;
9. Menyusun laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan yang disusun oleh Direksi.
10. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
11. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan perseroan lain;
12. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
13. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal;
14. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
15. Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi;
16. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
17. Menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi;

## DEWAN KOMISARIS

18. Melakukan Pengawasan Aktif terhadap Fungsi Kepatuhan, dengan:
  - a. mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun;
  - b. memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
19. Melakukan pengawasan aktif terhadap manajemen risiko meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Umum Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Mengevaluasi dan mengambil keputusan atas permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
20. Memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan serta memastikan penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan;
21. Memberikan persetujuan atas kebijakan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) dan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU & PPT;
22. Mengarahkan tumbuhnya budaya dan kepedulian Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank;
23. Memantau Tingkat Kesehatan Bank, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen Risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha;
24. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Perseroan terkait penggunaan Teknologi Informasi serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi;
25. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
26. Menyampaikan laporan mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Perseroan setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
27. Melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) oleh Pengurus; menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya; dan menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK);
28. Menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja Perseroan setiap triwulan kepada Pemegang Saham seri A Dwiwarna;
29. Memastikan bahwa komite - komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif; dan Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

### Ruang Lingkup Kewajiban Dewan Komisaris

Ruang Lingkup Tanggung Jawab Dewan Komisaris meliputi:

#### Strategi dan Kebijakan

Memberikan pendapat dan persetujuan terhadap rencana kerja Perseroan yang terdiri dari Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP), Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;

#### Tata Kelola Perusahaan

Dewan Komisaris berperan memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi. Dalam rangka mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Dewan Komisaris bertanggung jawab diantaranya untuk:



## DEWAN KOMISARIS

- a. Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik kepada RUPS.
- b. Melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan kepada RUPS.
- c. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan, serta memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan apabila diminta.

**Manajemen Risiko**

Melakukan pengawasan aktif terhadap manajemen risiko dengan menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Umum Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, sebagai salah satu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris juga bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.

**Kepatuhan**

Memberitahukan kepada regulator mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan, yang belum atau tidak dilaporkan oleh Perseroan dan/ atau oleh Direktur Kepatuhan kepada regulator serta melakukan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

**Larangan Dewan Komisaris**

Sesuai dengan *Board Charter* yang telah ditetapkan, Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundangan yang berlaku
2. Memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta;

- b. pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai peraturan dan perundang-undangan;
3. Memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan;
4. Melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan/atau mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah sebagai Anggota Dewan Komisaris;
5. Terpengaruh oleh pihak lain dalam melaksanakan tugas dan pengambilan keputusan yang menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan/atau pembuatan keputusan yang tidak tepat.
6. Memberikan atau menawarkan kepada pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah dan/atau pihak lain untuk mempengaruhi atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melibatkan diri pada penjualan atau pembelian atas efek dimana yang bersangkutan mempunyai informasi orang dalam (*insider trading*).

Anggota Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam kejahatan keuangan. Apabila anggota Dewan Komisaris terlibat dalam kejahatan keuangan berupa adanya status terpidana dari pihak yang berwenang maka anggota Dewan Komisaris dimaksud wajib mengundurkan diri. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## DEWAN KOMISARIS

## PENILAIAN KINERJA ATAS KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki 4 (empat) komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pengawasan Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Ketiga Komite tersebut bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang terdapat dalam Piagam Kerja masing-masing komite.

Per 31 Desember 2017, Dewan Komisaris melihat bahwa seluruh komite dibawah Dewan Komisaris telah melaksanakan seluruh kinerjanya dengan optimal dan efisien. Pendapat ini berdasarkan hasil kerja. Pendapat ini berdasarkan atas seluruh kinerjanya, rekomendasi atas hal-hal strategis kepada Dewan Komisaris dan peninjauan atas laporan berkala komite- komite berikut oleh Dewan Komisaris:

1. Komite Audit  
Pengawasan terhadap kecukupan sistem pengendalian internal, pelaksanaan proses laporan keuangan termasuk penelaahan sebelum memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan disampaikan kepada otoritas berwenang dan diumumkan kepada publik.
2. Komite Pengawasan Manajemen Risiko  
Mengevaluasi dan memantau penerapan manajemen Risiko di dalam Perseroan
3. Komite Nominasi dan Remunerasi  
Pemberian masukan atas calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta melaksanakan evaluasi atas kebijakan remunerasi di dalam Perseroan termasuk remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi serta evaluasi terhadap pengelolaan SDM secara keseluruhan
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi  
Memberikan masukan terkait sinergi penerapan tata kelola pada BRI dan anak usahanya.

Nama	Jabatan	Usia (th)	Tanggal pengangkatan	Lama Menjabat	Jenis Kelamin	Pendidikan
Mustafa Abubakar*)	Komisaris Utama/ Independen	67	28 Maret 2012	5 Tahun	Pria	S1 Sumber Daya Perairan, Institute Pertanian Bogor S2 Teknologi Kelautan, Institute Pertanian Bogor S3 Teknologi Kelautan, Institute Pertanian Bogor
Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/ Independen	55	15 Maret 2017	8 Bulan	Pria	S1 Ilmu Politik Universitas Indonesia S2 Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia S3 Ilmu Filsafat Universitas Indonesia



## DEWAN KOMISARIS

## KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dinyatakan bahwa komposisi Dewan Komisaris wajib memperhatikan keberagaman komposisi Dewan Komisaris.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka.

Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.

Komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan berasal dari beragam latar belakang pendidikan, pengetahuan, keahlian, jenis kelamin, usia dan pengalaman sebagaimana tertuang pada profil masing-masing anggota Dewan Komisaris, yaitu dari kalangan praktisi perbankan, cendekiawan/ akademisi, birokrasi dan mereka yang pernah berkarir sebagai pengambil keputusan/kebijakan di bidang regulasi maupun korporasi yang berpengalaman di bidangnya masing-masing.

Selama periode tahun 2017, keberagaman komposisi Dewan Komisaris tercermin dalam Profil Dewan Komisaris diantaranya pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin dengan rincian sebagai berikut:

	Pengalaman Kerja/Kedirekturan		Jabatan lain Saat Ini		Keahlian
	Periode	Jabatan	Periode	Jabatan	
	1991 - 2001	Inspektur Jendral Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan	2012 - sekarang	Dewan Pembina Yayasan Leuser Internasional (YLI)	Banking
	2001 - 2005	Inspektur Jendral Departemen Kelautan dan Perikanan	2013 - sekarang	Senat Akademik STIE Indonesia Banking School Dewan Penasehat PERBANAS	Risk Management Kelautan dan Sumber Daya Perairan
	2005 - 2007	Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam	2013 - sekarang	Dewan Penasehat Perhimpunan Perbankan Nasional (Perbanas)	Internal Audit
	2007 - 2009	Direktur Utama Perum Bulog	2015 - sekarang	Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat IKAL Lemnasham	
	2009 - 2011	Menteri Negara BUMN	2015 - sekarang	Wakil Ketua Dewan Pengawas Ikatan Bankir Indonesia (IBI)	
	2012 - 2015	Wakil Komisaris Utama BRI	2015 - sekarang	Ketua Dewan Pengawas BARA	
	2015 - 2017	Komisaris Utama BRI (Maret 2017)	2013 - sekarang	Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia	Ilmu Sosial, Politik & Ekonomi
	2008 - 2014	Direktur Eksekutif CIRUS Surveyors Group (CGS)	2006 - sekarang		
	2014 - 2015	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas			
	2015 - 2017	Komisaris Utama Angkasa Pura I			
	2017 - sekarang	Komisaris Utama BRI			

Ikhtisar Kinerja Utama  
 Laporan Manajemen  
 Profil Perusahaan  
 Analisa & Pembahasan Manajemen

## DEWAN KOMISARIS

Nama	Jabatan	Usia (th)	Tanggal pengangkatan	Lama Menjabat	Jenis Kelamin	Pendidikan
Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama	55	19 Maret 2015	1 Tahun 9 Bulan	Pria	Diploma, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)  S1 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara  S2 Master Akuntansi dan Sistem Informasi Keuangan, Cleveland State University Ohio – USA  S3 Doktor Manajemen Strategik, Universitas Padjadran
Ahmad Fuad*)	Komisaris Independen	62	28 Maret 2012	4 tahun 9 bulan	Pria	S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia  S2 MBA, University of Adelaide, Australia
Adhyaksa Dault***)	Komisaris Independen	52	20 Mei 2010	6 tahun 6 bulan	Pria	S1 Hukum Universitas Trisakti  S2 Magister Pemberdayaan Masyarakat Universitas Indonesia  S3 Fakultas Perikanan dan Kelautan Institut Pertanian Bogor



## DEWAN KOMISARIS

	Pengalaman Kerja/Kedirektoran		Jabatan lain Saat Ini		Keahlian
	Periode	Jabatan	Periode	Jabatan	
	2006 - 2010	Asisten Deputi Informasi dan Administrasi Kementerian BUMN	2015 – sekarang	Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan Kementerian BUMN	Accounting Risk Management
	2007 - 2012	Komisaris PT Adhi Karya (Persero)			
	2008 - 2012	Komisaris PT Jiwasraya (Persero)	2014 - sekarang	Anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia	Audit Finance
	2010 - 2013	Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II Kementerian BUMN	2010 - sekarang	President <i>Association Certified Fraud Examiner (CFE)</i> Indonesia	Manajemen Strategik
	2013 – April 2014	Komisaris PT Telkom	2010 - sekarang	Anggota Dewan Kehormatan Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)	
	2013 – Mei			Anggota Dewan Penguji <i>Certified Professional Management Accountant (CPMA)</i>	
	2014 - 2015	Komisaris PT Pertamina	2009 - sekarang		
	Mei 2014 - Juli 2015	Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain Kementerian BUMN.	2009 - sekarang	Anggota Dewan Penguji National Center for Sustainability Reporting (NCSR)	
	2015 - sekarang	Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan, Kementerian BUMN	2016 - sekarang	Ketua umum Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)	
	2015 - sekarang	Wakil Komisaris Utama BRI			
	1983 - 2001	Pengawas Bank Indonesia	2014 - sekarang	<i>Legal and Compliance Advisor</i> di Bank Sahabat Sampoerna	Hukum Risk Management
	2001 - 2005	Deputi Direktur Hukum Bank Indonesia	2014 - sekarang	<i>Legal and Compliance Advisor</i> di Bank ICBC Indonesia	Finance
	2005 - 2008	Direktur Investigasi Dan Mediasi Perbankan BI			
	2010 - 2012	Dewan Pengawas Dana Pensiun BI			
	2008 - 2012	Direktur Hukum BI			
	2012 - 2017	Komisaris Independen BRI (Maret 2017)			
	1995 - 1997	Komisaris PT Citra Mitra Inti Kusuma	2013 - Sekarang	Ketua Kwartir Nasional Pramuka	Hukum
	1997 - 1999	Komisaris PT Mitra Himalaya Perdana			Pemberdayaan Masyarakat
	2000 - 2002	Komisaris PT Kraton Imaji Utama			Kelautan dan Perikanan
	2000 - 2004	Pimpinan Kantor Advokat/Pengacara "Dault & associates"			Audit
	2004 - 2009	Menteri Pemuda dan Olahraga			
	2010 - 2017	Komisaris Independen BRI			

Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

## DEWAN KOMISARIS

Nama	Jabatan	Usia (th)	Tanggal pengangkatan	Lama Menjabat	Jenis Kelamin	Pendidikan
A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	61	19 Maret 2015	1 Tahun 9 Bulan	Pria	S1 Ekonomi, Universitas Indonesia S2 Master of Art, Duke University, Durham, North Carolina, USA S3 Economics, Venderbilt University, Tennesse, USA
A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	58	19 Maret 2015	1 Tahun 9 Bulan	Pria	S1 Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara S2 The Higher Institute of Philosophy, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia S3 The Higher Institute of Philosophy, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia
Mahmud	Komisaris Independen	59	23 Maret 2016	1 Tahun 8 Bulan	Pria	S1 Manajemen Keuangan Universitas Padjadjaran S2 Ekonomi Perusahaan Universitas Diponegoro



## DEWAN KOMISARIS

	Pengalaman Kerja/Kedirektoran		Jabatan lain Saat Ini		Keahlian
	Periode	Jabatan	Periode	Jabatan	
	2001 - 2006	Komisaris PT Danareksa (Persero)		Tidak memiliki jabatan lain	Ilmu Ekonomi Makro
	2001 - 2004	Kepala Pusat Manajemen Obligasi Negara, Kementerian Keuangan			Fiskal
	2002 - 2006	Komisaris PT Bank Internasional Indonesia			Pasar Financial
	2004 - 2005	Direktur Pengelolaan Surat Utang Negara, Departemen Keuangan			
	2005 - 2006	Deputi Keuangan dan Pendanaan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias, Departemen Keuangan			
	2006 - 2011	Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam)			
	2009 - 2014	Komisioner <i>ex officio</i> Lembaga Penjamin Simpanan			
	2011 - 2014	Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan			
	2014 - 2015	Anggota Dewan Direktur Non Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia			
	2014 - 2015	Komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)			
	2014 - 2015	Komisaris Independen BRI			
	2015 - sekarang				
	1999 - 2001	Menteri Negara Lingkungan Hidup RI	1998 - sekarang	Dosen Etika Bisnis & Etika Profesi Akuntansi, Universitas Atmajaya	Etika Bisnis
	2004 - 2009	Anggota DPR RI Komisi VIII DPR RI		Anggota Dewan Energi Nasional	Lingkungan Hidup
	2015 - sekarang	Komisaris Independen BRI	2014 - sekarang	Komisaris PT Gorontalo Sejahtera Mining	Filsafat
			2016 - sekarang		Ilmu Politik
					Legislasi
					Energi dan Sumber Daya Mineral
	2002 - 2007	Pemimpin BI Pekanbaru	Tidak memiliki jabatan lain		Perbankan
	2007 - 2010	Deputi Pemimpin BI Surabaya			Risk Management
	2010 - 2011	Direktur DPIP Bank Indonesia			Finance
	2011 - 2012	Kepala Departemen DPIP			
	2012 - 2013	Kepala Kpw Makassar Bank Indonesia			
	2013 - 2013	Kepala Departemen DPB1, BI Jakarta			
	2013 - 2016	Kepala Departemen DPB1, Otoritas Jasa Keuangan			
	2016 - 2016	Advisor Senior, Grup Dukungan Strategis Dewan Komisioner, Otoritas Jasa Keuangan			
	2016 - sekarang	Komisaris Independen BRI			

Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

## DEWAN KOMISARIS

Nama	Jabatan	Usia (th)	Tanggal pengangkatan	Lama Menjabat	Jenis Kelamin	Pendidikan
Vincentius Sonny Loho	Komisaris	59	28 Maret 2012	3 Tahun 9 Bulan	Pria	D3 Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara D4 Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara S2 Public Policy and Management, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA
Jeffrey J. Wurangian	Komisaris	63	19 Maret 2015	1 Tahun 9 Bulan	Pria	S1 Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi S2 M.sc., Agricultural Economics, Oklahoma State University, Oklahoma, USA. S2 MBA., European University, Belgium, Joined Program with IEU School of Business S3 Doktor Ekonomi, Universitas Merdeka, Malang. S3 Ph.D program, Ag. Economics, all courseworks completed, Oklahoma State University, Oklahoma, USA
Nicolaus Teguh Budi Harjanto**)	Komisaris	45	15 Maret 2017	8 Bulan	Pria	S1 Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada S2 Ilmu Politik, Ohio University, Athens, Ohio, USA S3 Ilmu Politik, Northern Illinois University, USA
Rofikoh Rokhim****)	Komisaris	46	24 Januari 2018	-	Wanita	S1 EkoNomi Manajemen UII Yogyakarta S1 Public Administration Universitas Gadjah Mada S2 Master Specialist, French Prime Minister, Institute International d' Administration Publique (IIAP)-Ecole National d' Administration (ENA), Paris S2 D.E.A (M.Phil), International and Development Economic, Universite de Paris 1 Pantheon Sorbonne, Paris S3 Ph.D., Economics Université de Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Paris

\*) diberhentikan sesuai RUPST 15 Maret 2017

\*\*) diangkat sesuai RUPST 15 Maret 2017

\*\*\*) diberhentikan sesuai RUPSLB 18 Oktober 2017

\*\*\*\*) diangkat sesuai RUPSLB 18 Oktober 2017



## DEWAN KOMISARIS

	Pengalaman Kerja/Kedirektoran		Jabatan lain Saat Ini		Keahlian
	Periode	Jabatan	Periode	Jabatan	
	2004 - 2006	Kepala Sub Direktorat Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan	2014 - sekarang	Anggota Dewan Konsultasi IAI Kompartemen Sektor Publik	Keuangan Negara Publik Management
	2006 - 2008	Direktur Pembinaan Keuangan Bidang Layanan Umum, Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan			Pengelolaan Asset dan Investasi
	2015 - 2017	Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan,			
	2011 – sekarang	Komisaris BRI			
	1989 - 1990	<i>Vice President Saseka Finance</i>	2016 - sekarang	Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Kerjasama BUMN - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia)	Banking, Finance
	1991 - 1992	Direktur Operasi Bank Mitra Niaga			
	2007 - 2008	Direktur Umum PT. Bank Sulut			
	2008 - 2009	Direktur Marketing PT. Bank Sulut			
	2010 - 2012	Direktur Utama PT. Bank Sulut			
	2015 - sekarang	Komisaris BRI			
	2013 - 2015	Direktur Eksekutif Populi Center (Public Opinion & Policy Research)	2015 - Sekarang	Sekretaris Jenderal Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)	Hubungan Internasional
	2013 - 2016	Perhimpunan Survei Opini Publik (PERSEPSI)	2016 - sekarang	Staff Khusus Mensesneg Bidang Komunikasi Politik dan Kelembagaan Sekretariat Negara Republik Indonesia	Ilmu Sosial & Politik
	2016 - 2017	Komisaris PT Permodalan Nasional Madani			
	2017 - sekarang	Komisaris BRI			
	2016 - November 2017	Head of Bisnis Indonesia Intelligence Unit	2006 - sekarang	Dosen dan Peneliti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia	Ekonomi, Finance, Research.
	2014 - 2015	Komite Audit dan Komite Risiko, PT. POS Indonesia			
	2014 - 2015	Satgas Migas, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral			
	2016 - 2017	Satgas Desa, Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal			
	2015 - 2017	Komisaris Utama, PT Hotel Indonesia Natour (Persero)			
	2017 - sekarang	Komisaris Independen BRI			

## DEWAN KOMISARIS

## KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2017 DAN PERUBAHANNYA

Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Sebagai perusahaan terbuka penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris. Jumlah dan susunan Dewan Komisaris BRI selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

## Susunan Dewan Komisaris 1 Januari 2017 sampai dengan 15 Maret 2017

Berdasarkan keputusan RUPST tanggal 23 Maret 2016, RUPS mengangkat Sdr. Mahmud Sebagai Komisaris Independen, sehingga susunan Dewan Komisaris BRI sebagai berikut:

No	Komisaris	Jabatan	Usia	Dasar Pengangkatan
1	Mutafa Abubakar	Komisaris Utama/Independen	68	RUPST 19 Maret 2015
2	Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama	57	RUPST 19 Maret 2015
3	Adhyaksa Dault	Komisaris Independen	54	RUPST 20 Mei 2010
4	Ahmad Fuad	Komisaris Independen	63	RUPST 28 Maret 2012
5	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	63	RUPST 19 Maret 2015
6	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	59	RUPST 19 Maret 2015
7	Vincentius Sonny Loho	Komisaris	60	RUPST 28 Maret 2012
8	Jeffry J. Wurangian	Komisaris	63	RUPST 19 Maret 2015
9	Mahmud	Komisaris	59	RUPST 23 Maret 2016

## Susunan Dewan Komisaris 15 Maret 2017 sampai dengan 18 Oktober 2017

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 15 Maret 2017, RUPS membeberhentikan Sdr. Mustafa Abubakar (Komisaris Utama/ Independen) dan Sdr. Ahmad Fuad (Komisaris Independen) serta mengangkat Komisaris baru yaitu Sdr. Andrinof A. Chaniago sebagai Komisaris Utama/Independen, mengangkat Sdr. Nicolaus Teguh Budi Harjanto sebagai Komisaris. Berdasarkan Hasil RUPST Tahun 2017 tersebut, susunan Dewan Komisaris BRI adalah sebagai berikut:

No	Komisaris	Jabatan	Usia	Dasar Pengangkatan
1	Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/ Independen	55	RUPST 15 Maret 2017
2	Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama	57	RUPST 19 Maret 2015
3	Adhyaksa Dault	Komisaris Independen	54	RUPST 20 Mei 2010
4	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	63	RUPST 19 Maret 2015
5	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	59	RUPST 19 Maret 2015
6	Mahmud	Komisaris Independen	59	RUPST 15 Maret 2016 (Peralihan Tugas dan Komisaris menjadi Komisaris Independen)
7	Vincentius Sonny Loho	Komisaris	60	RUPST 28 Maret 2012
8	Jeffry J. Wurangian	Komisaris	63	RUPST 19 Maret 2015
9	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	45	RUPST 15 Maret 2017



## DEWAN KOMISARIS

### Susunan Dewan Komisaris 18 Oktober 2017 sampai Sekarang

Berdasarkan RUPS Luar biasa yang dilaksanakan pada tanggal 18 oktober 2017, RUPSLB memberhentikan Sdr. Adhyaksa Dault, maka jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan yang efektif sampai dengan posisi 31 Desember 2016 sebanyak 8 (delapan) orang dengan komposisi 5 (lima) orang diantaranya merupakan Komisaris Independen.

Susunan Dewan Komisaris tersebut memiliki keberagaman pendidikan dan pengalaman yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

No	Komisaris	Jabatan	Usia	Dasar Pengangkatan
1	Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/ Independen	55	RUPST 15 Maret 2017
2	Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama	57	RUPST 19 Maret 2015
3	Rofikoh Rokhim*	Komisaris Independen	46	RUPSLB 18 Oktober 2017
4	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	63	RUPST 19 Maret 2015
5	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	59	RUPST 19 Maret 2015
6	Mahmud	Komisaris Independen	59	RUPST 15 Maret 2016 (Peralihan Tugas dan Komisaris menjadi Komisaris Independen)
7	Vincentius Sonny Loho	Komisaris	60	RUPST 28 Maret 2012
8	Jeffry J. Wurangian	Komisaris	63	RUPST 19 Maret 2015
9	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	45	RUPST 15 Maret 2017

\*) Berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-15/D.03/2018 tanggal 24 Januari 2018

### PEMBIDANGAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris, Dewan Komisaris menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris selama tahun 2017 sebagai berikut:

No	Komisaris	Jabatan	Periode	Pembidangan Tugas
1	Mutafa Abubakar	Komisaris Utama/ Independen	01 Januari 2017- 15 Maret 2017	1. Membawahi Komite Nominasi dan Remunerasi. 2. Membawahi Komite Pengawasan Manajemen Risiko.
2	Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/ Independen	19 Juli 2017 – 31 Desember 2017	1. Membawahi Komite Nominasi dan Remunerasi. 2. Membawahi Komite Pengawasan Manajemen Risiko. 3. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
3	Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama	1 Januari 2017- 31 Desember 2017	1. Membawahi Komite Nominasi dan Remunerasi. 2. Membawahi Komite Tata Kelola Terintegrasi
4	Adhyaksa Dault	Komisaris Independen	1 Januari 2017- 18 Oktober 2017	1. Membawahi Komite Nominasi dan Remunerasi. 2. Membawahi Komite Audit.
5	Ahmad Fuad	Komisaris Independen	01 Januari 2017- 15 Maret 2017	1. Membawahi Komite Nominasi dan Remunerasi. 2. Membawahi Komite Pengawasan Manajemen Risiko. 3. Membawahi Komite Tata Kelola Terintegrasi
6	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	1 Januari 2017- 31 Desember 2017	1. Membawahi Komite Nominasi dan Remunerasi. 2. Membawahi Komite Pengawasan Manajemen Risiko. 3. Membawahi Komite Tata Kelola Terintegrasi

## DEWAN KOMISARIS

No	Komisaris	Jabatan	Periode	Pembidangan Tugas
7	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	1 Januari 2017-31 Desember 2017	1. Membawahi Komite Nominasi dan Remunerasi. 2. Membawahi Komite Audit.
8	Vincentius Sonny Loho	Komisaris	1 Januari 2017-31 Desember 2017	1. Membawahi Komite Nominasi dan Remunerasi. 2. Membawahi Komite Tata Kelola Terintegrasi
9	Jeffry J. Wurangian	Komisaris	1 Januari 2017-31 Desember 2017	1. Membawahi Komite Nominasi dan Remunerasi. 2. Membawahi Komite Pengawasan Manajemen Risiko.
10	Mahmud	Komisaris	27 Maret 2017 – 31 Desember 2017	1. Membawahi Komite Nominasi dan Remunerasi. 2. Membawahi Komite Pengawasan Manajemen Risiko. 3. Membawahi Komite Tata Kelola Terintegrasi
11	Rofikoh Rokhim*)	Komisaris Independen	-	1. Membawahi Komite Audit 2. Membawahi Komite Nominasi dan Remunerasi

\*) Berdasarkan surat keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-15/D.03/2018 tanggal 24 Januari 2018

## INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan ketentuan POJK No: 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Pada Bank Umum, Dewan Komisaris wajib terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen dimana Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris, Komisaris Independen wajib menyampaikan Pernyataan independensi Komisaris Independen dalam laporan pelaksanaan tata kelola.

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balances* dengan prinsip bahwa kedua organ Perseroan tersebut mempunyai tugas untuk menjaga kelangsungan usaha Bank dalam jangka panjang dan mempunyai tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan Bank.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank/lembaga lain, dan tidak saling memiliki

hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Komisaris hingga derajat kedua. Dengan kondisi demikian, anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri.

Direksi Perseroan dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Direksi tidak memegang jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroan, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.



## DEWAN KOMISARIS

## HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM

- a. Hubungan Keuangan  
Tidak ada hubungan keuangan antara anggota Dewan Komisaris baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan anggota Direksi Perseroan dan Pemegang saham Pengendali Perseroan.
- b. Hubungan Keluarga  
Tidak ada hubungan keluarga antara anggota Dewan Komisaris baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan anggota Direksi Perseroan dan Pemegang saham Pengendali Perseroan.

Berikut adalah hubungan afiliasi yang dimiliki oleh Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2017:

**Tabel Hubungan Anggota Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali**

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	BOC		BOD		Pemegang Saham Pengendali		BOC		BOD		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
<b>Dewan Komisaris (BOC)</b>												
Mustafa Abubakar*	√		√		√		√		√		√	
Andrinof A. Chaniago	√		√		√		√		√		√	
Gatot Trihargo	√		√		√		√		√		√	
Ahmad Fuad	√		√		√		√		√		√	
Adhyaksa Dault **	√		√		√		√		√		√	
A. Fuad Rahmany	√		√		√		√		√		√	
A. Sonny Keraf	√		√		√		√		√		√	
Mahmud	√		√		√		√		√		√	
Vincentius Sonny Loho	√		√		√		√		√		√	
Jeffrey J. Wurangian	√		√		√		√		√		√	
Nicolaus teguh Budi Harjanto	√		√		√		√		√		√	
Rofikoh Rokhim***	√		√		√		√		√		√	

\*) Efektif 1 Januari 2017 – 15 Maret 2017

\*\*) Efektif 1 Januari 2017 – 18 oktober 2017

\*\*\*) Efektif setelah tanggal 1 Februari 2018

## DEWAN KOMISARIS

## RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Rangkap jabatan yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris BRI mengacu dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK-03/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yaitu tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada:

- Lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
- Lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Berikut adalah pengungkapan rangkap jabatan Dewan Komisaris per 31 Desember 2017:

No	Nama	Jabatan	Periode	Jabatan Lain Saat Ini	Nama Perusahaan/ instansi Lain
1	Mutafa Abubakar*	Komisaris Utama/ Independen	2016 – Sekarang	Ketua Dewan Pengawas	Bankers Association for Risk Management (BARa)
			2015 - sekarang	Wakil Ketua Dewan Pengawas	Ikatan Bankir Indonesia (IBI)
			2015 - Sekarang	Wakil Ketua Dewan Pertimbangan	Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL)
			2013 – Sekarang	Anggota Dewan Penasihat	Perbankan Nasional (PERBANAS).
			2012 - sekarang	Anggota Dewan Pembina	Yayasan Leuser Internasional (YLI)
			2013 – sekarang	Senat Akademik	STIE Indonesia Banking School
2	Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	2006 - sekarang	Pengajar di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Universitas Indonesia
3	Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama	Juli 2015 - sekarang	Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan	Kementerian BUMN
			2014 – sekarang	Anggota Dewan Pengurus Nasional	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
			2010 – sekarang	Presiden Association	Certified <i>Fraud</i> Examiner (CFE) - Indonesia Chapter
			2010 – sekarang	Anggota Dewan Kehormatan	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
			2009 – sekarang	Anggota Dewan Penguji	Certified Professional Management Accountant (CPMA)
			2009 – sekarang	Anggota Dewan Penguji	Center for Sustainability Reporting (NCSR)
			2016 - sekarang	Ketua umum	Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)



## DEWAN KOMISARIS

No	Nama	Jabatan	Periode	Jabatan Lain Saat Ini	Nama Perusahaan/ instansi Lain
4	Adhyaksa Dault**	Komisaris Independen	2013 - sekarang	Ketua Umum	Kwartir Nasional Pramuka
			2009 - sekarang	Dosen Program Doktor Manajemen Sumberdaya Pantai	Universitas Diponegoro
			2009 - sekarang	Dosen Pasca Sarjana	Universitas Negeri Jakarta
5	Ahmad Fuad*	Komisaris Independen	2014-Sekarang	<i>Legal and Compliance Advisor</i>	Bank Sahabat Sampoerna
			2014-Sekarang	<i>Legal and Compliance Advisor</i>	Bank ICBC Indonesia
6	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	Tidak Memiliki Rangkap Jabatan		
7	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	1998 – sekarang	Dosen Etika Bisnis & Etika Profesi Akuntansi	Universitas Atma Jaya Jakarta
			2014 – sekarang	Anggota	Dewan Energi Nasional
			2016 - Sekarang	Komisaris Independen	PT Gorontalo Sejahtera Mining
8	Vincentius Sonny Loho	Komisaris	2014 - sekarang	Anggota Dewan Konsultatif	IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik.
9	Jeffry J. Wurangjan	Komisaris	2015 - Sekarang	Wakil Ketua Umum Bidang pengembangan Kerja sama BUMN	Kamar Dagang Industri Nasional (KADIN)
10	Mahmud	Komisaris Independen	Tidak Memiliki Rangkap Jabatan		
11	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	2015 - Sekarang	Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi Politik dan Hubungan Kelembagaan	Kementerian Sekretariat Negara
12	Rofikoh Rokhim***	Komisaris Independen	2006 - Sekarang	Dosen dan Peneliti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.	Univesitas Indonesia

\*) Efektif 1 Januari 2017 – 15 Maret 2017

\*\*) Efektif 1 Januari 2017 – 18 Oktober 2017

\*\*\*) Efektif setelah tanggal 1 Februari 2018

## DEWAN KOMISARIS

## KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris telah menyampaikan keterbukaan transaksi pembelian dan penjualan surat berharga melalui Surat Pernyataan. Komisaris Independen tidak diperkenankan baik langsung maupun tidak langsung memiliki saham Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Sejalan dengan independensi anggota Dewan Komisaris Perseroan, Per 31 Desember 2017, tidak ada anggota Dewan Komisaris Perseroan yang memiliki saham 5% atau lebih di dalam Perseroan maupun perusahaan atau bank atau lembaga keuangan bukan bank lain.

No	Komisaris	Kepemilikan Saham lebih dari 5%			
		BRI	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
1	Mutafa Abubakar*	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Andrinof A. Chaniago	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	Gatot Trihargo	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4	Adhyaksa Dault**	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
5	Ahmad Fuad*	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
6	A. Fuad Rahmany	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
7	A. Sonny Keraf	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
8	Gatot Trihargo	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
9	Jeffry J. Wurangian	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
10	Mahmud	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
11	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
12	Rofikoh Rokhim***	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

\*) Efektif 1 Januari 2017 – 15 Maret 2017  
 \*\*) Efektif 1 Januari 2017 – 18 Oktober 2017  
 \*\*\*) Efektif setelah tanggal 18 Oktober 2017

## PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan yang memiliki benturan kepentingan dalam transaksi dan/atau aksi korporasi Perseroan wajib menyatakan benturan kepentingan dan dirinya tidak dapat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan terkait transaksi dan/atau aksi korporasi tersebut.

Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen sebelum transaksi tersebut dilaksanakan.

Pada tahun 2017 tidak terdapat transaksi atau aksi korporasi BRI yang mengandung benturan kepentingan dan dilakukan oleh Dewan Komisaris.



## DEWAN KOMISARIS

## PROGRAM ORIENTASI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Program Orientasi diadakan untuk setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru.

Program Orientasi merupakan program pengenalan perusahaan yang diselenggarakan oleh Sekretaris Perusahaan kepada anggota Dewan Komisaris baru. Pelaksanaan program ini berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit kerja perusahaan serta pengkajian dokumen atau program lainnya. Tujuan dari program orientasi Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

1. Mendukung pencapaian tujuan Bank melalui peningkatan kinerja yang berkelanjutan;
2. Menambah pengetahuan untuk dan Komisaris baru mengenai Visi, Misi, Profil dan tujuan Bank BRI;
3. Memberikan gambaran tanggung jawab, wewenang dan larangan sebagai Komisaris BRI;
4. Memberikan pedoman, gambaran tugas dan tanggung jawab Komisaris dalam melaksanakan tugasnya;
5. Menambah pemahaman Dewan Komisaris mengenai sistem kerja dan operasional di Bank BRI;
6. Menambah pemahaman mengenai sistem kerja dan operasional di Bank BRI; pemahaman *value creation* untuk para *stakeholders*, manajemen risiko, pemahaman industri perbankan atau bisnis perusahaan anak Bank BRI;
7. Menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris yang sesuai dengan bidangnya dan perkembangan bisnis BRI;
8. Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang didukung oleh pengetahuan hasil pendidikan.

### Program Orientasi Dewan Komisaris Tahun 2017

No	Peserta	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Pemberi Materi	Materi orientasi
1	Andrinof A. Chaniago dan Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Ruang Rapat Dewan Komisaris BRI, 23 dan 29 Maret 2017	Divisi Manajemen Risiko	Pembekalan Manajemen Risiko bagi Dewan Komisaris BRI.
2	Andrinof A. Chaniago dan Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Ruang Rapat Dewan Komisaris BRI, 31 Maret 2017	Divisi Sekretariat Perusahaan, Divisi Corporate Development & Strategy, Sekretariat Dewan Komisaris, Divisi Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pengetahuan mengenai perusahaan, antara lain Visi dan Misi, Strategi dan Rencana jangka menengah dan panjang, kinerja serta keuangan.</li> <li>· Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Dewan Komisaris, wewenang, waktu kerja, rapat Dewan Komisaris, hubungan dengan Direksi, aturan-aturan/ketentuan yang relevan.</li> <li>· Ketentuan perusahaan terkait GCG, Kode Etik, Budaya Perusahaan dan ketentuan terkait GCG lainnya sebagai penunjang bidang tugas Dewan Komisaris.</li> <li>· Kebijakan perusahaan yang relevan dan sesuai kebutuhan program orientasi,</li> <li>· Pengenalan proses bisnis Bank BRI dan struktur bisnis secara konsolidasi;</li> <li>· Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris.</li> </ul>

Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

## DEWAN KOMISARIS

## Program Orientasi Dewan Komisaris Tahun 2017

No	Peserta	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Pemberi Materi	Materi orientasi
3	Rofikoh Rokhim	Ruang Rapat Dewan Komisaris BRI, 23 Oktober 2017	Divisi Manajemen Risiko	Pembekalan Manajemen Risiko bagi Dewan Komisaris BRI .
4	Rofikoh Rokhim	Ruang Rapat Dewan Komisaris BRI, 31 Oktober 2017	Divisi Manajemen Risiko, Divisi Corporate Development dan Strategy, Divisi Pengelolaan Pekerja Kontrak dan Outsourcing	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pengetahuan mengenai perusahaan, antara lain Visi dan Misi, Strategi dan Rencana jangka menengah dan panjang, kinerja serta keuangan.</li> <li>· Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Dewan Komisaris, wewenang, waktu kerja, rapat Dewan Komisaris, hubungan dengan Direksi, aturan-aturan/ketentuan yang relevan.</li> <li>· Ketentuan perusahaan terkait GCG, Kode Etik, Budaya Perusahaan dan ketentuan terkait GCG lainnya sebagai penunjang bidang tugas Dewan Komisaris.</li> <li>· Materi Net Stable Funding Ration (VSFR) dan Liquidity Coverage Ratio (LCV).</li> <li>· Hak dan kewajiban Dewan Komisaris.</li> <li>· Materi pembekalan Corporate Plan dan RBB BRI.</li> </ul>

## Program Pengembangan Dewan Komisaris

BRI memiliki Kebijakan mengenai pengembangan kompetensi anggota Dewan Komisaris yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian masing-masing anggota Dewan Komisaris BRI dalam menunaikan tugasnya.

Pengembangan kompetensi bertujuan untuk:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris yang sesuai dengan bidangnya dan perkembangan bisnis;
2. Menambah relasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan di luar;
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang didukung oleh pengetahuan hasil pendidikan;
4. Mengembangkan pengetahuan profesional, kompetensi dan kemampuan kepemimpinan para Direksi dan Dewan Komisaris selaras dengan perkembangan terbaru dalam industri dan tata kelola perusahaan yang baik.
5. Meningkatkan kesadaran bahwa program pendidikan, pengenalan dan pengembangan bagi Dewan Komisaris merupakan bagian penting dari proses belajar dan mengembangkan perusahaan di samping penguatan struktur dan penguatan *governance* perusahaan.



## DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan pengembangan kompetensi anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2017 adalah:

### Program Pelatihan Dewan Komisaris

#### 1. Pendidikan, Training, Conference Dalam Negeri

No	Nama Komisaris	Tujuan	Tanggal Pendidikan	Keterangan
1	Mustafa Abubakar	-	-	Selama tahun 2017 tidak melaksanakan pendidikan/training/conference
2	Andrinof A. Chaniago	-	-	Selama tahun 2017 tidak melaksanakan pendidikan/training/conference
3	Gatot Trihargo	-	-	Selama tahun 2017 tidak melaksanakan pendidikan/training/conference
4	Ahmad Fuad	-	-	Selama tahun 2017 tidak melaksanakan pendidikan/training/conference
5	Adhyaksa Dault	Jakarta	23 - 24 Maret 2017	Seminar BARa Risk Forum: Refocusing on Credit Risk Management, Credit Risk Model, Pricing and Being prepared for Upcoming Regulations
6	Sonny Loho	Jakarta	23 - 24 Maret 2017	Seminar BARa Risk Forum: Refocusing on Credit Risk Management, Credit Risk Model, Pricing and Being prepared for Upcoming Regulations
7	Fuad Rahmany	Jakarta	23 - 24 Maret 2017	Seminar BARa Risk Forum: Refocusing on Credit Risk Management, Credit Risk Model, Pricing and Being prepared for Upcoming Regulations
8	Sonny Keraf	Jakarta	23 - 24 Maret 2017	Seminar BARa Risk Forum: Refocusing on Credit Risk Management, Credit Risk Model, Pricing and Being prepared for Upcoming Regulations
		Bali	18 - 19 Mei 2017	BARa Risk Forum: Deeper Understanding on IFRS 9 & BASEL IV and Progress of BASEL III Implementation
9	Jeffry J. Wurangian	Bali	18 - 19 Mei 2017	BARa Risk Forum: Deeper Understanding on IFRS 9 & BASEL IV and Progress of BASEL III Implementation
10	Nicolaus T. Budi Harjanto	-	-	Selama tahun 2017 tidak melaksanakan pendidikan/training/conference
11	Rofikoh Rokhim	-	-	Selama tahun 2017 tidak melaksanakan pendidikan/training/conference
12	Mahmud	Bali	4-5 Mei 2017	Mengikuti seminar internasional Change Consumer Behaviour Through Financial Literacy Financial Inclusion and Consumer Protection.

#### 2. Pendidikan, Training, Conference Luar Negeri

No	Nama Komisaris	Tujuan	Tanggal Pendidikan	Keterangan
1	Mustafa Abubakar			
2	Andrinof A. Chaniago	Milan, Basel	15 - 24 September 2017	European Confederation of The Institute of Internal Auditor Conference 2017 from Insight to Influence dan On Site Learning

## DEWAN KOMISARIS

**2. Pendidikan, Training, Conference Luar Negeri**

No	Nama Komisaris	Tujuan	Tanggal Pendidikan	Keterangan
3	Gatot Trihargo	-	-	Selama tahun 2017 tidak melaksanakan pendidikan/training/conference
4	Ahmad Fuad	-	-	Selama tahun 2017 tidak melaksanakan pendidikan/training/conference
5	Adhyaksa Dault	Frankfurt, Vienna	19 - 26 Agustus 2017	Sertifikasi Manajemen Risiko: Intensive Wealth Management and Risk Management Refreshment Programme for Executives
6	Sonny Loho	Sydney, Melbourne	22 - 29 Juli 2017	The IIA International Conference 2017 & On Site Learning
		Madrid, Granada	28 Oktober - 5 November 2017	International Risk Management Refreshment Program for Executives
7	Fuad Rahmany	London	9 - 11 April 2017	Sertifikasi Manajemen Risiko: Living Wills, Palnning for Bank Recovery and Resolition
8	Sonny Keraf	Geneva - Prague, Budapest	22 - 30 April 2017	Enterprise Risk Management Masater Class & Benchmarking in Europe: Risk Culture & Leadership
		London, UK	11 - 15 September 2017	ASEAN Global Leadership Programme: Leadership in a Transformational Digital Era
9	Jeffry J. Wurangian	Boston	22 - 27 Januari 2017	Executive Education: Entrepreneurship Development Program
		Sydney	18 - 23 Juni 2017	General Manager Program: Lead Strategically, Navigate Complexity, Drive Performance
10	Nocolaus T. Budi Harjanto	-	-	Selama tahun 2017 tidak melaksanakan pendidikan/training/conference
11	Rofikoh Rokhim	-	-	Selama tahun 2017 tidak melaksanakan pendidikan/training/conference

**Sertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris**

Memperhatikan perkembangan internal dan eksternal perbankan yang terus mengalami perubahan pesat yang ditandai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha perbankan, risiko yang dihadapi juga semakin besar. Semakin kompleksnya risiko tersebut akan meningkatkan kebutuhan praktik tata kelola usaha yang baik (*Good Corporate Governance*) dan fungsi Manajemen Risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko Bank.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko bagi kegiatan usaha Bank, Dewan Komisaris harus memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang Manajemen Risiko sesuai syarat minimum standar sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum dan perubahan Peraturan Bank Indonesia dimaksud dengan No. 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010.

Memperhatikan hal tersebut dalam rangka pengembangan kompetensi dan pemenuhan syarat sebagai Dewan Komisaris, selain mengikuti berbagai *training* dan *conference*, Dewan Komisaris Perseroan senantiasa membekali diri dengan sertifikasi manajemen risiko yang mendukung tugas nya sebagai Pengawas Perseroan. Adapun sertifikasi yang diikuti oleh Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:



## DEWAN KOMISARIS

No.	Nama	Jabatan	Sertifikasi MR			Refreshment Sertifikasi MR Tahun 2017	
			Lembaga Sertifikasi	Tingkat	Waktu	Lembaga Sertifikasi	Waktu
1.	Mustafa Abubakar	Komisaris Utama / Independen	LSPP	Level 2	23 Juni 2012		
			LSPP	Program Eksekutif Direksi	2016		
2.	Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama / Independen	LSPP	Level 2	21 April 2017		
3.	Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama	BSMR	Tingkat 1	11 April 2015		
4.	Adhyaksa Dault	Komisaris Independen	LSPP	Level 2	15 Maret 2014	IBI, LSPP, MM, UGM	19 Agustus 2017
5.	Ahmad Fuad	Komisaris Independen	BSMR	Program Eksekutif Direksi	08 September 2016		
6.	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	BSMR	Tingkat 2	17 Januari 2015	BSMR, GARP	9 April 2017
7.	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	LSPP	Level 2	02 Mei 2015		
8.	Vincentius Sonny Loho	Komisaris	LSPP	Level 1	26 Mei 2012	IBI, LSPP, MM, UGM	28 Oktober 2017
9.	Mahmud	Komisaris Independen	BSMR	Level 5	2015	BSMR	07 Februari 2017
10.	Jeffry J. Wurangian	Komisaris	BSMR	Program Eksekutif Direksi	07 September 2016		
11.	Nicolaus T. Budi Harjanto	Komisaris	LSPP	Level 1	6 April 2017		
12.	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	LSPP	Level 2	2 November 2017		

## DEWAN KOMISARIS

### PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2017

Dalam kurun waktu tahun 2017, Dewan Komisaris secara berkesinambungan telah melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Pengawasan Dewan Komisaris secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu yang bersifat rutin dan bersifat khusus. Pengawasan yang bersifat rutin, antara lain:

1. Evaluasi kebijakan strategis dan pelaksanaan RBB setiap triwulan;
2. Evaluasi laporan keuangan pra-publikasi setiap triwulan;
3. Evaluasi pelaksanaan audit yang dilakukan KAP, meliputi pelaksanaan audit keuangan tahun buku 2016, *Management Letter* Tahun Buku 2016 dan audit PKBL tahun buku 2016;
4. Evaluasi hasil audit intern setiap triwulan;
5. Pemantauan tindak lanjut Direksi atas hasil audit internal dan eksternal setiap triwulan;
6. Menelaah rencana Pelaksanaan Audit Tahunan (PAT) dan pemantauan tindak lanjut hasil audit internal;
7. Evaluasi profil risiko, pelaksanaan fungsi kepatuhan, dan strategi anti *fraud* setiap triwulan;
8. Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank setiap triwulan;
9. Evaluasi GCG dengan melakukan *self assessment* GCG setiap Semester;
10. Evaluasi kinerja perusahaan anak;
11. Evaluasi pengelolaan SDM;
12. Evaluasi Teknologi Informasi, termasuk pengelolaan dan rencana pengembangan IT pasca peluncuran satelit Perseroan (BRISat);
13. Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
14. Evaluasi Pengelolaan Dana dan Investasi Dana Pensiun BRI; dan
15. Evaluasi DPLK-BRI.

Pengawasan yang bersifat khusus dilakukan terhadap hal-hal yang dianggap perlu pendalaman lebih lanjut atau hal-hal yang bersifat strategis dan memerlukan keputusan segera. Dalam tahun 2017, permasalahan khusus yang menjadi perhatian Dewan Komisaris adalah:

1. Pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi (IT), termasuk transformasi pengembangan IT dan *Digital Banking* BRI.
2. Pengelolaan Manajemen risiko, khususnya terkait dengan upaya peningkatan pengelolaan risiko operasional dan likuiditas.
3. Optimalisasi struktur pendanaan dan memperbaiki sumber dana berbiaya murah (CASA), melalui program-program yang terstruktur terkait intensifikasi akuisisi dan retensi nasabah, serta dana-dana ritel yang tidak sensitif terhadap suku bunga.
4. Pengembangan perusahaan anak (Bank BRI Agro, Bank BRI Syariah, BRI Life & BRI Finance), antara lain terkait dengan rencana penambahan penyertaan modal pada perusahaan anak, tata kelola perusahaan anak dalam kerangka tata kelola terintegrasi, manajemen risiko terintegrasi dan *alignment* bisnis perusahaan anak dengan Perseroan sebagai induk.
5. Pengembangan solusi dan layanan transaksional, serta akses *e-channel* yang terintegrasi terkait *business model* menuju *digital banking*.
6. Restrukturisasi kredit menengah & korporasi dan *review* portofolio aktiva produktif.
7. Evaluasi pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BRI.
8. Rencana pengembangan *Core Banking System* (CBS) BRI.
9. Pengembangan SDM dalam rangka mewujudkan Visi BRI sebagai *home to the best talent* serta persiapan SDM BRI dalam proses transformasi melalui program Brivolution untuk menghadapi era digital banking dan Fintech.
10. Pengembangan *Manajemen Information System* (MIS) yang berbasis *Big Data* sehingga seluruh data yang ada di BRI tersusun dengan baik, terintegrasi dan bermanfaat dalam mengembangkan bisnis, mengambil keputusan strategis, pengelolaan manajemen risiko, kegiatan marketing dan lain sebagainya secara lebih cepat, tepat, murah, efisien dan terstruktur.



## DEWAN KOMISARIS

## PERSETUJUAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS 2017

## Persetujuan Dewan Komisaris 2017

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan Direksi, Selama Tahun 2017, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas hal-hal sebagai berikut:

No	Persetujuan Dewan Komisaris	Tanggal	Nomor Surat Persetujuan
1	Persetujuan penunjukkan KAP Mulyamin sensi Suryanto & Lianny untuk audit laporan keuangan & laporan investasi DPLK BRI Tahun buku 2016	03-Jan-17	Surat Dewan Komisaris No: B.01-KOM/01/2017
2	Kebijakan umum manajemen risiko	18-Jan-17	Surat Dewan Komisaris No: B.18-KOM/01/2017
3	Persetujuan usulan HPS pengadaan jasa kantor akuntan publik Tahun. 2017	10-Feb-17	Surat Dewan Komisaris No: B.28-KOM/02/2017
4	Persetujuan kebijakan dan prosedur prinsip mengenal nasabah jasa kustodian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	13-Feb-17	Surat Dewan Komisaris No: B.29-KOM/02/2017
5	Persetujuan pedoman penerapan program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme DPLK BRI	21-Feb-17	Surat Dewan Komisaris No: B.36-KOM/02/2017
6	Persetujuan penghapusbukuan aktiva tetap bangunan kanca BRI Fatmawati	28-Feb-17	Surat Dewan Komisaris No: B.37-KOM/02/2017
7	Kebijakan umum manajemen risiko	13-Mar-17	Surat Dewan Komisaris No: B.43-KOM/03/2017
8	Kebijakan penghapusbukuan kredit, recovery kredit, restrukturisasi kredit dan NPL	14-Mar-17	Surat Dewan Komisaris No: B.44-KOM/03/2017
9	SK Penetapan ketua dan anggota komite KPMR & KNR	29-Mar-17	Surat Dewan Komisaris No: B.55-KOM/03/2017
10	Persetujuan penghapusbukuan aktiva tetap bangunan eks Kanwil BRI Kupang	11-Apr-17	Surat Dewan Komisaris No: B.59-KOM/04/2017
11	Persetujuan penghapusbukuan aktiva tetap bangunan terbengkalai gedung BRI Jl. Proklamasi No.29 Jakarta Pusat	05-Mei-17	Surat Dewan Komisaris No: B.71-KOM/05/2017
12	Persetujuan atas Penetapan kembali limit kewenangan penghapusbukuan dan/atau pelepasan aktiva tetap tidak bergerak	09-Mei-17	Surat Dewan Komisaris No: B.74-KOM/05/2017
13	Persetujuan usulan perubahan organisasi BRI	12-Mei-17	Surat Dewan Komisaris No: B.76-KOM/05/2017
14	Penunjukkan KAP untuk pelaksanaan <i>review</i> terbatas laporan keuangan konsolidasian periode 30 Juni 2017	12-Mei-17	Surat Dewan Komisaris No: B.77-KOM/05/2017
15	Pengadaan jasa audit KAP	07-Sep-17	Surat Dewan Komisaris No: B.141-KOM/09/2017
16	Persetujuan kebijakan umum penyertaan modal dan pengelolaan perusahaan anak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	12-Sep-17	Surat Dewan Komisaris No: B.150-KOM/09/2017
17	Persetujuan kebijakan dan prosedur penerapan program anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT) Tahun 2017 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	20-Sep-17	Surat Dewan Komisaris No: B.152-KOM/09/2017

## DEWAN KOMISARIS

No	Persetujuan Dewan Komisaris	Tanggal	Nomor Surat Persetujuan
18	Persetujuan atas Pengkinian Piagam Audit SKAI.	10-Okt-17	Surat Dewan Komisaris No: B.159-KOM/01/2017
19	Persetujuan atas pernyataan pendiri dalam rangka perubahan peraturan dana pensiun BRI.	24-Okt-17	Surat Dewan Komisaris No: B.174-KOM/10/2017
20	Persetujuan fasilitas SBLC kepada PT.BRI Multifinance Indonesia	26-Apr-17	Surat Dewan Komisaris No:R.18-KOM/04/2017
21	Persetujuan pengangkatan kepala SKAI BRI	12-Mei-17	Surat Dewan Komisaris No:R.21-KOM/05/2017
22	Persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait an. PT Bringin Srikandi Finance	17-Mei-17	Surat Dewan Komisaris No:R.22-KOM/05/2017
23	Persetujuan penambahan ruang lingkup pekerjaan <i>review</i> & pelaporan laporan keuangan konsolidasian BRI & entitas anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2017 oleh KAP PSS (EY)	14-Mei-17	Surat Dewan Komisaris No:R.26-KOM/05/2017
24	Persetujuan RBB Tahun 2017-2019 dan RKAP Tahun 2017 (Revisi)	08-Jun-17	Surat Dewan Komisaris No:R.29-KOM/06/2017
25	Persetujuan Penyediaan dana kepada pihak terkait atas nama Bpk. Dr. Jeffry J Wurangian.	09-Jun-17	Surat Dewan Komisaris No:R.30-KOM/06/2017
26	Persetujuan penambahan modal PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Tahun 2017	16-Jun-17	Surat Dewan Komisaris No: R.31-KOM/06/2017
27	Persetujuan penambahan penyertaan modal pada Bank Agro Tahun 2017	06-Jul-17	Surat Dewan Komisaris No: R.34-KOM/07/2017
28	Persetujuan penambahan penyertaan modal pada Bank Agroniaga	07-Jul-17	Surat Dewan Komisaris No: R.35-KOM/07/2017
29	Perpanjangan masa kerja staf sekretaris Dewan Komisaris	25-Jul-17	Surat Dewan Komisaris No: R.37-KOM/07/2017
30	Persetujuan penyertaan modal pada PT Bahana Artha Ventura	10-Okt-17	Surat Dewan Komisaris No: R.52-KOM/10/2017
31	Persetujuan RBB Tahun 2018-2020 dan RKAP Tahun 2018	21-Nop-17	Surat Dewan Komisaris No: R.60-KOM/11/2017
32	Pengangkatan staf sekretaris Dewan Komisaris	30-Nop-17	Surat Dewan Komisaris No: R.65-KOM/11/2017
33	SK Bersama Direksi dan Komisaris PT.BRI tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi PT BRI (Persero) Tbk.	06-Des-17	Surat Dewan Komisaris No: R.67-KOM/12/2017

## Rekomendasi Dewan Komisaris 2017

Selain melaksanakan fungsi pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan Direksi, Dewan Komisaris juga memberikan berbagai rekomendasi dan masukan kepada manajemen berdasarkan atas laporan rutin manajemen ke Dewan Komisaris maupun berdasarkan atas kejadian atau kebijakan yang dilakukan oleh manajemen. Selama Tahun 2017, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi atas hal-hal sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tanggal	Nomor Surat
1	Kejadian <i>fraud</i> berdampak negatif secara signifikan dan/atau berpotensi menjadi perhatian publik priode September s.d Desember 2016	16-Jan-17	Surat Dekom No: B.08-KOM/01/2017
2	Permasalahan tuntutan oleh pihak eksternal BRI	16-Jan-17	Surat Dekom No: B.09-KOM/01/2017



## DEWAN KOMISARIS

No	Rekomendasi	Tanggal	Nomor Surat
3	Hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan	18-Jan-17	Surat Dekom No: B.17-KOM/01/2017
4	Profil Risiko Triwulan IV th.2016, Laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan Semester II Tahun 2016, Laporan program anti <i>fraud</i> Semester II Tahun 2016, Laporan pelaksanaan program APU & PPT Semester II Tahun 2016 dan Laporan penilaian tingkat kesehatan bank Semester II Tahun 2016.	14-Mar-17	Surat Dekom No: B.45-KOM/03/2017
5	Konsultasi Kredit	16-Mar-17	Surat Dekom No: B.50-KOM/03/2017
6	Pemantauan tindak lanjut terhadap permintaan Bank Indonesia dan Oteritas Jasa Keuangan	04-Apr-17	Surat Dekom No: B.58-KOM/04/2017
7	Pengenaan sanksi kewajiban membayar oleh regulator periode Januari s.d Maret 2017	18-Apr-17	Surat Dekom No: B.62-KOM/04/2017
8	Kejadian <i>fraud</i> berdampak negatif secara signifikan dan/atau berpotensi menjadi perhatian publik priode januari s.d maret 2017	03-Mei-17	Surat Dekom No: B.67-KOM/05/2017
9	Profil Risiko Terintegrasi Semester II 2016	09-Mei-17	Surat Dekom No: B.75-KOM/05/2017
10	Profil Risiko Triwulan I Tahun 2017	26-Mei-17	Surat Dekom No: B.85-KOM/05/2017
11	evaluasi komite audit BRI terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis Tahun buku 2016 oleh KAP PSS (EY)	16-Jun-17	Surat Dekom No: B.92-KOM/06/2017
12	Evaluasi komite audit BRI terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis DPLK BRI Tahun buku 2016 oleh KAP M Irawati Sensi Idris.	20-Jun-17	Surat Dekom No: B.96-KOM/06/2017
13	Tindak lanjut hasil audit umum laporan keuangan & Laporan investasi DPLK BRI Tahun buku 2016	20-Jun-17	Surat Dekom No: B.97-KOM/06/2017
14	Restrukturisasi kredit menengah & korporasi dan <i>review</i> portofolio aktiva produktif.	20-Jun-17	Surat Dekom No: B.98-KOM/06/2017
15	Laporan hasil <i>Self Assessment</i> faktor 2 & faktor 3 pelaksanaan tata kelola terintegrasi Semester I-2017	10-Jul-17	Surat Dekom No: B.103-KOM/07/2017
16	Implementasi standar nasional teknologi chip dan penggunaan PIN <i>online</i> 6 Digit untuk kartu ATM dan/atau kartu debit.	10-Agust-17	Surat Dekom No: B.128-KOM/08/2017
17	Profil risiko Triwulan II Tahun 2017, Laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan Semester I Tahun 2017, Laporan program anti <i>fraud</i> Semester I Tahun 2017, Laporan pelaksanaan program APU dan PPT Semester I Tahun 2017 dan Laporan penilaian tingkat kesehatan Bank Semester I Tahun 2017.	12-Sep-17	Surat Dekom No: B.149-KOM/09/2017
18	Pengenaan sanksi kewajiban membayar oleh regulator periode juli s.d september 2017	16-Okt-17	Surat Dekom No: B.163-KOM/10/2017
19	Kejadian <i>Fraud</i> berdampak negatif secara signifikan dan/atau berpotensi menjadi perhatian publik Triwulan III/2017	16-Okt-17	Surat Dekom No: B.164-KOM/10/2017
20	<i>Review</i> portofolio guidelines dan <i>review/evaluasi</i> aktiva produktif.	17-Okt-17	Surat Dekom No: B.165-KOM/10/2017
21	Profil Risiko Triwulan III Tahun 2017	09-Nop-17	Surat Dekom No: B.185-KOM/11/2017

## DEWAN KOMISARIS

No	Rekomendasi	Tanggal	Nomor Surat
22	Tanggapan atas hasil On Site Review pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko terintegrasi konglomerasi keuangan BRI 2017.	27-Nop-17	Surat Dekom No: B.200-KOM/11/2017
23	Review Profil Risiko Terintegrasi Semester I Tahun 2017	14-Des-17	Surat Dekom No: B.212-KOM/12/2017
24	Hasil Pemeriksaan implementasi standar nasional teknologi chip dan penggunaan PIN 6 digit pada kartu ATM dan/atau debit PT BRI (Persero) Tbk, posisi 30 September 2016	16-Jan-17	Surat Dekom No: R.02 -KOM/01/2017
25	Laporan pokok-pokok hasil audit Semester II Tahun 2016	21-Feb-17	Surat Dekom No: R.05-KOM/02/2017
26	Laporan pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja PT BRI (Persero) Tbk, Triwulan IV Tahun 2016	23-Feb-17	Surat Dekom No: R.07-KOM/02/2017
27	Catatan hasil kunjungan Dewan Komisaris selama Tahun 2016	14-Mar-17	Surat Dekom No: R.13-KOM/03/2017
28	Laporan hasil audit SKAI pada BRI Remittance Hongkong	14-Mar-17	Surat Dekom No: R.14-KOM/03/2017
29	Laporan evaluasi kinerja investasi DPLK BRI Tahun buku 2016	21-Mar-17	Surat Dekom No: R.17-KOM/03/2017
30	Konsultasi kredit	02-Mei-17	Surat Dekom No: R.20-KOM/05/2017
31	Laporan pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja PT BRI (Persero) Tbk, Triwulan I Tahun 2017	23-Mei-17	Surat Dekom No: R.24-KOM/05/2017
32	Laporan pokok-pokok hasil audit s.d Triwulan I Tahun 2017	23-Mei-17	Surat Dekom No: R.25-KOM/05/2017
33	Konsultasi kredit	26-Mei-17	Surat Dekom No: R.27-KOM/05/2017
34	Laporan pelaksanaan tugas audit intern terintegrasi Semester II 2016	26-Mei-17	Surat Dekom No: R.28-KOM/05/2017
35	Evaluasi kinerja keuangan dan investasi DPLK BRI DPLK BRI Tahun 2016	20-Jun-17	Surat Dekom No: R.32-KOM/06/2017
36	Evaluasi implementasi Tata Kelola DPLK BRI	20-Jun-17	Surat Dekom No: R.33-KOM/06/2017
37	Tindak lanjut <i>management letter</i> hasil audit umum atas laporan keuangan BRI Tahun buku 2016 oleh KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja	25-Jul-17	Surat Dekom No: R.38-KOM/07/2017
38	Laporan evaluasi kinerja investasi DPLK BRI Semester I Tahun 2017	06-Agust-17	Surat Dekom No: R.41-KOM/08/2017
39	Pemantauan tindak lanjut temuan auditor eksternal	06-Agust-17	Surat Dekom No: R.42-KOM/08/2017
40	Evaluasi laporan pokok-pokok hasil audit s.d Triwulan II Tahun 2017	14-Agust-17	Surat Dekom No: R.43-KOM/08/2017
41	Laporan pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja PT.BRI (Persero) Tbk, Triwulan II Tahun 2017	29-Agust-17	Surat Dekom No: R.44-KOM/08/2017
42	Tindak lanjut workshop Dewan Komisaris BRI	29-Agust-17	Surat Dekom No: R.47-KOM/08/2017



## DEWAN KOMISARIS

No	Rekomendasi	Tanggal	Nomor Surat
43	Temuan SKAI tentang pengadaan barang dan jasa	31-Agust-17	Surat Dekom No: R.48-KOM/08/2017
44	Revisi Laporan pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja PT BRI (Persero) Tbk, Semester I Tahun 2017	14-Sep-17	Surat Dekom No: R.50-KOM/09/2017
45	Konsultasi kredit	26-Sep-17	Surat Dekom No: R.51-KOM/09/2017
46	Permohonan persetujuan batasan/kriteria pembuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris BRI dan pemegang Saham Seri A Dwi Warna	31-Okt-17	Surat Dekom No: R.55-KOM/10/2017
47	Revisi draft SK bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT BRI tentang kebijakan tata kelola remunerasi PT.BRI (Persero)Tbk	15-Nop-17	Surat Dekom No: R.57-KOM/11/2017
48	Laporan pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja PT BRI (Persero) Tbk, Triwulan III Tahun 2017	21-Nop-17	Surat Dekom No: R.61-KOM/11/2017
49	Evaluasi laporan pokok-pokok hasil audit Triwulan III Tahun 2017	28-Nop-17	Surat Dekom No: R.63-KOM/11/2017
50	Penyampaian kembali permohonan persetujuan batasan/kriteria pembuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwi Warna.	30-Nop-17	Surat Dekom No: R.64-KOM/11/2017
51	Hasil evaluasi kinerja Direksi PT BRI (Persero) Tbk	02-Mar-17	Surat Dekom No: SR.06-KOM/03/2017
52	Rekomendasi KAP yang akan melaksanakan audit umum laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan PKBL BRI Tahun buku 2017 PT BRI (Persero) Tbk.	09-Mar-17	Surat Dekom No: SR.07-KOM/03/2017
53	Permohonan persetujuan bakal calon anggota Komisaris dan Direksi PT BRI Agro Niaga Tbk.	06-Des-17	Surat Dekom No: SR.15-KOM/12/2017

### Rekomendasi Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Tahun 2017

Dewan Komisaris merasa puas dengan hasil keseluruhan yang dicapai Direksi yang telah mampu menghadapi tantangan perekonomian di tahun 2017. Dalam melakukan penilaian atas kinerja Direksi, Dewan Komisaris mempertimbangkan beberapa faktor pendukung pertumbuhan.

Per Desember 2017, aset Perseroan mencapai Rp1.076,43 triliun, tumbuh sebesar 11,66% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp964,00 triliun. Dewan Komisaris menilai, Direksi berhasil dalam pelaksanaan strategi pertumbuhan kredit yang *prudent*, terutama dalam kondisi yang sangat kompetitif selama tahun 2017. Hingga Desember 2017, kredit yang disalurkan Perseroan sebesar 708,00 triliun tumbuh 11,45% dibandingkan posisi Desember 2016 sebesar Rp635,29 triliun. Kualitas kredit terjaga dengan baik yang tercermin dari rasio kredit bermasalah (NPL Gross) sebesar 2,10%.

Di sisi lain, dana pihak ketiga mampu tumbuh sebesar 10,98% menjadi Rp803,32 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp723,84 triliun dengan komposisi CASA sebesar 60,65%. Hal ini, sejalan dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan dana berbiaya murah.

Laba bersih Perseroan tumbuh sebesar 10,55% dari sebesar Rp25,75 triliun pada Desember 2016 menjadi sebesar Rp28,46 triliun pada Desember 2017. Imbal hasil atas Aktiva (Return on Asset / ROA) mencapai 3,69%, sedangkan imbal hasil atas ekuitas (Return on Equity/ ROE) mencapai sebesar 20,03%. Struktur permodalan tetap terjaga dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/ CAR) sebesar 22,96%, jauh diatas ketentuan regulator.

## DEWAN KOMISARIS

Sepanjang 2017, Perseroan telah mendapat tingkat kesehatan Bank Peringkat Komposit 2 (PK-2) yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Meskipun secara umum kinerja keuangan Perseroan sangat baik, namun terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Dewan Komisaris merangkum beberapa poin yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. Menata penempatan SDM dan menguatkan nilai-nilai budaya kerja dan menjaga kelancaran adaptasi karyawan dengan tuntutan era digital.
2. Melanjutkan upaya peningkatan efisiensi kegiatan operasional.
3. Peningkatan *fee based income (FBI)* yang bersumber dari *transaction banking* dan sumber-sumber *FBI* lainnya.
4. Perbaikan struktur dana dengan peningkatan *CASA* agar dilakukan secara terus menerus dengan disertai perbaikan layanan operasional dan peningkatan *transaction banking* melalui digitalisasi layanan dan operasional.
5. Strategi ekspansi kredit yang dilakukan secara *prudent* dengan mengutamakan pertumbuhan pada segmen yang menjadi *core competency* Perseroan serta sektor-sektor ekonomi yang tahan terhadap krisis.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengembangan *Digital Banking* dan *Fintech* untuk mendukung *sustainability* pengembangan bisnis Perseroan.

Atas prestasi kinerja keuangan tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi yang tinggi dan selamat kepada Direksi berikut seluruh jajaran Perseroan. Dewan Komisaris berharap agar prestasi kinerja keuangan tersebut dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan untuk masa yang akan datang.

## PROGRAM KERJA DEWAN KOMISARIS

### Realisasi Pelaksanaan Program Kerja Dewan Komisaris

Program kerja Dewan Komisaris disusun dengan memperhatikan tugas, kewajiban dan tanggungjawab Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun anak usaha perusahaan Perseroan.

Program kerja Dewan Komisaris disusun dalam suatu dokumen yang disebut Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris yang disusun setiap awal Tahun anggaran. Dalam melaksanakan RKA tersebut, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pengawasan Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan komite Tata kelola Terintegrasi. Agar tugas, kewajiban dan tanggung jawab dapat terlaksana secara efektif, Dewan Komisaris menggunakan seluruh sumber daya yang ada, yaitu seluruh anggota Dewan Komisaris, Anggota Komite yang berasal dari Non Komisaris, serta Sekretariat Dewan Komisaris, untuk mendukung pencapaian program kerja Dewan Komisaris tersebut.

Adapun realisasi program kerja Dewan Komisaris Perseroan pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

#### 1. Melaksanakan Proses Nominasi Direksi

Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa usulan penggantian dan pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris harus disampaikan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna kepada RUPS. Dewan Komisaris telah menyampaikan usulan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atas usulan calon anggota Direksi untuk diputuskan dalam RUPST Tahun 2017, RUPS LB Tahun 2017 dan menyampaikan usulan Calon Wakil Perseroan yang akan ditempatkan menjadi Pengurus di Perusahaan anak dan Pihak terafiliasi yaitu PT BRI Agro Niaga (Persero) Tbk. Dan PT Bahana Artha Ventura.



## DEWAN KOMISARIS

## 2. Melaksanakan Review dan Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Review dan usulan remunerasi telah dilakukan oleh Dewan Komisaris guna menjadi usulan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2017. Review dan usulan tersebut dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Peraturan Menteri yang berlaku, kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan, kewajaran dengan *peer group*, pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan, serta berbagai hasil survei dan kajian yang reliabel dari pihak eksternal.

## 3. Review atas Implementasi Remunerasi Pekerja dan Kebijakan Ketenagakerjaan

Review ini dilakukan untuk memastikan Perseroan selalu menetapkan remunerasi dan kebijakan ketenagakerjaan, yang adil untuk memotivasi seluruh pekerja. Penetapan remunerasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kinerja Perusahaan.

Review dilakukan dengan mengevaluasi implementasi Arsitektur SDM, strategi dan Kebijakan Pengembangan SDM. Hal-hal yang menjadi *concern* Dewan Komisaris antara lain terkait rekomposisi Pekerja dari Jajaran Support ke Jajaran Bisnis, Strategi untuk mewujudkan Visi Perseroan di bidang SDM yaitu BRI sebagai *Home To The Best Talent* serta strategi untuk menguatkan nilai-nilai budaya kerja dan menjaga kelancaran adaptasi karyawan dengan tuntutan era *digital banking* dan *fintech*.

## 4. Review terhadap Visi/Misi Perusahaan dan Pemberian Persetujuan atas Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*), Rencana Bisnis Bank (RBB) dan RKA Perseroan

Review terhadap Visi/Misi perusahaan dilakukan secara berkala bersamaan dengan penyusunan Rencana Jangka Panjang (RJP), sedangkan untuk *review* strategi perusahaan dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB).

Dalam rangka mengarahkan kegiatan operasional bank sesuai visi dan misinya, bank perlu menetapkan sasaran strategis dan seperangkat nilai perusahaan (*corporate values*) yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana bisnis. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 Tentang Rencana Bisnis Bank, Direksi berkewajiban menyusun Rencana Bisnis dan harus mendapatkan persetujuan atas rencana Bisnis Perseroan.

Sebelum memberikan persetujuan atas rencana bisnis bank, Dewan Komisaris melakukan *review* atas usulan Rencana Bisnis untuk memastikan bahwa rencana tersebut telah disusun secara matang dan realistis berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko, serta memperhatikan aspek internal dan eksternal dengan cakupan yang komprehensif serta asas perbankan yang sehat. Disamping memberikan persetujuan, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Realisasi Rencana Bisnis Perseroan yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat dua bulan setelah periode laporan.

Pembahasan dan persetujuan atas Rencana Bisnis yang dilakukan oleh Dewan Komisaris selama Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Materi Penelaahan	Waktu Pelaksanaan	Output
1.	Persetujuan Rencana Jangka Panjang BRI 2018-2022 dan <i>Review</i> Visi/Misi BRI	14 Maret 2017	Surat Dewan Komisaris BRI Nomor:R. 15-KOM/03/2017 tentang Persetujuan Rencana Jangka Panjang BRI 2018-2022
2.	Persetujuan RBB Tahun 2017-2019, RKAP Tahun 2017 (Revisi) dan <i>Review</i> Strategi Perusahaan	09 Juni 2017	Surat Dewan Komisaris BRI Nomor: R.29-KOM/11/2017 tanggal 09 Juni 2017 tentang Persetujuan RBB Tahun 2017-2019 dan RKAP Tahun 2017 (Revisi)
3.	Persetujuan RBB BRI Tahun 2018-2020 dan RKAP BRI Tahun 2018	21 November 2017	Surat Dewan Komisaris BRI Nomor: R.60-KOM/11/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Persetujuan RBB BRI Tahun 2018-2020 dan RKAP BRI Tahun 2018

## DEWAN KOMISARIS

### 5. Penelaahan Laporan Keuangan

Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan SKAI telah melakukan penelaahan atas laporan keuangan yang akan dipublikasikan Perseroan mencakup laporan keuangan Triwulan I dan Triwulan III, khusus Laporan Triwulan II dan Laporan Tahunan *review* Laporan Keuangan menggunakan Jasa Audit eksternal yang ditunjuk oleh RUPS yaitu KAP Puwanto, Sungkoro dan Surja (EY). Hasil penelaahan tersebut dapat berupa tanggapan kepada Direksi untuk penyempurnaan atau perbaikan laporan sebelum dipublikasikan.

Realisasi pelaksanaan penelaahan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

No.	Materi Penelaahan	Waktu Pelaksanaan	Hasil Penelaahan Laporan Keuangan
1.	Laporan Keuangan akhir Tahun 2016	20 Januari 2017	Tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian KAP yang menyebabkan KAP percaya bahwa informasi keuangan konsolidasian tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal material, kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian PT.BRI (Persero) Tbk. dan entitas anaknya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sesuai standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2.	Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2017	17 April 2017	Berdasarkan penelaahan dan Diskusi SKAI dengan Komite Audit tidak menemukan indikasi perlunya modifikasi material yang disebabkan ketidak konsistenan penyajian pos-pos di dalam Draft Laporan Keuangan PT BRI (Persero) Tbk. TW I Tahun 2017.
3.	Laporan Keuangan Triwulan II Tahun 2017	27 Juli 2017	Tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian KAP yang menyebabkan KAP percaya bahwa informasi keuangan konsolidasian interim tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal material, kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian PT.BRI (Persero) Tbk. dan entitas anaknya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, sesuai standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
4.	Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2017	24 Oktober 2017	Berdasarkan penelaahan dan Diskusi SKAI dengan Komite Audit tidak menemukan indikasi perlunya modifikasi material yang disebabkan ketidak konsistenan penyajian pos-pos di dalam Draft Laporan Keuangan PT BRI (Persero) Tbk. TW III Tahun 2017.

### 6. Pengawasan atas Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Kinerja Perseroan

Memenuhi Ketentuan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.03/2016 Tentang Rencana Bisnis Bank, Dewan Komisaris secara rutin menyampaikan Laporan Pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan kinerja Perseroan termasuk *review* strategi Perseroan dengan rincian sebagai berikut:



## DEWAN KOMISARIS

No	Laporan Kegiatan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris BRI	Tanggal	Laporan
1	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja PT BRI (Persero) Tbk, Triwulan IV Tahun 2016	23-Feb-17	Surat Dekom No: R.07-KOM/02/2017
2	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja PT BRI (Persero) Tbk, Triwulan I Tahun 2017	23-Mei-17	Surat Dekom No: R.24-KOM/05/2017
3	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja PT.BRI (Persero) Tbk, Triwulan II Tahun 2017	29-Agust-17	Surat Dekom No: R.44-KOM/08/2017
4	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja PT BRI (Persero) Tbk, Triwulan III Tahun 2017	21-Nop-17	Surat Dekom No: R.61-KOM/11/2017

### 7. Evaluasi Kecukupan Pengendalian Internal

Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern dan monitoring tindak lanjut temuan oleh manajemen.

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam rangka memantau tindak lanjut temuan hasil audit. Tujuan pemantauan ini untuk memastikan bahwa Direksi telah melakukan perbaikan sesuai dengan komitmen dan saran yang disampaikan oleh Kantor Akuntan Publik, OJK, BI, BPK dan Satuan Kerja Audit Internal atau regulator lainnya. Pelaksanaan pemantauan dilakukan bersamaan dengan pertemuan rutin dengan Satuan Kerja Audit Internal dan apabila dipandang perlu akan mengundang Direksi/Divisi terkait atau unit kerja terkait.

Realisasi pelaksanaan evaluasi dan persetujuan Dewan Komisaris atas Perencanaan Audit Tahunan Tahun 2017 dan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit ditargetkan sebagai berikut:

No.	Materi	Realisasi Waktu	Output
1.	Evaluasi dan persetujuan Dewan Komisaris atas Perencanaan Audit Tahunan Tahun 2017	08 Februari 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi dalam surat Dekom R.04-KOM/02/2017 tanggal 08 Februari 2017 Tentang Evaluasi Terhadap Perencanaan Audit Tahunan SKAI BRI Tahun 2017
2.	Review Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Intern Semester II Tahun 2016	21 Februari 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi R.05-KOM/02/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Laporan Hasil Audit Semester II Tahun 2017
3.	Review Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Intern Triwulan I Tahun 2017	25 Mei 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor: R.25-KOM/05/2017 tanggal 12 Juli 2016 tentang Laporan Pokok-pokok Hasil Audit Triwulan I Tahun 2017
4.	Review Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Intern dan Terintegrasi Semester I Tahun 2017	14 Agustus 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor: R.43-KOM/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Laporan hasil Audit Semester I Tahun 2017
5.	Review Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Intern Triwulan III Tahun 2017	28 November 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor: R.63-KOM/11/2017 tanggal 28 November 2017 tentang Laporan hasil Audit Triwulan III Tahun 2017

## DEWAN KOMISARIS

## 8. Melakukan Seleksi dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Pelaksanaan pengadaan Jasa Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Rangka Audit Umum Atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tahun Buku 2017 dilaksanakan di bawah koordinasi Dewan Komisaris BRI melalui Komite Audit dengan menggunakan ketentuan dan prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku di BRI.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No.: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, bahwa Laporan Keuangan Tahunan BUMN diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS/ Menteri dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; dan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut juga sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, bahwa salah satu tugas Komite Audit adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.

Dewan Komisaris telah melakukan proses seleksi dan penunjukan KAP sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris NOKEP: 01-KOM/01/2017 tanggal 23 Januari 2017 ditetapkan bahwa proses pengadaan Jasa Audit KAP dilaksanakan oleh Tim Teknis, Tim Penyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan Tim Pengadaan dibawah koordinasi Komite Audit.
- b. Tim Teknis, adalah tim yang bertugas antara lain membuat ruang lingkup, menyampaikan alokasi anggaran pengadaan jasa KAP, mempersiapkan Terms of Reference (TOR) dan melakukan penilaian teknis calon KAP yang akan ditunjuk berdasarkan kriteria teknis dan pengalaman masing-masing KAP serta meminta kepada Tim Pengadaan untuk melakukan proses pengadaan.
- c. Tim Penyusun HPS yang bertugas antara lain menyusun dan menganalisa Harga Perkiraan Sendiri/ *Owner Estimate* Pengadaan Jasa KAP Laporan Keuangan BRI dan mengusulkan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- d. Tim Pengadaan adalah unit kerja yang bertugas melaksanakan proses pengadaan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain mencakup mengusulkan harga perkiraan
- e. Berdasarkan laporan dan rekomendasi yang disampaikan Komite Audit terkait dengan proses pengadaan jasa audit Kantor Akuntan Publik dalam rangka Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan PKBL Perseroan Tahun Buku 2017, Dewan Komisaris telah memutuskan dan menetapkan KAP PurwantoNo, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young) sebagai KAP yang akan melakukan tugas dengan Surat Perintah Kerja No.B.374 P-PBJ/PJS/03/2017 tanggal 27 Maret 2017. Adapun ruang lingkup Pelaksanaan Audit oleh KAP yang ditunjuk meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Audit umum dan memberikan opini atas laporan keuangan Tahun 2017 konsolidasi Perseroan dan entitas anak yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan;
  - 2) Audit umum dan memberikan opini atas laporan keuangan PKBL Perseroan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP);
  - 3) Audit umum atas laporan keuangan konsolidasi Perseroan posisi Juni 2017 dan penerbitan *comfort letter* sehubungan dengan rencana *Corporate Action* Tahun 2017.



## DEWAN KOMISARIS

### 9. Review dan Evaluasi Pelaksanaan Audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)

Sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa Keuangan. Bank Rakyat Indonesia (DPLK BRI) sebagai pihak Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Otoritas Jasa Keuangan, Audit paling lama 6 (enam) bulan setelah Tahun buku berakhir.

Ruang lingkup kegiatan evaluasi yang dilaksanakan terhadap KAP antara lain meliputi:

1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
2. kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik;
4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan.

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Audit Oleh Kantor Akuntan Publik yang dilaksanakan pada Tahun 2017 antara lain Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas informasi keuangan historis Tahun keuangan 2016 oleh KAP Purwanto Sungkoro Surja (KAP PSS EY) dan Evaluasi pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis DPLK BRI Tahun Buku 2015 oleh KAP Mirawati Sensi Idris (MSI) dengan rincian sebagai berikut:

No	Evaluasi KAP	Ruang Lingkup Evaluasi			
		Kesesuaian Pelaksanaan Audit oleh KAP dan/atau KAP dengan Standar Audit Yang Berlaku	Kecukupan Waktu Pekerjaan Lapangan	Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik	Rekomendasi perbaikan yang diberikan.
1	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas informasi keuangan historis Tahun keuangan 2016 oleh KAP Purwanto Sungkoro Surja (KAP PSS EY)	Pelaksanaan audit oleh KAP PSS EY dilakukan sesuai dengan dengan Standar audit yang berlaku. Standar audit yang digunakan sebagai acuan, antara lain, Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan [POJK].	KAP PSS Telah memiliki time table audit untuk Melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ruang lingkup audit. Dalam pelaksanaannya, KAP PSS telah menyelesaikan seluruh agenda pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam time table audit tersebut. Dalam pelaksanaan audit berdasarkan Time Table Audit tersebut, KAP PSS telah menyelesaikan isu-isu akuntansi yang ditemukan di lapangan, termasuk estimasi dan judgement yang signifikan yang terjadi. Ketersediaan Data dari unit kerja di BRI yang dibutuhkan oleh KAP PSS secara tepat waktu telah Mendukung pelaksanaan audit Sesuai dengan time Table audit yang sudah disepakati.	Berdasarkan diskusi dengan KAP PSS. Komite Audit meyakini bahwa risiko Audit ( <i>Identifikasi inherent risk</i> , dan <i>control risk</i> serta meminimalkan <i>detection risk</i> ) dapat diminimalkan melalui perencanaan dan pelaksanaan prosedur audit yang diidentifikasi telah memadai untuk dapat mendeteksi <i>material miss statement</i> di dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan, baik yang disebabkan rror. Dengan demikian, Komite Audit meyakini bahwa KAP PSS telah melakukan pengujian atas Transaksi dengan jumlah Uji Petik yang memadai.	Rekomendasi disampaikan dalam Surat Dewan Komisaris Nomor: B.92 -KOM/06/2017 tanggal 16 Juni 2017

## DEWAN KOMISARIS

No	Evaluasi KAP	Ruang Lingkup Evaluasi			
		Kesesuaian Pelaksanaan Audit oleh KAP dan/atau KAP dengan Standar Audit Yang Berlaku	Kecukupan Waktu Pekerjaan Lapangan	Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik	Rekomendasi perbaikan yang diberikan.
2	Evaluasi pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis DPLK BRI Tahun Buku 2015 oleh KAP Mirawati Sensi Idris (MSI).	Pelaksanaan audit oleh KAP MSI dilakukan sesuai dengan dengan Standar audit yang berlaku. Standar audit yang digunakan sebagai acuan, antara lain, Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)	Ketersediaan data secara tepat waktu yang dibutuhkan KAP MSI sesuai time table audit yang sudah disepakati.	Komite Audit meyakinkan bahwa cakupan jasa yang diberikan kepada KAP MSI telah sesuai dengan standar <i>auditing</i> yang berlaku, tidak ada penugasan asuransi dan non-asuransi yang dilakukan bersamaan.	Rekomendasi disampaikan dalam Surat Dewan Komisaris Nomor: B.96-KOM/06/2017 tanggal 20 Juni 2017

Berdasarkan Evaluasi KAP tersebut di atas Komite Audit berkeyakinan bahwa pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2016 oleh KAP PSS telah dan Audit Atas Informasi Keuangan Historis DPLK BRI Tahun Buku 2015 oleh KAP Mirawati Sensi Idris (MSI) sesuai dengan standar audit yang berlaku.

Mempertimbangkan KAP yang telah ditunjuk dalam RUPST tahun 2017 dapat menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan dan PKBL tahun 2017 sesuai dengan standar Audit dan ketentuan yang berlaku, selama tahun 2017 Komite Audit tidak memberikan rekomendasi untuk tidak melakukan pergantian KAP yang telah ditunjuk dalam RUPS Tahunan Tahun 2017.

#### 10. Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Audit

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam rangka memantau tindak lanjut temuan hasil audit. Tujuan pemantauan ini untuk memastikan bahwa Direksi telah melakukan perbaikan sesuai dengan komitmen dan saran yang disampaikan oleh Kantor Akuntan Publik, OJK, BI, BPK dan Audit Intern. Pelaksanaan pemantauan dilakukan bersamaan dengan pertemuan rutin dengan Satuan Kerja Audit Internal dan apabila dipandang perlu akan mengundang Direksi/Divisi terkait atau mendalami di unit kerja terkait.

Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil temuan audit adalah sebagai berikut:

No	Materi	Waktu Pelaksanaan	Output
1	Pemeriksaan BPK RI atas Pengelolaan Kredit Segmen Korporasi Tahun Buku 2016 & 2017	26 September 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi surat Nomor: B.55-KA/09/2017 tanggal 26 September 2017 .



## DEWAN KOMISARIS

No	Materi	Waktu Pelaksanaan	Output
2.	<i>Management Letter</i> atas audit umum laporan keuangan Tahun 2016	22 Juli 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melalui surat Nomor: B.38-KA/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Tindak lanjut <i>management letter</i> hasil audit umum atas laporan keuangan BRI Tahun buku 2016 oleh KAP Purwantoro, Sungkoro, dan Surya (EY)
3.	Pemantauan tindak lanjut temuan auditor eksternal (BI, OJK, & Akuntan Publik) oleh BRI	08 Agustus 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melalui surat Nomor: B.42-KA/08/2017 tanggal 08 Agustus 2017 tentang Pemantauan tindak lanjut temuan auditor eksternal (BI, OJK, & Akuntan Publik) oleh BRI

Berdasarkan pemantauan tindak lanjut tersebut diatas Dewan Komisaris telah menyampaikan rekomendasi kepada Manajemen antara lain sebagai berikut:

- Terhadap setiap temuan hasil audit baik oleh auditor eksternal maupun internal agar dilakukan pengkajian dan evaluasi secara mendalam mengenai penyebab terjadinya suatu temuan.
- Hasil pengkajian tersebut selanjutnya agar digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tindak lanjut perbaikan yang tepat, komprehensif dan dapat menghindarkan terjadinya temuan berulang.
- Untuk perbaikan sistem pengendalian internal perlu dilakukan upaya untuk terus membangun kesadaran budaya sadar risiko atau *risk awareness* dan disiplin dari seluruh Pekerja BRI.
- Secara konsisten dan berkelanjutan SKAI diminta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan/rekomendasi audit eksternal oleh unit-unit kerja terkait sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
- Meminta SKAI untuk terus menyampaikan laporan perkembangan pemenuhan tindak lanjut temuan/rekomendasi audit eksternal kepada Dewan Komisaris secara periodik dalam Laporan Pokok-pokok Hasil Audit Triwulanan.
- Agar dilakukan penetapan prioritas perbaikan dengan mengutamakan tindak lanjut perbaikan terhadap temuan-temuan yang memiliki dampak risiko tinggi bagi operasional BRI.
- Direksi melalui SKAI agar terus melakukan monitoring terhadap setiap temuan beserta tindak lanjut perbaikan atas hasil audit dari internal (SKAI) (BPK,OJK, BI, KAP) serta melaporkan Secara berkala kepada Dewan Komisaris maupun eksternal.

#### 11. Review Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan

Sesuai POJK Nomor 4 /POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan yang mencakup penilaian profil risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance (GCG)*, rentabilitas (*earnings*), dan permodalan (*capital*).

## DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan evaluasi Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan adalah sebagai berikut:

No.	Materi	Realisasi Waktu	Output dan Rekomendasi	Keterangan
1.	Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Juli - Desember 2016	21 Februari 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melalui Surat Dekom Nomor: B. 45-KOM/03/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Laporan Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2016, Laporan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Semester II Tahun 2016, Laporan Program Anti Fraud Semester II Tahun 2016, Laporan Pelaksanaan Program APU dan PPT Semester II Tahun 2016 dan Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2016.	Peringkat rentabilitas menunjukkan perbaikan dari peringkat 2 pada Semester I Tahun 2016 menjadi peringkat I pada Semester II Tahun 2016, Namun GCG mengalami penurunan peringkat dari peringkat I pada Semester I Tahun 2016 menjadi peringkat 2 pada Semester II Tahun 2016, sedangkan aspek permodalan dan GCG tetap, sehingga rata-rata peringkat komposit. Peringkat final Tingkat Kesehatan bank mengalami penurunan dari Peringkat Komposit I pada Semester I Tahun 2016 menjadi Peringkat komposit II pada Semester II Tahun 2016. Berdasarkan hasil komposit self-assessment dan berdasarkan kriteria yang ditetapkan, kondisi BRI pada posisi Semester II Tahun 2016 secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
2.	Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Januari – Juni 2017	30 Agustus 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melalui Surat Dekom Nomor: B.149 - KOM/07/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Laporan Profil Risiko Triwulan II/2017, Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud, & Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Semester I Tahun 2017.	Peringkat komposit tingkat kesehatan Bank BRI membaik dari peringkat komposit 2 (sehat) pada Semester II Tahun 2016 menjadi Peringkat Komposit 1 (sangat Sehat) pada Semester I Tahun 2017 dengan rincian masing-masing faktor penilaian: Profil risiko mendapat peringkat 2, GCG, Permodalan dan Rentabilitas masing-masing peringkat 1. Perbaikan tersebut didukung oleh membaiknya penilaian GCG dari peringkat 2 pada Semester II Tahun 2016 ke peringkat 1 pada Semester I Tahun 2017, sedangkan penilaian untuk faktor lain (Profil risiko, Rentabilitas dan Permodalan) peringkatnya sama dengan Semester sebelumnya yaitu peringkat 1.

## 12. Review dan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Sejalan dengan perkembangan usaha Perseroan, maka perlu didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian guna memastikan bahwa seluruh kegiatan dan kebijakan usaha telah dilaksanakan dengan mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun otoritas berwenang lainnya.



## DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melakukan *review* dan evaluasi terhadap Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terutama terhadap pemenuhan ketentuan yang berlaku menyangkut pelaksanaan prinsip kehati-hatian, antara lain berupa Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (CAR), BMPK, Posisi Devisa Neto (PDN), Transaksi Derivatif, Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah dan Valuta Asing, dan Tingkat Kredit Bermasalah (NPL).

Target waktu penyelesaian *review* dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut:

No.	Materi	Realisasi Waktu	Output Dan Rekomendasi	Keterangan
1.	<i>Review</i> dan evaluasi pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Semester II Tahun 2016	21 Februari 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melalui surat Dekom No: B.22-KOM/03/2017, tanggal 29 Maret 2017 tentang Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Profil Risiko, Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Laporan Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> Semester II Tahun 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pada Semester II Tahun 2016 terdapat 592 pengujian prinsip kehati-hatian terhadap rencana kebijakan, keputusan dan perjanjian bersama yang tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku serta terdapat 262 <i>review</i> kebijakan internal.</li> <li>· Telah dilakukan <i>review</i> dan analisis dampak terhadap 158 ketentuan eksternal.</li> <li>· Pemantauan pelaksanaan ketentuan kehati-hatian yang meliputi CAR, BMPK, NPL, PDN, transaksi Derivatif dan LCR tidak melanggar ketentuan yang berlaku.</li> <li>· Risiko Kepatuhan masih dalam batas yang baik yaitu peringkat 2 (<i>Low to Moderate</i>) baik menurut OJK maupun <i>Self Assessment</i>.</li> </ul>
2.	<i>Review</i> dan evaluasi pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Semester I Tahun 2017	30 Agustus 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melalui surat Dekom Nomor: B.108-KOM/09/2017, tanggal 20 September 2017 tentang laporan profil risiko Triwulan II Tahun 2017, laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan Triwulan II Tahun 2017, laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> Semester I Tahun 2017 dan laporan tingkat kesehatan bank Semester I Tahun 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Terkait pencegahan terjadinya penyimpangan ketentuan telah dilakukan uji kehati-hatian terhadap 260 rencana kebijakan, keputusan dan perjanjian bersama.</li> <li>· Secara umum telah dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan ketentuan kehati-hatian yang meliputi GWM, CAR, BMPK, NPL, PDN, transaksi Derivatif dan LCR dan tidak terjadi pelanggaran.</li> <li>· Telah dilakukan <i>review</i> dan analisis dampak terhadap 175 ketentuan eksternal.</li> <li>· Profil Risiko Kepatuhan secara keseluruhan terjadi perbaikan dan risiko kepatuhan masih termasuk <i>Low to moderate</i> dan tidak berubah atau sama dengan penialain Tahun lalu.</li> </ul>

### 13. *Review* dan Evaluasi Profil Risiko

Dewan Komisaris melakukan *review* dan evaluasi terhadap penilaian profil risiko yang dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Perseroan (*inherent risk*) yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Perseroan.

## DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan *review* dan evaluasi terhadap penilaian profil risiko adalah sebagai berikut:

No	Materi	Realisasi Waktu	Output	Keterangan
1.	Laporan Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2016	21 Februari 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melalui surat Dekom No: B.22-KOM/03/2017, tanggal 29 Maret 2017 tentang Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Profil Risiko, Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Laporan Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> Semester II Tahun 2016.	Peringkat Profil Risiko pada Triwulan IV Tahun 2016 secara komposit tetap pada peringkat 2 (dua) atau <i>Low to Moderate</i> Atau tidak mengalami perubahan Peringkat apabila dibandingkan Dengan penilaian profil risiko Triwulan III Tahun 2016. Namun demikian, secara skor, terjadi kenaikan nilai komposit dari 2,05 pada Triwulan III Tahun 2016 menjadi 2,11 pada Triwulan IV Tahun 2016. Kenaikan ini disebabkan karena kenaikan pada risiko inheren dan penurunan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada beberapa jenis risiko.
2.	Laporan Profil Risiko Triwulan I Tahun 2017	23 Mei 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melalui surat Dekom Nomor: B.85 - KOM/05/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Laporan Profil Risiko 1 Tahun 2017	Peringkat Profi risiko pada Triwulan I Tahun 2017 secara komposit tetap pada peringkat 2 (dua) atau <i>Low to Moderate</i> , Secara skor terjadi perbaikan nilai komposit dai 2.11 pada Triwulan IV Tahun 2016 menjadi 2.03 pada Triwulan I Tahun 2017. Perbaikan ini disebabkan karena penurunan pada risiko inheren pasar, dan risiko inheren operasional serta danya perbaikan Kualitas Penerapan Manajemen Rsisko (KPMR).
3.	Laporan Profil Risiko Terintegrasi Triwulan II Tahun 2017	30 Agustus 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melalui surat Dekom Nomor: B.108-KOM/09/2017, tanggal. 20 September 2017 tentang laporan profil risiko Triwulan II Tahun 2017, laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan Triwulan II Tahun 2017, laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> Semester I Tahun 2017 dan laporan tingkat kesehatan bank Semester I Tahun 2017	Peringkat Profi risiko pada Triwulan II Tahun 2017 secara komposit tetap pada peringkat 2 (dua) atau <i>Low to Moderate</i> , Secara skor terjadi kenaikan nilai risiko komposit dai 2.03 pada Triwulan I Tahun 2017 menjadi 2.07 pada Triwulan II Tahun 2017. Kenaikan ini disebabkan karena kenaikan pada risiko inheren kredit , risiko inheren pasar, dan risiko inheren operasional. Sementara itu, untuk Kualitas Penerapan Manajemen Rsisko (KPMR) tidak ada perubahan dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2017.
4.	Laporan Profil Risiko Triwulan III Tahun 2017	03 November 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melalui surat Dekom Nomor: B.185 -KPMR/11/2017 tanggal 09 November 2017 tentang Laporan Profil Risiko TW III Tahun 2017	Peringkat Profi risiko pada Triwulan III Tahun 2017 secara komposit tetap pada peringkat 2 (dua) atau <i>Low to Moderate</i> , Secara skor terjadi perbaikan nilai komposit dai 2.07 pada Triwulan IV Tahun 2016 menjadi 2.03 pada Triwulan III Tahun 2017. Perbaikan ini disebabkan karena penurunan pada risiko-risiko inheren kecuali risiko inheren pasar dan risiko inheren stratejik. Kualitas Penerapan Manejemen Risiko (KMPR) secara umum sama dengan KPMR pada Triwulan II 2017, kecuali untuk KPMR risiko kredit yang membaik dari 1,70 pada Trwiwulan II Tahun 2017 menjadi 1,68 pada Triwulan III Tahun 2017.



## DEWAN KOMISARIS

#### 14. Review Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip GCG, dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas suatu permasalahan terhadap penerapan GCG pada Bank.

Penilaian sendiri (*self assessment*) tersebut dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek *governance* yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*, sebagai suatu proses yang berkesinambungan.

- Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.
- Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektifitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.
- Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank. Hasil penilaian *governance outcome* juga mencerminkan sejauh mana penerapan *governance process* dan dukungan yang memadai dari *governance structure*.

Review Pelaksanaan GCG Tahun 2017 dan *self assessment* Tahun 2017 yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Materi	Realisasi Waktu	Output Dan Rekomendasi	Keterangan
1.	<i>Self assesment</i> periode Semester II Tahun 2016	09 Januari 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melalui surat Dekom Nomor: B.06-Sekkom/01/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Pelaksanaan <i>Self Assesment</i> GCG Semster II 2016	GCG Bank BRI pada Semester II Tahun 2016 mendapat peringkat 2, mengalami penurunan dibandingkan dengan <i>self assesment</i> pada Semster II Tahun 2015 yang mendapat peringkat I. Berdasarkan penialain GCG oleh Pihak independen IICD ( <i>Indonesia Institute for Corporate Directorship</i> ) dengan menggunakan Asean Corporate Governance Scorecard menilai GCG BRI pada Tahun 2016 dengan nilai 102,5 point atau "Leadership in Corporate Governance". Mencerminkan BRI telah melakukan penerapan GCG pada aspek <i>Governance Process</i> , <i>Governance Structure</i> dan <i>Governance Outcome</i> yang secara umum "Baik". Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip GCG, Jika terdapat kelemahan dalam GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.

## DEWAN KOMISARIS

No	Materi	Realisasi Waktu	Output Dan Rekomendasi	Keterangan
2.	Self assesment periode Semester I Tahun 2017	18 Juli 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melalui surat Dekom Nomor: B.236 -Sekkom /07/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Self assesment GCG Semester I 2017	GCG Bank BRI pada Semester I Tahun 2017 mendapat peringkat I, dengan nilai komposit 1,13 atau mengalami perbaikan dibandingkan dengan nilai komposit Semester II Tahun 2016 dengan nilai komposit 1,18. Perbaikan terdapat pada Governance Procces untuk penerapan fungsi kepatuhan bank yang pada semester II Tahun 2016 mendapat skor 0,34 dan pada Semester I Tahun 2017 mendapat skor 0,17. Peringkat GCG I mencerminkan BRI telah melakukan penerapan GCG pada aspek <i>Governance Process</i> , <i>Governance Structure</i> , dan <i>Governance Outcome</i> yang secara umum "Sangat Baik". Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip GCG, Jika terdapat kelemahan dalam GCG, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan apat segera diperbaiki oleh Manajemen Bank.

### 15. Review atas Kecukupan Pengendalian Internal Terintegrasi, Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dan Profil Risiko Terintegrasi

Sejalan dengan perkembangan usaha Perseroan, maka perlu didukung dengan pengendalian intern guna memastikan bahwa seluruh kegiatan dan kebijakan usaha telah dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, memperhatikan risiko-risiko yang mungkin terjadi dan penyelesaian *action plan* atas semua risiko yang terjadi dan pelanggaran pengendalian intern.

*Review* dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengendalian Intern Terintegrasi dilakukan secara Semesteran dengan memperhatikan Laporan Semesteran Direktur Kepatuhan Perseroan dan LJK anggota konglomerasi Perseroan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan juga dengan memperoleh penjelasan melalui presentasi dari anggota Dewan Komisaris masing-masing LJK yang menjadi anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Disamping itu Dewan Komisaris melalui KTKT melakukan *review* dan evaluasi terhadap Laporan Semester Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam PBI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Pelaksanaan *Review* atas kecukupan pengendalian internal terintegrasi dan fungsi kepatuhan terintegrasi adalah sebagai berikut:

Materi	Realisasi Waktu	Output
Hasil <i>Review</i> Laporan Hasil Kepatuhan Semester II Tahun 2016	26 Mei 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melalui surat Dekom Nomor: B.86-KOM/05/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Laporan Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Terintegrasi Semester II 2016.
<i>Review</i> hasil Laporan Kepatuhan Terintegrasi Semester I Tahun 2017	13 Desember 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melalui surat Dekom Nomor Hasil <i>review</i> laporan hasil kepatuhan terintegrasi Semester I Tahun 2017 Nomor: B.16-KTKT/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Laporan Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Terintegrasi Triwulan I 2017



## DEWAN KOMISARIS

Materi	Realisasi Waktu	Output
Hasil <i>Review</i> Laporan Hasil Audit Terintegrasi Semester II Tahun 2016	26 Mei 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris melalui surat Nomor: B.28-KTKT/05/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Laporan Pelaksanaan Tugas Audit Intern Terintegrasi Semester II Tahun 2016
<i>Review</i> hasil Laporan Hasil Audit Terintegrasi Semester I Tahun 2017	13 Desember 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris melalui surat Nomor: B.28-KTKT/05/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Laporan Pelaksanaan Audit Terintegrasi Semester I Tahun 2017 Tahun 2015

#### 16. Review Laporan Profil Risiko Terintegrasi

Sesuai POJK Nomor 4 /POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan yang mencakup penilaian profil risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas (*earnings*), dan permodalan (*capital*).

*Review* dan evaluasi profil risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha (*inherent risk*) yang berpotensi mempengaruhi Konglomerasi Keuangan Perseroan.

*Review* dan evaluasi profil risiko juga dilakukan terhadap kualitas penerapan manajemen risiko Konglomerasi Keuangan Perseroan, yang mencakup 4 (empat) aspek, yaitu tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko serta kecukupan pengendalian risiko (*risk control system*) yang mencakup 10 jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko strategis, risiko transaksi intra group dan risiko asuransi. *Review* dan evaluasi profil risiko lebih difokuskan terhadap risiko-risiko yang memiliki peringkat 3 (*moderate*) sampai peringkat 5 (*high*) dan risiko yang memiliki peringkat dengan kecenderungan memburuk.

Pelaksanaan *Review* dan evaluasi profil risiko terintegrasi selama Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Materi	Realisasi Waktu	Output	Keterangan
<i>Review</i> Profil Risiko Terintegrasi Semester II Tahun 2016	09 Mei 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris melalui surat Nomor: B.75-KOM/05/2017 tanggal 09 Mei 2017 tentang <i>Review</i> Profil Risiko terintegrasi Semster II Tahun 2016	Peringkat Profil Risiko terintegrasi BRI pada Semester II Tahun 2016 secara komposit, jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2016, tetap berada pada peringkat 2 yaitu <i>Low to Moderate</i> . Namun demikian, profil risiko tersebut mengalami penurunan yang dicerminkan oleh meningkatnya skor penilaian dari 1.89 pada Semester I 2016 menjadi 2.02 pada Semester II 2016. Dari 10 jenis risiko inheren yang ada dalam konglomerasi keuangan BRI, terdapat beberapa risiko yang perlu dicermati yang berdampak pada meningkatnya risiko terintegrasi BRI yaitu: Risiko Likuiditas, Risiko Strategik dan Risiko Operasional.

## DEWAN KOMISARIS

Materi	Realisasi Waktu	Output	Keterangan
Review Profil Risiko Terintegrasi Semester I Tahun 2017	12 Desember 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris melalui surat Nomor: B.14-KTKT/12/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Review Profil Risiko terintegrasi Semester I Tahun 2017.	Peringkat Profil Risiko Terintegrasi BRI pada Semester I Tahun 2017 secara komposit, jika dibandingkan dengan Semester II Tahun 2016, tetap berada pada peringkat 2 yaitu <i>Low to Moderate</i> dan profil risiko tersebut tidak berubah karena skor penilaian konstan yaitu sebesar 1.83. Stabilitasnya skor dikarenakan risiko <i>inheren</i> meskipun meningkat dari 2.24 menjadi 2.26, kualitas penerapan manajemen risiko (KPMR) membaik skornya dari 2.02 menjadi 2.00. Dari 10 jenis risiko inheren yang ada dalam konglomerasi keuangan BRI, terdapat beberapa risiko yang perlu dicermati yang berdampak pada meningkatnya risiko terintegrasi BRI yaitu: Risiko Likuiditas, Risiko kredit dan Risiko Operasional

### 17. Konsultasi Kredit Direksi Kepada Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memberikan pendapat terhadap setiap pemberian kredit yang memenuhi kriteria kredit yang harus dikonsultasikan Direksi kepada Dewan Komisaris sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Edaran Direksi Perseroan. Konsultasi kredit tersebut dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah terdapat putusan kredit oleh Direksi.

Apabila karena satu dan lain hal forum rapat konsultasi kredit tidak dilaksanakan, maka konsultasi kredit dapat dilakukan dengan media lainnya tanpa harus melalui forum rapat konsultasi kredit. Selama Tahun 2017 Dewan Komisaris telah melaksanakan konsultasi kredit sebanyak 4 kali kepada 17 Debitur dengan total exposure kredit lebih dari Rp 1 triliun.

### 18. Penelaahan Laporan Whistle Blower System (WBS)

Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah melakukan penelaahan terhadap Laporan WhistleBlower System (WBS) maupun pengaduan atau pelaporan tertulis yang diterima Dewan Komisaris. Pelaksanaan penelaahan Laporan WhistleBlower System (WBS) dilakukan secara bersamaan dengan evaluasi dan pembahasan Laporan Hasil Audit (LHA) triwulanan yang disampaikan SKAI kepada Dewan Komisaris.

Secara kumulatif, selama periode bulan Januari s/d. September 2017 total pengaduan/pelaporan yang diterima melalui WhistleBlower System (WBS) BRI sebanyak 65 laporan. Seluruh pengaduan/pelaporan tersebut telah ditindaklanjuti SKAI, baik melalui investigasi maupun penelitian dan tindak lanjut oleh unit kerja terkait sesuai kewenangannya, dengan rincian sebagai berikut:

- 30 laporan statusnya dapat dinyatakan "Selesai".
- 14 laporan masih "Dalam Proses" penelitian dan tindak lanjut oleh unit kerja terkait. Selama periode tahun 2017 tidak terdapat pengaduan atau pelaporan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan. Untuk pengaduan dan pelaporan tertulis lainnya yang diterima oleh Dewan Komisaris, setelah dilakukan penelaahan oleh Komite Audit selanjutnya dimintakan klarifikasi secara tertulis kepada Direksi/SKAI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, yaitu antara lain:
  - Permohonan banding pekerja BRI Kanca Bondowoso
  - Peninjauan kembali hukuman jabatan Sdr. Mangaratua P.H. Simanjuntak
  - Permasalahan tuntutan paguyuban pensiunan BRI
  - Pengaduan Sdr. Ahmad Idris, SE.
  - Sdri. Rachmawati Karandja (BRI Kanca Parigi),



## DEWAN KOMISARIS

- f. permohonan banding Sdr. Bakhtiar Wijaya
- g. Pengaduan nasabah an. Yusuf Efendi (BRI Kanca Tangerang)

### 19. Persetujuan atas Pemberian Kredit Kepada Pihak Terkait

Dewan Komisaris memberikan persetujuan dan pendapat terhadap fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan Anak atau Pihak Terkait lainnya dengan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Edaran Direksi Perseroan.

Realisasi persetujuan pemberian kredit kepada perusahaan anak atau pihak terkait lainnya adalah sebagai berikut:

No	Materi	Realisasi	Output
1	Persetujuan fasilitas SBLC kepada PT.BRI Multifinance Indonesia	26 April 2017	Surat Dewan Komisaris No: R. 18-KOM/04/2017 tanggal 26 April 2017 Persetujuan fasilitas SBLC kepada PT.BRI Multifinance Indonesia
2	Penyediaan dana kepada pihak terkait An. Jeffry J. Wurangian	09 Juni 2017	Surat Dewan Komisaris No: R. 30-KOM/06/2017 tanggal 09 Juni 2017 tentang Penyediaan dana kepada pihak terkait atas nama Bpk. Dr. Jeffry J Wurangian.
3	Persetujuan kredit kepada Perusahaan Anak/ Pihak Terkait, PT Bringin Srikandi Finance	16 Mei 2017	Nota Dinas KPMR No. B.12 - KPMR/05/2017, tgl 16 Mei 2017 tentang Persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait atas nama PT Bringin Srikandi Finance
4	Penyediaan dana kepada pihak terkait An. Sis Apik Wijayanto	23 Oktober 2017	Nota Dinas KPMR No.30 - KPMR/10/2017, tgl 23 Oktober 2017 tentang Persetujuan penyediaan dana pihak terkait atas nama Sis Apik Wijayanto
5	Penyediaan dana kepada pihak terkait An. A. Fuad Rahmany & Susi Liestiowati	19 Desember 2017	Surat Dewan Komisaris No: R.72-KOM/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penyediaan dana kepada pihak terkait atas nama Bpk. Dr. Jeffry J Wurangian.

### 20. Lain-lain

- a. Dewan Komisaris juga memberikan pendapat dan persetujuan terhadap tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan yang berlaku antara lain mencakup:
  - 1) Pernyataan Pendiri dalam Rangka Perubahan Peraturan Dana Pensiun Perseroan;
  - 2) Penunjukan Direksi dan Komisaris Perusahaan Anak;
  - 3) Pelepasan atau penjualan barang tidak bergerak milik Perseroan;
  - 4) Perbuatan untuk tidak menagih lagi baik seluruhnya atau sebagian terhadap piutang;
  - 5) Pengambilan bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perseroan atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang;
  - 6) Pelepasan sebagian atau seluruh penyertaan Perseroan dalam perseroan atau badan lain yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang;
  - 7) Kontrak manajemen untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) Tahun;
  - 8) Penetapan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi; dan Penetapan pengangkatan Kepala Satuan Kerja Audit Internal dan Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan.
- b. Dewan Komisaris menyusun *Action Plan* perihal Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, dengan poin-poin pengawasan sebagai berikut:
  - 1) Pemantauan kemajuan dan realisasi rencana penggunaan satelit Perseroan.
  - 2) Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit.

## DEWAN KOMISARIS

- 3) Peningkatan kualitas penerapan Manajemen Risiko secara terintegrasi.
- 4) Restrukturisasi Debitur Menengah dan Korporasi, penilaian terhadap efektivitas restrukturisasi, dan evaluasi rencana tindak lanjut Debitur Korporasi yang diperkirakan menurun kualitasnya.
- 5) Pemantauan pelaksanaan pengembangan jaringan kantor.

### Kunjungan Kerja Dewan Komisaris

#### 1. Wilayah Binaan Anggota Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas kebijakan Direksi, selain melalui berbagai rapat dengan Direksi maupun Divisi terkait, Dewan Komisaris juga melaksanakan kunjungan kerja ke Unit Kerja di wilayah untuk mengetahui secara langsung implementasi, kendala dan permasalahan di tingkat operasional. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengawasan, Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas wilayah binaan menjadi sebagai berikut:

No	Komisaris	Wilayah Binaan
1	Andrinof A. Chaniago	Bandar Lampung dan Padang
2	Gatot Trihargo	Jakarta 2 dan Jakarta 3
3	Mahmud	Pekanbaru dan Surabaya
4	A. Fuad Rahmany	Banda aceh dan Bandung
5	A. Sonny Keraf	Denpasar, Banjarmasin dan Jayapura
6	Vincentius Sonny Loho	Jakarta 1 dan Medan
7	Jeffry J. Wurangian	Makassar dan Manado
8	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Yogyakarta dan Palembang

#### 2. Lokasi Kunjungan Kerja Dewan Komisaris

Kunjungan kerja Dewan Komisaris dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman mengenai kegiatan operasional dan implementasi kebijakan Perseroan di unit kerja. Kegiatan operasional unit kerja yang dievaluasi pada pokoknya meliputi seluruh aktivitas atau kegiatan operasional di unit kerja yang bersangkutan, seperti perkreditan, pendanaan, layanan, sumber daya manusia, teknologi informasi dan aspek lainnya. Hasil kunjungan kerja dapat dijadikan sebagai bahan Dewan Komisaris dalam merumuskan rekomendasi penyempurnaan dan/atau dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan.

Kunjungan kerja Dewan Komisaris dilakukan dari tingkat Divisi, Wilayah sampai dengan tingkat paling kecil yaitu BRI Unit dan Teras BRI. Hasil kunjungan kerja telah dibuatkan laporan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kalender setelah kunjungan kerja tersebut dilaksanakan.



## DEWAN KOMISARIS

Dalam Tahun 2017, Dewan Komisaris telah mengunjungi Unit Kerja sebagai berikut:

Nama	Kantor Wilayah	Pelaksanaan	Laporan Hasil Kunjungan Kerja
A. Fuad Rahmany	Banda Aceh	23-24 Mei 2017	Nota Dinas Komisaris Nomor B.05-KOM/05/2017
	Banda Aceh	5-6 Oktober 2017	Nota Dinas Komisaris Nomor B.12-KOM/10/2017
	Bandung	29 November 2017	Nota Dinas Komisaris Nomor B.20-KOM/12/2017
Andrinof A Chaniago	Bandar Lampung	20-22 Agustus 2017	Nota Dinas Komisaris Nomor B.09-KOM/08/2017
	Padang	23-27 Agustus 2017	Nota Dinas Komisaris Nomor B.10-KOM/08/2017
	Malang	28-31 Oktober 2017	Nota Dinas Komisaris Nomor B.13-KOM/11/2017
	Makassar	23-24 November 2017	Nota Dinas Komisaris Nomor B.19-KOM/11/2017
Jeffry J. Wurangian	Manado	22-24 Maret 2017	Nota Dinas Komisaris Nomor B.03-KOM/04/2017
	Makassar	9-11 Agustus 2017	Nota Dinas Komisaris Nomor B.08-KOM/08/2017
	Manado	25-27 Oktober 2017	Nota Dinas Komisaris Nomor B.14-KOM/11/2017
Nicolaus TB Harjanto	Jakarta 2	14 Desember 2017	Nota Dinas Komisaris Nomor B.20-KOM/11/2017
	Palembang	14-16 September 2017	Nota Dinas Komisaris Nomor B.11-KOM/09/2017
	Yogyakarta	6-8 November 2017	Nota Dinas Komisaris Nomor B.16-KOM/11/2017
A. Sonny Keraf	Denpasar	5-8 April 2017	Nota Dinas Komisaris Nomor B.03-KOM/04/2017
	Jayapura	11-16 Juli 2017	Nota Dinas Komisaris Nomor B.06-KOM/07/2017
	Banjarmasin	8-12 Agustus 2017	Nota Dinas Komisaris Nomor B.07-KOM/08/2017
Mahmud	Surabaya	26-27 Oktober 2017	Nota Dinas Komisaris Nomor B.15-KOM/11/2017
	Pekanbaru	23-25 November 2017	Nota Dinas Komisaris Nomor B.18-KOM/11/2017
A. Sonny Loho	Denpasar	16-18 Maret 2017	Nota Dinas Komisaris Nomor B.02-KOM/03/2017
	Jakarta 1	23 dan 30 November 2017	Nota Dinas Komisaris Nomor B.21-KOM/12/2017

## KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya.

Komisaris Independen Perseroan senantiasa melepaskan diri dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) serta bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi.

### Kriteria Komisaris Independen

BRI telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang Komisaris Independen antara lain:

1. Jumlah Komisaris Independen Perseroan adalah 5 (lima) orang dari total 9 (sembilan) orang Dewan Komisaris. Jumlah tersebut sudah melebihi jumlah minimal 30% anggota Komisaris Independen sebagaimana ditentukan oleh POJK Nomor 55/POJK.03/2016.
2. Memenuhi kriteria Komisaris Independen sebagai berikut:
  - a. Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali BRI atau pun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
  - b. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga/ Perusahaan bukan keuangan, BUMN, BUMD, maupun Badan Usaha Milik Swasta.
  - c. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
  - d. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
  - e. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
3. Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
4. Diusulkan oleh Pemegang Saham dan dipilih dalam RUPS.
5. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya:
  - a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
  - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
  - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/ atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

### Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Masing-masing anggota Komisaris Independen BRI telah menandatangani Pernyataan Independensi sehubungan dengan Pengangkatannya sebagai Komisaris Independen yang di dokumentasikan oleh Sekretariat Dewan Komisaris sebagai bagian dari dokumen perusahaan.



KOMISARIS INDEPENDEN

**LEMBAGA PERSEKUTUAN INDEPENDEN KOMISARIS INDEPENDEN  
PT BANK RAKAT INDONESIA (PUBLIK) Tbk.**

---

**Anggota Komite Independen:**

1. **Bernard S. Dharma, Ketua Komite Independen**
2. **A. Firdausy, Anggota Komite Independen**
3. **Harold Samsul Hidayat**
4. **A. Nuryasa, Anggota Komite Independen**
5. **Rafael Rahan, Anggota Komite Independen**

**Anggota Komite Independen telah ada:**

1. **Memiliki sifat yang independen terhadap semua pihak yang terkait.**
2. **Dapat bertindak sebagai anggota Komite Independen, memiliki akses kepada informasi keuangan dan/atau informasi lainnya yang dapat mempengaruhi pemenuhan kewajiban kepada Pemegang Saham dan/atau kreditor yang dapat mempengaruhi pemenuhan kewajiban kepada pemegang saham dan/atau kreditor (termasuk informasi yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi yang tidak wajar).**
3. **Apabila diperlukan, telah ada prosedur untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi pemenuhan kewajiban kepada pemegang saham dan/atau kreditor.**

**Anggota Komite Independen telah dapat bertindak sebagai:**

(tanggal 15 Desember 2017)  
Komite Independen  
PT Bank Rakyat Indonesia (PUBLIK) Tbk.



**A. Firdausy**  
Anggota Komite Independen



**Bernard S. Dharma**  
Ketua Komite Independen



**Rafael Rahan**  
Anggota Komite Independen



**A. Nuryasa**  
Anggota Komite Independen



**Harold**  
Anggota Komite Independen

## DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang bertugas untuk mengelola Bank agar mencapai maksud dan tujuan perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### DASAR HUKUM DIREKSI

Direksi Perseroan diangkat dan menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Dewan Komisaris Badan usaha Milik negara.
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER\_01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya, Peraturan

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012.

4. Peraturan Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam akta Notaris No. 26 dan telah dicatat dalam sistem administrasi Badan Hukum sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

### KRITERIA, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

#### Kriteria (Persyaratan dan Masa Jabatan)

Direksi BRI wajib memenuhi persyaratan kriteria yang sama dengan Dewan Komisaris yaitu sebagai berikut:

Kualifikasi Umum	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dinyatakan pailit;</li> <li>b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau</li> <li>c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.</li> </ol> </li> <li>2. Memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Bank, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.</li> <li>3. Tidak memangku jabatan rangkap sebagai:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. anggota Direksi pada Badan usaha Milik negara, Badan usaha Milik daerah, badan usaha milik swasta;</li> <li>b. anggota Dewan Komisaris/dewan Pengawas pada Badan usaha Milik negara;</li> <li>c. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;</li> <li>d. Pengurus partai politik dan atau calon/anggota legislatif dan atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; dan atau</li> <li>e. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.</li> </ol> </li> <li>4. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan /atau anggota Dewan Komisaris Bank sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.</li> </ol>



## DIREKSI

<b>Persyaratan Integritas</b>	Dalam rangka memenuhi persyaratan integritas, calon anggota Direksi wajib memiliki: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akhlak dan moral yang baik;</li> <li>2. Komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>3. Komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat; dan</li> <li>4. Tidak termasuk dalam daftar Tidak lulus.</li> </ol>
<b>Pemenuhan PBI No. 12/23/2010 tentang Penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>)</b>	Mendapatkan predikat lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan (dahulu Bank Indonesia).
<b>Pemenuhan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank</b>	Anggota Direksi wajib memiliki: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya;</li> <li>2. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/ atau bidang keuangan; dan;</li> <li>3. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.</li> </ol>

## Pengangkatan & Pemberhentian Direksi

### Pengangkatan Anggota Direksi

Prosedur pengangkatan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Calon anggota Direksi yang telah memenuhi kualifikasi dan persyaratan kompetensi terlebih dahulu di evaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi BRI melalui penelurusan pengalaman profesional dan riwayat hidup. Hasil evaluasi Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk Nota Dinas Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Dewan Komisaris atas dasar rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan persetujuan atas calon anggota Direksi. Hasil putusan rapat Dewan Komisaris tersebut sekaligus menjadi dasar rekomendasi calon Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
3. Calon anggota Direksi kemudian diangkat melalui keputusan RUPS yang berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mengacu kepada POJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa

Keuangan. Penilaian OJK dilaksanakan melalui antara lain penelitian administratif dan wawancara. Dalam hal calon yang dimintakan persetujuan dan telah diangkat dalam RUPS dimaksud ternyata tidak disetujui oleh OJK, maka BRI melalui RUPS wajib memberhentikan yang bersangkutan.

### Pemberhentian Direksi

Masa jabatan seorang anggota Direksi berakhir apabila:

1. Meninggal dunia
2. Masa jabatannya berakhir
3. Diberhentikan dalam RUPS, disebabkan alasan yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan
4. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan
5. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan Anggaran Dasar BRI dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, termasuk rangkap jabatan yang dilarang, maupun pengunduran diri.

## DIREKSI

Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada BRI dan BRI wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

### Kebijakan Direktur Pengganti dan SEVP

Dalam kelancaran operasional perusahaan pada saat Direktur dan SEVP berhalangan hadir, BRI memiliki kebijakan Penetapan Direktur Pengganti yang tertuang dalam SK Direksi BRI No. S.20-DIR/CDS/05/2017. Kebijakan Direktur pengganti dan SEVP diatur sebagai berikut:

#### Direktur Pengganti

1. Direktur yang ditetapkan sebagai Direktur Pengganti pada prinsipnya memiliki kedekatan bidang tugas dengan Direktur yang digantikan.
2. Direktur Pengganti berlaku efektif apabila Direktur yang digantikan tidak ada atau berhalangan hadir karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, untuk jangka waktu tertentu sekurang-kurangnya 1 (satu) hari.
3. Direktur Utama Pengganti I adalah Wakil Direktur Utama.
4. Direktur Utama Pengganti II adalah 1 (satu) Direktur, kecuali Direktur Manajemen Risiko dan Direktur Kepatuhan, apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan hadir dengan tetap memperhatikan four eyes principle sebagaimana diatur dalam ketentuan Perusahaan tentang perkreditan.
5. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan hadir, maka tugasnya dapat dirangkap oleh Direktur Utama dan tidak diperlukan Berita Acara Serah Terima Jabatan.
6. Wakil Direktur Utama pengganti II adalah 1 (satu) Direktur, kecuali Direktur Manajemen Risiko dan Direktur Kepatuhan, apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan hadir.
7. Direktur Kepatuhan Pengganti harus memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum sebagai berikut:
  - a. Direktur lain, kecuali Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama.
  - b. Direktur Kepatuhan Pengganti dilarang membawahkan fungsi bisnis & operasional, manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha bank, treasury, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang & jasa, teknologi informasi dan audit intern.
  - c. Apabila Direktur Kepatuhan Pengganti membawahkan fungsi-fungsi pada butir 'b' Ayat ini, maka tugas utamanya digantikan oleh Direktur Pengganti.
8. Direktur Pengganti I ditetapkan apabila Direktur tidak ada atau berhalangan hadir.
9. Direktur Pengganti II ditetapkan apabila Direktur dan Direktur Pengganti I tidak ada atau berhalangan hadir.
10. Direktur Pengganti III ditetapkan apabila Direktur, Direktur Pengganti I dan Direktur Pengganti II tidak ada atau berhalangan hadir.
11. Dalam hal Direktur Pengganti I s.d III tidak ada atau berhalangan hadir atau terdapat tugas kedinasan lain yang tidak memungkinkan Direktur Pengganti I s.d III menjalankan tugas sebagai Direktur Pengganti, maka Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama berwenang untuk menunjuk Direktur lain, kecuali Direktur Kepatuhan, sebagai Direktur Pengganti.
12. Dalam hal Direktur Pengganti I s.d III, Direktur Utama serta Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan hadir, maka Direktur mana saja, kecuali Direktur Kepatuhan, dapat menjalankan tugas sebagai Direktur Pengganti.

#### SEVP Pengganti

1. Direktur yang ditetapkan sebagai Direktur yang mengambil alih tugas SEVP pada prinsipnya memiliki kedekatan bidang tugas dengan SEVP yang tugasnya diambil alih.
2. Pengambilalihan tugas SEVP berlaku efektif apabila SEVP tidak ada atau berhalangan hadir karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, untuk jangka waktu tertentu sekurang-kurangnya 1 (satu) hari.
3. Direktur I yang mengambil alih tugas SEVP ditetapkan apabila SEVP tidak ada atau berhalangan hadir.
4. Direktur II yang mengambil alih tugas SEVP ditetapkan apabila Direktur I yang mengambil alih tugas SEVP tidak ada atau berhalangan hadir.



## DIREKSI

5. Dalam hal Direktur I dan Direktur II yang mengambil alih tugas SEVP tidak ada atau berhalangan hadir atau terdapat tugas kedinasan lain yang tidak memungkinkan Direktur I dan Direktur II tersebut menjalankan tugas untuk mengambil alih tugas SEVP, maka Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama berwenang untuk menunjuk Direktur lain, kecuali Direktur Kepatuhan, sebagai Direktur yang mengambil alih tugas SEVP.
6. Dalam hal Direktur I dan Direktur II yang mengambil alih tugas SEVP dan Direktur Utama serta Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan hadir, maka Direktur mana saja, kecuali Direktur Kepatuhan, dapat mengambil alih tugas SEVP.

#### Dasar pengangkatan Direksi

Nama	Jabatan di BRI	Dasar Pengangkatan
Suprajarto	Direktur Utama	RUPST 2017 tanggal 15 Maret 2017
Priyastomo	Direktur Kredit Mikro dan Ritel	RUPST 2016 tanggal 23 Maret 2016
Kuswiyoto	Direktur Kredit Menengah, Korporasi dan BUMN	RUPSLB 2015 tanggal 12 Agustus 2015
Indra Utoyo	Direktur Digital Banking & Teknologi Informasi	RUPST 2017 tanggal 15 Maret 2017
Mohammad Irfan	Direktur Jaringan dan Layanan	RUPST 2015 tanggal 19 Maret 2015
Haru Koesmahargyo	Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan	RUPST 2015 tanggal 19 Maret 2015
Susy Liestiowaty	Direktur Kepatuhan	RUPST 2015 tanggal 19 Maret 2015
Donsuwan Simatupang	Direktur Manajemen Risiko	RUPST 2015 tanggal 19 Maret 2015
Sis Apik Wijayanto	Direktur Hubungan Kelembagaan	RUPST 2016 tanggal 23 Maret 2016
Handayani	Direktur Konsumer	RUPSLB 2017 tanggal 18 Oktober 2017
R. Sophia Alizsa	Direktur <i>Human Capital</i>	RUPSLB 2017 tanggal 18 Oktober 2017

## PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Anggota Direksi sebagai berikut:

Nama	Jabatan di BRI	Tgl Efektif Berdasarkan Surat OJK	Pelaksana	Lulus
Suprajarto	Direktur Utama	SR-70/PB.12/2017 tanggal 03 Mei 2017	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Priyastomo	Direktur Kredit Mikro dan Ritel	SR-105/D.03/2016 tanggal 21 Juni 2016	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Kuswiyoto	Direktur Kredit Menengah, Korporasi dan BUMN	SR-207/D.03/2015 tanggal 4 Nov 2015	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Indra Utoyo	Direktur Digital Banking & Teknologi Informasi	SR-123/PB.12/2017 tanggal 12 Juli 2017	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Mohammad Irfan	Direktur Jaringan dan Layanan	SR-100/d.03/2015 tanggal 01 Juni 2015	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Haru Koesmahargyo	Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan	SR-109/D.03/2015 tanggal 08 Juni 2015	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Susy Liestiowaty	Direktur Kepatuhan	SR-108/D.03/2015 tanggal 08 Juni 2015	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Donsuwan Simatupang	Direktur Manajemen Risiko	SR-101/D.03/2015 tanggal 01 Juni 2015	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus

## DIREKSI

Nama	Jabatan di BRI	Tgl Efektif Berdasarkan Surat OJK	Pelaksana	Lulus
Sis Apik Wijayanto	Direktur Hubungan Kelembagaan	SR-85/D.03/2016 tanggal 20 Mei 2016	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Handayani	Direktur Konsumer	Masih menunggu hasil	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
R. Sophia Alizsa	Direktur <i>Human Capital</i>	Masih menunggu hasil	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus

### Pedoman dan Tata Tertib Direksi – BOD Charter

Perseroan telah memiliki Pedoman dan tata tertib kerja Direksi (Board Charter) Nokep 801-DIR/SKP/11/2015 tanggal 11 November 2015.

Board Charter berisi tentang aturan dan panduan tentang tata kerja Direksi dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai visi dan misi yang ingin dicapai oleh Perseroan.

Board Charter berisi antara lain:

1. Ketentuan umum jabatan anggota Direksi
2. Tugas dan tanggung jawab Direksi
3. Wewenang dan kewajiban Direksi
4. Nilai-nilai perusahaan
5. Etika kerja Direksi
6. Waktu kerja Direksi
7. Rapat Direksi
8. Struktur Keanggotaan Direksi
9. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Direksi

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal untuk mengelola Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam maupun di luar urusan pengadilan. Direksi berkewajiban mendahulukan kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.

#### Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

##### Tanggung Jawab kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

- a. Melaksanakan keputusan RUPS.
- b. Menyusun Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) dan rencana kerja

- lainnya serta perubahannya untuk disampaikan guna mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris
- c. Menyelenggarakan RUPS berdasarkan permintaan tertulis dari satu atau lebih pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah.
  - d. Membuat dan memelihara daftar pemegang saham dan daftar khusus yang berisi daftar kepemilikan saham yang dimiliki oleh Komisaris dan Direksi termasuk keluarga mereka dalam Bank dan di perusahaan lain.
  - e. Mengkonsultasikan pemberian kredit diatas jumlah tertentu kepada Dewan Komisaris dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
  - f. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

##### Tanggung Jawab Akuntansi dan Laporan Tahunan

- a. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Bank sesuai dengan praktek yang umum berlaku bagi perusahaan.
- b. Memastikan sistem akuntansi Bank telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama dalam hal pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan keuangan.
- c. Menyiapkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan berkala.

##### Tanggung Jawab atas Manajemen Risiko

- a. Memastikan kecukupan proses dan sistem untuk mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank.
- b. Memonitor dan menilai adanya proses manajemen yang baik untuk menilai kecukupan sistem



## DIREKSI

- manajemen risiko dan pengendalian intern, pelaporan keuangan dan kepatuhan.
- c. Memastikan adanya suatu sistem pengendalian yang efektif untuk menjamin keandalan dan integritas informasi, kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, peraturan dan undang-undang yang berlaku, penjagaan atas harta kekayaan Bank, penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien, serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk operasional.

#### Tanggung Jawab Terkait Organisasi

Membuat struktur organisasi, tugas dan menetapkan tanggung jawab yang jelas termasuk pengangkatan manajemen.

#### Wewenang

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, Direksi memiliki kewenangan dibawah ini sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan:

1. Menetapkan Kebijakan yang sesuai dengan pengelolaan Perseroan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada orang dan/atau badan lain;
3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiunan, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Perusahaan.
6. Menghapusbukkan piutang macet yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
7. Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos-ongkos dan piutang lainnya diluar pokok yang dilakukan dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan.
8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak

lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

#### Kewajiban

Direksi berkewajiban untuk:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan Rencana Kerja lainnya serta Perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
3. Membuat daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat RUPS dan Risalah Rapat Direksi.
4. Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan.
5. Menyusun Laporan Keuangan pada butir 4 diatas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
6. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan.
7. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
8. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lainnya.
10. Menyimpan ditempat kedudukan Perseroan; Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat

## DIREKSI

- Direksi, Laporan Tahunan dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lainnya.
11. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan.
  12. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
  13. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan dibidang pasar modal yang berlaku.
  14. Menyiapkan susunan organisasi perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
  15. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan atau yang diminta Anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan dibidang pasar modal yang berlaku.
  16. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  17. Bersama dengan Dewan Komisaris menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  18. Bersama dengan Dewan Komisaris menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, Karyawan/Pegawai, serta organ yang dimiliki oleh Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  19. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan pengabdianya secara penuh kepada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perseroan.
  20. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
  21. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.
  22. Setiap anggota Direksi wajib mengungkapkan:
    - a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank tempat yang bersangkutan maupun pada Bank atau perusahaan lain, yang berkedudukan didalam dan diluar negeri.
    - b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Bank.

### Etika Kerja

1. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan serta reputasi perseroan maupun anak perusahaannya.
2. Anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
3. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:
  - a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta.
  - b. Anggota Dewan Komisaris/ dewan pengawas pada Badan Usaha Milik Negara.
  - c. Jabatan structural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan atau daerah.
  - d. Pengurus partai politik dan atau calon/ anggota legislative dan atau calon kepala daerah/ wakil kepala daerah.
  - e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank dan/atau pada perusahaan lain.



## DIREKSI

5. Anggota Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa professional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. proyek bersifat khusus.
  - b. didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya.
  - c. konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada poin 1.
6. Anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris
7. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
8. Anggota Direksi wajib tunduk pada Kode Etik Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan internal Perseroan.

## RUANG LINGKUP PEKERJAAN MASING-MASING DIREKSI

Mengacu kepada Anggaran Dasar, pembagian tugas Direksi BRI dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nokep.802-DIR/REN/08/2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang bertujuan untuk memastikan agar fungsi pengelolaan Perseroan lebih efektif dan efisien. Pembagian tugas Direksi adalah sebagai berikut:

Nama dan Jabatan	Tugas	Kantor Wilayah Binaan	Perusahaan Anak Binaan
Suprajarto Direktur Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Kerja Jangka Panjang (<i>Corporate Plan</i>), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank), dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Perubahannya sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja perusahaan.</li> <li>2. Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target Perusahaan.</li> <li>3. Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan.</li> <li>4. Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal.</li> <li>5. Menjalankan fungsi pembinaan terhadap anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian target kinerja Perusahaan.</li> </ol>	-	Seluruh Perusahaan Anak
Haru Koesmahargyo Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Kerja Jangka Panjang (<i>Corporate Plan</i>), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank), dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Perubahannya sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja perusahaan.</li> <li>2. Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target Perusahaan di Direktorat Strategi Bisnis dan Keuangan.</li> <li>3. Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan.</li> <li>4. Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal.</li> <li>5. Menjalankan fungsi Direktur Pengganti untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Direksi.</li> <li>6. Menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama antar anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian target Kinerja Perusahaan.</li> </ol>	Jakarta 2	Seluruh Perusahaan Anak

Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

## DIREKSI

Nama dan Jabatan	Tugas	Kantor Wilayah Binaan	Perusahaan Anak Binaan
Susy Liestiowaty Direktur Kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Kerja Jangka Panjang (<i>Corporate Plan</i>), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank), dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahannya.</li> <li>Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target Perusahaan di Direktorat Kepatuhan.</li> <li>Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan.</li> <li>Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal.</li> <li>Menjalankan fungsi Direktur Pengganti untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Direksi.</li> <li>Menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama antar anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian target Kinerja Perusahaan.</li> </ol>	Bandar Lampung Jakarta 3	-
Donsuwan Simatupang Direktur Manajemen Risiko	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Kerja Jangka Panjang (<i>Corporate Plan</i>), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank), dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahannya.</li> <li>Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target pengelolaan Perusahaan di Direktorat Manajemen Risiko</li> <li>Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan.</li> <li>Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal.</li> <li>Menjalankan fungsi Direktur Pengganti untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Direksi.</li> <li>Menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama antar anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian target Kinerja Perusahaan.</li> </ol>	Medan Manado	-
Mohammad Irfan Direktur Jaringan & Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Kerja Jangka Panjang (<i>Corporate Plan</i>), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank), dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Perubahannya sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja perusahaan.</li> <li>Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target Perusahaan di Direktorat Jaringan dan Layanan.</li> <li>Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan.</li> <li>Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal.</li> <li>Menjalankan fungsi Direktur Pengganti untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Direksi.</li> <li>Menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama antar anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian target Kinerja Perusahaan.</li> </ol>	Semarang Surabaya	-



## DIREKSI

Nama dan Jabatan	Tugas	Kantor Wilayah Binaan	Perusahaan Anak Binaan
Kuswiyoto Direktur Kredit Menengah, Korporasi dan BUMN	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Kerja Jangka Panjang (<i>Corporate Plan</i>), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank), dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahannya sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja perusahaan.</li> <li>Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target Perusahaan di Direktorat Menengah, Korporasi dan BUMN.</li> <li>Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan.</li> <li>Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal.</li> <li>Menjalankan fungsi Direktur Pengganti untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Direksi.</li> <li>Menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama antar anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian target Kinerja Perusahaan.</li> </ol>	Malang	BRI Agro
Handayani Direktur Konsumer	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Kerja Jangka Panjang (<i>Corporate Plan</i>), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank), dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahannya sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja perusahaan.</li> <li>Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target Perusahaan Direktorat Konsumer.</li> <li>Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan.</li> <li>Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal.</li> <li>Menjalankan fungsi Direktur Pengganti untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Direksi.</li> <li>Menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama antar anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian target Kinerja Perusahaan.</li> </ol>	KCK	BRI Finance
Priyastomo Direktur Kredit Mikro dan Ritel	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Kerja Jangka Panjang (<i>Corporate Plan</i>), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank), dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahannya sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja perusahaan.</li> <li>Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target Perusahaan Direktorat Kredit Mikro dan Ritel.</li> <li>Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan.</li> <li>Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal terkait Direktorat Bisnis UMKM.</li> <li>Menjalankan fungsi Direktur Pengganti untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Direksi.</li> <li>Menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama antar anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian target Kinerja Perusahaan.</li> </ol>	Yogyakarta	BRI Life

Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

## DIREKSI

Nama dan Jabatan	Tugas	Kantor Wilayah Binaan	Perusahaan Anak Binaan
Sis Apik Wiyanto Direktur Hubungan Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Kerja Jangka Panjang (<i>Corporate Plan</i>), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank), dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Perubahannya sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja perusahaan.</li> <li>Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target Perusahaan di Direktorat Hubungan Kelembagaan.</li> <li>Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan.</li> <li>Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal.</li> <li>Menjalankan fungsi Direktur Pengganti untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Direksi.</li> <li>Menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama antar anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian target Kinerja Perusahaan.</li> </ol>	Jakarta 1 Bandung	-
R.Sophia Alizsa Direktur Human Capital	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Kerja Jangka Panjang (<i>Corporate Plan</i>), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank), dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Perubahannya sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja perusahaan.</li> <li>Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target Perusahaan di Direktorat <i>Human Capital</i>.</li> <li>Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan.</li> <li>Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal.</li> <li>Menjalankan fungsi Direktur Pengganti untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Direksi.</li> <li>Menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama antar anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian target Kinerja Perusahaan.</li> </ol>	Palembang	BRI Syariah
Indra Utoyo Direktur Digital Banking & Teknologi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Kerja Jangka Panjang (<i>Corporate Plan</i>), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank), dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahannya.</li> <li>Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target Perusahaan di Direktorat Digital Banking dan Teknologi Informasi.</li> <li>Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan.</li> <li>Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal.</li> <li>Menjalankan fungsi Direktur Pengganti untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Direksi.</li> <li>Menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama antar anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian target Kinerja Perusahaan.</li> </ol>	-	-



## DIREKSI

Nama dan Jabatan	Tugas	Kantor Wilayah Binaan	Perusahaan Anak Binaan
Hexana Tri Sasongko SEVP Treasury & Global Service	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Kerja Jangka Panjang (<i>Corporate Plan</i>), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank), dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahannya.</li> <li>Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target Perusahaan di segmen Bisnis Treasury, Investment Services dan Bisnis Internasional.</li> <li>Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan.</li> <li>Mengarahkan pengembangan bisnis Unit Kerja Luar Negeri, Perusahaan Anak dan Kantor Wilayah binaannya.</li> <li>Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal.</li> </ol>	Pekanbaru	BRI Remittance
Supari SEVP Transformation	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Kerja Jangka Panjang (<i>Corporate Plan</i>), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank), dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahannya.</li> <li>Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target pengelolaan Corporate Transformation dan Project Management Office.</li> <li>Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan.</li> <li>Mengarahkan pengembangan bisnis Kantor Wilayah binaannya.</li> <li>Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal.</li> </ol>	Banda Aceh	-
Agus Noorsanto*) SEVP Operation	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Kerja Jangka Panjang (<i>Corporate Plan</i>), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank), dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahannya.</li> <li>Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target pengelolaan Sentra Operasi dan Operasional Kredit.</li> <li>Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan.</li> <li>Mengarahkan pengembangan bisnis Kantor Wilayah binaannya.</li> <li>Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal.</li> </ol>	Jayapura	-

\*) Efektif 1 Januari 2016 - 5 Januari 2018

## DIREKSI

Nama dan Jabatan	Tugas	Kantor Wilayah Binaan	Perusahaan Anak Binaan
Gunawan Sulisty SEVP Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Kerja Jangka Panjang (<i>Corporate Plan</i>), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank), dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahannya.</li> <li>Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target pengelolaan Manajemen Aktiva Tetap &amp; Pengadaan;</li> <li>Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan.</li> <li>Mengarahkan pengembangan bisnis Kantor Wilayah binaannya.</li> <li>Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal.</li> </ol>	Padang	-

## PELAKSANAAN KINERJA KOMITE DIBAWAH DIREKSI

Perseroan memiliki komite-komite yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direksi untuk membantu fungsi pengelolaan Perseroan. Berdasarkan hasil kinerja dan kontribusi masing-masing komite kepada Perseroan, Direksi menilai bahwa seluruh Komite telah melaksanakan tugasnya dengan optimal. Adapun hasil kinerja signifikan dari masing-masing komite dapat dilihat pada sub bab Komite Dibawah Direksi.

## KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DIREKSI

Nama	Jabatan	Usia (th)	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kedirektoran/ Pemimpin Lembaga Eksekutif		Keahlian
					Periode	Jabatan	
Asmawi Syam*)	Direktur Utama	62	Pria	S1 Ekonomi	1999 -	Pemimpin Wilayah	· <i>Banking</i>
				Perusahaan	2001	Denpasar	· <i>Certified</i>
				Universitas	2001 -	Pemimpin Wilayah	<i>Wealth</i>
				Hasanuddin	2003	Bandung	<i>Management</i>
				S2 Ekoomi	2003 -	Kepala Divisi <i>Consumer</i>	· <i>Leadership</i>
				Perusahaan	2005	<i>Banking</i>	
				Universitas	2005 -	Kepala Divisi Bisnis Umum	
				Padjadjaran	2007	Direktur Bisnis	
					2007 -	Kelembagaan dan BUMN	
					2015	Direktur Utama BRI	
	2015 -						
	2017						



## DIREKSI

Nama	Jabatan	Usia (th)	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kedirektoran/ Pemimpin Lembaga Eksekutif		Keahlian
					Periode	Jabatan	
Suprajarto	Direktur Utama	61	Pria	S1 Ekonomi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Yogyakarta S2 Manajemen Pemasaran, Universitas Padjadjaran S3 Manajemen Bisnis, Universitas Padjadjaran	2007 - 2015 2015 - 2017 2017 - sekarang	Direktur Bidang Jaringan dan Layanan BRI Wakil Direktur Utama BNI Direktur Utama BRI	
Sunarso**)	Wakil Direktur Utama	54	Pria	S1 Pertanian, Institute Pertanian Bogor S2 Administrasi Bisnis Universitas Indonesia	2007 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2015 2015 - sekarang	Senior Executive Vice President Plantation Specialist Bank Mandiri Executive Vice President Agrobased Group, Bank Mandiri Direktur Commercial & Business Banking, Bank Mandiri Wakil Direktur BRI	· Agrofiancing · Corporate, Commercial & SME Banking · Public Speaker & Motivation · Leadership
Randi Anto**)	Direktur Human Capital Dan Asset Management	57	Pria	S1 Ekonomi Universitas Diponegoro S2 Banking, St. Louis University	2004 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2009 2009 - 2011 2011 - 2015 2015 - 2017	Kepala Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRI Kepala Divisi Administrasi Kredit BRI Pemimpin Wilayah BRI Palembang Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia BRI Direktur Kepatuhan BRI Direktur Human Capital & Asset Management	· Compliance · Human Capital · Certified Wealth Management
Muhammad Irfan	Direktur Jaringan dan Layanan	58	Pria	S1 Perikanan Institut Pertanian Bogor S2 Manajemen Keuangan LPMM		Kepala Divisi Teknologi dan Sistem Informasi BRI Pemimpin Wilayah BRI Padang Pemimpin Wilayah BRI Jakarta 1 Direktur Mikro BRI Direktur Jaringan dan Layanan BRI	· Microbanking · Regional Banking · Information Technology Management & Application

## DIREKSI

Nama	Jabatan	Usia (th)	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kedirektoran/ Pemimpin Lembaga Eksekutif		Keahlian
					Periode	Jabatan	
Zulhelfi Abidin*)	Direktur Operasional	55	Pria	S1 Teknik Informatika S2 MSc, University of Wologong	1997 - 2007	Kepala Divisi Teknologi Sistem Informasi Bank Bukopin	· <i>Certified Information System for Auditor (CISA)</i>
					2006 - 2012	Komisaris Utama PT Brigrin Gigantara	
					2007 - 2014	Kepala Divisi Teknologi Sistem Informasi BRI	
					2012 - 2015	Komisaris BRI Syariah <i>Senior Executive Vice President</i> BRI	
					2014 - 2015	Direktur Operasional BRI	
					2015 - 2017		
					2017 - sekarang		
Susy Liestiwaty	Direktur Kepatuhan	57	Wanita	S1 Agronomi Institut Pertanian Bogor S2 MBA, Management - Universitas CaseWestern Reserve, USA S3 Doktor, Institut Pertanian Bogor	2006 - 2009	Kepala <i>Desk</i> , Bidang <i>Investment Banking</i> BRI	· <i>Microbanking</i> · <i>Regional Banking</i>
					2009 - 2010	Kepala Divisi Agribisnis BRI Kepala Divisi Analisis Risiko Kredit	
					2010 - 2015	Komisaris BRI Agroniaga	
					2011 - 2015	Direktur Manajemen Risiko Kredit	
					2015 - 2017	Direktur Kepatuhan	
					2017 - sekarang		
					2017 - sekarang		
Donsuwan Simatupang	Direktur Manajemen Risiko	56	Pria	S1 Ekonomi Perusahaan, Universitas Parahyangan S2 Investment Banking, Virginia Tech	2010 - 2012	Pemimpin Wilayah Bri Medan	· <i>Commercial Banking</i> · <i>Marketing Regional Banking</i>
					2012 - 2013	Pemimpin Wilayah Bri Surabaya	
					2013 - 2015	Kepala Divisi Bisnis Umum Direktur Komersil	
					2015 - 2017	Direktur Manajemen Risiko	
					2017 - sekarang		
					2017 - sekarang		
					2017 - sekarang		



## DIREKSI

Nama	Jabatan	Usia (th)	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kedirektoran/ Pemimpin Lembaga Eksekutif		Keahlian
					Periode	Jabatan	
Haru Koesmahargyo	Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan	51	Pria	S1 Teknik Industri Pertanian, Universitas Brawijaya S2 Investment Banking, Emory University	2008 - 2011	Kepala <i>Desk</i> Hubungan Investor Divisi Sekretariat Perusahaan BRI	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Risk Management</li> <li>· Asset &amp; Liability Management</li> <li>· Treasury</li> <li>· Corporate Valuation</li> <li>· MEA and International Banking</li> </ul>
					2011 - 2014	<i>General Manager</i> , Kantor Cabang Luar Negeri New York	
					2014 - 2015	Kepala Divisi <i>Treasury</i> BRI	
					2014 - 2015	Presiden Komisaris PT BTMU-BRI Finance	
					2015 - 2017	Direktur Keuangan BRI	
					2017 - sekarang	Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan	
Kuswiyoto	Direktur Kredit Menengah, Korporasi, dan BUMN	52	Pria	S1 Ekonomi, Universitas Airlangga S2 MBA Finance, Washington University	2010 - 2014	Kepala Divisi Agribisnis BRI Komisaris PT Brigin	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Corporate Banking</li> <li>· Marketing</li> <li>· Regional Banking</li> </ul>
					2013 - 2014	Indotama Sejahtera Finance	
					2014 - 2015	Pemimpin Wilayah BRI Makassar	
					2015 - 2015	Pemimpin Wilayah BRI Jakarta 1	
					2017 - sekarang	Direktur Kelembagaan BRI	
						Direktur Kredit Menengah, Korporasi, dan BUMN	
Sis Apik Wijayanto	Direktur Hubungan Kelembagaan	56	Pria	S1 Administrasi Niaga, Universitas Brawijaya S2 Manajemen, Universitas Airlangga	2012 - 2014	Pemimpin Cabang Khusus BRI	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Marketing</li> <li>· Consumer Banking</li> <li>· Economic</li> </ul>
					2014 - 2015	Pemimpin Wilayah BRI Banjarmasin	
					2015 - 2016	Pemimpin Wilayah Jakarta 2	
					2015 - 2016	Direktur Funding & Distribution, Bank Tabungan Negara (Persero)	
					2016 - 2017	Direktur Konsumer BRI	
					2017 - sekarang	Direktur Hubungan Kelembagaan	

## DIREKSI

Nama	Jabatan	Usia (th)	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kedirektoran/ Pemimpin Lembaga Eksekutif		Keahlian
					Periode	Jabatan	
Priyastomo	Direktur Kredit Mikro dan Ritel	54	Pria	S1 Peternakan, Universitas Gadjah Mada S2 Manajemen Internasional, Universitas Gadjah Mada	2012 - 2014	Pemimpin Wilayah BRI Jayapura	· Compliance · Risk Mitigation
					2014 - 2015	Kepala Divisi Bisnis Ritel dan Menengah	
					2015 - 2014	Pemimpin Wilayah BRI Yogyakarta	
					2014 - 2015	Komisaris PT Asuransi Bringin Sejahtera	
					2016	Artamakmur	
					2016 - 2017	Pemimpin Wilayah BRI Bandung	
					2017 - sekarang	Direktur Kepatuhan BRI Direktur Kredit Mikro dan Ritel BRI	
					Indra Utoyo	Direktur Digital Banking dan Teknologi Informasi	
2016 - 2017	Direktur Digital & Strategic Portofolio Telkom Group, PT Telkom						
2017 - sekarang	Direktur Digital Banking dan Teknologi Informasi						
2011 - 2014	Kepala Divisi, Jaringan Kerja Bisnis Ritel BRI						
2015 - 2017	Pemimpin Cabang Khusus, Kantor Cabang Khusus BRI Direktur Operasional dan Jaringan, Perum Jamkrindo						
R Sophia Alizsa	Direktur Human Capital	58	Wanita	S1 Ekonomi, Universitas Jember S2 Magister Manajemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor	2017 - sekarang	Direktur Human Capital BRI	
					2013 - 2014	Direktur Marketing & Alternate Distribution, PT AXA Mandiri	
					2014 - 2016	Direktur Komersial, PT Garuda Indonesia Tbk	
Handayani	Direktur Konsumer	52	Wanita	S1 Kedokteran Gigi, universitas Airlangga S2 Magister Manajemen, Universitas Padjadjaran	2016 - 2017	Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
					2017 - sekarang	Direktur Konsumer BRI	
					2016 - 2017	Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
					2017 - sekarang	Direktur Konsumer BRI	



## DIREKSI

## KOMPOSISI DIREKSI DAN PERUBAHAN TAHUN 2017

Selama tahun 2017, terdapat perubahan komposisi Direksi dengan rincian sebagai berikut:

## Periode 01 Januari 2017-15 Maret 2017 (Sebelum RUPST Tahun 2017)

No	Jabatan	Nama
1	Direktur Utama	Asmawi Syam
2	Wakil Direktur Utama	Sunarso
3	Direktur Keuangan	Haru Koesmahargyo
4	Direktur Manajemen Risiko Kredit	Susy Liestiowaty
5	Direktur Konsumer	Sis Apik Wijayanto
6	Direktur Komersil	Donsuwan Simatupang
7	Direktur <i>Human Capital</i> & Manajemen Asset	Randi Anto
8	Direktur Operasional	Zulhelfi Abidin
9	Direktur Mikro	Mohammad Irfan
10	Direktur Kepatuhan	Priyastomo
11	Direktur Kelembagaan	Kuswiyoto

## Periode 15 Maret 2017-18 Oktober 2017 (Setelah RUPST Tahun 2017)

No	Jabatan	Nama
1	Direktur Utama	Suprajarto
2	Wakil Direktur Utama	Sunarso
3	Direktur Keuangan	Haru Koesmahargyo
4	Direktur Manajemen Risiko Kredit	Susy Liestiowaty
5	Direktur Konsumer	Sis Apik Wijayanto
6	Direktur Komersil	Donsuwan Simatupang
7	Direktur <i>Human Capital</i> & Manajemen Asset	Randi Anto
8	Direktur Operasional	Indra Utoyo
9	Direktur Mikro	Mohammad Irfan
10	Direktur Kepatuhan	Priyastomo
11	Direktur Kelembagaan	Kuswiyoto

## Periode 18 Oktober 2017 – 31 Desember 2017 (Setelah RUPSLB Tahun 2017)

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Suprajarto	Direktur Utama	RUPST 2017 – RUPST 2022
2	Priyastomo	Direktur Kredit Mikro dan Ritel	RUPST 2017 – RUPST 2022
3	Kuswiyoto	Direktur Kredit Menengah, Korporasi dan BUMN	RUPST 2017 – RUPST 2022
4	Indra Utoyo	Direktur Digital Banking & Teknologi Informasi	RUPST 2017 – RUPST 2022
5	Mohammad Irfan	Direktur Jaringan dan Layanan	RUPST 2015 – RUPST 2020
6	Haru Koesmahargyo	Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan	RUPST 2015 – RUPST 2020
7	Susy Liestiowaty	Direktur Kepatuhan	RUPST 2015 – RUPST 2020
8	Donsuwan Simatupang	Direktur Manajemen Risiko	RUPST 2015 – RUPST 2020
9	Sis Apik Wijayanto	Direktur Hubungan Kelembagaan	RUPST 2015 – RUPST 2020
10	Handayani	Direktur Konsumer	RUPST 2017 – RUPST 2022
11	R. Sophia Alizsa	Direktur <i>Human Capital</i>	RUPST 2017 – RUPST 2022

## DIREKSI

## INDEPENDENSI DIREKSI

Independensi Direksi diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Direksi (Board Charter). Dalam menjalankan tugas pengelolaan Peseroan, Direksi wajib mengedepankan kepentingan Peseroan diatas kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu serta menghindari potensi benturan kepentingan. Keputusan yang dibuat oleh Direksi tersebut wajib terlepas dari tekanan atau intervensi pihak manapun.

BRI memastikan adanya independensi Direksi melalui Direktur Utama yang merupakan pihak independen, tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham pengendali maupun dengan anggota Direksi serta Dewan Komisaris dan tidak memiliki jabatan rangkap diluar BRI.

## HUBUNGAN AFILIASI

Nama	Hubungan Keuangan			Hubungan Keluarga			Hubungan Kepengurusan		
	BOD	BOC	Pemegang Saham Pengendali	BOD	BOC	Pemegang Saham Pengendali	BOD	BOC	Pemegang Saham Pengendali
Suprajarto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Priyastomo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuswiyoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indra Utoyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mohammad Irfan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Haru Koesmahargyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Susy Liestiowaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donsuwan Simatupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sis Apik Wijayanto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Handayani	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R. Sophia Alizza	-	-	-	-	-	-	-	-	-

keterangan:

√ : Ya  
- : Tidak

## PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN DIREKSI

Sesuai dengan persyaratan kriteria, anggota Direksi BRI tidak memiliki Rangkap Jabatan sebagai/ pada:

1. Anggota Direksi pada Badan usaha Milik negara, Badan usaha Milik daerah, badan usaha milik swasta;
2. Anggota Dewan Komisaris/dewan Pengawas pada Badan usaha Milik negara;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;
4. Pengurus partai politik dan atau calon/anggota legislatif dan atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; dan atau
5. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu Direksi BRI juga telah memenuhi ketentuan Rangkap Jabatan sebagaimana terdapat pada Peraturan Bank Indonesia No 8/14/ PBI/2006.



## DIREKSI

Pengungkapan Rangkap Jabatan oleh Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di BRI	Jabatan di Bank Lain	Jabatan di Perusahaan /Lembaga Lain
Suprajarto	Direktur Utama	-	-
Priyastomo	Direktur Kredit Mikro dan Ritel	-	-
Kuswiyoto	Direktur Kredit Menengah, Korporasi dan BUMN	-	-
Indra Utoyo	Direktur Digital Banking & Teknologi Informasi	-	-
Mohammad Irfan	Direktur Jaringan dan Layanan	-	-
Haru Koesmahargyo	Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan	-	-
Susy Liestiowaty	Direktur Kepatuhan	-	-
Donsuwan Simatupang	Direktur Manajemen Risiko	-	-
Sis Apik Wijayanto	Direktur Hubungan Kelembagaan	-	-
Handayani	Direktur Konsumer	-	-
R. Sophia Alizsa	Direktur <i>Human Capital</i>	-	-

## KEPEMILIKAN SAHAM OLEH ANGGOTA DIREKSI

Pengungkapan kepemilikan saham oleh Anggota Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 dengan rincian sebagai berikut.

Nama	Kepemilikan Saham (Lembar)			
	31 Januari 2017	Prosentase	31 Desember 2017	Prosentase
Suprajarto	-	-	-	-
Priyastomo	-	-	-	-
Kuswiyoto	-	-	-	-
Indra Utoyo	-	-	-	-
Mohammad Irfan	34.000	0,0001378	170.000	0,0001378
Haru Koesmahargyo	-	-	-	-
Susy Liestiowaty	580.000	0,0023511	2.900.000	0,0023511
Donsuwan Simatupang	28.500	0,0001155	142.500	0,0001155
Sis Apik Wijayanto	140.000	0,0005675	700.000	0,0005675
Handayani	-	-	-	-
R. Sophia Alizsa	-	-	25.000	0,0000203

\*) Lembar saham sebelum pemecahan nilai nominal saham (stock split)

\*\*) Lembar saham setelah pemecahan nilai nominal saham (stock split) dengan rasio 1: 5

## DIREKSI

## PENGUNGKAPAN TRANSAKSI SAHAM OLEH DIREKSI TAHUN 2017

Selama tahun 2017, transaksi saham yang dilakukan oleh Direksi dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Transaksi Saham (Lembar)	
	Jumlah	Rp
Suprajarto	-	-
Priyastomo	-	-
Kuswiyoto	-	-
Indra Utoyo	-	-
Mohammad Irfan	34.000	533.800.000
Haru Koesmahargyo	-	-
Susy Liestiowaty	-	-
Donsuwan Simatupang	27.000	423.900.000
Sis Apik Wijayanto	-	-
Handayani	-	-
R. Sophia Aliza	-	-

## PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Masing-masing anggota Direksi Perseroan yang memiliki benturan kepentingan dalam transaksi dan/atau aksi korporasi Perseroan wajib menyatakan benturan kepentingan dan dirinya tidak dapat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan terkait transaksi dan/atau aksi korporasi tersebut.

Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Komisaris Independen dan pemegang saham independen sebelum transaksi tersebut dilaksanakan.

Pada tahun 2017 tidak terdapat transaksi atau aksi korporasi BRI yang mengandung benturan kepentingan

## PROGRAM ORIENTASI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Sama halnya dengan Program Orientasi untuk setiap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi Perseroan yang baru wajib mengikuti Program Orientasi yang diselenggarakan oleh Sekretaris Perusahaan. Program Orientasi dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit kerja perusahaan serta pengkajian dokumen atau program lainnya dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Visi, misi dan strategy Perseroan.
2. Prinsip-prinsip GCG di dalam Perseroan.
3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
4. Pengenalan organ – organ Perseroan beserta tugas dan kewenangannya termasuk Komite yang membantu pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.

### Program Orientasi Direksi Baru

Informasi program orientasi Direksi baru dapat dilihat di sub-bab Sekretaris Perusahaan pada halaman xxx di Laporan Tahunan ini.



## DIREKSI

### Program Pengembangan dan Pelatihan Direksi

Pengembangan kompetensi dan pelatihan Direksi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian masing-masing anggota Direksi dalam menunaikan tugasnya.

Pelaksanaan pengembangan kompetensi dan pelatihan anggota Direksi termasuk sertifikasi manajemen risiko sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Materi	Tempat	Penyelenggara
Suprajarto	Living Wills, Planning For Bank Recovery and Resolution	London	BSMR
	Executive Leadership Program	Jakarta	Kementerian BUMN
Priyastomo	Executive Leadership Program	Jakarta	Kementerian BUMN
Kuswiyoto	Risk Governance Masterclass	New Zealand	CRMS
	The 3rd Annual ASEAN Marketing Summit	Jakarta	Markplus Inc.
Indra Utoyo	China Internet Finance Academy	China	McKinsey & Company
	Executive Leadership Program	Jakarta	Kementerian BUMN
	Executive Education Program "Fintech – Innovation Banking"	London	Imperial College Business School
Mohammad Irfan	BARa Risk Forum	Jakarta	BARa
	Executive Leadership Program	Jakarta	Kementerian BUMN
	Executive Education "Brand Leadership: Strategy, Management and Performance"	New York, USA	Columbia Business School
Haru Koesmahargyo	ERM Marterclass & Benchmarking in Europe	Jenewa	CRMS
	Executive Leadership Program	Jakarta	Kementerian BUMN
	Effective Execution of Organization Strategy	Philadelphia	Wharton Executive Education
Susy Liestiowaty	ERM Marterclass & Benchmarking in Europe	Jenewa	CRMS
	Executive Leadership Program	Jakarta	Kementerian BUMN
	Women's Leadership Summit	Bali	Dayalima
	US-Indonesia Women Leadership Summit	Washington DC	American Indonesian Chamber of Commerce
Donsuwan Simatupang	ERM Marterclass & Benchmarking in Europe	Jenewa	CRMS
	2017 Asia CIB CEO Roundtable	Hongkong	McKinsey & Company
	Executive Leadership Program	Jakarta	Kementerian BUMN
	Executive Education, "The Innovative Organization"	Berkeley, CA, USA	Haas Business School, University of California Berkeley
Sis Apik Wijayanto	Cyber Security And Integrating Operation Risk With The Mitigating Factors	Jakarta	IBI
	Executive Leadership Program	Jakarta	Kementerian BUMN
	Executive Education Program "Design Your Innovation Blueprint: Leveraging Systematic Inventive Thinking"	New York, USA	Columbia Bussiness School
Handayani			
R. Sophia Alizsa	The 2nd Indonesian <i>Human Capital</i> Summit 2017	Jakarta	Forum <i>Human Capital</i> Indonesia

## DIREKSI

## Sertifikasi Manajemen Risiko

No.	Nama	Jabatan	Sertifikasi MR			Refreshment Sertifikasi MR Tahun 2017	
			Lembaga Sertifikasi Manajemen Risiko Terakhir	Tingkat	Waktu	Refreshment Terakhir	Lembaga Sertifikasi Manajemen Risiko Terakhir
1	Suprajarto	Direktur Utama	LSPB	Level 5	17 Desember 2011	07 April 2016	BSMR
2	R. Sophia Alizsa	Direktur Human Capital	BSMR	Level 5	6 Januari 2018	-	BSMR
3	Handayani	Direktur Konsumer	BSMR	Level 5	4 Juni 2016	-	BSMR
4	Susy Liestiowaty	Direktur Kepatuhan	LSPB	Level 5	08 April 2015	28 April 2017	LSPB
5	Haru Koesmahargyo	Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan	LSPB	Level 5	08 April 2015	28 April 2017	LSPB
6	Donsuwan Simatupang	Direktur Manajemen Risiko	LSPB	Level 5	08 April 2015	28 April 2017	LSPB
7	Mohammad Irfan	Direktur Jaringan dan Layanan	LSPB	Level 5	08 April 2015	24 Maret 2017	LSPB
8	Indra Utoyo	Direktur Digital Banking & Teknologi Informasi	LSPB	Level 5	27 Maret 2017	-	LSPB
9	Kuswiyoto	Direktur Kredit Menengah, Korporasi dan BUMN	LSPB	Level 5	26 Agustus 2015	22 September 2017	LSPB
10	Sis Apik Wijayanto	Direktur Kelembagaan	LSPB	Level 5	10 April 2015	16 Februari 2017	LSPB
11	Priyastomo	Direktur Kredit Mikro dan Ritel	BSMR	Level 5	16 April 2016	-	BSMR

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI STRATEGI BANK

Direksi dan Dewan Komisaris secara bersama-sama melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas strategi 2017 yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Pemantauan dan evaluasi strategi 2017 dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan pada berbagai forum *Asset & Liability Committee (ALCO)*, *Capital & Investment Committee*, Komite Kebijakan Kredit, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Produk dan Komite Kebijakan SDM.

## RENCANA SUKSESI DIREKSI

Pelaksanaan suksesi Direksi dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, profesionalisme serta kompetensi untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi kepemimpinan Perseroan, sehingga dapat menjamin keberlanjutan bisnis serta tujuan jangka panjang Perseroan.

Perseroan secara berkala melakukan *talent review* dengan mengidentifikasi para pejabat eksekutif yang memiliki potensi yang akan diusulkan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi. Prosedur dan kriteria pencalonan Direksi juga didasarkan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku antara lain yaitu POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.



## DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui BRI Syariah dan BRI Life selaku entitas anak, BRI telah memiliki Dewan Pengawas Syariah.

### DEWAN PENGAWAS SYARIAH – BRI SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi agar seluruh produk dan jasa yang ditawarkan serta kegiatan operasi perbankan BRI Syariah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah tidak hanya melakukan pemberian opini kepada produk dan aktivitas baru BRI Syariah, namun DPS juga melakukan kepastian terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan bisnis dan operasional Bank dengan melakukan koordinasi dan asistensi kepada unit-unit kerja terkait dalam Bank. Dalam hal pelaksanaan tugas pengawasan, DPS bekerjasama dengan Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Intenal untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.

#### Komposisi DPS BRI Syariah

Organisasi DPS BRI Syariah terdiri dari seorang ketua dan seorang anggota, sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	KH. DidinHafidhuddin	Ketua DPS
2	M. GunawanYasni	Anggota DPS

\*) Semua anggota DPS tersebut tinggal dan berdomisili di Indonesia. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan terkait yang mengatur tentang komposisi dan persyaratan DPS.

#### Tugas dan Tanggung Jawab DPS BRI Syariah

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

- Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI);
- Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank;
- Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank;
- Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI;
- Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan bank;
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan;
- Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

#### Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Saran DPS BRI Syariah

- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas Syariah akan melakukan rapat Dewan Pengawas Syariah minimal sekali dalam 1 (satu) bulan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam PBI No.11/33/PBI/2009 dan SEBI No.12/13/DPbS tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).
- Seluruh keputusan DPS dituangkan dalam risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS. Dalam risalah rapat memuat keputusan dan opini syariah yang diambil dalam rapat tersebut.

## DEWAN PENGAWAS SYARIAH

### DEWAN PENGAWAS SYARIAH - BRI LIFE

Dewan Pengawas Syariah BRI Life merupakan Organ Perusahaan yang direkomendasikan DSN MUI yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha asuransi agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan majelis pengawas aspek syariah, dimana setiap Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah. Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas Syariah didukung oleh Perangkat Dewan Pengawas Syariah yaitu sekretaris dan atau staff khusus Dewan Pengawas Syariah.

#### Komposisi DPS BRI Life

Organisasi DPS BRI Life terdiri dari seorang ketua dan 2 (dua) orang anggota, sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	KH. DR. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Ketua DPS
2	Ir. H. Agus Haryadi.AAAIJ, FIIIS	Anggota DPS
3	Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH	Anggota DPS

#### Tugas dan Tanggung Jawab DPS BRI Life

Dewan Pengawas Syariah BRI Life bertugas melakukan pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Asuransi sesuai dengan prinsip syariah, yang secara teknis disupport oleh manajemen, terhadap:

- Kegiatan Perusahaan Asuransi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, baik dana tabarru', dana perusahaan maupun dana investasi peserta;
- Produk asuransi syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi; dan
- Praktik pemasaran produk asuransi syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi.

#### Kewajiban Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah juga memiliki kewajiban untuk:

- Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.
- Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Asuransi sesuai dengan prinsip syariah;
- Menyelenggarakan rapat rutin antara DPS dan/atau dengan manajemen paling sedikit 6 (enam) kali dalam setahun;
- Membuat Risalah Rapat dengan lengkap, melalui bantuan manajemen, termasuk apabila terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) Dewan Pengawas Syariah dan didokumentasikan dengan baik, serta disampaikan kepada seluruh DPS, baik yang hadir maupun yang tidak hadir;
- Menyusun laporan tahunan melalui bantuan manajemen, tentang Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap perusahaan sesuai dengan bentuk dan tata cara yang telah diatur oleh Regulator.
- Menyampaikan hasil laporan pengawasan tersebut kepada OJK dan menyampaikan salinannya kepada Manajemen serta menjadi bagian dari isi laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan berkala tersebut;
- Meminta penjelasan kepada Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang dinilai oleh DPS tidak sesuai dengan prinsip syariah;
- Dalam hal Direksi menolak hasil penilaian DPS, DPS wajib melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Kepala Eksekutif dan ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh DPS.



## DEWAN PENGAWAS SYARIAH

10. Dalam hal Direksi menerima hasil penilaian DPS sebagaimana dimaksud pada butir 8 tersebut, DPS meminta Direksi untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan anggota Direksi tersebut agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
11. Dalam hal anggota Direksi tidak melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada butir 10, DPS wajib segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Kepala Eksekutif dan ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan dimaksud

### Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Saran Dewan Pengawas Syariah BRI Life

Dalam memberikan nasihat dan saran, Dewan Pengawas Syariah melakukan rapat yang berpedoman pada Piagam Dewan Pengawas Syariah yang diatur sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diadakan secara berkala paling kurang 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Rapat dapat diadakan sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa Anggota Dewan Pengawas Syariah atau atas permintaan Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
3. Keputusan Rapat Dewan Pengawas Syariah harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
4. Segala keputusan rapat bersifat mengikat bagi seluruh Anggota Dewan Pengawas Syariah

# PENILAIAN PENERAPAN GCG 2017 TERHADAP DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

## PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

### Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris membuat rencana kerja setiap awal tahun dan melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas pencapaian kerja Dewan Komisaris secara periodik setiap semester. Dalam melakukan penilaian sendiri, Dewan Komisaris juga melakukan *review* atas pelaksanaan tugas komite-komite dan sekretariat di bawah Dewan Komisaris sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran.

Materi	Realisasi Waktu	Output
Review Kinerja Dekom and Komite Dekom Semester I tahun 2017	29 Agustus 2017	Hasil evaluasi pelaksanaan tugas komite semester 1 tahun 2017 yang disampaikan dalam Notulen rapat nomor R.47A-KOM/08/2016.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Selama Periode Tahun 2017	25 Januari 2018	Laporan hasil pelaksanaan program kerja Komite Audit selama tahun 2017.

### Indikator dan Kriteria Penilaian

Indikator atau kriteria kinerja Dewan Komisaris diukur dari pencapaian atas program kerja /rencana kerja dan anggaran (RKA) yang telah disusun pada setiap awal tahun. Adapun program kerja Dewan Komisaris disusun dengan memperhatikan faktor-faktor utama keberhasilan (*Key Success Factors*) pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Dalam tahun 2017, Dewan Komisaris telah menetapkan aspek-aspek yang menjadi Indikator kinerja utama, sebagai berikut:

No	Aspek	Indikator	Bobot (%)
1	Pengawasan Pasif ( <i>Off Site Supervision</i> )	a. Hasil <i>Review</i> Laporan Hasil Pemeriksaan Audit dan tindak lanjut hasil audit.	10,00
		b. Hasil <i>Review</i> Laporan Keuangan	10,00
		c. Hasil Penilaian <i>Self Assessment</i> GCG	10,00
		d. Hasil <i>Review</i> atas Laporan Profil Risiko dan Fungsi Kepatuhan serta tingkat kesehatan bank.	10,00
		e. Hasil <i>Review</i> Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi.	5,00
		f. Hasil <i>self Assessment</i> <i>Self Assessment</i> Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan	5,00
<b>Sub Total</b>			<b>50,00</b>
2	Pengawasan Aktif ( <i>On Site Supervision</i> )	a. Jumlah Rapat	15,00
		b. Jumlah Kunjungan Kerja	20,00
<b>Sub Total</b>			<b>35,00</b>



## PENILAIAN PENERAPAN GCG 2017 TERHADAP DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

No	Aspek	Indikator	Bobot (%)
3	Kinerja Perseroan	a. Rentabilitas	
		· Laba Bersih	2,50
		· ROA	2,50
		b. Likuiditas	
		· Dana Pihak Ketiga	2,50
		· LDR	2,50
		c. Perkreditan	
		· Ekspansi Kredit	2,50
		· NPL	2,50
		<b>Sub Total</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>100,00</b>

Pencapaian indikator kinerja diatas dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- a. Nilai 80 - 100 = Sangat Baik
- b. Nilai 70 - < 80 = Baik
- c. Nilai 55 - < 70 = Cukup Baik
- d. Nilai < 55 = Kurang Baik

### Mekanisme Proses Penilaian

Setiap Semester Dewan Komisaris melakukan *self assessment* terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama Dewan Komisaris. *Assessment* dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris dan hasilnya sebagai dasar untuk mengambil langkah perbaikan dalam peningkatan kinerja anggota Dewan Komisaris dan Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris.

### Review/Hasil Penilaian dan Pengungkapan

Berdasarkan hasil *self assessment* Dewan Komisaris, pencapaian Indikator Kinerja Utama (KPI) Dewan Komisaris tahun 2017 memperoleh skor **97,89** dengan kriteria "Sangat Baik" dengan capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

No	Aspek	Indikator	Target	Relisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	Pengawasan Pasif ( <i>Off Site Supervision</i> )	a. Pelaksanaan <i>Review</i> Laporan Hasil Pemeriksaan Audit dan tindak lanjut hasil audit.	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target	<i>Review</i> Laporan Hasil Pemeriksaan Audit internal dan eksternal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	1	10,00	10,00
		b. Pelaksanaan <i>Review</i> Laporan Keuangan	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target	<i>Review</i> Laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	1	10,00	10,00
		c. Pelaksanaan Penilaian <i>Self Assessment</i> GCG	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target	Penilaian <i>Self Assessment</i> GCG dilaksanakan setiap Semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	1	10,00	10,00

Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

## PENILAIAN PENERAPAN GCG 2017 TERHADAP DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

No	Aspek	Indikator	Target	Relisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir	
		d	Pelaksanaan <i>Review</i> atas Laporan Profil Risiko dan Fungsi Kepatuhan serta tingkat kesehatan bank.	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target	Pelaksanaan <i>Review</i> atas Laporan Profil Risiko dan Fungsi Kepatuhan serta tingkat kesehatan bank dilaksanakan setiap Semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	1	10,00	10,00
		e	Pelaksanaan <i>Review</i> Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi.	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target	Pelaksanaan <i>Review</i> Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi dilaksanakan setiap Semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	1	5,00	5,00
		f	Pelaksanaan <i>-Self Assessment</i> Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan.	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target	<i>Self Assessment</i> Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan dilaksanakan setiap Semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	1	5,00	5,00
<b>Sub Total</b>						<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	
2	Pengawasan Aktif ( <i>On Site Supervision</i> )	a	a. Jumlah Rapat Dekom	18 Rapat Dekom dan Radirkom	45 Rapat Dekom dan Radirkom	1	15,00	15,00
		b	b. Jumlah Kunjungan Kerja	19 Kanwil	17 Kanwil	0,89	20,00	17,89
<b>Sub Total</b>						<b>35,00</b>	<b>32,89</b>	
3	Kinerja Perseroan	a	<b>Rentabilitas</b>					-
			Laba Bersih	27,75	28,46	1	2,50	2,50
			ROA	3,68%	3,69%	1	2,50	2,50
		b	<b>Likuiditas</b>					-
			Dana Pihak Ketiga	787,11	803,33	1	2,50	2,50
			LDR	90,88	88,13	1	2,50	2,50
		c	<b>Perkreditan</b>					-
			Ekspansi Kredit	715,29	708,001	0,99	2,50	2,47
			NPL	2,11%	2,10%	0,995	2,50	2,49
<b>Sub Total</b>						<b>15,00</b>	<b>14,96</b>	
<b>TOTAL</b>						<b>100,00</b>	<b>97,86</b>	

Aspek Penilaian	Skor Nilai
Pengawasan Pasif ( <i>Off Site Supervision</i> )	50,00
Pengawasan Aktif ( <i>On Site Supervision</i> )	32,89
Kinerja Perseroan	15,96
<b>Jumlah</b>	<b>97,89 (Sangat Baik)</b>



## PENILAIAN PENERAPAN GCG 2017 TERHADAP DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

### Pelaksanaan Penilaian Dewan Komisaris

#### Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Prosedur penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan pada saat penyampaian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tersebut kepada RUPS dalam laporan tahunan Perseroan, dimana berdasarkan laporan tersebut RUPST menyatakan serta memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) Kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada akhir tahun.

#### Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris Oleh RUPS

Kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2017 tercermin dari pencapaian realisasi Program Kerja/Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris tahun 2017 yang seluruhnya tercapai tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan/perundangan yang berlaku.

#### Pihak Yang Melakukan Assessment

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

#### Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Oleh RUPS

Kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2017 tercermin dari pencapaian realisasi Program Kerja/Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris tahun 2017 yang seluruhnya tercapai, di mana berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKA Tahunan Perseroan. Di samping itu dalam Anggaran Dasar BRI juga diatur kewajiban Dewan Komisaris untuk menyusun program kerja yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disusun oleh Direksi.

Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris disusun dengan memperhatikan tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris dipergunakan sebagai pedoman kerja bagi setiap anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan perseroan selama tahun berjalan.

#### Self Assessment GCG

Dewan Komisaris juga melakukan *self assessment* GCG terkait penilaian tingkat kesehatan bank setiap semester dengan menggunakan Kertas Kerja *self assessment* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK. *Self assessment* dimaksud meliputi *assessment* terhadap Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris (faktor 1), Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (faktor 3) dan Penanganan Benturan Kepentingan (faktor 4).

#### Kriteria Evaluasi Self Assessment GCG oleh Dewan Komisaris

*Self assessment* GCG tersebut dilakukan oleh Dewan Komisaris secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan kedalam 3 (tiga) aspek *governance* yaitu: *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* yang harus di dukung dengan data/informasi dan dokumen yang memadai, seperti kebijakan internal, laporan internal, laporan Bank, dan/atau pengungkapan-pengungkapan lainnya yang telah dipublikasikan.

#### Pihak yang Melakukan Assessment GCG Dewan Komisaris

Penilaian *Self Assessment* GCG Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris.

#### Hasil Self Assessment GCG oleh Dewan Komisaris

Hasil *self assessment* GCG Dewan Komisaris pada tahun 2017 adalah dengan peringkat implementasi sebagai berikut:

## PENILAIAN PENERAPAN GCG 2017 TERHADAP DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Aspek Penilaian	Peringkat Implementasi
<i>Governance Structure</i>	1
<i>Governance Process</i>	1
<i>Governance Outcome</i>	1
<b>Rata-rata</b>	<b>1 (sangat Baik)</b>

### ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Salah satu mekanisme penilaian Kinerja Dewan Komisaris yang berasal dari eksternal adalah melalui ASEAN Corporate Governance Scorecard.

- **Prosedur Pelaksanaan Assessment Kinerja Dewan Komisaris Melalui ASEAN CG Scorecard**

Prosedur pelaksanaan *assessment* Kinerja Dewan Komisaris melalui ASEAN CG Scorecard dilakukan berdasarkan informasi atau dokumen-dokumen yang tersedia di publik berkaitan dengan praktik-praktik GCG terkait kinerja Dewan Komisaris.

- **Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris Melalui ASEAN CG Scorecard**

Parameter penentu tanggung Jawab Dewan Komisaris dalam penilaian ASEAN CG Scorecard adalah sebagai berikut:

- 1 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
- 2 Struktur Dewan Komisaris.
- 3 Proses Dewan Komisaris.
- 4 Individu Dalam Susunan Dewan Komisaris.
- 5 Kinerja Dewan Komisaris.

- **Pihak Yang Melakukan Assessment**

Pihak yang melakukan *assessment* kinerja Dewan Komisaris berdasarkan ASEAN CG Scorecard adalah melalui IICD sebagai lembaga resmi yang ditunjuk OJK untuk melakukan *assessment* terhadap Bank.

- **Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Melalui ASEAN CG Scorecard**

Score BRI 2017 terhadap komponen prinsip utama kelima yaitu tanggung Jawab Dewan Komisaris adalah sebesar 37,84 atau dengan predikat baik. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris telah konsisten dan terus berupaya memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank.

Apabila dibandingkan dengan hasil penilaian tingkat kepatuhan perusahaan untuk Khususnya terkait dengan Dewan Komisaris pada tahun sebelumnya (ASEAN CG Scorecard 2016), terjadi peningkatan pencapaian kinerja sebesar **5,40%** (dari 89,19% menjadi 94,59%) atau peningkatan CG Score pada Prinsip E sebesar **2,16 poin** (dari 35,68 menjadi 37,84 poin) peningkatan ini disebabkan terjadinya perbaikan (*improvement*) yang dilakukan perusahaan **sebanyak 4 (empat) item penilaian**, yakni pada Perbaikan di Struktur Dewan Komisaris dan Proses Dewan Komisaris.

### Pengungkapan mekanisme/proses penilaian (assessment) oleh Pihak Independen.

Selain melakukan *Self assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dengan menggunakan Parameter KPI Dewan Komisaris serta *Self assessment* GCG sesuai dengan ketentuan dari OJK, penilaian kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan oleh OJK dan Pihak independen khususnya terkait dengan implementasi *Good Corporate Governance*. Berdasarkan penilaian OJK terkait dengan Kinerja Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan Implementasi *Good Corporate Governance* memperoleh **peringkat 2** atau kategori **baik**.

Pihak independen lain yang melakukan penilaian implementasi GCG di Perseroan antara lain *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) yaitu pihak independen yang melakukan penilaian implementasi *Good Corporate Governance* dengan menggunakan standar ASEAN Score Card. Berdasarkan penilaian pihak independen tersebut skor penilaian Perseroan masuk dalam kategori **Good** dengan poin **102,00**.



## PENILAIAN PENERAPAN GCG 2017 TERHADAP DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Selain IICG, pihak independen lain yang melakukan penilaian terhadap implementasi *Good Corporate Governance* Perseroan adalah *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) melalui program riset penerapan GCG: *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). Berdasarkan penilaian pihak independen tersebut skor penilaian Perseroan masuk dalam kategori **Baik** dengan total point **87,74** (*Self assessment*: 25.90, Dokumentasi 22.85, Makalah 13.46 dan Observasi Observasi 25,53).

### Penilaian atas Kinerja Komite Penunjang Dewan Komisaris

Selama tahun 2017 Komite-komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan peran dan tanggung jawab masing-masing secara baik dan telah memberikan dukungan yang signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pengawasan Dewan Komisaris.

Masing-masing komite telah melaksanakan fungsi dan perannya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan rekomendasi dan masukan bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai Pengawas sekaligus memberikan *advise* kepada Manajemen, secara umum penilaian Dewan Komisaris atas kinerja Komite Penunjang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- **Komite Audit**

Peranan Komite Audit tercermin dalam memastikan kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit telah melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik serta menelaah laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya dalam rangka memastikan kesesuaiannya dengan standar akuntansi dan aturan yang berlaku. Dewan Komisaris menilai seluruh Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit telah dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan.

- **Komite Pemantau Manajemen Risiko**

Kemampuan BRI dalam mengelola risiko tidak terlepas dari keberhasilan Komite Pemantau Manajemen Risiko bersama dengan Direktorat Manajemen Risiko dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menelaah dan memantau penerapan manajemen risiko di BRI. Peringkat profil risiko yang berada di level "*Low to Moderate*", kualitas portofolio kredit yang baik dan prosentase non performing loan yang rendah pada tahun 2017 merupakan hasil nyata dari sinergi pengelolaan risiko yang baik. Dewan Komisaris menilai seluruh Rencana Kerja dan Anggaran Komite Pemantau Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan.

- **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Kontribusi dari Komite Nominasi dan Remunerasi juga sangat besar terutama terkait dengan evaluasi kebijakan remunerasi pekerja dan ketenagakerjaan, remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, serta pengelolaan SDM secara keseluruhan. Selain itu, Komite Nominasi dan Remunerasi juga telah memberikan saran dan masukan yang konstruktif atas sistem dan prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pihak independen anggota komite Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai seluruh Rencana Kerja dan Anggaran Komite Nominasi dan Remunerasi Audit telah dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan.

- **Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang beranggotakan unsur-unsur dari anggota Dewan Komisaris BRI, anggota Dewan Komisaris Bank BRI Agro, BRI Life, BRI Finance serta anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Bank BRI Syariah. Selama tahun 2017, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, audit terintegrasi dan fungsi Kepatuhan terintegrasi.

## PENILAIAN PENERAPAN GCG 2017 TERHADAP DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

### PENILAIAN KINERJA DIREKSI TAHUN 2017

Penilaian kinerja Direksi dilaksanakan berdasarkan KPI Direksi yang disusun di awal tahun berjalan.

#### Pihak Penilai Kinerja Direksi

Kinerja Direksi tahun 2017 dinilai oleh Komite Nominasi dan Remunerasi serta Dewan Komisaris di setiap triwulan dalam bentuk evaluasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (KPI).

Selanjutnya Dewan Komisaris menyusun Laporan Pengawasan dan disampaikan kepada:

- Kementrian BUMN dan OJK secara berkala di tiap semester tahun buku bersangkutan.
- Rapat Umum Pemegang Saham sebagai bagian dari Laporan Pengawasan Dewan Komisaris sebagai dasar untuk RUPS dalam menentukan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi di tahun buku berikutnya.

#### Flow Prosedur Penilaian Kinerja Direksi



#### Indikator Penilaian Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilaksanakan dengan mengacu KPI Direksi yang kemudian di kelompokkan menjadi aspek kinerja sebagai berikut:

- Keuangan:** Fokus perusahaan untuk meningkatkan revenue dan meminimasi biaya
- Nasabah:** Fokus perusahaan untuk meningkatkan persepsi Pelanggan terhadap "value proposition" Perusahaan. Pelanggan yang dimaksud disini mencakup nasabah internal, nasabah eksternal, termasuk regulator.
- Inovasi:** Fokus Perusahaan untuk meningkatkan inovasi produk/layanan, customer value, dan efektivitas proses bisnis
- Pekerja:** Fokus Perusahaan untuk meningkatkan pengembangan organisasi, kemampuan, dan *engagement* Pekerja.



## PENILAIAN PENERAPAN GCG 2017 TERHADAP DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

**Key Performance Indicator (KPI) Direksi 2017**

Jabatan	KPI 2017
Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Melaksanakan <i>Corporate Plan</i>, RBB dan RKAP.</li> <li>· Pencapaian target indikator kinerja, mencakup aspek:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Keuangan dan Pasar</li> <li>2) Fokus Pelanggan</li> <li>3) Efektivitas Produk &amp; Proses</li> <li>4) Fokus Tenaga Kerja</li> <li>5) Kepemimpinan, Tata Kelola &amp; Tanggung Jawab Masyarakat</li> </ol> </li> <li>· Laporan dan dokumen pelaksanaan pengurusan Perusahaan disediakan.</li> <li>· Penjelasan pelaksanaan pengurusan Perusahaan disediakan.</li> <li>· Pencapaian target kinerja Audit Intern dan Sekretariat Perusahaan.</li> <li>· Tindak lanjut atas temuan audit dilaksanakan.</li> </ul>

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk secara kolektif kolegial melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) dan melakukan evaluasi serta penilaian atas KPI dimaksud bersama dengan Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

**Hasil Penilaian Kinerja Direksi 2017**

Selain penilaian yang telah dilakukan oleh Direksi tersebut di atas, Direksi juga melakukan penilaian Kinerja Direksi untuk tahun 2017 berdasarkan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) yang secara rutin dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN Republik Indonesia. Hasil penilaian berdasarkan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) telah tercantum dalam sub bab Penilaian Kinerja Direksi Melalui Pendekatan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN dengan 7 (tujuh) kategori penilaian yang terdiri dari 6 (enam) kategori proses dan 1 (satu) kategori hasil yaitu sebagai berikut:

- Kategori 1. Kepemimpinan
- Kategori 2. Perencanaan Strategis
- Kategori 3. Fokus Pelanggan
- Kategori 4. Pengukuran, Analisis, dan Manajemen Pengetahuan
- Kategori 5. Fokus Tenaga Kerja
- Kategori 6. Fokus Operasi
- Kategori 7. Hasil

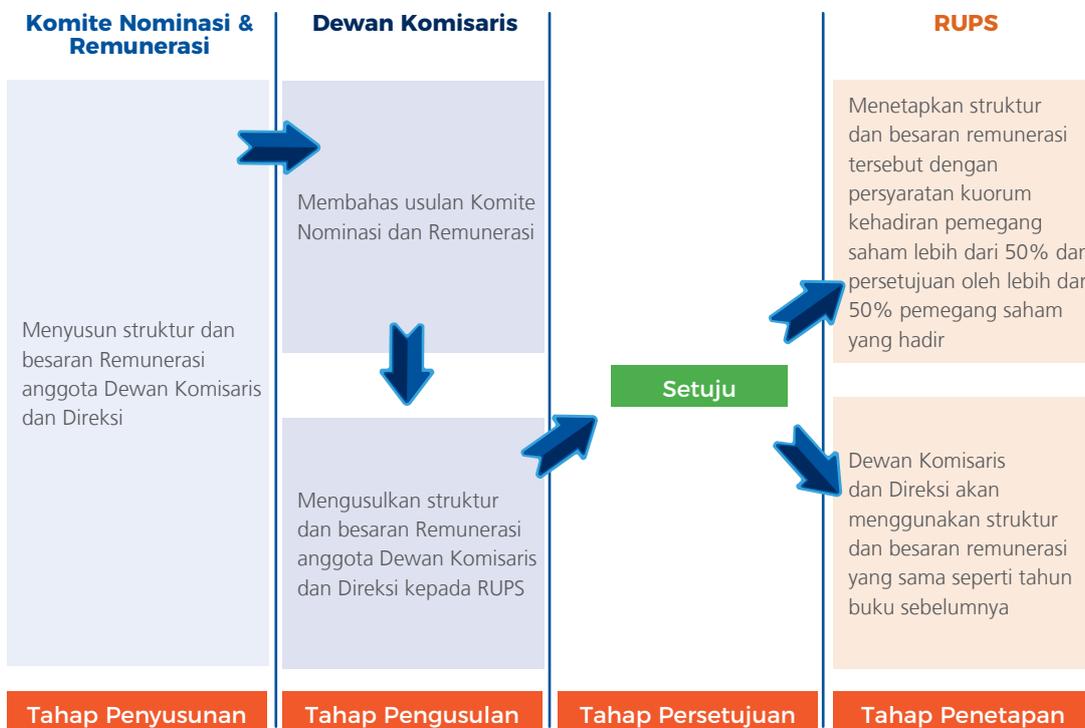
## KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sesuai Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Selanjutnya berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang tersebut, besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan kewenangan RUPS dimaksud dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/06/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris dalam setiap RUPS Tahunan mengajukan usulan mengenai penetapan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas serta tantiem untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi setelah melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan, *business size*, dan hasil survei remunerasi dalam industri perbankan.

### PROSEDUR PENENTUAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI





## KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Tahapan	Aktivitas
Tahap Penyusunan	<p><b>Komite Nominasi dan Remunerasi</b></p> <p>Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi struktur dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan struktur dan besaran Remunerasi tersebut dalam rapat Dewan Komisaris.</p>
Tahap Pengusulan	<p><b>Dewan Komisaris</b></p> <p>Dewan Komisaris mengajukan usulan mengenai penetapan honorarium, tunjangan dan fasilitas serta tantiem untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham.</p>
Tahap Penetapan	<p><b>Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)</b></p> <p>RUPS dapat menyetujui dan menetapkan struktur dan besaran remunerasi tersebut dengan persyaratan kuorum kehadiran pemegang saham lebih dari 50% dan persetujuan oleh lebih dari 50% pemegang saham yang hadir. Dalam hal RUPS tidak menyetujui usulan tersebut, maka Dewan Komisaris dan Direksi akan menggunakan struktur dan besaran remunerasi yang sama seperti tahun buku sebelumnya.</p>

# PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA REMUNERASI

## 1. Komite Nominasi dan Remunerasi

- Nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab  
Nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab disampaikan pada Bab Organ Pendukung Dewan Komisaris - Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Jumlah rapat yang telah dilakukan  
Jumlah rapat yang telah dilakukan disampaikan pada BAB Organ Pendukung Dewan Komisaris - Komite Nominasi dan Remunerasi. (Data didukung oleh SKP dan Sekdekom)
- Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Nominasi dan Remunerasi selama 1 (satu) tahun.

Remunerasi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	Jumlah Diterima dalam 1 tahun (2017)	
	Orang*	Jutaan
Remunerasi	13	111,595

\*) termasuk Dewan komisaris eksisting dan perubahan Anggota Dewan Komisaris selama tahun 2017 serta termasuk anggota komite non Komisaris

## 2. Proses penyusunan kebijakan remunerasi meliputi:

- Latar belakang dan Tujuan kebijakan remunerasi.  
Dalam rangka menjaga dan mempertahankan Pekerja, maka perlu diatur kebijakan Remunerasi yang dapat memelihara dan meningkatkan motivasi Pekerja serta mendorong terciptanya iklim kerja kondusif. Perusahaan menyusun kebijakan Remunerasi dengan tujuan untuk menarik calon Pekerja potensial, mempertahankan Pekerja kompeten dan memelihara motivasi Pekerja untuk berkinerja unggul.
- Evaluasi kebijakan remunerasi tahun sebelumnya, beserta perbaikannya.  
Perusahaan menyusun kebijakan Remunerasi berdasarkan praktek di pasar tenaga kerja bidang perbankan serta selalu mengkaji dan memperbaruinya sesuai dengan perubahan dan perkembangan bisnis dengan tetap memperhatikan kemampuan Perusahaan.
- Indenpendensi remunerasi bagi pekerja di unit kontrol.  
Remunerasi yang diterima Pekerja disusun berdasarkan jabatan Pekerja melalui hasil evaluasi jabatan, sehingga Remunerasi yang diterima Pekerja di unit kontrol tidak terkait dengan unit kerja yang di awasi.

## 3. Cakupan kebijakan remunerasi dan implementasi per unit bisnis, per wilayah dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi diluar negeri.

Dalam rangka menyelaraskan perbedaan tingkat kemahalan antar wilayah, Perusahaan memberikan bantuan penyesuaian tingkat kemahalan berupa Tunjangan Premium. Perusahaan mengadakan peninjauan terhadap Tunjangan Premium secara periodik apabila diperlukan sesuai dengan perkembangan tingkat kemahalan di setiap wilayah dan kemampuan Perusahaan. Perusahaan Anak memiliki Kebijakan Remunerasi terpisah dan disusun sendiri oleh Perusahaan Anak.

## 4. Remunerasi dikaitkan dengan risiko meliputi:

Remunerasi dikaitkan dengan risiko dan disusun berdasarkan pertimbangan Person Grade dan/ atau Job Grade Pekerja dalam suatu struktur upah yang menggambarkan Remunerasi Pekerja dari jabatan terendah sampai dengan jabatan tertinggi. Pada setiap jabatan ditentukan suatu rentang upah tertentu yang menggambarkan upah minimum, upah *midpoint* (nilai tengah) sampai dengan upah maksimum. Besaran remunerasi yang diterima oleh Pekerja mempertimbangkan/setara dengan beban dan potensi risiko jabatan yang melekat pada jabatan tersebut. Semakin tinggi jabatan tersebut



## PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA REMUNERASI

maka akan semakin tinggi tugas dan tanggung jawab Pekerja dalam mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil/eksposur risiko Perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perusahaan telah menetapkan pihak-pihak yang menjadi *Material Risk Takers* (MRT), berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan potensi risiko yang timbul atas suatu jabatan yang dimiliki. Bagi pihak yang ditetapkan sebagai MRT, maka Perusahaan akan menanggihkan pembayaran sebagian Remunerasi yang bersifat variabel.

### 5. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan remunerasi meliputi:

- a. Kebijakan remunerasi terhadap penilaian kinerja.  
Guna mendorong Pekerja untuk berkinerja unggul, Perusahaan memiliki program kompensasi variabel yang diberikan kepada Pekerja yang berhasil mencapai dan melampaui target kinerja. Pekerja dengan prestasi tinggi akan memperoleh kompensasi variabel yang tinggi pula. Sebaliknya, Pekerja yang kurang berprestasi akan memperoleh kompensasi variabel yang rendah, atau tidak mendapatkan kompensasi variabel sama sekali.
- b. Metode remunerasi individu dengan kinerja perusahaan, kinerja unit kerja, dan kinerja individu.  
Dalam pemberian kompensasi variabel bagi Pekerja, besarnya nilai kompensasi yang diterima oleh Pekerja tergantung dari pencapaian kinerja Perusahaan, kinerja unit kerja dan kinerja individu dimana masing-masing komponen tersebut memiliki indikator pencapaian target, bobot, dan faktor pengali yang berdiri sendiri.
- c. Metode penyesuaian remunerasi terhadap kinerja yang tidak tercapai.  
Pada awal tahun Perusahaan telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pekerja untuk memperoleh kompensasi variabel, salah satunya adalah kinerja yang harus dicapai. Bagi Pekerja yang tidak memenuhi syarat yang telah

ditetapkan tersebut tidak akan memperoleh kompensasi variabel.

### 6. Penyesuaian remunerasi dikaitkan dengan kinerja dan risiko yang meliputi:

- a. Kebijakan remunerasi terhadap besaran dan kriteria yang bersifat variabel yang ditanggihkan,  
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 09-KOM/ BRI/11/2017 dan S.1023-DIR/KPS/11/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Tata Kelola Remunerasi PT Bank rakyat Indonesia (Persero) Tbk., telah ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
  - a.1 Bagi pihak yang ditetapkan sebagai MRT, maka sebagian remunerasi yang bersifat variabelnya akan ditanggihkan.
  - a.2 Besarnya penanggihan bagi Direksi dan Dewan Komisaris adalah 20% dari Tantiem.
- b. Kebijakan remunerasi terhadap variabel yang ditanggihkan yang ditunda atau dibatalkan pembayarannya (*Malus*).  
Perusahaan dapat menunda pembayaran Remunerasi yang bersifat variabel yang ditanggihkan (*malus*) kepada MRT yang terbukti melakukan *Individual Fraud*.

### 7. Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan remunerasi

Salah satu prinsip remunerasi Perusahaan adalah kompetitif secara eksternal dimana Remunerasi diberikan pada tingkat yang kompetitif terhadap industri perbankan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perusahaan bekerjasama dengan Willis Towers Watson yang bertugas untuk melakukan *benchmarking* dan/atau *Salary Survey* sesuai dengan permintaan perusahaan mengenai kebijakan remunerasi.

### 8. Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan jumlah nominalnya.

Data dapat dilihat pada Sub Bab Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

## PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA REMUNERASI

### 9. Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam 1 tahun.

Data dapat dilihat pada Sub Bab Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

### 10. Remunerasi yang bersifat variabel meliputi:

- a. Bentuk dan alasan pemilihan remunerasi yang bersifat variabel.  
Kompensasi kepada Pekerja diberikan dalam kerangka sistem yang adil, kompetitif, serta sesuai kebutuhan dan kemampuan Bank. Kompensasi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
  - 1) Kompensasi yang bersifat tetap, terdiri dari Upah Pokok dan Tunjangan; dan
  - 2) Kompensasi yang bersifat variabel yang diberikan kepada Pekerja berdasarkan pencapaian kinerja, yaitu senagai berikut.:
    - i. Tunjangan Kinerja  
Tunjangan Kinerja merupakan kompensasi variabel yang dijanjikan oleh Perusahaan di awal tahun. Tunjangan Kinerja bertujuan untuk mendorong motivasi Pekerja, memberikan reward secara langsung dalam mencapai dan melampaui

target individu, target unit kerja maupun target perusahaan.

- ii. Bonus  
Bonus merupakan kompensasi variabel yang tidak dijanjikan oleh Perusahaan. Bonus diberikan kepada Pekerja dalam rangka memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja Perusahaan.

- b. Alasan perbedaan pemberian remunerasi yang bersifat variabel (Direksi, Dewan Komisaris dan Pekerja).

Perusahaan memberikan kompensasi variabel yang lebih besar bagi Tenaga Pemasar, hal ini disebabkan karena hal-hal sbb.:

- Tenaga Pemasar merupakan pencetak laba.
- Mendorong Tenaga Pemasar untuk dapat melampaui target yang telah ditetapkan.
- Apresiasi kepada Tenaga Pemasar.

Faktor penyebab perbedaan pemberian kompensasi yang bersifat variabel berdasarkan pertimbangan pencapaian kinerja dan kompetensi termasuk pencapaian kinerja unit kerja dan kinerja perusahaan.

### 11. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominalnya.

Keterangan	Jumlah	Total Nominal
Direksi	Tabel Struktur Remunerasi Direksi	
Komisaris	Tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris	
Pekerja	92.819	5,8 Triliun

### 12. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi *Material Risk Taker*

Pihak yang ditetapkan menjadi MRT adalah sbb.:

- a. Direksi
- b. Dewan Komisaris
- c. *Senior Executive Vice President* (SEVP)

### 13. *Share Option* yang dimiliki oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif.

- a. Kebijakan *Share Option*  
(Data telah disajikan dalam sub bab *Share Option*)
- b. Jumlah Saham yang dimiliki oleh Direksi, Dewan Komisaris dan pejabat Eksekutif sebelum diberikan *Share Option*.  
Terdapat pada sub bab Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris BRI



## PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA REMUNERASI

- c. Jumlah *Share Option* yang diberikan.  
Jumlah *Share Option* mempertimbangkan aspek pencapaian kinerja perusahaan, unit kerja dan individu serta memperhitungkan *stock option* yang telah dialokasikan untuk kebijakan *share option*.
- d. Jumlah *share option* yang telah dieksekusi sampai dengan akhir tahun 2017.  
Pada tahun 2017, belum dilakukan eksekusi terhadap *share option*.

**14. Rasio gaji tertinggi dan terendah**

Rasio Gaji	2015	2016	2017
Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah	39.07%	49.47%	37.93%
Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah	1.11%	1.11%	1.11%
Gaji Komisaris Tertinggi dan Terendah	1.11%	1.11%	1.11%
Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	1.51%	1.84%	2.10%

**15. Jumlah penerima dan jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon pekerja selama 1 tahun pertama bekerja.**

Belum terdapat pemberian kompensasi variabel terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi.

**16. Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total pesangon yang dibayarkan.**

Tidak terdapat Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total pesangon yang dibayarkan.

**17. Jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.**

Total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank belum diimplementasikan.

**18. Jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun.**

Jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun belum diimplementasikan.

**19. Rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam satu tahun.**

- a. Remunerasi yang bersifat Tetap atau Variabel.

Keterangan	Jumlah
Kompensasi yang bersifat tetap	9,98 Triliun
Kompensasi yang bersifat variabel	5,8 Triliun

- b. Remunerasi yang ditangguhkan atau tidak ditangguhkan.  
Belum diimplementasikan
- c. Bentuk remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perusahaan.
- Upah Bulanan
  - Tunjangan Hari Raya Keagamaan
  - Tunjangan Cuti
  - Tunjangan Kinerja
  - Bonus

## PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA REMUNERASI

### 20. Informasi kuantitatif mengenai:

- a. Total remunerasi yang masih ditangguhkan baik penyesuaian implisit atau eksplisit. Belum diimplementasikan selama periode tahun berjalan.
- b. Total pengurangan remunerasi yang disebabkan penyesuaian eksplisit selama tahun 2017. Belum diimplementasikan selama periode tahun berjalan.
- c. Total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama tahun 2017. Belum diimplementasikan selama periode tahun berjalan.

## STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Struktur remunerasi anggota Dewan Komisaris mencakup sebagai berikut:

1. Honorarium dan Tantiem  
Honorarium dan Tantiem Komisaris Utama ditetapkan sebesar 50% dari gaji Direktur Utama, sedangkan Honorarium dan Tantiem Wakil Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan masing-masing sebesar 95% dan 90% dari Honorarium Komisaris Utama.
2. Tunjangan  
Tunjangan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Uraian
1.	Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK)	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. THR diberikan sejak diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.</li> <li>b. Besaran THR maksimal 1 (satu) kali honorarium per bulan dan dibayarkan secara penuh</li> </ol>
2.	Tunjangan Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tunjangan transportasi diberikan setiap bulan sebesar 20% dari honorarium per bulan masing-masing anggota Dewan Komisaris.</li> <li>b. Dalam hal Komisaris telah diberikan fasilitas kendaraan dengan cara sewa sebagaimana diatur dalam SK sebelumnya, maka diatur sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Ketentuan pemberian fasilitas kendaraan tetap berpedoman pada keputusan terdahulu sampai dengan masa sewanya berakhir, dan untuk selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana huruf a di atas.</li> <li>2). Bagi Komisaris yang berhenti dari jabatannya dan periode sewa kendaraan belum berakhir maka diberikan kesempatan membeli kendaraan sebesar sisa biaya sewa yang belum dibayarkan, dengan catatan harga beli kendaraan tersebut dapat dinegosiasikan dengan pihak vendor. Bagi Komisaris dimaksud diberikan masa transisi selama 30 (tiga puluh) hari untuk menggunakan kendaraan tersebut.</li> </ol> </li> </ol>
3.	Asuransi Purna Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Diikutsertakan dalam Program Asuransi Purna Jabatan.</li> <li>b. Maksimum premi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium per Tahun.</li> </ol>
4.	Keanggotaan pada Club	Diberikan 2 (dua) keanggotaan Club Profesi.
5.	Pakaian Corporate	Diberikan 2 (dua) stel jas corporate dan 1 (satu) baju batik per Tahun.



## PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA REMUNERASI

### 3. Fasilitas

Fasilitas yang diperoleh oleh anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Uraian
1.	Kesehatan	<p>a. Biaya pengobatan dan perawatan kesehatan bagi anggota Dewan Komisaris dan keluarga yang menjadi tanggungannya diganti penuh oleh Perusahaan.</p> <p>b. Keluarga yang ditanggung adalah suami/istri dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum pernah menikah atau bekerja dan berumur di bawah 25 (dua puluh lima) Tahun</p> <p>c. Fasilitas Kesehatan diberikan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rawat jalan dan obat;</li> <li>2) rawat inap dan obat;</li> <li>3) <i>medical check up</i>.</li> </ol> <p>d. Fasilitas Kesehatan berupa rawat jalan dan obat sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas termasuk pemeriksaan mata berikut obat, serta pembelian kacamata yang diganti penuh oleh perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penggantian <i>Frame</i> setiap 2 (dua) Tahun maksimal sebesar Rp.15 juta.</li> <li>2) Penggantian Lensa setiap 1 (satu) Tahun.</li> </ol> <p>e. <i>Medical check up</i> diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Medical check up</i> diberikan 1 (satu) kali setiap Tahun.</li> <li>2) <i>Medical check up</i> dilakukan di dalam negeri.</li> </ol> <p>f. Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian fasilitas kesehatan dapat diberikan secara penuh. Fasilitas ini termasuk transportasi dan akomodasi bagi pasien dan satu orang pendamping</p>
2.	Fasilitas Bantuan Hukum	<p>a. Diberikan Fasilitas Bantuan Hukum dalam hal terjadi tindakan/ perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan.</p> <p>b. Fasilitas Bantuan Hukum diberikan dengan tata cara dan ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN yang berlaku.</p>

### 4. Fasilitas Lainnya

Fasilitas lainnya yang diperoleh oleh anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Uraian
1.	Fasilitas Lainnya	Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan fasilitas lain dalam rangka pelaksanaan tugas operasionalnya berupa perjalanan dinas, pemberian laptop/ipad dan pengemudi yang diberikan sesuai ketentuan intern perusahaan yang diatur dalam suatu keputusan Direksi.

Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

## PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA REMUNERASI

### Besaran Remunerasi dan Fasilitas Anggota Dewan Komisaris Tahun 2017

No	Nama	Gaji	Tunjangan Hari Raya Keagamaan	Tantiem	Tunjangan Perumahan
<b>Dewan Komisaris BRI</b>					
1	Andrinof A Chaniago *)	√	√	-	-
2	Mustafa Abubakar **)	√	-	√	-
3	Gatot Trihargo	√	√	√	-
4	Adhyaksa Dault *****)	√	√	√	-
5	Nicolaus T.B Harjanto *)	√	√	-	-
6	Ahmad Fuad **)	√	-	√	-
7	A. Fuad Rahmany	√	√	√	-
8	A. Sonny Keraf	√	√	√	-
9	Vincentius Sonny Loho	√	√	√	-
10	Jefry J. Wurangian	√	√	√	-
11	Mahmud	√	√	√	-
12	Rofikoh Rokhim *****)	√	-	-	-
<b>Total</b>		<b>14,355,000,000</b>	<b>1,196,250,000</b>	<b>90,998,609,626</b>	<b>-</b>

\*) Diangkat oleh RUPS tanggal 15 Maret 2017

\*\*) Diberhentikan oleh RUPS pada tanggal 15 Maret 2017

\*\*\*\*) Diberhentikan RUPS pada tanggal 23 Maret 2016

\*\*\*\*\*) Diangkat oleh RUPSLB tanggal 18 Oktober 2017

\*\*\*\*\*\*) Diberhentikan oleh RUPSLB pada tanggal 18 Oktober 2017

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun (2017)	
	Orang	Jutaan
<b>Remunerasi</b>		<b>110,095,330,150</b>
Gaji*	12	14,355,000,000
Tunjangan Rutin**	12	4,741,720,524
Tantiem**	12	90,998,609,626
<b>Fasilitas Dalam Bentuk Natura</b>		<b>6,567,518,750</b>
Transportasi	12	2,871,000,000
Santunan Purna Jabatan	9	3,696,518,750



PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA REMUNERASI

	Tunjangan Transportasi	Premi Asuransi Purna Jabatan / Tahun	Pakaian Corporate	Tunjangan Komunikasi	Jumlah Remunerasi Orang Per Tahun Di atas Rp.2 Miliar
	√	√	√	-	√
	√	-	-	-	√
	√	√	-	-	√
	√	√	√	-	√
	√	√	-	-	√
	√	-	√	-	√
	√	√	-	-	√
	√	√	√	-	√
	√	√	√	-	√
	√	√	√	-	√
	√	√	-	-	√
	√	-	-	-	-
	<b>2,871,000,000</b>	<b>3,696,518,750</b>	<b>197,683,947</b>	-	-

Jumlah Remunerasi/Orang dalam satu tahun	Orang	Jutaan
Di atas Rp 2 Miliar	11	116,662,464,910
Di atas 1 Miliar s/d Rp 2 Miliar	0	
Di atas Rp 500 Juta s/d I Rp 1 Miliar	0	
di bawah Rp 500 Juta***)	1	383,990

\*) Termasuk Komisaris yang diangkat dan diberhentikan pada RUPS tanggal 15 Maret 2017 dan tanggal 18 Oktober 2017

\*\*) Tunjangan Rutin Meliputi THR, Tunjangan Pakaian Corporate, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Lainnya

\*\*\*) Komisaris yang diangkat sejak 18 Oktober 2017

## PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA REMUNERASI

### STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI

Struktur remunerasi Direksi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No [\*\*] tanggal [\*\*] dan Persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna No [\*\*] tanggal [\*\*] adalah sebagai berikut:

Struktur remunerasi anggota Dewan Komisaris mencakup sebagai berikut:

- Honorarium dan Tantiem  
Besarnya Gaji dan Tantiem Direksi ditetapkan proporsional terhadap gaji dan tantiem Direktur Utama, yaitu Wakil Direktur Utama sebesar 95% dan Direksi sebesar 90%.
- Tunjangan  
Tunjangan Direksi adalah sebagai berikut:

Jenis Tunjangan	Besaran per Anggota Direksi	Keterangan
Tunjangan Hari Raya	Besaran THR maksimal 1 (satu) kali Gaji per bulan dan dibayarkan secara penuh.	Diberikan sejak diangkat oleh RUPS.
Tunjangan Perumahan	Rp 27.500.000,- per bulan. termasuk didalamnya biaya utilitas.	Tunjangan Perumahan tidak diberikan bagi anggota Direksi yang menempati rumah jabatan.
Asuransi Purna Jabatan	Maksimum premi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium per tahun.	Diikutsertakan sejak dinyatakan efektif lulus fit and proper test oleh OJK.
Keanggotaan Klub		<p><b>Direktur Utama/Wakil Direktur Utama:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (dua) keanggotaan Golf.</li> <li>- 2 (dua) keanggotaan Club Financial.</li> <li>- 1 (satu) keanggotaan Club Kebugaran (family club)</li> <li>- 2 (dua) Club profesi.</li> </ul> <p><b>Direktur:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) keanggotaan Golf.</li> <li>- 1 (satu) keanggotaan Club Kebugaran (family club).</li> <li>- 2 (dua) Club profesi.</li> </ul>
Pakaian Corporate		Berupa 2 (dua) stel jas corporate dan 1 (satu) baju batik per tahun.
Komunikasi	Biaya pulsa diganti sesuai dengan pemakaian.	Diberikan 2 (dua) unit HP yang dapat diganti setiap tahun.



## PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA REMUNERASI

3. Fasilitas  
Fasilitas yang diperoleh oleh anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Uraian
1.	Kesehatan	<p>a. Biaya pengobatan dan perawatan kesehatan bagi anggota Dewan Komisaris dan keluarga yang menjadi tanggungannya diganti penuh oleh Perusahaan.</p> <p>b. Keluarga yang ditanggung adalah suami/istri dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum pernah menikah atau bekerja dan berumur di bawah 25 (dua puluh lima) Tahun</p> <p>c. Fasilitas Kesehatan diberikan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rawat jalan dan obat;</li> <li>2) rawat inap dan obat;</li> <li>3) <i>medical check up</i>.</li> </ol> <p>d. Fasilitas Kesehatan berupa rawat jalan dan obat sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas termasuk pemeriksaan mata berikut obat, serta pembelian kacamata yang diganti penuh oleh perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penggantian <i>Frame</i> setiap 2 (dua) Tahun maksimal sebesar Rp.15 juta.</li> <li>2) Penggantian Lensa setiap 1 (satu) Tahun.</li> </ol> <p>e. <i>Medical check up</i> diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Medical check up</i> diberikan 1 (satu) kali setiap Tahun.</li> <li>2) <i>Medical check up</i> dilakukan di dalam negeri.</li> </ol> <p>f. Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian fasilitas kesehatan dapat diberikan secara penuh. Fasilitas ini termasuk transportasi dan akomodasi bagi pasien dan satu orang pendamping</p>
2.	Fasilitas Bantuan Hukum	<p>a. Diberikan Fasilitas Bantuan Hukum dalam hal terjadi tindakan/ perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan.</p> <p>b. Fasilitas Bantuan Hukum diberikan dengan tata cara dan ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN yang berlaku.</p>

## PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA REMUNERASI

### Besaran Remunerasi Direksi Tahun 2017

No	Nama	Gaji	THRK	Tantiem	Tunjangan Perumahan
<b>Direksi BRI</b>					
1	Suprajarto *)	√	√	-	√
2	Asmawi Syam **)	√	-	√	√
3	Sunarso *****)	√	√	√	-
4	Randi Anto *****)	√	√	√	-
5	Mohammad Irfan	√	√	√	√
6	Indra Utoyo *)	√	√	-	√
7	Zulhelfi Abidin **)	√	-	√	√
8	Susy Liestiowaty	√	√	√	√
9	Donsuwan Simatupang	√	√	√	√
10	Haru Koesmahargyo	√	√	√	√
11	Kuswiyoto	√	√	√	√
12	Sis Apik Wijayanto	√	√	√	√
13	Priyastomo	√	√	√	√
14	R. Sophia Alizsa *****)	√	-	-	√
15	Handayani *****)	√	-	-	√
16	Gatot Mardiwasiso ***)	-	-	√	-
17	A. Toni Soetirto ***)	-	-	√	-
<b>Total</b>		<b>34,938,451,613</b>	<b>2,914,500,000</b>	<b>230,021,390,374</b>	<b>2,787,744,538</b>

\*) Diangkat oleh RUPS tanggal 15 Maret 2017

\*\*) Diberhentikan oleh RUPS pada tanggal 15 Maret 2017

\*\*\*) Diberhentikan RUPS pada tanggal 23 Maret 2016

\*\*\*\*\*) Diangkat oleh RUPSLB tanggal 18 Oktober 2017

\*\*\*\*\*) Diberhentikan oleh RUPSLB pada tanggal 18 Oktober 2017

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun (2017)	
	Orang	Jutaan
<b>Remunerasi</b>		<b>286,916</b>
Gaji*	15	34,938
Tunjangan Rutin**	15	21,957
Tantiem***	13	230,021
<b>Fasilitas Dalam Bentuk Natura</b>		<b>11,958</b>
Perumahan	13	2,788
Santunan Purna Jabatan	11	9,171

Jumlah Remunerasi/Orang dalam satu tahun	Orang	Jutaan
Di atas Rp 2 Miliar	15	297,201
Di atas 1 Miliar s/d Rp 2 Miliar	0	
Di atas Rp 500 Juta s/d Rp 1 Miliar*****)	2	1,674
di bawah Rp 500 Juta	0	

\*) Termasuk gaji Direksi yang diangkat dan diberhentikan pada RUPS tanggal 15 Maret 2017 dan RUPSLB tanggal 18 Oktober 2017

\*\*) Tunjangan Rutin meliputi THR, Tunjangan Pakaian Corporate, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Lainnya

\*\*\*) Termasuk Tantiem Direksi yang diangkat dan diberhentikan pada tanggal 15 Maret 2017 dan 18 Oktober 2017 serta yang diberhentikan 23 Maret 2016

\*\*\*\*\*) Direksi yang diangkat sejak 18 Oktober 2017



## PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA REMUNERASI

	Tunjangan Trnasportasi	Premi Asuransi Purna Jabatan / Tahun	Pakaian Corporate	Tunjangan Komunikasi	Jumlah Remunerasi Orang Per Tahun Di atas Rp.2 Miliar
-	√	√	√	√	√
-	-	-	√	√	√
-	√	-	-	√	√
-	√	-	-	√	√
-	√	√	√	√	√
-	√	-	-	√	√
-	-	-	-	√	√
-	√	-	-	√	√
-	√	√	√	√	√
-	√	√	√	√	√
-	√	-	-	√	√
-	√	√	√	√	√
-	√	√	√	√	√
-	-	√	√	√	-
-	-	-	-	√	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	9,170,812,500	364,569,579	467,928,725	-	-

# RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT GABUNGAN DEWAN, & RAPAT DIREKSI

## RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat dibagi menjadi rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, rapat internal Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris dengan Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris. Rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris berlangsung secara berkesinambungan. Inisiatif rapat gabungan ini dapat berasal dari Dewan Komisaris maupun Direksi. Melalui rapat gabungan ini, didapatkan kesatuan pandangan dan keselarasan tindakan antara Dewan Komisaris sebagai organ yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasehat, dengan Direksi sebagai pelaksana operasional harian Perseroan.

## Kebijakan & Pelaksanaan Rapat 2017

### Kebijakan

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar BRI sebagai berikut:

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.</li> <li>2. Rapat bersama Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan; Rapat dapat diadakan sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa Anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.</li> <li>3. Panggilan rapat harus dilakukan oleh Komisaris Utama. Bila Komisaris Utama berhalangan atau tidak ada, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama dan bila Wakil Komisaris Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka panggilan rapat dapat dilakukan oleh seorang anggota Dewan Komisaris.</li> <li>4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (Radirkom) harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau surat elektronik (<i>e-mail</i>) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.</li> <li>5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris (Radirkom) dilakukan secara tertulis, dan disampaikan secara fisik atau melalui media elektronik.</li> <li>6. Panggilan rapat seperti tersebut diatas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat yang diadakan sebelumnya.</li> <li>7. Pedoman pelaksanaan rapat ditetapkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi/Direktur, Sekretaris Dewan Komisaris dapat berkoordinasi dengan Divisi Sekretariat Perseroan.</li> <li>b. Rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.</li> <li>c. Agenda dan jadwal rapat merupakan tanggung jawab dari Sekretaris Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Komisaris.</li> <li>d. Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk membantu, mengatur dan mempersiapkan rapat, menyiapkan, dan membagikan agenda rapat dan materi diskusi.</li> <li>e. Dalam hal rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi/Direktur, Sekretaris Dewan Komisaris dapat berkoordinasi dengan Divisi Sekretariat Perseroan.</li> <li>f. Materi rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi/Direktur, harus diberikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat berlangsung, sehingga Dewan Komisaris memiliki kesempatan untuk menelaah informasi dan/atau untuk meminta informasi tambahan sebelum rapat.</li> </ol> </li> </ol>
<b>Etika Rapat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.</li> </ol>



## RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT GABUNGAN DEWAN, & RAPAT DIREKSI

<b>Pengambilan Keputusan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.</li> <li>2. Pimpinan rapat harus mengemukakan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat.</li> <li>3. Segala keputusan rapat bersifat mengikat bagi seluruh Anggota Dewan Komisaris.</li> <li>4. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu dan seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya. Dalam kuasa sebagaimana dimaksud, anggota Dewan Komisaris yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Dewan Komisaris dapat mengajukan pendapatnya mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal-hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sah dalam Rapat Dewan Komisaris.</li> <li>5. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ol>
<b>Hak Suara</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak suara dalam rapat diatur sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk Anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut;</li> <li>b. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;</li> <li>c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara yang terbanyak dari yang hadir;</li> <li>d. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu rapat dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.</li> </ol> </li> <li>2. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.</li> <li>3. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.</li> </ol>

## RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT GABUNGAN DEWAN, & RAPAT DIREKSI

<b>Dokumentasi</b>	<p>Dalam setiap rapat harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan. Risalah rapat merupakan bukti yang sah untuk para Anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Pedoman pembuatan risalah rapat ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil Rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris baik yang hadir dan yang memberikan serta disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.</li> <li>Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi (Radirkom maupun Rakom) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat.</li> <li>Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib didokumentasikan oleh Perseroan.</li> <li>Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.</li> </ol>
--------------------	--

### Pelaksanaan Rapat Tahun 2017

Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan dan pemberian nasehat, setiap awal Tahun melalui Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris dan Komite (KNR, KPMR, KA dan KTKT) menyusun agenda rapat rutin yang akan dilaksanakan pada Tahun berjalan.

Agenda Rapat Rutin yang telah ditetapkan Dekom pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Agenda Rapat Tahun 2017	Waktu
1	Pengadaan Auditor Independen (KAP)	Minggu ke IV Januari 2017
2	Pengawasan Realisasi RBB Semester II Tahun 2017	Minggu ke I Februari 2017
3	Evaluasi Kinerja Direksi dan Dekom	Minggu ke II Februari 2017
4	Pembahasan Proses Nominasi & Remunerasi Direksi	Minggu ke III Februari 2017
5	Pembahasan Laporan Keuangan akhir Tahun 2016	Minggu ke I Maret 2017
7	Pembahasan Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2017	Minggu ke III April 2017
8	Pembahasan Laporan Keuangan Triwulan II Tahun 2017	Minggu ke III Juli 2017
9	Pengawasan Realisasi RBB Semester I Tahun 2017	Minggu I Agustus 2017
10	Pembahasan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2017	Minggu ke III Oktober 2017
11	Review atas Implementasi Remunerasi Pekerja dan Kebijakan Ketenagakerjaan	Minggu ke IV Oktober 2017
12	Rencana Bisnis Bank 2018-2020	Minggu ke II April 2017
13	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2017 serta Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun 2017	Minggu ke II November 2017

### Frekuensi Rapat dan Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Frekuensi rapat dan kehadiran Dewan Komisaris selama tahun 2017, adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	Mustafa Abubakar*	Komisaris Utama/Independen	3	3	100%
2	Andrinof A. Chaniago***	Komisaris Utama/Independen	19	16	84%
3	Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama	22	16	73%



## RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT GABUNGAN DEWAN, &amp; RAPAT DIREKSI

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
4	Ahmad Fuad*	Komisaris Independen	3	2	67%
5	Adhyaksa Dault**	Komisaris Independen	13	10	77%
6	A Fuad Rahmany	Komisaris Independen	22	19	86%
7	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	22	19	86%
8	Mahmud	Komisaris Independen	22	19	86%
9	V. Sonny Loho	Komisaris	22	17	77%
10	Jeffry J Wurangian	Komisaris	22	18	82%
11	Nicolaus TB Harjanto***	Komisaris	19	14	74%

\*) Efektif 1 Januari 2017 – 15 Maret 2017

\*\*) Efektif 1 Januari 2017 – 18 Oktober 2017

\*\*\*) Efektif sejak 19 Juli 2017

## Realisasi Agenda, Tanggal, Peserta Rapat Internal Dewan Komisaris

No	Rapat Internal Dewan Komisaris	Tanggal Rapat	Nomor Notulen Rapat	Jumlah Komisaris yang Hadir	Keterangan
1	Sharing Session Economic Outlook 2017	10 Januari 2017	01 - KOM/01/2017	8	Kuorum
2	1. Penetapan anggota komite tata kelola terintegrasi 2. Penyajian laporan keuangan menyangkut keputusan RUPS atas alokasi dana program bina lingkungan tahun 2016	21 Februari 2017	05 - KOM/02/2017	8	Kuorum
3	Pengadaan jasa audit kantor akuntan publik (KAP) dalam rangka audit umum atas laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan PKBL PT BRI (Persero) Tbk. tahun buku 2017	28 Februari 2017	06 - KOM/02/2017	7	Kuorum
4	Perkenalan Anggota Dewan Komisaris	21 Maret 2017	09 - KOM/03/2017	9	Kuorum
5	Pembahasan Rencana Pemberian Kredit Kepada PT Bringin Srikandi Finance / PT BSF	18 April 2017	11 - KOM/04/2017	6	Kuorum
6	Pembahasan Usulan Kepala SKAI	09 Mei 2017	14 - KOM/05/2017	5	Kuorum
7	1. Pembahasan laporan keuangan dan laporan investasi DPLK BRI 2. Penerapan tata kelola dan manajemen risiko DPLK BRI	20 Juni 2017	20 - KOM/06/2017	5	Kuorum
8	Penambahan Modal BRI Agro tahun 2017 dan Rencana Pemberian Insentif Kepada Pekerja BRI berupa Saham BRI Agro.	06 Juli 2017	22 - KOM/07/2017	6	Kuorum
9	Perubahan Anggaran Dasar BRI	11 Juli 2017	23 - KOM/07/2017	7	Kuorum
10	Laporan Kinerja DPLK Semester I tahun 2017	8 Agustus 2017	26 - KOM/08/2017	7	Kuorum
11	1. Usulan agenda RUPS LB BRI tahun 2017 2. Persiapan agenda retreat Dewan Komisaris BRI 3. Hal-hal strategis lain terkait dengan fungsi pengawasan dekom	01 Agustus 2017	28 - KOM/08/2017	7	Kuorum

## RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT GABUNGAN DEWAN, &amp; RAPAT DIREKSI

No	Rapat Internal Dewan Komisaris	Tanggal Rapat	Nomor Notulen Rapat	Jumlah Komisaris yang Hadir	Keterangan
12	Pembahasan Internal Dewan Komisaris terkait Threshold Anggaran Dasar BRI	21 Juli 2017	29 - KOM/07/2017	6	Kuorum
13	1. Stock split saham BRI 2. Penyertaan modal pada perusahaan Modal Ventura 3. Penambahan penyertaan modal pada BRI Life	05 September 2017	30 - KOM/09/2017	9	Kuorum
14	1. Persetujuan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait 2. Pembentukan Kembali Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi	23 Oktober 2017	35 - KOM/10/2017	6	Kuorum
15	1. Pembahasan usulan perubahan peraturan dana Pensiun, 2. Pemberian manfaat lain berupa dana manfaat tambahan kepada penerima manfaat pensiun yang telah menerima manfaat pensiun bulanan	23 Oktober 2017	36 - KOM/10/2017	7	Kuorum
16	Persetujuan Dewan Komisaris atas usulan threshold pembuatan Direksi yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris & Seri A Dwi Warna	24 Oktober 2017	38 - KOM/10/2017	6	Kuorum
17	Pembahasan kontrak kerja evaluasi komite Non Komisaris	31 Oktober 2017	39 - KOM/10/2017	6	Kuorum
18	Usulan Organisasi BRI	14 Nopember 2017	40 - KOM/11/2017	7	Kuorum
19	Recovery Plan BRI	28 November 2017	42 - KOM/11/2017	6	Kuorum
20	Evaluasi kebijakan <i>Human Capital</i> dan Rencana Pengembangan <i>Human Capital</i>	05 Desember 2017	44 - KOM/12/2017	9	Kuorum
21	Persetujuan penyediaan dana pihak terkait (BRI Syariah & BRINS)	12 Desember 2017	45 - KOM/12/2017	8	Kuorum
22	Pembahasan persetujuan kebijakan recovery plan	19 Desember 2017	47 - KOM/12/2017	8	Kuorum

## RENCANA RAPAT DEWAN KOMISARIS 2018

No.	Agenda Rapat	Jadwal Pelaksanaan
1.	Pembahasan Kinerja Keuangan Triwulan IV 2017	Minggu I Februari 2018
2.	Pembahasan Kinerja Keuangan Triwulan I Tahun 2018	Minggu ke III April 2018
3.	Pembahasan Kinerja Keuangan Triwulan II Tahun 2018	Minggu ke III Juli 2018
4.	Pembahasan Kinerja Keuangan Triwulan III Tahun 2018	Minggu ke III Oktober 2018



## RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT GABUNGAN DEWAN, &amp; RAPAT DIREKSI

No.	Agenda Rapat	Jadwal Pelaksanaan
5	Pembahasan dan evaluasi penilaian tingkat kesehatan Bank semester II tahun 2017	Minggu ke III Januari 2018
6	Pembahasan dan evaluasi penilaian tingkat kesehatan Bank semester I tahun 2018	Minggu ke III Juli 2018
7	Pembahasan <i>Review</i> RBB 2018-2020 dan RKAP 2016 (Revisi)	Minggu ke II Juni 2018
8	Pembahasan usulan RBB 2019-2021 dan RKAP 2017	Minggu ke II November 2018
9	Pembahasan Usulan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	Minggu ke IV Januari 2018
10	Pembahasan Nominasi Calon Pengurus BRI	Minggu ke I Maret 2018
11	Pembahasan Porifl Risiko, Penilaian GCG dan Fungsi Kepatuhan Triwulan IV Tahun 2017	Minggu Ke II Februari 2018
12	Pembahasan Porifl Risiko, Penilaian GCG dan Fungsi Kepatuhan Triwulan I 2018	Minggu Ke II April 2018
13	Pembahasan Porifl Risiko, Penilaian GCG dan Fungsi Kepatuhan Triwulan II 2018	Minggu ke III Juli 2018
14	Pembahasan Porifl Risiko, Penilaian GCG dan Fungsi Kepatuhan Triwulan III 2018	Minggu ke III Oktober 2018
15	Evaluasi hasil audit intern serta pemantauan tindak lanjut direksi atas hasil audit internal dan eksternal Triwulan IV 2017	Minggu ke II Februari 2018
16	Evaluasi hasil audit intern serta pemantauan tindak lanjut direksi atas hasil audit internal dan eksternal Triwulan I 2018	Minggu Ke II April 2018
17	Evaluasi hasil audit intern serta pemantauan tindak lanjut direksi atas hasil audit internal dan eksternal Triwulan II 2018	Minggu ke III Juli 2018
18	Evaluasi hasil audit intern serta pemantauan tindak lanjut direksi atas hasil audit internal dan eksternal Triwulan III 2018	Minggu ke III Oktober 2018
19	Pembahasan Audit Porifl Risiko, Penilaian GCG dan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi Semster II 2017	Minggu Ke II Maret 2018
20	Pembahasan Audit Porifl Risiko, Penilaian GCG dan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi Semster I 2018	Minggu ke III September 2018

## RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI (RAPAT GABUNGAN DEWAN)

Kebijakan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan mengacu kepada POJK 33/POJK.04/2014 sebagai berikut:

1. Rapat bersama Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
2. Rapat dapat diadakan sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa Anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan;
3. Persiapan rapat dilakukan oleh sekretaris Dewan Komisaris berkoordinasi dengan Divisi Sekretariat Perusahaan;
4. Hasil Rapat bersama Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

## RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT GABUNGAN DEWAN, &amp; RAPAT DIREKSI

## Frekuensi Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi (Radirkom)

Frekuensi Rapat dan tingkat kehadiran rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	Mustafa Abubakar*	Komisaris Utama/Independen	2	2	100%
2	Andrinof A. Chaniago***	Komisaris Utama/Independen	7	7	100%
3	Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama	9	7	78%
4	Adhyaksa Dault**	Komisaris Independen	7	5	71%
5	Ahmad Fuad*	Komisaris Independen	2	2	100%
6	A Fuad Rahmany	Komisaris Independen	9	9	100%
7	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	9	7	78%
8	Mahmud	Komisaris Independen	9	9	100%
9	V. Sonny Loho	Komisaris	9	8	89%
10	Jeffry J Wurangian	Komisaris	9	8	89%
11	Nicolaus TB Harjanto***	Komisaris	7	6	86%

\*) Efektif 1 Januari 2017 – 15 Maret 2017

\*\*) Efektif 1 Januari 2017 – 18 Oktober 2017

\*\*\*) Efektif sejak 19 Juli 2017

## Realisasi Agenda, Tanggal, Peserta Rapat Dewan Komisaris dan Direksi (Radirkom)

No	Rapat Radirkom	Tanggal Rapat	Nomor Notulen Rapat	Jumlah Peserta yang Hadir			Keterangan
				Komisaris	Direksi	SEVP	
1	Pembahasan kinerja keuangan tahun 2016	30 Januari 2017	02 - KOM/01/2017	7	10	4	Kuorum
2	Pembahasan Corporate plan BRI tahun 2018-2022	28 Februari 2017	07 - KOM/02/2017	8	10	3	Kuorum
3	Pembahasan kinerja BRI triwulan I tahun 2017	18 April 2017	12 - KOM/04/2017	7	11	4	Kuorum
4	Pembahasan RBB 2017-2019 dan RKAP 2017 (Revisi)	06 Juni 2017	17 - KOM/06/2017	7	11	4	Kuorum
5	Pembahasan tindak lanjut temuan audit dalam management letter 2016	11 Juli 2017	24 - KOM/07/2017	8	8	4	Kuorum
6	Pembahasan Kinerja keuangan BRI semester I tahun 2017	01 Agustus 2017	25 - KOM/08/2017	8	9	5	Kuorum
7	Rencana stock split saham Bank BRI, Rencana penyertaan modal venture capital, rencana penambahan modal BRI Life	29 Agustus 2017	27 - KOM/08/2017	8	10	0	Kuorum
8	Pembahasan kinerja laporan keuangan (pra publik) triwulan III tahun 2017	24 Oktober 2017	37 - KOM/10/2017	8	10	5	Kuorum
9	Rencana Bisnis Bank Tahun 2018-2020	20 November 2017	41 - KOM/11/2017	9	11	4	Kuorum



## RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT GABUNGAN DEWAN, &amp; RAPAT DIREKSI

## Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Dengan Direktur Bidang

Frekuensi Rapat dan tingkat kehadiran rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direktur Bidang adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	Mustafa Abubakar*	Komisaris Utama/Independen	2	2	100%
2	Andrinof A. Chaniago***	Komisaris Utama/Independen	12	10	83%
3	Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama	14	11	79%
4	Ahmad Fuad*	Komisaris Independen	2	2	100%
5	Adhyaksa Dault**	Komisaris Independen	12	9	75%
6	A Fuad Rahmany	Komisaris Independen	14	13	93%
7	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	14	13	93%
8	Mahmud	Komisaris Independen	14	14	100%
9	V. Sonny Loho	Komisaris	14	13	93%
10	Jeffry J Wurangian	Komisaris	14	13	93%
11	Nicolaus TB Harjanto***	Komisaris	12	9	75%

\*) Efektif 1 Januari 2017 – 15 Maret 2017

\*\*\*) Efektif 1 Januari 2017 – 18 Oktober 2017

\*\*\*\*) Efektif sejak 19 Juli 2017

## Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Seluruh Rapat Dewan Komisaris

Frekuensi Rapat dan tingkat kehadiran rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direktur Bidang adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Rapat Internal Dekom		Rapat Dekom & Dir Bidang		Radirkom		Total Kehadiran		
			Jumlah Rapat	Kehadiran	Jumlah Rapat	Kehadiran	Jumlah Rapat	Kehadiran	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	Mustafa Abubakar*	Komisaris Utama /Independen	3	3	2	2	2	2	7	7	100%
2	Andrinof A. Chaniago***	Komisaris Utama /Independen	19	16	12	10	7	7	38	33	87%
3	Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama	22	16	14	11	9	7	45	34	76%
4	Ahmad Fuad*	Komisaris Independen	3	2	2	2	2	2	7	6	86%
5	Adhyaksa Dault**	Komisaris Independen	13	10	12	9	7	5	32	24	75%
6	A Fuad Rahmany	Komisaris Independen	22	19	14	13	9	9	45	41	91%
7	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	22	19	14	13	9	7	45	39	87%
8	Mahmud	Komisaris Independen	22	19	14	14	9	9	45	42	93%
9	V. Sonny Loho	Komisaris	22	17	14	13	9	8	45	38	84%
10	Jeffry J Wurangian	Komisaris	22	18	14	13	9	8	45	39	87%
11	Nicolaus TB Harjanto***	Komisaris	19	14	12	9	7	6	38	29	76%

## RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT GABUNGAN DEWAN, &amp; RAPAT DIREKSI

## Realisasi Agenda, Tanggal, Peserta Rapat Dewan Komisaris dan Direktur Bidang

No	Rapat Dekom & Direktur Bidang	Tanggal Rapat	Nomor Notulen Rapat	Jumlah Peserta yang Hadir			Keterangan
				Komisaris	Direksi	SEVP	
1	Review kebijakan penghapusbukuan kredit, restrukturisasi dan pengelolaan NPL	21 Februari 2017	04 - KOM/02/2017	7	1	-	Kuorum
2	Pembahasan temuan audit bidang IT dan E-Channel	07 Maret 2017	08 - KOM/03/2017	8	2	1	Kuorum
3	Pembahasan Profil Risiko Terintegrasi & Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Smt. II 2016	04 April 2017	10 - KOM/04/2017	8	1	-	Kuorum
4	Pembahasan Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru BRI	02 Mei 2017	13 - KOM/05/2017	7	1	-	Kuorum
5	Usulan Organisasi BRI	09 Mei 2017	15 - KOM/05/2017	8	3	-	Kuorum
6	Pembahasan Lanjutan Rencana Pemberian Kredit Kepada PT Bringin Srikandi Finance / PT BSF	09 Mei 2017	16 - KOM/05/2017	7	1	-	Kuorum
7	Usulan Penambahan Modal BRI Agro tahun 2017	06 Juni 2017	18 - KOM/06/2017	7	6	2	Kuorum
8	Sharing Session strategi IT dan Pengemban produk BRI	13 Juni 2017	19 - KOM/06/2017	8	1	-	Kuorum
9	Laporan dan Pembahasan Rencana Pemberian Saham BRI Agro kepada Pekerja BRI	04 Juli 2017	21 - KOM/07/2017	8	1	-	Kuorum
10	Pembahasan Usulan Penyertaan Modal pada BRI Life	06 September 2017	31 - KOM/09/2017	7	3	-	Kuorum
11	Asumsi Dasar RBB BRI Tahun 2018-2020	19 September 2017	33 - KOM/09/2017	7	1	-	Kuorum
12	Update Progress Perbaikan IT, Tindak Lanjut Implementasi Strategi IT dan Pengembangan Produk Digital Banking BRI	10 Oktober 2017	34 - KOM/10/2017	8	1	-	Kuorum
13	Profil Risiko Terintegrasi, Transaksi Intra Group, & Review KUMR	28 November 2017	43 - KOM/11/2017	8	1	-	Kuorum
14	Update progress transformasi IT, Sinergi pengembangan digital banking & cosumer bankong BRI	12 Desember 2017	46 - KOM/12/2017	7	2	-	Kuorum



## RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT GABUNGAN DEWAN, &amp; RAPAT DIREKSI

## RAPAT DIREKSI

Kebijakan Rapat Direksi diatur didalam Anggaran Dasar BRI Pasal 13 sebagai berikut:

<b>Etika Rapat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan.</li> <li>2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</li> <li>3. Direksi wajib menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dengan agenda yang disesuaikan dengan Kalender Manajemen. Penjadwalan rapat tersebut ditetapkan dalam Rapat Direksi.</li> <li>4. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebelumnya, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Selain rapat yang telah terjadwal tersebut, bahan rapat disampaikan paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.</li> <li>5. Selain Rapat Direksi yang telah dijadwalkan tersebut, Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dipandang perlu oleh 1 (satu) orang atau lebih anggota Direksi atau</li> <li>b. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris.</li> </ol> </li> <li>6. Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama di dalam wilayah Republik Indonesia. Rapat Direksi yang diselenggarakan di tempat lain selain tersebut pada angka (6) hanya dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dilaksanakan di dalam wilayah Republik Indonesia dan dihadiri oleh seluruh anggota Direksi atau wakilnya yang sah</li> </ol>
<b>Pemanggilan Rapat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili perseroan</li> <li>2. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili, atau surat elektronik (e-mail).</li> <li>3. Pemanggilan Rapat disampaikan sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, tanpa memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak</li> <li>4. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.</li> <li>5. Pemanggilan tertulis untuk rapat tersebut harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.</li> <li>6. Direktur Utama memimpin Rapat Direksi.</li> <li>7. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut.</li> </ol>

## RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT GABUNGAN DEWAN, & RAPAT DIREKSI

<b>Pengambilan Keputusan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari ½ jumlah anggota Direksi.</li> <li>2. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.</li> <li>3. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.</li> <li>4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.</li> <li>5. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.</li> <li>6. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.</li> </ol>
<b>Hak Suara</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.</li> <li>2. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.</li> <li>3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.</li> <li>4. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.</li> <li>5. Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direktur Utama, atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal-hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi.</li> </ol>



## RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT GABUNGAN DEWAN, &amp; RAPAT DIREKSI

## Frekuensi Rapat dan Kehadiran Direksi

Pada tahun 2017, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Direksi sebanyak 58 dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Rapat*	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
1	Asmawi Syam**	58	26	45%
2	Sunarso***	58	50	86%
3	Randi Anto	58	47	81%
4	Susy Liestiowaty	58	52	90%
5	Zulhelfi Abidin	58	39	67%
6	Haru Koesmahargyo	58	38	66%
7	Donsuwan Simatupang	58	47	81%
8	Mohammad Irfan	58	45	78%
9	Kuswiyoto	58	43	74%
10	Priyastomo	45	32	71%
11	Sis Apik Wijayanto	45	39	87%

\*) Jumlah Rapat s/d Desember 2017

\*\*\*) Efektif s/d 15 Maret 2017

\*\*\*\*) Efektif s/d 18 Oktober 2017

## Rekapitulasi Rapat Direksi &amp; Kehadiran

No	Tanggal	Agenda Rapat Direksi	Direksi Yang Hadir	Kehadiran	Kuorum
<b>Januari</b>					
1	10-Jan 2017	1. Pelaksanaan Raker BRI Tahun 2017 2. Presentasi Penyusunan Konsep Program Bina Lingkungan 2017 - 2021	1. Asmawi Syam 2. Sunarso 3. Randi Anto 4. Donsuwan Simatupang 5. Susy Liestiowaty 6. Mohammad Irfan 7. Haru Koesmahargyo 8. Zulhelfi Abidin 9. Kuswiyoto 10. Sis Apik Wijayanto 11. Priyastomo	100%	Kuorum
2	11-Jan 2017	Potensi Kerjasama dengan Instansi/Lembaga lainnya.	1. Asmawi Syam 2. Sunarso 3. Randi Anto 4. Donsuwan Simatupang 5. Susy Liestiowaty 6. Mohammad Irfan 7. Haru Koesmahargyo 8. Zulhelfi Abidin 9. Kuswiyoto 10. Sis Apik Wijayanto 11. Priyastomo	100%	Kuorum

Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

## RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT GABUNGAN DEWAN, &amp; RAPAT DIREKSI

No	Tanggal	Agenda Rapat Direksi	Direksi Yang Hadir	Kehadiran	Kuorum
3	30-Jan 2017	Persiapan Analyst Meeting & Publikasi Kinerja Keuangan 31 Desember 2016	1. Asmawi Syam 2. Sunarso 3. Randi Anto 4. Donsuwan Simatupang 5. Susy Liestiwaty 6. Mohammad Irfan 7. Haru Koesmahargyo 8. Zulhelfi Abidin 9. Kuswiyoto 10. Sis Apik Wijayanto 11. Priyastomo	100%	Kuorum
4	07-Feb 2017	1. Corporate Plan BRI 2018 dan 2022 2. Persetujuan Struktur Organisasi 3. Persiapan RUPST 2017	1. Sunarso 2. Randi Anto 3. Donsuwan Simatupang 4. Susy Liestiwaty 5. Mohammad Irfan 6. Haru Koesmahargyo 7. Zulhelfi Abidin 8. Kuswiyoto 9. Sis Apik Wijayanto 10. Priyastomo	90%	Kuorum
5	14-Feb 2017	1. Produk Digital Saving & E-Wallet 2. Digital Saving BRIAgro 3. Progress Proyek Pemerintah	1. Asmawi Syam 2. Sunarso 3. Randi Anto 4. Donsuwan Simatupang 5. Susy Liestiwaty 6. Mohammad Irfan 7. Zulhelfi Abidin 8. Kuswiyoto 9. Sis Apik Wijayanto 10. Priyastomo	91%	Kuorum
<b>Februari</b>					
6	21-Feb 2017	1. Pengembangan Infrastruktur Trade Business BRI 2. Program Pengembangan UMKM melalui Wirausaha BRILian dan Rumah Kreatif BUMN 3. BRILINK Web	1. Asmawi Syam 2. Sunarso 3. Randi Anto 4. Donsuwan Simatupang 5. Susy Liestiwaty 6. Mohammad Irfan 7. Haru Koesmahargyo 8. Zulhelfi Abidin 9. Kuswiyoto 10. Sis Apik Wijayanto 11. Priyastomo	100%	Kuorum



## RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT GABUNGAN DEWAN, &amp; RAPAT DIREKSI

No	Tanggal	Agenda Rapat Direksi	Direksi Yang Hadir	Kehadiran	Kuorum
7	27-Feb 2017	1. Operasional Cardlink 2. Update Program Pemerintah 3. Dividend Payout Tahun Buku 2016	1. Asmawi Syam 2. Sunarso 3. Randi Anto 4. Donsuwan Simatupang 5. Susy Liestiowaty 6. Mohammad Irfan 7. Haru Koesmahargyo 8. Zulhelfi Abidin 9. Kuswiyoto 10. Sis Apik Wijayanto 11. Priyastomo	100%	Kuorum
<b>Maret</b>					
8	7-Mar 2017	1. Profil Risiko Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 2. Penetapan Core Banking System BRIHK 3. Pembukaan BRI Timor Leste	1. Asmawi Syam 2. Sunarso 3. Randi Anto 4. Donsuwan Simatupang 5. Susy Liestiowaty 6. Mohammad Irfan 7. Haru Koesmahargyo 8. Zulhelfi Abidin 9. Kuswiyoto 10. Sis Apik Wijayanto 11. Priyastomo	100%	Kuorum
<b>April</b>					
9	4-Apr 2017	1. Perubahan SK Komite Capital & Investment 2. Program CSR BRI Mengajar : BRI Mencerdaskan Anak Bangsa	1. Sunarso 2. Donsuwan Simatupang 3. Mohammad Irfan 4. Kuswiyoto 5. Sis Apik Wijayanto 6. Susy Liestiowaty 7. Priyastomo 8. Randi Anto 9. Indra Utoyo	82%	Kuorum
10	11-Apr 2017	1. Laporan Kinerja Keuangan 31 Maret 2017 2. Progress Report Program Pemerintah	1. Suprajarto 2. Sunarso 3. Donsuwan Simatupang 4. Mohammad Irfan 5. Haru Koesmahargyo 6. Kuswiyoto 7. Susy Liestiowaty 8. Priyastomo 9. Randi Anto 10. Indra Utoyo	91%	Kuorum

## RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT GABUNGAN DEWAN, &amp; RAPAT DIREKSI

No	Tanggal	Agenda Rapat Direksi	Direksi Yang Hadir	Kehadiran	Kuorum
11	18-Apr 2017	1. Penilaian Profil Risiko Tingkat Kesehatan Bank Triwulan I Tahun 2017 2. Persiapan Analyst Meeting : Paparan Kinerja Triwulan I Tahun 2017	1. Suprajarto 2. Sunarso 3. Donsuwan Simatupang 4. Mohammad Irfan 5. Haru Koesmahargyo 6. Kuswiyoto 7. Susy Liestiwaty 8. Priyastomo 9. Randi Anto 10. Indra Utoyo 11. Sis Apik Wijayanto	100%	Kuorum
12	25-Apr 2017	Progress Program Pemerintah	1. Suprajarto 2. Sunarso 3. Mohammad Irfan 4. Kuswiyoto 5. Sis Apik Wijayanto 6. Randi Anto 7. Indra Utoyo	64%	Kuorum
<b>Mei</b>					
13	2-Mei 2017	Laporan Pengembangan Produk & Aktivitas Baru	1. Suprajarto 2. Sunarso 3. Donsuwan Simatupang 4. Mohammad Irfan 5. Haru Koesmahargyo 6. Kuswiyoto 7. Sis Apik Wijayanto 8. Susy Liestiwaty 9. Randi Anto 10. Indra Utoyo	91%	Kuorum
14	9-Mei 2017	1. Implementasi Aturan GWM Baru 2. Rencana Aksi Korporasi	1. Sunarso 2. Randi Anto 3. Donsuwan Simatupang 4. Susy Liestiwaty 5. Indra Utoyo 6. Priyastomo	55%	Kuorum
15	16-Mei 2017	1. Revisi RBB dan RKAP	1. Suprajarto 2. Sunarso 3. Donsuwan Simatupang 4. Mohammad Irfan 5. Haru Koesmahargyo 6. Kuswiyoto 7. Susy Liestiwaty 8. Priyastomo 9. Randi Anto 10. Sis Apik Wijayanto	91%	Kuorum



## RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT GABUNGAN DEWAN, &amp; RAPAT DIREKSI

No	Tanggal	Agenda Rapat Direksi	Direksi Yang Hadir	Kehadiran	Kuorum
16	17-Mei 2017	Penetapan Organisasi BRI	1. Suprajarto 2. Sunarso 3. Donsuwan Simatupang 4. Mohammad Irfan 5. Haru Koesmahargyo 6. Kuswiyoto 7. Sis Apik Wijayanto 8. Susy Liestiowaty 9. Priyastomo 10. Randi Anto	91%	Kuorum
17	23-Mei 2017	1. Paparan Kinerja Perusahaan Anak 2. Perubahan Komite Kredit	1. Suprajarto 2. Sunarso 3. Donsuwan Simatupang 4. Mohammad Irfan 5. Haru Koesmahargyo 6. Kuswiyoto 7. Susy Liestiowaty 8. Priyastomo 9. Randi Anto 10. Indra Utoyo	91%	Kuorum
18	30-Mei 2017	1. Laporan Persiapan Lebaran 2. Rencana Penyertaan Lembaga Service National Payment Gateway (NPG) 3. Penetapan Komite-Komite Direksi	1. Suprajarto 2. Sunarso 3. Mohammad Irfan 4. Haru Koesmahargyo 5. Susy Liestiowaty 6. Priyastomo 7. Randi Anto 8. Indra Utoyo 9. Sis Apik Wijayanto	82%	Kuorum
<b>Juni</b>					
19	6-Juni 2017	1. Penetapan Organisasi Kantor Pusat 2. Persiapan Kegiatan Ramadhan 3. Persiapan Layanan Lebaran 4. Program BRI Point	1. Sunarso 2. Randi Anto 3. Donsuwan Simatupang 4. Mohammad Irfan 5. Haru Koesmahargyo 6. Kuswiyoto 7. Sis Apik Wijayanto 8. Susy Liestiowaty 9. Indra Utoyo	82%	Kuorum

Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

## RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT GABUNGAN DEWAN, &amp; RAPAT DIREKSI

No	Tanggal	Agenda Rapat Direksi	Direksi Yang Hadir	Kehadiran	Kuorum
20	20-Juni 2017	1. Rencana Stocksplrit 2. Rencana Aksi Korporasi	1. Suprajarto 2. Sunarso 3. Donsuwan Simatupang 4. Mohammad Irfan 5. Haru Koesmahargyo 6. Kuswiyoto 7. Sis Apik Wijayanto 8. Susy Liestiwaty 9. Indra Utoyo 10. Priyastomo 11. Randi Anto	100%	Kuorum
<b>Juli</b>					
21	4-Juli 2017	1. Rencana Aksi Korporasi 2. Laporan Keuangan Triwulan II Tahun 2017	1. Suprajarto 2. Sunarso 3. Donsuwan Simatupang 4. Mohammad Irfan 5. Haru Koesmahargyo 6. Kuswiyoto 7. Sis Apik Wijayanto 8. Susy Liestiwaty 9. Indra Utoyo 10. Priyastomo 11. Randi Anto	100%	Kuorum
22	11-Juli 2017	1. Rencana Stocksplrit 2. Progress Program Pemerintah	1. Suprajarto 2. Sunarso 3. Donsuwan Simatupang 4. Mohammad Irfan 5. Haru Koesmahargyo 6. Kuswiyoto 7. Sis Apik Wijayanto 8. Indra Utoyo 9. Priyastomo	82%	Kuorum
23	18-Juli 2017	1. Penilaian Profil Risiko Tingkat Kesehatan Bank Triwulan II Tahun 2017 2. Rencana Pembangunan Menara BRI Gatot Subroto 3. Update BRISat	1. Suprajarto 2. Mohammad Irfan 3. Haru Koesmahargyo 4. Kuswiyoto 5. Sis Apik Wijayanto 6. Susy Liestiwaty 7. Indra Utoyo 8. Priyastomo 9. Randi Anto	82%	Kuorum



## RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT GABUNGAN DEWAN, &amp; RAPAT DIREKSI

No	Tanggal	Agenda Rapat Direksi	Direksi Yang Hadir	Kehadiran	Kuorum
24	25-Juli 2017	1. Laporan Keuangan BRI Triwulan II Tahun 2017 2. Rencana Aksi Korporasi	1. Suprajarto 2. Sunarso 3. Donsuwan Simatupang 4. Mohammad Irfan 5. Haru Koesmahargyo 6. Kuswiyoto 7. Sis Apik Wijayanto 8. Susy Liestiowaty 9. Indra Utoyo 10. Priyastomo	91%	Kuorum
<b>Agustus</b>					
25	7-Aug 2017	1. Threshold Tindakan Direksi yang membutuhkan Persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwi Warna 2. Progress Keikutsertaan pada ASIAN GAMES	1. Suprajarto 2. Sunarso 3. Donsuwan Simatupang 4. Mohammad Irfan 5. Haru Koesmahargyo 6. Kuswiyoto 7. Sis Apik Wijayanto 8. Susy Liestiowaty 9. Indra Utoyo 10. Priyastomo 11. Randi Anto	100%	Kuorum
26	15-Aug 2017	Rencana RUPSLB BRI 2017	1. Suprajarto 2. Sunarso 3. Mohammad Irfan 4. Haru Koesmahargyo 5. Kuswiyoto 6. Sis Apik Wijayanto 7. Susy Liestiowaty 8. Randi Anto	73%	Kuorum
27	22-Aug 2017	1. <i>Network Service Enhancement</i> 2. Rencana Aksi Korporasi Perusahaan Anak 3. Rencana Aksi Korporasi 4. Optimalisasi Jaringan Kantor	1. Suprajarto 2. Sunarso 3. Randi Anto 4. Donsuwan Simatupang 5. Susy Liestiowaty 6. Mohammad Irfan 7. Haru Koesmahargyo 8. Sis Apik Wijayanto 9. Priyastomo 10. Indra Utoyo	91%	Kuorum

Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

## RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT GABUNGAN DEWAN, &amp; RAPAT DIREKSI

No	Tanggal	Agenda Rapat Direksi	Direksi Yang Hadir	Kehadiran	Kuorum
28	29-Aug 2017	1. Rencana Aksi Korporasi 2. <i>Modernisasi Core Banking System</i> 3. <i>E-channel Performance &amp; Strategy</i>	1. Suprajarto 2. Sunarso 3. Donsuwan Simatupang 4. Mohammad Irfan 5. Haru Koesmahargyo 6. Kuswiyoto 7. Sis Apik Wijayanto 8. Susy Liestiwaty 9. Indra Utoyo 10. Priyastomo 11. Randi Anto	100%	Kuorum
<b>September</b>					
29	5-Sep 2017	1. Progress Pembangunan BRI Gatot Subroto 2. Rencana Aksi Korporasi 3. <i>Update BRISat</i>	1. Sunarso 2. Randi Anto 3. Donsuwan Simatupang 4. Susy Liestiwaty 5. Mohammad Irfan 6. Haru Koesmahargyo 7. Kuswiyoto 8. Sis Apik Wijayanto 9. Priyastomo	82%	Kuorum
30	12-Sep 2017	Proyek CSR BRI bersama Sinergi BUMN	1. Suprajarto 2. Sunarso 3. Randi Antor 4. Donsuwan Simatupang 5. Susy Liestiwaty 6. Haru Koesmahargyo 7. Indra Utoyo	64%	Kuorum
31	19-Sep 2017	1. RKAP 2018 dan RBB BRI 2018-2021 2. Update Rencana Aksi Korporasi	1. Suprajarto 2. Sunarso 3. Donsuwan Simatupang 4. Mohammad Irfan 5. Haru Koesmahargyo 6. Kuswiyoto 7. Sis Apik Wijayanto 8. Susy Liestiwaty 9. Indra Utoyo 10. Priyastomo 11. Randi Anto	100%	Kuorum



## RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT GABUNGAN DEWAN, &amp; RAPAT DIREKSI

No	Tanggal	Agenda Rapat Direksi	Direksi Yang Hadir	Kehadiran	Kuorum
32	26-Sep 2017	1. <i>Review Risk Appetite Statement</i> 2. Rangkaian Kegiatan HUT BRI 3. Update Implementasi BRIVolution	1. Sunarso 2. Donsuwan Simatupang 3. Susy Liestiowaty 4. Mohammad Irfan 5. Kuswiyoto 6. Sis Apik Wijayanto 7. Priyastomo 8. Indra Utoyo	73%	Kuorum
<b>Oktober</b>					
33	3-Okt 2017	1. Peningkatan Efisiensi Operasional 2. Rencana Aksi Korporasi 3. Update Implementasi BRIVolution	1. Suprajarto 2. Sunarso 3. Randi Anto 4. Donsuwan Simatupang 5. Susy Liestiowaty 6. Mohammad Irfan 7. Haru Koesmahargyo 8. Sis Apik Wijayanto 9. Priyastomo 10. Indra Utoyo 11. Kuswiyoto	100%	Kuorum
34	3-Okt 2017	4. Progress Report 12000 CRM, 5. Seminar BRING IT On 6. Proyek Nakula	1. Suprajarto 2. Sunarso 3. Donsuwan Simatupang 4. Mohammad Irfan 5. Haru Koesmahargyo 6. Kuswiyoto 7. Sis Apik Wijayanto 8. Priyastomo 9. Indra Utoyo	82%	Kuorum
35	10-Okt 2017	1. Paparan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 & RKAP 2018 2. <i>Performance &amp; Talent Management</i> 3. Update Rencana RUPSLB 4. Program Apresiasi Pekerja Remote Area	1. Suprajarto 2. Sunarso 3. Randi Anto 4. Donsuwan Simatupang 5. Susy Liestiowaty 6. Mohammad Irfan 7. Haru Koesmahargyo 8. Sis Apik Wijayanto 9. Priyastomo 10. Indra Utoyo 11. Kuswiyoto	100%	Kuorum

Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

## RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT GABUNGAN DEWAN, &amp; RAPAT DIREKSI

No	Tanggal	Agenda Rapat Direksi	Direksi Yang Hadir	Kehadiran	Kuorum
36	17-Okt 2017	1. Progress Pembangunan BRI Medan & Pekanbaru 2. Profil Risiko Triwulan III BRI Tahun 2017	1. Suprajarto 2. Sunarso 3. Randi Anto 4. Donsuwan Simatupang 5. Susy Liestiowaty 6. Mohammad Irfan 7. Haru Koesmahargyo 8. Sis Apik Wijayanto 9. Priyastomo 10. Indra Utoyo 11. Kuswiyoto	100%	Kuorum
37	24-Okt 2017	1. Perubahan Struktur Organisasi BRI 2. Kewenangan Pengadaan 3. Kewenangan Komite Kredit 4. Paparan Kinerja Persiapan <i>Analyst Meeting</i> Triwulan III 2017 5. Revisi RKAP 2018 & RBB 2018-2021	1. Suprajarto 2. Donsuwan Simatupang 3. Susy Liestiowaty 4. Mohammad Irfan 5. Haru Koesmahargyo 6. Kuswiyoto 7. Sis Apik Wijayanto 8. Priyastomo 9. Indra Utoyo 10. R. Sophia Alizsa 11. Handayani	100%	Kuorum
38	30-Okt 2017	1. Monitoring Pencapaian Mingguan 2. Prognosa 2017 & RKAP 2018 3. Fasilitas Direksi	1. Suprajarto 2. Susy Liestiowaty 3. Mohammad Irfan 4. Sis Apik Wijayanto 5. Priyastomo 6. Indra Utoyo 7. R. Sophia Alizsa 8. Handayani	73%	Kuorum
<b>November</b>					
39	7-Nov 2017	1. <i>Corporate Venture Capital</i> 2. <i>Update</i> implementasi BRIVolution 3. Monitoring Pencapaian Mingguan	1. Suprajarto 2. Donsuwan Simatupang 3. Susy Liestiowaty 4. Haru Koesmahargyo 5. Sis Apik Wijayanto 6. Indra Utoyo 7. R. Sophia Alizsa 8. Handayani	73%	Kuorum



## RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT GABUNGAN DEWAN, &amp; RAPAT DIREKSI

No	Tanggal	Agenda Rapat Direksi	Direksi Yang Hadir	Kehadiran	Kuorum
40	9-Nov 2017	Revisi RKAP 2018 & RBB 2018-2021	1. Suprajarto 2. Donsuwan Simatupang 3. Susy Liestiowaty 4. Haru Koesmahargyo 5. Kuswiyoto 6. R. Sophia Alizsa 7. Handayani	64%	Kuorum
41	14-Nov 2017	Monitoring Pencapaian Minggu	1. Suprajarto 2. Donsuwan Simatupang 3. Susy Liestiowaty 4. Mohammad Irfan 5. Haru Koesmahargyo 6. Kuswiyoto 7. Sis Apik Wijayanto 8. Priyastomo 9. Indra Utoyo 10. R. Sophia Alizsa 11. Handayani	100%	Kuorum
42	21-Nov 2017	1. Peningkatan Manfaat Prospen & Program Akselerasi Pekerja 2. Update Implementasi BRIVolution 3. Progress Proyek Pembaharuan Museum BRI 4. Monitoring Pencapaian Mingguan	1. Suprajarto 2. Donsuwan Simatupang 3. Susy Liestiowaty 4. Mohammad Irfan 5. Haru Koesmahargyo 6. Kuswiyoto 7. Sis Apik Wijayanto 8. Priyastomo 9. Indra Utoyo 10. R. Sophia Alizsa 11. Handayani	100%	Kuorum
43	28-Nov 2017	1. Program <i>Recovery Plan</i> 2. Monitoring Pencapaian Mingguan 3. Update Implementasi BRIVolution 4. Perubahan Struktur Organisasi Kantor Cabang	1. Suprajarto 2. Donsuwan Simatupang 3. Susy Liestiowaty 4. Mohammad Irfan 5. Haru Koesmahargyo 6. Kuswiyoto 7. Sis Apik Wijayanto 8. Priyastomo 9. Indra Utoyo 10. R. Sophia Alizsa 11. Handayani	100%	Kuorum

Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

## RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT GABUNGAN DEWAN, &amp; RAPAT DIREKSI

No	Tanggal	Agenda Rapat Direksi	Direksi Yang Hadir	Kehadiran	Kuorum
<b>Desember</b>					
44	5-Des 2017	1. Perubahan Struktur Organisasi Kantor Cabang 2. Monitoring Pencapaian Mingguan	1. Suprajarto 2. Donsuwan Simatupang 3. Susy Liestiowaty 4. Mohammad Irfan 5. Haru Koesmahargyo 6. Kuswiyoto 7. Sis Apik Wijayanto 8. Priyastomo 9. R. Sophia Alizsa 10. Handayani	91%	Kuorum
45	12-Des 2017	1. Program Akselerasi Pekerja 2. Program Recovery Plan BRI 3. Update Rangkaian Kegiatan HUT BRI	1. Suprajarto 2. Susy Liestiowaty 3. Mohammad Irfan 4. Haru Koesmahargyo 5. Sis Apik Wijayanto 6. Priyastomo 7. R. Sophia Alizsa 8. Handayani	73%	Kuorum
46	19-Des 2017	1. Monitoring Pencapaian Mingguan 2. Organisasi <i>Digital Banking</i> 3. Modernisasi CBS & Digital Bank	1. Suprajarto 2. Susy Liestiowaty 3. Mohammad Irfan 4. Haru Koesmahargyo 5. Kuswiyoto 6. Priyastomo 7. Indra Utoyo 8. Handayani	73%	Kuorum
47	28-Des 2017	1. Resegmentasi Pekerja BRI 2. Update Implementasi BRIVolution 3. Monitoring Kinerja Mingguan	1. Suprajarto 2. Donsuwan Simatupang 3. Susy Liestiowaty 4. Mohammad Irfan 5. Haru Koesmahargyo 6. Kuswiyoto 7. Sis Apik Wijayanto 8. Priyastomo 9. Indra Utoyo 10. R. Sophia Alizsa 11. Handayani	100%	Kuorum



## RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT GABUNGAN DEWAN, &amp; RAPAT DIREKSI

Nama dan Jabatan	Jumlah Rapat 2017	Jumlah Kehadiran	%
Suprajarto Direktur Utama	38	33	87
Pryastomo Direktur Kredit Mikro dan Ritel	47	40	85
Indra Utoyo Direktur Digital Banking dan Teknologi Informasi	38	31	82
Mohammad Ifran Direktur Jaringan dan Layanan	47	43	91
Haru Koesmahargyo Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan	47	41	87
Susi Liestyowaty Direktur Kepatuhan	47	45	96
Donsuwan Simatupang Direktur Manajemen Risiko	47	40	85
Sis Apik Wijayanto Direktur Hubungan Kelembagaan	47	42	89
Handayani Direktur Konsumer	12	12	100
R. Sophia Alizsa Direktur <i>Human Capital</i>	12	11	92
Kuswiyoto Direktur Kredit Menengah, Korporasi dan BUMN	47	40	85
Asmawi Syam*	8	7	88
Sunarso**	35	33	94
Randi Anto**	35	30	86

\*Menjabat sebagai Direktur Utama sampai dengan RUPST 2017 tanggal 15 Maret 2017

\*\*Menjabat sebagai Direktur sampai dengan RUPSLB 2017 tanggal 18 Oktober 2017

### Rapat Konsultasi Direksi kepada Dewan Komisaris

Seperti telah diamanatkan dalam anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan perubahannya, dinyatakan bahwa Komisaris mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan atas jalannya Perseroan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam tugas pengawasan dimaksud Komisaris berhak untuk meminta penjelasan mengenai Perseroan kepada Direksi termasuk kegiatan operasional dalam pemberian kredit dan Direksi wajib memberikan penjelasan yang diminta Komisaris.

Kredit yang harus dikonsultasikan Direksi kepada Komisaris adalah Pemberian kredit berupa kredit *direct*, kredit *contingent* (BG/ SBLC, dll) termasuk kredit Sindikasi dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pemberian kredit baru dan atau pemberian tambahan kredit/suplesi dengan total exposure risiko 1 (satu) triliun rupiah ke atas atau ekuivalen dalam valas, dan atau bila menurut pertimbangan Komite Kredit BRI atau Direksi terdapat hal-hal yang perlu dikonsultasikan kepada Komisaris.
2. Penetapan besaran exposure tersebut di atas didasarkan pada besaran exposure debitur individual.
3. Pemberian kredit diluar butir 1 di atas tidak perlu dikonsultasikan dengan Komisaris, namun setiap 3 bulan Direksi wajib menyampaikan laporan pemberian kredit kepada Komisaris.

## RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT GABUNGAN DEWAN, & RAPAT DIREKSI

Rapat Konsultasi Kredit yang dilaksanakan selama Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Materi Konsultasi Kredit	Tanggal	Jumlah Peserta Yang Hadir		Keterangan
			Komisaris	Direksi	
1	Konsultasi Kredit Direksi dengan Komisaris BRI membahas 6 debitur	07 Maret 2017	7	1	Kuorum
2	Konsultasi Kredit Direksi dengan Komisaris BRI membahas 3 debitur	16 Mei 2017	6	2	Kuorum
3	Konsultasi Kredit Direksi dengan Komisaris BRI membahas 4 debitur	12 September 2017	4	2	Kuorum
4	Konsultasi Kredit Direksi dengan Komisaris BRI membahas 4 debitur	18 Desember 2017	7	1	Kuorum

## INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Pemegang Saham Utama dan Pengendali BRI adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui porsi kepemilikan sebesar 56,75%, saham Seri A Dwiwarna.

## PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI

- Seluruh Anggota Direksi BRI tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi baik dalam hubungan keuangan, keluarga atau kepengurusan.
- Seluruh anggota Direksi BRI tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, baik dalam hubungan keuangan, hubungan keluarga, maupun hubungan kepengurusan.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris BRI tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, baik dalam hubungan keuangan, hubungan keluarga, maupun hubungan kepengurusan.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris BRI tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.
- Seluruh anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris BRI tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris maupun Direksi BRI.



# ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

## Kebijakan

BRI memiliki pedoman dan tata tertib kerja Sekretariat Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris yang menjabarkan pedoman kerja termasuk tugas dan tanggung jawab di lingkungan Sekretariat Dewan Komisaris dan pembagian tugas Organ Pendukung Dewan Komisaris. Pedoman ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang sudah ditetapkan dalam Pedoman tersendiri. Pedoman kerja untuk masing-masing Organ Pendukung Dewan Komisaris dibuat dalam pedoman tersendiri.

## SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS

Sekretariat Dewan Komisaris adalah Organ Pendukung yang bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris dan dipimpin oleh Sekretaris Dewan Komisaris dibantu Staf Sekretariat Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas usul Pemegang Saham seri A Dwiwarna dan atas beban Perseroan yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

## Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Negara BUMN No:Per-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
2. Anggaran Dasar Perusahaan.

## Profil Sekretariat Dewan Komisaris



**Rainoc SE.**  
Ketua Sekretaris  
Dewan Komisaris  
Periode  
01 Juni 2013 –  
30 Juni 2017

Lahir di Sawah Lunto tanggal 07 Oktober 1969. Tamat Pendidikan Fakultas EkoNomi Universitas Andalas Tahun 1995. Menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan sejak 01 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nokep.: 02-KOM/BRI/06/2013 sampai dengan 30 Juni 2017. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (Januari 2011 – Mei 2013) dan Sekretaris Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset (Maret 2009 – Desember 2010).

Di samping sebagai Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan, saat ini juga menjabat sebagai Kepala Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media I.a pada Kementerian BUMN (sejak Oktober 2015). Pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Usaha Industri Strategis III (Mei 2014-Oktober 2015), Kepala Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur III.a (Sept 2013-Mei 2014), Kepala Bidang Usaha Jasa I.b (Oktober 2010-Sept 2013), Kepala Bidang Usaha Perbankan II (Mei 2008-Oktober 2010), Kepala Sub Bagian PKBL (Mei 2006-Mei 2008), Kepala Sub Bidang Evaluasi PUKK (Juli 2002-Mei 2006), dan Kepala Sub Bagian Mutasi (Maret 2001-Juli 2002).

## ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS



**Endra Gunawan**  
Ketua Sekretaris  
Dewan Komisaris  
Periode 01 Juli 2017  
- Sekarang

Lahir di Klaten tanggal 11 Januari 1982. Meraih gelar Master of Sains dari Universitas Indonesia, gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia, dan gelar Diploma III dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris BRI sejak 1 Juli 2017 sampai sekarang berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris BRI Nokep.: 06-KOM/BRI/06/2017 tanggal 13 Juni 2017. sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Agustus 2015-Mei 2017) dan Sekretaris Dewan Komisaris PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (September 2013-Agustus 2015).

Disamping sebagai Sekretaris Dewan Komisaris BRI, saat ini juga menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja pada Kementerian BUMN (sejak Juli 2017). Pernah menjabat sebagai Kepala Subbidang Restrukturisasi BUMN (April 2014 - Juni 2017) dan Kepala Subbidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur (Desember 2011 - April 2014).

### Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Pedoman dan tata tertib kerja, Sekretariat Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Staf, Sekretaris Komisaris, dan Pelaksana di Lembaga Dewan Komisaris.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat Dewan Komisaris yaitu:
  - a. Menyusun dan/atau menerima/ mendapatkan masukan dari Dewan Komisaris dan/atau Komite mengenai agenda rapat, serta memfinalisasi agenda rapat berdasarkan prioritas dan *urgency* permasalahan.
  - b. Mempersiapkan, mengkoordinasikan, dan memperoleh materi rapat dari sumber-sumber yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris atau kepada Komite jika permasalahan perlu mendapatkan masukan dan analisa Komite.
  - c. Mengusulkan waktu dan tempat pelaksanaan rapat serta mendistribusikan undangan rapat kepada pihak-pihak yang perlu hadir.
  - d. Menyusun risalah rapat dan menyimpan salinannya.
3. Mengkoordinasikan tugas-tugas administratif, kesekretariatan, dan protokoler Dewan Komisaris yaitu:
  - a. Melakukan seleksi atas surat-surat ataupun dokumen lainnya yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, menetapkan prioritas surat dan/ atau dokumen tersebut berdasarkan *urgency* permasalahan dan menindaklanjutinya sesuai kepentingan masing-masing surat dan/atau dokumen dimaksud;
  - b. Membuat catatan khusus dari surat dan/ atau dokumen yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, khususnya yang memiliki tingkat kepentingan/kompleksitas yang tinggi.
  - c. Menindaklanjuti disposisi Dewan Komisaris atas surat dan/atau dokumen tersebut diatas;
  - d. Mempersiapkan korespondensi lainnya dengan pihak manajemen Perseroan, pihak eksternal, dan pihak-pihak lainnya, khusus hal-hal yang telah mendapatkan keputusan Dewan Komisaris yang tidak tercakup dalam tugas-tugas Komite;
  - e. Mendokumentasikan arsip Lembaga Dewan Komisaris dan memastikan central filing yang up-date dan sistematis untuk memudahkan pencarian dokumen serta tindak lanjut;
  - g. Menjadwalkan dan mengkoordinasikan acara dan kegiatan Dewan Komisaris antara lain keikutsertaan dalam program *training/ workshop/seminar*, kunjungan kerja, perjalanan dinas, dan lain-lain;
  - h. Memastikan tersedianya sarana dan logistik untuk mendukung kelancaran acara-acara Dewan Komisaris sebagaimana diatas, dan untuk mendukung kegiatan dan kebutuhan operasional Dewan Komisaris lainnya antara lain ATK, reimbursement kesehatan, dan lain-lain; dan



## ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

- i. Mempersiapkan pidato/sambutan ataupun bahan presentasi Dewan Komisaris sesuai kebutuhan yang menyangkut hal-hal yang tidak terkait dengan tugas-tugas Komite.
4. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
5. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Menyusun laporan tentang pelaksanaan *Self Assessment* GCG Dewan Komisaris dan Komite setiap Semester, berkoordinasi dengan divisi Kepatuhan.
7. Mengkoordinasikan tercapainya pelaksanaan tugas Komite-Komite dan organ yang berada dibawah Dewan Komisaris.
8. Berkoordinasi dengan Komite-komite Dewan Komisaris dalam menyusun laporan mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Perseroan setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Mengkoordinasikan dan melakukan tindak lanjut atas permintaan dan/atau pengumpulan data/informasi dari dan/atau kepada pihak manajemen Perseroan dan eksternal yang tidak tercakup dalam tugas-tugas Komite, termasuk informasi mengenai peraturan dan ketentuan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain:
  - a. Menetapkan data/informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan masukan Komite, surat masuk, dan permasalahan yang memerlukan penanganan/tindak lanjut; dan
  - b. Mengkoordinasikan pengumpulan data/informasi dari dan/atau kepada pihak manajemen Perseroan dan eksternal terkait.
10. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun Direksi yaitu:
  - a. Memperoleh masukan dari Dewan Komisaris/Komite mengenai rencana kegiatan Tahunan;
  - b. Menetapkan prioritas rencana kegiatan tersebut diatas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara lebih optimal dan efektif;
  - c. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran dari masing-masing kegiatan tersebut diatas untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
  - d. Menindaklanjuti anggaran yang telah disetujui tersebut dengan Divisi Sekretariat Perseroan untuk dapat difinalisasi dan dikonsolidasikan dengan anggaran Tahunan Perseroan.
11. Mengkoordinasikan penyusunan saran dan pendapat mengenai agenda dan materi Rapat Umum Pemegang Saham pada:
  - a. Mengkoordinasikan agenda dan materi dengan pihak-pihak terkait; dan
  - b. Menyusun materi yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris, dan memberikan pendapat mengenai materi secara keseluruhan.

### Laporan Pelaksanaan Tugas 2017

1. Kunjungan Kerja  
Sekretariat Dekom bersama-sama dengan Komite Pengawasan Manajemen Risiko (KPMR), Komite Audit (KA), dan Komite Nominasi & Remunerasi (KNR) amendingi Dewan Komisaris untuk melakukan kunjungan kerja ke Unit-unit Kerja Perseroan.

Selama Tahun 2017 Sekretariat Dewan Komisaris telah membantu Dewan Komisaris melakukan sebanyak 19 kali kunjungan Kerja ke 17 Kantor Wilayah dan Unit Kerja Supervisinya.

## ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

### 2. Persetujuan & Pengawasan Rencana Kerja Perseroan

Sekretaris Dewan Komisaris bersama Komite Dewan Komisaris (KA, KPMR, KTKT, KNR) membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja Perseroan yang merupakan pedoman bagi seluruh jajaran Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya selama Tahun 2018. Disamping itu, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Realisasi Rencana Bisnis Bank yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat dua bulan setelah periode laporan.

Selama Tahun 2017 Sekretariat Dewan Komisaris telah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya memberikan Persetujuan, Rekomendasi dan Konsultasi Kredit. Tercatat selama Tahun 2017 Dewan Komisaris telah memberikan Persetujuan sebanyak 18 kali, Rekomendasi sebanyak 27 kali dan Konsultasi Kredit sebanyak 42 kali.

### 3. Laporan Tahunan Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris bersama Komite Dewan Komisaris (KA, KPMR, KTKT, KNR) telah menyusun Laporan Kegiatan Dewan Komisaris selama Tahun 2017 yang akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan. Laporan Tahunan tersebut akan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya dimintakan persetujuan RUPS Tahun 2018.

### 4. Rapat Kerja Dewan Komisaris

Dalam rangka melakukan *review* atas realisasi RKA Dekom Tahun 2016 serta menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dekom Tahun 2017, Sekretariat Dewan Komisaris bersama Komite Dewan Komisaris (KA, KPMR, KTKT, KNR) telah melaksanakan Rapat Kerja Dewan Komisaris di Jakarta pada tanggal 14-16 Agustus 2017.

## Program Pengembangan Kompetensi

Dalam rangka pengembangan kompetensi Dewan Komisaris, Sekretariat Dewan Komisaris memfasilitasi berbagai Pendidikan, Seminar & *Conference* bagi Dewan Komisaris untuk mendukung tugasnya sebagai Pengawas Perseroan. Selama Tahun 2017 Sekretariat Dewan Komisaris telah melaksanakan 8 Pendidikan, Seminar & *Conference* dalam negeri, dan Pendidikan, Seminar & *Conference* dalam negeri luar negeri.



# KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan mandat untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan Bank.

## DASAR HUKUM

Pembentukan Komite Audit Perseroan didasarkan pada:

1. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

## PIAGAM KOMITE AUDIT

Komite Audit BRI memiliki Buku Pedoman dan Tata Tertib Komite Audit (Audit Charter) yang menjabarkan tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, pembagian kerja, waktu kerja, etika kerja, rapat, struktur organisasi, dan pelaksanaan tugas Komite Audit. Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Audit. Pedoman Komite Audit disahkan oleh disahkan oleh Dewan Komisaris melalui Nota Dinas Sekretariat Dewan Komisaris No: B.41-Sekkom/05/2015 tanggal 12 Mei tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

## PENGGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dipilih oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme perekrutan dan seleksi. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi.

## STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

### Struktur Komite

1. Komite Audit berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen.

### Keanggotaan Komite

1. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang:
  - a. seorang Komisaris Independen;
  - b. seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan; dan
  - c. seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
2. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit.
3. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dipilih oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme perekrutan dan seleksi.
4. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi.
5. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian dan dimuat dalam Situs *Web* Bursa Efek dan/atau Situs *Web* Perseroan.

## KOMITE AUDIT

Susunan Keanggotaan Komite Audit BRI 1 Januari 2017 sampai dengan 18 Oktober 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Profesi	Periode Jabatan
1.	A. Fuad Rahmany	Ketua	Komisaris Independen	Juni 2015-sekarang
2.	Adhyaksa Dault	Anggota	Komisaris Independen	Juni 2015-Oktober 2017
3.	A. Sonny Keraf	Anggota	Komisaris Independen	Juni 2015-sekarang
4.	Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	Pihak Independen	Februari 2016 - sekarang
5.	I Gde Yadnya Kusuma	Anggota	Pihak Independen	Februari 2016 - sekarang
6.	Sunuaji Noor Widiyanto	Anggota	Pihak Independen	Desember 2016- sekarang

Susunan Keanggotaan Komite Audit BRI sampai dengan posisi 18 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Profesi	Periode Jabatan
1.	A. Fuad Rahmany	Ketua	Komisaris Independen	Juni 2015-sekarang
2.	A. Sonny Keraf	Anggota	Komisaris Independen	Juni 2015-sekarang
3.	Rofikoh Rokhim *	Anggota	Pihak Independen	Oktober 2017 - sekarang
4.	Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	Pihak Independen	Februari 2016 - sekarang
5.	I Gde Yadnya Kusuma	Anggota	Pihak Independen	Februari 2016 - sekarang
6.	Sunuaji Noor Widiyanto	Anggota	Pihak Independen	Desember 2016- sekarang

\*) Berdasarkan surat keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-15/D.03/2018 tanggal 24 Januari 2018

## Profil Komite

Profil Anggota Komite Audit per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

<b>A. Fuad Rahmany</b> Ketua Komite Audit/Komisaris Independen Periode: Juni 2015 - sekarang	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Anggota Dewan Komisaris.
<b>Adhyaksa Dault</b> Anggota Komite Audit/Komisaris Independen Periode: Juni 2015 – Oktober 2017	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Anggota Dewan Komisaris.
<b>Sonny Keraf</b> Anggota Komite Audit/Komisaris Independen Periode: Juni 2015 - sekarang	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Anggota Dewan Komisaris
<b>Rofikoh Rokhim</b> Anggota Komite Audit/Komisaris Independen Periode: Februari 2018 - sekarang	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Anggota Dewan Komisaris
<b>I Gde Yadnya Kusuma</b> Anggota Komite Audit Pihak Independen Periode: Februari 2016 - sekarang	Lahir di Singaraja Bali, 19 Mei 1954. Menjabat sebagai anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko PT BRI (Persero) Tbk sejak Juli 2010. Sebelumnya berkarir di Bank Indonesia dalam berbagai posisi dan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Direktur Riset dan Analisis. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya, Jakarta (1993) dan gelar Magister Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta (2006).



## KOMITE AUDIT

**Pamuji Gesang Raharjo**

Anggota Komite Audit  
Pihak Independen  
Periode: Februari 2016 - sekarang

Lahir di Jakarta, 10 April 1968. Menjabat sebagai anggota Komite Audit PT BRI (Persero) Tbk sejak tanggal 1 Februari 2016. Sebelumnya merupakan anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko PT BRI (Persero) Tbk. Pernah berkarir dalam berbagai posisi pada PT BNI (Persero) Tbk, PT Bank Internasional Indonesia Tbk; PT Bank Danahutama; PT Pegadaian (Persero); dan pernah menjabat Direktur Eksekutif Risk Management Center Indonesia (RMCI). Gelar Sarjana Ekonomi diperoleh dari Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta (1996), gelar Magister Manajemen bidang kekhususan Manajemen Risiko diperoleh dari Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2003), dan meraih gelar Doktor dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2014. Memiliki sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) dan memperoleh *Certified of Financial Consultant* (CFC) dari Institute of Financial Consultant, Canada (2013).

**Sunuaji Noor Widiyanto**

Anggota Komite Audit  
Pihak Independen  
Periode: Desember 2016 - sekarang

Lahir di Yogyakarta, 1 Januari 1960, Menjabat sebagai anggota Komite Audit PT BRI (Persero) Tbk sejak tanggal 1 Desember 2016. Sebelumnya berkarir di PT BRI (Persero) Tbk, pernah menjabat sebagai Inspektur di Kantor Inspeksi BRI Yogyakarta (2014-2016) dan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Pusat BRI (2012-2014). Yang bersangkutan pernah juga menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja BRI Nasional selama 2 (dua) periode (2006-2012). Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (1996) dan memperoleh sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA) dari Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) pada tahun 2015.

**MASA JABATAN**

Masa jabatan anggota Komite Audit adalah sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

- Memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep risiko dan pengendalian risiko dalam aktivitas usaha serta pengendalian intern perusahaan.

**KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN**

- Menjadi anggota organisasi profesi Komite Audit, memiliki pemahaman tentang konsep auditing dan mempunyai latar belakang pengetahuan dan pengalaman di bidang pelaporan keuangan atau audit minimal 10 tahun (sekurang-kurangnya satu anggota).
- Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang industri perbankan termasuk pula segala ketentuan dan peraturan perbankan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

**INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE**

Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris maupun pemegang saham pengendali BRI dibuktikan dengan tandatangan pernyataan independen Anggota Komite Audit. Anggota Komite Audit juga bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari Perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Sebelum menjabat, anggota Komite Audit tidak memiliki wewenang untuk merancang, memimpin maupun mengendalikan BRI dan bukan merupakan mantan pimpinan maupun pegawai Kantor Akuntan Publik yang memeriksa pembukuan BRI.

## KOMITE AUDIT

No	Kriteria Independensi	A. Fuad Rahmany	A. Sonny Keraf	Rofikoh Rokhim*	Pamuji Gesang Rahardjo	Sunuaji Noor Widiyanto	I Gde Yadnya Kusuma
1.	Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v	v	v	v	v	v
2.	Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v	v	v	v	v	v
3.	Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v	v	v	v	v	v
4.	Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v	v	v	v	v	v

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan berkenaan dengan:

1. Laporan Keuangan
  - a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
  - b. Melakukan penelaahan bersama Manajemen, SKAI dan Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP atas hasil audit termasuk kesulitan yang dihadapi.
  - c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP atas jasa yang diberikannya.
  - d. Melakukan penelaahan atas laporan tahunan untuk meyakinkan kecukupan, konsistensi dan keakuratan informasi.



## KOMITE AUDIT

2. Pengendalian Internal  
Memonitor, menelaah dan mendiskusikan dengan Manajemen, SKAI dan Akuntan Publik atau Tim Audit dari KAP atas kecukupan dan efektifitas pengendalian internal atas laporan keuangan termasuk adanya kelemahan material, baik dalam rancangan maupun operasi, yang dapat mengganggu kemampuan Perseroan dalam mencatat, memproses, mengikhtisarkan dan melaporkan informasi keuangan.
3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
  - a. Memantau efektivitas kerja SKAI.
  - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris untuk bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI.
  - c. Melakukan penelaahan terhadap Laporan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi Audit Intern.
  - d. Melakukan penelaahan terhadap setiap Laporan SKAI yang disampaikan kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit termasuk setiap laporan mengenai penyimpangan yang disampaikan kepada Direksi.
  - e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh SKAI dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal.
4. Auditor Independen
  - a. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, dengan memperhatikan independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
  - b. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, agar mengusulkan ke RUPS, dalam hal Akuntan Publik dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada poin 1) tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP pengganti dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
  - c. Dalam hal Komite Audit tidak dapat merekomendasikan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum RUPS sebagaimana dimaksud pada poin 1), Komite Audit merekomendasikan pendelegasian kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
    - 1) Alasan pendelegasian kewenangan; dan
    - 2) Kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk.
  - d. Dalam menyusun rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin 1), Komite Audit harus mempertimbangkan:
    - 1) Independensi Akuntan Publik, KAP, dan orang dalam KAP;
    - 2) Ruang lingkup audit;
    - 3) Imbalan jasa audit;
    - 4) Keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
    - 5) Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
    - 6) Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian Akuntan Publik, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
    - 7) Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
    - 8) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
  - e. Menyampaikan rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik kepada Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan/atau Pengurus DPLK untuk digunakan sebagai lampiran Laporan Penunjukan AP dan/atau KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - f. Mengusulkan pemberhentian Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP apabila dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.

## KOMITE AUDIT

- g. Menelaah calon Akuntan Publik, atau Tim Audit dari KAP untuk entitas anak yang dikonsolidasi. KAP untuk entitas anak yang dikonsolidasi ditunjuk dan ditetapkan oleh entitas anak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya tetapi harus dikonsultasikan dengan Komite Audit untuk menilai aspek independensi calon Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP dan supervisi audit yang dijalankan oleh Komite Audit.
- h. Memberikan persetujuan terlebih dahulu (*pre-approval*) atas jasa non asuransi yang akan ditugaskan kepada KAP.
- i. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP paling sedikit melalui:
- 1) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP dengan standar audit yang berlaku;
  - 2) Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
  - 3) Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik;
  - 4) Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau KAP; dan
  - 5) Hal lainnya.
- j. Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit sebagaimana dimaksud pada angka 9) kepada Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan/atau Pengurus DPLK BRI, sesuai dengan lampiran 2.
5. Kepatuhan (*Compliance*)
- a. Memonitor efektivitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko *fraud* yang terkait dengan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting risks*) yang telah disiapkan dan dilaksanakan oleh Direksi.
  - b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
6. Pengaduan  
 Menelaah pengaduan baik yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, maupun pengaduan lainnya.
7. Lain-Lain
- a. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
  - b. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
  - c. Melaksanakan penugasan yang diminta oleh Komisaris.

### Wewenang

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Audit dalam lingkup tanggung jawab Komite Audit untuk:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

### KPI DAN PENCAPAIAN TAHUN 2017

Indikator atau kriteria kinerja Audit diukur dari pencapaian atas program kerja / rencana kerja dan anggaran (RKA) yang telah disusun pada setiap awal tahun dan tingkat kehadiran Anggota Komite Audit dalam setiap rapat. Adapun program kerja Komite Audit bukan KTKT disusun untuk mendukung faktor-faktor utama keberhasilan (*Key Success Factors*) pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam memastikan kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Secara umum seluruh KPI Komite Audit telah tercapai dengan dilaksanakannya seluruh Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Komite Audit (KA) tahun 2017 sesuai target yang ditetapkan dan tingkat kehadiran anggota KA yang memenuhi ketentuan sehingga rapat KA dapat dilaksanakan dengan *quorum* dalam setiap mengambil keputusan.



## KOMITE AUDIT

## PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE 2017

Realisasi pelaksanaan program kerja Komite Audit pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

### 1. Review dan Persetujuan Rencana Audit Tahunan SKAI tahun 2017

Komite Audit telah melakukan *review* atas Perencanaan Audit Tahunan (PAT) tahun 2017 yang disusun dan diajukan oleh SKAI. Hasil *review* dan rekomendasi berupa pendapat Komite Audit dituangkan dalam Nota Dinas Komite Audit No. B.16-KA/02/2017 tanggal 8 Februari 2017 dan Surat Dewan Komisaris R.04-KOM/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Persetujuan Perencanaan Audit Tahunan (PAT) Tahun 2017.

### 2. Evaluasi Kecukupan Pengendalian Internal

Komite Audit, secara periodik, memantau pelaksanaan pemeriksaan SKAI untuk meyakinkan kualitas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan dengan metodologi *Risk Based Internal Audit* (RBIA) dengan pendekatan proses bisnis yang diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan tingkat kematangan manajemen risiko secara korporat.

Kegiatan evaluasi atas Laporan Hasil Audit triwulanan dan tindak lanjut hasil audit selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Materi	Realisasi Kegiatan	Output
1.	Laporan Hasil Audit SKAI Semester II Tahun 2016	17 Februari 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi yang meliputi:
2.	Laporan Hasil Audit SKAI Triwulan I Tahun 2017	22 Mei 2017	I. Nota Dinas KA No.: B.20-KA/02/2017 tanggal 17 Februari 2017;
3.	Laporan Hasil Audit SKAI Semester I Tahun 2017	8 Agustus 2017	II. Nota Dinas KA No.: B.38-KA/05/2017 tanggal 22 Mei 2017;
4.	Laporan Hasil Audit SKAI Triwulan III Tahun 2017	3 November 2017	III. Nota Dinas KA No.: R.10 -KA/08/2017 tanggal 8 Agustus 2017; IV. Nota Dinas KA No.: B.64-KA/11/2017 tanggal 3 November 2017

### 3. Penelaahan Komite Audit Terhadap Hasil Review SKAI atas Laporan Keuangan Perseroan Setiap Triwulan

Komite Audit melakukan penelaahan atas laporan keuangan yang akan dipublikasikan Perseroan mencakup laporan keuangan triwulan dan tahunan. Hasil penelaahan tersebut dapat berupa tanggapan kepada Direksi untuk penyempurnaan atau perbaikan laporan sebelum dipublikasikan.

## KOMITE AUDIT

Realisasi pelaksanaan penelaahan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

No.	Materi	Realisasi Kegiatan	Output
1.	Telaah Laporan Keuangan BRI Tahun Buku 2016;	20 Januari 2017	Rekomendasi tertulis dari KA dituangkan dalam risalah rapat Nomor: 01-KA/01/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Pembahasan Hasil Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT BRI (Persero) Tbk per 31 Desember 2016.
2.	Penelaahan Laporan Keuangan Triwulan I yang dipublikasikan ( <i>unaudited</i> ) 2017;	17 April 2017	Rekomendasi tertulis dari KA kepada Dekom untuk disampaikan kepada Direksi melalui Nota Dinas KA No.: B.27-KA/04/2017, Tanggal 17 April 2017.
3.	Penelaahan Laporan Keuangan <i>audited</i> semester I 2017;	1 Agustus 2017	Rekomendasi tertulis dari KA kepada Dekom untuk disampaikan kepada Direksi melalui Nota Dinas KA: B.47-KA/08/2017 tanggal 1 Agustus 2017.
4	Penelaahan Laporan Keuangan Triwulan III yang dipublikasikan ( <i>unaudited</i> ) 2017;	25 Oktober 2017	Rekomendasi tertulis dari KA kepada Dekom untuk disampaikan kepada Direksi melalui Nota Dinas KA No.: B.63-KA/10/2017 tanggal 25 oktober 2017.

#### 4. Penelaahan Laporan *Whistleblower System*

Komite Audit telah melakukan penelaahan terhadap Laporan *Whistleblower System* (WBS) maupun pengaduan atau pelaporan tertulis yang diterima Dewan Komisaris. Pelaksanaan penelaahan Laporan *Whistleblower System* (WBS) dilakukan secara bersamaan dengan evaluasi dan pembahasan Laporan Hasil Audit (LHA) triwulanan yang disampaikan SKAI kepada Dewan Komisaris.

Secara kumulatif, selama periode bulan Januari s/d. Desember 2017 total pengaduan/pelaporan yang diterima melalui *Whistleblower System* (WBS) BRI sebanyak 65 laporan dengan rincian sebagai berikut:

1. 50 laporan statusnya dapat dinyatakan "selesai";
2. 15 laporan masih "dalam proses" penelitian dan tindak lanjut oleh Unit Kerja terkait.

Selama periode tahun 2017 tidak terdapat pengaduan atau pelaporan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan. Untuk pengaduan dan pelaporan tertulis lainnya yang diterima oleh Dewan Komisaris, setelah dilakukan penelaahan oleh Komite Audit selanjutnya dimintakan klarifikasi secara tertulis kepada Direksi/SKAI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

#### 5. Pengangkatan Kepala SKAI

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01/MBUI/2011 tanggal 1 Agustus 2011, pemberhentian dan pengangkatan Kepala Satuan Kerja Audit Intern harus memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Menindaklanjuti surat Direksi BRI No. R.216-DIR/KPS/05/2017 tanggal 2 Mei 2017 perihal Pengganti Kepala Audit Intern BRI, Direksi BRI telah meminta persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat Sdr. Tri



## KOMITE AUDIT

Wintarto sebagai Kepala SKAI. Selanjutnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit, salah satunya adalah menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait pemberian persetujuan atas pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI, maka Komite Audit telah melakukan wawancara dengan Ybs. dalam forum Rapat Komite Audit yang dilaksanakan pada hari Selasa, 9 Mei 2017.

Berdasarkan hasil penelaahan dan wawancara terhadap kandidat yang diajukan oleh Manajemen, melalui Nota Dinas No. R.05-KA/05/2017 tanggal 12 Mei 2017, Komite Audit telah merekomendasikan kepada Dewan Komisaris atas usulan Sdr. Tri Winarto sebagai Kepala SKAI. Selanjutnya melalui surat Dewan Komisaris No. R.21-KOM/05/2017 tanggal 12 Mei 2017 kepada Direksi memberikan persetujuan usulan Sdr. Tri Winarto sebagai Kepala SKAI.

### 6. Rekomendasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.03/2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK No. 36/SEOJK.03/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Komite Audit bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas proses penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Independensi AP, KAP dan Orang Dalam KAP
- b. Ruang lingkup audit
- c. Imbalan jasa audit
- d. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP
- e. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
- f. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau

- g. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP pada periode sebelumnya, bila ada.

Selama tahun 2017 Komite Audit telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan pengadaan jasa audit Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka audit umum atas laporan keuangan konsolidasian dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan untuk tahun buku 2017.

Rekomendasi penunjukan KAP tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan unit-unit kerja terkait dan pembentukan Tim Teknis, Tim Pengadaan dan Tim Perkiraan Harga Sendiri melalui SK Dewan Komisaris yang dikoordinasikan oleh Komite Audit. Proses pengadaan dilakukan dengan cara Seleksi Langsung dengan menggunakan mekanisme pengadaan sesuai dengan ketentuan internal BRI.

Selama periode tahun 2017, Komite Audit telah melakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan penunjukan AP dan/atau KAP, yang mencakup sebagai berikut:

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan KAP Purwanto, Sungkoro Surja (EY) sebagai KAP yang bertanggung jawab melaksanakan Audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui Nota Dinas Komite Audit No. R.03-KA/02/2017 tanggal. 28 Februari 2017 perihal Rekomendasi Kantor Akuntan Publik Yang Akan Melaksanakan Audit Umum Atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan PKBL BRI tahun buku 2017.
- b. Memberikan rekomendasi atas penunjukan KAP Purwanto, Sungkoro Surja (EY) untuk melakukan *Review* Terbatas Laporan Keuangan Konsolidasian Periode 30 Juni 2017 melalui Nota Dinas Komite Audit No. B.34-KA/05/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal

## KOMITE AUDIT

Usulan Pemilihan KAP Untuk *Review* Terbatas Laporan Keuangan periode 30 Juni 2017 dan surat Dewan Komisaris No. B.77-KOM/05/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal Pemilihan KAP untuk Pelaksanaan *Review* Terbatas Laporan Keuangan Konsolidasian Periode 30 Juni 2017.

### 7. Evaluasi Kantor Akuntan Publik dan Rekomendasi Penggantian KAP

Dalam rangka memenuhi kewajiban melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Edaran OJK No. 36/SEOJK.03/2017 tanggal 11 Juli 2017 perihal Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Komite Audit telah melakukan evaluasi pelaksanaan audit oleh KAP dan hadir secara langsung (*field visit*) dalam "exit meeting" atas hasil audit KAP EY pada beberapa Kantor Cabang BRI yang dilaksanakan di beberapa Kantor Inspeksi (Kanins), yaitu sebagai berikut:

- a. BRI Kanins Medan
- b. BRI Kanins Palembang
- c. BRI Kanins Yogyakarta
- d. BRI Kanins Jakarta 3.

Ruang lingkup kegiatan evaluasi yang dilaksanakan terhadap KAP antara lain meliputi:

- a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
- b. kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
- c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik;
- d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan.

Berdasarkan Evaluasi KAP tersebut di atas Komite Audit berkeyakinan bahwa pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2016 oleh KAP PSS telah sesuai dengan standar audit yang berlaku.

Mempertimbangkan KAP yang telah ditunjuk dalam RUPST tahun 2017 dapat menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan dan PKBL tahun 2017 sesuai dengan standar Audit dan ketentuan yang berlaku, selama tahun 2017 Komite audit tidak memberikan rekomendasi untuk tidak melakukan pergantian KAP yang telah ditunjuk dalam RUPS Tahunan Tahun 2017.

### 8. Review Terhadap Pelaksanaan Audit Umum Atas Laporan Keuangan Perseroan yang Dilakukan Oleh Kantor Akuntan Publik

Target penyelesaian *review* terhadap pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik adalah sebagai berikut:



## KOMITE AUDIT

No.	Materi	Realisasi Waktu	Output
1.	Laporan Keuangan BRI Tahun Buku 2016	20 Januari 2017	Rekomendasi dalam Rapat Dewan Komisaris, SKAI dan KAP yang dituangkan dalam risalah rapat Nomor: 01-KA/01/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Pembahasan hasil audit atas laporan keuangan konsolidasian PT BRI (Persero) Tbk per 31 Desember 2016.
2.	<i>Management Letter</i> Tahun Buku 2016	17 Juli 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melalui surat Nomor: R.08 -KA/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang <i>management letter</i> atas audit umum laporan keuangan tahun 2016.

#### 9. Penelaahan Atas Laporan Kejadian *Fraud* Yang Berdampak Signifikan

Komite Audit juga melakukan penelaahan atas Laporan-laporan Kejadian *Fraud* yang berdampak signifikan kepada Perseroan yang disampaikan oleh SKAI dan Direktur Kepatuhan. Hasil penelaahan Komite Audit tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

No.	Materi	Realisasi Waktu	Output
1.	Laporan <i>Fraud</i> Yang Diperkirakan Berdampak Negatif Secara Signifikan	23 Februari 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi disampaikan melalui surat Nomor: B.04-KA/01/2017 tentang Kejadian <i>Fraud</i> berdampak negatif secara signifikan dan/atau berpotensi menjadi perhatian publik periode September s/d Desember 2016.
2.	Laporan <i>Fraud</i> Yang Diperkirakan Berdampak Negatif Secara Signifikan	26 April 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi disampaikan melalui surat Nomor: B.29-KA/04/2017 tentang Kejadian <i>Fraud</i> berdampak negatif secara signifikan dan/atau berpotensi menjadi perhatian publik periode periode Januari s/d Maret 2017.
3.	Laporan <i>Fraud</i> Yang Diperkirakan Berdampak Negatif Secara Signifikan	12 Oktober 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi disampaikan melalui surat Nomor: B.59-KA/10/2017 tentang Kejadian <i>Fraud</i> berdampak negatif secara signifikan dan/atau berpotensi menjadi perhatian publik triwulan III/2017.

#### 10. Tindak Lanjut Atas Temuan Audit Eksternal (OJK, PPATK dan BPK RI)

Komite Audit telah melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BPK RI. Pemantauan tersebut dilakukan secara bersamaan dengan penyampaian Laporan Pokok-pokok Hasil Audit (LHA) SKAI yang disampaikan secara Triwulanan kepada Komite Audit.

Secara khusus, Komite Audit melalui Nota Dinas No. R.09-KA/07/2017 tanggal 7 Agustus 2017 dan Surat Dewan Komisaris No. R.42-KOM/08/2017 tanggal 8 Agustus 2017 perihal Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Auditor Eksternal (BI, OJK dan Akuntan Publik) oleh BRI.

## KOMITE AUDIT

Komite Audit juga telah menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh OJK dan BPK RI, yaitu:

No	Pemeriksaan OJK, BI dan KAP	Realisasi	Output
1	Hasil Pemeriksaan Implementasi Standar Nasional Teknologi CHIP dan Penggunaan PIN <i>online</i> 6 Digit pada Kartu ATM BRI dan atau Debet BRI posisi 30 September 2017.	10 Januari 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi disampaikan melalui Nota Dinas KA No. R.01-KA/01/ 2017 Tanggal. 10 Januari 2017 dan Surat Dekom No. R.02-KOM/01/2017 Tanggal. 16 Januari 2017.
2	Laporan Audit on the spot pada BRI Remittance Company, Hongkong dalam rangka pelaksanaan audit IT proses operasional aplikasi core banking international system.	28 Februari 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi disampaikan melalui Nota Dinas KA No. R.02-KA/02/ 2017 Tanggal. 28 Februari 2017 dan Surat Dekom No. R.16-KOM/03/2017 Tanggal. 15 Maret 2017.

Pada sisi lain, Komite Audit juga melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi denda/kewajiban membayar oleh regulator secara Triwulanan berdasarkan surat—surat OJK yang diterima oleh Komite Audit. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris, termasuk memberikan pendapat dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan kepada Direksi melalui surat Dewan Komisaris.

Selama periode tahun 2017, Komite Audit telah menyampaikan hasil pemantauan pengenaan sanksi denda/kewajiban membayar oleh regulator tersebut sebagai berikut:

No.	Periode Pemantauan	Realisasi Waktu	Output
1.	Oktober – Desember 2016	20 Januari 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi disampaikan melalui Nota Dinas KA No. B.11-KA/01/ 2017 tanggal. 20 Januari 2017 dan Surat Dekom No. B.19-KOM/01/2017 tanggal 23 Januari 2017
2.	Januari – Maret 2017	18 April 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi disampaikan melalui Nota Dinas KA No. B.28-KA/04/ 2017 tanggal 18 April 2017 dan Surat Dekom No. B.62-KOM/04/2017 tanggal 18 April 2017
3.	April – Juni 2017		Tidak terdapat pengenaan sanksi/ denda kewajiban membayar
4.	Juli – September 2017	16 Oktober 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi disampaikan melalui Nota Dinas KA No. B.58-KA/10/ 2017 dan Surat Dekom No. B.163-KOM/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017

### 11. Laporan Evaluasi Kinerja Investasi DPLK BRI

Menunjuk Pasal 24 ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 3/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Investasi Dana Pensiun, dimana Dewan Komisaris sebagai Pengawas DPLK BRI wajib menyampaikan Laporan Evaluasi Kinerja Investasi DPLK Semesteran kepada OJK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir semester. Hasil penelaahan Komite Audit tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:



## KOMITE AUDIT

No.	Materi	Realisasi Waktu	Output
1.	Evaluasi laporan kinerja TW-IV - 2016 dan laporan evaluasi kinerja investasi DPLK	21 Maret 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi disampaikan melalui surat Nomor: B.22-KA/03/2017 tentang Evaluasi laporan kinerja TW-IV - 2016 dan laporan evaluasi kinerja investasi DPLK
2.	Evaluasi kinerja keuangan & investasi DPLK BRI Tahun 2016	19 Juni 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi disampaikan melalui surat Nomor: B.42-KA/06/2017 tentang Evaluasi kinerja keuangan & investasi DPLK BRI Tahun 2016
3.	Evaluasi laporan kinerja triwulan II/2017 & Laporan evaluasi kinerja investasi DPLK BRI semester I tahun 2017 kepada OJK.	4 Agustus 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi disampaikan melalui surat Nomor: B.48-KA/08/2017 tentang Evaluasi laporan kinerja triwulan II/2017 & Laporan evaluasi kinerja investasi DPLK BRI semester I tahun 2017 kepada OJK.
4.	Evaluasi laporan kinerja TW-III - 2017 dan laporan evaluasi kinerja investasi DPLK	03 November 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi disampaikan melalui surat Nomor: B.64-KA/11/2017 tentang Evaluasi laporan kinerja triwulan III/2017 DPLK BRI

## 12. Audit Umum atas Laporan Keuangan dan laporan Kinerja Investasi DPLK BRI

Terkait dengan pelaksanaan audit umum atas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Investasi DPLK BRI tahun buku 2016, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Audit antara lain:

- a. Melakukan pembahasan dengan KAP Mirawati Sensi Idris terkait hasil audit atas Laporan Keuangan DPLK BRI tahun buku 2016 dalam forum Rapat Dewan Komisaris yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017.
- b. Melakukan evaluasi pelaksanaan audit yang dilakukan KAP Mirawati Sensi Idris, dan hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Nota Dinas No. B.44-KA/06/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris BRI No. B.96-KOM/06/2017 tanggal 25 Juni 2017.

## 13. Penugasan Lain

Komite Audit juga melakukan penelaahan dan pemberian rekomendasi atas permohonan persetujuan yang diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, yaitu terkait:

- a. Penelaahan dan Rekomendasi Permohonan Persetujuan Yang Diajukan Direksi
  1. Permohonan persetujuan pedoman penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme DPLK BRI (Nota Dinas Komite Audit No. B.19-KA/02/2017 tanggal 13 Februari 2017);
  2. Permohonan persetujuan PH aktiva tetap bangunan Kanca BRI Jakarta Fatmawati (Nota Dinas Komite Audit No. B.21-KA/02/2017 tanggal 22 Februari 2017);
  3. Permohonan persetujuan PH aktiva tetap bangunan eks. Kanwil BRI Kupang (Nota Dinas Komite Audit No. B.24-KA/03/2017 tanggal 29 Maret 2017);
  4. Permohonan persetujuan PH aktiva tetap bangunan terbengkalai Jalan Proklamasi 29 (Nota Dinas Komite Audit No. B.30-KA/04/2017 tanggal 26 April 2017);

## KOMITE AUDIT

- b. Evaluasi Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan  
Komite Audit telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL). Evaluasi tersebut dilakukan melalui pembahasan dengan Divisi Sekretariat Perusahaan dan unit kerja terkait lainnya dalam Forum Rapat Komite Audit yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2017. Berdasarkan pembahasan tersebut, Komite Audit telah memberikan beberapa rekomendasi terkait dengan pelaksanaan program PKBL Perseroan melalui Nota Dinas Komite Audit No. R.11 -KA/09/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Audit PKBL tahun 2016 dan tahun 2017.

### Dokumentasi Penelaahan yang dilakukan selama tahun 2017

No	Perihal
1	Review dan Persetujuan Rencana Audit Tahunan SKAI tahun 2017
2	Evaluasi Kecukupan Pengendalian Internal: Laporan Hasil Audit SKAI Semester II Tahun 2016, Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan II Tahun 2017.
3	Penelaahan Komite Audit Terhadap Hasil Review SKAI atas Laporan Keuangan Perseroan Setiap Triwulan: Penelaahan Laporan Keuangan <i>audited</i> 2016, Penelaahan Laporan Keuangan Triwulan I yang dipublikasikan ( <i>unaudited</i> ) 2017, Penelaahan Laporan Keuangan <i>audited</i> semester II 2016, Penelaahan Laporan Keuangan Triwulan III yang dipublikasikan ( <i>unaudited</i> ) 2017;
4	Penelaahan Laporan <i>Whistleblower System</i>
5	Rekomendasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik
6	Review Terhadap Pelaksanaan Audit Umum Atas Laporan Keuangan BRI Tahun Buku 2016: Laporan Keuangan BRI Tahun Buku 2016, Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2016, dan <i>Management Letter</i> Tahun Buku 2016
7	Review Terhadap Pelaksanaan Audit Umum Atas Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2016
8	Review Terhadap Pelaksanaan Audit Umum Atas <i>Management Letter</i> Tahun Buku 2016
9	Penelaahan Atas Laporan Kejadian <i>Fraud</i> Yang Berdampak Signifikan
10	Laporan Evaluasi Kinerja Investasi DPLK BRI

## PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMITE 2017

Pelatihan/*training* yang diikuti oleh anggota Komite Audit selama tahun 2017 dapat dilihat pada daftar pendidikan/*training* Dewan Komisaris selama Tahun 2017.

## RAPAT KOMITE AUDIT

### Kebijakan Rapat

Kebijakan Rapat Komite Audit diatur sebagai berikut:

- Rapat dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Komite.
- Setiap pemanggilan Rapat dapat dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Komite Audit atau salah satu anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris, atau dilakukan secara lisan atau media komunikasi lainnya.
- Rapat harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat dan wajib dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik.
- Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- Setiap rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite Audit dan dalam hal Ketua Komite Audit tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris.
- Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.



## KOMITE AUDIT

8. Perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* yang terjadi dalam rapat Komite Audit, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
9. Risalah rapat Komite Audit harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite Audit yang hadir dalam rapat.
10. Risalah rapat Komite Audit merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud.
11. Komite Audit dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat dengan ketentuan semua anggota Komite Audit telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite Audit memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat.

Pada tahun 2017 Komite Audit telah melaksanakan 15 kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

#### Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran Rapat	% Kehadiran
1	A. Fuad Rahmany	Ketua	15	15	100%
2	A. Sonny Keraf	Anggota	15	13	87%
3	Adhyaksa Dault*	Anggota	13	10	77%
4	Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	15	14	93%
5	I. Gde Yadnya Kusuma	Anggota	15	15	100%
6	Sunuaji Noor Widiyanto	Anggota	15	12	80%

\*efektif sampai 18 Oktober 2017

#### Agenda Rapat

No.	Materi Rapat	Waktu	Jumlah Anggota yang Hadir	Keterangan
1	Pembahasan hasil audit atas laporan keuangan konsolidasian PT BRI (Persero) Tbk per 31 Desember 2016	20 Januari 2017	6	Kuorum
2	Pembahasan rencana pengadaan KAP untuk audit laporan keuangan konsolidasian PT BRI (Persero) Tbk, posisi 31 Desember 2017	20 Januari 2017	6	Kuorum
3	Pembahasan perencanaan audit tahunan (PAT) tahun 2017	03 Februari 2017	6	Kuorum
4	Pembahasan pengenaan order/denda kepada EY di AS	14 Februari 2017	6	Kuorum
5	Pembahasan laporan pokok-pokok hasil audit s/d Triwulan IV tahun 2016	14 Februari 2017	6	Kuorum
6	Pembahasan permasalahan IT	21 Februari 2017	5	Kuorum
7	Pembahasan temuan SKAI mengenai pengadaan barang & jasa	04 April 2017	6	Kuorum
8	Pembahasan <i>review draft</i> laporan keuangan BRI Triwulan I-2017	17 April 2017	5	Kuorum
9	Pembahasan pokok-pokok hasil audit SKAI Triwulan I-2017	17 Mei 2017	6	Kuorum
10	Laporan keuangan DPLK BRI tahun buku 2016 oleh KAP Mirawati Sensi Idris	19 Juni 2017	5	Kuorum

## KOMITE AUDIT

## Agenda Rapat

No.	Materi Rapat	Waktu	Jumlah Anggota yang Hadir	Keterangan
11	Pembahasan dengan KAP Purwanto, Sungkoro, & Surja-EY <i>review</i> atas laporan keuangan konsolidasian PT BRI (Persero) Tbk. dan entitas anak per 30 Juni 2017	27 Juli 2017	5	Kuorum
12	Pembahasan pokok-pokok hasil audit SKAI Triwulan II-2017	04 Agustus 2017	5	Kuorum
13	Pembahasan dengan KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja (EY) dalam rangka <i>kick-off</i> audit laporan keuangan konsolidasian PT BRI (Persero) Tbk dan entitas anak per 31 Desember 2017	19 September 2017	5	Kuorum
14	Pembahasan telaah <i>draft</i> laporan keuangan BRI Triwulan III-2017	24 Oktober 2017	5	Kuorum
15	Pembahasan kunjungan Komite Audit ke Kanins dalam rangka evaluasi pelaksanaan audit oleh KAP EY	07 November 2017	5	Kuorum

## Rencana Agenda Rapat Komite Audit

No.	Rencana Agenda Rapat Tahun 2018	Target Waktu
1.	Penelaahan dan Persetujuan atas Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI Tahun 2018; termasuk melakukan penelaahan dan pemberian rekomendasi atas penyempurnaan Piagam Audit SKAI (bila ada).	Minggu ke IV Januari 2018
2.	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Komite Audit Tahun 2018.	Minggu ke II Januari 2018
3.	Penelaahan atas Laporan Pokok-pokok Hasil Audit (LHA) TW IV 2017	Minggu ke II Februari 2018
4.	Penelaahan atas Laporan Pokok-pokok Hasil Audit (LHA) TW I 2018	Minggu ke II Mei 2018
5.	Penelaahan atas Laporan Pokok-pokok Hasil Audit (LHA) TW II 2018	Minggu ke II Agustus 2018
6.	Penelaahan atas Laporan Pokok-pokok Hasil Audit (LHA) TW III 2018	Minggu ke II Nopember 2018
7.	Penelaahan atas Laporan Keuangan Triwulanan IV 2017	Minggu ke II Januari 2018
8.	Penelaahan atas Laporan Keuangan Triwulanan I 2018 (Anduited)	Minggu ke II April 2018
9.	Penelaahan atas Laporan Keuangan Triwulanan II 2018	Minggu ke II Juli 2018
10.	Penelaahan atas Laporan Keuangan Triwulanan III 2018 (Anduited)	Minggu ke II Oktober 2018
11.	Evaluasi Pengadaan dan Usulan Penunjukkan KAP (Audit Lapkeu Perseroan & PKBL) untuk Tahun Buku 2018	Minggu ke II Februari 2018
12.	Pembahasan management leeter audit Laporan Keuangan Tahun 2017	Minggu ke I Mei 2018
13.	Evaluasi atas penganan sanksi/denda dari OJK, PPAK dan otoritas berwenang lainnya	Minggu ke II Juli 2018



## KOMITE AUDIT

### Tindak Lanjut Rapat

Seluruh hasil kegiatan pertemuan dan rapat yang dilaksanakan oleh komite Audit di dokumentasikan dalam risalah rapat dan ditindaklanjuti dengan berbagai surat Ke Dewan Komisaris dan pihak terkait.

### REMUNERASI KOMITE AUDIT TAHUN 2017

Remunerasi bagi anggota komite yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan dengan honorarium yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan tidak terdapat honorarium khusus bagi setiap anggota Komite.

Khusus Anggota Komite dari Pihak independen (Non Komisaris), besarnya honorarium ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan jumlah maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama dan tidak diberikan penghasilan lain selain honorarium tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan menteri BUMN Nomor PER-12.MBU/2012 tanggal 12 Agustus 2012 tentang Organ pendukung Dewan Komisaris.

### OPINI KOMITE AUDIT TERHADAP PENELAAHAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERN DAN MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris, bekerja berdasarkan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang telah diperbaharui melalui Nota dinas Komite Audit No. B.52 KA/09/2017 tanggal 05 September 2017 tentang Revisi Pedoman dan Tata tertib Kerja Komite Audit (Piagam Komite Audit).

Dalam Pedoman tersebut dijabarkan Komite Audit bertugas antara lain untuk (i) melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan, (ii) melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, (iii) memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Auditor Independen, (iv) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Auditor Independen termasuk *fee*, (v) melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), (vi) melakukan penelaahan pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan serta (vii) menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan didalam Perseroan.

Didalam melaksanakan tanggungjawab pengawasan (*oversees*), Komite Audit melakukan rapat secara rutin selama tahun 2017. Rapat Komite Audit dirancang untuk mendorong komunikasi diantara Komite Audit, Manajemen Perseroan, SKAI dan Auditor Independen. Komite Audit, secara periodik, berdiskusi dengan SKAI dan Auditor Independen untuk membahas keseluruhan pekerjaannya dari mulai skope dan rencana audit sampai dengan hasil pengujian, evaluasi atas sistem pengendalian internal dan kualitas dari pelaporan keuangan konsolidasian Perseroan. Diskusi ini dilakukan sesuai perkembangan, dengan atau tanpa kehadiran.

Selama tahun 2017, Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, diantaranya, melalui pertemuan dan diskusi dengan:

## KOMITE AUDIT

### 1. Manajemen Perseroan

Komite Audit melakukan penelaahan dan mendiskusikan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dengan Manajemen Perseroan. Diskusi ini mencakup kualitas standar akuntansi yang diterapkan, kewajaran penilaian yang signifikan dan kejelasan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian termasuk kecukupan kerangka (*framework*) pengendalian internal yang diterapkan. Direksi Perseroan bertanggungjawab atas laporan keuangan, efektifitas sistem pengendalian internal dan evaluasi atas efektifitas sistem pengendalian internal.

### 2. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

Diskusi dengan SKAI dilakukan untuk mendapatkan informasi atas pelaksanaan skope dan rencana audit. Dalam diskusi ini juga dibahas hasil pemantauan SKAI, yang secara rutin dilakukan, atas pelaksanaan komitmen manajemen untuk memperbaiki kelemahan pengendalian internal yang ada sesuai target waktu yang telah disepakati, dan opini atas kecukupan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan oleh manajemen. Komite Audit, secara periodik, memantau pelaksanaan pemeriksaan SKAI untuk meyakinkan kualitas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan dengan metodologi *Risk Based Internal Audit (RBIA)* dengan pendekatan proses bisnis yang diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan tingkat kematangan manajemen risiko secara korporat.

### 3. Auditor Independen

Dalam melakukan penelaahan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan, Komite Audit bersama dengan Auditor Independen membahas pertimbangan (*judgements*) dan kualitas standar akuntansi yang digunakan Manajemen didalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Dalam diskusi ini, Komite Audit dan Auditor Independen membahas juga defisiensi dalam pengendalian internal yang diidentifikasi selama audit dan menurut pertimbangan profesional Auditor Independen adalah cukup penting untuk mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang terkait. Auditor Independen bertanggungjawab untuk memberikan opini (pendapat) atas kesesuaian laporan keuangan konsolidasian Perseroan dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelaahan dan diskusi disebutkan diatas, Komite Audit dapat mengkonfirmasi bahwa sistem pengendalian internal dan manajemen risiko di dalam Perseroan cukup memadai dalam mengidentifikasi risiko sehingga Perseroan dapat memahami dan mengelola risiko tersebut. Kemudian, Komite Audit merekomendasikan kepada Dewan Komisaris agar laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2017 tersebut dimasukkan dalam laporan tahunan Perseroan.



# KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tugas untuk meninjau kebijakan remunerasi dan memberikan saran dan rekomendasi atas prosedur pemilihan kandidat dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta pihak ketiga independen didalam komite dibawah Dewan Komisaris.

Panduan Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi disahkan disahkan oleh Dewan Komisaris melalui Nota Dinas Sekretariat Dewan Komisaris No: B.41-Sekom/05/2015 tanggal 12 Mei tahun 2015 tentang Pedoman dan tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

## DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang BUMN
2. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya.
4. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komsaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 / POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

## PEDOMAN/ PIAGAM KOMITE

Pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan mengatur tentang tujuan pembentukan, keanggotaan, kewenangan, tugas dan tanggung jawab, kedudukan, etika kerja serta etika rapat. Panduan tersebut merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan bidang manajemen SDM.

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya terkait dengan Kebijakan Nominasi dan Kebijakan Remunerasi.

## STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE

### Struktur Komite

Sesuai ketentuan yang berlaku, struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diatur sebagai berikut:

1. Anggota Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris, dan seorang Pejabat Eksekutif satu tingkat di bawah Direksi yang menangani kebijakan SDM (*ex officio*).
2. Dalam hal anggota Komite ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
3. Dewan Komisaris dapat mengangkat Pihak Independen sebagai anggota Komite, dengan ketentuan:
  - a. wajib memenuhi syarat:
    - i. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
    - ii. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
    - iii. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
  - b. Dipilih oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme perekrutan dan seleksi.

4. Masa kerja paling lama adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk masa kerja berikutnya dengan memperhatikan masa kerja Dewan Komisaris dan peraturan pekerja kontrak yang berlaku di Perseroan, dengan tidak menutup kemungkinan diberhentikan oleh Dewan Komisaris sebelum jangka waktu kontrak berakhir. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
5. Anggota Komite diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
7. Masa jabatan anggota tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan terdiri dari Ketua yang merupakan Komisaris Utama Independen dan anggota yang terdiri dari seluruh anggota Dewan Komisaris ditambah satu orang pejabat eksekutif yaitu Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia. Struktur dan komposisi ini telah sesuai dengan ketentuan dalam POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Susunan Keanggotaan sampai dengan 1 Januari 2017 sampai dengan 02 April 2017 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Profesi
1	Mutafa Abubakar*	Ketua	Komisaris Utama/ Independen
2	Gatot Trihargo	Anggota	Wakil Komisaris Utama
3	Adhyaksa Dault	Anggota	Komisaris Independen
4	Ahmad Fuad*	Anggota	Komisaris Independen
5	A. Fuad Rahmany	Anggota	Komisaris Independen
6	A. Sonny Keraf	Anggota	Komisaris
7	Vincentius Sonny Loho	Anggota	Komisaris
8	Jeffry J. Wurangian	Anggota	Komisaris
9	Eko Bambang Suharno	Anggota	<i>Ex-officio</i> (Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)

\*Efektif sampai dengan 15 Maret 2017 (RUPST BRI Tahun 2017)

Susunan Keanggotaan sampai dengan 03 April 2017 sampai dengan 18 Oktober 2017 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Profesi
1	Adhyaksa Dault	Ketua	Komisaris Independen
2	Andrinof A. Chaniago*	Anggota	Komisaris Utama/ Independen
3	Gatot Trihargo	Anggota	Wakil Komisaris Utama
4	A. Fuad Rahmany	Anggota	Komisaris Independen
5	A. Sonny Keraf	Anggota	Komisaris Independen
6	Mahmud	Anggota	Komisaris Independen
7	Vincentius Sonny Loho	Anggota	Komisaris
8	Jeffry J. Wurangian	Anggota	Komisaris
9	Nicolaus Teguh Budi Harjanto*	Anggota	Komisaris
10	A. Solichin Lutfiyanto	Anggota	<i>Ex-officio</i> (Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)

\*Efektif pada tanggal 19 Juli 2017 setelah Lulus *Fit and Proper test* OJK



## KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Susunan Keanggotaan sampai dengan 18 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Profesi
1	Andrinof A. Chaniago	Ketua	Komisaris Utama/ Independen
2	Gatot Trihargo	Anggota	Wakil Komisaris Utama
3	A. Fuad Rahmany	Anggota	Komisaris Independen
4	A. Sonny Keraf	Anggota	Komisaris Independen
5	Mahmud	Anggota	Komisaris Independen
6	Vincentius Sonny Loho	Anggota	Komisaris
7	Jeffry J. Wurangian	Anggota	Komisaris
8	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Anggota	Komisaris
9	Rofikoh Rokhim*	Anggota	Komisaris Independen
10	A. Solichin Lutfiyanto	Anggota	<i>Ex-officio</i> (Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)

\*Efektif 1 Februari 2018

## Keanggotaan Komite

1. Anggota Komite paling kurang terdiri dari:
  - a. Seorang Komisaris Independen;
  - b. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan; dan
  - c. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
2. Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan harus memenuhi kriteria:
  - a. Memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan; dan
  - b. Memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan.
3. Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko harus memenuhi kriteria:
  - a. Memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko;
  - b. Memiliki pengalaman kerja paling kurang 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko, bidang keuangan dan/atau perbankan.
4. Pihak Independen harus memenuhi persyaratan:
  - a. Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko;
  - b. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun keuangan dengan Direksi dan Dewan Komisaris;
  - c. Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi dengan Perseroan;
  - d. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan;
  - e. Tidak boleh merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, Staf Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota Komite pada BUMN atau perusahaan lain; dan
  - f. Tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan lainnya.
5. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota Komite, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan. Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) untuk menjadi Pihak Independen tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya hanya melakukan fungsi pengawasan paling kurang 6 (enam) bulan.
6. Penunjukan anggota Komite dari Pihak Independen, mengikuti ketentuan:
  - a. Dipilih oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme perekrutan dan seleksi;
  - b. Masa kerja paling lama adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk masa

## KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

kerja berikutnya dengan memperhatikan masa kerja Dewan Komisaris dan peraturan pekerja kontrak yang berlaku di Perseroan, dengan tidak menutup kemungkinan diberhentikan oleh Dewan Komisaris sebelum jangka waktu kontrak berakhir.

7. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
8. Anggota Komite diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

### Profil Komite

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

<b>Andrinof A. Chaniago</b> Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Independen	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2017, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
<b>Gator Trihargo</b> Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Wakil Komisaris Utama	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2017, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
<b>A. Fuad Rahmany</b> Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Independen	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2017, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
<b>A. Sonny Keraf</b> Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Independen	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2017, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
<b>Mahmud</b> Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Independen	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2017, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
<b>Vincentius Sonny Loho</b> Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2017, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
<b>Jeffry J. Wurangian</b> Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Independen	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2017, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
<b>Nicolaus Teguh Budi Harjanto</b> Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Independen	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2017, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
<b>Rofikoh Rokhim</b> Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Independen	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2017, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.



## KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

<p><b>Ahmad Solichin Lutfiyanto</b> Anggota Komite KNR (01 Juli 2017-Sekarang)</p>	<p>Lahir di Malang 5 Juli 1970. Memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) dari Fakultas Fakultas Pertanian Universitas Jember pada tahun 1987 dan gelar MM Manajemen Pemasaran/Inf.Sys dari UGM dan Agder College University, Norway pada tahun 2008. Beliau pernah menduduki berbagai jabatan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, antara lain Wakil Kepala Divisi Jaringan Kerja Bisnis Ritel (2012-2016), Kepala Divisi Transaction Banking (2016-2017), dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan <i>Human Capital</i> (2017-sekarang).</p>
--	---

## KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN

1. Mempunyai integritas, obyektifitas, mentalitas, etika dan tanggung jawab profesi yang tinggi
2. Mampu bersikap independen, yaitu mampu melaksanakan tugas secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
3. Mempunyai pengetahuan perbankan yang memadai termasuk ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memahami konsep manajemen sumber daya manusia secara komprehensif, diutamakan berpengalaman dalam manajemen SDM antara lain perencanaan suksesi, pengembangan karir, evaluasi kinerja serta berpengalaman mengelola sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan pekerja Perusahaan.
5. Mempunyai pengetahuan tentang peraturan ketenagakerjaan dan peraturan lain yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan.
6. Mempunyai waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya.
7. Mampu berkomunikasi dengan efektif.

## INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan tugas, beberapa anggota KNR memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan keuangan sementara anggota lainnya memiliki pengalaman di bidang sumber daya manusia. Sedangkan untuk menjamin independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pandangan maupun saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota Komisaris Independen merupakan anggota KNR yang

tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun pemegang saham pengendali Perseroan dan bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur dari Perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Perseroan.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

## Fungsi Nominasi

- a. Menganalisa, menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris.
- b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris.
- c. Memantau pelaksanaan dan menganalisa kriteria dan prosedur seleksi bagi calon Pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
- d. Menyusun sistem penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
- e. Memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- f. Memberikan pendapat atau nasehat kepada Direksi atas keputusan Direksi untuk mutasi dan/atau pengangkatan Non pekerja Perseroan menjadi pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
- g. Menganalisa data pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang disampaikan oleh Direksi secara Triwulanan dan setiap waktu jika ada perubahan.
- h. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko.

## KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

### Fungsi Remunerasi

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja Perseroan.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - 1) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
  - 2) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pekerja Perseroan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- c. Memberikan rekomendasi tentang pemberian opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja Perseroan, antara lain opsi saham.
- d. Memberikan rekomendasi tentang sistem pensiun bagi Pekerja Perseroan.
- e. Memberikan rekomendasi tentang sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam pengurangan Pekerja Perseroan.

### Lain-lain

- a. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang berkaitan dengan kebijakan ketenagakerjaan dan fungsi lainnya dalam manajemen sumber daya manusia yang memiliki dampak finansial yang signifikan dan/atau risiko hukum bagi Perseroan.
- b. Memberikan rekomendasi atas penyelesaian temuan audit internal dan /atau eksternal serta hasil pengawasan Bank Indonesia, khusus mengenai kebijakan di bidang manajemen sumber daya manusia.
- c. Mengadministrasikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite.

### Wewenang

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite dalam lingkup tanggung jawab Komite untuk meminta informasi yang relevan berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Nominasi dan remunerasi serta kebijakan ketenagakerjaan dan fungsi lainnya dalam manajemen sumber daya manusia dari pihak internal.

### Larangan Komite

1. Mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
2. Menerima penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris bagi anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite.

### KPI DAN PENCAPAIAN TAHUN 2017

Indikator atau kriteria kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) dikukur dari pencapaian atas program kerja /rencana kerja dan anggaran (RKA) yang telah disusun pada setiap awal tahun dan tingkat kehadiran Anggota KNR dalam setiap rapat. Adapun program kerja KNR disusun untuk mendukung faktor-faktor utama keberhasilan (*Key Success Factors*) pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan proses nominasi pengurus perseroan dan anak perusahaan, evaluasi kebijakan remunerasi pekerja dan ketenagakerjaan, remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, serta pengelolaan SDM secara keseluruhan.

Secara umum seluruh KPI KNR telah tercapai dengan dilaksanakannya seluruh Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KNR tahun 2017 sesuai target yang ditetapkan dan tingkat kehadiran anggota KNR yang memenuhi ketentuan sehingga rapat KNR dapat dilaksanakan dengan quorum dalam setiap mengambil keputusan.



## KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

### PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE 2017

#### Fokus Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan program kerja Komite Nominasi dan Remunerasi, Fokus utama KNR adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Nominasi  
Memastikan Perusahaan memiliki kebijakan sistem dan prosedur Nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif; dan memastikan Perseroan memiliki Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif yang memiliki kompetensi, pengetahuan, pengalaman serta sikap perilaku yang dipersyaratkan untuk mengelola Perseroan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Fungsi Remunerasi  
Memastikan Perseroan memiliki kebijakan penetapan penghasilan dan fasilitas lainnya yang adil dan layak bagi Dewan Komisaris, Direksi dan pekerja Perseroan.
3. Lain-lain  
Memastikan kebijakan ketenagakerjaan dan fungsi lainnya dalam manajemen sumber daya manusia di Perseroan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### Uraian pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR)

Realisasi Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Nominasi Direksi  
Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor.55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2017 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi KNR. Adapun proses Nominasi yang terjadi selama Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
  - a. Nominasi dalam RUPS Tahunan Tahun 2017  
Pada Tahun 2017 terdapat 1 (satu) Direksi yang telah menjalani dua periode Jabatan yaitu Asmawi Syam sebagai Direktur Utama BRI dan tiga Komisaris yang menjalani satu periode jabatan yaitu Sdr. Mustafa Abubakar (Komisaris Utama), Ahmad Fuad (Komisaris Independen) dan Vincentius Sonny Loho (Komisaris). Memperhatikan hal tersebut Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan proses Nominasi Calon Direksi dan Komisaris dari Internal Dewan Komisaris yang akan diusulkan kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna untuk di Putus dalam RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2017.

Pelaksanaan kegiatan Proses Nominasi Direksi dan Rekomendasi KNR adalah sebagai berikut:

## KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

No	Materi	Target Waktu dalam RKA	Realisasi Waktu	Output
1	Usulan Nominasi Direksi	Minggu Pertama Maret 2017	10 Februari 2017	Usulan calon Direktur Utama dan bakal calon anggota Direksi BRI disampaikan dalam Surat Dewan Komisaris Nomor: SR.02-KOM/02/2017 tentang Usulan calon Direksi PT.BRI
2	Usulan Nominasi Komisaris	Minggu Pertama Maret 2016	02 Maret 2017	Usulan pengangkatan kembali Komisaris Utama BRI disampaikan dalam Surat Dewan Komisaris Nomor: SR.05-KOM/03/2016 tentang Usulan pengangkatan kembali Komisaris utama PT BRI (Persero) Tbk
			10 Maret	Usulan pengangkatan kembali Komisaris BRI disampaikan dalam Surat Dewan Komisaris Nomor: SR.08-KOM/03/2016 tentang Usulan pengangkatan kembali Komisaris PT BRI (Persero) Tbk

## b. Nominasi dalam RUPS Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2017

Pada tanggal 18 Oktober 2017 Perseroan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa Tahun 2017 yang salah satu agendanya adalah penggantian Direksi dan Komisaris Perseroan. Pelaksanaan kegiatan Proses Nominasi Direksi dan Rekomendasi KNR adalah sebagai berikut:

Materi	Target Waktu	Realisasi Waktu	Output
Usulan Nominasi Direksi	Minggu pertama Oktober 2017	18 Oktober 2017	Usulan calon Direksi BRI disampaikan dalam Surat Dewan Komisaris Nomor: SR.12-KOM/10/2017 tentang Usulan Calon Direksi PT BRI (Persero) Tbk

## c. Nominasi Calon Komisaris dan Direksi di anak Perusahaan atau Wakil Perseroan yang ditempatkan di anak Perusahaan atau Pihak Terkait.

Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar BRI tersebut, salah satu tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwi Warna adalah mengusulkan Wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada perusahaan anak yang memberikan kontribusi signifikan bagi perseroan dan/ atau bernilai strategis. Memperhatikan hal tersebut, selama Tahun 2017 Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris telah melaksanakan proses Nominasi terhadap calon wakil perseroan yang diusulkan oleh Direksi untuk ditempatkan kepada anak perusahaan dan Pihak terkait antara lain sebagai berikut:

No	Materi	Realisasi Waktu	Output
1	Usulan Nominasi Direksi PT Bahana Artha Ventura	20 November 2017	Usulan calon Pengurus PT Bahana Artha Ventura disampaikan kepada Dewan Komisaris BRI untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna melalui Surat Nomor: R.12-KNR/11/2017 tanggal 20 November 2017
2	Usulan Nominasi Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.	04 Desember 2017	Usulan calon Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk disampaikan kepada Dewan Komisaris BRI untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna melalui Surat Nomor: R.13-KNR/12/2017 tanggal 4 Desember 2017.



## KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara serta Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Komite Nominasi dan remunerasi harus melakukan penilaian terhadap pencapaian kinerja Direksi sesuai dengan KPI Direksi.

Dalam rangka melaksanakan *review* terhadap kinerja Direksi BRI, Komite Nominasi dan Remunerasi sepakat untuk melaksanakan evaluasi terhadap jajaran Direksi BRI pada tanggal 28 Februari 2017. Tujuan dari pelaksanaan evaluasi Direksi tersebut antara lain untuk melakukan penilaian terhadap pencapaian kinerja Direksi serta melakukan *review* kembali atas kompetensi masing-masing Direksi.

Pelaksanaan kegiatan Evaluasi kinerja Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Materi	Target Waktu	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Output
Evaluasi Kinerja Direksi per Bidang	Minggu II Maret 2017	02 Maret 2017	Surat tertulis KNR / Dewan Komisaris melalui surat Dewan Komisaris Nomor: SR.06-KOM/03/2016 tentang Hasil evaluasi kinerja Direksi PT BRI (Persero) Tbk

### 3. *Review* Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

#### a. *Review* Remunerasi Direksi dan Komisaris

KNR menyampaikan *review* dan usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk menjadi usulan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2017. Usulan remunerasi tersebut berupa meliputi usulan honorarium/gaji Dewan Komisaris dan Direksi, tunjangan dan fasilitas untuk Tahun 2017, usulan tantiem atas kinerja Tahun Buku 2016 .

Pelaksanaan *review* dan usulan remunerasi Direksi dan Komisaris adalah sebagai berikut:

Materi	Target Waktu dalam RKA	Realisasi Waktu	Output
<i>Review</i> Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	Minggu ke I Mei 2017	05 April 2017	Usulan tertulis Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui Surat Dewan Komisaris Nomor: SR.09-KOM/02/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Usulan Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2017.

#### b. Kebijakan Tata Kelola Remunerasi

Bahwa dalam rangka memastikan tata kelola pemberian remunerasi untuk mendorong *prudent risk taking* oleh Pejabat Bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

Sebagai Perusahaan yang diawasi oleh OJK, BRI perlu meninjau kembali kebijakan remunerasi yang telah dimiliki agar sesuai dengan aturan OJK tersebut, sehubungan dengan hal tersebut perlu untuk melakukan *review* dan menetapkan Kebijakan Tata Kelola Remunerasi BRI. Kebijakan tata Kelola remunerasi yang baru telah ditetapkan melalui SK bersama Direksi dan Komisaris pada tanggal 30 November 2017.

## KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

### 4. *Review* atas Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan

KNR menyampaikan rekomendasi mengenai hasil *review* atas Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan kepada Dewan Komisaris. Rekomendasi dimaksud menjadi bahan bagi Dewan Komisaris dalam rangka pemberian pendapat dan saran kepada Direksi untuk memastikan Perseroan selalu menetapkan kebijakan ketenagakerjaan sesuai dengan visi misi Perseroan. *Review* dilakukan dengan mengevaluasi implementasi Arsitektur SDM, Kebijakan SDM dan laporan serta pemaparan Direksi dan/atau Divisi SDM.

Target dan realisasi *review* atas implementasi remunerasi Pekerja dan Kebijakan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

Materi	Target Waktu	Realisasi Waktu	Output
<i>Review</i> Kebijakan Ketenagakerjaan	Minggu Pertama November 2016	05 Desember 2017	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi disampaikan dalam Notulen Rapat Nomor: 43-KOM/10/2017 tanggal 05 Desember 2017 tentang evaluasi Remunerasi dan Kebijakan SDM

Hal-hal yang menjadi *Concern* KNR dan Dewan Komisaris terkait dengan Kebijakan dan pengelolaan *Human Capital* BRI antara lain sebagai berikut:

- Manajemen diharapkan melakukan perencanaan SDM untuk jabatan spesialis sesuai dengan kebutuhan Perseroan.
- Memperkuat proses rekrutmen (yaitu dengan proses penyaringan awal yang lebih efektif).
- Mengembangkan program iNovatif untuk menjangkau talenta terbaik dan mendorong BRI menjadi pilihan utama talenta terbaik untuk bekerja.
- Mendorong recomposisi jumlah Pekerja dari bidang support ke bidang bisnis.
- Strategi dan rencana Manajemen dalam pengelolaan SDM menghadapi era *digital banking* dan *fintech*.
- Mendesain kembali penilaian kinerja untuk memastikan proses yang adil dan transparan.
- Menyelaraskan kembali mekanisme remunerasi untuk memberikan penghargaan terhadap pegawai serta distribusi kerja yang berkeadilan.
- Mengkaji jenjang karier pegawai untuk memperkuat hubungan kinerja dan kemajuan karir jangka panjang.
- Mengembangkan strategi dan desain *training* yang menunjang pengetahuan dan kemampuan Pekerja

## LAPORAN PELAKSANAAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Selama Tahun 2017, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan berbagai tugas dan kegiatan, mencakup:

- Menyusun rencana dan program kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2017 yang merupakan penjabaran dari Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Pengawasan Manajemen Risiko, Sekretaris Dewan Komisaris, dan Staf Sekretaris Dewan Komisaris melakukan penyusunan rencana dan program kerja Dewan Komisaris Tahun 2017
- Melakukan *review* dan kajian atas Remunerasi Direksi dan Komisaris sesuai kinerja Perseroan, *size business*, dan hasil survei remunerasi industri Perbankan.
- Melaksanakan proses Nominasi dan memberikan rekomendasi calon Pengurus Perseroan dan Anak perusahaan Perseroan.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai perpanjangan masa kerja anggota Komite yang berasal dari luar Komisaris.
- Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan ketenagakerjaan.
- Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Pengawasan Manajemen Risiko, dan Sekretariat Dewan Komisaris melakukan *review* dalam rangka pemberian persetujuan Dewan Komisaris terhadap usulan dan revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP).



## KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

8. Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Pengawasan Manajemen Risiko, Sekretariat Dewan Komisaris melakukan *review* perkembangan kinerja bulanan Perseroan dan memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Komisaris untuk diklarifikasi kepada Direksi dalam forum Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.
9. Melaksanakan kunjungan langsung ke unit kerja.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta oleh Dewan Komisaris.

## PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMITE 2017

Pelatihan/*training* yang diikuti oleh Dewan Komisaris yang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi selama Tahun 2017 dapat dilihat pada daftar pendidikan/*training* Dewan Komisaris selama Tahun 2017.

Pendidikan Anggota Komite Non-Komisaris	Tema	Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara Pendidikan
Ahmad Solichin Lutfiyanto	China Internet Finance Academy	China	McKinsey
	Innovation Strategy for Growth	Pennsylvania	Wharthon Business School

## RAPAT KOMITE

## Kebijakan Rapat

Pengaturan Rapat Komite adalah sebagai berikut:

1. Rapat dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu.
2. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota, termasuk Ketua Komite dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai.
3. Rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Komite.
4. Pemanggilan rapat harus dilakukan oleh Ketua Komite. Panggilan Rapat Komite harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Komite dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat elektronik (*e-mail*) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
5. Panggilan rapat tersebut diatas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat yang diadakan sebelumnya.
6. Pemanggilan rapat harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat;
7. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite.
8. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dengan ketentuan setiap anggota Komite hanya berhak untuk memberikan 1 (satu) suara;
9. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat yang memutuskan;
10. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik serta wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris;
11. Perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
12. Risalah rapat Komite harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite yang hadir dalam rapat;
13. Risalah rapat Komite merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud;
14. Rapat dapat mengundang Direksi dan/atau Kepala Divisi/Pejabat Eksekutif Perseroan untuk meminta penjelasan, pemaparan, dan informasi terkait dengan agenda rapat.
15. Pimpinan rapat harus mengemukakan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat;

## KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

16. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan semua anggota Komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

## Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Rapat-rapat yang dilaksanakan oleh KNR dalam Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Agenda Rapat	Tanggal	No Notulen Rapat KNR	Anggota KNR yang Hadir	Keterangan
1	a. Penetapan Perpanjangan Kontrak Kerja Anggota Komite KPMR dan KTKT an. Sdr. Tubagus Nur Ahmad Maulana b. Pengajuan <i>Fit and Proper Test</i> Komisaris Independen c. Persiapan RUPS Tahun 2017 d. Usulan Calon anggota Direksi PT BRI (Persero) Tbk.	31 Januari 2017	B.01-KNR/01/2017	6	Kuorum
2	a. Pembahasan Usulan Calon Direktur Utama BRI b. Pembahasan hasil wawancara Bakal Calon Anggota Direksi PT BRI (Persero) Tbk.	08 Februari 2017	B.02-KNR/02/2017	6	Kuorum
3	a. Nominasi Anggota Dewan Komisaris PT BRI (Persero) Tbk. b. Evaluasi jajaran Direksi PT BRI (Persero) Tbk.	28 Februari 2017	B.03-KNR/02/2017	7	Kuorum
4	Penerapan Tata Kelola Remunerasi: Implementasi Peraturan OJK No.45/POJK.03/2015 dan SE OJK No.40/SEOJK.03/2016	28 Februari 2017	B.04-KNR/02/2017	6	Kuorum
5	Evaluasi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun 2017 tanggal 15 Maret 2017.	14 Maret 2017	B.05-KNR/03/2017	7	Kuorum
6	Pembahasan Usulan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi BRI.	04 April 2017	B.06-KNR/04/2017	8	Kuorum
7	Penetapan Gaji/HoNorarium dan Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2016.	28 Juni 2017	B.07-KNR/06/2017	7	Kuorum
8	a. Pembahasan <i>Self Assessment</i> Calon Direktur Kepatuhan b. Pembahasan Perpanjangan Kontrak Anggota Komite (Pihak Independen) dan Staf Sekretariat Dekom	18 Juli 2017	B.08-KNR/07/2017	8	Kuorum
9	Pembahasan Usulan <i>Talent Pool</i> Calon Direksi BRI.	03 Oktober 2017	B.09-KNR/10/2017	7	Kuorum
10	Evaluasi calon anggota Direksi dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahunan Tahun 2017 tanggal 18 Oktober 2017.	17 Oktober 2017	B.10-KNR/10/2017	6	Kuorum
11	Usulan Nominasi Direksi PT bahan Artha Ventura	20 November 2017	B.11-KNR/11/2017	8	Kuorum
12	Usulan Nominasi Direksi PT BRI Agro Niaga (Persero) Tbk.	04 Desember 2017	B.12-KNR/12/2017	7	Kuorum
13	Evaluasi dan <i>Review</i> Kebijakan Tata Kelola SDM	05 Desember 2017	B.13-KNR/11/2017	9	Kuorum



## KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Adapun tingkat kehadiran rapat setiap anggota KNR adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat KNR	Kehadiran KNR	% Kehadiran KNR
1	Mustafa Abubakar*	Ketua	5	5	100%
2	Andrinof A. Chaniago***	Ketua	5	5	100%
3	Gatot Trihargo	Anggota	13	10	77%
4	Adhyaksa Dault**	Anggota/Ketua	10	9	90%
5	Ahmad Fuad*	Anggota	5	5	100%
6	A. Fuad Rahmany	Anggota	13	11	85%
7	A. Sonny Keraf	Anggota	13	11	85%
8	Mahmud	Anggota	13	11	85%
9	Vincentius Sonny Loho***	Anggota	13	10	77%
10	Jeffry J. Wurangian	Anggota	13	12	92%
11	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Anggota	5	5	100%
12	Eko Bambang Suharno*****	Anggota	8	6	75%
13	A. Solichin Lutfiyanto*****	Anggota	6	5	83%

\*) Efektif sampai 15 Maret 2017

\*\*\*) Efektif sampai 18 Oktober 2017

\*\*\*\*) Efektif mulai 19 Juli 2017

\*\*\*\*\*) Efektif sampai 30 Juni 2017

\*\*\*\*\*)Efektif Mulai 1 Juli 2017

## Tindak Lanjut Rapat

Dokumen rekomendasi atau hasil *review* kebijakan yang dikeluarkan oleh KNR dalam Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Rekomendasi dan Hasil Review Kebijakan	Nomor Surat	Perihal Dokumen/Surat
1	02 Februari 2017	R.01 -KNR/02/2017	Rekomendasi KNR a.n Sdr Mahmud sebagai Komisaris independen PT BRI (Persero) Tbk.
2	10 Februari 2017	R.02 -KNR/02/2017	Rekomendasi Usulan Calon Direktur Utama BRI
3	20 Februari 2017	R.03 -KNR/02/2017	Persetujuan <i>draft</i> SK Outsourcing (alih daya).
4	01 Maret 2017	R.04 -KNR/03/2017	Rekomendasi Pengangkatan Komisaris Utama Utama BRI
5	01 Maret 2017	R.05 -KNR/03/2017	Rekomendasi KNR atas Calon Anggota Dewan Komisaris BRI
6	01 Maret 2017	R.06 -KNR/03/2017	Rekomendasi KNR atas Calon Anggota Dewan Komisaris BRI
7	14 Maret 2017	R.07 -KNR/03/2017	Rekomendasi KNR atas penetapan bakal calon Direksi dan Dewan Komisaris yang akan di usulkan dalam RUPS
8	05 April 2017	R.08 -KNR/04/2017	Rekomendasi KNR atas usulan Remunerasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
9	05 April 2017	R.09 -KNR/04/2017	Rekomendasi Pengangkatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
10	21 Juni 2017	R.09.a -KNR/06/2017	Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2017
11	17 Oktober 2017	R.10 -KNR/10/2017	Rekomendasi KNR atas penetapan bakal calon Direksi dan Dewan Komisaris yang akan di usulkan dalam RUPS luar biasa Tahun 2017

## KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

No	Rekomendasi dan Hasil Review Kebijakan	Nomor Surat	Perihal Dokumen/Surat
12	14 Nopember 2017	R.11 -KNR/11/2017	Usulan revisi draft SK bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT BRI (Persero) Tbk, tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi PT BRI (Persero) Tbk
13	20 Nopember 2017	R.12 -KNR/11/2017	Rekomendasi bakal calon Dewan Komisaris dan Direktur PT Bahana Artha Ventura.
14	04 Desember 2017	R.13-KNR/12/2017	Rekomendasi bakal calon Dewan Komisaris dan Direktur PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.
15	05 Desember 2017	B.13-KNR/11/2017	Evaluasi dan <i>Review</i> Kebijakan Tata Kelola SDM

## Rencana Agenda Rapat KNR tahun 2018

No.	Agenda Rapat Tahun 2018	Target Waktu
1.	Nominasi Direksi dan Komisaris	Minggu IV Februari 2018
2.	<i>Review</i> Remunerasi Direksi dan Komisaris untuk Tahun 2018	Minggu I Maret 2018
3	Evaluasi Kinerja Direksi per Bidang	Minggu I Maret 2018
4	<i>Review</i> Kebijakan SDM	Minggu I November 2018
5	Nominasi Calon Pengurus Perusahaan Anak	Minggu I April 2018

## REMUNERASI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Remunerasi bagi anggota komite yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan dengan Honorarium yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan tidak terdapat Honorarium khusus bagi setiap anggota Komite.

## OPINI KNR TERHADAP PELAKSANAAN NOMINASI DAN REMUNERASI PERUSAHAAN

Komite Remunerasi dan Nominasi menilai, sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi telah mengacu pada ketentuan yang berlaku dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai contoh, dalam hal pemilihan calon Direksi, setiap calon terlebih dahulu harus lulus *assessment* yang dilakukan oleh pihak independen dan setiap posisi jabatan Direksi yang akan di isi minimal disiapkan 3 (dua) orang calon yang selanjutnya menjalani proses *fit and proper test* oleh Dewan Komisaris dengan metode wawancara langsung.

Komite Nominasi dan Remunerasi menilai, pengukuran kinerja untuk Dewan Komisaris dan untuk Direksi yang dilakukan secara kolektif kolegial saat ini dinilai telah mencukupi. Selain saat ini telah dikembangkan penilaian kinerja individu, khususnya untuk Direksi, yang dapat mengukur efektifitas pelaksanaan tugas dari masing-masing Direksi tanpa mengesampingkan bahwa terdapat kinerja individu Direksi yang bersifat kolegial (dipengaruhi/ mempengaruhi kinerja Direksi lain atau harus dikerjakan bersama Direksi lain).

Dalam hal kriteria dan prosedur seleksi bagi calon pejabat satu tingkat dibawah Direksi, Komite Nominasi dan Remunerasi menilai bahwa Direksi telah menerapkan sistem, kriteria dan prosedur yang prudent, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait dengan remunerasi, Perusahaan dinilai telah menerapkan remunerasi bagi Direksi berdasarkan kinerja yang dicapai, *benchmark* ke industri dan *peers group* serta didasarkan pada evaluasi yang komprehensif yang dibantu oleh pihak independen yang kompeten. Demikian pula dengan penetapan remunerasi bagi pekerja secara keseluruhan diterapkan secara wajar, adil dan memotivasi pekerja, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan dan remunerasi yang diberikan dalam industri.



## KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

### KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Bahwa dalam rangka implementasi praktik bisnis yang sehat dan memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* serta prinsip kehati-hatian di lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Dewan Komisaris telah menetapkan kebijakan Nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Surat Keputusan NOKEP:07-KOM/BRI/07/2015, tanggal 28 Juli 2015. Secara Umum Kebijakan Sukses Dewan Komisaris dan Direksi antara lain sebagai berikut:

#### 1. Kebijakan Umum Suksesi Direksi dan Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris berwenang untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank.
- b. Untuk calon anggota Direksi, proses Nominasi yang dilakukan adalah untuk bakal calon yang berasal dari internal Bank, yaitu:
  - 1) Anggota Direksi yang akan berakhir masa jabatannya namun masih dapat diangkat kembali sebagai anggota Direksi;
  - 2) Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa;
  - 3) Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan.
- c. Untuk calon anggota Dewan Komisaris, proses Nominasi dilakukan untuk bakal calon yang berasal dari anggota Dewan Komisaris yang akan berakhir masa jabatannya namun masih dapat diangkat kembali sebagai anggota Dewan Komisaris;
- d. Untuk bakal calon anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris selain Pejabat satu tingkat di bawah Direksi dan Direksi Anak Perusahaan, proses Nominasi dilakukan bersama dalam suatu Tim yang dibentuk oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dan sekaligus menetapkan bakal calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang akan diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- e. Dalam melakukan proses Nominasi, Komite diwakili oleh Ketua Komite dan apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka digantikan oleh salah seorang anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen.
- f. Keputusan ini sekaligus memberikan mandat kepada Ketua Komite atau Komisaris Independen untuk:
  - 1) Mewakili Komite sebagai anggota Tim Penilai yang dibentuk Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
  - 2) Memberikan rekomendasi atas calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan calon;
- g. Ketua Komite atau Komisaris Independen yang mewakili Komite wajib menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan wajib menjaga independensinya.

#### 2. Prosedur Nominasi Direksi dan Komisaris

Prosedur pemilihan Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi diatur sebagai berikut:

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) menajring Bakal Calon yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Untuk bakal calon anggota Direksi Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa dan Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan, komite dapat meminta usulan Bakal Calon kepada Direksi Bank yang terlebih dahulu dilakukan *assessment* oleh Lembaga Profesional dengan indikator kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang dianggap layak selanjutnya diusulkan oleh KNR kepada Dewan Komisaris untuk mengikuti proses Evaluasi.
- c. KNR melakukan proses evaluasi untuk menggali informasi komprehensif mengenai kualifikasi dan kompetensi Bakal Calon, sebagai berikut:
  1. Untuk bakal calon anggota Direksi yang berasal dari anggota Direksi yang masih menjabat yang akan berakhir masa jabatannya namun masih dapat diangkat kembali, evaluasi dilakukan antara lain dengan meminta pendapat dari Direktur Utama;

## KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

2. Komite Nominasi dan Remunerasi menjangking bakal calon anggota Direksi yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Proses penjangkingan ini melibatkan lembaga *assessment* profesional/eksternal atau *Professional Search Firm* yaitu: PPM Manajemen *Assesment Center* Indonesia (ACI) Telkom), DDI, Bina Potensia, SHL dan LMFE UI, selanjutnya hasil *assessment* tersebut diserahkan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Untuk bakal calon anggota Direksi yang berasal dari pejabat satu tingkat dibawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa, atau yang berasal dari Direksi anak perusahaan/perusahaan patungan, evaluasi dilakukan dengan cara:
  - a) Melakukan interview/wawancara terhadap Bakal Calon anggota Direksi yang direkomendasikan; dan/atau,
  - b) Meminta Bakal Calon anggota Direksi untuk memberikan presentasi mengenai topik tertentu, yang menggambarkan kemampuan Bakal Calon sesuai dengan persyaratan.
4. Untuk Bakal Calon anggota Dewan Komisaris, evaluasi untuk menggali kualifikasi dan kompetensi dilakukan dari daftar riwayat hidup yang bersangkutan.
- d. Hasil penggalian informasi mengenai Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dibahas dalam rapat Komite untuk memutuskan Bakal Calon yang terpilih menjadi Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
- e. Hasil pembahasan Komite dituangkan dalam Nota Dinas Komite kepada Dewan Komisaris. Nota Dinas tersebut merupakan dokumen rekomendasi Komite atas pencalonan Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang bersangkutan.
- f. Dewan Komisaris memutuskan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dalam rapat Dewan Komisaris yang sekaligus sebagai dasar rekomendasi Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk selanjutnya di sampaikan dalam RUPS.
- g. RUPS Menentukan susunan dan perubahan anggota Direksi BRI, dalam hal anggota Direksi yang diangkat belum disetujui oleh OJK, maka pengangkatan dimaksud belum efektif sebelum yang bersangkutan disetujui oleh OJK. Calon anggota Direksi BRI yang belum mendapat persetujuan OJK, yang bersangkutan dilarang melakukan tugas sebagai anggota Direksi dalam kegiatan operasional Bank dan atau kegiatan lain yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan kondisi keuangan Bank, walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS. RUPS juga memberhentikan Direksi yang terpilih pada RUPS sebelumnya, jika yang bersangkutan tidak disetujui oleh OJK.
- h. BRI Mengajukan permohonan kepada OJK untuk melakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan.
- i. OJK berwenang untuk Memberikan penilaian atas kemampuan dan kepatutan Direksi terpilih yang meliputi penelitian administratif dan wawancara. Persetujuan atau peNolakan atas permohonan dimaksud akan diberikan oleh OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.



# KOMITE PENGAWAS MANAJEMEN RISIKO

Komite Pengawasan Manajemen Risiko (KPMR) merupakan salah satu Organ Dewan Komisaris yang dibentuk dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris. KPMR bekerja secara kolektif, bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

## DASAR HUKUM

1. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.4/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.4/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

## PEDOMAN/ PIAGAM KOMITE

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Komite Pengawasan Manajemen Risiko BRI telah dilengkapi Pedoman Kerja yang mengatur tentang tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, pembagian kerja, waktu kerja, etika kerja, rapat, struktur organisasi, dan pelaksanaan tugas berkaitan dengan Komite Pengawasan manajemen Risiko (KPMR). Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Audit. Panduan tersebut merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bagi KPMR dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan memastikan agar penerapan manajemen risiko BRI.

Panduan kerja Komite Pengawasan Manajemen Risiko di *review* secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan pedoman tersebut selalu sejalan dengan kebutuhan, Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau regulasi terkait lain yang berlaku. Panduan Kerja KPMR disahkan oleh Dewan Komisaris melalui Nota Dinas Sekretariat Dewan Komisaris No: B.41-Sekkom/05/2015 tanggal 12 Mei tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam usaha mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait penerapan dan pengawasan penerapan manajemen risiko Perseroan. Penetapan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko ditetapkan melalui SK Direksi Nokep: 317-DIR/KPS/04/2017 tanggal 03 April 2017 tentang Penetapan Kembali Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko.

## STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE

### Struktur Komite

1. Komite berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
2. Anggota Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang. Salah satu diantaranya adalah Komisaris Independen yang akan bertindak sebagai Ketua Komite.

Struktur dan Keanggotaan anggota Komite Pemantau Risiko Periode 1 Januari –15 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

## KOMITE PENGAWAS MANAJEMEN RISIKO

No	Nama	Jabatan pada Komite	Periode Jabatan	Keterangan/Keahlian
1	Ahmad Fuad	Ketua	2015-5 Maret 2017	Komisaris Independen
2	Mustafa Abubakar	Anggota	2015-15 Maret 2017	Komisaris Utama
3	A. Fuad Rahmany	Anggota	2015-2017	Komisaris Independen
4	Jeffry J. Wurangian	Anggota	2015-2017	Komisaris
5	Indrayeti	Anggota	2015-2017	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko
6	Tubagus A. Maulana	Anggota	2015-2017	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko
7	Suindiyo	Anggota	2015 - 2017	Pihak Independen Bidang Keuangan
8	Totok Hermiyanto	Anggota	2015 - 2017	Pihak Independen Bidang Keuangan

Struktur dan Keanggotaan anggota Komite Pemantau Risiko Periode 15 Maret 2017 – 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan pada Komite	Periode Jabatan	Keterangan/Keahlian
1	Mahmud	Ketua	15 Maret 2017-Sekarang	Komisaris Independen
2	Andrinof A. Chaniago	Anggota	15 Maret 2017-Sekarang	Komisaris Utama
3	A. Fuad Rahmany	Anggota	Juni 2015-Sekarang	Komisaris Independen
4	Jeffry J. Wurangian	Anggota	Juni 2015-Sekarang	Komisaris
5	Nicolaus T. Budi Harjanto	Anggota	15 Maret 2017-Sekarang	Komisaris
6	Indrayeti	Anggota	Juni 2015-Sekarang	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko
7	Tubagus A. Maulana	Anggota	Juni 2015- Sekarang	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko
8	Suindiyo	Anggota	Juni 2015 - Sekarang	Pihak Independen Bidang Keuangan
9	Totok Hermiyanto	Anggota	Juni 2015 - Sekarang	Pihak Independen Bidang Keuangan

## Keanggotaan Komite

1. Anggota Komite paling kurang terdiri dari:
  - a. Seorang Komisaris Independen;
  - b. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan; dan
  - c. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
2. Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan harus memenuhi kriteria:
  - a. Memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan; dan
  - b. Memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan.
3. Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko harus memenuhi kriteria:
  - a. Memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko;
  - b. Memiliki pengalaman kerja paling kurang 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko di bidang keuangan dan/atau perbankan.



## KOMITE PENGAWAS MANAJEMEN RISIKO

4. Pihak Independen harus memenuhi persyaratan:
  - a. Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko;
  - b. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun keuangan dengan Direksi dan Dewan Komisaris;
  - c. Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi dengan Perseroan;
  - d. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan;
  - e. Tidak boleh merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, Staf Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota Komite pada BUMN atau perusahaan lain; dan
  - f. Tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan lainnya.
5. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota Komite, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan. Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) untuk menjadi Pihak Independen tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya hanya melakukan fungsi pengawasan paling kurang 6 (enam) bulan.
6. Penunjukan anggota Komite dari Pihak Independen, mengikuti ketentuan:
  - a. Dipilih oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme perekrutan dan seleksi;
  - b. Masa kerja paling lama adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk masa kerja berikutnya dengan memperhatikan masa kerja Dewan Komisaris dan peraturan pekerja kontrak yang berlaku di Perseroan, dengan tidak menutup kemungkinan diberhentikan oleh Dewan Komisaris sebelum jangka waktu kontrak berakhir.
7. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.

### Profil Komite

Profil Anggota KPMR per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

<b>Mahmud</b> Ketua KPMR/ Komisaris Independen Periode: 15 Maret 2017-Sekarang	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Pengawas Manajemen Risiko per 31 Desember 2017, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
<b>Andrinof A. Chaniago</b> Anggota KPMR/ Komisaris Independen Periode: 15 Maret 2017-Sekarang	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Pengawas Manajemen Risiko per 31 Desember 2017, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
<b>A. Fuad Rahmany</b> Anggota KPMR/ Komisaris Independen Periode: Juni 2015-Sekarang	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Pengawas Manajemen Risiko per 31 Desember 2017, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
<b>Jeffry J. Wurugian</b> Anggota KPMR/ Komisaris Independen Periode: Juni 2015-Sekarang	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Pengawas Manajemen Risiko per 31 Desember 2017, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
<b>Nicolaus T. Budi Harjanto</b> Anggota KPMR/ Komisaris Periode: 15 Maret 2017-Sekarang	Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Pengawas Manajemen Risiko per 31 Desember 2017, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

## KOMITE PENGAWAS MANAJEMEN RISIKO

<p><b>Indrayeti</b> Anggota KPMR Pihak Independen Periode: Juni 2015-Sekarang</p>	<p>Lahir di Sungai Liat, 9 Oktober 1972. Menjabat sebagai anggota KPMR PT BRI (Persero), Tbk sejak 2014. Sebelumnya berkarir di bank BUMN lain dan beberapa bank swasta dalam berbagai posisi. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta (1995) dan gelar Master of Commerce dari University of New South Wales (2000).</p>
<p><b>Tubagus A. Maulana</b> Anggota KPMR Pihak Independen Periode: Juni 2015-Sekarang</p>	<p>Lahir di Jakarta, 7 Mei 1971. Menjabat sebagai anggota KPMR PT BRI (Persero), Tbk sejak Februari 2016. Sebelumnya berkarir sebagai dosen dan konsultan. Memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari IPB (1995) dan gelar MBA Banking and Finance dari University of Birmingham (2000), MSc Finance dari University of Strathclyde (2001) dan PhD in Finance dari University of Strathclyde (2007).</p>
<p><b>Suindiyo</b> Anggota KPMR Pihak Independen Periode: Juni 2015-Sekarang</p>	<p>Lahir di Blera 27 April 1959. Menjabat sebagai anggota KPMR PT BRI (Persero), Tbk sejak Desember 2015. Sebelumnya berkarir di PT BRI (Persero) Tbk dalam berbagai posisi antara lain Inspektur (Executive Vice President bidang Audit), Vice President Loan Restructuring and Recovery, Vice President Administrasi Kredit dan Vice President Pusdiklat. Selain itu juga pernah menjabat sebagai Komisaris Lembaga Keuangan Non Bank. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Jember (1985) dan gelar Master of Business Administration Finance dari Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) (1994).</p>
<p><b>Totok Hermiyanto</b> Anggota KPMR Pihak Independen Periode: Juni 2015-Sekarang</p>	<p>Lahir di Banjarmasin, 22 Juni 1959. Menjabat sebagai anggota KPMR PT BRI (Persero), Tbk sejak Desember 2015. Sebelumnya berkarir lebih dari 30 tahun di Bank Indonesia sebagai Pengawas Bank, Auditor dan Kepala Perwakilan. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro 1983 dan Master of Business Administration dari Wollongong University Australia (1996).</p>

### Struktur dan Keanggotaan KPMR

Komite berada di bawah Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. KPMR terdiri atas paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang. Salah satu diantaranya adalah Komisaris Independen yang akan bertindak sebagai Ketua Komite.

Ketentuan keanggotaan KPMR adalah sebagai berikut:

1. Anggota Komite paling kurang terdiri dari:
  - a. Seorang Komisaris Independen;
  - b. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan; dan
  - c. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
2. Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan harus memenuhi kriteria:
  - a. Memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan; dan
  - b. Memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan.
3. Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko harus memenuhi kriteria:
  - a. Memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko;
  - b. Memiliki pengalaman kerja paling kurang 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko di bidang keuangan dan/atau perbankan.
4. Pihak Independen harus memenuhi persyaratan:
  - a. Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko;
  - b. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun keuangan dengan Direksi dan Dewan Komisaris;
  - c. Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi dengan Perseroan;
  - d. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan;
  - e. Tidak boleh merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris,



## KOMITE PENGAWAS MANAJEMEN RISIKO

- Staf Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota Komite pada BUMN atau perusahaan lain; dan
- f. Tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan lainnya.
5. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota Komite, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan. Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) untuk menjadi Pihak Independen tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya hanya melakukan fungsi pengawasan paling kurang 6 (enam) bulan.
  6. Penunjukan anggota Komite dari Pihak Independen, mengikuti ketentuan:
    - a. Dipilih oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme perekrutan dan seleksi;
    - b. Masa kerja paling lama adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk masa kerja berikutnya dengan memperhatikan masa kerja Dewan Komisaris dan peraturan pekerja kontrak yang berlaku di Perseroan, dengan tidak menutup kemungkinan diberhentikan oleh Dewan Komisaris sebelum jangka waktu kontrak berakhir.
  7. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.

### KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN

Sesuai dengan Pedoman Tata tertib KPMR Anggota Komite paling kurang terdiri dari Seorang Komisaris Independen, Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

1. Pihak Independen yang dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan harus memenuhi kriteria memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan; dan Memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan.
2. Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko harus memenuhi kriteria memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko dan memiliki pengalaman kerja paling kurang 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko di bidang keuangan dan/atau perbankan.

### INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE

Seluruh anggota KPMR tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun pemegang saham pengendali BRI, bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI. Syarat Independensi Anggota KPMR BRI antara lain sebagai berikut:

1. Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota KPMR;
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun keuangan dengan Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi;
4. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan;
5. Tidak merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, Staf Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota Komite pada BUMN atau perusahaan lain.

Independensi Anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko:

## KOMITE PENGAWAS MANAJEMEN RISIKO

No	Kriteria Independensi	Mahmud	Andrinof A. Chaniago	A. Fuad Rahamny	Jeffrey J. Wurangian	Nicolaus T. Budi Harjanto	Indrayeti	Tubagus NA. Maulana	Suindiyo	Totok Hermiyanto
1.	Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	V	V	V	V	V	V	V	V	V
2.	Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	V	V	V	V	V	V	V	V	V
3.	Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	V	V	V	V	V	V	V	V	V
4.	Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	V	V	V	V	V	V	V	V	V

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

KPMR membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengevaluasi dan memastikan penerapan manajemen risiko Perseroan tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan Perseroan tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan Perseroan.



## KOMITE PENGAWAS MANAJEMEN RISIKO

Tugas dan tanggung KPMR adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan menganalisa secara berkala kecukupan kebijakan manajemen risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan kerangka kerja dan kebijakan manajemen risiko yang diperlukan;
2. Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko Perseroan secara triwulanan dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan;
3. Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Perseroan serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan manajemen risiko Perseroan;
4. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko. Evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko paling kurang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
5. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan;
6. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan pengendalian risiko terjadinya *Fraud* Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Perseroan;
7. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang Perseroan;
8. Mengevaluasi dan menganalisa penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Rencana Strategis Teknologi Informasi serta kebijakan Perseroan yang terkait penggunaan Teknologi Informasi paling kurang setiap semester dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Perseroan;
9. Mengevaluasi dan menganalisa Tingkat Kesehatan Bank setiap semester dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memelihara Tingkat Kesehatan Bank;
10. Mengevaluasi dan menganalisa paket usulan Direksi untuk penyediaan dana bagi pihak terkait yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris;
11. Memberikan pendapat dan/atau rekomendasi atas pemberian kredit diatas jumlah tertentu yang memerlukan konsultasi dengan Dewan Komisaris;
12. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

### Wewenang

1. Memperoleh informasi yang relevan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dari pihak internal maupun eksternal Perseroan;
2. Mendapatkan masukan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya;
3. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan pengelolaan risiko Perseroan;
4. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko Perseroan;
5. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan;
6. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Perseroan;
7. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Perseroan;

## KOMITE PENGAWAS MANAJEMEN RISIKO

8. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Perseroan; dan
9. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memelihara dan meningkatkan Tingkat Kesehatan Perseroan.

## PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMITE 2017

Anggota KPMR BRI memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing dengan pengalaman minimal lima tahun. Latar belakang anggota KPMR BRI cukup beragam, yakni berpengalaman pada bidang manajemen strategis, manajemen risiko, perbankan, keuangan dan akuntansi sehingga dapat menjamin kualitas rekomendasi dan saran perbaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelatihan/*training* yang diikuti oleh anggota KPMR selama tahun 2017 dapat dilihat pada daftar pendidikan/*training* Dewan Komisaris selama Tahun 2017.

## RAPAT KOMITE

### Kebijakan Rapat

Kebijakan Rapat KPMR adalah sebagai berikut:

1. Rapat Komite dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu;
2. Rapat Komite diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Komite;
3. Pemanggilan rapat harus dilakukan oleh Ketua Komite. Panggilan Rapat Komite harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Komite dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (*e-mail*) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
4. Panggilan rapat tersebut diatas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat yang diadakan sebelumnya.
5. Panggilan rapat harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat;
6. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota, termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen;
7. Rapat dipimpin oleh ketua Komite dan dalam hal ketua Komite tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh salah satu anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen;
8. Rapat dapat mengundang Direksi dan/atau Kepala Divisi/Pejabat Eksekutif Perseroan untuk meminta penjelasan, pemaparan, dan informasi terkait dengan agenda rapat;
9. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dengan ketentuan setiap anggota Komite hanya berhak untuk memberikan 1 (satu) suara;
10. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat Komite yang memutuskan;
11. Pimpinan rapat harus mengemukakan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat;
12. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik;
13. Perbedaan pendapat atau *dissenting* opinion yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
14. Risalah rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite yang hadir dalam rapat;
15. Risalah rapat merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud; dan
16. Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 51 % (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota, termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen memberikan persetujuannya secara tertulis.



## KOMITE PENGAWAS MANAJEMEN RISIKO

## KPI DAN PENCAPAIAN TAHUN 2017

Indikator atau kriteria kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) diukur dari pencapaian atas program kerja /rencana kerja dan anggaran (RKA) yang telah disusun pada setiap awal tahun dan tingkat kehadiran Anggota KPMR dalam setiap rapat.

Adapun program kerja KPMR disusun untuk mendukung faktor-faktor utama keberhasilan (*Key Success Factors*) pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk menelaah dan memantau penerapan manajemen risiko di BRI.

Secara umum seluruh KPI KPMR telah tercapai dengan dilaksanakannya seluruh Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KPMR tahun 2017 sesuai target yang ditetapkan dan tingkat kehadiran anggota KPMR yang memenuhi ketentuan sehingga rapat KPMR dapat dilaksanakan dengan quorum dalam setiap mengambil keputusan.

## Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Komite Pengawasan Manajemen Risiko melakukan rapat sebanyak 6 (enam) kali selama tahun 2017 dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

No	Agenda Rapat	Tanggal	Anggota Komite KPMR yang Hadir	Keterangan
1	Pembahasan laporan profil risiko triwulan IV tahun 2016, Laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan semester II tahun 2016, Laporan prog anti <i>Fraud</i> semester II tahun 2016, Laporan program APU & PPT semester II tahun 2016 dan laporan penilaian tingkat kesehatan bank semester II tahun 2016	10 februari 2017	9	Kourum
2	Profil Risiko triwulan I tahun 2017	20 April 2017	7	Kourum
3	Evaluasi restrukturisasi kredit menengah & korporasi dan <i>review</i> portofolio aktiva produktif	30 Mei 2107	9	Kourum
4	Profil risiko triwulan II tahun 2017, Pelaksanaan fungsi kepatuhan, penerapan strategi anti <i>fraud</i> dan tingkat kesehatan bank semester I tahun 2017	18 Juli 2017	9	Kourum
5	<i>Review</i> portofolio aktiva produktif & <i>loan portfolio guidelines</i>	26 September 2017	8	Kourum
6	Pembahasan laporan profil risiko triwulan III tahun 2017	19 Oktober 2017	8	Kourum

Adapun tingkat kehadiran rapat setiap anggota KPMR adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Pada Komite	Periode Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	Ahmad Fuad	Ketua	2015-5 Maret 2017	1	1	100%
2	Mahmud	Ketua	15 Maret 2017-Sekarang	6	5	83%
3	Mustafa Abubakar	Anggota	2015-5 Maret 2017	1	1	100%

## KOMITE PENGAWAS MANAJEMEN RISIKO

No	Nama	Jabatan Pada Komite	Periode Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
4	Andrinof A. Chaniago	Anggota	15 Maret 2017-Sekarang	5	4	80%
5	A Fuad Rahmany	Anggota	Juni 2015-sekarang	6	6	100%
7	Jeffry J Wurangian	Anggota	Juni 2015-sekarang	6	6	100%
8	Nicolaus TB Harjanto	Anggota	15 Maret 2017-Sekarang	5	4	80%
9	Indrayeti	Anggota	Juni 2015-sekarang	6	5	83%
10	Totok Hermiyanto	Anggota	Juni 2015-sekarang	6	6	100%
11	Suindiyo	Anggota	Desember 2015 - Sekarang	6	6	100%
11	Tubagus NA. Maulana	Anggota	Desember 2015 - Sekarang	6	5	83%

## PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE 2017

## Fokus Pelaksanaan Kerja KPMR pada tahun 2017

1. Review dan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan penerapannya;
2. Review dan evaluasi terhadap profil risiko Perseroan;
3. Review dan evaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan; dan
4. Pemantauan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian fasilitas kredit.

Selama tahun 2017, Komite Pengawas Manajemen Risiko telah melakukan berbagai tugas dan kegiatan, mencakup:

## 1. Evaluasi Kebijakan Umum Manajemen

Evaluasi Kebijakan Umum Manajemen Risiko telah dilakukan dengan memperhatikan kondisi risiko perseroan dan mengadopsi ketentuan antara lain:

- a. UU Nomor 09 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK)
- b. POJK Nomor 04 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bagi Bank Umum
- c. POJK Nomor 11 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum
- d. POJK Nomor 18 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- e. POJK Nomor 38 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Bagi Bank Umum
- f. POJK Nomor 36/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal

- g. POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.

Perubahan lain dari Kebijakan Umum Manajemen Risiko di tahun 2017 adalah dengan melebur kebijakan umum manajemen risiko terintegrasi sehingga perseroan hanya mempunyai satu kebijakan umum yang berlaku untuk perseroan sebagai entitas utama dan anak-anak perusahaan yang tergabung dalam konglomerasi keuangan.

## 2. Evaluasi penerapan Kebijakan Manajemen Risiko dan evaluasi profil risiko

Kegiatan Evaluasi penerapan Kebijakan Manajemen Risiko dan evaluasi profil risiko dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas penerapan manajemen risiko Perseroan dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Perseroan (*inherent risk*) yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Perseroan. Penerapan manajemen risiko mencakup pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko, dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh yang mencakup seluruh jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko strategik.

Review dan evaluasi risiko lebih difokuskan terhadap risiko- risiko yang memiliki peringkat 3 (*moderate*) sampai peringkat 5 (*high*) dan risiko yang memiliki kecenderungan memburuk.



## KOMITE PENGAWAS MANAJEMEN RISIKO

*Review* dan evaluasi profil risiko selama tahun 2017 paling kurang dilakukan untuk periode Laporan Profil Risiko Triwulan IV-2016, Triwulan I-2017, Triwulan II-2017, dan Triwulan III-2017.

Penerapan Manajemen Risiko Perseroan telah disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan.

Realisasi waktu penyelesaian *review* dan evaluasi terhadap penilaian Profil Risiko adalah sebagai berikut:

No	Materi	Realisasi	Output
1.	Laporan Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2016	21 Februari 2017	Nota Dinas KPMR No. B.05 - KPMR/02/2017 tentang Laporan profil risiko Triwulan IV tahun 2016, Laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan Semester III tahun 2016, Laporan program anti <i>fraud</i> Semester II tahun 2016, Laporan pelaksanaan program APU dan PPT Semester II tahun 2016 dan Laporan penilaian tingkat kesehatan bank Semester II tahun 2016.
2.	Laporan Profil Risiko Triwulan I Tahun 2017	23 Mei 2017	Nota Dinas KPMR B.14 - KPMR/05/2017 tentang Laporan profil risiko Triwulan I tahun 2017
3.	Laporan Profil Risiko Triwulan II Tahun 2017	30 Agustus 2017	Nota Dinas KPMR No. B.22 - KPMR/08/2017 tentang Laporan profil risiko triwulan II/2017, Laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan, Laporan penerapan strategi anti <i>Fraud</i> , & Laporan penilaian tingkat kesehatan bank semester I tahun 2017
4.	Laporan Profil Risiko Triwulan III Tahun 2017	3 November 2017	Nota Dinas KPMR B.32 - KPMR/11/2017 tentang Laporan profil risiko Triwulan III tahun 2017

### 3. *Review* dan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Sejalan dengan perkembangan usaha Perseroan, maka perlu didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian guna memastikan bahwa seluruh kegiatan dan kebijakan usaha telah dilaksanakan dengan mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun otoritas berwenang lainnya. *Review* dan evaluasi dilakukan terutama terhadap pemenuhan ketentuan yang berlaku menyangkut pelaksanaan prinsip kehati-hatian, antara lain berupa kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (CAR), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Posisi Devisa Neto (PDN), Transaksi derivatif, Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah dan Valuta asing, dan Tingkat Kredit Bermasalah (NPL). *Review* dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dilakukan secara triwulanan. Disamping itu, KPMR juga akan melakukan *review* dan evaluasi terhadap Laporan Semesteran Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam PBI no. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 september 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum yang selanjutnya diubah dengan PBI no. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi kepatuhan Bank Umum.

Realisasi waktu *review* dan evaluasi fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut:

No	Materi	Realisasi	Output
1.	Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Semester II Tahun 2016	21 Februari 2016	Nota Dinas KPMR No. B.05 - KPMR/02/2017 tentang Laporan profil risiko triwulan IV tahun 2016, Laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan semester II tahun 2016, Laporan program anti <i>fraud</i> semester II tahun 2016, Laporan pelaksanaan program APU dan PPT semester II tahun 2016 dan Laporan penilaian tingkat kesehatan bank semester II tahun 2016.

## KOMITE PENGAWAS MANAJEMEN RISIKO

No	Materi	Realisasi	Output
2.	Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Semester I Tahun 2017	Tgl 30 Agustus 2017	Nota Dinas KPMR No. B.22 - KPMR/08/2017 tentang Laporan profil risiko triwulan II/2017, Laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan, Laporan penerapan strategi anti <i>Fraud</i> , & Laporan penilaian tingkat kesehatan bank semester I tahun 2017.

#### 4. Review Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Sesuai PBI No.13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank. Komite Pengawasan Manajemen Risiko melakukan evaluasi terhadap Penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang mencakup penilaian profil risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*). Realisasi evaluasi Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan adalah sebagai berikut:

No	Materi	Realisasi	Output
1.	Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Juli - Desember 2016	21 Februari 2016	Nota Dinas KPMR No. B.05 - KPMR/02/2017 tentang Laporan profil risiko Triwulan IV tahun 2016, Laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan Semester II tahun 2016, Laporan program anti <i>fraud</i> semester II tahun 2016, Laporan pelaksanaan program APU dan PPT semester II tahun 2016 dan Laporan penilaian tingkat kesehatan bank semester II tahun 2016.
2.	Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Januari – Juni 2017	30 Agustus 2017	Nota Dinas KPMR No. B.22 - KPMR/08/2017 tentang Laporan profil risiko Triwulan II/2017, Laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan, Laporan penerapan strategi anti <i>Fraud</i> , & Laporan penilaian tingkat kesehatan bank semester I tahun 2017.

#### 5. Persetujuan dan Pengawasan Rencana Kerja Perseroan

KPMR bersama dengan Komite Audit, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan KNR dibawah koordinasi Sekretaris Dewan Komisaris akan membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja Perseroan yang merupakan pedoman bagi seluruh jajaran Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya selama tahun 2016. Disamping itu, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Realisasi Rencana Bisnis Bank yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat dua bulan setelah periode laporan.

#### 6. Laporan Pelaksanaan GCG

KPMR bersama dengan Komite Audit, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan KNR dibawah koordinasi Sekretaris Dewan Komisaris akan melakukan evaluasi pelaksanaan GCG dengan cara self assesment untuk mengetahui efektivitas implementasi GCG di Dewan Komisaris termasuk Komite di bawah Dewan Komisaris.

#### 7. Laporan Tahunan Dewan Komisaris

KPMR bersama dengan Komite Audit, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan KNR dibawah koordinasi Sekretaris Dewan Komisaris menyusun draft Laporan Kegiatan Dewan Komisaris selama tahun 2016 yang akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan. Laporan Tahunan tersebut akan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya dimintakan persetujuan RUPS Tahun 2017.



## KOMITE PENGAWAS MANAJEMEN RISIKO

**8. Konsultasi kredit Direksi Kepada Dewan Komisaris**

Setiap kredit yang memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan dan atau surat edaran Direksi Perseroan, wajib dikonsultasikan Direksi kepada Dewan Komisaris. Konsultasi Kredit tersebut dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah terdapat putusan pencairan kredit oleh Direksi. KPMR memberikan rekomendasi berupa pendapat atau saran terhadap setiap usulan kredit yang dikonsultasikan Direksi kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya, KPMR memberikan rekomendasi tertulis berupa pendapat atau saran kepada Dewan Komisaris setelah forum rapat konsultasi kredit dilaksanakan.

Selama tahun 2017, semua kredit yang memenuhi kriteria untuk dikonsultasikan ke Dewan Komisaris telah dipaparkan dalam rapat konsultasi kredit dan semua rekomendasi telah disampaikan secara tertulis kepada Direksi.

Realisasi waktu penyelesaian konsultasi kredit sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

Materi	Realisasi	Debitur	Output
Hasil Konsultasi Kredit Dengan Forum Rapat Konsultasi Kredit	14 Maret 2017	1. PT PLN 2. Perum Bulog 3. PT Jasa Marga 4. Angkasa Pura I 5. PT Telkom 6. PT PN XI.	Nota Dinas KPMR No. B.08-KPMR/03/2017, tanggal 14 Maret 2017
	25 April 2017	1. PT Bina Sawit Abadi Pratama 2. PT Pelita Agung Agrindustri&Permata Hijau 3. PT Indosawit Subur 4. PT Tunggal Yunus estate 5. PT Mitra Unggul Pusaka 6. PT Rigunas Agri Utama 7. Dasa Anugrah Sejati 8. PT Amman Mineral Internasional 9. PT Amman Mineral Nusa Tenggara	Nota Dinas KPMR No. B.11 - KPMR/04/2017, tanggal 25 April 2017
	23 Mei 2017	1. PT Adaro Energy 2. PT Telekomunikasi Indonesia 3. PT Dayamitra Telekomunikasi Indonesia 4. PT RAPP	Nota Dinas KPMR No. B. 13 - KPMR/05/2017, tanggal 25 April 2017
	18 September 2017	1. PT PGN 2. PT Pertamina 3. PT Perum Bulog	Nota Dinas KPMR No. B. 25 - KPMR/09/2017, tanggal 25 April 2017
	19 Desember 2017	1. PT Antam 2. PT Bosowa 3. PT Delta Dunia Textile 4. PT Bio Farma	Nota Dinas KPMR No. B. 39-KPMR/12/2017 tanggal 22 Deseber 2017

**9. Persetujuan atas Pemberian kredit kepada Pihak Terkait**

KPMR akan memberikan rekomendasi berupa pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris terkait permohonan persetujuan terhadap pemberian fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan anak atau Pihak Terkait lainnya dengan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan dan atau surat edaran Direksi Perseroan.

## KOMITE PENGAWAS MANAJEMEN RISIKO

Realisasi waktu persetujuan pemberian kredit kepada perusahaan anak atau pihak terkait lainnya adalah sebagai berikut:

Materi	Realisasi	Output
Persetujuan kredit kepada Perusahaan Anak/ Pihak	B.10 - KPMR/04/2017	1. Permohonan fasilitas <i>standby letter of credit</i> (SLBC) USD 100juta PT BRI Multifinance Indonesia (PT BRI Finance) sebagai jaminan pemberian kredit bank.
	16 Mei 2017	2. Nota Dinas KPMR No. B.12 - KPMR/05/2017, tanggal 16 Mei 2017 tentang Persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait atas nama PT Bringin Srikandi Finance.
	23 Oktober 2017	3. Nota Dinas KPMR No.30 - KPMR/10/2017, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Persetujuan penyediaan dana pihak terkait atas nama Sis Apik Wijayanto & Jeffry J. Wurangian
	19 Desember 2016	4. Nota Dinas KPMR No. B.36-KPMR/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Persetujuan penyediaan dana pihak terkait atas nama A. Fuad Rahmany & Susy Liestiowaty.

#### 10. Pemantauan Rencana Tindak Lanjut (*Action Plan*) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Pemantauan Rencana Tindak Lanjut (*Action Plan*) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

KPMR beserta Komite Audit dan Komite Tata kelola Terintegrasi melakukan pemantauan terhadap Rencana Tindak Lanjut (*Action Plan*) pengawasan aktif Dewan Komisaris sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Target waktu penyelesaian Rencana Tindak Lanjut (*Action Plan*) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Materi	Realisasi	Output
Pemantauan kinerja perkreditan	16 Oktober 2017	Nota Dinas KPMR No. B.28-KPMR/09/2017, 16 Oktober 2017 tentang <i>Review portofolio guidelines</i> dan <i>review</i> aktiva produktif.

#### 11. Review Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi *Anti-Fraud* bagi Bank Umum bahwa bank disyaratkan untuk membangun 4 (empat) pilar strategi pengendalian *fraud* yang saling berkaitan satu sama lain yaitu: (a) pencegahan; (b) deteksi; (c) investigasi, pelaporan dan sanksi; dan (d) pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut. KPMR mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan pengendalian risiko terjadinya *Fraud* Perseroan secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Direksi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Perseroan. Evaluasi Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* adalah sebagai berikut:

No	Materi	Realisasi	Output
1.	Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Juli - Desember 2016	21 Februari 2017	Nota Dinas KPMR No. B.05 - KPMR/02/2017 tentang Laporan profil risiko triwulan IV tahun 2016, Laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan semester II tahun 2016, Laporan program anti <i>fraud</i> semester II tahun 2016, Laporan pelaksanaan program APU dan PPT semester II tahun 2016 dan Laporan penilaian tingkat kesehatan bank semester II tahun 2016.



## KOMITE PENGAWAS MANAJEMEN RISIKO

No	Materi	Realisasi	Output
2.	Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Januari – Juni 2017	30 Agustus 2017	Nota Dinas KPMR No. B.22 - KPMR/08/2017 tentang Laporan profil risiko triwulan II/2017, Laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan, Laporan penerapan strategi anti <i>Fraud</i> , & Laporan penilaian tingkat kesehatan bank semester I tahun 2017.

**12. Evaluasi Pertumbuhan non organik**

KPMR memberikan masukan kepada Dewan Komisaris BRI atas setiap pertumbuhan non organik yang akan ditempuh oleh Direksi BRI yang akan berimplikasi terhadap perubahan konglomerasi keuangan Perseroan. Rincian rekomendasi yang diberikan komite selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Materi	Realisasi	Output
1.	Penambahan Modal BRI Agro	13 Juni 2017	Nota Dinas B.16 - KPMR/06/2017 tanggal 13 Juni 2017 perihal Persetujuan tambahan modal kepada PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
2.	Persetujuan Penyertaan modal PT Bahana Artha Ventura	04 September 2017	Nota Dinas B. 23 - KPMR/09/2017 tanggal 4 September 2017 perihal Persetujuan penyertaan modal kepada PT Bahana Artha Ventura
3.	Persetujuan Penyertaan modal PT Asuransi BRI Life	19 September 2017	Nota Dinas B. 27 - KPMR/09/2017 tanggal 19 September 2017 perihal Persetujuan penyertaan modal kepada PT Asuransi BRI Life

**Rencana Agenda Rapat KPMR Agenda Rapat KPMR Tahun 2018**

No.	Rencana Agenda Rapat Tahun 2018	Target Waktu
1.	Pembahasan Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2017	Minggu ke I Maret 2018
2.	Pembahasan Profil Risiko Triwulan I Tahun 2018	Minggu ke I Mei 2018
3.	Pembahasan Profil Risiko Triwulan II Tahun 2018	Minggu ke I Agustus 2018
4.	Pembahasan Profil Risiko Triwulan III Tahun 2018	Minggu ke I November 2018
5.	Pembahasan Fungsi Kepatuhan Semester II Tahun 2017	Minggu Ke II Februari 2018
6.	Pembahasan Fungsi Kepatuhan Semester I Tahun 2018	Minggu Ke II Agustus 2018
7.	Pembahasan Penerapan Strategi Anti Fraud dan APU-PTT Semester II 2017	Minggu Ke II Februari 2018
8.	Pembahasan Penerapan Strategi Anti Fraud dan APU-PTT Semester I 2018	Minggu Ke II Agustus 2018
9.	Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Semester I Tahun 2017	Minggu Ke II Maret 2018
10.	Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Semester II Tahun 2018	Minggu Ke II Agustus 2018
11.	Valuasi kebijakan Manajemen Risiko	Minggu ke II Juli 2018

**Remunerasi Komite**

Remunerasi bagi anggota komite yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan dengan honorarium yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan tidak terdapat honorarium khusus bagi setiap anggota Komite.

**Opini KPMR terhadap Pelaksanaan Pengawasan Manajemen Risiko**

Berdasarkan hasil pengawasan aktif selama tahun 2017 melalui rapat, kunjungan kerja, konsultasi dan *review*, komite menyampaikan bahwa Penerapan manajemen risiko telah dilaksanakan dengan baik yang tercermin dari risiko yang diambil telah sesuai dengan *appetite risk* yang ditetapkan (*low to moderate*) sampai dengan triwulan III tahun 2017, tingkat kesehatan Bank yang memperoleh peringkat komposit 1 (Sangat Sehat) pada Juni 2017 serta Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) yang telah berjalan dengan baik. Namun demikian, pengelolaan risiko perlu ditingkatkan secara terus menerus dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham seiring dengan perkembangan bisnis di era digital ekonomi.

# KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi merupakan salah satu organ Dewan Komisaris yang dibentuk dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris. KTKT bekerja secara kolektif, bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

KTKT membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengevaluasi dan memastikan agar tata kelola yang berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi atau profesional, dan kewajaran diterapkan secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Perseroan.

## DASAR HUKUM

1. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.4/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

## PEDOMAN/ PIAGAM KOMITE

Buku Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini menjabarkan tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, pembagian kerja, waktu kerja, etika kerja, rapat, struktur organisasi, dan pelaksanaan tugas berkaitan dengan Komite Tata Kelola Terintegrasi disahkan oleh Dewan Komisaris melalui Nota Dinas Sekretariat Dewan Komisaris No: B.41-Sekkom/05/2015 tanggal 12 Mei tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) adalah Komite membantu Dewan Komisaris untuk memperkuat fungsi pengawasan (*oversight*) guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Perseroan secara terintegrasi. KTKT bertanggung jawab untuk melakukan monitoring proses perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan, prosedur, dan praktek pada semua tingkatan dalam Perseroan guna memastikan telah dilakukannya pengendalian intern, pelaksanaan fungsi kepatuhan dan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi. Penetapan Ketua dan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) ditetapkan melalui SK Dewan Komisaris BRI Nokep: 10-KOM/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT).

## STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE

### Struktur Komite

1. Komite berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris Entitas Utama dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Entitas Utama;
2. Komite diketuai oleh Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama;
3. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, Komite dapat dibantu oleh Staf dan/atau Sekretaris Komite Tata Kelola Terintegrasi, yang dapat berasal dari kalangan intern maupun ekstern Bank

### Keanggotaan Komite

1. Anggota Komite paling kurang terdiri dari satu Komisaris dari setiap anggota konglomerasi keuangan BRI, seorang pihak independen dan anggota Dewan Pengawas Syariah.
2. Anggota Komite paling kurang terdiri dari:
  - a. Seorang Komisaris Independen dari Entitas Utama sebagai ketua merangkap anggota;
  - b. Komisaris Independen dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan BRI sebagai anggota;
  - c. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan Komite Tata Kelola Terintegrasi;



## KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

- d. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari BRI Syariah sebagai anggota.
3. Setiap anggota Komite harus independen dengan pengertian:
  - a. Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;
  - b. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun bisnis dengan Direksi dan Dewan Komisaris ;
  - c. Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi dengan Bank; dan
  - d. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan.
4. Penunjukkan dan penggantian anggota Komite ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris, khusus untuk anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen, berlaku ketentuan:
  - a. Dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme perekrutan dan seleksi;
  - b. Masa kerja ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris jangka waktu kontrak dan peraturan pekerja kontrak yang berlaku di Perseroan, dengan tidak menutup kemungkinan diberhentikan oleh Dewan Komisaris sebelum jangka waktu kontrak berakhir.
5. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite; dan
6. Anggota Komite diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI 1 Januari 2017 sampai dengan 15 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Profesi	Periode Jabatan
1.	Ahmad Fuad	Ketua	Komisaris Independen	19 Mei 2015-15 Maret 2017
2.	Gatot Trihargo	Anggota	Komisaris Independen	19 Mei 2015-Sekarang
3.	Vincentius Sonny Loho	Anggota	Komisaris	19 Mei 2015-Sekarang
4.	Bambang Soepeno	Anggota	Komisaris Utama/Independen PT BRI Agroniaga, Tbk	19 Mei 2015-Sekarang
5.	Indra Kesuma	Anggota	Komisaris Utama/Independen PT BRI Syariah	19 Mei 2015-18 April 2017
6.	M. Gunawan Yasni	Anggota	Anggota Pengawas Syariah PT BRI Syariah	19 Mei 2015-Sekarang
7.	Mulabasa Hutabarat	Anggota	Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera	September 2017-Sekarang
8.	Indrayeti	Anggota	Pihak Independen	19 Mei Juni 2015-Sekarang
9.	Tubagus A. Maulana	Anggota	Pihak Independen	19 Mei Juni 2015- Sekarang

Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI sampai dengan posisi 15 Maret 2017 sampai dengan 18 April 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Profesi	Periode Jabatan
1.	Mahmud	Ketua	Komisaris Independen	15 Maret 2017-Sekarang
2.	Andrinof A. Chaniago	Anggota	Komisaris Utama/Independen	19 Juli 2017-Sekarang
3.	Gatot Trihargo	Anggota	Komisaris Independen	19 Mei 2015-Sekarang
4.	Vincentius Sonny Loho	Anggota	Komisaris	19 Mei 2015-Sekarang

## KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

No.	Nama	Jabatan	Profesi	Periode Jabatan
5.	Bambang Soepeno	Anggota	Komisaris Utama/Independen PT BRI Agroniaga, Tbk	19 Mei 2015-Sekarang
6.	Indra Kesuma	Anggota	Komisaris Utama/Independen PT BRI Syariah	19 Mei 2015-18 April 2017
7.	M. Gunawan Yasni	Anggota	Anggota Pengawas Syariah PT BRI Syariah	19 Mei 2015-Sekarang
8.	Mulabasa Hutabarat	Anggota	Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera	September 2017-Sekarang
9.	Boyke Budiono	Anggota	Komisaris Independen PT BRI Multifinance Indonesia	27 Maret 2017-Sekarang
10.	Indrayeti	Anggota	Pihak Independen	19 Mei Juni 2015-Sekarang
11.	Tubagus A. Maulana	Anggota	Pihak Independen	19 Mei Juni 2015- Sekarang

Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI sampai dengan posisi 18 April 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Profesi	Periode Jabatan
1.	Mahmud	Ketua	Komisaris Independen	15 Maret 2017-Sekarang
2.	Andrinof A. Chaniago	Anggota	Komisaris Utama/Independen	19 Juli 2017-Sekarang
3.	Gatot Trihargo	Anggota	Komisaris Independen	19 Mei 2015-Sekarang
4.	Vincentius Sonny Loho	Anggota	Komisaris	19 Mei 2015-Sekarang
5.	Bambang Soepeno	Anggota	Komisaris Utama/Independen PT BRI Agroniaga, Tbk	19 Mei 2015-Sekarang
6.	Eko Bambang Suharno*	Anggota	Komisaris Utama/Independen PT BRI Syariah	*Efektif Setelah Dinyatakan Lulus <i>Fit &amp; Proper Test</i> OJK
7.	M. Gunawan Yasni	Anggota	Anggota Pengawas Syariah PT BRI Syariah	19 Mei 2015-Sekarang
8.	Mulabasa Hutabarat	Anggota	Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera	September 2017-Sekarang
9.	Boyke Budiono	Anggota	Komisaris Independen PT BRI Multifinance Indonesia	27 Maret 2017-Sekarang
10.	Indrayeti	Anggota	Pihak Independen	19 Mei Juni 2015-Sekarang
11.	Tubagus A. Maulana	Anggota	Pihak Independen	19 Mei Juni 2015- Sekarang

### Profil Komite

Profil Anggota KTKT per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

<p><b>Mahmud</b> Ketua KTKT/ Komisaris Independen Periode: 15 Maret 2017-Sekarang</p>	<p>Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2017, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.</p>
---	---



## KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

<p><b>Gatot Trihargo</b> Anggota KTKT / Wakil Komisaris Utama Periode: 19 Mei 2015-Sekarang</p>	<p>Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2017, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.</p>
<p><b>Vincentius Sonny Loho</b> Anggota KTKT / Komisaris Periode: 19 Mei 2015-Sekarang</p>	<p>Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2017, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.</p>
<p><b>Bambang Supeno</b> Anggota KTKT Komisaris Utama BRI Agro Periode: 19 Mei 2015-Sekarang</p>	<p>Lahir di Surakarta 23 November 1952, menempuh pendidikan S1 di Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro (1979) dan MBA di Bidang International Business di St. Louis University, Amerika Serikat (1991). Karir perbankan dimulai di Bank Rakyat Indonesia pada awal tahun 1981 sampai tahun 2011, pernah menjabat sebagai Direktur Kepatuhan tahun 2006-2009, kemudian Direktur UMKM tahun 2009-2010 dan jabatan terakhir sebagai Direktur Kepatuhan pada tahun 2010-2011.</p> <p>Dalam perjalanan karirnya di BRI, pernah mendapat kepercayaan menjabat sebagai Direktur Dana Pensiun BRI tahun 2002 - 2004 kemudian bertugas di Bank BRI Syariah (2011-2014) sebagai Komisaris Utama, serta menjabat Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (Bank BRI AGRO) sejak Maret 2014 sampai dengan sekarang.</p> <p>Pendidikan/<i>training</i> yang pernah diikuti antara lain IIA Conference, London (2014), ECIIA conference Viena, Australia (20013), Getting Ready for Basel II-ICAAP and bassel III, Tokyo, Japan (2012), IIA-Conference Eroupe Regional Conference, Viena Asutralias (2012), IIA-Conference Boston, USA (2012), Project Finance, Amsterdam (2010), The IIA- International Conference, Johanersberg, Africa (2009), The IIA International Conference, San Fransisco, USA (2008) dll.</p>
<p><b>Eko Bambang Suharno</b> Anggota KTKT Komisaris Utama BRI Syariah Periode: 19 Mei 2015-Sekarang</p>	<p>Lahir di Wonosobo tahun 1960. Memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) dari Fakultas Perikanan Jurusan Sosial Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1983. Gelar MBA diperoleh dari Virginia Commonwealth University pada tahun 1992. Beliau memulai karir di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tahun 1985 dan dipercaya menduduki berbagai posisi penting diantaranya: Pemimpin Cabang Bank BRI Muara Bungo (1995-1998), Pemimpin Cabang BRI Probolinggo (1998-2001), Pemimpin Cabang BRI Bekasi (2001-2002), Wakil Kepala Divisi MSDM pada tahun (2002-2005), Kepala Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BRI (2005-2009) serta ikut membidangi lahirnya PT Bank BRISyariah dan ditugaskan sebagai Direktur PT Bank BRISyariah sejak 13 November 2008 hingga 8 April 2015. Kemudian menjabat Kepala Divisi Layanan BRI (April 2015 - Agustus 2015) dan menjabat sebagai Kepala Divisi Kebijakan &amp; Pengembangan SDM BRI (18 Juni 2015 – 30 Juni 2017). Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama BRI Syariah.</p>

## KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

### M. Gunawan Yasni

Anggota KTKT  
Dewan Pengawas BRI Syariah  
Periode: Juni 2015-Sekarang

Lahir di Jakarta 17 September 1969. Menyelesaikan Strata 1(S1) di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia (1993) dan meraih gelar Magister Management Keuangan dari Prasetya Mulya pada (1995).

Selama berkarir pernah menjadi Manajer PT Pacific 2000 Investindo (Securities Financial Services), *Deputy Head of Product Development* PT Bahana Artha Ventura (Venture Capital) Jakarta (2000), Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Asuransi SIMAS Syariah (2004–2005), Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Jaminan Kredit Indonesia (2006), Advisor-Deutsche Bank Sharia Custodian & Investment Banking (2009), Anggota Dewan Pengawas Syariah BRI Syariah (2008-sekarang) dan aktif sebagai konsultan dan pengajar senior dalam ekonomi dan keuangan syariah untuk beberapa institusi keuangan, sebagaimana untuk institusi pendidikan (Pasca Sarjana).

Sertifikasi yang dimiliki antara lain sebagai *Certified Islamic Financial Analyst* dari Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah & Islam Universitas Indonesia, Fellow di Islamic Insurance Society (FIIS) dan pemegang Sertifikasi Level Lanjutan (Level IV) Manajemen Risiko Perbankan dan Memiliki izin Bapepam sebagai Investment Manager, Underwriter & Broker-Dealer.

### Mulasaba Hutabarat

Anggota KTKT  
Komisaris Independen BRI Life  
Periode: September  
2017-Sekarang

Lahir di Jakarta 6 Januari 1954, menjabat sebagai anggota KTKT sejak September 2016. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Ekonomomi Studi Pembangunan Universitas Indonesia (1982) dan S2 di Jurusan Ekonomi, Indiana University, USA.

Beliau pernah menjabat di berbagai posisi penting di Kementerian Keuangan antara lain Sekretaris Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (2000-2006), Kepala Biro Dana Pensiun, Bapepam-Lk (2006-2012), Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan, Bapepam-Lk (2012-2013), Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal (2013-2014). Selain itu beliau pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pelindo I Medan (2002-2007), Komisaris PT Bank BTN (2008-2012), Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan (2014-2016), Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (2015-Sekarang), Komisaris Independen PT Sinar Mas Multi Finance (2014-sekarang), Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri (2014-sekarang). Berbagai pelatihan yang pernah diikuti antara lain Erma Bali International Seminar *On Enterprise Risk Management* 2015, *Strategy To Be A Winner In Crisis: "Refocusing On Credit Risk Management, Pricing, Asset & Liability Management And Be Prepared In Upcoming Regulations"* Frankfurt, Jerman 2012, Manajemen Risiko Tingkat I (Satu) 2010, Diklat SPAMA 1998, *Job Evaluation Workshop* 2001.

### Boyke Budiono

Anggota KTKT  
Komisaris Independen BRI  
Finance  
Periode: 27 Maret  
2017-Sekarang

Lahir di Jakarta 27 Agustus 1957. Menjabat sebagai anggota KTKT PT BRI (Persero), Tbk sejak 27 Maret 2017. Mendapatkan gelar Sarjana Pertanian di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dan gelar MBA bidang Operation Management & Management Information System di University of Colorado, Boulder, USA. Pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Divisi *Consumer Banking*, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2005-2006), Wakil Pemimpin Wilayah BRI Bandung, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2007), Direktur Keuangan, PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) (2007-2012), Direktur Utama, PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) (2012-2103). Saat ini menjabat sebagai Private Management Consultant, PT Makmur Jaya Kreasindo (2013-sekarang) dan Komisaris Independen PT BRI Multifinance (2017-Sekarang).



## KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

<p><b>Indrayeti</b> Anggota KTKT Pihak Independen Periode: 19 Mei 2015-Sekarang</p>	<p>Lahir di Sungai Liat, 9 Oktober 1972. Menjabat sebagai anggota KTKT PT BRI (Persero), Tbk sejak 2014. Sebelumnya berkarir di bank BUMN lain dan beberapa bank swasta dalam berbagai posisi. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta (1995) dan gelar Master of Commerce dari University of New South Wales (2000).</p>
<p><b>Tubagus Nur Ahmad Maulana</b> Anggota KTKT Pihak Independen Periode: 19 Mei 2015-Sekarang</p>	<p>lahir di Jakarta, 7 Mei 1971. Menjabat sebagai anggota KTKT PT BRI (Persero), Tbk sejak Februari 2015. Sebelumnya berkarir sebagai dosen dan konsultan. Memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari IPB (1995) dan gelar MBA Banking and Finance dari University of Birmingham (2000), MSc Finance dari University of Strathclyde (2001) dan PhD in Finance dari University of Strathclyde (2007).</p>

### KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN

1. Pihak Independen yang memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan pengalaman
2. Pihak Independen yang memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan entitas anak antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
3. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)
1. Memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep risiko dan pengendalian risiko dalam aktivitas usaha serta pengendalian intern perusahaan.
4. Komisaris Independen dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan BRI sebagai anggota;
5. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari BRI Syariah sebagai anggota

### INDEPENDENSI KOMITE

Untuk menjamin independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pandangan maupun saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota KTKT tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun pemegang saham pengendali BRI dan bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari Perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Persyaratan independensi anggota KTKT adalah:

1. Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun bisnis dengan Direksi dan Dewan Komisaris ;
3. Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi dengan Bank; dan
4. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan.

## KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

No	Kriteria Independensi	Mahmud	Andrinof A. Chaniago	Gatoto Trihargo	Vincentius Sonny Loho	Bambang Supeno	Eko Bambang Suharno	M. Gunawan Yasni	Mulasaba Hutabarat	Boyke Budiono	Indrayeti	Tubagus NA. Maulana
1.	Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
2.	Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun bisnis dengan Direksi dan Dewan Komisaris ;	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
3.	Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi dengan Bank	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
4.	Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

**Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian intern, pelaksanaan fungsi kepatuhan dan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi bila dianggap perlu;
3. Memberikan masukan strategis kepada Dewan Komisaris BRI untuk disampaikan kepada Direksi BRI terkait pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
4. Menyampaikan hasil evaluasi Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (*Self Assessment*) setiap semester kepada Direksi BRI.
5. Menyampaikan hasil evaluasi Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi BRI.

**Wewenang**

1. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, asset serta sumber daya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Mendapatkan masukan atau saran dari para profesional di luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya; dan
3. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan pengendalian intern secara terintegrasi;
4. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan
5. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka penerapan manajemen risiko secara terintegrasi.



## KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KOMITE 2017

Anggota KTKT BRI memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing dengan pengalaman minimal lima tahun. Latar belakang anggota KTKT BRI cukup beragam, yakni berpengalaman pada bidang manajemen strategis, manajemen risiko, perbankan, keuangan dan akuntansi sehingga dapat menjamin kualitas rekomendasi dan saran perbaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelatihan/*training* yang diikuti oleh anggota KTKT selama tahun 2017 dapat dilihat pada daftar pendidikan/*training* Dewan Komisaris selama Tahun 2017.

## KPI DAN PENCAPAIAN TAHUN 2017

Indikator atau kriteria kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) diukur dari pencapaian atas program kerja /rencana kerja dan anggaran (RKA) yang telah disusun pada setiap awal tahun dan tingkat kehadiran Anggota KTKT dalam setiap rapat. Adapun program kerja KTKT disusun untuk mendukung faktor-faktor utama keberhasilan (*Key Success Factors*) pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam bidang pengawasan dan memberikan masukan/saran dalam hal pengelolaan manajemen risiko terintegrasi, Fungsi kepuahn terintegrasi dan audit terintegrasi di entitas utama dan entitas anak.

Secara umum seluruh KPI Komite Tata Kelola terintegrasi telah tercapai dengan dilaksanakannya seluruh Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KTKT tahun 2017 sesuai target yang ditetapkan dan tingkat kehadiran anggota KTKT yang memenuhi ketentuan sehingga rapat KTKT dapat dilaksanakan dengan quorum dalam setiap mengambil keputusan.

## RAPAT KOMITE

## Kebijakan Rapat

Kebijakan Rapat KTKT adalah sebagai berikut:

1. Rapat Komite dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas inisiatif seorang atau lebih anggota Komite dengan menyebutkan agenda yang akan dibahas. Rapat Komite dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester;
2. Rapat Komite diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Komite;
3. Rapat Komite yang terjadwal harus dilakukan pemanggilan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan seorang anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris Entitas Utama, sedangkan rapat yang dilakukan karena adanya hal-hal yang mendesak atau tidak terjadwal dapat dilakukan pemanggilannya secara lisan atau komunikasi melalui *video conference*;
4. Rapat Komite harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat;
5. Setiap rapat Komite dipimpin oleh ketua Komite dan dalam hal ketua Komite tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris Entitas Utama;
6. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) maka harus dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat;
7. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik;
8. Risalah rapat Komite harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite yang hadir dalam rapat;
9. Risalah rapat Komite merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud.

## KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

## Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Pada tahun 2017 KTKT telah melaksanakan 3 (tiga) kali rapat dengan penjelasan sebagai berikut:

## Agenda Rapat

No.	Agenda Rapat	Tanggal	Nomor Notulen Rapat	Anggota KTKT yang Hadir	Keterangan
1	Evaluasi penerapan tata kelola terintegrasi semester II tahun 2016	31 Januari 2017	03 - KOM/02/2017	6	Kuorum
2	Kepatuhan dan pengendalian intern LJK semester II tahun 2016	25 April 2017	01 -KTKT/04/2017	8	Kuorum
3	1. Evaluasi Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Semester I tahun 2017 2. Evaluasi Fungsi Audit Terintegrasi Semester I tahun 2017	12 September 2017	32 - KOM/09/2017	8	Kuorum

## Tingkat Kehadiran Rapat

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat KTKT	Jumlah Kehadiran Rapat KTKT	% Kehadiran Rapat KTKT
1	Mahmud*	Ketua	2	2	100%
2	Ahmad Fuad**	Ketua	1	1	100%
3	Vincentius Sonny Loho	Anggota	3	3	100%
4	Gatot Trihargo	Anggota	3	3	100%
5	Indrayeti	Anggota	3	3	100%
6	Tubagus A. Maulana	Anggota	3	3	100%
7	Bambang Soepeno	Anggota	3	3	100%
8	Indra Kesuma	Anggota	3	3	100%
9	M. Gunawan Yasni	Anggota	3	2	67%
10	Mulabasa Hutabarat	Anggota	3	3	100%
11	Boyke Budiono	Anggota	3	3	100%

\*) Efektif Sejak 15 Maret 2017

\*\*) Diberhentikan dengan hormat 15 Maret 2017

## Rencana Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2018

No.	Rencana Agenda Rapat Tahun 2018	Target Waktu
1.	Evaluasi Penilaian Pelaksanaan Fungsi Tata Kelola Terintegrasi.	Minggu ke II Juli 2017
2.	Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, fungsi keparuhan terintegrasi dan Audit Terintegrasi Semester II/2017	Minggu ketiga Maret 2018
3.	Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, fungsi keparuhan terintegrasi dan Audit Terintegrasi Semester I/2018	Minggu ke III September 2018
4.	Evaluasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.	Minggu ke II November 2018



## KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

**Pelaksanaan Kegiatan Komite 2017**

Selama tahun 2017, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan program kerja sebagaimana yang ditetapkan. Pembentukan struktur konglomerasi keuangan BRI telah dilakukan dengan memperhatikan peraturan regulator yang berlaku dengan entitas utama adalah BRI. Kerangka Tata kelola Terintegrasi beserta struktur organisasi berupa satuan kerja Kepatuhan Terintegrasi, satuan kerja Audit Terintegrasi, dan satuan kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah ditetapkan dan telah berfungsi.

**1. Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Tata Kelola Terintegrasi**

Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi.
- b. Pelaksanaan fungsi Pengawasan oleh Dewan Komisaris. Fungsi yang dimaksud meliputi pengawasan penerapan Tata Kelola.
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan terintegrasi.
- d. Pelaksanaan fungsi audit intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan BRI.
- e. Pelaksanaan fungsi audit ekstern oleh pihak eksternal terhadap laporan keuangan LJK.
- f. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko yang memuat paling sedikit kebijakan manajemen risiko secara komprehensif dan efektif dengan berpedoman pada ketentuan mengenai manajemen risiko yang berlaku bagi masing-masing LJK.

Evaluasi pelaksanaan fungsi tata kelola terintegrasi untuk periode Semester II/2016 dan Semester I/2017 dilakukan melalui Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Direktur yang membidangi pada tanggal 31 Januari 2017 dan 12 September 2017.

Komite menilai bahwa Konglomerasi Keuangan BRI telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dengan sangat baik selama Semester II/2016 dan Semester I/2017.

**2. Evaluasi dan Persetujuan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi**

Evaluasi Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan pada saat rapat Dewan Komisaris dan Direktur terkait pada tanggal 28 November 2017 dalam pembahasannya Profil Risiko Terintegrasi, Transaksi Intra Group dan Review Kebijakan Umum Manajemen Risiko.

**3. Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi**

Komite memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas Usaha Konglomerasi Keuangan. Selanjutnya pada ayat 2 pasal 11 dinyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing LJK dalam konglomerasi Keuangan. Penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing LJK mencakup paling sedikit:

- a. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi LJK;
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko;
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan sistem informasi manajemen risiko; dan
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko.

Komite melakukan evaluasi atas penerapan manajemen risiko terintegrasi untuk periode Semester II/2016 dan Semester I/2017 melalui Radirkom pada tanggal 4 April 2017 dan 28 November 2017.

Komite menilai bahwa Perseroan telah melaksanakan manajemen risiko terintegrasi dengan baik dengan telah terpenuhinya ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

**4. Review Laporan Profil Risiko Terintegrasi**

Review dan evaluasi Profil Risiko Perseroan dilakukan berdasarkan Laporan Profil Risiko yang disusun dan disampaikan oleh Direksi cq. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.

## KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

*Review* dan evaluasi profil risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha (*inherent risk*) yang berpotensi mempengaruhi Konglomerasi Keuangan BRI.

*Review* dan evaluasi profil risiko juga dilakukan terhadap kualitas penerapan manajemen risiko Konglomerasi Keuangan BRI, yang mencakup 4 (empat) aspek, yaitu: (1) tata kelola risiko, (2) kerangka manajemen risiko, (3) proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko serta (4) kecukupan pengendalian risiko (*risk*

*control system*) yang mencakup 10 jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko transaksi intra group dan risiko asuransi. *Review* dan evaluasi profil risiko lebih difokuskan terhadap risiko-risiko yang memiliki peringkat 3 (*moderate*) sampai peringkat 5 (*high*) dan risiko yang memiliki peringkat dengan kecenderungan memburuk.

*Review* dan evaluasi profil risiko terintegrasi selama tahun 2017 dilakukan untuk periode Laporan Profil Risiko Terintegrasi Semester II-2016 dan Semester I-2017 sebagai berikut:

Materi	Realisasi	Output
Evaluasi Profil Risiko Terintegrasi Semester II tahun 2016	04 April 2017	Nota Dinas B.02-KTKT/04/2017, Tgl 4 April 2017 perihal Hasil <i>review</i> Profil Risiko Terintegrasi semester II-2016.
Evaluasi Profil Risiko Terintegrasi Semester I tahun 2017	12 Desember 2017	Nota Dinas B.14-KTKT/12/2017, Tgl 12 Desember 2017 perihal Hasil <i>review</i> Profil Risiko Terintegrasi semester I-2017.

Berdasarkan hasil evaluasi profil risiko terintegrasi, konglomerasi keuangan perseroan telah dikelola dalam batas-batas risiko yang baik sehingga kejadian risiko tidak mengganggu kelangsungan usaha perseroan.

### 5. Evaluasi Kecukupan Permodalan, Manajemen Likuiditas, Transaksi Intra Grup dan Manajemen Risiko Penyediaan Dana

Komite telah melakukan evaluasi tentang transaksi intra grup dengan memastikan hal-hal sebagai berikut:

- Kecukupan permodalan Konglomerasi Keuangan;
- Manajemen likuiditas dilakukan secara efektif;
- Pemantauan transaksi intra group secara terintegrasi; dan
- Manajemen Risiko penyediaan dana termasuk penyediaan dana besar (*large exposure*) secara efektif.



## KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite melalui rapat Dewan Komisaris telah menyampaikan hasil evaluasi sebagai berikut:

Materi	Realisasi	Output
Evaluasi Kecukupan Permodalan, Manajemen Likuiditas, Transaksi Intra Grup dan Manajemen Risiko Penyediaan Dana Semester II tahun 2016.	04 April 2017	Nota Dinas B.02-KTKT/04/2017, Tgl 4 April 2017 perihal Hasil review Profil Risiko Terintegrasi Semester II-2016
Evaluasi Kecukupan Permodalan, Manajemen Likuiditas, Transaksi Intra Grup dan Manajemen Risiko Penyediaan Dana Semester I tahun 2017.	12 Desember 2017	Nota Dinas B.14-KTKT/12/2017, Tgl 12 Desember 2017 perihal Hasil review Profil Risiko Terintegrasi Semester I-2017

Komite menyimpulkan bahwa bentuk konglomerasi keuangan perseroan sejalan dengan visi dan misi perseroan serta memberikan sinergi jangka panjang yang dapat meningkatkan nilai perseroan secara konsolidasi.

#### 6. Evaluasi Penilaian Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi dan Kecukupan Fungsi Kepatuhan secara Terintegrasi

Review dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengendalian Intern Terintegrasi dan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dilakukan secara semesteran dengan memperhatikan Laporan Semesteran Direktur Kepatuhan BRI dan LJK anggota konglomerasi BRI yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan juga dengan memperoleh penjelasan melalui presentasi dari anggota Dewan Komisaris masing-masing LJK yang menjadi anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Review dan evaluasi dilakukan terutama terhadap pemenuhan ketentuan yang berlaku menyangkut hasil audit intern dan ekstern, pelaksanaan prinsip kehati-hatian, antara lain berupa Laporan Bank Umum, Sistem Informasi Debitur, Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (CAR), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Posisi Devisa Neto (PDN), Transaksi Derivatif, Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah dan Valuta Asing, Tingkat Kredit Bermasalah (NPL dan NPF), dan program APU-PPT.

Hasil evaluasi terkait kecukupan pengendalian intern terintegrasi dan fungsi kepatuhan terintegrasi disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui nota dinas dengan rincian sebagai berikut:

No	Materi	Realisasi	Output
1.	Review Kepatuhan Terintegrasi	23 Mei 2017	Nota Dinas B. 04-KTKT/05/2017 tentang Hasil review laporan Hasil Kepatuhan Terintegrasi semester II-2016
2.	Review Audit Terintegrasi	23 Mei 2017	Nota Dinas B. 05-KTKT/05/2017 tentang Hasil review laporan Hasil Review Laporan Hasil Audit Terintegrasi semester II-2016
3.	Review Kepatuhan Terintegrasi	13 Desember 2017	Nota Dinas B. 16-KTKT/12/2017 tentang Hasil review laporan Hasil Kepatuhan Terintegrasi semester I-2017
4.	Review Audit Terintegrasi	13 Desember 2017	Nota Dinas B. 15-KTKT/12/2017 tentang Hasil review laporan Hasil Review Laporan Hasil Audit Terintegrasi semester I-2017

## KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Berdasarkan evaluasi terhadap fungsi pengendalian intern dan fungsi kepatuhan terintegrasi serta fungsi pengendalian dan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK untuk periode tersebut di atas, Komite berpendapat bahwa entitas utama dan LJK telah melaksanakan kedua fungsi tersebut dengan baik sehingga tidak terjadi pelanggaran aturan eksternal dan aturan internal yang dapat membahayakan kelangsungan konglomerasi keuangan Perseroan

### 7. Evaluasi Laporan Penilaian Tata Kelola Terintegrasi

Penilaian terhadap pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan berdasarkan prinsip penilaian sendiri (*self assessment*). Terdapat tujuh faktor penilaian yang terdiri atas: (1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama; (2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama; (3) Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi; (4) Tugas dan tanggung jawab Komite Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi; (5) Tugas dan tanggung jawab Komite Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; (6) Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan (7) Penyusunan dan Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Ketujuh faktor tersebut dilakukan penilaian berdasarkan aspek struktur, proses dan output dan dianalisis kecukupan dan efektivitas pelaksanaannya.

Komite Tata Kelola Terintegrasi bertanggung jawab melakukan *self assessment* terhadap dua faktor penilaian yaitu: (1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dan (2) Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi; sementara kelima faktor penilaian lainnya menjadi tanggung jawab satuan kerja terkait.

Selama tahun 2017, Komite telah melakukan 2 kali *assessment* yaitu untuk periode semester I/2016 dan semester II/2017. Hasil *self assessment* terhadap perseroan mendapat predikat 1 (satu).

### REMUNERASI KOMITE

Remunerasi bagi anggota komite yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan dengan honorarium yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan tidak terdapat honorarium khusus bagi setiap anggota Komite.

### OPINI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI TERHADAP PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI MANAJEMEN RISIKO

Komite menilai bahwa penerapan Tata Kelola Terintegrasi secara umum telah terlaksana dengan baik. Hal ini tercermin dari hasil *self-assessment* yang memperoleh peringkat 1 (sangat baik) pada semester II/2016 dan memperoleh peringkat 2 (baik) pada semester I/2017. Meskipun demikian, Komite menilai bahwa masih terdapat beberapa kelemahan baik pada aspek struktur dan proses yang masih memerlukan perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, pada tahun mendatang Komite akan memastikan agar seluruh kelemahan yang ada pada struktur dan proses, yang diperlukan untuk menunjang hasil (*outcome*) Tata Kelola Terintegrasi yang lebih baik dapat diminimalisir.



## KOMITE DIREKSI

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 Direksi dapat membentuk komite untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan bank.

Hingga 31 Desember 2017, BRI memiliki 10 komite dibawah Direksi sebagai berikut:

1. Asset and Liability Committee (ALCO)
2. Risk Management Committee (RMC) & Operational Risk Management Committee (ORMC)
3. Komite Kredit
4. Komite Permodalan dan Investasi
5. Komite Kebijakan Perkreditan
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi
7. Komite Kebijakan SDM
8. Komite Evaluasi Jabatan
9. Komite Pengarah Project Management Office (PMO)
- Komite Produk I Product Committee

### ASSET AND LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

ALCO merupakan Komite di Kantor Pusat yang bertanggungjawab menyusun dan menetapkan kebijakan aset (*assets*) dan kewajiban (*liabilities*) berikut penetapan tarif *Fund Transfer Price* (FTP).

#### Struktur Keanggotaan

Keanggotaan ALCO terdiri dari:

Direktur Utama	Ketua	Memiliki Hak Suara
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti I (merangkap Anggota)	Memiliki Hak Suara
Direktur Strategi dan Keuangan	Ketua Pengganti II (Merangkap Anggota)	Memiliki Hak Suara
Kepala Divisi <i>Assets &amp; Liabilities Management</i>	Sekretaris (Merangkap Anggota)	Memiliki Hak Suara
Seluruh Direksi	Anggota	Memiliki Hak Suara
Seluruh <i>Senior Executive Vice President</i>	Anggota	Memiliki Hak Suara
Kepala Satuan Kerja Audit Intern	Anggota	Memiliki Hak Suara
Seluruh Kepala Divisi Bisnis	Anggota	Memiliki Hak Suara
Kepala Divisi Kebijakan Risiko Kredit	Anggota	Memiliki Hak Suara
Kepala Divisi <i>Enterprise Risk &amp; Portofolio Management</i>	Anggota	Memiliki Hak Suara
Kepala Divisi Operasional & <i>Market Risk</i>	Anggota	Memiliki Hak Suara
Kepala Divisi Analisa Risiko Kredit	Anggota	Memiliki Hak Suara
Kepala Divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit	Anggota	Memiliki Hak Suara
Kepala Divisi <i>Corporate Development &amp; Strategy</i>	Anggota	Memiliki Hak Suara
Kepala Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan	Anggota	Memiliki Hak Suara
Pemimpin Wilayah Jakarta I	Anggota	Memiliki Hak Suara
Pemimpin Wilayah Jakarta II	Anggota	Memiliki Hak Suara
Pemimpin Wilayah Jakarta III	Anggota	Memiliki Hak Suara
Pemimpin Cabang Khusus	Anggota	Memiliki Hak Suara

## KOMITE DIREKSI

### Tugas dan Tanggung Jawab

1. Melakukan evaluasi kinerja Perusahaan serta menetapkan strategi dan kebijakan pengelolaan *asset* dan *liability* yang optimum dengan memperhatikan *potensial risk*, *optimum yield generation*, dan *cost efficiency*.
2. Menetapkan suku bunga simpanan, suku bunga pinjaman, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), *Fund Transfer Price* (FTP), dan *pricing* lainnya yang berdampak langsung pada pencapaian *Net Interest Margin* (NIM).
3. Menetapkan kewenangan Pejabat Pemutus dalam memutus suku bunga simpanan, pinjaman dan/atau produk bank lainnya.
4. Menentukan kebijakan *Net Open Position* (NOP).
5. Memonitor bahwa pengelolaan *asset* dan *liability* di perusahaan dilaksanakan sesuai dengan hasil putusan Rapat ALCO.
  - c. Alokasi aset produktif, diversifikasi *funding* dan *Capital Management*.
  - d. Pengelolaan risiko.
  - e. Suku bunga simpanan, suku bunga pinjaman suku bunga dasar kredit (SBDK), *fund transfer price* (FTP) dan *pricing* lainnya.
2. Rapat ALCO dipimpin oleh Ketua ALCO. Dalam hal Ketua ALCO berhalangan maka Rapat ALCO dipimpin oleh Ketua ALCO Pengganti sesuai urutan.
3. Koordinasi dalam penyelenggaraan Rapat ALCO menjadi tanggung jawab Sekretaris ALCO.
4. Rapat ALCO harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) Anggota ALCO. Dalam hal ini Pemimpin Unit Kerja berhalangan hadir maka yang bersangkutan dapat menunjuk pengganti setingkat Wakil Kepala Divisi atau sekurangnya Kepala Bagian.
5. Keputusan Rapat ALCO diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penuh maka keputusan Rapat ALCO dianggap sah dengan persetujuan dari 50 (lima puluh persen) dari jumlah Anggota ALCO yang memiliki hak suara ditambah dengan 1 (satu) orang Anggota ALCO, termasuk anggota Direksi yang salah satunya adalah Ketua ALCO atau Ketua ALCO Pengganti.

### Pedoman Kerja

1. Rapat ALCO sekurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk membahas pengelolaan *Asset & Liabilities* perusahaan yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan dalam hal:
  - a. Perkembangan kinerja Bank.
  - b. Komposisi dan pertumbuhan portofolio Bank.

### Rapat Komite

Pada tahun 2017 ALCO telah melaksanakan 12 kali rapat dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	13 Januari 2017	Agenda rapat: 1. Economic Brifieng 2. Kinerja Aset & Liabilities BRI 3. Perkembangan Saham BRI 4. Putusan Rapat ALCO
2	20 Februari 2017	
3	20 Maret 2017	
4	21 April 2017	
5	24 Mei 2017	
6	21 Juni 2017	
7	21 Juli 2017	
8	23 Agustus 2017	
9	20 September 2017	
10	23 Oktober 2017	
11	22 November 2017	
12	20 Desember 2017	

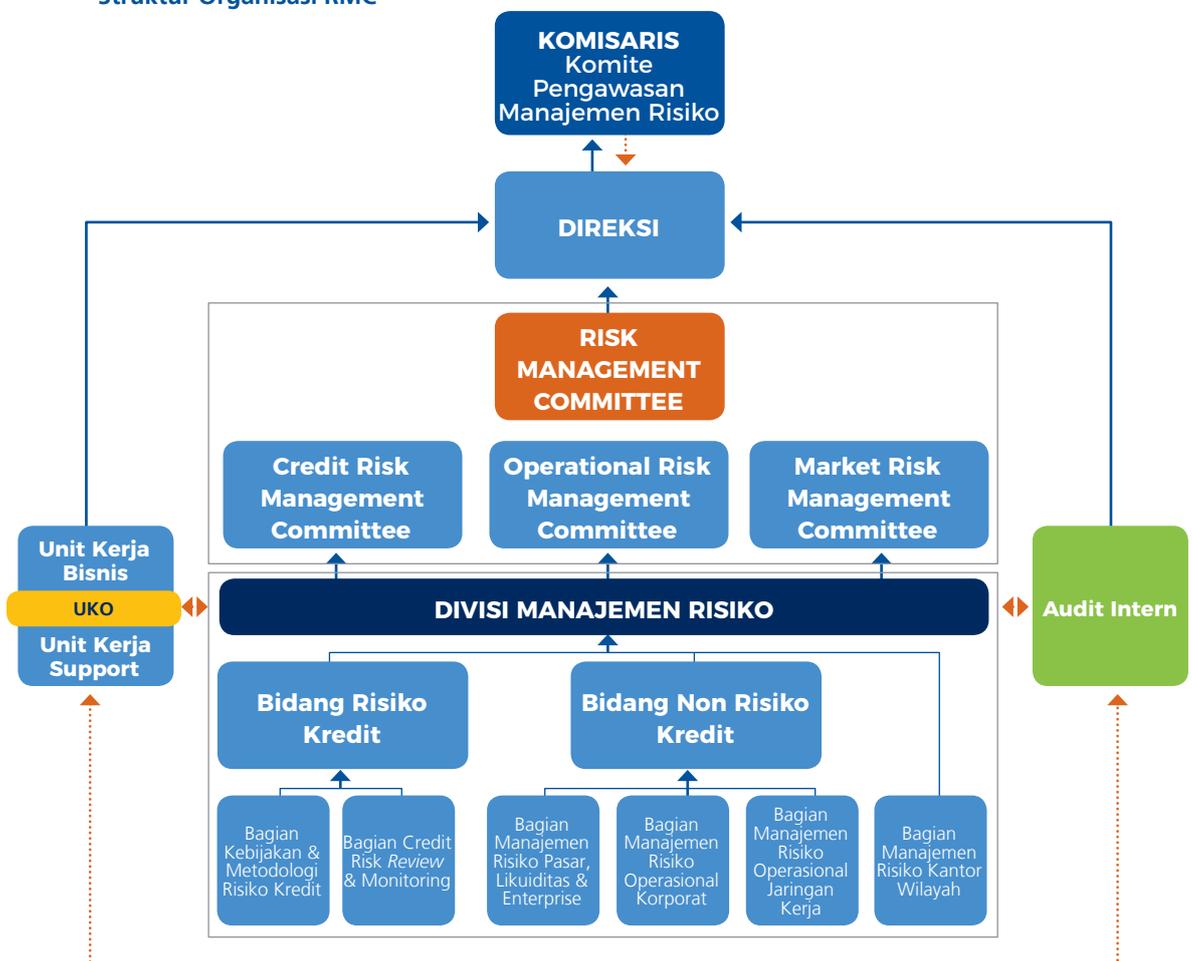


KOMITE DIREKSI

**RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC) & OPERATIONAL RISK MANAGEMENT COMMITTEE (ORMC)**

Komite yang bertanggungjawab atas penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta Perubahannya termasuk penerapan kebijakan dan strategi manajemen risiko.

**Struktur Organisasi RMC**



Keterangan:  
 — : Garis kewenangan dan pertanggungjawaban *managerial line*  
 - - - : Garis komunikasi

## KOMITE DIREKSI

## Keanggotaan Komite

## 1. Risk Management Committee (RMC)

Direktur Utama/ Wakil Direktur Utama	Ketua	Memiliki hak suara
Kepala Divisi Risiko <i>Enterprise &amp; Manajemen Portofolio</i>	Sekretaris	Tidak memiliki Hak Suara
Direktur Strategi & Keuangan	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Direktur <i>Human Capital</i>	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Seluruh Direktur atau SEVP Bidang Pengusul	Anggota Tidak Tetap	Memiliki hak suara
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	Tidak memiliki hak suara

## 2. RMC Terintegrasi

Direktur Utama/ Wakil Direktur Utama	Ketua	Memiliki Hak Suara
Kepala Divisi Risiko <i>Enterprise &amp; Manajemen Portofolio</i>	Sekretaris	Tidak memiliki hak suara
Direktur Strategi & Keuangan	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Direktur <i>Human Capital</i>	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Seluruh Direktur atau SEVP Bidang Pengusul	Anggota Tidak Tetap	Memiliki hak suara
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	Tidak memiliki hak suara
Direktur Utama BRI Syariah	Anggota Tetap	Tidak memiliki hak suara
Direktur Utama BRI Agro	Anggota Tetap	Tidak memiliki hak suara
Direktur Utama BRI Life	Anggota Tetap	Tidak memiliki hak suara
Direktur Utama BRI Finance	Anggota Tetap	Tidak memiliki hak suara
Direktur Kepatuhan BRI Syariah	Anggota Tetap	Tidak memiliki hak suara
Direktur Kepatuhan BRI Agro	Anggota Tetap	Tidak memiliki hak suara
Direktur Kepatuhan BRI Life	Anggota Tetap	Tidak memiliki hak suara
Direktur Kepatuhan BRI Finance	Anggota Tetap	Tidak memiliki hak suara

## 3. Operational Risk Management Committee (ORMC)

Direktur Utama/ Wakil Direktur Utama	Ketua	Memiliki hak suara
Kepala Divisi Manajemen Risiko Operasional & Pasar	Sekretaris	Tidak memiliki hak suara
Direktur Digital Banking & Teknologi	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Direktur <i>Human Capital</i>	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
SEVP Operation	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
SEVP Manajemen Jaringan	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Seluruh Direktur atau SEVP Bidang Pengusul	Anggota Tidak Tetap	Memiliki hak suara
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	Tidak memiliki hak suara

## Tugas dan Tanggung Jawab

*Risk Management Committee* memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama atas penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan Manajemen Risiko serta perubahannya termasuk *contingency plan* apabila kondisi tidak normal terjadi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi



## KOMITE DIREKSI

- eksternal dan internal BRI yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko BRI dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap efektifitas penerapan manajemen risiko.
3. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam rangka penetapan kebijakan dan/ atau penetapan hal-hal terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis BRI yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko melampaui limit yang telah ditetapkan.
  4. Menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk penetapan metodologi pengukuran risiko dan Perubahannya.
  5. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk penetapan limit dan perubahannya.
  6. Menyampaikan laporan Profil Risiko dan hasil pemantauan risiko serta rekomendasi Perubahannya (apabila diperlukan) kepada anggota RMC.
  7. Memberikan wewenang kepada Sub RMC (CRMC, ORMC, dan MRMC) untuk melakukan pembahasan isu-isu spesifik yang membutuhkan penanganan segera dan tidak membutuhkan keterlibatan seluruh anggota RMC.
    - a. Terjadi perubahan pada Profil Risiko BRI secara signifikan.
    - b. Terjadi perubahan regulasi yang membutuhkan tanggapan dan sikap cepat dari organisasi.
    - c. Terjadi kondisi *force majeure* seperti faktor alam, faktor manusia, gangguan eksternal, dan faktor disruptif lainnya.
    - d. Faktor yang menyebabkan Direksi memutuskan untuk dilakukan RMC.
  3. RMC membahas, mengkaji ulang dan menyetujui usulan dan rekomendasi yang disampaikan dalam rapat sesuai ketentuan yang berlaku.
  4. Rapat RMC dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.
  5. Rapat RMC dapat diselenggarakan apabila dihadiri sekurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Komite dan dihadiri Ketua Komite.
  6. Keputusan Rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penuh maka keputusan Rapat Komite dianggap sah dengan persetujuan dari 50 (lima puluh persen) dari jumlah Anggota ALCO yang memiliki hak suara ditambah dengan 1 (satu) orang Anggota termasuk Ketua Komite.
  7. Hasil Keputusan pada RMC dapat dianulir oleh Direksi sepanjang dilakukan pada Rapat Direksi.

## Pedoman Kerja

1. Rapat RMC diselenggarakan secara berkala sekurangnya 1 (satu) kali per Triwulan.
2. Penyelenggaraan rapat RMC dapat dilakukan diluar jadwal berkala apabila terdapat *issue* penting dan mendesak, antara lain

## Rapat Komite

Pada tahun 2017 Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat dengan penjelasan sebagai berikut:

## Mata Acara Rapat 2017

No	Kegiatan Activity	Tanggal Date	Agenda
1	RMC I 2017	10.03.2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil Risiko</li> <li>2. Tindak Lanjut Putusan RMC IV-2016</li> <li>3. Analisa Permodalan BRI dan Stress Test</li> <li>4. Pembahasan <i>Risk Issue</i> Eksternal dan Profil Risiko BRI</li> <li>5. Analisa Permodalan dan <i>Stress Test</i></li> <li>6. Pembahasan <i>Risk To Be Noticed</i> di BRI: Meningkatkan trend <i>fraud card</i> Bussines (Kartu Kredit), Pembayaran Bunga Kredit KMK bersumber dari kelonggaran tarik,</li> <li>7. <i>Write off</i> Kartu Kredit melebihi breakdown anggaran 2016</li> <li>8. Rekomendasi dan Putusan RMC I -2017</li> </ol>

## KOMITE DIREKSI

## Mata Acara Rapat 2017

No	Kegiatan Activity	Tanggal Date	Agenda
2	RMC II 2017	02.06.2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindak Lanjut Putusan RMC I-2017</li> <li>2. Pembahasan <i>Risk Issue</i> Eksternal dan Profil Risiko BRI</li> <li>3. Analisa Permodalan dan <i>Stress Test</i></li> <li>4. Pembahasan <i>Risk Issue</i> di BRI: Pendirian Perusahaan Aset Management, Implementasi Recovery Plan.</li> <li>5. Pembahasan <i>Risk To Be Noticed</i> di BRI: Penghapus bukuan Pinjaman Ritel Komersial Yang Berumur <math>\leq 12</math> Bulan Sejak Realisasi Awal, Suku Bunga Restrukturisasi yang Tidak Optimal, Ancaman Penyebaran Virus Ransomware Wannacrypt.</li> <li>6. Rekomendasi dan Putusan RMC II -2017</li> </ol>
3	RMC III 2017	28.08.2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Terkait Kejadian Satelit Telkom 1 Bergeser dari Orbitnya.</li> <li>2. Tindak Lanjut RMC II 2017</li> <li>3. Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank</li> <li>4. Monitoring Permodalan</li> <li>5. Leverage Ratio</li> <li>6. Credit Risk Monitoring</li> <li>7. Liquidity Risk Monitoring</li> <li>8. Stress Testing Risiko Pasar dan Kredit</li> <li>9. Stres Testing Likuiditas</li> <li>10. Pembahasan <i>Risk Issue</i> di BRI: Potensi Kerugian Gagal Kaim KUR, Potensi Kerugian Koreksi Pajak dan Denda Pajak Atas Debitur PH Yang Tidak Dimiliki NPWP untuk Pinjaman di Atas Rp. 50 Juta,</li> <li>11. Pembahasan <i>Risk To Be Noticed</i> di BRI: Berakhirnya masa berlaku POJK Nomor 11/POJK.03/2015 tahun 2015 tentang Ketentuan kehati-hatian Dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum, Transaksi Kartu Palsu Pada EDC BRI</li> <li>12. Rekomendasi dan Putusan RMC III Tahun 2017</li> </ol>
4	RMC IV 2017	23.11.2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembukaan Ketua I RMC</li> <li>2. Tindak Lanjut RMC III 2017</li> <li>3. Profil risiko triwulan III 2017</li> <li>4. Monitoring permodalan</li> <li>5. <i>Leverage Ratio</i></li> <li>6. <i>Liquidity Risk Monitoring</i></li> <li>7. <i>Market Risk Monitoring</i></li> <li>8. <i>Stress Test</i></li> <li>9. <i>Monitoring Sektor Ekonomi</i></li> <li>10. Pembahasan <i>Risk Issue</i>: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Biaya CKPN Akibat Tunggakan Kecil.</li> <li>b. Potensi <i>Recovery Rate</i> PH Dari Simpanan Debitur PH.</li> <li>c. <i>Risk Issue</i> Dampak Rekening Pinjaman Status 3 (Maturity Not Close) Terhadap Kualitas Kredit dan CKPN</li> <li>d. <i>Rate Borrowing</i> BRI New York Kepada BRI HO Di Bawah COF Valas</li> <li>e. <i>Skimming</i> Agen BRILINK</li> </ol> </li> <li>11. Rekomendasi dan Putusan RMC IV 2017</li> </ol>



## KOMITE DIREKSI

Dalam rangka membahas permasalahan yang spesifik pada jenis risiko tertentu dan membutuhkan putusan segera, dilakukan rapat RMC yang bersifat terbatas, atau yang disebut sub-RMC. Terdapat 3 (tiga) Sub-RMC yaitu CRMC (*Credit Risk Management Committee*), MRMC (*Market Risk Management Committee*), dan ORMC (*Operational Risk Management Committee*), yang dibentuk untuk membahas permasalahan-permasalahan yang menyangkut risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko lainnya. Adapun pertemuan sub RMC selama tahun 2017 sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Risalah Rapat
<b>CRMC</b>			
1	CRMC I	31 Januari 2017	B.41.e-DMR/CRM/02/2017
2	CRMC II	8 Maret 2017	-
3	CRMC III	10 Mei 2017	B.138.e-DMR/CRM/05/2017
4	CRMC IV	16 Agustus 2017	B.36.e-ERM/MRK/08/2017
5	Pra CRMC	9 November 2017	B.157.e-ERM/MRK/11/2017
<b>MRMC</b>			
1	MRMC I 2017	24 Januari 2017	B.47.e-DMR/MP/01/2017
2	MRMC III 2017	28 Juli 2017	B.228.e-DMR/MP/07/2017

## KOMITE KREDIT

Merupakan Komite operasional yang membantu Direksi dalam mengevaluasi dan atau memutuskan permohonan kredit untuk jumlah dan atau jenis kredit tertentu yang ditetapkan oleh Direksi.

## Struktur Komite

1. Komite Kredit di tingkat Direksi, yaitu
  - a. Komite Kredit BRI.
  - b. Komite Kredit Direksi 1
  - c. Komite Kredit Direksi 2
2. Komite Kredit di tingkat Divisi
3. Komite Kredit *Regional Commercial Business* (RCB)
4. Komite Kredit di Kantor Wilayah/ Kantor Cabang Khusus
5. Komite Kredit Unit Kerja Luar Negeri (UKLN)

## Tugas

1. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan oleh Direksi.
2. Melakukan koordinasi dengan *Asset & Liabilities Committee* (ALCO) dalam aspek pendanaan untuk kredit dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh ALCO.

## Tanggung Jawab

1. Melaksanakan tugas dalam pemberian putusan kredit berdasarkan kemahiran profesional secara jujur, objektif, cermat dan seksama.
2. Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas atau diluar asas-asas perkreditan yang sehat.
3. Membubuhkan tanda tangan pada formulir Putusan Kredit sebagai bukti pemberian putusan kredit serta sebagai wujud tanggung jawab Komite kredit.

## KOMITE DIREKSI

### Benturan Kepentingan

Dalam pemberian putusan kredit, Komite Kredit tetap berdasarkan penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan terlepas dari benturan kepentingan terhadap Komite Kredit dan individual, dengan mekanisme yang diatur sebagai berikut:

1. Dalam hal anggota pemutus Komite Kredit BRI memiliki benturan kepentingan (*Conflict of Interest*), maka putusan kredit dilakukan oleh seluruh Direksi dan SEVP yang memiliki kewenangan memutus, kecuali anggota Komite Kredit BRI yang memiliki benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) dimaksud. Pengambilan keputusan diambil secara *unanimous* dari seluruh anggota Pemutus.
2. Dalam hal benturan kepentingan terjadi pada anggota Komite Kredit selain Komite Kredit BRI, maka putusan kredit menjadi kewenangan pemutus setingkat lebih tinggi.
3. Dalam hal benturan kepentingan terjadi pada pemutus kredit individual, maka putusan kredit menjadi kewenangan pemutus setingkat lebih tinggi.
4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan sehingga putusan kredit dilaksanakan sebagaimana butir 2 dan 3 diatas, maka hal tersebut harus disampaikan dalam Memorandum Analisis Kredit (MAK)

### Pedoman Kerja

1. Rapat Komite Kredit hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi *quorum* yaitu sekurang-kurangnya dihadiri oleh  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) + 1 dari seluruh anggota Komite Kredit.
2. Anggota Komite Kredit yang tidak dapat hadir dalam Rapat Komite karena sedang tidak berada ditempat (namun tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja) maka tidak dapat diperhitungkan dalam penetapan *quorum* pelaksanaan rapat Komite Kredit.
3. Pelaksanaan Komite Kredit dilaksanakan dalam forum rapat Komite Kredit dengan Unit Kerja Administrasi Kredit terkait sebagai Sekretaris Komite.

### Rapat Komite

Selama tahun 2017, terdapat 36 (tiga puluh enam) pelaksanaan rapat komite kredit dan pelaksanaan komite telah sesuai dengan pedoman kerja komite dan *quorum* rapat.

## KOMITE PERMODALAN DAN INVESTASI

Komite Permodalan dan Investasi merupakan Komite yang bertanggung jawab terhadap kegiatan aksi korporasi dan pengelolaan perusahaan anak.

### Struktur dan Keanggotaan

Keanggotaan Komite Permodalan dan Investasi terdiri dari:

#### Struktur dan Keanggotaan

Direktur Strategi & Keuangan	Ketua	Memiliki Hak Suara
Kepala Divisi <i>Corporate Development &amp; Strategy</i>	Sekretaris	Memiliki Hak Suara
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	Tidak memiliki hak suara
Direktur atau SEVP Bidang terkait	Anggota Tidak Tetap	Memiliki Hak Suara
Direktur atau SEVP Pembina Perusahaan Anak	Anggota Tidak Tetap	Memiliki Hak Suara
Direktur <i>Human Capital</i>	Anggota Tidak Tetap	Memiliki Hak Suara
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	Tidak memiliki hak suara

Dalam melaksanakan tugas, Komite Capital & Investment didukung oleh Tim Penunjang Komite.

### Tugas dan Tanggung Jawab

1. Langkah Korporasi
  - a. Melakukan *review* atas kajian dan analisa langkah korporasi yang diusulkan oleh Tim Penunjang Komite.
  - b. Menentukan dan merekomendasikan langkah korporasi.



## KOMITE DIREKSI

2. Pengelolaan Perusahaan Anak
  - a. Melakukan *review* atas kajian dan analisa rencana bisnis, rencana kerja, dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Anak.
  - b. Melakukan *review* atas kajian dan analisa kinerja Perusahaan Anak.
  - c. Membahas dan merekomendasikan atas rencana bisnis, RKAP, dan kinerja Perusahaan Anak.
  - d. Membahas dan merekomendasikan inisiatif strategis tambahan penyertaan modal untuk Perusahaan Anak.
  - e. Membahas dan merekomendasikan Divestasi Perusahaan Anak.
  - f. Merekomendasikan kepengurusan dan remunerasi Anggota Direksi/Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak.
3. Komite menyelenggarakan rapat minimal 1 (satu) kali per Triwulan untuk membahas usulan, kajian dan analisa yang berasal dari Tim Penunjang Komite.
4. Rapat dinyatakan kuorum bila dihadiri oleh minimal 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Komite dan dihadiri oleh ketua Komite.
5. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite. Apabila Ketua berhalangan hadir, maka digantikan dengan mekanisme Direktur Pengganti.
6. Sekretaris Komite bertanggung jawab mengoordinasi penyelenggaraan Rapat Komite *Capital & Investment*.
7. Rekomendasi Komite ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal ini tidak tercapai kesepakatan, maka rekomendasi rapat Komite dianggap sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara +1 (satu) orang Anggota Komite termasuk Ketua Komite.
8. Kehadiran Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama menambah Anggota Tetap dengan Hak Suara.
9. Rekomendasi rapat Komite akan dilaporkan oleh Ketua Komite kepada Rapat Direksi untuk mendapat putusan Direksi.

## Pedoman Kerja

1. Tim Penunjang Komite mempersiapkan kajian dan analisa sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing.
2. Kajian dipresentasikan pada rapat Komite oleh Anggota Komite dan/atau Anggota Tim Penunjang dan/atau perwakilan Perusahaan Anak sesuai ruang lingkupnya masing-masing.

## Rapat Komite

Pada tahun 2017 Komite Permodalan dan Investasi telah melaksanakan 10 kali rapat dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Tanggal pelaksanaan	Agenda
1	12 Januari 2017	Presentasi Kajian Pertumbuhan Non Organik untuk Tahun 2017
2	16 Februari 2017	Presentasi Kajian Corporate Action Tahun 2017 <i>Review SK Capital &amp; Investment Committee</i>
3	15 September 2017	Pemaparan Hasil <i>Due Dilligence Project</i> Akuisisi Lembaga Keuangan 2017 Presentasi Kajian Pertumbuhan Non Organik untuk Tahun 2018
4	23 Oktober 2017	Komite Capital & Investment BRI Syariah 1. Pemaparan Kinerja BRI Syariah Triwulan III 2017 2. Strategi Pencapaian Kinerja BRI Syariah Tahun 2017 dan 2018 3. Rencana Aksi Korporasi BRI Syariah Tahun 2018 4. Penetapan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) BRI Syariah Tahun 2018
5	30 Oktober 2017	Pembahasan Kinerja BRI Syariah Tw III 2017 & Strategi Bisnis 2017 & 2018
6	30 Oktober 2017	Pembahasan Kinerja BRI Syariah Tw III 2017 & Strategi Bisnis 2017 & 2018
7	2 November 2017	Pembagian Dividen Interim Penerbitan Surat Berharga Dalam Rangka POJK No 14 Tahun 2017 Penyertaan Modal Pada Lembaga Keuangan
8	8 November 2017	Pembahasan Kinerja BRI Finance Tw III 2017 & Strategi Bisnis 2017 & 2018
9	13 November 2017	Pembahasan Kinerja BRI Life Tw III 2017 & Strategi Bisnis 2018
10	14 November 2017	Pembahasan Kinerja BRI Agro Tw III 2017 & Strategi Bisnis 2017 & 2019

## KOMITE DIREKSI

## KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan dibentuk dengan tugas merumuskan kebijakan perkreditan BRI dan memberikan saran perbaikan terhadap kebijakan perkreditan.

### Struktur dan Keanggotaan

Direktur Utama	Ketua	Memiliki hak suara
Kepala Divisi Kebijakan Risiko Kredit	Sekretaris (Merangkap Anggota)	Memiliki hak suara
Wakil Direktur Utama	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Seluruh Direktur Bidang	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Seluruh <i>Senior Vice President</i>	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Kepala Satuan Audit Intern	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Kepala Divisi Analisa Risiko Kredit	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Kepala Divisi Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Kepala Divisi Kebijakan & Strategi Bisnis Mikro	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Kepala Divisi Bisnis Ritel dan Menengah	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Kepala Divisi Kredit Konsumer	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Kepala Divisi Program, Pangan dan Kemitraan	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Kepala Divisi Korporasi 1	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Kepala Divisi Korporasi 2	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Kepala Divisi Korporasi 3	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Kepala Divisi Bisnis Komersial	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Kepala Divisi Sindikasi dan Jasa Lembaga Keuangan	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Kepala Divisi Bisnis Treasury	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Kepala Divisi Bisnis Internasional	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Kepala Divisi <i>Corporate Development &amp; Strategy</i>	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Kepala Divisi Kepatuhan	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Kepala Divisi Hukum	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Kepala Divisi <i>Investment Service</i>	Anggota Tetap	Memiliki hak suara

### Tugas dan Tanggung Jawab

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Umum Perkreditan (KUP).
2. Mengawasi penerapan Kebijakan Umum Perkreditan (KUP).
3. Melakukan *review* berkala Kebijakan Umum Perkreditan (KUP).
4. Melakukan evaluasi terhadap:
  - a. Kebenaran pelaksanaan memutus kredit atau penyediaan dana.
  - b. Kebenaran menjalankan proses pemberian kredit atau penyediaan dana, perkembangan dan kualitas kredit.
  - c. Kebenaran pelaksanaan ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK).
  - d. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit.
  - e. Penyelesaian kredit bermasalah.
  - f. CKPN dan cadangan penghapusbukuan.
  - g. Debitur besar tertentu dan kredit dalam daftar kredit Dalam Perhatian Khusus.



## KOMITE DIREKSI

5. Melakukan kajian menilai efektivitas sistem pengendalian intern perkreditan.
6. Menyampaikan laporan berkala kepada Direksi dan tindakan Dewan Komisaris mengenai:
  - a. Hasil pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan KUP.
  - b. Hasil evaluasi pada point 4 (empat).

### Pedoman Kerja

1. Komite Kebijakan Perkreditan wajib melakukan rapat pembahasan *final draft* perubahan atau revisi Kebijakan Umum Perkreditan (KUP).
2. Rapat Komite dilakukan dalam rangka pertemuan mengusulkan penyusunan perubahan, revisi KUP ataupun *issue* penting yang perlu mendapat tanggapan cepat dari perusahaan.
3. Rapat Komite dipimpin oleh Direktur Utama sebagai Ketua Komite. Dalam hal Direktur Utama berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh Wakil Direktur Utama atau Direktur Anggota Komite lainnya.
4. Rapat Komite sah apabila dihadiri sekurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Komite yang terdiri dari 3 Direktur yaitu:
  - a. Direktur Manajemen Risiko
  - b. Direktur Kepatuhan
  - c. Direktur Bidang Bisnis  
serta
  - d. Kepala Satuan Kerja Audit Internal,
  - e. Kepala Divisi Kebijakan Risiko Kredit
  - f. Kepala Divisi Kepatuhan.
 Apabila Kepala Divisi yang menjadi anggota Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) berhalangan hadir maka Penggantinya dapat ditunjuk.
5. Keputusan Rapat Komite ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal ini tidak tercapai kesepakatan, maka rekomendasi rapat Komite dianggap sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara +1 (satu) orang Anggota Komite termasuk Ketua Komite.

### Rapat Komite

Pada tahun 2017 Komite Kebijakan Kredit dan Investasi telah melaksanakan 3 (tiga) kali rapat dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	04 – 05 September 2017	Penyusunan Kebijakan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro
2	26 – 27 September 2017	Penyusunan Kebijakan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Ritel dan Menengah
3	03-04 Oktober 2017	Penyusunan Kebijakan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Korporasi, Internasional dan Treasury

## KOMITE DIREKSI

### KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah Teknologi Informasi bertanggungjawab memberikan arahan dan rekomendasi kepada Direksi tentang perencanaan, tata kelola, pengembangan dan operasional Teknologi Informasi (TI).

#### Struktur dan Keanggotaan

Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi terdiri dari:

Direktur Digital Banking dan Teknologi	Ketua	Memiliki hak suara
Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan TI	Sekretaris	Tidak memiliki hak suara
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
SEVP Operation	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
SEVP Manajemen Jaringan	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
SEVP Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan Properti	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Direktur atau SEVP Bidang Pengusul	Anggota Tidak Tetap	Memiliki hak suara
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	Tidak memiliki hak suara

#### Fungsi

1. Memberikan arahan kebijakan dan manajemen TI baik jangka panjang maupun jangka pendek (tahunan) dan mengacu kepada Rencana Strategis Teknologi Informasi (IT *Strategic Plan*) BRI.
2. Melakukan kontrol atas pelaksanaan pengembangan dan implementasi TI di BRI yang sedang dan akan dikembangkan dengan mengacu pada Rencan Strategis Teknologi Informasi (IT *Strategic Plan*) BRI.

7. Memantau performa sistem TI dan memberikan rekomendasi upaya peningkatannya.
8. Memberikan rekomendasi upaya penyelesaian masalah TI yang tidak dapat diselesaikan Unit Kerja pengguna TI dan penyelenggara TI secara efektif, efisien dan tepat waktu.
9. Memberikan rekomendasi dalam rangka memastikan kecukupan atas alokasi *resources* yang dimiliki BRI.

#### Tugas dan Tanggung Jawab

1. Memberikan rekomendasi rencana strategi TI jangka panjang yang sejalan dengan *Corporate Plan* dan Rencana Bisnis Bank yang dituangkan dalam IT *Strategic Plan* BRI.
2. Merumuskan kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama.
3. Memastikan kesesuaian rencana strategi IT dengan proyek IT lain yang disetujui untuk dilaksanakan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan proyek-proyek TI agar sesuai dengan rencana proyek yang disepakati (*Project Charter*).
5. Melakukan evaluasi kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen untuk operasional dan bisnis Bank.
6. Memantau efektifitas pengelolaan risiko atas investasi di bidang TI agar investasi yang ditanamkan mampu berkontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan bisnis BRI.

#### Pedoman Kerja

1. Komite Pengarah TI mengadakan rapat minimal 2 kali dalam 1 tahun.
2. Rapat Komite Pengarah TI sekurang-kurangnya dihadiri oleh:
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris
  - c. 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Komite Pengarah TI yang diundang dan terkait dengan agenda rapat Komite Pengarah TI.
3. Keputusan rapat diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal ini tidak tercapainya kesepakatan maka keputusan rapat Komite dianggap sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara ditambah 1 (satu) orang Anggota Komite termasuk Ketua Komite Pengarah TI.
4. Kehadiran Direktur Utama/Wakil Direktur Utama menambah Anggota Tetap Hak Suara.



## KOMITE DIREKSI

## Rapat Komite

Pada tahun 2017 Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan 3 (tiga) kali rapat dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	10 Juli 2017	Kick off Proyek transformasi IT "Digital Banking Architecture & CBS Due Diligence"
	31 Juli 2017	1. BRITCOM <i>Introduction</i> 2. BRI IT <i>Strategy in Digitalization Era</i> 3. BRISIM & BIG DATA 4. <i>Network &amp; Service Enhancement</i> 5. <i>Top Issues TI</i> 6. <i>Internal IT Update (Audit Eksternal)</i>
	12 Oktober 2017	1. Penjelasan Keputusan Direksi tanggal 29 Agustus 2017 2. Penjelasan ulang <i>Diagnostic, Design and Roadmap BRItE</i> 3. Pembahasan rencana kegiatan <i>Proof of Concept</i>

## KOMITE KEBIJAKAN HUMAN CAPITAL

Komite Kebijakan *Human Capital* Merupakan Komite yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan strategis dan operasional dibidang *Human Capital*.

## Struktur dan Keanggotaan

Keanggotaan Komite Kebijakan SDM adalah sebagai berikut:

Direktur Utama/Wakil Direktur Utama	Ketua	Memiliki hak suara
Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan <i>Human Capital</i> Seluruh Direksi BRI	Sekretaris	Memiliki hak suara
Seluruh <i>Senior Executive Vice President</i> BRI	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Kepala Satuan Kerja Audit Intern	Anggota Tetap	Memiliki hak suara

## Fungsi

1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengambilan keputusan strategik di bidang *Human Capital*.
2. Meningkatkan kualitas kebijakan strategik *human capital* yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

## Tugas dan Tanggung Jawab

1. Menetapkan prioritas strategi pengembangan, arah kebijakan dan peningkatan kualitas *human capital* BRI.
2. Memberikan rekomendasi dalam proses penetapan kebijakan strategis, manajemen karir, *corporate culture* di bidang *human capital*.

## Pedoman Kerja

1. Rapat Komite Kebijakan *Human Capital* dipimpin oleh Ketua Komite.
2. Dalam hal Direktur Utama berhalangan hadir maka digantikan Wakil Direktur Utama sebagai anggota komite.
3. Seluruh anggota Komite Kebijakan *Human Capital* memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama didalam proses penetapan kebijakan di bidang *Human Capital*.
4. Apabila terdapat *issue* penting dan mendesak yang membutuhkan jalan keluar dan/atau sikap dari Komite Kebijakan *Human Capital* maka Unit Kerja yang terkait dapat mengusulkan kepada Sekretaris Komite melakukan Rapat Komite Kebijakan *Human Capital*.

## KOMITE DIREKSI

- Keputusan rapat diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal ini tidak tercapainya kesepakatan maka keputusan rapat Komite dianggap sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara ditambah 1 (satu) orang Anggota Komite termasuk Ketua Komite Kebijakan *Human Capital* telah memberikan suara setuju.
- Dalam hal rapat Komite Kebijakan *Human Capital* tidak dapat diselenggarakan maka Komite dapat mengambil keputusan melalui Nota Dinas Sirkuler dengan persetujuan dari Ketua dan Anggota Komite lainnya.
- Apabila diperlukan maka Komite Kebijakan *Human Capital* dapat menghadirkan Pihak Lain yang terkait sebagai Narasumber.

### Rapat Komite

Pada tahun 2017 Komite Kebijakan *Human Capital* telah melaksanakan [\*] kali rapat dengan penjelasan sebagai berikut:

### Rapat Komite (Frekuensi, Tingkat Kehadiran, Agenda, dan Pengambilan Keputusan)

Selama tahun 2017 tidak terdapat agenda rapat komite.

## KOMITE EVALUASI JABATAN

Komite Evaluasi Jabatan merupakan Komite yang bertanggungjawab mereview, merekomendasi, dan/atau menetapkan golongan jabatan.

### Struktur dan Keanggotaan

Komite Evaluasi Jabatan terdiri dari:

Direktur Strategi dan Keuangan	Ketua	Memiliki hak suara
Wakil Kepala Divisi Bidang <i>Organization &amp; Performance Management</i> – <i>Divisi Corporate Development &amp; Strategy</i>	Sekretaris	Tidak memiliki hak suara
Direktur <i>Human Capital</i>	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Kepala Divisi <i>Corporate Development &amp; Strategy</i>	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan <i>Human Capital</i>	Anggota Tetap	Memiliki hak suara

### Tugas dan Tanggung Jawab

Melakukan *review*, merekomendasi, dan/atau menetapkan golongan jabatan.

### Pedoman Kerja

- Rapat Komite Evaluasi Jabatan dipimpin oleh Ketua Komite.
- Seluruh anggota Komite Evaluasi Jabatan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama didalam proses *review*, merekomendasikan, dan atau menetapkan golongan jabatan.
- Penyelenggaraan rapat Komite Evaluasi Jabatan menjadi tanggung jawab Sekretaris Komite.
- Rapat Komite Evaluasi Jabatan ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal ini tidak mencapai kesepakatan, maka keputusan Rapat Komite dianggap sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara + 1 (satu) orang Anggota Komite termasuk Ketua Komite.
- Dalam hal rapat Komite tidak dapat diselenggarakan maka Komite Evaluasi Jabatan dapat mengambil keputusan melalui Nota Dinas Sirkuler dengan persetujuan dari Ketua Komite dan Anggota Komite lainnya.



## KOMITE DIREKSI

## Rapat Komite

Pada tahun 2017 Komite Evaluasai Jabatan telah melaksanakan satu kali rapat dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Tanggal pelaksanaan	Agenda
1	09 Februari 2017	Usulan Penetapan Golongan Jabatan Divisi Satelit & Jaringan Infrastruktur dan <i>Priority Banking Manager</i> .

## KOMITE PENGARAH PROJECT MANAGEMENT (PMO-SC)

PMO-SC Merupakan Komite di Kantor Pusat yang bertanggungjawab mengarahkan dan mengkoordinasikan pengelolaan portofolio proyek untuk memastikan proyek dilaksanakan sesuai Kebijakan Umum (KU) Proyek.

## Struktur dan Keanggotaan

PMO-SC adalah forum/komite tertinggi dalam manajemen proyek tingkat korporat di BRI.

Wakil Direktur Utama	Ketua	Memiliki hak suara
Kepala Divisi <i>Project Management Office</i>	Sekretaris (Merangkap Anggota)	Tidak memiliki hak suara
Direktur Strategi & Keuangan	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Direktur Digital Banking dan Teknologi	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
SEVP Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Direktur atau SEVP Bidang Pemilik Proyek	Anggota Tidak Tetap	Memiliki hak suara
Kepala Unit Kerja Pemilik Proyek	Anggota Tidak Tetap	Tidak Memiliki hak suara
Kepala Unit Kerja Pendukung Proyek	Anggota Tidak Tetap	Tidak Memiliki hak suara

## Tugas dan Tanggung Jawab

- Memberikan arahan arahan ditingkat korporat terhadap strategi proyek-proyek di BRI.
- Mengambil keputusan atas usul penyelesaian masalah dalam pengelolaan proyek yang tidak dapat diputus oleh *Head of PMO*.
- Mengambil keputusan terhadap usul relokasi anggaran antar proyek yang tercantum didalam anggaran Rencana Kerja Proyek.
- Mengambil keputusan atas hal-hal yang belum diatur didalam Kebijakan Umum (KU) proyek dan Pedoman Pelaksanaannya (PP).
- Menyetujui dan mengesahkan proyek yang diusulkan setelah RKAP mendapat persetujuan.
- Memberi arahan dan putusan terkait akselerasi penyelesaian proyek.
- Menetapkan kriteria untuk proyek yang dimonitor *Project Management Office* (PMO).
- Memutuskan proyek-proyek yang masuk dan dikeluarkan dari monitoring PMO.
- Menetapkan prioritas proyek untuk dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemilik Proyek atau Unit Kerja Pendukung proyek.
- Memberikan keputusan dengan proyek diantaranya menyetujui, mengubah dan membatalkan rencana dan pelaksanaan proyek.
- Memberikan arahan terhadap hasil Evaluasi Pasca Implementasi Proyek (EPIP) yang sudah dilaksanakan sebagai bagian dari *lessons learned* dalam pelaksanaan proyek selanjutnya di BRI.

## Pedoman Kerja

- Rapat Komite Pengarah PMO-SC diadakan secara berkala sekurangnya 2 (dua) kali per tahun.
- Rapat diluar rapat berkala dapat diselenggarakan dengan kriteria:
  - Terdapat perubahan kondisi bisnis secara signifikan.
  - Terdapat perubahan regulasi.
  - Terdapat kondisi yang mendorong dilakukannya rapat PMO-SC.

## KOMITE DIREKSI

3. Rapat PMO-SC dipimpin oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama sebagai Ketua PMO SC. Apabila Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama berhalangan hadir maka posisi Ketua Komite digantikan oleh Direktur atau SEVP sesuai ketentuan berlaku.
4. Kehadiran Anggota dengan Hak Suara di dalam Rapat PMO-SC tidak dapat diwakilkan. Apabila Anggota dengan Hak suara berhalangan hadir maka posisinya di rapat dapat digantikan oleh Direktur atau SEVP Pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Rapat PMO-SC dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Ketua Komite serta dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang Anggota Komite dengan hak suara dengan minimal terdapat 1 (satu) orang Direktur.
6. Rapat Komite ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal ini tidak mencapai kesepakatan, maka keputusan Rapat Komite dianggap sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara + 1 (satu) orang Anggota Komite termasuk Ketua Komite.

### Rapat Komite

Pada tahun 2017 PMO-SC telah melaksanakan satu kali rapat dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Tanggal pelaksanaan	Agenda
1	04 Desember 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja Proyek/Inisiatif Strategis 2017</li> <li>2. Rekomendasi Putusan PMO-SC yaitu:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perubahan Kriteria Proyek dalam monitoring PMO.</li> <li>b. Proyek/Inisiatif 2017 yang "Carry Over" dan "Multiyears" ke 2018.</li> <li>c. Perubahan untuk "Sneak Preview" pada 16 Desember 2017.</li> <li>d. Perubahan pemilik proyek terkait Re-organisasi.</li> <li>e. Proyek yang dikeluarkan dari monitoring PMO.</li> <li>f. Perubahan inisiatif strategis</li> <li>g. Proyek/Inisiatif tahun 2018.</li> </ol> </li> <li>3. Putusan PMO-SC</li> </ol>

## KOMITE PRODUK

Komite Produk merupakan Komite yang bertanggungjawab memberikan putusan atas usul pengembangan produk dan jasa baru, pengembangan dan penghentian produk dan jasa eksisting, memutus produk dan jasa *bundling* diatas kewenangan Direktur atau, dan memberikan rekomendasi kepada Direksi atas strategi pengembangan produk dan jasa.

### Struktur dan Keanggotaan

Komite Produk memiliki struktur keanggotaan sebagai berikut:

Wakil Direktur Utama	Ketua	Memiliki hak suara
Kepala Divisi Corporate Development & Strategy	Sekretaris (Anggota Tetap)	Tidak memiliki hak suara
Direktur Strategi & Keuangan	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Direktur Digital Banking & Teknologi	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
SEVP Manajemen Jaringan	Anggota Tetap	Memiliki hak suara
Direktur atau SEVP Pemilik Produk	Anggota Tidak Tetap	Memiliki hak suara
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	Tidak memiliki hak suara



## KOMITE DIREKSI

**Fungsi**

Mengevaluasi kinerja produk serta memberikan rekomendasi kepada Direksi atas strategi pengembangan produk BRI.

**Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Mengkaji dan memberikan putusan atas usul pengembangan produk dan jasa yang telah memenuhi kriteria produk dan jasa yang dapat diputus oleh Komite Produk.
2. Mengkaji dan memberikan putusan atas usul produk dan jasa *bundling* diatas kewenangan Direktur atau SEVP Bidang Pemilik Produk yang telah memenuhi kriteria produk dan jasa yang dapat diputus oleh Komite Produk.
3. Mengkaji dan memberikan putusan atas penghentian produk dan jasa existing yang telah memenuhi kriteria produk dan jasa yang dapat diputus oleh Komite Produk.
4. Mengkaji dan memberikan putusan atas permasalahan produk dan jasa yang tidak dapat diputus pada tingkat kewenangan Direktur atau SEVP Bidang Pemilik Produk.
5. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi atas strategi pengembangan produk BRI.
  - b. Terjadi perubahan regulasi yang membutuhkan respon organisasi khususnya dalam pengembangan produk atau penghentian produk secara cepat dan segera.
  - c. Faktor-faktor lainnya yang menyebabkan Direksi memutuskan untuk dilakukan Rapat Komite Produk.
3. Rapat Komite Produk dipimpin oleh Wakil Direktur Utama sebagai Ketua Komite. Apabila Wakil Direktur Utama berhalangan hadir maka posisi Ketua Komite dapat digantikan oleh Direktur Pengganti sesuai dengan ketentuan Direktur Pengganti.
4. Kehadiran Anggota dengan Hak Suara di dalam Rapat Komite Produk tidak dapat diwakilkan. Apabila Anggota dengan Hak suara berhalangan hadir maka dapat digantikan oleh Direktur atau SEVP Pengganti sesuai dengan ketentuan.
5. Rapat Komite Produk dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Ketua Komite dan dihadiri minimal 3 (tiga) orang anggota dengan hak suara yang hadir dimaksud minimal terdapat 1 (satu) Direktur.
6. Keputusan rapat diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal ini tidak tercapainya kesepakatan maka keputusan rapat Komite dianggap sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara ditambah 1 (satu) orang Anggota Komite termasuk Ketua Komite.
7. Hasil keputusan Komite Produk dilaporkan pada Rapat Direksi.

**Pedoman Kerja**

1. Rapat Komite Produk diselenggarakan berkala sekurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.
2. Rapat diluar dari rapat berkala dapat diselenggarakan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Terjadi perubahan kondisi bisnis secara signifikan yang membutuhkan khususnya dalam pengembangan produk atau penghentian produk secara cepat dan segera.

**Rapat Komite**

Pada tahun 2017 Komite Produk telah melaksanakan 3 (tiga) kali rapat dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Tanggal pelaksanaan	Agenda
1	22 Juni 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Taksonomi Produk BRI &amp; Unit Kerja Pemilik Produk</li> <li>2. Pembahasan Fitur Produk BRI &amp; Unit Kerja Pemilik Fitur Produk</li> </ol>
2	31 Agustus 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan kembali Unit Kerja Pemilik Fitur Produk BRI</li> <li>2. Pembahasan usulan Produk &amp; Fitur Baru Direktorat Konsumer:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undian Briguna Nasional</li> <li>b. Easy Card dan Program Cash Back Tu Wa Ga</li> <li>c. BRI Point Reward</li> </ol> </li> </ol>

## KOMITE DIREKSI

No	Tanggal pelaksanaan	Agenda
3	10 Oktober 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan usulan pengembangan Produk Kredit Modal Kerja sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>d. KMK Dinamis</li> <li>e. KMK WA</li> <li>f. KMK Mitra - Pengembangan LAS Supply Chain Financing</li> <li>g. KMK Mitra - Pengembangan Aplikasi Brijamin Asuransi Kredit Mitra</li> <li>h. KMK Mitra - Pengembangan fitur pada CMS untuk kredit Post Financing</li> <li>i. KMK Mitra - Pengembangan fitur pada CMS untuk kredit Distributor Financing</li> <li>j. Partnership dengan Fintech</li> </ol> </li> <li>2. Pembahasan Produk Bank Garansi</li> <li>3. Pembahasan Strategi Pengembangan Produk Kupedes sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kupedes Keagenan</li> <li>b. Kupedes Ekstra Cepat</li> </ol> </li> <li>4. Pembahasan Produk Briguna Mikro</li> </ol>

## KOMITE PENGADAAN BARANG DAN JASA

Komite Pengadaan Barang dan Jasa merupakan Komite yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan evaluasi dan memberi keputusan atas permohonan pelaksanaan dan hasil dari suatu pengadaan dengan nilai tertentu.

## Struktur dan Keanggotaan

Komite	Susunan Keanggotaan		Hak Suara
Komite Pengadaan I (Nilai > Rp.200 M)	Ketua	Direktur/SEVP yang membidangi Manajemen Aktifa Tetap dan Pengadaan	Memiliki hak suara
	Sekretaris	Kepala Divisi MAT atau PBJ	Memiliki hak suara
	Anggota Tetap	1. Seluruh Anggota Direksi BRI	Memiliki hak suara
		2. Direktur/SEVP <i>user</i> terkait 3. Direktur Kepatuhan	Memiliki hak suara Tidak memiliki hak suara
Komite Pengadaan II (Nilai >Rp. 75 M s.d Rp.200 M)	Ketua	Direktur/SEVP yang membidangi Manajemen Aktifa Tetap dan Pengadaan	
	Sekretaris	Kepala Divisi MAT atau PBJ	
	Anggota Tetap	1. Direktur Utama	Memiliki hak suara
		2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Manajemen Risiko 4. Direktur/SEVP <i>user</i> terkait	Memiliki hak suara Memiliki hak suara Memiliki hak suara
Komite Pengadaan III (Nilai >Rp. 20 M s.d Rp.75 M)	Anggota	1. Wakil Direktur Utama	Memiliki hak suara
		2. Direktur/SEVP <i>user</i> terkait	Memiliki hak suara
		3. SEVP Manajemen AT dan Pengadaan	Memiliki hak suara
Komite Pengadaan III (Nilai >Rp. 7.5 M s.d Rp.20 M)	Anggota	1. Direktur/SEVP <i>user</i> terkait	Memiliki hak suara
		2. SEVP Manajemen AT dan Pengadaan	Memiliki hak suara



## KOMITE DIREKSI

### Tugas dan Tanggung Jawab

1. Melaksanakan pemberian putusan pengadaan secara profesional, jujur, bertanggung jawab, objektif, akuntabel dan seksama.
2. Menghindari benturan kepentingan dalam pemberian putusan pengadaan.
3. Mengevaluasi, memberi masukan atau usul pengadaan yang diajukan.
4. Memberi putusan setuju atau menolak pengadaan sesuai limit wewenangnya.
5. Menandatangani dokumen putusan pengadaan sebagai bukti pemberian putusan pengadaan sebagai wujud tanggung jawab Komite Pengadaan.

### Pedoman Kerja

1. Keputusan Komite diambil dalam suatu rapat Komite Pengadaan.
2. Putusan Komite Pengadaan diambil secara *unanimous* dan dianggap disetujui apabila seluruh Anggota Komite dengan suara yang hadir atau yang mewakili menyatakan setuju.
3. Dalam hal Anggota Komite Pengadaan berhalangan maka tugas dan kewenangan Anggota Komite Pengadaan dimaksud digantikan oleh Direktur atau SEVP Pengganti. Direktur atau SEVP Pengganti dapat bertindak didalam Komite sebagai dua kapasitas yaitu selaku Pejabat Pengganti dan dalam kapasitasnya selaku Anggota Komite Pengadaan.

### Rapat Komite

Berikut data Komite Pengadaan Barang dan Jasa di BRI selama tahun 2017 sebagai berikut:

No.	Nama Komite Pengadaan	Nilai Pengadaan	Jumlah Pengadaan
1	Komite Pengadaan I	> Rp. 200 Miliar	2
2	Komite Pengadaan II	> Rp. 75 Miliar sd. Rp. 200 Miliar	2
3	Komite Pengadaan III	> Rp. 20 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	9
4	Komite Pengadaan IV	> Rp. 7,5 Miliar sd. Rp. 20 Miliar	28

## SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memiliki peranan khusus untuk membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan antara lain, Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada homepage BRI, Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu, Memastikan penyelenggaraan, pengumuman dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan sesuai ketentuan, Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, Sekretaris Perusahaan BRI mempunyai peranan penting sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pihak eksternal seperti regulator pasar modal, pemegang saham, media serta pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Perusahaan juga berperan dalam membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal.

### PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN



**Hari Siaga Amijarso**  
**Sekretaris Perusahaan**

Warga Negara Indonesia, saat ini berdomisili di Jakarta. Usia 52 tahun.

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan BRI sejak 1 Oktober 2015 s/d 22 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Direksi No. R. 226-DIR/KPS/09/2015 tanggal 28 September 2015 serta Keputusan Penggantian Sekretaris Perusahaan Nokep R.13-DIR/KPS/01/2018. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan BRI yang baru tersebut telah dilaporkan kepada OJK dan dipublikasikan melalui situs *web* BRI dan Bursa Efek Indonesia. Memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara dari Universitas Brawijaya, Malang dan memulai karir BRI sejak tahun 1990. Dalam perjalanan karirnya, telah menjabat berbagai posisi antara lain Pimpinan Cabang BRI di berbagai wilayah dan Kepala Biro Direksi Divisi Sekretariat Perusahaan.



**Bambang Tribaroto**  
**Sekretaris Perusahaan**

Warga Negara Indonesia, saat ini berdomisili di Jakarta. Usia 56 tahun.

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan BRI sejak 22 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Direksi No. R. 13-DIR/KPS/01/2018 tanggal 5 Januari 2018 serta Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor: R.07-KOM/01/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Persetujuan Penggantian Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan BRI yang baru tersebut telah dilaporkan kepada OJK dan dipublikasikan melalui situs *web* BRI dan Bursa Efek Indonesia. Memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Gajahmada, Yogyakarta dan memulai karir BRI sejak tahun 1990. Dalam perjalanan karirnya, telah menjabat berbagai posisi antara lain Kepala Biro Direksi BRI, Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Operasional di berbagai wilayah.

### DASAR HUKUM

Pembentukan Sekretaris Perusahaan didasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, di antaranya:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35 / POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012, Bagian Kesembilan mengenai Sekretaris Perusahaan.

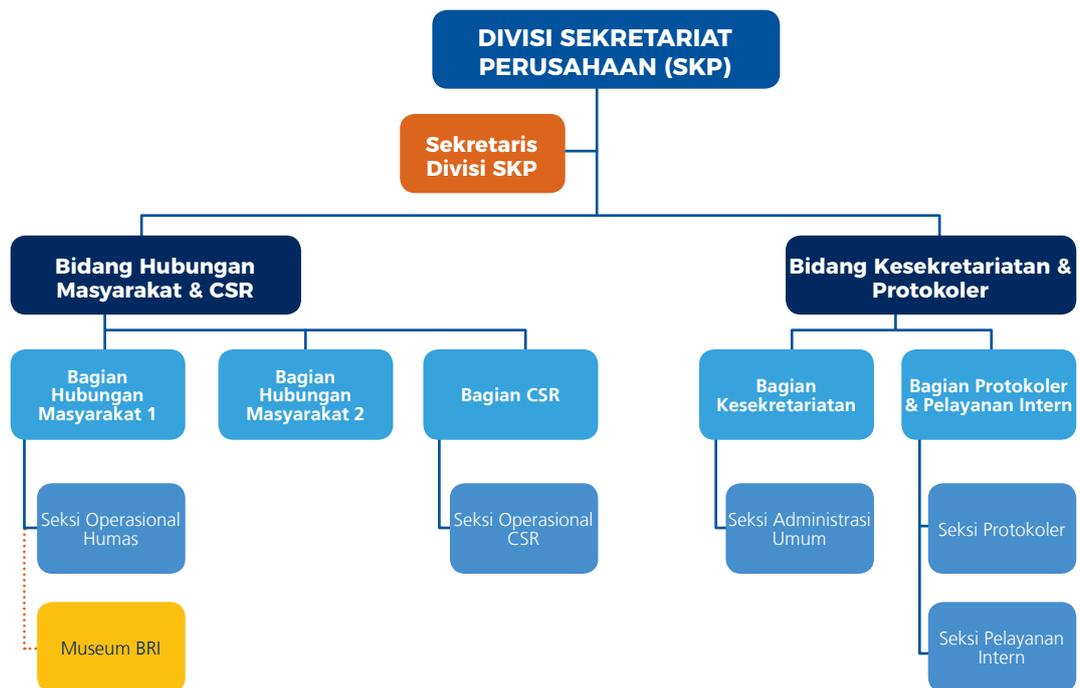
### STRUKTUR ORGANISASI DIVISI SEKRETARIAT PERUSAHAAN BRI

Sekretaris perusahaan BRI bertanggung jawab kepada Direktur Utama atas pelaksanaan tugasnya. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan yang juga merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan dibantu oleh Pejabat setingkat eselon 2 yang membawahi unit kerja Investor Relations, Hubungan Masyarakat dan CSR, serta Kesekretariatan dan Protokoler. Struktur organisasi Divisi Sekretariat Perusahaan BRI adalah sebagai berikut:



## SEKRETARIS PERUSAHAAN

## Struktur Sekretaris Perusahaan



## URAIAN PELAKSANAAN TUGAS

Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab mengikuti perkembangan pasar modal, terutama peraturan yang terkait, untuk memberi masukan kepada Komisaris dan Direksi mengenai kepatuhan terhadap peraturan pasar modal. Selain itu, Sekretaris perusahaan juga bertanggung jawab untuk menerapkan tata kelola yang baik di lingkungan:

- Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS, Rapat Direksi.
- Pengelolaan risiko reputasi, melalui penyampaian keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk didalamnya penyusunan strategi komunikasi dan CSR, serta pengelolaan *website* korporat.
- Penyelenggaraan program orientasi bagi Komisaris dan Direksi perusahaan.
- Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal.
- Sebagai penghubung perusahaan dengan pemegang saham dan regulator di bidang pasar modal seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia serta pemangku kepentingan lainnya.
- Sebagai *spoke person* perusahaan.

## SEKRETARIS PERUSAHAAN

## LAPORAN URAIAN PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2017

## Penyelenggaraan RUPS

Kegiatan RUPS Tahun 2017	Tanggal	Surat	Penyampaian Iklan/Publikasi
RUPST Tahun 2017	15 Maret 2017	R. 24-DIR/SKP/01/2017 tanggal 18 Januari 2017 kepada OJK perihal Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan RUPST 2017	Non Publikasi
		B. 57-SKP/SKR/01/2017 tanggal 6 Februari 2017 kepada OJK perihal Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan RUPST 2017	Publikasi Pengumuman Rencana Pelaksanaan RUPST pada Koran Kontan dan <i>Investor Daily</i> serta situs <i>web</i> Perseroan dan situs <i>web</i> Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Februari 2017.
		B. 59-SKP/SKR/01/2017 tanggal 6 Februari 2017 kepada Bursa Efek Indonesia perihal Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan RUPST 2017	Publikasi Pemanggilan (Undangan) Pelaksanaan RUPST pada Koran Kontan dan <i>Investor Daily</i> serta situs <i>web</i> Perseroan dan situs <i>web</i> Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 Februari 2017.
		B. 107-SKP/SKR/02/2017 tanggal 21 Februari 2017 kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal Pemanggilan & Bukti Iklan Pemanggilan RUPST 2017	Publikasi Ringkasan Risalah RUPST Koran Kontan dan <i>Investor Daily</i> serta situs <i>web</i> Perseroan dan situs <i>web</i> Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Maret 2017.
		B. 105-SKP/SKR/02/2017 tanggal 21 Februari 2017 kepada Bursa Efek Indonesia perihal Pemanggilan & Bukti Iklan Pemanggilan RUPST 2017	Non Publikasi
		B. 179-SKP/SKR/10/2017 tanggal 17 Maret 2017 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia perihal Laporan Pelaksanaan dan Penyampaikan Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPS	Non Publikasi
		B. 219-SKP/SKR/04/2017 tanggal 7 April 2017 kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal Penyampaian Risalah RUPST	Non Publikasi
RUPSLB Tahun 2017	18 Oktober 2017	R. 397-DIR/SKP/08/2017 tanggal 30 Agustus 2017 kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan RUPSLB	Non Publikasi
		B. 451-SKP/SKR/09/2017 tanggal 11 September 2011 kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal Pengumuman & Bukti Iklan RUPSLB 2017	Publikasi Pengumuman Rencana Pelaksanaan RUPSLB pada Koran Kontan dan <i>Investor Daily</i> serta situs <i>web</i> Perseroan dan situs <i>web</i> Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 September 2017.
		B. 453-SKP/SKR/09/2017 tanggal 11 September 2011 kepada Bursa Efek Indonesia perihal Pengumuman & Bukti Iklan RUPSLB 2017	Publikasi Pemanggilan (Undangan) Pelaksanaan RUPSLB pada Koran Kontan dan <i>Investor Daily</i> serta situs <i>web</i> Perseroan dan situs <i>web</i> Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 September 2017.
		B. 466-SKP/SKR/09/2017 tanggal 26 September 2017 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia perihal Pemanggilan & Bukti Iklan Pemanggilan RUPSLB 2017	



## SEKRETARIS PERUSAHAAN

Kegiatan RUPS Tahun 2017	Tanggal	Surat	Penyampaian Iklan/Publikasi
RUPSLB Tahun 2017	18 Oktober 2017	B. 499-SKP/SKR/10/2017 tanggal 20 Oktober 2017 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia perihal Laporan Pelaksanaan dan Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPS	Publikasi Ringkasan Risalah RUPST Koran Kontan dan <i>Investor Daily</i> serta situs <i>web</i> Perseroan dan situs <i>web</i> Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2017.
		B. 516-SKP/SKR/10/2017 tanggal 10 Oktober 2017 kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal Penyampaian Risalah RUPSLB	Non Publikasi

### Penyelenggaraan Public Expose

Pada tahun 2016, Sekretaris Perusahaan telah menyelenggarakan satu kali Public Expose pada tanggal 9 Agustus 2017 di acara Public Expose Marathon yang bertempat di Bursa Efek Indonesia. Penyelenggaraan Public Expose tersebut telah dilaporkan kepada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E sebagai berikut:

Perihal	Tanggal	Informasi tersedia di
Pemberitahuan Rencana Public Expose	26 Juli 2017	Situs <i>web</i> Bursa Efek Indonesia dan situs <i>web</i> Perseroan
Penyampaian Materi Publik Expose	4 Agustus 2017	
Laporan Pelaksanaan Public Expose	14 Agustus 2017	

### Penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Publik

Selama tahun 2017 terdapat 15 kali keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan diunggah ke situs *web* Perseroan dan situs *web* Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:

No	No. Surat	Tanggal	Keterbukaan Informasi
1	B. 576-SKP/SKR/2017	21 Desember 2017	Perubahan Komite Audit
2	B. 551-SKP/SKR/11/2017	24 November 2017	Transaksi Afiliasi Penyertaan Saham
3	B. 534-SKP/SKR/11/2017	10 November 2017	Penandatanganan Perjanjian Bersyarat Penyertaan Modal
4	B. 518-SKP/SKR/11/2017	02 November 2017	Jadwal Pemecahan Nilai Saham ( <i>Stocksplit</i> )
5	B. 311-SKP/SKR/08/2017	08 Agustus 2017	Informasi Tambahan Ringkas Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017
6	B. 369-SKP/SKR/08/2017	03 Agustus 2017	Pemeringkatan Tahunan
7	B. 333-SKP/SKR/07/2017	14 Juli 2017	Pemberitahuan <i>Review</i> Terbatas Laporan Keuangan Triwulan II Tahun 2017
8	B. 334-SKP/SKR/07/2017	22 Juli 2017	Penambahan Modal BRIAgro
9	B. 754-DIR/SKP/06/2017	11 Juli 2017	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
10	B. 315-SKP/SKR/06/2017	22 Juni 2017	Penjelasan Pemberitaan di Media Massa
11	B. 282-SKP/SKR/05/2017	31 Mei 2017	Perubahan Internal Audit
12	B. 193/SKP/SKR/03/2017	24 Maret 2017	Informasi Tambahan PUB Obligasi II Tahap II Tahun 2017
13	B. 179/SKP/SKR/03/2017	20 Maret 2017	Jadwal Dividen Tunai
14	B. 60-SKP/SKR/02/2017	6 Februari 2017	Penjelasan Pemberitaan Media Massa
15	B. 09-SKP/SKR/01/2017	12 Januari 2017	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

## SEKRETARIS PERUSAHAAN

### Penyelenggaraan Program Orientasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Baru

Sekretaris Perusahaan mengkoordinir pelaksanaan program orientasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan menyampaikan diantaranya tugas dan tanggungjawab selaku Direksi dan Dewan Komisaris, Hak dan Kewajiban, peraturan dan ketentuan terkait. Program Orientasi yang telah dijalankan selama tahun 2017 kepada Direksi dan Dewan Komisaris baru yaitu:

- Program Orientasi Direksi dilakukan melalui forum Rapat Direksi, pertemuan taap muka Sekertaris Perusahaan dengan Direksi. Adapun materi orientasi antara lain:
  - Tugas dan tanggung jawab Direksi dan sesuai pembedangan Direksi
  - Visi dan Misi Perusahaan
  - Hak dan Fasilitas Direksi.
- Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru sebagaimana telah di jelaskan program Orientasi Dewan Komisaris.

### Penyelenggaraan dan Dokumentasi Rapat Direksi dan Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris

Pengaturan Jawal, Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sesuai ketentuan pada Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku.

### Pelaksanaan Hubungan Komunikasi dengan Media

Penyelenggaraan komunikasi dengan media (baik media *online* /digital dan media cetak) dilaksanakan melalui penerbitan press release, bertindak sebagai *spoke person* / juru bicara Perusahaan yang bertugas untuk menjawab pertanyaan media, melakukan wawancara/ mendampingi pejabat dalam wawancara bersama media menjalin hubungan baik dengan komunitas media. Menyelenggarakan *press conference* terkait pengumuman penting yang akan memberikan dampak positif bagi perusahaan.

Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga melakukan monitoring atas frekuensi pemberitaan dan isu-isu perusahaan yang menjadi sorotan dalam rangka meminimalisir pemberitaan negatif.

### Pelaksanaan Program Komunikasi Investor

Penyelenggaraan komunikasi dengan pemegang saham dikelola oleh Divisi Hubungan Investor dengan bekerjasama dengan Sekretaris Perusahaan. Dalam rangka menjamin keterbukaan dan transparansi informasi perusahaan baik finansial maupun non finansial secara pantas, wajar dan berimbang, Sekretaris Perusahaan memastikan akses informasi pada situs *web* yang dapat diakses secara luas dan mudah.

### Program Pelatihan Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

No	Materi	Waktu & Tempat	Penyelenggara
1.	Manajemen Risiko	Jakarta, 3 Maret 2017	BRI Corporate University
2.	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)	Jakarta, 14 April 2017	BRI Corporate University
3.	<i>Good Corporate Governance</i>	Jakarta, 7 Juni 2017	BRI Corporate University
4.	Rencana Jangka Panjang BRI 2018 - 2020	Jakarta, 17 Juli 2017	BRI Corporate University
5.	<i>Corporate Communication, Media Handling, Keprotokoleran &amp; event management.</i>	Jakarta, 21- 22 Mei 2017	<i>In House Training</i> , Divisi Sekretariat Perusahaan BRI
6.	<i>Living Wills, Planning for Bank Recovery and Resolution</i>	London, 28-Sep-17	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
7.	<i>Enhancement Special Request</i> materi Kehumasan, CSR, Pelayanan Intern & Protokol BRI / BRI	Jakarta, 22-23 Mei 2017	<i>In House Training</i> , Divisi Sekretariat Perusahaan BRI



## HUBUNGAN INVESTOR



### Ninis K. Adriani

Warga Negara Indonesia, 51 tahun, Ninis K. Adriani menyelesaikan pendidikan S1 dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1989 dan pada tahun 2000 memperoleh gelar MBA dari State New York University at Buffalo.

Beberapa sertifikasi yang telah diikuti antara lain Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3, Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) dan Sertifikasi Kepatuhan Level 1.

Menjabat sebagai *Head of Investor Relations* sejak Juli 2014, dan memulai karier di BRI pada tahun 1990. Dalam perjalanan kariernya, beliau sempat menjabat sebagai *Account Officer* di Divisi Agribisnis, *Expert* di Desk IVP, serta Wakil Kepala Divisi Bisnis Internasional dan Kepala Bagian Hubungan Luar Negeri Divisi Bisnis Internasional.

### Contact Investor Relations

Nama/ Name: Ninis K Adriani

Alamat/ Address: Gedung BRI 1 Lantai 20 Jl. Jend Sudirman Kav 44-46 Jakarta Pusat 10210

Telepon/ Phone: (021) 575 2019 / 1969

Fax: (021) 575 2010

E-mail: ir@bri.co.id

Website: www.ir-bri.com

### Tugas dan Tanggung Jawab

Tanggung jawab utama *Head of Investor Relations* BRI adalah merumuskan strategi dan melakukan fungsi komunikasi terkait kinerja dan strategi perusahaan kepada pemegang saham, pemegang surat hutang, analis dan lembaga pemeringkat BRI.

Dalam rangka memenuhi tanggung jawab dan peraturan serta meningkatkan komunikasi yang efektif, Divisi Hubungan Investor BRI melakukan beragam kegiatan yaitu:

1. *Analyst Meeting*  
Merupakan kegiatan yang dilakukan rutin setiap triwulan dalam rangka pemaparan kinerja BRI kepada para analyst/ perusahaan sekuritas yang bertujuan agar analyst/perusahaan sekuritas tersebut dapat menyajikan report dengan data terkini kepada para investor.
2. *Company visit - field visit*  
Menerima kunjungan dari investor/ analyst yang ingin mengupdate kinerja terkini serta ingin mengetahui dan melihat secara langsung operasi perusahaan baik di kantor pusat maupun di unit kerja operasional.
3. *Conference call*  
Melakukan kegiatan tele-conference untuk mengakomodasi kebutuhan para investor/ analyst dalam mendapatkan informasi perusahaan maupun kondisi perekonomian yang memberikan pengaruh ke bisnis dan operasional perusahaan.
4. *Investor newsletter*  
Update informasi terkini melalui penerbitan newsletter pada *website* hubungan investor BRI.
5. *Investor conference dan non-deal roadshow*  
Melakukan kegiatan komunikasi melalui 1-on-1 meeting maupun group meeting dengan para investor baik di dalam dan luar negeri terutama pada kota-kota pusat keuangan dunia di Asia, Eropa dan Amerika.
6. *Rating Review*  
Melakukan kegiatan komunikasi dan penyampaian data BRI dalam rangka pemeringkatan yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat yang digunakan BRI, baik lembaga pemeringkat internasional (Moody's, Fitch Rating, S&P) maupun lembaga pemeringkat domestik (Pefindo).

## HUBUNGAN INVESTOR

7. Pengelolaan *Website* Hubungan Investor  
Bertujuan agar pemegang saham, pemegang surat hutang, analis, lembaga pemeringkat serta masyarakat umum memiliki kemudahan dalam mengakses informasi terkini dari perusahaan. *Website* yang dikelola oleh Divisi Hubungan Investor tersebut juga terkoneksi dengan *website* perusahaan yaitu [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id).

### Pelatihan Hubungan Investor 2017

Beberapa pelatihan yang telah diikuti oleh Head of Investor Relations, diantaranya:

1. Client *Training Seminar* "Baden-Wuerttemberg" by Commerzbank, Frankfurt, October 2011.
2. Tutorial of Certified Documentary Credit Specialist, International Chamber of Commerce Indonesia, Jakarta, 2011.
3. Investor Relations Seminar, Jakarta, 2008.
4. *Training of Trainer for Risk Management Certification Program Level III*.
5. Small Credit *Training*, Shore Cap Exchange Planters Bank, Manila, Philippine, 2005.
6. Financial Institutions for Private Enterprises Development, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, USA, 2003.

Beberapa pelatihan juga diikuti oleh Kepala Bagian dan staff Divisi Hubungan Investor, diantaranya:

1. Chartered Financial Analyst
2. Business Valuation
3. Querying Microsoft SQL Serve Mini-MBA

### Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017

Beberapa kegiatan komunikasi kepada pemegang saham, pemegang surat hutang, analis dan lembaga pemeringkat BRI yang dilakukan oleh Divisi Hubungan Investor selama tahun 2017 meliputi:

1. Penyelenggaraan *Analyst Meeting* yang dilaksanakan setiap triwulan
2. Kegiatan komunikasi berupa 134 *company visit*, 11 *field visit*, 7 *roadshow* luar negeri, 7 *roadshow* dalam negeri dan 71 *conference call*.
3. Penyelenggaraan *Annual Rating Review* untuk Fitch, Moodys, S&P serta Pefindo.
4. Penyelenggaraan *Public Expose*, RUPS, RUPSLB dan 1 (satu) *Investor Newsletter*.
5. Pengelolaan informasi terkini pada *website* Investor Relations ([www.ir-bri.com](http://www.ir-bri.com)) meliputi:
  - a. Informasi Perusahaan
  - b. Kinerja Keuangan dan Presentasi Perusahaan
  - c. *Corporate Governance*
  - d. Informasi Terkait RUPS
  - e. *Disclosure (Regulatory Filings, Events Calender, Release)*
  - f. Kinerja Saham dan Informasi Surat Berharga yang diterbitkan



## SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dibentuk dengan dilandaskan ketentuan dan regulasi yang berlaku, antara lain:

1. Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 Tanggal 20 September 1999 Tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 Tanggal 23 Desember 2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN.
4. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/2013 Tanggal 18 Februari 2013 Tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 Tanggal 7 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 Tanggal 18 November 2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 Tanggal 25 Mei 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35/SEOJK03/2017 Tanggal 7 Juli 2017 Tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank umum.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 Tanggal 1 Desember 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, SKAI didukung dengan struktur organisasi yang independen, jumlah Auditor yang memadai, pengembangan metodologi dan *tools audit* yang sesuai dengan *best practices*. Berdasarkan hasil evaluasi oleh Kantor Akuntan Publik independen, aktivitas SKAI BRI **Secara Umum Sesuai (*Generally Comply*)** terhadap PBI No. 1/6/PBI/1999 mengenai Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 38/POJK.03/2016, Surat Edaran OJK Nomor 21/SEOJK.03/2017 (Bab VIII–Audit Intern TI), Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal dari *The Institute of Internal Auditors*, dan **sesuai dengan** Piagam Audit Intern.

Di masa mendatang, SKAI diharapkan dapat menjadi **Trusted Advisor** bagi *Auditee* dan mampu memberikan *forward looking insights* kepada *Auditee* dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Untuk dapat berperan sebagai *Trusted Advisor* bagi *Auditee*, maka SKAI perlu untuk meningkatkan/optimalisasi keselarasan fokus dan prioritas audit dengan *key business objectives*, memperluas *risk coverage*, lebih proaktif terhadap *current and emerging risk* yang dihadapi BRI serta meningkatkan sinergi dengan fungsi *1<sup>st</sup> line of defense & 2<sup>nd</sup> line of defense* untuk penyelarasan prioritas risiko.

Memperhatikan beberapa peluang peningkatan peran diatas, maka SKAI mengembangkan beberapa program kerja untuk merespon kebutuhan tersebut melalui pelaksanaan audit tematik yang melibatkan jajaran Kantor Inspeksi Selindo, pengembangan identifikasi *red flags* risiko *fraud*, pengembangan *Enhanced Continuous Auditing* dan pelaksanaan forum komunikasi dengan fungsi *2<sup>nd</sup> line of defense*.

### Kedudukan SKAI dalam Struktur Organisasi BRI

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dalam organisasi BRI berada langsung dibawah Direktur Utama dan dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dalam hal pengawasan dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

## SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep.S.18-DIR/CDS/05/2017 tanggal 23 Mei 2017 dan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.129.e-DIR/REN/08/2012 tanggal 21 Juli 2017 bahwa Satuan Kerja Audit Intern secara struktural berada di bawah pengawasan langsung kepada Direktur Utama yang memiliki akses komunikasi (*communication line*) dengan Dewan Komisaris (dalam hal ini dengan Komite Audit) sehingga dapat mendukung pelaksanaan kegiatan audit dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif. SKAI dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja Audit Intern setingkat *Senior Executive Vice President* (SEVP) yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.

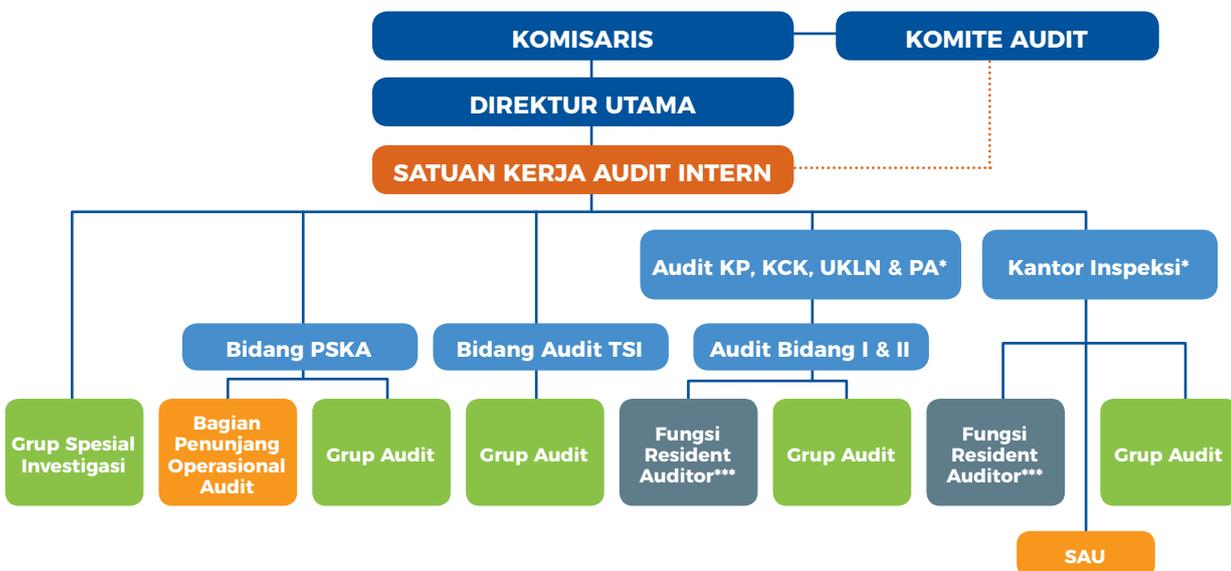
### Struktur Organisasi SKAI BRI

Organisasi SKAI sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.129.e-DIR/REN/08/2012 tanggal 21 Juli 2017 bahwa SKAI secara struktural berada di binaan Direktur Utama yang memiliki akses komunikasi (*communication line*) dengan Dewan Komisaris (dalam hal ini dengan Komite Audit), sehingga dapat mendukung pelaksanaan kegiatan audit dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif.

SKAI BRI dipimpin oleh Kepala SKAI setingkat *Senior Executive Vice President* yang membawahi Audit di Kantor Pusat/ Kantor Cabang Khusus/Unit Kerja Luar Negeri dan Perusahaan Anak, Bidang Audit TSI, 19 (Sembilan Belas) Kantor Inspeksi, Audit Bidang Pengembangan Standar & Kualitas Audit (PSKA), dan Grup Spesial Investigasi.

Berikut adalah Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern:

### Struktur Organisasi SKAI



SKAI secara struktural terdiri dari Unit Kerja yang melaksanakan kegiatan audit dan Pengembangan Standar dan Kualitas Audit sebagai berikut:

1. Unit Kerja yang melaksanakan kegiatan audit sebagai berikut:

a. Kantor Inspeksi

Melaksanakan seluruh kegiatan audit dan pemberian jasa konsultasi sebagai *strategic business partner* dengan objek audit Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan BRI Unit di wilayah kerjanya.



## SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

Saat ini BRI memiliki 19 (sembilan belas) Kantor Inspeksi yang berdampingan dengan 19 Kantor Wilayah BRI. Keberadaan Kantor Inspeksi yang berdampingan dengan Kantor Wilayah merupakan salah satu strategi BRI agar peran SKAI sebagai *Strategic Business Partner* dan fungsi *assurance* dapat lebih efektif dan efisien mengingat struktur organisasi, kewenangan, tugas dan tanggung jawab pengelolaan bisnis dan aset BRI terdesentralisasi.

Pada organisasi Kantor Inspeksi BRI juga terdapat *Resident Auditor* (RA) yang ditempatkan di Kantor Cabang. Pada pelaksanaan fungsinya, Kantor Inspeksi melakukan audit terhadap Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas (KK) setiap tahun, serta BRI Unit. Sedangkan RA melakukan kegiatan audit dan monitoring berkala secara berkesinambungan. RA terdiri dari RA Kantor Cabang dengan objek audit Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas. Sedangkan RA Unit dengan objek audit BRI Unit.

Penempatan RA diseluruh Unit Kerja diharapkan dapat berperan untuk memberikan deteksi dini atas peningkatan risiko di Unit Kerja Operasional. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Kanins dan RA, maka dalam menentukan ruang lingkup audit, Kanins memperhatikan ruang lingkup dan hasil audit, serta monitoring berkala dari RA Kanca dan RA Unit. Demikian sebaliknya. Sinergi dan komunikasi yang terbangun antar Kanins dan RA merupakan faktor utama dalam menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan audit

- b. Audit Kantor Pusat/Kantor Cabang Khusus/Unit Kerja Luar Negeri & Perusahaan Anak  
Melaksanakan seluruh kegiatan audit dan pemberian jasa konsultasi sebagai *strategic business partner* dengan objek audit Unit Kerja Kantor Pusat, Kantor Cabang Khusus, Unit Kerja

Luar Negeri, LJK Konglomerasi Keuangan BRI (Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi), dan Perusahaan Anak diluar LJK Konglomerasi Keuangan BRI yang di miliki BRI lebih dari 50%.

Audit Kantor Pusat/ Kantor Cabang Khusus/ Unit Kerja Luar Negeri dan Perusahaan Anak juga melaksanakan kaji ulang terhadap beberapa hal yang telah diatur oleh regulator diantaranya Manajemen Risiko, Strategi Anti *Fraud*, dan APU PPT.

- c. Bidang Audit TSI  
Melaksanakan kegiatan audit dan pemberian jasa konsultasi sebagai *strategic business partner* terhadap terhadap unit kerja yang terlibat dalam proses pengelolaan dan penggunaan TSI (meliputi proses pengembangan dan operasional aplikasi *Core* dan *Non Core Banking*; operasional infrastruktur TSI pada *Data Center*, *Disaster Recovery Center* & seluruh Unit Kerja; pengamanan informasi; aplikasi; infrastruktur TSI; strategi & kebijakan pengembangan TSI; manajemen risiko TI; penunjang TSI (pengelolaan aset & logistik, pengadaan barang dan jasa IT yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat BRI) serta *End User Computing*).
  - d. Grup Spesial Investigasi  
Melakukan investigasi atas indikasi *fraud* dan pengaduan *whistleblowing system* dengan kewenangan objek audit seluruh Unit Kerja BRI. Grup Spesial Investigasi berada di bawah Kepala Satuan Kerja Audit Intern dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan Kerja Audit Intern.
2. Bidang Pengembangan Standar & Kualitas Audit melakukan penyusunan visi, misi & strategi SKAI, pengkajian organisasi SKAI, pengelolaan sumber daya SKAI, penyusunan kebijakan & prosedur audit, pengelolaan sarana penunjang audit (*Audit Tools*), pengembangan kualitas audit, pengkajian dan perancangan *software* maupun *hardware* untuk menunjang pelaksanaan kegiatan audit. Berikut adalah posisi 19 (Sembilan belas) Kantor Inspeksi:

## SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

Sebaran Unit Kerja Audit tercermin dalam gambar sebagai berikut:



### Piagam Internal Audit

Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Nokep: 08-KOM/BRI/08/2015; Nokep: S.17-DIR/AIN/08/2015 tanggal 11 Agustus 2015. Piagam Audit Intern disusun guna memberikan gambaran dan pedoman mengenai visi, misi, kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, kode etik Auditor Intern, Independensi dan Objektivitas, dan ruang lingkup pekerjaan audit intern dalam organisasi.

### Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

SKAI bertanggungjawab melaksanakan kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasional. SKAI membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian intern dan proses *governance*. Sebagaimana diatur dalam Piagam Audit Intern, tugas dan tanggung jawab SKAI mencakup:

- Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- Menyusun dan melaksanakan Perencanaan Audit Tahunan.
- Membuat analisis dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang Keuangan, Akuntansi, Operasional, Sumber Daya Manusia, Pemasaran, Teknologi Informasi dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- Memberikan penilaian tingkat keyakinan kualitas pelaksanaan tugas atas proses manajemen risiko, sistem pengendalian intern dan tata kelola usaha telah dilaksanakan secara cukup dan efektif di seluruh Unit Kerja BRI.
- Melaksanakan audit di semua Unit Kerja BRI antara lain Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, BRI Unit, Kantor Cabang Luar Negeri/Kantor Perwakilan Luar Negeri dan LJK Konglomerasi Keuangan BRI (Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi) serta Perusahaan Anak diluar LJK Konglomerasi Keuangan BRI dimana kepemilikan saham oleh BRI lebih dari 50% secara independen, obyektif dan profesional.
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.



## SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

10. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
11. Bekerjasama dengan Komite Audit dalam melakukan pengawasan dan memonitor pelaksanaan tindak lanjut perbaikan atas temuan SKAI.
12. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan SKAI.

### Tugas dan Tanggung Jawab Kepala SKAI

Kepala SKAI melaporkan kegiatan audit intern kepada Direktur Utama secara berkala. Sesuai Piagam Audit Intern, tugas dan tanggung jawab Kepala SKAI antara lain:

1. Mengelola SKAI secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan nilai tambah bagi BRI.
2. Mengkoordinasikan penyusunan dan penyempurnaan strategi SKAI untuk menjamin keselarasannya dengan visi, misi dan strategi BRI.
3. Mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan Perencanaan Audit Tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Audit Intern.
4. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan audit sehingga proses audit dilakukan secara independen, objektif dan profesional sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan.
5. Mengarahkan dan mengkoordinasikan Organisasi, Sumber Daya, Kebijakan dan Prosedur Audit untuk meningkatkan kualitas audit dan nilai tambah peran SKAI dalam organisasi.

### Kode Etik Audit Intern BRI

SKAI BRI memiliki kode etik yang harus dipatuhi oleh Auditor Intern baik secara individu maupun kelompok dalam melaksanakan kegiatan audit untuk meningkatkan budaya etik dalam Profesi Audit Intern. Kode Etik Auditor BRI terdiri dari 4 prinsip yaitu:

#### 1. Integrity principle

Membangun kepercayaan yang menjadi dasar berpijak auditor intern yang profesional.

#### 2. Objectivity principle

Mempraktekkan perilaku objektif dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktifitas/ kegiatan yang sedang diaudit.

Auditor Intern membuat penilaian secara bebas (independen) dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sendiri atau pendapat orang lain dalam memberikan pendapat profesionalnya.

#### 3. Confidentiality principle

Menghargai nilai dari informasi yang diterima dan kepemilikan informasi serta tidak membocorkan informasi yang diperoleh tanpa mendapat kuasa kecuali demi hukum atau profesi.

#### 4. Competency principle

Menggunakan ketrampilan, pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam melaksanakan audit.

Komitmen Auditor Intern terhadap Kode Etik dinyatakan dengan menandatangani Deklarasi Kode Etik Audit Intern dan diperbaharui setiap tahun. Hal ini dilakukan agar setiap Auditor diingatkan kembali akan adanya Kode Etik yang harus dijunjung tinggi dan ditaati.

### Independensi Audit Intern BRI

SKAI sebagai 3<sup>rd</sup> *line of defense* secara struktural telah independen terhadap fungsi 1<sup>st</sup> *line of defense* (Unit Kerja Operasional) dan fungsi 2<sup>nd</sup> *line of defense* (Jajaran Manajemen Risiko, dan Jajaran Kepatuhan).

Kedudukan SKAI dalam perusahaan berada dibawah pengawasan langsung Direktur Utama, serta memiliki akses komunikasi (*communication line*) dengan Dewan Komisaris (dalam hal ini dengan Komite Audit), maka hal tersebut mendukung independensi & objektivitas pelaksanaan dan pelaporan audit, sehingga dapat mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan BRI. Komunikasi SKAI dengan Komite Audit adalah dalam bentuk koordinasi maupun penyampaian laporan hasil audit secara rutin. Untuk menjaga objektivitas Auditor Intern, dilakukan perubahan penugasan secara berkala.

## SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

### Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua SKAI

SKAI BRI dipimpin oleh Kepala SKAI setingkat *Senior Executive Vice President* yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan Bank Indonesia & Bapepam Lembaga Keuangan (saat ini OJK). Pengangkatan Kepala SKAI telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### Profil Ketua SKAI



#### Tri Wintarto

Senior Executive Vice President  
Satuan Kerja Audit Internal

**Lahir** di Cilacap, 22 Desember 1962. Lulusan Universitas UPN Veteran Yogyakarta tahun 1987 dan Universitas Lampung tahun 2002.

#### Pengalaman Professional/Kerja:

- Pemimpin Cabang (1993-2009)
- Wakil Pemimpin Wilayah BRI Manado (2009-2010)
- Wakil Pemimpin Wilayah BRI Malang (2010-2011)
- Pemimpin Wilayah BRI Manado (2011-2012)
- Kepala Divisi Pembinaan Bisnis Mikro 1 (2012-2013)
- Kepala Divisi Pembinaan Bisnis Mikro 2 (2013-2014)
- Pemimpin Wilayah BRI Bandar Lampung (2014-2015)
- Pemimpin Wilayah BRI Bandung (2015)
- Kepala Divisi Bisnis Program (2016)
- Inspektur Kanins BRI Jakarta 3 (2016-2017)
- Inspektur Kanins BRI Jakarta 1 (2017)

Dan saat ini menjabat sebagai Senior Executive Vice President Satuan Kerja Audit Intern.

Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris PT Bringin Sejahtera Makmur (2013). Saat ini beliau aktif terlibat sebagai Ketua Umum Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB) dan Ketua Yayasan Baitul Mal BRI (2013-sekarang).

#### Pelatihan/Training yang diikuti

Aktif mengikuti berbagai pelathan dan seminar diantaranya Pendidikan Sekolah dan Pimpinan Bank (Sespibank) di Jakarta-Switzerland (2016), The Victoria Indonesia Leadership Program (VILP) di Melbourne (2016), Pendidikan dan Uji Sertifikasi QIA di Jakarta (2017), dan BARA Risk Forum di Prague & Vienna (2017).

#### Pembicara

Aktif sebagai pembicara dalam Konferensi IX Ikatan Auditor Intern Bank di Surabaya (2017), National *Anti Fraud Conference* di Yogyakarta (2017) dan *Fraud Management Sespibank Angkatan 67* di Jakarta (2017).

#### Sertifikasi

Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (2017), *General Banking Level 3* (2015) dan Sertifikasi Manajemen Risiko. Level 4 (2012).



## SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

### Profil dan SDM Satuan Kerja Audit Intern BRI

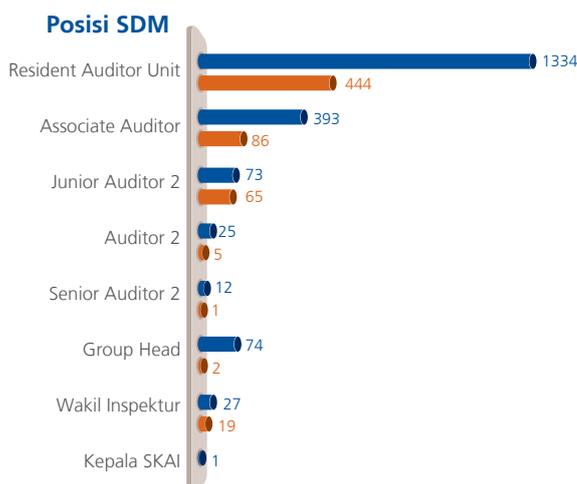
Membangun auditor yang berkualitas menjadi salah satu fokus utama SKAI setiap tahun. Melalui berbagai program peningkatan kompetensi Auditor, SKAI terus berupaya menyediakan tenaga auditor yang berkualitas, memiliki kompetensi dan memahami tingkat risiko dimasing-masing wilayah kerja audit. SKAI senantiasa melakukan pengkinian profil kompetensi auditor untuk mengidentifikasi *gap* kompetensi dan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kedepannya.

Oleh karena hal tersebut, SKAI bekerjasama dengan BRI *Corporate University* dalam mengembangkan kompetensi auditor yang dilakukan melalui *sustainable education* yang diharapkan dapat memberikan pembekalan secara memadai kepada auditor untuk menjalankan tugas auditnya. *Sustainable education* dilakukan melalui penugasan langsung baik sesuai dengan bidang pekerjaan dan diluar bidang pekerjaan untuk meningkatkan *skill* auditor melalui *On The Job Training* dan pendidikan (*Inclass, In House Training, Public Course* dan Seminar).

Secara berkala, perkembangan kompetensi auditor dilakukan *monitoring*, evaluasi dan tindak lanjut pengembangan kompetensi baik melalui penugasan, *training* dan lain sebagainya. Program pengembangan dan peningkatan kompetensi pekerja di jajaran SKAI dilakukan *monitoring* secara tertib untuk memastikan terdapatnya peningkatan kemampuan dan keterampilan auditor.

### Jumlah Auditor dan Jabatannya

Sampai dengan 31 Desember 2017 posisi SDM SKAI berjumlah:



### Sertifikasi Profesi Audit Internal BRI

Untuk memastikan pelaksanaan tugas audit yang berkualitas, SKAI BRI didukung tenaga audit profesional yang diantaranya telah bersertifikat nasional maupun internasional sebagai berikut:

Sertifikasi	Jumlah
CFE (Certified <i>Fraud</i> Examiner)	34
QIA (Qualified Internal Auditor)	46
CISA (Certified Information System Audit)	5
CEH (Certified Ethical Hacker)	1
CGEIT (Certified In The Governance of Enterprise IT)	1
CDCP (Certified Data Center Professional)	1
CFSS (Certified Forensic Security Specialist)	1
Big Data Administrator	4
<b>Total</b>	<b>93</b>

### Kualifikasi Pendidikan Formal

Kualifikasi pendidikan formal berdasarkan level jabatan adalah sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan Formal	S3	S2	S1	Lainnya
Kepala SKAI		1		
Inspektur		13	6	
Wakil Inspektur		16	12	
Kepala Bidang		1	1	
Group Head	1	25	46	
Senior Auditor 2		5	7	
Senior Auditor 1		1	3	1
Auditor 2		2	26	2
Auditor 1		2	61	
Junior Auditor 2			73	1
Junior Auditor 1		2	85	
Associate Auditor			393	

### Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi Audit Intern BRI

Selama tahun 2017 SKAI telah melaksanakan pendidikan, *public course* dan seminar (baik yang diselenggarakan oleh lembaga internal maupun eksternal BRI) kepada 5.145 peserta didik. Adapun rekapitulasi pendidikan yang telah diselenggarakan meliputi:

## SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

### Rekapitulasi Jumlah Peserta Pendidikan, Seminar dan Workshop

No	Jenis Pendidikan	Peserta Pendidikan
1	Pendidikan <i>In House Training</i>	4.438
2	<i>Public course</i> dalam negeri	445
3	Pendidikan pembekalan audit	155
4	Pendidikan sertifikasi	99
5	<i>Public course</i> luar negeri	8
<b>TOTAL</b>		<b>5.145</b>

### Program Kerja SKAI BRI

Berikut adalah beberapa program kerja SKAI 2017 antara lain:

1. Strategi & Metodologi
  - a. Penyusunan Perencanaan Audit Tahunan (PAT) dan pelaksanaan audit yang selaras dengan tujuan & strategi perusahaan dan profil risiko.
  - b. Pelaksanaan audit tematik dengan tema *e-channel* dan *cyber security* dalam rangka mengawal pencapaian Rencana Bisnis Bank.
  - c. Pelaksanaan *mandatory audit* terhadap RTGS, SKNBI, Daftar Hitam Nasional, BI-ETP (*Electronic Trading Platform*), BI SSSS, dan Produk Aktivitas Baru e-Banking.
  - d. Pelaksanaan kaji ulang penerapan manajemen risiko, kaji ulang penerapan strategi anti *fraud*, kaji ulang penerapan APU PPT.
  - e. Kajian penyalarsan/*mapping risk issue* SKAI dan Manajemen Risiko.
  - f. Pengkinian dan penyusunan program audit.
  - g. Penyusunan petunjuk pelaksanaan *mandatory audit*
  - h. Penyusunan petunjuk pelaksanaan Monitoring Berkala untuk *Resident Auditor*.
  - i. Penyusunan *key risk indicator red flags* risiko *fraud*
  - j. Penyusunan laporan hasil audit terintegrasi.
  - k. Penyusunan laporan dengan tema spesifik sesuai perkembangan atau *issue-issue* terkini.
  - l. Peningkatan monitoring penyelesaian tindak lanjut hasil audit dari Auditor Eksternal dan Pengawas.
  - m. Pemantauan fungsi SKAI LJK Konglomerasi Keuangan BRI.

2. Organisasi  
Usulan pengembangan organisasi dan manning analisis formasi SKAI.
3. Peningkatan Mutu Kualitas Audit
  - a. Pelaksanaan *surveillance* ISO 9001:2008.
  - b. Resertifikasi ISO 9001:2015
  - c. Pelaksanaan *review* kesesuaian fungsi SKAI terhadap SPFAIB oleh pihak independen.
4. Teknologi  
Pengembangan Pusat Data Elektronik (PDE), BRI *Data Extractor* (BRIdex), BRI Sistem Manajemen Audit (BRISMA Versi 2.0), dan Aplikasi *Customer Satisfaction Survey* (CSS) versi 2.0.
5. Sumber Daya Manusia
  - a. Pelaksanaan sertifikasi bagi Auditor untuk mendukung efektivitas peran *assurance* dan *strategic business partner*.
  - b. Pelaksanaan pendidikan, seminar atau *workshop* yang mendukung strategi perusahaan

### Metodologi Audit

Satuan Kerja Audit Intern menerapkan metodologi *risk based audit* (RBA) yang diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan tingkat kematangan manajemen risiko secara korporat. Penetapan *audit universe* dilakukan dengan memperhatikan tujuan perusahaan, evaluasi terhadap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan perusahaan dan memastikan sistem pengendalian intern yang ada telah dapat memitigasi risiko. Dengan metodologi tersebut, maka pelaksanaan audit difokuskan pada area yang memiliki potensi risiko yang tinggi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pelaksanaan *risk based audit*, SKAI menggunakan *Computer Assisted Audit Technique* (CAAT's) sebagai *analytical tools audit* untuk menentukan prioritas audit, ruang lingkup dan sampel audit.

Disamping kegiatan audit, Satuan Kerja Audit Intern melaksanakan deteksi dini (*early warning signal*) terhadap potensi risiko *fraud* melalui kegiatan *monitoring off site* yang dilaksanakan Kanins serta melalui kegiatan monitoring berkala yang dilaksanakan *Resident Auditor*. Peran audit dalam *Early Warning Signal* diharapkan dapat memberikan deteksi dini atas peningkatan risiko yang terjadi di Unit Kerja.



## SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

Untuk mewujudkan peran SKAI sebagai *Strategic Bisnis Partner* telah dilakukan beberapa hal diantaranya penyampaian saran, ide & masukan untuk penyempurnaan draft dan kebijakan; melakukan forum komunikasi antara Kantor Inspeksi dan Kantor Wilayah; Program Auditor Mengajar; kegiatan konsultasi; dan *sharing knowledge*; khususnya terkait dengan pengendalian intern, manajemen risiko dan GCG. Kegiatan tersebut merupakan wujud visi SKAI sebagai SBP yang tangguh dan terpercaya untuk dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam rangka mencapai visi BRI. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan budaya sadar risiko, budaya kepatuhan dan budaya GCG di seluruh Unit Kerja serta pekerja BRI.

### Uraian Pelaksanaan Kegiatan Unit Audit Internal Tahun 2017

#### Program Kerja dan Pelaksanaan Program Kerja

Berikut adalah beberapa program kerja SKAI yang telah dilakukan selama tahun 2017 antara lain:

No	Program Kerja	Pelaksanaan
1	Strategi & Metodologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan audit yang selaras dengan tujuan &amp; strategi perusahaan dan profil risiko.</li> <li>b. Pelaksanaan audit tematik dengan tema <i>e-channel</i> dan <i>cyber security</i> dalam rangka mengawal pencapaian Rencana Bisnis Bank.</li> <li>c. Pelaksanaan <i>mandatory audit</i> terhadap RTGS, SKNBI, Daftar Hitam Nasional, BI-ETP (<i>Electronic Trading Platform</i>), BI SSSS, dan Produk Aktivitas Baru e-Banking.</li> <li>d. Pelaksanaan kaji ulang penerapan manajemen risiko, kaji ulang penerapan strategi anti <i>fraud</i>, dan kaji ulang penerapan APU PPT.</li> <li>e. Kajian penyesuaian/<i>mapping risk issue</i> SKAI dan Manajemen Risiko.</li> <li>f. Pengkinian dan penyusunan program audit.</li> <li>g. Pengkinian form CSS versi 2.0.</li> <li>h. Penyusunan Juklak Kegiatan Audit (<i>Mandatory Audit</i> Sesuai Ketentuan Regulator).</li> <li>i. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Berkala untuk <i>Resident Auditor</i>.</li> <li>j. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Supervisi untuk Unit Kerja Audit Delivery dan <i>Resident Auditor</i>.</li> <li>k. Penyusunan <i>key risk indicator red flags</i> risiko <i>fraud</i>.</li> <li>l. Penyusunan laporan hasil audit terintegrasi.</li> <li>m. Penyusunan laporan dengan tema spesifik sesuai perkembangan atau <i>issue-issue</i> terkini.</li> <li>n. Peningkatan monitoring penyelesaian tindak lanjut hasil audit dari Auditor Eksternal dan Pengawas.</li> <li>o. Pemantauan fungsi SKAI LJK Konglomerasi Keuangan BRI</li> </ul>
2	Organisasi	Penyampaian usulan pengembangan organisasi dan manning analisis formasi SKAI
3	Peningkatan Kualitas Mutu Audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan <i>surveillance</i> ISO 9001:2008 ke 6 tahun 2017.</li> <li>b. Resertifikasi ISO 9001:2015.</li> <li>c. Pelaksanaan <i>review</i> kesesuaian fungsi SKAI terhadap SPFAIB oleh pihak independen (PT Delloite Indonesia).</li> </ul>
4	Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan <i>Analytical Tools Audit</i>: Pengembangan Pusat Data Elektronik (PDE) dan BRI Data Extractor (BRIdex).</li> <li>b. Pengembangan BRI Sistem Manajemen Audit (BRISMA Versi 2.0).</li> <li>c. Pengembangan Aplikasi <i>Customer Satisfaction Survey</i> (CSS) versi 2.0.</li> </ul>
5	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan kriteria <i>Best Excellence Award</i> jajaran SKAI.</li> <li>b. Pelaksanaan sertifikasi bagi Auditor untuk mendukung efektivitas peran <i>assurance</i> dan <i>strategic business partner</i>.</li> <li>c. Pelaksanaan pendidikan, seminar atau <i>workshop</i> yang mendukung strategi perusahaan.</li> </ul>

## SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

### Pelaksanaan Kegiatan/Tugas Audit

Kegiatan audit dilaksanakan sesuai Perencanaan Audit Tahunan (PAT) yang telah mendapat persetujuan Direktur Utama dan Komisaris Utama serta berdasarkan hasil *assessment* terhadap potensi risiko. Selama tahun 2017, SKAI telah melaksanakan kegiatan audit reguler, audit khusus (*special audit*) dan audit tematik. Secara terperinci, realisasi kegiatan audit yang telah dilaksanakan meliputi:

#### a. Audit reguler

Obyek kegiatan audit egular SKAI terbagi kedalam 2 (dua) kelompok, yaitu: Unit Kerja dan Jaringan Elektronik (*electronic channel*). Realisasi kegiatan audit egular terhadap Unit Kerja adalah sebagai berikut:

**Tabel Realisasi Audit Terhadap Unit Kerja**

No	Obyek Audit	Target	Realisasi	%
1	Divisi	36	39	108%
2	Kantor Wilayah	38	38	100%
3	Kantor Cabang	462	462	100%
4	Kantor Cabang Pembantu	608	608	100%
5	Kantor Kas	330	427	129%
6	BRI Unit (termasuk Teras BRI)	1.816	2.442	134%
7	SAU	18	18	100%
8	Audit Teknologi Sistem Informasi	12	13	108%

Realisasi kegiatan audit reguler terhadap jaringan elektronik (*electronic channel*) adalah sebagai berikut:

**Tabel Realisasi Audit Terhadap Jaringan Elektronik**

No	Audit	Total E- Channel	PAT Reguler 2017		Audit Reguler	%
			Jumlah	%		
1	E Channel	150,719	33,521	22%	52,562	156.80%
	Total s/d TW. IV 2017 :	150,719	33,521	22%	52,562	156.80%

#### b. Audit khusus (*special audit*)

Audit khusus (*special audit*) dilaksanakan dengan ruang lingkup dan tujuan tertentu (baik atas inisiatif SKAI, manajemen, *auditee* atau dilaksanakan untuk tujuan pemenuhan ketentuan regulator).

Pada tahun 2017 SKAI telah melaksanakan 370 audit khusus.

#### c. Audit tematik

Audit tematik dilaksanakan untuk mendapatkan profil kecukupan dan efektivitas pengendalian intern secara menyeluruh.

Pada tahun 2017, SKAI telah melaksanakan audit tematik sebagai berikut:

- Audit IT Tematik Cyber Security
- Audit Tematik E Banking dan E Channel



## SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

Jumlah audit khusus		
No	Unit Kerja/Project Audit	Khusus (SA)
<b>Kanins Kanpus dan Audit TSI</b>		
1	Divisi ( KCK, UKLN, PA )	12
2	Project Audit (oleh Audit TSI)	14
<b>Kanins (Wilayah)</b>		
1	Kanwil	32
2	Kanca	154
3	KCP	29
4	Kantor Kas	0
5	Unit	129
6	SAU	0
Total s/d TW. IV 2017 :		370

### Sistem Manajemen Mutu Audit

Dalam rangka menjamin kualitas pelaksanaan audit, dilakukan penilaian kualitas (*quality assurance*) oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Penilaian kualitas oleh pihak internal dilakukan melalui supervisi, *peer review*, dan *quality assurance*. Sedangkan penilaian kualitas oleh pihak eksternal dilakukan melalui *surveillance* ISO 9001:2008, serta untuk memastikan fungsi audit intern sesuai dengan SPFAIB dilaksanakan setiap 3 tahun oleh konsultan independen.

*Surveillance* ISO 9001:2008 berfokus pada kesesuaian penerapan sistem manajemen mutu (SMM) SKAI BRI dengan standar ISO 9001:2008. *Surveillance* ISO 9001:2008 *visit* ke 6 untuk tahun 2017 telah dilaksanakan dengan hasil **tidak ada temuan (*non conformities*) Minor maupun Major**. Adapun target kesesuaian penerapan sistem manajemen mutu SKAI BRI adalah *tidak ada non-conformities (ketidaksesuaian) dengan standar ISO 9001:2008 yang bersifat Major*.

*Review* oleh Kantor Akuntan Publik telah dilakukan sebagai berikut:

1. Telaah kesesuaian pelaksanaan aktivitas *internal audit* yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) BRI terhadap PBI No.1/6/PBI/1999 mengenai Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dengan kesimpulan **Secara Umum Sesuai (*Generally Comply*)** terhadap PBI No. 1/6/PBI/1999

mengenai Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank. Adapun target sasaran mutu penilaian kesesuaian fungsi Audit Intern dengan SPFAIB oleh pihak eksternal adalah secara umum sesuai dengan SPFAIB.

2. Telaah kesesuaian pelaksanaan aktivitas *internal audit* yang dilakukan oleh Audit Intern Teknologi Sistem Informasi (TSI) BRI terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 dan SEOJK Nomor 21/SEOJK.03/2017, mengenai Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern TI Bank untuk meningkatkan proses kerja Audit TSI BRI dengan kesimpulan **Secara Umum Sesuai (*Generally Comply*)** terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 38/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK Nomor 21/SEOJK.03/2017 (Bab VIII–Audit Intern TI).

Kajian kesesuaian pelaksanaan aktivitas Audit Intern Bank Rakyat Indonesia terhadap *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* (ISPPA) yang dikeluarkan oleh *Institute of Internal Auditors* (IIA) dengan kesimpulan **Umumnya Sesuai** dengan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal dari *The Institute of Internal Auditors*, dan SKAI telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Piagam Audit Intern.

### Efektivitas Pelaksanaan Audit Intern

#### 1. Pelaksanaan Tugas Audit

SKAI BRI melaksanakan program *review* untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit yang dilakukan oleh jajaran SKAI BRI guna melakukan perbaikan yang berkesinambungan.

##### a. *Review Intern*

SKAI melaksanakan *review* secara berkesinambungan atas kualitas pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Unit Kerja Audit BRI. Tujuannya adalah untuk menjamin tercapainya target sasaran mutu yang telah ditetapkan. *Review* dilaksanakan dengan 3 metode yakni *Quality Assurance* (QA), *Peer Review* dan Supervisi:

- 1) Kegiatan QA dilakukan pada seluruh UKA Fungsi *Delivery*, RA Kanca dan RA Unit.

## SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

- 2) Penilaian *peer review* yaitu penilaian kualitas audit yang dilakukan antar tim audit.
- 3) Supervisi yaitu penilaian kualitas audit yang dilakukan oleh atasan auditor pada setiap project audit.

Penilaian kualitas pelaksanaan audit tersebut merupakan salah satu *Key Performance Indicator* dalam penilaian kinerja.

### b. Review Ekstern

Untuk menjamin fungsi SKAI BRI telah dilaksanakan sesuai sistem manajemen mutu ISO 9001:2008, PT SGS Indonesia akan melakukan *surveillance* yang pelaksanaannya akan dilakukan setiap semester.

### c. Customer Satisfaction Survey (CSS)

Pelaksanaan fungsi audit intern sesuai sistem manajemen mutu tetap berfokus pada kepuasan pelanggan/*stakeholders*. Salah satu pelanggan utama SKAI adalah pihak *Auditee*. Karenanya kepuasan *Auditee* tetap akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai kualitas pelaksanaan audit.

## 2. Wujud Koordinasi dengan Eksternal dan Komite Audit

Pemeriksaan terhadap BRI dilakukan pula oleh eksternal auditor yakni Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Dalam kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh eksternal auditor, SKAI berperan sebagai *liaison officer* untuk mengkoordinir kelancaran pelaksanaan audit serta melakukan pemantauan atas tindak lanjut perbaikan dari temuan eksternal auditor oleh unit kerja terkait. Pemantauan bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen telah melakukan perbaikan atas kelemahan pengendalian intern yang ditemukan oleh eksternal auditor.

SKAI BRI sebagai *Liaison Officer* bagi Auditor Eksternal dan Pihak Eksternal yang berkaitan dengan kegiatan audit melakukan hal-hal berikut:

- a. Komunikasi dan koordinasi secara berkesinambungan
- b. Pemenuhan data sesuai permintaan (terkait dengan kapasitasnya melakukan kegiatan pemeriksaan maupun pengawasan)
- c. Pendampingan terhadap Pihak Eksternal BRI (terkait dengan kapasitasnya melakukan kegiatan pemeriksaan maupun pengawasan)
- d. Menindaklanjuti setiap tanggapan yang disampaikan oleh Pihak Eksternal BRI (terkait dengan kapasitasnya melakukan kegiatan pemeriksaan maupun pengawasan).
- e. Monitoring tindak lanjut perbaikan atas temuan Pihak Eksternal secara memadai.

Dalam rangka membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan memonitor pelaksanaan tindak lanjut perbaikan atas temuan SKAI, maka SKAI BRI melakukan komunikasi secara berkala dengan Komite Audit dalam bentuk penyampaian Laporan Triwulanan SKAI.

### Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit

SKAI secara rutin melakukan pemantauan pelaksanaan komitmen manajemen untuk memperbaiki kelemahan pengendalian intern serta memberikan opini kecukupan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilaksanakan manajemen. Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan komitmen manajemen sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel Hasil Monitoring Komitmen Manajemen**

No	Hasil Monitoring RPM	%
1	Memadai	92.38%
2	Masih Dalam Proses Pemantauan	1.92%
3	Tidak Memadai	5.70%
<b>Total</b>		<b>100%</b>

Disamping pemantauan terhadap tindak lanjut temuan SKAI, dilakukan pemantauan *progress* tindak lanjut dan perbaikan berdasarkan temuan Auditor Eksternal dan Pengawas. Hasil pemantauan komitmen manajemen terhadap temuan Auditor Eksternal dan Pengawas sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:



## SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

No	Auditor Eksternal / Pengawas	Jumlah Temuan	Tindak Lanjut			
			Telah Selesai		Dalam Pemantauan	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	BPK RI	480	441	91.88%	39	8.13%
2	Otoritas Jasa Keuangan	364	359	98.63%	5	1.37%
3	Kantor Akuntan Publik	134	115	85.82%	19	14.18%
4	Bank Indonesia	166	154	92.77%	12	7.23%

### Program dan Strategi SKAI 2018

Untuk dapat berperan sebagai *Trusted Advisor* bagi manajemen dan mampu memberikan *forward looking insights* kepada manajemen dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis, maka SKAI perlu untuk meningkatkan/optimalisasi keselarasan fokus dan prioritas audit dengan *key business objectives*, memperluas *risk coverage*, lebih proaktif terhadap *current and emerging risk* yang dihadapi BRI serta meningkatkan sinergi dengan fungsi *2<sup>nd</sup> line of defense* untuk penyalarsan prioritas risiko.

Berikut beberapa program kerja dan strategi SKAI tahun 2018:

#### 1. Strategi & Metodologi

- Perencanaan dan pelaksanaan audit yang selaras dengan tujuan & strategi perusahaan dan profil risiko.
- Pelaksanaan Uji Coba Audit Tematik Selindo dan Lokal (khusus Kanins)
- Pelaksanaan *mandatory audit* terhadap RTGS, SKNBI, Daftar Hitam Nasional, BI-ETP (*Electronic Trading Platform*), BI SSSS, dan Produk Aktivitas Baru e-Banking.
- Pelaksanaan kaji ulang penerapan manajemen risiko, dan kaji ulang penerapan strategi anti *fraud*.
- Pengembangan metodologi audit tematik untuk Kanins, dan petunjuk audit Tematik untuk Audit KP & Audit TSI.

- Review* dan pengkinian Panduan Audit Intern sesuai dengan *best practices*.
- Penyusunan Pedoman Umum Audit Grup BRI.
- Pengkinian dan penyusunan program audit.
- Pengembangan & penyusunan *Internal Control Checklist*.
- Penyusunan petunjuk pelaporan *fraud* audit / investigasi
- Penyampaian *highlight* temuan (Major dan *Fraud*) kepada Direktur Pembina.

#### 2. Teknologi

- Pengembangan otomatisasi *red flags* risiko *fraud*.
- Implementasi penyampaian laporan audit secara elektronik.
- Pelaksanaan *surveillance* ISO 9001:2015
- Pengembangan Sistem Manajemen Audit
- Pengembangan *Continuous Auditing*

#### 3. Sumber Daya Manusia

- Pengembangan standar kompetensi Auditor Intern
- Pengembangan Kurikulum Pendidikan Audit
- Pengembangan kurikulum untuk *refreshment* Auditor

#### 4. Peningkatan Mutu Kualitas Audit

- Pelaksanaan *surveillance* ISO 9001:2015
- Resertifikasi ISO 9001:2015.

# AKUNTAN PUBLIK

## Fungsi Audit Eksternal

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional dan bisnis BRI, selain audit internal, fungsi pengawasan BRI juga dilaksanakan oleh fungsi audit eksternal dalam hal ini Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik

## Penunjukan Auditor Eksternal

Sesuai hasil RUPST BRI pada tanggal 17 Maret 2017 pada Mata Acara Rapat keempat menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017.

## Prosedur Penunjukkan KAP

Komite Audit terlibat dalam proses pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu sebagai pengawas, sebagaimana tertuang dalam SK Tim seleksi pengadaan KAP.

Secara detail prosedur dan tahapan pelaksanaan pemilihan dan penunjukan KAP untuk periode audit laporan keuangan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan
1	Permohonan Alokasi Anggaran ke Divisi Manajemen Aktiva Tetap
2	Permohonan Ijin Pelaksanaan kepada Dekom
3	Presentasi kepada Komite Audit
4	Pembahasan Time Schedule dan Tim Seleksi
5	Penyusunan dan Finalisasi <i>Request for proposal, Term of Reference</i> dan Kriteria Penilaian
6	Ijin Prinsip Pelaksanaan dan Penggunaan Anggaran
7	Penetapan Owner Estimated
8	Ijin Prinsip Pengadaan
9	Pengiriman Undangan kepada KAP-KAP
10	Aanwijzing
11	Pengiriman Undangan ulang (Dilakukan apabila proses Aanwijzing pertama hanya dihadiri 1 peserta)
12	Aanwijzing ulang (Dilakukan apabila proses Aanwijzing pertama hanya dihadiri 1 peserta)

No	Kegiatan
13	Penyerahan proposal oleh KAP
14	Penilaian Teknis (awal)
15	Presentasi Peserta untuk konfirmasi*)
16	Penilaian Teknis (akhir)
17	Laporan Hasil Penilaian Teknis
18	Penggabungan Final
19	Negosiasi
20	Usulan Penetapan ke BOD dan ke Dekom
21	Penetapan Pemenang
22	Masa Sanggah
23	Penetapan KAP oleh Dewan Komisaris

## Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik dan Fee Jasa Audit (5 tahun)

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan Audit terhadap BRI untuk tahun 2017 adalah:

### Nama Akuntan Perusahaan:

Drs. Hari Purwantono (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0684) / Danil Setiadi Handaja, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1008).

### Alamat Kantor:

Indonesian Stock Exchange Building Tower 2,  
Lantai 7  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telp. (62-21) 5289 5000  
Fax. (62-21) 5289 4100

### Alamat Kantor Akuntan Publik:

Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)  
Alamat Kantor Akuntan Publik:  
Indonesian Stock Exchange Building Tower 2,  
Lantai 7  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telp. (62-21) 5289 5000  
Fax. (62-21) 5289 4100  
www.ey.com/id

### Dasar Penunjukan:

Berdasarkan Keputusan RUPST Tahun 2017 tanggal 15 Maret 2017 yang dituangkan dalam Berita Acara RUPST pada mata acara keempat.



## AKUNTAN PUBLIK

**Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Fee periode 5 Tahun Terakhir**

Tahun	Nama Akuntan Publik	Nama Akuntan	Fee
2013	Purwantono, Sungkoro & Surja	Sinarta	5.550.000.000,-
2014	Purwantono, Sungkoro & Surja	Sinarta	6.775.000.000,-
2015	Purwantono, Sungkoro & Surja	Sinarta	6.950.000.000,-
2016	Purwantono, Sungkoro & Surja	Sinarta	6.950.000.000,-
2017	Purwantono, Sungkoro & Surja	Drs. Hari Purwantono / Danil Setiadi Handaja, CPA	7.300.000.000,-

**Jasa Lainnya**

Jasa Lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik selain Jasa Audit Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2017 adalah *review* terbatas Semester I 2017.

Besarnya biaya untuk Jenis Jasa lain yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada Tahun 2017 adalah Rp6.350.000.000.

**Temuan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Auditor Eksternal**

Hasil Audit telah disampaikan oleh KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja yang ditanda tangani oleh Auditor Drs. Hari Purwantono / Danil Setiadi Handaja, CPA dalam Laporan Auditor Independen No.RPC-250/PSS/2016 pada paragraf "Opini" dengan penjelasan:

"Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia"

**Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal dan Kepatuhan Bank terhadap ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia**

Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk akan mengaudit dan memberikan opini atas laporan keuangan konsolidasi BRI dan entitas anak, serta mengevaluasi kinerja BRI sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Ditjen Pajak

dan peraturan serta praktik-praktik lainnya yang relevan. Dalam pelaksanaannya, perseroan senantiasa menjalin komunikasi dengan Kantor Akuntan Publik, Komite Audit dan Manajemen Perusahaan.

Dasar pelaksanaan transparansi keuangan tahun 2017 berdasarkan ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 Pasal 18 butir (4) tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan OJK No.6/POJK.03/2015 berlaku mulai 1 April 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
2. Surat Edaran Bank Indonesia No.14/35/DPNP Tanggal 10 Desember 2012 tentang Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia butir II.2.a.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 11/SEOJK.03/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

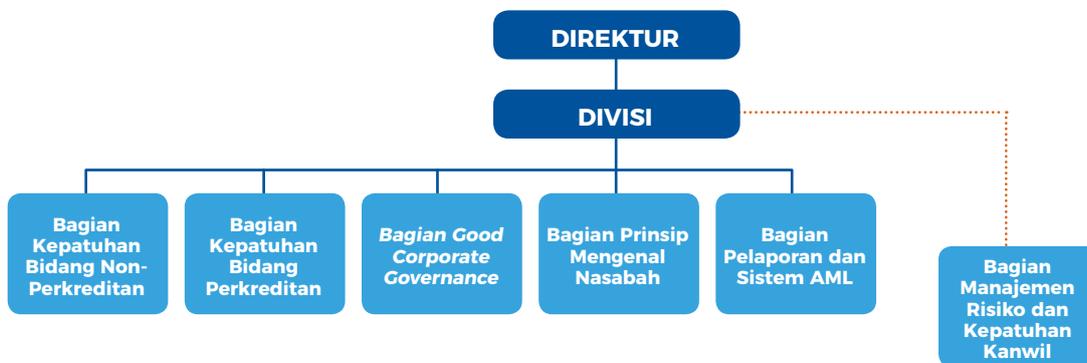
Ruang lingkup pekerjaan pekerjaan Kantor Akuntan Publik meliputi:

1. Audit umum terhadap laporan keuangan BRI dan konsolidasian akhir tahun posisi 31 Januari 2017.
2. Audit umum terhadap laporan keuangan PKBL BRI Tahun 2017.
3. Audit terhadap kinerja, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan pengendalian internal.
4. Audit terhadap laporan hasil evaluasi kinerja manajemen.

## FUNGSI KEPATUHAN

alam rangka memitigasi risiko dan uaya yang bersifat preventive (*ex-ante*) serta mengelola Risiko Kepatuhan agar sejalan dengan penerapan Manajemen Risiko yang telah berjalan di Bank secara keseluruhan, BRI telah melaksanakan Fungsi Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

### Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan



Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan wajib memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran Direktur Kepatuhan mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, Direktur Kepatuhan wajib mendapat persetujuan oleh OJK dan sesuai Surat OJK No.SR-108/D.03/2015 tanggal 08 Juni 2015 menyetujui pengangkatan Susy Liestiowaty sebagai Direktur Kepatuhan BRI.

### Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan BRI dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan adalah:

1. Merumuskan strategi terciptanya budaya kepatuhan.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan dan prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
4. Memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah.

5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan.
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan.
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

### Independensi Direktur Kepatuhan

Independensi Direktur Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi dengan mengacu Peraturan OJK No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017.

1. Tidak rangkap jabatan dan hubungan afiliasi.
2. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, pemegang saham pengendali.
3. Direktur Kepatuhan tidak membawahi fungsi:
  - a. Bisnis dan operasional.
  - b. Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan bagi kegiatan usaha Bank.
  - c. *Treasury*.
  - d. Keuangan dan Akuntansi.
  - e. Logistik dan pengadaan barang & jasa.
  - f. Teknologi dan informasi.
  - g. Audit intern.



## FUNGSI KEPATUHAN

### Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan bersifat independen dan terpisah dari fungsi bisnis, operasional maupun fungsi penunjang lainnya dalam kegiatan usaha BRI. Jajaran kepatuhan harus bebas dari pengaruh atau tekanan unit kerja lain dan bebas benturan kepentingan (*conflict of interest*) serta bertindak profesional & objektif.

### Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan

Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab adalah:

1. Menyusun langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu kepada ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bank.
3. Menilai dan mengevaluasi efektifitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan OJK dan perundang-undangan.
5. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur dan kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan perundang-undangan.
6. Melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

### Profil Kepala Divisi Kepatuhan BRI



#### Heru Setiabudi

Executive Vice President  
Compliance Division

Lahir di Tanjung Karang, 21 Juli 1964. Lulusan Sarjana Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Lampung dan Magister of Business Administration Universitas Gajah Mada.

#### Pengalaman Profesional/Kerja:

- Pemimpin Cabang (2002-2010)
- Wakil Pemimpin Wilayah BRI Banjarmasin (2012)
- Wakil Pemimpin Wilayah BRI Malang (2013)
- Wakil Pemimpin Wilayah BRI Makassar (2013)
- Wakil Inspektur Kanins BRI Denpasar (2016)
- Kepala Divisi Kepatuhan 2017- sekarang

Dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Kepatuhan.

#### Training yang diikuti

1. Risk Management Certification Refresher Program: Deeper Understanding on IFRS 9 & BASEL IV and Progress of BASEL III Implementation.
2. Arah Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Serta Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan

#### Sertifikasi

- Sertifikasi *Qualified Internal Auditor*,
- Sertifikasi Manajemen Risiko. Level 3, dan
- Sertifikasi Kepatuhan Level 1

## FUNGSI KEPATUHAN

### Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*)

Dalam rangka penerapan budaya kepatuhan, perusahaan memiliki pedoman pelaksanaan fungsi kepatuhan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI tentang Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Ruang lingkup Piagam Kepatuhan meliputi:

1. Fungsi Kepatuhan Bank dan ketentuan umum satuan kerja kepatuhan diantaranya independensi kedudukan dan kewenangan dalam menjalankan fungsi kepatuhan.
2. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan.
3. Pelaporan fungsi kepatuhan

### Program Pengembangan Kompetensi Pendidikan/Pengembangan Kompetensi

Program pendidikan dan pengembangan kompetensi selama tahun 2017 diantaranya:

1. Pelaksanaan *In House Training* kepada seluruh jajaran Fungsi Kepatuhan Kantor Wilayah BRI.
2. Pelaksanaan kegiatan *Public Course* terkait bidang pekerjaan Fungsi Kepatuhan.
3. *Training*, Seminar, Workshop dan forum yang diselenggarakan asosiasi seperti Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan.
4. Pelaksanaan Sertifikasi Kepatuhan

### Sertifikasi Kepatuhan

Pelaksanaan Sertifikasi Kepatuhan pada jajaran Satuan Kerja Kepatuhan BRI selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Level Sertifikasi	Jabatan	Peserta
1	1	Officer	12
2	1	Assistan Manager	21
3	1	AVP	10
4	2	VP	1
5	1	EVP	1
<b>Total Peserta</b>			<b>45</b>

### Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2017

Dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, Divisi Kepatuhan menyusun program kerja fungsi kepatuhan tahun 2017 sebagai berikut:

#### Peningkatan Budaya Kepatuhan

1. Peningkatan *Compliance Awareness* pekerja melalui sosialisasi budaya kepatuhan dan sadar risiko ke unit kerja operasional. Sosialisasi berupa *training*, *e-learning*, portal SDM, majalah internal, video, poster, dll.
2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Divisi Kepatuhan melalui sertifikasi kepatuhan, pendidikan, seminar, dan *public course*.

#### Pengelolaan Risiko Kepatuhan

1. *Review* dan pengkinian kebijakan internal bank dalam rangka sinkronisasi dengan ketentuan regulator yang berlaku.
2. Identifikasi risiko kepatuhan terhadap kebijakan dan putusan Direksi tidak menyimpang dari peraturan OJK/regulator/perundang-undangan yang berlaku melalui pengujian prinsip kehati-hatian.
3. Pengukuran dan pemantauan risiko berdasarkan data Manajemen Insiden atas terjadinya pelanggaran ketentuan.
4. Monitoring dan tindak lanjut kepatuhan Bank terhadap komitmen kepada pihak regulator dan/ atau pengawas lainnya yang berwenang.

#### Peningkatan Penerapan GCG

1. Penerapan gratifikasi dan komitmen manajemen tentang larangan pemberian dan penerimaan hadiah/ fasilitas lainnya kepada insan BRI.
2. Penguatan struktur kebijakan GCG dan sistem *Whistleblowing System*.
3. Internalisasi kebijakan GCG secara onsite dan offsite ke seluruh pekerja BRI diantaranya Kode Etik, Pedoman GCG, Strategi Anti *Fraud*, Gratifikasi, Benturan Kepentingan, dan *Whistleblowing System*.
4. Pelaksanaan *e-learning* penerapan GCG ke seluruh Pekerja BRI.
5. Evaluasi penerapan GCG di Perusahaan Anak.



## FUNGSI KEPATUHAN

## PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Dengan adanya dinamika nasional, regional dan global serta semakin kompleksnya produk, aktivitas, dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya (*multi channel marketing*) serta teknologi informasi, menyebabkan peningkatan risiko Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang dihadapi oleh Perseroan. Menyikapi kondisi tersebut dan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan regulator, Perseroan melakukan Penerapan Program APU dan PPT secara memadai.

### Dasar Hukum

#### Ketentuan Eksternal

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
4. Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Kepala PPATK), dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Kepala Bapeten), Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 Tanggal 16 Mei 2017 Tentang Pencantuman Identitas Orang Dan Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Dan Pemblokiran Secara Serta Merta (DPPSPM) Atas Dana Milik Orang Atau Korporasi Yang Tercantum Dalam DPPSPM.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 / SEOJK.01/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris (DTTOT).
7. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER- 11/1.02/PPATK/09/2012 tanggal 4 September 2012 tentang Transaksi Keuangan Tunai yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan.
8. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER- 11/1.02/PPATK/06/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan Jo. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER- 04/1.02/PPATK/03/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan.
9. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER- 12/1.02/PPATK/06/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri bagi Penyedia Jasa Keuangan.
10. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER- 21/1.02/PPATK/11/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan.
11. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER- 02/1.02/PPATK/02/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.
12. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER- 14/1.02/PPATK/11/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan.
13. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER- 02/1.02/PPATK/02/2015 tanggal 3 Februari 2015 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## FUNGSI KEPATUHAN

14. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: 18 tanggal 3 Februari 2015 tentang
15. Surat Edaran PPATK Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).

### Ketentuan Internal

1. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep S.779-DIR/DKP/09/2017 tanggal 22 September 2017 tentang Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT PT BRI (Persero).
2. Surat Keputusan Nokep S.001-DIR/LYN/01/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang BPO Unit Kerja Operasional.

### Pengelola APU PPT

Penanggungjawab Penerapan Program APU dan PPT dilaksanakan oleh Unit Kerja Khusus (UKK) yang berada di setiap level organisasi. UKK Kantor Pusat BRI dilaksanakan oleh Divisi Kepatuhan KP BRI yang merupakan unit kerja struktural dalam struktur organisasi BRI. Dalam menjalankan tugasnya, Divisi Kepatuhan KP BRI melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan BRI. Sedangkan di UKK Kantor Wilayah BRI dilaksanakan oleh Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang mengkoordinasikan Penerapan Program APU dan PPT di Kantor Cabang (KC), Sentra Layanan Prioritas (SLP), Kantor Cabang Pembantu (KCP), BRI Unit dan Kantor Kas (KK).



### Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola APU PPT

Tugas dan tanggung jawab Divisi Kepatuhan KP BRI terhadap penerapan Program APU dan PPT adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/ atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*);
2. Menyusun, melakukan pengkinian dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan Program APU dan PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko, kepada Direktur Kepatuhan BRI untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan;
3. Memastikan adanya sistem yang mendukung Program APU dan PPT, yaitu sistem yang antara lain dapat mengakses dan mengidentifikasi data Nasabah, Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan lainnya yang diwajibkan dalam Undang-Undang;
4. Melakukan koordinasi atas pengkinian data profil dan transaksi Nasabah;
5. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan Program APU dan PPT dengan KC, SLP, KCP, BRI Unit dan Kantor Kas;



## FUNGSI KEPATUHAN

6. Memastikan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha Bank, volume transaksi dan modus Pencucian Uang dan/ atau Pendanaan Terorisme;
7. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT;
8. Memantau kesesuaian transaksi keuangan dengan profil Nasabah khususnya Nasabah dan transaksi yang berisiko tinggi dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan sumber informasi yang memadai;
9. Memantau rekening Efek dan pelaksanaan transaksi Nasabah jasa kustodian;
10. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi transaksi Efek;
11. Menerima laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan (*red flag*) dari KC, SLP, KCP, BRI Unit dan KK serta melakukan analisis atas laporan tersebut;
12. Mengidentifikasi transaksi yang terindikasi memenuhi kriteria mencurigakan berdasarkan laporan hasil analisa transaksi keuangan dari KC, SLP, KCP, BRI Unit dan KK;
13. Menyusun Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau *Suspicious Transaction Report* (STR) dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, untuk disampaikan kepada PPAK berdasarkan persetujuan Direktur Kepatuhan BRI;
14. Memastikan bahwa:
  - a) Terdapat mekanisme kerja yang memadai dari setiap KC, SLP, KCP, BRI Unit dan KK kepada Divisi Kepatuhan KP BRI dengan menjaga kerahasiaan informasi dan *anti tipping off*; dan
  - b) KC, SLP, KCP, BRI Unit dan KK melakukan fungsi dan tugas dalam rangka mempersiapkan laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan sebelum menyampaikan kepada UKK Kantor Pusat BRI atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan Program APU dan PPT.
15. Melakukan evaluasi dan menatausahakan hasil pemantauan dan analisis transaksi nasabah untuk

memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri;

16. Memantau, menganalisis, dan merekomendasi kebutuhan pelatihan Program APU dan PPT bagi pegawai BRI; dan
17. Berperan sebagai contact person bagi otoritas yang berwenang terkait dengan penerapan Program APU dan PPT (antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PPAK, dan Aparat Penegak Hukum)

### Sosialisasi APU PPT

Dalam meningkatkan pemahaman pekerja terhadap implementasi APU PPT di BRI, Pengelola APU PPT melakukan sosialisasi:

1. Mengadakan *In House Training* kepada seluruh Staf Kepatuhan, perwakilan Auditor Kantor Inspeksi BRI di seluruh Indonesia dan Divisi terkait dengan menghadirkan pembicara dari pihak eksternal seperti BNN, KPK, dan Densus 88.
2. Pelaksanaan *In House Training* dan sosialisasi secara *onsite* ke 19 (sembilan belas) Kantor Wilayah BRI dengan peserta seluruh perwakilan Asisten Manajer Operasional (AMO) terkait sosialisasi Aplikasi Sistem APU & PPT, STR dan CTR WIC on Line serta aplikasi pendukung lainnya.
3. Pelaksanaan *e-learning* dengan materi APU PPT kepada 31.262 pekerja BRI.
4. Membuat materi komunikasi APU PPT berupa poster yang dipasang di seluruh unit kerja BRI

### Implementasi APU PPT 2017

Penerapan Program APU dan PPT dilakukan berdasarkan 5 (lima) pilar, sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
  - a) Pengawasan aktif Direksi, sebagai berikut:
    - 1) Memastikan BRI memiliki kebijakan dan prosedur program APU dan PPT;
    - 2) Menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai penerapan program APU dan PPT yang bersifat teknis, seperti penetapan Nasabah yang dikategorikan sebagai *Politically Exposed Person* (PEP) dan pengelompokan calon Nasabah, Nasabah, dan/atau *Walk In Customer*

## FUNGSI KEPATUHAN

- (WIC) berdasarkan tingkat risiko terjadinya Pencucian uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
- 3) Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis Program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris, seperti perubahan struktur organisasi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT;
  - 4) Memastikan penerapan Program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan serta pengembangan sistem pendukung Program APU dan PPT;
  - 5) Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai pejabat yang akan memimpin Unit Kerja Khusus (UKK) atau pejabat yang bertanggungjawab atas penerapan Program APU dan PPT;
  - 6) Membentuk UKK dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggungjawab terhadap Program APU dan PPT;
  - 7) Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan Program APU dan PPT;
  - 8) Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan Program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
  - 9) Memberikan persetujuan dan/atau pendelegasian persetujuan kepada pejabat Divisi Kepatuhan KP BRI atas Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau *Suspicious Transaction Report* (STR), kewajiban laporan Program APU dan PPT lainnya, dan pemberian informasi data nasabah terkait program APU dan PPT kepada regulator;
  - 10) Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan Program APU dan PPT secara berkala. Adapun pegawai dimaksud adalah pegawai yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan Nasabah dan/atau WIC, seperti *frontliner*, petugas pemasaran, pejabat yang bertanggung jawab terhadap program APU dan PPT.
- b) Pengawasan aktif Dewan Komisaris, sebagai berikut:
    - 1) Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur Penerapan Program APU dan PPT yang bersifat strategis diusulkan oleh Direksi;
    - 2) Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT; dan
    - 3) Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris. Frekuensi pembahasan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan penilaian risiko BRI.
2. Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT
    - a) Pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme berdasarkan pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*) terkait dengan Nasabah, negara/area geografis, produk, jasa dan transaksi, serta jaringan distribusi (*delivery channels*);
    - b) Uji Tuntas Nasabah/*Customer Due Diligence* (CDD) dan/atau Uji Lanjut Nasabah/*Enhanced Due Diligence* (EDD) terhadap calon Nasabah, Nasabah, dan *Walk In Customer* (WIC);
    - c) Penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi;
    - d) Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur;
    - e) Pengkinian dan pemantauan;
    - f) Pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
    - g) Pelaporan kepada PPAK.
  3. Pengendalian Intern
    - a) Tersedianya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai;



## FUNGSI KEPATUHAN

- b) Adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan APU dan PPT; dan
- c) Pemeriksaan dilakukan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT.
4. Sistem Informasi Manajemen (SIM)  
Aplikasi Pendukung Penerapan Program APU dan PPT
- a) Sistem Anti Money Laundering & Countering Financing Of Terrorism (Sistem AML & CFT), yang digunakan untuk melakukan identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), Transaksi Keuangan Tunai (TKT), Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan ke Luar Negeri (TKL).
- b) Aplikasi penyediaan data untuk pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).
- c) Aplikasi mutasi rekening yang menyediakan informasi lawan transaksi.
- d) Aplikasi pencatatan profil dan transaksi *Walk In Customer* (WIC).
- e) Aplikasi pelaporan *Suspicious Transaction Report* (STR) dan *Cash Transaction Report* (CTR) *WIC online*.
- f) Aplikasi pencarian data keuangan nasabah terintegrasi.
5. Sumber Data Manusia (SDM) dan Pelatihan  
Sumber Data Manusia (SDM)  
Dalam rangka pencegahan penggunaan BRI sebagai media atau tujuan pencucian uang dan pendanaan terorisme, BRI wajib melakukan: Prosedur penyaringan (*pre-employee screening*) pada saat penerimaan pegawai baru sebagai bagian dari penerapan *Know Your Employee* (KYE).
- Pelatihan
- a) Pelatihan dapat dilakukan secara elektronik (*online base*) maupun melalui pertemuan tatap muka.
- b) Pelatihan secara elektronik (*online base*) dapat menggunakan media *e-learning* baik yang disediakan oleh otoritas berwenang seperti PPATK atau yang disediakan oleh BRI.

- c) Pelatihan melalui tatap muka dilakukan dengan menggunakan pendekatan misalkan melalui tatap muka secara interaktif (misal *In House Training/IHT*) dengan topik Penerapan Program APU dan PPT tertentu sesuai kebutuhan pekerja.

### Realisasi Penerapan Program APU dan PPT terkait dengan Pelaporan kepada PPATK dan Pemenuhan Permintaan Data/Informasi dari Regulator/Aparat Penegak Hukum Tahun 2017

#### 1. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)

Pelaporan	2017
CTR oleh Nasabah	440.555
CTR oleh <i>Walk In Customer</i>	97

#### 2. Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL)

Pelaporan	2017
<i>Non SWIFT* Incoming</i>	2.361.141
<i>SWIFT Incoming</i>	153.600
<i>SWIFT Outgoing</i>	41.330
<b>Total</b>	<b>2.556.071</b>

#### 3. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

Pelaporan	2017
STR	901

#### 4. Pemenuhan Permintaan Data Keuangan dari PPATK/Aparat Penegak Hukum

Pelaporan	2017
	Sudah TL
PPATK	381
KPK	180
BNN RI	11
Kepolisian	21
Densus 88	6
Kejagung RI	3
OJK	17
Kemenkeu	2
BI	4
Pajak	5
<b>Total</b>	<b>624</b>

## FUNGSI KEPATUHAN

### Evaluasi dan Rencana Penerapan APU PPT 2018

#### Evaluasi penerapan APU PPT

Untuk memastikan penerapan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT telah dilaksanakan secara konsisten di Unit kerja BRI, Pengelola APU PPT telah melakukan evaluasi secara *self assessment* ke 665 BRI Unit. berdasarkan hasil *assessment*, beberapa hal yang perlu mendapat tindak lanjut diantaranya:

- Pengembangan aplikasi/report untuk pemantauan nasabah berisiko tinggi termasuk nasabah kategori PEP.
- Pengembangan fitur *unflagging* pada aplikasi AML untuk monitoring nasabah PEP.
- Pengkinian materi sosialisasi APU dan PPT.

#### Pelaksanaan Aktivitas Kepatuhan lainnya

Selama periode tahun 2017, terdapat aktivitas lainnya dalam menjalankan fungsi kepatuhan, diantaranya:

- Pelaksanaan Pengujian Prinsip Kehati-hatian**  
Dalam rangka mencegah penyimpangan dari ketentuan kehati-hatian baik di bidang perkreditan maupun bidang non perkreditan, Direktur Kepatuhan BRI telah melakukan Pengujian Prinsip Kehati-hatian terhadap Rencana Kebijakan, Keputusan dan Perjanjian dengan pihak ketiga yang ditetapkan oleh Direksi.
- Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengujian**  
Merupakan kelanjutan dari kegiatan Pengujian Prinsip Kehati-hatian yang dilaksanakan untuk memastikan kembali bahwa tidak terdapat adanya penyimpangan dalam tindak lanjut rencana kebijakan dan atau keputusan yang telah dinyatakan memenuhi prinsip kehati-hatian (*comply*).
- Resume Kebijakan Eksternal**  
Baik *resume* maupun penerusan kebijakan eksternal dilakukan terhadap kebijakan baru maupun perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh regulator eksternal. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari sosialisasi kebijakan sehingga kebijakan eksternal dimaksud dapat segera dijadikan acuan oleh unit kerja terkait dalam bidang tugasnya.
- Analisa Dampak Kebijakan Eksternal**  
Dilakukan untuk mengetahui pengaruh ketentuan eksternal yang berlaku terhadap kebijakan internal BRI yang berlaku saat ini sekaligus memastikan bahwa kebijakan internal BRI yang berlaku saat ini telah sesuai dengan ketentuan eksternal.

Jenis Kegiatan	2017	
	Bidang Perkreditan	Bidang Non Perkreditan
Pengujian prinsip kehati-hatian	189	336
Monitoring	181	150
Tanggapan Kebijakan	40	186
Resume & Penerusan Kebijakan Eksternal	43	59
Analisa Dampak Kebijakan Eksternal	35	21



## FUNGSI KEPATUHAN

**Rencana Kerja Satuan Kerja Kepatuhan 2018**

Satuan Kerja Kepatuhan memiliki peran sebagai satuan kerja independen di bawah Direktur Kepatuhan dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, serta sekaligus berperan sebagai *management tools* yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mendukung kegiatan bisnis dan operasional Bank yang *prudent* (memenuhi prinsip kehati-hatian), sehat dan transparan.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, strategi BRI dalam pengembangan bidang kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi, mengembangkan, menyempurnakan dan menyusun kebijakan/ ketentuan/ metodologi/ sistem prosedur pengujian prinsip kehati-hatian.
2. Mengelola GCG dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GCG baik yang dilakukan secara mandiri maupun oleh pihak eksternal.
3. Melakukan penyempurnaan pengelolaan APU dan PPT di Unit Kerja dan pemenuhan pelaporan kepada pihak eksternal (PPATK, KPK, Kepolisian, Kejaksaan, BNN).
4. Mempersiapkan pelaporan di bidang kepatuhan secara lebih efektif dan efisien dengan memperhatikan *timeline* yang telah ditentukan.

# MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Risiko berperan dalam melindungi modal dan mengoptimalkan return terhadap risk. Skala operasi yang luas dan volume usaha yang terus meningkat, membuat BRI harus menerapkan pola pengelolaan risiko secara terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh eksposur risiko.

Untuk bertumbuh menjadi bank terdepan, BRI mengembangkan bisnisnya melalui inovasi produk dan jasa secara berkelanjutan serta didukung dengan teknologi digital dan jaringan yang handal didukung satelit untuk mengoptimalkan layanan perbankan sampai ke pelosok negeri.

BRI menerapkan proses Manajemen Risiko secara konsisten pada setiap proses aktivitas bisnis maupun operasional yang menjadikan BRI bank yang sehat dan tumbuh secara berkesinambungan.

## Dasar Penerapan Manajemen Risiko Bank

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34/POJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.03/ 2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
6. Surat Keputusan Nokep: 72 DIR/DMR/12/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Kebijakan Umum Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia, (Persero),Tbk.
7. Surat Keputusan Nose: 04- DIR/DMR/03/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Prosedur Penilaian Tingkat Kesehatan Bank PT Bank Rakyat Indonesia, (Persero),Tbk.

## Penetapan Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Risiko

1. Kebijakan Umum Manajemen Risiko BRI (KUMR BRI) adalah aturan tertinggi dalam implementasi manajemen risiko pada seluruh kegiatan bisnis BRI, secara individual maupun terintergrasi (SK Direksi BRI No:S.72-DIR/DMR/12/2016 tentang Kebijakan Umum Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
2. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko
  - a. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Operasional.
  - b. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Kredit.
  - c. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Pasar.
  - d. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas.
  - e. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Enterprise Risk Management.

## SISTEM MANAJEMEN RISIKO Prinsip dan Penerapan Manajemen Risiko

Sistem Manajemen Risiko dilaksanakan secara terintegrasi melalui 4 pilar yaitu:

### Pilar 1 Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

#### Pengawasan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Manajemen Risiko yang tertuang dalam Piagam Komite Pengawasan Manajemen Risiko. Tugas komite antara lain:

1. Mengevaluasi dan menganalisa secara berkala kecukupan kebijakan manajemen risiko.
2. Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko secara triwulanan.
3. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko.



## MANAJEMEN RISIKO

Sehubungan dengan hal tersebut, Komite Pemantau Manajemen Risiko secara berkala mengadakan pertemuan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang disampaikan dalam notulensi. Adapun pertemuan untuk membahas profil risiko dan penerapan manajemen risiko telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 16 Februari 2016, 29 Maret 2016, 09 Agustus 2016 dan 25 Oktober 2016

### Pengawasan Direksi

1. *Risk Management Committee* dilaksanakan berkala minimal triwulanan dan telah dilaksanakan selama periode 2017 meliputi:
  - a. RMC I tanggal 10 Maret 2017
  - b. RMC II tanggal 2 Juni 2017
  - c. RMC III tanggal 28 Agustus 2017
  - d. RMC IV tanggal 23 November 2017
  - e. RMC Terintegrasi I tanggal 3 April 2017
  - f. RMC Terintegrasi II tanggal 28 September 2017
2. Forum ALCO terkait dengan pembahasan ekonomi makro serta kondisi dan pencapaian *asset & liability* yang dilakukan minimal 1 bulan sekali atau sebanyak 12 kali selama periode tahun 2017.
3. *Business Performance Review* (BPR) kegiatan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja BRI secara nasional, kinerja seluruh unit kerja bisnis (Kantor Wilayah dan KCK serta seluruh Divisi Bisnis Kantor Pusat) serta program-program kerja strategis yang dilakukan secara berkala 1 bulan sekali dalam rangka pencapaian kinerja melibatkan Direksi, SEVP, Pemimpin Wilayah, Inspektur, Kepala Divisi. Pelaksanaan BPR selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:
  - a. BPR Periode Januari tanggal 21 Februari 2017
  - b. BPR Periode Februari tanggal 21 Maret 2017
  - c. BPR Periode April tanggal 10 April 2017
  - d. BPR Periode Maret tanggal 15 Mei 2017
  - e. BPR Periode Mei tanggal 21 Juni 2017
  - f. BPR Periode Juni tanggal 19 Juli 2017
  - g. BPR Periode Juli tanggal 21 Agustus 2017
  - h. BPR Periode Agustus tanggal 18 September 2017
  - i. BPR Periode September tanggal 25 Oktober 2017
  - j. BPR Periode Oktober tanggal 20 November 2017
  - k. BPR Periode November tanggal 20 Desember 2017

### Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, prosedur dan penetapan limit

Perumusan Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit telah tersedia dan sejalan dengansasaran strategi dan bisnis bank secara keseluruhan yang ditetapkan dalam Surat Edaran S.18-DIR/DMR/07/2015 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko (*Risk Based Bank Rating*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

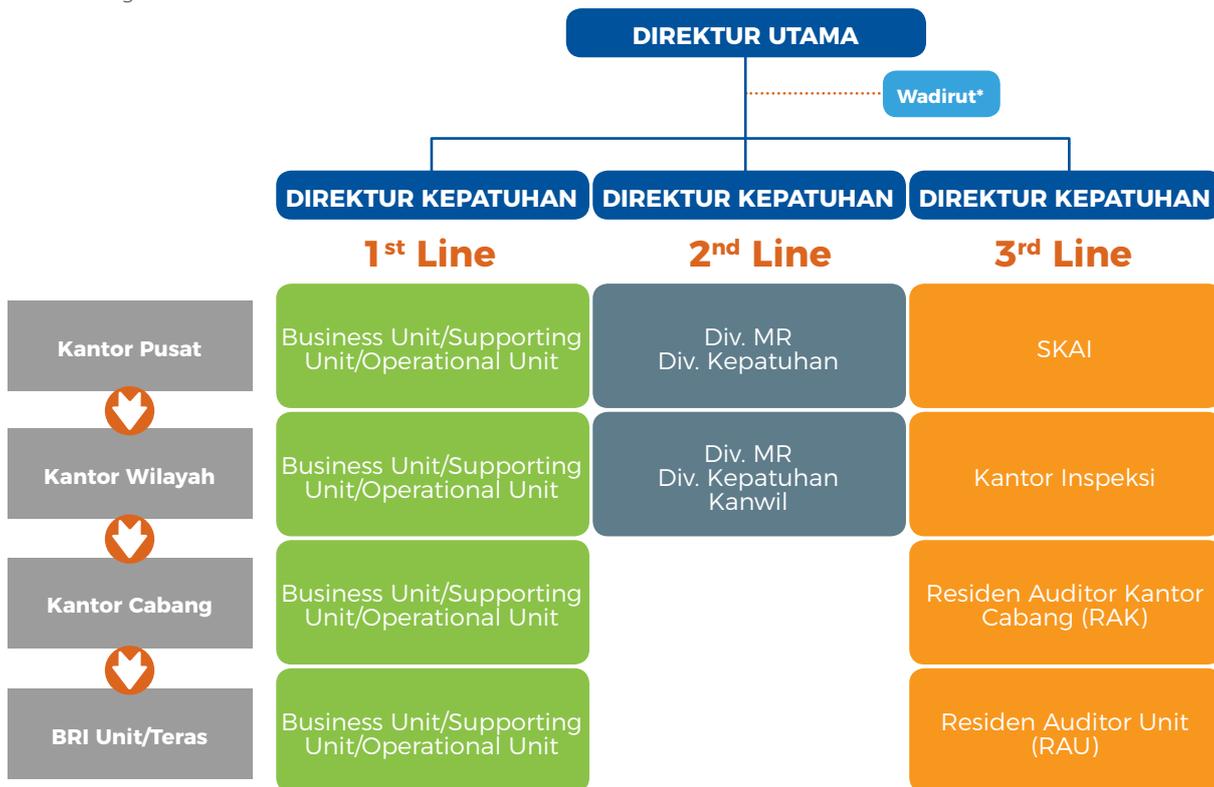
### Pilar 3 Kecukupan Sistem Informasi Manajemen Risiko

1. Pelaporan Manajemen Risiko  
Pelaporan Manajemen Risiko kepada pihak-pihak tertentu sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Frekuensi penyampaian laporan disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga mampu memberikan informasi yang memadai bagi pengambil keputusan
  - b. Laporan memuat informasi mengenai total eksposur risiko, pemantauan terhadap risiko yang bersifat material, penetapan limit, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, pencapaian kinerja bisnis serta implementasi manajemen risiko.
2. Manajemen Data Risiko  
Manajemen data risikomerupakan pengelolaan data risikoyang dipergunakan untuk memastikan tingkat ketersediaan, akurasi serta ketepatan waktu penyaluran informasi/laporan manajemen risiko serta pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan manajemen Risiko.  
  
Sistem Informasi diantaranya meliputi: BRINETS, portal DWH, Cognos, Dashboard Profil Risiko (bank wide), Dashboard Profil Risiko Likuiditas, Dashboard Profil Risiko Pasar dan Dashboard Profil Risiko Per Kantor Wilayah dan lain-lain.

## MANAJEMEN RISIKO

### Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern

Penerapan Sistem Pengendalian Intern di BRI diterapkan dengan menggunakan konsep *Three Line of Defense*, dengan rincian sebagai berikut:



\*) efektif s/d 18 Oktober 2017

### Efektifitas Pelaksanaan Sistem Informasi

Tinjauan atas efektifitas Pelaksanaan Sistem Informasi meliputi:

1. Ketersediaan informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Dewan Komisaris, Direksi, dan unit kerja terkait dalam penerapan Manajemen Risiko untuk menilai, memantau, dan memitigasi Risiko yang dihadapi BRI baik risiko keseluruhan maupun per jenis risiko.
2. Efektivitas penerapan Manajemen Risiko mencakup kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
3. Ketersediaan informasi tentang hasil (realisasi) penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan BRI sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko.

### Penetapan Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Risiko

1. Kebijakan Umum Manajemen Risiko BRI (KUMR BRI) adalah aturan tertinggi dalam implementasi manajemen risiko pada seluruh kegiatan bisnis BRI, secara individual maupun terintegrasi - SK Nokep: 72-DIR/DMR/12/2016 tentang Kebijakan Umum Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko
  - a. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Operasional
  - b. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Kredit
  - c. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Pasar
  - d. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas
  - e. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko *Enterprise Risk Management*



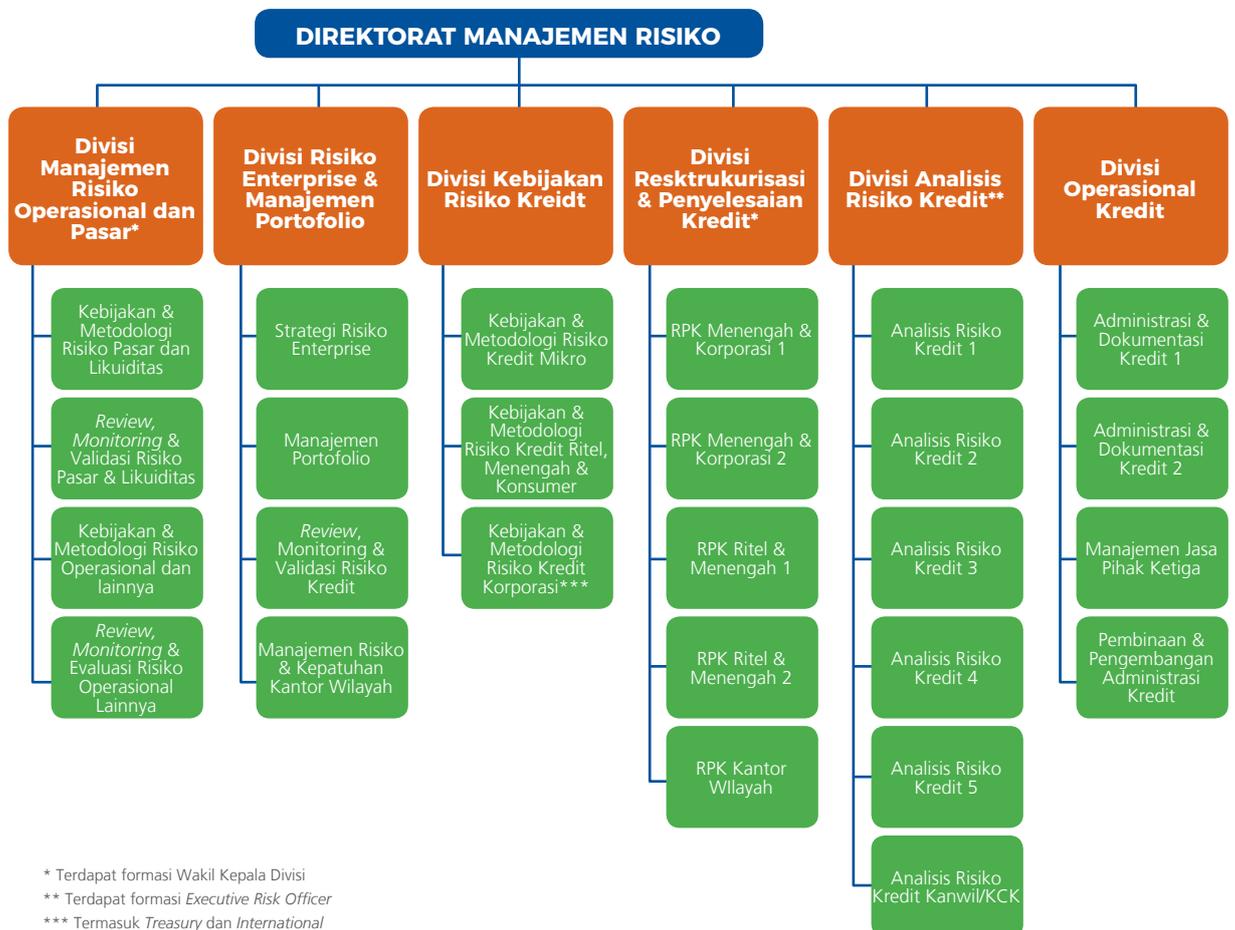
MANAJEMEN RISIKO

Struktur Organisasi Fungsi Manajemen Risiko

Pada tahun 2017, struktur fungsi Manajemen Risiko berada dibawah Direktur Kepatuhan dengan rincian data sebagai berikut:



\* Terdapat Formasi Jabatan Wakil Kepala Divisi  
\*\* Terdapat Formasi Wakil Kepala Bagian Fungsi *Middla Office*



\* Terdapat formasi Wakil Kepala Divisi  
\*\* Terdapat formasi *Executive Risk Officer*  
\*\*\* Termasuk *Treasury* dan *International*

## MANAJEMEN RISIKO

### Profil Kepala Divisi Fungsi Manajemen Risiko



**Sandra Chalik**  
 Kepala Divisi Enterprise  
 Risk & Management  
 Portofolio

Lahir di Makassar 9 Januari 1964 lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya tahun 1989 dan Magister Management Universitas Indonesia (MMUI) tahun 2003.

#### Pengalaman Profesional:

1. Senior Risk Manager Divisi Manajemen Risiko BRI
  2. Kepala Bagian Manajemen Risiko Kantor Wilayah Jakarta 1
  3. Kepala Bagian Enterprise Risk Management, Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas, Divisi Manajemen Risiko BRI
  4. Kepala Bagian Laporan Keuangan, Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan
  5. Wakil Kepala Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan BRI
  6. Wakil Kepala Divisi Manajemen Risiko
- Saat ini menjabat Kepala Divisi Risiko Enterprise dan Manajemen Portofolio BRI

#### Training:

1. *Asset Liability Management & Capital Adequacy*, Euromoney Singapore
2. *Using Interest Rate Derivative & Forex Option*, Euromoney Singapore
3. *Financial Modeling For Corporate Budgeting*, Jakarta
4. *Managing Liquidity Risk and Stress Testing Simulation*, Jakarta
5. *Measurement of Operational Risk Capital Burden*, Jakarta
6. *Fundamental of Market Risk Managemant at Bank*, Euromoney Singapore
7. *Risk Based Bank Rating (RBBR) "Tantangan perbankan Menangani Krisis Global*, Jakarta
8. *Implementing an Integrated Governance, Risk Management and Compliance (GRC) Framework for Financial Services Industry*, Jakarta
9. *Living Wills, Planing for Bank Recovery and Resolution*, Jakarta

#### Sertifikasi:

1. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 dan level 2 di Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
2. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 dan level 4 di Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan Indonesia



## MANAJEMEN RISIKO



**Heri Supriyadi**  
Kepala Divisi Operasional  
& Market Risk

Lahir di Purbalingga, 10 Oktober 1965, memperoleh gelar S1 Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman dan S2 Master Manajemen Universitas Gadjah Mada, dan MBA Gatton Collage of Bussiness and Economic, University of Kentucky. Menjabat sebagai Kepala Divisi *Enterprise & Portofolio Risk Management* BRI sejak tanggal 1 Juli 2017. Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Divisi Bidang Risiko Kredit sejak tanggal 1 Maret 2016.

**Pengalaman Profesional:**

1. Kepala Bagian Operasional Risk Management Methodology
2. Pemimpin Cabang BRI
3. Wakil Pemimpin Wilayah BRI Denpasar
4. Wakil Kepala Divisi Manajemen Risiko BRI
5. Kepala Divisi Operasional & Market Risk BRI

**Training:**

1. Integration of GRC – Governance Risk Management Compliance, International Public Course by CRMS, New Zealand.
2. *Refocusing on Credit Risk Management, Credit Risk Model, Pricing and Being Prepared for Upcoming Regulations*. Risk Management Certification Refresher Program by BARa. Jakarta
3. *Market Innovation for Sustainable Finance: 2016 International Sustainable Finance Forum* by OJK and IFC. Denpasar
4. *Developing and Applying an Integrated Stress Testing Framework*. Seminar by KPMG and SAS Institute. Jakarta
5. *Crisis Management*. Public Course. Held by IBN International. Jakarta
6. *A Symbiotic Relationship to Achieve the Effective Risk Management*. Internal Audit and Risk Management Seminar. Held by IBI, IAIB and BARa

**Sertifikasi**

1. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 dan 2 oleh BSMR
2. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 dan 4 oleh LSPP
3. Sertifikasi Assessor BRI untuk Kompetensi Pekerja

## MANAJEMEN RISIKO

### Rachmad Guntur Kristianto Kepala Divisi Kebijakan Risiko Kredit

Lahir di Malang, tanggal 22 Mei 1962, memperoleh gelar S1 Fakultas Hukum di Universitas Brawijaya dan S2 Magister Manajemen Agribisnis di Institut Pertanian Bogor. Menjabat sebagai Kepala Divisi Kebijakan Risiko Kredit BRI sejak tanggal 1 Juli 2017. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Administrasi Kredit sejak tanggal 1 April 2017 s.d 30 Juni 2017..

#### Pengalaman Profesional:

1. Kepala Bagian Bagian Penyelesaian Kredit Menengah Divisi RPK BRI.
2. Kepala Bagian Group Restrukturisasi & Penyelesaian K.M. 2 Divisi RPK BRI.
3. Wakil Pemimpin Wilayah BRI Manado.
4. Wakil Pemimpin Wilayah BRI Semarang.
5. Wakil Kepala Divisi RPK BRI.
6. Kepala Divisi PKO BRI.
7. Pemimpin Wilayah BRI Malang.

#### Training:

1. Treasury Course yang diadakan oleh Pusdiklat BRI.
2. Workshop Essentials of Trade Finance Law di Hongkong.
3. Matrikulasi & Help Session Manajemen Risiko Level 3.
4. Leading the Organization in Transforming Industry; Memandu Organisasi dalam Industri yang Bertransformasi di BRI Corpu.
5. LHC Enhancement Kepala Divisi Kantor Pusat Materi Leadership.
6. Short Course Manajemen Risiko di Belanda.
7. Benchmark Agribisnis di New Zealand & Australia.
8. Perlakuan Kredit Bermasalah di JW Marriot Hotel.

#### Sertifikasi:

Beberapa sertifikasi yang telah diikuti antara lain Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3.

### Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Manajemen Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan pada seluruh aktivitas kegiatan bank dengan mengacu kepada ketentuan standar pengelolaan yang ditetapkan oleh pihak regulator. Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan dengan secara berkesinambungan oleh *three line of defense*, yaitu seluruh risk taking unit selaku *first line*, unit kerja kepatuhan dan manajemen risiko selaku *second line* dan unit internal audit selaku *third line*. Hasil penilaian profil risiko pada triwulan IV 2017, peringkat profil risiko bri berada pada tingkat *low to moderate*, hal ini menunjukkan bahwa bank mampu menjaga tingkat pengelolaan risiko seiring dengan berkembangnya bisnis dan persaingan bank di Indonesia.

### Tugas dan Tanggung Jawab

1. Penyusunan metodologi manajemen risiko enterprise dan manajemen risiko terintegrasi.
2. Penyusunan dan analisa profil risiko, tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, credit risk rating&scoring dan validasi metodologi risiko kredit.
3. Penyusunan dan analisa *portofolio guideline, sustainability finance, risk based pricing, risk performance management* dan *stress testing*.
4. Menyusun, menyempurnakan dan melaksanakan kebijakan/ketentuan/prosedur dan metodologi proses manajemen risiko (Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian termasuk validasi data, strategi Manajemen risiko, profil risiko, stress testing, dan menantau risiko (risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko lainnya) Manajemen Kelangsungan Usaha ( MKU)/*Business Continuity Management* (BCM).



## MANAJEMEN RISIKO

- Menilai Kecukupan pengelolaan risiko atas produk dan atau aktiva baru yang diusulkan unit kerja

### Pengembangan dan Pendidikan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

#### Pendidikan/Pengembangan Kompetensi

Program pendidikan dan pengembangan kompetensi selama tahun 2017 sebagai berikut:

- Pengantar Manajemen Risiko dan Perangkat Manajemen Risiko
- In House Training* SQL
- Training* Analisis Lingkungan dari OJK
- Sertifikasi Manajemen Risiko
- Public Course* Divisi Manajemen Risiko dan Manajemen Risiko Kanwil

#### Sertifikasi Manajemen Risiko

Pelaksanaan Sertifikasi dan Pejabat yang telah memiliki sertifikasi manajemen risiko di BRI tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Level Sertifikasi	Peserta
1	Officer	1	20
2	Manager	1	218
3	AVP	1	41
		2	1
4	VP	3	2
		1	1
5	EVP	3	11
		4	3
<b>Total Peserta</b>			<b>297</b>

### JENIS RISIKO DAN TATA CARA PENGELOLAANNYA

Terdapat 10 Risiko yang dikelola BRI dalam Konglomerasi Keuangan yaitu:

#### RISIKO KREDIT

Merupakan risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain (*counterparty*) dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko Kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank.

#### Upaya Pengelolaan Risiko

##### Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

- Proses putusan kredit diatas nominal tertentu wajib melalui Komite Kredit Direksi dan konsultasi kepada Dewan Komisaris
- Pemantauan tindak lanjut oleh Dewan Komisaris dan Direksi apabila terdapat pelampauan limit risiko
- Pelaksanaan forum RMC triwulanan yang membahas mengenai isu strategis terkait dengan pengelolaan risiko perusahaan
- Pelaporan profil risiko bulanan dari Unit Kerja Manajemen Risiko kepada Direksi.

##### Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

- Ketentuan Pasar sasaran
- Penentuan limit risiko di level korporat (*risk appetite statement*) mengenai NPL, dan NPL Coverage
- Ketentuan PDWK berjenjang

##### Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

- Identifikasi** risiko kredit dilakukan menggunakan sistem *Credit Risk Rating* (CRR) dan *Credit Risk Scoring* (CRS) sejak tahun 2001. Pemeringkatan internal (*Credit Risk Rating/Credit Risk Scoring*) yang digunakan di BRI saat ini disusun berdasarkan data empiris/historis dari debitur *existing* BRI dengan menggunakan metodologi statistik. Atas pemeringkatan internal ini dilakukan kaji ulang secara berkala terhadap akurasi model dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan kegagalan, dan dilakukan penyesuaian asumsi jika terjadi perubahan ketentuan baik eksternal (regulator) maupun internal. Dalam rangka mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas penggunaan model internal rating tersebut, telah dilakukan validasi oleh satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan model tersebut. Proses validasi atau *review* atas model pengukuran risiko kredit dilakukan dengan metode back testing.

## MANAJEMEN RISIKO

- b. Pengukuran** risiko kredit dilakukan dengan internal model menggunakan metode standard yaitu dengan menghitung probability of default dan loss given default untuk masing-masing segmen bisnis berdasarkan pergeseran kolektibilitas kreditnya. Saat ini, BRI juga sedang dalam tahap pengembangan *Internal Rating Based Approach* (IRBA). Selain itu, serangkaian *Stress Test* juga dilakukan untuk mengukur potensi kerugian maksimal apabila terjadi kondisi stress. *Stress test* tersebut dilakukan berdasarkan beberapa hipotesa dan asumsi antara lain: pertumbuhan ekonomi, inflasi, harga minyak dunia serta perubahan kurs Rupiah.
- c. Pemantauan** risiko kredit dilakukan melalui proses monitoring portfolio kredit yang merupakan tanggung jawab unit kerja administrasi kredit di kantor pusat. Monitoring portfolio dilakukan berdasarkan kualitas kredit, sektor ekonomi, penggunaan kredit, geografi unit kerja pemrakarsa, dan sebagainya. Pemantauan juga dilakukan untuk limit risiko kredit antara lain: NPL, SML, komposisi *Loan at Risk*, *Credit Cost*, *NPL Coverage ratio*, PH, *Recovery income*, dan *Recovery Rate*.
- d. Pengendalian** risiko kredit dilakukan melalui:
- 1) Putusan kredit mempertimbangkan aspek analisa Agunan, dimana harus mematuhi ketentuan *minimum loan to value* atau *minimum coverage* terhadap pinjaman
  - 2) Prosedur perbaikan kualitas kredit melalui restrukturisasi
  - 3) Prosedur meminimalkan kerugian risiko kredit melalui penyelesaian kredit dan optimalisasi penagihan
  - 4) Prosedur penghapusbukuan kredit bermasalah.

### Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern

- a. *Four Eyes Principles*: pemisahan fungsi pemrakarsa kredit dengan pemutus
- b. Pemisahan unit kerja pemrakarsa kredit (bisnis) dengan unit kerja analisis risiko kredit untuk segmen Korporasi
- c. Penggunaan aplikasi *Loan Approval System* (LAS) yang meliputi identifikasi risiko kredit melalui perhitungan CRR dan CRS serta putusan kredit yang telah sesuai dengan ketentuan PDWK berjenjang.

- d. Penentuan CKPN secara otomatis berdasarkan internal model untuk menghitung kecukupan pencadangan risiko kredit berdasarkan portfolio kredit per segmen.
- e. Integrasi antara pelampauan limit risiko kredit dengan penilaian kinerja unit kerja bisnis dan individual.

### RISIKO PASAR

Merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan Bank. Variabel pasar dalam huruf ini adalah suku bunga dan nilai tukar.

#### Upaya Pengelolaan Risiko

##### Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Dan Direksi

- a. Pemantauan tindak lanjut oleh Dewan Komisaris dan Direksi apabila terdapat pelampauan limit risiko.
- b. Pelaksanaan forum RMC triwulanan yang membahas mengenai isu strategis terkait dengan pengelolaan risiko perusahaan.
- c. Pelaporan profil risiko bulanan dari Unit Kerja Manajemen Risiko kepada Direksi.

##### Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Kebijakan, prosedur, dan limit risiko pasar telah disusun dan tertuang dalam *Treasury Policy* serta Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Pasar (KUMR dan P3MRP). Limit yang tercantum dalam kebijakan tersebut, antara lain *limit open position* untuk *trading*, limit transaksi *dealer*, *limit cut loss* dan *stop loss*, *limit uncommitted credit line*, *counterparty limit*, serta *limit Value at Risk* (VaR).

##### Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

- a. Identifikasi
  - 1) Perhitungan Risiko Suku Bunga dengan metode standar dilakukan terhadap posisi seluruh instrumen keuangan BRI yang diklasifikasikan sebagai *Trading Book* yang terekspos Risiko Suku Bunga dan Perhitungan Risiko Nilai Tukar dengan metode standar dilakukan terhadap posisi valuta asing BRI dalam *Trading Book* dan *Banking Book* yang terekspos Risiko Nilai Tukar.



## MANAJEMEN RISIKO

- 2) Faktor risiko yang diperhitungkan dalam risiko suku bunga dalam metode standar yaitu:
  - a) Risiko Spesifik (*Specific Risk*) dari setiap efek atau instrumen keuangan, tanpa memperhatikan posisi *long* atau posisi *short*. Dengan demikian proses saling hapus (*offset*) tidak dimungkinkan kecuali posisi tersebut bersifat identik;
  - b) Risiko Umum (*General Market Risk*) dari keseluruhan portofolio, dimana posisi *long* atau posisi *short* dalam efek atau instrumen yang berbeda dapat dilakukan saling hapus.
- 3) Nilai pasar surat berharga yang digunakan dalam perhitungan Risiko Spesifik dan Risiko Umum adalah *dirty price*, yaitu nilai pasar surat berharga (*clean price*) ditambah dengan *present value* dari pendapatan bunga yang akan diterima (*accrued interest*). Perhitungan *present value* atas *accrued interest* dapat tidak dilakukan apabila berdasarkan jangka waktu pembayaran kupon, nilai *present value* tersebut tidak menimbulkan perbedaan yang material. Perhitungan Risiko Nilai Tukar dilakukan terhadap semua posisi BRI baik *Trading Book* dan *Banking Book* dalam valuta asing termasuk emas, dengan mengacu pada perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN). Posisi suatu instrumen yang memiliki denominasi dalam valuta asing, selain terkena Risiko Nilai Tukar, juga dapat menimbulkan Risiko Suku Bunga (misalnya untuk instrumen *cross-currency swaps*). Dalam hal tersebut, maka eksposur Risiko Suku Bunga juga harus diperhitungkan.
 

Cakupan portofolio yang diperhitungkan dalam Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) antara lain:

  - 1) Posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek.
  - 2) Posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek dari pergerakan harga (*price movement*) secara aktual dan atau potensial.
  - 3) Posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan arbitrase (*locking in arbitrage profit*).
- 4) Instrumen derivatif yang terkait dengan surat-surat berharga atau suku bunga antara lain *Bond Forward*, *Bond Option*, *Interest Rate Swap*, *Cross Currency Swaps*, *Foreign Exchange Forward*, *Interest Rate Options*, dan *Forward Rate Agreements/ FRAs*.
- 5) Seluruh efek utang dengan suku bunga tetap atau mengambang, dan seluruh instrumen keuangan yang memiliki karakteristik yang sejenis, termasuk sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (*Negotiable Certificates of Deposits*) dan surat-surat berharga yang dijual oleh BRI dengan syarat dibeli kembali (*Repo/ Securities Lending*).
- 6) Posisi valuta asing BRI dalam *trading book* dan *banking book* yang terekspos risiko nilai tukar.
  - b. Pengukuran
    - 1) Perhitungan Risiko Suku Bunga dengan metode standar dilakukan terhadap posisi seluruh instrumen keuangan BRI yang diklasifikasikan sebagai *Trading Book* yang terekspos Risiko Suku Bunga dan Perhitungan Risiko Nilai Tukar dengan metode standar dilakukan terhadap posisi valuta asing BRI dalam *Trading Book* dan *Banking Book* yang terekspos Risiko Nilai Tukar.
    - 2) Pengukuran risiko pasar dilakukan secara berkala (harian, mingguan dan bulanan) antara lain menghitung risiko pasar menggunakan pendekatan metode pengukuran standardized dan pengukuran internal model (VaR) melalui aplikasi GUAVA, melakukan simulasi NII setiap terjadi perubahan suku bunga pasar dan menata profil maturity surat berharga.
    - 3) Valuasi portofolio *trading book* dan *banking book* dilakukan dengan menggunakan kuotasi harga pasar dari instrumen yang diperdagangkan secara aktif (*mark to market*). Harga pasar tersebut mencerminkan transaksi aktual dan rutin yang dilakukan secara wajar. Hasil valuasi berdasarkan nilai pasar (*mark to market*) divalidasi secara periodik untuk memastikan konsistensi dan kewajaran harga pasar yang digunakan. Apabila harga pasar

## MANAJEMEN RISIKO

tidak tersedia karena instrumen tidak aktif diperdagangkan maka valuasi penetapan nilai wajar menggunakan pendekatan simulasi harga (*mark-to-model*).

- c. Pemantauan dan Pengendalian  
Dalam menjalankan manajemen risiko pasar, Direksi secara rutin melakukan evaluasi risiko pasar melalui laporan harian Posisi Devisa Netto, forum *Asset & Liability Committee* (ALCO), serta laporan eksposur risiko pasar dalam Profil Risiko pasar. Selain itu, BRI juga menyelenggarakan forum *Market Risk Management Committee* setiap triwulan.

### Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern

- a. Pemisahan fungsi *front, middle and back office*.  
Fungsi manajemen risiko pasar BRI terdiri dari unit kerja *front office* (Divisi Treasury), *middle office* (Divisi Manajemen Risiko), dan *back office* (Divisi Sentra Operasi) dengan masing-masing memiliki kewenangan berbeda.
- 1) Jajaran *front office* berwenang melakukan transaksi instrumen keuangan dan bertanggung jawab memantau pergerakan harga pasar.
  - 2) Jajaran *middle office* menetapkan dan memantau limit risiko pasar dan secara berkala memastikan data pasar (*market price*) yang digunakan untuk *mark-to-market* (MTM).
  - 3) Jajaran *back office* melakukan *settlement* transaksi *treasury* dan secara harian menetapkan harga pasar (MTM) pada akhir hari. Pelaksanaan delegasi kewenangan diwujudkan melalui penetapan limit transaksi secara berjenjang sesuai dengan kompetensi dan pengalaman.
- b. Sistem pengendalian risiko pasar yang terintegrasi dengan fungsi *front office*.
- c. BRI telah mengimplementasikan sistem aplikasi *treasury and market risk* (GUAVA) yang merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang digunakan oleh fungsi *front office, middle office dan back office*. Melalui aplikasi ini BRI dapat melakukan pengukuran risiko pasar yang terintegrasi dengan proses transaksi harian. Selain melakukan monitoring eksposur risiko instrumen, BRI juga melakukan monitoring limit risiko pasar dan limit transaksi antara lain limit nominal transaksi *dealer, limit open position, Limit*

*Uncommitted Credit Line (UCL), cut loss limit, dan stop loss limit*. Monitoring dilakukan secara harian sehingga mempercepat penyediaan informasi terkini yang mendukung pengambilan keputusan oleh pejabat lini dan manajemen secara tepat waktu, terutama untuk instrumen yang termasuk ke dalam klasifikasi diperdagangkan/*trading*.

- d. Integrasi antara pelampauan limit risiko pasar dengan penilaian kinerja unit kerja bisnis.

### RISIKO LIKUIDITAS

Merupakan risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu.

#### Upaya Pengelolaan Risiko

##### Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Dan Direksi

- a. Pelaksanaan Rapat *ad-hoc* mini ALCO dan Rapat Direksi mingguan ketika kondisi likuiditas pasar atau BRI sedang cukup ketat.
- b. Pemantauan tindak lanjut oleh Dewan Komisaris dan Direksi apabila terdapat pelampauan limit risiko
- c. Pelaksanaan forum RMC triwulanan yang membahas mengenai isu strategis terkait dengan pengelolaan risiko perusahaan
- d. Pelaporan profil risiko bulanan dari Unit Kerja Manajemen Risiko kepada Direksi.

##### Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Penentuan limit-limit Risiko Likuiditas dengan berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas BRI dan memperhatikan *Risk Appetite & Risk Tolerance* Direksi BRI. Limit yang diatur antara lain:

1. *Limit Rasio Primary Reserve*
2. Limit Konsentrasi Aset dan Kewajiban
3. Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan
4. *Risk Appetite* BRI

##### Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

- a. Identifikasi, Pengukuran dan Pemantauan risiko melalui dashboard profil likuiditas harian
- b. Pengendalian risiko melalui *Protokol liquidity contingency plan*.



## MANAJEMEN RISIKO

**Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern**

- a. Sistem *monitoring* posisi likuiditas harian
- b. Sistem *monitoring Liquidity Coverage Ratio* harian
- c. Integrasi antara pelampauan limit risiko likuiditas dengan evaluasi kinerja.

**RISIKO OPERASIONAL**

Merupakan risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

**Upaya Pengelolaan Risiko****Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Dan Direksi**

- a. Pemantauan tindak lanjut oleh Dewan Komisaris dan Direksi apabila terdapat pelampauan limit risiko
- b. Pelaksanaan forum RMC triwulanan yang membahas mengenai isu strategis terkait dengan pengelolaan risiko perusahaan dan pelaksanaan ORMC (*Operational Risk Management Committee*) yang diselenggarakan bilamana diperlukan (bersifat insidental) membahas risk issue berdasarkan penilaian issue risiko operasional dan risiko lainnya serta kejadian-kejadian kerugian terkini berikut efektifitas kontrol dari proses bisnis dan operasional.

**Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit**

- a. Limit approval untuk transaksi yang diberikan berjenjang
- b. Parameter dan limit profil risiko operasional dan lainnya.

**Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko**

- a. **Identifikasi** risiko operasional dilakukan melalui perangkat RCSA yang bersifat kualitatif dan prediktif yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko dengan menggunakan dimensi dampak (*impact*) dan frekuensi (*likelihood*).
- b. **Pengukuran** risiko operasional dilakukan menggunakan metodologi *Basic Indicator Approach* (BIA). Saat ini secara bertahap, BRI sedang mempersiapkan menuju perhitungan dengan metode

*Standardized Approach* (SA), yang kemudian akan dilanjutkan dengan metode *Advanced Measurement Approach* (AMA).

- c. **Pemantauan** profil risiko dilakukan melalui perangkat Indikator Risiko Utama (IRU), berdasarkan hasil asesmen profil risiko dan data kerugian operasional yang dikelola melalui perangkat Manajemen Insiden (MI).
- d. **Pengendalian** risiko melalui:
  - 1) Prosedur asesmen Produk dan Aktifitas Baru untuk setiap produk maupun layanan baru, dimana setiap produk tersebut harus melalui *review* oleh Unit Kerja Manajemen Risiko dan Unit Kerja Kepatuhan serta Unit Kerja Hukum (jika diperlukan) sebelum didaftarkan ke regulator.
  - 2) Protokol *Business Continuity Management* untuk kejadian yang bersifat katastrofik. Dalam hal ini, BRI memiliki Tim Manajemen Krisis (TMK) yang berperan penting saat terjadi gangguan atau bencana dan bertanggung jawab melakukan langkah-langkah yang perlu diambil termasuk pengelolaan risiko reputasi. Struktur TMK dibentuk di seluruh Unit Kerja BRI yaitu TMK Kantor Pusat, TMK Kantor Wilayah, TMK Kantor Cabang. Aspek strategik yang harus diperhatikan dalam pengelolaan risiko reputasi saat krisis adalah menjaga kepercayaan nasabah, pemegang saham, dan masyarakat sekitar terhadap nama baik BRI.

**Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern**

- a. Pemisahan fungsi *Maker-Checker-Signer* dalam aktifitas operasional perbankan, dimana *approval* sebagian besar proses operasional telah *embedded* dalam *system Core Banking, Asset Management* maupun HR MIS.
- b. Prosedur penanganan aduan (*Complaint Handling*) dengan SLA tertentu
- c. Implementasi SOP (*Standard Operational Procedure*) terkait APU dan PPT untuk melindungi BRI dari sasaran tindak pidana pencucian uang dan terorisme. Serta adanya sistem AML (*anti money laundering*) untuk memonitor transaksi yang mencurigakan (CTR dan STR).

## MANAJEMEN RISIKO

- d. Integrasi antara pelampauan limit risiko operasional, hukum, strategik dan kepatuhan dengan penilaian kinerja unit kerja bisnis maupun individual.

### RISIKO HUKUM

Merupakan risiko yang menyebabkan oelh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat syahnya kontrak dan pengikatan yang tidak sempurna.

#### Upaya Pengelolaan Risiko

##### Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Dan Direksi

Pembahasan mengenai kasus hukum yang material, pengelolaan risiko hukum dan tindak lanjutnya dibahas dalam RMC, Rapat KPMR, dan Rapat Komite Audit.

##### Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

- Pedoman hukum disusun oleh Divisi Hukum Kantor Pusat dan disosialisasikan keseluruhan Unit Kerja Operasional.
- Pembagian kewenangan pendampingan kasus hukum di lingkungan Divisi Hukum Kantor Pusat dan Legal Officer di Kantor Wilayah.

##### Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

- Setiap proses transaksi maupun produk dan aktifitas baru yang memiliki potensi risiko hukum ditelaah lebih dulu oleh Divisi Hukum.
- Monitoring Risiko Hukum terhadap seluruh Unit Kerja Operasional di Indonesia dilakukan oleh Legal Officer di Kantor Wilayah melalui mekanisme pelaporan dan dokumentasi kasus-kasus hukum.
- Legal Officer di Kantor Wilayah dan Kantor Pusat akan melakukan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya apabila terjadi kasus hukum di Unit Kerja Operasional.

##### Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern

Divisi Hukum secara aktif men-sosialisasikan modus operasi kejahatan berikut prosedur penanganannya secara hukum untuk meminimalkan risiko hukum di Unit Kerja Operasional.

### RISIKO STRATEJIK

merupakan risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal.

#### Upaya Pengelolaan Risiko

##### Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Dan Direksi

Pembahasan mengenai perencanaan strategi, monitoring pencapaian target dan evaluasi strategi dibahas dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (Radirkom) pada saat pembahasan mengenai persetujuan RBB, persetujuan RKAP, dan pembahasan kinerja keuangan triwulanan.

Materi forum strategi (Forstra) yang diadakan setiap tahun untuk mendukung proses formulasi strategi juga dibahas dalam forum Rapat Direksi. Selain itu, Rapat Komite Direksi seperti ALCO juga membahas pencapaian kinerja dan upaya pencapaian kinerja keuangan.

##### Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Proses perencanaan, monitoring dan evaluasi strategi perusahaan tertuang dalam DUJ maupun BPO Divisi Corporate Development and Strategy dan Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan.

##### Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

- Penyelenggaraan *Joint Planning session* pada saat penyusunan RBB dalam rangka pembahasan strategi bisnis beserta rencana program kerja masing-masing Unit Kerja Divisi di Kantor Pusat.
- Penyelenggaraan Workshop Penyelarasan (*Alignment*) Rencana program kerja strategis antar Unit Kerja Kantor Pusat dalam rangka pencapaian target dalam RKAP dan RBB.
- Penerapan *Performance Management* BRI dengan pendekatan *Balanced Scorecard*, melalui penetapan *Key Performance Indicator* (KPI) dengan prinsip sinergi vertikal dan horisontal.
- Monitoring *Strategic Initiatives* Perusahaan oleh Unit Kerja *Change Management*. *Strategic Initiatives* yang dimaksud adalah program kerja non rutin yang



## MANAJEMEN RISIKO

- bersifat sangat strategis dan *critical*, yang harus dilakukan agar suatu target unit kerja dapat tercapai.
- e. Pembentukan Tim *Corporate Plan* dalam menyusun Rencana Jangka Panjang BRI Periode Tahun 2018-2022.
  - f. Di level Kantor Wilayah, BRI memiliki Bagian Operasional, Jaringan, Layanan & *Performance Management* yang berperan memonitor pencapaian target bisnis di wilayah kerjanya.
  - g. *Monitoring* dan *review* pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan di dalam RKAP, RBB maupun RJP dilakukan di level korporat oleh Divisi Corporate Development and Strategy secara berkala. *Review* juga dilakukan terhadap pencapaian program-program kerja (Rencana Kerja Fungsional – RKF) suatu Uker di KP yang dilakukan untuk mencapai target kinerja Rencana Kerja Anggaran – RKA.

**Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern**

Apabila terdapat realisasi program kerja suatu Uker masih *behind schedule* akibat keterkaitan dengan Uker lain, akan dilakukan penyesuaian /akselerasi program kerja ke Uker yang dimintakan *support*. Penyesuaian dan akselerasi program kerja tersebut dimonitor oleh Divisi Corporate Development and Strategy.

**RISIKO REPUTASI**

Merupakan risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank.

**Upaya Pengelolaan Risiko****Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Dan Direksi**

Pembahasan mengenai profil risiko reputasi dan pengelolaan risiko reputasi dan serta tindak lanjutnya dibahas dalam RMC, dan Rapat KPMR.

**Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit**

Dalam rangka pengendalian risiko reputasi telah ditunjuk Divisi SKP untuk menangani setiap informasi negatif. Proses pengelolaan risiko reputasi tertuang dalam DUJ maupun BPO Divisi Sekretariat Perusahaan.

**Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko**

- a. Kegiatan identifikasi risiko reputasi yang dilakukan secara berkala oleh Divisi SKP dengan melihat jumlah pemberitaan negative terhadap BRI, jumlah keluhan nasabah di media massa baik cetak maupun elektronik, call center dan rating perusahaan.
- b. Pengukuran risiko reputasi bertujuan untuk memperkirakan tingkat kerawanan (*vulnerabilities*) risiko reputasi yang dihadapi BRI. Setelah proses identifikasi akan dilakukan pengukuran terhadap risiko reputasi untuk menilai kategori risiko reputasi dengan menggunakan beberapa parameter sesuai dengan limit parameter dalam Laporan Profil Risiko reputasi.
- c. Pemantauan risiko yang dilakukan oleh Divisi SKP yaitu dengan melakukan monitoring secara berkala terhadap jumlah keluhan dan pemberitaan negative di media massa dan melaporkan dalam profil risiko reputasi.
- d. Pemantauan risiko reputasi di Kantor Wilayah dilakukan oleh Bagian OJL Sie Layanan masing-masing Kanwil yaitu dengan melakukan monitoring secara berkala terhadap kualitas layanan di Kanca, KCP dan BRI Unit binaan masing-masing, dimana untuk setiap tahunnya serta dilakukan pelaporan secara triwulanan mengenai kompilasi laporan penanganan pengaduan nasabah pada LKPBU.
- e. Pengendalian risiko reputasi BRI antara lain dengan terdapatnya SE mengenai kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi, serta Divisi SKP melakukan pengendalian risiko dengan cara berkoordinasi dengan Divisi Layanan dan Uker terkait untuk menyelesaikan pemberitaan negative dan keluhan nasabah sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan.

**Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern**

Divisi Kepatuhan secara aktif men-sosialisasikan dampak terhadap regulasi baru terhadap bisnis maupun operasional perusahaan.

**RISIKO KEPATUHAN**

Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten.

## MANAJEMEN RISIKO

### Upaya Pengelolaan Risiko

#### Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Dan Direksi

Pembahasan mengenai profil risiko kepatuhan dan pengelolaan risiko kepatuhan dan tindak lanjutnya dibahas dalam RMC, dan Rapat KPMR.

#### Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

- Proses pengelolaan risiko kepatuhan tertuang dalam DUJ maupun BPO Satuan Kerja Kepatuhan.
- Penetapan Unit Kerja Khusus baik di Kantor Cabang maupun di Kantor Pusat untuk mengkoordinir pengelolaan risiko kepatuhan terutama yang terkait dengan program APU dan PPT
- Pengelolaan risiko kepatuhan menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab dari Fungsi Manajemen Risiko yang mengkoordinir pelaksanaan Manajemen Risiko untuk 8 jenis risiko termasuk risiko kepatuhan.

#### Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

- Identifikasi risiko kepatuhan dilakukan melalui laporan profil risiko kepatuhan yang disampaikan oleh setiap Unit Kerja kepada Divisi Kepatuhan
- Setiap proses transaksi maupun produk dan aktifitas baru yang memiliki potensi risiko kepatuhan ditelaah lebih dulu oleh Divisi Kepatuhan.
- Monitoring terhadap kepatuhan pada regulasi terbaru merupakan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan. Setiap perubahan regulasi, antara lain Undang-undang, Peraturan Menteri, POJK, dan PBI ditelaah oleh Divisi Kepatuhan dan dinilai dampaknya bagi perusahaan.

#### Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern

- Proses Manajemen Risiko Kepatuhan didukung dengan Sistem Informasi yang memadai untuk mengidentifikasi dan memonitor gugatan karena pencucian uang dan pendanaan terkait terorisme. Sistem tersebut antara lain sistem Anti Money Laundering dan sistem pelaporan Cash Transaction Report serta Suspicious Transaction Report yang melekat di Core Banking.
- Divisi Kepatuhan secara aktif men-sosialisasikan dampak terhadap regulasi baru terhadap bisnis maupun operasional perusahaan.

### RISIKO TRANSAKSI INTRA GROUP

Merupakan risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

### Upaya Pengelolaan Risiko

#### Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Dan Direksi

- Direktur Kepatuhan BRI sebagai Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan BRI.
- Direksi BRI membentuk Risk Management Comitte Terintegrasi dan telah mengadakan Forum RMC Terintegrasi untuk membahas Risiko Intra-Group dan Kebijakan Risiko Intra-Group dalam Konglomerasi Keuangan BRI
- Dewan Komisaris Entitas Utama bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan bertanggung jawab untuk:
  - Mengarahkan, meyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
  - Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala.
- Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah mengadakan forum dengan Anak Perusahaan secara berkala untuk membahas Profil Risiko Intra-Group.

#### Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Terdapat Kebijakan yang telah mengatur tentang Manajemen Risiko Terintegrasi meliputi:

- Surat Keputusan Nokep: DIR 313-DIR/DMR/06/2015 tanggal 30 Juni 2016 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Perusahaan Anak.
- Surat Edaran S.18-DIR/DMR/07/2015 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko (*Risk Based Bank Rating*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 24 Juli 2015 yang didalamnya mengatur Profil Risiko Intra-Group dan Tata Kelola Terintegrasi
- Surat Keputusan Risk Management Comitte Terintegrasi Nokep: 137 – DIR/DMR/12/2016 tanggal 30 Desember 2016.



## MANAJEMEN RISIKO

### Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

- a. Identifikasi Risiko Intra-Group secara Terintegrasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi Konglomerasi Keuangan BRI.
- b. Pelaksanaan Risiko Inheren Intra-Group dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Intra-Group melalui Laporan Profil Risiko Terintegrasi
- c. Pemantauan dan Pengendalian Risiko melalui Forum Pembahasan Profil Risiko Perusahaan Anak yang dilaksanakan secara berkala untuk membahas *Risk Issue* Risiko Intra-Group dan rencana tindak lanjutnya
- d. Proses manajemen risiko transaksi Intra-grup memadai. Dalam rangka pengendalian risiko transaksi intra-grup telah ditunjuk Divisi *Investment Service* sebagai Unit kerja yang melakukan pengelolaan terhadap anak perusahaan.

### Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern

- a. Efektivitas budaya Sadar Risiko Intra-Group pada Konglomerasi Keuangan BRI.
- b. Pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) pada kualitas Penerapan Manajemen Risiko Intra-Group oleh Satuan Kerja Audit Internal dilakukan secara berkala minimal setahun sekali.

### RISIKO ASURANSI

Merupakan risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

### Upaya Pengelolaan Risiko

#### Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Dan Direksi

- a. Direktur Kepatuhan BRI sebagai Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan BRI.
- b. Direksi BRI membentuk Risk Management Committee Terintegrasi dan telah mengadakan Forum RMC Terintegrasi untuk membahas Risiko Asuransi dan kebijakan Risiko Asuransi dalam Konglomerasi Keuangan BRI

- c. Dewan Komisaris Entitas Utama bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan bertanggung jawab untuk:
  - 1) Mengarahkan, meyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
  - 2) Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala.
- d. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah mengadakan forum dengan Anak Perusahaan secara berkala untuk membahas Profil Risiko Asuransi.

### Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Terdapat Kebijakan yang telah mengatur tentang Manajemen Risiko Terintegrasi meliputi:

- a. Surat Keputusan Nokep: DIR 313–DIR/DMR/06/2015 tanggal 30 Juni 2016 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Perusahaan Anak.
- b. Surat Edaran S.18-DIR/DMR/07/2015 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko (*Risk Based Bank Rating*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 24 Juli 2015 yang didalamnya mengatur Profil Risiko Asuransi Terintegrasi dan Tata Kelola Terintegrasi.
- c. Surat Keputusan Risk Management Committee Terintegrasi Nokep: 137–DIR/DMR/12/2016 tanggal 30 Desember 2016.

### Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

- a. Identifikasi Risiko Asuransi secara Terintegrasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi Konglomerasi Keuangan BRI.
- b. Pengukuran Risiko Inheren Asuransi dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Asuransi melalui Laporan Profil Risiko Terintegrasi.
- c. Pemantauan dan Pengendalian Risiko melalui Forum Pembahasan Profil Risiko Perusahaan Anak yang dilaksanakan secara berkala untuk membahas *Risk Issue* Risiko Asuransi dan rencana tindak lanjutnya.

## MANAJEMEN RISIKO

### Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern

- a. Efektivitas budaya Sadar Risiko Asuransi pada Konglomerasi Keuangan BRI
- b. Pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) pada kualitas Penerapan Manajemen Risiko Asuransi oleh Satuan Kerja Audit Internal dilakukan secara berkala minimal setahun sekali.

## TARGET DAN PELAKSANAAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO 2017

### Kegiatan Kerja Program Kerja Risiko

#### 1. Penilaian Kecukupan Pengelolaan Risiko Produk dan Aktivitas Baru (PAB)

Dalam rangka penerbitan setiap produk dan atau aktivitas baru (PAB) di BRI, dilakukan proses manajemen risiko yang meliputi penilaian risiko oleh *product owner* terhadap setiap jenis risiko yang mungkin timbul dari penerbitan PAB, termasuk penetapan kontrol dan pengendalian yang ditujukan untuk memitigasi risiko PAB dimaksud. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) bertugas melakukan penilaian kecukupan atas pengelolaan risiko PAB dan merekomendasikan hasil penilaian dimaksud untuk mendapatkan persetujuan Direktur Bidang Manajemen Risiko BRI.

#### 2. Implementasi Budaya Sadar Risiko

Penerapan Budaya Sadar Risiko mencerminkan nilai-nilai serta komitmen Direksi BRI dalam rangka peningkatan kesadaran pekerja BRI terhadap pengelolaan risiko. Elemen Budaya Sadar Risiko adalah aspek-aspek dasar Budaya Sadar Risiko yang mendasari penerapan Budaya Sadar Risiko yang terdiri dari; Komitmen, Manajemen Kinerja, Tatakelola Risiko, Komunikasi, Pelatihan dan Pengembangan, Pelaporan dan Pemantauan.

Budaya Sadar Risiko dimulai dari adanya komitmen manajemen yang tertuang dalam strategi perusahaan, strategi inisiatif, dan strategi risiko dalam bentuk penetapan *risk appetite statement*. Budaya Sadar Risiko tercermin dari adanya penetapan manajemen kinerja berbasis risiko dalam bentuk KPI (*Key Performance Indicator*) yang diturunkan dari komitmen manajemen.

Budaya Sadar Risiko memiliki tatakelola risiko yang baik dilaksanakan pada seluruh jajaran organisasi pengelola risiko mulai dari *first line of defense* (Unit Kerja Operasional dan Bisnis), *second line of defense* (Unit Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan) serta *third line of defense* (Unit Kerja Audit Internal).

Komunikasi yang konsisten dan berkesinambungan antara manajemen dan pekerja juga dapat membangun Budaya Sadar Risiko. Setiap pekerja dapat dengan nyaman untuk berbicara terbuka dan jujur berkaitan dengan risiko dan permasalahan yang dihadapi. Kegiatan pelatihan dan pengembangan dapat meningkatkan pemahaman pekerja terhadap pentingnya penerapan manajemen risiko bagi perusahaan,

Saat ini sedang disusun materi pengembangan budaya sadar risiko berupa permainan interaktif dan dikemas dalam acara Forum Peningkatan Kinerja (FPK) di Uker Selindo dan diharapkan dapat membangun budaya sadar risiko. Selain itu, sistem pelaporan dan monitoring risiko melalui perangkat manajemen risiko operasional menciptakan terbentuknya budaya saling memberikan *feedback* yang dapat diterima secara positif untuk membawa perusahaan kearah yang lebih baik.

#### 3. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Operasional (PPMRO)

Penyusunan PPMRO merupakan kebijakan untuk mengendalikan dan/atau memitigasi risiko operasional, dan mengamati langkah alternatif untuk mengelola risiko operasional yang wajib dipahami, dilaksanakan, dan dipatuhi oleh seluruh Unit Kerja, sehingga pengembangan bisnis dan operasional BRI senantiasa dilaksanakan dalam kerangka prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

#### 4. Implementasi ketentuan Basel III : Market & Liquidity Risk Monitoring Tools

Implementasi Basel III dalam peningkatan monitoring risiko Pasar & Likuiditas merupakan salah satu program kerja yang sedang dilaksanakan BRI dalam peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko. Pada tahun 2017, BRI telah melakukan mengimplementasikan dan melakukan pemantauan terhadap Rasio Kecukupan Likuiditas: *Liquidity*



## MANAJEMEN RISIKO

*Coverage Ratio* (LCR) secara harian melalui Sistem Informasi LCR. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa posisi kecukupan likuiditas harian BRI dalam mengantisipasi kondisi krisis selalu terjaga sesuai dengan *Risk Appetite* BRI. Saat ini BRI sedang menyusun untuk implementasi lanjutan dari Basel III yaitu *Net Stable Funding Ratio* dan *Interest rate Risk in The Banking Book*.

### 5. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas (PPMRL)

PPMRL merupakan kebijakan manajemen risiko likuiditas BRI yang disusun untuk mendukung kegiatan pengelolaan sumber dan penggunaan dana bank secara berkesinambungan dengan pengendalian risiko yang memadai dan terukur di dalam kerangka prinsip kehati-hatian dalam perbankan (*prudential banking*). Kebijakan tersebut harus dipahami, dilaksanakan, dan dipatuhi oleh unit kerja BRI yang mengelola risiko likuiditas sehingga pengembangan bisnis BRI senantiasa dilaksanakan dalam kerangka prinsip kehati-hatian.

### 6. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Pasar (PPMRP)

PPMRP merupakan kebijakan manajemen risiko Pasar BRI yang disusun untuk memberikan pedoman tata kelola proses manajemen risiko pasar di BRI secara umum sesuai ketentuan yang berlaku meliputi kebijakan trading dan banking book, pengukuran risiko pasar, pengelolaan surat berharga dan derivatif, penetapan limit risiko pasar, serta stress testing dan back testing. Kebijakan tersebut harus dipahami, dilaksanakan, dan dipatuhi oleh unit kerja BRI yang mengelola risiko pasar sehingga risiko yang timbul dalam aktivitas bisnis *Treasury* BRI senantiasa terkendali.

### 7. Penyusunan Risk Appetite Statement

Dalam penyusunan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko, Direksi BRI memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*), toleransi Risiko (*Risk Tolerance*) dan limit Risiko BRI yang dapat digunakan untuk melaksanakan pengendalian Risiko secara efektif. Penetapan toleransi Risiko dan Limit Risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan strategi BRI secara keseluruhan.

*Risk Appetite* ditetapkan dalam bentuk pernyataan yang bersifat kuantitatif, kualitatif, dan ketidaktoleranan (*zero tolerance*) yang terkait dengan sasaran dan tujuan bisnis BRI. *Risk Appetite* dikaji ulang setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan memperhatikan perubahan rencana dan tujuan bisnis BRI serta perubahan kondisi lingkungan bisnis.

Penetapan *Risk Appetite* digunakan sebagai panduan objektif dalam membuat keputusan strategis terkait dengan pengelolaan Risiko, sebagai perangkat bagi Manajemen dalam melaksanakan tata kelola bisnis dengan baik serta sebagai panduan dari Manajemen kepada Unit Kerja mengenai jenis dan jumlah risiko yang dapat diterima dan dikelola.

### 8. Penyusunan Recovery Plan

Sebagai salah satu Bank yang telah ditunjuk sebagai *Domestic-Systemically Important Banks* (D-SIB atau Bank Sistemik) di Indonesia, BRI memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Aksi yang diatur dalam POJK No. 14/POJK.03/2017 Tentang Rencana Aksi.

Dokumen Rencana Aksi yang disusun memuat berbagai mekanisme yang diharapkan dapat mencegah, memulihkan, dan/atau memperbaiki kondisi finansial BRI sebagai akibat dari krisis keuangan atau gangguan pasar finansial lainnya yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank-bank Sistemik

Dalam Gambaran Umum Bank, BRI telah melakukan analisis materialitas dan pemeringkatan untuk menentukan peringkat lini bisnis, jaringan kantor dan perusahaan anak. Analisis dilakukan dengan menggunakan *scorecard* materialitas berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif yang ditetapkan. Hasil pemeringkatan lini bisnis adalah sebagai berikut (1) Mikro, (2) Ritel, (3) Korporasi dan (4) *Investment Services*. Adapun peringkat perusahaan anak yang material adalah (1) BRI Life, (2) BRI Syariah, (3) BRI Multifinance, dan (4) BRI Agro. Pemeringkatan materialitas Jaringan Kantor dilakukan berdasarkan Kantor Wilayah (Kanwil) yaitu Bandung, Yogyakarta, Makassar, Malang, dan Jakarta 2.

## MANAJEMEN RISIKO

Untuk keterkaitan usaha eksternal, BRI melakukan analisis berdasarkan aspek (1) *Intra-financial system assets*, (2) *Intra-financial system liabilities*, dan (3) *securities outstanding* serta 10 (Sepuluh) *counterpart* signifikan (Obligor, Depositor, *Treasury Counterparties*) sesuai dengan *common practice* yang ada. Untuk analisis skenario dampak perubahan sistemik, BRI melakukan aktivitas *Stress Testing* yang dibagi ke dalam 2 (dua) bagian skenario yaitu skenario *Idiosyncratic* serta skenario *Market-wide*. Untuk skenario *Idiosyncratic* BRI mengembangkan skenario terkait konsentrasi pada obligor serta industri yang ada. Untuk skenario *Market-wide*, BRI menggunakan *Regulatory Stress Testing Financial Stress Assessment Program* (atau disingkat dengan FSAP) berdasarkan skenario yang telah ditetapkan oleh FSAP sebagai representasi atas kondisi krisis yang dapat terjadi.

### Kegiatan Credit Risk Monitoring

#### 1. Kegiatan Perkreditan

- Rekening Pinjaman status 4 (Kolektibilitas Kurang Lancar)  
Terdapat penurunan jumlah rekening pinjaman status 4 pada posisi bulan September 2017, jumlah rekening pinjaman status 4 paling tinggi pada segmen Ritel. Untuk penyelesaian rekening pinjaman status 4 rata-rata sebesar 90%.
- Kajian kinerja dan tingkat kompetitif asuransi jiwa pada produk Briguna  
Berdasarkan *outstanding* kredit Briguna masih mengalami kenaikan namun jika dilihat berdasarkan jumlah debitur mengalami penurunan. Rata-rata NPL Januari 2015 s.d Juli 2017 sebesar 0,92%. Kinerja *payroll loan* dibandingkan dengan bank pesaing. Rata-rata pembayaran premi dibandingkan pembayaran klaim sebesar 54%..
- Simulasi perhitungan Coverage CKPN yang optimum dan sesuai dengan risk appetite BOD.
- Penerimaan Kredit Ekstrakomtabel Tidak Optimal.
- Penetapan Struktur, Tipe, dan Syarat Kredit Tidak Sesuai Hasil Analisis Kredit / Tidak Sesuai Ketentuan.
- Penerimaan Kredit Ekstrakomtabel Tidak Optimal.

#### 2. Risk Awareness bidang Perkreditan

- PH Rekening dilakukan kurang dari atau sama dengan 12 bulan sejak tanggal realisasi
- Potensi kerugian akibat Freeport melakukan pemutusan kontrak karya (Kanwil Jayapura)
- Potensi kerugian akibat fasilitas KUR Baru (Mikro/Ritel) yang belum dijamin.
- Peningkatan CKPN akibat adanya tunggakan kecil (Rp. 15 ribu)
- Tata cara validasi KTP
- Pinjaman bersaldo kredit
- Suku bunga restruk segmen ritel konsumtif tidak sesuai ketentuan
- Suku bunga restruk segmen ritel komersial di bawah *counter rate*.
- Administrasi permohonan kredit tidak lengkap atau tidak ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- Pembinaan dan monitoring secara *off site* tidak dilakukan sesuai ketentuan.
- Penetapan Struktur, Tipe, dan Syarat Kredit Tidak Sesuai Hasil Analisis Kredit / Tidak Sesuai Ketentuan.
- Dampak Rekening Pinjaman Status 3 (*Maturity but Not Closed*).

#### 3. Penyusunan Credit Risk Management Handbook

CRM *handbook* merupakan buku saku yang berisi titik kritis prosedur perkreditan, Risk Issue & Control pada segmen bisnis Ritkom yang disusun berdasarkan kebijakan.

#### 4. Penyusunan Laporan Kinerja Perkreditan BRI (ERM Report)

Laporan Kinerja Perkreditan BRI yang dilakukan setiap bulan dalam rangka monitoring dan analisa pencapaian kinerja perkreditan sebagai laporan ke BOD dan Divisi Bisnis.

#### 5. Laporan Regulatory

- Pelanggaran BMPK
- Pelampauan BMPK
- BMPK Pihak Terkait
- Restrukturisasi Kredit
- Top 25 debitur
- Laporan Perkembangan Restrukturisasi Kredit ke OJK



## MANAJEMEN RISIKO

**6. Laporan Rutin Bulanan**

- a. Laporan Reaktivasi Kredit.
- b. BMPK ke BOD dan Komisaris.
- c. Laporan Restrukturisasi Kredit ke BOD dan Komisaris.

**Penyusunan Kebijakan Greenbanking**

Peningkatan ekonomi di seluruh dunia menyebabkan pengaruh negatif bagi lingkungan. Perhatian terhadap lingkungan semakin gencar dilakukan oleh berbagai pihak, baik di tingkat global dan lokal. Disadari bahwa peran perbankan sangat signifikan untuk mendorong investasi yang bertanggungjawab terhadap lingkungan karena perbankan menyalurkan kredit terhadap berbagai sektor. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penerapan Sustainable Finance (SF) di perbankan atau sering disebut perbankan hijau (*Greenbanking*).

Alasan penerapan *greenbanking* Bagi BRI karena penerapan *Greenbanking* dinilai memiliki dampak positif yaitu:

1. Merupakan kontribusi nyata peran BRI terhadap dampak ekonomi yang seimbang dengan lingkungan sosial dan kelestarian alam
2. Meningkatkan reputasi BRI sehingga akhirnya dapat meningkatkan value BRI dimata stakeholders
3. Merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko lingkungan sosial dan tata kelola (LST) yang selaras dengan prinsip kehati-hatian perbankan
4. Membuka peluang bisnis, kerjasama dan pendanaan terkait *green fund* baik dengan lembaga nasional maupun internasional

*Roadmap Greenbanking* BRI diselaraskan sesuai dengan POJK No 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Sesuai POJK tersebut, BRI sebagai Bank BUKU IV wajib menerapkan SF per 1 Januari 2019. Roadmap secara umum yaitu:

- a. Tahun 2017 merupakan tahap untuk penyusunan kebijakan, peningkatan capacity building serta sosialisasi.
- b. Tahun 2018 menyesuaikan POJK, penyesuaian ketentuan internal BRI dan menyusun rencana aksi untuk tahun 2019.

- c. Tahun 2019 melakukan penyesuaian terhadap kebijakan turunan dan melaksanakan Rencana aksi keuangan berkelanjutan 2019 serta menyusun Laporan Keberlanjutan.

Bank BRI telah melaksanakan tahapan roadmap sesuai dengan tahap pertama pada tahun 2017. Selain itu, dalam rangka menjadi *champion* green banking serta persiapan terhadap penerapan POJK, BRI telah melakukan implementasi SF secara bertahap, antara lain:

1. Mengikuti pilot project "*First Step To Be A Sustainable Finance*" hasil kerjasama dan WWF Indonesia
2. Menyusun kebijakan terkait keberlanjutan yaitu: Kebijakan Umum Keberlanjutan (*Sustainability*). Kebijakan Strategi Implementasi Keberlanjutan serta Kebijakan Manajemen Risiko LST Sub sektor kelapa sawit.
3. Menyusun Laporan Keberlanjutan secara tahunan
4. *Capacity building* bagi Pekerja BRI terutama jajaran analis kredit
5. *Internal campaign* untuk memberikan awareness bagi pekerja BRI khususnya dan debitur BRI umumnya
6. Keikutsertaan dan partisipasi aktif pada berbagai kegiatan yang diadakan oleh regulator dan pihak/ instansi terkait
7. Mengikuti ajang penghargaan terkait sustainable finance antara lain *Sustainable Finance Award* yang diselenggarakan oleh OJK.

**PELAKSANAAN IMPLEMENTASI BASEL**

Perseroan telah menerapkan beberapa Pilar Basel dalam implementasi Manajemen Risiko, antara lain:

**1. Permodalan**

Sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, BRI telah memastikan bahwa modal BRI telah memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko, dan membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*), yang meliputi *Capital Conversation Buffer*, *Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systemically Important Bank* (D-SIB), di samping itu BRI telah memenuhi persyaratan minimum *Leverage Ratio* yang telah dilaporkan kepada regulator secara triwulanan.

## MANAJEMEN RISIKO

### 2. Kredit

Pengukuran risiko kredit menggunakan *standardized approach* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan POJK nomor 34/POJK.03/2016 mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum serta SE OK nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

### 3. Operasional

Perhitungan modal minimum untuk risiko operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar sesuai dengan SE OJK No. 24/SEOJK.03/2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar.

### 4. Pasar dan Likuiditas

- a. Perhitungan modal minimum untuk risiko pasar dengan menggunakan *Standardized Model* sesuai dengan POJK No. 38/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar Dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
- b. Pengukuran ketahanan Likuiditas Bank dengan menggunakan *Basel III Approach: Liquidity Coverage Ratio & Net Stable Funding Ratio*, sesuai dengan POJK No. 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum dan POJK No. 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) Bagi Bank Umum.

## PENILAIAN PROFIL RISIKO

Pengelolaan risiko dilakukan pada seluruh aktivitas kegiatan bank dengan mengacu kepada ketentuan standar pengelolaan yang ditetapkan oleh pihak regulator. Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko

dilakukan dengan secara berkesinambungan oleh *three line of defense*, yaitu seluruh *risk taking unit* selaku *first line*, Unit Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko selaku *second line* dan Unit Internal Audit selaku *third line*. Hasil penilaian profil risiko pada triwulan IV 2017, peringkat profil risiko BRI berada pada tingkat *low to moderate*, hal ini menunjukkan bahwa Bank mampu menjaga tingkat pengelolaan risiko seiring dengan berkembangnya bisnis dan persaingan bank di Indonesia.

### Self Assessment

#### 1. Peringkat Profil Risiko

Posisi Risiko BRI Triwulan IV - 2017 disusun berdasarkan data Bulan Desember 2017 (*unaudited*). Secara keseluruhan peringkat Profil Risiko BRI adalah **Low to Moderate (Peringkat 2)** dengan tingkat risiko *Low to Moderate* meliputi: Risiko kredit, pasar, likuiditas, hukum, strategik, kepatuhan dan reputasi, adapun tingkat risiko *Moderate* meliputi: risiko operasional

#### 2. Risiko Inheren

Predikat komposit Risiko Inheren adalah *Low to Moderate* dengan perincian peringkat risiko *Low to Moderate* untuk Risiko kredit, pasar, likuiditas, hukum, strategik, kepatuhan dan reputasi sedangkan dengan peringkat risiko *Moderate* adalah risiko operasional.

#### 3. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Predikat komposit kualitas penerapan Manajemen Risiko adalah *Satisfactory* dengan dengan perincian peringkat *Satisfactory* meliputi Risiko kredit, pasar, likuiditas, hukum, strategik, kepatuhan dan reputasi, adapun peringkat *Fair* untuk risiko operasional.

### Analisa

Peringkat Profil Risiko BRI adalah **Low to Moderate (Peringkat 2)** tidak mengalami perubahan peringkat risiko dibanding tahun Desember 2016 (*Low to Moderate* /peringkat 2) namun mengalami perbaikan skor risiko dari 2,02 pada Desember 2016 menjadi 2,00 pada Desember 2017.



## MANAJEMEN RISIKO

## EVALUASI EFEKTIFITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Sistem pengendalian risiko dinilai telah memadai dengan dilakukan evaluasi terhadap kecukupan sistem pengendalian intern oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), SKAI, dan Auditor Eksternal.

Evaluasi yang dilaksanakan oleh SKMR mencakup metode asumsi dan *variable* yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan limit risiko sedangkan kaji ulang oleh SKAI dan Auditor Eksternal mencakup kerangka manajemen risiko dan penerapan manajemen risiko oleh unit bisnis dan/atau unit pendukung

## PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi di BRI meliputi 4 tahapan yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan tersebut dilakukan terhadap seluruh faktor (kualitatif dan kuantitatif) yang berdampak secara signifikan terhadap kondisi keuangan Konglomerasi Keuangan BRI.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

### 1. Penetapan Limit Risiko Terintegrasi

Penyusunan limit risiko dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari anggota Konglomerasi Keuangan BRI. Penetapan limit risiko mencakup limit secara keseluruhan, limit setiap jenis risiko dan limit setiap anggota konglomerasi Keuangan yang memiliki eksposur risiko. Limit risiko tersebut akan direview secara berkala oleh Divisi *Enterprise Risk & Portofolio Management* BRI terhadap perubahan kondisi yang terjadi. Divisi *Enterprise Risk & Portofolio Management* BRI menyampaikan hasil pemantauan limit secara berkala kepada Direksi BRI atau *Risk Management Committee* BRI.

### 2. Laporan Profil Risiko Terintegrasi

Laporan profil risiko terintegrasi disusun setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, disampaikan secara komparatif dengan posisi semester sebelumnya. Peringkat profil risiko Konglomerasi Keuangan BRI posisi bulan Desember 2017 adalah **Low to Moderate**.

### 3. Kecukupan Permodalan Konglomerasi Keuangan

Kecukupan permodalan dilakukan melalui pemantauan profil risiko dan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terintegrasi. BRI menyusun dan melaporkan Laporan Perhitungan KPMM Terintegrasi kepada OJK setiap semester.

Rasio KPMM Terintegrasi konsolidasi BRI dan Perusahaan Anak posisi Desember 2017 sebesar 236%. Nilai Rasio KPMM Terintegrasi tersebut berada di atas batas minimum ketentuan sebesar 100%.

### 4. Manajemen Likuiditas Konsolidasi

Posisi *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) BRI secara konsolidasi posisi Desember 2017 sebesar 251.52%.

### 5. Pemantauan Transaksi Intragroup

Total transaksi intra group terhadap total asset, dihitung semua transaksi *on balance sheet (borrow and placement money market)* baik dari BRI ke Perusahaan Anak ataupun sebaliknya sebesar Rp1,03 triliun atau kurang dari 0,28% dari total asset BRI.

### 6. Pelaksanaan Risk Management Committee (RMC) Terintegrasi.

*Risk Management Committee* (RMC) Terintegrasi merupakan komite tertinggi dalam sistem manajemen risiko Konglomerasi Keuangan BRI. Pada tahun 2017, BRI telah melaksanakan RMC terintegrasi sebanyak 2 kali yaitu tanggal 3 April 2017 dan 28 September 2017.

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Dalam rangka menerapkan sistem pengendalian internal yang menyeluruh secara efektif, BRI mengacu pada ketentuan eksternal antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 Tanggal 16 Maret 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.35/SEOJK03/2017 Tanggal 7 Juli 2017 Tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum.

Beberapa ketentuan yang mengatur mengenai Sistem Pengendalian Intern BRI antara lain:

1. Kode Etik, Budaya Kepatuhan, Kebijakan GCG, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, Strategi Anti *Fraud* dan Kebijakan WBS
2. Struktur Organisasi, Penetapan Formasi & Daftar Uraian Jabatan Seluruh Unit Kerja
3. Kebijakan Perangkat Manajemen Risiko Operasional
4. Kebijakan & Pedoman Operasional Manajemen Risiko Atas Rencana Penerbitan Produk dan Aktivitas Baru
5. Buku Pedoman Operasional
6. Kebijakan Umum dan Pedoman Pelaksanaan Organisasi
7. Kebijakan Umum dan Pedoman Pelaksanaan Rencana Jangka Panjang & Rencana Bisnis Bank
8. Kebijakan Tata Kelola & Manajemen Risiko TI
9. Kebijakan Umum Teknologi Informasi
10. Kebijakan Umum & Pedoman Pelaksanaan Kredit
11. Ketentuan Pembukuan Dan Verifikasi Serta Kewenangan User di BRINETS

Piagam Audit Intern.

### Kerangka Sistem Pengendalian Intern dengan COSO

BRI menerapkan kegiatan pengendalian internal dengan mengacu pada kerangka yang diakui secara internasional, yakni *COSO IC framework (Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information & Communication and Monitoring)*.

Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan:

1. Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan atau tujuan kepatuhan
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna dan tepat waktu atau tujuan informasi
3. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha Bank atau tujuan operasional
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh atau tujuan budaya risiko. Mendapatkan kepastian dipatuhinya seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam seluruh kegiatan operasional.

Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pengendalian intern terdiri dari:

1. *1<sup>st</sup> line of defense* selaku *risk owner* yaitu Unit Kerja yang melakukan aktivitas bisnis dan operasional serta mengelola risiko yang dihadapi (a.l. Unit Kerja Operasional)
2. *2<sup>nd</sup> line of defense* yaitu Unit Kerja yang melakukan pengawasan fungsional (a.l. Jajaran MR Kantor Pusat & Wilayah, Div Kepatuhan, dan Div Kebijakan & Prosedur).
3. *3<sup>rd</sup> line of defense* yaitu Unit Kerja yang melakukan *assurance*. SKAI merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern yang melakukan fungsi pengawasan atas monitoring sistem pengendalian intern.

### Elemen Sistem Pengendalian Intern

BRI telah memiliki kebijakan sistem pengendalian internal yang mencakup 5 (lima) komponen:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian
  - a. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern seperti mengadakan pertemuan berkala dengan Direksi dan Pejabat Eksekutif untuk membahas efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
  - b. Direksi memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern dengan memastikan kegiatan fungsi pelaksanaan intern telah dilaksanakan oleh pejabat dan pekerja.



## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

2. Identifikasi dan Penilaian Risiko  
Sistem pengendalian intern yang efektif mengharuskan perseroan untuk selalu mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian perusahaan, baik risiko individual maupun secara keseluruhan (*aggregate*).

3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi  
Kegiatan pengendalian meliputi kebijakan, prosedur dan SOP yang diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai struktur organisasi perseroan membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian kepada perseroan.

Perseroan mematuhi prinsip pemisahan fungsi atau *Four Eyes Principle* yaitu setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi.

4. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi  
Sistem akuntansi meliputi metode dan catatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi mencatat/ membukukan dan melaporkan transaksi Bank. Dalam menjamin data akunting yang akurat dan konsisten, maka dilakukan rekonsiliasi antara data akunting dan sistem informasi manajemen secara berkala.

Sistem Informasi dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi.

Sistem komunikasi mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern dan ekstern seperti Otoritas Jasa Keuangan, Auditor Eksternal, Pemegang Saham, dan Nasabah.

5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Perseroan selalui melakukan pemantauan terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Pemantauan risiko utama Bank menjadi prioritas dan berfungsi sebagai bagian kegiatan perseroan termasuk evaluasi secara berkala.

Kelemahan dalam pengendalian intern harus segera dilaporkan kepada dan menjadi perhatian pejabat atau Direksi yang berwenang. Kelemahan pengendalian intern yang material juga dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Seluruh manajemen dan pekerja BRI memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal BRI. Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam terlaksananya sistem pengendalian internal BRI antara lain *1<sup>st</sup> line of defense* (Manajemen dan Seluruh Pekerja BRI), *2<sup>nd</sup> line of defense* (Jajaran Manajemen Risiko termasuk Fungsi Manajemen Risiko, dan Jajaran Kepatuhan), dan *3<sup>rd</sup> line of defense* (Jajaran SKAI termasuk Resident Auditor Kanca dan Resident Auditor Unit).

### Implementasi Sistem Pengendalian Intern Top Level Review

Pengendalian melalui kaji ulang secara berkala dilakukan minimal setahun sekali oleh Manajemen (*Top Level Review*). Dewan Komisaris dan Direksi BRI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengendalian *Top Level Review* dalam penerapan Strategi Anti *Fraud* diantaranya:

1. Pengembangan budaya dan kepedulian terhadap Anti *Fraud* pada seluruh jenjang informasi.
2. Penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik.
3. Penyusunan dan pengawasan penerapan Strategi Anti *Fraud*.
4. Pengembangan kualitas SDM khususnya peningkatan *awareness* dan pengendalian *fraud*.
5. Pemantauan dan evaluasi atas insiden *fraud* serta penerapan tindak lanjut.
6. Pengembangan saluran komunikasi yang efektif di internal BRI.

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

### Tinjauan Fungsional

Satuan Kerja Audit Intern melakukan kegiatan *assurance* dan pemberian jasa konsultasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, pengelolaan risiko dan *corporate governance*. Kegiatan audit dilakukan secara berkala untuk setiap level Unit Kerja BRI. SKAI menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Utama, dan Komite Audit dengan tindasan kepada Direktur Kepatuhan. SKAI melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah perbaikan yang disampaikan oleh *Auditee*.

Selain melakukan kegiatan audit, SKAI melakukan kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko, dan penerapan Strategi Anti *Fraud*.

### Pengendalian Sistem Informasi dan Teknologi

Satuan Kerja Teknologi Informasi (TI) menerapkan praktik-praktik pengendalian yang memadai sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko TI secara keseluruhan dengan memperhatikan diantaranya:

1. Hasil penilaian risiko.
2. Kriteria penanganan risiko dan rekomendasi bentuk penanganan risiko.
3. Ketentuan perundang-undangan dan persyaratan hukum atau kontrak lainnya.
4. Praktik-praktik pengendalian antara lain:
  - a. Penerapan kebijakan, standar, prosedur dan struktur organisasi termasuk alur kerjanya.
  - b. Pengendalian intern yang efektif yang dapat memitigasi risiko dalam proses TI.
  - c. Penetapan kebijakan, standar, prosedur sistem pengelolaan pengamanan informasi yang diperlukan BRI untuk melakukan pengamanan aset terkait penyelenggaraan dan penggunaan TI.
  - d. Evaluasi hasil kaji ulang dan pengujian atas *Disaster Recovery Plan*.
  - e. Penetapan kebijakan dan prosedur mengenai penggunaan pihak penyedia jasa TI.
  - f. Evaluasi kemampuan penyedia jasa TI untuk menjaga tingkat keamanan yang diterapkan oleh BRI dari kerahasiaan, integritas data dan ketersediaan informasi.

- g. Pengawasan dan pemantauan sebagai tanggung jawab manajemen BRI dengan melakukan alih daya (*outsourcing*) operasional TI kepada pihak penyedia jasa TI.
- h. Pemakaian asuransi sebagai upaya dalam mitigasi potensi kerugian dalam penyelenggaraan TI.

### Pengendalian Aset Fisik

Pengendalian aset fisik BRI tertuang dalam Kebijakan Umum Manajemen Aktiva Tetap dan Logistik (KEMAL). KEMAL memuat kebijakan manajemen aktiva tetap dan pengelolaan logistik BRI secara terpadu yang meliputi kegiatan perencanaan, penentuan kebutuhan, pendanaan, pengadaan, pembayaran, distribusi, asuransi, pemeliharaan, optimalisasi aset, administrasi dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi.

### Dokumentasi

Perseroan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit secara memadai. Dokumen tersebut *diupdate* secara berkala untuk menggambarkan kegiatan operasional Perseroan dan diinformasikan kepada pejabat dan pegawai. Akurasi dan ketersediaan dokumen harus dinilai pada pelaksanaan audit oleh auditor intern.

### Pembagian Tugas

Pengendalian intern melalui pemisahan jabatan merupakan bagian fungsi pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada tingkat organisasi Perseroan diantaranya:

1. Penerapan fungsi *Dual Control* dalam kegiatan operasional dan bisnis Perseroan.
2. Penetapan kewenangan limit dalam akses dan pemberian keputusan atas transaksi.
3. Menghindari pemberian tanggung jawab dan wewenang yang dapat menyebabkan terjadinya benturan kepentingan.
4. Pemisahan fungsi *Maker, Checker, dan Signer* ke beberapa orang dalam mitigasi risiko operasional dan bisnis.



## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

### Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal 2017

BRI melakukan evaluasi efektivitas penerapan SPI secara berkesinambungan, baik yang dilakukan oleh fungsi *1<sup>st</sup> line of defense* sebagai *risk owner* yang melakukan evaluasi secara terus menerus dalam kegiatan operasional bank, fungsi *2<sup>nd</sup> line of defense* yakni jajaran Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang secara berkala memastikan kecukupan pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap ketentuan, serta fungsi *3<sup>rd</sup> line of defense* yang melakukan kegiatan audit.

Disamping itu, untuk mengantisipasi perubahan kondisi internal dan eksternal BRI, juga senantiasa melakukan evaluasi kecukupan sistem pengendalian intern untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern masih dapat diandalkan.

Pada dasarnya evaluasi kecukupan dan efektivitas penerapan sistem pengendalian intern dilaksanakan terhadap beberapa komponen pengendalian yang saling berkaitan, mencakup:

1. Budaya pengendalian
2. Identifikasi dan penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi
4. Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi
5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan

### Hasil Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

SKAI melakukan analisis atas kelemahan pengendalian intern atas hasil audit dan menyampaikan hasil analisis tersebut ke Unit Kerja yang berwenang sebagai salah satu sumber informasi dalam penyempurnaan sistem ataupun kebijakan pengendalian, peningkatan kompetensi dan perbaikan kelemahan pengendalian intern sebagai wujud peran SKAI untuk melakukan evaluasi efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern secara keseluruhan.

### Pernyataan Direksi dan Komisaris atas Kecukupan Pengendalian Internal BRI

Berdasarkan hasil penelaahan dan berdasarkan diskusi bersama Manajemen, Komite Audit, Auditor Independen, Internal Auditor, dan beberapa Divisi Terkait bahwa Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa sistem pengendalian intern dan manajemen risiko perusahaan telah memadai dalam mengidentifikasi risiko sehingga Perseroan dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko tersebut.

# PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

## Permasalahan Hukum BRI 2017

Permasalahan hukum yang dihadapi BRI selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

### Perkara Hukum yang di hadapi BRI 3 tahun terakhir

Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
256 Perkara	477 Perkara	398 Perkara

### Perkara Hukum berdasarkan aktivitas bank

Triwulan 2017	Kredit	Treasury & Investigasi	Operasional & Jasa	Support	Total
Triwulan 1	80	-	4	1	85
Triwulan 2	83	-	3	5	91
Triwulan 3	104	-	6	4	114
Triwulan 4	99	-	2	7	108

### Perkara Hukum dan Status Penyelesaian

Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana	PHI	PTUN	Pailit
Telah Selesai (Mempunyai kekuatan hukum tetap)	1409	4	45	42	2
Dalam Proses	1257	39	14	34	18
<b>Total</b>					

### Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

1 Perkara Pajak	
Pokok Perkara	BRI mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 0003/206/10/093/12 tanggal 28 November 2012 tentang Ketetapan Pajak Kurang Bayar Atas Pajak Penghasilan Tahun 2010 yang menyatakan bahwa BRI masih memiliki kewajiban untuk memenuhi kekurangan bayar atas PPh Tahun 2010 sebesar Rp 1.4 Trilyun,-
Posisi Perkara	Atas SKPKB tersebut BRI telah mengajukan keberatan melalui surat No. B.154-DIR/AMK/02/2003 tanggal 27 Februari 2013 tentang permohonan pengajuan keberatan. Dalam surat keberatan tersebut, BRI telah menyampaikan alasan keberatan atas nilai koreksi yang dilakukan pihak Dirjen Pajak (DJP) terhadap penghapusbukuan Piutang (kredit) sebesar Rp. 4.964.081.000.000,-. Menurut BRI, pos penghapusan piutang tersebut dapat seluruhnya diakui sebagai biaya dalam laporan laba rugi fiskal.
Status Penyelesaian	Pengajuan keberatan tersebut ditolak dan BRI melakukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Pajak. Atas Banding Pajak BRI menang karena Majelis Hakim Peradilan Pajak mengabulkan seluruh Banding BRI.  Terhadap putusan Banding Pajak tersebut DJP mengajukan upaya hukum berupa Peninjauan Kembali ke Pengadilan Pajak.
Pengaruh terhadap Perusahaan	Rp 1.4 triliun
Sanksi Administratif	Nihil



## PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

<b>2 Perkara Pensiunan BRI</b>	
Pokok Perkara	<p>Gugatan perkara ini terjadi di beberapa wilayah. Para Penggugat yang berjumlah ± 2.000 (dua ribu) orang mengajukan gugatan pada beberapa wilayah Pengadilan Hubungan Industrial yaitu di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung, Semarang, Yogyakarta, Jakarta Pusat dan Surabaya. Dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>BRI tidak adil dalam memberikan Uang Pesangon kepada Para Penggugat dimana Para Penggugat hanya menerima Uang Penggantian Hak (bukan Uang Pesangon) yang jumlahnya tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.</li> <li>berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2007-2009, 2009-2011, 2011-2013, 2013-2015, jumlah Uang Penggantian Hak yang Para Penggugat terima karena Pensiun Normal lebih sedikit jika dibandingkan dengan Jumlah Uang yang diterima oleh mantan pekerja BRI yang mengakhiri masa kerja karena alasan lain (mengundurkan diri atas permintaan sendiri, tidak cakap melaksanakan tugas dengan wajar, rasionalisasi, ditahan pihak yang berwajib, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan, dijatuhi hukuman disiplin, mangkir, alasan kesehatan, dan meninggal dunia).</li> </ol> <p>Perbedaan tersebut dikarenakan pekerja BRI yang mengakhiri masa kerja karena alasan lain mendapatkan kompensasi berupa komponen Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan/atau Uang Pisah.</p>
Posisi Perkara	Atas gugatan-gugatan yang diajukan pada PHI Bandung, Semarang, Yogyakarta, Jakarta Pusat dan Surabaya tersebut, BRI telah berhasil membuktikan bahwa BRI telah membayarkan uang pesangon kepada Para Penggugat (Para Pensiunan) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga seluruh perkara tersebut telah dimenangkan oleh BRI pada tingkat pertama. Saat ini, di beberapa wilayah (Bandung, Semarang, Yogyakarta), Para Pensiunan mengajukan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung RI.
Status Penyelesaian	Saat ini, di beberapa wilayah (Bandung, Semarang, Yogyakarta), Para Pensiunan mengajukan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung RI.
Pengaruh terhadap Perusahaan	± Rp 614 Milyar,-.
Sanksi Administratif	Nihil
<b>3 Perkara Lelang Agunan</b>	
Pokok Perkara	Penggugat selaku ahli waris menggugat orang tua sebagai pemilik SHM No.1368 dimana orang tua penggugat merupakan debitur Kanca BRI Krekot dan SHM tersebut menjadi agunan kredit di BRI. Penggugat merasa bahwa pembagian waris tidak sah sehingga penyerahan agunan kredit ke BRI tidak sah.
Posisi Perkara	Atas gugatan tersebut, BRI sebagai tergugat 6 melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta
Status Penyelesaian	Saat ini masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Jakarta
Pengaruh terhadap Perusahaan	Penyerahan SHM No.1368 sebagai objek hak tanggungan menjadi tidak sah dan BRI berpotensi mengalami kerugian sebesar ± 10 Miliar
Sanksi Administratif	Nihil

## PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERUSAHAN

### Upaya Mitigasi Risiko Hukum

#### Permasalahan Hukum yang sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2017, tidak ada Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BRI yang menjabat memiliki perkara hukum terkait Perdata dan Pidana dengan kegiatan bisnis BRI.

#### Sanksi Administratif Bank

Selama tahun 2017, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

## AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Akses informasi dan Data Perseroan dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian:

1. Eksternal yang terdiri dari:
  - a. *Website* Pemerintah melalui *Website* Bursa Efek Indonesia (IDXNet) sebagai sarana pelaporan dan penyampaian keterbukaan informasi fakta material yang dapat diakses oleh public
  - b. *Website* BRI ([www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)) sebagai sarana bagi Pemegang Saham maupun Pemangku Kepentingan untuk memperoleh data Perseroan antara lain kinerja keuangan, Rapat Umum Pemegang Saham, informasi tentang Direksi dan Dewan Komisaris dan informasi lainnya yang disyaratkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.04/2015 tentang Situs *Web* Emiten atau Perusahaan Publik.
  - c. Media Massa dalam bentuk Pengumuman Laporan Keuangan Auditan, Siaran Pers, Pengumuman dan Pemanggilan RUPS maupun media poster atau banner terkait kegiatan BRI.
  - d. Korespondensi dengan instansi pemerintahan
  - e. Interaktif atau tatap muka yang dilaksanakan melalui rapat analis, atau konferensi Pers.
2. Internal melalui media intranet portal pekerja "BRISTARS", dan majalah internal "BRITA KITA" yang diterbitkan oleh Divisi Sekretariat Perusahaan dan didistribusikan keseluruhan unit kerja operasional BRI.

Para Pemegang Saham maupun Pemangku Kepentingan dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan atau Investor Relation untuk dapat memperoleh informasi maupun data Perseroan.

### Sekretaris Perusahaan

Nama : Bambang Tribaroto  
Alamat : Gedung BRI 1 Lantai 20 Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46 Jakarta Pusat 10210  
Telepon : (021) 575 1966  
Fax : (021) 575 2010  
*Website* : [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)



# KODE ETIK



Kode Etik menjabarkan prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang diharapkan dilakukan oleh setiap insan Bank dalam melaksanakan tugasnya dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan telah memiliki kode etik BRI sejak tahun 2001 dan dilakukan penyempurnaan pada tahun 2013 sesuai Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Nomor:06-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep:S.65-DIR/DKP/12/2013 tentang Kode Etik BRI.

Penerapan Kode etik bertujuan untuk menjaga lingkungan kerja yang kondusif dan menjaga reputasi perusahaan serta memberikan pedoman etika bagi insan Bank dalam melaksanakan tugas, kewenangan, kewajiban dan tanggungjawabnya.

## Komitmen Kode Etik

Kode etik berlaku bagi seluruh insan Bank diseluruh jenjang organisasi Bank. Penerapan kode etik Bank secara terus menerus dan berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan, komitmen dan ketentuan mendukung terciptanya budaya perusahaan.

## Pokok-Pokok Kode Etik

Perseroan memiliki 9 (sembilan) elemen kode etik BRI yaitu:

1. Kepatuhan terhadap Hukum dan Kebijakan Bank  
Komitmen Bank patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penguatan budaya kepatuhan Bank.
2. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
  - Etika terhadap Nasabah  
Komitmen Bank memberikan pelayanan prima kepada Nasabah dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
  - Etika terhadap Mitra Kerja  
Komitmen Bank dengan Mitra Kerja berdasarkan praktik-praktik usaha yang sah dan wajar dan menjunjung tinggi sikap profesionalisme dengan selalu mengutamakan kepentingan perusahaan.
  - Etika terhadap Pesaing  
Komitmen Bank mengedepankan persaingan yang sehat dalam menjalankan usahanya, dengan meningkatkan Bank pesaing sebagai pemacu peningkatan kinerja.

## KODE ETIK

- Etika terhadap Regulator  
Komitmen Bank memenuhi kewajiban dan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator perbankan dan otoritas berwenang lainnya.
  - Etika terhadap Pemegang Saham  
Komitmen Bank dalam upaya memberikan kontribusi positif dan optimal kepada Pemegang saham (*shareholders*).
3. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan Hidup  
Komitmen Bank menjunjung nilai-nilai masyarakat setempat (*local wisdom*) dan memberikan manfaat serta mendukung pelestarian lingkungan hidup dimana Bank menjalankan operasionalnya.
  4. Hubungan Perusahaan dengan Karyawan Bank
    - a. Komitmen Bank memberikan kesempatan yang sama kepada semua pekerja untuk berpartisipasi dalam mencapai visi dan misi Bank.
    - b. Komitmen Bank menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan produktifitas dan etika sesama pekerja.
  5. Kerahasiaan Informasi Bank  
Komitmen Bank melindungi seluruh informasi nasabah dan internal Bank dari pihak luar/tidak berkepentingan.
  6. Integritas dan Akurasi Pelaporan Bank.  
Komitmen insan BRI menyampaikan laporan Bank secara tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada manajemen, pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
  7. Benturan Kepentingan  
Komitmen insan BRI menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan dan tidak menempatkan pada kondisi/situasi timbulnya benturan kepentingan antara dirinya dengan Bank, Nasabah, dan Pihak Ketiga yang dapat merugikan perusahaan.
  8. Kontribusi dan Aktifitas Politik  
Komitmen insan BRI untuk tidak berkontribusi dalam aktifitas politik atau usaha sejenis lainnya.

9. Larangan Menerima Hadiah  
Insan BRI tidak diperkenankan meminta dan menerima hadiah atau imbalan apapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Penyebarluasan Kode Etik

BRI senantiasa melakukan sosialisasi kebijakan GCG dan kode etik kepada pekerja BRI melalui program pendidikan, kegiatan *workshop*, *In House Training*, Pembinaan dan Monitoring secara *onsite* ke unit kerja BRI, pembelajaran atau *e-learning* melalui portal internal BRI, dan pelaksanaan Forum Peningkatan Kinerja (FPK) di seluruh unit kerja BRI.

### Pernyataan Kepatuhan terhadap Kode Etik bahwa berlaku bagi Direktur Komisaris dan Seluruh Karyawan

Dengan berlakunya kebijakan Kode Etik BRI, maka

1. Seluruh Insan BRI wajib mengetahui, memahami dan melaksanakan Kode Etik BRI.
2. Seluruh insan Bank wajib secara tertulis untuk menyatakan kepatuhannya atas Kode Etik BRI. Surat Pernyataan Kepatuhan Kode Etik BRI yang ditandatangani merupakan syarat keranjutan hubungan kerja dengan Bank.

### Upaya Penegakan Kode Etik Perusahaan

Dalam upaya penegakan kode etik di perusahaan, Dewan Komisaris, Direksi dan Seluruh Pekerja BRI memiliki komitmen untuk menjalankan bisnis Bank dengan menerapkan etika dalam sistem perbankan. Wujud komitmen tersebut dilakukan dalam:

1. Penerapan Kode Etik berlaku bagi seluruh insan BRI di seluruh jenjang organisasi. Penerapan Kode Etik secara terus menerus dan berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan dan komitmen dan ketentuan yang mendukung terciptanya budaya Perusahaan.
2. Seluruh insan BRI diwajibkan secara tertulis untuk menyatakan kepatuhan terhadap Kode Etik BRI.
3. Setiap Pelanggaran Kode Etik yang terjadi akan diberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan yang berlaku.
4. Sosialisasi Kode Etik kepada Pekerja BRI.



## KODE ETIK

### Sanksi Terkait Pelanggaran Kode Ethic

Pelanggaran terhadap Kode Etik BRI akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku. Selama tahun 2017, jumlah sanksi pelanggaran kode etik diberikan kepada 137 pekerja. Sanksi pelanggaran kode etik berupa sanksi administratif kepada 49 pekerja dan Pemutusan Hubungan Kerja kepada 63 Pekerja.

### Jumlah Pelanggaran Kode Etik Tahun 2017

Selama tahun 2017 terdapat 255 kasus pelanggaran Kode Etik yang dilakukan 137 pekerja.

## BUDAYA PERUSAHAAN

BRI merumuskan Nilai-Nilai Utama perusahaan baru yang digunakan untuk membentuk perilaku dan karakter kerja selaras dengan strategi perusahaan terkini. Nilai-nilai utama perusahaan tersebut yakni BRI dengan 5 (lima) nilai atau biasa disebut BRILIAN yang tercermin dalam 10 sikap dan perilaku. Adapun BRILIAN serta sikap dan perilakunya adalah sebagai berikut:

#### 1. Integrity

Senantiasa berfikir, berkata dan berperilaku terpuji, menjaga kehormatan dan taat aturan. Adapun sikap perilaku dari Nilai Integrity adalah sebagai berikut:

- a. Terbuka, Jujur dan tulus; dan
- b. Patuh Terhadap Peraturan.

#### 2. Professionalism

Berkomitmen bekerja tuntas dan akurat dengan kemampuan terbaik dan penuh tanggung jawab. Adapun sikap perilaku dari Nilai Professionalism adalah sebagai berikut:

- a. *Continous Learner*
- b. *Fairness*

#### 3. Trust

Membangun keyakinan dan sangka baik di antara *stakeholders* dalam hubungan yang tulus dan terbuka berdasarkan kehandalan. Adapun sikap perilaku dari Nilai Trust adalah sebagai berikut:

- a. Saling menghargai
- b. Mengutamakan kepentingan Perusahaan dan Negeri

#### 4. Innovation

Mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menemukan solusi dan gagasan baru untuk menghasilkan produk atau kebijakan dalam menjawab tantangan permasalahan perusahaan. Adapun sikap perilaku dari Nilai Innovation adalah sebagai berikut:

- a. Visioner
- b. Pionir Perubahan

#### 5. Customer Centric

Senantiasa menjadikan pelanggan sebagai mitra utama yang saling menguntungkan untuk tumbuh secara berkesinambungan. Adapun sikap perilaku dari Nilai *Customer Centric* adalah sebagai berikut:

- a. Melayani Lebih dari Ekspektasi Nasabah dengan setulus hati
- b. *Collaborative*

## WHISTLEBLOWING SYSTEM



BRI BERKOMITMEN DALAM MENJALANKAN BISNIS BANK DENGAN MENERAPKAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK. UNTUK MEWUJUDKAN HAL TERSEBUT, MANAJEMEN BRI SECARA TRANSPARAN DAN ADIL DALAM PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DARI PIHAK INTERNAL DAN EKSTERNAL.”

*Whistleblowing System* (WBS) merupakan sarana diberikan kepada Pelapor Internal maupun Eksternal BRI dalam menyampaikan informasi indikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan BRI. Informasi indikasi pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh Perseroan.

### Kebijakan WBS

BRI telah menerapkan *WBS* sejak tahun 2013 dan telah dilakukan *review* terhadap kebijakan tersebut sesuai Surat Direksi BRI No.S.27-DIR/DKP/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 perihal Kebijakan *Whistleblowing System* BRI.

### Penyampaian Laporan

Pelaporan indikasi pelanggaran dapat disampaikan melalui sarana sebagai berikut:

1. Surat Tertulis: PO BOX 1895 JKP 10900
2. SMS: 0811-8200-600
3. Email: whistleblower@corp.bri.co.id

Informasi indikasi pelanggaran yang dapat dilaporkan diantaranya:

1. Tindakan *fraud*.
2. Perbuatan melanggar hukum (penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, penyalahgunaan narkoba, pelecehan seksual, perbuatan kriminal lainnya).
3. Pelanggaran *Standard Operating Procedure* (SOP) perusahaan.
4. Pelanggaran Kode Etik BRI dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip GCG.
5. Pelanggaran etika.
6. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja atau membahayakan keamanan perusahaan serta merugikan perusahaan.

### Sosialisasi WBS

Pelaksanaan sosialisasi WBS BRI telah dilakukan kepada Pihak Internal (Pekerja BRI) dan Eksternal diantaranya:

1. Menyampaikan kebijakan WBS yang dapat oleh seluruh pekerja melalui portal internal BRI.
2. Memasang poster informasi WBS di Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI Unit.
3. Menyampaikan materi WBS pada *in-class training* Program pengembangan Staff (PPS) BRI.
4. Melaksanakan pembelajaran *e-learning* WBS kepada seluruh pekerja BRI.
5. Penyampaian informasi WBS melalui *website* perseroan.
6. Sosialisasi WBS secara *onsite* ke Unit Kerja.

### Perlindungan Pelapor

BRI memberikan perlindungan kepada Pelapor atas kerahasiaan data diri dan informasi yang dilaporkan. Pemberian perlindungan juga diberikan kepada Pelapor internal dari adanya tekanan, penundaan kenaikan pangkat, diskriminasi, pemecatan, hingga tindakan fisik.

### Pengelolaan Pengaduan

Pihak pengelola WBS berada dibawah Direktur Utama dan dimonitor oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Direktur Utama membentuk Unit Pengelola WBS yang bertanggung jawab dalam mengelola dan menindaklanjuti laporan indikasi pelanggaran.

### Penanganan dan Mekanisme Pelaporan WBS

Setiap laporan yang disampaikan melalui sarana WBS akan ditindaklanjuti melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Pelapor menyampaikan laporan indikasi pelanggaran melalui sarana WBS.
2. Laporan diterima oleh Unit Pengelola WBS.



## WHISTLEBLOWING SYSTEM

3. Petugas WBS akan melakukan verifikasi dan analisa awal informasi indikasi pelanggaran paling lambat 20 hari kerja kemudian menyampaikan ke Pemimpin Unit Pengelola WBS.
4. Memeriksa dan memastikan laporan indikasi pelanggaran sesuai kriteria laporan WBS. Selanjutnya memutuskan tindak lanjut laporan WBS ke Unit Kerja Investigasi. Apabila laporan tidak sesuai kriteria maka laporan indikasi pelanggaran tidak akan ditindaklanjuti.
5. Unit Kerja Investigasi melakukan investigasi terhadap informasi indikasi pelanggaran. Selanjutnya menyampaikan laporan hasil investigasi dan rekomendasi ke Unit Pengelola WBS.
6. Unit Pengelola WBS akan menyurati Unit Kerja Berwenang untuk melakukan tindak lanjut perbaikan dan sanksi atas rekomendasi dari Unit Kerja Investigasi.
7. Unit Kerja Berwenang melakukan tindak lanjut perbaikan dan sanksi kepada Terlapor.
8. Unit Pengelola WBS melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut perbaikan yang dilakukan Unit Kerja Berwenang.
9. Unit Kerja Berwenang menyampaikan laporan realisasi perbaikan kepada Unit Pengelola WBS.
10. Unit Pengelola WBS memastikan tindak lanjut perbaikan telah dilakukan secara memadai.
11. Unit Pengelola WBS melaporkan rekapitulasi dan evaluasi kepada Direktur Utama dan Komite Audit setiap Triwulan.

## Mekanisme Pelaporan WBS



## Laporan WBS

Jumlah laporan indikasi pelanggaran yang diterima selama tahun 2017 sebanyak 65 pelaporan. Secara kumulatif, sejak awal implementasi sistem WBS sampai posisi 31 Desember 2017, jumlah laporan indikasi pelanggaran yang dilaporkan melalui sarana WBS sebanyak 1.719 laporan.

## Rekapitulasi Jumlah Laporan WBS

Jumlah laporan WBS selama tahun 2017 sebanyak 65 laporan dengan rincian laporan sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah Laporan	Status Laporan	
			Dalam Proses	Selesai
1	Tindakan <i>Fraud</i>	16	4	13
2	Perbuatan Melanggar Hukum	2	0	2
3	Pelanggaran SOP	26	7	19
4	Pelanggaran Kode Etik dan GCG	16	2	14
5	Pelanggaran Etika	5	2	3
6	Perbuatan yang Membahayakan	0	0	0
<b>Total</b>		<b>65</b>	<b>15</b>	<b>50</b>

## WHISTLEBLOWING SYSTEM

### Klasifikasi Laporan WBS (Sumber Laporan, Identitas Pelapor, Media pelaporan)

Terhadap seluruh laporan pengaduan yang diterima selama tahun 2017, dapat dikelompokkan menurut klasifikasi laporan, sumber laporan, penyertaan identitas pelapor dan media penyampaian sebagai berikut:

Periode	Σ	Sumber Pengaduan		Identitas Pelapor		Media Yang Dipakai			
		Internal BRI	Eksternal BRI	Ada	Tidak	SMS	Surat	Telp/Lisan	Email
2017	65	45	20	19	46	48	13	2	2

### Perkembangan Laporan WBS 3 tahun terakhir

Gambaran secara umum laporan pengaduan per 31 Desember 2017 apabila dibandingkan dengan periode 3 tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tahun	Media Penyampaian			Status		
	SMS	Surat	Telepon	SMS	Open	Closed
2015	210	22	6	0	27	210
2016	84	14	1	0	11	88
<b>2017</b>	<b>48</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>50</b>

### Sanksi dan Tindak lanjut

Tindak lanjut atas laporan *Whistleblowing System* yang terbukti terjadinya pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan disiplin perusahaan diantaranya :

1. Pembinaan dan teguran lisan dari atasan.
2. Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis atau Teguran Tertulis.
3. Penundaan promosi atau Turun Jabatan
4. Pemutusan Hubungan Kerja.



## KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi diwujudkan dalam bentuk keberagaman kompetensi, pengalaman serta latar belakang pendidikan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang di evaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sebelum pengangkatannya oleh RUPS atas usulan Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris BRI telah memenuhi kebijakan keberagaman yang berlaku di Perseroan.

**Tabel Keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Gender dan Usia**

Jenis Kelamin	Direksi/BOD	Dewan Komisaris/BOC	Direksi dan Dewan Komisaris/ BOD and BOC
Laki –Laki/ Men	8	8	16
Perempuan/ Woman	3	1	4

Rentang Usia	Direksi/BOD	Dewan Komisaris/BOC	Direksi dan Dewan Komisaris/ BOD and BOC
31 – 50 tahun	0	2	2
50-60 tahun	10	5	15
60 tahun ke atas	1	2	3

Kebagaman Dewan Komisaris dan Direksi secara terperinci dari sisi kompetensi, pengalaman kerja/kedirekturan serta latar belakang pendidikan adalah sebagaimana dijelaskan pada bagian Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi pada Laporan Tahunan ini.

## KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI

BRI telah memiliki kebijakan dan prosedur anti korupsi yang diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE:S.25-DIR/DMR/12/2016 tentang Strategi Anti *Fraud* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kebijakan dimaksud merupakan wujud komitmen manajemen BRI dalam mengendalikan *fraud* yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud*.

### Program Pengendalian Gratifikasi

BRI menyadari pengendalian gratifikasi merupakan kegiatan penting dalam menjaga etika dan proses bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Pada tanggal 22 Juni 2016, BRI berkomitmen dengan KPK dalam Penerapan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Perseroan. Sebagai wujud komitmen BRI dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencegahan praktik gratifikasi, Bank BRI telah memiliki kebijakan Pedoman Pengendalian Gratifikasi BRI dan Unit Pengendalian Gratifikasi.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi BRI mengacu pada Peraturan KPK No. 2 Tahun 2014 pada tanggal 9 Desember 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi. Pedoman Pengendalian Gratifikasi BRI mengatur larangan penerimaan gratifikasi bagi seluruh Insan BRI dan batasan-batasan penerimaan gratifikasi. Penerapan Pedoman Pengendalian Gratifikasi bertujuan untuk membangun nilai-nilai perusahaan sesuai prinsip GCG dan menanamkan *value integrity* kepada seluruh Insan BRI kepada nasabah, vendor, rekanan dan seluruh pemangku kepentingan. BRI senantiasa terus berupaya meningkatkan implementasi pengendalian gratifikasi diantaranya:

- a. Mengikuti Forum Unit Pengendali Gratifikasi Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 3 November 2016 di Bogor Jawa Barat.
- b. Mengikuti Festival Hari Anti Korupsi International Tahun 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 8-10 Desember 2016 di Pekanbaru Riau.
- c. Mengikuti Rapat Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKN) Ahli Pembangun Integritas yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2017 di Jakarta.
- d. Mengikuti International Business Integrity Conference (IBIC) 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 11 -12 Desember 2017 di Jakarta.

### Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

Dalam penerapan Program Pengendalian Gratifikasi di BRI, pada tanggal 14 Juli 2017 dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pengendalian gratifikasi. UPG BRI secara struktural berada di organisasi Divisi Kepatuhan BRI dan fungsinya melekat pada Bagian GCG. UPG BRI memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya:

1. Menyusun kebijakan dan prosedur pengendalian gratifikasi.
2. Sentralisasi pelaporan Gratifikasi dan pelaporan ke KPK.
3. Pengelolaan barang gratifikasi.
4. Sosialisasi dan internalisasi pedoman pengendalian gratifikasi ke seluruh unit kerja BRI.
5. Pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi.





## KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI

### Jenis-Jenis Gratifikasi

Pedoman Pengendalian Gratifikasi BRI telah menetapkan jenis-jenis gratifikasi yang diatur secara internal, hal ini juga telah diselaraskan dengan Pedoman Mengenal Gratifikasi yang dikeluarkan oleh KPK. Adapun jenis-jenis gratifikasi yang diatur oleh BRI adalah:

#### 1. Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan

Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan adalah Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Beberapa contoh praktik Gratifikasi yang wajib dilaporkan Insan BRI, yaitu semua bentuk pemberian dalam arti luas yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan kewajiban atau tugasnya antara lain sebagai berikut:

- a. Proses pemberian kredit;
- b. Proses pengadaan barang dan jasa;
- c. Proses kerjasama dengan Pihak Ketiga;
- d. Proses pelaksanaan audit;
- e. Proses penerimaan pekerja, promosi dan mutasi Insan BRI;
- f. Proses Jasa Bank lainnya

#### 2. Gratifikasi Yang Tidak Wajib Dilaporkan

Gratifikasi Yang Tidak Wajib Dilaporkan adalah penerimaan yang diterima oleh Insan BRI bukan berdasarkan/tidak terkait jabatan atau kewenangan yang dimiliki dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Karakteristik Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan secara umum adalah:

- a. Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatuhan;
- b. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramahan-tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar;

- d. Merupakan bentuk ppenerimaan yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.

#### 3. Gratifikasi yang Terkait dengan Kedinasan

Gratifikasi yang Terkait dengan Kedinasan adalah Pemberian Gratifikasi kepada Insan BRI dari pihak manapun dalam pelaksanaan kedinasan yang ditugaskan kepadanya. Karakteristik umum Gratifikasi yang Terkait dengan Kedinasan adalah sebagai berikut:

- a. Diperoleh secara sah dalam pelaksanaan tugas resmi;
- b. Diberikan secara terbuka dalam rangkaian kedinasan;
- c. Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan, atau nilai (mengacu pada standar biaya umum), untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatuhan

### Sosialisasi dan Program Awareness Gratifikasi

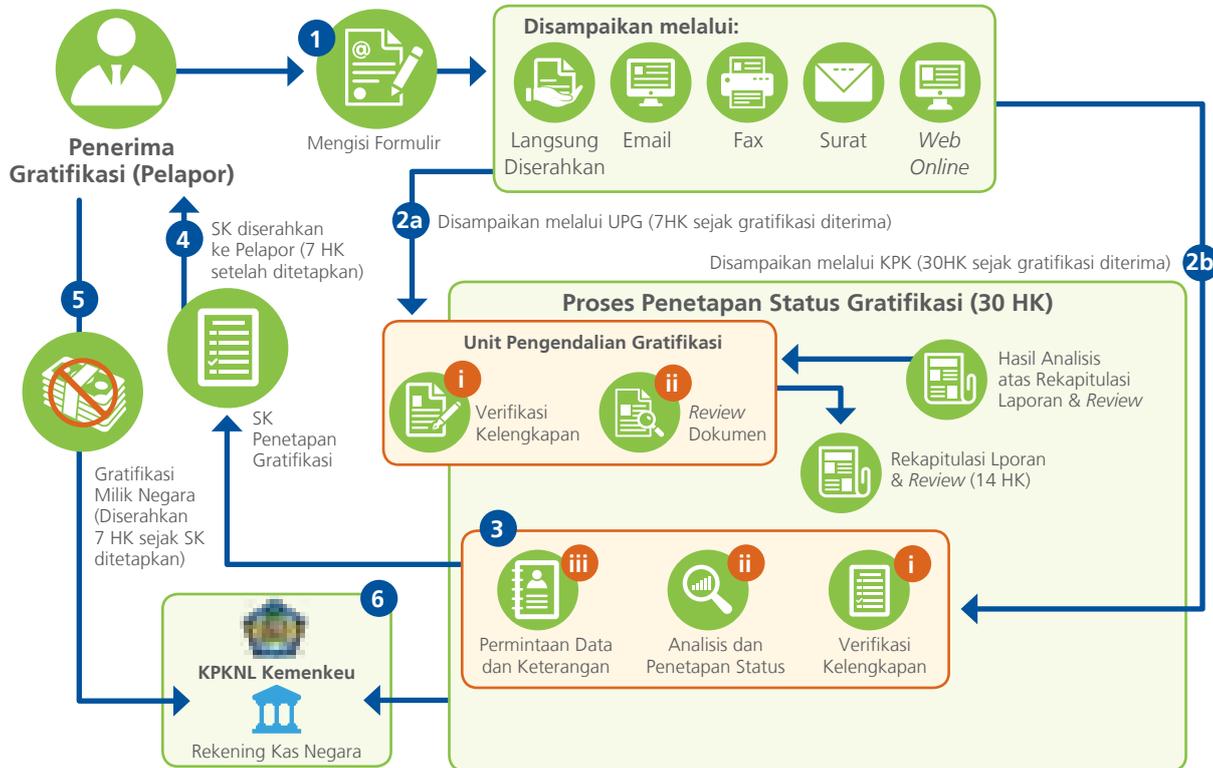
Selama tahun 2017 dalam implementasi penerapan Program Pengendalian Gratifikasi, BRI telah melakukan hal-hal berikut:

1. Sosialisasi ke Unit Kerja BRI Selindo oleh Divisi Kepatuhan BRI dan Bagian Manajemen Risiko & Kepatuhan Kantor Wilayah BRI
2. Pembekalan pendidikan kepada Pekerja Baru dan Level Manajerial di BRI
3. Program *E-Learning* Gratifikasi untuk seluruh Pekerja BRI
4. Penandatanganan pakta integritas dalam setiap aktivitas pengadaan Barang dan Jasa di BRI

### Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Standar pelaporan gratifikasi merujuk dengan standar dan prosedur pelaporan di KPK dengan rincian sebagai berikut:

## KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI



## Laporan Gratifikasi 2017

Selama tahun 2017, tidak terdapat penerimaan laporan gratifikasi BRI.

## KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK KREDITUR

Dalam menjalankan salah satu fasilitas bisnisnya BRI memberikan pinjaman kepada masyarakat, dimana hak BRI sebagai kreditur dilindungi dan diatur berdasarkan peraturan yang berlaku dan dituangkan dalam masing-masing perjanjian kredit.

Bank BRI senantiasa menjunjung tinggi kesetaraan hak dan perlindungan terhadap nasabahnya dengan melakukan beberapa aktivitas dalam rangka perlindungan kreditur diantaranya:

- Penjelasan produk bank serta syarat dan ketentuan kepada calon nasabah,
- Penjelasan kepada nasabah mengenai syarat dan ketentuan perihal kredit yang diajukan oleh pegawai bank dan notaris rekanan bank pada saat akan akad kredit.
- Perjanjian kredit dibuat rangkap 2 untuk kedua pihak.

## KEBIJAKAN PERLINDUNGAN NASABAH

Kebijakan Perlindungan Nasabah BRI berpedoman kepada kebijakan yang diatur oleh regulator, serta kebijakan internal perusahaan sebagai berikut:

- Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/16/DKSP/2014 tanggal 30 September 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
- Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan No. 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Jasa Usaha
- Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.15-DIR/LYN/06/2015 tentang Revisi Atas Kebijakan Dan Prosedur Penyelesaian Pengaduan Nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.15-DIR/LYN/06/2015 tentang Revisi Atas Kebijakan Dan Prosedur Penyelesaian Pengaduan Nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Telah di cabut dan direvisi menjadi Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.1051- DIR/LCC/ 12/2016 Tanggal 2 Desember 2016 Perihal Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian Pengaduan Nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



## KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI

**BENTURAN KEPENTINGAN**

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi/situasi dimana seseorang karena kedudukan, jabatan atau wewenang yang dimiliki BRI memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja dari pelaksanaan tugas yang diamanatkan secara objektif.

**Kebijakan**

Dalam mencegah timbulnya benturan kepentingan, Perusahaan memiliki kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No:02-KOM/BRI/05/2012 dan Nokep:S.104-DIR/DKP/05/2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Prinsip dasar penanganan Benturan Kepentingan adalah:

1. Mengutamakan kepentingan publik.
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan.
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan.
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang mampu menangani benturan kepentingan.

**Komitmen**

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh insan BRI berkomitmen dan profesionalitas dalam penerapan kebijakan penanganan benturan kepentingan. Sebagai wujud komitmen insan BRI dalam implementasi kebijakan dan pengungkapan benturan kepentingan diantaranya:

1. Seluruh insan BRI wajib membuat pernyataan tahunan (*Annual Disclosure*) tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya dan telah melaksanakan perilaku yang telah ditetapkan perusahaan.
2. Setiap unit kerja wajib menyampaikan laporan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

**Sosialisasi dan Program Awareness**

BRI senantiasa melakukan sosialisasi kebijakan GCG dan benturan kepentingan kepada pekerja BRI melalui program pendidikan, kegiatan workshop, *In House Training*, Pembinaan dan Monitoring secara *onsite* ke unit kerja BRI, pembelajaran atau *e-learning* melalui portal internal BRI, dan pernyataan benturan kepentingan.

**Laporan Transaksi Benturan Kepentingan 2017**

Selama tahun 2017, terdapat 12 pengungkapan transaksi benturan kepentingan yaitu 7 laporan penyewaan kantor milik pekerja BRI, 1 laporan pengadaan barang dan jasa, dan 4 laporan proses pemberian kredit yang mengandung benturan kepentingan. Setiap laporan benturan kepentingan telah dilaporkan ke Kantor Pusat dan disampaikan pada laporan semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**PENCEGAHAN INSIDER TRADING**

*Insider Trading* merupakan perdagangan saham perusahaan atau surat berharga lainnya (obligasi atau opsi saham) yang dilakukan individu perusahaan yang memiliki akses informasi non publik terhadap perusahaan.

**Kebijakan**

Perseroan memiliki kebijakan yang mengatur kegiatan *insider trading* bagi seluruh insan BRI. Kebijakan *insider trading* tertuang dalam:

1. Surat Keputusan Bersama (SKB) Dewan Komisaris dan Direksi BRI No: 02-KOM/BRI/05/2012 dan Nokep:S.104-DIR/DKP/05/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan BRI.

Kebijakan tersebut menyatakan bahwa seluruh insan BRI dilarang melakukan segala aktifitas yang terkait dengan *insider trading* yang merujuk pada kegiatan *illegal* di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal misalnya rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan/aksi korporasi yang dipublikasikan.

Dalam mendukung praktik tata kelola perusahaan yang baik, seluruh insan BRI diwajibkan membuat pernyataan tahunan (*Annual Disclosure*) diantaranya pengungkapan terhadap transaksi *insider trading* yang dilakukan oleh insan BRI.

2. Anggaran Dasar BRI yang menyatakan bahwa setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung atau tidak langsung

## KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI

mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya.

### PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pengadaan adalah proses kegiatan dalam rangka memenuhi atau menyediakan kebutuhan barang dan/atau jasa perusahaan dengan cara membeli atau sewa atau kerja sama dengan pihak lain, yang pelaksanaannya dilakukan melalui rekanan perusahaan atau pihak lain yang ditunjuk.

Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh BRI bertujuan untuk mendukung operasional bank dan kinerja bisnis secara umum. Dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan mengindahkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, BRI bertekad untuk menciptakan proses pengadaan barang dan jasa yang aman, efektif, dan efisien.

#### Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Kebijakan Umum Manajemen Aktiva Tetap dan Logistik (KEMAL) merupakan pedoman dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa untuk mendukung kegiatan operasional Bank sesuai kualitas, kuantitas dan waktu yang ditetapkan dengan harga terbaik serta tetap memperhatikan prinsip GCG (*Good Corporate Governance*).

KEMAL BRI memperoleh pengesahan dari Direksi pada tahun 2011 dan diberlakukan terhitung mulai tahun 2012. KEMAL berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa Badan Umum Milik Negara. Tujuan dari disusunnya KEMAL BRI adalah:

1. Sebagai pedoman dalam pengelolaan aktiva tetap dan pelayanan logistik yang berkualitas kepada seluruh unit kerja BRI.
2. Sebagai pedoman dalam proses pengadaan barang dan jasa di BRI sehingga proses pengadaan di BRI.

Penyempurnaan terhadap KEMAL dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan mekanisme kontrol dan tantangan perusahaan. Dengan demikian diharapkan

agar proses pengadaan barang dan jasa di BRI dapat lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis, skala prioritas, ketersediaan anggaran, dan efisiensi anggaran.

#### Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam melaksanakan proses pengadaan, Bank mengacu pada prinsip-prinsip dasar pelaksanaan pengadaan meliputi:

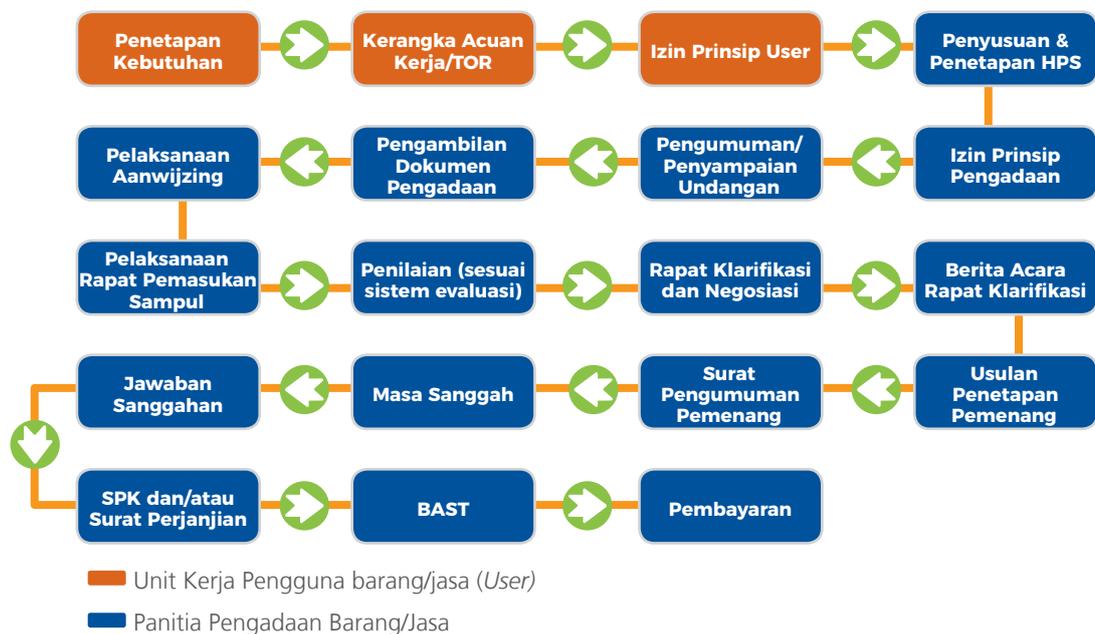
1. Efisien  
Pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan daya kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah.
2. Efektif  
Pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai sasaran yang ditetapkan.
3. Kompetitif  
Pengadaan barang dan/atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan/atau jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. Transparan  
Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa yang berminat.
5. Adil dan Wajar  
Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat.
6. Akuntabel  
Harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.



## KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI

## Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa

Tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di BRI dilakukan sebagai berikut:



Penjelasan:

1. Dalam rangka menunjang kegiatan operasional BRI diperlukan sarana, prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mencapai tujuan Perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan sarana, prasarana dan infrastruktur tersebut dibutuhkan suatu proses pengadaan.
2. Dalam setiap pelaksanaan proses pengadaan dibutuhkan penetapan Harga Perkiraan Sendiri yang dijadikan sebagai salah satu dasar dalam menetapkan metode pengadaan. Pada tahun 2017 telah dibentuk **Grup Estimasi**, yaitu unit kerja independen yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyusun dan menetapkan HPS pengadaan barang dan/atau jasa di BRI.
3. Proses pengadaan dapat dilakukan dengan beberapa Metode, diantaranya adalah Swakelola, Pembelian langsung, Penunjukan Langsung, Pemilihan Langsung dan Pelelangan Terbuka.
4. Dalam proses pengadaan tersebut akan dilakukan evaluasi atas penawaran yang diajukan oleh Calon Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh kualitas dan harga terbaik.
5. Dalam rangka memperoleh kesesuaian antara kebutuhan BRI dengan penawaran yang diajukan oleh calon penyedia barang/jasa maka dalam proses pengadaan dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi sampai ditentukannya pemenang penyedia barang/jasa.
6. Apabila telah ditetapkan pemenang, BRI menyediakan waktu sanggah apabila ada pihak yang berkeberatan dalam proses pengadaan yang telah dilakukan atau terhadap penetapan pemenang. Hal tersebut dilakukan oleh BRI dalam rangka mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa yang memenuhi kaidah *Good Corporate Governance*.

## PENGELOLAAN AKTIVA TETAP BRI

Pengelolaan aktiva tetap BRI saat ini menggunakan aplikasi BRISmile (Sistem Manajemen Informasi Logistik Elektronik) yang merupakan penyempurnaan dari aplikasi sebelumnya yaitu Portal Logistik yang dikembangkan secara inhouse oleh Divisi Perencanaan dan Pengembangan TSI. Dalam aplikasi tersebut terdapat beberapa modul yaitu:

## KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI

- a. Modul pengadaan aktiva tetap.
- b. Modul pengelolaan aktiva tetap yang terdiri antara lain asuransi aktiva tetap, relokasi, reclass aktiva tetap dan penghapusbukuan aktiva tetap.
- c. Modul anggaran.

Berbeda dengan SIM AT sebelumnya yaitu *SAP Fixed asset management (FAM)* yang hanya dapat di akses di level Kanwil BRI dan Kanpus, BRISmile dapat diakses sampai di level Kanca/Kantor Pusat sehingga pengelolaan aktiva tetap dapat lebih efisien dan efektif. Adapun efisiensi yang didapatkan atas pengelolaan AT melalui BRISmile adalah sebagai berikut:

- a. Unit kerja BRI dapat melihat dan melakukan monitoring atas pencatatan aktiva tetap di unit kerjanya secara *on line* sehingga permasalahan terutama yang berkaitan dengan selisih antara fisik aktiva tetap dan rincian data di BRISmile dapat segera diselesaikan. Unit kerja dapat memastikan bahwa aktiva tetap yang diterima sudah tercatat di BRISmile.
- b. Bertambahnya unit kerja BRI dan adanya resupervisi unit kerja BRI membutuhkan pengelolaan aktiva tetap yang bersifat desentralisasi terutama yang berkaitan dengan relokasi (perpindahan) aktiva tetap antar unit kerja. Kanca BRI dapat melakukan relokasi atas aktiva tetap yang dimilikinya tanpa melalui Kanwil atau Kanpus sehingga permasalahan terutama yang berkaitan dengan selisih antara fisik aktiva tetap dan rincian data di BRISmile dapat diminimalisir.
- c. Proses asuransi aktiva tetap termasuk didalamnya penutupan asuransi dan pembayaran klaim asuransi atas kerugian aktiva tetap dapat dilakukan secara *on line* dengan pihak penanggung (asuradur) sehingga proses penutupan asuransi dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan pada saat dilakukan secara manual sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya kerugian aktiva tetap BRI. Selain itu, progress klaim asuransi atas kerugian aktiva tetap BRI dapat dimonitoring oleh unit kerja yang melakukan pengajuan klaim asuransi melalui BRISmile. Selanjutnya setelah terdapat persetujuan klaim dari asuradur maka pembayaran klaim dilakukan secara otomatis ke rekening GL Titipan Klaim AT unit kerja pemilik aktiva tetap. Dengan demikian, unit kerja tidak perlu lagi melakukan pelimpahan dari rekening IA uker ke GL Titipan Klaim AT.
- d. Proses penghapusbukuan dapat dilakukan sendiri oleh unit kerja BRI mulai dari usulan sampai dengan penghapusan dari pencatatan di BRISmile. Proses ini memberikan kemudahan unit kerja untuk melakukan monitoring atas *progress* setiap usulan penghapusbukuan yang diajukan.
- e. Modul anggaran dalam BRISmile memberikan kemudahan dalam penyusunan RKAP. Hal ini dikarenakan usulan dari setiap unit kerja dilakukan melalui sistem sehingga kebutuhan unit kerja dapat langsung dimonitoring dan di analisa oleh Kantor Pusat untuk kebutuhan penyusunan RKAP BRI.
- f. Proses pengadaan aktiva tetap dimulai dari input ijin prinsip pengadaan, ijin prinsip hasil pengadaan dan pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK) sampai dengan pengiriman/distribusi aktiva tetap ke unit kerja BRI dapat dilakukan melalui Aplikasi BRISmile sehingga dapat diketahui *progress* semua pengadaan aktiva tetap yang sedang dilakukan ataupun sudah dilakukan di Kanpus, Kanwil, Kanins, dan BRI Corporate University sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Dengan demikian dapat dilakukan evaluasi atas setiap pengadaan aktiva tetap yang dilakukan termasuk waktu dan kendala yang dihadapi.
- g. Proses pengajuan usulan sampai dengan pencatatan aktiva tetap sewa/beli properti dan pembangunan/renovasi Gedung BRI sudah dapat dilakukan melalui BRISmile sehingga *progress* usulan atau pembangunan/renovasi dapat langsung dimonitor oleh unit kerja BRI.
- h. Saat ini modul BRISmile telah terhubung (*interface*) langsung dengan Brinets, dimana seluruh transaksi pembukuan dilakukan otomatis melalui BRISmile, sehingga tidak diperlukan lagi pembukuan manual oleh unit kerja (kecuali transaksi pembayaran ke rek.vendor/pihak ketiga, pelimpahan ke Hutang Pengadaan Investasi dan pelimpahan ke rekening titipan lelang AT). Adapun modul BRISmile yang telah *interface* ke Brinets antara lain:



## KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI

- 1) Pembebanan Biaya Penyusutan.
  - 2) Relokasi & Reklasifikasi Aktiva Tetap.
  - 3) Penghapusbukuan AT.
  - 4) Pembayaran Klaim Asuransi.
  - 5) Pengadaan Barang/Distribusi Barang.
  - 6) Realisasi pembangunan/renovasi dan realisasi pembelian bangunan kantor/rudin.
- i. Kebutuhan informasi mengenai aktiva tetap BRI baik untuk kepentingan internal maupun eksternal terutama data yang terkait dengan laporan keuangan BRI dapat lebih cepat dan akurat. Adapun laporan yang dapat dihasilkan dari BRISmile ini antara lain laporan rincian aktiva tetap, laporan mutasi aktiva tetap, laporan penghapusbukuan aktiva tetap, laporan penutupan asuransi aktiva tetap, dll.
- j. Untuk memudahkan pihak manajemen dalam mengambil strategi kebijakan yang berkaitan dengan aktiva tetap telah dibuatkan dashboard pengadaan, usulan sewa/beli properti, pembangunan/renovasi gedung sehingga kebijakan yang diambil tepat waktu dan tepat sasaran.
- k. Selama tahun 2017 terdapat beberapa modul yang telah dikembangkan oleh BRI, yaitu:
- 1) Modul Pengadaan dan distribusi barang cetakan  
Modul pengadaan barang cetakan dan distribusi barang cetakan (security printing / non security printing) yang terintegrasi dengan pembukuan BRINETS dan digital office.
  - 2) Modul SIM BPKB Kendaraan Bermotor  
Modul Sistem Informasi Manajemen BPKB yang berfungsi mendistribusikan BPKB dari vendor penyedia kendaraan ke Uker pemilik kendaraan yang belum menerima fisik BPKB yang terintegrasi dengan digital office.
  - 3) Modul Verifikasi Pembayaran Divisi AMK  
Modul yang berfungsi untuk memverifikasi nota persetujuan fiat bayar yang diterbitkan oleh Divisi PBJ jika pembayaran kepada pihak ketiga sudah selesai dilakukan oleh Divisi AMK.
  - 4) Modul Pembebanan Biaya Amortisasi Otomatis Untuk Bangunan Sewa & Upgrading Bangunan Sewa

Modul yang berfungsi untuk dilakukan pembebanan amortisasi secara otomatis untuk bangunan sewa dan upgrading bangunan sewa.

- 5) Tanda Daftar Rekanan *Online*  
Modul yang berfungsi untuk mempermudah proses bagi pihak ketiga yang ingin menjadi rekanan BRI mulai dari proses pendaftaran rekanan dengan metode *online* di *web* BRI sampai penerbitan Tanda Daftar Rekanan BRI.

### Pengelolaan Rekanan

1. Penyedia barang dan/atau jasa yang akan berpartisipasi dalam pengadaan barang dan/atau jasa di BRI pada prinsipnya perlu memiliki Tanda Daftar Rekanan (TDR) BRI. TDR (Tanda Daftar Rekanan) adalah keterangan dalam format sertifikat atau surat yang berisi penjelasan bahwa pihak penyedia barang/jasa yang tercantum di dalamnya telah terdaftar sebagai Rekanan BRI, sebagai syarat untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di BRI.
2. BRI telah memiliki daftar rekanan penyedia barang/jasa yang dapat digunakan dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa di BRI. Daftar rekanan tersebut diperoleh dari seleksi atas kualifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan oleh BRI. Persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi rekanan BRI sampai dengan penyedia barang/jasa yang lolos seleksi menjadi rekanan telah dilakukan secara transparan, guna menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*.
3. Evaluasi terhadap Rekanan  
Evaluasi dilakukan terhadap rekanan dengan variable penilaian meliputi *procurement process, quality, delivery, responsiveness, dan maintenance period*.
4. Aplikasi Pengelolaan Rekanan  
BRI telah mengembangkan aplikasi pengelolaan TDR (Tanda Daftar Rekanan) yang terintegrasi dengan BRISMILE mulai dari pendaftaran rekanan yang dilakukan secara mandiri oleh vendor (melalui intranet BRI), proses evaluasi legalitas dan usaha vendor sampai penerbitan Tanda Daftar Rekanan BRI (TDR BRI) oleh BRI.

## KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI

### 5. *Vendor Gathering*

Selama tahun 2017, BRI telah melaksanakan 2 kali *vendor gathering* dengan agenda *Brainstorming* antara BRI dengan vendor serta mendengarkan masukan dan opini dari vendor terkait proses pengadaan barang dan/atau jasa di BRI.

#### **Rincian pelaksanaan *vendor gathering***

Tanggal pelaksanaan

1. 08 Maret 2017
2. 08 Mei 2017

Tempat

1. Ruang Tender Divisi MAT lantai 25
2. Ruang Britama Lantai 19 BRI 1

Rekanan

Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana

### Laporan Pengadaan Barang dan Jasa 2017

Sampai dengan bulan Desember 2017, jumlah total pengadaan dan nilai total pengadaan yang dilakukan oleh Divisi Pengadaan Barang dan Jasa sejumlah 2.530 pengadaan dan sebesar Rp.2.503.998.605.255,-.

Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, maka untuk pengadaan barang dan jasa dalam batas nilai tertentu, diterapkan mekanisme pengambilan keputusan bersama oleh para Pejabat Pemutus Pengadaan dalam suatu forum Komite Pengadaan Barang dan Jasa.

Dengan adanya Putusan Komite Pengadaan Barang dan Jasa, diharapkan putusan pengadaan barang dan jasa dapat diberikan secara lebih seksama, akuntabel dengan tetap memperhatikan prinsip efektif dan efisien serta dalam proses pengadaan barang dan jasa.

### Audit Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam meningkatkan fungsi pengendalian intern dalam proses pengadaan barang dan jasa, BRI senantiasa melaksanakan audit pengadaan barang dan jasa oleh internal audit / Satuan Kerja Audit Intern dan audit eksternal.





# RENCANA STRATEGIS BANK 2017

Di tahun 2017, Direksi BRI telah menyusun dan menetapkan *Corporate Plan* 5 tahunan BRI untuk 2018 - 2022, yang akan menjadi pedoman dari proses transformasi BRI, 'From Good to Great'. Dalam penyusunan *Corporate Plan* 2018-2022, selain berpedoman pada pernyataan visi dan misi BRI, Direksi BRI juga mempertimbangkan sejumlah faktor yang akan berpengaruh terhadap perkembangan industri perbankan di Indonesia ke depan, antara lain:

- Kondisi demografis Indonesia dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif kelas menengah dengan daya beli yang semakin tinggi dan semakin didominasi oleh generasi millennial yang akrab dengan teknologi digital;
- Arah kebijakan pembangunan nasional Pemerintah melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor energi yang akan membutuhkan pendanaan dari perbankan;
- Integrasi ekonomi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan perdagangan bebas antar-negara ASEAN yang akan berpengaruh terhadap persaingan bank, baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan.

## Jangka Panjang

Proses transformasi BRI dari tahun 2018 hingga 2022 ditujukan untuk mencapai aspirasi sebagai *The Most Valuable Bank* di Asia Tenggara serta *Home to The Best Talent*.

## Target Bisnis

Untuk mendukung aspirasi tersebut, target bisnis yang akan dicapai yaitu:

- **Segmen Mikro**  
Mempertahankan dan mengembangkan bisnis mikro BRI hingga mencapai pangsa pasar minimal
- **Segmen Consumer**  
Mempertahankan market leader pada salary based loan sekaligus menjadi Top Player di sektor consumer lainnya.
- **Segmen SME**  
Mewujudkan keinginan BRI sebagai Leading SME Bank di Indonesia
- **Segmen Korporasi**  
Meningkatkan profitabilitas di segmen Korporasi

## Strategi Transformasi

Transformasi BRI yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang akan diimplementasikan dalam 3 *waves of transformation* sebagai berikut:

- Mempertahankan dominasi BRI di segmen MKM melalui digitalisasi proses bisnis  
Hal yang akan dilakukan untuk mempertahankan dominasi BRI di segmen MKM pada bisnis Mikro terutama adalah melakukan digitalisasi untuk proses bisnis, meningkatkan monitoring, *collection* dan *underwriting capability*.
- Menjawab Tantangan Bisnis Simpanan dengan Pengembangan layanan *Wholesale Transaction Banking* dan *Retail Payment*  
Untuk menjawab tantangan perubahan teknologi dan menggarap potensi dari kelas menengah yang semakin meningkat, BRI memperkuat kemampuan dalam hal retail payment dan transaction banking.
  - Bisnis *retail payment* yang fokus menasar potensi nasabah segmen individu dan keagenan, *Pengembangan bisnis wholesale transaction banking*,
- Meningkatkan Produktivitas SDM serta Kualitas Layanan Teknologi Informasi  
Untuk mempersiapkan eksekusi strategi jangka panjang, dari sisi support, BRI akan memperkuat kapabilitas teknologi informasi dalam mendukung bisnis dan operasional, pengelolaan risiko yang lebih efisien, membangun kapasitas *data analytics*, membangun *performance-driven culture* serta memperkuat *leadership capability*.

## Jangka Menengah

Strategi BRI dalam tiga tahun ke depan adalah *Competitive Growth Strategy*, yaitu dilakukan dengan cara:

- Memperbaiki Struktur Neraca dan Pendapatan
- Meningkatkan Produktivitas Jaringan Kerja
- Menerapkan Operational Excellence
- Membangun sinergi BUMN untuk meningkatkan daya saing

## Jangka Pendek

Berbagai strategi jangka pendek untuk tahun 2018 telah kami jabarkan dalam analisis dan pembahasan manajemen per-segmen, yang pada intinya adalah:

- Tetap menjaga Fokus Pertumbuhan Aset di segmen MKM
- Meningkatkan Pertumbuhan Dana Murah dan Menjaga Komposisi CASA
- Meningkatkan Produktivitas Operasional
- Menjaga Kualitas Aset

## KEBIJAKAN BANK LAINNYA

### TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

#### Transparansi Keuangan

BRI melaksanakan transparansi atas kondisi keuangannya melalui Laporan Keuangan baik secara Bulanan, Triwulanan maupun Tahunan kepada otoritas keuangan dan pasar modal yang dapat diakses dan diunduh baik oleh Investor maupun masyarakat umum melalui situs *web* BRI ([www.bri.co.id](http://www.bri.co.id), <http://banggaberindonesia.com/home>, [www.ir-bri.com](http://www.ir-bri.com)), situs Otoritas Jasa Keuangan ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)), situs Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) maupun media cetak.

Publikasi Laporan Keuangan & Non Keuangan Tahun 2017	Tanggal	Sarana Publikasi
<b>Publikasi Laporan Keuangan Bulanan</b>		
Desember 2016	31 Januari 2017	Situs <i>web</i> BRI: <a href="http://www.bri.co.id">www.bri.co.id</a> dan <a href="http://www.ir-bri.com">www.ir-bri.com</a>
Januari 2017	28 Februari 2017	Situs <i>Web</i> Otoritas Jasa Keuangan: <a href="http://www.ojk.go.id">www.ojk.go.id</a>
Februari 2017	31 Maret 2017	
Maret 2017	28 April 2017	
April 2017	31 Mei 2017	
Mei 2017	30 Juni 2017	
Juni 2017	31 Juli 2017	
Juli 2017	31 Agustus 2017	
Agustus 2017	29 September 2017	
September 2017	31 Oktober 2017	
Oktober 2017	30 November 2017	
November 2017	30 Desember 2017	
Desember 2017	31 Januari 2018	
<b>Publikasi Triwulanan</b>		
<b>Laporan Keuangan</b>		
31 Desember 2016 ( <i>Audited</i> )	1 Februari 2017	Media Cetak: Media Indonesia, <i>Investor Daily</i> , Kontam, Bisnis Indonesia.
31 Maret 2017 ( <i>Un-audited</i> )	20 April 2017	Situs <i>web</i> BRI: <a href="http://www.bri.co.id">www.bri.co.id</a> dan <a href="http://www.ir-bri.com">www.ir-bri.com</a>
30 Juni 2017 ( <i>Limited Review</i> )	7 Agustus 2017	Situs <i>Web</i> Otoritas Jasa Keuangan: <a href="http://www.ojk.go.id">www.ojk.go.id</a>
30 September 2017 ( <i>Un-Audited</i> )	26 Oktober 2017	Situs <i>Web</i> Bursa Efek Indonesia: <a href="http://www.idx.co.id">www.idx.co.id</a>
31 Desember 2017 ( <i>Audited</i> )	25 Januari 2018	
<b>Laporan Liquidity Coverage Ratio (LCR)</b>		
Triwulan I – 2017	28 April 2017	Situs <i>web</i> BRI: <a href="http://www.bri.co.id">www.bri.co.id</a>
Triwulan II – 2017	31 Juli 2017	
Triwulan III – 2017	31 Oktober 2017	
Triwulan IV – 2017	31 Januari 2018	
<b>Publikasi Tahunan</b>		
Laporan Tahunan BRI 2016	1 Maret 2018	Situs <i>web</i> BRI: <a href="http://www.bri.co.id">www.bri.co.id</a> dan <a href="http://www.ir-bri.com">www.ir-bri.com</a> Situs <i>Web</i> Bursa Efek Indonesia: <a href="http://www.idx.co.id">www.idx.co.id</a>
Laporan Keberlanjutan ( <i>Sustainability Reports</i> )	1 Maret 2018	Situs <i>web</i> BRI: <a href="http://www.bri.co.id">www.bri.co.id</a> , <a href="http://www.ir-bri.com">www.ir-bri.com</a> dan <a href="http://banggaberindonesia.com/home">http://banggaberindonesia.com/home</a>
Laporan Keuangan PKBL 2016	1 Maret 2018	Situs <i>web</i> BRI: <a href="http://www.bri.co.id">www.bri.co.id</a> dan <a href="http://banggaberindonesia.com/home">http://banggaberindonesia.com/home</a>
Laporan Tahunan DPLK BRI 2016	28 Februari 2017	Situs <i>web</i> BRI: <a href="http://www.bri.co.id">www.bri.co.id</a>
Laporan Keuangan DPLK BRI 2016	28 Februari 2017	
Laporan Investasi DPLK BRI 2016	28 Februari 2017	
Laporan Tata Kelola Terintegrasi 2016		



## KEBIJAKAN BANK LAINNYA

### Laporan Non Keuangan

Selain informasi keuangan, melalui situs web BRI, nasabah, masyarakat luas, pemegang saham dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), dapat mencari informasi, kapanpun secara akurat dan memadai antara lain :

1. Informasi Tata Kelola Perusahaan, diantaranya Anggaran Dasar Perusahaan, Laporan Tahunan, Laporan Tata Kelola Terintegrasi, Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*), Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG), Kebijakan Manajemen Risiko, Kode Etik Perusahaan, Hasil Penilaian GCG, Profil anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dan lainnya.
2. Informasi produk dan Layanan Perusahaan termasuk jaringan kantor.
3. *Press Release* Perusahaan yang berisi *update* berita dan perkembangan Perseroan.

### PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN DANA BESAR

#### Kebijakan Transaksi Pihak Terkait

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, BRI telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan Penyediaan Dana khususnya Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait atau Penyediaan Dana Besar (*large exposures*) dan atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE:S.32-DIR/ADK/09/2007 tentang Batas Minimum Pemberian kredit.

Seluruh Portofolio Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dengan Perseroan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank. Ketentuan pihak lainnya yang diatur adalah:

1. Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan Dana yang berlaku.
2. Bank dilarang memberikan penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris.
3. Bank dilarang membeli aktiva berkualitas rendah dari pihak terkait.

4. Apabila kualitas Penyediaan Dana kepada pihak terkait menurun menjadi kurang lancar, diragukan dan macet, Bank wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian untuk memperbaiki antara lain dengan cara
  - a. pelunasan kredit selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak turunnya kualitas Penyediaan Dana dan atau
  - b. Melakukan restrukturisasi kredit sejak turunnya kualitas Penyediaan Dana.
5. Penyediaan Dana kepada Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait yang disalurkan dan atau digunakan untuk keuntungan Pihak Terkait digolongkan sebagai Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait.
6. Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait yang menerima Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud ada Butir 5) dikategorikan sebagai Pihak Terkait.
7. Dalam hal Bank akan memberikan Penyediaan Dana dalam bentuk Penyertaan Modal yang mengakibatkan pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal (*investee*) menjadi Pihak Terkait, Bank wajib memastikan:
  - a. Rencana Penyediaan Dana tersebut tidak melanggar ketentuan pemberian Dana Kepada Pihak Terkait.
  - b. Penyediaan Dana yang akan dan telah diberikan kepada *investee* tersebut setelah ditambah dengan seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang telah ada tidak melanggar ketentuan.
  - c. Persyaratan sebagaimana dimaksud sesuai Butir 1, 2, 3 dan 4 telah dipenuhi.

Pihak terkait meliputi:

1. Perseorangan atau perusahaan/badan yang merupakan pengendali Bank.
2. Perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali.
3. Perseorangan atau perusahaan/badan lain yang bertindak sebagai pengendali dari perusahaan
4. Perusahaan dimana:
  - a. perseorangan dan atau perusahaan/badan sebagaimana dimaksud pada butir 1 bertindak sebagai pengendali.
  - b. perseorangan dan atau perusahaan/badan sebagaimana dimaksud pada butir 3 bertindak sebagai pengendali;

## KEBIJAKAN BANK LAINNYA

5. Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank.
6. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal.
7. Perusahaan/badan yang Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutifnya pada perusahaan/badan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2,3 dan 4.
8. Perusahaan/badan yang Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutifnya merupakan:
  - a. Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif pada Bank.
  - b. Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan/badan sebagaimana dimaksud pada butir 1,2,3,dan 4.
9. Perusahaan/badan yang 50 % (lima puluh per seratus) atau lebih Komisaris dan Direksinya merupakan Komisaris, Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan/badan sebagaimana dimaksud pada butir 3 dan atau 4.
10. Perusahaan/badan dimana:
  - a. Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif Bank sebagaimana dimaksud pada huruf e) bertindak sebagai pengendali.
  - b. Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, 3, dan atau 4 bertindak sebagai pengendali;
11. Perusahaan/badan yang memiliki hubungan keuangan dengan Bank dan atau pihak sebagaimana dimaksud pada butir 1 sampai 10 diatas.
12. Kontrak investasi kolektif dimana Bank dan atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir 1 sampai 10 memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham pada manajer investasi kontrak investasi kolektif tersebut;
13. Peminjam berupa perseorangan atau perusahaan/badan bukan bank yang memberikan jaminan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir 1 sampai dengan 12.
14. Peminjam yang diberikan jaminan oleh pihak -pihak sebagaimana dimaksud pada butir 1 sampai dengan 12.
15. Bank lain yang memberikan jaminan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir 1 sampai dengan 12 sepanjang terdapat *counterguarantee* dari Bank dan atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir 1 sampai dengan 12 kepada bank lain tersebut .
16. Perusahaan/badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir 6.

#### Tabel Penyediaan dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Dana Besar (*Large Exposure*)

BRI telah memiliki kebijakan dan prosedur tentang penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*) dan/atau Penyediaan kepada Pihak Terkait yang memiliki kepentingan dengan Bank. Penyediaan Dana dengan besaran minimal Rp. 1 Triliun, maka putusan penyediaan dana tersebut harus dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris. Penyediaan Dana berlaku untuk Debitur Tunggal, Grup, Plasma, maupun Debitur BUMN atau Pemerintah.

Penyediaan Dana kepada pihak terkait (*Related Party*) dan debitur/ group inti tahun 2017 sebagai berikut:

Penyediaan Dana	Total	
	Debitur	Nominal Baki Debet (dalam juta rupiah)
Pihak Terkait	488	5,286,535
Debitur	100	386,496
Individu	50	177,010
BUMN dan Kementrian	25	137,030
Non BUMN	25	39,979
Group	50	209,487
BUMN	25	159,528
NON BUMN	25	49,959



## KEBIJAKAN BANK LAINNYA

## PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

### Kegiatan Sosial

Sepanjang tahun 2017 pemberian dana untuk kegiatan sosial disalurkan melalui berbagai kegiatan *Corporate Social Responsibility*, Pinjaman Kemitraan dan Bina Lingkungan. Jumlah Pembiayaan/pemberian dana untuk melaksanakan kegiatan CSR dan Pinjaman Kemitraan sebagaimana dilaporkan pada Sub Bab *Corporate Social Responsibility*.

### Kegiatan Politik

Selama periode pelaporan, Bank tidak memberikan/menyalurkan dana untuk kegiatan politik.

## LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN)

Untuk meningkatkan kualitas implementasi GCG, BRI juga mematuhi peraturan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) berdasarkan ketentuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

### Kebijakan

#### Pejabat yang wajib melaporkan LHKPN

Sebagai bentuk nyata untuk meningkatkan transparansi, pencegahan korupsi dan mendukung budaya bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, anggota Komisaris, Direksi, SEVP, EVP dan VP di BRI wajib untuk melaporkan harta kekayaan sesuai dalam ketentuan internal Surat Direksi Nokep.S.07-DIR/KPS/02/2017 tanggal 22 Februari 2017 Data yang dilaporkan dalam laporan tersebut meliputi posisi harta kekayaan sebelum saat dan setelah selesai menjabat. Ketentuan pelaporan tersebut senantiasa diperbaharui agar menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

#### Koordinator Pelaporan LHKPN

Koordinator pelaporan yang ditunjuk oleh BRI untuk mengelola dan memonitor proses pelaporan LHKPN adalah Kepala Bidang Kesekretariatan dan Protokoler dan Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Berdasarkan struktur organisasi BRI saat ini, terdapat 264 pekerja BRI (di luar Direksi, Dewan Komisaris dan Perusahaan Anak) yang wajib melaporkan harta kekayaan kepada KPK. Dari seluruh pejabat tersebut, mayoritas telah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan kewajiban pelaporan pada LHKPN.

### Pelaporan

No	Jabatan	Jumlah Wajib LHKPN	Jumlah Yang Telah Melaporkan		Jumlah Yang Belum	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Dewan Komisaris	9	9	100%	0	-
2	Direksi	11	10	90%	1	10%
3	Pekerja BRI	262	156	59%	106	41%
4	Perusahaan Anak	11	7	63%	4	37%
<b>Total</b>		<b>293</b>	<b>182</b>		<b>111</b>	

# LAPORAN TAHUNAN TATA KELOLA TERINTEGRASI



## Kebijakan Transaksi Intra Group

Hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan diberbagai sektor keuangan menyebabkan dampak secara langsung atau tidak langsung terhadap eksposur risiko yang timbul dalam kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan. Berdasarkan POJK Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Bank BRI sebagai Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan wajib mengidentifikasi, mengelola dan memitigasi terhadap risiko transaksi intra group.

Kebijakan transaksi intra group diatur dalam ketentuan internal BRI yang ditetapkan dalam SK Direksi BRI No:S.72-DIR/DMR/12/2016 tentang Manajemen Risiko Terintegrasi BRI. Pengendalian risiko intra group bertujuan agar dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan ketergantungan LJK baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam konglomerasi keuangan.

BRI senantiasa memonitoring terhadap kinerja dan risiko bisnis yang timbul pada perusahaan anak dengan memastikan transaksi intra group sesuai aturan dan limit yang ditetapkan oleh regulator.



## LAPORAN TAHUNAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

## Struktur Konglomerasi Keuangan

Sesuai surat BRI kepada OJK No.B.140-DKP/GCG/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016, Struktur Konglomerasi Keuangan BRI adalah sebagai berikut:



## Struktur Kepemilikan Saham

Perusahaan Anak	Kepemilikan Saham(%)	Tanggal Operasional	Address
BRI Syariah	99,99%	16 October 2008	Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta
BRI Agro	86.83%	8 February 1990	Plaza GRI Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 No. 1 Jakarta
BRI Life	91%	28 October 1987	Graha Irama Lt 2,5,7,11 & 15, Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav 1&2, Jakarta 12950, Indonesia
BRI Finance	99%	1 August 1983	Wisma 46, Lantai 10 – Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1, Jakarta

## Struktur Kepengurusan

Struktur kepengurusan konglomerasi keuangan BRI sesuai dengan POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

Perusahaan Anak	Komite TKT	Fungsi Kepatuhan	Fungsi Audit Internal	Fungsi Manajemen Risiko
BRI Syariah	√	√	√	√
BRI Agro	√	√	√	√
BRI Life	√	√	√	√
BRI Finance	√	√	√	√

## Struktur Organisasi Entitas Utama dan Anggota LJK

## Entitas Utama

Struktur Organisasi Entitas Utama dibahas dalam BAB Dewan Komisaris dan Direksi pada Laporan Tahunan ini.

## LAPORAN TAHUNAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

### Anggota LJK: BRI Syariah

#### Dewan Komisaris

<b>Eko B. Suharno</b>	Komisaris Utama
<b>Hermanto Siregar</b>	Komisaris Independen
<b>Komaruddin Hidayat</b>	Komisaris Independen
<b>Eko Suwardi</b>	Komisaris Independen

#### Dewan Pengawas Syariah - BRI Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi agar seluruh produk dan jasa yang ditawarkan serta kegiatan operasi perbankan BRISyariah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah tidak hanya melakukan pemberian opini kepada produk dan aktivitas baru BRISyariah, namun DPS juga melakukan kepastian terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan bisnis dan operasional Bank dengan melakukan koordinasi dan asistensi kepada unit-unit kerja terkait dalam Bank. Dalam hal pelaksanaan tugas pengawasan, DPS bekerjasama dengan Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Intenal untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.

#### Komposisi DPS BRI Syariah

Organisasi DPS BRI Syariah terdiri dari seorang ketua dan seorang anggota, sebagaimana tabel berikut:

<b>Didin Hafidudin</b>	Ketua DPS
<b>Muhammad Gunawan Yasni</b>	Anggota DPS

#### Direksi

<b>Moch. Hadi Santoso</b>	Direktur Utama
<b>Agus Katon Eko S.</b>	Direktur
<b>Indra Praseno</b>	Direktur
<b>Hilman Purakusumah</b>	Direktur
<b>Wildan</b>	Direktur

### Anggota LJK: BRI Agro

#### Dewan Komisaris

<b>Bambang Soepeno</b>	Komisaris Utama
<b>Roswita Nilakurnia</b>	Komisaris
<b>Achmad Fachmi</b>	Komisaris
<b>Saptono Siwi</b>	Komisaris
<b>Heru Sukanto</b>	Komisaris

#### Direksi

<b>I Komang Sudiarsa</b>	Direktur Utama
<b>Zuhri Anwar</b>	Direktur
<b>Mustari Damopolii</b>	Direktur
<b>Sahala Manalu</b>	Direktur
<b>Zainuddin Mappa</b>	Direktur

### Anggota LJK: BRI Life

#### Dewan Komisaris

<b>Gatot Mardiwastito Trisnadi</b>	Komisaris Utama
<b>Mahmuddin Yasin</b>	Wakil Komisaris Utama
<b>Siswarin D. Hendarsapti</b>	Komisaris
<b>Mulabasa Hutabarat</b>	Komisaris Independen
<b>M.Ridwan Rizqi R. Nasution</b>	Komisaris Independen

#### Dewan Pengawas Syariah - BRILife

Dewan Pengawas Syariah BRI Life merupakan Organ Perusahaan yang direkomendasikan DSN MUI yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha asuransi agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan majelis pengawas aspek syariah, dimana setiap Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah. Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas Syariah didukung oleh Perangkat Dewan Pengawas Syariah yaitu sekretaris dan atau staff khusus Dewan Pengawas Syariah.

#### Komposisi DPS BRI Life

Organisasi DPS BRI Lifeterdiridariseseorangketuadan 2 (dua) orang anggota, sebagaimana tabel berikut:

<b>Mohamad Hidayat</b>	Ketua DPS
<b>Agus Haryadi</b>	Anggota DPS
<b>Siti Haniatunnisa</b>	

#### Direksi

<b>Rianto Ahmadi</b>	Direktur Utama
<b>Fabiola N. Sondakh</b>	Direktur
<b>M. Sodo Harisetyanto</b>	Direktur
<b>Sugeng Sudibjo</b>	Direktur
<b>Kahiri Setiawan</b>	Direktur
<b>Ansar Arifin</b>	Direktur



## LAPORAN TAHUNAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

**Anggota LJK: BRI Finance****Dewan Komisaris**

<b>Edi Masrianto</b>	Komisaris Utama
<b>Nandi Hendrian Hamaki</b>	Komisaris
<b>Boyke Budiono</b>	Komisaris

**Direksi**

<b>Kurnia Chaerudin</b>	Direktur Utama
<b>Hendrickus</b>	Direktur
<b>Achmad Chairul Ganie</b>	Direktur
<b>Hadi Susanto</b>	Direktur

**Tugas dan Tanggung Jawab**

Dalam penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan BRI, Entitas Utama memiliki pedoman untuk mendorong LJK Konglomerasi keuangan memiliki tata kelola yang lebih *prudent* sesuai prinsip-prinsip GCG. Dalam implementasi pedoman tersebut, seluruh organ entitas utama dan LJK konglomerasi keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam fungsi pengawasan dan pengendalian intern.

**Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama****Dewan Komisaris Entitas Utama**

1. Pengawasan terhadap LJK Konglomerasi Keuangan BRI sesuai dengan pedoman tata kelola terintegrasi.
2. Pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi BRI atas pelaksanaan tata kelola terintegrasi.
3. Evaluasi pedoman dan penerapan tata kelola terintegrasi.

**Direksi Entitas Utama**

1. Menyusun pedoman tata kelola terintegrasi.
2. Mengarahkan, memantau dan evaluasi pelaksanaan pedoman tata kelola terintegrasi.
3. Menindaklanjuti arahan dan evaluasi Dewan Komisaris terhadap pedoman dan pelaksanaan tata kelola terintegrasi.
4. Memastikan temuan dan rekomendasi dari pengawasan OJK atau regulator, auditor eksternal, satuan kerja audit terintegrasi, telah ditindaklanjuti.

**Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Anggota LJK****Dewan Komisaris LJK Konglomerasi Keuangan**

1. Pengawasan penerapan tata kelola, tugas dan tanggung jawab Direksi, serta tindak lanjut temuan audit.
2. Membentuk Komite Pemantauan Audit dan Komite Pemantauan Kepatuhan.
3. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris mencakup frekuensi, kehadiran, dan tata cara pengambilan keputusan.
4. Memiliki pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris.

**Dewan Pengawas Syariah BRI Syariah**

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI);
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank;
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank;
4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI;
5. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan bank;
6. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan;
7. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.

**Frekuensi dan Cara Pemberian Nasehat dan Saran DPS BRI Syariah**

1. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Pengawas Syariah akan melakukan rapat Dewan Pengawas Syariah minimal sekali dalam 1 (satu) bulan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam PBI No.11/33/PBI/2009 dan SEBI No.12/13/DPB Stentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

## LAPORAN TAHUNAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

- Seluruh keputusan DPS dituangkan dalam risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS. Dalam risalah rapat memuat keputusan dan opini syariah yang diambil dalam rapat tersebut.

### Dewan Pengawas Syariah BRILife

Dewan Pengawas Syariah BRI Life bertugas melakukan pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Asuransi sesuai dengan prinsip syariah, yang secara teknis disupport oleh manajemen, terhadap:

- Kegiatan Perusahaan Asuransi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, baik dan atau baru, dana perusahaan maupun dana investasi peserta;
- Produk asuransi syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi; dan
- Praktik pemasaran produk asuransi syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi.

### Kewajiban Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah juga memiliki kewajiban untuk:

- Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.
- Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Asuransi sesuai dengan prinsip syariah;
- Menyelenggarakan rapat rutin antara DPS dan/atau dengan manajemen paling sedikit 6 (enam) kali dalam setahun;
- Membuat Risalah Rapat dengan lengkap, melalui bantuan manajemen, termasuk apabila terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) Dewan Pengawas Syariah dan didokumentasikan dengan baik, serta disampaikan kepada seluruh DPS, baik yang hadir maupun yang tidak hadir;
- Menyusun laporan tahunan melalui bantuan manajemen, tentang Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap perusahaan sesuai dengan bentuk dan tata cara yang telah diatur oleh Regulator.
- Menyampaikan hasil laporan pengawasan tersebut kepada OJK dan menyampaikan salinannya kepada Manajemen serta menjadi bagian dari isi laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

- Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan berkala tersebut;
- Meminta penjelasan kepada Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang dinilai oleh DPS tidak sesuai dengan prinsip syariah;
- Dalam hal Direksi menolak hasil penilaian DPS, DPS wajib melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Kepala Eksekutif dan ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh DPS.
- Dalam hal Direksi menerima hasil penilaian DPS sebagaimana dimaksud pada butir 8 tersebut, DPS meminta Direksi untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan anggota Direksi tersebut agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- Dalam hal anggota Direksi tidak melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada butir 10, DPS wajib segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Kepala Eksekutif dan ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan dimaksud.

### Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Saran Dewan Pengawas Syariah BRI Life

Dalam memberikan nasihat dan saran, Dewan Pengawas Syariah melakukan rapat yang berpedoman pada Piagam Dewan Pengawas Syariah yang diatur sebagai berikut:

- Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diadakan secara berkala paling kurang 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat dapat diadakan sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa Anggota Dewan Pengawas Syariah atau atas permintaan Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akandibicarakan.
- Keputusan Rapat Dewan Pengawas Syariah harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
- Segala keputusan rapat bersifat mengikat bagi seluruh Anggota Dewan Pengawas Syariah.



## LAPORAN TAHUNAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

**Direksi LJK Konglomerasi Keuangan**

1. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG termasuk pemenuhan prinsip syariah.
2. Menindaklanjuti temuan audit dari pihak internal dan eksternal.
3. Memastikan ketersediaan peraturan tata tertib kerja di LJK Konglomerasi Keuangan.
4. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris mencakup frekuensi, kehadiran, dan tata cara pengambilan keputusan.

**Komite Tata Kelola Terintegrasi**

1. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi termasuk pemenuhan prinsip syariah.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan pedoman tata kelola terintegrasi.
3. Memberikan masukan strategis kepada Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola terintegrasi.

**Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi**

Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi pada masing-masing LJK Konglomerasi Keuangan BRI termasuk pemenuhan prinsip syariah.
2. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Kepatuhan.

**Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi**

Dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi pada konglomerasi keuangan, BRI sebagai Entitas Utama wajib memiliki Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi. Pelaksanaan tugas audit intern terintegrasi dilakukan oleh SKAI BRI.

Tugas dan tanggung jawab SKAI BRI sebagai berikut:

1. Membantu tugas Direksi dan Dewan Komisaris BRI sebagai Entitas Utama melakukan pemantauan pelaksanaan audit intern atas LJK Konglomerasi Keuangan BRI dalam rangka penerapan kerangka tata kelola terintegrasi.

2. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK Konglomerasi Keuangan BRI.
3. Dalam melaksanakan pemantauan, SKAI BRI dapat melakukan hal-hal sbb:
  - a. Pemantauan berdasarkan laporan dari Satuan Kerja Audit Intern LJK Konglomerasi Keuangan BRI.
  - b. Audit secara individual pada LJK Konglomerasi Keuangan BRI, atau
  - c. Audit secara bersama atau *joint audit* pada LJK Konglomerasi Keuangan BRI.

**Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi**

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko BRI. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi bersifat independen, terpisah dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern dan unit kerja operasional (*risk taking unit*) di BRI. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan BRI.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi berkoordinasi dengan satuan kerja Manajemen Risiko pada masing-masing Perusahaan Anak. Koordinasi dilakukan antara lain dengan cara penyampaian informasi eksposur masing-masing Perusahaan Anak kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala.

Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi meliputi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Direksi BRI dan kepada RMC Terintegrasi dalam penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi
2. Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
3. Melakukan pemantauan risiko pada Perusahaan Anak berdasarkan hasil penilaian:
  - a. profil Risiko setiap Perusahaan Anak
  - b. tingkat risiko masing-masing risiko secara terintegrasi
  - c. profil Risiko Terintegrasi
4. Melakukan *stress testing* terintegrasi

## LAPORAN TAHUNAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

5. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
  - a. keakuratan metodologi penilaian risiko
  - b. kecukupan implementasi sistem informasi manajemen
  - c. ketepatan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko

Pelaksanaan kaji ulang secara berkala bertujuan untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan faktor internal dan faktor eksternal terhadap Konglomerasi Keuangan BRI

6. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategik dan berpengaruh signifikan terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi. Pengkajian usulan lini bisnis baru difokuskan pada aspek kemampuan dalam mengelola bisnis baru, termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur risiko secara keseluruhan
7. Memberikan informasi kepada RMC Terintegrasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, antara lain mengenai besaran dan maksimum eksposur risiko yang perlu mendapat perhatian Direksi BRI atau Perusahaan Anak
8. Menyusun dan menyampaikan laporan Profil Risiko Terintegrasi secara berkala kepada Direktur Kepatuhan BRI dan kepada RMC Terintegrasi. Frekuensi laporan dapat ditingkatkan jika kondisi pasar berubah dengan cepat.

4. Penyampaian pelaporan pelaksanaan TKT kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Program kerja Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi selama periode tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Memonitor pelaksanaan fungsi audit intern secara berkala setiap Triwulanan dengan ruang lingkup pelaksanaan monitoring sbb.:
  - a. Monitoring pencapaian kinerja Perusahaan Anak
  - b. Monitoring Laporan Hasil Audit Perusahaan Anak
  - c. Monitoring tindak lanjut temuan signifikan Perusahaan Anak
  - d. Monitoring pemenuhan SDM Audit Perusahaan Anak
2. Melaksanakan *joint audit* dengan SKAI BRI Agroniaga untuk pelaksanaan audit terhadap *internet banking* di BRI Agroniaga
3. Melaksanakan *Quality Assurance* terhadap SKAI Perusahaan Anak.

### Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Program kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi selama periode tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Risk Management Committee (RMC) Terintegrasi.
2. Pelaksanaan Profil Risiko Terintegrasi.
3. Laporan Tingkat Kesehatan Bank Konsolidasi BRI
4. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Konsolidasi.

## PROGRAM KERJA TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2017

### Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Program kerja Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi selama periode tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Menjaga struktur TKT telah memenuhi prinsip TKT dan ketentuan regulator diantaranya Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Satuan Kerja Terintegrasi dan kebijakan/prosedur.
2. Evaluasi pelaksanaan Satuan Kerja Terintegrasi yaitu Fungsi Kepatuhan, Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Audit Intern pada konglomerasi keuangan.
3. Penilaian *self assessment* TKT pada konglomerasi keuangan BRI.

## REALISASI TATA KELOLA TERINTEGRASI 2017

### Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Dalam menjalankan fungsi Kepatuhan dalam konglomerasi keuangan selama tahun 2017, Satuan Kerja Kepatuhan BRI telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan TKT pada konglomerasi keuangan BRI.
2. Menyelenggarakan rapat Komite TKT sebanyak 2 (dua) kali selama tahun 2017.
3. Menyampaikan laporan profil risiko terintegrasi kepada regulator.



## LAPORAN TAHUNAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

**Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi**

Dalam menjalankan fungsinya sebagai SKAI Terintegrasi, SKAI BRI telah melaksanakan program kerja sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pendidikan Audit Syariah
2. Pembahasan Perencanaan Audit Tahunan (PAT) Perusahaan Anak
3. *Sharing knowledge* terkait pengembangan *Key Risk Indicator, Quality Assurance* & Investigasi.
4. *Joint Audit* terhadap DRC dan Pengembangan *Internet Banking* di BRI Agro
5. Pelaksanaan Pendidikan *Risk Based Audit* Bagi Auditor Perusahaan Anak
6. Pemantauan secara *off site* terhadap Laporan Hasil Audit SKAI Perusahaan Anak
7. Penyampaian Laporan Audit Intern Terintegrasi setiap Semester
8. Penilaian *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi setiap semester.
9. Rapat Koordinasi Rutin Dengan SKAI Perusahaan Anak
10. Penyelesaian *Draft* Kebijakan Pengelolaan Perusahaan Anak Terkait Aspek Integrasi Audit Intern
11. Pelaksanaan *Quality Assurance* terhadap fungsi SKAI BRI Life dan BRI Syariah.

**Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi**

Dalam menjalankan fungsinya sebagai SKAI Terintegrasi, SKAI BRI telah melaksanakan program kerja sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Risk Management Committee (RMC)* Terintegrasi.  
RMC terintegrasi dilaksanakan setiap semester, pada tahun 2017 BRI telah melaksanakan RMC terintegrasi sebagai berikut:
  - a. RMC terintegrasi I 2017 dilaksanakan tanggal 3 April 2017
  - b. RMC Terintegrasi II dilaksanakan tanggal 28 September 2017
2. Pelaksanaan Profil Risiko Terintegrasi.  
Profil risiko terintegrasi disusun setiap semester, laporan profil risiko terintegrasi BRI posisi Juni 2017 telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 14 Agustus 2017.
3. Laporan Tingkat Kesehatan Bank Konsolidasi BRI  
BRI menyusun laporan tingkat kesehatan bank konsolidasi setiap semester, Laporan tingkat kesehatan bank konsolidasi BRI posisi Juni 2017 telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal Agustus 2017.
4. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Konsolidasi.  
KPMM konsolidasi disusun setiap semester, pada tahun 2017 BRI telah menyampaikan laporan KPMM sebagai berikut:
  - a. Laporan KPMM konsolidasi BRI posisi Juni 2017 telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 9 Agustus 2017.
  - b. Laporan KPMM konsolidasi BRI posisi Desember 2017 telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 15 Februari 2018.

# MANAJEMEN RISIKO

## PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(Dalam Jutaan Rupiah)

### KETERANGAN

#### I. MODAL INTI (Tier 1)

##### 1. Modal Inti Utama (CET 1)

##### 1.1. Modal Disetor (Setelah dikurangi Saham Treasury)

- a. Saham biasa
- b. Saham preferen

##### 1.2. Cadangan Tambahan Modal \*)

##### 1.2.1. Faktor Penambah :

##### 1.2.1.1. Pendapatan Komprehensif Lainnya

- 1.2.1.1.1. Selisih lebih penjabaran laporan keuangan
- 1.2.1.1.2. Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
- 1.2.1.1.3. Saldo surplus revaluasi aset tetap

##### 1.2.1.2. Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves)

- 1.2.1.1.1. Agio
- 1.2.1.1.2. Cadangan Umum
- 1.2.1.1.3. Laba tahun-tahun lalu
  - a. Laba tahun lalu
  - b. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan
  - c. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi
- 1.2.1.1.4. Laba tahun berjalan
  - a. Laba tahun berjalan
  - b. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan
  - c. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi

##### 1.2.1.1.5. Dana Setoran Modal

##### 1.2.1.1.6. Lainnya

##### 1.2.2. Faktor Pengurang :

##### 1.2.2.1. Pendapatan Komprehensif Lainnya

- 1.2.2.1.1. Selisih kurang penjabaran laporan keuangan
- 1.2.2.1.2. Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual

##### 1.2.2.2. Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves)

- 1.2.2.2.1. Disagio
- 1.2.2.2.2. Rugi tahun-tahun lalu
- 1.2.2.2.3. Rugi tahun berjalan
- 1.2.2.2.4. Selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif
- 1.2.2.2.5. Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam Trading Book

##### 1.2.1.1.6. PPA aset non produktif yang wajib dibentuk

##### 1.2.1.1.6. Lainnya

##### 1.3. Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan

##### 1.4. Faktor Pengurang Modal Inti Utama \*)

- 1.4.1. Perhitungan pajak tangguhan
- 1.4.2. Goodwill
- 1.4.3. Selisih aset tidak berwujud lainnya
- 1.4.4. Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang
- 1.4.5. Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi
- 1.4.6. Eksposur sekuritisasi



## MANAJEMEN RISIKO

	31 DES 17		31 DES 16	
	Bank	Konsolidasi	Bank	Konsolidasi
	154.668.699	159.087.145	136.670.139	139.786.475
	154.668.699	159.087.145	136.670.139	139.786.475
	6.111.861	6.111.861	6.111.861	6.111.861
	6.111.861	6.111.861	6.111.861	6.111.861
	158.200.691	157.400.369	138.668.380	137.524.555
	158.230.228	157.443.602	138.691.220	137.724.479
	15.500.155	15.500.155	13.952.073	13.952.073
	54.202	54.202	23.490	23.490
	1.621.261	1.621.261	103.891	103.891
	13.824.692	13.824.692	13.824.692	13.824.692
	142.730.073	141.943.447	124.739.147	123.772.406
	410.340	410.340	410.340	410.340
	3.022.685	3.022.685	3.022.685	3.022.685
	110.827.813	109.844.759	95.552.666	94.339.485
	110.827.813	109.844.759	95.552.666	94.339.485
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	28.469.235	28.665.396	25.753.456	25.999.896
	28.469.235	28.665.396	25.753.456	25.999.896
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	267	-	-
	-	-	-	-
	29.537	43.233	22.840	199.924
	-	-	-	25.542
	-	-	-	-
	-	-	-	25.542
	29.537	43.233	22.840	174.382
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	56.547
	-	-	-	-
	29.537	33.890	22.840	110.221
	-	9.343	-	7.614
	-	410.067	-	247.259
	9.643.853	4.835.152	8.110.102	4.097.200
	2.989.066	3.137.065	2.328.528	2.402.408
	-	65.246	-	64.580
	-	6.198	-	3.569
	6.654.787	1.626.643	5.781.574	1.626.643
	-	-	-	-
	-	-	-	-

## MANAJEMEN RISIKO

**PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)****PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**

(Dalam Jutaan Rupiah)

**KETERANGAN**

1.4.7.	Faktor pengurang modal inti utama lainnya
1.4.7.1	Penempatan dana pada instrumen AT1 dan/atau Tier 2 pada bank lain
1.4.7.2	Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wajar
2.	Modal Inti Tambahan/Additional Tier 1 (AT 1) *)
2.1.	Instrumen yang memenuhi persyaratan AT1
2.2.	Agio/Disagio
2.3.	Faktor Pengurang : Investasi pada instrumen AT1 dan Tier 2 pada bank lain *)
2.3.1.	Penempatan dana pada instrumen AT1 dan/atau Tier 2 pada bank lain
2.3.2.	Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wajar
II.	MODAL PELENGKAP (Tier 2)
1.	Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Tier 2
a.	Saham preferen (perpetual kumulatif, non perpetual), setelah dikurangi pembelian kembali
b.	Surat berharga subordinasi (perpetual kumulatif, non perpetual), setelah dikurangi pembelian kembali
c.	Pinjaman subordinasi (perpetual kumulatif, non perpetual), setelah dikurangi pembelian kembali
d.	Mandatory convertible bond
e.	Penerbitan Tier 2 oleh perusahaan anak berupa bank dan non bank yang dibeli oleh pihak lain (konsolidasi)
f.	Amortisasi berdasarkan jangka waktu tersisa (-/-)
2.	Agio / disagio
3.	Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)
4.	Faktor pengurang modal pelengkap *)
4.1.	Sinking Fund
4.2.	Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada bank lain
4.3.	Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wajar

## TOTAL MODAL

## ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO

ATMR RISIKO KREDIT

ATMR RISIKO PASAR

ATMR RISIKO OPERASIONAL

TOTAL ATMR

## RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISK (%)

## ALOKASI PEMENUHAN KPMM

Dari CET 1 (%)

Dari AT1 (%)

Dari Tier 2 (%)

## RASIO KPMM

Rasio CET 1 (%)

Rasio Tier 1 (%)

Rasio Tier 2 (%)

Rasio Total (%)

## CET UNTUK BUFFER (%)

## PROSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK (%)

Capital Conversion Buffer (%)

Countercyclical Buffer (%)

Capital Surcharge untuk D-SIB (%)

1) Penyajian rincian dapat tidak ditampilkan apabila nilainya nihil.



### Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2017						
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah						
		Jakarta	Indonesia Timur & Tengah	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	274.065.941	-	-	-	-	-	37.291
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	75.635.998	2.219.593	9.877.247	0	2.335.915	2.225.157	4.442.045
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	52.673.654	-	-	-	-	-	101.756
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	23.813	44.750	16.531	20.145	12.900	25.067	18.862
6	Kredit Beragun Properti Komersial	2.351.274	758.088	13.867	75.553	652.844	73.984	2.922
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	18.030.820	58.642.051	12.416.629	10.239.161	14.014.404	22.827.945	5.176.110
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	34.281.678	65.631.646	25.855.084	48.070.214	39.313.421	45.966.277	9.595.949
9	Tagihan kepada Korporasi	108.934.329	22.295.636	7.902.463	12.280.345	16.483.355	23.329.523	6.624.076
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.022.695	1.571.674	613.021	652.615	831.297	1.680.664	288.375
11	Aset Lainnya	34.796.483	3.780.050	6.365.427	5.094.761	8.648.204	11.129.445	3.092.350
	<b>Total</b>	<b>614.600.781</b>	<b>155.441.598</b>	<b>63.463.875</b>	<b>76.767.094</b>	<b>82.956.875</b>	<b>108.851.564</b>	<b>29.379.736</b>

### Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2017						
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah						
		Jakarta	Indonesia Timur & Tengah	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	279.060.280	-	-	-	-	-	37.291
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	76.063.264	2.219.593	9.877.247	-	2.335.915	2.316.381	4.442.045
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	52.742.768	20	11	20	261	20.258	101.756
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	132.788	62.445	48.882	28.734	25.255	74.484	18.862
6	Kredit Beragun Properti Komersial	2.561.082	758.088	221.340	75.553	708.234	94.261	2.922
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	18.112.880	58.650.657	12.491.617	10.244.403	14.020.867	22.987.699	5.176.110
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	35.475.815	66.038.867	25.891.978	48.195.257	39.417.630	46.913.057	9.595.949
9	Tagihan kepada Korporasi	114.625.271	22.347.460	7.950.524	12.456.133	16.967.491	23.568.111	6.624.076
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.030.150	1.584.418	616.849	672.233	833.018	1.747.868	288.375
11	Aset Lainnya	34.796.483	3.780.050	6.365.427	5.094.761	8.648.204	11.129.445	3.092.350
	<b>Total</b>	<b>614.600.781</b>	<b>155.441.598</b>	<b>63.463.875</b>	<b>76.767.094</b>	<b>82.956.875</b>	<b>108.851.564</b>	<b>29.379.736</b>



31 Desember 2016									
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah									
Total	Jakarta	Indonesia Timur & Tengah	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total	
(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	
274.103.232	237.611.053	-	-	-	-	-	21.087	237.632.140	
96.735.955	75.067.213	2.213.105	8.450.053	0	2.298.599	2.733.383	5.128.899	95.891.252	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52.775.410	47.943.452	5.077	-	-	-	-	101.044	48.049.573	
162.068	13.760	31.505	10.683	13.792	8.253	8.920	4.085	90.998	
3.928.532	1.325.774	937.420	9.800	82.796	439.988	146.560	2.876	2.945.214	
141.347.120	15.606.482	53.708.129	10.806.445	9.502.434	12.747.879	20.437.930	4.745.257	127.554.556	
268.714.269	30.797.864	59.475.386	23.340.858	43.433.540	35.069.945	42.200.974	9.307.177	243.625.744	
197.849.727	95.588.769	18.310.138	5.268.097	10.201.166	12.873.806	18.190.685	5.202.984	165.635.645	
6.660.341	1.083.339	1.312.369	541.653	721.045	776.750	1.868.020	205.892	6.509.068	
72.906.720	29.588.796	3.434.596	5.611.977	4.763.238	7.967.318	9.919.997	1.393.155	62.679.076	
1.131.461.522	534.626.502	139.427.725	54.039.566	68.718.011	72.182.538	95.506.469	26.112.456	990.613.266	

31 Desember 2016									
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah									
Total	Jakarta	Indonesia Timur & Tengah	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total	
(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	
279.097.571	239.570.232	-	-	-	-	-	21.087	239.591.319	
97.254.445	75.350.897	2.213.105	8.450.053	-	2.298.599	2.825.882	5.128.899	96.267.434	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52.865.094	48.828.795	5.097	10	24.759	16.884	42.372	101.044	49.018.962	
391.450	124.471	47.806	43.134	30.633	16.688	59.063	4.085	325.881	
4.421.480	1.328.814	938.007	232.098	82.796	439.988	186.311	2.876	3.210.890	
141.684.234	15.691.141	53.716.603	10.889.581	9.510.458	12.756.691	20.631.191	4.745.257	127.940.922	
271.528.553	31.607.737	59.644.580	23.367.557	43.525.265	35.178.276	42.773.357	9.307.177	245.403.949	
204.539.065	99.685.431	18.384.238	5.331.905	10.286.124	13.491.471	18.415.247	5.202.984	170.797.400	
6.772.911	1.100.433	1.319.647	544.641	736.003	777.573	1.946.787	205.892	6.630.977	
72.906.720	29.797.066	3.437.998	5.620.821	4.768.963	7.975.923	9.971.224	1.393.155	62.965.149	
1.131.461.522	543.085.017	139.707.082	54.479.801	68.965.002	72.952.095	96.851.433	26.112.456	1.002.152.884	

## MANAJEMEN RISIKO

**Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Individual**

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2017						Total
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak						
		< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	149	1.743.686	6.696	23.113.429	249.239.272	274.103.232	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	21.283.761	9.557.608	4.773.132	45.818.897	15.302.557	96.735.955	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	20.254.866	3.702.778	5.690.279	5.641.366	17.486.121	52.775.410	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	392	7.856	153.820	-	162.068	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	26.795	1.453.068	2.448.669	-	3.928.532	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	175.735	4.789.265	20.357.873	116.023.777	470	141.347.120	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	31.408.918	129.779.138	61.895.883	43.955.700	1.674.630	268.714.269	
9	Tagihan kepada Korporasi	23.984.791	38.621.552	30.306.063	99.932.771	5.004.550	197.849.727	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	406.220	1.648.073	1.544.792	3.061.256	-	6.660.341	
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	72.608.621	72.608.621	
	<b>Total</b>	<b>97.514.440</b>	<b>189.869.287</b>	<b>126.035.642</b>	<b>340.149.685</b>	<b>361.316.221</b>	<b>1.114.885.275</b>	

**Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak**

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2017						Total
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak						
		< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	4.994.488	1.743.686	6.696	23.113.429	249.239.272	279.097.571	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	21.679.086	9.599.355	4.840.279	45.833.168	15.302.557	97.254.445	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	20.330.145	3.702.778	5.694.279	5.651.771	17.486.121	52.865.094	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	1.538	16.691	25.135	348.086	-	391.450	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	38.130	146.006	1.531.746	2.705.597	-	4.421.480	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	194.092	4.903.022	20.500.138	116.086.511	470	141.684.234	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	32.278.827	129.992.951	62.079.351	45.502.794	1.674.630	271.528.553	
9	Tagihan kepada Korporasi	26.453.520	39.175.288	30.809.090	103.096.616	5.004.550	204.539.065	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	466.030	1.660.359	1.557.678	3.088.844	-	6.772.911	
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	72.906.720	72.906.720	
	<b>Total</b>	<b>106.435.856</b>	<b>190.940.138</b>	<b>127.044.391</b>	<b>345.426.818</b>	<b>361.614.320</b>	<b>1.131.461.522</b>	



## MANAJEMEN RISIKO

	31 Desember 2016					
	Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
	< 1 tahun (9)	> 1 thn s.d. 3 thn (10)	> 3 thn s.d. 5 thn (11)	> 5 thn (12)	Non Kontraktual (13)	Total (14)
	9.553	5.289.123	460.818	106.966.036	124.906.610	237.632.140
	24.207.127	5.276.829	3.875.061	54.398.014	8.134.221	95.891.252
	-	-	-	-	-	-
	22.204.537	3.181.478	1.408.384	2.798.661	18.456.513	48.049.573
	-	524	4.137	86.337	-	90.998
	1.183	16.097	112.756	2.815.178	-	2.945.214
	116.601	4.264.928	19.362.218	103.810.217	592	127.554.556
	30.518.915	119.159.539	50.425.950	42.179.483	1.341.857	243.625.744
	18.141.542	34.651.246	21.434.129	87.183.479	4.225.249	165.635.645
	338.041	1.571.877	1.491.463	3.107.687	-	6.509.068
	-	-	-	-	62.679.076	62.679.076
	95.537.499	173.411.641	98.574.916	403.345.092	219.744.118	990.613.265

	31 Desember 2016					
	Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
	< 1 tahun (9)	> 1 thn s.d. 3 thn (10)	> 3 thn s.d. 5 thn (11)	> 5 thn (12)	Non Kontraktual (13)	Total (14)
	1.968.732	5.289.123	460.818	106.966.036	124.906.610	239.591.319
	24.439.564	5.319.884	3.963.796	54.409.969	8.134.221	96.267.434
	-	-	-	-	-	-
	23.055.200	3.261.268	1.412.384	2.833.597	18.456.513	49.018.962
	2.112	12.328	30.507	280.933	-	325.881
	9.778	41.851	141.571	3.017.690	-	3.210.890
	137.844	4.419.482	19.481.323	103.901.680	592	127.940.922
	31.286.362	119.276.859	50.649.344	42.849.527	1.341.857	245.403.949
	19.875.840	36.063.866	21.671.977	88.960.469	4.225.249	170.797.400
	380.586	1.585.600	1.500.419	3.164.372	-	6.630.977
	286.073	-	-	-	62.679.076	62.965.149
	101.442.092	175.270.261	99.312.139	406.384.274	219.744.118	1.002.152.883

## MANAJEMEN RISIKO

**Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual**

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>31 Desember 2017</b>				
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	4.246.842	-
2	Perikanan	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	23.584	-
4	Industri pengolahan	-	12.885.828	-
5	Listrik, Gas dan Air	-	29.810.910	-
6	Konstruksi	-	6.541.688	-
7	Perdagangan besar dan eceran	149	12.045.369	-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	271.350	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	8.327.719	-
10	Perantara keuangan	249.319.593	7.934.090	-
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	81.466	-
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	3.353.842	-
13	Jasa pendidikan	-	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	37.291	6.115.000	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	24.730.089	1.426.623	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-
20	Lainnya	16.110	3.671.644	-
	<b>Total</b>	<b>274.103.232</b>	<b>96.735.955</b>	<b>-</b>
<b>31 Desember 2016</b>				
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	5.918.105	-
2	Perikanan	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	333.185	-
4	Industri pengolahan	-	13.594.343	-
5	Listrik, Gas dan Air	-	30.590.833	-
6	Konstruksi	-	5.469.834	-
7	Perdagangan besar dan eceran	280	15.234.450	-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	8.576.810	-
10	Perantara keuangan	210.741.731	3.970.110	-
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	61.608	-
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	21.087	4.104.039	-
13	Jasa pendidikan	-	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	210.922	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	26.819.495	5.504.929	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	78	-
20	Lainnya	49.547	2.322.007	-
	<b>Total</b>	<b>237.632.140</b>	<b>95.891.253</b>	<b>-</b>



## MANAJEMEN RISIKO

	Tagihan Kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai / Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	-	-	1.895	15.383	36.903.446	37.550.975	429.644	-
-	-	-	-	1.334	2.487.130	782.415	46.864	-
390.625	-	-	-	143	249.345	4.663.200	18.134	-
1.150.753	-	-	-	1.337	9.075.398	41.136.702	192.484	-
-	-	-	-	5.060	255.204	6.397.946	7.239	-
10.649	-	-	-	4.992	957.689	17.741.137	400.174	-
80.400	844	-	-	10.186	155.927.876	49.682.755	4.004.878	-
2.884	-	1.918.036	-	2.775	3.498.399	1.500.412	55.659	-
-	-	1.960.954	-	2.604	3.994.959	6.229.046	91.618	-
22.790.662	-	-	-	5.656	160.664	2.434.927	10.258	-
2.981	10.670	47.647	-	8.502	3.641.377	4.079.952	107.348	-
-	-	-	-	173.941	33.577	40.776	1.923	-
-	-	-	-	99.248	282.723	245.144	7.270	-
-	471	-	-	188.841	807.208	1.450.130	17.054	-
-	266	-	-	102.627	12.926.217	4.976.085	157.220	-
-	-	-	-	2.520	1.768.842	170.087	22.370	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-
3.207.572	3.620	-	-	12.363.288	6.620.095	8.840.972	299.189	-
-	146.197	-	-	128.358.683	29.119.927	6.891.413	791.015	-
25.138.863	-	-	-	-	4.193	3.035.653	-	72.608.621
52.775.410	162.068	3.928.532	-	141.347.120	268.714.269	197.849.727	6.660.341	72.608.621
-	82	1.701	-	16.215	31.437.980	32.300.715	454.123	-
-	-	-	-	1.402	2.316.659	576.893	38.443	-
1.294.731	-	-	-	176	283.349	6.710.519	20.277	-
2.240.864	222	-	-	1.820	8.278.920	41.277.090	197.021	-
-	-	-	-	1.945	237.258	5.556.726	64.532	-
4.508	-	-	-	6.535	1.244.637	14.286.221	493.868	-
80.067	1.988	-	-	13.940	144.106.863	32.340.411	3.723.696	-
5.380	-	2.518.981	-	3.592	3.027.193	912.747	55.663	-
-	-	370.440	-	2.631	3.477.979	4.666.544	92.535	-
32.612.185	-	-	-	8.823	174.098	1.027.439	14.387	-
6.164	15.592	54.092	-	12.938	3.841.693	2.955.859	134.882	-
-	-	-	-	224.895	40.058	12.514	2.200	-
-	241	-	-	124.504	299.737	202.652	7.565	-
-	620	-	-	149.762	829.924	847.186	19.729	-
-	335	-	-	186.417	10.490.144	3.617.709	134.363	-
-	-	-	-	2.920	1.699.987	96.231	23.729	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.080.191	4.537	-	-	22.419.985	7.642.582	9.726.393	430.717	-
-	67.381	-	-	104.376.056	24.191.919	4.071.802	601.338	-
8.725.483	-	-	-	-	4.764	4.449.994	-	62.679.076
48.049.573	90.998	2.945.214	-	127.554.556	243.625.744	165.635.645	6.509.068	62.679.076

Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

## MANAJEMEN RISIKO

**Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak**

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>31 Desember 2017</b>				
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	4.757.744	-
2	Perikanan	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	23.584	-
4	Industri pengolahan	-	12.893.416	-
5	Listrik, Gas dan Air	-	29.810.910	-
6	Konstruksi	-	6.541.688	-
7	Perdagangan besar dan eceran	149	12.045.369	-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	271.350	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	8.327.719	-
10	Perantara keuangan	249.319.593	7.934.090	-
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	81.466	-
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	3.353.842	-
13	Jasa pendidikan	-	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	37.291	6.115.000	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	24.730.089	1.426.623	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-
20	Lainnya	5.010.449	3.671.644	-
	<b>Total</b>	<b>279.097.571</b>	<b>97.254.445</b>	<b>-</b>
<b>31 Desember 2016</b>				
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	6.282.201	-
2	Perikanan	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	333.185	-
4	Industri pengolahan	-	13.594.343	-
5	Listrik, Gas dan Air	-	30.590.833	-
6	Konstruksi	-	5.469.834	-
7	Perdagangan besar dan eceran	280	15.234.450	-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	8.576.810	-
10	Perantara keuangan	210.741.731	3.970.110	-
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	61.608	-
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	21.087	4.104.039	-
13	Jasa pendidikan	-	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	210.922	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	26.819.495	5.504.929	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	78	-
20	Lainnya	2.008.725	2.334.092	-
	<b>Total</b>	<b>239.591.318</b>	<b>96.267.434</b>	<b>-</b>



## MANAJEMEN RISIKO

	Tagihan Kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	-	-	22.172	15.383	38.373.085	41.218.850	454.754	-
	-	-	-	1.334	2.494.544	782.415	47.291	-
	390.625	-	-	143	276.544	4.663.321	18.618	-
	1.150.753	-	-	1.337	9.181.230	42.244.731	199.533	-
	-	-	-	5.060	260.620	6.450.209	7.239	-
	10.649	-	136.598	4.992	1.069.339	17.861.395	408.436	-
	80.400	844	-	10.186	156.559.576	50.552.521	4.031.560	-
	2.884	-	2.097.357	2.775	3.573.417	1.560.885	59.414	-
	-	-	1.960.954	2.604	4.097.117	6.295.761	94.482	-
	22.880.346	-	-	5.656	210.699	3.152.339	10.258	-
	2.981	10.670	204.399	8.502	3.722.955	4.089.812	111.389	-
	-	-	-	173.941	33.577	40.776	1.923	-
	-	-	-	99.248	283.904	245.161	7.270	-
	-	471	-	188.841	832.464	1.450.130	17.054	-
	-	266	-	102.627	13.004.913	4.992.581	161.857	-
	-	-	-	2.520	1.770.076	170.087	22.370	-
	21	-	-	-	-	-	-	-
	3.207.572	3.620	-	12.700.402	6.660.374	8.841.026	328.449	298.099
	-	146.197	-	128.358.683	29.119.927	6.891.413	791.015	-
	25.138.863	229.382	-	-	4.193	3.035.652	-	72.608.621
	52.865.094	391.450	4.421.480	141.684.234	271.528.553	204.539.064	6.772.911	72.906.720
	-	259	34.223	16.215	32.154.166	34.415.907	518.761	-
	-	-	-	1.402	2.321.196	576.893	38.909	-
	1.294.731	-	-	176	290.509	6.710.519	20.277	-
	2.265.603	222	989	1.820	8.349.529	41.770.535	202.155	-
	-	-	-	1.945	240.316	5.556.726	64.532	-
	4.508	-	2.201	6.535	1.324.625	14.421.893	499.938	-
	80.067	3.029	8.848	13.940	144.598.534	33.098.143	3.740.565	-
	5.380	-	2.676.993	3.592	3.071.040	1.132.396	56.878	-
	-	-	370.440	2.631	3.579.297	4.722.954	93.935	-
	33.532.276	-	-	8.823	184.169	2.214.005	14.387	-
	30.164	15.592	116.943	12.938	3.928.151	3.047.866	138.958	-
	-	-	-	224.895	40.058	12.514	2.200	-
	-	241	-	124.504	301.061	202.733	7.565	-
	-	751	-	149.762	849.622	847.186	19.729	-
	-	335	-	186.417	10.567.199	3.632.970	137.360	-
	-	-	-	2.920	1.700.814	96.231	23.729	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.080.191	238.072	254	22.806.351	7.706.980	9.726.393	449.760	286.073
	-	67.381	-	104.376.056	24.191.919	4.071.802	601.338	-
	8.726.042	-	-	-	4.764	4.539.733	-	62.679.076
	49.018.962	325.882	3.210.889	127.940.922	245.403.949	170.797.398	6.630.978	62.965.149

## MANAJEMEN RISIKO

**Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Individual**

(dalam jutaan rupiah)

Kategori Portofolio		31 Desember 2017					
		Tagihan Bersih					
		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
		PT ICRA Indonesia	[Idr]AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	16.986.522	7.622.198
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		-	134.999	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		1.180.549	492.276	120.000	9.360.897	1.375.387
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal						
6	Kredit Beragun Properti Komersial						
7	Kredit Pegawai/Pensiunan						
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
9	Tagihan kepada Korporasi		531.516	106.732	50.000	3.498.653	4.758.838
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						
11	Aset Lainnya						
	<b>TOTAL</b>		<b>1.712.065</b>	<b>734.007</b>	<b>170.000</b>	<b>29.846.071</b>	<b>13.756.423</b>



## MANAJEMEN RISIKO

			31 Desember 2017						
			Tagihan Bersih						
			Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Total	
B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3				
B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3				
B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3				
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)				
[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B-	[Idr]A1+ s.d [Idr]A1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr]A3	Kurang dari [Idr]A3				
id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4				
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
-	-	-	-	-	-	-	249.494.512	274.103.232	
-	-	-	-	-	-	-	96.600.956	96.735.955	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	40.246.301	52.775.410	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	188.903.988	197.849.727	
-	-	-	-	-	-	-	575.245.757	621.464.324	

## MANAJEMEN RISIKO

**Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Individual**

(dalam jutaan rupiah)

Kategori Portofolio		31 Desember 2016					
		Tagihan Bersih					
		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
		PT ICRA Indonesia	[Idr]AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	21.474.803	8.500.649
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		22.048	197.317	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		771.877	272.424	611.796	13.718.901	555.284
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal						
6	Kredit Beragun Properti Komersial						
7	Kredit Pegawai/Pensiunan						
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
9	Tagihan kepada Korporasi		896.252	168.419	302.820	3.474.378	6.044.404
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						
11	Aset Lainnya						
TOTAL			1.690.177	638.160	914.616	38.668.082	15.100.337



## MANAJEMEN RISIKO

		31 Desember 2016								
		Tagihan Bersih								
		Peringkat Jangka Pendek					Tanpa Peringkat	Total		
B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3					
B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3					
B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3					
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)					
[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B-	[Idr]A1+ s.d [Idr]A1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr]A3	Kurang dari [Idr]A3					
id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4					
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
-	-	-	-	-	-	-	-	207.656.688	237.632.140	
-	-	-	-	-	-	-	-	95.671.887	95.891.252	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	32.119.291	48.049.573	
-	-	-	-	-	-	-	-	154.749.372	165.635.645	
-	-	-	-	-	-	-	-	490.197.238	547.208.610	

## MANAJEMEN RISIKO

### Pengungkapan Tag Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio & Skala Peringkat - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

Kategori Portofolio		31 Desember 2017					
		Tagihan Bersih					
		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
		PT ICRA Indonesia	[Idr]AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	16.986.522	7.622.198
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		-	134.999	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		1.180.549	906.681	120.000	9.360.897	1.375.387
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal						
6	Kredit Beragun Properti Komersial						
7	Kredit Pegawai/Pensiunan						
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
9	Tagihan kepada Korporasi		531.516	106.732	50.000	3.498.653	4.758.838
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						
11	Aset Lainnya						
TOTAL			1.712.065	748.412	170.000	29.846.071	13.756.423



## MANAJEMEN RISIKO

		31 Desember 2017								
		Tagihan Bersih								
		Peringkat Jangka Pendek					Tanpa Peringkat	Total		
	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3				
	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3				
	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3				
	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)				
	[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B-	[Idr]A1+ s.d [Idr]A1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr] A3	Kurang dari [Idr]A3				
	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4				
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
	-	-	-	-	-	-	-	254.488.852	279.097.571	
	-	-	-	-	-	-	-	97.119.446	97.254.445	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	40.321.580	52.865.094	
	-	-	-	-	-	-	-	195.593.326	204.539.065	
	-	-	-	-	-	-	-	587.523.204	633.756.175	

## MANAJEMEN RISIKO

### Pengungkapan Tag Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio & Skala Peringkat - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

Kategori Portofolio		31 Desember 2016					
		Tagihan Bersih					
		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
		PT ICRA Indonesia	[Idr]AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	21.474.803	8.500.649
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		22.048	197.317	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		771.877	272.424	611.796	13.718.901	555.284
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal						
6	Kredit Beragun Properti Komersial						
7	Kredit Pegawai/Pensiunan						
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
9	Tagihan kepada Korporasi		896.252	168.419	302.820	3.474.378	6.044.404
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						
11	Aset Lainnya						
TOTAL			1.690.177	638.160	914.616	38.668.082	15.100.337



## MANAJEMEN RISIKO

		31 Desember 2016							
		Tagihan Bersih							
		Peringkat Jangka Pendek					Tanpa Peringkat	Total	
B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3				
B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3				
B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3				
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)				
[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B-	[Idr]A1+ s.d [Idr]A1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr] A3	Kurang dari [Idr]A3				
id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4				
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
-	-	-	-	-	-	-	209.615.867	239.591.319	
-	-	-	-	-	-	-	96.048.069	96.267.434	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	33.088.680	49.018.962	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	159.911.127	170.797.400	
-	-	-	-	-	-	-	498.663.745	555.675.117	

## MANAJEMEN RISIKO

**Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) : Transaksi Derivatif**

(dalam jutaan rupiah)

No	Variabel yang Mendasari	31 Desember 2017							
		Notional Amount			Tagihan Derivatif	Kewajiban Derivatif	Tagihan Bersih sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih setelah MRK
		< 1 Tahun	> 1 Tahun - < 5 Tahun	> 5 Tahun					
BANK SECARA INDIVIDUAL									
1	Suku Bunga	7.294.765	2.698.900	3.390.536	60.475	54.261	124.828	-	124.828
2	Nilai Tukar	22.527.732	1.681.337	-	20.745	27.391	330.089	-	330.089
3	Lainnya	-	-	-	64.708	115.981	64.708	-	64.708
	TOTAL	29.822.497	4.380.237	3.390.536	145.928	197.633	519.625	-	519.625
BANK SECARA KONSOLIDASI									
1	Suku Bunga	7.294.765	2.698.900	3.390.536	60.475	54.261	124.828	-	124.828
2	Nilai Tukar	22.527.732	1.681.337	-	20.745	27.391	330.089	-	330.089
3	Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Emas	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Logam selain Emas	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Lainnya	-	-	-	64.708	115.981	64.708	-	64.708
	TOTAL	29.822.497	4.380.237	3.390.536	145.928	197.633	519.625	-	519.625

**Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) : Transaksi Repo - Bank secara Individual**

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2017			
		Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	12.200.619	12.136.684	996.995	448.227
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total	12.200.619	12.136.684	996.995	448.227

**Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) : Transaksi Repo - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak**

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2017			
		Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	12.200.619	12.136.684	996.995	448.227
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total	12.200.619	12.136.684	996.995	448.227



## MANAJEMEN RISIKO

	31 Desember 2016							
	Notional Amount			Tagihan Derivatif	Kewajiban Derivatif	Tagihan Bersih sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih setelah MRK
	< 1 Tahun	> 1 Tahun - < 5 Tahun	> 5 Tahun					
	5.484.998	3.719.891	3.233.400	59.443	53.780	126.543	-	126.543
	24.283.467	2.456.844	-	2.002	112.160	367.679	-	367.679
	-	-	-	32.204	178.925	32.204	-	32.204
	29.768.465	6.176.736	3.233.400	93.649	344.865	526.426	-	526.426
	5.484.998	3.719.891	3.233.400	59.443	53.780	126.543	-	126.543
	24.283.467	2.456.844	-	2.002	112.160	367.679	-	367.679
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	32.204	178.925	32.204	-	32.204
	29.768.465	6.176.736	3.233.400	93.649	344.865	526.426	-	526.426

	31 Desember 2016			
	Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
	(7)	(8)	(9)	(10)
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	7.358.032	7.302.398	677.262	300.015
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	7.358.032	7.302.398	677.262	300.015

	31 Desember 2016			
	Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
	(7)	(8)	(9)	(10)
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	7.358.032	7.302.398	677.262	300.015
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	7.358.032	7.302.398	677.262	300.015

## MANAJEMEN RISIKO

**Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) : Transaksi Reverse Repo - Bank secara Individual**

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2017			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	15.068.698	-	15.068.698	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	1.427.595	-	1.427.595	285.519
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total	16.496.292	-	16.496.292	285.519

**Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) : Transaksi Reverse Repo - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak**

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2017			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	16.583.432	-	15.068.698	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	1.427.595	-	1.427.595	285.519
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total	18.011.026	-	16.496.292	285.519



## MANAJEMEN RISIKO

31 Desember 2016				
	Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR setelah MRK
	(7)	(8)	(9)	(10)
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	1.557.370	-	1.557.370	311.474
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	1.557.370	-	1.557.370	311.474

31 Desember 2016				
	Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR setelah MRK
	(7)	(8)	(9)	(10)
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	1.557.370	-	1.557.370	311.474
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	1.557.370	-	1.557.370	311.474

## MANAJEMEN RISIKO

### Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2017					
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit					
(1)	(2)	0%	20%	35%	40%	45%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
<b>A Eksposur Neraca</b>							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	259.015.604	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	3.091.436	3.245.094	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	27.166.865	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	162.068	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	729.439	19.071.021	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	16.138.711	2.175.202	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	197	-	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	24.437.574	-	-	-	-	-
Total Eksposur Neraca		303.412.961	51.658.182	162.068	-	-	-
<b>B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif</b>							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	18.930	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	480.260	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur TRA		18.930	480.260	-	-	-	-
<b>C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)</b>							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	15.068.698	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	2.114.790	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur Counterparty Credit Risk		15.068.698	2.114.790	-	-	-	-



## MANAJEMEN RISIKO

						ATMR (13)	Beban Modal (14)
	50% (8)	75% (9)	100% (10)	150% (11)	Lainnya (12)		
	-	-	-	-	-	-	-
	80.234.060	-	-	-	-	40.766.049	3.261.284
	-	-	-	-	-	-	-
	11.223.940	-	-	-	-	11.045.343	883.627
	-	-	-	-	-	56.724	4.538
	-	-	3.928.532	-	-	3.928.532	314.283
	141.347.120	-	-	-	-	70.673.560	5.653.885
	- 248.812.007	-	-	-	-	190.423.209	15.233.857
	119.611	-	174.080.285	-	-	174.575.131	13.966.010
	-	-	6.846	6.653.298	-	9.986.793	798.943
	-	-	48.064.588	106.459	-	48.224.278	3.857.942
	232.924.731	248.812.007	226.080.251	6.759.757	-	549.679.619	43.974.370
	-	-	-	-	-	-	-
	10.165.365	-	-	-	-	5.082.683	406.615
	-	-	-	-	-	-	-
	10.960.130	-	-	-	-	5.576.117	446.089
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	101.802	-	-	-	76.352	6.108
	-	-	5.335.918	-	-	5.335.918	426.873
	-	-	-	-	-	-	-
	21.125.495	101.802	5.335.918	-	-	16.071.070	1.285.686
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	829.425	-	-	-	-	837.671	67.014
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	829.425	-	-	-	-	837.671	67.014

## MANAJEMEN RISIKO

### Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2016					
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit					
(1)	(2)	0%	20%	35%	40%	45%	
		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
<b>A Eksposur Neraca</b>							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	237.523.630	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	15.663	2.274.138	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	21.372.831	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	90.998	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	621.232	18.657.504	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	12.586.470	1.218.948	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	140	-	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	24.865.136	-	-	-	-	-
	<b>Total Eksposur Neraca</b>	<b>275.612.271</b>	<b>43.523.421</b>	<b>90.998</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif</b>							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	108.510	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	273.279	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Eksposur TRA</b>	<b>108.510</b>	<b>273.279</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)</b>							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	2.212.516	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Eksposur Counterparty Credit Risk</b>	<b>-</b>	<b>2.212.516</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## MANAJEMEN RISIKO

						ATMR (25)	Beban Modal (26)
	50% (20)	75% (21)	100% (22)	150% (23)	Lainnya (24)		
	-	-	-	-	-	-	-
	84.529.394	-	60.803	-	-	42.780.329	3.422.426
	-	-	-	-	-	-	-
	18.430.384	-	-	-	-	13.489.758	1.079.181
	-	-	-	-	-	31.849	2.548
	-	-	2.945.214	-	-	2.945.214	235.617
	127.554.556	-	-	-	-	63.777.278	5.102.182
	-	224.177.873	-	-	-	171.864.906	13.749.192
	324.862	-	147.613.908	50.000	-	148.095.129	11.847.610
	-	-	11.966	6.496.962	-	9.757.409	780.593
	-	-	37.781.514	32.426	-	37.830.153	3.026.412
	230.839.196	224.177.873	188.413.405	6.579.388	-	490.572.025	39.245.762
	-	-	-	-	-	-	-
	9.011.254	-	-	-	-	4.505.627	360.450
	-	-	-	-	-	-	-
	5.212.021	-	-	-	-	2.660.667	212.853
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	169.135	-	-	-	126.851	10.148
	-	-	3.841.457	-	-	3.841.457	307.317
	-	-	-	-	-	-	-
	14.223.275	169.135	3.841.457	-	-	11.134.602	890.768
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	548.542	-	-	-	-	716.774	57.342
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	548.542	-	-	-	-	716.774	57.342

## MANAJEMEN RISIKO

### Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2017					
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit					
(1)	(2)	0%	20%	35%	40%	45%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
A	Eksposur Neraca						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	262.495.209	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	3.091.436	3.245.094	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	27.245.728	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	391.450	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	875.947	19.071.021	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	16.342.136	2.175.202	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	197	-	-	-	-	
11	Aset Lainnya	24.449.680	-	-	-	-	
	<b>Total Eksposur Neraca</b>	<b>307.254.605</b>	<b>51.737.045</b>	<b>391.450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	18.930	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	490.736	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	36	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	-	2.714	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	
	<b>Total Eksposur TRA</b>	<b>18.930</b>	<b>493.486</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	15.068.698	1.514.734	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	2.114.790	-	-	-	
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
	<b>Total Eksposur Counterparty Credit Risk</b>	<b>15.068.698</b>	<b>3.629.524</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



## MANAJEMEN RISIKO

						ATMR (13)	Beban Modal (14)
	50% (8)	75% (9)	100% (10)	150% (11)	Lainnya (12)		
	-	-	-	-	-	-	-
	80.747.283	-	-	-	-	41.022.661	3.281.813
	-	-	-	-	-	-	-
	11.224.095	-	-	-	-	11.061.194	884.896
	-	-	-	-	-	137.008	10.961
	-	-	4.349.537	-	-	4.349.537	347.963
	141.684.234	-	-	-	-	70.842.117	5.667.369
	-	251.424.670	-	-	-	192.382.706	15.390.616
	119.611	-	180.351.136	-	-	180.845.982	14.467.679
	-	-	26.002	6.746.712	-	10.146.070	811.686
	-	-	48.346.148	110.892	-	48.512.488	3.880.999
	233.775.223	251.424.670	233.072.823	6.857.604	-	559.299.763	44.743.981
	-	-	-	-	-	-	-
	10.170.632	-	-	-	-	5.085.317	406.825
	-	-	-	-	-	-	-
	10.960.320	-	-	-	-	5.578.307	446.265
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	71.943	-	-	71.943	5.755
	-	-	-	-	-	-	-
	-	156.879	-	-	-	117.660	9.413
	-	-	5.548.266	-	-	5.548.266	443.861
	-	-	-	-	-	-	-
	21.130.952	156.879	5.620.209	-	-	16.401.493	1.312.119
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	829.425	-	-	-	-	837.671	67.014
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	829.425	-	-	-	-	837.671	67.014

## MANAJEMEN RISIKO

**Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah  
Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak**

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2016					
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit					
(1)	(2)	0%	20%	35%	40%	45%	
		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
<b>A Eksposur Neraca</b>							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	239.482.809	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	15.663	2.274.138	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	3.000	22.257.364	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	325.881	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	653.386	18.657.504	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	12.710.244	1.218.948	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	190	-	-	-	-	
11	Aset Lainnya	24.893.790	-	-	-	-	
	<b>Total Eksposur Neraca</b>	<b>277.759.082</b>	<b>44.407.954</b>	<b>325.881</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif</b>							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	108.510	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	316.404	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	241	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1.232	-	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	1.421	-	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	
	<b>Total Eksposur TRA</b>	<b>111.163</b>	<b>316.645</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)</b>							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	2.212.516	-	-	-	
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
	<b>Total Eksposur Counterparty Credit Risk</b>	<b>-</b>	<b>2.212.516</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



## MANAJEMEN RISIKO

	50%	75%	100%	150%	Lainnya	ATMR	Beban Modal
						(20)	(21)
	-	-	-	-	-	-	-
	84.864.155	-	60.803	-	-	42.947.710	3.435.817
	-	-	-	-	-	-	-
	18.468.884	-	-	-	-	13.685.914	1.094.873
	-	-	-	-	-	114.058	9.125
	-	-	3.209.158	-	-	3.209.158	256.733
	127.940.818	-	-	-	-	63.970.409	5.117.633
	-	225.899.510	-	-	-	173.156.134	13.852.491
	324.862	-	152.527.913	50.000	-	153.009.134	12.240.731
	-	-	22.905	6.607.780	-	9.934.575	794.766
	-	-	38.038.472	32.887	-	38.087.803	3.047.024
	231.598.719	225.899.510	193.859.251	6.690.667	-	498.114.895	39.849.192
	-	-	-	-	-	-	-
	9.052.675	-	-	-	-	4.526.338	362.107
	-	-	-	-	-	-	-
	5.212.252	-	-	-	-	2.669.408	213.553
	-	-	-	-	-	-	-
	1.491	-	-	-	-	1.732	139
	104	-	-	-	-	52	4
	-	192.317	-	-	-	144.238	11.539
	-	-	3.964.012	-	-	3.964.012	317.121
	-	-	-	102	-	153	12
	14.266.522	192.317	3.964.012	102	-	11.305.933	904.475
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	548.542	-	-	-	-	716.774	57.342
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	548.542	-	-	-	-	716.774	57.342

## MANAJEMEN RISIKO

**Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual**

(dalam juta rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2017							
		Wilayah							
		Jakarta	Indonesia Tengah & Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tagihan	486.312.630	164.490.857	58.252.311	72.368.597	74.717.427	116.718.289	62.367.709	1.035.227.820
2	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (impaired)	16.236.980	6.641.418	1.434.029	1.576.305	1.975.582	4.381.086	1.881.779	34.127.179
	a. Belum Jatuh Tempo	11.390.967	4.720.845	458.467	612.594	986.741	2.031.268	1.583.401	21.784.283
	b. Telah jatuh Tempo	4.846.013	1.920.573	975.562	963.711	988.841	2.349.818	298.378	12.342.896
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	7.174.103	3.758.889	275.906	237.393	390.282	888.625	106.215	12.831.413
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	3.482.585	4.059.499	1.635.075	2.069.701	1.660.348	2.777.741	545.900	16.230.849
5	Tagihan yang hapus buku	2.167.823	2.075.684	1.003.485	1.115.392	1.104.708	1.739.682	321.915	9.528.689

No	Keterangan	31 Desember 2016							
		Wilayah							
		Jakarta	Indonesia Tengah & Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tagihan	484.721.911	145.581.872	49.574.109	65.124.172	66.540.632	105.381.213	11.115.589	928.039.498
2	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (impaired)	18.088.623	6.179.064	1.322.518	1.720.463	1.954.933	4.059.721	1.813.951	35.139.273
	a. Belum Jatuh Tempo	14.485.545	4.640.424	448.877	737.601	955.259	1.933.053	1.581.813	24.782.572
	b. Telah jatuh Tempo	3.603.078	1.538.640	873.641	982.862	999.674	2.126.668	232.138	10.356.701
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	5.265.898	620.754	214.057	144.041	313.030	755.711	92.745	7.406.236
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	3.050.873	3.488.105	1.385.513	1.914.013	1.517.048	2.625.608	556.975	14.538.135
5	Tagihan yang hapus buku	1.366.455	1.650.777	1.010.294	1.059.205	1.158.141	1.959.834	241.539	8.446.245



## MANAJEMEN RISIKO

**Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan perusahaan anak**

(dalam juta rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2017							
		Wilayah							
		Jakarta	Indonesia Tengah & Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tagihan	571.490.815	167.878.518	62.008.395	74.828.975	77.473.271	121.304.019	13.768.630	1.088.752.623
2	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (impaired)	16.993.917	6.885.341	1.861.497	1.649.050	2.099.366	5.074.355	1.881.779	36.445.305
	a. Belum Jatuh Tempo	11.990.642	4.862.170	824.258	644.319	1.044.226	2.451.759	1.583.401	23.400.775
	b. Telah jatuh Tempo	5.003.275	2.023.171	1.037.239	1.004.731	1.055.140	2.622.596	298.378	13.044.530
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	7.501.909	3.768.011	299.029	241.954	429.246	977.361	106.215	13.323.725
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	3.737.933	4.128.800	1.677.761	2.108.036	1.695.911	2.886.829	545.900	16.781.170
5	Tagihan yang hapus buku	2.189.865	2.098.622	1.013.120	1.228.680	1.108.730	1.746.985	321.915	9.707.917

(dalam juta rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2016							
		Wilayah							
		Jakarta	Indonesia Tengah & Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tagihan	505.009.200	148.709.681	53.544.987	67.357.260	69.428.009	109.612.644	12.158.530	965.820.311
2	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (impaired)	18.782.148	6.323.751	1.533.053	1.857.544	2.085.906	4.292.243	1.822.543	36.697.188
	a. Belum Jatuh Tempo	14.591.501	4.640.424	488.654	767.673	955.259	1.959.227	1.590.405	24.993.143
	b. Telah jatuh Tempo	4.190.647	1.683.327	1.044.399	1.089.871	1.130.647	2.333.016	232.138	11.704.045
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	5.237.758	641.714	227.568	150.888	316.702	846.785	92.745	7.514.160
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	3.491.263	3.560.465	1.456.709	1.947.620	1.557.527	2.722.491	556.975	15.293.050
5	Tagihan yang hapus buku	1.401.102	1.654.771	1.060.801	1.070.856	1.181.434	1.996.848	241.539	8.607.351

## MANAJEMEN RISIKO

**Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan - Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual**

(dalam juta rupiah)

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai ( <i>impaired</i> ) - Belum Jatuh Tempo	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai ( <i>impaired</i> ) - Telah Jatuh Tempo	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>31 Desember 2017</b>							
1	Pertanian, Perburuan dan Kelautan	80.841.487	3.425.105	920.412	1.039.393	2.379.388	1.093.940
2	Perikanan	3.345.548	15.365	57.904	677	132.595	130.805
3	Pertambangan dan Penggalian	5.537.860	2.197.909	514.816	883.192	46.274	15.935
4	Industri Pengolahan	62.795.635	7.999.558	442.759	4.808.591	1.007.663	1.097.405
5	Listrik, Gas dan Air	34.218.438	600.174	107.677	692.703	563.370	11.330
6	Konstruksi	25.406.212	1.686.184	1.432.348	1.656.859	343.726	161.092
7	Perdagangan besar dan eceran	230.064.625	1.660.052	5.404.789	1.102.228	7.005.014	5.214.583
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	7.729.740	1.750.512	102.773	345.636	193.250	100.433
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	21.909.700	340.388	1.316.981	1.282.391	443.576	151.606
10	Perantara keuangan	5.754.946	213	190.555	180.288	84.318	13.568
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	8.103.561	473.429	264.132	180.649	155.907	231.605
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	3.604.239	258	1.604	-	47.403	2.830
13	Jasa Pendidikan	637.016	1.763	9.113	-	13.811	6.612
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	2.473.050	71.105	19.413	4.641	39.615	15.245
15	Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, Hiburan dan perorangan lainnya	25.021.020	821.515	206.316	403.893	764.126	318.998
16	Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga	1.974.334	1.962	27.339	-	82.013	55.502
17	Badan Internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	23.093.859	650.646	370.072	211.061	492.738	199.321
19	Bukan Laporan Usaha	165.489.775	88.145	953.893	39.211	2.436.062	707.879
20	Lainnya	327.226.775	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>1.035.227.820</b>	<b>21.784.283</b>	<b>12.342.896</b>	<b>12.831.413</b>	<b>16.230.849</b>	<b>9.528.689</b>



## MANAJEMEN RISIKO

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai ( <i>impaired</i> ) - Belum Jatuh Tempo	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai ( <i>impaired</i> ) - Telah Jatuh Tempo	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>31 Desember 2016</b>							
1	Pertanian, Perburuan dan Kelautan	71.611.185	3.020.420	952.355	832.454	2.133.148	1.383.513
2	Perikanan	3.009.047	8.010	67.568	20.257	116.515	120.891
3	Pertambangan dan Penggalian	8.009.446	2.552.565	563.787	823.328	110.108	250.808
4	Industri Pengolahan	60.251.331	8.664.370	625.940	1.603.320	834.485	579.442
5	Listrik, Gas dan Air	33.095.511	638.267	85.686	44.234	537.012	6.620
6	Konstruksi	21.022.641	2.824.499	872.979	1.134.417	269.564	144.939
7	Perdagangan besar dan eceran	208.333.605	1.834.656	4.727.019	1.292.221	6.323.564	4.477.133
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	6.844.374	1.951.604	72.985	284.564	154.263	73.556
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	18.074.610	1.284.897	356.991	814.932	325.482	143.705
10	Perantara keuangan	5.179.104	8	204.180	190.054	69.858	11.109
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	7.324.311	596.460	315.949	243.696	162.300	77.270
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	4.405.408	9	2.012	-	170.414	4.408
13	Jasa Pendidikan	640.239	3	5.167	-	11.038	6.614
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1.885.586	69.197	20.582	27.365	30.219	13.643
15	Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, Hiburan dan perorangan lainnya	14.864.302	307.925	183.682	61.768	536.910	363.301
16	Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga	1.870.894	854	36.352	8.300	83.736	54.901
17	Badan Internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	35.210.492	946.031	531.860	-	102.806	319.210
19	Bukan Laporan Usaha	133.659.135	82.797	731.607	25.326	2.566.713	415.182
20	Lainnya	292.748.277	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>928.039.498</b>	<b>24.782.572</b>	<b>10.356.701</b>	<b>7.406.236</b>	<b>14.538.135</b>	<b>8.446.245</b>

## MANAJEMEN RISIKO

### Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan - Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan perusahaan anak

(dalam juta rupiah)

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai ( <i>impaired</i> ) - Belum Jatuh Tempo	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai ( <i>impaired</i> ) - Telah Jatuh Tempo	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>31 Desember 2017</b>							
1	Pertanian, Perburuan dan Kelautan	87.716.464	3.694.642	1.007.878	1.108.476	2.467.989	1.096.921
2	Perikanan	3.353.514	15.365	58.556	677	132.913	130.805
3	Pertambangan dan Penggalian	5.744.546	2.198.837	522.540	883.192	47.184	15.935
4	Industri Pengolahan	67.435.470	8.413.668	496.216	4.984.978	1.057.605	1.097.405
5	Listrik, Gas dan Air	34.391.709	600.727	107.901	692.703	565.346	11.330
6	Konstruksi	28.376.671	1.717.791	1.519.479	1.702.616	369.253	161.092
7	Perdagangan besar dan eceran	235.717.047	1.988.571	5.569.892	1.130.410	7.131.734	5.231.532
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	8.453.368	1.969.551	125.033	360.379	196.599	100.433
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	23.013.956	355.819	1.325.316	1.387.685	451.650	151.606
10	Perantara keuangan	6.367.633	66.205	208.533	211.939	95.460	13.568
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	9.758.800	563.445	311.349	192.878	184.426	231.605
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	3.604.239	258	1.604	-	47.403	2.830
13	Jasa Pendidikan	638.169	1.763	9.113	-	13.823	6.612
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	3.199.027	96.130	25.171	6.961	50.881	15.245
15	Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, Hiburan dan perorangan lainnya	25.122.455	821.515	212.967	403.893	767.675	318.998
16	Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga	1.975.580	1.962	27.339	-	82.025	55.502
17	Badan Internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	24.040.172	650.646	431.132	211.061	517.180	199.321
19	Bukan Laporan Usaha	165.489.775	88.145	953.893	39.211	2.436.062	707.879
20	Lainnya	354.354.028	155.735	130.618	6.666	165.962	159.298
	<b>Total</b>	<b>1.088.752.623</b>	<b>23.400.775</b>	<b>13.044.530</b>	<b>13.323.725</b>	<b>16.781.170</b>	<b>9.707.917</b>



## MANAJEMEN RISIKO

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai ( <i>impaired</i> ) - Belum Jatuh Tempo	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai ( <i>impaired</i> ) - Telah Jatuh Tempo	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>31 Desember 2016</b>							
1	Pertanian, Perburuan dan Kelautan	76.100.817	3.020.420	1.252.660	891.654	2.186.491	1.373.725
2	Perikanan	3.009.047	8.010	67.568	21.615	129.165	120.891
3	Pertambangan dan Penggalian	8.100.729	2.552.565	566.859	823.328	111.955	251.060
4	Industri Pengolahan	60.251.331	8.664.370	625.940	1.667.338	871.567	580.442
5	Listrik, Gas dan Air	33.210.648	638.267	86.108	44.234	538.271	6.620
6	Konstruksi	22.113.925	2.824.499	918.792	1.161.152	285.079	148.911
7	Perdagangan besar dan eceran	214.845.370	1.834.656	5.119.932	1.191.170	6.596.676	4.479.676
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	6.844.374	1.951.604	72.985	285.628	164.690	73.556
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	19.188.519	1.284.897	409.663	853.215	346.573	143.705
10	Perantara keuangan	5.179.104	8	204.180	190.054	164.705	11.109
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	7.324.311	596.460	315.949	252.069	177.652	78.210
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	4.405.408	9	2.012	-	170.507	4.408
13	Jasa Pendidikan	640.239	3	5.167	2.608	14.322	6.614
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	6.699.230	69.197	164.052	27.365	32.137	13.643
15	Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, Hiburan dan perorangan lainnya	14.864.302	307.925	183.682	64.661	547.338	365.077
16	Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga	1.870.894	854	36.352	8.300	84.872	54.901
17	Badan Internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	35.210.492	946.031	531.860	2.690	138.722	322.765
19	Bukan Laporan Usaha	133.659.135	82.797	731.609	26.340	2.569.943	415.182
20	Lainnya	312.302.436	210.571	408.675	739	162.385	156.856
	<b>Total</b>	<b>965.820.311</b>	<b>24.993.143</b>	<b>11.704.045</b>	<b>7.514.160</b>	<b>15.293.050</b>	<b>8.607.351</b>

## MANAJEMEN RISIKO

**Pengungkapan Rincian Mutasi Kerugian Penurunan Nilai-Bank Secara Individual**

(dalam juta rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2017	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Saldo awal CKPN	7.406.236	14.538.135
2	Pembentukan (Pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	6.753.899	9.905.798
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku tagihan pada periode berjalan	(1.328.722)	(8.199.967)
4	Pembentukan (Pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	(13.117)
Saldo akhir CKPN		12.831.413	16.230.849

No.	Keterangan	31 Desember 2016	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Saldo awal CKPN	4.074.445	12.955.907
2	Pembentukan (Pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	4.206.147	9.113.616
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku tagihan pada periode berjalan	(874.356)	(7.571.889)
4	Pembentukan (Pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	40.501
Saldo akhir CKPN		7.406.236	14.538.135



## MANAJEMEN RISIKO

**Pengungkapan Rincian Mutasi Kerugian Penurunan Nilai-Bank Secara Konsolidasi dengan Anak Perusahaan**

(dalam juta rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2017	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Saldo awal CKPN	7.514.160	15.293.050
2	Pembentukan (Pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	7.033.153	9.986.369
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku tagihan pada periode berjalan	(1.223.588)	(8.484.329)
4	Pembentukan (Pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	(13.920)
Saldo akhir CKPN		13.323.725	16.781.170

No.	Keterangan	31 Desember 2016	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Saldo awal CKPN	4.104.272	13.538.921
2	Pembentukan (Pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	4.284.245	9.446.562
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku tagihan pada periode berjalan	(874.357)	(7.732.994)
4	Pembentukan (Pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	40.561
Saldo akhir CKPN		7.514.160	15.293.050

## MANAJEMEN RISIKO

**Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank Secara Individual**

(dalam juta Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2017					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤ 1 bulan	>1 bln s.d 3 bln	>3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>I NERACA</b>							
A. Aset							
1	Kas	23.431.269	23.431.269	-	-	-	-
2	Penempatan Pada Bank Indonesia	22.645.124	22.645.124	-	-	-	-
3	Penempatan pada Bank Lain	4.300.000	2.725.000	1.055.000	520.000	-	-
4	Surat Berharga	140.050.518	110.158.782	4.586.446	-	2.566.300	22.738.991
5	Kredit yang diberikan	614.624.489	25.541.792	33.103.280	46.325.928	75.071.883	434.581.606
6	Tagihan lainnya	52.714.976	46.228.627	2.842.611	3.573.119	10.818	59.801
7	Lain-lain	52.500.757	8.197.076	2.460.182	1.099.400	3.012.714	37.731.385
Total Aset		910.267.133	238.927.670	44.047.519	51.518.447	80.661.715	495.111.783
B. Kewajiban							
1	Dana Pihak Ketiga	694.468.700	596.139.755	69.460.788	15.128.039	6.010.330	7.729.788
2	Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3	Kewajiban pada bank lain	4.292.191	4.250.981	41.210	-	-	-
4	Surat berharga yang Diterbitkan	23.543.419	-	808.000	1.131.758	2.135.633	19.468.028
5	Pinjaman yang Diterima	28.534	85	-	6.545	21.904	-
6	Kewajiban Lainnya	30.974.606	9.128.724	2.338.864	1.261.543	447.665	17.797.810
7	Lain-lain	5.442.534	1.477.194	2.666.549	470.272	824.446	4.073
Total Kewajiban		758.749.984	610.996.739	75.315.411	17.998.157	9.439.978	44.999.699
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		151.517.149	(372.069.069)	(31.267.892)	33.520.290	71.221.737	450.112.084
<b>II REKENING ADMINISTRATIF</b>							
A. Tagihan Rekening Administratif							
1	Komitmen	5.515.119	2.726.475	418.454	2.326.283	43.907	-
2	Kontijensi	1.253	-	-	-	-	1.253
Total Tagihan Rekening Administratif		5.516.372	2.726.475	418.454	2.326.283	43.907	1.253
B. Kewajiban Rekening Administratif							
1	Komitmen	90.624.540	15.652.011	19.383.065	16.782.049	9.360.329	29.447.086
2	Kontijensi	15.886.078	4.823.106	2.243.619	1.949.848	3.957.061	2.912.444
Total Kewajiban Rekening Administratif		106.510.618	20.475.117	21.626.684	18.731.897	13.317.390	32.359.530
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif		(100.994.246)	(17.748.642)	(21.208.230)	(16.405.614)	(13.273.483)	(32.358.277)
Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB)		50.522.903	(389.817.711)	(52.476.122)	17.114.676	57.948.254	417.753.807
Selisih Kumulatif							



## MANAJEMEN RISIKO

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2016					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤ 1 bulan	>1 bln s.d 3 bln	>3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>I NERACA</b>							
A. Aset							
1	Kas	24.156.773	24.156.773	-	-	-	-
2	Penempatan Pada Bank Indonesia	57.980.634	57.980.634	-	-	-	-
3	Penempatan pada Bank Lain	2.855.000	2.065.000	790.000	-	-	-
4	Surat Berharga	77.853.365	40.578.310	3.944.084	-	5.745.247	27.585.725
5	Kredit yang diberikan	557.732.494	13.749.614	37.493.300	41.011.842	68.085.053	397.392.685
6	Tagihan lainnya	52.343.902	44.029.468	3.881.640	4.372.293	1.547	58.954
7	Lain-lain	42.564.932	1.809.589	826.521	633.133	9.063.481	30.232.208
Total Aset		815.487.101	184.369.388	46.935.545	46.017.268	82.895.328	455.269.572
B. Kewajiban							
1	Dana Pihak Ketiga	672.145.745	622.748.521	33.643.139	1.894.442	11.693.960	2.165.683
2	Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3	Kewajiban pada bank lain	1.246.199	1.214.099	32.100	-	-	-
4	Surat berharga yang Diterbitkan	18.214.916	-	807.927	-	4.110.712	13.296.277
5	Pinjaman yang Diterima	28.197	-	515	7.573	-	20.109
6	Kewajiban Lainnya	23.892.393	14.910.461	1.387.992	2.159.012	670.000	4.764.928
7	Lain-lain	5.099.498	4.112.136	932.229	19.661	-	35.471
Total Kewajiban		720.626.948	642.985.218	36.803.902	4.080.688	16.474.672	20.282.468
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		94.860.153	(458.615.830)	10.131.643	41.936.580	66.420.655	434.987.104
<b>II REKENING ADMINISTRATIF</b>							
A. Tagihan Rekening Administratif							
1	Komitmen	12.761.146	12.219.746	-	-	-	541.400
2	Kontijensi	1.462	-	-	-	-	1.462
Total Tagihan Rekening Administratif		12.762.608	12.219.746	-	-	-	542.862
B. Kewajiban Rekening Administratif							
1	Komitmen	94.333.231	27.104.327	5.640.842	157.985	23.140.637	38.289.440
2	Kontijensi	11.919.411	2.289.130	1.753.356	1.474.858	2.103.786	4.298.281
Total Kewajiban Rekening Administratif		106.252.642	29.393.458	7.394.197	1.632.844	25.244.423	42.587.721
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif		(93.490.034)	(17.173.712)	(7.394.197)	(1.632.844)	(25.244.423)	(42.044.859)
Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB)		1.370.119	(475.789.541)	2.737.445	40.303.736	41.176.233	392.942.245
Selisih Kumulatif							

## MANAJEMEN RISIKO

### Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank Secara Individual

(dalam juta Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2017					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤ 1 bulan	>1 bln s.d 3 bln	>3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>I NERACA</b>							
A. Aset							
1	Kas	1.006.302	1.006.302	-	-	-	-
2	Penempatan Pada Bank Indonesia	18.992.969	18.857.781	135.188	-	-	-
3	Penempatan pada Bank Lain	7.446.517	6.232.226	529.132	685.159	-	-
4	Surat Berharga	50.843.265	33.624.771	206.371	-	3.291.221	13.720.901
5	Kredit yang diberikan	64.314.294	6.952.069	2.530.547	1.477.709	9.290.448	44.063.521
6	Tagihan lainnya	20.093.583	18.190.664	1.213.421	639.799	49.699	-
7	Lain-lain	3.474.003	1.926.848	1.160.888	254.887	385	130.995
Total Aset		166.170.933	86.790.661	5.775.547	3.057.554	12.631.753	57.915.417
B. Kewajiban							
1	Dana Pihak Ketiga	108.857.870	67.979.250	20.976.976	11.053.639	7.955.131	892.874
2	Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3	Kewajiban pada bank lain	1.460.229	1.460.229	-	-	-	-
4	Surat berharga yang Diterbitkan	6.780.383	-	6.780.383	-	-	-
5	Pinjaman yang Diterima	29.238.875	679.742	743.333	3.251.551	3.120.450	21.443.799
6	Kewajiban Lainnya	5.359.097	1.271.528	936.748	517.671	2.562.717	70.433
7	Lain-lain	944.421	528.165	61.648	-	208.465	146.143
Total Kewajiban		152.640.875	71.918.914	29.499.088	14.822.861	13.846.763	22.553.249
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		13.530.058	14.871.747	(23.723.541)	(11.765.307)	(1.215.010)	35.362.168
<b>II REKENING ADMINISTRATIF</b>							
A. Tagihan Rekening Administratif							
1	Komitmen	6.227.490	237.454	1.542.132	1.700.900	1.065.667	1.681.337
2	Kontijensi	2.924	-	-	-	-	2.924
Total Tagihan Rekening Administratif		6.230.414	237.454	1.542.132	1.700.900	1.065.667	1.684.261
B. Kewajiban Rekening Administratif							
1	Komitmen	45.072.741	8.302.903	17.267.923	5.460.860	5.327.908	8.713.147
2	Kontijensi	17.995.548	992.318	1.467.945	3.088.909	3.059.431	9.386.945
Total Kewajiban Rekening Administratif		63.068.289	9.295.221	18.735.868	8.549.769	8.387.339	18.100.092
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif		(56.837.875)	(9.057.767)	(17.193.736)	(6.848.869)	(7.321.672)	(16.415.831)
Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB)		(43.307.817)	5.813.980	(40.917.277)	(18.614.176)	(8.536.682)	18.946.337
Selisih Kumulatif							



## MANAJEMEN RISIKO

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2016						
		Saldo	Jatuh Tempo					
			≤ 1 bulan	>1 bln s.d 3 bln	>3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
I	NERACA							
	A. Aset							
1	Kas	708.360	708.360	-	-	-	-	-
2	Penempatan Pada Bank Indonesia	13.471.984	13.471.984	-	-	-	-	-
3	Penempatan pada Bank Lain	3.266.628	3.266.628	-	-	-	-	-
4	Surat Berharga	46.525.305	27.070.776	502.673	-	1.023.818	17.928.038	
5	Kredit yang diberikan	55.614.356	2.455.617	2.821.807	1.261.097	6.629.540	42.446.295	
6	Tagihan lainnya	26.888.883	23.731.791	1.861.568	1.000.275	295.249	-	
7	Lain-lain	2.038.074	756.250	953.333	312.215	-	16.276	
	Total Aset	148.513.589	71.461.406	6.139.381	2.573.587	7.948.607	60.390.609	
	B. Kewajiban							
1	Dana Pihak Ketiga	51.699.713	47.384.044	4.264.075	26.958	24.636	-	
2	Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	
3	Kewajiban pada bank lain	538.733	538.733	-	-	-	-	
4	Surat berharga yang Diterbitkan	6.721.814	-	-	-	-	6.721.814	
5	Pinjaman yang Diterima	34.571.441	320.647	6.201.529	7.525.315	371.400	20.152.550	
6	Kewajiban Lainnya	3.867.322	601.438	1.880.317	523.657	682.985	178.925	
7	Lain-lain	517.001	352.366	22.301	142.334	-	-	
	Total Kewajiban	97.916.024	49.197.228	12.368.222	8.218.264	1.079.021	27.053.289	
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	50.597.565	22.264.178	(6.228.841)	(5.644.677)	6.869.586	33.337.320	
II	REKENING ADMINISTRATIF							
	A. Tagihan Rekening Administratif							
1	Komitmen	6.869.963	-	-	-	-	6.869.963	
2	Kontijensi	2.994	-	-	-	-	2.994	
	Total Tagihan Rekening Administratif	6.872.957	-	-	-	-	6.872.957	
	B. Kewajiban Rekening Administratif							
1	Komitmen	48.878.719	7.772.681	17.991.065	9.126.448	7.890.659	6.097.867	
2	Kontijensi	12.543.898	1.120.488	898.064	1.542.575	6.462.176	2.520.594	
	Total Kewajiban Rekening Administratif	61.422.617	8.893.169	18.889.129	10.669.023	14.352.835	8.618.461	
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	(54.549.660)	(8.893.169)	(18.889.129)	(10.669.023)	(14.352.835)	(1.745.504)	
	Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB)	(3.952.095)	13.371.009	(25.117.970)	(16.313.700)	(7.483.249)	31.591.816	
	Selisih Kumulatif							

## MANAJEMEN RISIKO

### Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank Secara Konsolidasi dengan perusahaan Anak

(dalam juta Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2017					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤ 1 bulan	>1 bln s.d 3 bln	>3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>I NERACA</b>							
A. Aset							
1	Kas	23.780.207	23.780.207	-	-	-	-
2	Penempatan Pada Bank Indonesia	26.052.984	26.052.984	-	-	-	-
3	Penempatan pada Bank Lain	3.162.700	2.532.700	630.000	-	-	-
4	Surat Berharga	157.161.887	117.147.147	7.943.906	-	3.653.527	28.417.307
5	Kredit yang diberikan	644.310.827	26.568.744	34.471.167	48.465.511	78.917.585	455.887.820
6	Tagihan lainnya	55.418.835	48.932.486	2.842.611	3.573.119	10.818	59.801
7	Lain-lain	49.846.404	8.559.278	2.460.182	1.099.400	3.293.879	34.433.665
Total Aset		959.733.844	253.573.546	48.347.866	53.138.030	85.875.809	518.798.593
B. Kewajiban							
1	Dana Pihak Ketiga	694.468.700	596.139.755	69.460.788	15.128.039	6.010.330	7.729.788
2	Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3	Kewajiban pada bank lain	4.224.785	4.137.592	57.408	29.785	-	-
4	Surat berharga yang Diterbitkan	30.619.658	-	7.588.383	1.131.758	2.135.633	19.763.884
5	Pinjaman yang Diterima	28.534	85	-	6.545	-	21.904
6	Kewajiban Lainnya	31.374.738	9.240.167	2.338.864	1.264.768	447.665	18.083.274
7	Lain-lain	13.886.612	1.558.479	4.000.543	584.867	874.391	6.868.332
Total Kewajiban		774.603.027	611.076.078	83.445.986	18.145.762	9.468.019	52.467.182
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		185.130.817	(357.502.532)	(35.098.120)	34.992.268	76.407.790	466.331.411
<b>II REKENING ADMINISTRATIF</b>							
A. Tagihan Rekening Administratif							
1	Komitmen	5.515.119	2.726.475	418.454	2.326.283	43.907	-
2	Kontijensi	67.981	66.727	-	-	-	1.254
Total Tagihan Rekening Administratif		5.583.100	2.793.202	418.454	2.326.283	43.907	1.254
B. Kewajiban Rekening Administratif							
1	Komitmen	91.728.290	15.654.105	19.407.905	16.905.416	10.313.778	29.447.086
2	Kontijensi	16.033.717	4.860.902	2.260.660	1.960.113	4.006.409	2.945.633
Total Kewajiban Rekening Administratif		107.762.007	20.515.007	21.668.565	18.865.529	14.320.187	32.392.719
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif		(102.178.907)	(17.721.805)	(21.250.111)	(16.539.246)	(14.276.280)	(32.391.465)
Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB)		82.951.910	(375.224.337)	(56.348.231)	18.453.022	62.131.510	433.939.946
Selisih Kumulatif							



## MANAJEMEN RISIKO

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2016					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤ 1 bulan	>1 bln s.d 3 bln	>3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>I NERACA</b>							
A. Aset							
1	Kas	24.499.503	24.499.503	-	-	-	-
2	Penempatan Pada Bank Indonesia	59.320.550	59.320.550	-	-	-	-
3	Penempatan pada Bank Lain	2.534.921	2.404.921	130.000	-	-	-
4	Surat Berharga	89.593.795	45.852.085	5.385.436	-	7.853.783	30.502.491
5	Kredit yang diberikan	584.372.002	15.146.308	40.345.333	42.932.430	70.602.703	415.345.228
6	Tagihan lainnya	54.737.943	46.369.540	3.930.101	4.377.801	1.547	58.954
7	Lain-lain	39.451.093	1.814.202	826.521	642.580	10.864.270	25.303.520
Total Aset		854.509.807	195.407.109	50.617.391	47.952.811	89.322.303	471.210.193
B. Kewajiban							
1	Dana Pihak Ketiga	702.826.660	649.857.693	36.663.313	2.379.948	11.756.638	2.169.069
2	Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3	Kewajiban pada bank lain	1.690.805	1.647.425	42.057	1.323	-	-
4	Surat berharga yang Diterbitkan	18.078.967	-	807.927	-	4.110.712	13.160.328
5	Pinjaman yang Diterima	128.197	-	515	7.573	100.000	20.109
6	Kewajiban Lainnya	24.334.040	15.296.147	1.438.445	2.164.520	670.000	4.764.928
7	Lain-lain	11.537.849	4.876.591	993.476	19.661	163.437	5.484.684
Total Kewajiban		758.596.519	671.677.856	39.945.733	4.573.025	16.800.787	25.599.118
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		95.913.288	(476.270.747)	10.671.658	43.379.786	72.521.516	445.611.076
<b>II REKENING ADMINISTRATIF</b>							
A. Tagihan Rekening Administratif							
1	Komitmen	12.761.146	12.219.746	-	-	-	541.400
2	Kontijensi	42.214	40.752	-	-	-	1.462
Total Tagihan Rekening Administratif		12.803.360	12.260.498	-	-	-	542.862
B. Kewajiban Rekening Administratif							
1	Komitmen	95.431.290	27.394.518	5.795.888	281.467	23.496.759	38.462.658
2	Kontijensi	11.979.117	2.348.836	1.753.356	1.474.858	2.103.786	4.298.281
Total Kewajiban Rekening Administratif		107.410.407	29.743.355	7.549.243	1.756.326	25.600.545	42.760.939
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif		(94.607.047)	(17.482.856)	(7.549.243)	(1.756.326)	(25.600.545)	(42.218.077)
Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB)		1.306.241	(493.753.603)	3.122.414	41.623.460	46.920.971	403.392.999
Selisih Kumulatif							

## MANAJEMEN RISIKO

**Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank Secara Konsolidasi dengan perusahaan Anak**

(dalam juta Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2017					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤ 1 bulan	>1 bln s.d 3 bln	>3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>I NERACA</b>							
A. Aset							
1	Kas	1.017.575	1.017.575	-	-	-	-
2	Penempatan Pada Bank Indonesia	18.992.969	18.857.781	135.188	-	-	-
3	Penempatan pada Bank Lain	6.897.034	6.150.822	407.025	339.187	-	-
4	Surat Berharga	51.085.657	33.633.480	206.371	-	3.304.748	13.941.058
5	Kredit yang diberikan	64.921.556	6.952.489	2.534.906	1.534.056	9.371.140	44.528.965
6	Tagihan lainnya	20.125.398	18.166.888	1.263.381	645.430	49.699	-
7	Lain-lain	3.474.409	1.926.014	1.160.888	254.887	385	132.235
Total Aset		166.514.598	86.705.049	5.707.759	2.773.560	12.725.972	58.602.258
B. Kewajiban							
1	Dana Pihak Ketiga	147.187.750	106.307.123	20.978.983	11.053.639	7.955.131	892.874
2	Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3	Kewajiban pada bank lain	1.368.582	1.368.582	-	-	-	-
4	Surat berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-	-	-
5	Pinjaman yang Diterima	29.374.475	679.742	743.333	3.251.551	3.120.450	21.579.399
6	Kewajiban Lainnya	5.414.688	1.271.528	986.708	523.302	2.562.717	70.433
7	Lain-lain	952.426	533.529	61.648	2.489	208.617	146.143
Total Kewajiban		184.297.921	110.160.504	22.770.672	14.830.981	13.846.915	22.688.849
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		(17.783.323)	(23.455.455)	(17.062.913)	(12.057.421)	(1.120.943)	35.913.409
<b>II REKENING ADMINISTRATIF</b>							
A. Tagihan Rekening Administratif							
1	Komitmen	6.227.490	237.454	1.542.132	1.700.900	1.065.667	1.681.337
2	Kontijensi	2.924	-	-	-	-	2.924
Total Tagihan Rekening Administratif		6.230.414	237.454	1.542.132	1.700.900	1.065.667	1.684.261
B. Kewajiban Rekening Administratif							
1	Komitmen	45.159.416	8.303.609	17.277.854	5.460.860	5.403.946	8.713.147
2	Kontijensi	17.996.663	992.318	1.467.945	3.088.909	3.060.546	9.386.945
Total Kewajiban Rekening Administratif		63.156.079	9.295.927	18.745.799	8.549.769	8.464.492	18.100.092
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif		(56.925.665)	(9.058.473)	(17.203.667)	(6.848.869)	(7.398.825)	(16.415.831)
Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB)		(74.708.988)	(32.513.928)	(34.266.580)	(18.906.290)	(8.519.768)	19.497.578
Selisih Kumulatif							



## MANAJEMEN RISIKO

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2016					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤ 1 bulan	>1 bln s.d 3 bln	>3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>I NERACA</b>							
A. Aset							
1	Kas	712.521	712.521	-	-	-	-
2	Penempatan Pada Bank Indonesia	13.471.984	13.471.984	-	-	-	-
3	Penempatan pada Bank Lain	2.815.299	2.815.299	-	-	-	-
4	Surat Berharga	46.764.575	27.075.920	504.355	-	1.023.061	18.161.239
5	Kredit yang diberikan	56.241.764	2.459.607	2.853.377	1.396.320	6.698.566	42.833.894
6	Tagihan lainnya	27.050.430	23.893.338	1.861.568	1.000.275	295.249	-
7	Lain-lain	2.078.046	756.250	953.333	312.215	39.972	16.276
	Total Aset	149.134.619	71.184.919	6.172.633	2.708.810	8.056.848	61.011.409
B. Kewajiban							
1	Dana Pihak Ketiga	51.699.713	47.384.044	4.264.075	26.958	24.636	-
2	Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3	Kewajiban pada bank lain	538.733	538.733	-	-	-	-
4	Surat berharga yang Diterbitkan	6.721.814	-	-	-	-	6.721.814
5	Pinjaman yang Diterima	34.879.973	320.647	6.201.529	7.525.315	371.400	20.461.082
6	Kewajiban Lainnya	3.869.674	601.438	1.882.309	523.657	682.985	179.285
7	Lain-lain	525.410	352.366	22.301	142.334	366	8.043
	Total Kewajiban	98.235.317	49.197.228	12.370.214	8.218.264	1.079.387	27.370.224
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	50.899.302	21.987.691	(6.197.581)	(5.509.454)	6.977.461	33.641.185
<b>II REKENING ADMINISTRATIF</b>							
A. Tagihan Rekening Administratif							
1	Komitmen	6.869.963	-	-	-	-	6.869.963
2	Kontijensi	2.994	-	-	-	-	2.994
	Total Tagihan Rekening Administratif	6.872.957	-	-	-	-	6.872.957
B. Kewajiban Rekening Administratif							
1	Komitmen	48.939.965	7.772.681	18.018.522	9.126.448	7.924.448	6.097.867
2	Kontijensi	12.543.898	1.120.488	898.064	1.542.575	6.462.176	2.520.594
	Total Kewajiban Rekening Administratif	61.483.863	8.893.169	18.916.586	10.669.023	14.386.624	8.618.461
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	(54.610.906)	(8.893.169)	(18.916.586)	(10.669.023)	(14.386.624)	(1.745.504)
	Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB)	(3.711.604)	13.094.522	(25.114.167)	(16.178.477)	(7.409.163)	31.895.681
	Selisih Kumulatif						

## MANAJEMEN RISIKO

### Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2017						Bagian Yang Tidak Dijamin
		Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				(8) = (3) - [(4)+(5)+(6)+(7)]	
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
<b>A Eksposur Neraca</b>								
1	Tagihan Kepada Pemerintah	259.015.604	-	-	-	-	259.015.604	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	86.570.590	3.091.436	-	-	-	83.479.154	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	38.390.805	-	-	-	-	38.390.805	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	162.068	-	-	-	-	162.068	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	3.928.532	-	-	-	-	3.928.532	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	141.347.120	-	-	-	-	141.347.120	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	268.612.467	729.439	-	19.071.021	-	248.812.007	
9	Tagihan kepada Korporasi	192.513.809	16.138.711	-	-	-	176.375.098	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	6.660.341	197	-	-	-	6.660.144	
11	Aset Lainnya	72.608.621	-	-	-	-	72.608.621	
Total Eksposur Neraca		1.069.809.957	19.959.783	-	19.071.021	-	1.030.779.153	
<b>B Eksposur Rekening Admsitratif</b>								
1	Tagihan Kepada Pemerintah	18.930	-	-	-	-	18.930	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	10.165.365	-	-	-	-	10.165.365	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	11.440.390	-	-	-	-	11.440.390	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	101.802	-	-	-	-	101.802	
9	Tagihan kepada Korporasi	5.335.918	-	-	-	-	5.335.918	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	
Total Eksposur Rekening Administratif		27.062.405	-	-	-	-	27.062.405	
<b>C Eksposur Counterparty Credit Risk</b>								
1	Tagihan Kepada Pemerintah	15.068.698	-	-	-	-	15.068.698	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	2.944.215	-	-	-	-	2.944.215	
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	
Total Eksposure Counterparty Credit Risk		18.012.913	-	-	-	-	18.012.913	
Total (A+B+C)		1.114.885.275	19.959.783	-	19.071.021	-	1.075.854.471	



## MANAJEMEN RISIKO

	31 Desember 2016					
	Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
		Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9) - [(10)+(11)+(12)+(13)]	
	237.523.630	-	-	-	-	237.523.630
	86.879.998	15.663	-	-	-	86.864.335
	-	-	-	-	-	-
	39.803.215	-	-	-	-	39.803.215
	90.998	-	-	-	-	90.998
	2.945.214	-	-	-	-	2.945.214
	127.554.556	-	-	-	-	127.554.556
	243.456.609	621.232	-	18.657.504	-	224.177.873
	161.794.188	12.586.470	-	-	-	149.207.718
	6.509.068	140	-	-	-	6.508.928
	62.679.076	-	-	-	-	62.679.076
	969.236.552	13.223.505	-	18.657.504	-	937.355.543
	108.510	-	-	-	-	108.510
	9.011.254	-	-	-	-	9.011.254
	-	-	-	-	-	-
	5.485.300	-	-	-	-	5.485.300
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	169.135	-	-	-	-	169.135
	3.841.457	-	-	-	-	3.841.457
	-	-	-	-	-	-
	18.615.656	-	-	-	-	18.615.656
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	2.761.058	-	-	-	-	2.761.058
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	2.761.058	-	-	-	-	2.761.058
	990.613.266	13.223.505	-	18.657.504	-	958.732.257

## MANAJEMEN RISIKO

### Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2017						Bagian Yang Tidak Dijamin
		Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan					
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)- [(4)+(5)+(6)+(7)]	
<b>A Eksposur Neraca</b>								
1	Tagihan Kepada Pemerintah	262.495.209	-	-	-	-	262.495.209	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	87.083.813	3.091.436	-	-	-	83.992.377	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	38.469.823	-	-	-	-	38.469.823	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	391.450	-	-	-	-	391.450	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	4.349.537	-	-	-	-	4.349.537	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	141.684.234	-	-	-	-	141.684.234	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	271.371.637	875.947	-	19.071.021	-	251.424.669	
9	Tagihan kepada Korporasi	198.988.085	16.342.136	-	-	-	182.645.949	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	6.772.910	197	-	-	-	6.772.713	
11	Aset Lainnya	72.906.720	-	-	-	-	72.906.720	
<b>Total Eksposur Neraca</b>		<b>1.084.513.418</b>	<b>20.309.716</b>	<b>-</b>	<b>19.071.021</b>	<b>-</b>	<b>1.045.132.681</b>	
<b>B Eksposur Rekening Admsintratif</b>								
1	Tagihan Kepada Pemerintah	18.930	-	-	-	-	18.930	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	10.170.632	-	-	-	-	10.170.632	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	11.451.056	-	-	-	-	11.451.056	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	71.943	-	-	-	-	71.943	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	156.915	36	-	-	-	156.879	
9	Tagihan kepada Korporasi	5.550.980	2.714	-	-	-	5.548.266	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	
<b>Total Eksposur Rekening Administratif</b>		<b>27.420.456</b>	<b>2.750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27.417.706</b>	
<b>C Eksposur Counterparty Credit Risk</b>								
1	Tagihan Kepada Pemerintah	16.583.432	-	-	-	-	16.583.432	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	2.944.215	-	-	-	-	2.944.215	
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	
<b>Total Eksposure Counterparty Credit Risk</b>		<b>19.527.647</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.527.647</b>	
<b>Total (A+B+C)</b>		<b>1.131.461.521</b>	<b>20.312.466</b>	<b>-</b>	<b>19.071.021</b>	<b>-</b>	<b>1.092.078.034</b>	



## MANAJEMEN RISIKO

	31 Desember 2016					
	Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
		Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9) - [(10)+(11)+(12)+(13)]	
	239.482.809	-	-	-	-	239.482.809
	87.214.759	15.663	-	-	-	87.199.096
	-	-	-	-	-	-
	40.729.248	3.000	-	-	-	40.726.248
	325.881	-	-	-	-	325.881
	3.209.158	-	-	-	-	3.209.158
	127.940.818	-	-	-	-	127.940.818
	245.210.399	653.386	-	18.657.504	-	225.899.509
	166.831.969	12.710.244	-	-	-	154.121.725
	6.630.875	190	-	-	-	6.630.685
	62.965.149	-	-	-	-	62.965.149
	980.541.065	13.382.483	-	18.657.504	-	948.501.078
	108.510	-	-	-	-	108.510
	9.052.675	-	-	-	-	9.052.675
	-	-	-	-	-	-
	5.528.656	-	-	-	-	5.528.656
	-	-	-	-	-	-
	1.732	-	-	-	-	1.732
	104	-	-	-	-	104
	193.549	1.232	-	-	-	192.317
	3.965.433	1.421	-	-	-	3.964.012
	102	-	-	-	-	102
	18.850.761	2.653	-	-	-	18.848.108
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	2.761.058	-	-	-	-	2.761.058
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	2.761.058	-	-	-	-	2.761.058
	1.002.152.884	13.385.136	-	18.657.504	-	970.110.244

## MANAJEMEN RISIKO

**Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi - Bank secara Individual**

(dalam jutaan rupiah)

No.	Eksposur Sekuritisasi	31 Desember 2017					
		Nilai aset yg disekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/Rugi dari aktivitas sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal
			Telah jatuh tempo	Belum Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bank bertindak sebagai Kreditur Asal - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-			-		
2	Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung						
	a. Fasilitas penanggung risiko pertama - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-
	b. Fasilitas penanggung risiko kedua - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	
3	Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	
4	Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-					
5	Bank bertindak sebagai Bank Kostodian - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-					
6	Bank bertindak sebagai Pemodal						
	a. Senior tranche - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-
	b. Junior tranche - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-		-



## MANAJEMEN RISIKO

	31 Desember 2016					
	Nilai aset yg disekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/ Rugi dari aktivitas sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal
		Telah jatuh tempo	Belum Jatuh Tempo			
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	-			-		
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-					
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-		-

## MANAJEMEN RISIKO

**Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak**

(dalam jutaan rupiah)

No.	Eksposur Sekuritisasi	31 Desember 2017						
		Nilai aset yg disekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/Rugi dari aktivitas sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal	
			Telah jatuh tempo	Belum Jatuh Tempo				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Bank bertindak sebagai Kreditur Asal - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-			-			
2	Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung							
	a. Fasilitas penanggung risiko pertama - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-	
	b. Fasilitas penanggung risiko kedua - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-		
3	Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-		
4	Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-						
5	Bank bertindak sebagai Bank Kostodian - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-						
6	Bank bertindak sebagai Pemodal							
	a. Senior tranche - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-	
	b. Junior tranche - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-		-	



## MANAJEMEN RISIKO

	31 Desember 2016					
	Nilai aset yg disekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/ Rugi dari aktivitas sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal
		Telah jatuh tempo	Belum Jatuh Tempo			
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	-			-		
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-					
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-		-

Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

## MANAJEMEN RISIKO

**Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Aset dalam hal Bank Bertindak sebagai Kreditur Asal - Bank Secara Individu**

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
		Niai Aset Yang Disekuritisasi	Keuntungan (Kerugian) Penjualan	Niai Aset Yang Disekuritisasi	Keuntungan (Kerugian) Penjualan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah				
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik				
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional				
4.	Tagihan Kepada Bank				
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal				
6.	Kredit Beragun Properti Komersial				
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan				
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel				
9.	Tagihan Kepada Korporasi				
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo				
11.	Aset Lainnya				
Total					

**Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Aset dalam hal Bank Bertindak sebagai Kreditur Asal - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak**

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
		Nilai Aset Yang Disekuritisasi	Keuntungan (Kerugian) Penjualan	Nilai Aset Yang Disekuritisasi	Keuntungan (Kerugian) Penjualan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah				
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik				
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional				
4.	Tagihan Kepada Bank				
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal				
6.	Kredit Beragun Properti Komersial				
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan				
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel				
9.	Tagihan Kepada Korporasi				
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo				
11.	Aset Lainnya				
Total					



## MANAJEMEN RISIKO

### Pengungkapan Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

#### a. Eksposur Aset di Neraca

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2017			31 Desember 2016		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	259.015.604	-	-	237.523.630	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	86.570.590	42.311.767	40.766.049	86.879.998	42.788.160	42.780.329
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	38.390.805	11.045.343	11.045.343	39.803.215	13.489.758	13.489.758
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	162.068	56.724	56.724	90.998	31.849	31.849
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	3.928.532	3.928.532	3.928.532	2.945.214	2.945.214	2.945.214
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	141.347.120	70.673.560	70.673.560	127.554.556	63.777.278	63.777.278
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	268.612.467	201.459.350	190.423.209	243.456.609	182.592.457	171.864.906
9.	Tagihan Kepada Korporasi	192.513.809	190.713.842	174.575.131	161.794.188	160.681.599	148.095.129
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	6.660.341	9.987.089	9.986.793	6.509.068	9.757.619	9.757.409
11.	Aset Lainnya	72.608.621	-	48.224.278	62.679.076	-	37.830.153
	<b>Total</b>	<b>1.069.809.957</b>	<b>530.176.207</b>	<b>549.679.619</b>	<b>969.236.552</b>	<b>476.063.934</b>	<b>490.572.025</b>

#### b. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2017			31 Desember 2016		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	18.930	-	-	108.510	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	10.165.365	5.082.683	5.082.683	9.011.254	4.505.627	4.505.627
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan kepada Bank	11.440.390	5.576.117	5.576.117	5.485.300	2.660.667	2.660.667
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	101.802	76.352	76.352	169.135	126.851	126.851
9.	Tagihan Kepada Korporasi	5.335.918	5.335.918	5.335.918	3.841.457	3.841.457	3.841.457
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>27.062.405</b>	<b>16.071.070</b>	<b>16.071.070</b>	<b>18.615.656</b>	<b>11.134.602</b>	<b>11.134.602</b>

## MANAJEMEN RISIKO

### Pengungkapan Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

#### c. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2017			31 Desember 2016		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	15.068.698	-	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan kepada Bank	2.944.215	837.671	837.671	2.761.058	716.774	716.774
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
7.	Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA Risk Weighted Assets)			70.834			
	Total	18.012.913	837.671	908.505	2.761.058	716.774	716.774

#### d. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (Settlement Risk)

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2017			31 Desember 2016		
		Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	<i>Delivery versus payment</i>						
a.	Beban Modal 8% (5-15 hari)	-		-			
b.	Beban Modal 50% (16-30 hari)	-		-			
c.	Beban Modal 75% (31-45 hari)	-		-			
d.	Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	-		-			
2.	<i>Non-delivery versus payment</i>	-		-			-
	Total	-		-			-



## MANAJEMEN RISIKO

### Pengungkapan Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

#### e. Eksposur Sekuritisasi

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
	a. <i>First Loss Facility</i>				
	b. <i>Second Loss Facility</i>				
2.	Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
	a. Bank merupakan Kreditur Asal				
	b. Bank bukan merupakan Kreditur Asal				
3.	Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan		-		-
4.	Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
	a. Bank merupakan Kreditur Asal				
	b. Bank bukan merupakan Kreditur Asal				
5.	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
	a. <i>Senior Tranche</i>				
	b. <i>Junior Tranche</i>				
6.	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
7.	Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.		-		-
Total		-	-	-	-

#### f. Total Pengukuran Risiko Kredit

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	566.659.194	502.423.401
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	(0)	-

## MANAJEMEN RISIKO

### Pengungkapan Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

## a. Eksposur Aset di Neraca

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2017			31 Desember 2016		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	262.495.209	-	-	239.482.809	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	87.083.813	42.568.379	41.022.661	87.214.759	42.955.541	42.947.708
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	38.469.823	11.061.194	11.061.194	40.729.248	13.687.416	13.685.916
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	391.450	137.008	137.008	325.881	114.058	114.058
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	4.349.537	4.349.537	4.349.537	3.209.158	3.209.158	3.209.158
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	141.684.234	70.842.117	70.842.117	127.940.818	63.970.409	63.970.409
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	271.371.638	203.528.729	192.382.707	245.210.400	183.907.800	173.156.133
9.	Tagihan Kepada Korporasi	198.988.085	197.188.118	180.845.982	166.831.967	165.719.378	153.009.134
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	6.772.911	10.146.365	10.146.070	6.630.875	9.934.860	9.934.575
11.	Aset Lainnya	72.906.720	-	48.512.486	62.965.149	-	38.087.805
	<b>Total</b>	<b>1.084.513.420</b>	<b>539.821.447</b>	<b>559.299.762</b>	<b>980.541.064</b>	<b>483.498.620</b>	<b>498.114.896</b>

## b. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2017			31 Desember 2016		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	18.930	-	-	108.510	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	10.170.632	5.085.316	5.085.316	9.052.675	4.526.338	4.526.338
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan kepada Bank	11.451.056	5.578.307	5.578.307	5.528.656	2.669.408	2.669.408
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	71.943	71.943	71.943	1.732	1.732	1.732
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	104	52	52
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	156.914	117.686	117.659	193.549	145.162	144.238
9.	Tagihan Kepada Korporasi	5.550.979	5.550.979	5.548.266	3.965.431	3.965.431	3.964.012
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	102	153	153
	<b>Total</b>	<b>27.420.454</b>	<b>16.404.231</b>	<b>16.401.491</b>	<b>18.850.759</b>	<b>11.308.276</b>	<b>11.305.933</b>



## MANAJEMEN RISIKO

### Pengungkapan Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

#### c. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2017			31 Desember 2016		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	16.583.432	-	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan kepada Bank	2.944.215	837.670	837.670	2.761.058	716.774	716.774
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
7.	Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA Risk Weighted Assets)			70.834			
	Total	19.527.647	837.670	908.504	2.761.058	716.774	716.774

#### d. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (Settlement Risk)

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2017			31 Desember 2016		
		Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Delivery versus payment						-
a.	Beban Modal 8% (5-15 hari)	-		-	-		-
b.	Beban Modal 50% (16-30 hari)	-		-	-		-
c.	Beban Modal 75% (31-45 hari)	-		-	-		-
d.	Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	-		-	-		-
2.	Non-delivery versus payment	-			-		
	Total	-	-	-	-	-	-

## MANAJEMEN RISIKO

### Pengungkapan Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

## e. Eksposur Sekuritisasi

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
2.	Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
3.	Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan		-		-
4.	Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
5.	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
6.	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
7.	Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.		-		-
Total		-	-	-	-

## f. Eksposur di Perusahaan Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah (jika ada)

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Total Eksposur	-	14.781.970	-	14.367.884

## g. Total Pengukuran Risiko Kredit

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	591.391.727	524.505.487
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	-	-

## Pengungkapan Risiko Pasar Menggunakan Metode Standar

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Risiko	31 Desember 2017				31 Desember 2016			
		Bank		Konsolidasi		Bank		Konsolidasi	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Risiko Suku Bunga								
	a. Risiko Spesifik	500	6.248	500	6.248	-	-	-	-
	b. Risiko Umum	4.296	53.697	7.965	99.559	-	-	2.584	32.305
2	Risiko Nilai Tukar	546.329	6.829.117	550.456	6.880.697	762.834	9.535.428	767.182	9.589.771
3	Risiko Ekuitas *)			-	-				
4	Risiko Komoditas *)			-	-				
5	Risiko Option	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		551.125	6.889.062	558.920	6.986.504	762.834	9.535.428	769.766	9.622.076

\*) Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud



## MANAJEMEN RISIKO

**Pengungkapan Nilai *Liquidity Coverage Ratio* (LCR)**

	NILAI LCR (%)			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	(1)	(2)	(3)	(4)
Bank Secara Individu	211,47%	222,14%	230,14%	241,97%
Bank Secara Konsolidasi	209,56%	222,36%	231,46%	243,65%

**Pengungkapan Risiko Operasional - Bank secara Individual**

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pendekatan Yang Digunakan	31 Desember 2017			31 Desember 2016		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Indikator Dasar	69.849.455	10.477.418	130.967.728	59.679.413	8.951.912	111.898.899
Total		69.849.455	10.477.418	130.967.728	59.679.413	8.951.912	111.898.899

**Pengungkapan Risiko Operasional - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak**

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pendekatan Yang Digunakan	31 Desember 2017			31 Desember 2016		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Indikator Dasar	71.691.108	10.753.666	134.420.827	61.248.577	9.187.287	114.841.081
Total		71.691.108	10.753.666	134.420.827	61.248.577	9.187.287	114.841.081



BRI telah menetapkan *roadmap implementasi green banking* yang mengacu pada *Roadmap Keuangan Berkelanjutan* yang telah ditetapkan OJK. Secara konsisten, Perusahaan berkomitmen untuk terus berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan yang bermanfaat.



# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

- 729 Kebijakan dan Acuan Pelaksanaan CSR
- 730 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan
- 734 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja
- 741 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
  - 742 Kenaikan Realisasi Penyaluran Program BRI Peduli Periode 2015-2017
  - 743 Rincian Realisasi Anggaran Program BRI Peduli Periode 2015-2017
  - 743 Alokasi Realisasi Anggaran Program BRI Peduli 2017
- 744 Indonesia Peduli
- 745 Indonesia Cerdas
- 748 Indonesia Sehat
- 749 Indonesia Membangun
- 751 Indonesia Takwa
- 752 Indonesia Lestari
- 753 Indonesia Sejahtera
- 754 Total Anggaran BRI Peduli
- 754 Program Kemitraan
- 757 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



“

CSR BRI adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan maupun masyarakat sekitar. Sebagai Badan Usaha Milik Negara, wujud kepedulian BRI juga dilakukan melalui program Bina Lingkungan yang merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat. ”



## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility-CSR*) BRI merupakan perwujudan dari komitmen Perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan dari pelaksanaan program CSR BRI adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan maupun masyarakat sekitar. Sebagai Badan Usaha Milik Negara, wujud kepedulian BRI juga dilakukan melalui program Bina Lingkungan yang merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat.

Pelaksanaan Tanggung jawab sosial perusahaan terdiri atas:

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan,
2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan & Keselamatan Kerja,
3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial & Masyarakat, dan
4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen.

- a. UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- b. UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- d. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.UU RI No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
- e. PP No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terbatas.
- f. Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- g. Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana diubah dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri BUMN No. Per-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 beserta perubahannya.

### Kebijakan dan Acuan Pelaksanaan CSR

Dalam melaksanakan program kepedulian masyarakat, Perusahaan berpedoman pada dasar hukum sebagai berikut:



## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN



“

Bank BRI menerapkan konsep go green dalam setiap aspek kegiatan dan bisnis. Hal tersebut tercermin dari rencana pembangunan gedung yang mengusung konsep green building, dan penggunaan produk ramah lingkungan dalam kegiatan operasional.

”



## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN

Sejauh ini, belum ada aktivitas bisnis Perusahaan yang secara umum bersentuhan langsung dengan lingkungan. Namun Perusahaan selalu berkomitmen tinggi untuk mengelola dan meminimalkan dampak operasionalnya terhadap lingkungan. Dalam hal ini BRI memiliki divisi khusus yang mengelola aspek lingkungan yang berada di bawah Divisi Manajemen Aktiva Tetap dan Divisi Pengadaan Barang & Jasa. Divisi ini menjalankan fungsi kebijakan, pemantauan, dan pengawasan strategis. Pengelolaan kelestarian lingkungan dalam hal operasional BRI dilakukan terhadap efisiensi air, pemakaian kertas, energi dan sumber daya alam lainnya.

Pada 2017, Perusahaan telah menetapkan *roadmap* implementasi *green banking*. *Roadmap* tersebut mengacu pada *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan OJK. Sesuai Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, bahwa pada Januari 2019 BRI sebagai bank BUKU 4 harus telah menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Pada 2017 BRI telah menetapkan target yang meliputi aspek kebijakan, penyesuaian dengan strategi BRI, *internal campaign*, *marketing communication* serta pengembangan produk dan TI. BRI juga telah menyusun *Sustainability Report* sejak tahun 2012 untuk menjelaskan kontribusi BRI terhadap Lingkungan, sosial dan tatakelola sesuai *Global Reporting Initiative* (GRI).

Terkait dengan acuan/ kebijakan dalam memberikan layanan kepada nasabah, Perusahaan berpedoman kepada kebijakan yang diatur oleh regulator, serta kebijakan internal perusahaan meliputi:

1. Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/DKSP/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Jasa Usaha.
3. Surat Kebijakan Direksi BRI Nokep: S.1051-DIR/LCC/12/2016 tanggal 2 Desember 2016 perihal Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian Pengaduan Nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

### Target dan Kegiatan yang Ditetapkan Manajemen untuk Tahun 2017

Dalam melaksanakan berbagai program CSR, Perusahaan telah menetapkan sejumlah target/rencana kegiatan. Adapun target/rencana kegiatan yang ditetapkan manajemen meliputi:

- a. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan mengutamakan produk yang ramah lingkungan.
- b. Divisi MAT akan melaksanakan pembangunan gedung BRI Gatot Subroto dengan menerapkan konsep *Green Building* menggunakan material yang ramah lingkungan sebagai berikut:
  - 1) Penggunaan kaca *Unitized Double Glassy Low-E*.  
Bila ada cahaya matahari maka tidak dapat meneruskan panas kedalam gedung apabila menggunakan jenis kaca tersebut sehingga dapat menghemat penggunaan AC.
  - 2) Di area *facade* tertentu (sisi yang banyak terpapar matahari) dilengkapi dengan tanaman merambat hijau yang bertujuan untuk menahan panas.
  - 3) Penggunaan tanaman hijau pada atap *Convention Hall*.
  - 4) Penggunaan AC dengan sistem VRP (hemat energi).  
Apabila menggunakan AC tersebut maka diestimasi 50% lebih hemat dari penggunaan AC konvensional.
  - 5) Penggunaan lampu LED yang hemat energi.
  - 6) Penggunaan sistem *recycle water* sehingga hemat dalam penggunaan air.
  - 7) Penggunaan sistem peresapan air kotor dan sebagian air hujan yang dapat meresap langsung ke tanah.

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN

### Kegiatan yang Dilakukan dan Dampak Kuantitatif atas Kegiatan Tersebut

#### Kebijakan-kebijakan Tanggung Jawab Lingkungan BRI dalam Operasional Perusahaan:

##### a. Paperless System

Secara khusus, penerapan kebijakan *paperless* dan teknologi informasi sangat relevan dengan kondisi industri perbankan saat ini, termasuk BRI. Kedua hal ini juga menjadi fokus perhatian Bank BRI dan dengan demikian efisiensi penggunaan energi, termasuk juga efisiensi pemakaian air, terus dilakukan. Himbauan ini tertuang dalam Surat Divisi JBR No. B.612-JBR/KJR/07/2013, tanggal 9 Juli 2013, dan mengacu kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011 tentang penghematan Energi dan Air serta Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2012 tentang penghematan pemakaian listrik.

BRI berkomitmen meningkatkan efisiensi operasional melalui penghematan pemakaian kertas tentunya dengan dukungan sistem teknologi yang selalu dikembangkan oleh BRI. Sistem Informasi yang terintegrasi secara baik untuk kepentingan internal BRI dan Nasabah dengan ditunjang aplikasi-aplikasi yang secara implementasi sangat menunjang efisiensi operasional.

#### Aplikasi yang Mendukung Efisiensi Operasional BRI

1. Intranet dan internet terhubung *real* untuk yang memungkinkan komunikasi secara *real time*.
2. Seluruh kebijakan yang dibuat untuk disampaikan ke Unit Kerja BRI disosialisasikan melalui *Public Folder*.
3. Presensi pekerja BRI dilakukan dengan EDC
4. Aplikasi terintegrasi BRISTARS yang mengimplementasikan efisiensi operasional, terdiri dari aplikasi terintegrasi sebagai berikut:
  - a. e-Rekrutmen, sarana bagi para calon tenaga kerja yang ingin bergabung dengan BRI, melalui lamaran secara *online*.
  - b. Digitalisasi *Assessment*, penilaian kompetensi pekerja dilakukan secara *online*.
  - c. e-Mutasi, perpindahan pekerja antar unit kerja BRI yang diproses secara otomatis.
  - d. Data pribadi pekerja aplikasi data pribadi secara otomatis.
  - e. e-Cuti, untuk pekerja mengajukan permohonan pelaksanaan cuti serta proses persetujuan oleh atasan secara *online*.
  - f. e-SPJ, dimana pengajuan perjalanan dinas pekerja BRI tidak lagi menggunakan kertas namun menggunakan aplikasi untuk dokumentasi dan persetujuan pemutus.
  - g. e-Fasilitas Pinjaman Pekerja, untuk mengajukan permohonan fasilitas pinjaman secara *online*.
  - h. e-Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, untuk mengajukan penggantian klaim biaya pengobatan dan proses penggantian secara *online*.
  - i. e-Lembur, untuk menerbitkan Surat Perintah Kerja Lembur secara *online* dan pembayaran upah lembur secara otomatis.
5. BRIHC (BRI *Human Capital*), untuk mengelola proses bisnis SDM.
6. SMK (Sistem Manajemen Kinerja) online untuk monitoring kinerja pekerja.
7. Portal Hubungan Industrial, untuk monitoring pelanggaran disiplin pekerja.
8. e-Pensiun, untuk informasi benefit yang diperoleh untuk masa pensiun normal.
9. e-*Corporate Culture*, untuk monitoring implementasi budaya kerja pekerja BRI.
10. Konsultasi dan Informasi SDM, untuk informasi terkini mengenai SDM.
11. e-*Filing*, untuk memenuhi kewajiban pelaporan sebagai wajib pajak.
12. *Digital Office*, untuk efisiensi dan efektivitas surat menyurat internal.
13. *Survey Online*, survei kepuasan pelanggan dengan responden pekerja/unit kerja BRI.

#### Aplikasi Paperless untuk Nasabah BRI:

1. e-*tax*, BRI yang pertama di Indonesia;
2. e-*Form*, *formless* untuk pelayanan *Frontliner* di Unit Kerja BRI;
3. e-*statement*, memberikan informasi melalui email yang didaftarkan;
4. *New account swap* untuk membantu nasabah menghubungkan produk pinjaman dan giro, tanpa harus memiliki dua rekening terpisah;



## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN



5. Menerapkan ATM 'tanpa bukti cetak' (*print-receipt*);
6. *Loan approval system*;
7. *E-Tilang*;
8. BRISPOT, merupakan aplikasi menggunakan system berbasis Android dan koneksi melalui internet, memungkinkan putusan pinjaman mikro untuk dilakukan di tempat sehingga lebih cepat dan *paperless*;
9. *E-UMKM*;
10. MY BRI, merupakan aplikasi yang menggunakan system berbasis Android dan koneksi melalui internet, memungkinkan putusan pinjaman konsumen untuk dilakukan di tempat sehingga lebih cepat dan *paperless*.

**Data Pemakaian Kertas**

Keterangan	Satuan	2016	2017
Pemakaian Kertas	Rim	31.980	30.800
Biaya Pengadaan	Rp Juta	1.175	1.007

**b. Konsumsi Energi Listrik**

BRI menyadari akan besarnya penggunaan energi dalam bidang operasional Bank, dan berkomitmen menjaga fasilitas energi dalam keadaan stabil. Dalam hal ini, BRI mengeluarkan kebijakan penghematan konsumsi listrik melalui pemakaian lampu hemat energi serta *setting* suhu udara yang wajar, dengan tetap menjaga kualitas *near zero downtime*. Selanjutnya, dalam hal penambahan unit kerja, penambahan *server* yang terintegrasi dengan teknologi dilakukan, sehingga pengelolaan data menjadi terpusat.

Pada akhir 2017, penggunaan konsumsi listrik di kantor pusat tercatat sebesar 7.993.500 Kwh, turun 3% dari tahun sebelumnya 8.484.520 Kwh. Penurunan ini dapat terjadi karena terdapat penggantian seluruh lampu di gedung BRI 1 dari lampu konvensional menjadi lampu *LED*.

**c. Penggunaan Kendaraan Operasional**

Komitmen BRI dalam menjaga lingkungan yang bersih juga diwujudkan dengan penggunaan Pertamina sebagai bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan operasional perusahaan. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah sejak tahun 2012 yang mengharuskan kendaraan operasional semua badan usaha milik negara (BUMN) menggunakan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.

No	Keterangan (Kiloliter)	2016	2017
1.	Konsumsi Bahan Bakar	302,31	219,47

**d. Pengelolaan Dampak Lingkungan**

Bentuk kepedulian BRI untuk mengurangi dampak lingkungan lain juga dilakukan dengan berbagai kegiatan, antara lain:

1. Pengelolaan limbah padat bekerja sama dengan perusahaan berizin;
2. Pemakaian alat pemadam api ringan (APAR) berbahan yang ramah lingkungan;
3. Mengganti freon mengandung chlorofluorocarbon (CFC), dengan freon jenis halotron.

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA



“

Mewujudkan Harmonisasi Antara Perusahaan Dan Pekerja. BRI berkomitmen penuh untuk mendukung terwujudnya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara perusahaan dan pekerja. Salah satunya, melalui Perjanjian Kerja Bersama yang disusun dan disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ”



## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Perusahaan memandang aspek ketenagakerjaan sebagai salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Pengelolaan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dilakukan oleh Divisi yang berada di bawah Direktur *Human Capital* dan Direktur Manajemen Risiko meliputi Divisi Kebijakan dan Pengembangan *Human Capital*, Divisi Operasional *Human Capital*, Divisi Pengelolaan Pekerja Kontrak dan *Outsourcing*, *BRI Corporate University* dan Divisi Manajemen Risiko Operational & Pasar.

### Target/Kegiatan yang Ditetapkan Manajemen untuk Tahun 2017

Dalam melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan harmonisasi ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, Perusahaan telah menetapkan sejumlah target/ rencana kegiatan. Adapun target/ rencana kegiatan yang ditetapkan manajemen antara lain pelaksanaan GMCU bagi seluruh Pekerja Tetap, Simulasi kebakaran atau bencana, Pelatihan dan Briefing Floor Warden. BRI telah memiliki kebijakan Business Continuity Management yang diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.26-DIR/DMR/12/2016. Kebijakan tersebut mengatur tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) / Emergency Response Plan (ERP) berkaitan dengan keamanan dan keselamatan jiwa yang berupa tanggap darurat atas gangguan/bencana. Prosedur tanggap darurat BRI diatur dalam Juklak Kesiapan Tanggap Darurat dan Evakuasi Pekerja Akibat Gangguan/ Bencana di Unit Kerja sesuai Nota Dinas Direksi BRI No: B.01-DIR/DMR/01/2016.

### Kegiatan yang Dilakukan dan Dampak Kuantitatif atas Kegiatan tersebut

Untuk membina hubungan yang harmonis antara perusahaan dan pekerja, BRI secara reguler telah melakukan perundingan dengan Serikat Pekerja untuk menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku 2 tahun sekali dan maksimum perpanjangan satu tahun. Adapun PKB yang saat ini berlaku adalah PKB Periode tahun 2015-2017. PKB BRI telah mendapat pengesahan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang merupakan lembaga yang berwenang untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh ketentuan didalam PKB BRI telah patuh terhadap ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Selain melalui PKB, BRI juga mengatur hak dan kewajiban pekerja melalui kebijakan-kebijakan internal, meliputi:

1. Pengembangan Karir;
2. Kompensasi dan benefit;
3. Manajemen Kinerja;
4. Hubungan Industrial.

Secara umum, baik PKB maupun kebijakan internal BRI lainnya, merupakan wujud komitmen Perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab secara maksimal kepada para pekerja. Lebih lanjut implementasi dari hal tersebut dapat dijelaskan melalui hal-hal sebagai berikut:

### Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja yang Sama

Dalam kegiatan operasionalnya, BRI menjamin tidak terdapat diskriminasi dalam hal gender, suku, agama, serta ras. Pekerja tetap wanita boleh menanggung keluarga tanpa syarat apapun. Kesempatan kerja dan pengembangan karir dilakukan dengan memperhatikan kompetensi setiap individu melalui metode yang terukur.

### Komposisi Pekerja berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	2016	2017
1	Pria	52.474	52.434
2	Wanita	40.859	40.424
<b>Total</b>		<b>93.333</b>	<b>92.858</b>

Pemberian kesempatan kerja yang sama di BRI juga ditunjukkan melalui rekrutmen penyandang difabel sebagai pekerja. Kebijakan manajemen untuk merekrut penyandang difabel sebagai pekerja baru diterapkan sejak tahun 2016.

No	Jenis Kelamin	2016	2017
1	Pria	64 pekerja	64 pekerja
2	Wanita	6 pekerja	37 pekerja
3	Difabel	70 pekerja	101 pekerja

Selanjutnya, terkait dengan pemberdayaan potensi SDM lokal, Perusahaan memberikan kesempatan yang sama untuk dapat bergabung dengan Perusahaan. Adapun persebaran jumlah pekerja berdasarkan wilayah adalah sebagai berikut:

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP  
KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

No	Wilayah	2016		2017	
		Pria	Wanita	Pria	Wanita
1	Audit	2.150	531	2.071	503
2	Kantor Cabang Khusus	81	76	83	82
3	Kantor Pusat	1.542	851	1.739	866
4	Kanwil Aceh	1.343	727	1.261	686
5	Kanwil Bandung	5.570	3.485	5.540	3.376
6	Kanwil Banjarmasin	2.428	2.047	2.469	2.083
7	Kanwil Denpasar	2.529	2.293	2.544	2.296
8	Kanwil Jakarta 1	1.589	1.521	1.567	1.569
9	Kanwil Jakarta 2	2.289	2.240	2.295	2.217
10	Kanwil Jakarta 3	2.479	1.978	2.460	1.986
11	Kanwil Jayapura	854	806	880	845
12	Kanwil Lampung	1.767	1.142	1.713	1.114
13	Kanwil Makassar	3.041	2.216	3.066	2.273
14	Kanwil Malang	4.229	3.636	4.239	3.611
15	Kanwil Manado	1.757	1.691	1.740	1.661
16	Kanwil Medan	2.580	2.085	2.497	2.072
17	Kanwil Padang	1.343	1.033	1.345	1.009
18	Kanwil Palembang	2.164	1.462	2.131	1.476
19	Kanwil Pekanbaru	1.734	1.295	1.755	1.263
20	Kanwil Semarang	3.737	3.010	3.702	2.869
21	Kanwil Surabaya	2.744	2.374	2.758	2.290
22	Kanwil Yogyakarta	4.245	4.276	4.282	4.178
23	BRI Corporate University	239	69	232	70
Total		52.434	40.844	52.369	40.395
Kantor Anak Perusahaan BRI		25	14	34	22
Kantor Cabang Luar Negeri		15	1	31	7
Subtotal		40	15	65	29
<b>TOTAL</b>			<b>93.333</b>		<b>92.858</b>

### Kesempatan Pengembangan Diri

Perusahaan secara berkesinambungan melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi di seluruh jenjang jabatan pekerja, agar memiliki keahlian dan kompetensi yang dapat menjawab tantangan bisnis perusahaan di masa kini dan masa yang akan datang. Melalui program pelatihan, pekerja BRI diarahkan untuk menjadi *human capital* yang memiliki kemampuan belajar, kemauan berubah, berinovasi dan memberikan daya dorong kreatif bagi kemajuan perusahaan. Program pelatihan yang diberikan kepada seluruh pekerja bertujuan meningkatkan kompetensi dalam tiga hal pokok, menyangkut keahlian aplikatif, teknis maupun analitis dan mengasah kemampuan manajerial pekerja.

Sepanjang 2017, BRI telah memfasilitasi pekerja dari berbagai jenjang jabatan untuk memperoleh pendidikan dan/atau pelatihan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 533,6 miliar, dengan biaya per pekerja adalah sebesar Rp 301.000/peserta. Sejak 2016 BRI mengimplementasikan *Blended Learning*, yaitu metode pendidikan dengan perpaduan *in-class learning* secara tatap muka langsung dan *e-learning*.

Perusahaan telah menyelenggarakan berbagai program training dengan realisasi jumlah peserta pendidikan pada periode Januari – Desember 2017 sejumlah 1.773.194 peserta. Dimana jumlah tersebut merupakan jumlah dari peserta pendidikan *In Class* yaitu 13,6% dan peserta pendidikan *E-Learning* sebesar 86,4%.



## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

### Remunerasi dan Benefit

Perusahaan memberikan kompensasi secara adil, kompetitif, serta memperhatikan strategi dan perkembangan bisnis perusahaan. Struktur pengupahan BRI dirancang untuk memberikan kompensasi kepada pekerja sesuai dengan kompetensi pekerja dan bobot jabatannya, tanpa membedakan gender pekerja. Kompensasi kepada pekerja diberikan dalam kerangka sistem yang adil, kompetitif, serta sesuai kebutuhan dan kemampuan Perusahaan. Kompensasi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kompensasi yang bersifat tetap terdiri dari Upah Pokok dan Tunjangan, serta kompensasi yang bersifat variabel yang diberikan kepada pekerja berdasarkan pencapaian kinerja.

Perusahaan menerapkan kebijakan kenaikan upah berdasarkan prestasi kerja (*merit increase*), sehingga pekerja dengan prestasi tinggi akan memperoleh kenaikan upah yang tinggi pula. Selain itu, guna mendorong prestasi kerja yang optimal, BRI memiliki program kompensasi variabel yang diberikan kepada pekerja yang berhasil mencapai dan melampaui target kinerja. Pekerja dengan prestasi tinggi akan memperoleh kompensasi variabel yang tinggi pula. Sebaliknya, pekerja yang kurang berprestasi akan memperoleh kompensasi variabel yang rendah, atau tidak mendapatkan kompensasi variabel sama sekali.

BRI senantiasa memastikan bahwa upah minimum yang diberikan kepada pekerja sejak bergabung telah berada di atas upah minimum yang berlaku di setiap wilayah Perusahaan. Penambahan jumlah pekerja dan pemenuhan kompensasi dan benefitnya berdampak pada peningkatan alokasi dana bagi pekerja. Namun demikian, BRI memandang alokasi yang juga diperuntukkan bagi peningkatan kompetensi pekerja secara komprehensif ini merupakan investasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

### Biaya Pengelolaan Ketenagakerjaan

Komponen	Angka Bank Saja (Rp Juta)	
	2016	2017
Gaji, Upah, dan Tunjangan	8.542.413	9.096.616
Bonus, Insentif dan Tantiem	5.816.691	6.234.168
Pendidikan dan Pengembangan	578.568	534.097
Tunjangan Kesehatan	358.918	371.686
Jaminan Jamsostek	522.249	606.823
Pemutusan Hubungan Kerja	153.281	304.976
Pensiun Iuran Pasti	231.105	256.675
Cuti Besar	308.429	289.150
Pensiun Imbalan Pasti	513.384	457.552
Penghargaan Tanda Jasa	150.349	155.894
Lain-lain	472.964	508.695
<b>Total</b>	<b>17.648.351</b>	<b>18.816.332</b>

### Turnover Karyawan

Survei keterikatan pekerja BRI dilakukan setiap tahunnya, pada 2017 angka *employee engagement survey* adalah sebesar 3,1 dari skala 4. *Engagement survey* dilakukan dengan tujuan untuk mengukur seberapa besar rasa keterikatan pekerja terhadap perusahaan. Hal ini juga sejalan dengan rendahnya tingkat turnover pekerja BRI yang sebesar 1,22%.

### Data Turnover Karyawan

Kepuasan (*satisfaction*) pekerja BRI terhadap pengelolaan SDM salah satunya diukur dari tingkat *turnover*. Pada tahun 2017, tingkat *turnover* mencapai sebesar 1,22%, lebih rendah dari tingkat *turnover* secara industri yang mencapai 14%.

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

### Jumlah Pekerja berdasarkan Status Kepegawaian

Status pekerja BRI umumnya adalah Pekerja Tetap (Termasuk pekerja dalam masa percobaan) sebanyak 60.764, Pekerja Kontrak 31.994, dan Pekerja Outsourcing 37.929. Adapun komposisi pekerja BRI menurut status kepegawaian adalah sebagai berikut:

### Jumlah Pekerja berdasarkan Status Kepegawaian

Status	2014	2015	2016	2017
Pekerja Tetap	48.814	54.859	59.007	60.764
Pekerja Kontrak	41.739	37.451	34.262	31.994
Trainee	811	264	64	100
Total	91.364	92.574	93.333	92.858

### Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Penanganan komplain pekerja merupakan salah satu perhatian Manajemen BRI untuk menegaskan komitmen Manajemen dalam rangka menjaga harmonisasi hubungan antara Manajemen BRI dengan seluruh pekerja. Wujud penanganan komitmen Manajemen BRI terkait dengan komplain pekerja di buktikan dengan diterbitkannya kebijakan tentang *Whistleblowing System (WBS)* yang merupakan alat monitoring yang langsung dibawah monitoring/kendali *Top Management* Perusahaan melalui pesan singkat (*Short Message Service/SMS*) atau surat tertulis yang ditujukan langsung kepada Direktur Utama Perusahaan.

Selain *Whistleblowing System (WBS)*, dalam menangani komplain pekerja terkait permasalahan di bidang SDM, BRI memiliki saluran komunikasi yaitu *Call Center SDM*. Melalui *Call Center SDM*, pekerja dapat menyampaikan permasalahan terkait SDM baik terkait pekerjaan hingga permasalahan pribadi yang membawa dampak secara langsung terhadap pekerjaan. Dengan dibukanya fasilitas dan sarana komunikasi bagi seluruh pekerja di Perusahaan, menunjukkan komitmen Perusahaan dalam menjaga harmonisasi hubungan antara Perusahaan dan pekerja.

### Jumlah Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

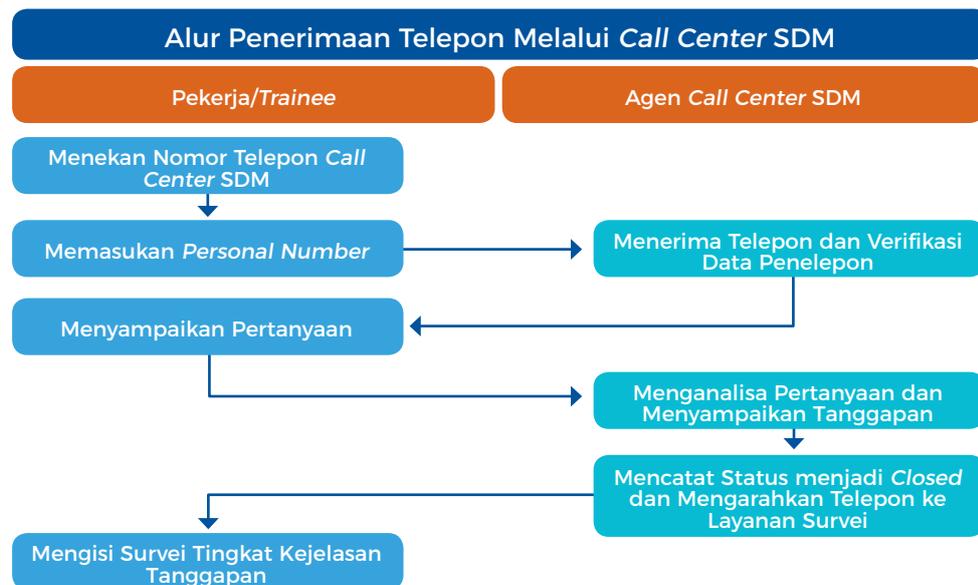
#### Jumlah Telepon Melalui Call Center SDM

	2016	2017
Telepon diterima	22.909	23.649
Telepon diselesaikan/ ditanggapi	22.909	23.649



## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

### Agen Penerimaan Telepon Melalui Call Center SDM



### Kesehatan & Keselamatan Kerja

BRI berupaya dalam mewujudkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) para karyawannya. Bentuk pengelolaan K3 yang telah dilakukan BRI meliputi:

#### Pencegahan

Pencegahan kecelakaan, kebakaran, pemberian pertolongan pertama pada Kecelakaan (P3K) kepada pekerja, telah diatur oleh BRI di dalam ketentuan yang berisi:

1. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta apa yang dapat timbul di tempat kerjanya.
2. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan di tempat kerja.
3. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
4. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

Secara kontinyu BRI melakukan pelatihan simulasi kebakaran, tanggap darurat bencana (gempa bumi, dan kebakaran)



## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA

### Pengelolaan Risiko Kecelakaan Kerja di BRI

#### Di Area Bisnis (*Business Area*)

- Gedung bertingkat, rumah kantor (rukan), rumah toko (ruko), maupun unit kerja mobile berbasis *e-channel*.
- Pelaksanaan K3 difasilitasi kebijakan pengelola gedung
  - Pelatihan dan pemberian informasi evakuasi dari gedung bertingkat secara berkala
  - Pelatihan dasar penggunaan alat pemadam kebakaran
  - Pelatihan penyelamatan korban dari dalam gedung yang diikuti oleh pekerja pengamanan gedung
  - Perlengkapan fasilitas dengan peralatan dasar keselamatan yang relevan dan memadai, termasuk tabung Oksigen (O2), kotak obat P3K, perosotan (tangga luncur) darurat pada jendela keluar (*exit window*)
  - Penyediaan dua mobil ambulans di kantor pusat dan bekerja sama dengan BRI Medika (Anak perusahaan BRI)

#### Di Luar Area Bisnis (*Non Business Area*)

- Lokasi peninjauan pembangunan proyek dan kegiatan kunjungan nasabah
- Pelaksanaan K3 difasilitasi pengelola proyek
  - Peraturan bagi setiap pekerja untuk mengikuti *safety induction*
  - Pembekalan seluruh pekerja dengan polis asuransi kecelakaan kerja yang mencakup personal *accident* dan program Jaminan Kecelakaan Kerja

### Fasilitas GMCU dan Santunan

BRI juga memberikan fasilitas *general medical check up* dan fasilitas jaminan kesehatan. Kepada pekerja yang menderita cacat ringan, BRI menempatkan posisi yang sesuai dengan kemampuan dan memberikan fasilitas *general medical check up* dan fasilitas jaminan kesehatan.

BRI juga memberikan fasilitas asuransi jiwa dan *personal accident* bagi seluruh pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dalam melaksanakan pekerjaan sepanjang dalam hubungan kerja dengan Perusahaan, dengan manfaat meninggal dunia atau cacat.

Dalam hal terdapat pekerja meninggal dunia akibat kecelakaan sebagaimana dimaksud, maka fasilitas tersebut diberikan kepada ahli waris yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.





## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN



“

Program BRI Peduli merupakan salah satu wujud peran aktif BRI kepada masyarakat dan lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sosial masyarakat. Pada 2017, penyaluran dana Program BRI peduli mencapai Rp 150,35 miliar. ”

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Sesuai dengan amanat Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Peraturan Menteri BUMN tentang Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 beserta perubahannya yang terakhir yakni Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017, BRI secara konsisten dan berkelanjutan menjalankan Tanggung jawab sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Kegiatan CSR BRI diimplementasikan dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang merupakan salah satu wujud peran aktif BRI kepada masyarakat dan lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sosial masyarakat. PKBL sendiri terbagi menjadi 2 (dua) kegiatan utama, yakni Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

Program Kemitraan (PK) dengan usaha kecil dilaksanakan sebagai upaya BRI dalam mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, terciptanya lapangan kerja serta menciptakan usaha-usaha yang berkelanjutan agar mereka dapat memiliki akses terhadap layanan perbankan. Sedangkan Program Bina Lingkungan (BL) dilaksanakan sebagai upaya BRI memberdayakan dan mengembangkan kondisi sosial masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan.

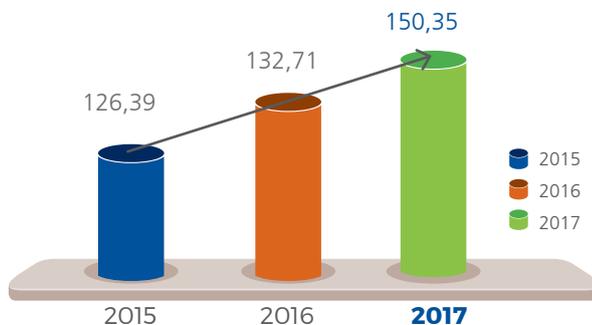
Hingga akhir Desember 2017, dana yang disalurkan melalui program bina lingkungan (BL) mencapai Rp150,35 miliar, meningkat sebanyak 13,29% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp132,71 miliar. Dana tersebut disalurkan melalui berbagai program BRI Peduli dengan *tagline* Bangga BERINDONESIA yang dialokasikan untuk 7 (tujuh) sektor, yaitu:

- Sektor bantuan untuk korban bencana alam, yang dikomunikasikan dengan nama INDONESIA PEDULI
- Sektor pendidikan, yang dikomunikasikan dengan nama INDONESIA CERDAS
- Sektor peningkatan kesehatan, yang dikomunikasikan dengan nama INDONESIA SEHAT
- Sektor sarana prasarana umum, yang dikomunikasikan dengan nama INDONESIA MEMBANGUN

- Sektor sarana ibadah, yang dikomunikasikan dengan nama INDONESIA TAKWA
- Sektor pelestarian alam, yang dikomunikasikan dengan nama INDONESIA LESTARI
- Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, yang dikomunikasikan dengan nama INDONESIA SEJAHTERA

Dalam pelaksanaan program BL, BRI melakukan koordinasi dengan unit kerja BRI yang tersebar di seluruh Indonesia serta institusi-institusi terpercaya lainnya agar penyaluran dapat tepat sasaran dan tepat guna.

### Kenaikan Realisasi Penyaluran Program BRI Peduli Periode 2015-2017



**KENAIKAN REALISASI PENYALURAN PROGRAM BRI PEDULI PERIODE 2015-2017**  
(Pencapaian Bina Lingkungan 3 Tahun Terakhir)  
(Rp miliar)



## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

### Rincian Realisasi Anggaran Program BRI Peduli Periode 2015-2017

Sektor	2015	%	2016	%	2017	%
Indonesia Peduli	3.194.027.094	2,53%	1.414.781.307	1,07%	2.394.042.761	1,59%
Indonesia Cerdas	31.029.002.836	24,55%	27.027.916.471	20,37%	32.990.028.609	21,94%
Indonesia Sehat	17.452.033.345	13,81%	22.827.520.022	17,20%	21.596.164.343	14,36%
Indonesia Membangun	31.397.242.073	24,84%	26.463.322.958	19,94%	31.455.378.146	20,92%
Indonesia Taqwa	17.385.011.551	13,75%	27.177.503.630	20,48%	29.095.446.575	19,35%
Indonesia Lestari	2.386.873.415	1,89%	1.992.366.872	1,50%	723.303.800	0,48%
Indonesia Sejahtera	23.546.868.028	18,63%	25.724.377.567	19,38%	32.094.333.268	21,35%
Indonesia Bermitra*			80.795.000	0,06%		
Total	126.391.058.342	100,00%	132.708.583.827	100,00%	150.348.697.502	100,00%

\*sejak tahun 2017 telah beralih menjadi program kemitraan

### Alokasi Realisasi Anggaran Program BRI Peduli 2017



Terkait dengan penyaluran dana dan efektivitas kinerja kegiatan PKBL yang merupakan implementasi dari program CSR BRI, perusahaan selalu berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Selain itu, pelaksanaan CSR BRI juga telah mendapatkan pengakuan sebagai program yang berkualitas dan berkesinambungan, ditandai dengan penghargaan yang diterima oleh lembaga-lembaga penilai program CSR terkemuka diantaranya berupa penghargaan *Top CSR 2017 on Bank Sector* oleh *Business News*, *Social Business Innovation* oleh *Warta Ekonomi* dan CSR terbaik 2017 untuk kategori pendidikan oleh *Sindo Media Grup*.



## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

### Target/Kegiatan yang Ditetapkan Manajemen untuk Tahun 2017

Mengimplementasikan peran tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada masyarakat dan lingkungan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan mengacu pada Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas; PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terbatas serta Peraturan Menteri BUMN tentang Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) No. Per-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 beserta perubahannya yang terakhir, yakni Peraturan Menteri BUMN No. Per-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017.

### Kegiatan yang Dilakukan dan Dampak Kuantitatif atas Kegiatan Tersebut

Adapun Program BRI Peduli yang telah dilaksanakan di sepanjang tahun 2017 diantaranya sebagai berikut:



### Indonesia Peduli

Bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2017 mengundang keprihatinan yang mendalam bagi berbagai pihak, tak terkecuali BRI. Untuk meringankan beban masyarakat korban bencana alam, BRI menggelar sejumlah posko serta menyalurkan bantuan sebagai bagian dari bantuan tanggap bencana.

Bantuan tanggap bencana yang telah direalisasikan selama kurun waktu tahun 2017 mencapai Rp2,39 miliar melalui beberapa kegiatan diantaranya:

No	Kontribusi	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Tanggap Darurat Banjir	Kuningan, Pati, Sumbawa, Brebes, Surakarta, Sampang, Kutacane, Pangkal Pinang, Kendari, Rababima NTB	454.884.500
2.	Tanggap darurat letusan gunung berapi	Denpasar, Bali; Sinabung, Sumatra Utara; Rababima, NTB	452.028.000
3.	Tanggap Darurat Gempa	Aceh, Kediri	302.475.700
4.	Tanggap Darurat Longsor	Ponorogo, Bangli, Payakumbuh	201.455.100



## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN



### Indonesia Cerdas

Tema besar CSR BRI tahun 2017 di sektor pendidikan salah satunya adalah BRI mencerdaskan anak bangsa, dimana sepanjang tahun 2017 BRI telah merealisasikan anggaran untuk Indonesia Cerdas hingga mencapai Rp32,99 miliar. Beberapa kegiatan penting terkait Indonesia Cerdas, antara lain:

- **BRI Mengajar**

Jajaran manajemen BRI menggelar kelas inspirasi bertajuk 'BRI Mengajar di 20 Sekolah Dasar' dan 'BRI Mencerdaskan anak bangsa di 122 Sekolah Dasar' bagi siswa kelas dasar di sejumlah lokasi 3 T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) Indonesia.

Melalui kelas inspirasi bagi siswa kelas dasar ini diharapkan dapat menggugah minat belajar para murid dan memotivasi mereka agar lebih giat belajar. Dalam kelas inspirasi tersebut, BRI juga memberikan wawasan literasi keuangan dalam lingkup yang sederhana dan mudah untuk dimengerti.

Tidak hanya itu, selain melakukan *sharing* wawasan dan motivasi, BRI juga memberikan bantuan pendidikan dalam bentuk sarana prasarana kepada sekolah-sekolah dasar yang dikunjungi.

No	Bantuan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Jumlah Penerima
1.	BRI Mencerdaskan Anak Bangsa Tahun 2017	Wilayah supervisi Kanwil BRI Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Palembang, Medan, Bandar Lampung, Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Manado, Denpasar, Jayapura	3.280.000.000	Siswa di 122 sekolah tingkat dasar yang tersebar di seluruh Indonesia
2.	BRI Mengajar Tahun 2017	Natuna, Sabang, Dobo, Muko-Muko, Nunukan, Putussibau, Tahuna, Rote, Nabire, Merauke	2.260.000.000	Siswa di 20 sekolah dasar yang tersebar di seluruh Indonesia

- **Siswa Mengenal Nusantara**

Kegiatan ini merupakan kegiatan pertukaran pelajar di level Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat yang bertujuan untuk menumbuhkan dan memupuk rasa bangga terhadap bangsa dan tanah airnya.

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

No	Bantuan	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Jumlah Penerima
1.	Siswa Mengenal Nusantara (SMN) bekerjasama dengan PT. INKA (Persero), PT. SIER (Persero), PT. GARAM (Persero), dan Perum Jasa Tirta I	Mengirimkan 38 pelajar SMA/ Sederajat yang berasal dari Provinsi Jawa Timur ke provinsi Sulawesi Tenggara dan menerima pertukaran pelajar SMN sebanyak 20 pelajar SMA/ Sederajat asal provinsi Sulawesi Tenggara ke provinsi Jawa Timur	447.476.532	58 orang siswa-siswi

### • Pendirian Taman Bacaan

Selanjutnya pendirian Taman Bacaan oleh BRI di sekolah-sekolah dasar di sejumlah daerah kawasan 3 T seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Gorontalo, Maluku dan Papua. Program pendirian taman bacaan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan minat baca bagi siswa-siswa sekolah dasar, dimana dengan meningkatnya minat baca dapat semakin menambah wawasan dan pengetahuan bagi siswa-siswa tersebut.

No	Bantuan	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Jumlah Penerima
1.	Program pendirian taman bacaan sekolah.	SDN 4 Singkil, Aceh; SD Inpres Soknar, NTT; SDN 004 Nunukan Sel, Kaltara; SDN 17 Tilamuta, Gorontalo; SMPN 26 Buru, Buru, Maluku; SD Inpres 22, Maluku Utara; SD Inpres 14 Samate, Papua Barat; SD Inpres Krim, Papua	1.041.590.000	8 Sekolah tingkat dasar di 8 provinsi

### • Renovasi dan Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, BRI memberikan sejumlah bantuan melalui pemenuhan perlengkapan sarana dan prasarana pendidikan seperti, perbaikan gedung sekolah & pondok pesantren, penambahan kelengkapan sekolah, pemberian bus penunjang pendidikan, Perpustakaan keliling dan pembangunan laboratorium.

No	Bantuan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Jumlah Penerima
1.	Bantuan Pembangunan dan atau Renovasi sarana & prasarana pendidikan lainnya	Universitas Brawijaya, Malang; Universitas Padjajaran, Bandung; Universitas Andalas, Padang; Universitas Teknologi Sumbawa, Nusa Tenggara Barat; Univ Methodist Indonesia, Medan; MAN 4 Medan Sumatera Utara; MTs Badrul Arifin Situbondo; SDI Al Baisuny, Bangkalan, Jawa Timur; SD Inpres Ende 1 dan SD Inpres Ende 9 Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur; SD Islam Kemuliaan, Jakarta; Sekolah Dasar di Kabupaten Jombang; SDN Uspisera dan SD Kristen Ustutun Pulau Liran, Maluku; TPA/ PAUD di Jayapura; TK Anyelir Bernis Cijantung dan TK Dirgahayu Pasar Rebo Jaktim	5.276.238.000	17 Lembaga Pendidikan
2.	Bantuan Pemberian Bus untuk Penunjang Pendidikan	STAIN Bengkulu; Politeknik Negeri Ujung Pandang; Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur; Universitas Jember; Universitas Hasanuddin Makassar; Universitas Katolik Parahyangan, Bandung	3.401.929.500	6 Lembaga Pendidikan
3.	Bantuan pembangunan laboratorium pendidikan	Universitas Peradaban Bumiayu; Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqofah Depok, Jawa Barat; Pondok Pesantren Buntet Cirebon; IAIN Surakarta; SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah; Pondok Pesantren Pabelan Mungkid, Magelang	2.486.798.750	6 Lembaga pendidikan

### • Kampanye Sadar Bahaya Narkoba

Kegiatan pendidikan lainnya yang juga menjadi salah satu ikon program di 2017 yaitu kampanye sadar bahaya narkoba yang diselenggarakan di beberapa kota yang tersebar di 19 Kantor Wilayah BRI seluruh Indonesia, dengan jumlah peserta 3.580 orang dari sekitar 1.000 sekolah yang turut hadir pada kampanye tersebut. Tujuan kampanye ini diantaranya untuk menghindarkan generasi muda dari bahaya buruk narkoba sekaligus mewaspadaai upaya-upaya pengedar dalam menyalurkan narkoba melalui berbagai cara.



## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

No	Bantuan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Jumlah Penerima
1.	Program Mencerdaskan Anak Bangsa - Kampanye Sadar Bahaya Narkoba Bersama BRI	Wilayah supervisi Kanwil BRI Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Palembang, Medan, Bandar Lampung, Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Manado, Denpasar, Jayapura	4.180.220.000	3.580 orang

### • Beasiswa BRI

Berangkat dari permasalahan bahwa masih banyak generasi muda yang memiliki kemampuan tinggi secara akademis namun tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi, Bank BRI kemudian memberikan Bantuan Pendidikan kepada mereka melalui berbagai Beasiswa, diantaranya:

#### a. Beasiswa Nusantara Cerdas (BNC)

Program Beasiswa Nusantara Cerdas (BNC) BRI adalah Program bersama antara Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI dan BRI yang secara bersama-sama memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa kepada Putra-putri Indonesia yang berasal dari daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) di Indonesia yang telah memenuhi syarat akademis dan lulus seleksi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Adapun bantuan yang diterima oleh peserta program BNC cukup lengkap, selain bantuan untuk biaya kuliah, penerima BNC juga menerima berbagai fasilitas seperti biaya hidup, sarana penunjang pendidikan lainnya dan peningkatan *soft skill* berupa pelatihan *capacity building* yang dilaksanakan secara berkala.

Program ini dimulai pada tahun 2010 yang dinamakan dengan program Beasiswa Putra Papua, dikarenakan penerima beasiswa yang berjumlah 12 orang semuanya merupakan asli Putra Daerah dari dua Provinsi di Papua. Namun pada tahun 2011, beasiswa yang diberikan tidak hanya dikhususkan pada mahasiswa asal Papua namun juga mahasiswa lain yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia terutama dari daerah 3 T. Dan selanjutnya beasiswa ini disebut sebagai Beasiswa Nusantara Cerdas (BNC).

Pada tahun 2017 total anggaran yang disalurkan untuk program BNC yang masih berjalan mencapai Rp1,24 miliar yang telah disalurkan kepada 48 mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi terkemuka, diantaranya Undip, UI, UGM, Unibraw, IPB, ITB, ITS, Unair, Universitas Padjajaran, dan Universitas Jenderal Soedirman-Purwokerto.

Pada bulan Desember 2017 telah ditetapkan 25 orang mahasiswa penerima program BNC baru yang berasal dari Universitas Syiah Kuala, Universitas Tanjungpura, Universitas Mulawarman, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Mataram.

#### b. Beasiswa lainnya

Berangkat dari permasalahan bahwa masih banyaknya generasi muda di Indonesia yang memiliki kemampuan tinggi secara akademis namun tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi, BRI memberikan Bantuan Pendidikan kepada Putra-putri Indonesia. Sepanjang tahun 2017, bantuan beasiswa ini disalurkan kepada penerima beasiswa yang bekerja sama dengan berbagai pihak yang diantaranya yaitu:

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

No	Bantuan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Jumlah Peserta
1.	Program beasiswa kerjasama dengan YAKESPEN	Seluruh Indonesia	3.120.000.000	650 orang
2.	Bantuan pemberian beasiswa penunjang pendidikan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	Politeknik Ilmu Pelayaran, Semarang, Jawa Tengah	250.000.000	30 orang
3.	Beasiswa untuk UIN Palangkaraya	Palangkaraya, Kalimantan Tengah	120.000.000	25 orang

### • Pelatihan dan pendidikan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan bekal berupa keahlian dan ketrampilan kepada peserta didik, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui kegiatan wirausaha. Beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BRI di tahun 2017 di antaranya:

No	Bantuan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Jumlah Penerima
1.	Bantuan pelatihan sertifikasi pengelasan	Surabaya, Jawa Timur	1.100.000.000	100 orang
2.	Bantuan pelatihan dan pendidikan UMKM dlm rangka pengembangan pariwisata Sumatera Barat	Padang, Payakumbuh, Bukittinggi	513.600.000	300 orang
3.	Pendidikan pelatihan bagi pedagang asongan dan pengelola <i>homestay</i>	Mandalika, NTB	320.106.000	200 orang
4.	Program Pelatihan TKI Purna asal Malaysia	Jakarta	260.325.000	30 orang
5.	Pelatihan pemberdayaan UMKM	Bekasi, Jawa Barat dan Serang, Banten	190.575.000	81 orang
6.	Pelatihan <i>Soft Skill</i> Mahasiswa Kampus ITB Bandung	Bandung, Jawa Barat	100.000.000	200 orang
7.	Pelatihan kewirausahaan se Kalimantan Selatan	Banjarmasin	83.500.000	100 orang
8.	Pelatihan <i>entrepreneurs go grow</i>	Jakarta	65.000.000	40 orang



### Indonesia Sehat

Sebagai bagian dari upaya BRI untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, BRI melakukan kampanye Indonesia Sehat. Dana yang disalurkan untuk menyukseskan kegiatan ini mencapai Rp21,60 miliar di tahun 2017. Beberapa Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kampanye ini di antaranya:

### • Bantuan Sarana Penunjang Kesehatan

Melalui bantuan sarana penunjang kesehatan diharapkan pertolongan medis yang akan diperoleh masyarakat bisa lebih cepat sehingga dapat meminimalisir dampak yang tidak diinginkan. Beberapa kegiatan terkait pemberian bantuan tersebut yaitu:



## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

No	Bantuan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Jumlah Penerima
1.	Bantuan pemberian mobil ambulance sebanyak 43 unit	Wilayah supervisi Kanwil BRI Banda Aceh, Bandar Lampung, Jakarta 2, Jakarta 3, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Manado, Denpasar, Jayapura	10.906.112.000	41 Rumah Sakit/ Instansi/ Lembaga lainnya
2.	Bantuan pemberian alat penunjang kesehatan Rumah Sakit	Jakarta; Kab Sinjai, Sulawesi Selatan; dan Ponorogo, Jawa Timur;	1.095.000.000	4 Rumah Sakit/ Poliklinik

### • Layanan Kesehatan

BRI memberikan layanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkala dan dengan cakupan yang terus bertambah. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori layanan kesehatan antara lain:

No	Bantuan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Jumlah Penerima
1.	Operasi Katarak Gratis	Wilayah supervisi Kanwil BRI Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Palembang, Medan, Bandar Lampung, Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Manado, Denpasar, Jayapura	5.940.000.000	2.000 orang
2.	Program pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis	Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Malang, Ponorogo, Renon Denpasar	1.378.975.000	9.942 orang
3.	Khitanan Massal	Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Blitar, Cibinong, Sleman, Yogyakarta, Banten	967.208.597	1.250 orang
4.	Operasi Bibir Sumbing	Purwokerto	250.000.000	75 orang

### • Bantuan Bidang Kesehatan Lainnya

Selain bantuan sarana prasarana dan layanan kesehatan di atas, Bank BRI juga memberikan bantuan berupa pembangunan dan perbaikan sarana kebersihan lingkungan guna mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2017, BRI telah melaksanakan pembangunan dan renovasi posyandu, perbaikan dan pembangunan fasilitas MCK, tempat sampah, dan drainase.



## Indonesia Membangun

Ketersediaan sarana dan prasarana umum yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BRI memberikan perhatian yang cukup intens terhadap hal tersebut dengan memberikan bantuan terkait dengan fasilitas umum yang dikomunikasikan dengan nama Indonesia Membangun.

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Pada tahun 2017, anggaran yang terserap untuk kegiatan Indonesia Membangun mencapai Rp31,46 miliar. Adapun kegiatan BRI yang termasuk dalam kategori Indonesia Membangun antara lain:

### • Peduli Pasar Rakyat

Sebagaimana diketahui, pasar rakyat merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Secara umum, kualitas infrastruktur pasar rakyat berbanding lurus dengan peningkatan aktivitas ekonomi didalamnya yang tentunya dapat berimbas pada pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Beberapa pasar rakyat yang telah direvitalisasi oleh BRI sepanjang tahun 2017 yakni:

No	Bantuan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp.)
1.	Revitalisasi 19 Pasar	Wilayah supervisi Kanwil BRI Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Palembang, Medan, Bandar Lampung, Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Manado, Denpasar, Jayapura	5.700.000.000

### • Sarana Air Bersih dan Sanitasi Umum

Akses terhadap air bersih dan sanitasi merupakan salah satu syarat penting bagi terbentuknya masyarakat yang sehat, sejahtera dan damai. Untuk itu melalui Indonesia Membangun, BRI membantu masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, seperti:

No	Bantuan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp.)
1.	Bantuan pembangunan jaringan air bersih di 3 titik	Sumba Barat, NTB	647.250.000
2.	Pembuatan Sumur Bor	Manokwari, Papua	250.000.000
3.	Bantuan pembangunan saluran irigasi pertanian di Dusun Minian	Palembang, Sumatera Selatan	200.000.000
4.	Bantuan PIPANISASI Sarana Air Bersih untuk Desa Blimbing	Kediri, Jawa Timur	157.625.000

### • Sarana umum lainnya

Selain pasar rakyat, sarana air bersih dan sanitasi umum, BRI juga melaksanakan pembangunan sarana umum lainnya sebagai bagian dari kegiatan Indonesia Membangun. Beberapa kegiatan tersebut antara lain:

No	Bantuan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp.)
1.	Pembangunan Jembatan Gantung Cisemeut, Desa Sangkan Wangi	Lebak, Banten	825.000.000
2.	Bantuan Tandon Air, dan Gazebo sarana pengairan pertanian Desa Gongseng Kec. Randudongkal, Pemalang	Pemalang, Jawa Tengah	611.850.000



## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN



### Indonesia Takwa

Tumbuh dan besar di tengah-tengah masyarakat yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa, BRI turut berpartisipasi aktif dalam mengembangkan kultur masyarakat yang religius, total realisasi Anggaran untuk menyukseskan Indonesia Takwa BRI hingga akhir tahun 2017 mencapai Rp29,10 miliar.

Adapun partisipasi tersebut dikomunikasikan dengan nama Indonesia Takwa, yang dilaksanakan dalam beberapa kegiatan meliputi:

- a. Pembangunan Rumah Ibadah (a.l.: masjid, gereja, pura, dsb),
- b. Bantuan sarana dan prasarana pendukung ibadah,
- c. Bantuan untuk menambah kesakralan peringatan hari raya keagamaan juga menjadi salah satu kegiatan rutin BRI, seperti:
  - Buka Puasa Bersama 7.300 Anak Yatim Piatu,
  - Kegiatan mudik bersama 6.847 pemudik dengan aneka moda transportasi (darat, laut, udara).

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN



### Indonesia Lestari

Sadar bahwa kelestarian alam berkorelasi positif dengan keberlangsungan hidup di planet ini, BRI memberikan perhatian yang serius terhadap pelestarian alam. Perhatian tersebut diantaranya ditunjukkan melalui Pengembangan konservasi mangrove untuk program *coastal carbon corridor*, Penanaman pohon dan konservasi satwa air payau seperti kepiting, rajungan, dan sebagainya.

Hingga akhir Desember tahun 2017, Bank BRI telah menyalurkan dana untuk Program Indonesia Lestari sebesar Rp723,30 juta. Adapun beberapa kegiatan utama untuk mendukung pelaksanaan Program Indonesia Lestari, yaitu antara lain:

- Pengembangan konservasi mangrove utk program *coastal carbon corridor* di Bali
- Bantuan penebaran budidaya benih kepiting rajungan dan penanaman mangrove di Tamalanrea Sulawesi Selatan
- Penanaman bibit mangrove di desa Kaliwumbu dan Desa Uludada Ende Nusa Tenggara Barat
- Penanaman bibit pohon jati di Sukaraja Jawa Barat



## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN



### Indonesia Sejahtera

Di bidang sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, BRI melaksanakan kegiatan yang dikomunikasikan dengan nama Indonesia Sejahtera. Sepanjang tahun 2017, total anggaran yang disalurkan oleh BRI untuk kegiatan ini mencapai Rp32,09 miliar melalui beberapa kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- **Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia, UMKM mendapatkan perhatian yang sangat serius dari BRI. Berbagai bantuan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dilaksanakan oleh BRI. Beberapa kegiatan dimaksud diantaranya yaitu:

No	Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Bantuan 10 motor perahu tempel untuk nelayan di pesisir pantai mandalika	NTB	250.000.000
2.	Bantuan peralatan usaha ternak burung puyuh	Sukabumi	225.000.000
3.	Bantuan 60 gerobak untuk UMKM	Boyolali dan Kepulauan Selayar	210.000.000
4.	Bantuan pembangunan 58 Kios PKL	Lumajang	182.300.000

- **Bantuan sosial lainnya**

Beberapa kegiatan BRI yang masuk dalam kategori Bantuan sosial untuk pengentasan kemiskinan antara lain:

No	Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Bantuan biaya kegiatan dalam rangka menyambut bulan ramadhan 1438 H yaitu sembako gratis, buka bersama dan santunan anak yatim di 19 kanwil	Wilayah supervisi Kanwil BRI Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Palembang, Medan, Bandar Lampung, Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Manado, Denpasar, Jayapura	19.247.498.000
2.	Bedah rumah veteran sebanyak 79 Unit	Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur	3.038.240.000

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

No	Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)
3.	Bantuan kegiatan Pasar Murah	Klaten, Jawa Tengah; Boyolali, Jawa Tengah; Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara; Bau Bau, Sulawesi Tenggara	988.350.000
4.	Bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 25 Unit	Tulungagung	400.000.000

### Total Anggaran BRI Peduli

Sumber dana program BRI Peduli pada 2017 menggunakan anggaran dana yang berasal dari kewajiban perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Realisasi anggaran BRI Peduli mengalami kenaikan dari Rp132,63 miliar pada 2016 menjadi Rp150,35 miliar pada 2017. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21,94% disalurkan untuk program pendidikan, 21,35% untuk Bantuan Sosial pengentasan kemiskinan, 19,35% untuk perbaikan dan pembangunan sarana ibadah, 20,92% untuk perbaikan dan pembangunan sarana umum, 14,36% untuk kesehatan, 1,59% untuk bantuan bencana alam, dan sisanya untuk pelestarian alam.

### Program Kemitraan

Sebagai BUMN, BRI memiliki tugas dan tanggungjawab sosial terhadap negara untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program kemitraan. Program Kemitraan dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Sejak berlakunya Peraturan Menteri BUMN No. Per-02/MBU/07/2017 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, pelaksanaan Program Kemitraan dilakukan salah satunya melalui skema penyaluran Pinjaman Kemitraan.

Pinjaman Kemitraan merupakan bentuk pemberian dana program kemitraan dengan bunga lunak. Tujuan pemberian pinjaman kemitraan adalah untuk membantu menumbuhkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan kemampuan masyarakat yang memiliki usaha mikro atau kecil melalui pembiayaan modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap.

Dalam penyaluran Pinjaman Kemitraan, BRI menerapkan kebijakan agar penyaluran dana Program Kemitraan menjadi tepat sasaran, memberikan dampak positif dan optimal terhadap masyarakat maupun terhadap bisnis Perusahaan. Adapun kebijakannya sebagai berikut:

- Penyaluran pinjaman kemitraan dilakukan secara selektif kepada pelaku usaha produktif dengan mempertimbangkan kondisi calon mitra binaan, seperti karakter, jiwa kewirausahaan yang dimiliki, kondisi sosial dan budaya masyarakat.
- Komoditas calon mitra binaan yang diprioritaskan adalah usaha kecil produk unggulan daerah baik di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kreatif maupun perdagangan.
- Kriteria komoditas calon mitra binaan diantaranya mencakup: komoditas yang mampu memanfaatkan potensi sekitarnya, komoditas yang menjadi unggulan daerah, dan komoditas yang mampu menyerap tenaga kerja/padat karya.
- Pemilihan calon mitra binaan dilakukan secara transparan dan obyektif, untuk menjaring usaha kecil yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi calon nasabah komersial.
- Dilaksanakan guna membantu perkembangan perekonomian rakyat dan secara umum berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN.

Pada umumnya, jenis usaha yang diberikan melalui Pinjaman Kemitraan masih dalam skala kecil, belum pernah menikmati fasilitas pinjaman, memiliki kemampuan pemasaran yang masih terbatas dalam hal pengetahuan dan keterampilan mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, penyaluran Pinjaman Kemitraan merupakan strategi penetrasi pasar dengan pemberian pinjaman kepada usaha kecil yang selanjutnya diarahkan untuk menjadi embrio nasabah komersial.

Ketentuan umum untuk menjadi calon mitra binaan BRI, antara lain:

- Aset calon mitra binaan tidak melebihi Rp500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Omset usaha maksimal Rp2,5 miliar per tahun.
- Belum memenuhi persyaratan perbankan (*non-bankable*).
- Telah melakukan kegiatan usaha minimal enam bulan.



## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

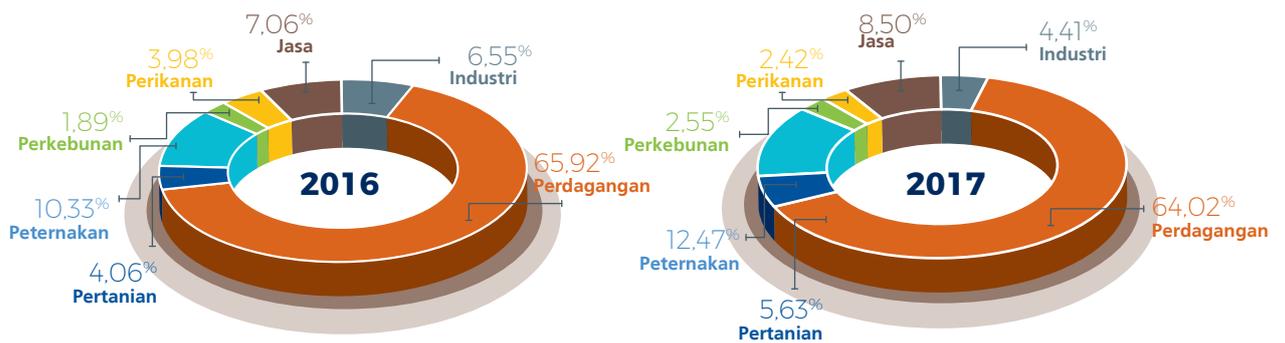
### Realisasi Penyaluran

Tahun 2017 jumlah realisasi penyaluran dana Pinjaman Kemitraan sebesar Rp222,100 miliar kepada 3.077 mitra binaan. Penyaluran pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2016, hal ini dikarenakan pola pemasaran yang lebih baik, dengan memberikan program pemasaran khusus yang memberikan keringanan suku bunga yang rendah dan biaya administrasi ringan.

Tabel realisasi penyaluran dana Pinjaman Kemitraan tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Sektor Usaha	Realisasi 2015 (Rp Miliar)	%	Realisasi 2016 (Rp Miliar)	%	Realisasi 2017 (Rp Miliar)	%
Industri	5,15	9,46%	5,88	6,55%	7.490	4,41%
Perdagangan	28,90	53,06%	59,17	65,92%	108.729	64,02%
Pertanian	2,40	4,41%	3,65	4,06%	9.569	5,63%
Peternakan	4,79	8,79%	9,27	10,33%	21.170	12,47%
Perkebunan	8,49	15,58%	1,89	2,10%	4.333	2,55%
Perikanan	1,54	2,82%	3,58	3,98%	4.112	2,42%
Jasa	3,20	5,87%	6,33	7,06%	14.429	8,50%
Lainnya	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Subtotal	54,47	100%	89,76	100%	169.832	100%
Sinergi BUMN	8,07				52.268	
Dana Pembinaan	0,03					
<b>Total</b>	<b>62,57</b>		<b>89,76</b>		<b>222.100</b>	

Gambaran komposisi penyaluran dana Pinjaman Kemitraan per sektor posisi bulan Desember 2017 adalah sebagai berikut:



### Perkembangan Penyaluran Dana Program Kemitraan

Kegiatan	Tahun Realisasi						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pinjaman Kemitraan	43.197	143.708	130.060	28.670	54.467	89.760	222.101
Pembinaan Kemitraan	2.382	2.258	1.256	172	34	0	174
Jumlah	45.579	145.966	131.316	28.843	54.501	89.760	222.274

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

### Metode Penyaluran Pinjaman Kemitraan

Penyaluran dana Pinjaman Kemitraan kepada calon mitra binaan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perbankan yang terstruktur sebagaimana layaknya pemberian kredit bank pada umumnya. Sebelum memberikan pinjaman, terlebih dahulu melakukan pengenalan terhadap calon mitra binaan yang dilakukan dari berbagai aspek, meliputi: analisis karakter, pengenalan produk unggulan, proses kreatif yang dilakukan untuk menambah nilai produk, ketersediaan sekaligus kemampuan penyerapan tenaga kerja lokal.

Skema lain yang dapat diterapkan dalam penyaluran dana Pinjaman Kemitraan yaitu skema khusus melalui kerjasama yang diberikan kepada Pihak Ketiga, yakni BUMN penyalur dan/atau Lembaga Penyalur lainnya dengan didasari Perjanjian Kerjasama yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Mitra binaan yang telah menikmati fasilitas pinjaman kemitraan diharapkan sudah mengalami peningkatan dalam segi usaha sehingga sudah dapat mengakses pembiayaan secara komersil.

Selanjutnya, mitra binaan dapat dibuatkan klaster usaha, yaitu pusat kegiatan usaha pada sentra ekonomi yang berkembang yang ditandai dengan munculnya pengusaha baru dan pengusaha lama yang lebih maju. Pembentukan kluster usaha ini memberikan berbagai *benefit*, mencakup efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program pembinaan, efisiensi waktu pendampingan, administrasi dan

pengawasan, efisiensi pemasaran produk, efisiensi proses produksi dan sebagainya. Mengingat banyaknya manfaat yang diperoleh, BRI semakin berkonsentrasi menyalurkan dana PK dengan pola pendekatan/pembentukan kluster ini.

### Pembinaan Mitra

Sebagai bentuk dukungan terhadap mitra binaan, BRI memberikan pembinaan kepada mitra dengan tujuan agar mitra binaan dapat lebih mandiri, mendapatkan wawasan yang luas serta lebih percaya diri untuk bersaing di pasar yang lebih besar. Pembinaan dapat dilakukan oleh BRI maupun pihak ketiga yang ditunjuk.

Bentuk pembinaan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan mitra binaan, dapat berupa pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan program lain yang dapat meningkatkan produktivitas maupun perkembangan usaha Mitra Binaan BRI.

Pembinaan yang telah dilakukan oleh BRI di tahun 2017 adalah pelatihan kepada mitra binaan yang diselenggarakan di Kanwil BRI Jakarta 2, Kanwil BRI Yogyakarta dan Kanwil BRI Bandung. Pelatihan tersebut dilaksanakan atas kerjasama dengan UKM Center dan *BRI Institute For Microfinance* sebagai fasilitator yang menyediakan narasumber berkompeten dibidangnya. Dari pelatihan tersebut, Mitra Binaan mendapatkan kesempatan untuk melakukan *sharing session* terkait perkembangan usaha dan peluang bisnis ke depan.

No	Pameran	Tanggal	Lokasi
1	Pelatihan Mitra Binaan Kanwil BRI Jakarta 2	22 s/d 23 Februari 2017	Hotel Ibis Slipi
2	Pelatihan Mitra Binaan Kanwil BRI Yogyakarta	24 s/d 25 Agustus 2017	Hotel Horizon
3	Pelatihan Mitra Binaan Kanwil BRI Bandung	16 s/d 17 November 2017	Hotel Aston Tropicana



## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KONSUMEN



“

Mempertahankan Dan Meningkatkan Kualitas Layanan. Selama 2017, Perusahaan berhasil menjaga kualitas layanan kepada nasabah. Hal ini diwujudkan dalam nilai Service Quality Index BRI yang selalu berada di atas rata-rata nilai Service Quality Index Industri Perbankan ”

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KONSUMEN

### Target dan Kegiatan yang Direncanakan Manajemen Tahun 2017

BRI terus berusaha meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh nasabah dengan memanfaatkan keunggulan di bidang TI dan *Human Capital*. Dengan langkah tersebut, diharapkan peringkat di Industri perbankan nasional akan terus meningkat.

Kinerja BRI terus mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Peningkatan kinerja dibarengi oleh kualitas layanan yang semakin baik. Pada 2017, kinerja Perusahaan selalu tumbuh di atas rata-rata industri.

### Hasil Kinerja Pengawasan Layanan

Uraian	2015	2016	2017
Kinerja BRI	4.0477	4.0205	4.0046
Industri Perbankan	4.0303	3.9979	3.9951

### Kegiatan yang Dilakukan dan Dampak Kuantitatif atas Kegiatan Tersebut

Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait tanggung jawab produk kepada nasabah yang meliputi kesehatan dan keselamatan konsumen selama 2017 adalah sebagai berikut:

- **BRI Vision Sentralized**

BRI Vision Sentralized merupakan sebuah inovasi yang dikembangkan untuk standarisasi tampilan BRI Vision di Banking Hall Unit Kerja BRI. Aplikasi ini akan menampilkan program, promo, dan produk BRI serta informasi yang dibutuhkan oleh nasabah berupa kurs, saham, dan suku bunga yang senantiasa update setiap bulannya. Proses updating materi akan dilakukan secara terpusat di Kantor Pusat BRI sehingga tidak perlu melakukan download manual di masing-masing Unit Kerja. Dengan demikian, nasabah BRI akan mendapatkan informasi perbankan yang sama dan update di semua Unit Kerja BRI.





## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KONSUMEN

- **Aplikasi E-Form BRI**

BRI telah menghadirkan layanan *e-form* bagi nasabah BRI yang dapat diakses melalui web [eform.bri.co.id](http://eform.bri.co.id) maupun aplikasi BRI Mobile. Melalui layanan *e-form* ini proses layanan nasabah bisa menjadi lebih efisien dan lebih cepat.



- **Standarisasi Kualitas Layanan Nasabah di segala aspek**

BRI senantiasa berusaha untuk mewujudkan Standar kualitas Layanan Bank yang lebih baik di segala aspek yaitu *people*, *process*, *product*, dan standarisasi *premises* dengan mendasarkan pada *core values* BRI Khususnya *Customer Centric* yang menghasilkan *Customer Experience* yang *outstanding* sehingga nasabah akan selalu aman dan nyaman bertransaksi di BRI.

Layanan *Contact Center* (LCC) BRI telah beroperasi dengan sistem manajemen kualitas yang sesuai dengan ISO 9001:2008 yang meliputi: "The Operation of Call Center for Banking, Premium Banking, Credit Card, Telemarketing and Supporting Services". Sertifikasi dari *Guardian Independent Certification Limited* berlaku sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan 15 September 2018. Dengan sertifikasi ini BRI diharapkan dapat memberikan layanan *contact center* yang prima terhadap nasabah.

### Rincian Penyelesaian Keluhan

Jenis Keluhan	2016		2017	
	Jumlah Keluhan	Keluhan Diselesaikan	Jumlah Keluhan	Keluhan Diselesaikan
Keuangan	725.657	714.904	831.586	759.718
Ketersediaan Informasi	735.051	734.767	888.687	884.065
Non Keuangan	1.183.413	1.177.845	1.272.962	1.284.117
Kualitas Layanan	4.239	4.193	5.719	3.263
Lain-lain	0	0	0	0
Jumlah	2.648.363	2.631.709	2.998.954	2.931.163

Penambahan *site contact center* BRI yang berlokasi di Kota Semarang serta jumlah *agent contact center* BRI melalui alih daya kepada pihak ketiga merupakan wujud komitmen BRI untuk meningkatkan pelayanan terhadap nasabah. Pada Tahun 2017 jumlah *Agent Contact Center* BRI yang dikelola oleh BRI sendiri sebanyak 273 *Agent*, sedangkan yang dikelola oleh pihak ketiga sebanyak 170 *Agent*.

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KONSUMEN

### Strategi 2018

Nasabah merupakan pemangku kepentingan strategis yang ikut mempengaruhi keberlanjutan usaha BRI pada masa mendatang. Oleh karena itu BRI senantiasa mengembangkan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik bagi masyarakat perkotaan, hingga area terpencil di seluruh Indonesia. Dengan motto "Melayani Dengan Setulus Hati", BRI memberikan *service mindset* dan layanan prima yang membudaya, bukan sekedar bagaimana menjalankannya, namun juga mengapa harus dijalankan.

### Kebijakan Pelayanan Kepada Nasabah

Kebijakan pelayanan kepada nasabah di BRI juga dituangkan dalam sebuah panduan pelayanan yang disebut Budaya Layanan BRI "CAKRAM" yang berarti Cepat AKurat Ramah Aman nyaMan.

#### Cepat

- Melayani nasabah dengan segera sesuai dengan *Service Level Agreement* dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- Menanggapi keluhan nasabah sesegera mungkin sesuai dengan *Service Level Agreement* dengan *win-win solution*.

#### Akurat

- Melakukan pencatatan transaksi nasabah secara benar.
- Menyediakan informasi nasabah dengan dukungan sistem yang terintegrasi.

#### Ramah

- Menjadikan nilai kekeluargaan sebagai ciri khas BRI dalam memberikan layanan kepada nasabah melalui sentuhan Pribadi.
- Memberikan kesan positif kepada nasabah melalui sikap, tutur kata yang santun dan penampilan yang menarik.
- Berkomunikasi dengan penuh keakraban dan profesional.

#### Aman

- Memberikan rasa aman kepada nasabah dengan dukungan sistem yang handal dan mendayagunakan sumber daya manusia profesional & berintegritas tinggi.

- Menjaga kerahasiaan data nasabah.
- Melakukan pencatatan keuangan nasabah secara teratur dan benar.
- Senantiasa menjaga keselamatan dan keamanan atas segala sesuatu yang dipercayakan nasabah.

#### nyaMan

- Menyediakan sarana dan prasarana yang bersih, rapi terpelihara dan lingkungan yang menyenangkan.
- Menyediakan infrastruktur yang senantiasa berfungsi sesuai dengan kebutuhan nasabah.

### Pengelolaan Informasi Layanan

BRI menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh nasabah sesuai dengan jenis produk layanan yang diberikan, baik dalam produk simpanan, pinjaman dan jasa perbankan. Informasi secara komprehensif memuat fitur produk yang tersedia, biaya, manfaat, dan risiko yang melekat. Dengan mengidentifikasi dan mengendalikan risiko hukum yang melekat pada produk, selama tahun pelaporan, BRI tidak pernah dihadapkan pelanggaran kesalahpahaman atas produk yang dijual ke masyarakat.

Demi menjamin informasi yang andal, informasi disampaikan kepada nasabah melalui satuan kerja yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab. Selain itu, untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mengakses informasi, semua informasi terkait ragam produk dan jasa selalu tersedia bagi semua pemangku kepentingan dengan mengakses website [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id), media sosial twitter @promo\_BRI dan @kontakbri, mobile banking Perusahaan, serta menghubungi pusat layanan (contact center) 24 jam.

### Keamanan Data Nasabah

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, sesuai dengan kode etik BRI, menjaga kerahasiaan data nasabah merupakan hal yang utama. Komitmen ini telah sejalan dengan aturan regulator, diantaranya UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan pada Pasal 40 bahwa "Bank dilarang memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh Bank". Serta berdasarkan Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, disebutkan pada Pasal 31 bahwa "Pelaku usaha jasa keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga".



## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KONSUMEN

BRI menyadari kepercayaan Nasabah adalah modal utama bagi Bank untuk tumbuh. Untuk itu sejalan dengan aturan-aturan dari regulator, BRI senantiasa menerapkan kebijakan kerahasiaan data nasabah sebagai hal yang utama, hal ini telah BRI terapkan di seluruh proses operasional dan bisnis BRI, seperti:

- 1) BRI telah memiliki aturan internal yang menegaskan tentang perlindungan data nasabah (Surat Div Layanan No. B.425-LYN/KPO/05/2015, tanggal 5 Mei 2015).
- 2) BRI harus memastikan kerahasiaan data nasabah agar tidak diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk itu setiap petugas Contact Center BRI wajib menandatangani pernyataan kepatuhan pada Kode Etik BRI sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 06-KOM/BRI/12/2013, S.65-DIR/DKP/02/2013 tentang Kode Etik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- 3) Informasi data nasabah didapat pada saat nasabah akan membuka rekening, data nasabah diinput ke dalam sistem dengan menggunakan *user* khusus petugas yang berwenang serta dilengkapi dengan mekanisme *approval* dari pejabat setingkat lebih tinggi, adapun *user-user* seluruh pekerja BRI telah dilengkapi dengan *password*.
- 4) Tidak semua pekerja memiliki wewenang untuk dapat mengakses data nasabah yang tersimpan dalam database nasabah BRI. Hal ini untuk memitigasi risiko dan menjaga keamanan database nasabah di BRI.
- 5) Seluruh pekerja BRI telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersama yang di dalamnya tertuang komitmen untuk senantiasa menjaga kerahasiaan data nasabah.
- 6) Khusus kepada pekerja yang mendapat wewenang untuk mengakses data nasabah, telah ditambahkan juga perjanjian tambahan untuk mempertegas komitmen menjaga kerahasiaan data nasabah.
- 7) Seluruh PC *frontliners* dan pekerja lainnya yang mendapat wewenang untuk mengakses data nasabah telah dilengkapi dengan sistem *hardening*, yang salah satu fungsinya adalah mencegah potensi kebocoran data nasabah serta mencegah serangan yang bisa dilakukan oleh *attacker*.
- 8) Kebijakan pelayanan kepada nasabah di BRI juga dituangkan dalam sebuah panduan pelayanan yang

disebut Budaya Layanan BRI "CAKRAM" yang berarti Cepat AKurat Ramah Aman nyaMan. Pada point "AMAN", salah satu wujudnya adalah BRI senantiasa menjaga kerahasiaan data nasabah.

Selain hal-hal di atas, BRI juga berupaya memberikan edukasi untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan nasabah terhadap keamanan bertransaksi. Bentuk edukasi tersebut diantaranya dengan sosialisasi himbauan kehati-hatian dalam transaksi, serta menghimbau unit layanan, terutama lini terdepan (*frontliner*), untuk memberikan peringatan kepada nasabah terhadap setiap modus penipuan yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

### Layanan Pengaduan Nasabah

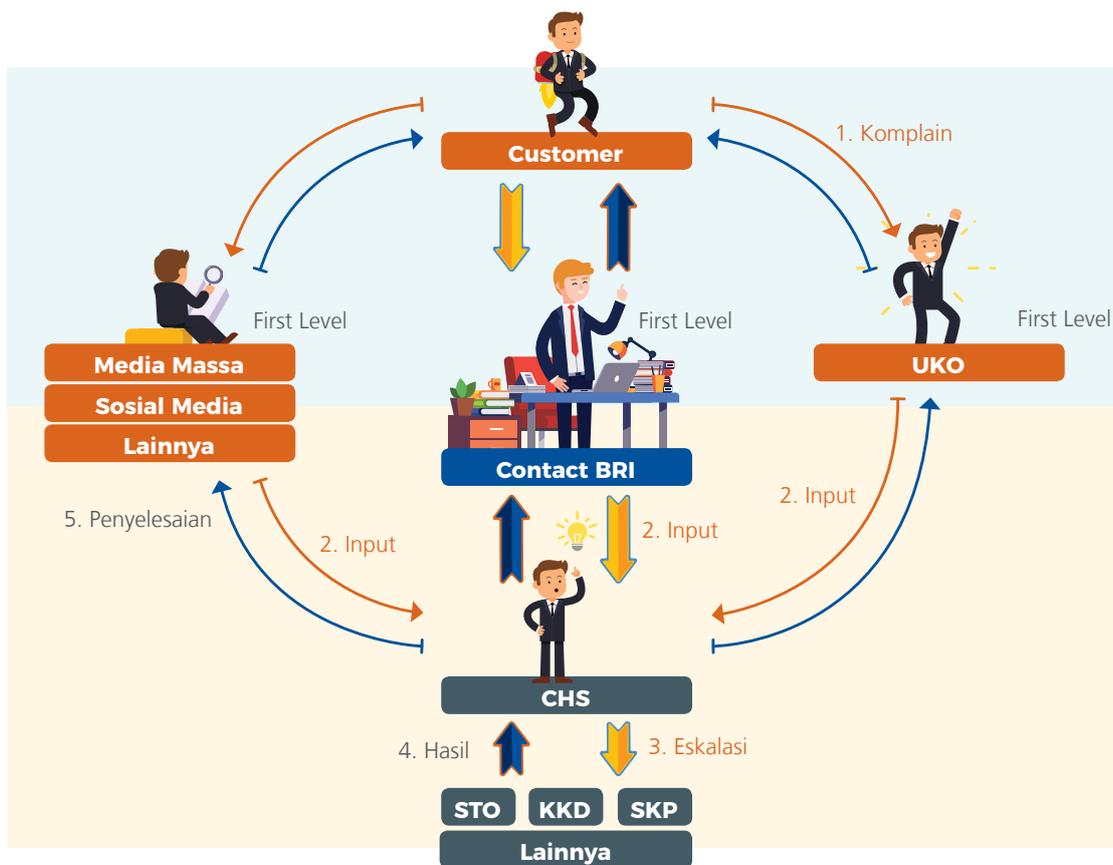
BRI memandang setiap pengaduan nasabah merupakan masukan yang penting untuk peningkatan kualitas layanan dan produk. Melalui sistem sentralisasi *complaint handling*, BRI menyediakan sarana bagi nasabah untuk menyampaikan keluhan dan menjadi rekomendasi perbaikan di masa depan. Oleh karena itu, agar setiap keluhan nasabah dapat diidentifikasi dan diketahui secara cepat, saat ini BRI menggunakan media omni-channel, yaitu sarana dan akses tempat nasabah BRI bisa mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan BRI secara lengkap dan menyampaikan keluhan melalui saluran yang tersedia yaitu:

1. Tatap muka melalui Customer Service di seluruh Unit kerja operasional BRI;
2. Telepon melalui 14017, 1500017, dan 021-57987400/Premium call melalui 021-5758899 dan 08001017017;
3. Webchat melalui website [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id);
4. Email di [callbri@bri.co.id](mailto:callbri@bri.co.id);
5. Internet banking di <https://ib.bri.co.id>;
6. Media sosial twitter di @kontakbri;
7. Media sosial facebook di [BANK BRI@BRIofficialpage](https://www.facebook.com/BANKBRIofficialpage);
8. Telegram dan SMS di 0812 12 14017.
9. Layanan Toll Free khusus Agen BRILink 0800 10 14017

Dalam menyelesaikan pengaduan nasabah, BRI menetapkan service level agreement (SLA) yaitu maksimal 20 (dua puluh) hari kerja.

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KONSUMEN

Adapun mekanisme pengaduan sebagai berikut:



### Tata Cara Pengaduan:

1	Pengaduan nasabah adalah ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial/pada nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank.
2	Nasabah agar segera melaporkan pengaduannya kepada BRI melalui sarana yang telah ditentukan sesegera mungkin apabila nasabah mengalami kondisi pada poin 1.
3	Pengaduan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis kepada: <ol style="list-style-type: none"> <li>Kantor Cabang Khusus/Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/BRI Unit/Kantor Kas/Teras BRI diterima oleh customer service;</li> <li>Sentra Layanan Prioritas dan Unit Kerja Digital Banking BRI (BRI Digital Branch) diterima oleh Priority Banking Assistant;</li> <li>Call Center BRI Nomor Telepon 14017 atau 1500017;</li> <li>E-mail BRI (melalui menu hubungi kami pada website <a href="http://www.bri.co.id">www.bri.co.id</a> dan atau <a href="mailto:callbri@bri.co.id">callbri@bri.co.id</a>);</li> <li>Melalui media sosial official bank BRI</li> </ol>



## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KONSUMEN

4	Pengaduan yang dilakukan secara lisan harus dilengkapi dengan informasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Data Nasabah;</li> <li>b. Permasalahan yang diadukan.</li> </ol>
5	Pengaduan yang dilakukan yang secara tertulis yang disampaikan di UKO/melalui fax harus dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir pengaduan nasabah yang berisi data nasabah dan permasalahan yang diadukan;</li> <li>b. Fotocopy kartu identitas nasabah (KTP);</li> <li>c. Bukti transaksi keuangan di BRI yang berkaitan dengan permasalahan yang diadukan/dokumen pendukung lainnya yang terkait pengaduan.</li> </ol>
6	Pengaduan melalui Email harus dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Data nasabah dan permasalahan yang diadukan;</li> <li>b. Scan file/data capture bukti transaksi keuangan di BRI yang berkaitan dengan pengaduan yang diajukan;</li> </ol>
7	Batas waktu penyelesaian pengaduan nasabah yang disampaikan secara lisan adalah 2 (dua) hari kerja sedangkan penyelesaian pengaduan nasabah yang disampaikan secara tertulis adalah 20 (dua puluh) hari kerja.
8	Dalam hal penyelesaian pengaduan yang terkait dengan kerugian finansial belum memuaskan nasabah maka dapat diselesaikan dengan difasilitasi melalui mediasi perbankan.

### Survey Kepuasan Pelanggan 2017

Perusahaan secara periodik melakukan survey untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabah. Hasil survey umumnya digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas layanan kepada nasabah. Untuk memperoleh hasil survey yang akurat serta mampu menggambarkan kondisi seungguhnya, BRI menggunakan 2 (dua) metode survey, yaitu:

1. Survei internal  
Survey internal adalah survey yang dilakukan oleh fungsi assurance di Kantor Pusat bekerja sama dengan fungsi assurance di Kantor Wilayah BRI Selindo.
2. Survey eksternal  
Survey yang dilakukan oleh lembaga independen dengan menggunakan variable pembanding, yaitu layanan yang dilakukan oleh kompetitor di industri perbankan.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh lembaga riset Roy Morgan, tingkat kepuasan nasabah Bank BRI pada Q3 Tahun 2017 mencapai 94,1% atau secara YoY naik 3.3%. Menurut lembaga tersebut juga nilai *passing grade* tingkat kepuasan nasabah untuk industri perbankan adalah 90,0% sehingga Bank BRI telah berhasil mencapai nilai *passing grade*. Atas hasil survey tersebut, BRI menyusun langkah-langkah improvement agar dapat memberikan kualitas layanan terbaik bagi para nasabah sehingga mendapatkan pengakuan dari lembaga yang kredibel. Pada Tahun 2017 BRI telah memperoleh penghargaan di bidang kualitas layanan diantaranya sebagai berikut :

1. Top Brand Award Kategori Call Center
2. Bronze Champion of Indonesia WOW Service Excellence Award Category Conventional Bank (BUKU IV)
3. Predikat "Good" by CARRE Kategori Regular Banking
4. Contact Center Service Excellence Index 2017 Peringkat 5 Kategori Priority Banking
5. MRI Peringkat 4 Kategori Performa E-Channel



Memasuki era teknologi digital, salah satu terobosan yang telah dilakukan Bank BRI adalah dengan meluncurkan satelit sendiri, yang diberi nama BRISat, untuk menunjang operasional layanan perbankan Bank pada 2016. Menjadikan Bank BRI satu-satunya Bank di dunia yang memiliki dan mengoperasikan satelit sendiri.



---

# LAPORAN KEUANGAN 2017

---

Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisa & Pembahasan Manajemen

**PT Bank Rakyat Indonesia  
(Persero) Tbk dan Entitas Anaknya**

Laporan keuangan konsolidasian  
Tanggal 31 Desember 2017  
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
berserta laporan auditor independen



# PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

## KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46, Gedung Bina Indonesia Jakarta 10210  
 Telepon: (021) 2000100, 2000104, 2010000, 2010001, 2010002  
 Faksimil: (021) 2000117, 2000118, 2000119  
 Email: (021) 2000100, 2000104

### SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2017  
DAN UNTUK TAIJUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Nama         | : Sutrisno                                      |
| Alamat Kantor   | : Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210 |
| Alamat Domisili | : Jl. Satelese No. 11 Menteng, Jakarta Pusat    |
| Nomor Telepon   | : 021 - 371 1705                                |
| Jabatan         | : Direktur Utama                                |
| 2. Nama         | : Hana Koesnabowo                               |
| Alamat Kantor   | : Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210 |
| Alamat Domisili | : Jl. MPR III / 19 Cilandak, Jakarta Selatan    |
| Nomor Telepon   | : 021 - 371 1751                                |
| Jabatan         | : Direktur                                      |

Mengatakan bahwa:

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak;
- Laporan keuangan konsolidasian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak telah mengungkapkan semua aspek yang benar;  
 b. Laporan keuangan konsolidasian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak.

Dibaca persama di Ruang Rapat Direksi

Jakarta, 28 Januari 2018

Atas nama dan mewakili Direksi

Sutrisno  
Direktur Utama

Hana Koesnabowo  
Direktur

Anggity, Profiteabilitas, Prad, Inovation, Customer Choice



Ikhtisar Kinerja Utama  
 Laporan Manajemen  
 Profil Perusahaan  
 Analisa & Pembahasan Manajemen

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA  
 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
 TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
 PADA TANGGAL TERSEBUT  
 BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**Daftar Isi**

	Halaman
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian .....	771 - 772
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian .....	775 - 777
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian .....	778 - 779
Laporan Arus Kas Konsolidasian .....	780 - 782
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian .....	783 - 993
Laporan Posisi Keuangan - Entitas Induk .....	994 - 996
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain - Entitas Induk .....	997 - 998
Laporan Perubahan Ekuitas - Entitas Induk .....	999 - 1000
Laporan Arus Kas - Entitas Induk .....	1001 - 1002
Catatan atas Informasi Keuangan - Entitas Induk .....	1003

\*\*\*\*\*



## Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC/5561/PSS/2018

### Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anaknya berlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketertujuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang segala angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melaksanakan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengungkapan atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan keajajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengungkapan atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen



## Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPO-0561/PIS/2018 (lanjutan)

### Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian berlabel menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### Mahasiswa lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk memformulasikan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu (daftar) kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas yang diuruskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dan dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas secara keseluruhan.

Purwandono, Sangkoro & Surja

Dani Setiadi Handaja, CPA  
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1008

24 Januari 2018



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
<b>ASET</b>			
Kas	2a,2c,3	24.797.782	25.212.024
Giro pada Bank Indonesia	2a,2c,2f,4	58.155.479	55.635.946
Giro pada Bank lain	2a,2c,2d,2e, 2f,5,44	5.925.684	11.022.715
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	2a,2c,2d,2e, 2g,6,44	55.105.687	78.142.754
Efek-efek	2a,2c,2d, 2e,2h,7,44	186.919.436	132.064.102
Cadangan kerugian penurunan nilai		(758)	(758)
		<u>186.918.678</u>	<u>132.063.344</u>
Tagihan Wesel Ekspor	2c,2d,2e,2i, 8,44	5.623.717	9.345.472
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	2c,2d,2h, 9,44	3.317.840	3.318.434
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	2c,2d,2u, 10,44	18.011.026	1.557.370
Tagihan Derivatif	2c,2e,2ak, 11	145.928	91.657
Kredit yang Diberikan	2c,2d,2e, 2j,12,44	718.982.668	643.470.975
Cadangan kerugian penurunan nilai		(29.423.380)	(22.184.296)
		<u>689.559.288</u>	<u>621.286.679</u>
Piutang dan Pembiayaan Syariah	2c,2d,2e, 2k,13,44	17.864.869	17.748.943
Cadangan kerugian penurunan nilai		(577.257)	(492.156)
		<u>17.287.612</u>	<u>17.256.787</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2017**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
<b>ASET (lanjutan)</b>			
Piutang Sewa Pembiayaan	2c,2e,2l, 14	2.488.983	2.200.300
Cadangan kerugian penurunan nilai		(103.500)	(130.000)
		<u>2.385.483</u>	<u>2.070.300</u>
Tagihan Akseptasi	2c,2d,2e, 2m,15,44	5.693.425	5.692.583
Penyertaan Saham	2c, 2d, 2e, 2n,16, 44	73.821	2.439
Aset Tetap	2d, 2o,2p, 17,44		
Biaya perolehan		33.972.363	32.262.349
Akumulasi penyusutan		(9.226.057)	(7.747.290)
Nilai buku - neto		<u>24.746.306</u>	<u>24.515.059</u>
Aset Pajak Tangguhan - neto	2al,38c	3.270.231	2.520.930
Aset Lain-lain - neto	2c,2e,2p, 2q,2r,18	25.230.455	13.909.933
<b>TOTAL ASET</b>		<u><b>1.126.248.442</b></u>	<u><b>1.003.644.426</b></u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2017**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
Liabilitas Segera	2c,2s,19	6.584.201	5.410.313
Simpanan Nasabah	2c,2d,2t,44		
Giro	20	145.529.168	141.419.020
Giro <i>Wadiah</i>		1.766.901	1.127.843
Giro <i>Mudharabah</i>		139.535	-
Tabungan	21	343.420.737	298.110.406
Tabungan <i>Wadiah</i>		4.749.652	4.176.761
Tabungan <i>Mudharabah</i>		1.270.484	983.121
Deposito Berjangka	22	326.417.937	293.029.378
Deposito Berjangka <i>Mudharabah</i>		18.362.036	15.679.845
Total Simpanan Nasabah		841.656.450	754.526.374
Simpanan dari Bank lain dan Lembaga Keuangan lainnya	2c,2d,2t,23,44	5.593.367	2.229.538
Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	2c,2d,2u,7,24,44	12.136.684	7.302.398
Liabilitas Derivatif	2c,2ak,11	200.858	347.217
Liabilitas Akseptasi	2c,2d,2m,15,44	5.693.425	5.692.583
Utang Pajak	2al,38a	564.798	942.401
Surat Berharga yang Diterbitkan	2c,2v,25	30.619.658	24.800.781
Pinjaman yang Diterima	2c,2d,2w,26,44	29.403.009	35.008.170
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	2d,2e,2ao,27,44	2.134	895
Liabilitas Imbalan Kerja	2d,2af,28,42,44	12.174.258	9.451.203
Liabilitas Lain-lain	2c,2z,2ae,29,45b	13.285.656	10.111.453
Pinjaman dan Surat Berharga Subordinasi	2c,2x,30	986.450	1.008.510
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>958.900.948</b>	<b>856.831.836</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2017**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)</b>			
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham - nilai nominal Rp50 (Rupiah penuh) per lembar saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan Rp250 (Rupiah penuh) per lembar saham pada tanggal 31 Desember 2016			
Modal dasar - 300.000.000.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 299.999.999.999 lembar saham Seri B) pada tanggal 31 Desember 2017 dan 60.000.000.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 59.999.999.999 lembar saham Seri B) pada tanggal 31 Desember 2016			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 123.345.810.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 123.345.809.999 lembar saham Seri B) pada tanggal 31 Desember 2017 dan 24.669.162.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 24.669.161.999 lembar saham Seri B) pada tanggal 31 Desember 2016	1,31a 31b	6.167.291 2.773.858	6.167.291 2.773.858
Tambahan modal disetor saham	2o,17	13.824.692	13.824.692
Surplus revaluasi aset tetap - bersih			
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2aj,31c	54.199	23.490
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual - bersih	2h	1.813.625	75.618
Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih	2af	706.403	665.870
Modal saham diperoleh kembali (saham treasuri)	1d	(2.418.948)	(2.418.948)
Saldo laba	31d,31e		
Telah ditentukan penggunaannya		3.022.685	3.022.685
Belum ditentukan penggunaannya		140.805.012	122.286.786
<b>Total Saldo Laba</b>		<b>143.827.697</b>	<b>125.309.471</b>
Total Ekuitas yang Dapat Distribusikan Kepada Entitas Induk		166.748.817	146.421.342
Kepentingan non-pengendali	2b	598.677	391.248
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>167.347.494</b>	<b>146.812.590</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>1.126.248.442</b>	<b>1.003.644.426</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2017	2016 <sup>1)</sup>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Bunga dan Syariah			
Pendapatan bunga	2k,2aa,	100.080.250	91.358.338
Pendapatan syariah	2ac,32	2.819.042	2.636.677
Total Pendapatan Bunga dan Syariah		102.899.292	93.995.015
Beban Bunga dan Syariah			
Beban bunga	2aa,2ac,	(28.652.214)	(27.541.214)
Beban syariah	33	(1.241.591)	(1.035.502)
Total Beban Bunga dan Syariah		(29.893.805)	(28.576.716)
Pendapatan Bunga dan Syariah - neto		73.005.487	65.418.299
Pendapatan premi	2ad	3.788.965	3.038.864
Beban klaim	2ad	(3.403.551)	(2.760.154)
Pendapatan premi - neto		385.414	278.710
Pendapatan Operasional lainnya			
Provisi dan komisi lainnya	2ab	10.442.240	9.222.558
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan		5.050.713	4.496.825
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - neto	2h,7,9	784.667	447.580
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek	2h,7	50.915	31.025
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	2ai,2aj	183.974	-
Lain-lain		2.578.558	2.800.801
Total Pendapatan Operasional lainnya		19.091.067	16.998.789
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	2e,34	(16.994.115)	(13.700.241)
(Beban) pembalikan penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi - neto	2ao,27b	(1.239)	347
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	2p	(239.132)	(90.757)

<sup>1)</sup> Setelah reklasifikasi (Catatan 50)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2017	2016 <sup>1)</sup>
Beban Operasional lainnya			
Tenaga kerja dan tunjangan	2d,2af,35,42,44	(20.352.004)	(18.485.014)
Umum dan administrasi	2o,36	(13.146.944)	(11.975.745)
Kerugian transaksi mata uang asing - neto	2ai,2aj	-	(273.832)
Lain-lain		(4.942.700)	(4.206.014)
Total Beban Operasional lainnya		(38.441.648)	(34.940.605)
<b>LABA OPERASIONAL</b>		<b>36.805.834</b>	<b>33.964.542</b>
<b>PENDAPATAN NON OPERASIONAL - NETO</b>	37	216.323	9.228
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK</b>		<b>37.022.157</b>	<b>33.973.770</b>
<b>BEBAN PAJAK</b>	2al, 38b, 38c	(7.977.823)	(7.745.779)
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		<b>29.044.334</b>	<b>26.227.991</b>
<b>Penghasilan komprehensif lainnya:</b>			
<b>Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>			
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		53.985	165.615
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		(13.496)	(532.239)
Surplus revaluasi aset tetap	17	-	14.315.527
<b>Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>			
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2aj	30.709	(25.579)
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual	2h	2.289.836	1.641.313
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi		(528.353)	(412.621)
<b>Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak</b>		<b>1.832.681</b>	<b>15.152.016</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>30.877.015</b>	<b>41.380.007</b>

<sup>1)</sup> Setelah reklasifikasi (Catatan 50)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2017	2016 <sup>1)</sup>
<b>LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>			
Pemilik entitas induk		28.996.535	26.195.772
Kepentingan non-pengendali		47.799	32.219
<b>TOTAL</b>		<b>29.044.334</b>	<b>26.227.991</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>			
Pemilik entitas induk		30.805.784	41.340.376
Kepentingan non-pengendali		71.231	39.631
<b>TOTAL</b>		<b>30.877.015</b>	<b>41.380.007</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam Rupiah penuh)</b>	2ah,49	<b>237,22</b>	<b>214,30</b>

<sup>1)</sup> Setelah reklasifikasi (Catatan 50)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahkan Modal Disetor/ Agio Saham	Selisih Kurs Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	Keuntungan yang Direalisasi atas Efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang Tersedia untuk Dijual - Setelah Pajak Tanggihan	Keuntungan Perolehan Kembali Program Imbalan Pajak Setelah Pajak Tanggihan	Saham Treasuri	Surplus Revaluasi Aset Tetap - Setelah Pajak Terkait	Saldo Laba		Total Ekuitas Entitas Induk	Kepentingan Non Pengendali	Total Ekuitas
									Telah Ditetapkan Penggunaannya	Belum Ditetapkan Penggunaannya			
<b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2015</b>		6.167.291	2.773.858	48.069	(1.145.471)	541.468	(2.206.375)	-	18.115.741	88.617.280	112.832.861	294.318	113.127.179
Labanya berjalan		-	-	-	-	-	-	-	-	26.195.772	26.195.772	32.219	26.227.991
Penghasilan komprehensif lainnya	2h,2a,17	-	-	(25.579)	1.221.089	124.402	-	13.824.692	-	-	15.144.604	7.412	15.152.016
<b>Total penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan</b>		-	-	(25.579)	1.221.089	124.402	-	13.824.692	-	26.195.772	41.340.376	39.631	41.380.007
Pembagian laba Dividen	31d	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.619.322)	(7.619.322)	(1.994)	(7.621.316)
Tambahan modal disetor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.698	63.698
Reklasifikasi cadangan tujuan	31e	-	-	-	-	-	-	-	(15.093.056)	15.093.056	-	-	-
Perubahan kepentingan non pengendali entitas anak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.405)	(4.405)
Modal saham diperoleh kembali (saham treasuri)	1d	-	-	-	-	-	(132.573)	-	-	(132.573)	-	-	(132.573)
<b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2016</b>		6.167.291	2.773.858	23.490	75.618	665.870	(2.418.948)	13.824.692	3.022.685	122.286.786	146.421.342	391.248	146.812.590

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambah Modal Disetor/ Agio Saham	Selisih Kurs karena Perubahan Nilai Laju Pertukaran dalam Mata Uang Asing	Kerugian yang Belum Direalisasi atas Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Penerbitan yang Ditujai - Setelah Pajak Tanggihan	Keuntungan Pengukuran Kembali Pajak - Imbuan Pajak - Setelah Pajak Tanggihan	Saham Treasuri	Surplus Realisasi Aset Tetap - Setelah Pajak Terkait	Saldo Laba		Total Ekuitas Pemilik Entitas Induk	Kepentingan Non Pengendal	Total Ekuitas
								Telah Ditetapkan Penggunaannya	Belum Ditetapkan Penggunaannya			
<b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2016</b>	<b>6.167.281</b>	<b>2.773.858</b>	<b>23.480</b>	<b>75.618</b>	<b>685.870</b>	<b>(2.418.948)</b>	<b>13.824.692</b>	<b>3.022.685</b>	<b>122.286.786</b>	<b>146.421.342</b>	<b>391.248</b>	<b>146.812.590</b>
Labanya tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	28.996.535	28.996.535	47.799	29.044.334
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	30.709	1.738.007	40.533	-	-	-	-	1.809.249	23.432	1.832.681
Total penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan	-	-	30.709	1.738.007	40.533	-	-	-	28.996.535	30.805.784	71.231	30.877.015
Pembagian laba Dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.478.309)	(10.478.309)	(5.488)	(10.483.777)
Tambahan modal disetor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.613	133.613
Perubahan kepertingian non pengendali pada entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.053	8.053
<b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2017</b>	<b>6.167.281</b>	<b>2.773.858</b>	<b>54.199</b>	<b>1.818.625</b>	<b>706.403</b>	<b>(2.418.948)</b>	<b>13.824.692</b>	<b>3.022.685</b>	<b>140.805.612</b>	<b>166.748.817</b>	<b>598.677</b>	<b>167.347.494</b>

2h.2aj

31d

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2017	2016
<b>ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI</b>			
Pendapatan yang diterima			
Penerimaan bunga dan investasi		100.171.404	91.595.203
Pendapatan syariah		2.819.042	2.636.677
Pendapatan premi		3.788.965	2.474.579
Beban yang dibayar			
Beban bunga		(28.319.909)	(26.038.559)
Beban syariah		(1.241.591)	(1.035.502)
Beban klaim		(3.403.551)	(2.410.192)
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan		5.050.713	4.511.717
Pendapatan operasional lainnya		13.745.727	9.333.633
Beban operasional lainnya		(32.263.843)	(35.096.972)
Pendapatan non operasional - neto		216.325	479
Pembayaran atas pajak penghasilan badan		(9.037.947)	(6.182.996)
<b>Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi</b>		<b>51.525.335</b>	<b>39.788.067</b>
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:			
Penurunan (kenaikan) aset operasi:			
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		(339.187)	100.000
Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi		(702.255)	254.367
Tagihan wesel ekspor		3.721.755	(2.064.589)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		(16.453.656)	(712.245)
Kredit yang diberikan		(85.060.312)	(87.463.887)
Piutang dan pembiayaan syariah		(258.240)	(1.254.192)
Piutang sewa pembiayaan		(305.667)	(2.214.946)
Aset lain-lain		(11.728.077)	(662.511)
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:			
Liabilitas segera		1.153.159	264.342
Simpanan:			
Giro		4.110.148	27.989.677
Giro <i>Wadiah</i>		639.058	190.098
Giro <i>Mudharabah</i>		139.535	-
Tabungan		45.310.331	30.051.541
Tabungan <i>Wadiah</i>		572.891	460.832
Tabungan <i>Mudharabah</i>		287.363	286.923
Deposito berjangka		33.388.559	25.144.974
Deposito berjangka <i>Mudharabah</i>		2.682.191	1.406.950
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya		3.363.829	(8.935.535)
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali		4.834.286	(4.075.560)
Liabilitas lain-lain		2.418.063	3.216.527
<b>Kas Neto yang Diperoleh dari Kegiatan Operasi</b>		<b>39.299.109</b>	<b>21.770.833</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2017	2016
<b>ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI</b>			
Penerimaan dividen	16	40	235
Penambahan penyertaan saham		(71.327)	-
Perolehan aset tetap	17	(2.006.347)	(3.653.072)
Penurunan (kenaikan) efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo		(28.918.362)	328.455
<b>Kas Neto yang Digunakan untuk Kegiatan Investasi</b>		<b>(30.995.996)</b>	<b>(3.324.382)</b>
<b>ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN</b>			
Pembayaran pinjaman yang diterima		(5.663.258)	(647.350)
Pembelian kembali saham beredar (saham treasury)	1d	-	(132.573)
Pembagian laba untuk dividen		(10.483.777)	(7.621.316)
Penerimaan (pembayaran) pinjaman dan surat berharga subordinasi		(22.060)	952.042
Penerimaan atas surat berharga yang diterbitkan		10.242.963	15.510.825
Pembayaran atas surat berharga yang jatuh tempo	25	(4.921.000)	(980.000)
<b>Kas Neto yang (Digunakan untuk) Diperoleh dari Kegiatan Pendanaan</b>		<b>(10.847.132)</b>	<b>7.081.628</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS</b>		<b>(2.544.019)</b>	<b>25.528.079</b>
<b>PENAMBAHAN KAS DARI AKUISISI BRI FINANCE</b>		<b>-</b>	<b>36.764</b>
<b>PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING</b>		<b>(427)</b>	<b>1.279</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>		<b>188.954.879</b>	<b>163.388.757</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>		<b>186.410.433</b>	<b>188.954.879</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2017	2016
Kas dan Setara Kas akhir tahun terdiri dari:	2a		
Kas	3	24.797.782	25.212.024
Giro pada Bank Indonesia	4	58.155.479	55.635.946
Giro pada bank lain	5	5.925.684	11.022.715
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	6	54.766.500	78.142.754
Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	7	42.764.988	18.941.440
<b>Total Kas dan Setara Kas</b>		<b>186.410.433</b>	<b>188.954.879</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## 1. UMUM

### a. Pendirian

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "BRI") didirikan dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 18 Desember 1968 berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1968. Pada tanggal 29 April 1992, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") No. 21 Tahun 1992, bentuk badan hukum BRI diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pengalihan BRI menjadi Persero didokumentasikan dengan akta No. 133 tanggal 31 Juli 1992 Notaris Muhani Salim, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73, Tambahan No. 3A tanggal 11 September 1992. Anggaran Dasar BRI kemudian diubah dengan akta No. 7 tanggal 4 September 1998 Notaris Imas Fatimah, S.H., pasal 2 tentang "Jangka Waktu Berdirinya Perseroan" dan pasal 3 tentang "Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha" untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang "Perseroan Terbatas" dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-24930.HT.01.04.TH.98 tanggal 13 November 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86, Tambahan No. 7216 tanggal 26 Oktober 1999 dan akta No. 7 tanggal 3 Oktober 2003 Notaris Imas Fatimah, S.H., antara lain tentang status perusahaan dan penyesuaian dengan Undang-Undang Pasar Modal dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-23726 HT.01.04.TH.2003 tanggal 6 Oktober 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88, Tambahan No. 11053 tanggal 4 November 2003.

Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/117/DPwB2/PWPwB24 tanggal 15 Oktober 2003, tentang "SK Penunjukan BRI sebagai bank umum devisa", BRI telah ditetapkan sebagai bank devisa melalui Surat Dewan Moneter No. SEKR/BRI/328 tanggal 25 September 1956.

Berdasarkan akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 Notaris Fathiah Helmi, S.H., telah dilakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar BRI, antara lain untuk penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang "Perseroan Terbatas" dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") (fungsinya sejak 1 Januari 2013 dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")), No. IX.J.I tentang "Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik", yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-48353.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, Tambahan No. 23079 tanggal 25 Agustus 2009.

Selanjutnya, Anggaran Dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir didokumentasikan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi S.H., No. 54 tanggal 27 Oktober 2017, mengenai penyesuaian Anggaran Dasar Perusahaan dalam rangka pemecahan nilai nominal saham (stock split) dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0187521 tanggal 3 November 2017.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BRI, ruang lingkup kegiatan BRI adalah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas guna meningkatkan nilai Perseroan.

BRI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham mayoritas.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. UMUM (lanjutan)**

**b. Program Rekapitalisasi**

Sebagai realisasi dari Program Rekapitalisasi Bank Umum sesuai Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Bank Pemerintah, BRI telah menerima seluruh jumlah rekapitalisasi sebesar nominal Rp29.149.000 dalam bentuk Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diterbitkan dalam 2 (dua) tahap yaitu sebesar nominal Rp20.404.300 pada tanggal 25 Juli 2000 dan Rp8.744.700 pada tanggal 31 Oktober 2000 (Catatan 9).

Lebih lanjut, seperti yang disebutkan dalam Kontrak Manajemen tanggal 28 Februari 2001 antara Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah melalui Menteri Keuangan dan BRI, Pemerintah telah menetapkan bahwa total kebutuhan rekapitalisasi BRI untuk mencapai Liabilitas Penyediaan Modal Minimum 4% adalah sebesar Rp29.063.531. Oleh karena itu, BRI telah mengembalikan kelebihan total rekapitalisasi sebesar Rp85.469 dalam bentuk Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah kepada Negara Republik Indonesia pada tanggal 5 November 2001.

Pada tanggal 30 September 2003, Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan No. 427/KMK.02/2003 tanggal 30 September 2003 tentang besarnya nilai akhir dan pelaksanaan hak-hak Pemerintah yang timbul sebagai akibat penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal BRI dalam rangka program rekapitalisasi bank umum. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Menteri Keuangan menetapkan bahwa nilai akhir kebutuhan rekapitalisasi BRI adalah sebesar Rp29.063.531.

**c. Penawaran Umum Saham Perdana dan Pemecahan Saham (Stock Split)**

Dalam rangka penawaran umum saham perdana BRI, berdasarkan pernyataan pendaftaran tanggal 31 Oktober 2003, Pemerintah, melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menyetujui untuk melakukan penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering ("IPO")) sebesar 3.811.765.000 lembar saham biasa BRI atas nama seri B, yang terdiri dari 2.047.060.000 lembar milik Negara Republik Indonesia (divestasi) dan 1.764.705.000 lembar atas nama Seri B baru, serta bersamaan dengan opsi pemesanan lebih dan opsi penjatahan lebih.

Penawaran umum saham perdana meliputi penawaran kepada masyarakat internasional (Peraturan 144A dari Perundang-undangan Sekuritas dan peraturan "S") dan penawaran kepada masyarakat Indonesia. BRI menyerahkan pendaftarannya kepada Bapepam-LK dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No. S-2646/PM/2003 tanggal 31 Oktober 2003.

Penawaran umum saham perdana BRI meliputi 3.811.765.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per lembar saham dengan harga jual Rp875 (Rupiah penuh) per lembar saham. Selanjutnya, opsi pemesanan lebih sejumlah 381.176.000 lembar saham dan opsi penjatahan lebih sejumlah 571.764.000 lembar saham masing-masing dengan harga Rp875 (Rupiah penuh) setiap lembar saham telah dilaksanakan masing-masing pada tanggal 10 November 2003 dan 3 Desember 2003. Setelah IPO BRI dan opsi pemesanan lebih dan opsi penjatahan lebih dilaksanakan oleh Penjamin Pelaksana Emisi, Negara Republik Indonesia memiliki 59,50% saham di BRI. Saham yang ditawarkan tersebut mulai diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 10 November 2003 dan pada saat yang bersamaan seluruh saham BRI juga telah dicatatkan (Catatan 31b).



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**c. Penawaran Umum Saham Perdana dan Pemecahan Saham (Stock Split) (lanjutan)**

Berdasarkan akta No. 38 tanggal 24 November 2010, Notaris Fathiah Helmi, S.H. dilakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp500 (Rupiah penuh) per saham menjadi Rp250 (Rupiah penuh) per saham. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya No. AHU.AH.01.10-33481 tanggal 29 Desember 2010. Pemecahan Saham dilakukan pada tahun 2011 dan BRI menjadwalkan bahwa akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama atau Rp500 (Rupiah penuh) per lembar saham di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi adalah tanggal 10 Januari 2011 dan tanggal dimulainya perdagangan sah dengan nilai nominal baru atau Rp250 (Rupiah penuh) per lembar saham adalah tanggal 11 Januari 2011.

Berdasarkan akta No. 54 tanggal 27 Oktober 2017, Notaris Fathiah Helmi, S.H. dilakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp250 (Rupiah penuh) per saham menjadi Rp50 (Rupiah penuh) per saham. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya No. AHU.AH.01.03-0187521 tanggal 3 November 2017. Pemecahan Saham dilakukan pada tahun 2017 dan BRI menjadwalkan bahwa akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama atau Rp250 (Rupiah penuh) per lembar saham di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi adalah tanggal 9 November 2017 dan tanggal dimulainya perdagangan sah dengan nilai nominal baru atau Rp50 (Rupiah penuh) per lembar saham adalah tanggal 10 November 2017.

**d. Modal saham diperoleh kembali (saham treasury)**

BRI melalui surat No. R.224-DIR/DIS/09/2015 tanggal 25 September 2015 mengajukan permohonan persetujuan pembelian kembali saham BRI kepada OJK sebanyak-banyaknya Rp5.000.000, dan telah disetujui oleh OJK melalui Surat No. S-101/PB.31/2015 tanggal 6 Oktober 2015. Selanjutnya BRI menyampaikan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.500.000 melalui surat No. B.696-DIR/SKP/10/2015 tanggal 9 Oktober 2015. Pembelian kembali tersebut dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan, antara tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016. Per tanggal 31 Desember 2015 dan 12 Januari 2016 BRI telah melakukan pembelian saham masing-masing sebanyak 210.118.600 dan 221.718.000 lembar saham (nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per lembar saham) dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp2.286.375 dan Rp2.418.948 (Catatan 31a).

**e. Struktur dan Manajemen**

Kantor pusat BRI berlokasi di Gedung BRI I, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, BRI memiliki jaringan unit kerja dengan rincian sebagai berikut (tidak diaudit):

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Kantor Wilayah	19	19
Kantor Inspeksi Pusat	1	1
Kantor Inspeksi Wilayah	19	19
Kantor Cabang Dalam Negeri	462	462
Kantor Cabang Khusus	1	1

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**e. Struktur dan Manajemen (lanjutan)**

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, BRI memiliki jaringan unit kerja dengan rincian sebagai berikut (tidak diaudit) (lanjutan):

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Kantor Cabang/Kantor Perwakilan di Luar Negeri	5	4
Kantor Cabang Pembantu (KCP)	610	609
Kantor Kas	992	984
BRI Unit	5.382	5.380
Teras dan Teras Keliling	3.171	3.180
Teras Kapal	3	3

Pada tanggal 31 Desember 2017, BRI memiliki 3 (tiga) Kantor Cabang di luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands, Singapura dan Timor Leste, 2 (dua) Kantor Perwakilan di luar negeri yang berlokasi di New York dan Hong Kong, serta 5 (lima) entitas anak yaitu PT Bank BRISyariah, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, BRI Remittance Co. Ltd. Hong Kong, PT Asuransi BRI Life dan PT BRI Multifinance Indonesia.

Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2016 BRI memiliki 2 (dua) Kantor Cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands dan Singapura, 2 (dua) Kantor Perwakilan yang berlokasi di New York dan Hong Kong, serta 5 (lima) entitas anak yaitu PT Bank BRISyariah, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, BRI Remittance Co. Ltd. Hong Kong, PT Asuransi BRI Life (dahulu PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera), dan PT BRI Multifinance Indonesia.

Berdasarkan kebijakan akuntansi BRI, manajemen kunci BRI cakupannya adalah anggota komisaris, direksi, *senior executive vice president*, komite audit, komite remunerasi, kepala divisi, kepala satuan kerja audit intern dan inspektur, pemimpin wilayah, pemimpin cabang khusus dan pemimpin cabang. Total karyawan BRI adalah 60.683 dan 58.885 orang (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Susunan Dewan Komisaris BRI pada tanggal 31 Desember 2017 ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa BRI yang diaktakan dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 55 tanggal 27 Oktober 2017, sedangkan susunan Dewan Komisaris BRI pada tanggal 31 Desember 2016 ditetapkan berdasarkan RUPS Tahunan BRI tanggal 23 Maret 2016 yang diaktakan dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 1 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Komisaris Utama/Independen :	Andrinof A. Chaniago	Mustafa Abubakar
Wakil Komisaris Utama :	Gatot Trihargo	Gatot Trihargo
Komisaris Independen :	Mahmud	Ahmad Fuad
Komisaris Independen :	A. Fuad Rahmany	A. Fuad Rahmany
Komisaris Independen :	A. Sonny Keraf	A. Sonny Keraf
Komisaris Independen :	Rofikoh Rokhim <sup>*)</sup>	Adhyaksa Dault
Komisaris :	Vincentius Sonny Loho	Vincentius Sonny Loho
Komisaris :	Jeffry J. Wurangian	Jeffry J. Wurangian
Komisaris :	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Mahmud

\*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**e. Struktur dan Manajemen (lanjutan)**

Susunan Direksi BRI pada tanggal 31 Desember 2017 ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa BRI yang diaktakan dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 55 tanggal 27 Oktober 2017, sedangkan susunan Direksi BRI pada tanggal 31 Desember 2016 ditetapkan berdasarkan RUPS Tahunan BRI tanggal 23 Maret 2016 yang diaktakan dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 1 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Direktur Utama	Suprajarto	Asmawi Syam
Wakil Direktur Utama	- <sup>*)</sup>	Sunarso
Direktur	Haru Koesmahargyo	Haru Koesmahargyo
Direktur	Susy Liestiowaty	Susy Liestiowaty
Direktur	Kuswiyoto	Kuswiyoto
Direktur	Donsuwan Simatupang	Donsuwan Simatupang
Direktur	Mohammad Irfan	Mohammad Irfan
Direktur	Sis Apik Wijayanto	Sis Apik Wijayanto
Direktur	Priyastomo	Priyastomo
Direktur	Indra Utoyo	Zulhelfi Abidin
Direktur	R. Sophia Alizsa <sup>**)</sup>	Randi Anto
Direktur	Handayani <sup>**)</sup>	-

<sup>\*)</sup> Jabatan wakil direktur utama ditiadakan (perubahan nomenklatur jabatan) sesuai dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No.55

<sup>\*\*)</sup> Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Susunan Komite Audit BRI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kep.1101-DIR/KHC/12/2017 tanggal 20 Desember 2017 dan Surat Keputusan Komisaris No.R.58-KOM/11/2017 tanggal 15 November 2017, sedangkan tanggal 31 Desember 2016 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kep. 1059-DIR/KPS/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 dan Surat Keputusan Komisaris No. R.57-KOM/11/2016 tanggal 22 November 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Ketua	A. Fuad Rahmany	A. Fuad Rahmany
Anggota	A. Sonny Keraf	A. Sonny Keraf
Anggota	Rofikoh Rokhim <sup>*)</sup>	Adhyaksa Dault
Anggota	Pamuji Gesang Raharjo	Pamuji Gesang Raharjo
Anggota	I Gde Yadnya Kusuma	I Gde Yadnya Kusuma
Anggota	Sunuaji Noor Widiyanto	Sunuaji Noor Widiyanto

<sup>\*)</sup> Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Sekretaris Perusahaan BRI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Hari Siaga Amijarso, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. Kep. 887-DIR/KPS/12/2015 tanggal 21 Desember 2015. Sesuai dengan Surat No. R.13-DIR/KHC/01/2018 tanggal 5 Januari 2018 bahwa sekretaris Perusahaan BRI terhitung sejak tanggal 22 Januari 2018 adalah Bambang Tribaroto

Kepala Satuan Kerja Audit Intern BRI pada tanggal 31 Desember 2017 adalah Tri Wintarto, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.Kep. 427-DIR/KPS/05/2017 tanggal 24 Mei 2017. Sedangkan Kepala Satuan Kerja Audit Intern BRI pada tanggal 31 Desember 2016 adalah Adi Setyanto dan Bardiyono Wiyatmojo, yang ditunjuk sebagai pejabat pengganti sementara sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.Kep. S.147.e-DIR/KPS/12/2016 tanggal 7 Desember 2016.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. UMUM (lanjutan)**

**f. Entitas Anak**

**PT Bank BRISyariah**

Pada tanggal 29 Juni 2007, BRI telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dengan pemegang saham PT Bank Jasa Arta ("BJA") untuk mengakuisisi 100% saham BJA dengan harga pembelian sebesar Rp61 miliar. Berdasarkan RUPS Luar Biasa BRI sesuai dengan akta No. 3 tanggal 5 September 2007 Notaris Imas Fatimah, S.H., para pemegang saham telah menyetujui akuisisi terhadap BJA tersebut dan juga telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat No. 9/188/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 18 Desember 2007 dan No. 9/1326/DPIP/Prz tanggal 28 Desember 2007. Akuisisi ini diselesaikan pada tanggal 19 Desember 2007 berdasarkan akta Akuisisi No. 61 Notaris Imas Fatimah, S.H., dimana BRI memiliki 99,99875% dari total saham yang dikeluarkan BJA dan sebesar 0,00125% diserahkan kepada Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI.

BJA berdasarkan Akta No. 45 tanggal 22 April 2008 Notaris Fathiah Helmi, S.H., telah berubah menjadi PT Bank Syariah BRI ("BSB"). Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008, BSB memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selama 60 (enam puluh) hari setelah keputusan tersebut, BSB wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan selambat-lambatnya 360 (tiga ratus enam puluh) hari setelah keputusan, BSB wajib menyelesaikan seluruh kredit dan liabilitas debitur atau nasabah dari kegiatan konvensional.

BRI pada tanggal 19 Desember 2008 sepakat untuk melakukan pemisahan (spin-off) atas Unit Usaha Syariah BRI ("UUS BRI") kedalam BSB yang telah diaktakan dengan "Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah BRI ke dalam PT Bank Syariah BRI" No. 27 tanggal 19 Desember 2008 Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana tanggal efektif pemisahan adalah tanggal 1 Januari 2009. Akibat dari pemisahan yang ditetapkan tersebut, terhitung sejak tanggal efektif pemisahan maka:

1. Semua aset dan liabilitas UUS BRI yang dimiliki oleh BRI, karena hukum telah beralih kepada dan menjadi hak atau kepunyaan, serta liabilitas atau beban dari dan akan dijalankan oleh dan atas tanggungan BSB, selaku perseroan yang menerima pemisahan.
2. Semua operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas kantor UUS BRI karena hukum beralih kepada dan akan dijalankan atau diusahakan oleh BSB atas keuntungan, kerugian dan tanggungan BSB.
3. Semua hak, piutang, wewenang dan liabilitas UUS BRI berdasarkan perjanjian, tindakan atau peristiwa apapun yang telah ada, dibuat, dilakukan atau terjadi pada atau sebelum tanggal efektif pemisahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada yang tercatat dalam daftar aset dan liabilitas UUS BRI, serta semua hubungan hukum antara UUS BRI dengan pihak lain karena hukum beralih kepada dan akan dijalankan atau dilaksanakan oleh BSB atas keuntungan atau kerugian dan tanggungan BSB.

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham BSB No. 18 tanggal 14 April 2009, Notaris Fathiah Helmi, S.H., dilakukan perubahan nama dari PT Bank Syariah BRI menjadi PT Bank BRISyariah ("BRIS") dan telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia sesuai Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**f. Entitas Anak (lanjutan)**

**PT Bank BRISyariah (lanjutan)**

Anggaran Dasar BRIS telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BRISyariah No. 8 tanggal 8 Januari 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, antara lain mengenai peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp7,5 triliun terdiri atas 15 miliar lembar saham dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham. Perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0009250 tanggal 10 Januari 2018.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BRIS yang terakhir, ruang lingkup kegiatan BRIS adalah menyelenggarakan usaha perbankan dengan prinsip Syariah.

Total aset BRIS pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp31.546.275 atau 2,80% dan Rp27.687.188 atau 2,76% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan pengelolaan dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.816.080 atau 2,64% dan Rp2.634.201 atau 2,69% dari total pendapatan bunga, syariah dan premi konsolidasian.

Total karyawan BRISyariah adalah 3.048 dan 3.091 orang (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Kantor pusat BRISyariah berlokasi di Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat, dan memiliki 54 kantor cabang dan 206 kantor cabang pembantu.

**PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro)**

Pada tanggal 19 Agustus 2010, BRI telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Saham dengan Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) selaku pemegang 95,96% saham PT Bank Agroniaga Tbk ("Bank Agro") untuk mengakuisisi saham Bank Agro dengan total nominal sebesar Rp330.296 untuk 3.030.239.023 lembar saham dengan harga Rp109 (Rupiah penuh) per lembar. Komposisi kepemilikan saham Bank Agro nantinya adalah BRI akan memiliki 76%, Dapenbun 14% dan publik 10%.

Berdasarkan RUPS Luar Biasa BRI sesuai dengan akta No. 37 tanggal 24 November 2010 Notaris Fathiah Helmi, S.H., para pemegang saham telah menyetujui akuisisi terhadap BRI Agro. Selain itu, Bank Indonesia juga telah memberikan persetujuan melalui Surat No. 13/19/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 16 Februari 2011. Akuisisi ini diselesaikan pada tanggal 3 Maret 2011 berdasarkan akta akuisisi No. 14 Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana BRI memiliki 88,65% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Bank Agro, sebagaimana dimuat dalam akta No. 68 tanggal 29 Desember 2009, Notaris Rusnaldy, S.H. Hal tersebut diatas telah mempertimbangkan efek dari Waran Seri I yang dapat dieksekusi sampai dengan tanggal 25 Mei 2011.

Untuk memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-259/BL/2008, tanggal 30 Juni 2008, tentang "Pengambilalihan Perusahaan Terbuka", BRI sebagai pengendali baru Bank Agro diwajibkan untuk melaksanakan Penawaran Tender terhadap saham Bank Agro yang dimiliki pemegang saham publik. Pernyataan Penawaran Tender telah dinyatakan efektif pada tanggal 4 Mei 2011 berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No. S-4985/BL/2011 dan telah diumumkan pada dua surat kabar harian, yaitu *Bisnis Indonesia* dan *Investor Daily*, keduanya pada tanggal 5 Mei 2011. Masa penawaran Tender dimulai pada tanggal 5 Mei 2011 dan berakhir pada tanggal 24 Mei 2011. Pada tanggal penutupan masa Penawaran Tender, terdapat 113.326.500 lembar saham (3,15% dari seluruh saham Bank Agro) yang dibeli oleh BRI. Harga penawaran Tender yang digunakan adalah sebesar Rp182 (Rupiah penuh) per lembar.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. UMUM (lanjutan)**

**f. Entitas Anak (lanjutan)**

**PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro) (lanjutan)**

Pada tanggal 1 Juli 2011, telah dilaksanakan penjualan saham kepada Dapenbun sejumlah 256.375.502 lembar atas eksekusi opsi beli Dapenbun dengan harga Rp109 (Rupiah penuh) per lembar. Selanjutnya sesuai peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1, jangka waktu pengembalian *tender offer* adalah selama 2 (dua) tahun, namun khusus untuk Bank Agro maka BRI wajib memenuhi kepemilikan saham publik minimal adalah sebesar 10%, dan harus dipenuhi paling lambat pada tanggal 24 Mei 2013. Hal ini untuk memenuhi Surat Bursa Efek Indonesia No. S-06472/BEI.PPJ/09-2011 tanggal 23 September 2011. Sampai dengan 31 Desember 2011, saham Bank Agro yang berhasil dijual ke publik sebesar 500.000 lembar, sehingga kepemilikan saham BRI di Bank Agro per 31 Desember 2011 menjadi 79,78% dan Dapenbun 14%. Selama tahun 2012 dan 2013 tidak terdapat penjualan saham, kemudian pada tahun 2014 terdapat penjualan saham sebesar 130.000 lembar saham, sehingga per tanggal 31 Desember 2014, kepemilikan saham publik untuk memenuhi surat Bursa Efek Indonesia No. S-06472/BEI.PPJ/09-2011 tanggal 23 September 2011 sebesar 10% pada tanggal 24 Mei 2013 belum dapat dipenuhi BRI karena tidak aktifnya harga saham Bank Agro di pasar modal.

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 16 Mei 2012, Notaris Rusnaldy, S.H., dilakukan perubahan nama dari PT Bank Agroniaga Tbk menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk ("BRI Agro") dan telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia sesuai Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/72/KEP.GBI/2012 tanggal 10 Oktober 2012.

Pada tanggal 10 Mei 2013, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas IV ("PUT IV") kepada Dewan Komisiner OJK dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 3.846.035.599 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) setiap lembar saham. Pada tanggal 26 Juni 2013, Dewan Komisiner OJK melalui surat No. S-186/D.04/2013 menyetujui Pernyataan Penawaran Umum Terbatas IV tersebut, sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 3.832.685.599 lembar saham.

Hasil dari PUT IV menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 107 tanggal 30 Juli 2013, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro menjadi 80,43%, Dapenbun 14,02% dan publik 5,55%. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0074249.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013.

Pada tanggal 11 Mei 2015, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas V ("PUT V") kepada Dewan Komisiner OJK dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 5.588.085.883 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) setiap lembar saham. Pada tanggal 17 Juni 2015, Dewan Komisiner OJK melalui surat No. S-259/D.04/2015 memberitahu mengenai Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas V, sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 4.028.934.521 lembar saham.

Hasil dari PUT V menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 68 tanggal 14 Juli 2015, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro menjadi 87,23%, Dapenbun 9,10% dan publik 3,67%. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. AHU-AH.01.03-0951264 tanggal 14 Juli 2015.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**f. Entitas Anak (lanjutan)**

**PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro) (lanjutan)**

Pada tanggal 17 Oktober 2016, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VI ("PUT VI") kepada Dewan Komisiner OJK dalam rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya 3.845.996.122 saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) per saham dan menerbitkan Waran Seri II sebanyak 616.908.103 lembar. Pada tanggal 25 November 2016, Dewan Komisiner OJK melalui surat No. S-695/D.04/2016 memberitahu mengenai Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VI, sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 3.845.996.122 lembar saham. Waran Seri II dapat dikonversi menjadi saham BRI Agro dengan nilai Rp130 per lembar (Rupiah penuh) dengan periode pelaksanaan dari 9 Juni 2017 sampai dengan 11 Juni 2018.

Hasil dari PUT VI menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 58 tanggal 27 Desember 2016, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro tetap sebesar 87,23%, Dapenbun 7,08% dan publik 5,69%. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. AHU-AH.01.03-0112637 tanggal 27 Desember 2016.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, jumlah Waran Seri II yang diterbitkan oleh BRI Agro saat PUT VI telah dikonversi menjadi saham sejumlah 71.270.431 lembar, sehingga meningkatkan modal saham BRI Agro sebesar Rp7.127. Atas konversi Waran Seri II mengakibatkan kepemilikan saham BRI pada 31 Desember 2017 di BRI Agro adalah sebesar 86,82%, Dapenbun 5,98% dan publik 7,20%.

Pada tanggal 2 Mei 2017, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VII ("PUT VII") kepada Dewan Komisiner OJK dalam rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya 2.515.555.707 saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) per saham. Pada tanggal 12 Juni 2017, Dewan Komisiner OJK melalui surat No. S-293/D.04/2017 memberitahu mengenai Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VII, sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 2.515.555.707 lembar saham.

Hasil dari PUT VII menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 21 Juli 2017, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro sebesar 87,16%, Dapenbun 6,44% dan publik 6,39%. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. AHU-AH.01.03-0154825 tanggal 21 Juli 2017.

Anggaran Dasar BRI Agro telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 6 Desember 2017, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh yang berasal dari konversi Waran Seri II. Perubahan ini diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. AHU-AH.01.03-0197681 tanggal 6 Desember 2017.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. UMUM (lanjutan)**

**f. Entitas Anak (lanjutan)**

**PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro) (lanjutan)**

Total aset BRI Agro pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp16.325.247 atau 1,45% dan Rp11.379.242 atau 1,13% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp1.252.069 atau 1,17% dan Rp965.085 atau 0,99% dari total pendapatan bunga, syariah dan premi konsolidasian.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan BRI Agro adalah menjalankan kegiatan umum di bidang perbankan.

BRI Agro telah mendapat izin usaha sebagai Bank Umum berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/1037/UUps/Ps6D tanggal 26 Desember 1989.

Total karyawan BRI Agro adalah 499 dan 444 orang (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Kantor pusat BRI Agro berlokasi di Gedung BRI Agro, Jl. Warung Jati Barat No. 139, Jakarta, dan memiliki 18 kantor cabang dan 19 kantor cabang pembantu.

**BRI Remittance Co. Limited Hong Kong (BRI Remittance)**

Pada tanggal 16 Desember 2011, BRI telah menandatangani *Instrument of Transfer* dan *Bought and Sold Notes* untuk mengakuisisi 100% atau 1.600.000 (angka penuh) saham BRIngin Remittance Co. Ltd. (BRC) Hong Kong dengan harga pembelian sebesar HKD1.911.270. Akuisisi ini telah disahkan oleh *Inland Revenue Department* (IRD) Hong Kong dengan *stamp duty* pada tanggal 28 Desember 2011 dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat No. 13/32/DPB1/TPB1-3/Rahasia pada tanggal 1 Desember 2011.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Tahunan BRIngin Remittance Company Limited tanggal 2 Juli 2012, serta dengan diterbitkannya *Certificate of Change of Name* No. 961091 tanggal 11 Oktober 2012 oleh *Registrar of Companies Hong Kong Special Administrative Region*, maka nama BRIngin Remittance Company Limited secara resmi berubah menjadi BRI Remittance Company Limited Hong Kong.

Total aset BRI Remittance pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp8.370 atau 0,0007% dan Rp5.952 atau 0,0006%, dari total aset konsolidasian.

Ruang lingkup kegiatan BRI Remittance adalah menjalankan kegiatan umum di bidang *remittance*.

Total karyawan BRI Remittance adalah 6 dan 5 orang (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Kantor pusat BRI Remittance berlokasi di Lippo Centre, Tower II, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**f. Entitas Anak (lanjutan)**

**PT Asuransi BRI Life (dahulu PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera) (BRI Life)**

Pada tanggal 6 Oktober 2015, BRI telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dengan pemegang saham PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera ("BRI Life") untuk mengakuisisi 91,001% saham BRI Life dengan harga pembelian sebesar Rp1.627 miliar. Berdasarkan RUPS Luar Biasa BRI sesuai dengan akta No. 14 tanggal 14 Desember 2015 Notaris Fathiah Helmi, S.H., para pemegang saham telah menyetujui akuisisi terhadap BRI Life tersebut dan juga telah mendapat persetujuan dari OJK melalui surat No. S-151/PB.31/2015 tanggal 23 Desember 2015. Akuisisi ini diselesaikan pada tanggal 29 Desember 2015 berdasarkan akta Pengambilalihan Saham dalam PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera No. 41 Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana BRI memiliki 91,001% dari total saham yang dikeluarkan BRI Life dan sebesar 8,999% diserahkan kepada Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI.

Berdasarkan Akta No. 31 tanggal 23 Februari 2017, yang dibuat dihadapan Dahlia, S.H., notaris pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dilakukan perubahan nama dari PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera menjadi PT Asuransi BRI Life dan sesuai Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-140/NB.11/2017 tanggal 20 Maret 2017, BRI Life memperoleh pemberlakuan izin usaha di bidang asuransi jiwa sehubungan perubahan nama perusahaan.

Anggaran Dasar BRI Life telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dituangkan dalam Akta No. 31 tanggal 23 Februari 2017, yang dibuat dihadapan Dahlia, S.H., notaris pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara lain mengenai perubahan atas penyebutan jenis saham yaitu saham Seri A sejumlah 1 saham dan saham Seri B sejumlah 2.199.999 saham (jumlah penuh). Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0004875.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BRI Life yang terakhir, ruang lingkup kegiatan BRI Life adalah menyelenggarakan usaha di bidang perasuransian.

BRI Life mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-181/KMK.13/1988 tanggal 10 Oktober 1988.

BRI Life mendapatkan ijin pembukaan kantor cabang dan unit Syariah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-007/KM.6/20013 tanggal 21 Januari 2003.

Total aset BRI Life pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp8.156.566 atau 0,72% dan Rp6.174.156 atau 0,62% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan premi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp4.160.024 atau 3,90% dan Rp2.474.579 atau 2,53% dari total pendapatan bunga, syariah dan premi konsolidasian.

Total karyawan BRI Life adalah 489 dan 422 orang (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Kantor pusat BRI Life berlokasi di Gedung Graha Irama Lantai 15 Jl. H.R Rasuna Said Blok X-1 Kav 1 dan 2, Jakarta, dan memiliki 6 kantor regional dengan jumlah keseluruhan sebanyak 34 kantor penjualan konvensional dan 10 kantor penjualan unit syariah.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. UMUM (lanjutan)**

**f. Entitas Anak (lanjutan)**

**PT BRI Multifinance Indonesia**

Pada tanggal 12 Juli 2016, BRI menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat ("PPJB") dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd ("BTMU") dalam rangka peningkatan kepemilikan saham BRI pada PT BTMU-BRI Finance ("BBF") dari semula sebesar 45% menjadi 99%, dengan harga pembelian sebesar Rp378.548, dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui surat No. S-102/PB.31/2016 tanggal 21 September 2016. Pengalihan saham ini telah dilaksanakan secara efektif pada tanggal 30 September 2016, sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 75 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dimana BRI memiliki 99% dari total saham yang dikeluarkan oleh PT BRI Multifinance Indonesia ("BRI Finance") dan sebesar 1% dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI. Atas akuisisi BRI Finance, BRI mencatat *goodwill* sebesar Rp51.915 yang diklasifikasikan dalam akun Aset Lain-lain.

Berdasarkan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 67 tanggal 15 September 2016, yang dibuat di hadapan Notaris I Gede Buda Gunamanta, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan perubahan nama dari PT BTMU-BRI Finance menjadi PT BRI Multifinance Indonesia, dan sesuai Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-771/NB.11/2016 tanggal 17 Oktober 2016, sehubungan dengan perubahan nama tersebut maka BRI Finance memperoleh pemberlakuan Izin Usaha di bidang perusahaan pembiayaan atas izin usaha yang sebelumnya telah diberikan kepada PT Sanwa-BRI Finance, yang selanjutnya berubah nama menjadi PT UFJ-BRI Finance dan PT BTMU-BRI Finance.

Anggaran Dasar BRI Finance telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan anggaran dasar terakhir adalah sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.9 tanggal 6 Juli 2017, yang dibuat di hadapan I Gede Buda Gunamanta, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar. Perubahan anggaran dasar ini telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BRI Multifinance Indonesia No. AHU-AH.01.03-0151106 tanggal 8 Juli 2017.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan BRI Finance adalah melakukan usaha di bidang pembiayaan.

Total aset BRI Finance pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp2.609.699 atau 0,23% dan Rp2.399.828 atau 0,24% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp206.304 atau 0,19% dan Rp57.948 atau 0,06% dari total pendapatan bunga, syariah dan premi konsolidasian.

Total karyawan BRI Finance adalah 157 dan 137 orang (tidak diaudit) pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Kantor pusat BRI Finance berlokasi di Gedung Wisma 46, lantai 10, Kota BNI Jl. Jenderal Sudirman Kav.1, Jakarta Pusat dan memiliki 4 cabang yaitu Bandung, Surabaya, Samarinda dan Medan.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

### a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

#### Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan".

BRIS (entitas anak) yang beroperasi dalam bidang perbankan dengan prinsip syariah disajikan sesuai dengan PSAK No. 101 (Revisi 2016) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 (Revisi 2016) tentang "Akuntansi *Murabahah*", PSAK No. 104 tentang "Akuntansi *Istishna*", PSAK No. 105 tentang "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK No. 106 (Revisi 2016) tentang "Akuntansi *Musyarakah*" dan PSAK No. 107 tentang "Akuntansi *Ijarah*" yang menggantikan PSAK No. 59 tentang "Akuntansi Perbankan Syariah" yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk topik tersebut, PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Laporan keuangan konsolidasian telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan dasar akrual, kecuali pendapatan dari *istishna* dan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk keperluan laporan arus kas konsolidasian, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali dinyatakan lain, dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

### b. Prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan BRI dan entitas anak yang mayoritas sahamnya dimiliki atau dikendalikan oleh BRI.

Dalam hal pengendalian terhadap entitas anak dimulai atau diakhiri dalam suatu periode berjalan maka hasil usaha entitas anak yang diperhitungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebatas hasil pada saat pengendalian tersebut mulai diperoleh atau hingga saat pengendalian itu berakhir.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

### b. Prinsip konsolidasian (lanjutan)

Pengendalian didapat ketika BRI terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas anak.

BRI mengendalikan entitas anak jika dan hanya jika BRI memiliki hal berikut ini:

- a) Kekuasaan atas entitas anak (hak yang ada saat ini yang memberi kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil entitas anak).
- b) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak.
- c) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas entitas anak untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil BRI.

Seluruh saldo dan transaksi antar perusahaan yang signifikan termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha BRI dan entitas anak sebagai satu kesatuan usaha.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Apabila laporan keuangan entitas anak menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian, maka dilakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan entitas anak tersebut.

Kepentingan non-pengendali dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham minoritas atas laba neto dan ekuitas entitas anak tersebut sesuai dengan persentase kepemilikan pemegang saham minoritas pada entitas anak tersebut.

### c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

Aset keuangan terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, tagihan wesel ekspor, Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah, piutang sewa pembiayaan, tagihan akseptasi, penyertaan saham dengan metode biaya dan aset lain-lain.

Liabilitas keuangan BRI terdiri dari liabilitas segera, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, liabilitas lain-lain dan pinjaman subordinasi.

#### (i) Klasifikasi

BRI mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang diperdagangkan;
- Kredit yang diberikan dan piutang;
- Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo;
- Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

### c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

#### (i) Klasifikasi (lanjutan)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Kelompok aset dan liabilitas diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset dan liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan yang diperoleh atau dimiliki BRI terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau *position taking*.

Kredit yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak mempunyai kuota di pasar aktif, kecuali:

- Yang dimaksudkan oleh BRI untuk dijual segera dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok investasi tersedia untuk dijual; atau
- Dalam hal BRI mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas kredit yang diberikan dan piutang, yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo terdiri dari aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana BRI mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Investasi yang dimiliki untuk periode yang tidak dapat ditentukan tidak dikategorikan dalam klasifikasi ini.

Investasi tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan non-derivatif yang ditentukan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan sebagai salah satu dari kategori aset keuangan lain.

Setelah pengukuran awal, investasi tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai wajar dengan laba atau rugi yang diakui sebagai bagian dari ekuitas sampai dengan investasi dihentikan pengakuannya atau sampai investasi dinyatakan mengalami penurunan nilai dimana akumulasi laba atau rugi sebelumnya dilaporkan dalam ekuitas dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Hasil efektif dan (bila dapat diaplikasikan) hasil dari nilai tukar dinyatakan kembali untuk investasi tersedia dijual dan dilaporkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

(ii) Pengakuan awal

- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal penyelesaian.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

BRI pada pengakuan awal dapat menetapkan aset keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (accounting mismatch) yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- Aset keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan.

Opsi nilai wajar digunakan untuk kredit yang diberikan dan piutang tertentu yang dilindungi nilai menggunakan *credit derivatives* atau *swap* suku bunga, namun tidak memenuhi kriteria untuk akuntansi lindung nilai. Jika tidak, kredit yang diberikan akan dicatat menggunakan biaya diamortisasi dan derivatif akan diukur menggunakan nilai wajar melalui laba rugi.

Opsi nilai wajar juga digunakan untuk dana investasi yang merupakan bagian dari portofolio yang dikelola dengan basis nilai wajar. Opsi nilai wajar juga digunakan untuk *structured investment* termasuk derivatif melekat.

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Kredit yang diberikan dan piutang serta investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

### c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

#### (iv) Penghentian pengakuan

##### a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- BRI mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*); dan antara (a) BRI telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) BRI tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika BRI telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki *pass-through arrangement* dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan BRI yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Penghapusbukuan kredit yang diberikan dilakukan ketika tidak terdapat lagi prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara BRI dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

##### b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

#### (v) Pengakuan pendapatan dan beban

- ##### a. Pendapatan dan beban bunga, untuk aset tersedia untuk dijual serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan menggunakan suku bunga efektif.
- ##### b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam ekuitas, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari *item* moneter, dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai dari aset keuangan tersebut.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau terjadi penurunan nilai, maka keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus direklas pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

BRI tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh BRI sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

BRI tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam periode berjalan atau dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:

- a. Dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali dimana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
- b. Terjadi setelah BRI telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau BRI telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
- c. Terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali BRI, tidak berulang dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh BRI.

(vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dilakukan saling hapus dan nilai neto-nya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika dan hanya jika BRI memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh Standar Akuntansi Keuangan.

(viii) Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi penurunan nilai.

(ix) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

### c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

#### (ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

BRI dan entitas anak menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 : harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Level 2 : input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3 : input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, BRI menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

BRI untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar (Catatan 40).

#### (x) Aset keuangan sukuk

Berdasarkan PSAK No. 110 (Revisi 2015), BRI menentukan klasifikasi investasi pada sukuk *ijarah* dan *mudharabah* sebagai berikut :

##### a. Diukur pada biaya perolehan

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

(x) Aset keuangan sukuk (lanjutan)

Berdasarkan PSAK No. 110 (Revisi 2015), BRI menentukan klasifikasi investasi pada sukuk *ijarah* dan *mudharabah* sebagai berikut (lanjutan):

a. Diukur pada biaya perolehan (lanjutan)

- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi, dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk, terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi, dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.
- Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi.

c. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi, dan selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi

**d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi**

BRI dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Suatu pihak dianggap berelasi dengan BRI dan entitas anak jika:

- 1) langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama, dengan BRI dan entitas anak; (ii) memiliki kepentingan dalam BRI dan entitas anak yang memberikan pengaruh signifikan atas BRI dan entitas anak; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas BRI dan entitas anak;
- 2) suatu pihak yang berelasi dengan BRI dan entitas anak;
- 3) suatu pihak adalah ventura bersama di mana BRI dan entitas anak sebagai *venturer*;
- 4) suatu pihak adalah anggota dari personel manajemen kunci BRI dan entitas anak atau induk;
- 5) suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

### d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

Suatu pihak dianggap berelasi dengan BRI dan entitas anak jika (lanjutan):

- 6) suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk dimana hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); dan
- 7) suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari BRI dan entitas anak atau entitas yang terkait dengan BRI dan entitas anak.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan BRI telah memenuhi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.E.1 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu", pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 44 atas laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, saldo dan transaksi yang material antara BRI dan entitas anak dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia (RI) dan entitas lain yang berelasi dengan Pemerintah Negara RI diungkapkan juga pada Catatan 44 tersebut.

### e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, BRI mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi telah mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh entitas untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- c) Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- d) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- e) Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- f) Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
  - 1) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
  - 2) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) dan 12 (dua belas) bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

### e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

BRI pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika BRI menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka BRI memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

BRI menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai;
2. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, BRI melakukan penilaian secara individual untuk: (a) Pinjaman dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet; atau (b) Pinjaman dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah yang direstrukturisasi.

BRI menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai;
2. Kredit yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan;
3. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, penilaian secara kolektif dilakukan untuk: (a) Pinjaman dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus serta tidak direstrukturisasi; atau (b) Pinjaman dalam segmen pasar usaha kecil dan konsumen.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi kredit berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu dan kemungkinan terjadinya kegagalan (*probability of default*). Kredit yang mempunyai data dan informasi kerugian historis yang dikategorikan sebagai daerah rawan bencana oleh Pemerintah Republik Indonesia dan didukung oleh kebijakan internal BRI, maka perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai dilakukan dengan menghitung tingkat kerugian secara keseluruhan yang meliputi tingkat kerugian aktual ditambah dengan faktor-faktor risiko terkait yang relevan berdasarkan survei yang dilakukan secara periodik kepada pihak eksternal maupun internal BRI.

BRI menggunakan metode *migration analysis* yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan secara kolektif. BRI menggunakan rata-rata bergerak (*moving average*) data historis 3 (tiga) tahun dalam menghitung *probability of default* (PD) dan *loss of given default* (LGD).



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

### e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

BRI menggunakan *fair value of collateral* sebagai arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

1. Kredit bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan;
2. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal atas pengikatan agunan.

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika kredit yang diberikan atau efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Sebagai panduan praktis, BRI dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi, perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*collateralized financial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dicatat pada akun penyisihan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, BRI mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas dibawah biaya perolehannya merupakan bukti obyektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai.

Kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi dengan nilai pelunasan pokok dan amortisasi) dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kerugian penurunan nilai yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian atas investasi instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas yang tersedia untuk dijual tidak boleh dipulihkan melalui pembalikan atas penurunan nilai sebelumnya pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun berjalan.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)**

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian nilai pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Jika persyaratan kredit yang diberikan, piutang atau efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah.

Jika pada suatu periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur atau penerbit), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun berjalan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang diberikan yang telah dihapusbukukan, pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain bunga.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Bank Indonesia (OJK), BRI menerapkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang "Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum" yang berlaku sampai dengan 24 Agustus 2017.

Entitas anak yang bergerak dalam bidang Perbankan Syariah (BRIS) menerapkan POJK No. 16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2015 dan POJK No. 12/POJK.03/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang "Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang berlaku sampai dengan 24 Agustus 2017. Penilaian sebelum tanggal 1 Januari 2015 menggunakan PBI No. 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah".

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (OJK) adalah sebagai berikut:

- a) 1% dari aset produktif yang digolongkan Lancar, di luar penempatan pada Bank Indonesia, Obligasi Pemerintah, instrumen hutang lain yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai;
- b) 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi agunan;
- c) 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi agunan;
- d) 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi agunan; dan
- e) 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi agunan.

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (OJK).



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

### f. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

### g. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah penanaman dana pada Bank Indonesia berupa *Deposit Facility*, *Term Deposit* dan *Deposit Facility Syariah*, sedangkan penempatan dana pada bank lain merupakan penanaman dana dalam bentuk penempatan pada pasar uang (inter-bank call money), deposito berjangka, dan *banker's acceptance*.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan masing-masing sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

### h. Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah

Efek-efek terdiri atas surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang dan modal seperti Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Obligasi Pemerintah, wesel tagih, obligasi subordinasi, unit penyertaan reksadana, *Medium-Term Notes*, *U.S. Treasury Bonds*, *Singapore Government Securities*, *Negotiable Certificate of Deposits*, *Monetary Authority of Singapore (MAS) bills* dan *credit linked notes* serta obligasi yang diperdagangkan di bursa efek.

Termasuk di dalam efek-efek adalah obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah yang tidak terkait dengan program rekapitalisasi seperti Surat Utang Negara (SUN), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan obligasi Pemerintah dalam mata uang asing yang diperoleh melalui pasar perdana dan juga pasar sekunder.

Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah adalah obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah sehubungan dengan program rekapitalisasi bank-bank umum yang terdiri dari obligasi dalam rangka rekapitalisasi BRI dan obligasi rekapitalisasi pemerintah yang dibeli dari pasar sekunder.

Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah pada awalnya disajikan sebesar nilai wajarnya. Setelah pengakuan awal, efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah dicatat sesuai dengan kategorinya yaitu dimiliki hingga jatuh tempo, nilai wajar melalui laba rugi atau tersedia untuk dijual.

Penilaian efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

- 1) Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. BRI tidak mengklasifikasikan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah sebagai aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelumnya, BRI telah menjual atau mereklasifikasi efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan (*more than insignificant*) sebelum jatuh tempo selain dari pada penjualan atau reklasifikasi yang telah dijelaskan dalam PSAK No. 55 yang dapat diaplikasikan dalam periode yang relevan.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

### h. Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah (lanjutan)

Penilaian efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut (lanjutan):

- 2) Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diperdagangkan dinyatakan pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
- 3) Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai investasi tersedia untuk dijual dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Perubahan nilai wajar lainnya diakui secara langsung dalam ekuitas sampai dengan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah tersebut dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

### i. Tagihan wesel ekspor

Tagihan wesel ekspor adalah wesel ekspor yang dinegosiasikan secara diskonto dan dijaminan oleh bank lainnya. Tagihan wesel ekspor dicatat pada biaya perolehan amortisasi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Tagihan wesel ekspor diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

### j. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.

Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

Kredit dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi) dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh BRI.

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Kredit yang diberikan dihapusbukukan, ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian di masa datang dan semua jaminan telah diupayakan untuk direalisasi atau sudah diambil alih. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, dikreditkan ke cadangan kerugian penurunan nilai di Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

### k. Piutang dan pembiayaan syariah

Pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, yang timbul dari transaksi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil antara bank dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu. Piutang tersebut meliputi piutang *murabahah*, piutang *istishna* dan *qardh*, untuk pembiayaan meliputi pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

*Murabahah* adalah akad jual beli antara nasabah dengan BRIS, dimana BRIS membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode *margin* efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

*Mudharabah* adalah akad pembiayaan kerjasama antara BRIS sebagai pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (mudharib) selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan *nisbah* (pre-determined ratio) yang telah disepakati bersama. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil *review* oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

*Musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil *review* oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

*Istishna* adalah akad jual beli antara *al-mustashni* (pembeli) dan *al-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Margin *istishna* yang ditanggung disajikan sebagai pos lawan piutang *istishna*.

*Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pinjaman *qardh* dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil *review* oleh manajemen terhadap kualitas pinjaman yang ada.

### l. Piutang sewa pembiayaan

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

### I. Piutang sewa pembiayaan (lanjutan)

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Piutang sewa pembiayaan diakui sebesar investasi bersih yang merupakan nilai wajar dikurangi pendapatan administrasi dan ditambah biaya-biaya transaksi (jika ada) yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode tingkat suku bunga efektif.

Pada saat pengakuan awal, nilai wajar investasi bersih dalam sewa pembiayaan merupakan piutang sewa pembiayaan ditambah nilai sisa yang akan diterima pada akhir masa sewa dikurangi dengan pendapatan sewa pembiayaan yang ditangguhkan dan simpanan jaminan. Selisih antara nilai piutang bruto dan nilai kini piutang diakui sebagai pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui. Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui dialokasikan sebagai pendapatan tahun berjalan menggunakan suku bunga efektif.

### m. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan transaksi *letter of credit* (L/C) yang diaksep oleh bank pengaksep (accepting bank).

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang. Liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

### n. Investasi pada Entitas Asosiasi

Investasi BRI pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana BRI mempunyai pengaruh signifikan atau kepemilikan saham lebih dari 20% hak suara. Pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat tersebut ditambah atau dikurangkan untuk mengakui bagian BRI atas laba rugi entitas asosiasi setelah tanggal perolehan. Bagian BRI atas laba rugi entitas asosiasi diakui dalam laba rugi BRI. Penerimaan distribusi dari entitas asosiasi mengurangi nilai tercatat investasi.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian atas hasil operasi entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas entitas asosiasi, BRI mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika berlaku, dalam laporan perubahan ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi sebagai hasil transaksi-transaksi antara BRI dan entitas asosiasi dieliminasi pada jumlah sesuai dengan kepentingan BRI dalam entitas asosiasi.

Setelah menerapkan metode ekuitas, BRI menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi BRI dalam entitas asosiasi. BRI menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang objektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, BRI menghitung jumlah penurunan berdasarkan selisih jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**n. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)**

Investasi BRI pada Entitas Asosiasi yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan dibawah 20% dicatat sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

**o. Aset tetap**

Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah, dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar, kecuali:

- (i) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau
- (ii) nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	15
Kendaraan bermotor	5
Komputer dan mesin	3 - 5
Perlengkapan kantor	5
Satelit	15

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomis masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan maupun pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut dimasukkan ke dalam laba rugi untuk tahun dimana penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan.

Tanah awalnya dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Setelah pengakuan awal, tanah diukur pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Penilaian terhadap tanah dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional, dan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tanah tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajarnya pada akhir periode pelaporan (Catatan 17).

Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka perlu direvaluasi secara tahunan, sedangkan jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi tidak mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif maka perlu dilakukan revaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

### o. Aset tetap (lanjutan)

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya dalam laba rugi. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi diakui dalam laba rugi.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset tetap terkait bila besar kemungkinan bagi Kelompok Usaha manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset tetap terkait.

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap". Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak hukum atau umur ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

### p. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, BRI menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian pada tanggal laporan atas penurunan nilai aset tertentu (yaitu aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tidak berwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka BRI akan membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai "rugi penurunan nilai". Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, mengacu pada PSAK No. 68: "Pengukuran Nilai Wajar" (Catatan 2c).

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

### q. Agunan yang diambil alih

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit (disajikan dalam akun "Aset Lain-lain") diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi atau sebesar nilai tercatat dari kredit, mana yang lebih rendah. Nilai neto yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Kelebihan saldo kredit yang diberikan, yang belum dilunasi oleh peminjam di atas nilai dari agunan yang diambil alih, dibebankan sebagai penyisihan penghapusan kredit yang diberikan pada tahun berjalan. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Penyisihan kerugian agunan yang diambil alih dibentuk berdasarkan penurunan nilai agunan yang diambil alih.

Beban perbaikan (reconditioning cost) yang timbul setelah pengambilalihan agunan dikapitalisasi dalam akun agunan yang diambil alih tersebut.

### r. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method).

### s. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas BRI kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan dihitung berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

### t. Simpanan nasabah dan bank lain serta lembaga keuangan lainnya

Giro merupakan simpanan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya. Giro dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemegang giro.

Giro *wadiah* merupakan titipan dana pihak ketiga yang setiap saat tersedia untuk dikembalikan dan diberikan bonus berdasarkan kebijakan BRIS. Giro *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di BRIS.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Tabungan dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemilik tabungan.

Tabungan *wadiah* adalah simpanan dana nasabah pada BRIS, yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan terhadap titipan tersebut BRIS tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela. Tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar liabilitas BRIS.

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan BRIS atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Tabungan *mudharabah* dicatat sebesar nilai simpanan nasabah.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara penyimpan dengan BRI dan BRI Agro. Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito atau yang diperjanjikan.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**t. Simpanan nasabah dan bank lain serta lembaga keuangan lainnya (lanjutan)**

Deposito berjangka *mudharabah* merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka *mudharabah* dan BRIS. Deposito berjangka *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dan BRIS.

Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik lokal maupun luar negeri, dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka dan *inter-bank call money* dengan promes yang berjangka waktu sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari serta dinyatakan sesuai dengan jumlah liabilitas terhadap bank dan lembaga keuangan lainnya tersebut.

Simpanan nasabah dan bank lain serta lembaga keuangan lainnya diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan dan dana *syirkah* temporer yang dinyatakan sebesar nilai liabilitas BRI dan entitas anak kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

**u. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali**

**Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali**

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan (belum diamortisasi) dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual kembali dengan menggunakan suku bunga efektif.

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

**Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali**

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai biaya dibayar di muka dan diakui sebagai beban selama jangka waktu sejak efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan suku bunga efektif.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

**v. Surat berharga yang diterbitkan**

Surat berharga yang diterbitkan BRI adalah Obligasi, *Medium-Term Notes* (MTN) dan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD).

Surat berharga yang diterbitkan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**w. Pinjaman yang diterima**

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

**x. Pinjaman dan surat berharga subordinasi**

Pinjaman subordinasi diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

**y. Provisi**

Provisi diakui jika BRI dan entitas anak memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif), yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

**z. Cadangan dan pembayaran bunga tepat waktu pada BRI Unit**

Pembayaran Bunga Tepat Waktu (PBTW) adalah insentif yang diberikan kepada para debitur Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) yang melunasi liabilitasnya dengan membayar kembali kredit sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disepakati bersama. Besarnya PBTW adalah sebesar 25% dari bunga yang diterima baik untuk Kupedes Modal Kerja maupun Kupedes Investasi. PBTW disajikan sebagai pengurang pendapatan bunga dari kredit yang diberikan. BRI membentuk Cadangan Pembayaran Bunga Tepat Waktu (CPBTW) atas PBTW tersebut dan menyajikan pada akun "Liabilitas Lain-lain" (Catatan 29).

**aa. Pendapatan dan beban bunga**

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan yang *interest bearing* diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, BRI dan BRI Agro mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang.

Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

### aa. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

### ab. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu dan/atau terkait dengan pemberian suatu jasa, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan dicatat pada akun pendapatan operasional lainnya.

### ac. Pendapatan dan beban syariah

Pendapatan syariah terdiri dari pendapatan dari transaksi piutang *murabahah*, *istishna*, *ijarah* dan pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pendapatan dari transaksi *ijarah* diakui dengan menggunakan metode akrual. Pendapatan dari transaksi *istishna* dan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat angsuran diterima secara tunai. Beban berdasarkan prinsip syariah terdiri dari beban bagi hasil *mudharabah* dan beban bonus *wadiah*.

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode *margin* efektif. *Margin* efektif adalah *margin* yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*. Pada saat menghitung *margin* efektif, BRIS mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari *margin* efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (nisbah) yang disepakati.

### ad. Pendapatan premi dan beban klaim

Premi kontrak asuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan dalam periode kontrak sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. Premi kontrak asuransi bukan jangka pendek diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo dari pemegang polis. Premi yang diterima sebelum diterbitkannya polis asuransi atau tanggal premi jatuh tempo dicatat sebagai titipan premi.

Premi terkait kontrak investasi dan jumlah komponen risiko keuangan kontrak asuransi dicatat sebagai deposit melalui laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai penyesuaian terhadap akun liabilitas kontrak investasi.

Premi reasuransi bruto diakui sebagai beban pada saat dibayarkan atau pada tanggal di mana polis tersebut efektif.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**ad. Pendapatan premi dan beban klaim (lanjutan)**

Klaim dan manfaat asuransi merupakan klaim-klaim yang telah disetujui (approved claim). Klaim dan manfaat tersebut diakui sebagai beban pada saat timbulnya liabilitas untuk memenuhi klaim. Bagian klaim yang diperoleh dari reasuradur diakui dan dicatat sebagai klaim reasuransi pada periode yang sama dengan pengakuan beban klaim.

Klaim dan manfaat asuransi terkait kontrak investasi dan jumlah komponen risiko keuangan kontrak asuransi dicatat sebagai penarikan (withdrawal) melalui laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai penyesuaian terhadap akun liabilitas kontrak investasi.

**ae. Liabilitas kontrak asuransi, kontrak investasi dan reasuransi**

**Liabilitas kontrak asuransi**

**a. Liabilitas manfaat polis masa depan**

Liabilitas manfaat polis masa depan merupakan nilai kini estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan termasuk seluruh opsi yang disediakan, nilai kini estimasi seluruh biaya yang dikeluarkan dan juga mempertimbangkan penerimaan premi di masa depan. Liabilitas manfaat polis masa depan merupakan liabilitas atas kontrak asuransi bukan jangka pendek.

Kenaikan (penurunan) liabilitas manfaat polis masa depan diakui sebagai beban (pendapatan) pada laba rugi tahun berjalan. Liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya pada saat kontrak berakhir, dikeluarkan atau dibatalkan.

**b. Estimasi liabilitas klaim**

Estimasi liabilitas klaim merupakan klaim dalam proses penyelesaian yang ditentukan berdasarkan estimasi kerugian dari klaim yang masih dalam proses penyelesaian pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, termasuk klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan ("IBNR").

Perubahan dalam estimasi liabilitas klaim diakui dalam laba rugi tahun berjalan. Liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya pada saat kontrak berakhir, dikeluarkan atau dibatalkan.

**c. Premi yang belum merupakan pendapatan**

Premi yang belum merupakan pendapatan merupakan bagian premi yang telah dilunasi, namun belum merupakan pendapatan karena masa pertanggungansian asuransi masih berjalan pada akhir tahun. Premi yang belum merupakan pendapatan merupakan liabilitas atas kontrak asuransi jangka pendek.

Premi yang belum merupakan pendapatan dihitung secara individual dari tiap pertanggungansian yang besarnya ditetapkan secara proporsional terhadap jumlah proteksi yang diberikan selama periode pertanggungansian atau periode risiko, konsisten dengan pengakuan pendapatan premi asuransi jangka pendek.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

### ae. Liabilitas kontrak asuransi, kontrak investasi dan reasuransi (lanjutan)

#### Liabilitas kontrak asuransi (lanjutan)

##### c. Premi yang belum merupakan pendapatan (lanjutan)

Kenaikan (penurunan) premi yang belum merupakan pendapatan diakui sebagai beban (pendapatan) pada laba rugi tahun berjalan. Liabilitas ini dihentikan pengakuannya pada saat kontrak berakhir, dilepaskan atau dibatalkan.

#### Liabilitas kontrak investasi

Liabilitas kontrak investasi merupakan liabilitas yang dihitung atas kontrak investasi (termasuk jumlah komponen risiko keuangan dalam kontrak asuransi yang telah dipisahkan) dengan menggunakan prinsip-prinsip penilaian sesuai PSAK No. 55 (Revisi 2014). Deposit dan penarikan terkait kontrak investasi (termasuk jumlah komponen risiko keuangan dalam kontrak asuransi yang telah dipisahkan) dicatat langsung sebagai penyesuaian atas liabilitas kontrak investasi dalam laporan keuangan konsolidasian dan tidak dicatat sebagai pendapatan premi di laba rugi. Kecuali deposit dan penarikan, seluruh perubahan liabilitas kontrak investasi diakui dalam laba rugi tahun berjalan. Liabilitas ini dihentikan pengakuannya pada saat kontrak berakhir, dilepaskan atau dibatalkan.

#### Reasuransi

BRI Life mensesikan risiko asuransi dalam bisnis normal pada setiap lini bisnisnya.

Manfaat BRI Life atas kontrak reasuransi yang dimiliki diakui sebagai aset reasuransi. Aset ini terdiri dari piutang yang bergantung pada klaim yang diperkirakan dan manfaat yang timbul dalam kontrak reasuransi terkait. Sebagaimana disyaratkan oleh PSAK No. 62, aset reasuransi tidak saling hapus dengan liabilitas kontrak asuransi terkait.

Piutang reasuransi diestimasi secara konsisten dengan klaim yang disetujui terkait dengan kebijakan reasuradur dan sesuai dengan kontrak reasuransi terkait.

BRI Life mereasuransikan sebagian risiko atas ekspektasi pertanggungan yang diperoleh kepada perusahaan asuransi lain dan perusahaan reasuransi. Jumlah premi yang dibayar atau bagian premi atas transaksi reasuransi prospektif diakui sebagai premi reasuransi sesuai periode kontrak reasuransi secara proporsional dengan proteksi yang diberikan. Pembayaran atau liabilitas atas transaksi reasuransi retrospektif diakui sebagai piutang reasuransi sebesar liabilitas yang dibukukan sehubungan dengan kontrak asuransi tersebut.

Aset reasuransi termasuk saldo yang diharapkan dibayarkan oleh perusahaan reasuransi untuk *ceded* liabilitas manfaat polis masa depan, *ceded* estimasi liabilitas klaim, dan *ceded* premi yang belum merupakan pendapatan. Jumlah manfaat yang ditanggung oleh reasuradur diperkirakan secara konsisten sesuai dengan liabilitas yang terkait dengan polis reasuransi.

BRI Life menyajikan aset reasuransi secara terpisah sebagai aset atas liabilitas manfaat polis masa depan, premi yang belum merupakan pendapatan, dan estimasi liabilitas klaim.

Aset reasuransi mengalami penurunan nilai jika ada bukti obyektif, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset reasuransi, bahwa BRI Life tidak dapat menerima seluruh jumlah karena di bawah syarat-syarat kontrak, dan dampak pada jumlah yang akan diterima dari reasuradur dapat diukur secara andal.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

### ae. Liabilitas kontrak asuransi, kontrak investasi dan reasuransi (lanjutan)

#### Reasuransi (lanjutan)

Jika aset reasuransi mengalami penurunan nilai, BRI Life mengurangi nilai tercatat dan mengakui kerugian penurunan nilai tersebut dalam laba rugi tahun berjalan.

Aset atau liabilitas reasuransi dihentikan pengakuannya ketika hak kontraktualnya hilang atau berakhir, atau ketika kontrak dialihkan kepada pihak lain.

### af. Imbalan kerja

#### Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

#### Program pensiun iuran pasti

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti BRI. Iuran dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut dan pembayaran dikurangkan dari utang iuran. Iuran terhutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

#### Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti penghargaan tanda jasa, cuti besar dan program kesehatan pasca kerja BPJS dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang memenuhi syarat. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan BRI dan persyaratan minimum Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13/2003.

Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri atas:

- (i) Keuntungan dan kerugian aktuarial.
- (ii) Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).
- (iii) Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto langsung diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode berjalan.

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**ag. Opsi saham**

Sehubungan dengan IPO, BRI memberikan opsi saham kepada Direksi dan pekerja pada posisi dan jabatan tertentu berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BRI. Biaya kompensasi saham pada tanggal penerbitan dihitung berdasarkan nilai wajar dari opsi saham tersebut dan diakui dalam akun "Beban Tenaga Kerja dan Tunjangan" berdasarkan program hak yang diakui pada tahun berjalan (cliff-vesting scheme) dengan metode garis lurus selama masa tunggu (vesting period). Akumulasi dari biaya kompensasi saham diakui sebagai "Opsi Saham" dalam bagian ekuitas.

Nilai wajar dari opsi saham tersebut dinilai dengan menggunakan model penentuan harga opsi *Black-Scholes*.

**ah. Laba per lembar saham**

Laba per lembar saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada Entitas Induk (BRI) dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun yang bersangkutan.

**ai. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing**

BRI dan entitas anaknya menyelenggarakan catatan akuntansi dalam Rupiah. Transaksi yang melibatkan mata uang asing dicatat pada nilai tukar pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, semua aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia bagian Barat). Keuntungan atau kerugian yang timbul dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

Nilai tukar yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam Rupiah adalah sebagai berikut (Rupiah penuh):

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
1 Dolar Amerika Serikat	13.567,50	13.472,50
1 Pound Sterling Inggris	18.325,62	16.555,01
1 Yen Jepang	120,52	115,07
1 Euro Eropa	16.236,23	14.175,77
1 Dolar Hong Kong	1.736,21	1.737,34
1 Riyal Arab Saudi	3.617,71	3.591,90
1 Dolar Singapura	10.154,56	9.311,93
1 Ringgit Malaysia	3.352,07	3.003,23
1 Dolar Australia	10.594,19	9.723,11
1 Renminbi	2.083,64	1.939,19
1 Baht Thailand	416,31	376,12
1 Franc Swiss	13.901,13	13.208,98
1 Dolar Kanada	10.821,97	9.986,29
1 Dolar Brunei Darussalam	10.083,61	9.311,29
1 Kroner Denmark	2.180,78	1.906,86
1 Won Korea Selatan	12,74	11,20
1 Dolar Selandia Baru	9.650,57	9.362,72
1 Kina Papua Nugini	4.219,51	4.243,86
1 Dirham Uni Emirat Arab	3.693,95	3.667,98
1 Kroner Swedia	1.650,05	1.482,52
1 Kroner Norwegia	1.649,87	1.560,42
1 Rupee India	212,49	198,40



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**aj. Penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang dan Perwakilan di luar negeri**

BRI memiliki 1 (satu) Entitas Anak di Hong Kong, 3 (tiga) Kantor Cabang di Cayman Islands, Singapura dan Timor Leste, serta 2 (dua) Kantor Perwakilan masing-masing di New York dan Hong Kong yang merupakan entitas asing yang terpisah.

Untuk tujuan penggabungan laporan keuangan konsolidasian, seluruh akun Entitas Anak, Kantor Cabang dan Perwakilan di luar negeri dijabarkan dalam Rupiah dengan kurs sebagai berikut:

- Aset dan liabilitas serta komitmen dan kontinjensi - menggunakan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan.
- Pendapatan, beban, laba dan rugi - menggunakan kurs tengah rata-rata yang berlaku pada bulan yang bersangkutan. Saldo akhir tahun merupakan penjumlahan saldo bulanan pendapatan, beban, laba dan rugi selama tahun yang bersangkutan.
- Pos ekuitas - Modal Saham dan Tambahan Modal Disetor menggunakan kurs historis.
- Laporan arus kas - menggunakan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan, kecuali pos-pos laba rugi yang menggunakan kurs tengah rata-rata dan pos-pos ekuitas yang menggunakan kurs historis.

Selisih yang timbul dari proses penjabaran laporan keuangan tersebut disajikan di kelompok ekuitas sebagai "Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing".

**ak. Instrumen derivatif**

Instrumen keuangan derivatif dinilai dan diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar. Setiap kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan diskonto arus kas dan model penentu harga atau harga yang diberikan oleh *broker* (*quoted price*) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa, yang mengacu pada PSAK No. 68: "Pengukuran Nilai Wajar" (Catatan 2c).

**al. Perpajakan**

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

### al. Perpajakan (lanjutan)

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan, Tangguhan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Kelompok Usaha mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

Untuk setiap entitas yang dikonsolidasi, pengaruh pajak atas perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak, yang masing-masing dapat berupa aset atau liabilitas, disajikan dalam jumlah neto untuk masing-masing entitas tersebut.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

### am. Informasi segmen

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Kelompok Usaha yang terlibat baik dalam menyediakan produk tertentu (segmen operasi), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup *item-item* yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. *Item-item* segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Kelompok Usaha, dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

BRI dan entitas anak menyajikan segmen usaha berdasarkan laporan internal konsolidasian yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional yaitu Direksi.

BRI telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis utama (segmen operasi) yang terbagi atas kelompok mikro, ritel, korporasi dan lainnya serta entitas anak, juga berdasarkan segmen geografis.

Segmen geografis meliputi penyediaan barang maupun jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain. Segmen geografis BRI adalah berdasarkan wilayah Indonesia, Amerika Serikat, Hong Kong, Singapura dan Timor Leste.

### an. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian BRI dan entitas anak mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

### an. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

#### **Pertimbangan**

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi BRI dan entitas anak yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian BRI dan entitas anak sebagai berikut:

#### Usaha yang berkelanjutan

Manajemen BRI telah melakukan penilaian atas kemampuan BRI dan entitas anak untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa BRI dan entitas anak memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen BRI tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan BRI dan entitas anak untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

#### Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Manajemen BRI dan entitas anak menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) telah dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi BRI dan entitas anak seperti diungkapkan pada Catatan 2c.

#### Nilai wajar atas instrumen keuangan

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 : harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Level 2 : input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3 : input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

#### Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

Surat berharga dengan klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo membutuhkan *judgement* yang signifikan. Dalam membuat *judgement* ini, BRI dan entitas anak mengevaluasi intensi dan kemampuan untuk memiliki investasi tersebut hingga jatuh tempo, maka jika BRI dan entitas anak gagal untuk memiliki investasi ini hingga jatuh tempo selain dalam kondisi-kondisi tertentu sebagai contoh, menjual dalam jumlah yang tidak signifikan saat mendekati jatuh tempo, BRI dan entitas anak harus mereklasifikasi seluruh portofolio tersebut menjadi surat berharga yang tersedia untuk dijual. Surat berharga yang tersedia untuk dijual tersebut akan diukur pada nilai wajar dan bukan menggunakan biaya yang diamortisasi.

#### Kontinjensi

Manajemen BRI dan entitas anak sedang terlibat dalam proses hukum. Perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum BRI dan entitas anak didasarkan pada analisis hasil yang potensial. Manajemen BRI dan entitas anak tidak berkeyakinan bahwa hasil dari hal ini akan mempengaruhi hasil usaha. Besar kemungkinan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa depan dapat secara material terpengaruh oleh perubahan dalam estimasi atau efektivitas dari strategi yang terkait dengan hal tersebut.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

### an. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

#### Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko untuk dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya seperti yang diungkapkan di bawah ini. BRI dan entitas anak mendasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali BRI dan entitas anak. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

#### Cadangan kerugian penurunan nilai dari kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah serta piutang sewa pembiayaan

Manajemen BRI dan entitas anak menelaah portofolio kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah serta piutang sewa pembiayaan setiap tahun, untuk menilai penurunan nilai dengan memperbaharui cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk selama periode yang diperlukan berdasarkan analisis berkelanjutan dan pemantauan terhadap rekening individual oleh petugas kredit.

Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, BRI dan entitas anak membuat penilaian, apakah terdapat data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang dapat diukur dalam laporan perkiraan arus kas masa depan dari portofolio pinjaman sebelum penurunan tersebut dapat diidentifikasi secara individual dalam portofolio tersebut.

Bukti seperti ini dapat termasuk data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan yang merugikan pada status pembayaran kelompok peminjam, atau kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok. BRI dan entitas anak menggunakan perkiraan dalam menentukan jumlah dan waktu dari arus kas masa depan ketika menentukan tingkat cadangan kerugian yang diperlukan. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi mengenai sejumlah faktor dan hasil aktual yang dapat berbeda, yang mengakibatkan perubahan terhadap jumlah cadangan kerugian di masa yang akan datang.

#### Penurunan nilai untuk surat berharga

Manajemen BRI menentukan bahwa surat berharga memiliki kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

#### Umur ekonomis dari aset tetap

Manajemen BRI memperkirakan masa manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan. Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbarui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut. Selain hal tersebut, estimasi masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada penilaian secara kolektif dengan menggunakan praktik industri, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan aset serupa. Tetap dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil masa depan dapat secara material dipengaruhi oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut di atas. Jumlah dan saat pencatatan biaya untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor dan keadaan saat pencatatan. Pengurangan dari taksiran masa manfaat dari aset tetap akan meningkatkan beban usaha.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

### an. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

#### Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

##### Penurunan nilai aset non-keuangan

BRI dan entitas anak mengevaluasi penurunan nilai aset non-keuangan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset non-keuangan tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a) Performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- b) Perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- c) Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Manajemen BRI dan entitas anak mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya pelepasan dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

##### Pengakuan aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal yang belum digunakan dalam hal terdapat kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia untuk dikompensasi terhadap kerugian yang dapat digunakan. Pertimbangan manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan saat dan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang seiring dengan strategi perencanaan pajak.

BRI menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan mengurangi jumlah tercatat dalam hal tidak adanya lagi kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak yang cukup akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan.

##### Nilai kini atas imbalan kerja

Biaya atas program pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya ditentukan dengan perhitungan aktuaris. Perhitungan aktuaris melibatkan penggunaan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset, kenaikan gaji di masa depan, tingkat kematian dan tingkat kecacatan. Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

##### Estimasi Liabilitas Klaim

Estimasi liabilitas klaim merupakan liabilitas yang disisihkan untuk memenuhi liabilitas klaim yang terjadi dan yang masih dalam proses penyelesaian atas polis-polis asuransi yang masih berlaku (policies in force). Pertimbangan manajemen Perusahaan diperlukan untuk menentukan jumlah estimasi liabilitas klaim yang dapat diakui.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

### an. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

#### Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

##### Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan

Perusahaan mencatat liabilitas kontrak asuransi jangka panjang dengan metode nilai kini estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan termasuk seluruh opsi yang disediakan ditambah dengan nilai kini estimasi seluruh biaya yang akan dikeluarkan dan juga mempertimbangkan penerimaan premi di masa depan. Asumsi utama yang mendasari metode tersebut adalah pengalaman klaim masa lalu dan tingkat diskonto.

### ao. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non produktif dan komitmen dan kontinjensi

Sesuai dengan Surat Bank Indonesia (BI) No. 13/658/DPNP/IDPnP tanggal 23 Desember 2011, BRI dan BRI Agro tidak diwajibkan lagi untuk membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non produktif dan transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi), namun manajemen BRI tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada standar akuntansi yang berlaku.

Atas aset non produktif, manajemen BRI dan BRI Agro menentukan cadangan kerugian penurunan nilai pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya pelepasan.

Atas komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko kredit, manajemen BRI dan BRI Agro menentukan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan selisih antara nilai tercatat dan nilai kini atas pembayaran kewajiban yang diharapkan akan terjadi (ketika pembayaran atas jaminan tersebut menjadi *probable*).

### ap. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan

BRI dan entitas anaknya telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2017, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan konsolidasian, yaitu:

- a. PSAK No. 1 (Amandemen 2015), "Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan", memberikan klarifikasi terkait penerapan persyaratan materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan. Amandemen PSAK No. 1 ini juga mengakibatkan amandemen terhadap PSAK (consequential amendment) sebagai berikut: PSAK No. 3 "Laporan Keuangan Interim", PSAK No. 5 "Segmen Operasi", PSAK No. 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", dan PSAK No. 62 "Kontrak Asuransi".
- b. PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016), "Laporan Keuangan Interim", mengklarifikasi bahwa pengungkapan interim yang dipersyaratkan harus dicantumkan dalam laporan keuangan interim atau melalui referensi silang dari laporan keuangan interim seperti komentar manajemen atau laporan risiko yang tersedia untuk pengguna laporan keuangan interim dan pada saat yang sama. Jika pengguna laporan keuangan tidak dapat mengakses informasi yang ada pada referensi silang dengan persyaratan dan waktu yang sama maka laporan keuangan interim entitas dianggap tidak lengkap.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**ap. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)**

BRI dan entitas anaknya telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2017, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan konsolidasian, yaitu (lanjutan):

- c. PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016), "Imbalan Kerja", penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pasar obligasi korporasi berkualitas tinggi dinilai berdasarkan denominasi mata uang obligasi tersebut dan bukan berdasarkan negara di mana obligasi tersebut berada.
- d. PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan". Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa entitas harus menilai sifat dari imbalan kontrak jasa untuk menentukan apakah entitas memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan dan apakah persyaratan pengungkapan terkait keterlibatan berkelanjutan terpenuhi.
- e. PSAK No. 101 (Revisi 2016), "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", merupakan revisi terhadap ilustrasi laporan keuangan asuransi syariah sebagai dampak dari revisi PSAK No. 108 "Akuntansi Asuransi Syariah". Dimana penyisihan manfaat polis masa depan disajikan dilaporan posisi keuangan sebagai liabilitas.
- f. PSAK No. 102 (Amandemen 2016), "Akuntansi Murabahah", PSAK No. 103 (Amandemen 2016), "Akuntansi Salam", PSAK No.104 (Amandemen 2016), "Akuntansi *Istishna*", PSAK No. 107 (Amandemen 2016), "Akuntansi *Ijarah*", amandemen ini merubah definisi nilai wajar mengikuti definisi nilai wajar pada PSAK No. 68 "Pengukuran Nilai Wajar". Nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.
- g. PSAK No. 108 (Revisi 2016), "Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah", revisi PSAK ini memberikan perubahan pengaturan terkait akuntansi asuransi syariah seperti pengakuan awal kontribusi peserta, perhitungan penyisihan teknis manfaat polis masa depan, serta penyajian atas revisi PSAK No. 108 pada laporan keuangan.
- h. ISAK No. 31, "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi", merupakan interpretasi atas karakteristik bangunan yang digunakan sebagai bagian dari definisi properti investasi dalam PSAK No. 13 "Properti Investasi". Bangunan sebagaimana dimaksud dalam definisi properti investasi mengacu pada struktur yang memiliki karakteristik fisik yang umumnya diasosiasikan dengan suatu bangunan yang mengacu pada adanya dinding, lantai, dan atap yang melekat pada aset.

Penerapan PSAK diatas, tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**3. KAS**

	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Rupiah		23.780.207		24.499.503
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	24.518.731	332.658	25.130.556	338.571
Riyal Arab Saudi	44.538.523	161.128	27.860.774	100.072
Dolar Singapura	12.426.367	126.185	8.179.992	76.171
Dolar Australia	9.523.110	100.890	4.901.050	47.653
Kina Papua Nugini	20.351.860	85.875	6.273.700	26.625
Euro Eropa	5.057.112	82.108	3.703.923	52.506
Ringgit Malaysia	21.343.230	71.544	5.869.535	17.628
Renminbi	8.298.458	17.291	7.706.154	14.944
Yen Jepang	107.417.978	12.945	113.550.640	13.066
Dirham Uni Emirat Arab	2.264.530	8.365	1.805.500	6.623
Pound Sterling Inggris	279.611	5.124	324.900	5.379
Dolar Hong Kong	2.558.587	4.442	2.981.757	5.180
Franc Swiss	165.269	2.297	130.200	1.720
Dolar Brunei Darussalam	196.065	1.977	237.922	2.215
Dolar Kanada	140.265	1.518	72.670	726
Baht Thailand	3.624.785	1.509	5.394.605	2.029
Dolar Selandia Baru	143.509	1.385	109.491	1.025
Won Korea Selatan	25.910.970	330	34.316.799	384
Rupiah India	19.307	4	19.307	4
		1.017.575		712.521
<b>Total</b>		<b>24.797.782</b>		<b>25.212.024</b>

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo kas sudah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) adalah masing-masing sebesar Rp8.572.694 dan Rp9.148.888, serta ASD187.828 (angka penuh) dan ASDNil.

**4. GIRO PADA BANK INDONESIA**

Giro pada Bank Indonesia terdiri atas:

	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Rupiah		47.081.113		44.066.637
Dolar Amerika Serikat	816.242.160	11.074.366	858.735.147	11.569.309
<b>Total</b>		<b>58.155.479</b>		<b>55.635.946</b>

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, di dalam giro pada Bank Indonesia terdapat giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah, masing-masing sebesar Rp1.797.626 dan Rp1.201.177.

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

#### 4. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Rasio GWM BRI (Entitas Induk) (tidak diaudit) pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
GWM Utama - Rupiah	6,52%	6,94%
GWM Sekunder - Rupiah	15,09	9,96
GWM Utama - Valuta Asing	8,15	8,03

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2017 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/6/PBI/2017 tanggal 17 April 2017 tentang "Perubahan Kelima atas PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional". Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2016 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang "Perubahan Ketiga atas PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional".

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas, BRI harus memenuhi persyaratan GWM Utama dalam Rupiah masing-masing sebesar 6,5%, sedangkan untuk mata uang asing masing-masing sebesar 8%. Untuk GWM Sekunder masing-masing adalah sebesar 4% dalam Rupiah.

Selain GWM Utama dan Sekunder, BRI juga diharuskan memenuhi GWM *Loan to Funding Ratio* (LFR), jika LFR BRI kurang dari batas bawah target Bank Indonesia (BI) yaitu sebesar 80% atau melebihi batas atas target BI yaitu sebesar 92% dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) BRI lebih kecil dari KPM insentif BI yang sebesar 14%.

BRI telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang GWM pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

#### 5. GIRO PADA BANK LAIN

a) Berdasarkan Mata Uang:

	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>		64.351		119.480
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	241.441.855	3.275.762	441.928.870	5.953.887
Renminbi	368.054.977	766.894	289.301.369	561.010
Euro Eropa	30.473.101	494.768	216.459.615	3.068.481
Dolar Singapura	32.966.963	334.765	44.289.848	412.424
Dolar Hong Kong	186.764.137	324.261	91.641.803	159.213
Yen Jepang	2.640.107.545	318.172	1.850.099.200	212.882
Riyal Arab Saudi	33.258.310	120.319	13.268.872	47.660
Dolar Australia	5.448.385	57.721	14.336.181	139.392
Pounds Sterling Inggris	3.124.408	57.257	9.564.477	158.340
Franc Swiss	3.707.809	51.543	2.559.185	33.804
Dolar Selandia Baru	1.624.150	15.674	1.349.992	12.640
Dirham Uni Emirat Arab	3.057.362	11.294	26.818.881	98.371
Dolar Kanada	527.067	5.704	1.152.637	11.511
Kroner Norwegia	3.170.148	5.230	4.765.927	7.437
Kroner Swedia	439.543	725	2.249.280	3.335
		5.840.089		10.880.387
		5.904.440		10.999.867

--

Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)**

a) Berdasarkan Mata Uang (lanjutan):

	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>		5.000		9.258
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Hong Kong	5.669.667	9.844	5.273.792	9.162
Dolar Amerika Serikat	471.702	6.400	328.678	4.428
		16.244		13.590
		21.244		22.848
<b>Total</b>		<b>5.925.684</b>		<b>11.022.715</b>

b) Berdasarkan Bank:

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Central Asia Tbk	39.268	34.910
Citibank, N.A.	8.583	26.315
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	7.438	9.554
BPR Warga Dani Bringin Dana Sejahtera	6.587	6.431
Standard Chartered Bank	478	606
Lainnya	1.997	41.664
	64.351	119.480
<u>Mata uang asing</u>		
JP Morgan Chase Bank, N.A.	1.647.615	5.341.827
Standard Chartered Bank	785.301	863.323
Bank of China, Ltd.	705.571	490.368
ING Belgium N.V. Brussels	601.926	1.838.108
Bank of New York Mellon	263.211	240.474
Lainnya	1.836.465	2.106.287
	5.840.089	10.880.387
	5.904.440	10.999.867
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.422	8.096
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.466	1.014
PT Bank BNI Syariah	79	74
PT Bank Syariah Mandiri	33	74
	5.000	9.258



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)**

b) Berdasarkan Bank (lanjutan):

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<u>Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)</u>		
<u>Mata uang asing</u>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.477	9.626
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.767	3.964
	16.244	13.590
	21.244	22.848
<b>Total</b>	<b>5.925.684</b>	<b>11.022.715</b>

c) Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, seluruh giro pada bank lain diklasifikasikan "Lancar".

d) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

	2017	2016
Rupiah	0,37%	0,27%
Mata uang asing	0,35	0,26

e) BRI melakukan penilaian cadangan kerugian penurunan nilai atas giro pada bank lain secara individual dengan menggunakan bukti obyektif.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, karena Manajemen berkeyakinan bahwa giro pada bank lain dapat ditagih.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tidak terdapat giro pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan.

**6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN**

a) Berdasarkan Mata Uang dan Jenis:

	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Bank Indonesia				
Term Deposit		12.997.000		5.997.961
Deposit Facility		11.087.984		52.359.589
Deposit Facility Syariah		1.968.000		963.000
		26.052.984		59.320.550

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)**

a) Berdasarkan Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>				
<u>Rupiah (lanjutan)</u>				
<i>Inter-bank call money</i>				
PT Bank Danamon				
Indonesia Tbk		400.000		70.000
PT Bank Pan Indonesia Tbk		300.000		60.000
PT Bank OCBC NISP Tbk		300.000		80.000
PT Bank Aceh Syariah		200.000		200.000
PT Bank Sumitomo				
Mitsui Indonesia		180.000		250.000
PT BPD Riau Kepri		150.000		25.000
PT BPD Jawa Barat dan				
Banten Tbk		110.000		245.000
PT Bank Mega Tbk		100.000		-
PT BPD Jambi		100.000		50.000
PT BPD Jawa Timur Tbk		100.000		50.000
PT Bank ANZ Indonesia		100.000		-
PT Bank ICBC Indonesia		100.000		-
J.P. Morgan Chase Bank, N.A.		100.000		100.000
PT BPD Kalimantan Timur				
dan Kalimantan Utara		85.000		-
PT BPD Sulawesi Tenggara		75.000		-
PT Bank Tabungan				
Pensiunan Nasional Tbk		75.000		-
PT Bank CIMB Niaga Tbk		50.000		70.000
PT BPD Sulawesi Tengah		50.000		50.000
PT Bank CTBC Indonesia		50.000		-
PT Bank KEB Hana Indonesia		30.000		-
PT BPD Jawa Tengah		20.000		50.000
Standard Chartered Bank		-		200.000
PT Bank Sinarmas Tbk		-		80.000
PT Bank Bukopin Tbk		-		80.000
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk		-		70.000
PT BPD Maluku dan Maluku Utara		-		50.000
PT BPD Lampung		-		50.000
PT Bank Victoria				
International Tbk		-		30.000
PT Bank Maybank				
Indonesia Tbk		-		20.000
PT Bank DBS Indonesia		-		20.000
PT Bank Victoria Syariah		-		20.000
PT Bank Kesejahteraan Ekonomi		-		20.000
		2.675.000		1.940.000
<b>Deposito Berjangka</b>				
PT Bank Bukopin Tbk		9.250		3.300
PT Bank Ganesha		4.800		-
PT Bank Muamalat				
Indonesia Tbk		4.800		-
PT Bank Danamon				
Indonesia Tbk		2.200		-
PT Bank Sahabat Sampoerna		2.000		2.000
PT Bank Mayapada				
Internasional Tbk		1.700		-
PT BPD Jawa Barat				
dan Banten Tbk		1.300		-
PT BPD Riau Kepri		300		-
PT Bank HSBC Indonesia		200		-
		26.550		5.300



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)**

a) Berdasarkan Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>				
<u>Rupiah (lanjutan)</u>				
Penempatan Lainnya				
(Banker's Acceptance)				
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia		400.000		-
PT Bank KEB Hana Indonesia		-		130.000
		400.000		130.000
		29.154.534		61.395.850
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Bank Indonesia				
Term Deposit	1.399.887.185	18.992.969	999.961.670	13.471.984
<u>Inter-bank call money</u>				
Wells Fargo Bank, N.A.	261.100.000	3.542.474	70.300.000	947.117
Federal Reserve Bank	101.662.902	1.379.311	62.352.096	840.039
The Bank of New York Mellon	52.900.000	717.721	33.700.000	454.023
Citibank, N.A.	27.530.000	373.513	29.940.000	403.367
TD Bank, N.A.	119.787	1.625	627.068	8.448
PT Bank BNP Paribas Indonesia		-	1.310.193	17.652
		6.014.644		2.670.646
<u>Deposito Berjangka</u>				
U.S. Bank	9.776.443	132.643	228.828	3.083
TD Bank, N.A.	260.475	3.534	511.630	6.893
		136.177		9.976
<u>Penempatan Lainnya (Banker's Acceptance)</u>				
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	25.000.000	339.188		-
PT Bank Mega Tbk	10.000.000	135.675	9.996.546	134.678
		474.863		134.678
		25.618.653		16.287.284
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
<u>Inter-bank call money</u>				
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia		-		200.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		-		200.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		-		40.000
		-		440.000

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)**

a) Berdasarkan Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)</u>				
<u>Rupiah (lanjutan)</u>				
Deposito Berjangka				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		43.400		5.400
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (UUS)		8.550		4.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk		7.200		8.220
PT Bank BNI Syariah		2.000		2.000
		61.150		19.620
		61.150		459.620
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Penempatan Lainnya (Banker's Acceptance)				
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	10.000.000	135.675		-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.000.000	135.675		-
		271.350		-
<b>Total</b>		<b>55.105.687</b>		<b>78.142.754</b>

b) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu penempatan berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	28.524.534	61.265.850
> 1 bulan - 3 bulan	630.000	130.000
	29.154.534	61.395.850
<u>Mata uang asing</u>		
≤ 1 bulan	25.008.603	16.287.284
> 1 bulan - 3 bulan	270.863	-
> 3 bulan - 1 tahun	339.187	-
	25.618.653	16.287.284
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	61.150	459.620
<u>Mata uang asing</u>		
> 1 bulan - 3 bulan	271.350	-
<b>Total</b>	<b>55.105.687</b>	<b>78.142.754</b>



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)**

c) Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan "Lancar".

d) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<u>Rupiah</u>		
Penempatan pada Bank Indonesia	3,83%	4,35%
Penempatan pada bank lain	5,13	6,46
<u>Mata uang asing</u>		
Penempatan pada Bank Indonesia	0,69%	0,44%
Penempatan pada bank lain	1,40	0,62

BRI melakukan penilaian cadangan kerugian penurunan nilai atas penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain secara individual dengan menggunakan bukti obyektif.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang mengalami penurunan nilai dan yang dibatasi penggunaannya.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, karena Manajemen berkeyakinan bahwa penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dapat ditagih.

**7. EFEK-EFEK**

a) Berdasarkan Tujuan, Mata Uang dan Jenis:

	<b>31 Desember 2017</b>		<b>31 Desember 2016</b>	
	<b>Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)</b>	<b>Ekuivalen Rp</b>	<b>Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)</b>	<b>Ekuivalen Rp</b>
<u>Nilai wajar melalui laba rugi</u>				
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Reksadana		812.205		273.602
Sertifikat Deposito Bank Indonesia		385.040		-
Obligasi subordinasi		50.976		45.880
Obligasi		35.833		54.416
Lainnya		134.459		111.464
		<u>1.418.513</u>		<u>485.362</u>
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Reksadana	542.921	7.366		-
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Obligasi pemerintah		167.838		84.746
Obligasi		35.545		10.329
Reksadana		21.264		19.786
Lainnya		82.647		72.759
		<u>307.294</u>		<u>187.620</u>

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**7. EFEK-EFEK (lanjutan)**

a) Berdasarkan Tujuan, Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<b>Nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)</b>				
<b>Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)</b>				
<b>Dolar Amerika Serikat</b>				
Obligasi pemerintah	1.989.302	26.990		-
Reksadana	154.753	2.100	147.263	1.984
		29.090		1.984
		1.762.263		674.966
<b>Tersedia untuk dijual</b>				
<b>Pihak ketiga</b>				
<b>Rupiah</b>				
Sertifikat Deposito Bank Indonesia		35.482.251		6.023.957
Obligasi		2.994.315		2.141.239
Reksadana		1.086.590		552.481
Obligasi subordinasi		796.981		812.649
Negotiable Certificate of Deposits		686.354		-
Medium-Term Notes		57.000		40.000
Sertifikat Bank Indonesia		-		8.895.833
Lainnya		103.528		82.796
		41.207.019		18.548.955
<b>Dolar Amerika Serikat</b>				
Sertifikat Bank Indonesia	445.640.048	6.046.221	276.240.564	3.721.651
Obligasi	32.756.717	444.427	59.913.082	807.179
U.S Treasury Bonds	17.316.502	234.941	25.822.008	347.887
		6.725.589		4.876.717
<b>Dolar Singapura</b>				
Monetary Authority of Singapore (MAS) Bills	42.460.236	431.165	35.000.048	325.918
Singapore Government Securities	18.167.760	184.486	21.338.863	198.706
		615.651		524.624
<b>Pihak berelasi (Catatan 44)</b>				
<b>Rupiah</b>				
Obligasi pemerintah		50.412.771		21.158.568
Obligasi		6.078.903		2.408.561
Reksadana		418.278		373.303
Medium-Term Notes		150.000		155.074
Negotiable Certificate of Deposits		77.807		-
Lainnya		102.264		77.508
		57.240.023		24.173.014
<b>Dolar Amerika Serikat</b>				
Obligasi pemerintah	1.739.665.407	23.602.910	1.441.010.726	19.414.017
Obligasi	53.137.755	720.946	106.060.345	1.428.898
		24.323.856		20.842.915
<b>Euro Eropa</b>				
Obligasi pemerintah	50.205.906	815.155	37.108.474	526.041
		130.927.293		69.492.266



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**7. EFEK-EFEK (lanjutan)**

a) Berdasarkan Tujuan, Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<b><u>Dimiliki hingga jatuh tempo</u></b>				
<b><u>Pihak ketiga</u></b>				
<b><u>Rupiah</u></b>				
Obligasi		1.182.953		1.444.330
Sertifikat Deposito Bank Indonesia		597.476		-
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)		250.000		1.650.000
Medium-Term Notes		150.000		150.000
Negotiable Certificate of Deposits		106.968		660.243
Obligasi subordinasi		20.000		60.000
Sertifikat Bank Indonesia		-		2.009.192
		<u>2.307.397</u>		<u>5.973.765</u>
<b><u>Dolar Amerika Serikat</u></b>				
Wesel Tagih		-	2.000.000	26.945
Lainnya	37.463.410	508.285	43.108.406	580.778
		<u>508.285</u>		<u>607.723</u>
<b><u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u></b>				
<b><u>Rupiah</u></b>				
Obligasi pemerintah		30.170.232		32.185.729
Obligasi		3.027.090		2.567.989
Negotiable Certificate of Deposits		155.453		808.282
Medium-Term Notes		-		99.710
		<u>33.352.775</u>		<u>35.661.710</u>
<b><u>Dolar Amerika Serikat</u></b>				
Obligasi pemerintah	1.302.517.859	17.671.911	1.391.260.144	18.743.752
Obligasi	14.344.879	194.624	54.871.034	739.250
		<u>17.866.535</u>		<u>19.483.002</u>
<b><u>Euro Eropa</u></b>				
Obligasi pemerintah	12.003.295	194.888	12.039.541	170.670
		<u>54.229.880</u>		<u>61.896.870</u>
Total		186.919.436		132.064.102
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		(758)		(758)
<b>Bersih</b>		<b><u>186.918.678</u></b>		<b><u>132.063.344</u></b>

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**7. EFEK-EFEK (lanjutan)**

b) Berdasarkan Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, seluruh efek-efek diklasifikasikan "Lancar", kecuali Obligasi I Tahun 2003 yang diterbitkan oleh PT Great River International diklasifikasikan "Macet" yang dimiliki oleh BRI Life (entitas anak), dimana obligasi tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp758.

Atas hal tersebut diatas, manajemen BRI Life per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 telah melakukan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp758.

c) Berdasarkan Sisa Umur Hingga Jatuh Tempo:

Klasifikasi jangka waktu efek-efek berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	43.039.517	19.419.942
> 1 bulan - 3 bulan	782.535	308.968
> 3 bulan - 1 tahun	494.140	4.168.321
> 1 tahun	616.737	1.110.851
	44.932.929	25.008.082
<u>Mata uang asing</u>		
≤ 1 bulan	7.507.182	5.401.340
> 1 bulan - 3 bulan	206.371	267.955
> 3 bulan - 1 tahun	143.338	339.769
	7.856.891	6.009.064
	52.789.820	31.017.146
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	57.982.462	25.393.914
> 1 bulan - 3 bulan	4.557.673	4.151.328
> 3 bulan - 1 tahun	2.034.387	3.685.462
> 1 tahun	26.325.570	26.791.640
	90.900.092	60.022.344
<u>Mata uang asing</u>		
≤ 1 bulan	26.127.056	21.362.145
> 1 bulan - 3 bulan	-	504.355
> 3 bulan - 1 tahun	3.161.410	996.873
> 1 tahun	13.941.058	18.161.239
	43.229.524	41.024.612
	134.129.616	101.046.956
Total	186.919.436	132.064.102
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(758)	(758)
<b>Bersih</b>	<b>186.918.678</b>	<b>132.063.344</b>



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**7. EFEK-EFEK (lanjutan)**

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit:

d.1. Obligasi Pemerintah

Obligasi Pemerintah merupakan obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dalam rangka pengelolaan portofolio surat utang negara tersebut, seperti Surat Utang Negara (SUN), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan obligasi Pemerintah valuta asing yang diperoleh melalui pasar perdana dan juga pasar sekunder, termasuk *U.S Treasury Bonds* dan *Singapore Government Securities*. Rincian obligasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<u>Nilai wajar melalui laba rugi</u>		
<u>Rupiah</u>		
<i>Fixed Rate</i>	70.418	63.762
Obligasi Republik Indonesia	53.904	-
Obligasi Pemerintah Sukuk	43.516	20.984
	<u>167.838</u>	<u>84.746</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Obligasi Republik Indonesia	26.990	-
	<u>194.828</u>	<u>84.746</u>
<u>Tersedia untuk dijual</u>		
<u>Rupiah</u>		
<i>Fixed Rate</i>	31.565.767	16.299.512
Obligasi Pemerintah Sukuk	9.383.086	3.249.526
Surat Perbendaharaan Negara	8.568.221	888.536
Obligasi Republik Indonesia	895.697	720.994
	<u>50.412.771</u>	<u>21.158.568</u>
<u>Mata uang asing</u>		
<i>Fixed Rate</i> Dolar Amerika	19.407.161	14.539.987
Obligasi Pemerintah Sukuk	4.195.749	4.874.030
Obligasi Pemerintah Euro Eropa	815.155	526.041
<i>U.S. Treasury Bonds</i>	234.941	347.887
<i>Singapore Government Securities (SIGB)</i>	184.486	198.706
	<u>24.837.492</u>	<u>20.486.651</u>
	<u>75.250.263</u>	<u>41.645.219</u>

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**7. EFEK-EFEK (lanjutan)**

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo</u>		
<u>Rupiah</u>		
<i>Fixed Rate</i>		
Obligasi Pemerintah Sukuk	15.772.583	14.005.826
Surat Perbendaharaan Negara	12.676.512	14.933.145
Obligasi Republik Indonesia	1.587.418	2.327.809
	133.719	918.949
	30.170.232	32.185.729
<u>Mata uang asing</u>		
Obligasi Pemerintah Sukuk	11.524.572	11.579.660
<i>Fixed Rate</i>	6.147.339	7.164.092
Obligasi Pemerintah Euro Eropa	194.888	170.670
	17.866.799	18.914.422
	48.037.031	51.100.151
<b>Total</b>	<b>123.482.122</b>	<b>92.830.116</b>

Informasi mengenai tingkat suku bunga dan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017	
	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo
<u>Nilai wajar melalui laba rugi</u>		
<u>Rupiah</u>		
<i>Fixed Rate</i>		
FR0064	6,13	15 Mei 2028
FR0065	6,63	15 Mei 2033
FR0074	7,50	15 Agustus 2032
FR0075	7,50	15 Mei 2038
Obligasi Republik Indonesia		
ORI012	9,00	15 Oktober 2018
ORI014	5,85	15 Oktober 2020
Obligasi Pemerintah Sukuk		
IFR0006	10,25	15 Maret 2030
PBS005	6,75	15 April 2043
PBS006	8,25	15 September 2020
PBS011	8,75	15 Agustus 2023
PBS012	6,50	15 November 2031
PBS013	6,25	15 Mei 2019
SR007	8,25	11 Maret 2018
SR009	6,90	10 Maret 2020



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**7. EFEK-EFEK (lanjutan)**

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga dan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2017	
	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo
<u>Nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)</u>		
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
Obligasi Republik Indonesia		
ORI0123	2,95	11 Januari 2023
<u>Tersedia untuk dijual</u>		
<u>Rupiah</u>		
<i>Fixed Rate</i>		
FR0035	12,90	15 Juni 2022
FR0040	11,00	15 September 2025
FR0053	8,25	15 Juli 2021
FR0059	7,00	15 Mei 2027
FR0061	7,00	15 Mei 2022
FR0063	5,63	15 Mei 2023
FR0064	6,13	15 Mei 2028
FR0069	7,88	15 April 2019
FR0074	7,50	15 Agustus 2032
FR0075	7,50	15 Mei 2038
Obligasi Pemerintah Sukuk		
PBS003	6,00	15 Januari 2027
PBS004	6,10	15 Februari 2037
PBS005	6,75	15 April 2043
PBS006	8,25	15 September 2020
PBS007	9,00	15 September 2040
PBS009	7,75	25 Januari 2018
PBS011	8,75	15 Agustus 2023
PBS012	8,88	15 November 2031
PBS013	6,25	15 Mei 2019
PBS014	6,50	15 Mei 2021
SR007	8,25	11 Maret 2018
SR008	8,30	10 Maret 2019
SR009	6,90	10 Maret 2020
IFR002	11,95	15 Agustus 2018
Surat Perbendaharaan Negara	beragam	beragam
Obligasi Republik Indonesia		
ORI012	9,00	15 Oktober 2018
ORI013	6,60	15 Oktober 2019
ORI014	5,85	15 Oktober 2020

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**7. EFEK-EFEK (lanjutan)**

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga dan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2017	
	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo
<u>Tersedia untuk dijual (lanjutan)</u>		
<u>Mata uang asing</u>		
<i>Fixed Rate</i> Dolar Amerika		
RI0018	6,88	17 Januari 2018
RI0122	3,70	8 Januari 2022
RI0125	4,13	15 Januari 2025
RI0126	2,95	1 Juni 2026
RI0320	5,88	13 Maret 2020
RI0422	3,75	25 April 2022
RI0521	4,88	5 Mei 2021
RI0626	2,95	24 Juni 2026
RI190304	11,63	4 Maret 2019
<i>U.S. Treasury Bonds</i>	beragam	beragam
Obligasi Pemerintah Euro Eropa		
RIEUR0275	3,38	30 Juli 2025
RIEUR0623	2,63	14 Juni 2023
RIEUR0721	2,88	8 Juli 2021
RIEUR0724	2,15	18 Juli 2024
<i>Singapore Government Securities</i>		
SIGB 060126	2,13	1 Juni 2026
Obligasi Pemerintah Sukuk		
INDOIS 18	4,00	21 November 2018
INDOIS 19S	6,13	15 Maret 2019
INDOIS 21	3,40	31 Maret 2021
INDOIS 21A	3,40	29 Maret 2021
INDOIS 22	3,40	29 Maret 2022
INDOIS 25	4,33	28 Mei 2025
INDOIS 26	4,55	29 Maret 2026
INDOIS 24	4,35	10 September 2024
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo</u>		
<u>Rupiah</u>		
<i>Fixed Rate</i>		
FR0034	12,80	15 Juni 2021
FR0038	11,60	15 Agustus 2018
FR0039	11,75	15 Agustus 2023
FR0040	11,00	15 September 2025
FR0042	10,25	15 Juli 2027
FR0043	10,25	15 Juli 2022
FR0044	10,00	15 September 2024
FR0045	9,75	15 Mei 2037
FR0046	9,50	15 Juli 2023
FR0047	10,00	15 Februari 2028



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**7. EFEK-EFEK (lanjutan)**

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga dan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2017	
	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)</u>		
<u>Rupiah (lanjutan)</u>		
Obligasi Pemerintah Sukuk		
SR007	8,25	11 Maret 2018
PBS001	4,45	15 Februari 2018
PBS002	5,45	15 Januari 2022
PBS003	6,00	15 Januari 2027
PBS004	6,10	15 Februari 2037
PBS006	8,25	15 September 2020
PBS009	7,75	25 Januari 2018
PBS011	8,75	15 Agustus 2023
PBS014	6,50	15 Mei 2021
IFR0007	10,25	15 Januari 2025
Surat Perbendaharaan Negara	beragam	beragam
Obligasi Republik Indonesia		
ORI012	9,00	15 Oktober 2018
ORI013	6,60	15 Oktober 2019
<u>Mata uang asing</u>		
Obligasi Pemerintah Sukuk		
INDOIS 18	4,00	21 November 2018
INDOIS 19	6,13	15 Maret 2019
INDOIS 19S	6,13	15 Maret 2019
INDOIS 21	3,40	31 Maret 2021
INDOIS 21A	3,40	29 Maret 2021
INDOIS 22	3,40	29 Maret 2022
INDOIS 24	4,35	10 September 2024
INDOIS 25	4,33	28 Mei 2025
INDOIS 26	4,55	29 Maret 2026
<i>Fixed Rate</i>		
RI0018	6,88	17 Januari 2018
RI0124	5,88	15 Januari 2024
RI0126	4,75	8 Januari 2026
RI0320	5,88	13 Maret 2020
RI0422	3,75	25 April 2022
RI0521	4,88	5 Mei 2021
RI1023	5,38	17 Oktober 2023
RI190304	11,63	4 Maret 2019
USDFR0002	4,05	24 Juni 2026
Obligasi Pemerintah Euro Eropa		
RIEUR0623	2,62	14 Juni 2023
RIEUR0721	2,87	8 Juli 2021
RIEUR0725	3,37	30 Juli 2025

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**7. EFEK-EFEK (lanjutan)**

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Nilai pasar Obligasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai "Nilai Wajar melalui Laba Rugi dan Tersedia untuk dijual" berkisar dari 84,99% sampai dengan 149,63% dan 74,48% sampai dengan 135,63% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

d.2. Obligasi

Rincian obligasi adalah sebagai berikut:

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<u>Nilai wajar melalui laba rugi</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Surya Artha Nusantara Finance	15.335	19.740
PT Medco Energi Internasional Tbk	7.491	10.160
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	7.248	7.238
PT Summarecon Agung Tbk	3.120	5.103
PT Indosat Tbk	2.639	2.597
Lainnya	-	9.578
	35.833	54.416
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Pupuk Indonesia (Persero)	30.633	-
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	4.912	1.812
Lainnya	-	8.517
	35.545	10.329
	71.378	64.745
<u>Tersedia untuk dijual</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank OCBC NISP Tbk	404.543	246.165
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	294.642	106.133
PT Bank CIMB Niaga Tbk	274.488	129.375
PT Bank Pan Indonesia Tbk	264.344	243.247
PT Astra Sedaya Finance	232.123	365.786
PT Maybank Indonesia Finance	187.393	35.581
PT Bank UOB Indonesia	156.774	132.589
PT Toyota Astra Financial Services	119.100	126.881
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	105.866	64.869
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	90.165	-
Lainnya	864.877	690.613
	2.994.315	2.141.239



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**7. EFEK-EFEK (lanjutan)**

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Rincian obligasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<u>Tersedia untuk dijual (lanjutan)</u>		
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>		
<u>Mata uang asing</u>		
JP Morgan Chase Bank, N.A.	80.834	105.320
Alibaba Group Holding Ltd.	69.971	66.622
Oversea-Chinese Banking Corporation	56.307	54.283
Xerox Corporation	40.117	38.655
Macy's Inc.	26.108	26.298
Province of Ontario	12.987	12.978
Bank of America	10.245	9.786
Citigroup Inc.	10.164	9.792
Wells Fargo & Company	9.774	9.669
AT&T, Inc.	8.667	8.289
Lainnya	119.253	465.487
	444.427	807.179
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	1.126.131	535.518
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	783.305	349.854
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	682.133	48.979
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	461.890	-
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	450.181	157.814
PT Indonesia Power	383.547	-
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	318.613	275.649
PT Pegadaian (Persero)	299.507	105.224
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	320.350	287.893
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	280.192	144.717
Lainnya	973.054	502.913
	6.078.903	2.408.561
<u>Mata uang asing</u>		
PT Pertamina (Persero)	352.610	257.029
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	237.779	146.181
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	79.766	100.658
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	36.918	100.613
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	13.873	209.527
Lainnya	-	614.890
	720.946	1.428.898
	10.238.591	6.785.877

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**7. EFEK-EFEK (lanjutan)**

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Rincian obligasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Pan Indonesia Tbk	185.441	147.385
PT Bank OCBC NISP Tbk	145.046	145.157
PT Bank UOB Indonesia	85.242	85.369
PT BCA Finance	76.976	143.105
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	75.000	74.713
PT Bank CIMB Niaga Tbk	51.118	93.205
PT Indonesia Infrastructure Finance	49.998	50.000
PT Toyota Astra Financial Services	32.998	33.000
PT Astra Sedaya Finance	28.020	39.221
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	20.012	106.083
Lain-lain	433.102	527.092
	1.182.953	1.444.330
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Pupuk Indonesia (Persero)	940.237	116.011
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	506.341	506.239
PT Pegadaian (Persero)	328.125	464.436
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	260.186	308.272
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	237.256	231.282
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	114.864	172.418
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	95.000	95.000
PT Mandiri Tunas Finance	89.996	124.075
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	30.000	138.766
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	16.101	29.178
Lain-lain	408.984	382.312
	3.027.090	2.567.989
<u>Mata uang asing</u>		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	55.314	62.902
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	53.727	52.148
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	35.126	33.863
PT Pertamina (Persero)	28.646	34.514
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	21.811	21.353
Lainnya	-	534.470
	194.624	739.250
	4.404.667	4.751.569
<b>Total</b>	<b>14.714.636</b>	<b>11.602.191</b>



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**7. EFEK-EFEK (lanjutan)**

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017		
	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat <sup>1</sup>
<u>Nilai wajar melalui laba rugi</u>			
<u>Pihak ketiga</u>			
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk			
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2013 Seri C	11,00	24 Oktober 2018	idAAA
PT Indosat Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri B	10,30	12 Desember 2019	idAAA
PT Medco Energi Internasional Tbk			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 Seri B	11,30	15 Juli 2021	idA+
PT Surya Artha Nusantara Finance			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 Seri B	9,00	9 Juni 2019	idAA-
PT Summarecon Agung Tbk			
Sukuk <i>ljarah</i> Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013	10,85	11 Desember 2018	idA+(sy)
Sukuk <i>ljarah</i> Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014	11,50	10 Oktober 2019	idA+(sy)
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>			
PT Pupuk Indonesia (Persero)			
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017 Seri A	7,50	9 November 2020	AAA
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)			
Sukuk <i>ljarah</i> Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013	8,00	5 Juli 2020	idAAA(sy)
Sukuk <i>ljarah</i> V Tahun 2010 Seri B	10,40	8 Juli 2022	idAAA(sy)
<u>Tersedia untuk dijual</u>			
<u>Pihak ketiga</u>			
<u>Rupiah</u>			
PT Bank OCBC NISP Tbk			
Tahap II Tahun 2015 Seri C	9,80	10 Februari 2018	idAAA
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 Seri C	8,25	11 Mei 2019	idAAA
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri C	7,70	22 Agustus 2020	idAAA
PT Bank CIMB Niaga Tbk			
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 Seri C	9,75	20 November 2018	idAAA
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 Seri C	8,25	3 November 2021	idAAA
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri B	7,70	23 Agustus 2020	idAAA
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri C	8,15	23 Agustus 2022	idAAA
PT Bank Pan Indonesia Tbk			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016	9,15	28 Juni 2021	idAA
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016	8,75	27 Oktober 2021	idAA
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk			
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2013 Seri C	11,00	24 Oktober 2018	idAAA
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2015 Seri A	9,50	30 Juni 2018	idAAA
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2015 Seri B	9,50	25 Agustus 2018	idAAA
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2015 Seri C	10,25	25 Agustus 2020	idAAA
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2016 Seri B	8,75	26 Juli 2019	idAAA
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2017 Seri A	7,50	2 April 2018	idAAA
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2017 Seri B	8,60	22 Maret 2020	idAAA
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2017 Seri C	8,90	22 Maret 2022	idAAA
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2017 Seri B	8,10	14 Juli 2020	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2017 Seri C	7,55	12 Desember 2022	idAAA
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2013 Seri D	8,90	1 Maret 2018	idAAA
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2015 Seri B	10,25	30 Juni 2020	idAAA
PT Astra Sedaya Finance			
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2017 Seri A	6,25	12 November 2018	idAAA
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2017 Seri B	7,50	2 November 2020	idAAA
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2016 Seri B	7,95	18 Oktober 2019	idAAA
Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2015 Seri B	9,25	2 Juli 2018	idAAA
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 Seri B	8,50	11 Mei 2019	idAAA
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2017 Seri C	8,75	3 Maret 2022	idAAA
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2017 Seri B	8,50	3 Maret 2020	idAAA

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**7. EFEK-EFEK (lanjutan)**

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2017		
	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat
<u>Tersedia untuk dijual (lanjutan)</u>			
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>			
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			
PT Maybank Indonesia Finance			
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2017 Seri C	7,75	9 November 2020	idAA <sup>-</sup> )
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2015 Seri A	10,35	12 April 2018	idAA <sup>+</sup> )
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2016 Seri A	9,10	13 April 2019	idAA <sup>+</sup> )
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2016 Seri A	8,30	3 November 2019	idAA <sup>+</sup> )
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017 Seri A	8,00	12 Maret 2018	idAA <sup>-</sup> )
Tahap II Tahun 2013 Seri B	8,25	19 Juni 2018	idAA <sup>+</sup> )
PT Bank UOB Indonesia			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016 Seri B	8,00	25 November 2019	idAAA <sup>1</sup> )
Tahap I Tahun 2015 Seri B	9,40	1 April 2018	idAAA <sup>1</sup> )
Tahap I Tahun 2015 Seri C	9,60	1 April 2020	idAAA <sup>1</sup> )
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016 Seri B	8,00	25 November 2019	idAAA <sup>1</sup> )
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016 Seri C	8,25	30 Juni 2021	idAAA <sup>1</sup> )
PT Toyota Astra Financial Services			
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015 Seri B	9,50	6 November 2018	idAAA <sup>1</sup> )
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2015 Seri B	9,25	11 Juni 2018	idAAA <sup>1</sup> )
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 Seri B	8,40	1 Juni 2019	idAAA <sup>1</sup> )
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri B	8,50	14 Februari 2020	idAAA <sup>1</sup> )
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk			
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017 Seri B	7,50	17 Oktober 2020	idAAA <sup>1</sup> )
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2013 Seri B	8,25	5 Maret 2018	idAAA <sup>1</sup> )
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2013 Seri B	8,25	4 Juli 2018	idAAA <sup>1</sup> )
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2013 Seri B	8,25	5 Maret 2018	idAAA <sup>1</sup> )
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 Seri B	8,15	6 Desember 2022	idAA <sup>-</sup> )
<u>Mata uang asing</u>			
JP Morgan Chase Bank, N.A.			
JP Morgan Chase Bank, N.A.	4,95	25 Maret 2020	A3 <sup>***</sup> )
JP Morgan Chase Bank, N.A.	3,20	15 Juni 2026	A3 <sup>*)</sup> )
Alibaba Group Holding Ltd.			
Alibaba Group Holding Ltd.	3,80	28 November 2024	A1 <sup>***</sup> )
Oversea-Chinese Banking Corporation			
OCBCSP 061924	4,25	19 Juni 2024	Aaa <sup>***</sup> )
Xerox Corporation			
Xerox Corporation	2,95	15 Mei 2024	Baa3 <sup>***</sup> )
Macy's Inc.			
Macy's Inc.	3,10	1 Juni 2024	Baa3 <sup>***</sup> )
Province of Ontario			
Province of Ontario	4,40	14 April 2020	Aa2 <sup>***</sup> )
Bank of America			
Bank of America	3,30	11 Januari 2023	A3 <sup>***</sup> )
Bank of America	3,00	20 Desember 2023	A3 <sup>***</sup> )
Bank of America	3,50	19 April 2026	A3 <sup>*)</sup> )
Bank of America	3,30	11 Januari 2023	A3 <sup>***</sup> )
Bank of America	5,63	1 Juli 2020	A3 <sup>***</sup> )
Citigroup Inc.			
Citigroup Inc.	2,65	26 Oktober 2020	Baa1 <sup>***</sup> )
Citigroup Inc.	3,75	16 Juni 2024	Baa1 <sup>***</sup> )
Wells Fargo & Company			
Wells Fargo & Company	2,60	22 Juli 2020	A2 <sup>***</sup> )
Wells Fargo & Company	3,50	8 Maret 2022	A2 <sup>***</sup> )
AT&T, Inc.			
AT&T, Inc.	4,95	15 Februari 2019	Baa1 <sup>***</sup> )
AT&T, Inc.	4,45	15 Mei 2021	Baa1 <sup>***</sup> )



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**7. EFEK-EFEK (lanjutan)**

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2017		
	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat <sup>1)</sup>
<u>Tersedia untuk dijual (lanjutan)</u>			
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>			
<u>Rupiah</u>			
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia			
Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2015 Seri C	9,50	13 Maret 2020	idAAA
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2011 Seri C	8,50	20 Desember 2018	idAAA
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2016 Seri B	7,85	22 November 2019	idAAA
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2016 Seri D	8,50	22 November 2023	idAAA
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2017 Seri B	8,40	23 Februari 2020	idAAA
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2017 Seri C	8,25	15 Agustus 2024	idAAA
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 Seri B	8,20	8 Juni 2019	idAAA
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 Seri C	8,70	8 Juni 2021	idAAA
Berkelanjutan II Tahap VI Tahun 2015 Seri B	9,20	16 September 2018	idAAA
Berkelanjutan II Tahap VI Tahun 2015 Seri C	9,50	16 September 2020	idAAA
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2016 Seri B	7,95	25 Agustus 2019	idAAA
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2016 Seri C	8,20	22 November 2021	idAAA
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2017 Seri C	8,90	23 Februari 2022	idAAA
Berkelanjutan II Tahap VII Tahun 2016 Seri C	9,60	19 Februari 2021	idAAA
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2014 Seri D	9,75	5 Juni 2019	idAAA
Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2015 Seri B	9,00	13 Maret 2018	idAAA
Berkelanjutan II Tahap VII Tahun 2016 Seri B	9,25	19 Februari 2019	idAAA
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 Seri A	9,63	8 Juli 2018	idAA+
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 Seri B	9,88	8 Juli 2020	idAA+
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 Seri C	10,00	8 Juli 2022	idAA+
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 Seri A	8,20	30 Agustus 2019	idAA+
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 Seri B	8,75	30 Agustus 2021	idAA+
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri A	8,30	13 Juli 2020	idAA+
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri B	8,50	13 Juli 2022	idAA+
Tahap XIV Tahun 2010	10,25	11 Juni 2020	idAA+
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013	7,90	27 Maret 2023	idAA+
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017 Seri A	8,00	15 Juni 2022	idAAA
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017 Seri B	8,50	15 Juni 2024	idAAA
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016 Seri A	7,95	30 September 2021	idAAA
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017	8,00	11 Juli 2022	idAAA
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)			
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2015 Seri B	9,25	7 Juli 2018	idAAA
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2016	8,60	27 September 2021	idAAA
Berkelanjutan III Tahap VII Tahun 2017 Seri B	8,40	2 Maret 2020	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2017 Seri B	7,80	20 Juni 2020	idAAA
PT Indonesia Power			
Eba Danareksa I Tahun 2017 Kelas A	8,02	19 September 2022	idAAA(sf)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013 Seri S Seri C	8,90	27 September 2018	idAA
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014 Seri T	9,85	19 September 2019	idAA
Tahap XIV Tahun 2010 Seri JM-10 T	9,35	12 Oktober 2020	idAA
Komodo 11122020	7,50	11 Desember 2020	Baa3
PT Pegadaian (Persero)			
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2012 Seri D	7,75	14 Februari 2019	idAAA
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2013 Seri D	8,00	9 Juli 2020	idAAA
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2015 Seri B	9,25	7 Mei 2018	idAAA
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2015 Seri C	9,50	7 Mei 2020	idAAA
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri C	7,70	3 Oktober 2022	idAAA
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri A	6,55	13 Oktober 2018	idAAA
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri B	7,40	3 Oktober 2020	idAAA
PT Waskita Karya (Persero) Tbk			
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2015 Seri A	10,40	16 Oktober 2018	idA-
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2015 Seri B	11,10	16 Oktober 2020	idA-
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016	9,25	10 Juni 2019	idA-
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016	8,50	28 September 2021	idA-
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017 Seri B	9,00	21 Februari 2022	idA-
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri A	8,00	6 Oktober 2020	A-
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri B	8,50	6 Oktober 2022	idA-

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**7. EFEK-EFEK (lanjutan)**

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2017		
	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat <sup>1)</sup>
<u>Tersedia untuk dijual (lanjutan)</u>			
<u>Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)</u>			
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri C	8,20	3 November 2027	idAAA
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			
PT Pertamina (Persero)			
Tahun 2023	4,30	20 Mei 2023	Baa3
Tahun 2022	4,88	3 Mei 2022	Baa3
Tahun 2021	5,25	23 Mei 2021	Baa3
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)			
Tahun 2021	5,50	22 November 2021	Baa3
Tahun 2027	4,13	15 Mei 2027	Baa3
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)			
Tahun 2024	4,88	1 Oktober 2024	Baa3
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk			
Tahun 2024	5,13	16 Mei 2024	Baa3
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)			
Tahun 2025	4,25	5 Mei 2025	Baa3
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo</u>			
<u>Pihak ketiga</u>			
<u>Rupiah</u>			
PT Bank Pan Indonesia Tbk			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016	9,15	28 Juni 2021	AA
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016	8,75	27 Oktober 2021	AA
PT Bank OCBC NISP Tbk			
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2015 Seri C	9,80	10 Februari 2018	idAAA
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 Seri C	8,25	11 Mei 2019	idAAA
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 Seri B	8,00	11 Mei 2018	idAAA
PT Bank UOB Indonesia			
Tahap I Tahun 2015 Seri B	9,40	1 April 2018	AAA
Tahap I Tahun 2015 Seri C	9,60	1 April 2020	AAA
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016 Seri B	8,00	25 November 2019	AAA
PT BCA Finance			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 Seri C	9,00	20 Maret 2018	idAAA
PT Bank Maybank Indonesia Tbk			
Sukuk <i>Mudharabah</i> Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2016	8,25	10 Juni 2019	idAAA(sy)
PT Bank CIMB Niaga Tbk			
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 Seri C	9,75	20 November 2018	idAAA
PT Indonesia Infrastructure Finance			
Tahap I Tahun 2016 Seri B	8,70	19 Juli 2021	idAAA
PT Toyota Astra Financial Services			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 Seri B	8,40	1 Juni 2019	AAA
PT Astra Sedaya Finance			
Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2015 Seri B	9,25	2 Juli 2018	AAA
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 Seri B	8,50	11 Mei 2019	
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk			
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2015 Seri A	9,50	30 Juni 2018	idAAA
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2013 Seri D	8,90	1 Maret 2018	idAAA
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>			
<u>Rupiah</u>			
PT Pupuk Indonesia (Persero)			
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017 Seri A	7,50	9 November 2020	AAA
Tahap I Tahun 2014 Seri B	9,95	8 Juli 2019	AAA
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			
Tahap XIV Tahun 2010	10,25	11 Juni 2020	idAA+
Tahap XV Tahun 2011	9,50	28 Juni 2021	idAA+
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012	7,90	5 Juni 2022	idAA+
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013	7,90	27 Maret 2023	idAA+
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 Seri A	9,63	8 Juli 2018	idAA+
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 Seri B	9,88	8 Juli 2020	idAA+



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**7. EFEK-EFEK (lanjutan)**

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2017		
	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat <sup>*)</sup>
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)</u>			
<u>Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)</u>			
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (lanjutan)			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 Seri C	10,00	8 Juli 2022	idAA+
Tahap XIV Tahun 2010	10,25	11 Juni 2020	idAA+
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013	7,90	27 Maret 2023	idAA+
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 Seri A	8,20	30 Agustus 2019	idAA+
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 Seri B	8,75	30 Agustus 2021	idAA+
PT Pegadaian (Persero)			
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2012 Seri D	7,75	14 Februari 2019	idAAA
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2011 Seri C	9,00	11 Oktober 2021	idAAA
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2014 Seri C	9,75	11 Juli 2019	idAAA
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2015 Seri B	9,25	7 Mei 2018	idAAA
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2015 Seri C	9,50	7 Mei 2020	idAAA
Obligasi X Tahun 2003 Seri B	10,50	11 Juli 2018	idAAA
Obligasi XII Tahun 2009 Seri C	12,88	1 Juli 2019	idAAA
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia			
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2014 Seri C	9,75	16 Oktober 2019	idAAA
Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2015 Seri B	9,00	13 Maret 2018	idAAA
Berkelanjutan II Tahap VI Tahun 2015 Seri B	9,20	16 September 2018	idAAA
Berkelanjutan II Tahap VI Tahun 2015 Seri C	9,50	16 September 2020	idAAA
Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2015 Seri C	9,50	13 Maret 2020	idAAA
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2015 Seri A	9,93	23 Juni 2022	idAAA
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2015 Seri D	11,00	23 Juni 2045	idAAA
Obligasi II Tahun 2010 Seri B	10,20	6 Juli 2020	idAAA
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk			
Berkelanjutan I Tahun 2011 Seri A	8,38	14 Desember 2018	idBBB+
Berkelanjutan I Tahun 2011 Seri B	9,05	14 Desember 2021	idBBB+
PT Mandiri Tunas Finance			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 Seri A	10,20	18 Desember 2018	idAA+
PT Jasa Marga (Persero) Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013 Seri S Seri C	8,90	27 September 2018	idAA
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014 Seri T	9,85	19 September 2019	idAA
Obligasi XIV Seri JM-10 Tahun 2010	9,35	12 Oktober 2020	idAA
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)			
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2015 Seri B	9,25	7 Juli 2018	idAAA
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)			
Obligasi I Tahun 2014 Seri B	10,00	11 Juni 2019	idAAA
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)			
Tahun 2020	7,75	20 Januari 2020	BAA3
Tahun 2021	5,50	22 November 2021	BAA3
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)			
Tahun 2025	4,25	5 Mei 2025	BAA3
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)			
Tahun 2024	4,88	1 Oktober 2024	BAA3
PT Pertamina (Persero)			
Tahun 2023	4,30	20 Mei 2023	BAA3
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk			
Tahun 2023	4,30	20 Mei 2023	BAA3
Tahun 2024	5,13	16 Mei 2024	BAA3

<sup>\*)</sup> Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

<sup>\*\*)</sup> Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's

<sup>\*\*\*)</sup> Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**7. EFEK-EFEK (lanjutan)**

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.3. Reksadana

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
<b><u>Nilai wajar melalui laba rugi</u></b>		
<b><u>Pihak ketiga</u></b>		
<b><u>Rupiah</u></b>		
PT Schroder Investment Management Indonesia	678.836	135.961
PT Trimegah Asset Management	32.761	29.558
PT Sinarmas Asset Management	17.708	56.402
PT Maybank Asset Management	17.356	16.651
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen	17.130	14.772
PT Ciptadana Asset Management	16.387	-
PT BNP Paribas Investment Partners	16.305	12.042
PT Insight Investments Management	10.316	-
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia	5.406	5.227
PT Kresna Asset Management	-	2.989
	<u>812.205</u>	<u>273.602</u>
<b><u>Dolar Amerika Serikat</u></b>		
PT Schroder Investment Management Indonesia	7.366	-
	<u>819.571</u>	<u>273.602</u>
<b><u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u></b>		
<b><u>Rupiah</u></b>		
PT Danareksa Investment Management	15.356	14.255
PT PNM Investment Management	3.452	3.287
PT Mandiri Manajemen Investasi	1.253	1.194
PT Bahana TCW Investment Management	1.203	1.050
	<u>21.264</u>	<u>19.786</u>
<b><u>Dolar Amerika Serikat</u></b>		
PT Danareksa Investment Management	2.100	1.984
	<u>23.364</u>	<u>21.770</u>
	<u>842.935</u>	<u>295.372</u>
<b><u>Tersedia untuk dijual</u></b>		
<b><u>Pihak ketiga</u></b>		
<b><u>Rupiah</u></b>		
PT Insight Investments Management	306.601	108.164
PT Sinarmas Asset Management	145.908	103.965
PT RHB Asset Management Indonesia	115.364	4.902
PT Maybank Asset Management	113.613	61.425
PT Syailendra Asset Management	81.838	48.542
PT Mega Capital Investama	60.862	40.099
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia	58.032	7.134
PT Panin Asset Management	49.614	4.227
PT Samuel Aset Manajemen	33.861	-
PT Ashmore Asset Management Indonesia	33.614	-
PT Henan Putihrai Asset Management	29.362	-
PT Trimegah Asset Management	24.748	48.643



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**7. EFEK-EFEK (lanjutan)**

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.3. Reksadana (lanjutan)

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b><u>Tersedia untuk dijual (lanjutan)</u></b>		
<b><u>Pihak ketiga (lanjutan)</u></b>		
<b><u>Rupiah (lanjutan)</u></b>		
PT BNP Paribas Investment Partners	18.341	15.790
PT CIMB Principal Asset Management	7.788	8.040
PT Ciptadana Asset Management	3.020	-
PT Pratama Capital Assets Management	2.117	1.843
PT Schroder Investment Management Indonesia	1.341	98.189
PT Indo Premier Sekuritas	566	-
PT MNC Asset Management	-	1.054
PT Indo Premier Investment Management	-	464
	<u>1.086.590</u>	<u>552.481</u>
<b><u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u></b>		
<b><u>Rupiah</u></b>		
PT Danareksa Investment Management	276.548	268.100
PT BNI Asset Management	75.291	50.105
PT Mandiri Manajemen Investasi	60.710	50.017
PT Bahana TCW Investment Management	5.729	5.081
	<u>418.278</u>	<u>373.303</u>
	<u>1.504.868</u>	<u>925.784</u>
	<b><u>2.347.803</u></b>	<b><u>1.221.156</u></b>

d.4. *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD)

Penerbit	Nilai Nominal	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Tercatat	
				31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b><u>Tersedia untuk dijual</u></b>					
<b><u>Pihak ketiga</u></b>					
<b><u>Rupiah</u></b>					
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk					
Tahap I 2017 Seri A	20.000	7,50	21 Maret 2018	19.776	-
Tahap I 2017 Seri B	20.000	7,60	21 Juni 2018	19.430	-
Tahap II 2017 Seri A	100.000	6,85	2 Oktober 2018	95.287	-
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur					
Tahap I 2017 Seri A	20.000	7,50	13 November 2018	18.899	-
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia					
Tahap I 2017 Seri A	50.000	5,85	11 April 2018	49.184	-
Tahap I 2017 Seri B	50.000	6,00	11 Juli 2018	48.399	-
Tahap I 2017 Seri C	50.000	6,15	11 Oktober 2018	47.559	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk					
Tahap III 2017 Seri C	50.000	5,95	19 Mei 2018	48.798	-
PT Bank Mizuho Indonesia					
Tahap III Tahun 2017	50.000	5,95	17 Mei 2018	48.950	-
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.					
Tahap I 2017 Seri A	35.000	7,10	23 Februari 2018	39.659	-
Tahap I 2017 Seri B	40.000	7,20	29 Mei 2018	38.979	-

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**7. EFEK-EFEK (lanjutan)**

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.4. *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) (lanjutan)

Penerbit	Nilai Nominal	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Tercatat	
				31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>Tersedia untuk dijual (lanjutan)</b>					
<b>Pihak ketiga (lanjutan)</b>					
<b>Rupiah (lanjutan)</b>					
PT Bank KEB Hana Indonesia					
Tahap III 2017 Seri B	50.000	6,31	27 Maret 2018	49.394	-
Tahap III 2017 Seri C	50.000	6,52	26 September 2018	47.953	-
PT Bank Commonwealth					
Tahap I 2017	70.000	6,55	31 Agustus 2018	67.114	-
PT Bank Maybank Indonesia Tbk					
Tahap IV 2017	50.000	6,15	12 Desember 2018	46.973	-
				686.354	-
<b>Pihak berelasi (Catatan 44)</b>					
<b>Rupiah</b>					
PT Bank Tabungan					
Negara (Persero) Tbk					
Tahap 1 2017 Seri B	50.000	7,43	16 Februari 2018	49.629	-
Tahap IV 2017 Seri B	30.000	6,20	13 Desember 2018	28.178	-
				77.807	-
<b>Dimiliki hingga jatuh tempo</b>					
<b>Pihak ketiga</b>					
<b>Rupiah</b>					
PT Bank Mizuho Indonesia					
Tahap III 2017	60.000	7,50	17 Mei 2018	58.347	-
Tahap II 2016	50.000	7,50	22 Mei 2017	-	43.717
PT Bank CIMB Niaga Tbk					
Tahap II 2016 Seri B	50.000	7,60	13 Januari 2017	-	49.869
Tahap II 2016 Seri C	50.000	8,25	3 November 2021	48.621	49.233
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia					
Tahap II 2016 Seri C	100.000	7,76	22 September 2017	-	94.704
Tahap II 2016 Seri B	100.000	7,66	11 Juli 2017	-	96.154
Tahap II 2016 Seri A	50.000	7,50	22 Maret 2017	-	49.187
PT Bank Commonwealth					
Tahap III 2016 Seri B	100.000	7,60	14 Juli 2017	-	96.132
Tahap III 2016 Seri C	100.000	7,60	13 Oktober 2017	-	94.358
Tahap III 2016 Seri A	50.000	7,44	13 April 2017	-	48.974
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk					
Tahap II 2016 Seri A	10.000	7,30	8 Mei 2017	-	9.750
Tahap II 2016 Seri B	30.000	8,25	8 November 2017	-	28.165
				106.968	660.243
<b>Pihak berelasi (Catatan 44)</b>					
<b>Rupiah</b>					
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk					
Tahun 2016 Seri A	60.000	7,55	15 Maret 2018	59.095	-
Tahun 2016 Seri E	100.000	8,25	15 Juni 2018	96.358	89.573
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk					
Tahap V Tahun 2016	500.000	7,55	3 Juli 2017	-	481.000
Tahap II Tahun 2016	100.000	7,50	10 Agustus 2017	-	95.547
Tahap VI Tahun 2016	50.000	7,75	29 Maret 2017	-	49.071
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk					
Tahap II Tahun 2016 Seri A	100.000	7,65	21 Desember 2017	-	93.091
				155.453	808.282
<b>Total</b>				<b>1.026.582</b>	<b>1.468.525</b>



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**7. EFEK-EFEK (lanjutan)**

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.5. Wesel Tagih

Penerbit	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat		Nilai Tercatat	
			31 Desember 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>Dimiliki hingga jatuh tempo</b>						
<u>Pihak ketiga</u>						
<u>Dolar Amerika Serikat</u>						
Morgan Stanley	4,00	31 Agustus 2017	-	A-****)	-	26.945
<b>Total</b>					-	<b>26.945</b>

\*\*\*\*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor

d.6. Obligasi Subordinasi

Penerbit	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)		Nilai Tercatat	
			31 Desember 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>Nilai Wajar melalui laba rugi</b>						
<u>Pihak ketiga</u>						
<u>Rupiah</u>						
PT Bank KEB Hana Indonesia Tahap I Tahun 2016	9,95	21 Desember 2023	AA(idn)	idAA	33.115	30.956
PT Bank Maybank Indonesia Tbk Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016	9,63	10 Juni 2023	idAA	idAA	8.433	7.786
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Sukuk <i>Mudharabah</i> Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013	7,61	28 Maret 2023	idA-(sy)	-	5.252	-
PT Bank Pan Indonesia Tbk Seri III Tahun 2010 Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012	10,50	9 November 2017	-	idAA-	-	3.058
PT Bank CIMB Niaga Tbk Seri II Tahun 2012	9,40	20 Desember 2019	idAA-	idAA-	2.065	2.014
PT Bank Permata Tbk Seri II Tahun 2011	10,85	23 Desember 2020	AA(idn)	idAA	1.498	1.454
	11,00	28 Juni 2018	idAA+	idAA+	613	612
					50.976	45.880
<b>Tersedia untuk dijual</b>						
<u>Pihak ketiga</u>						
<u>Rupiah</u>						
PT Bank Pan Indonesia Tbk Seri III Tahun 2010	10,50	9 November 2017	-	idAA-	-	147.662
Tahap I Tahun 2012	9,40	20 Desember 2019	idAA-	idAA-	96.465	91.136
Tahap II Tahun 2017	10,25	17 Maret 2024	idA+	-	30.248	-
PT Bank UOB Indonesia Seri I Tahun 2014	11,35	28 Mei 2021	AA(idn)	idAA	30.772	29.252
Tahap II Tahun 2017	9,25	17 Oktober 2024	AA(idn)	-	20.706	-
PT Bank Maybank Indonesia Tbk Tahap I Tahun 2011 Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2011	10,00	6 Desember 2018	idAA+	idAA+	15.958	15.648
Tahap II Tahun 2012	10,75	19 Mei 2018	idAA+	idAA+	57.907	50.218
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2014	9,25	31 Oktober 2019	idAA+	idAA+	65.242	64.029
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016	11,35	8 Juli 2021	idAA	idAA	33.032	31.657
PT Bank Permata Tbk Seri II Tahun 2011	9,63	10 Juni 2023	idAA	AA(idn)	10.542	9.733
Tahap II Tahun 2012	11,00	28 Juni 2018	idAA+	idAA+	57.971	56.421
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012	9,40	19 Desember 2019	idAA+	idAA+	151.752	124.008
	8,90	15 Juni 2019	idAA+	idAA+	5.107	4.961

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**7. EFEK-EFEK (lanjutan)**

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.6. Obligasi Subordinasi (lanjutan)

Penerbit	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)		Nilai Tercatat	
			31 Desember 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>Tersedia untuk dijual (lanjutan)</b>						
<b>Pihak ketiga (lanjutan)</b>						
<b>Rupiah (lanjutan)</b>						
PT Bank Permata Tbk (lanjutan)						
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2013	12,00	24 Desember 2020	idAA+	idAA+	5.568	5.425
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2014	11,75	24 Oktober 2021	idAA	idAA	39.173	42.814
PT Bank Bukopin Tbk						
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012	9,25	6 Maret 2019	idA	idA	10.078	989
Tahap II Tahun 2017	11,00	28 Februari 2024	idA-	-	5.348	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk						
Seri I Tahun 2010	11,30	8 Juli 2017	-	idAA	-	8.084
Seri II Tahun 2010	10,85	23 Desember 2020	AA(idn)	idAA	143.859	118.924
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk						
<i>Mudharabah</i> Berkelanjutan I Tahun 2012	11,17	29 Juni 2022	-	idA-(sy)	-	877
<i>Mudharabah</i> Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013	9,60	28 Maret 2023	idA-(sy)	idA-(sy)	7.640	1.824
PT Bank KEB Hana Indonesia						
Seri I Tahun 2016	9,95	21 Desember 2023	AA(idn)	idAA	9.613	8.987
					796.981	812.649
<b>Dimiliki hingga jatuh tempo</b>						
<b>Pihak ketiga</b>						
<b>Rupiah</b>						
PT Bank Permata Tbk						
Tahap II Tahun 2012	9,40	19 Desember 2019	idAA+	idAA+	20.000	20.000
PT Bank OCBC NISP Tbk						
Seri III	11,35	30 Juni 2017	-	idAAA	-	40.000
					20.000	60.000
<b>Total</b>					<b>867.957</b>	<b>918.529</b>

\*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

d.7. Medium-Term Notes (MTN)

Penerbit	Nilai Nominal	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Tercatat	
				31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>Tersedia untuk dijual</b>					
<b>Pihak ketiga</b>					
<b>Rupiah</b>					
PT Kimia Farma Tbk					
Tahap I Tahun 2017	57.000	8,10	15 September 2020	57.000	-
PT Bank Bukopin Tbk					
Tahap I Tahun 2016	40.000	10,00	4 September 2017	-	40.000
				57.000	40.000
<b>Pihak berelasi (Catatan 44)</b>					
<b>Rupiah</b>					
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)					
	150.000	10,00	21 Desember 2018	150.000	155.074
				207.000	195.074



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**7. EFEK-EFEK (lanjutan)**

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.7. *Medium-Term Notes* (MTN) (lanjutan)

Penerbit	Nilai Nominal	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Tercatat	
				31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b><u>Dimiliki hingga jatuh tempo</u></b>					
<b><u>Pihak ketiga</u></b>					
<b><u>Rupiah</u></b>					
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia Seri I Tahun 2015	100.000	9,85	3 Februari 2018	100.000	100.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa dan Banten Tbk Seri I Tahun 2016	50.000	7,00	8 Januari 2018	50.000	50.000
				150.000	150.000
<b><u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u></b>					
<b><u>Rupiah</u></b>					
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Seri II Tahun 2014	100.000	9,80	24 Desember 2017	-	99.710
				150.000	249.710
<b>Total</b>				<b>357.000</b>	<b>444.784</b>

e) BRI melakukan penilaian atas penurunan nilai efek-efek secara individual dengan adanya bukti obyektif penurunan nilai.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 telah memadai.

f) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

	2017	2016
Rupiah	8,77%	8,65%
Dolar Amerika Serikat	5,18	5,08
Euro Eropa	2,92	2,87
Dolar Singapura	2,15	2,12

g) BRI mengakui keuntungan yang belum direalisasi - neto dari nilai efek-efek yang diklasifikasikan dalam "Nilai Wajar melalui Laba Rugi" sebesar Rp50.915 dan Rp31.025 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, yang dilaporkan dalam akun "Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**7. EFEK-EFEK (lanjutan)**

- h) BRI mengakui keuntungan neto atas penjualan efek-efek masing-masing sebesar Rp784.667 dan Rp447.580 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, yang dilaporkan dalam akun "Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
- i) Efek-efek sejumlah nominal Rp13.064.976 dan Rp7.935.345 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, telah dijual dengan janji dibeli kembali (Catatan 24).

**8. TAGIHAN WESEL EKSPOR**

- a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang:

	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		3.435.946		6.112.978
Wesel Ekspor		1.534.058		649.730
		<u>4.970.004</u>		<u>6.762.708</u>
<u>Mata uang asing</u>				
Wesel Ekspor				
Dolar Amerika Serikat	41.649.765	565.083	47.917.829	645.573
Renminbi	31.642.266	65.931	823.503.667	1.596.930
Euro Eropa	499.255	8.106	2.540.997	36.021
Yen Jepang	32.343.467	3.898	513.619.647	59.100
Pound Sterling Inggris		-	267.500	4.428
		<u>643.018</u>		<u>2.342.052</u>
		5.613.022		9.104.760
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		3.150		77.494
Wesel Ekspor		6.427		-
		<u>9.577</u>		<u>77.494</u>
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Wesel Ekspor	82.425	1.118	12.114.895	163.218
		<u>10.695</u>		<u>240.712</u>
<b>Total</b>		<b><u>5.623.717</u></b>		<b><u>9.345.472</u></b>



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**8. TAGIHAN WESEL EKSPOR (lanjutan)**

b) Berdasarkan Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, seluruh tagihan wesel ekspor diklasifikasikan "Lancar".

c) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu tagihan wesel ekspor berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
<u>Pihak ketiga</u>		
≤ 1 bulan	1.108.391	2.308.225
> 1 bulan - 3 bulan	2.085.852	3.250.882
> 3 bulan - 1 tahun	2.418.779	3.545.653
	<u>5.613.022</u>	<u>9.104.760</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
≤ 1 bulan	7.405	227.971
> 1 bulan - 3 bulan	3.290	7.810
> 3 bulan - 1 tahun	-	4.931
	<u>10.695</u>	<u>240.712</u>
<b>Total</b>	<b><u>5.623.717</u></b>	<b><u>9.345.472</u></b>

BRI melakukan penilaian atas cadangan kerugian penurunan nilai tagihan wesel ekspor secara individual dengan menggunakan bukti obyektif.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, karena Manajemen berkeyakinan bahwa tagihan wesel ekspor dapat ditagih.

**9. OBLIGASI REKAPITALISASI PEMERINTAH**

Akun ini terdiri dari obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah sehubungan dengan program rekapitalisasi BRI dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang dibeli dari pasar sekunder.

Sehubungan dengan program rekapitalisasi, BRI menerima obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah sejumlah nominal Rp29.149.000 yang diterbitkan dalam 2 (dua) tahap yaitu sebesar nominal Rp20.404.300 pada tanggal 25 Juli 2000 dan Rp8.744.700 pada tanggal 31 Oktober 2000, yang seluruhnya merupakan obligasi tingkat bunga tetap (Catatan 1b). Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-84/MK.01/2002 tanggal 26 Maret 2002 tentang "Pelaksanaan Konversi Obligasi Seri FR Menjadi Obligasi Seri VR", pada tanggal 26 Maret 2002 BRI telah menukarkan sebagian Obligasi Pemerintah tingkat bunga tetap dengan Obligasi Pemerintah tingkat bunga variabel.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**9. OBLIGASI REKAPITALISASI PEMERINTAH (lanjutan)**

a) Berdasarkan Tujuan Kepemilikan dan Sisa Umur Sampai Saat Jatuh Tempo:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
<u>Tersedia untuk dijual</u>		
≤ 1 bulan	717.840	718.434
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo</u>		
≤ 1 tahun	1.125.000	-
> 1 tahun - 5 tahun	1.475.000	2.600.000
	2.600.000	2.600.000
<b>Total</b>	<b>3.317.840</b>	<b>3.318.434</b>

b) Berdasarkan Klasifikasi dan Jenis:

Seri	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
			31 Desember 2017	31 Desember 2016
<u>Tersedia untuk dijual</u>				
VR0027	SPN 3 bulan	25 Juli 2018	449.055	449.325
VR0031	SPN 3 bulan	25 Juli 2020	268.785	269.109
			717.840	718.434
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo</u>				
VR0026	SPN 3 bulan	25 Januari 2018	375.000	375.000
VR0027	SPN 3 bulan	25 Juli 2018	375.000	375.000
VR0028	SPN 3 bulan	25 Agustus 2018	375.000	375.000
VR0029	SPN 3 bulan	25 Agustus 2019	375.000	375.000
VR0031	SPN 3 bulan	25 Juli 2020	1.100.000	1.100.000
			2.600.000	2.600.000
<b>Total</b>			<b>3.317.840</b>	<b>3.318.434</b>

c) Informasi Signifikan Lainnya:

Jadwal pembayaran bunga untuk Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah adalah 3 (tiga) bulan sekali.

Nilai pasar untuk Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan "Tersedia untuk dijual" berkisar dari 99,55% sampai dengan 99,79% dan 99,67% sampai dengan 99,85% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**10. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI**

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 terdiri dari:

		31 Desember 2017				
	Tingkat Suku Bunga (%)	Tanggal Beli	Tanggal Jual Kembali	Nilai Beli	Nilai Jual Kembali-Neto	
<u>Pihak ketiga</u>						
<u>Rupiah</u>						
Bank Indonesia						
Obligasi Pemerintah						
	FR0066	4,77	13 Oktober 2017	12 Januari 2018	97.113	98.130
	FR0034	4,45	27 Desember 2017	10 Januari 2018	1.743.116	1.743.978
	FR0052	4,60	27 Desember 2017	24 Januari 2018	955.856	956.344
	FR0054	4,60	20 Desember 2017	17 Januari 2018	3.019.546	3.023.790
	FR0065	4,55	6 Desember 2017	3 Januari 2018	271.414	272.271
	FR0068	4,60	6 Desember 2017	3 Januari 2018	1.604.687	1.609.813
	FR0068	4,60	13 Desember 2017	10 Januari 2018	2.554.503	2.560.354
	FR0070	4,85	8 Desember 2017	9 Maret 2018	320.827	321.821
	SPN12180809	4,80	10 November 2017	9 Februari 2018	273.786	275.648
	SPN03180118	4,25	27 Desember 2017	3 Januari 2018	2.836.382	2.837.722
	SPN12180412	4,45	20 Desember 2017	3 Januari 2018	2.333.619	2.336.792
	SPN12180809	4,80	13 Oktober 2017	12 Februari 2018	90.878	91.835
	SPN12181004	4,84	10 November 2017	9 Februari 2018	451.835	454.933
PT Bank CIMB Niaga Tbk						
Obligasi Pemerintah						
	FR0061	5,10	12 Desember 2017	12 Januari 2018	280.249	281.004
Sertifikat Bank Indonesia						
	IDSD240818364S	4,95	6 Desember 2017	5 Januari 2018	172.954	173.548
PT Bank CTBC Indonesia						
Obligasi Pemerintah						
	OR1012	5,10	12 Desember 2017	12 Januari 2018	139.182	139.556
PT Bank J Trust Indonesia Tbk						
Obligasi Pemerintah						
	FR0064	5,30	30 November 2017	28 Februari 2018	42.611	42.805
Sertifikat Deposito Bank Indonesia						
	IDSD060418273S	5,30	30 November 2017	28 Februari 2018	132.192	132.795
	IDSD040518182S	5,00	13 Desember 2017	3 Januari 2018	88.219	88.440
PT Bank Pembangunan Daerah						
Sulawesi Tengah						
Sertifikat Bank Indonesia						
	IDSD110518182S	4,70	28 Desember 2017	8 Januari 2018	66.238	66.264
PT Bank Pan Indonesia Tbk						
Sertifikat Bank Indonesia						
	IDSD090318182S	5,20	19 Desember 2017	19 Januari 2018	502.312	503.183
<b>Total</b>				<b>17.977.519</b>	<b>18.011.026</b>	

		31 Desember 2016				
	Tingkat Suku Bunga (%)	Tanggal Beli	Tanggal Jual Kembali	Nilai Beli	Nilai Jual Kembali-Neto	
<u>Pihak ketiga</u>						
<u>Rupiah</u>						
Bank Indonesia						
Obligasi Pemerintah						
	FR0066	5,60	30 Desember 2016	31 Maret 2017	924.996	925.140
PT Bank J Trust Indonesia Tbk						
Sertifikat Deposito Bank Indonesia						
	IDSD130117182C	8,50	28 Desember 2016	11 Januari 2017	89.749	89.812
				<b>1.014.745</b>	<b>1.014.952</b>	

Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**10. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)**

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 terdiri dari (lanjutan):

31 Desember 2016						
Tingkat Suku Bunga (%)	Tanggal Beli	Tanggal Jual Kembali	Nilai Beli	Nilai Jual Kembali-Neto		
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>						
<u>Mata uang asing</u>						
PT Bank BNP Paribas Indonesia						
Obligasi Pemerintah						
	RI1023	6,15 19 Desember 2016	26 Januari 2017	58.835	58.955	
	RI0320	6,15 19 Desember 2016	26 Januari 2017	74.733	74.886	
	RI0237	6,15 19 Desember 2016	26 Januari 2017	111.868	112.097	
	RI0319	6,15 19 Desember 2016	26 Januari 2017	66.360	66.497	
			311.796	312.435		
			1.326.541	1.327.387		
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>						
<u>Rupiah</u>						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk						
	Obligasi Pemerintah	FR0069	6,50 17 November 2016	6 Januari 2017	228.170	229.983
<b>Total</b>			<b>1.554.711</b>	<b>1.557.370</b>		

**11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF**

Ikhtisar transaksi derivatif adalah sebagai berikut:

Transaksi	31 Desember 2017	
	Tagihan derivatif	Liabilitas derivatif
Swap mata uang dan suku bunga	64.708	115.981
Swap suku bunga	60.475	54.261
Option	10.218	11.341
Pembelian dan penjualan <i>forward</i> mata uang asing	6.883	15.156
Swap mata uang asing	2.740	3.334
Pembelian dan penjualan <i>spot</i> mata uang asing	904	785
<b>Total</b>	<b>145.928</b>	<b>200.858</b>

Transaksi	31 Desember 2016	
	Tagihan derivatif	Liabilitas derivatif
Swap mata uang dan suku bunga	32.204	179.286
Swap suku bunga	59.443	53.780
Swap mata uang asing	-	112.160
Pembelian dan penjualan <i>spot</i> mata uang asing	10	-
Pembelian dan penjualan <i>forward</i> mata uang asing	-	1.991
<b>Total</b>	<b>91.657</b>	<b>347.217</b>



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)**

a. *Swap* Mata Uang dan Suku Bunga

Pada tanggal 31 Desember 2017, BRI melakukan kontrak pertukaran mata uang dan suku bunga (cross currency interest rate swap) terhadap beberapa *counterparties*, dimana BRI sepakat untuk menukarkan dana masing-masing sebesar RMB1.062.730.500 (angka penuh), RMB750.000.000 (angka penuh), ASD64.625.500 (angka penuh), ASD100.000.000 (angka penuh), ASD10.000.000 (angka penuh), Rp1.288.440 dan Rp269.400 yang nilainya setara pada tanggal efektif kontrak masing-masing dengan ASD165.000.000 (angka penuh), Rp1.522.990, EUR57.000.000 (angka penuh), Rp1.328.250, RMB68.346.000 (angka penuh), EUR80.000.000 (angka penuh) dan ASD20.000.000 (angka penuh).

Para pihak yang melakukan kontrak pertukaran mata uang berkewajiban membayar bunga sesuai dengan dana yang diterimanya.

Apabila dana yang diterima ASD, maka pihak penerima berkewajiban membayar bunga tetap (fixed rate) atau bunga mengambang (floating rate) sebesar LIBOR 6 (enam) bulanan ditambah dengan margin tertentu. Sebaliknya penerima dana Rupiah, Renminbi atau Euro berkewajiban membayar *fixed rate*.

b. *Swap* Suku Bunga

Pada tanggal 31 Desember 2017, BRI melakukan kontrak pertukaran suku bunga (interest rate swap) terhadap beberapa *counterparties*, dimana BRI dan *counterparties* sepakat untuk saling menukarkan bunga dengan suku bunga tetap (fixed rate) atau bunga mengambang (floating rate) dengan total nilai kontrak sebesar ASD418.651.309.

c. *Option*

Pada tanggal 31 Desember 2017, BRI memiliki kontrak pembelian *option* termasuk *call spread option* dengan nilai nosional sebesar ASD64.710.461 dengan nilai kontrak sebesar Rp548.082 serta kontrak penjualan *option* termasuk *call spread option* dengan nilai nosional sebesar ASD149.710.461 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.067.752.

d. Pembelian dan Penjualan *Spot* dan *Forward* Mata Uang Asing

Pada tanggal 31 Desember 2017, BRI memiliki kontrak pembelian dan penjualan *spot* mata uang asing dengan nilai nosional sebesar ASD62.000.000 dan EUR5.000.000 dengan nilai kontrak masing-masing sebesar Rp840.389 dan Rp81.073 serta kontrak penjualan *spot* mata uang asing dengan nilai nosional ASD45.500.000 dan EUR5.000.000 dengan nilai kontrak masing-masing sebesar Rp616.803 dan Rp80.918.

Selain itu, BRI memiliki kontrak pembelian *forward* mata uang asing dengan nilai nosional sebesar ASD95.427.140 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.299.745 serta kontrak penjualan *spot* mata uang asing dengan nilai nosional ASD392.015.599 dengan nilai kontrak sebesar Rp5.338.694.

e. *Swap* Mata Uang Asing

Pada tanggal 31 Desember 2017, BRI memiliki kontrak pembelian *swap* mata uang asing dengan nilai nosional sebesar ASD68.000.000 dan Renminbi 10.000.000 dengan nilai kontrak masing-masing sebesar Rp922.295 dan Rp20.680 serta kontrak penjualan *swap* mata uang asing dengan nilai nosional ASD365.000.000 dengan nilai kontrak sebesar Rp4.952.199.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**12. KREDIT YANG DIBERIKAN**

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang:

Rincian pinjaman yang diberikan berdasarkan jenis adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
Kupedes	239.446.222	211.417.693
Modal kerja	137.253.555	123.647.784
Konsumsi	115.226.118	101.016.417
Investasi	56.554.806	54.536.901
Program	15.132.136	10.547.008
Sindikasi	376.908	1.136.189
	<u>563.989.745</u>	<u>502.301.992</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Investasi	35.517.455	27.477.766
Modal kerja	22.585.002	19.362.729
Sindikasi	571.560	615.873
Konsumsi	82.785	-
	<u>58.756.802</u>	<u>47.456.368</u>
	<u>622.746.547</u>	<u>549.758.360</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
Modal kerja	38.485.484	37.739.884
Investasi	30.682.594	27.960.891
Sindikasi	14.305.128	17.116.441
Karyawan kunci	38.457	43.174
Konsumsi	11.118	14.871
	<u>83.522.781</u>	<u>82.875.261</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Modal kerja	8.482.183	5.573.961
Investasi	3.418.191	4.286.304
Sindikasi	812.966	977.089
	<u>12.713.340</u>	<u>10.837.354</u>
	<u>96.236.121</u>	<u>93.712.615</u>
Total	718.982.668	643.470.975
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(29.423.380)	(22.184.296)
<b>Bersih</b>	<b><u>689.559.288</u></b>	<b><u>621.286.679</u></b>



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)**

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang (lanjutan):

Rincian pinjaman yang diberikan berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka Penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka Penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Rupiah</u>		647.512.526		585.177.253
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	5.198.485.778	70.530.456	4.265.605.843	57.468.374
Euro Eropa	35.917.796	583.169	40.702.251	576.986
Dolar Singapura	28.764.567	292.091	21.521.459	200.406
Pound Sterling Inggris	2.507.085	45.943	2.090.463	34.608
Yen Jepang	117.832.413	14.201	90.820.000	10.450
Franc Swiss	308.006	4.282	205.338	2.712
Dolar Australia		-	19.099	186
		71.470.142		58.293.722
Total		718.982.668		643.470.975
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		(29.423.380)		(22.184.296)
<b>Bersih</b>		<b>689.559.288</b>		<b>621.286.679</b>

b) Berdasarkan Sektor Ekonomi:

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
Perdagangan, perhotelan dan restoran	226.186.153	201.932.238
Pertanian	67.543.304	61.298.365
Jasa dunia usaha	25.831.990	21.669.972
Perindustrian	24.177.058	23.131.242
Konstruksi	14.975.663	13.352.157
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	9.364.498	7.411.834
Jasa pelayanan sosial	5.885.751	4.570.127
Pertambangan	2.115.257	2.223.852
Listrik, gas dan air	1.574.646	1.235.411
Lain-lain	186.335.425	165.476.794
	563.989.745	502.301.992
<u>Mata uang asing</u>		
Perindustrian	25.665.775	23.302.570
Pertanian	16.070.541	8.994.684
Listrik, gas dan air	5.831.595	4.465.298
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	2.828.184	1.581.561
Perdagangan, perhotelan dan restoran	2.432.355	1.742.852
Jasa dunia usaha	2.097.505	1.681.920
Pertambangan	1.962.466	3.951.956
Konstruksi	1.529.935	1.669.253
Jasa pelayanan sosial	47.496	-
Lain-lain	290.950	66.274
	58.756.802	47.456.368
	622.746.547	549.758.360

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)**

b) Berdasarkan Sektor Ekonomi (lanjutan):

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
Listrik, gas dan air	26.866.643	27.396.425
Jasa dunia usaha	11.913.867	6.315.017
Perdagangan, perhotelan dan restoran	10.821.560	15.784.788
Konstruksi	9.280.503	6.272.142
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	9.234.581	8.699.909
Perindustrian	8.667.951	9.804.224
Pertanian	6.243.108	7.673.124
Jasa pelayanan sosial	346.347	418.524
Pertambangan	108.341	466.620
Lain-lain	39.880	44.488
	<u>83.522.781</u>	<u>82.875.261</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Perindustrian	5.681.336	4.979.352
Jasa pelayanan sosial	3.007.495	3.707.071
Perdagangan, perhotelan dan restoran	2.031.732	25.829
Pertambangan	1.356.750	1.347.250
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	632.312	524.255
Konstruksi	3.715	77.020
Jasa dunia usaha	-	176.577
	<u>12.713.340</u>	<u>10.837.354</u>
	<u>96.236.121</u>	<u>93.712.615</u>
Total	718.982.668	643.470.975
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(29.423.380)	(22.184.296)
<b>Bersih</b>	<b><u>689.559.288</u></b>	<b><u>621.286.679</u></b>

c) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu kredit yang diberikan berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	16.086.535	13.537.435
> 1 bulan - 3 bulan	23.003.072	18.772.288
> 3 bulan - 1 tahun	110.806.225	97.065.113
> 1 tahun - 2 tahun	86.191.035	80.029.683
> 2 tahun - 5 tahun	157.904.624	142.332.825
> 5 tahun	169.998.254	150.564.648
	<u>563.989.745</u>	<u>502.301.992</u>



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)**

c) Berdasarkan Jangka Waktu (lanjutan):

Klasifikasi jangka waktu kredit yang diberikan berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>		
<u>Mata uang asing</u>		
≤ 1 bulan	5.382.236	2.441.291
> 1 bulan - 3 bulan	2.244.541	1.521.131
> 3 bulan - 1 tahun	5.174.926	5.505.601
> 1 tahun - 2 tahun	11.410.051	5.977.606
> 2 tahun - 5 tahun	8.737.745	12.608.850
> 5 tahun	25.807.303	19.401.889
	<u>58.756.802</u>	<u>47.456.368</u>
	622.746.547	549.758.360
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	11.019.644	1.890.341
> 1 bulan - 3 bulan	11.150.941	19.986.637
> 3 bulan - 1 tahun	17.130.693	16.731.440
> 1 tahun - 2 tahun	3.145.595	2.638.472
> 2 tahun - 5 tahun	5.891.373	7.727.466
> 5 tahun	35.184.535	33.900.905
	<u>83.522.781</u>	<u>82.875.261</u>
<u>Mata uang asing</u>		
≤ 1 bulan	2.000.424	242.395
> 1 bulan - 3 bulan	407.025	1.347.250
> 3 bulan - 1 tahun	5.862.809	2.736.744
> 1 tahun - 2 tahun	1.344.479	-
> 2 tahun - 5 tahun	2.999.687	4.967.027
> 5 tahun	98.916	1.543.938
	<u>12.713.340</u>	<u>10.837.354</u>
	96.236.121	93.712.615
Total	718.982.668	643.470.975
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(29.423.380)	(22.184.296)
<b>Bersih</b>	<b><u>689.559.288</u></b>	<b><u>621.286.679</u></b>

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)**

d) Berdasarkan Kolektibilitas:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Individual	27.226.560	28.871.177
Kolektif		
Lancar	661.911.830	587.285.896
Dalam perhatian khusus	21.928.300	20.523.521
Kurang lancar	1.290.701	1.056.103
Diragukan	1.408.731	1.128.476
Macet	5.216.546	4.605.802
	<u>691.756.108</u>	<u>614.599.798</u>
Total	718.982.668	643.470.975
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai:		
Individual	(13.013.036)	(7.510.899)
Kolektif	(16.410.344)	(14.673.397)
	<u>(29.423.380)</u>	<u>(22.184.296)</u>
<b>Bersih</b>	<b><u>689.559.288</u></b>	<b><u>621.286.679</u></b>

e) Berdasarkan Segmen Operasi:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
Ritel	267.885.706	235.361.063
Mikro	252.850.654	221.802.205
Korporasi	43.253.385	45.138.724
	<u>563.989.745</u>	<u>502.301.992</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Korporasi	48.592.233	38.531.635
Ritel	10.164.569	8.924.733
	<u>58.756.802</u>	<u>47.456.368</u>
	<u>622.746.547</u>	<u>549.758.360</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
Korporasi	82.866.296	82.280.121
Ritel	656.485	595.140
	<u>83.522.781</u>	<u>82.875.261</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Korporasi	12.713.340	10.837.354
	<u>96.236.121</u>	<u>93.712.615</u>
Total	718.982.668	643.470.975
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(29.423.380)	(22.184.296)
<b>Bersih</b>	<b><u>689.559.288</u></b>	<b><u>621.286.679</u></b>



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)**

f) Informasi Penting Lainnya:

1) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

	2017	2016
Bunga Kontrak		
Rupiah	11,78%	11,91%
Mata uang asing	4,11	4,23
Bunga Efektif		
Rupiah	14,14%	14,59%
Mata uang asing	4,20	4,38

- 2) Kredit yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan, surat kuasa untuk menjual, giro, tabungan, deposito atau jaminan lain yang umumnya diterima oleh perbankan (Catatan 20, 21 dan 22).
- 3) Kredit modal kerja dan investasi diberikan kepada debitur untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan barang-barang modalnya.
- 4) Kredit konsumsi terdiri dari kredit kepada pegawai dan pensiun, kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan kredit konsumsi lainnya.
- 5) Kredit program merupakan kredit yang disalurkan BRI berdasarkan petunjuk dari Pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan di Indonesia khususnya pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.
- 6) Kredit Kupedes merupakan kredit yang disalurkan BRI melalui kantor BRI Unit. Sasaran kredit ini adalah usaha mikro dan golongan berpenghasilan tetap yang memerlukan tambahan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan ketentuan batasan plafon Kupedes. Sektor ekonomi yang menjadi sasaran adalah pertanian, industri, perdagangan dan lain-lain.
- 7) Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada debitur dibawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Jumlah kredit sindikasi yang diberikan BRI adalah sebesar Rp38.340.157 dan Rp45.054.012 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Keikutsertaan BRI sebagai pimpinan sindikasi berkisar dari 22,65% sampai dengan 63,65% dan 24,50% sampai dengan 63,65% sedangkan sebagai anggota sindikasi berkisar dari 10,89% sampai dengan 50,00% dan 2,97% sampai dengan 59,97% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.
- 8) Pinjaman karyawan adalah pinjaman yang diberikan kepada karyawan dengan tingkat bunga sebesar 5,50% per tahun yang ditujukan untuk pembelian kendaraan, rumah dan keperluan lainnya dengan jangka waktu berkisar antara 4 (empat) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun. Pembayaran pokok pinjaman dan bunga dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulan. Perbedaan antara tingkat bunga pinjaman karyawan dan *Base Lending Rate* (BLR) ditangguhkan dan dicatat sebagai beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan, bagian dari aset lain-lain. Besarnya akun beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan sebesar Rp617.834 dan Rp565.480 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (Catatan 18).

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)**

f) Informasi Penting Lainnya (lanjutan):

9) Kredit yang diberikan BRI kepada pihak berelasi diluar kredit yang diberikan kepada karyawan kunci (Catatan 44) adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	27.039.931	27.446.991
Perum Bulog	9.049.660	16.112.248
PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (Persero)	6.100.000	-
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3.801.438	3.864.676
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	3.450.797	4.307.997
PT Pegadaian (Persero)	3.037.521	3.835.110
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	2.438.770	1.735.635
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	2.375.195	1.968.132
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	2.218.288	1.655.684
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	1.939.755	2.377.804
Lain-lain	34.746.309	30.365.164
<b>Total</b>	<b>96.197.664</b>	<b>93.669.441</b>

10) Jumlah kredit yang diberikan yang telah direstrukturisasi BRI (Entitas Induk) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp42.175.770 dan Rp37.131.753 (tidak diaudit). Skema restrukturisasi umumnya dilakukan dengan perpanjangan masa pelunasan kredit dan penjadwalan kembali bunga yang tertunggak.

11) Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) per tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 kepada Bank Indonesia, BRI tidak memiliki debitur baik pihak terkait maupun pihak tidak terkait, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang tidak memenuhi atau melampaui ketentuan BMPK.

12) Rincian kredit mengalami penurunan nilai berdasarkan sektor ekonomi, serta cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Perdagangan, perhotelan dan restoran	9.898.334	9.589.255
Perindustrian	8.457.660	9.306.203
Pertanian	4.727.530	4.345.008
Konstruksi	3.183.411	3.725.349
Pertambangan	2.712.370	3.116.077
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	1.671.117	1.653.314
Jasa dunia usaha	1.589.408	1.629.211
Listrik, gas dan air	707.437	723.688
Jasa pelayanan sosial	676.383	135.594
Lain-lain	1.518.888	1.437.859
<b>Total</b>	<b>35.142.538</b>	<b>35.661.558</b>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(15.239.033)	(9.224.013)
<b>Bersih</b>	<b>19.903.505</b>	<b>26.437.545</b>



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)**

f) Informasi Penting Lainnya (lanjutan):

13) Rasio-rasio

a. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) BRI berdasarkan Peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

(i) BRI Induk dan BRI Agro

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Total kredit <i>non-performing</i>	15.147.081	13.117.282
Total kredit yang diberikan	718.982.668	643.470.975
% kredit <i>non-performing</i> (NPL)	2,11%	2,04%

(ii) BRI (Entitas Induk)

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Total kredit <i>non-performing</i>	14.862.646	12.882.913
Total kredit yang diberikan	708.001.045	635.291.221
% kredit <i>non-performing</i> (NPL)	2,10%	2,03%

b. Rasio kredit usaha kecil terhadap jumlah kredit yang diberikan BRI adalah masing-masing sebesar 45,58% dan 44,48% pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (tidak diaudit).

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Saldo awal	22.184.296	17.162.183
Pembentukan penyisihan cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 34)	16.800.820	13.454.979
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(9.548.619)	(8.473.450)
Selisih kurs	(13.117)	40.584
<b>Saldo akhir</b>	<b>29.423.380</b>	<b>22.184.296</b>

Dalam saldo cadangan kerugian penurunan nilai BRI (Entitas Induk) termasuk cadangan kerugian untuk daerah yang masih dikategorikan sebagai daerah rawan bencana atau yang pernah mengalami bencana oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah sebesar Rp926.267 dan Rp857.060, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (Catatan 2e).

Jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan BRI (Entitas Induk), yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (Catatan 2e) adalah sebesar Rp18.507.786 dan Rp15.652.514, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan yang dibentuk telah memadai.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**13. PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH**

a) Piutang dan pembiayaan syariah berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
<u>Pihak ketiga</u>		
Lancar	14.285.886	14.553.293
Dalam perhatian khusus	1.382.563	1.870.297
Kurang lancar	505.223	160.261
Diragukan	89.184	178.264
Macet	604.915	479.990
	<u>16.867.771</u>	<u>17.242.105</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
Lancar	996.779	506.483
Dalam perhatian khusus	319	355
	<u>997.098</u>	<u>506.838</u>
Total	17.864.869	17.748.943
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(577.257)	(492.156)
<b>Bersih</b>	<b><u>17.287.612</u></b>	<b><u>17.256.787</u></b>

b) Piutang dan pembiayaan syariah berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	530.569	282.806
> 1 bulan - 3 bulan	236.409	449.395
> 3 bulan - 1 tahun	2.421.838	1.399.649
> 1 tahun - 2 tahun	960.678	1.265.385
> 2 tahun - 5 tahun	7.331.402	2.728.868
> 5 tahun	5.386.875	11.116.002
	<u>16.867.771</u>	<u>17.242.105</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	-	6
> 1 bulan - 3 bulan	-	3.400
> 3 bulan - 1 tahun	4.004	328.777
> 1 tahun - 2 tahun	801.366	1.936
> 2 tahun - 5 tahun	100.938	41.675
> 5 tahun	90.790	131.044
	<u>997.098</u>	<u>506.838</u>
Total	17.864.869	17.748.943
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(577.257)	(492.156)
<b>Bersih</b>	<b><u>17.287.612</u></b>	<b><u>17.256.787</u></b>



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**13. PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)**

Piutang dan pembiayaan syariah terdiri dari piutang *murabahah*, piutang *istishna*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Pendapatan piutang *murabahah* yang belum diakui pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp4.200.027 dan Rp4.322.067.

Perubahan cadangan kerugian nilai piutang dan pembiayaan syariah:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Saldo awal	492.156	352.252
Pembentukan penyisihan cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 34)	202.008	244.267
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	25.407	14.892
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(142.314)	(119.255)
<b>Saldo akhir</b>	<b>577.257</b>	<b>492.156</b>

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang dan pembiayaan syariah yang dibentuk telah memadai.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah piutang dan pembiayaan syariah yang diklasifikasikan *Non-Performing Financing* (NPF) masing-masing sebesar Rp1.199.322 (6,71%) dan Rp818.515 (4,61%).

Jenis jaminan yang diserahkan oleh debitur atas piutang dan pembiayaan *syariah* berupa tanah dan bangunan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan properti lainnya.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tidak terdapat piutang pembiayaan *syariah* yang dialihkan dan atau digunakan sebagai jaminan atas utang.

**14. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN**

Piutang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 terdiri dari:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
<u>Pihak ketiga</u>		
Piutang sewa pembiayaan-bruto	2.828.510	2.465.843
Nilai sisa yang terjamin	1.656.302	1.750.061
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(342.419)	(266.044)
Simpanan jaminan	(1.653.410)	(1.749.560)
Total	2.488.983	2.200.300
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(103.500)	(130.000)
<b>Bersih</b>	<b>2.385.483</b>	<b>2.070.300</b>

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**14. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)**

Piutang sewa pembiayaan-bruto sesuai dengan tanggal jatuh temponya:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 tahun	217.083	192.212
> 1 tahun - 2 tahun	522.974	480.529
> 2 tahun - 5 tahun	1.234.645	929.023
	<u>1.974.702</u>	<u>1.601.764</u>
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
≤ 1 tahun	45.397	71.824
> 1 tahun - 2 tahun	45.663	179.561
> 2 tahun - 5 tahun	423.221	347.151
	<u>514.281</u>	<u>598.536</u>
Total	2.488.983	2.200.300
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(103.500)	(130.000)
<b>Bersih</b>	<b><u>2.385.483</u></b>	<b><u>2.070.300</u></b>

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang sewa pembiayaan:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Saldo awal	130.000	128.000
(Pembalikan) pembentukan penyisihan cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 34) *)	(8.713)	16.669
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(16.984)	(14.646)
Selisih kurs	(803)	(23)
<b>Saldo akhir</b>	<b><u>103.500</u></b>	<b><u>130.000</u></b>

\*) Pembentukan penyisihan cadangan kerugian penurunan nilai untuk periode berjalan setelah akuisisi tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp995 (catatan 34)

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang sewa pembiayaan yang dibentuk telah memadai.

**15. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI**

Rincian tagihan akseptasi kepada nasabah adalah sebagai berikut:

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang:

	<b>31 Desember 2017</b>		<b>31 Desember 2016</b>	
	<b>Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)</b>	<b>Ekivalen Rp</b>	<b>Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)</b>	<b>Ekivalen Rp</b>
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
L/C Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		2.765.562		3.192.249



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**15. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan)**

Rincian tagihan akseptasi kepada nasabah adalah sebagai berikut (lanjutan):

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang (lanjutan):

	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Mata uang asing</u>				
L/C Impor dan SKBDN				
Dolar Amerika Serikat	116.065.536	1.574.719	147.121.912	1.982.100
Euro Eropa	2.157.759	35.034	1.406.631	19.940
Yen Jepang	38.445.000	4.634	30.124.000	3.466
Dolar Singapura	23.550	239	19.600	183
		1.614.626		2.005.689
		4.380.188		5.197.938
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
L/C Impor dan SKBDN		401.456		363.963
<u>Mata uang asing</u>				
L/C Impor dan SKBDN				
Dolar Amerika Serikat	66.226.205	898.524	7.433.691	100.150
Euro Eropa	816.480	13.257	2.153.788	30.532
		911.781		130.682
		1.313.237		494.645
<b>Total</b>		<b>5.693.425</b>		<b>5.692.583</b>

b) Berdasarkan Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, seluruh tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai "Lancar".

c) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu tagihan akseptasi berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<u>Pihak ketiga</u>		
≤ 1 bulan	1.101.957	955.776
> 1 bulan - 3 bulan	1.609.616	1.935.035
> 3 bulan - 1 tahun	1.668.615	2.307.127
	4.380.188	5.197.938

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**15. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan)**

c) Berdasarkan Jangka Waktu (lanjutan):

Klasifikasi jangka waktu tagihan akseptasi berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
≤ 1 bulan	792.676	89.867
> 1 bulan - 3 bulan	373.623	171.292
> 3 bulan - 1 tahun	146.938	233.486
	<u>1.313.237</u>	<u>494.645</u>
<b>Total</b>	<b><u>5.693.425</u></b>	<b><u>5.692.583</u></b>

BRI melakukan penilaian atas penurunan nilai tagihan akseptasi secara individual dengan adanya bukti obyektif penurunan nilai.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, karena Manajemen berkeyakinan bahwa tagihan akseptasi dapat ditagih.

**16. PENYERTAAN SAHAM**

Rincian penyertaan saham adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Jenis Usaha	31 Desember 2017			
		Persentase Pemilikan (%)	Biaya Perolehan	Akumulasi atas Bagian Laba Neto Asosiasi	Nilai Tercatat
<b>Metode Ekuitas</b>					
(Investasi dalam entitas asosiasi)					
PT Bahana Artha Ventura (Pihak berelasi - Catatan 44)	Modal Ventura	35,00	71.326	56	71.382
<b>Metode Biaya</b>					
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Jasa penitipan surat berharga	3,00			900
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	Lembaga keuangan non Bank	8,00			536
PT Jakarta Kyoei Medical Center	Pelayanan kesehatan	1,68			220
PT Pemingkat Efek Indonesia	Pemingkat efek	0,21			210
PT Menara Proteksi Indonesia	Infrastruktur	2,00			200



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**16. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)**

Rincian penyertaan saham adalah sebagai berikut (lanjutan):

31 Desember 2017					
Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Persentase Pemilikan (%)	Biaya Perolehan	Akumulasi atas Bagian Laba Neto Asosiasi	Nilai Tercatat
<b>Metode Biaya (lanjutan)</b>					
BPR Toelongredjo Dasa Nusantara	Perbankan	1,50			77
BPR Tjoekir Dasa Nusantara	Perbankan	3,00			77
BPR Toelangan Dasa Nusantara	Perbankan	1,50			66
PT Merapi Gelanggang Wisata	Sarana olahraga	0,64			50
BPR Cinta Manis Agroloka	Perbankan	1,75			35
PT Sukapraja Estetika Padang Golf	Sarana olahraga	0,24			25
BPR Bungamayang Agroloka	Perbankan	1,13			23
PT Aplikanusa Lintasarta	Non-Bank	0,03			20
					2.439
<b>Total</b>					<b>73.821</b>

31 Desember 2016			
Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Nilai Tercatat
<b>Metode Biaya</b>			
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Jasa penitipan Surat berharga	3,00	900
PT Sarana Bersama	Lembaga keuangan non Bank	8,00	536
PT Jakarta Kyoei Medical Center	Pelayanan kesehatan	1,68	220
PT Pemeringkat Efek Indonesia	Pemeringkat efek	0,21	210
PT Menara Proteksi Indonesia	Infrastruktur	2,00	200
BPR Toelongredjo Dasa Nusantara	Perbankan	1,50	77
BPR Tjoekir Dasa Nusantara	Perbankan	3,00	77
BPR Toelangan Dasa Nusantara	Perbankan	1,50	66
PT Merapi Gelanggang Wisata	Sarana Olahraga	0,64	50
BPR Cinta Manis Agroloka	Perbankan	1,75	35
PT Sukapraja Estetika Padang Golf	Sarana Olahraga	0,24	25
BPR Bungamayang Agroloka	Perbankan	2,25	23
PT Aplikanusa Lintasarta	Non-Bank	0,03	20
			2.439
<b>Total</b>			<b>2.439</b>

BRI melakukan penilaian atas penurunan nilai penyertaan secara individual dengan adanya bukti obyektif penurunan nilai.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, seluruh penyertaan diklasifikasikan "Lancar".

Pada tahun 2016, BRI telah menerima dividen tunai dari PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia dan PT Pemeringkat Efek Indonesia masing-masing sebesar Rp170 dan Rp11.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**16. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)**

Pada tahun 2017, BRI Agro (entitas anak) telah menerima dividen tunai dari BPR Cinta Manis Agroloka, BPR Bungamayang Agroloka dan PT Aplikanusa Lintasarta masing-masing sebesar Rp8, Rp13 dan Rp19, sedangkan pada tahun 2016, BRI Agro (entitas anak) telah menerima dividen tunai dari BPR Cinta Manis Agroloka, BPR Bungamayang Agroloka dan PT Aplikanusa Lintasarta masing-masing sebesar Rp7, Rp21 dan Rp26.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, karena Manajemen berkeyakinan bahwa penyertaan saham dapat diperoleh kembali.

**17. ASET TETAP**

Aset tetap terdiri atas:

Keterangan	31 Desember 2017			
	Saldo Awal	Penambahan <sup>*)</sup>	Pengurangan	Saldo Akhir
<u>Biaya Perolehan</u>				
Hak atas tanah	15.799.496	340.373	5.742	16.134.127
Bangunan	3.160.913	617.484	102.976	3.675.421
Kendaraan bermotor	2.152.023	84.034	33.041	2.203.016
Komputer dan mesin	6.404.214	750.309	60.444	7.094.079
Perlengkapan kantor	1.469.906	125.049	14.083	1.580.872
Aset tetap museum	184	-	-	184
Satelit	-	3.284.664	-	3.284.664
Satelit dalam pengembangan	3.275.613	183.877	3.459.490	-
	<u>32.262.349</u>	<u>5.385.790</u>	<u>3.675.776</u>	<u>33.972.363</u>
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Bangunan	1.359.558	173.013	3.251	1.529.320
Kendaraan bermotor	1.418.674	316.705	31.545	1.703.834
Komputer dan mesin	3.834.431	820.942	51.909	4.603.464
Perlengkapan kantor	1.134.627	141.008	13.933	1.261.702
Satelit	-	127.737	-	127.737
	<u>7.747.290</u>	<u>1.579.405</u>	<u>100.638</u>	<u>9.226.057</u>
<b>Nilai buku - neto</b>	<b><u>24.515.059</u></b>			<b><u>24.746.306</u></b>

Keterangan	31 Desember 2016			
	Saldo Awal	Penambahan <sup>**)</sup>	Pengurangan	Saldo Akhir
<u>Biaya Perolehan</u>				
Hak atas tanah	1.107.163	14.709.604	17.271	15.799.496
Bangunan	2.900.001	455.660	194.748	3.160.913
Kendaraan bermotor	1.943.674	243.909	35.560	2.152.023
Komputer dan mesin	5.065.582	1.422.607	83.975	6.404.214
Perlengkapan kantor	1.354.292	143.069	27.455	1.469.906
Aset tetap museum	184	-	-	184
Satelit dalam pengembangan	2.316.572	959.041	-	3.275.613
	<u>14.687.468</u>	<u>17.933.890</u>	<u>359.009</u>	<u>32.262.349</u>



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**17. ASET TETAP (lanjutan)**

Aset tetap terdiri atas (lanjutan):

Keterangan	31 Desember 2016			
	Saldo Awal	Penambahan**)	Pengurangan	Saldo Akhir
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Bangunan	1.220.467	141.655	2.564	1.359.558
Kendaraan bermotor	1.123.409	330.604	35.339	1.418.674
Komputer dan mesin	3.276.548	636.290	78.407	3.834.431
Perlengkapan kantor	1.027.764	134.265	27.402	1.134.627
	<u>6.648.188</u>	<u>1.242.814</u>	<u>143.712</u>	<u>7.747.290</u>
<b>Nilai buku - neto</b>	<b><u>8.039.280</u></b>			<b><u>24.515.059</u></b>

\*) Termasuk didalamnya properti investasi entitas anak (BRI Life) yang dipergunakan oleh BRI dan BRI Syariah sebesar Rp94.779.

\*\*) Termasuk dalam penambahan aset tetap adalah surplus revaluasi hak atas tanah sebesar Rp14.261.442 (setelah dikurangi penurunan nilai akibat revaluasi sebesar Rp54.085) dan saldo awal BRI Finance (entitas anak) yang diakuisisi (Biaya Perolehan sebesar Rp19.376, Akumulasi Penyusutan sebesar Rp16.901 dan Biaya Penyusutan tahun berjalan sebesar Rp1.589)

Jumlah penyusutan aset tetap yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian masing-masing sebesar Rp1.579.405 dan Rp1.224.809 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (Catatan 36).

BRI telah mengasuransikan aset tetap (tidak termasuk hak atas tanah dan satelit) untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian, vandalis, *force majeure* dan lain-lain kepada PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (pihak berelasi - Catatan 44), PT Asuransi Jasa Tania Tbk, dan PT Asuransi Purna Artanugraha dengan nilai pertanggungan seluruhnya sebesar Rp12.283.482 dan Rp10.530.478 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. BRI mengasuransikan aset tetap satelit kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (pihak berelasi - Catatan 44) dengan nilai pertanggungan seluruhnya sebesar ASD224.000.000 (angka penuh) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

NJOP bangunan yang dimiliki BRI pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing senilai Rp2.196.353 dan Rp2.038.098. NJOP dianggap sebagai estimasi terbaik yang mencerminkan nilai wajar bangunan.

Nilai tercatat bruto aset tetap yang telah terdepresiasi penuh, namun masih digunakan oleh BRI adalah masing-masing sebesar Rp4.777.039 dan Rp3.666.122 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Tidak ada aset tetap yang dimiliki BRI yang dijadikan jaminan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Pada tahun 2017, Satelit dalam pengembangan telah siap digunakan sebagai penunjang bisnis sesuai dengan maksud manajemen BRI. Oleh karena itu, BRI melakukan reklasifikasi atas satelit dalam pengembangan sebesar Rp3.459.490 ke aset tetap satelit sebesar Rp3.284.664, bangunan sebesar Rp79.722, perlengkapan kantor sebesar Rp1.360 serta komputer dan mesin sebesar Rp93.744.

Atas aset tetap satelit, BRI mengalokasikan pemanfaatan 144 MHz kapasitas transponder kepada beberapa instansi pemerintah yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Adapun instansi pemerintah yang dapat memanfaatkan kapasitas tersebut adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Kementerian Keuangan.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**17. ASET TETAP (lanjutan)**

Manufaktur satelit (BRIsat) telah selesai dilaksanakan dan telah berhasil diluncurkan pada tanggal 19 Juni 2016 dari Kourou, French Guiana. BRIsat telah mencapai orbit yang dituju dan telah dilakukan pengujian (in orbit test). Terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2016 telah dilakukan "*BRIsat operational handover*" dari SSL (sebagai manufaktur satelit BRIsat). Hingga tanggal 31 Desember 2016 dilakukan *Final Acceptance* untuk perangkat *ground* (gRCS) untuk memastikan perangkat-perangkat tersebut dapat digunakan secara optimal oleh BRI. Sesuai dengan kontrak, performa satelit akan terus dimonitor oleh SSL dan BRI sampai *milestone* terakhir (satellite performance) diselesaikan pada pertengahan tahun 2017. Persentase jumlah tercatat satelit dalam pengembangan terhadap nilai kontrak adalah sebesar  $\pm 96\%$ .

Pada tanggal 1 April 2016, BRI melakukan penilaian kembali (revaluasi) atas aset tetap tanah untuk tujuan akuntansi dan perpajakan adalah sebagai berikut:

- Tujuan akuntansi: BRI mengubah kebijakan akuntansi untuk pengukuran tanah menjadi model revaluasian dari sebelumnya menggunakan model biaya.
- Tujuan perpajakan: kenaikan nilai tercatat aset tetap tanah sebesar Rp14.315.527 telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-479/WPJ.19/2016 tanggal 29 Juli 2016.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain sebesar Rp13.824.692 (setelah dikurangi pajak final sebesar Rp490.835). Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi sebesar Rp54.085 diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Nilai wajar hak atas tanah termasuk pada hirarki nilai wajar level 2.

Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim. Metode penilaian yang dipakai adalah metode data pasar, metode biaya dan metode pendapatan.

Penilaian atas tanah dilakukan oleh penilai independen eksternal KJPP Abdullah, Fitriantoro dan Rekan, KJPP Aditya, Iskandar dan Rekan, KJPP Aksa, Nelson dan Rekan, KJPP Immanuel, Johnny dan Rekan, KJPP Iwan Bachron dan Rekan, KJPP Nanang, Rahayu dan Rekan, KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan, KJPP Satria, Iskandar, Setiawan dan Rekan serta KJPP Toha, Okky, Heru dan Rekan, dengan berbagai tanggal penilaian.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jika tanah diukur menggunakan model biaya, nilai tercatatnya masing-masing sebesar Rp1.810.249 dan Rp1.538.053.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap dan jumlah nilai pertanggungansian asuransi cukup untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul atas aset tetap pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**18. ASET LAIN-LAIN**

Aset lain-lain terdiri atas:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
<u>Rupiah</u>		
Tagihan kepada Pemerintah terkait pemberian KUR generasi II	4.176.707	595.562
Wesel tagih	3.164.762	1.479.420
Tagihan terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit	2.100.850	1.726.840
Aset tetap belum didistribusikan	1.393.552	1.169.654
Piutang bunga		
Efek-efek	1.089.898	725.662
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	389.617	417.562
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	8.292	80.864
Lain-lain	52.042	76.757
Biaya dibayar di muka	1.212.974	632.266
Aset <i>ijarah</i>	1.146.920	286.181
Uang muka pajak (Catatan 38b)	927.453	-
Sewa kantor, gudang, dan ruang kelas	914.088	845.247
Tagihan atas penyaluran bantuan sosial pemerintah	657.815	-
Beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan (Catatan 12f)	617.834	565.480
Persekot Intern	381.897	611.471
Agunan yang diambil alih	362.576	257.769
Aset reasuransi	269.007	232.332
Persediaan kantor	235.827	296.038
Tagihan kepada Perum Bulog	228.682	328.559
Pendapatan yang masih harus diterima berdasarkan prinsip syariah	191.236	170.519
Estimasi tagihan pajak	88.684	63.170
Tagihan pinalti pokok dan bunga kredit	68.864	68.009
Piutang premi	20.465	46.511
Lain-lain	2.071.248	1.752.014
	<u>21.771.290</u>	<u>12.427.887</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Wesel tagih	1.865.874	755.285
Tagihan <i>refinancing</i>	817.573	115.386
Piutang bunga		
Efek-efek	547.626	535.611
Lain-lain	42.859	34.164
Lain-lain	185.233	41.600
	<u>3.459.165</u>	<u>1.482.046</u>
<b>Total</b>	<b><u>25.230.455</u></b>	<b><u>13.909.933</u></b>

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**19. LIABILITAS SEGERA**

Liabilitas segera terdiri atas:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
<u>Rupiah</u>		
Titipan <i>advance payment</i>	2.127.026	1.492.074
Titipan setoran pajak	424.823	379.554
Titipan ATM dan kartu kredit	285.508	457.982
Titipan kerjasama pihak ketiga	200.525	100.786
Titipan asuransi	162.907	152.213
Titipan pinjaman kelolaan	57.321	51.265
Titipan pengiriman uang	26.587	35.703
Titipan setoran kliring	22.252	26.807
Penampungan dana bantuan siswa miskin	21.422	558
Lain-lain	3.025.164	2.506.480
	<u>6.353.535</u>	<u>5.203.422</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Titipan <i>advance payment</i>	61.720	56.120
Titipan ATM dan kartu kredit	48.686	52.597
Titipan setoran pajak	15.867	12.273
Lain-lain	104.393	85.901
	<u>230.666</u>	<u>206.891</u>
<b>Total</b>	<b><u>6.584.201</u></b>	<b><u>5.410.313</u></b>

**20. GIRO**

Giro terdiri atas:

	<b>31 Desember 2017</b>		<b>31 Desember 2016</b>	
	<b>Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)</b>	<b>Ekuivalen Rp</b>	<b>Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)</b>	<b>Ekuivalen Rp</b>
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
		81.525.195		79.314.862
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	1.362.520.346	18.485.995	1.153.376.172	15.538.860
Euro Eropa	11.802.883	191.634	113.890.839	1.614.490
Dolar Singapura	12.039.022	122.251	2.777.138	25.861
Pound Sterling Inggris	2.679.707	49.107	3.764.194	62.316
Dolar Australia	3.039.571	32.202	21.415.159	208.222
Renminbi	7.318.360	15.249	56.984.608	110.504
Yen Jepang	79.572.861	9.590	223.500.953	25.717
Dolar Hong Kong	511.954	889	528.967	919
Riyal Arab Saudi	37.625	136	2.306.560	8.285
		<u>18.907.053</u>		<u>17.595.174</u>
		<u>100.432.248</u>		<u>96.910.036</u>



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**20. GIRO (lanjutan)**

Giro terdiri atas (lanjutan):

	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>		29.089.518		29.618.921
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	1.161.516.707	15.758.878	1.081.759.223	14.574.001
Euro Eropa	14.932.009	242.439	22.240.029	315.269
Yen Jepang	50.489.759	6.085	6.890.431	793
		16.007.402		14.890.063
		45.096.920		44.508.984
<b>Total</b>		<b>145.529.168</b>		<b>141.419.020</b>

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

	2017	2016
Rupiah	2,32%	2,33%
Mata uang asing	0,33	0,49

Giro yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh BRI dan entitas anak adalah masing-masing sebesar Rp238.264 dan Rp127.809 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

**21. TABUNGAN**

Tabungan terdiri atas:

	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Simpedes		205.658.448		183.909.412
Britama		126.653.884		108.269.980
Lain-lain		9.432.599		4.260.239
		341.744.931		296.439.631
<u>Mata uang asing</u>				
Britama				
Dolar Amerika Serikat	96.426.361	1.308.264	94.648.979	1.275.158
Euro Eropa	4.319.864	70.138	15.504.444	219.787
Dolar Singapura	4.047.720	41.103	5.506.164	51.273
Dolar Australia	497.747	5.273	807.929	7.856
Yen Jepang	33.461.987	4.033	10.923.961	1.257
Renminbi	684.461	1.426	672.164	1.304
Pound Sterling Inggris	76.103	1.394	66	1
Dolar Hong Kong	29.476	51	12.547	22
Riyal Arab Saudi	960	3	328	1
Dirham Uni Emirat Arab	147	1	365	1
		1.431.686		1.556.660

Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**21. TABUNGAN (lanjutan)**

Tabungan terdiri atas (lanjutan):

	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>				
<u>Mata uang asing (lanjutan)</u>				
<u>Lain-lain</u>				
Dolar Amerika Serikat	324.787	4.407	195.196	2.630
		1.436.093		1.559.290
		343.181.024		297.998.921
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Britama		160.589		96.035
Simpedes		3.562		2.680
Lain-lain		54.560		6.476
		218.711		105.191
<u>Mata uang asing</u>				
<u>Britama</u>				
Dolar Amerika Serikat	1.538.170	20.869	466.872	6.290
Dolar Australia	195	2		-
Euro Eropa	64	1		-
Pound Sterling Inggris	51	1		-
Dolar Singapura	80	1	242	3
Renminbi	357	1	607	1
		20.875		6.294
<u>Lain-lain</u>				
Dolar Amerika Serikat	9.346	127		-
		21.002		6.294
		239.713		111.485
<b>Total</b>		<b>343.420.737</b>		<b>298.110.406</b>

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

	2017	2016
Rupiah	0,86%	1,14%
Mata uang asing	0,21	0,22

Tabungan yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh BRI dan entitas anak adalah masing-masing sebesar Rp83.430 dan Rp84.937 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**22. DEPOSITO BERJANGKA**

Deposito berjangka terdiri atas:

	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>		179.634.460		159.195.095
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	3.756.779.689	50.970.108	3.126.352.845	42.119.789
Dolar Singapura	20.713.546	210.337	17.812.319	165.867
Dolar Australia	6.452.966	68.364	4.553.424	44.273
Euro Eropa	2.983.283	48.437	803.857.776	11.395.299
Renminbi	9.277.833	19.332	50.220.204	97.387
Riyal Arab Saudi	5.258.518	19.024	5.258.518	18.888
Pound Sterling Inggris	125.209	2.295	118.604	1.963
Yen Jepang	1.135.000	137	388.000	45
		51.338.034		53.843.511
		230.972.494		213.038.606
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>		68.918.906		60.898.562
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	1.912.908.304	25.953.383	1.376.645.507	18.546.856
Dolar Singapura	44.162.297	448.449	43.793.922	407.806
Euro Eropa	7.649.000	124.191	9.703.047	137.548
Dolar Australia	48.532	514		-
		26.526.537		19.092.210
		95.445.443		79.990.772
<b>Total</b>		<b>326.417.937</b>		<b>293.029.378</b>

Deposito berjangka berdasarkan periode kontrak adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
<i>Deposits on call</i>	7.846.255	9.577.885
Deposito		
1 bulan	71.521.847	66.562.883
3 bulan	73.908.929	59.117.884
6 bulan	19.467.302	17.829.486
12 bulan	6.123.449	5.647.297
Lebih dari 12 bulan	766.678	459.660
	179.634.460	159.195.095

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**22. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)**

Deposito berjangka berdasarkan periode kontrak adalah sebagai berikut (lanjutan):

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>		
<u>Mata uang asing</u>		
<i>Deposits on call</i>	3.858.989	3.823.613
Deposito		
1 bulan	12.810.631	6.845.138
3 bulan	5.859.042	5.329.468
6 bulan	13.393.642	26.618.525
12 bulan	15.411.619	10.607.111
Lebih dari 12 bulan	4.111	619.656
	<u>51.338.034</u>	<u>53.843.511</u>
	<u>230.972.494</u>	<u>213.038.606</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
<i>Deposits on call</i>	14.117.304	7.975.541
Deposito		
1 bulan	24.736.012	29.547.145
3 bulan	14.274.439	12.669.883
6 bulan	2.560.592	2.456.474
12 bulan	1.659.159	5.289.119
Lebih dari 12 bulan	11.571.400	2.960.400
	<u>68.918.906</u>	<u>60.898.562</u>
<u>Mata uang asing</u>		
<i>Deposits on call</i>	7.275.615	1.377.187
Deposito		
1 bulan	8.742.183	9.196.247
3 bulan	4.072.443	3.306.531
6 bulan	5.367.913	5.030.168
12 bulan	948.989	182.077
Lebih dari 12 bulan	119.394	-
	<u>26.526.537</u>	<u>19.092.210</u>
	<u>95.445.443</u>	<u>79.990.772</u>
<b>Total</b>	<b><u>326.417.937</u></b>	<b><u>293.029.378</u></b>

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Rupiah	6,20%	7,49%
Mata uang asing	1,43	1,19

Deposito berjangka yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh BRI dan entitas anak adalah masing-masing sebesar Rp334.019 dan Rp257.410 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**23. SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA**

Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya terdiri atas:

	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<b>Pihak ketiga</b>				
<b>Rupiah</b>				
<i>Deposits on call</i>		3.473.000		810.000
Deposito berjangka		523.193		84.630
Giro		169.262		152.260
Tabungan		6.709		6.497
<i>Inter-bank call money</i>		-		536.729
		4.172.164		1.590.116
<b>Dolar Amerika Serikat</b>				
Giro	13.272.017	180.068	6.387.630	86.057
<i>Inter-bank call money</i>	6.000.000	81.405		-
Deposito berjangka	1.000.000	13.568	4.000.000	53.890
		275.041		139.947
		4.447.205		1.730.063
<b>Pihak berelasi (Catatan 44)</b>				
<b>Rupiah</b>				
<i>Deposits on call</i>		50.000		80.000
Giro		2.621		689
<i>Inter-bank call money</i>		-		20.000
		52.621		100.689
<b>Dolar Amerika Serikat</b>				
<i>Inter-bank call money</i>	80.600.000	1.093.541	29.600.000	398.786
		1.146.162		499.475
<b>Total</b>		<b>5.593.367</b>		<b>2.229.538</b>

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

	Rupiah		Dolar Amerika Serikat	
	2017	2016	2017	2016
Giro	1,31%	1,21%	0,03%	0,05%
Tabungan	1,37	1,46	-	-
<i>Deposits on call</i>	5,23	5,97	-	-
Deposito berjangka	5,90	6,47	0,45	0,44
<i>Inter-bank call money</i>	-	4,74	0,92	0,46

Klasifikasi jangka waktu simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017			
	≤ 1 bulan	> 1 - 3 bulan	> 3 bulan - 1 tahun	Total
<b>Pihak ketiga</b>				
<b>Rupiah</b>				
<i>Deposits on call</i>	3.473.000	-	-	3.473.000
Deposito berjangka	436.000	57.408	29.785	523.193
Giro	169.262	-	-	169.262
Tabungan	6.709	-	-	6.709
	4.084.971	57.408	29.785	4.172.164

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**23. SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)**

Klasifikasi jangka waktu simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2017			Total
	≤ 1 bulan	> 1 - 3 bulan	> 3 bulan - 1 tahun	
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>				
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Giro	180.068	-	-	180.068
Deposito berjangka	13.568	-	-	13.568
Inter-bank call money	81.405	-	-	81.405
	275.041	-	-	275.041
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Deposits on call	50.000	-	-	50.000
Giro	2.621	-	-	2.621
	52.621	-	-	52.621
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Inter-bank call money	1.093.541	-	-	1.093.541
<b>Total</b>	<b>5.506.174</b>	<b>57.408</b>	<b>29.785</b>	<b>5.593.367</b>
	31 Desember 2016			
	≤ 1 bulan	> 1 - 3 bulan	> 3 bulan - 1 tahun	Total
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Deposits on call	810.000	-	-	810.000
Inter-bank call money	536.729	-	-	536.729
Giro	152.260	-	-	152.260
Deposito berjangka	41.250	42.057	1.323	84.630
Tabungan	6.497	-	-	6.497
	1.546.736	42.057	1.323	1.590.116
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Giro	86.057	-	-	86.057
Deposito berjangka	53.890	-	-	53.890
	139.947	-	-	139.947
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Deposits on call	80.000	-	-	80.000
Inter-bank call money	20.000	-	-	20.000
Giro	689	-	-	689
	100.689	-	-	100.689
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Inter-bank call money	398.786	-	-	398.786
<b>Total</b>	<b>2.186.158</b>	<b>42.057</b>	<b>1.323</b>	<b>2.229.538</b>



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**24. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI**

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri atas:

31 Desember 2017					
	Tanggal Jual	Tanggal Beli Kembali	Nilai Nominal	Nilai Jual	Nilai Beli Kembali-Neto
<u>Pihak ketiga</u>					
<u>Rupiah</u>					
Bank Lain					
Obligasi Pemerintah					
FR0069	18 Mei 2015	15 April 2019	571.000	500.047	500.047
FR0069	21 Mei 2015	15 April 2019	568.000	499.714	499.714
FR0069	9 September 2016	15 April 2019	540.000	498.000	498.000
FR0061	28 Februari 2017	15 Mei 2022	362.000	304.722	304.722
FR0063	7 November 2017	15 Mei 2023	500.000	446.090	446.090
FR0066	13 September 2016	15 Mei 2018	539.000	489.000	489.000
FR0053	9 September 2016	15 Juli 2021	416.000	390.000	390.000
FR0053	6 September 2016	15 Juli 2021	450.000	437.025	437.025
FR0053	28 Februari 2017	15 Juli 2021	440.000	382.690	382.690
FR0034	6 September 2016	15 Juni 2021	300.000	344.315	344.315
FR0048	6 September 2016	15 September 2018	100.000	98.570	98.570
			4.786.000	4.390.173	4.390.173
Sertifikat Bank Indonesia					
IDSD240818364S	21 Desember 2017	5 Januari 2018	2.000.000	2.021.328	2.024.388
IDSD090318182S	5 Desember 2017	5 Februari 2018	500.000	443.495	445.161
IDSD160318182S	30 November 2017	28 Februari 2018	500.000	442.923	444.944
IDSD060418273S	5 November 2017	5 Maret 2018	500.000	440.638	442.325
IDSD290618277S	30 November 2017	30 Mei 2018	500.000	436.495	438.637
			4.000.000	3.784.879	3.795.455
<u>Dolar Amerika Serikat</u>					
Bank Lain					
Obligasi Pemerintah					
RI0126	6 Desember 2017	6 Juni 2018	474.863	444.804	445.966
RI0320	6 Desember 2017	6 September 2018	367.679	339.188	340.109
RI0319	6 Desember 2017	6 September 2018	349.363	339.188	340.109
RI0521	11 Desember 2017	9 November 2018	788.272	678.375	679.929
RI0422	11 Desember 2017	9 November 2018	818.799	678.375	679.929
			2.798.976	2.479.930	2.486.042
			11.584.976	10.654.982	10.671.670
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>					
<u>Rupiah</u>					
Non Bank					
Obligasi Pemerintah					
FR0069	29 Juni 2015	15 April 2019	480.000	466.545	474.927
FR0069	20 Maret 2015	15 April 2019	1.000.000	972.093	990.087
			1.480.000	1.438.638	1.465.014
<b>Total</b>			<b>13.064.976</b>	<b>12.093.620</b>	<b>12.136.684</b>

Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**24. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri atas (lanjutan):

31 Desember 2016					
	Tanggal Jual	Tanggal Beli Kembali	Nilai Nominal	Nilai Jual	Nilai Beli Kembali-Neto
<u>Pihak ketiga</u>					
<u>Rupiah</u>					
Bank Lain					
Obligasi Pemerintah					
FR0069	18 Mei 2015	15 April 2019	571.000	500.047	500.047
FR0069	21 Mei 2015	15 April 2019	568.000	499.714	499.714
FR0069	9 September 2016	15 April 2019	540.000	498.000	498.000
FR0060	15 September 2016	15 April 2017	615.000	574.000	574.000
ORIO11	14 September 2016	15 Oktober 2017	718.000	670.000	670.000
FR0066	13 September 2016	15 Mei 2018	539.000	489.000	489.000
FR0053	9 September 2016	15 Juli 2021	416.000	390.000	390.000
FR0053	6 September 2016	15 Juli 2021	450.000	437.025	437.025
FR0034	6 September 2016	15 Juni 2021	300.000	344.315	344.315
FR0048	6 September 2016	15 September 2018	100.000	98.570	98.570
			4.817.000	4.500.671	4.500.671
<u>Dolar Amerika Serikat</u>					
Bank Lain					
Obligasi Pemerintah					
FR0028	16 Maret 2015	15 Juli 2017	670.000	538.900	538.900
FR0028	26 Maret 2015	15 Juli 2017	166.000	134.725	134.725
FR0053, FR0061	26 Februari 2015	24 Februari 2017	802.345	673.625	673.625
			1.638.345	1.347.250	1.347.250
			6.455.345	5.847.921	5.847.921
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>					
<u>Rupiah</u>					
Non Bank					
Obligasi Pemerintah					
FR0069	29 Juni 2015	15 April 2019	480.000	466.545	471.361
FR0069	20 Maret 2015	15 April 2019	1.000.000	972.093	983.116
			1.480.000	1.438.638	1.454.477
<b>Total</b>			<b>7.935.345</b>	<b>7.286.559</b>	<b>7.302.398</b>

**25. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN**

BRI menerbitkan surat berharga dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<u>Rupiah</u>		
Obligasi Berkelanjutan I BRI		
Tahap I Tahun 2015		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp2.091 dan Rp3.358 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016	2.321.788	2.321.811
Tahap II Tahun 2016		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp2.125 dan Rp2.430 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016	3.839.875	4.647.570
Tahap III Tahun 2016		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.372 dan Rp2.508 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016	3.069.111	4.281.750



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**25. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)**

BRI menerbitkan surat berharga dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<u>Rupiah (lanjutan)</u>		
Obligasi Berkelanjutan II BRI		
Tahap I Tahun 2016		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi		
masing-masing sebesar Rp4.116 dan Rp5.466 pada tanggal		
31 Desember 2017 dan 2016	3.927.592	4.544.019
Obligasi Berkelanjutan II BRI		
Tahap II Tahun 2017		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi		
sebesar Rp2.579 pada tanggal 31 Desember 2017	5.076.914	-
Obligasi Berkelanjutan II BRI		
Tahap III Tahun 2017		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi		
sebesar Rp3.293 pada tanggal 31 Desember 2017	5.126.187	-
Obligasi I BRI Agro Tahun 2017		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi		
sebesar Rp2.035 pada tanggal 31 Desember 2017	477.808	-
<u>Medium-Term Notes (MTN)</u>		
Tahap I Tahun 2014		
setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi		
masing-masing sebesar Rp191 pada tanggal 31 Desember 2016	-	359.809
Tahap I Tahun 2016		
setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi		
sebesar Rp992 pada tanggal 31 Desember 2016	-	1.924.008
	23.839.275	18.078.967
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
Obligasi BRI		
setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi obligasi yang		
belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp4.231		
dan Rp21.055 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016	6.780.383	6.721.814
<b>Total</b>	<b>30.619.658</b>	<b>24.800.781</b>

Amortisasi atas biaya emisi surat berharga yang diterbitkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar dan Rp23.830 dan Rp22.526.

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan:

a) Obligasi Berkelanjutan I BRI

Pada tanggal 25 Juni 2015, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Tahun 2015 dengan nilai pokok sebesar Rp3.000.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp655.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2016.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp925.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,20% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2018.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp1.420.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2020.

Bunga Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Tahun 2015 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 3 Oktober 2015. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**25. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)**

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

a) Obligasi Berkelanjutan I BRI (lanjutan)

Pada tanggal 19 Januari 2016, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap II Tahun 2016 dengan nilai pokok sebesar Rp4.650.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp808.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 8 Februari 2017.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp1.018.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Februari 2019.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp2.823.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Februari 2021.

Bunga Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap II Tahun 2016 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 4 Mei 2016. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal 4 Mei 2016, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap III Tahun 2016 dengan nilai pokok sebesar Rp4.350.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.212.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2017.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp2.437.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2019.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp701.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,70% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2021.

Bunga Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap III Tahun 2016 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 25 Agustus 2016. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Obligasi Berkelanjutan I BRI memperoleh *rating* idAAA dari Pefindo.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan tersebut dimanfaatkan untuk penyaluran kredit.

Persyaratan penting dalam perjanjian Obligasi Berkelanjutan adalah BRI tanpa persetujuan tertulis dari agen pemantau tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.

Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Seri A, Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap II Seri A, dan Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap III Seri A dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp655.000, Rp808.000, dan Rp1.212.000 telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**25. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)**

b) Obligasi Berkelanjutan II BRI

Pada tanggal 2 Desember 2016, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap I Tahun 2016 dengan nilai pokok sebesar Rp4.600.000 dalam 5 (lima) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp616.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 6 Desember 2017.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp964.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2019.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp193.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2021.
- Seri D: Nilai pokok sebesar Rp477.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,65% per tahun, untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2023.
- Seri E: Nilai pokok sebesar Rp2.350.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,90% per tahun, untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2026.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap I Tahun 2016 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 1 Maret 2017. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal 12 April 2017, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Tahun 2017 dengan nilai pokok sebesar Rp5.100.000 dalam 4 (empat) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.131.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,20% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 April 2018.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp1.743.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,10% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2020.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp925.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,30% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2022.
- Seri D: Nilai pokok sebesar Rp1.300.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,80% per tahun, untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2027.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Tahun 2017 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 11 Juli 2017. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal 25 Agustus 2017, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap III Tahun 2017 dengan nilai pokok sebesar Rp5.150.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp980.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2020.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp1.652.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2022.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp2.517.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun, untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2024.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**25. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)**

b) Obligasi Berkelanjutan II BRI (lanjutan)

Bunga Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap III Tahun 2017 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 24 November 2017. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Obligasi Berkelanjutan II BRI memperoleh *rating* idAAA dari Pefindo .

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan tersebut dimanfaatkan untuk penyaluran kredit.

Persyaratan penting dalam perjanjian Obligasi Berkelanjutan adalah BRI tanpa persetujuan tertulis dari agen pemantau tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.

Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap I Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp616.000 telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya.

c) Obligasi BRI

Pada tanggal 28 Maret 2013, BRI menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Bank BRI tahun 2013 dengan nominal sebesar ASD500.000.000 (angka penuh) pada *Singapore Exchange Securities Trading Limited* (SGX-ST) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2018 dengan tingkat bunga tetap 2,95% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan sebesar 99,196% setara dengan ASD495.980.000 (angka penuh) dan bunga obligasi tersebut dibayarkan setiap 6 (enam) bulan mulai tanggal 28 September 2013. Pada saat diterbitkan, obligasi ini diperingkat oleh Moody's dan Fitch dengan *rating* masing-masing Baa3 dan BBB-.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Bank BRI tersebut akan dimanfaatkan untuk keperluan memperkuat struktur pendanaan umum BRI.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Obligasi Bank BRI tahun 2013 memperoleh peringkat Baa3 dari Moody's dan BBB- dari Fitch dan Moody's.

d) Obligasi I BRI Agro

Pada tanggal 7 Juli 2017, setelah menerima Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari OJK No. S-348/D.04/2017 tertanggal 22 Juni 2017, BRI Agro menerbitkan Obligasi I BRI Agro Tahun 2017 dengan nilai pokok sebesar Rp500.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp261.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,25% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2020.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp239.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,50% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2022.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 7 Oktober 2017. Pada saat diterbitkan, Obligasi ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAA.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Obligasi I BRI Agro memperoleh *rating* idAA dari Pefindo. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi tersebut dimanfaatkan untuk penyaluran kredit.

Persyaratan penting dalam perjanjian Obligasi I BRI Agro tanpa persetujuan tertulis dari agen pemantau tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**26. PINJAMAN YANG DITERIMA**

Pinjaman yang diterima terdiri atas:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
Bank Indonesia		
Pinjaman likuiditas	15.906	15.906
Pinjaman lainnya	12.628	12.291
	<u>28.534</u>	<u>28.197</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Pinjaman dari China Development Bank Corporation setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi	13.402.803	13.047.548
Pinjaman Sindikasi <i>Club Loan</i> setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi	7.394.230	7.300.061
Pinjaman dari BNP Paribas setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi	782.365	-
Pinjaman Sindikasi <i>Club Deal</i> setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi	-	3.725.183
Pinjaman dari Bilateral	684.214	417.508
Pinjaman lainnya	7.110.863	10.389.673
	<u>29.374.475</u>	<u>34.879.973</u>
	<u>29.403.009</u>	<u>34.908.170</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	-	100.000
<b>Total</b>	<b><u>29.403.009</u></b>	<b><u>35.008.170</u></b>

Klasifikasi jangka waktu pinjaman yang diterima berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	85	85
> 3 bulan - 1 tahun	6.545	6.571
> 1 tahun - 5 tahun	7.966	7.942
> 5 tahun	13.938	13.599
	<u>28.534</u>	<u>28.197</u>

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)**

Klasifikasi jangka waktu pinjaman yang diterima berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>		
<u>Mata uang asing</u>		
≤ 1 bulan	679.742	320.647
> 1 bulan - 3 bulan	743.333	6.201.529
> 3 bulan - 1 tahun	6.372.001	7.996.715
> 1 tahun - 5 tahun	7.394.230	7.313.534
> 5 tahun	14.185.169	13.047.548
	<u>29.374.475</u>	<u>34.879.973</u>
	<u>29.403.009</u>	<u>34.908.170</u>
 <u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
> 3 bulan - 1 tahun	-	100.000
<b>Total</b>	<b><u>29.403.009</u></b>	<b><u>35.008.170</u></b>

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima:

a) Pinjaman dari Bank Indonesia

Pinjaman Likuiditas

Akun ini merupakan fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Indonesia untuk dipinjamkan kembali kepada debitur-debitur BRI antara lain untuk keperluan Kredit Investasi, Kredit Koperasi Primer untuk Anggota Tebu Rakyat, Pinjaman untuk Bulog dan KUD, Kredit Modal Kerja Permanen, Pupuk dan lain-lain.

Klasifikasi jangka waktu pinjaman likuiditas dari Bank Indonesia berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
≤ 1 bulan	85	85
> 3 bulan - 1 tahun	6.571	6.571
> 1 tahun - 5 tahun	7.942	7.942
> 5 tahun	1.308	1.308
<b>Total</b>	<b><u>15.906</u></b>	<b><u>15.906</u></b>

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun masing-masing adalah sebesar 0,02% untuk tahun 2017 dan 2016.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## 26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

### b) Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Pinjaman kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) merupakan fasilitas pembiayaan *Mudharabah* yang diperoleh BRISyariah (entitas anak) pada tanggal 14 Desember 2012 untuk modal kerja pembiayaan kredit kepemilikan rumah (KPR). Pembiayaan tersebut berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 14 Desember 2017 dan telah dilunasi pada tanggal jatuh temponya. Porsi *nisbah* yang disepakati adalah masing-masing sebesar 63,46% untuk PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan 36,54% untuk BRISyariah.

### c) Pinjaman Sindikasi *Club Deal*

Pada tanggal 12 September 2014, BRI mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi berupa *Club Deal* dengan jumlah pinjaman sebesar ASD370.000.000 (angka penuh), yang difasilitasi oleh BNP Paribas cabang Singapura (agent) yang terbagi atas:

- a. Fasilitas A sebesar ASD320.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
  - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited sebesar ASD60.000.000,
  - Wells Fargo Bank, National Association sebesar ASD60.000.000,
  - Australia and New Zealand Banking Group Limited sebesar ASD50.000.000,
  - BNP Paribas sebesar ASD50.000.000,
  - DBS Bank Ltd. sebesar ASD50.000.000, dan
  - United Overseas Bank Limited sebesar ASD50.000.000.
- b. Fasilitas B sebesar ASD50.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Fasilitas ini hanya dibiayai oleh Commerzbank Aktiengesellschaft.

Pinjaman sindikasi ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dimulai pada bulan ke-3 (tiga) sejak tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi.

Pinjaman sindikasi ini memiliki jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan telah jatuh tempo pada tanggal 12 September 2017. BRI tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

BRI telah melakukan pembayaran sebagian pinjaman sebesar ASD80.000.000 (angka penuh) dan ASD12.500.000 (angka penuh) masing-masing untuk Fasilitas A dan Fasilitas B pada tanggal 30 September 2015.

BRI telah melunasi sisa pinjaman sebesar ASD240.000.000 (angka penuh) dan ASD37.500.000 (angka penuh) masing-masing untuk Fasilitas A dan Fasilitas B pada tanggal 12 September 2017.

Persyaratan-persyaratan penting (financial covenants) dalam perjanjian pinjaman sindikasi ini antara lain menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 9%,
- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimum 5%.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 BRI telah memenuhi persyaratan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)**

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

d) Pinjaman Sindikasi Club Loan

BRI mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi berupa *Club Loan* dengan total pinjaman sebesar ASD550.000.000 (angka penuh) sesuai *Facility Agreement* tanggal 30 September 2015. Pinjaman ini difasilitasi oleh The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited sebagai *agent* yang terbagi atas:

- a. Fasilitas A sebesar ASD325.000.000 (angka penuh) dengan jangka waktu pinjaman 42 (empat puluh dua) bulan sejak tanggal perjanjian (termasuk *grace period*) dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2019. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
  - Bank of America N.A. sebesar ASD50.000.000,
  - Citibank, N.A., cabang Singapura sebesar ASD30.000.000,
  - Citibank, N.A., cabang Jakarta sebesar ASD20.000.000,
  - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited sebesar ASD50.000.000,
  - Sumitomo Mitsui Banking Corporation sebesar ASD50.000.000,
  - Westpac Banking Corporation sebesar ASD25.000.000,
  - Australia and New Zealand Banking Group Limited sebesar ASD20.000.000,
  - BNP Paribas sebesar ASD20.000.000,
  - CTBC Bank Co., Ltd., sebesar ASD20.000.000,
  - DBS Bank Ltd., sebesar ASD20.000.000,
  - United Overseas Bank Limited sebesar ASD20.000.000.
- b. Fasilitas B sebesar ASD155.000.000 (angka penuh) dengan jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal perjanjian (termasuk *grace period*) dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2019. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
  - Oversea-Chinese Banking Corporation Limited sebesar ASD50.000.000,
  - BNP Paribas sebesar ASD30.000.000,
  - Australia and New Zealand Banking Group Limited sebesar ASD20.000.000,
  - DBS Bank Ltd. sebesar ASD20.000.000,
  - United Overseas Bank Limited sebesar ASD20.000.000,
  - Westpac Banking Corporation sebesar ASD15.000.000.
- c. Fasilitas C sebesar ASD70.000.000 (angka penuh) dengan jangka waktu pinjaman 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal perjanjian (termasuk *grace period*) dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2020. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
  - CTBC Bank Co., Ltd. sebesar ASD30.000.000,
  - Australia and New Zealand Banking Group Limited sebesar ASD10.000.000,
  - DBS Bank Ltd. sebesar ASD10.000.000,
  - United Overseas Bank Limited sebesar ASD10.000.000,
  - Westpac Banking Corporation sebesar ASD10.000.000.

Pinjaman sindikasi ini dipergunakan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang dan *maturity profile*. Pokok pinjaman dibayarkan saat periode pinjaman berakhir, sedangkan bunga sebesar LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah margin tertentu per tahun dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Atas fasilitas pinjaman ini, BRI tidak memberikan jaminan dalam bentuk apapun.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)**

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

d) Pinjaman Sindikasi Club Loan (lanjutan)

Persyaratan-persyaratan penting (financial covenants) dalam perjanjian pinjaman sindikasi ini antara lain menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 9%,
- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimum 5%.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 BRI telah memenuhi persyaratan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini.

e) Pinjaman dari China Development Bank Corporation

Pada tanggal 16 September 2015, BRI menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dari China Development Bank Corporation untuk membiayai proyek infrastruktur dan industri di Indonesia yang bersifat jangka panjang serta transaksi lintas batas antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok.

Pinjaman ini terdiri dari 2 fasilitas yaitu:

- Fasilitas Tranche A senilai ASD700.000.000 (angka penuh) dimana penarikan pinjaman dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2015 dan 6 November 2015 masing-masing sebesar ASD223.953.383 (angka penuh) dan ASD476.046.617 (angka penuh),
- Fasilitas Tranche B senilai RMB1.906.080.000 (ekuivalen ASD300.000.000) (angka penuh) dimana BRI melakukan penarikan pertama tanggal 30 Oktober 2015 sebesar RMB609.818.661 (angka penuh) dan penarikan kedua pada tanggal 6 November 2015 sebesar RMB1.296.261.339 (angka penuh).

Fasilitas jangka panjang ini memiliki tenor 10 (sepuluh) tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 16 September 2025 dengan suku bunga LIBOR 6 (enam) bulanan ditambah *margin* tertentu per tahun untuk fasilitas Tranche A dan sebesar SHIBOR 6 (enam) bulanan ditambah *margin* tertentu per tahun untuk fasilitas Tranche B dimana pembayaran bunga dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

Angsuran pokok dibayarkan setiap 6 (enam) bulan bersamaan dengan pembayaran bunga. Untuk fasilitas Tranche A, jumlah angsuran pokok adalah sebesar ASD46.666.667 (angka penuh) dimulai pada tanggal 16 September 2018 hingga jatuh tempo. Sedangkan untuk fasilitas Tranche B, jumlah angsuran pokok adalah sebesar RMB127.072.000 (angka penuh) dimulai pada tanggal 16 September 2018 hingga jatuh tempo. BRI tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

Persyaratan-persyaratan penting (financial covenants) dalam perjanjian pinjaman sindikasi ini antara lain menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 9%,
- Rasio modal inti (Tier 1) minimum 6%,
- Rasio modal inti utama (Core Tier 1) minimum 5%,
- Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) minimum 6,5%,
- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimum 5%,
- Rasio *Return On Assets* (ROA) minimum 0,6%.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 BRI telah memenuhi persyaratan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)**

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

f) Pinjaman dari BNP Paribas

Pada tanggal 7 Juni 2016, BRI telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dari BNP Paribas dengan skema *Export Credit Financing* (ECA) untuk membiayai komponen dan jasa peluncuran BRIsat yang dilakukan oleh Arianespace Perancis.

Pinjaman ini terdiri dari 2 (dua) fasilitas yaitu:

- Fasilitas Tranche Banque Publique d'Investissement (BPI) senilai ASD49.961.501,23 (angka penuh) dimana penarikan pinjaman dilakukan seluruhnya pada tanggal 31 Agustus 2017,
- Fasilitas Tranche Hermes senilai ASD9.901.308,77 (angka penuh) dimana BRI melakukan penarikan pinjaman seluruhnya pada tanggal 31 Agustus 2017.

Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 3 Februari 2025 dengan suku bunga 2,68% per tahun untuk fasilitas Tranche BPI dan LIBOR 6 (enam) bulanan ditambah *margin* tertentu per tahun untuk fasilitas Tranche Hermes.

Angsuran pokok dibayarkan setiap 6 (enam) bulan bersamaan dengan pembayaran bunga. Untuk fasilitas Tranche BPI, angsuran pokok pertama kali mulai dibayarkan pada tanggal 5 Februari 2018 sebesar ASD3.330.766,75 (angka penuh) sampai dengan jatuh tempo. Sedangkan untuk fasilitas Tranche Hermes, jumlah angsuran pokok adalah sebesar ASD660.087,25 (angka penuh) dimulai sejak tanggal 5 Februari 2018 hingga jatuh tempo. BRI tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

Persyaratan-persyaratan penting (financial covenants) dalam perjanjian pinjaman sindikasi ini antara lain menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 9%,
- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimum 5%.

Pada tanggal 31 Desember 2017 BRI telah memenuhi persyaratan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini.

g) Pinjaman bilateral

Pinjaman dari The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

Pada tanggal 19 Juni 2015, BRI Finance (Entitas Anak) dan The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sebesar ASD1.000.000 (angka penuh) untuk pembiayaan *Cross Currency Swap*. Atas pinjaman ini dikenakan bunga sebesar LIBOR 6 (enam) bulanan ditambah *margin* tertentu per tahun yang dibayarkan setiap 6 (enam) bulan. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 21 Juni 2017.

Pinjaman dari Emirates NBD Bank

Pada tanggal 7 April 2016, BRI (cabang Singapura) dan Emirates NBD Bank menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sebesar ASD10.000.000 (angka penuh) untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BRI cabang Singapura. Atas pinjaman ini dikenakan bunga sebesar LIBOR 1 (satu) bulanan ditambah *margin* tertentu per tahun yang dibayarkan setiap bulan. Pinjaman ini telah jatuh tempo dan telah dilunasi pada tanggal 30 Maret 2017.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)**

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

g) Pinjaman bilateral (lanjutan)

Pinjaman dari Emirates NBD Bank (lanjutan)

Pada tanggal 14 November 2017, BRI (cabang Singapura) dan Emirates NBD Bank menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sebesar ASD50.000.000 (angka penuh) untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BRI cabang Singapura. Atas pinjaman ini dikenakan bunga sebesar LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah *margin* tertentu per tahun yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Agustus 2018.

Pinjaman dari United Overseas Bank

Pada tanggal 12 Desember 2016, BRI (cabang Singapura) dan United Overseas Bank menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sebesar ASD20.000.000 (angka penuh) untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BRI cabang Singapura. Atas pinjaman ini dikenakan bunga sebesar LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah *margin* tertentu per tahun yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pinjaman ini telah jatuh tempo dan telah dilunasi pada tanggal 13 Maret 2017.

h) Pinjaman Lainnya

	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Bank Indonesia		12.628		12.291
<u>Mata uang asing</u>				
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Bank of Montreal	220.000.000	2.984.850	210.000.000	2.829.225
Bank of America N.A.	75.000.000	1.017.562	36.875.880	496.810
Citibank, N.A.	75.000.000	1.017.562	75.000.000	1.010.437
The Bank of New York Mellon	65.000.000	881.888	90.000.000	1.212.525
Standard Chartered Bank	25.000.000	339.188	100.000.000	1.347.250
Wells Fargo Bank, N.A.	25.000.000	339.188		-
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	24.511.666	332.562	76.004.562	1.023.971
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	10.000.000	135.600		-
Commerzbank, A.G.		-	60.000.000	808.350
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, Ltd.		-	50.000.000	673.625
National Bank of Abu Dhabi		-	25.000.000	336.813
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ		-	21.900.810	295.059
BNP Paribas		-	19.982.976	269.221
		7.048.400		10.303.286
<u>Euro Eropa</u>				
CTBC Bank	2.864.858	46.514	3.104.913	44.015
Commerzbank, A.G.	982.320	15.949	2.989.067	42.372
		62.463		86.387
		7.110.863		10.389.673
<b>Total</b>		<b>7.123.491</b>		<b>10.401.964</b>

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)**

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

h) Pinjaman Lainnya (lanjutan)

Fasilitas pinjaman diterima lainnya dalam mata uang asing merupakan pinjaman jangka pendek dari beberapa Bank dengan jangka waktu antara 1 (satu) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR atau EURIBOR ditambah *margin* tertentu, termasuk fasilitas pinjaman *refinancing* yang dijamin dengan *letters of credit* (L/C) yang diterbitkan oleh BRI.

**27. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI**

a) Rincian Estimasi Kerugian atas Transaksi Komitmen dan Kontinjensi yang Mempunyai Risiko Kredit:

<u>Rupiah</u>	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Garansi yang diterbitkan	2.134	895

b) Perubahan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi:

<u>Rupiah</u>	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Saldo awal tahun	895	1.242
Penyisihan (pembalikan) beban estimasi kerugian selama tahun berjalan	1.239	(347)
<b>Saldo akhir</b>	<b>2.134</b>	<b>895</b>

BRI melakukan penilaian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit secara individual dengan menggunakan bukti obyektif, kecuali untuk transaksi komitmen dan kontinjensi milik BRIS (entitas anak) (berdasarkan prinsip syariah) penilaian dilakukan menggunakan panduan kolektibilitas Bank Indonesia.

Jumlah minimum estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia adalah sebesar Rp2.134 dan Rp895 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Manajemen berpendapat bahwa jumlah tersebut telah memadai.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**27. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)**

- c) Kolektibilitas Bank Garansi yang diterbitkan dan L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor pada Rekening Administratif dikategorikan "Lancar" (Catatan 2ao dan 43):

	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Garansi yang diterbitkan		5.622.512		4.342.053
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor		719.945		514.596
		6.342.457		4.856.649
<u>Mata uang asing</u>				
Garansi yang diterbitkan				
Dolar Amerika Serikat	783.830.900	10.634.626	440.361.405	5.932.769
Euro Eropa	15.756.226	255.821	16.835.180	238.652
Dolar Australia		-	676.419	6.577
Riyal Arab Saudi		-	1.000.000	3.592
		10.890.447		6.181.590
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor				
Dolar Amerika Serikat	155.008.887	2.103.083	107.112.073	1.443.067
Euro Eropa	20.769.936	337.225	7.789.354	110.420
Pound Sterling Inggris	511.882	9.381	342.912	5.677
Yen Jepang	57.180.643	6.891	45.373.091	5.221
Dolar Singapura	588.866	5.980	313.839	2.922
Renminbi	2.400.000	5.001	2.646.926	5.133
Franc Swiss	18.380	255		-
		2.467.816		1.572.440
		13.358.263		7.754.030
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Garansi yang diterbitkan		10.411.205		7.637.064
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor		919.438		571.900
		11.330.643		8.208.964
<u>Mata uang asing</u>				
Garansi yang diterbitkan				
Dolar Amerika Serikat	479.169.690	6.501.135	394.079.942	5.309.242
Euro Eropa	32.281.032	524.122	71.004.683	1.006.546
Yen Jepang	324.000.000	39.047	74.828.897	8.610
Ringgit Malaysia	8.500.000	28.493	8.500.000	25.527
Dolar Kanada	1.240.000	13.419	1.240.000	12.383
		7.106.216		6.362.308

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**27. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)**

- c) Kolektibilitas Bank Garansi yang diterbitkan dan L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor pada Rekening Administratif dikategorikan "Lancar" (Catatan 2a0 dan 43) (lanjutan):

	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u> <u>(lanjutan)</u>				
<u>Mata uang asing (lanjutan)</u>				
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor				
Dolar Amerika Serikat	239.833.977	3.253.948	334.073.051	4.500.799
Euro Eropa	89.256.297	1.449.185	63.038.569	893.620
Pound Sterling Inggris	6.038.100	110.652	5.307.740	87.870
Yen Jepang	374.485.163	45.131	3.406.896.610	392.015
Dolar Australia	1.199.000	12.702		-
Dolar Singapura	182.613	1.854	266.951	2.486
Renminbi		-	2.798.000	5.426
		4.873.472		5.882.216
		11.979.688		12.244.524
<b>Total</b>		<b>43.011.051</b>		<b>33.064.167</b>

**28. LIABILITAS IMBALAN KERJA**

Liabilitas imbalan kerja terdiri atas:

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Bonus dan Insentif	7.962.072	5.889.022
Cadangan cuti besar (Catatan 42e)	1.560.648	1.349.754
Program pemutusan hubungan kerja (Catatan 42d)	1.335.477	1.261.219
Cadangan penghargaan tanda jasa (Catatan 42e)	1.072.802	951.208
Cadangan program kesehatan pasca kerja BPJS (Catatan 42e)	243.259	-
<b>Total</b>	<b>12.174.258</b>	<b>9.451.203</b>

**29. LIABILITAS LAIN-LAIN**

Liabilitas lain-lain terdiri atas:

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
Liabilitas manfaat polis masa depan	4.823.808	3.764.582
Utang bunga	1.311.391	1.025.594
Dana subsidi kemenpupera	1.291.497	692.560
Cadangan kewajiban litigasi (Catatan 45b)	971.354	613.720



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**29. LIABILITAS LAIN-LAIN (lanjutan)**

Liabilitas lain-lain terdiri atas (lanjutan):

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>		
<u>Rupiah (lanjutan)</u>		
Liabilitas kontrak investasi	699.564	401.903
Cadangan pembayaran bunga tepat waktu (Catatan 2z)	669.194	758.697
Jasa <i>outsourcing</i>	600.851	200.851
Liabilitas kartu kredit	151.406	88.063
Premi yang belum merupakan pendapatan	136.658	98.374
Estimasi liabilitas klaim	91.697	91.135
Pendapatan diterima di muka	64.590	92.768
Dana syirkah temporer	63.967	52.550
Bagi hasil yang masih harus dibayar	35.683	34.991
Cadangan pajak hadiah simpedes	24.222	21.756
Utang reasuransi	20.481	9.761
Setoran jaminan	18.476	14.343
Lain-lain	1.358.391	1.624.395
	<u>12.333.230</u>	<u>9.586.043</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Utang bunga	327.659	249.908
Pendapatan diterima di muka	164.541	148.591
Lain-lain	460.226	126.911
	<u>952.426</u>	<u>525.410</u>
<b>Total</b>	<b><u>13.285.656</u></b>	<b><u>10.111.453</u></b>

**30. PINJAMAN DAN SURAT BERTARGA SUBORDINASI**

BRI memperoleh pinjaman dan surat berharga subordinasi dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<u>Rupiah</u>		
Sukuk <i>Mudharabah</i> Subordinasi I	972.065	973.039
Pinjaman <i>two-step loan</i>	14.385	35.471
	<b><u>986.450</u></b>	<b><u>1.008.510</u></b>

a. Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I

Pada tanggal 17 November 2016, BRISyariah menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2016 sebesar Rp1.000.000 dengan pendapatan bagi hasil, dan diterbitkan senilai 100,00% dari nilai nominalnya. Besarnya nisbah pemegang sukuk adalah sebesar 80,2013% yang dihitung dari *gross revenue* tunai, yang diindikasikan sebesar 11,8452%. Bagi hasil dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 November 2023. Pada saat diterbitkan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I ini diperingkat oleh Fitch dengan peringkat A+(Idn).

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**30. PINJAMAN DAN SURAT BERHARGA SUBORDINASI (lanjutan)**

a. Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I (lanjutan)

Penerimaan dari penerbitan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I tersebut, akan dimanfaatkan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka menunjang kegiatan pengembangan usaha berupa penyaluran pembiayaan.

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I ini tidak dijamin dengan agunan khusus, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau lembaga penjaminan lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Sukuk *Mudharabah* Subordinasi memperoleh peringkat A+(Idn) dari Fitch.

Bertindak sebagai wali amanat untuk Sukuk *Mudharabah* Subordinasi tersebut adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Pembatasan dan kewajiban BRISyariah tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Pengeluaran Sukuk atau MTN yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, dan pembayarannya didahulukan dari Sukuk *Mudharabah* Subordinasi.
- Perubahan bidang usaha utama.
- Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.
- Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya BRISyariah, atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha.
- Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap milik BRISyariah kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar (melebihi 50%) dari seluruh aset tetap milik BRISyariah berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit.
- Melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi, kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan BRISyariah atau setidaknya tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh BRISyariah dari pihak ketiga yang bukan terafiliasinya dalam transaksi yang lazim.
- Memberikan pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.

b. Pinjaman *two-step loan*

Pinjaman *two-step loan* dalam mata uang Rupiah merupakan pinjaman dari Pemerintah yang dananya berasal dari Asian Development Bank (ADB), International Fund for Agricultural Development (IFAD) dan United States Agency for International Development (USAID). Tingkat bunga pinjaman ini bervariasi sesuai dengan masing-masing perjanjian dengan jangka waktu antara 15 (lima belas) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk pinjaman dan surat berharga subordinasi adalah sebesar 4,06% dan 4,27%, untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Pinjaman-pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2027.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**30. PINJAMAN DAN SURAT BERHARGA SUBORDINASI (lanjutan)**

Klasifikasi jangka waktu pinjaman dan surat berharga subordinasi berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<u>Rupiah</u>		
> 3 bulan - 1 tahun	10.312	-
> 1 tahun - 5 tahun	-	30.935
> 5 tahun	976.138	977.575
<b>Total</b>	<b>986.450</b>	<b>1.008.510</b>

**31. EKUITAS**

a. Modal Saham

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh BRI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2017				
	Total Lembar Saham	Nilai Nominal Per Lembar Saham (Rupiah Penuh)	Total Nilai Saham (Rupiah Penuh)	Persentase Kepemilikan Saham
<b>Modal Dasar</b>				
Saham Seri A Dwiwarna	1	50	50	0,00%
Saham Biasa Atas Nama Seri B	299.999.999.999	50	14.999.999.999.950	100,00
<b>Total</b>	<b>300.000.000.000</b>		<b>15.000.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>				
Saham Seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia	1	50	50	0,00%
Saham Biasa Atas Nama Seri B Negara Republik Indonesia	69.999.999.999	50	3.499.999.999.950	56,75
Direksi:				
- Susy Liestiowaty	2.900.000	50	145.000.000	0,00
- Sis Apik Wijayanto	700.000	50	35.000.000	0,00
- Mohammad Irfan	170.000	50	8.500.000	0,00
- Donsuwan Simatupang	142.500	50	7.125.000	0,00
- R. Sophia Alizsa	25.000	50	1.250.000	0,00
Masyarakat	52.233.282.500	50	2.611.664.125.000	42,35
	<b>122.237.220.000</b>		<b>6.111.861.000.000</b>	
Saham treasuri (Catatan 1d)	1.108.590.000		55.429.500.000	0,90
<b>Total</b>	<b>123.345.810.000</b>		<b>6.167.290.500.000</b>	<b>100,00%</b>
31 Desember 2016				
	Total Lembar Saham	Nilai Nominal Per Lembar Saham (Rupiah Penuh)	Total Nilai Saham (Rupiah Penuh)	Persentase Kepemilikan Saham
<b>Modal Dasar</b>				
Saham Seri A Dwiwarna	1	250	250	0,00%
Saham Biasa Atas Nama Seri B	59.999.999.999	250	14.999.999.999.750	100,00
<b>Total</b>	<b>60.000.000.000</b>		<b>15.000.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**31. EKUITAS (lanjutan)**

a. Modal Saham (lanjutan)

31 Desember 2016				
	Total Lembar Saham	Nilai Nominal Per Lembar Saham (Rupiah Penuh)	Total Nilai Saham (Rupiah Penuh)	Persentase Kepemilikan Saham
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>				
Saham Seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia	1	250	250	0,00%
Saham Biasa Atas Nama Seri B Negara Republik Indonesia	13.999.999.999	250	3.499.999.999.750	56,75
Direksi:				
- Randi Anto	661.000	250	165.250.000	0,00
- Susy Liestiowaty	580.000	250	145.000.000	0,00
- Sis Apik Wijayanto	140.000	250	35.000.000	0,00
- Mohammad Irfan	34.000	250	8.500.000	0,00
- Donsuwan Simatupang	28.500	250	7.125.000	0,00
Masyarakat	10.446.000.500	250	2.611.500.125.000	42,35
	<b>24.447.444.000</b>		<b>6.111.861.000.000</b>	
Saham treasuri (Catatan 1d)	221.718.000		55.429.500.000	0,90
<b>Total</b>	<b>24.669.162.000</b>		<b>6.167.290.500.000</b>	<b>100,00%</b>

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan hak-hak preferen kepada pemegangnya untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi, perubahan anggaran dasar, menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan BRI, pengajuan permohonan agar BRI dinyatakan pailit dan pembubaran BRI.

Saham Seri B adalah saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh masyarakat.

b. Tambahan Modal Disetor

Rincian tambahan modal disetor per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tambahan modal Pemerintah sehubungan dengan program rekapitalisasi	1.092.144
Sisa setoran modal Pemerintah sebelumnya	5
Agio saham dari IPO	589.762
Eksekusi atas opsi saham	
Tahun 2004	49.514
Tahun 2005	184.859
Tahun 2006	619.376
Tahun 2007	140.960
Tahun 2008	29.013
Tahun 2009	14.367
Tahun 2010	43.062
Opsi saham MSOP tahap pertama yang telah jatuh tempo	504
Opsi saham MSOP tahap kedua yang telah jatuh tempo	1.845
Opsi saham MSOP tahap ketiga yang telah jatuh tempo	8.447
<b>Total</b>	<b>2.773.858</b>

Sebagai realisasi dari Program Rekapitalisasi Bank Umum sesuai Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 tentang "Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Bank Pemerintah", Pemerintah telah menetapkan bahwa jumlah kebutuhan rekapitalisasi BRI untuk mencapai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 4% adalah sebesar Rp29.063.531.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**31. EKUITAS (lanjutan)**

b. Tambahan Modal Disetor (lanjutan)

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2003, modal dasar dan ditempatkan BRI belum ditingkatkan dengan tambahan modal dari program rekapitalisasi tersebut, sehingga setoran modal Pemerintah sebesar Rp29.063.531 dicatat sementara pada akun "Tambahan Modal Disetor" bersama-sama dengan sisa setoran modal Pemerintah sebelumnya sebesar Rp5.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 427/KMK.02/2003 tanggal 30 September 2003, jumlah final kebutuhan rekapitalisasi BRI sebesar Rp29.063.531, dikonversi menjadi modal disetor sebesar Rp3.272.000 dan sisanya sebesar Rp25.791.531 dibukukan sebagai agio saham. Selanjutnya, dengan dilaksanakannya kuasi-reorganisasi oleh BRI, saldo rugi sebelum kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2003 sebesar Rp24.699.387 dieliminasi ke agio saham, sehingga menghasilkan saldo agio saham sebesar Rp1.092.149 pada tanggal 30 Juni 2003.

Pada tanggal 10 November 2003, BRI telah melakukan IPO dengan mengeluarkan 1.764.705.000 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B baru dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham dengan harga penawaran Rp875 (Rupiah penuh) per saham sehingga menghasilkan tambahan agio saham sebagai berikut:

Jumlah Saham Biasa Atas Nama Seri B baru yang dikeluarkan untuk masyarakat dalam rangka IPO (lembar saham) (Catatan 1c)	1.764.705.000
Agio saham per saham (Rupiah penuh)	375
Total agio saham - sebelum diskon	661.764
Dikurangi	
- 3% diskon yang diberikan kepada nasabah BRI	(2.961)
- Biaya IPO	(69.041)
<b>Agio saham dari IPO</b>	<b>589.762</b>

Sesuai dengan RUPS Luar Biasa pada tanggal 3 Oktober 2003, seperti yang telah diungkapkan dalam Akta No. 6 Notaris Imas Fatimah, S.H., pemegang saham menyetujui penerbitan saham opsi yang akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap. Opsi saham diberikan kepada Direksi dan pekerja pada posisi dan jabatan tertentu yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan (Management Stock Option Plan (MSOP)).

Biaya kompensasi atas MSOP diakui sebagai opsi saham, bagian dari ekuitas.

Pegawai BRI telah melakukan eksekusi atas opsi saham untuk MSOP I mulai tanggal 10 November 2004, MSOP II mulai tanggal 10 November 2005 dan MSOP III mulai tanggal 15 November 2006. Selama periode 2004 sampai dengan tahun 2010 telah dilakukan eksekusi atas opsi saham sebanyak 569.876.000 lembar saham untuk MSOP I, II dan III, dimana untuk tahun 2010 sebanyak 4.728.500 lembar saham, tahun 2009 sebanyak 4.553.000 lembar saham, tahun 2008 sebanyak 7.499.000 lembar saham, tahun 2007 sebanyak 31.379.000 lembar saham, tahun 2006 sebanyak 250.721.000 lembar saham, tahun 2005 sebanyak 185.610.000 lembar saham dan tahun 2004 sebanyak 85.385.500 lembar saham. Agio yang timbul dari eksekusi tersebut untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp43.062, tahun 2009 adalah sebesar Rp14.367, tahun 2008 sebesar Rp29.013, tahun 2007 sebesar Rp140.960, tahun 2006 sebesar Rp619.376, tahun 2005 sebesar Rp184.859 dan tahun 2004 sebesar Rp49.514.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**31. EKUITAS (lanjutan)**

c. Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Akun ini merupakan selisih kurs yang timbul karena penjabaran laporan keuangan BRI Kantor Cabang/Perwakilan luar negeri (Cayman Islands, New York, Hong Kong, Singapura dan Timor Leste) dan entitas anak dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Dolar Hong Kong dan Dolar Singapura ke dalam mata uang Rupiah (Catatan 2aj). Aset dan liabilitas serta komitmen dan kontinjensi dalam mata uang asing lainnya dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut merupakan penjumlahan dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian setiap bulan yang telah dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah rata-rata pada bulan yang bersangkutan.

d. Pembagian Laba

Dalam RUPS Tahunan BRI tanggal 15 Maret 2017 dan 23 Maret 2016, pemegang saham menyetujui pembagian dividen dari laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dengan penggunaan sebagai berikut:

	<b>Laba tahun berjalan 2016</b>	<b>Laba tahun berjalan 2015</b>
Dividen	10.478.309	7.619.322

e. Reklasifikasi Saldo Laba - Telah Ditentukan Penggunaannya

Dalam rangka menjaga struktur permodalannya, BRI telah melakukan reklasifikasi saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya (cadangan tujuan) ke saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp15.093.056. Hal ini dilakukan sehubungan dengan penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.34/POJK.03/2016 pada tanggal 26 September 2016 tentang "Perubahan atas POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum".

**32. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH**

Pendapatan bunga diperoleh dari:

	<b>Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<u>Rupiah</u>		
Kredit yang diberikan		
Mikro	42.392.633	40.946.075
Ritel	34.069.909	29.804.038
Korporasi	9.134.968	8.428.432
Efek-efek		
Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi		
Obligasi Pemerintah	60.522	18.472
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	51.664	58.206
Sertifikat Bank Indonesia	2.967	12.635
Obligasi	1.309	11.983



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**32. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH (lanjutan)**

Pendapatan bunga diperoleh dari (lanjutan):

	<b>Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<u>Rupiah (lanjutan)</u>		
<u>Efek-efek (lanjutan)</u>		
Tersedia untuk Dijual		
Obligasi Pemerintah	2.613.410	2.153.086
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	1.025.495	384.725
Obligasi	492.943	134.390
Sertifikat Bank Indonesia	219.361	424.375
<i>Medium-Term Notes</i>	18.648	26.617
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	16.726	-
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo		
Obligasi Pemerintah	2.506.018	2.558.389
Obligasi	282.125	235.228
<i>Negotiable Certificate Deposit</i>	89.962	34.660
<i>Medium-Term Notes</i>	23.959	18.008
Sertifikat Bank Indonesia	9.350	87.678
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	-	11.425
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah		
Dimiliki hingga Jatuh Tempo	65.394	173.129
Tersedia untuk Dijual	12.626	28.112
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
<i>Deposit Facility/Term Deposit</i>	643.369	460.282
<i>Inter-bank call money</i>	159.434	155.010
Lain-lain	37.231	183.915
Giro pada Bank Indonesia	158.770	158.570
Lain-lain	1.214.469	893.919
	95.303.262	87.401.359
<u>Mata uang asing</u>		
Kredit yang diberikan		
Korporasi	2.246.515	1.347.607
Ritel	264.091	531.801
Efek-efek		
Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi		
Obligasi Pemerintah	32.300	724
Sertifikat Bank Indonesia	205	-
Tersedia untuk Dijual		
Obligasi Pemerintah	693.803	629.431
Sertifikat Bank Indonesia	72.824	40.105
Obligasi	29.677	26.162
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo		
Obligasi Pemerintah	674.298	647.443
Obligasi	38.129	23.347
Sertifikat Bank Indonesia	11.517	7.992
Wesel Tagih	1.374	57.082
<i>Credit Link Notes</i>	-	7.628

Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**32. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH (lanjutan)**

Pendapatan bunga diperoleh dari (lanjutan):

	<b>Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
<i>Deposit Facility/Term Deposit</i>	158.401	62.019
<i>Inter-bank call money</i>	68.768	45.424
Lain-lain	77.659	75.637
Lain-lain	407.427	454.577
	<u>4.776.988</u>	<u>3.956.979</u>
	<u>100.080.250</u>	<u>91.358.338</u>
Pendapatan syariah diperoleh dari:		
<i>Murabahah</i>	1.507.098	1.533.339
<i>Musarakah</i>	528.286	526.506
Lain-lain	783.658	576.832
Total Pendapatan Syariah	<u>2.819.042</u>	<u>2.636.677</u>
<b>Total</b>	<b><u>102.899.292</u></b>	<b><u>93.995.015</u></b>

**33. BEBAN BUNGA DAN SYARIAH**

Akuni ini merupakan beban bunga atas:

	<b>Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<u>Rupiah</u>		
Deposito berjangka	15.394.210	16.429.029
Tabungan	2.700.285	2.880.441
Giro	2.021.036	1.572.976
Surat berharga yang diterbitkan	1.989.118	1.015.247
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	509.300	356.224
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	400.517	496.936
Lain-lain	2.857.395	2.452.235
	<u>25.871.861</u>	<u>25.203.088</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Pinjaman yang diterima	1.050.731	1.091.202
Deposito berjangka	1.035.328	685.944
Surat berharga yang diterbitkan	237.413	114.238
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	176.402	141.315
Giro	80.974	88.276
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	24.685	22.006
Tabungan	3.166	5.717
Lain-lain	171.654	189.428
	<u>2.780.353</u>	<u>2.338.126</u>
	<u>28.652.214</u>	<u>27.541.214</u>



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**33. BEBAN BUNGA DAN SYARIAH (lanjutan)**

Akun ini merupakan beban bunga atas (lanjutan):

	<b>Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Beban syariah terdiri atas:		
Deposito <i>mudharabah</i>	1.077.056	990.710
Lain-lain	164.535	44.792
Total Beban Syariah	1.241.591	1.035.502
<b>Total</b>	<b>29.893.805</b>	<b>28.576.716</b>

**34. BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ATAS ASET KEUANGAN - NETO**

Akun ini merupakan beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan sebagai berikut:

	<b>Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Kredit yang diberikan (Catatan 12f)	16.800.820	13.454.979
Piutang dan pembiayaan syariah (Catatan 13)	202.008	244.267
Piutang sewa pembiayaan (Catatan 14)	(8.713)	995
<b>Total</b>	<b>16.994.115</b>	<b>13.700.241</b>

**35. BEBAN TENAGA KERJA DAN TUNJANGAN**

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	<b>Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Gaji, upah dan tunjangan	10.376.601	9.195.127
Bonus, insentif dan <i>tantiem</i>	6.441.267	5.904.569
Iuran Jamsostek	623.454	525.477
Pendidikan dan pelatihan	557.236	593.654
Tunjangan kesehatan	397.363	368.137
Pemutusan hubungan kerja (Catatan 42d)	335.941	181.458
Cuti besar (Catatan 42e)	306.297	316.665
Pensiun iuran pasti (Catatan 42c)	257.441	231.801
Pensiun imbalan pasti (Catatan 42a)	246.012	513.384
Program kesehatan pasca kerja BPJS (Catatan 42e)	243.259	-
Penghargaan tanda jasa (Catatan 42e)	156.639	152.480
Lain-lain	410.494	502.262
<b>Total</b>	<b>20.352.004</b>	<b>18.485.014</b>

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**35. BEBAN TENAGA KERJA DAN TUNJANGAN (lanjutan)**

Jumlah gaji dan tunjangan untuk Direksi adalah sebesar Rp81.073 dan Rp65.526, dan Dewan Komisaris adalah sebesar Rp28.919 dan Rp26.702 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (Catatan 44). Jumlah bonus, insentif dan *tantiem* Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan kunci yang dibayarkan adalah masing-masing sebesar Rp433.539 dan Rp396.453 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (Catatan 44).

**36. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	<b>Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Jasa <i>outsourcing</i>	3.247.488	2.918.089
Penyusutan aset tetap (Catatan 17)	1.579.405	1.224.809
Sewa	1.577.521	1.758.312
Perbaikan dan pemeliharaan	1.174.499	961.923
Listrik dan air	600.867	577.645
Transportasi	829.900	459.785
Percetakan dan benda pos	379.085	306.174
Peralatan kantor	302.473	298.711
Komunikasi	172.214	180.413
Jasa profesional	161.233	133.901
Instalasi komputer	52.461	45.602
Penelitian dan pengembangan produk	20.600	21.367
Lain-lain	3.049.198	3.089.014
<b>Total</b>	<b>13.146.944</b>	<b>11.975.745</b>

**37. PENDAPATAN NON OPERASIONAL - NETO**

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	<b>Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Laba penjualan aset tetap	13.419	7.934
Pendapatan sewa	9.502	9.833
Distribusi kas hasil likuidasi BRI Finance Limited, Hong Kong	-	1.656
Lain-lain - neto	193.402	(10.195)
<b>Total</b>	<b>216.323</b>	<b>9.228</b>



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**38. PERPAJAKAN**

a) Utang Pajak

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
<u>BRI (Entitas Induk)</u>		
Pajak penghasilan		
Pasal 29	470.272	881.207
	<u>470.272</u>	<u>881.207</u>
<u>Entitas Anak</u>		
Pajak penghasilan dan pajak lainnya		
Pasal 21	12.314	10.230
Pasal 22	51	116
Pasal 23	680	1.145
Pasal 25	677	6.162
Pasal 26	-	157
Pasal 29	50.485	15.790
Pasal 4 ayat 2	27.317	23.604
Pajak Pertambahan Nilai	3.002	3.990
	<u>94.526</u>	<u>61.194</u>
<b>Total</b>	<b><u>564.798</u></b>	<b><u>942.401</u></b>

b) Beban Pajak

	<b>Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<u>Entitas Induk</u>		
Beban pajak kini dari:		
Tahun berjalan	8.983.257	8.165.498
Periode lalu dari hasil pemeriksaan pajak	81.393	466.188
Manfaat beban pajak penghasilan tangguhan	(1.183.155)	(943.499)
	<u>7.881.495</u>	<u>7.688.187</u>
<u>Entitas Anak</u>		
Beban pajak kini dari:		
Tahun berjalan	198.254	128.975
Periode lalu dari hasil pemeriksaan pajak	5.091	-
Manfaat beban pajak penghasilan tangguhan	(107.017)	(71.383)
	<u>96.328</u>	<u>57.592</u>
<b>Total</b>	<b><u>7.977.823</u></b>	<b><u>7.745.779</u></b>

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**38. PERPAJAKAN (lanjutan)**

b) Beban Pajak (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

	<b>Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Laba sebelum beban pajak sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Bagian laba Entitas Anak	37.022.157 (671.427)	33.973.770 (532.127)
Laba sebelum beban pajak BRI (Entitas Induk)	36.350.730	33.441.643
Perbedaan Temporer:		
Cadangan kerugian kredit yang diberikan	4.262.620	3.154.390
Pembentukan penyisihan beban pegawai	535.764	651.210
Kerugian yang belum direalisasi dari nilai efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	(3.217)	(6.879)
Penyusutan aset tetap	(62.549)	(24.727)
	4.732.618	3.773.994
Perbedaan Permanen:		
Humas	233.789	298.147
Representasi dan sumbangan	177.116	159.361
Pembinaan jasmani dan rohani	48.825	46.622
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan tarif final	(6.316)	(7.302)
Bagian laba Entitas Asosiasi	(56)	(18.564)
Lain-lain	3.379.578	3.133.588
	3.832.936	3.611.852
<b>Taksiran penghasilan kena pajak</b>	<b>44.916.284</b>	<b>40.827.489</b>
<u>Entitas Induk</u>		
Beban pajak-kini	(8.983.257)	(8.165.498)
Pembayaran angsuran pajak penghasilan selama tahun berjalan	8.487.061	7.263.072
Kredit pajak luar negeri	25.924	21.219
Utang pajak penghasilan - Pasal 29	(470.272)	(881.207)
Pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 tahun 2017 untuk tahun 2018 (Catatan 18)	927.453	-
<u>Entitas Anak</u>		
Beban pajak-kini	(198.254)	(124.362)
Pembayaran angsuran pajak penghasilan selama tahun berjalan	173.283	171.742
(Utang)/Tagihan pajak penghasilan - Pasal 29 <sup>1)</sup>	(24.971)	47.380

<sup>1)</sup> Pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk tagihan pajak penghasilan sebesar Rp25.514, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk utang pajak sebesar Rp15.790.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**38. PERPAJAKAN (lanjutan)**

b) Beban Pajak (lanjutan)

Berdasarkan surat kepala KPP No. PBK-00005/I/WPJ.19/KP.0403/2018, No.PBK-00006/I/WPJ.19/KP.0403/2018, PBK-00004/I/WPJ.19/KP.0403/2018 masing-masing pada tanggal 5 Januari 2018, atas permohonan BRI, telah disetujui pemindahbukuan angsuran PPh pasal 25 masa Januari 2017 dan Februari 2017 sebesar Rp618.302 ke masa Januari 2018 dan pemindahbukuan angsuran PPh Pasal 25 masa Maret 2017 sebesar Rp309.151 ke masa Februari 2018.

Rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan dengan perkalian laba sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	<b>Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Laba sebelum beban pajak sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	37.022.157	33.973.770
Bagian laba entitas anak	(671.427)	(532.127)
Laba sebelum beban pajak BRI (Entitas Induk)	36.350.730	33.441.643
Beban pajak dengan tarif pajak 20%	7.270.146	6.688.329
Pengaruh pajak atas beda tetap	766.587	722.370
Pengaruh perbedaan penggunaan tarif dalam perhitungan pajak tangguhan	(236.631)	(188.700)
Koreksi hasil pemeriksaan pajak penghasilan tahun sebelumnya	81.393	466.188
Beban pajak - Entitas Induk	7.881.495	7.688.187
Beban pajak - Entitas Anak	96.328	57.592
	<b>7.977.823</b>	<b>7.745.779</b>

Taksiran penghasilan kena pajak tahun 2016 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan BRI kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sampai dengan tanggal 24 Januari 2018, BRI belum melaporkan SPT tahun 2017 kepada KPP. Namun dasar pelaporan SPT PPh Badan Tahun 2017 akan sesuai dengan taksiran penghasilan kena pajak tersebut diatas.

**Pajak atas Penilaian Kembali Aset Tetap**

BRI melalui surat No.830-DIR/AMK/11/2015 tanggal 30 November 2015 mengajukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP WP Besar "Permohonan penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan yang diajukan tahun 2015 oleh wajib pajak yang belum melakukan penilaian kembali aset tetap".

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.191/PMK.010/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang telah diubah dengan PMK No.233/PMK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015, permohonan yang diajukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, akan mendapatkan perlakuan khusus berupa penurunan tarif pajak penghasilan yang bersifat final menjadi sebesar 3%. Sehubungan dengan hal tersebut BRI melakukan estimasi atas nilai wajar aset tetap berupa tanah dan bangunan, dan kemudian atas kenaikan nilai wajar dibanding dengan nilai buku aset tetap yang ada, dilakukan pembayaran pajak sebesar Rp245.357 pada tanggal 2 Desember 2015, karena belum mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**38. PERPAJAKAN (lanjutan)**

b) Beban Pajak (lanjutan)

**Pajak atas Penilaian Kembali Aset Tetap (lanjutan)**

Pada tanggal 1 April 2016, BRI melakukan penilaian kembali (revaluasi) atas aset tetap tanah dimana terdapat kenaikan nilai tercatat sebesar Rp14.315.527 dan dikenakan pajak final sebesar Rp490.835. Hal ini telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-479/WPJ.19/2016 tanggal 29 Juli 2016.

**Pemeriksaan tahun pajak 2011**

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00025/207/11/093/16 tanggal 2 Juni 2016, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebesar Rp3.284 serta dendanya sebesar Rp443 dan telah ditagih dengan Surat Tagihan Pajak No. 00025/107/11/093/16 tanggal 2 Juni 2016 yang telah disetujui oleh BRI.

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00003/201/11/093/16 tanggal 30 Mei 2016, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp49.656 dan telah disetujui oleh BRI.

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00005/203/11/093/16 tanggal 1 Juni 2016, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp8.015 dan telah disetujui oleh BRI.

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00005/206/11/093/16 tanggal 30 Mei 2016, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan sebesar Rp466.188 dan telah disetujui oleh BRI.

**Surat Tagihan Pajak Penghasilan tahun pajak 2014**

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Tagihan Pajak No. 90002/106/14/093/15 tanggal 29 Desember 2015, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan untuk tahun pajak 2014 sebesar Rp1.603.100, serta sanksi administrasi sebesar Rp256.496, sehubungan dengan koreksi atas saldo Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) minimum Bank Indonesia.

Manajemen berpendapat bahwa atas Surat Tagihan Pajak tersebut tidak tepat dan perlakuannya di BRI sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tanggal 13 Januari 2016, BRI mengajukan permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak tersebut. Untuk memenuhi syarat pengajuan pembatalan Surat Tagihan Pajak tersebut, pada tanggal 30 Desember 2015 BRI telah membayar deposit sebesar Rp1.603.100 dan dicatat dalam akun aset lain-lain - uang muka pajak (Catatan 18).

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-90001/NKEB/WPJ.19/2016 tanggal 1 Februari 2016 "Tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak", seluruh permohonan BRI dikabulkan seluruhnya.

Pada tanggal 4 Februari 2016, BRI mengajukan permohonan agar pembatalan Surat Tagihan Pajak sebesar Rp1.603.100 dapat dikompensasikan ke angsuran PPh Pasal 25 masa pajak Januari dan Februari 2016 masing-masing sebesar Rp800.000 dan Rp803.100.

Berdasarkan Surat Keputusan Pengembalian Pajak No. KEP-00019.PPH/WPJ.19/KP.0403/2016 tanggal 15 Februari 2016 dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak No. 80095/093-0095-2016 tanggal 15 Februari 2016 Direktorat Jenderal Pajak menyetujui permohonan kompensasi yang diajukan BRI.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**38. PERPAJAKAN (lanjutan)**

b) Beban Pajak (lanjutan)

**Pemeriksaan tahun pajak 2014**

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan No. 00009/206/14/093/17 tanggal 19 Desember 2017, menetapkan kekurangan pembayaran sebesar Rp54.995 serta sanksi administrasinya sebesar Rp26.398 dan telah disetujui oleh BRI.

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00009/201/14/093/17 tanggal 19 Desember 2017, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp32.159 serta sanksi administrasinya sebesar Rp15.436 dan telah disetujui oleh BRI.

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00011/203/14/093/17 tanggal 19 Desember 2017, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp10.313 serta sanksi administrasi sebesar Rp4.950 dan telah disetujui oleh BRI.

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00002/204/14/093/17 tanggal 19 Desember 2017, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp2.839 serta sanksi administrasinya sebesar Rp1.363 dan telah disetujui oleh BRI.

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00081/207/14/093/17 tanggal 19 Desember 2017, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebesar Rp109 serta sanksi administrasi sebesar Rp52 dan telah disetujui oleh BRI.

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Tagihan Pajak No. 00077/107/14/093/17 tanggal 19 Desember 2017, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa sebesar Rp21 dan telah disetujui oleh BRI.

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00020/277/14/093/17 tanggal 19 Desember 2017, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp448 serta sanksi administrasinya sebesar Rp215 dan telah disetujui oleh BRI.

c) Aset Pajak Tangguhan

Perhitungan (beban) manfaat pajak tangguhan BRI adalah sebagai berikut:

	<b>Tahun yang Berakhir pada</b>	
	<b>tanggal 31 Desember</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Entitas Induk</b>		
Pembalikan cadangan kerugian aktiva produktif	1.065.655	788.598
Pembalikan penyisihan beban pegawai	133.941	162.803
Keuntungan yang belum direalisasi dari nilai efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	(804)	(1.720)
Penyusutan aset tetap	(15.637)	(6.182)
	1.183.155	943.499
Entitas Anak	107.017	71.383
<b>Total</b>	<b>1.290.172</b>	<b>1.014.882</b>

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**38. PERPAJAKAN (lanjutan)**

c) Aset Pajak Tangguhan (lanjutan)

Pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak (dicatat pada akun "Aset Pajak Tangguhan") adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
<u>Entitas Induk</u>		
Cadangan kerugian aset produktif	2.682.442	1.616.787
Penyisihan beban pegawai	1.243.798	1.109.857
Penyusutan aset tetap	(160.908)	(145.271)
Pengukuran kembali program imbalan pasti	(235.040)	(218.213)
Keuntungan yang belum direalisasi dari nilai efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	(804)	-
Kerugian yang belum direalisasi dari efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual	(540.422)	(34.630)
	<u>2.989.066</u>	<u>2.328.530</u>
Entitas Anak	281.165	192.400
<b>Total</b>	<b><u>3.270.231</u></b>	<b><u>2.520.930</u></b>

Berdasarkan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" yang telah diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tarif Pajak Penghasilan Badan adalah sebesar 25%.

Namun demikian, berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tanggal 23 September 2008 tersebut, Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka" dan Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.03/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang "Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka" mengatur bahwa Perseroan Terbuka dalam negeri di Indonesia dapat memperoleh fasilitas penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan yang ada, dengan memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu Perseroan Terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak dan masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas harus dipenuhi oleh Perseroan Terbuka dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

### 38. PERPAJAKAN (lanjutan)

Berdasarkan surat keterangan No. DE//2018-0155 tanggal 5 Januari 2018 dan laporan bulanan kepemilikan saham (Formulir No. X.H.I-2 tanggal 5 Januari 2018 dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham BRI selama tahun 2017) semua kriteria di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan BRI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah terpenuhi.

Berdasarkan surat keterangan No.DE//17-0128 tanggal 5 Januari 2017 dan laporan bulanan kepemilikan saham (Formulir No.X.H.I-2 tanggal 5 Januari 2017 dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham BRI selama tahun 2016) semua kriteria di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan BRI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah terpenuhi.

### 39. MANAJEMEN RISIKO

Kegiatan usaha BRI senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan yang pesat pada lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan risiko kegiatan usaha bank semakin kompleks. Oleh karena itu, agar mampu beradaptasi dalam lingkungan bisnis, BRI dituntut untuk mengelola risiko secara terpadu dan sistematis, yakni pengelolaan terhadap risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pasar, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko hukum.

Prinsip-prinsip pengelolaan risiko terpadu dan sistematis oleh BRI dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, antara lain Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR). KUMR sebagai aturan tertinggi dalam implementasi manajemen risiko pada seluruh kegiatan bisnis BRI, dimulai dari kebijakan umum, strategi, organisasi, sistem informasi manajemen risiko, proses dan penerapan manajemen risiko, sampai dengan sistem pengendalian intern. Pelaksanaan penerapan manajemen risiko diatur dalam kebijakan-kebijakan turunan sesuai dengan jenis risikonya.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di BRI dan memegang peranan penting dalam mendukung dan mengawasi keberhasilan penerapannya di seluruh unit kerja.

Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko BRI secara efektif. Dalam melakukan pengawasan aktif terhadap manajemen risiko BRI, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pengawasan Manajemen Risiko (KPMR).

Direksi menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko secara komprehensif beserta implementasinya. Selain itu Direksi memastikan seluruh risiko yang material dan dampaknya telah ditindaklanjuti, serta memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha BRI. Direksi menunjuk Direktur khusus, dalam hal ini Direktur Manajemen Risiko, untuk menjalankan proses pengawasan dan pengendalian risiko secara *bankwide*.

Direksi BRI dibantu oleh *Risk Management Committee* (RMC) individual dan RMC terintegrasi (konsolidasi dengan perusahaan anak) sebagai komite dalam sistem manajemen risiko BRI yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam merumuskan kebijakan, menyempurnakan pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi perkembangan dan kondisi profil risiko, serta memberikan saran-saran dan langkah-langkah perbaikan.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

### 39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Untuk membahas permasalahan operasional bank yang membutuhkan putusan segera, dilakukan rapat *Operational Risk Management Committee* (ORMC) untuk membahas permasalahan-permasalahan yang menyangkut risiko operasional.

#### Manajemen Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BRI termasuk kegagalan *settlement*. BRI melakukan identifikasi dan mengukur tingkat risiko calon debitur melalui pengembangan Internal *Risk Rating*. BRI memantau kualitas kredit sebagai bagian dari identifikasi dini dari pemburukan kredit. Pengelolaan risiko kredit dilakukan melalui kebijakan pengelolaan risiko secara komprehensif dan terintegrasi. BRI menyusun kebijakan manajemen risiko kredit diantaranya tata kelola, pengelolaan limit pada batasan eksposur risiko yang dapat diterima, pengelolaan limit pada batasan geografis, dan pengelolaan limit konsentrasi per industri. *Rating* risiko kredit diperbarui secara berkala untuk memperkirakan *potential loss* sebagai risiko akibat ekspansi kredit dan penentuan tindak lanjut perbaikan.

Penerapan manajemen risiko kredit selain bertujuan untuk mematuhi regulasi yang berlaku, juga merupakan suatu keharusan dalam rangka menerapkan sistem pengelolaan risiko kredit pada tingkat *risk and return* yang optimum dan sesuai dengan praktek di perbankan. Penerapan manajemen risiko kredit diharapkan mampu mendorong kegiatan bisnis BRI namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Penyaluran kredit yang dilakukan oleh unit kerja bisnis telah mempertimbangkan dan memperhatikan risiko kredit sejak saat kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut dilunasi. Pemantauan dilakukan secara berkala terhadap kualitas kredit untuk mencegah terjadinya *Non Performing Loan* (NPL).

Melalui penerapan *Early Warning System* (EWS) terhadap perkembangan kondisi usaha debitur, maka pengelolaan risiko kredit yang efektif dapat meminimalkan risiko terjadinya kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal untuk memperoleh pendapatan yang maksimal.

Pengelolaan risiko kredit BRI dimaksudkan agar kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh tidak terbayarnya pinjaman yang diberikan dan kontrak keuangan lainnya, baik secara tingkat individual maupun portofolio kredit secara keseluruhan dapat dikelola seminimal mungkin. Pengelolaan risiko kredit ini juga dilakukan BRI dalam upaya memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh regulator.

BRI senantiasa melakukan penyempurnaan metodologi penilaian risiko kredit dalam rangka meningkatkan akurasi dalam pengelolaan risiko kredit khususnya dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

1. Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya

Nilai tercatat dari aset keuangan bank selain kredit yang diberikan dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

### 39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

#### Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

- Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya (lanjutan)

Untuk membahas permasalahan operasional bank yang membutuhkan putusan segera, dilakukan rapat *Operational Risk Management Committee* (ORMC) untuk membahas permasalahan-permasalahan yang menyangkut risiko operasional.

Tabel di bawah ini menunjukkan *net maximum exposure* atas risiko kredit untuk efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

	31 Desember 2017		
	Eksposur Maksimum	Agunan	Net Eksposur
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	18.011.026	17.443.973	567.053
	31 Desember 2016		
	Eksposur Maksimum	Agunan	Net Eksposur
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.557.370	1.576.958	-

Untuk kredit yang diberikan, BRI menggunakan agunan untuk meminimalkan risiko kredit. Berdasarkan klasifikasi, kredit BRI dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- Secured loans*
- Unsecured loans*

Untuk *secured loans*, BRI menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijamin sesuai skema kredit. Jenis dari agunan terdiri dari:

- Physical collateral*, berupa tanah dan bangunan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan properti.
- Financial collateral*, berupa simpanan (tabungan, giro, deposito), surat berharga, dan emas.
- Lainnya berupa garansi, jaminan pemerintah dan lembaga penjamin.

Apabila terjadi *default* (gagal bayar), BRI akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban *counterparty*.

*Unsecured loans* terdiri dari *fully unsecured loans* seperti kartu kredit dan *partially secured loans* seperti kredit untuk golongan berpenghasilan tetap, kredit untuk para pensiunan dan kredit konsumen lainnya. Dalam pembayaran kewajibannya, *partially secured loans* umumnya dilakukan melalui pemotongan penghasilan secara otomatis.

Dengan demikian, meskipun kredit tersebut termasuk dalam kategori *unsecured loans* namun tingkat risiko dari *partially secured loans* tidak sebesar nilai tercatat kredit. Sedangkan untuk *fully unsecured loans*, tingkat risiko adalah sebesar nilai tercatat kredit.

Mitigasi risiko kredit untuk *partially secured loans* terdiri dari surat keputusan pengangkatan pegawai dan surat keterangan pensiun.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)**

2. Analisa konsentrasi risiko

a. Sektor geografis

Tabel berikut menggambarkan rincian konsentrasi risiko aset keuangan konsolidasian dengan eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan wilayah geografis pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Kategori wilayah geografis berdasarkan tempat beroperasinya bisnis BRI yang sekaligus menggambarkan potensial bisnis wilayah masing-masing:

	31 Desember 2017							Total
	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah dan DIY	Jawa Timur	Sumatera	Indonesia Tengah dan Timur	Lainnya	
<b>Aset</b>								
Giro pada Bank Indonesia	58.155.479	-	-	-	-	-	-	58.155.479
Giro pada bank lain	5.132.577	59	137	1.891	234	8.553	782.233	5.925.684
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	53.090.678	6.587	544	-	-	-	2.007.878	55.105.687
Efek-efek								
Nilai wajar melalui laba rugi	1.762.263	-	-	-	-	-	-	1.762.263
Tersedia untuk dijual	129.077.061	-	-	-	-	-	1.850.232	130.927.293
Dimiliki hingga jatuh tempo	53.994.290	-	-	-	-	-	235.590	54.229.880
Tagihan wesel ekspor	4.553.793	324.637	165.019	227.935	44.470	204.670	103.193	5.623.717
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah								
Tersedia untuk dijual	717.840	-	-	-	-	-	-	717.840
Dimiliki hingga jatuh tempo	2.600.000	-	-	-	-	-	-	2.600.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	18.011.026	-	-	-	-	-	-	18.011.026
Tagihan derivatif	145.928	-	-	-	-	-	-	145.928
Kredit yang diberikan								
Mikro	20.361.828	24.638.871	40.371.919	33.385.745	53.269.609	80.822.682	-	252.850.654
Ritel	69.066.044	20.499.298	29.264.047	35.637.177	49.412.465	74.739.913	87.816	278.706.760
Korporasi	134.346.141	12.650.037	2.646.191	5.910.996	15.064.359	8.895.510	7.912.020	187.425.254
Piutang dan pembiayaan Syariah	5.758.078	2.874.036	2.093.955	1.765.856	2.625.028	2.747.916	-	17.864.869
Piutang sewa pembiayaan	1.410.880	435.594	7.486	278.529	244.868	111.626	-	2.488.983
Tagihan akseptasi	4.757.849	542.649	134.108	156.304	102.515	-	-	5.693.425
Penyertaan saham*)	2.439	-	-	-	-	-	-	2.439
Aset lain-lain**)	8.546.621	36.627	145.569	108.838	540.471	347.648	789.668	10.515.442
<b>Total</b>	<b>571.490.815</b>	<b>62.008.395</b>	<b>74.828.975</b>	<b>77.473.271</b>	<b>121.304.019</b>	<b>167.878.518</b>	<b>13.768.630</b>	<b>1.088.752.623</b>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(30.104.895)
<b>Bersih</b>								<b>1.058.647.728</b>
<b>Rekening Administratif</b>								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	5.188.328	2.091.479	103.479	403.997	1.093.134	99.502	752	8.980.671
Garansi yang diterbitkan	29.483.331	1.929.418	322.367	411.173	1.099.907	784.184	-	34.030.380
<b>Total</b>	<b>34.671.659</b>	<b>4.020.897</b>	<b>425.846</b>	<b>815.170</b>	<b>2.193.041</b>	<b>883.686</b>	<b>752</b>	<b>43.011.051</b>

\*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan

\*\*) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, wesel tagih, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)**

2. Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

a. Sektor geografis (lanjutan)

Kategori wilayah geografis berdasarkan tempat beroperasinya bisnis BRI yang sekaligus menggambarkan potensial bisnis wilayah masing-masing (lanjutan):

31 Desember 2016								
	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah dan DIY	Jawa Timur	Sumatera	Indonesia Tengah dan Timur	Lainnya	Total
<b>Aset</b>								
Giro pada Bank Indonesia	55.635.946	-	-	-	-	-	-	55.635.946
Giro pada bank lain	10.250.878	6.593	1.066	294	262	46.494	717.128	11.022.715
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	77.131.960	-	-	-	-	-	1.010.794	78.142.754
<b>Efek-efek</b>								
Nilai wajar melalui laba rugi	490.742	-	-	-	-	-	184.224	674.966
Tersedia untuk dijual	67.812.522	-	-	-	-	-	1.679.744	69.492.266
Dimiliki hingga jatuh tempo	61.286.147	-	-	-	-	-	610.723	61.896.870
Tagihan wesel ekspor	7.450.580	198.567	147.953	960.666	581.374	6.332	-	9.345.472
<b>Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah</b>								
Tersedia untuk dijual	718.434	-	-	-	-	-	-	718.434
Dimiliki hingga jatuh tempo	2.600.000	-	-	-	-	-	-	2.600.000
<b>Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali</b>								
Tagihan derivatif	1.557.370	-	-	-	-	-	-	1.557.370
Kredit yang diberikan	91.657	-	-	-	-	-	-	91.657
<b>Mikro</b>								
Ritel	17.333.003	21.577.469	35.655.855	28.925.252	47.381.058	70.929.568	-	221.802.205
Korporasi	57.407.811	18.067.842	27.185.046	31.453.445	44.719.314	66.046.776	702	244.880.936
Piutang dan pembiayaan Syariah	128.551.904	10.038.287	2.291.428	5.344.063	13.911.017	8.772.798	7.878.337	176.787.834
Piutang sewa pembiayaan	5.562.328	3.096.990	1.967.988	1.838.606	2.558.727	2.724.304	-	17.748.943
Tagihan akseptasi	1.107.160	415.637	-	314.227	273.494	89.782	-	2.200.300
Penyertaan saham*)	4.939.982	114.705	78.217	557.509	632	1.538	-	5.692.583
Aset lain-lain**)	2.439	-	-	-	-	-	-	2.439
	5.078.337	28.897	29.707	33.947	186.766	92.089	76.878	5.526.621
<b>Total</b>	<b>505.009.200</b>	<b>53.544.987</b>	<b>67.357.260</b>	<b>69.428.009</b>	<b>109.612.644</b>	<b>148.709.681</b>	<b>12.158.530</b>	<b>965.820.311</b>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(22.807.210)
<b>Bersih</b>								<b>943.013.101</b>
<b>Rekening Administratif</b>								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor								
Garansi yang diterbitkan	6.313.266	1.303.388	57.293	381.770	463.165	22.270	-	8.541.152
	20.227.433	2.244.394	341.443	573.537	737.002	395.993	3.213	24.523.015
<b>Total</b>	<b>26.540.699</b>	<b>3.547.782</b>	<b>398.736</b>	<b>955.307</b>	<b>1.200.167</b>	<b>418.263</b>	<b>3.213</b>	<b>33.064.167</b>

\*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan

\*\*) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, wesel tagih, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

b. Sektor industri

Tabel di bawah ini menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

31 Desember 2017								
	Pemerintah (Termasuk BI)	Bank dan lembaga keuangan lainnya	Pertanian	Perindustrian	Perdagangan, hotel dan restoran	Jasa dunia usaha	Lain-lain	Total
<b>Aset</b>								
Giro pada Bank Indonesia	58.155.479	-	-	-	-	-	-	58.155.479
Giro pada bank lain	-	5.925.684	-	-	-	-	-	5.925.684
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	45.045.953	10.059.734	-	-	-	-	-	55.105.687

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)**

2. Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

b. Sektor industri (lanjutan)

Tabel di bawah ini menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (lanjutan):

31 Desember 2017								
	Pemerintah (Termasuk BI)	Bank dan lembaga keuangan lainnya	Pertanian	Perindustrian	Perdagangan, hotel dan restoran	Jasa dunia usaha	Lain-lain	Total
<b>Aset (lanjutan)</b>								
<b>Efek-efek</b>								
Nilai wajar melalui laba rugi	579.868	541.586	30.633	-	-	393.071	217.105	1.762.263
Tersedia untuk dijual	117.209.900	10.393.823	-	1.346.737	-	1.792.656	184.177	130.927.293
Dimiliki hingga jatuh tempo	48.884.507	2.618.577	-	2.018.980	-	511.908	195.908	54.229.880
Tagihan wesel ekspor	2.344	-	-	2.128.717	27.732	14.526	3.450.398	5.623.717
<b>Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah</b>								
Tersedia untuk dijual	717.840	-	-	-	-	-	-	717.840
Dimiliki hingga jatuh tempo	2.600.000	-	-	-	-	-	-	2.600.000
<b>Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali</b>								
Tagihan derivatif	16.583.431	1.427.595	-	-	-	-	-	18.011.026
Kredit yang diberikan	-	145.928	-	-	-	-	-	145.928
<b>Kredit yang diberikan</b>								
Mikro	-	-	37.841.570	7.475.754	115.976.898	13.849.550	77.706.882	252.850.654
Ritel	258.751	256.146	14.007.246	17.064.946	106.306.510	10.244.264	130.568.897	278.706.760
Korporasi	443.302	9.833.219	37.734.788	39.233.056	18.963.721	6.752.211	74.464.957	187.425.254
Piutang dan pembiayaan Syariah	404.574	500.946	-	7.016.107	9.511.713	337.966	93.563	17.864.869
Piutang sewa pembiayaan	-	-	8.454	729.517	375.209	281.491	1.094.312	2.488.983
Tagihan akseptasi	1.030.279	-	-	338.662	21.868	-	4.302.616	5.693.425
Penyertaan saham*)	-	1.034	-	-	-	975	430	2.439
Aset lain-lain**)	1.930.438	1.056.167	-	-	-	5.288.276	2.240.561	10.515.442
<b>Total</b>	<b>293.846.666</b>	<b>42.760.439</b>	<b>89.622.691</b>	<b>77.352.476</b>	<b>251.183.651</b>	<b>39.466.894</b>	<b>294.519.806</b>	<b>1.088.752.623</b>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(30.104.895)
<b>Bersih</b>								<b>1.058.647.728</b>
<b>Rekening Administratif</b>								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor								
Garansi yang diterbitkan	4.696.968	-	-	354.114	19.077	-	3.910.512	8.980.671
	16.195.739	640	543.925	245.615	265.164	146.452	16.632.845	34.030.380
<b>Total</b>	<b>20.892.707</b>	<b>640</b>	<b>543.925</b>	<b>599.729</b>	<b>284.241</b>	<b>146.452</b>	<b>20.543.357</b>	<b>43.011.051</b>

31 Desember 2016								
	Pemerintah (Termasuk BI)	Bank dan lembaga keuangan lainnya	Pertanian	Perindustrian	Perdagangan, hotel dan restoran	Jasa dunia usaha	Lain-lain	Total
<b>Aset</b>								
Giro pada Bank Indonesia	55.635.946	-	-	-	-	-	-	55.635.946
Giro pada bank lain	-	11.022.715	-	-	-	-	-	11.022.715
<b>Penempatan pada Bank</b>								
Indonesia dan bank lain	72.792.534	5.350.220	-	-	-	-	-	78.142.754
<b>Efek-efek</b>								
Nilai wajar melalui laba rugi	84.746	329.944	-	-	-	18.029	242.247	674.966
Tersedia untuk dijual	60.612.578	4.627.494	-	2.293.191	-	1.633.416	325.587	69.492.266
Dimiliki hingga jatuh tempo	54.759.343	4.674.843	-	1.446.121	-	746.500	270.063	61.896.870

\*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.

\*\*) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, wesel tagih, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

### 39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

#### Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

#### 2. Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

#### b. Sektor industri (lanjutan)

Tabel di bawah ini menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (lanjutan):

	31 Desember 2016							Total
	Pemerintah (Termasuk BI)	Bank dan lembaga keuangan lainnya	Pertanian	Perindustrian	Perdagangan, hotel dan restoran	Jasa dunia usaha	Lain-lain	
<b>Aset (lanjutan)</b>								
Tagihan wesel ekspor	239.769	-	-	2.926.515	133.525	22.823	6.022.840	9.345.472
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah								
Tersedia untuk dijual	718.434	-	-	-	-	-	-	718.434
Dimiliki hingga jatuh tempo	2.600.000	-	-	-	-	-	-	2.600.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	925.140	632.230	-	-	-	-	-	1.557.370
Tagihan derivatif	-	91.657	-	-	-	-	-	91.657
Kredit yang diberikan								
Mikro	-	-	32.354.043	6.532.381	101.384.386	11.236.469	70.294.926	221.802.205
Ritel	348.026	1.270.563	7.871.328	17.369.845	95.507.483	8.212.692	114.300.999	244.880.936
Korporasi	600.926	4.650.036	37.365.653	36.710.500	22.379.114	5.050.563	70.031.042	176.787.834
Piutang dan pembiayaan Syariah	-	1.455.136	398.661	2.443.509	4.812.794	757.641	7.881.202	17.748.943
Piutang sewa pembiayaan	-	4.607	2.362	1.105.236	-	866.959	221.136	2.200.300
Tagihan akseptasi	428.155	89.740	-	301.789	5.127	632	4.867.140	5.692.583
Penyertaan saham <sup>*)</sup>	-	1.034	-	-	-	975	430	2.439
Aset lain-lain <sup>**)</sup>	1.501.389	393.192	-	-	-	2.548.857	1.083.183	5.526.621
<b>Total</b>	<b>251.246.986</b>	<b>34.593.411</b>	<b>77.992.047</b>	<b>71.129.087</b>	<b>224.222.429</b>	<b>31.095.556</b>	<b>275.540.795</b>	<b>965.820.311</b>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(22.807.210)
<b>Bersih</b>								<b>943.013.101</b>
<b>Rekening Administratif</b>								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	5.505.442	-	377	226.337	20.707	-	2.788.289	8.541.152
Garansi yang diterbitkan	12.990.267	737	443.271	907.353	195.202	92.565	9.893.620	24.523.015
<b>Total</b>	<b>18.495.709</b>	<b>737</b>	<b>443.648</b>	<b>1.133.690</b>	<b>215.909</b>	<b>92.565</b>	<b>12.681.909</b>	<b>33.064.167</b>

<sup>\*)</sup> Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.

<sup>\*\*)</sup> Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, wesel tagih, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.

#### 3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

##### a. Giro pada bank lain

Per tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

##### b. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Per tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

##### c. Efek-efek

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, seluruh efek-efek diklasifikasikan "Lancar", kecuali Obligasi I Tahun 2003 yang diterbitkan oleh PT Great River International diklasifikasikan "Macet" yang dimiliki oleh BRI Life (entitas anak), dimana obligasi tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp758.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)**

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (lanjutan)

d. Piutang sewa pembiayaan

Per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Mengalami penurunan nilai	103.445	217.115
Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai	110.585	221.851
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	2.274.953	1.761.334
	<b>2.488.983</b>	<b>2.200.300</b>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(103.500)	(130.000)
<b>Total</b>	<b>2.385.483</b>	<b>2.070.300</b>

e. Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah

Per tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2017				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	High Grade	Standard Grade			
<u>Rupiah</u>					
Perdagangan, perhotelan dan restoran	208.941.190	9.219.724	13.130.011	9.840.619	241.131.544
Pertanian	66.580.203	1.630.968	1.978.945	4.776.126	74.966.242
Jasa dunia usaha	35.806.525	658.828	1.404.509	1.290.482	39.160.344
Perindustrian	30.027.023	477.416	866.830	4.217.950	35.589.219
Listrik, gas dan air	28.500.509	8.438	24.373	25.402	28.558.722
Konstruksi	23.493.510	354.850	245.389	1.972.233	26.065.982
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	17.310.995	281.006	672.142	1.263.900	19.528.043
Jasa pelayanan sosial	5.763.160	182.779	278.949	707.128	6.932.016
Pertambangan	1.024.116	56.059	60.801	1.103.730	2.244.706
Lain-lain	183.835.359	949.376	4.616.378	1.799.464	191.200.577
	<b>601.282.590</b>	<b>13.819.444</b>	<b>23.278.327</b>	<b>26.997.034</b>	<b>665.377.395</b>
<u>Mata uang asing</u>					
Perindustrian	26.665.130	11.873	-	4.670.108	31.347.111
Pertanian	16.070.541	-	-	-	16.070.541
Listrik, gas dan air	5.148.785	-	-	682.810	5.831.595
Perdagangan, perhotelan dan restoran	4.043.006	7.199	22.149	391.733	4.464.087
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	3.044.175	-	-	416.321	3.460.496
Pertambangan	1.706.282	3.193	-	1.609.741	3.319.216
Jasa pelayanan sosial	3.054.991	-	-	-	3.054.991
Jasa dunia usaha	1.735.827	-	10.706	350.972	2.097.505
Konstruksi	310.509	-	-	1.223.141	1.533.650
Lain-lain	290.950	-	-	-	290.950
	<b>62.070.196</b>	<b>22.265</b>	<b>32.855</b>	<b>9.344.826</b>	<b>71.470.142</b>
<b>Total</b>	<b>663.352.786</b>	<b>13.841.709</b>	<b>23.311.182</b>	<b>36.341.860</b>	<b>736.847.537</b>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai					(30.000.637)
<b>Bersih</b>					<b>706.846.900</b>



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)**

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (lanjutan)

e. Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah (lanjutan)

	31 Desember 2016				Total
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai		
	High Grade	Standard Grade	Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	
<b>Rupiah</b>					
Perdagangan, perhotelan dan restoran	194.421.942	6.713.103	12.197.071	9.197.709	222.529.825
Pertanian	62.778.609	948.799	2.061.115	4.321.466	70.109.989
Perindustrian	29.205.165	345.519	1.130.893	4.697.397	35.378.974
Jasa dunia usaha	27.111.516	649.859	1.129.198	1.307.191	30.197.764
Listrik, gas dan air	28.677.845	10.184	23.344	32.519	28.743.892
Konstruksi	17.552.083	204.414	242.271	2.473.659	20.472.427
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	14.927.759	217.035	649.998	1.270.357	17.065.149
Jasa pelayanan sosial	8.712.795	150.190	550.859	273.676	9.687.520
Pertambangan	1.397.823	38.171	41.345	1.297.754	2.775.093
Lain-lain	159.567.402	705.909	4.186.671	1.505.581	165.965.563
	<u>544.352.939</u>	<u>9.983.183</u>	<u>22.212.765</u>	<u>26.377.309</u>	<u>602.926.196</u>
<b>Mata uang asing</b>					
Perindustrian	23.536.391	-	-	4.745.531	28.281.922
Pertanian	8.789.899	-	177.628	27.157	8.994.684
Pertambangan	3.474.378	-	3.434	1.821.394	5.299.206
Listrik, gas dan air	3.773.707	-	-	691.591	4.465.298
Jasa pelayanan sosial	3.707.071	-	-	-	3.707.071
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	1.681.947	-	-	423.869	2.105.816
Jasa dunia usaha	1.406.898	1.347	-	450.252	1.858.497
Konstruksi	484.670	-	-	1.261.603	1.746.273
Perdagangan, perhotelan dan restoran	1.080.091	6.877	346	681.367	1.768.681
Lain-lain	66.274	-	-	-	66.274
	<u>48.001.326</u>	<u>8.224</u>	<u>181.408</u>	<u>10.102.764</u>	<u>58.293.722</u>
<b>Total</b>	<u><b>592.354.265</b></u>	<u><b>9.991.407</b></u>	<u><b>22.394.173</b></u>	<u><b>36.480.073</b></u>	<u><b>661.219.918</b></u>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai					(22.676.452)
<b>Bersih</b>					<u><b>638.543.466</b></u>

f. Tagihan wesel ekspor

Per tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

g. Tagihan akseptasi

Per tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

h. Aset lain-lain

Per tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)**

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (lanjutan)

i. Rekening administratif

Per tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, akun-akun administratif ini mengalami penurunan nilai dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<u>Rupiah</u>		
Garansi yang diterbitkan	16.033.717	11.979.117
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	1.639.383	1.086.496
	<u>17.673.100</u>	<u>13.065.613</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Garansi yang diterbitkan	17.996.663	12.543.898
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	7.341.288	7.454.656
	<u>25.337.951</u>	<u>19.998.554</u>
	43.011.051	33.064.167
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(2.134)	(895)
<b>Total</b>	<b><u>43.008.917</u></b>	<b><u>33.063.272</u></b>

4. Kualitas aset keuangan

Tabel berikut menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang terekspos risiko kredit, nilai yang disajikan adalah *gross*.

	31 Desember 2017				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Total
	High Grade	Standard Grade	Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	
<u>Aset</u>					
Giro pada Bank Indonesia	58.155.479	-	-	-	58.155.479
Giro pada bank lain	5.925.684	-	-	-	5.925.684
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	55.105.687	-	-	-	55.105.687
Efek efek					
Nilai wajar melalui laba rugi	1.762.263	-	-	-	1.762.263
Tersedia untuk dijual	127.515.291	3.412.002	-	-	130.927.293
Dimiliki hingga jatuh tempo	53.461.707	768.173	-	-	54.229.880
Tagihan wesel ekspor	5.623.717	-	-	-	5.623.717
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah					
Tersedia untuk dijual	717.840	-	-	-	717.840
Dimiliki hingga jatuh tempo	2.600.000	-	-	-	2.600.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	18.011.026	-	-	-	18.011.026
Tagihan derivatif	145.928	-	-	-	145.928



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)**

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit, nilai yang disajikan adalah gross (lanjutan).

	31 Desember 2017				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	High Grade	Standard Grade			
<b>Aset (lanjutan)</b>					
Kredit yang diberikan					
Mikro	236.294.763	3.482.707	10.226.252	2.846.932	252.850.654
Ritel	247.613.770	9.598.810	11.334.840	10.159.340	278.706.760
Korporasi	164.867.303	54.477	367.209	22.136.265	187.425.254
Piutang dan pembiayaan syariah	14.576.950	705.715	1.382.881	1.199.323	17.864.869
Piutang sewa pembiayaan	2.274.953	-	110.585	103.445	2.488.983
Tagihan akseptasi	5.693.425	-	-	-	5.693.425
Penyertaan saham*)	2.439	-	-	-	2.439
Aset lain-lain**)	10.514.322	1.120	-	-	10.515.442
<b>Total</b>	<b>1.010.862.547</b>	<b>18.023.004</b>	<b>23.421.767</b>	<b>36.445.305</b>	<b>1.088.752.623</b>
31 Desember 2016					
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	High Grade	Standard Grade			
<b>Aset</b>					
Giro pada Bank Indonesia	55.635.946	-	-	-	55.635.946
Giro pada bank lain	10.998.749	23.966	-	-	11.022.715
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	78.142.754	-	-	-	78.142.754
Efek efek					
Nilai wajar melalui laba rugi	674.966	-	-	-	674.966
Tersedia untuk dijual	67.702.626	1.789.640	-	-	69.492.266
Dimiliki hingga jatuh tempo	61.028.620	868.250	-	-	61.896.870
Tagihan wesel ekspor	9.345.472	-	-	-	9.345.472
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah					
Tersedia untuk dijual	718.434	-	-	-	718.434
Dimiliki hingga jatuh tempo	2.600.000	-	-	-	2.600.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.557.370	-	-	-	1.557.370
Tagihan derivatif	91.657	-	-	-	91.657
Kredit yang diberikan					
Mikro	206.999.682	2.496.361	9.958.341	2.347.821	221.802.205
Ritel	218.691.266	6.880.476	10.484.935	8.824.259	244.880.936
Korporasi	152.218.111	-	80.245	24.489.478	176.787.834
Piutang dan pembiayaan syariah	14.445.206	614.570	1.870.652	818.515	17.748.943
Piutang sewa pembiayaan	1.761.334	-	221.851	217.115	2.200.300
Tagihan akseptasi	5.692.583	-	-	-	5.692.583
Penyertaan saham*)	2.439	-	-	-	2.439
Aset lain-lain**)	5.526.104	517	-	-	5.526.621
<b>Total</b>	<b>893.833.319</b>	<b>12.673.780</b>	<b>22.616.024</b>	<b>36.697.188</b>	<b>965.820.311</b>

\*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.

\*\*) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)**

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut:

1. Tingkat Tinggi (High Grade)
  - a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah dan transaksi dengan bank yang telah terdaftar pada Bursa.
  - b) Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah yaitu pinjaman kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai, serta tidak pernah direstrukturisasi.
  - c) Tagihan wesel ekspor dan tagihan akseptasi yaitu tagihan kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo, dan memiliki kapasitas finansial yang kuat dalam hal pembayaran kembali seluruh kewajibannya secara tepat waktu.
  - d) Efek-efek dan Obligasi Pemerintah, yaitu efek-efek yang dikeluarkan oleh Pemerintah, efek-efek dan obligasi dengan *rating* minimal idA- (Pefindo), A- (Fitch), A- (Standard & Poor's), atau A3 (Moody's).
  - e) Penyertaan saham, yaitu penyertaan pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa dan memiliki tingkat kinerja keseluruhan yang baik.
2. Tingkat Standar (Standard Grade)
  - a) Giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, yaitu giro atau penempatan pada bank yang tidak terdaftar pada Bursa.
  - b) Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah yaitu pinjaman kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo, dan tidak mengalami penurunan nilai, namun pernah direstrukturisasi.
  - c) Tagihan wesel ekspor dan tagihan akseptasi, yaitu tagihan kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo dan memiliki kapasitas finansial yang memadai dalam hal pembayaran kembali seluruh kewajibannya secara tepat waktu.
  - d) Efek-efek dan Obligasi Pemerintah, yaitu efek-efek dan obligasi dengan *rating* antara idBBB+ sampai dengan idBBB- (Pefindo), BBB+ sampai dengan BBB- (Fitch), BBB+ sampai dengan BBB- (Standard & Poor's), atau Baa1 sampai dengan Baa3 (Moody's).
  - e) Penyertaan saham, yaitu penyertaan pada perusahaan yang tidak terdaftar pada Bursa dan memiliki tingkat kinerja keseluruhan yang baik.
5. Berdasarkan PSAK No. 60, aset keuangan yang telah jatuh tempo ditentukan ketika debitur gagal melakukan pembayaran sesuai jadwal. Tabel berikut menunjukkan *aging analysis* terhadap kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah, dan piutang sewa pembiayaan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai.

	31 Desember 2017			
	≤ 30 hari	> 30 – 60 hari	> 60 – 90 hari	Total
Kredit yang diberikan				
Mikro	4.613.769	2.481.527	3.130.956	10.226.252
Ritel	5.600.236	2.482.225	3.252.379	11.334.840
Korporasi	175.635	191.574	-	367.209
Piutang dan pembiayaan syariah	905.650	187.999	289.232	1.382.881
Piutang sewa pembiayaan	83.351	5.216	22.018	110.585
<b>Total</b>	<b>11.378.641</b>	<b>5.348.541</b>	<b>6.694.585</b>	<b>23.421.767</b>



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

### 39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

#### Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

5. Berdasarkan PSAK No. 60, aset keuangan yang telah jatuh tempo ditentukan ketika debitur gagal melakukan pembayaran sesuai jadwal. Tabel berikut menunjukkan *aging analysis* terhadap kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah, dan piutang sewa pembiayaan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai (lanjutan).

	31 Desember 2016			Total
	≤ 30 hari	> 30 – 60 hari	> 60 – 90 hari	
Kredit yang diberikan				
Mikro	4.548.784	2.399.345	3.010.212	9.958.341
Ritel	5.463.764	2.229.201	2.791.970	10.484.935
Korporasi	80.245	-	-	80.245
Piutang dan pembiayaan syariah	1.471.901	176.717	222.034	1.870.652
Piutang sewa pembiayaan	179.860	18.679	23.312	221.851
<b>Total</b>	<b>11.744.554</b>	<b>4.823.942</b>	<b>6.047.528</b>	<b>22.616.024</b>

#### Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan sehingga tidak mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

BRI mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, serta dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal. Untuk mendukung pengelolaan likuiditas, BRI menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas (PPPMRL) yang mencakup kebijakan manajemen likuiditas, proyeksi arus kas, profil maturitas (*maturity gap*), *net stable funding ratio* dan *liquidity coverage ratio*, pedoman penetapan limit risiko likuiditas, *stress test* risiko likuiditas, *contingency funding plan* dan sistem informasi risiko likuiditas.

Pedoman ini bertujuan untuk memastikan kecukupan pengelolaan risiko likuiditas harian dalam memenuhi kewajiban pada kondisi normal maupun kondisi krisis secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, termasuk memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi dan penghimpunan DPK yang memiliki struktur yang sehat dan *sustainable*.

BRI juga melakukan simulasi *stress testing* secara triwulanan yang disampaikan kepada Dewan Direksi dan Komisaris BRI melalui *Risk Management Committee* (RMC). Tujuan dari *stress testing* yaitu untuk mengukur ketahanan atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas selama kondisi krisis (*stress*). Selain itu, *stress test* juga digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan atau meningkatkan rencana pendanaan darurat (*contingency plan*), dan limit risiko likuiditas.

#### Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual

Potensi risiko likuiditas yang akan dihadapi BRI di masa mendatang diukur melalui *Liquidity Gap Analysis*, yang merupakan proyeksi *mismatch* likuiditas atas dasar jatuh tempo aset dan liabilitas, setelah memperhitungkan kebutuhan untuk ekspansi bisnis. Informasi ini menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan pengelolaan likuiditas, termasuk juga kebutuhan ekspansi bisnis. Dengan diterapkannya pengelolaan likuiditas yang efektif, diharapkan dapat meminimalkan risiko likuiditas di BRI sekaligus meningkatkan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan)**

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (maturity buckets) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (remaining maturity) pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

Keterangan	Total	31 Desember 2017				
		Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
<b>Aset</b>						
Kas	24.797.782	-	-	-	-	24.797.782
Giro pada Bank Indonesia	58.155.479	58.155.479	-	-	-	-
Giro pada bank lain	5.925.684	5.925.684	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	55.105.687	53.594.287	1.172.213	339.187	-	-
Efek-efek	186.919.436	134.656.217	5.546.579	5.833.275	40.883.365	-
Cadangan kerugian	(758)	-	-	-	-	(758)
Tagihan wesel ekspor	5.623.717	1.115.796	2.089.142	2.418.779	-	-
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	3.317.840	717.840	375.000	750.000	1.475.000	-
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	18.011.026	16.691.189	1.319.837	-	-	-
Tagihan derivatif	145.928	7.782	33.611	44.734	59.801	-
Kredit yang diberikan						
Mikro	252.850.654	2.291.479	5.218.530	32.882.324	212.458.321	-
Ritel	278.706.760	11.075.495	16.591.931	75.614.695	175.424.639	-
Korporasi	187.425.254	21.121.865	14.995.118	30.477.634	120.830.637	-
Cadangan kerugian	(29.423.380)	-	-	-	-	(29.423.380)
Piutang dan pembiayaan Syariah	17.864.869	530.569	236.409	2.425.842	14.672.049	-
Cadangan kerugian	(577.257)	-	-	-	-	(577.257)
Piutang sewa pembiayaan	2.488.983	106.308	16.802	139.370	2.226.503	-
Cadangan kerugian	(103.500)	-	-	-	-	(103.500)
Tagihan akseptasi Penyertaan saham*)	5.693.425	1.894.633	1.983.239	1.815.553	-	-
Aset lain-lain**)	2.439	-	-	-	-	2.439
Aset lain-lain**)	10.515.442	5.600.108	2.202.645	889.598	15.050	1.808.041
	<b>1.083.445.510</b>	<b>313.484.731</b>	<b>51.781.056</b>	<b>153.630.991</b>	<b>568.045.365</b>	<b>(3.496.633)</b>
<b>Liabilitas</b>						
Liabilitas segera	6.584.201	6.584.201	-	-	-	-
Simpanan nasabah						
Giro	145.529.168	145.529.168	-	-	-	-
Giro <i>Wadiah</i>	1.766.901	1.766.901	-	-	-	-
Giro <i>Mudharabah</i>	139.535	139.535	-	-	-	-
Tabungan	343.420.737	343.420.737	-	-	-	-
Tabungan <i>Wadiah</i>	4.749.652	4.749.652	-	-	-	-
Tabungan <i>Mudharabah</i>	1.270.484	1.270.484	-	-	-	-
Deposito berjangka	326.417.937	178.534.567	96.297.623	40.992.107	10.593.640	-
Deposito berjangka <i>Mudharabah</i>	18.362.036	14.272.754	3.949.195	140.087	-	-
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	5.593.367	5.506.174	57.408	29.785	-	-
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	12.136.684	2.024.388	1.332.430	3.512.249	5.267.617	-



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

### 39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

#### Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan)

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (maturity buckets) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (remaining maturity) pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (lanjutan):

31 Desember 2017						
Keterangan	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
<b>Liabilitas (lanjutan)</b>						
Liabilitas derivatif	200.858	8.472	9.903	58.219	124.264	-
Liabilitas akseptasi Surat berharga yang diterbitkan	5.693.425	1.894.633	1.983.239	1.815.553	-	-
Pinjaman yang diterima	30.619.658	-	7.588.383	3.267.391	19.763.884	-
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	29.403.009	679.827	743.333	6.378.546	21.601.303	-
Liabilitas lain-lain***)	986.450	-	-	10.312	976.138	-
	2.454.031	784.913	531.439	353.778	-	783.901
	<b>935.328.133</b>	<b>707.166.406</b>	<b>112.492.953</b>	<b>56.558.027</b>	<b>58.326.846</b>	<b>783.901</b>
<b>Perbedaan Jatuh Tempo</b>	<b>148.117.377</b>	<b>(393.681.675)</b>	<b>(60.711.897)</b>	<b>97.072.964</b>	<b>509.718.519</b>	<b>(4.280.534)</b>
31 Desember 2016						
Keterangan	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
<b>Aset</b>						
Kas	25.212.024	-	-	-	-	25.212.024
Giro pada Bank Indonesia	55.635.946	55.635.946	-	-	-	-
Giro pada bank lain	11.022.715	11.022.715	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	78.142.754	78.012.754	130.000	-	-	-
Efek-efek	132.064.102	71.577.341	5.232.606	9.190.425	46.063.730	-
Cadangan kerugian	(758)	-	-	-	-	(758)
Tagihan wesel ekspor	9.345.472	2.536.196	3.258.692	3.550.584	-	-
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	3.318.434	718.434	-	-	2.600.000	-
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.557.370	632.230	925.140	-	-	-
Tagihan derivatif	91.657	32.214	-	489	58.954	-
Kredit yang diberikan						
Mikro	221.802.205	1.942.248	4.449.159	30.293.610	185.117.188	-
Ritel	244.880.936	10.175.734	13.037.992	63.386.726	158.280.484	-
Korporasi	176.787.834	5.993.480	24.140.155	28.358.562	118.295.637	-
Cadangan kerugian	(22.184.296)	-	-	-	-	(22.184.296)
Piutang dan pembiayaan Syariah	17.748.943	282.812	452.795	1.728.426	15.284.910	-
Cadangan kerugian	(492.156)	-	-	-	-	(492.156)
Piutang sewa pembiayaan	2.200.300	-	-	264.036	1.936.264	-
Cadangan kerugian	(130.000)	-	-	-	-	(130.000)
Tagihan akseptasi	5.692.583	1.045.643	2.106.327	2.540.613	-	-
Penyertaan saham*)	2.439	-	-	-	-	2.439
Aset lain-lain**)	5.526.621	2.570.452	1.199.076	954.795	478	801.820
	<b>968.225.125</b>	<b>242.178.199</b>	<b>54.931.942</b>	<b>140.268.266</b>	<b>527.637.645</b>	<b>3.209.073</b>

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

### 39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

#### Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan)

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (maturity buckets) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (remaining maturity) pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (lanjutan):

Keterangan	Total	31 Desember 2016				
		Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
<b>Liabilitas</b>						
Liabilitas segera	5.410.313	5.410.313	-	-	-	-
Simpanan nasabah						
Giro	141.419.020	141.419.020	-	-	-	-
Giro <i>Wadiah</i>	1.127.843	1.127.843	-	-	-	-
Tabungan	298.110.406	298.110.406	-	-	-	-
Tabungan <i>Wadiah</i>	4.176.761	4.176.761	-	-	-	-
Tabungan <i>Mudharabah</i>	983.121	983.121	-	-	-	-
Deposito berjangka	293.029.378	239.316.485	37.907.214	13.639.996	2.165.683	-
Deposito berjangka <i>Mudharabah</i>	15.679.845	13.791.599	1.670.222	214.638	3.386	-
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	2.229.538	2.186.158	42.057	1.323	-	-
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	7.302.398	-	673.625	1.917.625	4.711.148	-
Liabilitas derivatif	347.217	-	114.152	-	233.065	-
Liabilitas akseptasi Surat berharga yang diterbitkan	5.692.583	1.045.643	2.106.327	2.540.613	-	-
Pinjaman yang diterima	24.800.781	-	807.927	4.110.712	19.882.142	-
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	35.008.170	320.732	6.201.529	8.103.286	20.382.623	-
Liabilitas lain-lain***)	1.008.510	-	-	-	1.008.510	-
	1.851.087	1.053.489	73.376	241.664	-	482.558
	<b>838.176.971</b>	<b>708.941.570</b>	<b>49.596.429</b>	<b>30.769.857</b>	<b>48.386.557</b>	<b>482.558</b>
<b>Perbedaan Jatuh Tempo</b>	<b>130.048.154</b>	<b>(466.763.371)</b>	<b>5.335.513</b>	<b>109.498.409</b>	<b>479.251.088</b>	<b>2.726.515</b>

\*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.

\*\*) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, wesel tagih, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.

\*\*\*) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi dan diklasifikasi siap untuk dijual, dana *tabarru'* dan dana *syirkah* temporer.

#### Manajemen Risiko Pasar

Risiko pasar timbul karena pergerakan faktor pasar yang meliputi suku bunga dan nilai tukar yang berlawanan dengan posisi yang dimiliki BRI, baik posisi yang ada di laporan posisi keuangan maupun rekening administratif. Posisi tersebut merupakan posisi yang ada dalam *trading book* dan *banking book*.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

### 39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

#### Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

BRI telah mengimplementasikan sistem aplikasi *treasury* dan risiko pasar (GUAVA) yang merupakan suatu sistem yang terintegrasi, yang digunakan oleh fungsi *front office*, *middle office* dan *back office*. *Middle Office* dapat melakukan pengukuran risiko pasar menggunakan model internal (Value-at-Risk) yang terintegrasi dengan proses transaksi harian. Selain melakukan *monitoring* eksposur risiko instrumen, *Middle Office* juga melakukan *monitoring limit* risiko pasar dan *limit* transaksi antara lain *limit* nominal transaksi *dealer*, *cut loss limit*, *stop loss limit* dan *Value-at-Risk (VaR) limit*. *Monitoring* dilakukan secara harian sehingga mempercepat penyediaan informasi terkini yang mendukung pengambilan keputusan oleh pejabat lini dan manajemen secara tepat waktu, terutama untuk instrumen yang termasuk ke dalam klasifikasi diperdagangkan (*trading*).

#### 1. Value-at-Risk (VaR): Tujuan Penggunaan Metode dan Keterbatasannya

BRI menggunakan pendekatan model internal untuk mengukur potensi kerugian VaR akibat perubahan harga pasar dari portofolio *trading* berdasarkan pada data historis. Potensi kerugian VaR dari risiko pasar diukur dengan menggunakan asumsi perubahan faktor risiko mengikuti pola distribusi normal. BRI menggunakan VaR untuk menghitung risiko nilai tukar untuk posisi *trading* dan *banking book* serta menghitung risiko suku bunga untuk posisi *trading book*.

#### 2. Asumsi Value-at-Risk (VaR)

Potensi kerugian VaR dihitung berdasarkan nilai estimasi dengan menggunakan tingkat kepercayaan (*confidence level*) di 99% dan posisi risiko pasar yang tidak berubah dalam 1 (satu) hari (*holding period*). Hal ini menunjukkan potensi kerugian yang dapat melebihi nilai VaR dalam kondisi pasar normal, rata-rata dapat terjadi satu kali dalam seratus hari. Metode yang digunakan dalam pengukuran VaR adalah metode Delta Gamma.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai nilai VaR dari 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dan dari 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 (tidak diaudit).

	2017	
	Nilai Tukar*)	Suku Bunga
Rata-rata Harian	39.407,73	3.293,16
Tertinggi	67.226,24	8.366,41
Terendah	26.745,25	468,63
	2016	
	Nilai Tukar*)	Suku Bunga
Rata-rata Harian	58.421,11	851,78
Tertinggi	134.093,77	4.153,38
Terendah	20.170,30	7,00

\*) Termasuk *trading* dan *banking book*.

#### 3. Back Testing

Tujuan dilaksanakannya *back testing* yaitu untuk memastikan bahwa hasil perhitungan internal model untuk risiko suku bunga dan risiko nilai tukar telah sesuai. Ketika melakukan *back testing*, BRI membandingkan antara estimasi VaR harian dengan realisasi perubahan harga.

Berdasarkan prosedur *back testing* untuk risiko nilai tukar dan risiko tingkat suku bunga, hasil kerugian sebenarnya sepanjang tahun telah sesuai secara signifikan dengan VaR *forecast model*.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)**

**4. Risiko Pasar Diluar *Trading Book***

**a. Risiko Tingkat Suku Bunga**

Instrumen keuangan yang berbasis suku bunga memiliki risiko karena terdapat potensi perubahan suku bunga yang akan berdampak pada arus kas di masa depan.

Direksi dan Manajemen bertanggung jawab dalam menetapkan, mengelola, serta mengendalikan tingkat suku bunga dengan menimbang *risk appetite* bank dan target pencapaian kinerja keuangan. *Review* atas penetapan suku bunga dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam forum *Asset and Liability Committee* (ALCO).

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk posisi aset dan liabilitas keuangan untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

	2017		2016	
	Rupiah (%)	Valas (%)	Rupiah (%)	Valas (%)
<b>Aset</b>				
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4,48	1,05	5,41	0,53
Efek-efek	8,77	3,42	8,65	3,36
Kredit yang diberikan	11,78	4,11	11,91	4,23
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	6,72	-	6,63	-
Piutang sewa pembiayaan	13,62	6,38	13,43	5,93
<b>Liabilitas</b>				
Simpanan nasabah				
Giro	2,32	0,33	2,33	0,49
Tabungan	0,86	0,21	1,14	0,22
Deposito	6,20	1,43	7,49	1,19
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lain	3,45	0,47	3,97	0,32
Pinjaman yang diterima	3,79	2,51	4,04	2,35
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	4,06	-	4,27	-
Surat berharga yang diterbitkan	8,44	2,95	8,56	2,95

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas (tidak diaudit) terhadap kemungkinan perubahan dalam tingkat suku bunga untuk *banking book*, dengan semua variabel lain yang dimiliki adalah konstan, terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BRI.

2017	
Perubahan Persentase	Dampak Terhadap Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
+/- 1 %	+/- 1.745.607
2016	
Perubahan Persentase	Dampak Terhadap Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
+/- 1 %	+/- 1.122.980



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)**

**4. Risiko Pasar Diluar *Trading Book* (lanjutan)**

**a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)**

Tingkat sensitivitas digunakan untuk menganalisis kemungkinan perubahan suku bunga yang berdampak pada keuntungan dan kerugian portofolio *banking book*. Pada analisa sensitivitas di atas, asumsi perubahan suku bunga untuk portofolio *banking book* dengan basis 1%.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan terhadap risiko tingkat suku bunga (gross) (tidak diaudit):

31 Desember 2017						
Keterangan	Suku bunga mengambang			Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
	Tidak lebih dari 3 bulan	Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun			
<b>Aset</b>						
Kas	-	-	-	-	24.797.782	24.797.782
Giro pada Bank Indonesia	58.155.479	-	-	-	-	58.155.479
Giro pada Bank Lain	5.925.684	-	-	-	-	5.925.684
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	55.105.687	-	-	-	-	55.105.687
Efek-efek						
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	-	-	-	1.762.263	-	1.762.263
Tersedia untuk dijual	-	-	-	130.927.293	-	130.927.293
Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	54.229.880	-	54.229.880
Tagihan wesel ekspor	5.623.717	-	-	-	-	5.623.717
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah						
Tersedia untuk dijual	717.840	-	-	-	-	717.840
Dimiliki hingga jatuh tempo	2.600.000	-	-	-	-	2.600.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	18.011.026	-	18.011.026
Tagihan derivatif	-	-	-	-	145.928	145.928
Kredit yang diberikan						
Mikro	7.510.009	45.099.796	-	200.240.849	-	252.850.654
Ritel	27.667.428	134.890.688	29.309.168	86.839.476	-	278.706.760
Korporasi	36.116.983	151.308.271	-	-	-	187.425.254
Piutang dan pembiayaan Syariah	-	-	-	-	17.864.869	17.864.869
Piutang sewa pembiayaan	19.744	141.583	770.715	1.556.941	-	2.488.983
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	5.693.425	5.693.425
Penyertaan saham*)	-	-	-	-	2.439	2.439
Aset lain-lain**)	-	-	-	-	10.515.442	10.515.442
	<b>199.442.571</b>	<b>331.440.338</b>	<b>30.079.883</b>	<b>493.567.728</b>	<b>59.019.885</b>	<b>1.113.550.405</b>
<b>Liabilitas</b>						
Liabilitas segera	-	-	-	-	6.584.201	6.584.201
Simpanan nasabah						
Giro	96.798.129	-	-	48.731.039	-	145.529.168
Giro <i>Wadiah</i>	-	-	-	-	1.766.901	1.766.901
Giro <i>Mudharabah</i>	-	-	-	-	139.535	139.535
Tabungan	171.075.330	-	-	172.345.407	-	343.420.737
Tabungan <i>Wadiah</i>	-	-	-	-	4.749.652	4.749.652
Tabungan <i>Mudharabah</i>	-	-	-	-	1.270.484	1.270.484
Deposito berjangka	274.832.190	40.992.107	10.593.640	-	-	326.417.937
Deposito berjangka <i>Mudharabah</i>	-	-	-	-	18.362.036	18.362.036

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)**

**4. Risiko Pasar Diluar *Trading Book* (lanjutan)**

**a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)**

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan terhadap risiko tingkat suku bunga (gross) (tidak diaudit) (lanjutan):

31 Desember 2017						
Keterangan	Suku bunga mengambang			Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
	Tidak lebih dari 3 bulan	Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun			
<b>Liabilitas (lanjutan)</b>						
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	5.563.581	29.786	-	-	-	5.593.367
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	2.486.042	-	-	9.650.642	12.136.684
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	200.858	200.858
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	5.693.425	5.693.425
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	30.619.658	-	30.619.658
Pinjaman yang diterima	1.423.160	6.378.546	21.601.303	-	-	29.403.009
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	-	-	-	14.385	972.065	986.450
Liabilitas lain-lain***)	-	-	-	-	2.454.031	2.454.031
	<b>549.692.390</b>	<b>49.886.481</b>	<b>32.194.943</b>	<b>251.710.489</b>	<b>51.843.830</b>	<b>935.328.133</b>
<b>Perbedaan (gap) repricing suku bunga antara aset dan liabilitas keuangan</b>	<b>(350.249.819)</b>	<b>281.553.857</b>	<b>(2.115.060)</b>	<b>241.857.239</b>	<b>7.176.055</b>	<b>178.222.272</b>

31 Desember 2016						
Keterangan	Suku bunga mengambang			Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
	Tidak lebih dari 3 bulan	Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun			
<b>Aset</b>						
Kas	-	-	-	-	25.212.024	25.212.024
Giro pada Bank Indonesia	55.635.946	-	-	-	-	55.635.946
Giro pada Bank Lain	11.022.715	-	-	-	-	11.022.715
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	78.142.754	-	-	-	-	78.142.754
Efek-efek						
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	-	-	-	674.966	-	674.966
Tersedia untuk dijual	-	-	-	69.492.266	-	69.492.266
Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	61.896.870	-	61.896.870
Tagihan wesel ekspor	9.345.472	-	-	-	-	9.345.472
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah						
Tersedia untuk dijual	718.434	-	-	-	-	718.434
Dimiliki hingga jatuh tempo	2.600.000	-	-	-	-	2.600.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	1.557.370	-	1.557.370



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)**

**4. Risiko Pasar Diluar *Trading Book* (lanjutan)**

**a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)**

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan terhadap risiko tingkat suku bunga (gross) (tidak diaudit) (lanjutan):

31 Desember 2016						
Keterangan	Suku bunga mengambang			Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
	Tidak lebih dari 3 bulan	Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun			
<b>Aset (lanjutan)</b>						
Tagihan derivatif	-	-	-	-	91.657	91.657
Kredit yang diberikan						
Mikro	6.391.407	39.348.602	-	176.062.196	-	221.802.205
Ritel	23.213.726	120.684.576	23.750.225	77.232.409	-	244.880.936
Korporasi	30.133.635	146.654.199	-	-	-	176.787.834
Piutang dan pembiayaan						
Syariah	-	-	-	-	17.748.943	17.748.943
Piutang sewa pembiayaan	31.206	155.746	935.350	1.077.998	-	2.200.300
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	5.692.583	5.692.583
Penyertaan saham*)	-	-	-	-	2.439	2.439
Aset lain-lain**)	-	-	-	-	5.526.621	5.526.621
	<b>217.235.295</b>	<b>306.843.123</b>	<b>24.685.575</b>	<b>387.994.075</b>	<b>54.274.267</b>	<b>991.032.335</b>
<b>Liabilitas</b>						
Liabilitas segera	-	-	-	-	5.410.313	5.410.313
Simpanan nasabah						
Giro	97.490.396	-	-	43.928.624	-	141.419.020
Giro <i>Wadiah</i>	-	-	-	-	1.127.843	1.127.843
Tabungan	155.940.955	-	-	142.169.451	-	298.110.406
Tabungan <i>Wadiah</i>	-	-	-	-	4.176.761	4.176.761
Tabungan <i>Mudharabah</i>	-	-	-	-	983.121	983.121
Deposito berjangka	215.329.405	51.934.654	25.765.319	-	-	293.029.378
Deposito berjangka <i>Mudharabah</i>	-	-	-	-	15.679.845	15.679.845
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	2.186.158	42.057	1.323	-	-	2.229.538
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	673.625	673.625	-	5.955.148	-	7.302.398
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	347.217	347.217
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	5.692.583	5.692.583
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	24.800.781	-	24.800.781
Pinjaman yang diterima	320.132	14.297.326	20.274.822	15.890	100.000	35.008.170
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	-	-	-	35.471	973.039	1.008.510
Liabilitas lain-lain***)	-	-	-	-	1.851.087	1.851.087
	<b>471.940.671</b>	<b>66.947.662</b>	<b>46.041.464</b>	<b>216.905.365</b>	<b>36.341.809</b>	<b>838.176.971</b>
<b>Perbedaan (gap) repricing suku bunga antara aset dan liabilitas keuangan</b>	<b>(254.705.376)</b>	<b>239.895.461</b>	<b>(21.355.889)</b>	<b>171.088.710</b>	<b>17.932.458</b>	<b>152.855.364</b>

\*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.

\*\*) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, wesel tagih, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.

\*\*\*) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, hutang koasuransi, reasuransi dan diklasifikasi siap untuk dijual, dana *tabarru'* dan dana *syirkah* temporer.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)**

**4. Risiko Pasar Diluar *Trading Book* (lanjutan)**

**b. Risiko Nilai Tukar**

Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul karena adanya fluktuasi nilai tukar terhadap Rupiah dari posisi valuta asing yang dimiliki BRI. Termasuk dalam posisi valuta asing tersebut yaitu posisi *trading book* yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan transaksi valuta asing dalam jangka pendek maupun posisi *banking book* dalam rangka pengendalian PDN (Posisi Devisa Neto).

Menurut ketentuan Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 perubahan keempat atas PBI No. 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum tanggal 1 Juli 2010, PDN ditetapkan maksimum sebesar 20% modal.

PDN adalah penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan untuk setiap mata uang asing dengan selisih bersih tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap mata uang asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

Berikut adalah PDN (BRI saja) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, per mata uang:

<u>Mata Uang</u>	<u>31 Desember 2017</u>		
	<u>Aset</u>	<u>Liabilitas</u>	<u>PDN</u>
<b><u>Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif</u></b>			
Dolar Amerika Serikat	154.683.931	151.009.523	3.674.408
Renminbi	4.974.959	4.185.484	789.475
Dolar Singapura	1.367.530	711.167	656.363
Euro Eropa	2.657.026	3.109.627	452.601
Yen Jepang	368.820	29.103	339.717
Pound Sterling Inggris	123.919	53.640	70.279
Dolar Australia	145.894	107.965	37.929
Dolar Kanada	7.196	62	7.134
Lain-lain	899.315	98.105	801.210
			<b>6.829.116</b>
Modal (Catatan 48a)			161.751.939
<b>Rasio PDN</b>			<b>4,22%</b>



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)**

**4. Risiko Pasar Diluar *Trading Book* (lanjutan)**

**b. Risiko Nilai Tukar (lanjutan)**

Berikut adalah PDN (BRI saja) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, per mata uang (lanjutan):

Mata Uang	31 Desember 2016		
	Aset	Liabilitas	PDN
<b><u>Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif</u></b>			
Dolar Amerika Serikat	138.725.987	137.134.766	1.591.221
Renminbi	6.598.517	4.678.412	1.920.105
Dolar Singapura	1.377.990	574.284	803.706
Euro Eropa	10.065.634	14.520.265	4.454.631
Yen Jepang	315.709	301.684	14.025
Pound Sterling Inggris	212.224	66.595	145.629
Dolar Australia	185.862	262.620	76.758
Dolar Kanada	12.211	116	12.095
Lain-lain	564.675	47.416	517.259
			<b>9.535.429</b>
Modal (Catatan 48a)			142.910.432
<b>Rasio PDN</b>			<b>6,67%</b>

**5. Analisa Sensitivitas BRI Agro**

Tabel di bawah ini menunjukkan sensitivitas (tidak diaudit) terhadap kemungkinan perubahan tingkat suku bunga dan nilai tukar BRI Agro terhadap laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan semua variabel lain yang dimiliki adalah konstan.

	2017		2016	
	Perubahan Persentase	Dampak Terhadap Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	Perubahan Persentase	Dampak Terhadap Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Risiko tingkat suku bunga	+/- 1%	+/-49.012	+/- 1%	+/-45.421
Risiko nilai tukar	+/- 1%	+/-70	+/- 1%	+/-133

**Manajemen Risiko Operasional**

Penerapan Manajemen Risiko Operasional dilakukan dengan berpedoman pada POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yang mensyaratkan penerapan manajemen risiko mencakup pilar-pilar pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan *limit*, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian internal.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

### 39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

#### Manajemen Risiko Operasional (lanjutan)

Penerapan Manajemen Risiko Operasional yang dimaksud, ditujukan untuk mengelola eksposur risiko operasional yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang dapat mengganggu aktivitas bisnis dan operasional, seperti faktor ketidakcukupan sumber daya manusia, internal proses, kegagalan sistem teknologi informasi, bencana alam dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial bagi bank. Pengelolaan terhadap eksposur risiko operasional di BRI mencakup pengelolaan terhadap eksposur risiko hukum, reputasi, kepatuhan dan stratejik yang terdapat pada setiap proses bisnis dan aktivitas operasional.

Setiap unit kerja operasional BRI bertanggung jawab atas penerapan proses manajemen risiko melalui sistem pengendalian internal dalam aktivitas operasional dan bisnis di masing-masing unit kerja. Hal tersebut dilakukan mulai dari tahap identifikasi, pengukuran, pemantauan hingga pengendalian risiko. Direksi BRI menetapkan fungsi manajemen risiko pada setiap unit kerja mulai dari *level* Kantor Pusat (Divisi/*Desk*), Kantor Wilayah, Kantor Cabang Khusus, Kantor Cabang yang mencakup bidang operasional, pemasaran dan bisnis mikro, dan Kantor Cabang Pembantu, Sentra Layanan BRI Prioritas, dan Unit Kerja Luar Negeri (UKLN).

Manajemen risiko baik yang berada di Kantor Pusat maupun di Kantor Wilayah BRI bertugas dan bertanggung jawab dalam penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko operasional, pengembangan dan implementasi kebijakan/prosedur dan metodologi, pengawasan, pengkajian, serta pemantauan proses manajemen risiko operasional. Disamping itu juga berperan dalam penyusunan dan pemantauan profil risiko BRI, penilaian kecukupan pengelolaan risiko dari suatu produk dan/atau aktivitas baru, serta mendukung unit kerja operasional/*risk owner* dalam mengembangkan budaya sadar risiko, penerapan strategi anti *fraud*, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip manajemen risiko dimaksud. Dalam rangka pembahasan pengelolaan dan perbaikan kontrol atas risiko operasional, Divisi Manajemen Risiko mengkoordinasikan pelaksanaan *Operational Risk Management Committee* (ORMC) yang dilaksanakan setiap triwulanan bersama Divisi/*Desk* dan unit kerja terkait.

Audit Intern selaku *third line of defense* yang meliputi Audit Kantor Pusat dan Kantor Inspektorat BRI seluruh Indonesia bertugas melakukan pemantauan dan validasi atas kecukupan pengendalian internal dalam aktivitas operasional dan bisnis di unit kerja operasional dan konsistensi atas penerapan manajemen risiko operasional di BRI secara *bankwide*.

Penerapan manajemen risiko operasional BRI difasilitasi melalui perangkat manajemen risiko operasional berupa *BRI Operational Risk Assessor (BRIOPRA)* yang mencakup *modul Risk and Control Self Assessment (RCSA)*, Indikator Risiko Utama (IRU)/*Key Risk Indicator (KRI)*, Manajemen Insiden (MI), Forum MR dan Maturitas. Kebijakan Perangkat Manajemen Risiko Operasional telah dikiniikan dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nokep S.17- DIR/DMR/02.2016.

Upaya peningkatan pemahaman atas manajemen risiko difokuskan pada peningkatan budaya sadar risiko dan sosialisasi/pelatihan manajemen risiko yang terus dilakukan kepada seluruh pekerja BRI serta peningkatan kualitas pengendalian risiko pada setiap aktivitas operasional BRI.

#### 1. Risk Control and Self Assessment (RCSA)

RCSA merupakan perangkat manajemen risiko yang bersifat kualitatif dan prediktif yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko berdasarkan dimensi dampak (*impact*) dan kemungkinan kejadian (*likelihood*), RCSA di BRI telah diterapkan di Divisi/*Desk* Kantor Pusat BRI, Kantor Wilayah (KanWil), Kantor Cabang Khusus (KCK), Kantor Cabang (KanCa) yang juga mewakili BRI Unit, Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Sentra Layanan BRI Prioritas.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**Manajemen Risiko Operasional (lanjutan)**

**1. Risk Control and Self Assessment (RCSA) (lanjutan)**

RCSA ditujukan untuk membantu unit kerja dalam mengidentifikasi dan mengukur secara independen risiko operasional pada setiap aktivitas operasional dan bisnis, termasuk melakukan pemantauan dan penentuan langkah-langkah perbaikan/rencana tindak lanjut ke depan.

Pengkinian *risk issue* pada RCSA dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis BRI yang meliputi implementasi produk dan atau aktivitas baru, segmen pasar baru dan persaingan bisnis, perubahan ketentuan internal/eksternal, dan perubahan lainnya yang mempengaruhi eksposur risiko BRI. Penilaian dimaksud dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan data Manajemen Insiden (MI)/*Loss Event Database* (LED), Indikator Risiko Utama (IRU)/*Key Risk Indicator* (KRI) dan Laporan Hasil Audit (LHA). RCSA dilaksanakan secara periodik setiap triwulan, dan frekuensinya akan ditingkatkan apabila terjadi perubahan eksposur risiko yang signifikan.

Laporan hasil konsolidasi RCSA tersebut dilaporkan secara rutin kepada seluruh Direksi BRI dalam *Risk Management Committee* (RMC) yang dilaksanakan setiap triwulan.

**2. Manajemen Insiden (MI) dan Loss Event Database (LED)**

Manajemen Insiden (MI) merupakan *Loss Event Database* (LED) BRI yang mencakup proses pencatatan data kejadian kerugian yang dilakukan untuk setiap jenis kerugian finansial maupun non finansial yang meliputi *actual loss*, *potential loss* dan *near misses* sejak insiden terjadi sampai dengan penyelesaian, termasuk langkah-langkah perbaikan dan penanganan insiden yang dilakukan.

Berdasarkan data kejadian kerugian pada modul MI, dapat dilakukan analisa kejadian kerugian berdasarkan penyebab, aktivitas fungsional, kategori kejadian (*event type*) dan lini bisnis BRI. Sistem informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah preventif pengendalian risiko berbasis pendokumentasian proses penanganan/penyelesaian insiden baik dari sisi non finansial, kerugian finansial dan *recovery* kerugian maupun proses litigasi.

Data kerugian operasional BRI yang didokumentasikan mulai dari tahun 2007 disusun secara konsisten dan sistematis dalam bentuk matriks *database* kerugian yang diklasifikasikan berdasarkan delapan lini bisnis dan tujuh *event type*/kategori kejadian dan dilihat dari dimensi frekuensi kejadian dan *severity/loss*.

Dalam rangka perhitungan beban modal dan ATMR Operasional, BRI menggunakan metode *Basic Indicator Approach* (BIA) yang mulai diterapkan sejak 2010 sesuai dengan ketentuan regulator. Namun demikian, BRI telah melakukan persiapan penerapan *The Standardised Approach* (TSA) dan *Advanced Measurement Approach* (AMA). LED BRI juga telah digunakan dalam simulasi perhitungan beban modal risiko operasional dengan metode *Advanced Measurement Approach* (AMA), baik dengan menggunakan *Extreme Value Theory* (EVT) maupun *Loss Distribution Approach* (LDA). Dalam rangka menuju perhitungan beban modal risiko operasional yang lebih *advanced*, BRI telah menyusun *gap analysis* terkait penerapan TSA dan AMA.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**Manajemen Risiko Operasional (lanjutan)**

**3. Indikator Risiko Utama (IRU)/Key Risk Indicator (KRI)**

IRU/KRI adalah alat untuk mendeteksi peningkatan dan atau penurunan risiko/tren risiko baik yang bersifat *leading* terhadap kejadian kerugian yang belum terjadi maupun yang bersifat historis. Prediksi tren risiko dimaksud ditujukan untuk menentukan rencana tindak lanjut terkait risiko operasional yang muncul sebelum kerugian finansial atau non finansial terjadi.

BRI telah melakukan identifikasi terhadap indikator-indikator risiko utama untuk semua jenis risiko dan menetapkan batasan atau *limit* risiko yang mencerminkan kondisi dan risiko yang dapat diterima (*risk appetite*) BRI. Identifikasi indikator risiko utama dan penetapan batasan (*threshold*) KRI dilakukan dengan menggunakan *best judgement* dengan mempertimbangkan eksposur risiko dan *risk appetite* BRI. Penentuan *threshold* melibatkan Audit Internal, *Risk Owner* dan unit kerja terkait lainnya. Indikator Risiko Utama BRI antara lain tercermin dalam Laporan Profil Risiko *Bankwide* dan Profil Risiko KanWil yang dimonitor secara rutin dan dilaporkan kepada pihak manajemen setiap bulan.

**4. Forum Manajemen Risiko (Forum MR)**

Forum Manajemen Risiko (Forum MR) adalah wadah atau forum pertemuan antara pemimpin unit kerja operasional dengan pejabat setingkat dibawahnya, pekerja atau jajarannya untuk membahas permasalahan-permasalahan (risiko) yang melekat pada aktivitas bisnis atau operasional yang menjadi kendala dalam rangka mencapai target bisnis atau kinerja yang ditetapkan. Pelaksanaan Forum Manajemen Risiko di masing-masing unit kerja BRI diharapkan menjadi salah satu pendukung dan pendorong untuk menumbuhkembangkan budaya sadar risiko di BRI.

**5. Maturitas**

Maturitas merupakan proses *self assessment* terhadap tingkat kemapanan penerapan manajemen risiko di setiap unit kerja BRI yang dilakukan setiap akhir tahun oleh masing-masing pimpinan unit kerja BRI terhadap parameter-parameter tertentu. Dengan melakukan penilaian maturitas diharapkan masing-masing unit kerja dapat mengevaluasi penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan sehingga lebih baik ke depan.

**6. Business Continuity Management (BCM)**

Potensi gangguan/bencana baik yang disebabkan antara lain oleh alam, manusia dan teknologi merupakan ancaman bagi kelangsungan usaha BRI, dimana BRI memiliki unit kerja operasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Direksi BRI memandang perlu untuk mengembangkan dan menerapkan suatu Kebijakan *Business Continuity Management* (BCM) guna melindungi keamanan dan keselamatan jiwa pekerja, melindungi keselamatan jiwa nasabah dan *stakeholders* lainnya yang berada di lingkungan unit kerja operasional BRI (Rencana Penanggulangan Bencana), serta mempertahankan kelangsungan aktivitas-aktivitas bisnis/operasional terpenting, menjaga aset BRI dan memiliki respon yang memadai dalam situasi gangguan/bencana (Rencana Kelangsungan Usaha). Kebijakan BCM diatur melalui Surat Edaran BRI No. S.26-DIR/DMR/12/2016.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**Manajemen Risiko Operasional (lanjutan)**

**6. Business Continuity Management (BCM) (lanjutan)**

Implementasi BCM BRI mencakup seluruh unit kerja BRI yang antara lain dilakukan melalui pembentukan Tim Manajemen Krisis, penyusunan *Call Tree* dan penetapan *alternate sites*. Unit kerja BRI juga telah melakukan Penilaian Risiko Ancaman dan Bencana (PRAB) yang bertujuan untuk mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka persiapan menghadapi ancaman/bencana di masing-masing unit kerja. Pelaksanaan uji coba BCM dilaksanakan setiap tahun dan diprioritaskan pada unit kerja yang rawan bencana termasuk di dalamnya Gedung Kantor Pusat yaitu Gedung BRI 1 dan 2, Gedung IT dan Gedung BRI *Corporate University* serta Asrama Siswa di Ragunan.

Kesiapan organisasi BRI untuk memastikan pelaksanaan prosedur kelangsungan usaha sudah teruji dengan baik pada kejadian-kejadian bencana yang dialami oleh beberapa unit kerja BRI, dimana di Triwulan IV Tahun 2017 terjadi peningkatan status dan aktivitas Gunung Agung, dan gempa bumi dengan kekuatan 6,2 SR yang berpusat di selatan Sukabumi yang berdampak pada operasional dan bisnis Unit Kerja BRI di Denpasar, dan Pangandaran.

**7. Penilaian Kecukupan Pengelolaan Risiko Produk dan/atau Aktivitas Baru (PAB)**

Dalam rangka penerbitan setiap produk dan/atau aktivitas baru (PAB) di BRI, dilakukan proses manajemen risiko yang meliputi penilaian risiko oleh *product owner* terhadap setiap jenis risiko yang mungkin timbul dari penerbitan PAB, termasuk penetapan kontrol dan pengendalian yang ditujukan untuk memitigasi risiko PAB yang dimaksud.

Divisi Manajemen Risiko BRI bertugas melakukan penilaian kecukupan atas pengelolaan risiko PAB dan merekomendasikan hasil penilaian yang dimaksud untuk mendapatkan persetujuan Direktur Bidang Manajemen Risiko BRI. Kebijakan PAB diatur melalui Surat Edaran BRI No. S.89-DIR/MOP/11/2017.

**8. Penerapan Strategi Anti *Fraud* BRI**

Penerapan sistem pengendalian *fraud* telah dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur pengendalian internal BRI, dimana perhatian khusus diberikan terhadap penyelesaian kasus-kasus *fraud* yang terjadi untuk menunjukkan intoleransi manajemen BRI terhadap *fraud* (zero tolerance). Penetapan dan penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagai bagian dari penerapan Manajemen Risiko dalam rangka pencegahan dan pengelolaan kejadian *fraud* di BRI mencakup 4 (empat) pilar, yaitu pilar pencegahan, pilar deteksi, pilar investigasi, pelaporan dan sanksi, pilar evaluasi, pemantauan dan tindak lanjut.

Komitmen Anti *Fraud* ditandatangani oleh Direktur dan Komisaris, jajaran manajemen dan seluruh pekerja BRI sebagai bentuk peningkatan *employee awareness* dan pencegahan *fraud*. Kebijakan Strategi Anti *Fraud* diatur melalui Surat Keputusan BRI No. S.25-DIR/DMR/12/2016.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**40. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN**

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan kewajiban keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal tersebut.

	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar
<b>ASET</b>				
Kas	24.797.782	24.797.782	25.212.024	25.212.024
Giro pada Bank Indonesia	58.155.479	58.155.479	55.635.946	55.635.946
Giro pada bank lain	5.925.684	5.925.684	11.022.715	11.022.715
Penempatan pada bank Indonesia dan bank lain	55.105.687	55.105.687	78.142.754	78.142.754
Efek-efek				
Nilai wajar melalui laba rugi	1.762.263	1.762.263	674.966	674.966
Tersedia untuk dijual	130.927.293	130.927.293	69.492.266	69.492.266
Dimiliki hingga jatuh tempo	54.229.122	56.701.981	61.896.112	62.452.483
Tagihan wesel ekspor	5.623.717	5.623.717	9.345.472	9.345.472
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah				
Tersedia untuk dijual	717.840	717.840	718.434	718.434
Dimiliki hingga jatuh tempo	2.600.000	2.575.239	2.600.000	2.592.245
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	18.011.026	18.011.026	1.557.370	1.557.370
Tagihan derivatif	145.928	145.928	91.657	91.657
Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah	706.846.900	667.849.222	638.543.466	601.402.821
Piutang sewa pembiayaan	2.385.483	2.405.495	2.070.300	2.059.460
Tagihan akseptasi	5.693.425	5.693.425	5.692.583	5.692.583
Penyertaan saham *)	2.439	2.439	2.439	2.439
Aset lain-lain **)	10.515.442	10.515.442	5.526.621	5.526.621
<b>Total</b>	<b>1.083.445.510</b>	<b>1.046.915.942</b>	<b>968.225.125</b>	<b>931.622.256</b>
<b>LIABILITAS</b>				
Liabilitas segera	6.584.201	6.584.201	5.410.313	5.410.313
Simpanan nasabah ***)				
Giro	147.435.604	147.435.604	142.546.863	142.546.863
Tabungan	349.440.873	349.440.873	303.270.288	303.270.288
Deposito berjangka	344.779.973	344.779.973	308.709.223	308.709.223
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya				
Giro	351.951	351.951	239.006	239.006
Tabungan	6.709	6.709	6.497	6.497
Deposito berjangka dan <i>on call</i>	4.059.761	4.059.761	1.028.520	1.028.520
<i>Inter-bank call money</i>	1.174.946	1.174.946	955.515	955.515
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	12.136.684	12.136.684	7.302.398	7.302.398
Liabilitas derivatif	200.858	200.858	347.217	347.217
Liabilitas akseptasi	5.693.425	5.693.425	5.692.583	5.692.583
Surat berharga yang diterbitkan	30.619.658	31.472.743	24.800.781	25.123.300
Pinjaman yang diterima	29.403.009	29.403.009	35.008.170	35.008.170
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	986.450	986.450	1.008.510	1.007.148
Liabilitas lain-lain ****)	2.454.031	2.454.031	1.851.087	1.851.087
<b>Total</b>	<b>935.328.133</b>	<b>936.181.218</b>	<b>838.176.971</b>	<b>838.498.128</b>

\*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.

\*\*) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain, wesel tagih dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.

\*\*\*) Termasuk simpanan nasabah dengan prinsip syariah.

\*\*\*\*) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi dan diklasifikasi siap untuk dijual, dana *tabarru'* dan dana *syirkah* temporer.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**40. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)**

Metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar adalah sebagai berikut:

- a) Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan tertentu, kecuali efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo, kredit yang diberikan, piutang sewa pembiayaan, tagihan dan liabilitas derivatif, serta pinjaman yang diterima, surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman dan surat berharga subordinasi, mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang singkat.

Estimasi nilai wajar terhadap aset keuangan tertentu ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa.

Estimasi nilai wajar terhadap kewajiban keuangan tertentu yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa.

- b) Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah

Nilai wajar untuk efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (broker)/pedagang efek (dealer). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa.

- c) Kredit yang diberikan

Portofolio kredit BRI secara umum terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan suku bunga tetap. Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh BRI. Perkiraan arus kas ini didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar untuk menentukan nilai wajar.

- d) Piutang sewa pembiayaan

Nilai wajar dihitung berdasarkan model diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar.

- e) Tagihan dan liabilitas derivatif

Nilai wajar atas instrumen derivatif yang dinilai menggunakan teknik penilaian dengan menggunakan komponen yang dapat diamati di pasar terutama adalah *swap* suku bunga, *swap* mata uang dan kontrak pertukaran mata uang. Teknik penilaian yang paling banyak digunakan meliputi model penilaian *forward* dan *swap* yang menggunakan perhitungan nilai kini. Model tersebut menggabungkan berbagai komponen yang meliputi kualitas kredit dari *counterparty*, nilai *spot* dan kontrak berjangka serta kurva tingkat suku bunga.

- f) Pinjaman yang diterima, surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman dan surat berharga subordinasi

Nilai wajar dihitung berdasarkan model diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk sisa periode jatuh tempo.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**40. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)**

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan BRI untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan (Catatan 2c):

	31 Desember 2017			
	Nilai wajar	Level 1	Level 2	Level 3
<b>Aset Keuangan</b>				
<b>Nilai wajar melalui laba rugi</b>				
Reksadana	842.935	842.935	-	-
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	385.040	385.040	-	-
Obligasi Pemerintah	194.828	194.828	-	-
Tagihan derivatif	145.928	-	145.928	-
Obligasi	71.378	71.378	-	-
Obligasi subordinasi	50.976	50.976	-	-
Lainnya	217.106	217.106	-	-
	1.908.191	1.762.263	145.928	-
<b>Tersedia untuk dijual</b>				
Obligasi Pemerintah	74.830.836	74.830.836	-	-
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	35.482.251	35.482.251	-	-
Obligasi	10.238.591	10.238.591	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	6.046.221	6.046.221	-	-
Reksadana	1.504.868	1.504.868	-	-
Obligasi subordinasi	796.981	796.981	-	-
<i>Negotiable Certificate of Deposits</i>	764.161	764.161	-	-
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	717.840	717.840	-	-
<i>MAS Bills</i>	431.165	431.165	-	-
<i>U.S. Treasury Bonds</i>	234.941	234.941	-	-
<i>Medium-Term Notes</i>	207.000	207.000	-	-
<i>Singapore Government Securities</i>	184.486	184.486	-	-
Lainnya	205.792	205.792	-	-
	131.645.133	131.645.133	-	-
<b>Dimiliki hingga jatuh tempo</b>				
Obligasi Pemerintah	50.457.329	50.457.329	-	-
Obligasi	4.453.319	4.453.319	-	-
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	2.575.239	2.575.239	-	-
Sertifikat Bank Indonesia				
Syariah (SBIS)	250.000	250.000	-	-
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	597.605	597.605	-	-
<i>Negotiable Certificate of Deposits</i>	265.083	265.083	-	-
<i>Medium-Term notes</i>	150.360	150.360	-	-
Obligasi subordinasi	20.000	20.000	-	-
Lainnya	508.285	508.285	-	-
	59.277.220	59.277.220	-	-
<b>Kredit yang Diberikan dan Piutang</b>				
Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah	667.849.222	-	653.265.720	14.583.502
Piutang Sewa Pembiayaan	2.405.495	-	-	2.405.495
	670.254.717	-	653.265.720	16.988.997
<b>Total Aset Keuangan</b>	<b>863.085.261</b>	<b>192.684.616</b>	<b>653.411.648</b>	<b>16.988.997</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>				
<b>Nilai wajar melalui laba rugi</b>				
Liabilitas derivatif	200.858	-	200.858	-
<b>Kewajiban lainnya</b>				
Surat berharga yang diterbitkan	31.472.743	31.472.743	-	-
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	986.450	986.450	-	-
	32.459.193	32.459.193	-	-
<b>Total Liabilitas Keuangan</b>	<b>32.660.051</b>	<b>32.459.193</b>	<b>200.858</b>	-



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**40. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)**

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan BRI untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan (Catatan 2c) (lanjutan):

	31 Desember 2016			
	Nilai wajar	Level 1	Level 2	Level 3
<b>Aset Keuangan</b>				
<b>Nilai wajar melalui laba rugi</b>				
Reksadana	295.372	295.372	-	-
Tagihan derivatif	91.657	-	91.657	-
Obligasi Pemerintah	84.746	84.746	-	-
Obligasi	64.745	64.745	-	-
Obligasi subordinasi	45.880	45.880	-	-
Lainnya	184.223	184.223	-	-
	766.623	674.966	91.657	-
<b>Tersedia untuk dijual</b>				
Obligasi Pemerintah	41.098.626	41.098.626	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	12.617.484	12.617.484	-	-
Obligasi	6.785.877	6.785.877	-	-
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	6.023.957	6.023.957	-	-
Reksadana	925.784	925.784	-	-
Obligasi subordinasi	812.649	812.649	-	-
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	718.434	718.434	-	-
<i>U.S. Treasury Bonds</i>	347.887	347.887	-	-
<i>MAS Bills</i>	325.918	325.918	-	-
<i>Singapore Government Securities</i>	198.706	198.706	-	-
<i>Medium-Term Notes</i>	195.074	195.074	-	-
Lainnya	160.304	160.304	-	-
	70.210.700	70.210.700	-	-
<b>Dimiliki hingga jatuh tempo</b>				
Obligasi Pemerintah	51.737.965	51.737.965	-	-
Obligasi	4.663.814	4.663.814	-	-
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	2.592.245	2.592.245	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	2.009.884	2.009.884	-	-
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	1.650.000	1.650.000	-	-
<i>Negotiable Certificate of Deposits</i>	1.468.526	1.468.526	-	-
<i>Medium-Term notes</i>	254.022	254.022	-	-
Obligasi subordinasi	60.549	60.549	-	-
Wesel Tagih	26.945	26.945	-	-
Lainnya	580.778	580.778	-	-
	65.044.728	65.044.728	-	-
<b>Kredit yang Diberikan dan Piutang</b>				
Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah	601.402.821	-	579.128.986	22.273.835
Piutang Sewa Pembiayaan	2.059.460	-	-	2.059.460
	603.462.281	-	579.128.986	24.333.295
<b>Total Aset Keuangan</b>	<b>739.484.332</b>	<b>135.930.394</b>	<b>579.220.643</b>	<b>24.333.295</b>

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

#### 41. INFORMASI SEGMENT

Berikut adalah informasi keuangan tertentu untuk BRI dan entitas anak:

a. Nama Perusahaan	Bidang Usaha
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Perbankan Konvensional
PT Bank BRISyariah	Perbankan Syariah
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Perbankan Konvensional
BRI Remittance Co. Limited Hong Kong	Jasa Keuangan
PT Asuransi BRI Life	Asuransi Jiwa
PT BRI Multifinance Indonesia	Perusahaan Pembiayaan

#### b. Segmen Operasi

Untuk kepentingan manajemen, BRI diorganisasikan ke dalam 5 (lima) segmen operasional berdasarkan produk sebagai berikut:

- Segmen Mikro
- Segmen Ritel
- Segmen Korporasi
- Segmen Lainnya
- Entitas Anak

Berikut ini adalah informasi segmen BRI dan entitas anak berdasarkan segmen operasi:

Keterangan	Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal tersebut					
	Mikro	Ritel	Korporasi	Lainnya	Entitas Anak	Total
Pendapatan bunga dan premi - neto	36.447.777	23.067.911	6.857.906	4.054.952	2.962.355	73.390.901
Pendapatan operasional lainnya	6.453.398	8.985.018	899.231	2.355.189	398.231	19.091.067
<b>Total pendapatan</b>	<b>42.901.175</b>	<b>32.052.929</b>	<b>7.757.137</b>	<b>6.410.141</b>	<b>3.360.586</b>	<b>92.481.968</b>
Beban operasional lainnya	(15.371.678)	(15.048.835)	(3.541.484)	(2.350.602)	(2.129.049)	(38.441.648)
Beban CKPN	(7.642.460)	(5.738.482)	(3.278.755)	-	(574.789)	(17.234.486)
<b>Total beban</b>	<b>(23.014.138)</b>	<b>(20.787.317)</b>	<b>(6.820.239)</b>	<b>(2.350.602)</b>	<b>(2.703.838)</b>	<b>(55.676.134)</b>
<b>Pendapatan lainnya-neto</b>	<b>88.970</b>	<b>185.381</b>	<b>327</b>	<b>(73.034)</b>	<b>14.679</b>	<b>216.323</b>
Laba sebelum pajak penghasilan	19.976.007	11.450.993	937.225	3.986.505	671.427	37.022.157
Beban pajak	(4.331.159)	(2.482.782)	(203.207)	(864.347)	(96.328)	(7.977.823)
<b>Laba tahun berjalan</b>	<b>15.644.848</b>	<b>8.968.211</b>	<b>734.018</b>	<b>3.122.158</b>	<b>575.099</b>	<b>29.044.334</b>
<b>Aset segmen</b>						
Kredit	252.850.653	270.601.420	184.548.972	-	31.335.475	739.336.520
CKPN	(12.840.500)	(5.378.019)	(10.843.743)	-	(1.041.875)	(30.104.137)
Non kredit	-	-	-	394.510.217	19.235.611	413.745.828
<b>Total</b>	<b>240.010.153</b>	<b>265.223.401</b>	<b>173.705.229</b>	<b>394.510.217</b>	<b>49.529.211</b>	<b>1.122.978.211</b>
<b>Liabilitas segmen</b>						
Pendanaan	243.794.632	304.439.989	255.091.949	-	38.329.880	841.656.450
Non pendanaan	-	-	-	108.064.289	9.180.209	117.244.498
<b>Total</b>	<b>243.794.632</b>	<b>304.439.989</b>	<b>255.091.949</b>	<b>108.064.289</b>	<b>47.510.089</b>	<b>958.900.948</b>



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**41. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)**

Berikut adalah informasi keuangan tertentu untuk BRI dan entitas anak (lanjutan):

**b. Segmen Operasi (lanjutan)**

Berikut ini adalah informasi segmen BRI dan entitas anak berdasarkan segmen operasi (lanjutan):

Keterangan	Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal tersebut					
	Mikro	Ritel	Korporasi	Lainnya	Entitas Anak	Total
Pendapatan bunga dan premi - neto	34.477.951	19.488.591	6.006.200	3.122.328	2.601.939	65.697.009
Pendapatan operasional lainnya	6.517.052	7.674.882	972.169	1.515.107	319.579	16.998.789
<b>Total pendapatan</b>	<b>40.995.003</b>	<b>27.163.473</b>	<b>6.978.369</b>	<b>4.637.435</b>	<b>2.921.518</b>	<b>82.695.798</b>
Beban operasional lainnya	(14.921.582)	(13.814.825)	(2.994.735)	(1.296.931)	(1.912.532)	(34.940.605)
Beban CKPN	(6.624.372)	(3.355.030)	(3.340.361)	-	(470.888)	(13.790.651)
<b>Total beban Pendapatan lainnya-neto</b>	<b>(21.545.954)</b>	<b>(17.169.855)</b>	<b>(6.335.096)</b>	<b>(1.296.931)</b>	<b>(2.383.420)</b>	<b>(48.731.256)</b>
	123.338	232.923	292.580	(633.642)	(5.971)	9.228
Laba sebelum pajak penghasilan	19.572.387	10.226.541	935.853	2.706.862	532.127	33.973.770
Beban pajak	(4.499.665)	(2.351.067)	(215.151)	(622.304)	(57.592)	(7.745.779)
<b>Laba tahun berjalan</b>	<b>15.072.722</b>	<b>7.875.474</b>	<b>720.702</b>	<b>2.084.558</b>	<b>474.535</b>	<b>26.227.991</b>
<b>Aset segmen</b>						
Kredit	221.802.205	237.808.490	175.680.526	-	28.128.997	663.420.218
CKPN	(10.556.250)	(2.920.658)	(8.467.463)	-	(862.081)	(22.806.452)
Non kredit	-	-	-	348.325.310	12.184.420	360.509.730
	<b>211.245.955</b>	<b>234.887.832</b>	<b>167.213.063</b>	<b>348.325.310</b>	<b>39.451.336</b>	<b>1.001.123.496</b>
<b>Liabilitas segmen</b>						
Pendanaan	213.208.779	285.574.629	225.062.050	-	30.680.916	754.526.374
Non pendanaan	-	-	-	94.697.514	7.607.948	102.305.462
	<b>213.208.779</b>	<b>285.574.629</b>	<b>225.062.050</b>	<b>94.697.514</b>	<b>38.288.864</b>	<b>856.831.836</b>

**c. Segmen Geografis**

Keterangan	Total Pendapatan	
	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2017	2016
Indonesia	91.923.171	82.168.879
Amerika Serikat	500.743	473.146
Hong Kong	5.653	4.452
Singapura	47.246	49.321
Timor Leste	5.155	-
<b>Total</b>	<b>92.481.968</b>	<b>82.695.798</b>

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**41. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)**

c. Segmen Geografis (lanjutan)

Keterangan	<b>Laba sebelum beban pajak</b>	
	<b>Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Indonesia	36.659.600	33.609.647
Amerika Serikat	365.318	346.335
Hong Kong	199	167
Singapura	4.964	17.621
Timor Leste	(7.924)	-
<b>Total</b>	<b>37.022.157</b>	<b>33.973.770</b>

Keterangan	<b>Total aset</b>	
	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
	Indonesia	1.104.377.993
Amerika Serikat	14.847.364	14.065.978
Hong Kong	8.370	5.952
Singapura	3.365.196	2.794.839
Timor Leste	379.288	-
<b>Total</b>	<b>1.122.978.211</b>	<b>1.001.123.496</b>

Keterangan	<b>Total liabilitas</b>	
	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
	Indonesia	940.817.829
Amerika Serikat	14.330.575	13.656.808
Hong Kong	2.557	338
Singapura	3.362.659	2.798.400
Timor Leste	387.328	-
<b>Total</b>	<b>958.900.948</b>	<b>856.831.836</b>

**42. PROGRAM BAGI PEKERJA**

a. Program Pensiun Imbalan Pasti

Efektif tanggal 1 Januari 2007, semua pekerja yang baru diangkat sebagai pekerja tetap tidak diikutsertakan dalam program ini dan hak atas manfaat pensiun diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan dengan memperhatikan faktor penghargaan per tahun masa kerja dan penghasilan dana pensiun. Program dana pensiun BRI dikelola oleh Dana Pensiun BRI (DPBRI). Sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI, kontribusi pekerja BRI untuk iuran pensiun adalah sebesar 7% dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada DPBRI merupakan kontribusi BRI, dimana kontribusi BRI sejak tanggal 1 Oktober 2017 adalah sebesar 26,65% (sebelumnya 25,02%).



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)**

a. Program Pensiun Imbalan Pasti (lanjutan)

Penilaian aktuarial atas beban pensiun BRI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dilakukan oleh PT Bestama Aktuarial, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 4 Januari 2018 dan 5 Januari 2017, telah sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2013) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Tingkat diskonto	7,60%	8,10%
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	7,50	7,50
Tingkat kenaikan imbalan pensiun	4,00	4,00
Tingkat kematian	CSO 1958	CSO 1958
Tingkat cacat jasmaniah	10,0% dari CSO 1958	10,0% dari CSO 1958
Usia pensiun normal	56 tahun	56 tahun

Aset DPBRI terutama terdiri dari tabungan dan deposito, efek-efek, unit penyertaan reksadana, efek beragunan aset, investasi jangka panjang dalam bentuk saham dan properti.

Mutasi atas nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti awal tahun	15.032.520	13.221.843
Beban bunga	1.191.806	1.151.483
Biaya jasa kini	316.354	286.216
Biaya jasa lalu	-	300.295
Pembayaran imbalan kerja (benefit paid)	(954.113)	(853.894)
Kerugian aktuarial	1.163.430	926.577
<b>Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti akhir tahun</b>	<b><u>16.749.997</u></b>	<b><u>15.032.520</u></b>

Mutasi atas nilai wajar aset program masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Nilai wajar aset program awal tahun	16.230.759	14.287.884
Hasil pengembangan riil	2.068.136	2.469.674
Pembayaran iuran-iuran (contributions) pemberi kerja	250.758	255.787
Pembayaran iuran-iuran (contributions) peserta program	70.157	71.308
Pembayaran imbalan kerja (benefit paid)	(954.113)	(853.894)
<b>Aset program akhir tahun</b>	<b><u>17.665.697</u></b>	<b><u>16.230.759</u></b>

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)**

a. Program Pensiun Imbalan Pasti (lanjutan)

Mutasi atas kewajiban program pensiun imbalan pasti masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Saldo awal	-	-
Beban program pensiun imbalan pasti - neto (Catatan 35)	246.012	513.384
Pembayaran iuran periode berjalan	(250.758)	(255.787)
Pengukuran kembali liabilitas (aset) pensiun imbalan pasti-neto	4.746	(257.597)
<b>Saldo akhir</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) pensiun imbalan pasti masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Saldo awal	(1.047.558)	(789.961)
Kerugian aktuarial	1.163.430	926.577
Imbal hasil atas aset program	(779.088)	(1.221.494)
Perubahan atas dampak atas aset di luar bunga neto liabilitas	(379.595)	37.320
<b>Jumlah pengukuran kembali atas aset imbalan pasti - neto</b>	<b>(1.042.811)</b>	<b>(1.047.558)</b>

Beban pensiun imbalan pasti untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 berdasarkan perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut:

	<b>Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember</b>	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Biaya jasa kini	316.354	286.216
Iuran peserta program	(70.157)	(71.308)
Beban bunga - neto	(185)	(1.819)
Biaya jasa lalu	-	300.295
<b>Beban pensiun imbalan pasti (Catatan 35)</b>	<b>246.012</b>	<b>513.384</b>



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)**

b. Program Tunjangan Hari Tua

Karyawan BRI juga memperoleh manfaat dari pemberian Tunjangan Hari Tua (THT) sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI. Program THT dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai BRI.

Iuran THT terdiri dari iuran beban pekerja dan iuran beban BRI sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI.

Berdasarkan perhitungan penilaian aktuarial atas THT masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang dilakukan oleh PT Bestama Aktuarial, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 4 Januari 2018 dan 5 Januari 2017, telah sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2013) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Tingkat diskonto	7,70%	8,30%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,50	7,50
Tingkat kematian	CSO 1958	CSO 1958
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari CSO 1958	10,00% dari CSO 1958

Status THT sesuai dengan penilaian aktuaris masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Nilai Wajar Aset	3.696.006	3.286.981
Nilai Kini Kewajiban THT	(1.927.967)	(1.374.984)
<b>Surplus</b>	<b>1.768.039</b>	<b>1.911.997</b>

Mutasi atas kewajiban Tunjangan Hari Tua masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Beban tunjangan hari tua	59.067	16.809
Pengukuran kembali liabilitas tunjangan hari tua - neto	37.473	74.546
Pembayaran iuran periode berjalan	(96.540)	(91.355)
<b>Saldo akhir Kewajiban</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)**

b. Program Tunjangan Hari Tua (lanjutan)

Pengukuran kembali atas liabilitas Tunjangan Hari Tua masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Saldo awal	202.101	127.555
Kerugian aktuarial	478.657	335.918
Imbal hasil atas (aset) liabilitas program	(138.530)	150.663
Perubahan atas dampak atas aset di luar bunga - neto	(302.654)	(412.035)
<b>Jumlah pengukuran kembali atas liabilitas tunjangan hari tua - neto</b>	<b>239.574</b>	<b>202.101</b>

Perhitungan beban THT untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sesuai dengan perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut:

	<b>Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember</b>	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Biaya jasa kini	106.604	63.621
Iuran peserta program	(46.043)	(43.571)
Beban bunga - neto	(1.494)	(3.241)
<b>Beban THT</b>	<b>59.067</b>	<b>16.809</b>

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, BRI tidak mengakui adanya THT dibayar dimuka dan manfaat THT karena manajemen BRI tidak memiliki keuntungan (benefit) atas aset tersebut dan BRI juga tidak memiliki rencana untuk mengurangi kontribusinya di masa depan.

c. Program Pensiun Iuran Pasti

(i) BRI (Entitas Induk)

Karyawan BRI juga diikutsertakan dalam program pensiun iuran pasti sesuai dengan Keputusan Direksi BRI yang berlaku efektif sejak bulan Oktober 2000. Kontribusi BRI pada program ini yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebesar Rp256.675 dan Rp231.105 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (Catatan 35). Pengelolaan program pensiun iuran pasti dilakukan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI.

(ii) BRI Agro (entitas anak)

BRI Agro menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetapnya yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jumlah kontribusi BRI Agro untuk dana pensiun adalah sebesar 87,8% dari iuran yang sudah ditetapkan berdasarkan tingkat dari masing-masing karyawan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, sebesar Rp766 dan Rp696 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (Catatan 35).



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)**

d. Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

(i) BRI (Entitas Induk)

Perhitungan PHK menggunakan asumsi-asumsi penilaian aktuarial atas kewajiban BRI berkaitan dengan cadangan penyisihan untuk penetapan uang pesangon, uang penghargaan tanda jasa dan ganti kerugian disusun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003, untuk tahun buku masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, yang dilakukan oleh PT Bestama Aktuarial, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 4 Januari 2018 dan 5 Januari 2017 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Tingkat diskonto	7,70%	8,30%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,50	7,50
Tingkat kematian	CSO 1958	CSO 1958
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari CSO 1958	10,00% dari CSO 1958

Mutasi atas kewajiban program pemutusan hubungan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Saldo awal	1.109.732	997.669
Beban pemutusan hubungan kerja (Catatan 35)	304.706	153.280
Pembayaran manfaat aktual oleh BRI	(92.705)	(61.297)
Pengukuran kembali (aset) liabilitas pemutusan hubungan kerja - neto	(109.524)	20.080
<b>Saldo akhir (Catatan 28)</b>	<b><u>1.212.209</u></b>	<b><u>1.109.732</u></b>

Pengukuran kembali atas (aset) liabilitas program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Saldo awal	(27.394)	(47.474)
(Keuntungan)/kerugian aktuarial	(109.524)	20.080
<b>Jumlah pengukuran kembali atas aset pemutusan hubungan kerja - neto</b>	<b><u>(136.918)</u></b>	<b><u>(27.394)</u></b>

Perhitungan beban program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sesuai dengan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	<u>Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember</u>	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Biaya jasa kini	207.821	144.737
Beban bunga	96.885	93.544
Biaya jasa lalu	-	(85.001)
<b>Beban PHK (Catatan 35)</b>	<b><u>304.706</u></b>	<b><u>153.280</u></b>

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)**

d. Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (lanjutan)

(ii) BRISyariah (Entitas Anak)

Entitas anak memberikan program pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Tabel berikut menyajikan ringkasan komponen beban pemutusan hubungan kerja yang dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian untuk kewajiban pemutusan hubungan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, sesuai perhitungan PT Bestama Aktuaria, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 4 Januari 2018 dan 4 Januari 2017, dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Tingkat diskonto	7,10%	8,10%
Tingkat kenaikan penghasilan	5,00	5,00
Tingkat kematian	TMI III 2011	TMI III 2011

Mutasi atas kewajiban program pemutusan hubungan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Saldo awal	58.108	46.966
Beban pemutusan hubungan kerja (Catatan 35)	13.214	12.599
Pembayaran manfaat aktual oleh BRISyariah	(68.254)	(2.723)
Pengukuran kembali liabilitas pemutusan hubungan kerja - neto	9.761	1.266
<b>Saldo akhir (Catatan 28)</b>	<b>12.829</b>	<b>58.108</b>

Pengukuran kembali atas (aset) liabilitas Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Saldo awal	(14.363)	(15.629)
Kerugian aktuarial	9.761	1.266
<b>Jumlah pengukuran kembali atas aset pemutusan hubungan kerja - neto</b>	<b>(4.602)</b>	<b>(14.363)</b>



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)**

d. Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (lanjutan)

(ii) BRISyariah (Entitas Anak) (lanjutan)

Perhitungan beban program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sesuai dengan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	<b>Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Biaya jasa kini	9.528	8.034
Beban bunga	3.686	4.565
<b>Beban PHK (Catatan 35)</b>	<b>13.214</b>	<b>12.599</b>

(iii) BRI Agro (Entitas Anak)

Entitas anak memberikan program pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Tabel berikut menyajikan ringkasan komponen beban pemutusan hubungan kerja yang dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian untuk kewajiban pemutusan hubungan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, sesuai perhitungan PT Bestama Aktuarial, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 4 Januari 2018 dan 5 Januari 2017, dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Tingkat diskonto	7,50%	8,30%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,00	8,00
Tingkat kematian	TMI 2011	TMI 2011
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% TMI 2011	10,00% TMI 2011

Mutasi atas kewajiban program pemutusan hubungan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Saldo awal	35.519	27.420
Beban pemutusan hubungan kerja (Catatan 35)	8.052	10.245
Pembayaran manfaat aktual oleh BRI Agro	(2.245)	(1.540)
Pengukuran kembali aset pemutusan hubungan kerja - neto	(2.269)	(606)
<b>Saldo akhir (Catatan 28)</b>	<b>39.057</b>	<b>35.519</b>

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)**

d. Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (lanjutan)

(iii) BRI Agro (Entitas Anak) (lanjutan)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) pemutusan hubungan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Saldo awal	442	1.048
Keuntungan aktuarial	(2.269)	(606)
<b>Jumlah pengukuran kembali atas (aset) liabilitas pemutusan hubungan kerja - neto</b>	<b>(1.827)</b>	<b>442</b>

Perhitungan beban pemutusan hubungan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sesuai dengan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	<b>Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember</b>	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Biaya jasa kini	4.991	3.212
Beban bunga	3.061	2.542
Biaya jasa lalu	-	4.491
<b>Beban PHK (Catatan 35)</b>	<b>8.052</b>	<b>10.245</b>

(iv) BRI Life (Entitas Anak)

Entitas anak memberikan program pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Tabel berikut menyajikan ringkasan komponen beban pemutusan hubungan kerja yang dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian untuk kewajiban pemutusan hubungan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, sesuai perhitungan PT Padma Radya Aktuarial, aktuaris independen, dalam laporannya pada tanggal 4 Januari 2018 dan 6 Januari 2017, dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Tingkat diskonto	7,00%	8,25%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,00	7,00
Tingkat kematian	TMI III 2011	TMI III 2011
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% TMI III 2011	10,00% TMI III 2011



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)**

d. Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (lanjutan)

(iv) BRI Life (Entitas Anak) (lanjutan)

Mutasi atas kewajiban program pemutusan hubungan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Saldo awal	48.692	41.044
Beban pemutusan hubungan kerja (Catatan 35)	8.098	4.711
Pembayaran manfaat aktual oleh BRI Life	(44)	(760)
Pengukuran kembali liabilitas pemutusan hubungan kerja - neto	3.960	3.697
<b>Saldo akhir (Catatan 28)</b>	<b><u>60.706</u></b>	<b><u>48.692</u></b>

Pengukuran kembali atas (aset) liabilitas Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Saldo awal	6.598	2.901
Kerugian aktuarial	3.960	3.697
<b>Jumlah pengukuran kembali atas liabilitas pemutusan hubungan kerja - neto</b>	<b><u>10.558</u></b>	<b><u>6.598</u></b>

Perhitungan beban program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sesuai dengan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	<b>Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember</b>	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Biaya jasa kini	4.124	2.798
Beban bunga	3.974	3.682
Biaya jasa lalu	-	(1.769)
<b>Beban PHK (Catatan 35)</b>	<b><u>8.098</u></b>	<b><u>4.711</u></b>

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)**

d. Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (lanjutan)

(v) BRI Finance (Entitas Anak)

Entitas anak memberikan program pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Tabel berikut menyajikan ringkasan komponen beban pemutusan hubungan kerja yang dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian untuk kewajiban pemutusan hubungan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, sesuai perhitungan PT Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa, aktuaris independen, dalam laporannya pada tanggal 2 Januari 2018 dan 5 Januari 2017, dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Tingkat diskonto	7,00%	8,00%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,00	7,00
Tingkat kematian	TMI 2011	TMI 2011
Tingkat cacat jasmaniah	5,00% TMI 2011	5,00% TMI 2011

Mutasi atas kewajiban program pemutusan hubungan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Saldo awal	9.168	16.055
Beban pemutusan hubungan kerja (Catatan 35)	1.871	2.490
Pembayaran manfaat aktual oleh BRI Finance	(971)	(5.074)
Pengukuran kembali liabilitas (aset) pemutusan hubungan kerja - neto	608	(4.303)
<b>Saldo akhir (Catatan 28)</b>	<b>10.676</b>	<b>9.168</b>

Pengukuran kembali atas (aset) liabilitas Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Saldo awal	(5.742)	(1.439)
Kerugian/(keuntungan) aktuarial	608	(4.303)
<b>Jumlah pengukuran kembali atas aset pemutusan hubungan kerja - neto</b>	<b>(5.134)</b>	<b>(5.742)</b>



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)**

d. Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (lanjutan)

(v) BRI Finance (Entitas Anak) (lanjutan)

Perhitungan beban pemutusan hubungan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sesuai dengan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	<b>Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Biaya jasa kini	1.133	1.061
Beban bunga	733	1.429
Biaya jasa lalu	5	-
<b>Beban PHK (Catatan 35)</b>	<b>1.871</b>	<b>2.490</b>

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Pekerja BRI juga memiliki imbalan kerja jangka panjang, seperti penghargaan tanda jasa, cuti besar dan Masa Persiapan Pensiun (MPP).

(i) Cadangan penghargaan tanda jasa

i. BRI (Entitas Induk)

Perhitungan aktuarial atas penghargaan tanda jasa masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang dilakukan oleh PT Bestama Aktuarial, aktuarial independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 4 Januari 2018 dan 5 Januari 2017 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Tingkat diskonto	7,70%	8,30%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,50	7,50
Tingkat kenaikan harga emas	10,00	10,00
Tingkat kematian	CSO 1958	CSO 1958
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari CSO 1958	10,00% dari CSO 1958

Nilai kini kewajiban untuk cadangan atas penghargaan tanda jasa berdasarkan perhitungan aktuarial adalah masing-masing sebesar Rp1.061.952 dan Rp940.341 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Mutasi untuk cadangan atas penghargaan tanda jasa masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Saldo awal kewajiban	940.341	833.576
Beban penghargaan tanda jasa (Catatan 35)	155.894	150.349
Pembayaran manfaat aktual oleh BRI	(34.283)	(43.584)
<b>Kewajiban penghargaan tanda jasa (Catatan 28)</b>	<b>1.061.952</b>	<b>940.341</b>

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)**

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(i) Cadangan penghargaan tanda jasa (lanjutan)

i. BRI (Entitas Induk) (lanjutan)

Beban penghargaan tanda jasa untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	<b>Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Biaya jasa kini	83.175	72.442
Beban bunga	86.831	76.320
(Keuntungan)/kerugian aktuarial yang diakui	(14.112)	1.587
<b>Beban penghargaan tanda jasa (Catatan 35)</b>	<b>155.894</b>	<b>150.349</b>

ii. BRI Agro (Entitas Anak)

Entitas anak juga memberikan program penghargaan tanda jasa kepada para pekerjanya sebagai salah satu bentuk imbalan kerja.

Perhitungan aktuarial atas penghargaan tanda jasa entitas anak dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2017 yang dilakukan oleh PT Bestama Aktuarial, aktuaris independen, dalam laporannya pada tanggal 4 Januari 2018 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>
Tingkat diskonto	7,00%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,50
Tingkat kenaikan harga emas	5,00
Tingkat kematian	TMI 2011
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% TMI 2011

Nilai kini kewajiban untuk cadangan atas penghargaan tanda jasa berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebesar Rp719 pada tanggal 31 Desember 2017.

Mutasi untuk cadangan atas penghargaan tanda jasa pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>
Saldo awal kewajiban	-
Beban penghargaan tanda jasa (Catatan 35)	719
Pembayaran manfaat aktual oleh BRI Agro	(422)
<b>Kewajiban penghargaan tanda jasa (Catatan 28)</b>	<b>297</b>



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)**

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(i) Cadangan penghargaan tanda jasa (lanjutan)

ii. BRI Agro (Entitas Anak) (lanjutan)

Beban penghargaan tanda jasa untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	<b>Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2017</b>
Biaya jasa kini	274
Beban bunga	-
Kerugian aktuarial yang diakui	25
Biaya jasa lalu	420
<b>Beban penghargaan tanda jasa (Catatan 35)</b>	<b>719</b>

iii. BRI Life (Entitas Anak)

Entitas anak juga memberikan program penghargaan tanda jasa kepada para pekerjanya sebagai salah satu bentuk imbalan kerja.

Perhitungan aktuarial atas penghargaan tanda jasa entitas anak dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 yang dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuarial, aktuaris independen, dalam laporannya pada tanggal 4 Januari 2018 dan 6 Januari 2017, dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Tingkat diskonto	7,00%	8,25%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,00	7,00
Tingkat kematian	TMI III 2011	TMI III 2011
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% TMI 2011	10,00% TMI 2011

Nilai kini kewajiban untuk cadangan atas penghargaan tanda jasa berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebesar Rp10.289 dan Rp10.623 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Mutasi untuk cadangan atas penghargaan tanda jasa masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Saldo awal kewajiban (Pendapatan)/beban penghargaan tanda jasa (Catatan 35)	10.623	9.764
Pembayaran manfaat aktual oleh BRI Life	(51)	2.131
	(283)	(1.272)
<b>Kewajiban penghargaan tanda jasa (Catatan 28)</b>	<b>10.289</b>	<b>10.623</b>

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)**

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(i) Cadangan penghargaan tanda jasa (lanjutan)

iii. BRI Life (Entitas Anak) (lanjutan)

Beban penghargaan tanda jasa untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	<b>Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Biaya jasa kini	935	729
Beban bunga	765	602
(Keuntungan)/kerugian aktuarial yang diakui	(1.305)	1.709
Biaya jasa lalu	(446)	(909)
<b>(Pendapatan)/beban penghargaan tanda jasa (Catatan 35)</b>	<b>(51)</b>	<b>2.131</b>

iv. BRI Finance (Entitas Anak)

Entitas anak juga memberikan program penghargaan tanda jasa kepada para pekerjanya sebagai salah satu bentuk imbalan kerja.

Perhitungan aktuarial atas penghargaan tanda jasa entitas anak dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang dilakukan oleh PT Jasa Aktuarial Praptasentosa Gunajasa, aktuaris independen, dalam laporannya pada tanggal 2 Januari 2018 dan 5 Januari 2017, dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Harga emas (nilai Rupiah penuh)	568.320	502.750
Rata-rata usia di bawah usia pensiun	37,17	36,00
Rata-rata usia di atas usia pensiun	0,00	0,00
Rata-rata masa kerja	8,63	7,71

Nilai kini kewajiban untuk cadangan atas penghargaan tanda jasa berdasarkan perhitungan aktuarial masing-masing sebesar Rp264 dan Rp244 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Mutasi untuk cadangan atas penghargaan tanda jasa masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Saldo awal kewajiban	244	356
Beban/(pendapatan) yang diakui dalam laba rugi (Catatan 35)	26	(65)
Pembayaran manfaat aktual oleh BRI Finance	(6)	(47)
<b>Kewajiban penghargaan tanda jasa (Catatan 28)</b>	<b>264</b>	<b>244</b>



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)**

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(i) Cadangan penghargaan tanda jasa (lanjutan)

iv. BRI Finance (Entitas Anak) (lanjutan)

Beban penghargaan tanda jasa untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	<b>Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Biaya jasa kini	25	26
Beban bunga	20	(122)
(Keuntungan)/kerugian aktuarial yang diakui	(19)	31
<b>Beban/(pendapatan) penghargaan tanda jasa (Catatan 35)</b>	<b>26</b>	<b>(65)</b>

(ii) Cuti besar

i. BRI (Entitas Induk)

Perhitungan aktuarial atas cuti besar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang dilakukan oleh PT Bestama Aktuarial, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 4 Januari 2018 dan 5 Januari 2017, dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Tingkat diskonto	7,70%	8,30%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,50	7,50
Tingkat kematian	CSO 1958	CSO 1958
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari CSO 1958	10,00% dari CSO 1958

Nilai kini kewajiban untuk cadangan atas cuti besar berdasarkan perhitungan aktuarial adalah masing-masing sebesar Rp1.517.614 dan Rp1.314.399 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Mutasi untuk cadangan atas cuti besar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Saldo awal kewajiban	1.314.399	1.119.535
Beban cuti besar (Catatan 35)	292.476	308.428
Pembayaran manfaat aktual oleh BRI	(89.261)	(113.564)
<b>Kewajiban cuti besar (Catatan 28)</b>	<b>1.517.614</b>	<b>1.314.399</b>

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)**

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(ii) Cuti besar (lanjutan)

i. BRI (Entitas Induk) (lanjutan)

Beban cuti besar untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	<b>Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Biaya jasa kini	217.623	187.174
Beban bunga	114.422	104.070
(Kerugian)/keuntungan aktuarial yang diakui	(39.569)	17.184
<b>Beban cuti besar (Catatan 35)</b>	<b>292.476</b>	<b>308.428</b>

ii. BRISyariah (Entitas Anak)

Entitas anak juga memberikan program cuti besar kepada para pekerjanya sebagai salah satu bentuk imbalan kerja.

Perhitungan aktuarial atas cuti besar entitas anak dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang dilakukan oleh PT Bestama Aktuarial, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 4 Januari 2018 dan 4 Januari 2017, dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Tingkat diskonto	7,10%	8,10%
Tingkat kenaikan penghasilan	5,00	5,00
Tingkat kematian	TMI III 2011	TMI III 2011
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% TMI 2011	10,00% TMI 2011

Nilai kini kewajiban untuk cadangan atas cuti besar berdasarkan perhitungan aktuarial adalah masing-masing sebesar Rp30.304 dan Rp25.294 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Mutasi atas kewajiban program cuti besar pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Saldo awal kewajiban	25.294	32.828
Beban cuti besar - neto (Catatan 35)	10.046	985
Pembayaran manfaat aktual oleh BRISyariah	(5.036)	(8.519)
<b>Kewajiban cuti besar (Catatan 28)</b>	<b>30.304</b>	<b>25.294</b>



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)**

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(ii) Cuti besar (lanjutan)

ii. BRISyariah (Entitas Anak) (lanjutan)

Beban cuti besar entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	<b>Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Biaya jasa kini	5.372	6.485
Beban bunga	1.721	2.927
Kerugian/(keuntungan) aktuarial yang diakui	2.953	(8.427)
<b>Beban cuti besar (Catatan 35)</b>	<b>10.046</b>	<b>985</b>

iii. BRI Agro (Entitas Anak)

Entitas anak juga memberikan program cuti besar kepada para pekerjanya sebagai salah satu bentuk imbalan kerja.

Perhitungan aktuarial atas cuti besar entitas anak dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang dilakukan oleh PT Bestama Aktuarial, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 4 Januari 2018 dan 5 Januari 2017, dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Tingkat diskonto	6,00%	7,50%
Tingkat kenaikan penghasilan	6,50	8,00
Tingkat kematian	TMI 2011	TMI 2011
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% TMI 2011	10,00% TMI 2011

Nilai kini kewajiban untuk cadangan atas cuti besar entitas anak berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebesar Rp3.026 dan Rp2.202 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Mutasi untuk cadangan atas cuti besar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Saldo awal kewajiban	2.202	1.957
Beban cuti besar (Catatan 35)	1.304	1.046
Pembayaran manfaat aktual oleh BRI Agro	(480)	(801)
<b>Kewajiban cuti besar (Catatan 28)</b>	<b>3.026</b>	<b>2.202</b>

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)**

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(ii) Cuti besar (lanjutan)

iii. BRI Agro (Entitas Anak) (lanjutan)

Beban cuti besar entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	<b>Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Biaya jasa kini	1.081	844
Beban bunga	188	172
Kerugian aktuarial yang diakui	35	30
<b>Beban cuti besar (Catatan 35)</b>	<b>1.304</b>	<b>1.046</b>

iv. BRI Life (Entitas Anak)

Entitas anak juga memberikan program cuti besar kepada para pekerjanya sebagai salah satu bentuk imbalan kerja.

Perhitungan aktuarial atas cuti besar entitas anak dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuarial, aktuaris independen, dalam laporannya pada tanggal 4 Januari 2018 dan 6 Januari 2017, dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Tingkat diskonto	7,00%	8,25%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,00	7,00
Tingkat kematian	TMI 2011	TMI 2011
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% TMI 2011	10,00% TMI 2011

Nilai kini kewajiban untuk cadangan atas cuti besar entitas anak berdasarkan perhitungan aktuarial masing-masing sebesar Rp9.050 dan Rp7.542 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Mutasi untuk cadangan atas cuti besar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Saldo awal kewajiban	7.542	2.221
Beban cuti besar (Catatan 35)	2.086	6.161
Pembayaran manfaat aktual oleh BRI Life	(578)	(840)
<b>Kewajiban cuti besar (Catatan 28)</b>	<b>9.050</b>	<b>7.542</b>



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)**

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(ii) Cuti besar (lanjutan)

iv. BRI Life (Entitas Anak) (lanjutan)

Beban cuti besar entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	<b>Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Biaya jasa kini	2.619	1.990
Biaya jasa lalu	-	2.678
Beban bunga	533	412
(Keuntungan)/kerugian aktuarial yang diakui	(1.066)	1.081
<b>Beban cuti besar (Catatan 35)</b>	<b>2.086</b>	<b>6.161</b>

v. BRI Finance (Entitas Anak)

Entitas anak juga memberikan program cuti besar kepada para pekerjanya sebagai salah satu bentuk imbalan kerja.

Perhitungan aktuarial atas cuti besar entitas anak dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang dilakukan oleh PT Jasa Aktuarial Praptasentosa Gunajasa, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 2 Januari 2018 dan 5 Januari 2017, dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Tingkat diskonto	7,00%	8,00%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,00	7,00
Tingkat kematian	5,00% TMI 2011	5,00% TMI 2011
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% TMI 2011	10,00% TMI 2011

Nilai kini kewajiban untuk cadangan atas cuti besar entitas anak berdasarkan perhitungan aktuarial masing-masing sebesar Rp654 dan Rp317 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Mutasi untuk cadangan atas cuti besar pada masing-masing tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Saldo awal kewajiban	317	485
Beban cuti besar (Catatan 35)	385	181
Pembayaran manfaat aktual oleh BRI Finance	(48)	(349)
<b>Kewajiban cuti besar (Catatan 28)</b>	<b>654</b>	<b>317</b>

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)**

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(ii) Cuti besar (lanjutan)

v. BRI Finance (Entitas Anak) (lanjutan)

Beban cuti besar entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Biaya jasa kini	83	48
Beban bunga	25	43
Kerugian aktuarial yang diakui	277	90
<b>Beban cuti besar (Catatan 35)</b>	<b>385</b>	<b>181</b>

(iii) Program Kesehatan Pasca Kerja BPJS

i. BRI (Entitas Induk)

Perhitungan aktuarial atas program kesehatan pasca kerja BPJS pada tanggal 31 Desember 2017 dan yang dilakukan oleh PT Bestama Aktuarial, aktuaris independen, dalam laporannya pada tanggal 4 Januari 2018 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2017</u>
Tingkat diskonto	7,60%
Skala kenaikan iuran BPJS	4,00
Tingkat kematian	CSO 1958
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari CSO 1958

Nilai kini kewajiban atas program kesehatan pasca kerja di BPJS berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebesar Rp243.259 pada tanggal 31 Desember 2017.

Mutasi untuk cadangan atas program kesehatan pasca kerja BPJS pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2017</u>
Saldo awal kewajiban	-
Beban program kesehatan pasca kerja BPJS	243.259
<b>Kewajiban program kesehatan pasca kerja BPJS (Catatan 28)</b>	<b>243.259</b>



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)**

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(iii) Program Kesehatan Pasca Kerja BPJS (lanjutan)

i. BRI (Entitas Induk) (lanjutan)

Beban program kesehatan pasca kerja di BPJS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	<b>Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2017</b>
Biaya jasa kini	2.450
Biaya jasa lalu	240.809
<b>Beban program kesehatan pasca kerja BPJS (Catatan 35)</b>	<b>243.259</b>

**43. INFORMASI MENGENAI KOMITMEN DAN KONTINJENSI**

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
<b><u>Komitmen</u></b>		
Tagihan komitmen		
Pembelian <i>spot</i> dan mata uang asing	4.038.459	12.219.746
Liabilitas komitmen		
Fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur yang belum digunakan	107.073.032	120.916.072
Penjualan <i>spot</i> dan mata uang asing L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor (Catatan 27c)	8.980.671	8.541.152
Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur yang belum digunakan	105.497	254.649
	129.159.708	136.821.075
<b>Komitmen - neto</b>	<b>(125.121.249)</b>	<b>(124.601.329)</b>

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**43. INFORMASI MENGENAI KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)**

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
<b><u>Kontinjensi</u></b>		
Tagihan kontinjensi		
Tagihan bunga dalam penyelesaian	70.905	45.208
Liabilitas kontinjensi		
Garansi yang diterbitkan (Catatan 27c) dalam bentuk:		
Garansi bank	23.188.654	20.684.825
Standby L/C	10.841.726	3.838.190
	34.030.380	24.523.015
<b>Kontinjensi - neto</b>	<b>(33.959.475)</b>	<b>(24.477.807)</b>

**44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI**

Dalam kegiatan normal usaha, BRI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

<b>Pihak-pihak berelasi</b>	<b>Jenis hubungan</b>	<b>Unsur transaksi pihak berelasi</b>
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	Kepemilikan saham mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI	Efek-efek, Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah
PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur	Hubungan kepemilikan melalui Dana Pensiun BRI	Asuransi atas aset tetap
PT Bahana Artha Ventura	Hubungan kepemilikan	Penyertaan saham
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Asuransi atas aset tetap
BDH Khusus Bialugri Kementerian Pertahanan	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
Bendahara Khusus Direktorat Angkatan Darat (DITKUAD)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Efek-efek



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
Perum Bulog	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor, Kredit yang diberikan
Perum Djawatan Angkoetan Motor Republik Indonesia (DAMRI)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan syariah
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi
PT Aero Systems Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor
PT Bank BNI Syariah	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Efek-efek, Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Efek-efek
PT Bank Syariah Mandiri	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Efek-efek
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor, Kredit yang diberikan, Garansi yang diterbitkan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
PT Indonesia Power	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Inti Pindad Mitra Sejati	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor
PT Inti Konten Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan syariah
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, Garansi yang diterbitkan
PT Koperasi Karyawan BRI Syariah	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan syariah
Koperasi Swakarya BRI	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan syariah
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor, Kredit yang diberikan, Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi
PT Pegadaian (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Kredit yang diberikan, Piutang dan pembiayaan syariah
PT Pembangkitan Jawa Bali	Hubungan kepemilikan Melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi, Garansi yang diterbitkan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Pertamina (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor, Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi, Garansi yang diterbitkan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Pertamina Lubricants	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, Garansi yang diterbitkan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Pindad (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor, Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Pindad Enjiniring Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Railink	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Semen Indonesia Logistik	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Telekomunikasi Selular	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi, Garansi yang diterbitkan
PT Waskita Beton Precast Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan syariah
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi, Garansi yang diterbitkan
PT Wijaya Karya Industri Energi	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi
Karyawan kunci	Hubungan pengendalian kegiatan perusahaan	Kredit yang diberikan, Piutang dan pembiayaan syariah

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>Aset</b>		
Giro pada bank lain (Catatan 5)		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	11.943	10.640
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.189	12.060
PT Bank BNI Syariah	79	74
PT Bank Syariah Mandiri	33	74
	21.244	22.848
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (Catatan 6)		
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	135.675	200.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	135.675	200.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	43.400	45.400
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	15.750	12.220
PT Bank BNI Syariah	2.000	2.000
	332.500	459.620
Efek-efek (Catatan 7)		
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	123.062.695	92.283.523
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	1.386.317	1.151.487
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.367.453	1.486.711
PT Pupuk Indonesia (Persero)	970.870	116.011
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	682.133	142.070
PT Pegadaian (Persero)	627.632	569.660
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	617.343	931.236
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	480.181	296.580
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	433.477	448.067
PT Indonesia Power	383.547	-
Lain-lain	4.117.968	3.621.611
	134.129.616	101.046.956
Tagihan wesel ekspor (Catatan 8)		
PT Semen Indonesia Logistik	8.352	-
PT Pindad Enjiniring Indonesia	1.225	6.398
PT Pertamina (Persero)	1.118	932
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	-	161.800
Perum Bulog	-	60.143
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	-	5.031
PT Aero Systems Indonesia	-	4.275
PT Pindad (Persero)	-	1.191
PT Pertamina Lubricants	-	485
PT Inti Pindad Mitra Sejati	-	457
	10.695	240.712
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah (Catatan 9)		
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	3.317.840	3.318.434



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
<b>Aset (lanjutan)</b>		
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Catatan 10)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	229.983
Kredit yang diberikan (Catatan 12)		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	27.039.931	27.446.991
Perum Bulog	9.049.660	16.112.248
PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (Persero)	6.100.000	-
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3.801.438	3.864.676
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	3.450.797	4.307.997
PT Pegadaian (Persero)	3.037.521	3.835.110
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	2.438.770	1.735.635
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	2.375.195	1.968.132
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	2.218.288	1.655.684
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	1.939.755	2.377.804
Karyawan kunci	38.457	43.174
Lain-lain	34.746.309	30.365.164
	<u>96.236.121</u>	<u>93.712.615</u>
Piutang dan Pembiayaan Syariah (Catatan 13)		
PT Pegadaian (Persero)	400.000	300.000
PT Waskita Beton Precast Tbk	400.000	-
PT Koperasi Karyawan BRI Syariah	105.436	112.576
Perum DAMRI	56.381	31.700
Koperasi Swakarya BRI	14.251	45.366
PT Inti Konten Indonesia	3.850	3.850
Karyawan kunci	17.180	13.346
	<u>997.098</u>	<u>506.838</u>
Tagihan Akseptasi (Catatan 15)		
PT Pertamina (Persero)	607.723	-
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	274.365	66.490
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	189.270	119.260
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	136.471	-
PT Pindad (Persero)	50.094	93.410
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	24.064	163.023
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	7.953	16.087
PT Wijaya Karya Industri Energi	7.270	1.192
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	4.331	-
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	4.022	-
Lainnya	7.674	35.183
	<u>1.313.237</u>	<u>494.645</u>
Penyertaan Saham (Catatan 16)		
PT Bahana Artha Ventura	71.382	-
<b>Total aset dari pihak-pihak berelasi</b>	<b>236.429.733</b>	<b>200.032.651</b>
<b>Total aset konsolidasian</b>	<b>1.126.248.442</b>	<b>1.003.644.426</b>
<b>Persentase total aset dari pihak-pihak berelasi terhadap total aset konsolidasian</b>	<b>20,99%</b>	<b>19,93%</b>

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

<b>44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)</b>	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
<b><u>Liabilitas</u></b>		
Giro (Catatan 20)		
Entitas dan lembaga pemerintah	45.075.744	44.484.819
Karyawan kunci	1.547	632
Lain-lain	19.629	23.533
	<u>45.096.920</u>	<u>44.508.984</u>
Tabungan (Catatan 21)		
Entitas dan lembaga pemerintah	80.414	18.806
Karyawan kunci	147.366	86.529
Lain-lain	11.933	6.150
	<u>239.713</u>	<u>111.485</u>
Deposito Berjangka (Catatan 22)		
Entitas dan lembaga pemerintah	93.732.744	79.043.913
Karyawan kunci	120.479	118.601
Lain-lain	1.592.220	828.258
	<u>95.445.443</u>	<u>79.990.772</u>
Simpanan dari Bank lain dan lembaga keuangan lainnya (Catatan 23)		
Entitas dan lembaga pemerintah	1.146.162	499.475
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (Catatan 24)		
Entitas dan lembaga pemerintah	1.465.014	1.454.477
Liabilitas Akseptasi (Catatan 15)		
Entitas dan lembaga pemerintah	1.313.237	494.645
Pinjaman yang Diterima (Catatan 26)		
Entitas dan lembaga pemerintah	-	100.000
Kompensasi kepada manajemen karyawan kunci (Catatan 42)		
Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti	275.514	369.514
Nilai kini kewajiban pemutusan hubungan kerja	50.643	76.513
Nilai kini kewajiban tunjangan hari tua	61.989	68.082
Nilai kini kewajiban cuti besar	37.308	42.327
Nilai kini kewajiban penghargaan tanda jasa	29.243	37.548
	<u>454.697</u>	<u>593.984</u>
<b>Total liabilitas kepada pihak-pihak berelasi</b>	<b><u>145.161.186</u></b>	<b><u>127.753.822</u></b>
<b>Total liabilitas konsolidasian</b>	<b><u>958.900.948</u></b>	<b><u>856.831.836</u></b>
<b>Persentase total liabilitas kepada pihak-pihak berelasi terhadap total liabilitas konsolidasian</b>	<b><u>15,14%</u></b>	<b><u>14,91%</u></b>



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b><u>Komitmen dan Kontinjensi pada Rekening Administratif</u></b>		
Garansi yang diterbitkan (Catatan 27c)		
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	2.516.028	2.348.096
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2.316.148	2.457.968
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	1.897.681	2.310.583
PT Pertamina (Persero)	1.393.469	115.912
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	1.252.015	1.507.044
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1.134.175	84.938
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	714.859	225.841
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	640.284	288.897
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	572.200	640.776
PT Telekomunikasi Selular	492.264	463.357
Lain-lain	4.588.298	3.555.960
	<u>17.517.421</u>	<u>13.999.372</u>
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor (Catatan 27c)		
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	1.512.405	947.591
PT Pertamina (Persero)	756.452	835.210
PT Railink	738.169	517.392
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	629.159	360.514
PT Pindad (Persero)	514.038	62.824
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	306.786	149.740
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	248.777	1.477.564
PT Pembangkitan Jawa-Bali	107.853	103.498
Bendahara Khusus Direktorat Angkatan Darat	104.136	203.481
BDH Khusus Bialugri Kementerian Pertahanan	93.905	541.153
Lain-lain	781.230	1.255.149
	<u>5.792.910</u>	<u>6.454.116</u>
	<b>Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi (Catatan 35)		
Gaji dan tunjangan Direksi	81.073	65.526
Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris	28.919	26.702
Total	<u>109.992</u>	<u>92.228</u>
Tantiem, bonus dan insentif Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan kunci (Catatan 35)		
Tantiem Direksi	239.461	213.003
Tantiem Dewan Komisaris	99.622	84.028
Bonus dan insentif karyawan kunci	94.456	99.422
Total	<u>433.539</u>	<u>396.453</u>

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Persentase transaksi dengan pihak-pihak berelasi terhadap total aset dan liabilitas konsolidasian BRI dan entitas anak adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>Aset</b>		
Giro pada Bank lain	0,002%	0,002%
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	0,029	0,046
Efek-efek	11,909	10,068
Tagihan Wesel Ekspor	0,001	0,024
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	0,294	0,331
Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	-	0,023
Kredit yang Diberikan	8,545	9,337
Piutang dan Pembiayaan Syariah	0,089	0,050
Tagihan Akseptasi	0,117	0,049
Penyertaan Saham	0,006	-
<b>Total</b>	<b>20,992%</b>	<b>19,930%</b>
<b>Liabilitas</b>		
Giro	4,703%	5,194%
Tabungan	0,025	0,013
Deposito Berjangka	9,953	9,336
Simpanan dari Bank lain dan Lembaga Keuangan Lainnya	0,120	0,058
Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	0,153	0,170
Liabilitas Akseptasi	0,137	0,058
Pinjaman yang Diterima	-	0,012
Kompensasi kepada Manajemen Karyawan Kunci	0,047	0,069
<b>Total</b>	<b>15,138%</b>	<b>14,910%</b>

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, BRI (Entitas Induk) telah mengasuransikan aset tetap kepada PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (pihak berelasi, Catatan 17).

**45. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN**

a. Perjanjian Signifikan

Pada tanggal 15 November 2017, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Asaba Computer Centre sehubungan dengan pengadaan 780 (tujuh ratus delapan puluh) unit CRM untuk RBB BRI tahun 2017 dengan jangka waktu garansi selama 3 (tiga) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp100.558.

Pada tanggal 13 September 2017, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Bringin Gigantara sehubungan dengan pengadaan jasa *maintenance agreement 2* (dua) unit mesin IBM AS400 Power8 E880 periode 2017 sampai dengan 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp80.000.

Pada tanggal 17 Mei 2017, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Anabatic Technologies Tbk sehubungan dengan pengadaan 2 (dua) unit mesin *mainframe Z13S N10* dengan jangka waktu garansi selama 1 (satu) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp69.000.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**45. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

a. Perjanjian Signifikan (lanjutan)

Pada tanggal 9 Mei 2017, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Patra Telekomunikasi Indonesia sehubungan dengan pengadaan sewa perangkat *Hub* dan *Remote VSAT Fase-1 Integrasi BRI*sat untuk 2.278 (dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan) lokasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp67.994.

Pada tanggal 13 April 2017, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Ingenico International Indonesia sehubungan dengan pengadaan 45.750 (empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) unit EDC dengan jangka waktu garansi selama 3 (tiga) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp74.572.

Pada tanggal 23 Desember 2016, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Satkomindo Mediyasa sehubungan dengan pengadaan sewa perangkat *Hub* dan *Remote VSAT Fase-1 Integrasi BRI*sat untuk 6.836 (enam ribu delapan ratus tiga puluh enam) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp210.549.

Pada tanggal 9 Juni 2016, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Bringin Gigantara sehubungan dengan pengadaan 2 (dua) unit Mesin AS/400 *Power-8 (E880)* untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp220.000.

Pada tanggal 1 Juni 2016, BRI mengadakan perjanjian dengan Koperasi Swakarya BRI sehubungan dengan pengadaan 3.000 (tiga ribu) unit ATM untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp250.805.

Pada tanggal 1 Juni 2016, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Titan Sarana Niaga sehubungan dengan pengadaan 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) unit ATM untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp188.073.

Pada tanggal 1 Juni 2016, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Asaba Computer Centre sehubungan dengan pengadaan 1.500 (seribu lima ratus) unit ATM untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp125.382.

b. Liabilitas Kontinjensi

Dalam melakukan usahanya, BRI menghadapi berbagai perkara hukum dan tuntutan dimana BRI sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan dengan kontrak. Walaupun belum ada kepastian yang jelas, BRI berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan keputusan terakhir dari perkara bahwa tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas BRI.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, BRI telah membentuk cadangan (disajikan dalam akun "Liabilitas Lain-lain") untuk sejumlah tuntutan hukum yang belum diputuskan masing-masing adalah sebesar Rp971.354 dan Rp613.720 (Catatan 29). Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan yang dibentuk atas kemungkinan timbulnya kerugian akibat tuntutan hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses tersebut telah memadai.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**46. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM**

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 yang dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Keuangan tanggal 28 Januari 1998 dan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (SKB BI dan BPPN) No. 30/270/KEP/DIR dan No. 1/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998, Pemerintah telah menjamin kewajiban tertentu dari seluruh bank umum yang berbadan hukum Indonesia. Berdasarkan perubahan terakhir yang terdapat pada Keputusan Menteri Keuangan No. 179/KMK.017/2000 tanggal 26 Mei 2000, jaminan tersebut berlaku sejak tanggal 26 Januari 1998 sampai dengan 31 Januari 2001 dan dapat diperpanjang dengan sendirinya setiap 6 (enam) bulan berikutnya secara terus-menerus, kecuali apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Program Penjaminan atau jangka waktu perpanjangannya, Menteri Keuangan mengumumkan pengakhiran dan atau perubahan Program Penjaminan tersebut untuk diketahui oleh umum. Atas penjaminan ini, Pemerintah membebaskan premi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.05/2005 tanggal 3 Maret 2005, terhitung sejak tanggal 18 April 2005, jenis kewajiban bank umum yang dijamin berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah meliputi giro, tabungan, deposito berjangka dan pinjaman yang diterima dari bank lain dalam bentuk transaksi pasar uang antar bank.

Program penjaminan Pemerintah melalui UP3 telah berakhir pada tanggal 22 September 2005, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.05/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang "Perhitungan dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum" untuk periode 1 Juli sampai dengan 21 September 2005. Sebagai pengganti UP3, Pemerintah telah membentuk lembaga independen yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang "Lembaga Penjamin Simpanan", dimana LPS menjamin dana masyarakat termasuk dana dari bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan salinan Peraturan LPS No. 1/PLPS/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang "Program Penjaminan Simpanan" diatur besarnya saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling tinggi sebesar Rp100 juta.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang "Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan" maka nilai simpanan setiap nasabah pada satu bank yang dijamin oleh Pemerintah naik menjadi sebesar Rp2 miliar dari semula Rp100 juta, efektif sejak tanggal tersebut di atas.

Suku bunga penjaminan LPS pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar 5,75% dan 6,25% untuk simpanan dalam mata uang Rupiah, dan sebesar 0,75% untuk simpanan dalam mata uang asing.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**47. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) YANG DIKELUARKAN DAN DIREVISI**

Berikut ini ikhtisar PSAK dan ISAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) - IAI yang relevan untuk BRI dan entitas anak, namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2017:

**Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018:**

- a. PSAK No. 2 (Amandemen 2016), "Laporan Arus Kas Tentang Prakarsa Pengungkapan", mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna Laporan Keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan nonkas.
- b. PSAK No. 46 (Amandemen 2016), "Pajak Penghasilan Tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan Untuk Rugi Yang Belum Direalisasi", mengklarifikasi:
  - bahwa perbedaan temporer dapat dikurangkan timbul ketika jumlah tercatat aset instrumen utang yang diukur pada nilai wajar dan nilai wajar tersebut lebih kecil dari dasar pengenaan pajaknya, tanpa mempertimbangkan apakah entitas memperkirakan untuk memulihkan jumlah tercatat instrumen utang melalui penjualan atau penggunaan,
  - bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan, maka penilaian perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan pajak,
  - bahwa pengurangan pajak yang berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari estimasi laba kena pajak masa depan. Lalu entitas membandingkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dengan estimasi laba kena pajak masa depan yang tidak mencakup pengurangan pajak yang dihasilkan dari pembalikan aset pajak tangguhan tersebut,
  - bahwa beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya jika terdapat bukti yang memadai bahwa kemungkinan besar bahwa entitas akan mencapai hal tersebut.
- c. PSAK No. 15 (Penyesuaian 2017), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama", saat pengakuan awal entitas dapat memilih untuk mengukur *investee*-nya pada nilai wajar atas dasar investasi per investasi.
- d. PSAK No. 67 (Penyesuaian 2017), "Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain", persyaratan pengungkapan dalam PSAK No. 67, selain yang dideskripsikan dalam paragraf PP 10 - PP 16, juga diterapkan pada setiap kepentingan dalam entitas yang diklasifikasikan sesuai PSAK No. 58 "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan".
- e. PSAK No. 13 (Amendemen 2017), "Properti Investasi", mengamendemen paragraf 57 sehingga mencerminkan prinsip bahwa perubahan penggunaan mencakup penilaian atas apakah properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan bukti pendukung bahwa perubahan penggunaan telah terjadi. Selain itu, Amendemen PSAK No. 13 tentang Pengalihan Properti Investasi juga mengkararakteristik ulang daftar keadaan dalam paragraf 57(a)-(d) sebagai daftar contoh yang tidak komprehensif.
- f. PSAK No. 53 (Amendemen 2017), "Pembayaran Berbasis Saham", Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham", bertujuan untuk memperjelas perlakuan akuntansi terkait klasifikasi dan pengukuran transaksi pembayaran berbasis saham.
- g. PSAK No. 111, "Akuntansi Wa'd", mengatur entitas yang memberi atau menerima wa'd tidak mengakui aset dan liabilitas yang akan terjadi dari wa'd ketika menjadi akad. PSAK No. 111 ini dilengkapi dengan contoh penerapan wa'd pada transaksi lindung nilai dan repo syariah.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**47. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) YANG DIKELUARKAN DAN DIREVISI (lanjutan)**

Berikut ini ikhtisar PSAK dan ISAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) - IAI yang relevan untuk BRI dan entitas anak, namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2017 (lanjutan):

**Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019:**

- a. ISAK No. 33, "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka", mengklarifikasi penggunaan tanggal transaksi untuk menentukan kurs yang digunakan pada pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait pada saat entitas telah menerima atau membayar imbalan di muka dalam valuta asing.

**Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020:**

- a. PSAK No. 62 (Amandemen 2017), "Kontrak Asuransi", memenuhi kriteria tertentu untuk menerapkan pengecualian sementara dari PSAK No. 71 (deferral approach) atau memilih untuk menerapkan pendekatan berlapis (overlay approach) untuk aset keuangan yang ditetapkan.
- b. PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan", mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.
- c. PSAK No. 71 (Amandemen 2017), "Instrumen Keuangan", mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur pelunasan dipercepat yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah terutang.
- d. PSAK No. 73, "Sewa", menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (right-of-use assets) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (1) sewa jangka pendek dan (2) sewa yang aset dasarnya (underlying assets) bernilai rendah.
- e. PSAK No. 15 (Amandemen 2017), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama", mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK No. 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama sebagaimana dimaksud dalam PSAK No. 15 paragraf 38.

Saat ini BRI dan entitas anak sedang mengevaluasi dan belum menetapkan dampak dari PSAK yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasiannya.

**48. INFORMASI TAMBAHAN**

- a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)

BRI secara aktif mengelola modalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap saat BRI dapat menjaga kecukupan modalnya untuk menutup risiko bawaan (inherent risk) pada kegiatan perbankan tanpa mengurangi optimalisasi nilai pemegang saham.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**48. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)**

a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) (lanjutan)

CAR pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, dimana modal untuk risiko kredit terdiri dari modal inti (modal inti utama/*Common Equity Tier 1* dan modal inti tambahan) dan modal pelengkap.

Berdasarkan POJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, PBI No. 17/22/PBI/2015 tentang Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer* dan POJK No. 46/POJK.03/2015 tentang Penetapan *Systemically Important Bank* dan *Capital Surcharge*, BRI diwajibkan membentuk tambahan modal sebagai penyangga (buffer) yang berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 2016. Pembentukan modal *buffer* yaitu *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge* untuk D-SIB yang wajib dibentuk berdasarkan persentase tertentu dari ATMR masing-masing sebesar 1,25%, 0,00% dan 1,00%.

Berdasarkan profil risiko BRI masing-masing per tanggal 30 Juni 2017 dan 2016, yaitu *satisfactory*, maka CAR minimum per 31 Desember 2017 dan 2016 ditetapkan masing-masing sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%.

Penentuan kepatuhan BRI terhadap peraturan dan rasio yang berlaku didasarkan pada peraturan praktis akuntansi yang berbeda dalam beberapa hal dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, BRI telah memenuhi rasio sesuai yang disyaratkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk rasio kecukupan modal.

CAR BRI (Entitas Induk) pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing dihitung sebagai berikut:

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Modal Inti (Tier 1)		
Modal Inti Utama (CET 1)	154.668.699	136.670.139
Modal Pelengkap (Tier 2)	7.083.240	6.240.293
<b>Total Modal</b>	<b>161.751.939</b>	<b>142.910.432</b>
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)		
ATMR untuk Risiko Kredit *)	566.659.194	502.423.401
ATMR untuk Risiko Pasar **)	6.889.063	9.535.428
ATMR untuk Risiko Operasional ***)	130.967.728	111.898.899
<b>Total ATMR</b>	<b>704.515.985</b>	<b>623.857.728</b>
Rasio CAR		
Rasio CET 1	21,95%	21,91%
Rasio Tier 1	21,95	21,91
Rasio Tier 2	1,01	1,00
Rasio Total	22,96	22,91
Rasio Minimum Tier 1	6,00%	6,00%
Rasio Minimum CET 1	4,50	4,50
CAR Minimum Berdasarkan Profil Risiko	9,00	9,00

\*) Risiko Kredit dihitung berdasarkan SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016.

\*\*) Risiko Pasar dihitung berdasarkan SE OJK No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016.

\*\*\*) Risiko Operasional dihitung berdasarkan SE OJK No. 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**48. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)**

b. Rasio Kredit *Non-Performing* (NPL)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, rasio NPL BRI adalah sebagai berikut:

(i) Konsolidasian (termasuk piutang dan pembiayaan syariah)

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Rasio NPL - kotor	2,22%	2,11%
Rasio NPL - neto	0,98	1,15

(ii) BRI (Entitas Induk)

	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Rasio NPL - kotor	2,10%	2,03%
Rasio NPL - neto	0,88	1,09

Rasio NPL - neto dihitung berdasarkan NPL setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai minimum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dibagi dengan jumlah kredit yang diberikan.

c. Kegiatan Jasa Kustodian

BRI melakukan kegiatan jasa penitipan harta (bank kustodian) sejak tahun 1996 berdasarkan izin operasi melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam No. 91/PM/1996 tanggal 11 April 1996 dan telah ditunjuk sebagai *Sub Registry* dalam melaksanakan transaksi obligasi Pemerintah dan penatakerjaan SBI *Scriptless* oleh Bank Indonesia.

Jasa penitipan harta ini merupakan bagian dari kegiatan Divisi *Investment Services* yang meliputi jasa-jasa sebagai berikut:

- Jasa penyimpanan (*safe keeping services*) dan *Portfolio Valuation*;
- Jasa penyelesaian transaksi (*settlement handling*);
- Jasa penagihan penghasilan (*income collection*), termasuk pembayaran pajaknya;
- Jasa *corporate action* dan *proxy services*;
- Jasa informasi dan pelaporan (*reporting services*);
- Jasa *Custody Unit Link* dan DPLK;
- Jasa Kustodian untuk sekuritisasi aset; dan
- Jasa Kustodian Global untuk surat berharga yang diterbitkan di luar negeri

BRI memiliki 258 (dua ratus lima puluh delapan) dan 210 (dua ratus sepuluh) nasabah (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, terutama dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan dan asuransi, perusahaan sekuritas, reksadana dan institusi lainnya.

Aset milik nasabah yang dititipkan pada Kustodian BRI (tidak diaudit) adalah sebesar Rp298.786.806 dan Rp320.285.896 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Sedangkan jumlah pendapatan jasa penitipan harta (tidak diaudit) adalah sebesar Rp71.513 dan Rp56.058, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**48. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)**

d. Kegiatan Wali Amanat

BRI melakukan kegiatan jasa wali amanat sejak tahun 1996. Izin operasi BRI sebagai wali amanat telah diberikan oleh Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 1554/KMK.013/1990 tanggal 6 Desember 1990 dan telah terdaftar di OJK sesuai Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.

Jasa wali amanat ini merupakan bagian dari kegiatan Divisi *Investment Services* yang meliputi jasa-jasa sebagai berikut:

- Wali amanat
- Agen jaminan
- Agen pembayar

BRI memiliki 31 (tiga puluh satu) nasabah (tidak diaudit) pada tanggal 31 Desember 2017, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2016 memiliki 26 (dua puluh enam) nasabah (tidak diaudit). Jumlah obligasi yang diwaliananati oleh BRI (tidak diaudit) adalah sebesar Rp69.044.870 dan Rp66.099.135 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

e. Jasa *Trust*

Layanan Jasa *Trust* BRI merupakan layanan jasa penitipan harta nasabah yang berupa aset *financial* untuk dan atas nama nasabah. BRI merupakan bank pertama di Indonesia yang memperoleh ijin dari Bank Indonesia untuk menjalankan layanan Jasa *Trust* di Indonesia melalui surat Bank Indonesia No. 15/19/DPB1/PB1-3 tanggal 12 Februari 2013 dan surat penegasan Bank Indonesia No. 15/30/DPB1/PB1-3 tanggal 19 Maret 2013.

Ruang lingkup layanan Jasa *Trust* BRI meliputi :

- Layanan Jasa Agen Pembayar
- Layanan Jasa Agen Peminjaman
- Layanan Jasa Agen Investasi
- Layanan Jasa Keagenan Lainnya, seperti misalnya Agen Penampungan dan Agen Jaminan

BRI saat ini telah memberikan pelayanan Jasa *Trust* untuk transaksi-transaksi keuangan yang melibatkan proyek minyak dan gas (Migas) baik yang dilaksanakan oleh anggota Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dibawah naungan SKK Migas maupun proyek-proyek non K3S.

Di samping memberikan layanan Jasa *Trust*, BRI juga memberikan layanan jasa Agen Pembayar dan Agen Penampungan (non *Trust*) untuk sektor-sektor lain, seperti sektor infrastruktur, energi, perdagangan dan industri kimia. Tak hanya melayani *direct customer*, Jasa *Trust* BRI juga berperan serta mendukung unit kerja pembiayaan BRI dalam transaksi kegiatan pembiayaan infrastruktur, energi dan aktivitas transaksi pembiayaan sindikasi.

Nilai proyek kelolaan Jasa *Trust* BRI (tidak diaudit) adalah sebesar Rp67.285.809 dan Rp37.515.581, masing-masing untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

f. Agen Sindikasi

BRI saat ini memberikan pelayanan Jasa Agen Sindikasi untuk pembiayaan kredit sindikasi dari beberapa sektor/industri diantaranya sektor agribisnis, infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, pembangkit tenaga listrik, minyak & gas, tekstil, properti dan manufaktur yang melibatkan proyek-proyek pemerintah (BUMN) maupun proyek-proyek swasta.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**48. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)**

f. Agen Sindikasi (lanjutan)

Jasa agen sindikasi ini merupakan bagian dari kegiatan *Trust and Corporate Services* yang meliputi jasa-jasa sebagai berikut:

- *Arranger*
- Agen Fasilitas
- Agen Jaminan
- Agen Penampungan

Jasa Agen Sindikasi BRI telah mengelola berbagai proyek sindikasi dengan total nilai proyek (tidak diaudit) adalah sebesar Rp142.304.126 dan Rp141.670.733, masing-masing untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

**49. LABA PER LEMBAR SAHAM**

Perhitungan laba tahun berjalan per lembar saham dasar adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017		
	Laba Tahun Berjalan	Rata-rata Tertimbang Saham Biasa yang Beredar	Laba Tahun Berjalan Per Lembar Saham (Rupiah penuh)
Laba tahun berjalan per lembar saham dasar	28.996.535	122.237.220.000	237,22
	31 Desember 2016		
	Laba Tahun Berjalan	Rata-rata Tertimbang Saham Biasa yang Beredar	Laba Tahun Berjalan Per Lembar Saham (Rupiah penuh)
Laba tahun berjalan per lembar saham dasar	26.195.772	122.237.777.717	214,30

Jumlah saham biasa yang beredar sebelum pemecahan saham atau saham biasa yang diterbitkan kepada pemegang saham yang ada tanpa imbalan tambahan disesuaikan dengan perubahan proposional atas jumlah saham beredar seolah-olah peristiwa tersebut terjadi pada permulaan dari periode sajian paling awal.

**50. REKLASIFIKASI DAN PENYESUAIAN AKUN**

Beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah direklasifikasi sehingga sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Reklasifikasi dan penyesuaian tersebut dilakukan antara lain adalah:

1. Reklasifikasi beban premi program penjaminan dana nasabah sebagai bagian dari *cost of fund* sehingga disajikan dalam beban bunga, yang sebelumnya dicatat sebagai komponen beban operasional lainnya.
2. Reklasifikasi penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi bagian komponen dalam pendapatan bunga sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah No.8 Tahun 2015 tentang "Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat", yang sebelumnya dicatat sebagai komponen pendapatan operasional lainnya.
3. Penyesuaian kembali atas premi produk *unit link* pada entitas anak BRI Life.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**50. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016		
	Sebelum Reklasifikasi/ Penyesuaian akun	Reklasifikasi/ Penyesuaian akun	Setelah reklasifikasi/ Penyesuaian akun
<b><u>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan</u></b>			
<b><u>Komprehensif Lain Konsolidasian</u></b>			
Pendapatan Bunga dan Syariah			
Pendapatan bunga	92.151.312	(792.974)	91.358.338
Beban Bunga dan Syariah			
Beban bunga	(26.176.473)	(1.364.741)	(27.541.214)
Pendapatan premi	2.474.579	564.285	3.038.864
Beban klaim	(2.410.192)	(349.962)	(2.760.154)
Pendapatan Operasional Lainnya			
Lain-lain	3.015.124	(214.323)	2.800.801
Beban Operasional Lainnya			
Premi program penjaminan Pemerintah	(1.364.741)	1.364.741	-
Lain-lain	(4.998.988)	792.974	(4.206.014)

**51. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Manajemen BRI bertanggung jawab penuh atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2018.

Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK**  
**Tanggal 31 Desember 2017**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

<b>ASET</b>	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Kas	24.437.571	24.865.133
Giro pada Bank Indonesia	55.598.024	53.398.240
Giro pada Bank lain	5.803.057	10.792.581
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	53.384.610	77.574.246
Efek-efek	171.079.651	120.083.644
Tagihan Wesel Ekspor	5.623.717	9.345.472
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	3.317.840	3.318.434
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	16.496.292	1.557.370
Tagihan Derivatif	145.928	93.649
Kredit yang Diberikan Cadangan kerugian penurunan nilai	708.001.045 (29.062.262)	635.291.221 (21.944.371)
	<u>678.938.783</u>	<u>613.346.850</u>
Tagihan Akseptasi	5.637.833	5.602.843
Penyertaan Saham	6.727.814	5.783.220
Aset Tetap		
Biaya perolehan	32.692.513	31.232.047
Akumulasi penyusutan	(8.674.305)	(7.255.098)
Nilai buku - neto	<u>24.018.208</u>	<u>23.976.949</u>
Aset Pajak Tangguhan - neto	2.989.066	2.328.530
Aset Lain-lain - neto	<u>22.239.672</u>	<u>11.933.529</u>
<b>TOTAL ASET</b>	<b><u>1.076.438.066</u></b>	<b><u>964.000.690</u></b>

Lampiran 1



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2017**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
Liabilitas Segera	6.472.759	5.328.446
Simpanan Nasabah		
Giro	144.432.274	140.764.079
Tabungan	342.759.191	297.649.283
Deposito Berjangka	316.135.105	285.432.096
Total Simpanan Nasabah	<u>803.326.570</u>	<u>723.845.458</u>
Simpanan dari Bank lain dan Lembaga Keuangan lainnya	5.752.420	1.784.932
Efek Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali	12.136.684	7.302.398
Liabilitas Derivatif	197.633	344.865
Liabilitas Akseptasi	5.637.833	5.602.843
Utang Pajak	470.272	881.207
Surat Berharga yang Diterbitkan	30.323.802	24.936.730
Pinjaman yang Diterima	29.267.409	34.599.638
Liabilitas Imbalan Kerja	11.888.794	9.181.163
Liabilitas Lain-lain	5.902.298	4.699.821
Pinjaman dan Surat Berharga Subordinasi	14.385	35.471
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<u><b>911.390.859</b></u>	<u><b>818.542.972</b></u>

Lampiran 1

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2017**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)</b>		
<b>EKUITAS</b>		
Modal saham - nilai nominal Rp50 (Rupiah penuh) per lembar saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan Rp250 (Rupiah penuh) per lembar saham pada tanggal 31 Desember 2016		
Modal dasar - 300.000.000.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 299.999.999.999 lembar saham Seri B) pada tanggal 31 Desember 2017 dan 60.000.000.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 59.999.999.999 lembar saham Seri B) pada tanggal 31 Desember 2016		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 123.345.810.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 123.345.809.999 lembar saham Seri B) pada tanggal 31 Desember 2017 dan 24.669.162.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 24.669.161.999 lembar saham Seri B) pada tanggal 31 Desember 2016	6.167.291	6.167.291
Tambahan modal disetor saham	2.773.858	2.773.858
Surplus revaluasi aset tetap - bersih	13.824.692	13.824.692
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	54.199	23.490
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual - bersih	1.621.265	103.891
Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih	705.117	654.637
Modal saham diperoleh kembali (saham treasuri)	(2.418.948)	(2.418.948)
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	3.022.685	3.022.685
Belum ditentukan penggunaannya	139.297.048	121.306.122
Total Saldo Laba	<u>142.319.733</u>	<u>124.328.807</u>
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b><u>165.047.207</u></b>	<b><u>145.457.718</u></b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b><u>1.076.438.066</u></b>	<b><u>964.000.690</u></b>

Lampiran 1



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN -**  
**ENTITAS INDUK**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<b>Tahun yang Berakhir pada</b>	
	<b>tanggal 31 Desember</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
Pendapatan Bunga	98.253.779	90.015.450
Beban Bunga	(27.825.233)	(26.920.380)
Pendapatan Bunga - neto	70.428.546	63.095.070
Pendapatan Operasional lainnya		
Provisi dan komisi lainnya	10.303.072	9.209.654
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	5.044.147	4.461.473
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - neto	705.361	373.720
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek	2h,7      3.217	-
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	175.531	-
Lain-lain	2.461.508	2.634.363
Total Pendapatan Operasional lainnya	18.692.836	16.679.210
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(16.659.697)	(13.319.763)
Beban Operasional lainnya		
Tenaga kerja dan tunjangan Umum dan administrasi	(19.436.502)	(17.648.351)
Kerugian transaksi mata uang asing - neto	-	(271.661)
Lain-lain	(4.407.557)	(3.783.112)
Total Beban Operasional lainnya	(36.312.599)	(33.028.073)
<b>LABA OPERASIONAL</b>	<b>36.149.086</b>	<b>33.426.444</b>
<b>PENDAPATAN NON OPERASIONAL - NETO</b>	<b>201.644</b>	<b>15.199</b>
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK</b>	<b>36.350.730</b>	<b>33.441.643</b>
<b>BEBAN PAJAK</b>	<b>(7.881.495)</b>	<b>(7.688.187)</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>28.469.235</b>	<b>25.753.456</b>

Lampiran 2

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN -**  
**ENTITAS INDUK (lanjutan)**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016
<b>Penghasilan komprehensif lainnya:</b>		
<b>Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>		
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	67.307	162.969
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(16.827)	(531.577)
Surplus revaluasi aset tetap	-	14.315.527
<b>Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	30.709	(25.579)
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual	2.023.166	1.524.025
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(505.792)	(381.006)
<b>Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak</b>	<b>1.598.563</b>	<b>15.064.359</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>30.067.798</b>	<b>40.817.815</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah penuh)</b>	<b>232,90</b>	<b>210,68</b>

Lampiran 2



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - ENTITAS INDUK**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahkan Modal Disetor/ Agi Saham	Selisih Kurs Pengaruh Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	Kerugian yang Belum Direalisasi atas Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang Terdapat untuk Dijual - Setelah Pajak Tanggungan	Keuntungan Pengukuran Kembali Imbalan Pasti - Setelah Pajak Tanggungan	Saham Treasuri	Surplus Realisasi Aset Total - Setelah Pajak Terkait	Saldo Laba		Total Ekuitas Pemilik Entitas Induk
								Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
<b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2015</b>	<b>6.167.291</b>	<b>2.773.858</b>	<b>49.069</b>	<b>(1.039.128)</b>	<b>532.410</b>	<b>(2.286.375)</b>	-	<b>18.115.741</b>	<b>88.078.932</b>	<b>112.391.798</b>
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	25.753.456	25.753.456
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	(25.579)	1.143.019	122.227	-	13.824.692	-	-	15.064.359
Total penghasilan komprehensif untuk periode berjalan	-	-	(25.579)	1.143.019	122.227	-	13.824.692	-	25.753.456	40.817.815
Pembagian laba Dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.619.322)	(7.619.322)
Reklasifikasi cadangan tujuan	-	-	-	-	-	-	-	(15.093.056)	15.093.056	-
Modal saham diperoleh kembali (saham treasuri)	-	-	-	-	-	(132.573)	-	-	-	(132.573)
<b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2016</b>	<b>6.167.291</b>	<b>2.773.858</b>	<b>23.490</b>	<b>103.891</b>	<b>654.637</b>	<b>(2.418.948)</b>	<b>13.824.692</b>	<b>3.022.685</b>	<b>121.306.122</b>	<b>145.457.718</b>

Lampiran 3

Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - ENTITAS INDUK (lanjutan)**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Modal Ditampilkan di Disetor Penuh	Tambahkan Modal Disetor/ Agio Saham	Selisih Kurs Karena Pengajaran Keperluan dalam Mata Uang Asing	Kerugian yang Belum Direalisasi atas Efek-efek dan Obligasi/ Rekapitalisasi Pemerintah yang Tersebut untuk Dijual Setelah Pajak Tanggungan	Keuntungan Pengukuran Kembali Pajak Imbalan Pasti- Setelah Pajak Tanggungan	Saham Treasuri	Surplus Reservasi Aset Tetap - Setelah Pajak Terkait	Saldo Laba		Total Ekuitas Pemilik Entitas Induk
								Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2016	6.167.291	2.773.858	23.490	103.881	654.637	(2.418.948)	13.824.692	3.022.685	121.306.122	145.457.718
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	28.469.235	28.469.235
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	30.709	1.517.374	50.480	-	-	-	-	1.598.563
Total penghasilan komprehensif untuk periode berjalan	-	-	30.709	1.517.374	50.480	-	-	-	28.469.235	30.067.798
Pembagian laba Dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.478.309)	(10.478.309)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2017	6.167.291	2.773.858	54.199	1.621.265	705.117	(2.418.948)	13.824.692	3.022.685	139.297.048	165.047.207

Lampiran 3



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**LAPORAN ARUS KAS - ENTITAS INDUK**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<b>Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI</b>		
Penerimaan bunga	98.344.933	90.236.423
Pembayaran bunga	(27.509.119)	(25.499.702)
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	5.044.147	4.461.473
Pendapatan operasional lainnya	13.096.801	8.545.173
Beban operasional lainnya	(31.549.214)	(33.435.736)
Pendapatan non operasional - neto	201.646	6.450
Pembayaran pajak penghasilan badan dan tagihan pajak	(8.897.996)	(6.012.928)
<b>Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi</b>	<b>48.731.198</b>	<b>38.301.153</b>
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:		
Penurunan (kenaikan) aset operasi:		
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	(1.205.159)	100.000
Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	(116.427)	273.714
Tagihan wesel ekspor	3.721.755	(2.064.589)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	(14.938.922)	(712.245)
Kredit yang diberikan	(82.238.513)	(85.301.450)
Aset lain-lain	(10.646.059)	(19.174)
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:		
Liabilitas segera	1.123.584	320.350
Simpanan:		
Giro	3.668.195	27.775.358
Tabungan	45.109.908	30.042.245
Deposito berjangka	30.703.009	23.253.851
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	3.967.488	(8.580.300)
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.834.286	(4.075.560)
Liabilitas lain-lain	457.053	1.850.135
<b>Kas Neto yang Diperoleh dari Kegiatan Operasi</b>	<b>33.171.396</b>	<b>21.163.488</b>
<b>ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI</b>		
Penerimaan dividen	41.903	27.290
Penyertaan saham	(944.539)	(814.668)
Perolehan aset tetap	(1.460.466)	(3.339.807)
Kenaikan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo	(25.583.756)	3.750.731
<b>Kas Neto yang Digunakan untuk Kegiatan Investasi</b>	<b>(27.946.858)</b>	<b>(376.454)</b>

Lampiran 4

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**LAPORAN ARUS KAS - ENTITAS INDUK (lanjutan)**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<b>Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN</b>		
Pembayaran pinjaman yang diterima	(5.390.326)	(955.882)
Pembelian kembali saham beredar (saham treasury)	-	(132.573)
Pembagian laba untuk dividen	(10.478.309)	(7.619.322)
Pembayaran pinjaman dan surat berharga subordinasi	(21.086)	(20.997)
Penerimaan atas surat berharga yang diterbitkan	10.242.963	15.510.825
Pembayaran atas surat berharga yang jatuh tempo	(4.921.000)	(980.000)
<b>Kas Neto yang Diperoleh dari Kegiatan Pendanaan</b>	<b>(10.567.758)</b>	<b>5.802.051</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(5.343.220)</b>	<b>26.589.085</b>
<b>PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING</b>	<b>3.195</b>	<b>5.012</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>185.271.640</b>	<b>158.677.543</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>179.931.615</b>	<b>185.271.640</b>
Kas dan Setara Kas akhir tahun terdiri dari:		
Kas	24.437.571	24.865.133
Giro pada Bank Indonesia	55.598.024	53.398.240
Giro pada bank lain	5.803.057	10.792.581
Penempatan pada bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	52.179.451	77.574.246
Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	41.913.512	18.641.440
<b>Total Kas dan Setara Kas</b>	<b>179.931.615</b>	<b>185.271.640</b>



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**CATATAN ATAS INFORMASI KEUANGAN - ENTITAS INDUK**  
**Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**

**Dasar penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas Induk**

Laporan keuangan tersendiri entitas induk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri".

PSAK No. 4 (Revisi 2013) mengatur dalam hal entitas menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan pengendalian bersama entitas dengan menggunakan metode biaya perolehan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada entitas anak yang disajikan pada harga perolehan.

**2. PENYERTAAN SAHAM PADA ENTITAS ANAK**

Informasi mengenai entitas anak yang dimiliki BRI diungkapkan pada Catatan 1f atas laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, entitas induk memiliki penyertaan saham pada entitas anak sebagai berikut:

	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Harga Perolehan	Persentase Kepemilikan	Harga Perolehan	Persentase Kepemilikan
PT Bank BRISyariah	2.004.375	99,99%	2.004.375	99,99%
PT Bank Rakyat Indonesia Agri Niaga Tbk	2.397.751	86,82	1.524.538	87,23
BRI Remittance Co Limited	2.289	100,00	2.289	100,00
PT Asuransi BRI Life	1.626.643	91,00	1.626.643	91,00
PT BRI Multifinance Indonesia	660.003	99,99	660.003	99,00

Lampiran 5

Ikhtisar Kinerja Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisa & Pembahasan Manajemen

**Program Kemitraan dan Bina Lingkungan/  
*Partnership and Community Development Program*  
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

Laporan keuangan Tanggal 31 Desember 2017 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
beserta laporan auditor independen/  
*Financial statements as of December 31, 2017 and  
for the year then ended with independent auditors' report*



The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT  
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED  
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

**Daftar Isi**

**Table of Contents**

	Halaman/ Pages	
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan .....	1006	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Aktivitas .....	1007	<i>Statement of Activities</i>
Laporan Arus Kas .....	1008	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan .....	1009 - 1037	<i>Notes to the Financial Statements</i>
Lampiran 1 - Laporan penyaluran dana program bina lingkungan .....	1038 - 1039	<i>Appendix 1 - Statement of community development program funds distribution</i>
Lampiran 2 - Laporan kualitas piutang pinjaman menurut wilayah dan sektor usaha program kemitraan .....	1040 - 1060	<i>Appendix 2 - Statement of loan receivables partnership program's collectibility classified by regional and economic sector</i>

\*\*\*\*\*

Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017  
(Dinyatakan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  
As of December 31, 2017  
(Expressed in Rupiah)**

	31 Desember/ December 31, 2017	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2016	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Kas pada Bank	848.287.476.264	2b,4,19	1.086.201.152.132	<i>Cash in Bank</i>
Piutang kepada Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") pembina lain/ lembaga penyalur (setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp16.362.150.268 dan Rp16.905.874.481 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016)	51.137.854.732	2c,2d,5,19	54.094.125.519	<i>Receivables from other fostering State-Owned Enterprises ("SOE")/distributing partners (net of allowance for impairment losses amounting to Rp16,362,150,268 and Rp16,905,874,481 as of December 31, 2017 and 2016, respectively)</i>
Piutang pinjaman mitra binaan (setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp36.174.341.728 dan Rp34.598.316.377 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016)	227.527.762.828	2c,2d,6	94.769.204.307	<i>Loan receivables from foster partners (net of allowance for impairment losses amounting to Rp36,174,341,728 and Rp34,598,316,377 as of December 31, 2017 and 2016, respectively)</i>
Piutang kepada BUMN Pembina	-	2c,12,19	253.977.420.000	<i>Receivables from Fostering SOE</i>
Pendapatan jasa administrasi pinjaman yang masih akan diterima	1.026.296.072	2j,7	687.076.348	<i>Accrued loan administration services income</i>
Piutang lain-lain	24.974.479.409	2c,8	9.001.092.980	<i>Other receivables</i>
Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp71.057.855 dan Rp70.194.730 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016)	31.250	2e,9	894.375	<i>Fixed assets (net of accumulated depreciation amounting to Rp71,057,855 and Rp70,194,730 as of December 31, 2016 and 2017, respectively)</i>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.152.953.900.555</b>		<b>1.498.730.965.661</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS DAN ASET NETO</b>				<b>LIABILITIES AND NET ASSETS</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Beban yang masih harus dibayar	54.054.085.143	2f,10,19	21.140.870.351	<i>Accrued expenses</i>
<b>ASET NETO</b>				<b>NET ASSETS</b>
Aset neto tidak terikat	1.098.899.815.412	2g,11	1.477.590.095.310	<i>Unrestricted net assets</i>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO</b>	<b>1.152.953.900.555</b>		<b>1.498.730.965.661</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements taken as a whole.



The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
LAPORAN AKTIVITAS  
Untuk Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal 31 Desember 2017  
(Dinyatakan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
STATEMENT OF ACTIVITIES  
For the Year Ended December 31, 2017  
(Expressed in Rupiah)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2017	Catatan/ Notes	2016	
<b>PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT</b>				<b>CHANGES IN UNRESTRICTED NET ASSETS</b>
<b>PENDAPATAN</b>				<b>REVENUE</b>
Pendapatan dari BUMN Pembina	-	2k,12,19	253.977.420.000	Revenue form Fostering SOE
Pendapatan bunga	16.379.026.105	2i,13,19	18.118.330.254	Interest income
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	7.029.970.301	2j,14	4.684.179.220	Loan administration services income
Pembalikan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang kepada BUMN pembina lain	543.724.213	2o,5	-	Reversal for impairment losses on receivable from other fostering SOE expenses
Pendapatan lain-lain	3.457.515.961	2l,15,19	35.675.534.044	Other income
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>27.410.236.580</b>		<b>312.455.463.518</b>	<b>TOTAL REVENUE</b>
<b>BEBAN</b>				<b>EXPENSES</b>
Dana pembinaan kemitraan	197.510.500	2m,16	-	Fostering partnership funds
Penyaluran dana program bina lingkungan	150.348.697.502	17	132.708.583.827	Community development program funds distribution
Beban penyusutan aset tetap	863.125	9	2.440.625	Fixed assets depreciation expenses
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman	1.576.025.351	2o,6d	1.507.857.843	Allowance for impairment losses of loan receivables expenses
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai piutang kepada BUMN pembina lain	-	2o,5	10.343.129.619	Allowance for impairment losses on receivable from other fostering SOE expenses
Beban pembalikan piutang kepada BUMN pembina	253.977.420.000	19	-	Reversal of receivables from Fostering SOE expenses
Beban lain-lain	-	18,19	242.170.740	Other expenses
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>406.100.516.478</b>		<b>144.804.182.654</b>	<b>TOTAL EXPENSES</b>
<b>KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET NETO TIDAK TERIKAT</b>	<b>(378.690.279.898)</b>		<b>167.651.280.864</b>	<b>INCREASE/(DECREASE) IN UNRESTRICTED NET ASSETS</b>
<b>ASET NETO TIDAK TERIKAT PADA AWAL TAHUN</b>	<b>1.477.590.095.310</b>		<b>1.309.938.814.446</b>	<b>UNRESTRICTED NET ASSETS AT BEGINNING OF YEAR</b>
<b>ASET NETO TIDAK TERIKAT PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>1.098.899.815.412</b>		<b>1.477.590.095.310</b>	<b>UNRESTRICTED NET ASSETS AT END OF YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
LAPORAN ARUS KAS  
Untuk Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal 31 Desember 2017  
(Dinyatakan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
STATEMENT OF CASH FLOWS  
For the Year Ended December 31, 2017  
(Expressed in Rupiah)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2017	Catatan/ Notes	2016	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>				<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Pengembalian piutang pinjaman mitra binaan	59.051.365.649	20	39.430.101.338	Collection of foster partners loan receivables
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	6.690.750.577	20	5.074.342.741	Loan administration service income
Pendapatan bunga	16.379.026.105	13	18.118.330.254	Interest income
Pendapatan lain-lain	3.457.515.961	15	35.675.534.044	Other income
Pengembalian dari BUMN pembina lain	3.499.995.000	5	9.072.358.000	Repayment from other fostering SOE
Penyaluran piutang pinjaman mitra binaan	(209.359.335.950)		(89.759.543.425)	Loan receivables from foster partners distribution
Penyaluran dana pembinaan kemitraan	(197.510.500)	16	-	Fostering partnership distribution fund
Penyaluran dana program bina lingkungan	(117.435.482.710)		(126.573.128.334)	Community development program funds distribution
Beban lain-lain	-	18	(242.170.740)	Other expense
Penyaluran ke BUMN Pembina lain	-		-	Distribution to other fostering SOE
<b>Kas Neto yang (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>	<b>(237.913.675.868)</b>		<b>(109.204.176.122)</b>	<b>Net Cash (Used in) Provided by Operating Activities</b>
<b>PENURUNAN NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(237.913.675.868)</b>		<b>(109.204.176.122)</b>	<b>NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>	<b>1.086.201.152.132</b>		<b>1.195.405.328.254</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>848.287.476.264</b>		<b>1.086.201.152.132</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements taken as a whole.



The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2017 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**1. PENJELASAN UMUM**

**a. Pendirian dan Informasi Umum**

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BRI), selanjutnya disebut "PKBL BRI" berdiri dan beroperasi sejak tahun 1990 dengan nama Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi (PPELK) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI) No. 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989, jo No. 306/KMK.013/1991 tanggal 20 Maret 1991, jo No. 368/KMK.013/1991 tanggal 19 April 1991 yang ditinjau kembali dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kegiatan ini merupakan kebijakan Pemerintah yang dilaksanakan oleh seluruh BUMN dengan maksud agar BUMN disamping menjalankan operasional bisnisnya, juga melaksanakan tugas sosial sebagai pembina usaha kecil koperasi berupa akses permodalan dan pendampingan, sehingga pada akhirnya bisa mandiri atau akses pembebanan komersial/perbankan.

Peraturan tersebut selanjutnya diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Peraturan ini kemudian disempurnakan melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, kemudian di amandemen berturut-turut oleh PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 yang berlaku untuk tahun buku 2013. Peraturan selanjutnya yang dikeluarkan yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 yang mengatur mengenai penghentian pelaksanaan kegiatan BUMN peduli mulai tahun 2013.

**1. GENERAL DESCRIPTION**

**a. Establishment and General Information**

Partnership and community development program (PKBL) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), hereinafter referred to as "PKBL BRI" was established and started its operations since 1990 with named Entrepreneur Small Economy and Cooperative Coaching (PPELK) according to the Decree of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 1232/KMK.013/1989 dated November 11, 1989, in conjunction with No. 306/KMK.013/1991 dated March 20, 1991, in conjunction with No. 368/KMK.013/1991 dated April 19, 1991 which was revisited with the Decree of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 316/KMK.016/1994 dated June 27, 1994 regarding the Fostering Guidelines for Small Businesses and Cooperatives through the utilization of funds from the profit of the State-Owned Enterprises (SOEs). This activity is a government policy that is implemented by all SOEs with the intention that in addition to conducting its business operations, SOEs, also carry out social duties as a foster for small business cooperatives in the form of access to capital and mentoring, so that they in the end can be independent or commercial loading access/banking.

The regulation was subsequently amended by Decree of Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-236/MBU/2003 dated June 17, 2003 regarding the Partnership Program for State-Owned Enterprises with Small Business and Community Development Program and the Circular Letter of Minister of State-Owned Enterprises No. SE-433/MBU/2003 dated September 16, 2003 regarding the Implementation Guidelines of Partnership Program for SOEs with Small Business and Community Development Program. The regulation was later amended by the Minister of State-Owned Enterprises' Regulation No. PER-05/MBU/2007 dated April 27, 2007, subsequently amended successively by PER-20/MBU/2012 dated December 27, 2012 regarding amendments to the Minister of SOEs' Regulation No. PER-05/MBU/2007, which applies to the fiscal year 2013. The subsequent regulations issued is the Minister of SOEs' Regulation No. PER-05/MBU/2013 dated May 1, 2013 governing the termination of the SOEs care activities begin in 2013.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2017 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**1. PENJELASAN UMUM (lanjutan)**

**a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)**

Peraturan Kementerian diatas, terakhir kembali diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 antara lain, mengatur tentang sumber dana Progam Kemitraan dan Bina Lingkungan yang berasal dari anggaran perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya, maksimal (masing-masing) 2% dari laba bersih tahun sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-07/MBU/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan, menyatakan bahwa peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012, No. PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013, No. PER-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013, No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 dan Surat Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN No. S-92/DS.MBU/2013 tanggal 3 April 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tanggal 3 Juli 2015 Kementerian BUMN mengeluarkan Peraturan Menteri No. PER-09/MBU/07/2015 yang menggantikan PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dimana dana PKBL diambil dari bagian laba BUMN.

Pada tanggal 19 Desember 2016 Kementerian BUMN mengeluarkan peraturan Menteri No. PER-03/MBU/12/2016 yang merupakan perubahan atas peraturan No. PER-09/MBU/07/2015.

Terakhir, pada tanggal 5 Juli 2017 Kementerian BUMN mengeluarkan peraturan Menteri No. PER-02/MBU/7/2017 yang merupakan perubahan kedua atas peraturan No. PER-09/MBU/07/2015.

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan (PK) adalah program untuk meningkatkan kemampuan Usaha Kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN Pembina.

**1. GENERAL DESCRIPTION (continued)**

**a. Establishment and General Information (continued)**

The Ministry Regulation above, latest amended by the Minister of SOEs' Regulation No. PER-08/MBU/2013 dated September 10, 2013 among others, regulates the funding sources of the Partnership and Community Development Program derived from the company's budget that is calculated as expense, maximum (each) of 2% from the previous year's net income.

Based on Minister of State-Owned Enterprises' Regulation No. PER-07/MBU/05/2015 dated May 22, 2015 regarding the Partnership Program for State-Owned Enterprises with small business and community development program, state that the previous regulation, which is the Minister of State-Owned Enterprises' Regulation No. PER-05/MBU/2007 dated April 27, 2007, No. PER-20/MBU/2012 dated December 27, 2012, No. PER-05/MBU/2013 dated May 1, 2013, No. PER-07/MBU/2013 dated June 27, 2013, No. PER-08/MBU/2013 dated September 10, 2013 and the Letter of Deputy for Restructuring and SOEs Strategic Planning No. S-92/DS.MBU/2013 dated April 3, 2013 are revoked and declared invalid.

On July 3, 2015 the Ministry of State-Owned Enterprises issued the Ministerial Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 which replaced PER-07/MBU/05/2015 regarding the Partnership and Community Development Program of the State-Owned Enterprises, where PKBL's fund was taken from SOE profits.

On December 19, 2016 the Ministry of State-Owned Enterprises issued another Ministerial Regulation No. PER-03/MBU/12/2016 which is an amendment of No. PER-09/MBU/07/2015.

Latest, on July 5, 2017 the Ministry of State-Owned Enterprises issued another Ministerial Regulation No. PER-02/MBU/7/2017 which is a second amendment of No. PER-09/MBU/07/2015.

Partnership Program for SOEs' and with small business, hereinafter called Partnership Program (PK) is a program to improve the ability of Small Business to be resilient and independent through the utilization of funds that are part of the profits of Fostering SOEs.



The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2017 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**1. PENJELASAN UMUM (lanjutan)**

**a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)**

Program Bina Lingkungan (BL) adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN Pembina.

**b. Kegiatan Utama**

Kegiatan utama yang dilakukan PKBL BRI meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Program Kemitraan (PK) meliputi kegiatan penyaluran dana berupa:
  - a) Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
  - b) Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.
2. Program Bina Lingkungan (BL) meliputi kegiatan penyaluran dana berupa:
  - a) Bantuan korban bencana alam;
  - b) Bantuan pendidikan dan/ atau pelatihan;
  - c) Bantuan peningkatan kesehatan;
  - d) Bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum;
  - e) Bantuan sarana ibadah;
  - f) Pelestarian alam;
  - g) Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk:
    - 1) Elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik;
    - 2) Penyediaan sarana air bersih;
    - 3) Penyediaan sarana Mandi Cuci Kakus;
    - 4) Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;
    - 5) Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
    - 6) Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau
    - 7) Bantuan peralatan usaha

**1. GENERAL DESCRIPTION (continued)**

**a. Establishment and General Information (continued)**

Community Development Program (BL) is SOE's community program whose objective is to empower the social condition of the community's business in the area through the utilization of funds from the profits of Fostering SOEs.

**b. Primary Activities**

The primary activities of PKBL BRI include the following activities:

1. Partnership Program (PK) includes the distribution of funds in the form of:
  - a) Loans to finance working capital and/or purchase of fixed asset in order to increase production and sales;
  - b) Additional loan distribution to finance the short-term funding, to fulfill orders from business partner of the Foster Partners.
2. Community Development Program (BL) includes the distribution of funds in the form of:
  - a) Aid for victims of natural disaster;
  - b) Aid for education and/ or training;
  - c) Aid for health improvement;
  - d) Development of public facilities and infrastructure;
  - e) Improvement of worship facilities;
  - f) Nature preservation;
  - g) Social assistance in order to alleviate poverty, include of:
    - 1) Electrification in areas that have not been electricity;
    - 2) Providing facilities for clean water;
    - 3) Providing facilities for toilet washing;
    - 4) Educational assistance, training, internship, promotion and other assistance related to improving the economic independence of small businesses other than Partnership Program Foster Partner;
    - 5) Repairing house for poor people;
    - 6) Assistance for agriculture, animal husbandry and fisheries; or
    - 7) Assistance of business equipment

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2017 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**1. PENJELASAN UMUM (lanjutan)**

**b. Kegiatan Utama (lanjutan)**

3. Melakukan pengawasan atas kegiatan penyaluran dana PKBL di unit kerja BRI dan pengawasan kegiatan usaha Mitra Binaan;
4. Melakukan pelaporan kegiatan PKBL.

**c. Sumber Dana**

Sumber dana PKBL BRI adalah berasal dari:

1. Penyisihan sebagian laba bersih PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan/atau anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
2. Penyisihan sebagian laba bersih PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan/atau anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
3. Saldo dana PKBL BRI yang berasal dari penyisihan sebagian laba PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2012;
4. Jasa administrasi pinjaman/margin/ bagi hasil Program Kemitraan, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana PKBL;
5. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.

**d. Susunan Pengelola**

Sebelum tanggal 27 April 2011, PKBL BRI adalah unit kerja bernama Bagian PKBL dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang secara struktural berada dibawah Divisi Bisnis Program dan Kemitraan, Direktorat Bisnis UMKM BRI yang bertugas mengelola dana PKBL BRI.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP. S.16-DIR/REN/04/2011 tanggal 27 April 2011 tentang Organisasi Divisi Sekretariat Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, menyatakan tentang penambahan fungsi Bagian *Corporate Social Responsibility* (CSR) dibawah Divisi Sekretariat Perusahaan yang bertugas untuk mengelola dana Bina Lingkungan.

**1. GENERAL DESCRIPTION (continued)**

**b. Primary Activities (continued)**

3. Monitoring of PKBL funds distribution in BRI working unit activities and the monitoring of business activities Foster Partners;
4. Reporting PKBL activities.

**c. Funding Resources**

Source of PKBL BRI's funding is derived from:

1. Provision of net income PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and/or budget which was calculated as expense in PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
2. Provision of net income PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and/or budget which calculated as an expense in PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
3. The PKBL funds balance that is derived from provision of the profits of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk allocated until the end of 2012;
4. Administrative services from Partnership Program loan/margin/profit-sharing, time deposits interest and/or current account services from PKBL funds;
5. Partnership Program funds handed over from other SOEs, if any.

**d. Management Structure**

Before April 27, 2011, PKBL BRI was a working unit called PKBL Section and Supervision of Microfinance Institution (MFI) that was structurally under the Partnership and Business Program Division, Directorate of MSME Business in charge of managing the PKBL BRI funds.

Based on PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Board of Directors' Decree NOKEP. S.16-DIR/REN/04/2011 dated April 27, 2011 regarding the Organization of Corporate Secretary Division of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, it was stated that functionality of Corporate Social Responsibility (CSR) was added under the Corporate Secretary Division that in charge of managing the Community Development funds.



The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2017 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**1. PENJELASAN UMUM (lanjutan)**

**1. GENERAL DESCRIPTION (continued)**

**d. Susunan Pengelola (lanjutan)**

**d. Management Structure (continued)**

Pembentukan Bagian CSR Divisi Sekretariat Perusahaan telah ada sejak tanggal 27 April 2011, akan tetapi Pengelolaan Dana Program Bina Lingkungan yang dulunya dikelola oleh Bagian PKBL dan Pengawasan LKM Divisi Bisnis Program dan Kemitraan dilimpahkan kepada Bagian *Corporate Social Responsibility* (CSR) Divisi Sekretariat Perusahaan efektif pada tanggal 30 Maret 2012 sesuai dengan Nota Dinas No. B.64.SKP/CSR/03/2012 dan No. B.148.PRG/KBL/03/2012 tanggal 30 Maret 2012.

CSR Department has been established as a part of Corporate Secretary Division since April 27, 2011, but the Community Development Programs Funds Management that was once managed by PKBL Section and Supervision MFI of Partnership and Business Program Division was effectively transferred to the Corporate Social Responsibility (CSR) Department of Corporate Secretary Division effective on March 30, 2012 in accordance with the Official Memo No. B.64.SKP/CSR/03/2012 and No. B.148.PRG/KBL/03/2012 dated March 30, 2012.

Susunan Pengelola PKBL BRI untuk tahun berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Management structure of PKBL BRI for the years ended December 31, 2017 and 2016 is as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2017	2016	
Direktur Kredit Mikro dan Ritel	Priyastomo	Mohammad Irfan	Director of Micro and Retail Loan Division
Kepala Divisi Bisnis Program, Pangan dan Kemitraan	Supardi Santoso	Supardi Santoso	Head of Business Program, Food and Partnership
Wakil Kepala Divisi	-	-	Deputy Head of Division
Kepala Bagian PKBL dan Pengawasan LKM	-	Gafyunedi	Department Head of PKBL and MFI Supervision
Wakil Kepala Bagian PKBL dan Pengawasan LKM	-	-	Deputy Head of PKBL and MFI Supervision
- Staf	Renatasia Sari	Renatasia Sari	Staff -
- Staf	Fitri Septianingsih	Fitri Septianingsih	Staff -
- Supervisor PKBL dan Pengawasan LKM	Mulyatno	Mulyatno	PKBL Supervisor and -
- Pelaksana	Fabby Fabianto	Fabby Fabianto	MFI Supervisor
- Pelaksana	-	-	Executive -
Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan	Hari Siaga Amijarso	Hari Siaga Amijarso	Executive -
Kepala Bagian <i>Corporate Social Responsibility</i>	Zainuddin Thalib Burutu	Zainuddin Thalib Burutu	Division Head of Corporate Secretary
Wakil Kepala Bagian <i>Corporate Social Responsibility</i>	Endra Tri Subehi	-	Department Head of Corporate Social Responsibility
- Staf	Abas Wahyudi	Abas Wahyudi	Deputy Department Head of Corporate Social Responsibility
- Staf	Agusman Muhammad Latif	Agusman Muhammad Latif	Staff -
- Staf	Adnan Dianda Prima	-	Staff -
- Staf	Salvandi Qito Pratama	-	Staff -
- Supervisor Operasional CSR	Nurhidayati	Nurhidayati	Operational Supervisor CSR -
- Pelaksana	Ceindry Indra Prayogo	Ceindry Indra Prayogo	Assistant -
- Pelaksana	-	Lia Lidya Putri	Assistant -

Seluruh pegawai adalah pegawai yang memperoleh gaji dan manfaat lainnya dari BRI sehingga masalah penetapan Imbalan Kerja (PSAK No. 24) dilaksanakan oleh dan menjadi beban BRI.

All employees are employees who earn salaries and other benefits from BRI so that the application of Employee Benefits (SFAS No. 24) is implemented by and charged to BRI.

Pemotongan dan penyeteroran atas PPh Pasal 21 atas pegawai BRI yang ditempatkan di PKBL BRI dilakukan oleh BRI.

Withholding and deposit of Income Tax Article 21 of BRI employees placed in PKBL BRI is conducted by BRI.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2017 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**1. PENJELASAN UMUM (lanjutan)**

**e. Unit Kerja Penyalur PKBL BRI**

Unit PKBL BRI terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:

1. Bagian PKBL dan Pengawasan LKM, Divisi Bisnis Program dan Kemitraan berlokasi di Gedung BRI II Lantai 28 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat sebagai penyalur dana pinjaman kemitraan.
2. Bagian Corporate Social Responsibility (CSR), Divisi Sekretariat Perusahaan berlokasi di Gedung BRI I Lantai 20 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat sebagai penyalur dana Bina Lingkungan.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 penyaluran dana PKBL BRI dilakukan di unit kerja BRI dengan rincian sebagai berikut (tidak diaudit):

No.	Unit Kerja	Jumlah Kantor Cabang/ Total Branches	Jumlah Kantor Cabang Pembantu/ Total Sub Branches	Working Units	No.
1.	Kantor Wilayah Aceh	11	15	Aceh Regional Office	1.
2.	Kantor Wilayah Medan	24	34	Medan Regional Office	2.
3.	Kantor Wilayah Padang	14	8	Padang Regional Office	3.
4.	Kantor Wilayah Pekanbaru	22	20	Pekanbaru Regional Office	4.
5.	Kantor Wilayah Palembang	21	29	Palembang Regional Office	5.
6.	Kantor Wilayah DKI Jakarta 1	26	54	DKI Jakarta 1 Regional Office	6.
7.	Kantor Wilayah DKI Jakarta 2	32	68	DKI Jakarta 2 Regional Office	7.
8.	Kantor Wilayah DKI Jakarta 3	36	57	DKI Jakarta 3 Regional Office	8.
9.	Kantor Wilayah Bandung	30	45	Bandung Regional Office	9.
10.	Kantor Wilayah Semarang	22	38	Semarang Regional Office	10.
11.	Kantor Wilayah Yogyakarta	33	34	Yogyakarta Regional Office	11.
12.	Kantor Wilayah Surabaya	25	39	Surabaya Regional Office	12.
13.	Kantor Wilayah Malang	24	36	Malang Regional Office	13.
14.	Kantor Wilayah Denpasar	31	27	Denpasar Regional Office	14.
15.	Kantor Wilayah Banjarmasin	31	31	Banjarmasin Regional Office	15.
16.	Kantor Wilayah Makassar	36	28	Makassar Regional Office	16.
17.	Kantor Wilayah Manado	17	18	Manado Regional Office	17.
18.	Kantor Wilayah Jayapura	13	13	Jayapura Regional Office	18.
19.	Kantor Wilayah Bandar Lampung	14	16	Bandar Lampung Regional Office	19.
	<b>Jumlah</b>	<b>462</b>	<b>610</b>	<b>Total</b>	

Unit Kerja penyalur meliputi Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu dibawah kelolaan masing-masing Kantor Wilayah BRI.

**f. Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan telah diselesaikan dan disahkan untuk diterbitkan oleh Pengelola PKBL BRI pada tanggal 19 Februari 2018.

**1. GENERAL DESCRIPTION (continued)**

**e. Distributor Working Units PKBL BRI**

PKBL BRI units consists of 2 (two) parts:

1. The PKBL Section and Supervision of MFI, Business Program and Partnership Division located in BRI II Building 28<sup>th</sup> Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Central Jakarta as the distributor of funds partnerships receivables.
2. Corporate Social Responsibility (CSR) Section, Corporate Secretariat Division located at BRI I Building 20<sup>th</sup> Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Central Jakarta as distributor of funds of Community Development.

As of December 31, 2017 and 2016 the distribution of funds of PKBL BRI conducted by BRI working unit are detailed as follows (unaudited):

Distributor Working Units includes Branches and Sub-Branches each managed by BRI Regional Office.

**f. Authorization of the Issuance of Financial Statement**

The financial statements were completed and authorized for issuance by PKBL BRI management on February 19, 2018.



*The original financial statements included herein are in Indonesian language.*

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2017 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Kebijakan akuntansi signifikan dan diterapkan dalam menyusun laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia, dan mempertimbangkan Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 yang dikeluarkan tanggal 23 Februari 2012 perihal Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas dalam satu periode yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, yang disusun dengan metode langsung.

Mata uang penyajian yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah.

**b. Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, setelah dikurangi cerukan, dan tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

**c. Piutang**

Piutang pinjaman Mitra Binaan merupakan pinjaman yang disalurkan oleh PKBL lewat unit kerja penyalur PKBL kepada Mitra Binaan sesuai ketentuan yang berlaku. Piutang pinjaman mitra binaan diakui pada saat pinjaman tersebut disalurkan kepada mitra binaan dan diukur serta dicatat sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

*The significant accounting policies adopted in preparing the financial statements for the years ended December 31, 2017 and 2016 are as follows:*

**a. Basis of Preparation of Financial Statements**

*The Financial statements are prepared in accordance with Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP) as issued by The Financial Accounting Standards Board - Indonesian Institute of Accountants, and considered Ministry of State-Owned Enterprises ("SOE") Circular No. SE-02/MBU/Wk/2012 dated February 23, 2012 Concerning Guidance of Accounting Standards for Partnership Program and Community Development.*

*The financial statements have been prepared on the accrual basis, except for certain accounts prepared based on other measurement as explained in related accounting policy.*

*The statement of cash flows presents information on receipts and payments of cash and cash equivalents during the year classified by operating, investing and financing activities, which is prepared using the direct method.*

*Currency used in the presentation of financial statements is the Indonesian rupiah.*

**b. Cash and Cash Equivalents**

*Cash and cash equivalents consist of cash, bank and all short-term investment with maturities in 3 (three) months or less from the acquisition date, after netted for overdraft, not pledged as collateral, also not restricted in use.*

**c. Receivables**

*Foster Partners loan receivables are loans distributed by PKBL through PKBL working units to Foster Partners according to applicable regulations. Foster partners loan receivables are recognized when the loans are disbursed to foster partners, and are measured and recorded at the net amount after deducting allowance for impairment losses.*

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2017 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**c. Piutang (lanjutan)**

Piutang kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pembina Lain/Lembaga Penyalur Lain merupakan pinjaman yang diberikan kepada unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)/Lembaga Penyalur lain sebagai bentuk sinergi antar unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Piutang kepada BUMN Pembina merupakan alokasi dana dari BUMN Pembina untuk Program Bina Lingkungan yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

Piutang selain dijelaskan di atas disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan pada akun Piutang Lain-lain.

Penggolongan kualitas piutang kemitraan ditetapkan sebagai berikut:

1. Lancar, apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran;
2. Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran;
3. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran;
4. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.

**d. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang**

Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang adalah penyisihan atas estimasi kerugian terhadap piutang yang mungkin tidak tertagih di masa yang akan datang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**c. Receivables (continued)**

Receivables from other Fostering SOEs Distribution Partners represent loans given to Partnership and Community Development Program (PKBL) units/other distributing Partners as a form of synergy among Partnership and Community Development Program units.

Receivable from Fostering SOE are funds allocation for Community Development Program which decided in the General Meeting of Shareholders ("GMS").

Loans other than those described above are presented in the Other Receivables account of the Statement of Financial Position.

The classification of receivables partnership based on collectibility is as follows:

1. Current, when principal installment and administration service income payment are paid on time or those whose late payments of principal and/or administration service is a maximum of 30 (thirty) days from the agreed payment date.
2. Substandard, when late payment of principal and/or administration service income payment are between 30 (thirty) days and 180 (one hundred eighty) days from the agreed payment date.
3. Doubtful, when late payment of principal and/or administration service income payment are between 180 (one hundred eighty) days and 270 (two hundred seventy) days from the agreed payment date.
4. Loss, when late payment of principal and/or administration service income payment are over 270 (two hundred seventy) days from the agreed payment date.

**d. Allowance for Impairment Losses on Receivables**

Allowance for impairment losses on receivables is the provision for estimated losses that might become uncollectible receivables in the future.



The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2017 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**d. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai  
Piutang (lanjutan)**

Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan dihitung secara kolektif berdasarkan prosentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun) sedangkan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang kepada BUMN pembina lain dihitung secara individual.

**e. Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu dan digunakan dalam operasi PKBL BRI serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset tetap diakui berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Aset tetap kecuali tanah, disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Tarif Penyusutan/tahun/ Depreciation Rate/year
Inventaris dan Peralatan	25%

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada saat terjadinya pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan, dikapitalisasi ke akun aset tetap yang bersangkutan. Jika aset tetap dihentikan pengakuannya, PKBL BRI harus menentukan keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dengan menghitung perbedaan, antara hasil penjualan neto (jika ada) dan jumlah tercatatnya.

**f. Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang masih harus dibayar adalah biaya-biaya yang masih harus dibayar PKBL BRI karena telah diterimanya jasa atau prestasi selama tahun berjalan tetapi belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi karena pembayarannya akan jatuh tempo pada tahun berikutnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**d. Allowance for Impairment Losses on  
Receivables (continued)**

Allowance for impairment losses on loan receivables from foster partners is calculated collectively based on specific percentage of available historical collectibility rate (minimum 2 years of historical data) while allowance for impairment losses on receivables to other Fostering SOEs Distribution Partners is calculated individually.

**e. Fixed Assets**

Fixed assets are tangible assets acquired off-the-shelf or are built for use in PKBL operations and have a useful life of more than one year.

Fixed assets are recognized at their historical costs less accumulated depreciation.

Fixed assets except for land are depreciated using straight-line method based on the estimated useful life as follows:

Masa Manfaat/ Useful Life	Fixed Asset Type
4	Premises and Equipment

Repairs and maintenance expense are charged as incurred, significant amount of renewal and addition is capitalized to relevant fixed assets account. If the fixed asset is derecognized, PKBL BRI should determine the gain or loss arising from the derecognition of fixed assets by calculating the difference between the net sale proceeds (if any) and the carrying amount.

**f. Accrued Expenses**

Accrued expenses are expenses that have to be paid by PKBL BRI as service that have been received in the current period have not been paid for at the end of current accounting period because payment will due in the next year.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2017 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**g. Aset Neto**

Aset neto adalah aset dikurangi dengan liabilitas. Aset neto diklasifikasikan menjadi Aset Neto Terikat (ANT) dan Aset Neto Tidak Terikat (ANTT).

ANT adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasi normal. ANT diklasifikasikan menjadi Aset Neto Terikat Temporer (ANTT) dan Aset Neto Terikat Permanen (ANTP).

Termasuk dalam pembatasan temporer adalah penyisihan dana BUMN Peduli yaitu dana program bina lingkungan yang disisihkan PKBL BRI untuk program Bina Lingkungan BUMN Peduli yang berasal dari saldo awal kas dana program bina lingkungan, pengembalian dana bina lingkungan yang gagal terealisasi dan alokasi laba BRI untuk program bina lingkungan.

ANTT adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

**h. Aset Neto Terikat Temporer (ANTT) - Berakhir Pemenuhan Program**

ANTT - berakhir pemenuhan program adalah dana aset neto terikat - alokasi BUMN peduli yang menurut ketentuan telah digunakan dalam rangka pelaksanaan program bina lingkungan BUMN Peduli (telah dipenuhi pembatasan programnya). Akun ini merupakan kontra akun ANTT - terbebaskan.

**i. Pendapatan Bunga**

Pendapatan bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil penempatan dana program kemitraan pada rekening giro bank. Pendapatan bunga disajikan setelah dikurangi pajak yang bersifat final dan biaya administrasi rekening.

**j. Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman**

Pendapatan jasa administrasi pinjaman adalah pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana program kemitraan yang disalurkan kepada Mitra Binaan. Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman diukur dan dicatat berdasarkan nilai yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak. Pendapatan jasa administrasi pinjaman diakui secara akrual hanya pada piutang dengan status lancar dan kurang lancar.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**g. Net Assets**

Net assets are assets less liabilities. Net assets are classified as Restricted Net Assets (ANT) and Unrestricted Net Assets (ANTT).

ANT is a resource which is restricted for a specific purpose or can not be used for normal operating activities. ANT is classified into Temporary-Restricted Net Assets (ANTT) and Permanent-Restricted Net Assets (ANTP).

Temporary restriction consists of provision for SOEs Cares fund which is community development fund that is set aside by PKBL BRI for Community Development program of SOEs Care that is derived from the beginning balance of the cash funds of Community Development program, the refund from community development which failed to realize and allocation of BRI profit for community development program.

ANTT are resources whose usage are unrestricted for a specific purpose.

**h. Temporary Restricted Net Assets - Ending Realization Program**

ANTT - ending realization program is restricted net assets fund - allocation of SOE Care according to the provisions which have been used in the implementation of community development program of SOEs Care (program restrictions have been met). This account is the contra of ANTT account - released.

**i. Interest Income**

Interest income is the income generated from fund placement partnership program on current account. Interest income presented after being deducted with final tax and administrative cost.

**j. Loan Administration Services Income**

Loan administration services income is service income from partnership program funds which is distributed to Foster Partner. Loan administration services income is measured and recognized based on the values that have matured according to the contract. Loan administration services income is only recognised using accrual basis for loan with current and substandard collectibility.



The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2017 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**k. Pendapatan dari BUMN Pembina**

Pendapatan dari BUMN pembina adalah pendapatan yang berasal dari alokasi dana yang ditetapkan oleh RUPS untuk dana PKBL.

Alokasi dana dari BUMN pembina diakui pada saat ditetapkan oleh RUPS dan diukur serta dicatat sebesar jumlah dana yang dialokasikan untuk PKBL sesuai dengan keputusan RUPS.

**l. Pendapatan Lain-lain**

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang tidak dapat digolongkan menurut klasifikasi dari pendapatan di atas. Pendapatan ini diakui menggunakan basis akrual.

**m. Dana pembinaan kemitraan (Hibah)**

Dana pembinaan kemitraan (Hibah) adalah penyaluran dana PKBL BRI sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Program Kemitraan, yang disalurkan melalui beberapa program yang disusun untuk membantu Mitra Binaan dalam rangka mengembangkan usahanya dengan besaran maksimal 20% dari dana Program Kemitraan tahun berjalan dan hanya diberikan kepada Mitra Binaan. Beban diakui pada saat dana disalurkan.

**n. Beban Pembinaan**

Beban pembinaan adalah beban yang dikeluarkan PKBL BRI berkaitan dengan penyaluran pinjaman kepada Mitra Binaan yang meliputi biaya survei, biaya *monitoring*, biaya penagihan pinjaman, dan biaya pelatihan pekerja atau pengurus PKBL BRI. Beban pembinaan diukur dan dicatat sebesar beban yang telah menjadi liabilitas sebagai akibat transaksi keuangan yang dilakukan oleh PKBL BRI.

**o. Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Pinjaman**

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman adalah beban yang timbul akibat pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih.

**k. Revenue from Fostering SOE**

Revenue from fostering SOE is an income from allocation of fund which is set by GMS for PKBL funds.

Allocation of fund from fostering SOEs is recognized when decided by GMS and it was measured and recorded at the amount of funds allocated in accordance with the GMS's decision.

**l. Other Income**

Other income is an income that cannot be classified according to the classification of income stated above. The income is recognized on an accrual basis.

**m. Fostering Partnership Funds (Grant)**

Fostering partnership funds (Grant) is a form through which Partnership Program is implemented. The grant, which is PKBL distribution fund is distributed through several programs designed to help the Foster Partner to expand its business with the amount of maximum 20% of current year partnership program funds and is only given to Foster Partners. The expenses are recognized when the funds are distributed.

**n. Empowerment Expenses**

Empowerment expenses are the expenses incurred by PKBL BRI on the distribution of Foster Partner loan. These costs include survey cost, monitoring cost, loan collection cost, and training cost of worker or management of PKBL BRI. Empowerment expenses are measured and recognized as expense which have become a liability as a result of financial transaction of PKBL BRI.

**o. Allowance for Impairment Losses on Loan Receivables**

Allowance for impairment losses on loan receivables are expense that arise from the allowance for impairment losses on loan receivables which might become uncollectible.

*The original financial statements included herein are in Indonesian language.*

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2017 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI  
DAN ASUMSI**

**a. Pertimbangan**

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi PKBL BRI, Pengelola telah membuat pertimbangan-pertimbangan berikut ini yang telah terpisah dari estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan:

Implementasi PER-09/MBU/07/2015

Sehubungan dengan penerapan PER-09/MBU/07/2015 yang telah diungkapkan dalam Catatan 1a, disyaratkan bahwa beban operasional Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan menjadi beban PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku BUMN Pembina. Dengan demikian, beban tersebut tidak dicatat oleh PKBL BRI dalam laporan aktivitas.

Sesuai dengan RUPS Luar Biasa yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2015, yang telah diungkapkan dalam Catatan 12, dinyatakan bahwa PER-09/MBU/07/2015 diberlakukan pada tahun 2016.

Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas piutang pinjaman mitra binaan, PKBL BRI mengestimasi penyisihan untuk kerugian penurunan nilai atas piutang yang secara khusus diidentifikasi sebagai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Tingkat penyisihan ditelaah oleh Pengelola dengan dasar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut.

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas piutang kepada BUMN Pembina lain, tingkat cadangan ditelaah oleh Pengelola dengan dasar peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal dan berdampak pada arus kas masa datang yang dapat diestimasi secara handal.

**3. ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATION AND ASSUMPTION**

**a. Judgment**

*In the implementation process of PKBL BRI's accounting policies, Management has prepared these judgments, apart from estimation and assumption, which have significant impact to the amounts recognized in the financial statements:*

The implementation of PER-09/MBU/07/2015

*In relation to the implementation of PER-09/MBU/07/2015 as disclosed in Note 1a, required that the operational expenses of Partnership and Community Development Program to be recognized by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as Fostering SOE. Therefore, such expense was not recorded by PKBL BRI in the statement of Activity.*

*In accordance with Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") that held at December 14, 2015 as disclosed in Note 12, it was stated that PER-09/MBU/07/2015 was enacted in 2016.*

Allowance for impairment losses on loan receivables

*If there is objective evidence that impairment losses has been incurred on loan to foster partners, PKBL BRI estimates an allowance for impairment losses of those loans specifically identified as possibly uncollectible. The level of allowance is examined by Management based on several factors influencing the receivables collectibility.*

*If there is objective evidence that impairment losses has been incurred on Loan to other Fostering SOEs, the level of allowance for impairment losses of those loans is evaluated by the Management on the basis of an adverse event has occurred after the initial recognition and impact on the future cash flows that can be reliably estimated.*



The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2017 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI  
DAN ASUMSI (lanjutan)**

**a. Pertimbangan (lanjutan)**

**Penyisihan kerugian penurunan nilai  
piutang pinjaman (lanjutan)**

PKBL BRI menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan PKBL BRI dengan Mitra Binaan dan status kredit berdasarkan kualitas pinjaman kemitraan.

**b. Estimasi dan asumsi**

PKBL BRI berkesinambungan mengevaluasi adanya bukti objektif bahwa piutang mengalami penurunan nilai pada tiap akhir periode pelaporan. Tingkat penyisihan ditelaah oleh manajemen dengan dasar faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut. Dalam kasus ini, PKBL BRI menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta terbaik yang tersedia untuk mengakui penyisihan spesifik (individu) terhadap jumlah yang jatuh tempo untuk menurunkan piutang PKBL BRI ke jumlah yang diharapkan dapat ditagih.

Untuk penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman kepada BUMN Pembina lain dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yaitu secara individual berdasarkan estimasi arus kas masa datang.

PKBL BRI juga meneliti penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif terhadap resiko kredit Mitra Binaan yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, yang meskipun tidak diidentifikasi secara spesifik memerlukan penyisihan tertentu, memiliki risiko yang lebih besar tidak tertagih dibandingkan dengan piutang yang diberikan kepada Mitra Binaan. Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan dihitung berdasarkan kajian nilai terkini dan historis tingkat ketertagihan dari piutang. Penyisihan piutang mitra binaan dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yaitu secara kolektif berdasarkan prosentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal dua tahun). Penyisihan ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan estimasi.

**3. ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATION  
AND ASSUMPTION (continued)**

**a. Judgment (continued)**

**Allowance for impairment losses on loan  
receivables (continued)**

PKBL BRI uses judgments based on available facts and circumstances, including but not limited to, PKBL BRI's period of relationship with Foster Partners and fostering partner's loan status based on collectibility of loans.

**b. Estimations and Assumptions**

PKBL BRI continually assesses the existence of objective evidence that the receivables are impaired at the end of each reporting period. The level of allowance is evaluated by management on the basis of factors that affect the collectibility of said receivables. In this case, PKBL BRI uses judgment based on the best facts available to recognize a specific allowance (individual) against the amount due to lower receivables PKBL BRI to the expected in order collectible amount.

Allowance for impairment losses on loans receivables from other Fostering SOE are calculated based on the estimated losses that cannot be collected individually based on the estimated future cash flows.

PKBL BRI also assesses the allowance for impairment losses collectively towards credit risks of Foster Partners which are grouped based on the same credit risk, regardless whether an allowance has not been specifically identified, have a higher risk of uncollectibility compared to loan given to Foster Partners. Allowance for impairment losses on loan is measured based on the evaluation of current value and historical rate of loan collectibility. Allowance for impairment losses on loan receivables is recognised based on the estimation of uncollectible amount which is done collectively based on a specific percentage (two years minimum) of historical rate of loan collectibility. This allowance is adjusted periodically to reflect actual result and estimation.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2017 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**4. KAS PADA BANK**

Kas pada Bank merupakan penempatan dana PKBL pada rekening giro di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016
<b>Program Kemitraan</b>		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Penampungan Pokok - setelah Tbk	159.937.757.887	345.258.638.386
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - setelah Tbk	78.525.929.102	27.227.070.556
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Penampungan Pokok - sebelum Tbk	52.745.332.034	52.116.483.307
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Penampungan Bunga - setelah Tbk	32.018.180.704	31.805.673.352
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Penampungan Bunga - sebelum Tbk	4.904.811.576	4.846.334.657
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - sebelum Tbk	3.975.320.651	3.927.925.454
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Operasional	328.188.552	549.422.364
	<u>332.435.520.506</u>	<u>465.731.548.076</u>
<b>Bina Lingkungan</b>		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bina Lingkungan	231.905.633.801	343.712.930.576
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BUMN Peduli	749.264.690	276.016.341.791
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bina Lingkungan Komitmen BRI	283.197.057.267	740.331.689
	<u>515.851.955.758</u>	<u>620.469.604.056</u>
<b>Jumlah Kas pada Bank</b>	<b>848.287.476.264</b>	<b>1.086.201.152.132</b>

Tingkat suku bunga giro pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 2,00%.

**5. PIUTANG KEPADA BUMN PEMBINA  
LAIN/LEMBAGA PENYALUR**

Piutang kepada BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016
PKBL PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)	67.500.005.000	71.000.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>67.500.005.000</b>	<b>71.000.000.000</b>
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang kepada BUMN pembina lain/lembaga penyalur	(16.362.150.268)	(16.905.874.481)
<b>Neto</b>	<b>51.137.854.732</b>	<b>54.094.125.519</b>

**4. CASH IN BANK**

Cash in Bank is PKBL fund placement in the following current account of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:

	31 Desember/ December 31, 2016
<b>Partnership Program</b>	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Principal Escrow - after Tbk	345.258.638.386
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - after Tbk	27.227.070.556
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Principal Escrow - before Tbk	52.116.483.307
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Interest Escrow - after Tbk	31.805.673.352
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Interest Escrow - before Tbk	4.846.334.657
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - before Tbk	3.927.925.454
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Operational	549.422.364
	<u>465.731.548.076</u>
<b>Community Development</b>	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bina Lingkungan	343.712.930.576
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BUMN Peduli	276.016.341.791
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bina Lingkungan Komitmen BRI	740.331.689
	<u>620.469.604.056</u>

**Total Cash in Bank**

The current account's interest rate for December 31, 2017 and 2016 are 2.00%, respectively.

**5. RECEIVABLES FROM OTHER FOSTERING  
SOE/DISTRIBUTING PARTNERS**

Receivables from other Fostering SOE/Distributing Partners as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2016
PKBL PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)	71.000.000.000
<b>Total</b>	<b>71.000.000.000</b>
Less: allowance for impairment losses on receivables from other fostering SOE/ distributing partners	(16.905.874.481)
<b>Net</b>	<b>54.094.125.519</b>



The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2017 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**5. PIUTANG KEPADA BUMN PEMBINA  
LAIN/LEMBAGA PENYALUR (lanjutan)**

Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang kepada BUMN pembina lain/lembaga penyalur adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember/ December 31, 2017</b>
<b>Saldo awal tahun</b>	16.905.874.481
(Pembalikan)/pembentukan penyisihan selama tahun berjalan	(543.724.213)
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>16.362.150.268</b>

**PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)**

Berdasarkan Persetujuan Kredit No. B.171-DIR/PRG/03/2013 dan No. PTPN IX-0/KOTR/009/2013 antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) tanggal 11 Maret 2013, PKBL BRI menyalurkan pinjaman kemitraan sebesar Rp75.000.000.000 yang diperuntukkan kepada petani/kelompok petani untuk budidaya tanaman tebu untuk masa tanam 2013/2014 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6% per tahun dan memiliki jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Maret 2015.

Pada tanggal 10 November 2014, PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) mengajukan permohonan perpanjangan pengembalian pinjaman kemitraan tersebut sampai dengan Desember 2015, yang disetujui oleh PKBL BRI pada tanggal 17 Februari 2015.

Pada tanggal 8 Januari 2016, PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) mengajukan kembali permohonan perpanjangan pengembalian pinjaman kemitraan sampai dengan Desember 2019.

Pada tanggal 4 April 2017, dilakukan pembahasan antara PKBL BRI dengan PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) yang menghasilkan kesepakatan untuk kembali memperpanjang jangka waktu pengembalian pinjaman kemitraan sampai dengan triwulan keempat 2020 dengan jumlah pembayaran cicilan setiap bulan yang sudah ditentukan diawal. Telah terdapat pembayaran pokok di bulan April dan Oktober 2017 sebesar Rp3.499.995.000.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang kepada BUMN pembina lain/lembaga penyalur cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

**5. RECEIVABLES FROM OTHER FOSTERING  
SOE/DISTRIBUTING PARTNERS (continued)**

Movements in allowance for impairment losses on receivables from other fostering SOE/distributing partners are as follows:

	<b>31 Desember/ December 31, 2016</b>	
	6.562.744.862	<b>Beginning balance</b>
	10.343.129.619	(Reversal)/allowance for impairment during the year
	<b>16.905.874.481</b>	<b>Ending balance</b>

**PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)**

Based on Credit Agreement No. B.171-DIR/PRG/03/2013 and No. PTPN IX-0/KOTR/009/2013 between PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) dated March 11, 2013, PKBL BRI grants partnership loan amounting to Rp75,000,000,000 for farmers/farmers group for cultivation of sugar cane for planting season 2013/2014 with a fixed annual interest rate of 6% for 24 (twenty four) months that would mature on March 11, 2015.

On November 10, 2014, PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) proposed extending the partnership of loan repayment until December 2015, which was approved by PKBL BRI dated February 17, 2015.

On January 8, 2016, PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) repropoed extending the partnership of loan repayment until December 2019.

On April 4, 2017, a discussion was held between PKBL BRI and PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) which resulted in an agreement to re-extend the term of repayment of the partnership loan up to the fourth quarter of 2020 with the amount of monthly installment payment determined at the earliest. There have been payments of principal in April and October 2017 amounting to Rp3,499,995,000.

Management believes that the allowance for impairment losses on receivables from the other fostering SOE/distributing partners is adequate to cover losses from uncollectible receivables.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2017 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**6. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN**

**6. LOAN RECEIVABLES FROM FOSTER PARTNERS**

**a. Berdasarkan Kantor Wilayah**

**a. By Regional Offices**

Kantor Wilayah	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	Regional Offices
Malang	51.813.615.414	7.538.146.443	Malang
Yogyakarta	31.827.800.724	15.256.674.072	Yogyakarta
Denpasar	22.232.211.901	8.425.540.041	Denpasar
Makassar	20.097.795.695	10.216.025.907	Makassar
Semarang	16.782.724.252	6.849.641.180	Semarang
Surabaya	16.284.001.566	10.877.765.558	Surabaya
Bandung	14.736.833.772	11.937.264.758	Bandung
Banjarmasin	13.166.650.545	8.633.061.410	Banjarmasin
Bandar Lampung	10.675.182.414	7.058.348.487	Bandar Lampung
DKI Jakarta 2	9.684.413.313	5.638.284.993	DKI Jakarta 2
Palembang	9.325.182.479	5.338.832.834	Palembang
Medan	7.995.134.780	2.674.501.979	Medan
Manado	7.779.257.383	4.416.119.422	Manado
Banda Aceh	7.692.663.901	7.447.185.723	Banda Aceh
Padang	6.979.482.709	5.129.756.379	Padang
DKI Jakarta 3	6.216.283.515	3.711.222.671	DKI Jakarta 3
Pekanbaru	4.603.904.551	3.757.735.674	Pekanbaru
Jayapura	3.758.943.567	3.292.565.378	Jayapura
DKI Jakarta 1	2.050.022.075	1.168.847.775	DKI Jakarta 1
<b>Jumlah</b>	<b>263.702.104.556</b>	<b>129.367.520.684</b>	<b>Total</b>
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan	(36.174.341.728)	(34.598.316.377)	Less: allowance for impairment losses on loan receivables from foster partners
<b>Neto</b>	<b>227.527.762.828</b>	<b>94.769.204.307</b>	<b>Net</b>

**b. Berdasarkan Sektor Ekonomi**

**b. By Economic Sector**

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
Perdagangan, Hotel dan Restoran	138.036.980.180	73.407.573.147	Trading, Restaurants and Hotels
Pertanian	98.086.350.346	38.426.325.996	Agriculture
Jasa Lainnya	13.128.802.141	7.379.241.751	Services Industry
Industri Pengolahan	10.107.208.031	7.704.054.887	Processing Industries
Sosial Masyarakat	2.845.106.677	1.812.721.515	Community Services
Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi	1.141.410.201	452.464.288	Transportation, Warehousing and Communications
Listrik, Gas dan Air	234.024.380	62.500.200	Electricity, Gas and Water
Konstruksi	122.222.600	99.305.300	Construction
Perumahan	-	-	Housing
Pertambangan	-	23.333.600	Mining
<b>Jumlah</b>	<b>263.702.104.556</b>	<b>129.367.520.684</b>	<b>Total</b>
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan	(36.174.341.728)	(34.598.316.377)	Less: allowance for impairment losses on loan receivables from foster partners
<b>Neto</b>	<b>227.527.762.828</b>	<b>94.769.204.307</b>	<b>Net</b>



The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2017 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**6. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)**

**6. LOAN RECEIVABLES FROM FOSTER PARTNERS (continued)**

**c. Berdasarkan Kualitas Piutang Pinjaman**

**c. Loan Receivables By Collectibility**

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
<b>Piutang Pinjaman Mitra Binaan</b>			<b>Loan Receivables from Foster Partners</b>
Lancar	223.730.374.569	90.749.161.619	Current
Kurang Lancar	3.559.145.897	3.529.461.633	Substandard
Diragukan	1.633.098.360	1.246.158.378	Doubtful
Macet	34.779.485.730	33.842.739.054	Loss
<b>Jumlah</b>	<b>263.702.104.556</b>	<b>129.367.520.684</b>	<b>Total</b>
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan	(36.174.341.728)	(34.598.316.377)	Less: allowance for impairment losses on loan receivables from foster partners
<b>Neto</b>	<b>227.527.762.828</b>	<b>94.769.204.307</b>	<b>Net</b>

**d. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Kepada Mitra Binaan**

**d. Allowance for Impairment Losses on Loan Receivables from Foster Partners**

Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman kepada Mitra Binaan adalah sebagai berikut:

Movements in allowance for impairment losses on loan receivables from foster partners are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
<b>Saldo awal tahun</b>	34.598.316.377	33.090.458.534	<b>Beginning balance</b>
Pembentukan penyisihan selama tahun berjalan	1.576.025.351	1.507.857.843	Allowance for impairment during the year
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>36.174.341.728</b>	<b>34.598.316.377</b>	<b>Ending balance</b>

Alokasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman kepada Mitra Binaan adalah sebagai berikut:

Allocation for allowance for impairment losses on loan receivables from foster partners are as follows:

31 Desember 2017/December 31, 2017			
	Saldo Piutang Pinjaman/ Loan Receivables Balance	Akumulasi penyisihan kerugian penurunan nilai/ Accumulated allowance for impairment losses	Neto/Net
Lancar	223.730.374.569	(835.015.598)	222.895.358.971
Kurang Lancar	3.559.145.897	(208.207.628)	3.350.938.269
Diragukan	1.633.098.360	(351.632.772)	1.281.465.588
Macet	34.779.485.730	(34.779.485.730)	-
<b>Jumlah</b>	<b>263.702.104.556</b>	<b>(36.174.341.728)</b>	<b>227.527.762.828</b>

Current  
Substandard  
Doubtful  
Loss

**Total**

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2017 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**6. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)**

**6. LOAN RECEIVABLES FROM FOSTER PARTNERS (continued)**

**d. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai  
Piutang Pinjaman Kepada Mitra Binaan**

**d. Allowance for Impairment Losses on Loan  
Receivables from Foster Partners**

31 Desember 2016/December 31, 2016

	Saldo Piutang Pinjaman/ Loan Receivables Balance	Akumulasi penyisihan kerugian penurunan nilai/ Accumulated allowance for impairment losses	Neto/Net	
Lancar	90.749.161.619	(374.743.839)	90.374.417.780	Current
Kurang lancar	3.529.461.633	(171.662.079)	3.357.799.554	Substandard
Diragukan	1.246.158.378	(209.171.405)	1.036.986.973	Doubtful
Macet	33.842.739.054	(33.842.739.054)	-	Loss
<b>Jumlah</b>	<b>129.367.520.684</b>	<b>(34.598.316.377)</b>	<b>94.769.204.307</b>	<b>Total</b>

Manajemen berpendapat bahwa saldo penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman kepada mitra binaan cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the balance of allowance for impairment losses on loan receivables from foster partners is adequate to cover losses from uncollectible loan.

**7. PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI PINJAMAN  
YANG MASIH AKAN DITERIMA**

**7. ACCRUED LOAN ADMINISTRATION SERVICES  
INCOME**

Pendapatan jasa administrasi pinjaman yang masih akan diterima berdasarkan kantor wilayah adalah sebagai berikut:

Accrued loan administration services income by regional offices are as follows:

Kantor Wilayah	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	Regional Offices
Malang	193.822.689	94.411.624	Malang
Yogyakarta	131.924.981	53.160.211	Yogyakarta
Semarang	93.696.143	39.443.028	Semarang
Bandung	81.888.270	53.584.276	Bandung
Banjarmasin	81.317.727	36.134.797	Banjarmasin
Surabaya	72.809.646	59.351.661	Surabaya
Bandar Lampung	64.012.684	61.713.080	Bandar Lampung
Makassar	57.295.875	46.754.626	Makassar
Manado	56.438.854	62.253.035	Manado
Denpasar	46.419.512	46.131.044	Denpasar
DKI Jakarta 2	31.509.327	22.136.775	DKI Jakarta 2
Palembang	22.642.852	22.593.840	Palembang
Banda Aceh	21.235.815	19.996.907	Banda Aceh
Padang	17.513.795	17.363.675	Padang
Pekanbaru	14.583.775	12.221.882	Pekanbaru
Medan	14.177.420	20.781.667	Medan
DKI Jakarta 3	10.949.496	5.142.743	DKI Jakarta 3
Jayapura	9.063.163	11.384.645	Jayapura
DKI Jakarta 1	4.994.048	2.516.832	DKI Jakarta 1
<b>Jumlah</b>	<b>1.026.296.072</b>	<b>687.076.348</b>	<b>Total</b>



The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2017 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**8. PIUTANG LAIN-LAIN**

Piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp24.974.479.409 dan Rp9.001.092.980, terdiri dari alokasi dana dari PKBL BRI kepada Unit Kerja (cabang) Penyalur PKBL BRI tetapi belum disalurkan kepada Mitra Binaan sampai dengan akhir periode pelaporan.

**8. OTHER RECEIVABLES**

Other receivables as of December 31, 2017 and 2016 amounting to Rp24,974,479,409 and Rp9,001,092,980, respectively, consist of allocated funds from PKBL BRI to PKBL BRI distributor working unit (branches) but not yet distributed to foster partner until the end of the reporting period.

**9. ASET TETAP**

Aset tetap adalah sebagai berikut:

**9. FIXED ASSETS**

Fixed assets are as follows:

31 Desember/December 31, 2017					
	Saldo 1 Januari 2017/ Balance January 1, 2017	Mutasi/Movement		Saldo 31 Desember 2017/ Balance December 31, 2017	
		Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Disposal		
<u>Harga Perolehan</u> Inventaris dan peralatan	71.089.105	-	-	71.089.105	<u>Acquisition Cost</u> Premises and equipment
<u>Akumulasi Penyusutan</u> Inventaris dan peralatan	(70.194.730)	863.125	-	(71.057.855)	<u>Accumulated Depreciation</u> Premises and equipment
<b>Nilai Buku Neto</b>	<b>894.375</b>			<b>31.250</b>	<b>Net Book Value</b>
31 Desember/December 31, 2016					
	Saldo 1 Januari 2016/ Balance January 1, 2016	Mutasi/Movement		Saldo 31 Desember 2016/ Balance December 31, 2016	
		Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Disposal		
<u>Harga Perolehan</u> Inventaris dan peralatan	71.089.105	-	-	71.089.105	<u>Acquisition Cost</u> Premises and equipment
<u>Akumulasi Penyusutan</u> Inventaris dan peralatan	(67.754.105)	2.440.625	-	(70.194.730)	<u>Accumulated Depreciation</u> Premises and equipment
<b>Nilai Buku Neto</b>	<b>3.335.000</b>			<b>894.375</b>	<b>Net Book Value</b>

**10. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR**

Beban yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp54.054.085.143 dan Rp21.140.870.351, yang terdiri dari bina lingkungan yang telah atau sedang dilaksanakan oleh Unit Kerja (cabang) BRI namun belum diganti atau dibayar kembali oleh Unit PKBL BRI.

**10. ACCRUED EXPENSES**

Accrued expenses as of December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp54,054,085,143 and Rp21,140,870,351, respectively, which consist of community development that have been or are being performed by the BRI working unit (branches) but not yet reimbursed by PKBL BRI Unit.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2017 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**11. ASET NETO**

**Aset Neto Tidak Terikat**

	<u>31 Desember/ December 31, 2017</u>
<b>Saldo awal tahun</b>	1.477.590.095.310
Kenaikan/(Penurunan) Aset Neto Tidak Terikat	(378.690.279.898)
<b>Saldo akhir tahun</b>	<u><b>1.098.899.815.412</b></u>

**11. NET ASSETS**

**Unrestricted Net Assets**

	<u>31 Desember/ December 31, 2016</u>	
<b>Saldo awal tahun</b>	1.309.938.814.446	<b>Beginning balance</b>
Kenaikan/(Penurunan) Aset Neto Tidak Terikat	167.651.280.864	<b>Increase/(Decrease) in Unrestricted Net Assets</b>
<b>Saldo akhir tahun</b>	<u><b>1.477.590.095.310</b></u>	<b>Ending balance</b>

**12. ALOKASI DANA DARI BUMN PEMBINA**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba BUMN sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Salinan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan serta perubahan terakhir pada PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013, yang menyatakan bahwa Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sebelum tahun 2013 salah satunya bersumber dari penyisihan laba setelah pajak dan pada tahun 2013 berasal dari Anggaran Perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya, maksimal 2% dari laba bersih tahun sebelumnya.

Pada tahun 2015, dikeluarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015, yang menyatakan bahwa dana PKBL bersumber dari penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya.

Pada tahun 2016, dikeluarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang terbaru No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 19 Desember 2016, yang menambahkan bahwa dana PKBL juga bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN Pembina.

**12. ALLOCATION OF FUND FROM FOSTERING SOE**

Based on the Minister of Finance Decree Letter No. 316/KMK.016/1994 regarding Guidelines for Small Business Enterprise and Cooperation through the Utilization of fund from SOE's profit as amended several times with Minister of SOEs' Copy Regulation No. PER-05/MBU/2007 dated April 27, 2007 regarding SOEs Partnership Program with Small Business Enterprises and Community Development Program, as well as the latest amendment No. PER-08/MBU/2013 dated September 10, 2013, which stated that one of the the fund sources of Partnership and Community Development Program before 2013 is from the provision from profit after tax and the source in 2013 is from the Company's budget calculated as expense, maximum of 2% from prior year's net profit.

In 2015, Ministry of SOEs' issued Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 dated July 3, 2015 which stated that PKBL fund derived from the provision of net income after tax which is set by GMS/Ministry's Approval of Annual Report of Fostering SOEs is at maximum of 4% (four percent) from the prior year's net profit after tax.

Ministry of SOEs' recently developed Regulation No. PER-03/MBU/12/2016 on December 19, 2016. This new regulation further adds the source through which PKBL fund can be derived, that is from Fostering SOE's budget expenditure or expense.



The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2017 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**12. ALOKASI DANA DARI BUMN PEMBINA  
(lanjutan)**

Alokasi dana pada tahun 2017 dan 2016 sebagai berikut:

**Tahun 2017**

Berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan No. 37 tanggal 15 Maret 2017 yang telah disahkan oleh Notaris dan Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fathiah Helmi, SH dinyatakan tidak ada pembentukan biaya untuk PKBL untuk tahun 2017.

**Tahun 2016**

Berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan No. 30 tanggal 23 Maret 2016 yang telah disahkan oleh Notaris dan Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fathiah Helmi, SH dinyatakan bahwa alokasi dana Program Bina Lingkungan untuk tahun 2016 sebesar Rp253.977,42 juta menjadi beban BUMN Pembina.

Per tanggal 31 Desember 2016, PKBL BRI telah mencatat alokasi dana dari BUMN Pembina sebagai pendapatan di Laporan Aktivitas dan piutang kepada BUMN Pembina di Laporan Posisi Keuangan. Namun demikian, hingga tanggal laporan posisi keuangan, alokasi dana tersebut belum diterima dalam rekening bank PKBL BRI, karena PKBL BRI masih menggunakan saldo dana Program Bina Lingkungan yang berasal dari penyesihan laba BUMN Pembina yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2012.

Per tanggal 31 Desember 2017, telah dilakukan pencatatan beban atas alokasi dana dari BUMN Pembina yang tidak direalisasikan ke rekening bank PKBL BRI berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2017 yang menyatakan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tahun 2016 telah diputuskan alokasi dana untuk Program Bina Lingkungan tahun 2016 menjadi beban Perseroan, namun oleh karena masih terdapat sisa saldo dana bina lingkungan yang teralokasi pada tahun 2015 maka penggunaan anggaran program bina lingkungan tahun 2016 menggunakan sisa saldo dana bina lingkungan yang masih tersisa pada tahun 2016.

**12. ALLOCATION OF FUND FROM FOSTERING  
SOE (continued)**

Allocation of fund in 2017 and 2016 are as follows:

**Year 2017**

Based on the Minutes of General Meeting of Shareholders No. 37 dated March 15, 2017 that was legalised by Notary and Land Registrar Fathiah Helmi, SH it was stated that there is no allocation of profit from fostering SOEs for PKBL BRI for the fiscal year 2017.

**Year 2016**

Based on the Minutes of General Meeting of Shareholders No. 30 dated March 23, 2016 that was legalised by Notary and Land Registrar Fathiah Helmi, SH, it was decided that funds amounting to Rp253,977.42 million that was allocated to 2016 Community Development Program are to be expensed by Fostering SOE.

As of December 31, 2016, PKBL BRI has recognized the allocation of fund from the Fostering SOE as revenue in the Statement of Activities and as receivables from Fostering SOE in the Statement of Financial Position. However, until the statement of financial position date, such allocation of fund has not been received in the bank account's of PKBL BRI, since PKBL BRI still use Partnership and Community Development Program funds which are derived from Fostering SOE's profit provision allocated until 2012.

As of December 31, 2017, the carrying out of the allocation of funds from fostering SOE which is not realized to PKBL's Bank account has already been recorded as an expense based on the Annual GMS dated March 15, 2017 stating that at the General Meeting of Shareholders held in 2016 it has been decided the allocation of funds for the Community Development Program 2016 becomes the expense of the Company, but because there is still remaining balance of Community Development Program funds allocated in 2015 then the use of Community Development Program budget in 2016 using the remaining balance of Community Development Program funds in 2016.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2017 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**13. PENDAPATAN BUNGA**

Pendapatan bunga dari jasa giro untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year ended December 31,	
	2017	2016
<b>Program Kemitraan</b>		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Penampungan Pokok - setelah Tbk	6.972.197.441	6.452.735.902
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - setelah Tbk	316.494.246	1.475.356.976
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Penampungan Pokok - sebelum Tbk	786.060.907	778.803.430
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Penampungan Bunga - setelah Tbk	558.883.469	435.279.950
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Penampungan Bunga - sebelum Tbk	73.096.149	72.421.273
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - sebelum Tbk	59.243.995	58.697.011
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Operasional	7.268.359	8.212.046
	<u>8.773.244.566</u>	<u>9.281.506.588</u>
<b>Bina Lingkungan</b>		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bina Lingkungan	6.104.909.810	8.355.877.226
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BUMN Peduli	5.586.149.502	5.003.626.622
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bina Lingkungan Komitmen BRI	11.166.253	11.063.157
	<u>11.702.225.565</u>	<u>13.370.567.005</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>20.475.470.131</u></b>	<b><u>22.652.073.593</u></b>

Pendapatan bunga disajikan setelah dikurangi pajak yang bersifat final dan biaya administrasi rekening yaitu sebesar Rp4.096.444.026 dan Rp4.533.743.339 tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

**13. INTEREST INCOME**

Interest income from current account for the years ended December 31, 2017 and 2016 are as follows:

<b>Partnership Program</b>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Principal Escrow - after Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - after Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Principal Escrow - before Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Interest Escrow - after Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Interest Escrow - before Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - before Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Operational
<b>Community Development</b>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bina Lingkungan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BUMN Peduli
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bina Lingkungan Komitmen BRI
<b>Total</b>

Interest income presented after being deducted with final tax and administrative expense amounting to Rp4,096,444,026 and Rp4,533,743,339, for the years ended December 31, 2017 and 2016, respectively.

**14. PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI PINJAMAN**

Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Program Kemitraan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Kantor Wilayah	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year ended December 31,	
	2017	2016
Surabaya	634.345.304	617.943.933
Bandung	672.394.121	431.034.822
Makassar	597.896.550	440.934.565

**14. LOAN ADMINISTRATION SERVICES INCOME**

Loan administration services income of Partnership Program for the years ended December 31, 2017 and 2016 are as follows:

Regional Offices
Surabaya
Bandung
Makassar



The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2017 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**14. PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI  
PINJAMAN (lanjutan)**

Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Program Kemitraan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut (lanjutan):

Kantor Wilayah	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year ended December 31,		Regional Offices
	2017	2016	
Semarang	499.595.601	380.372.443	Semarang
Denpasar	319.831.357	374.310.458	Denpasar
Malang	452.775.237	299.912.121	Malang
Yogyakarta	807.293.323	281.236.980	Yogyakarta
Bandar Lampung	436.945.828	269.967.034	Bandar Lampung
DKI Jakarta 2	402.541.731	209.812.900	DKI Jakarta 2
Banda Aceh	385.576.659	203.554.867	Banda Aceh
Palembang	235.959.642	178.161.162	Palembang
Banjarmasin	461.987.991	170.015.710	Banjarmasin
Pekanbaru	254.071.712	168.990.974	Pekanbaru
Medan	156.392.967	138.722.523	Medan
Manado	147.125.100	131.439.919	Manado
Padang	228.854.542	117.480.090	Padang
Jayapura	128.613.683	92.303.070	Jayapura
DKI Jakarta 3	153.756.726	91.368.893	DKI Jakarta 3
DKI Jakarta 1	53.012.227	86.616.756	DKI Jakarta 1
Kantor Cabang Khusus	1.000.000	-	Kantor Cabang Khusus
<b>Jumlah</b>	<b>7.029.970.301</b>	<b>4.684.179.220</b>	<b>Total</b>

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-01/MBU/2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang Pemberlakuan Jasa Administrasi Pinjaman Kemitraan, PKBL BRI menerbitkan surat edaran Nota No. B.79-DIR/PRG/12/2007 tanggal 19 Desember 2007 perihal Bunga Pinjaman Kemitraan dan telah diperbaharui dengan Surat No. B.176-DIR/PRG/03/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang perubahan distribusi/komposisi bunga Pinjaman Kemitraan.

Berikutnya perubahan atas distribusi/komposisi bunga Pinjaman Kemitraan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 dan perubahan terakhir dilakukan berdasarkan PER-02/MBU/07/2017 dimana PKBL BRI menerbitkan Surat No. B.136.e-PPK/KPL/08/2017 tanggal 18 Agustus 2017 dengan perubahan sebagai berikut:

	Setelah 18 Agus/ After Augst 18, 2017	Setelah 31 Des/ After Dec 31, 2015	Setelah 13 Maret/ After March 13, 2013	
Jasa Administrasi/Suku Bunga	3%	6%	6%	Administration Services/Interest Rates

**14. LOAN ADMINISTRATION SERVICES INCOME  
(continued)**

Loan administration services income of Partnership Program for the years ended December 31, 2017 and 2016 are as follows (continued):

Based on Minister of SOEs' Circular Letter No. SE-01/MBU/2007 dated August 31, 2007 regarding The Application of Partnership Loan Administration Services, PKBL BRI issued Memorandum Circular No. B.79-DIR/PRG/12/2007 dated December 19, 2007 regarding Interest Partnership Loan and that has been updated with Letter No. B.176-DIR/PRG/03/2013 dated March 13, 2013 regarding changes in distribution/composition of Partnership Loan interest.

Subsequent changes to the distribution/composition of the Partnership Loan interest shall be made in accordance with the Minister of SOE Decree No. PER-09 /MBU/07/2015 dated July 3, 2015 and the latest amendment was made pursuant to PER-02 / MBU / 07/2017 where PKBL BRI issued Letter no. B.136.e-KDP/MPA/08/2017 date August 18, 2017 with the following changes:

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2017 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

<b>14. PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI PINJAMAN (lanjutan)</b>	<b>Setelah 18 Agus/ After Augst 18, 2017</b>	<b>Setelah 31 Des/ After Dec 31, 2015</b>	<b>Setelah 13 Maret/ After March 13, 2013</b>	<b>14. LOAN ADMINISTRATION SERVICES INCOME (continued)</b>
Distribusi jasa administrasi/ suku bunga sebagai berikut:				<i>Distribution of administration services/ interest rates are as follows:</i>
Pelimpahan ke Kantor Pusat	3%	6%	1%	<i>Transferred to Head Office</i>
Dana kompensasi beban operasional Kantor Cabang	-	-	1,5%	<i>Compensation funds for operating expenses of Branch Office</i>
Dana pembinaan kemitraan Kantor Cabang	-	-	2,5%	<i>Fostering partnership funds of Branch Office</i>
Dana pembinaan dan pengawasan kemitraan Kantor Wilayah	-	-	1%	<i>Fostering and monitoring Partnership funds of Regional Office</i>
<b>15. PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>				<b>15. OTHER INCOME</b>
	<b>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year ended December 31,</b>			
	<b>2017</b>	<b>2016</b>		
Pengembalian dana dari koordinator sektor BUMN Peduli	2.711.795.876	28.553.874.044		<i>Refund from BUMN Peduli coordinator</i>
Pengembalian dana pinjaman kemitraan karena tidak jadi realisasi	-	5.357.518.681		<i>Refund from unrealized foster partners Loan</i>
Pengembalian kelebihan dana bina lingkungan	745.720.085	1.764.141.319		<i>Return of excess fund from community development</i>
<b>Jumlah</b>	<b>3.457.515.961</b>	<b>35.675.534.044</b>		<b>Total</b>

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, pengembalian dana dari koordinator sektor BUMN Peduli terutama berasal dari PT Pos Indonesia dan Perum Perumnas.

As of December 31, 2017 and 2016, refund from BUMN Peduli coordinator is mainly from PT Pos Indonesia and Perum Perumnas.

**16. DANA PEMBINAAN KEMITRAAN**

Dana pembinaan kemitraan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp197.510.500 dan Rp Nihil digunakan untuk penyelenggaraan pameran atas usaha Mitra Binaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tertanggal 3 Juli 2015, dana pembinaan kemitraan menjadi bagian dari program penyaluran dana bina lingkungan dengan nama "Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas mitra binaan".

**16. FOSTERING PARTNERSHIP FUNDS**

Fostering partnership funds for the year ended December 31, 2017 and 2016 which amounted Rp197,510,500 and Rp Nil, respectively, were used for the business exhibitions of foster partners.

Based on Minister of SOE Decree No. PER-09/MBU/07/2015, dated July 3, 2015, the fostering partnership fund is a part of funds ditribution for community development under the name of "Funds for education, training, internship, marketing, promotion and other forms of assistance related to the efforts of increasing the capacity of foster entrepreneur of Partnership Program."



The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2017 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**16. DANA PEMBINAAN KEMITRAAN (lanjutan)**

Sesuai dengan Berita Acara RUPS LB No. 13 tanggal 14 Desember 2015 dinyatakan bahwa Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan diberlakukan pada tahun 2016 di PKBL BRI.

Perkembangan berikutnya, berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tertanggal 19 Desember 2016, dana pembinaan kemitraan yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai bagian dari program penyaluran dana bina lingkungan berubah menjadi program yang didanai dari dana program kemitraan.

Sesuai dengan Berita Acara RUPS No. 37 tanggal 15 Maret 2017 dinyatakan bahwa Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan diberlakukan pada tahun 2017 di PKBL BRI.

**17. PENYALURAN DANA PROGRAM BINA LINGKUNGAN**

Penyaluran dana program bina lingkungan adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year ended December 31,	
	2017	2016
Bantuan Pendidikan	32.990.028.609	27.027.916.471
Bantuan Sosial		
Pengentasan Kemiskinan	32.094.333.268	25.724.377.567
Bantuan Sarana Umum	31.455.378.146	26.463.322.958
Bantuan Sarana Ibadah	29.095.446.575	27.177.503.630
Bantuan Peningkatan Kesehatan	21.596.164.343	22.827.520.022
Bantuan Korban Bencana Alam	2.394.042.761	1.414.781.307
Pelestarian Alam	723.303.800	1.992.366.872
Peningkatan Kapasitas Mitra Binaan	-	80.795.000
<b>Jumlah</b>	<b>150.348.697.502</b>	<b>132.708.583.827</b>

**18. BEBAN LAIN-LAIN**

Beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp Nihil dan Rp242.170.740, dimana terdiri dari pemberian jasa administrasi kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar Rp242.170.740 pada tahun 2016.

**16. FOSTERING PARTNERSHIP FUNDS (continued)**

According to Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 13 dated December 14, 2015 it was stated that the Minister of SOE Decree No. PER-09/MBU/07/2015 dated July 3, 2015 regarding Partnership and Community Development Program will be enacted by PKBL BRI in 2016.

The next development, based on Minister of SOE Decree No. PER-03/MBU/12/2016, dated December 19, 2016, the fostering partnership fund previously classified as part of funds ditribution for community development turned into a program funded by a partnership program fund.

According to Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 37 dated March 15, 2017 it was stated that the Minister of SOE Decree No. PER-03/MBU/12/2016 dated December 19, 2016 concerning amendment to Minister of SOE Decree No. PER-09/MBU/07/2015 regarding Partnership and Community Development Program will be enacted by PKBL BRI in 2017.

**17. COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM FUNDS DISTRIBUTION**

Community development program funds distribution are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year ended December 31,	
	2017	2016
Bantuan Pendidikan	32.990.028.609	27.027.916.471
Bantuan Sosial		
Pengentasan Kemiskinan	32.094.333.268	25.724.377.567
Bantuan Sarana Umum	31.455.378.146	26.463.322.958
Bantuan Sarana Ibadah	29.095.446.575	27.177.503.630
Bantuan Peningkatan Kesehatan	21.596.164.343	22.827.520.022
Bantuan Korban Bencana Alam	2.394.042.761	1.414.781.307
Pelestarian Alam	723.303.800	1.992.366.872
Peningkatan Kapasitas Mitra Binaan	-	80.795.000
<b>Jumlah</b>	<b>150.348.697.502</b>	<b>132.708.583.827</b>

**18. OTHER EXPENSES**

Other expenses for the years ended December 31, 2017 and 2016, amounting to Rp Nil and Rp242,170,740, respectively, which consisted of administration services to PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) amounting to Rp242,170,740 for the year 2016.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2017 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**18. BEBAN LAIN-LAIN (lanjutan)**

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Pasal 13 dinyatakan bahwa beban operasional Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan menjadi beban BUMN Pembina.

**18. OTHER EXPENSES (continued)**

Based on Minister of SOE Decree No. PER-09/MBU/07/2015 Article 13 it was stated that operational expense of Partnership and Community Development Program are to be expensed by Fostering SOE.

**19. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**

a. Jenis hubungan dan unsur transaksi dengan pihak berelasi

**19. RELATED PARTY TRANSACTIONS**

a. Type of relationships and transactions with related party

<b>Pihak berelasi/ Related parties</b>	<b>Jenis hubungan/ Type of relationship</b>	<b>Unsur transaksi pihak berelasi/ Transactions with related parties</b>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Common control through central government	Kas, pendapatan bunga dan beban yang masih harus dibayar kepada BUMN Pembina/Cash, interest income and accrued expenses to Fostering SOE
PT Perkebunan Nusantara IX	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Common control through central government	Piutang kepada BUMN Pembina lain dan beban lain-lain/Receivables from other fostering SOE and other expenses
BUMN Peduli	Pengendalian melalui Kementerian BUMN/Common control through Ministry of SOE	Pengembalian dana program BUMN Peduli/Refund from BUMN Peduli coordinator

b. Rincian saldo transaksi dengan pihak berelasi

b. Details of transaction balances with related party

	<b>31 Desember/ December 31, 2017</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2016</b>	
<b>Aset</b>			<b>Asset</b>
Kas pada Bank	848.287.476.264	1.086.201.152.132	Cash in Bank
Piutang kepada BUMN pembina lain - bersih	51.137.854.732	54.094.125.519	Receivables from other fostering SOE/distributing partners - net
Piutang kepada BUMN Pembina	-	253.977.420.000	Receivables from Fostering SOE
<b>Jumlah</b>	<b>899.425.330.996</b>	<b>1.394.272.697.651</b>	<b>Total</b>
<b>Persentase jumlah aset kepada pihak berelasi terhadap jumlah aset</b>	<b>78,01%</b>	<b>93,03%</b>	<b>Percentage total asset to related party of total asset</b>
<b>Liabilitas</b>			<b>Liability</b>
Beban yang masih harus dibayar	54.054.085.143	21.140.870.351	Accrued Expenses
<b>Jumlah</b>	<b>54.054.085.143</b>	<b>21.140.870.351</b>	<b>Total</b>
<b>Persentase jumlah liabilitas kepada pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>Percentage total liability to related party of total liability</b>
<b>Pendapatan</b>			<b>Revenue</b>
Pendapatan dari BUMN pembina	-	253.977.420.000	Revenue from fostering SOE
Pendapatan bunga	16.379.026.105	18.118.330.254	Interest Income



The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2017 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**19. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI  
(lanjutan)**

b. Rincian saldo transaksi dengan pihak berelasi  
(lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2017
<b>Pendapatan (lanjutan)</b>	
Pendapatan lain-lain - pengembalian dana dari koordinator sektor BUMN Peduli	2.711.795.876
<b>Jumlah</b>	<b>19.090.821.981</b>
<b>Persentase jumlah pendapatan dari pihak berelasi terhadap jumlah pendapatan</b>	<b>69,65%</b>
Beban lain-lain	-
Beban pembalikan piutang kepada BUMN Pembina	253.977.420.000
<b>Jumlah</b>	<b>253.977.420.000</b>
<b>Persentase jumlah beban kepada pihak berelasi terhadap jumlah beban</b>	<b>62,54%</b>

**19. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continue)**

b. Details of transaction balances with related  
party (continue)

	31 Desember/ December 31, 2016	
		<b>Revenue (continued)</b>
		Other Income - refund from BUMN Peduli coordinator
	28.553.874.044	
	<b>300.649.624.298</b>	<b>Total</b>
		<b>Percentage total revenue from related party of total revenue</b>
	96,22%	
		Other expenses
	242.170.740	Reversal of receivables from Fostering SOE expenses
	-	
	<b>242.170.740</b>	<b>Total</b>
		<b>Percentage total expense to related party of total expense</b>
	0,17%	

**20. PEMBATASAN PENGGUNAAN DANA**

**Kep.100/MBU/2002**

**Program Kemitraan**

**a. Penilaian Efektivitas**

Penilaian kinerja program kemitraan dan bina lingkungan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. Kep.100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 mencakup Program Kemitraan dengan Indikator Tingkat Efektivitas penyaluran dan Tingkat Kolektabilitas Pengembalian Pinjaman.

Tingkat efektivitas penyaluran dana dihitung dengan cara membagi jumlah dana yang disalurkan dengan jumlah dana yang tersedia. Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari pinjaman modal kerja. Sedangkan jumlah dana yang tersedia terdiri dari saldo awal periode ditambah dengan pengembalian pinjaman (pokok ditambah bunga) dan pendapatan bunga dari program kemitraan.

Tabel skor tingkat penyerapan dana

Penyerapan %	>90	85 s.d 90	80 s.d 85	<80	% of absorption
Skor	3	2	1	0	Score

**20. RESTRICTED FUND USAGE**

**Kep.100/MBU/2002**

**Partnership Program**

**a. Effectivity Performance**

The performance evaluation of partnership and community development program is based on the Minister of SOE Decree No. Kep.100/MBU/2002 dated June 4, 2002 regarding The Effectiveness Indicator of Partnership Program Loan Distribution and the Collectability of the Loan Repayments.

The effectiveness of loan distribution is calculated by dividing the amount of distributed funds by the amount of the utilizable funds. Amount of distributed funds represents all current year funds distribution to small enterprise businesses and cooperation. The funds are distributed as working capital loans. Utilizable funds is calculated by adding the beginning balance with loan repayments (principal and the interest repayments) and with interest income from partnership program.

Score of funds absorption table

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2017 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**20. PEMBATASAN PENGGUNAAN DANA (lanjutan)**

**Kep.100/MBU/2002 (lanjutan)**

**Program Kemitraan (lanjutan)**

	<b>Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017/ Year ended December 31, 2017</b>
<b>Distribusi dana</b>	
Jumlah dana yang disalurkan	209.359.335.950
Dana Pembinaan Kemitraan (Catatan 16)	197.510.500
	<u>209.556.846.450</u>
<b>Dana yang tersedia</b>	
Saldo awal kas	
Program Kemitraan (Catatan 4)	465.731.548.076
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan	59.051.365.649
Pendapatan Jasa Administrasi	
Pinjaman	6.690.750.577
Pengembalian dari BUMN pembina lain	3.499.995.000
	<u>534.973.659.302</u>
<b>Tingkat efektivitas penyaluran (prosentase distribusi dana terhadap dana yang tersedia)</b>	<u><b>39,17%</b></u>
<b>Skor tingkat efektivitas penyaluran pinjaman</b>	<u><b>0</b></u>

**b. Tingkat Kolektabilitas Penyaluran Pinjaman**

Indikator lain dalam penilaian kinerja program kemitraan dan bina lingkungan yaitu tingkat kolektabilitas pengembalian pinjaman yang mana memberi indikasi kemungkinan tertagihnya suatu pinjaman. Tingkat kolektabilitas pengembalian pinjaman merupakan perbandingan antara rata-rata tertimbang kolektabilitas pinjaman terhadap jumlah pinjaman yang disalurkan (saldo pinjaman). Rata-rata tertimbang kolektabilitas pinjaman adalah perkalian antara bobot kolektabilitas dengan saldo pinjaman berdasarkan kualitas pinjaman (lancar, kurang lancar, ragu-ragu dan macet). Bobot kolektabilitas dengan kualitas lancar (100%), kurang lancar (75%), ragu-ragu (25%) dan macet (0%).

Skor tingkat kolektabilitas pengembalian pinjaman adalah sebagai berikut:

Tingkat Pengembalian (%)	>70	40 s.d 70	10 s.d 40	<10	% of Collectability Level
Skor	3	2	1	0	Score

**20. RESTRICTED FUND USAGE (continued)**

**Kep.100/MBU/2002 (continued)**

**Partnership Program (continued)**

	<b>Fund distribution</b>
<b>Distribution of Funds</b>	
<i>Fostering Partnership Funds (Note 16)</i>	
<b>Fund available</b>	
<i>Cash of Partnership Program</i>	
<i>Beginning balance (Note 4)</i>	
<i>Repayments from Foster Partners</i>	
<i>Administration Service Income of</i>	
<i>Loan</i>	
<i>Repayments from other fostering SOE</i>	
<b>Level of the effectiveness of the loan distribution (percentage fund distribution to fund available)</b>	<b>39,17%</b>
<b>Score of level of the effectiveness of the loan distribution</b>	<b>0</b>

**b. Collectability level of the Loan Distribution**

Another performance indicator of partnership and community development program is the collectability of repayments which indicates the probability of a loan to be fully paid. The collectability level is calculated by comparing the weighted average collectability funds with distributed funds. Weighted average funds is the result of multiplying the collectability weightage with the balance of each quality of the loan (e.g: current: 100%, substandard: 75%, doubtful: 25% and troubled: 0%)

Score of loan repayments collectability level is as follows:



The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2017 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**20. PEMBATASAN PENGGUNAAN DANA (lanjutan)**

**Kep.100/MBU/2002 (lanjutan)**

**Program Kemitraan (lanjutan)**

**b. Tingkat Kolektabilitas Penyaluran Pinjaman**

Rata-rata tertimbang kolektabilitas pinjaman per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Kualitas Pinjaman	Saldo pinjaman (Catatan 6)/ Loan balance (Note 6)	%	(tidak diaudit) Jumlah rata-rata tertimbang/ (unaudited) Weighted Average Amount	Loan Quality
Lancar	223.730.374.569	100%	223.730.374.569	Current
Kurang Lancar	3.559.145.897	75%	2.669.359.423	Substandard
Diragukan	1.633.098.360	25%	408.274.590	Doubtful
Macet	34.779.485.730	0%	-	Troubled
<b>Jumlah</b>	<b>263.702.104.556</b>		<b>226.808.008.582</b>	<b>Total</b>
Tingkat kolektabilitas pengembalian pinjaman (prosentase jumlah rata-rata tertimbang kolektabilitas pinjaman terhadap saldo pinjaman yang disalurkan)		89,80%	Loan repayment collectability level (percentage of weighted average loan collectability to loan distribution)	
Nilai tingkat kolektabilitas pengembalian pinjaman		3	Score of repayments collectability level	

**PER-03/MBU/12/2016**

**Program Kemitraan**

Prosentase dana pembinaan terhadap dana program kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan

PER-09/MBU/07/2015 pasal 9 ayat 4 menyatakan bahwa besarnya dana pembinaan kemitraan yang terdiri dari biaya pendidikan, pemasaran, promosi dan hal lain-lain besarnya maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari dana program kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan. Dana pembinaan menjadi bagian dari program bina lingkungan.

Pada tanggal 19 Desember 2016, PER-09/MBU/07/2015 direvisi dengan PER-03/MBU/12/2016, dimana beban pembinaan kemitraan menjadi bagian dari realisasi program kemitraan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 9 ayat 1c, efektif 19 Desember 2016.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, presentase beban dana pembinaan terhadap penyaluran program kemitraan adalah sebagai berikut:

**PER-03/MBU/12/2016**

**Partnership Program**

The percentage of fostering partnership funds to current year funds distribution for partnership program

PER-09/MBU/07/2015 art 9 paragraph 4 specified that the amount of fostering partnership funds which consists of education, marketing, promotion expense, etc is 20% (twenty percent) at maximum of the partnership program distribution during the year. Development funds is part of community development program.

As of December 19, 2016, PER-09/MBU/07/2015 revised with PER-03/MBU/12/2016, which stipulates that fostering partnership expense is a part of partnership program as stated in Art 9 paragraph 1c, effective December 19, 2016.

For the year ended December 31, 2017, the percentage of fostering partnership funds to current year partnership program funds distribution is as follows:

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2017 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**20. PEMBATASAN PENGGUNAAN DANA (lanjutan)**

**PER-03/MBU/12/2016 (lanjutan)**

**Program Kemitraan (lanjutan)**

	<b>Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017/ Year ended December 31, 2017</b>
Dana pembinaan kemitraan (Catatan 16)	197.510.500
Penyaluran program kemitraan	209.359.335.950
	<u>209.556.846.450</u>

**Prosentase dana pembinaan kemitraan  
terhadap dana program kemitraan  
yang disalurkan**

**20. RESTRICTED FUND USAGE (continued)**

**PER-03/MBU/12/2016 (continued)**

**Partnership Program (continued)**

	<b>Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017/ Year ended December 31, 2017</b>
Dana pembinaan kemitraan (Catatan 16)	197.510.500
Penyaluran program kemitraan	209.359.335.950
	<u>209.556.846.450</u>

**Percentage of fostering partnership  
funds to partnership funds  
distribution**

**0,09%**

**21. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN**

Manajemen PKBL BRI bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan PKBL PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2018.

**21. COMPLETION OF FINANCIAL STATEMENTS**

The Management of PKBL BRI is responsible for the preparation and presentation of financial statements of PKBL PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk which has been completed and approved to be issued on February 19, 2018.

**22. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN**

**Perubahan susunan Pengelola PKBL BRI**

Berdasarkan Surat Keputusan xxx No. xxx tanggal 22 Januari 2018, terdapat perubahan posisi Kepala Divisi Bisnis Program Pangan dan Kemitraan dan Kepala Dvisi Sekretariat Perusahaan dari Supardi Santoso dan Hari Siaga Amijarso menjadi Bambang Tribaroto dan xxx.

**22. EVENT AFTER THE DATE OF REPORTING PERIOD**

**Changes in the composition of management of PKBL BRI**

Based on Decree of xxx No. xxx dated January 22, 2018, there was changes on position Division Head of Business Program, Food and Partnership and Division Head of Corporate Secretary form Supardi Santoro and Hari Siaga Amijarso to Bambang Tribaroto and xxx .



## Lampiran/Appendix 1

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
LAPORAN PENYALURAN DANA  
PROGRAM BINA LINGKUNGAN  
Tanggal 31 Desember 2016 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
STATEMENT OF COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM FUNDS DISTRIBUTION  
As of December 31, 2016 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**Laporan Penyaluran Dana Program Bina  
Lingkungan Tahun 2017**

**Statement of Community Development Program  
Funds Distribution Year 2017**

No.	Kantor Wilayah/ Regional Offices	Bantuan Sarana Umum/ Public Facility Donation	Bantuan Korban Bencana Alam/ Aid for Victims of Nature Disaster	Bantuan Pendidikan/ Aid for Education Donation	Bantuan Peningkatan Kesehatan/ Aid for Health Improvement	Bantuan Sarana Ibadah/ Improvement of Worship Facilities	Pelestarian Alam/ Nature Preservation	Bantuan Sosial Pengentasan Kemiskinan/ Social Assistance in order to Alleviate Poverty	Jumlah/ Total
1	Banda Aceh	941.650.816	224.976.000	739.903.116	365.000.000	412.520.000	-	652.312.000	3.236.361.932
2	Bandar Lampung	827.200.000	-	1.162.248.886	487.700.000	474.672.000	-	1.468.516.000	4.420.336.886
3	Bandung	1.625.414.289	50.450.925	736.363.000	1.917.900.000	205.836.200	-	1.063.238.900	5.599.203.314
4	Banjarmasin	1.015.993.950	44.410.000	841.985.850	886.550.000	383.295.550	-	266.434.700	3.438.670.050
5	Denpasar	4.261.789.620	769.535.000	1.521.782.800	1.956.038.245	1.146.501.000	-	1.523.658.500	11.179.305.165
6	DKI Jakarta 1	1.580.700.000	-	344.539.684	1.715.618.257	397.680.000	-	1.294.938.760	5.333.476.701
7	DKI Jakarta 2	290.215.444	-	1.854.059.900	1.580.014.500	2.867.350.000	-	629.126.560	7.120.766.404
8	DKI Jakarta 3	103.920.544	58.986.000	353.462.684	2.466.470.368	3.364.990.000	-	943.884.686	7.291.714.282
9	Jayapura	924.702.000	-	906.171.721	529.172.883	350.000.000	-	785.792.000	3.495.838.604
10	Kantor Pusat	1.330.620.279	107.116.286	9.240.293.161	909.292.500	8.025.330.475	-	12.981.872.216	32.594.524.917
11	Makassar	3.723.073.713	55.000.000	1.793.729.250	1.723.639.090	721.368.000	65.000.000	1.505.592.500	9.587.402.553
12	Malang	3.644.380.500	221.330.800	2.486.291.796	3.769.915.000	1.902.988.000	83.500.000	1.804.640.000	13.913.046.096
13	Manado	355.750.000	48.355.000	616.436.115	309.818.000	979.760.000	196.500.000	35.320.000	2.541.939.115
14	Medan	1.570.872.773	-	744.420.000	130.000.000	729.000.000	-	746.700.000	3.920.992.773
15	Padang	1.514.283.000	225.000.000	902.165.000	108.000.000	350.000.000	-	555.050.000	3.654.498.000
16	Palembang	2.360.748.017	30.175.000	248.959.500	375.250.000	265.693.600	-	671.425.000	3.952.251.117
17	Pekanbaru	227.504.000	-	263.415.000	417.000.000	-	-	612.592.775	1.520.511.775
18	Semarang	1.884.758.826	87.578.650	2.485.094.746	68.990.400	3.197.975.000	378.303.800	926.475.000	9.029.176.422
19	Surabaya	2.095.125.000	205.085.000	3.588.029.400	855.295.100	2.295.714.250	-	992.532.500	10.031.781.250
20	Yogyakarta	1.176.675.375	266.044.100	2.160.677.000	1.024.500.000	1.024.772.500	-	2.834.231.171	8.486.900.146
	<b>Jumlah/ Total</b>	<b>31.455.378.146</b>	<b>2.394.042.761</b>	<b>32.990.028.609</b>	<b>21.596.164.343</b>	<b>29.095.446.575</b>	<b>723.303.800</b>	<b>32.094.333.268</b>	<b>150.348.697.502</b>

## Lampiran/Appendix 1

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
LAPORAN PENYALURAN DANA  
PROGRAM BINA LINGKUNGAN  
Tanggal 31 Desember 2016 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
STATEMENT OF COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM FUNDS DISTRIBUTION  
As of December 31, 2016 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**Laporan Penyaluran Dana Program Bina  
Lingkungan Tahun 2016**

**Statement of Community Development Program  
Funds Distribution Year 2016**

No.	Kantor Wilayah/ Regional Offices	Bantuan Sarana Umum/ Public Facility Donation	Bantuan Korban Bencana Alam/ Aid for Victims of Nature Disaster	Bantuan Pendidikan/ Aid for Education Donation	Bantuan Peningkatan Kesehatan/ Aid for Health Improvement	Bantuan Sarana Ibadah/ Improvement of Worship Facilities	Pelestarian Alam/ Nature Preservation	Bantuan Sosial Pengentasan Kemiskinan/ Social Assistance in order to Alleviate Poverty	Peningkatan Kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan/ Capacity Enhancement for Foster Partners	Jumlah/ Total
1	Banda Aceh	347.179.400	455.344.500	88.300.000	218.400.000	938.275.415	50.000.000	391.188.520	-	2.488.687.835
2	Bandar Lampung	274.841.000	-	544.015.000	156.500.000	462.840.000	154.250.000	350.532.000	-	1.942.978.000
3	Bandung	312.000.000	160.191.306	916.675.412	2.232.765.001	1.200.278.000	154.792.500	691.057.500	-	5.667.759.719
4	Banjarmasin	517.659.250	25.000.000	95.700.000	534.895.150	600.000.000	107.813.000	263.490.000	-	2.144.557.400
5	Denpasar	1.927.742.950	-	824.284.350	619.300.000	920.013.200	269.250.080	1.460.888.000	-	6.021.478.580
6	DKI Jakarta 1	473.782.500	3.275.000	563.100.495	536.750.000	2.838.156.000	-	212.649.150	-	4.627.713.145
7	DKI Jakarta 2	459.747.500	38.518.600	1.893.892.200	452.100.000	2.173.198.000	97.500.000	149.329.320	-	5.264.285.620
8	DKI Jakarta 3	930.191.200	49.904.000	490.000.000	1.134.486.060	443.850.000	340.001.882	482.496.400	-	3.870.929.542
9	Jayapura	3.170.512.993	-	787.491.900	306.083.500	250.000.000	24.500.000	7.762.037.335	-	12.300.625.728
10	Kantor Pusat	5.593.438.000	-	11.374.322.000	8.699.830.444	11.190.878.300	-	8.788.688.191	-	45.647.156.935
11	Makassar	2.416.790.137	44.594.000	233.215.513	679.150.000	646.730.000	-	496.520.000	54.940.000	4.571.939.650
12	Malang	1.166.801.000	19.918.750	2.002.412.500	1.232.600.001	1.308.888.100	381.250.000	289.903.820	-	6.401.774.171
13	Manado	546.290.438	45.000.000	371.488.150	592.750.000	783.000.000	-	234.537.750	-	2.573.066.338
14	Medan	327.820.000	200.000.000	668.063.000	100.000.000	1.272.804.000	30.000.000	407.700.000	-	3.006.387.000
15	Padang	892.401.000	69.795.000	231.121.000	35.000.000	150.000.000	-	622.160.000	-	2.000.477.000
16	Palembang	986.052.000	25.000.000	385.487.000	636.378.866	-	118.931.410	473.392.000	-	2.625.241.276
17	Pekanbaru	740.735.000	-	91.000.000	443.500.000	35.800.000	-	268.256.000	-	1.579.291.000
18	Semarang	514.921.700	6.000.000	661.273.300	993.645.000	230.194.900	-	562.325.000	-	2.968.359.900
19	Surabaya	2.476.615.890	37.000.000	3.048.954.175	1.151.445.000	1.204.161.515	264.078.000	92.079.000	25.855.000	8.300.188.580
20	Yogyakarta	2.387.801.000	235.240.151	1.757.120.476	2.071.941.000	528.436.200	-	1.725.147.581	-	8.705.686.408
	<b>Jumlah/ Total</b>	<b>26.463.322.958</b>	<b>1.414.781.307</b>	<b>27.027.916.471</b>	<b>22.827.520.022</b>	<b>27.177.503.630</b>	<b>1.992.366.872</b>	<b>25.724.377.567</b>	<b>80.795.000</b>	<b>132.708.583.827</b>

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN  
MENURUT WILAYAH DAN  
SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN  
Tanggal 31 Desember 2016 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES  
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY  
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR  
As of December 31, 2016 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program  
Kemitraan Tahun 2017**

**Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility  
Classified by Regional and Economic Sector Year 2017**

No.	Kantor Wilayah/ Regional Office	Industri Pengolahan/ Processing Industries	Jasa Lainnya/ Other Services	Konstruksi/ Construction	Listrik, Gas, dan Air Panas/ Electricity, Gas and Water	Pengangkutan, Perdagangan, dan Komunikasi/ Transportation, Warehousing and Communications	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ Trading, Restaurant and Hotels	Pertanian/ Agriculture	Pertambangan/ Mining	Sosial Masyarakat/ Community Services	Jumlah/ Total
1	<b>Banda Aceh</b>										
	Lancar/ Current	216.758.323	466.182.169	-	72.916.700	-	4.503.683.933	475.359.276	-	165.000.600	5.899.901.001
	Kurang Lancar/ Substandard	-	-	-	-	-	73.522.677	17.708.100	-	-	91.230.777
	Diragukan/ Doubtful	-	-	-	-	57.000.200	136.433.070	-	-	-	193.433.270
	Macek/ Loss	-	121.031.845	-	-	16.300.000	1.252.479.241	112.730.967	-	5.556.800	1.508.098.853
	<b>Sub jumlah/ Sub total</b>	<b>216.758.323</b>	<b>587.214.014</b>	<b>-</b>	<b>72.916.700</b>	<b>73.300.200</b>	<b>5.866.118.921</b>	<b>605.798.343</b>	<b>-</b>	<b>170.557.400</b>	<b>7.692.663.901</b>
2	<b>Bandar Lampung</b>										
	Lancar/ Current	326.402.565	470.907.334	-	-	-	4.221.773.510	4.685.764.607	-	5.207.700	9.690.055.716
	Kurang Lancar/ Substandard	-	-	-	-	-	87.666.329	39.904.000	-	34.040.000	161.610.329
	Diragukan/ Doubtful	-	-	-	-	-	66.767.000	-	-	-	66.767.000
	Macek/ Loss	-	14.609.667	-	-	-	298.431.800	442.707.902	-	-	756.749.369
	<b>Sub jumlah/ Sub total</b>	<b>326.402.565</b>	<b>485.517.001</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.675.638.639</b>	<b>5.148.376.509</b>	<b>-</b>	<b>39.247.700</b>	<b>10.675.182.414</b>



## Lampiran/Appendix 2

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM**  
**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES**  
**PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY**  
**CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR**  
**As of December 31, 2016 and**  
**For the Year then Ended**  
**(Expressed in Rupiah)**

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**  
**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN**  
**MENURUT WILAYAH DAN**  
**SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016 dan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program**  
**Kemitraan Tahun 2017 (lanjutan)**

**Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility**  
**Classified by Regional and Economic Sector Year 2017 (continued)**

No.	Kantor Wilayah/ Regional Office	Industri Pengolahan/ Processing Industries	Jasa Lainnya/ Other Services	Konstruksi/ Construction	Listrik, Gas, dan Air/ Electricity, Gas and Water	Pengangkutan, Perdagangan, dan Komunikasi/ Transportation, Warehousing and Communications	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ Trading, Restaurants and Hotels	Pertanian/ Agriculture	Pertambangan/ Mining	Sosial Masyarakat/ Community Services	Jumlah/ Total
3	<b>Bandung</b>										
	Lancar/ Current	555.908.216	190.278.802	-	37.900.600	-	6.654.984.186	2.699.832.866	-	85.277.800	10.223.782.470
	Kurang Lancar/ Substandard	37.500.187	-	-	-	-	307.937.244	75.000.000	-	-	420.437.431
	Diragukan/ Doubtful	-	-	-	-	-	135.416.900	73.678.601	-	-	209.095.501
	Macek/ Loss	166.203.900	217.759.468	-	-	-	1.137.350.473	2.233.036.964	-	129.167.565	3.883.518.370
	<b>Sub jumlah/ Sub total</b>	<b>759.612.303</b>	<b>408.038.270</b>	<b>-</b>	<b>37.900.600</b>	<b>-</b>	<b>8.235.688.803</b>	<b>5.081.548.431</b>	<b>-</b>	<b>214.445.365</b>	<b>14.796.833.772</b>
4	<b>Banjarmasin</b>										
	Lancar/ Current	205.183.600	514.013.373	68.055.600	-	218.750.100	7.379.030.099	2.713.342.150	-	15.625.834	11.114.010.756
	Kurang Lancar/ Substandard	-	-	-	-	-	222.265.541	-	-	-	222.265.541
	Diragukan/ Doubtful	-	-	-	-	-	97.377.954	-	-	-	97.377.954
	Macek/ Loss	75.341.800	178.432.269	-	-	-	1.111.170.754	321.919.271	-	46.132.200	1.732.896.294
	<b>Sub jumlah/ Sub total</b>	<b>280.535.400</b>	<b>692.445.642</b>	<b>68.055.600</b>	<b>-</b>	<b>218.750.100</b>	<b>8.809.844.348</b>	<b>3.035.261.421</b>	<b>-</b>	<b>61.758.034</b>	<b>13.166.650.545</b>

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN  
MENURUT WILAYAH DAN  
SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN  
Tanggal 31 Desember 2016 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES  
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY  
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR  
As of December 31, 2016 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program  
Kemitraan Tahun 2017 (lanjutan)**

**Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility  
Classified by Regional and Economic Sector Year 2017 (continued)**

No.	Kantor Wilayah/ Regional Office	Industri Pengolahan/ Processing Industries	Jasa Lainnya/ Other Services	Konstruksi/ Construction	Listrik, Gas, dan Air/ Electricity, Gas and Water	Pengangkutan, dan Komunikasi/ Transportation, Warehousing and Communications	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ Trading, Restaurants and Hotels	Pertanian/ Agriculture	Pertambangan/ Mining	Sosial Masyarakat/ Community Services	Jumlah/ Total
5	Dempasar										
	Lancar/ Current	1.140.688.053	683.876.303	-	-	48.611.100	10.501.537.310	4.348.427.673	-	72.916.667	16.796.057.106
	Kurang Lancar/ Substandard	46.650.400	-	-	-	-	142.918.059	109.098.484	-	-	298.666.943
	Diragukan/ Doubtful	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Macek/ Loss	9.983.322	107.197.832	-	-	14.442.800	559.828.218	4.446.035.680	-	-	5.137.487.852
	<b>Sub jumlah/ Sub total</b>	<b>1.197.321.775</b>	<b>791.074.135</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63.053.900</b>	<b>11.204.283.587</b>	<b>8.903.561.837</b>	<b>-</b>	<b>72.916.667</b>	<b>22.232.211.901</b>
6	DKI Jakarta 1										
	Lancar/ Current	-	20.000.000	16.666.400	-	-	1.648.873.427	47.916.700	-	-	1.733.456.527
	Kurang Lancar/ Substandard	-	-	-	-	-	20.198.632	-	-	-	20.198.532
	Diragukan/ Doubtful	-	-	-	-	-	16.667.200	-	-	-	16.667.200
	Macek/ Loss	1.257.201	23.719.233	-	-	-	163.666.382	91.053.900	-	-	279.689.716
	<b>Sub jumlah/ Sub total</b>	<b>1.257.201</b>	<b>43.719.233</b>	<b>16.666.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.849.408.641</b>	<b>138.970.600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.050.022.075</b>



Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

Lampiran/Appendix 2

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM**  
**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES**  
**PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY**  
**CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR**  
**As of December 31, 2016 and**  
**For the Year then Ended**  
**(Expressed in Rupiah)**

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**  
**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN**  
**MENURUT WILAYAH DAN**  
**SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016 dan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility**  
**Classified by Regional and Economic Sector Year 2017 (continued)**

**Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program**  
**Kemitraan Tahun 2017 (lanjutan)**

No.	Kantor Wilayah/ Regional Office	Industri Pengolahan/ Processing Industries	Jasa Lainnya/ Other Industries	Konstruksi/ Construction	Listrik, Gas, dan Air/ Electricity, Gas and Water	Pengangkutan, Perdagangan, Transportasi, Warehousing and Communications	Persediaan Restoran dan Hotel/ Trading, Restaurants and Hotels	Pertanian/ Agriculture	Pertambangan/ Mining	Sosial Masyarakat/ Community Services	Jumlah/ Total
7	<b>DKI Jakarta 2</b>										
	Lancar/ Current	258.768.821	1.034.504.337	-	-	-	6.554.380.199	310.371.913	-	224.846.317	8.382.871.587
	Kurang Lancar/ Substandard	16.733.500	-	-	-	-	51.249.500	-	-	48.130.315	116.113.315
	Diragukan/ Doubtful	-	-	-	-	-	72.250.000	63.313.334	-	-	135.563.334
	Macek/ Loss	7.234.548	175.336.533	-	-	3.434.787	742.598.239	114.761.360	-	6.499.630	1.049.865.077
	<b>Sub jumlah/ Sub total</b>	<b>282.736.869</b>	<b>1.209.840.870</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.434.787</b>	<b>7.420.477.938</b>	<b>488.446.607</b>	<b>-</b>	<b>279.476.262</b>	<b>9.684.413.313</b>
8	<b>DKI Jakarta 3</b>										
	Lancar/ Current	195.676.476	450.543.491	-	-	72.916.700	3.092.072.818	346.528.203	-	23.958.300	4.181.695.988
	Kurang Lancar/ Substandard	-	-	-	-	-	72.225.063	-	-	-	72.225.063
	Diragukan/ Doubtful	-	-	-	-	-	56.249.400	18.958.337	-	-	75.207.737
	Macek/ Loss	87.105.660	688.898.459	-	-	-	913.479.354	197.671.234	-	-	1.887.154.727
	<b>Sub jumlah/ Sub total</b>	<b>282.782.156</b>	<b>1.139.441.950</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72.916.700</b>	<b>4.134.026.635</b>	<b>563.157.774</b>	<b>-</b>	<b>23.958.300</b>	<b>6.216.283.515</b>

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN  
MENURUT WILAYAH DAN  
SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN  
Tanggal 31 Desember 2016 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES  
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY  
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR  
As of December 31, 2016 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**Laporan Kualitas Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program  
Kemitraan Tahun 2017 (lanjutan)**

**Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility  
Classified by Regional and Economic Sector Year 2017 (continued)**

No.	Kantor Wilayah/ Regional Office	Industri Pengolahan/ Processing Industries	Jasa Lainnya/ Other Services	Konstruksi/ Construction	Listrik, Gas, dan Air/ Electricity, Gas and Water	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ Transportation, Warehousing and Communications	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ Trading, Restaurants and Hotels	Pertanian/ Agriculture	Pertambangan/ Mining	Sosial Masyarakat/ Community Services	Jumlah/ Total
9	Jayapura										
	Lancar/ Current	39.833.500	145.276.900	-	-	-	1.590.717.741	430.229.635	-	-	2.206.057.776
	Kurang Lancar/ Substandard	7.080.728	-	-	-	-	4.167.300	11.667.400	-	-	22.915.428
	Diragukan/ Doubtful	-	-	-	-	-	19.444.200	-	-	-	19.444.200
	Macet/ Loss	76.505.433	354.657.634	-	-	49.414.034	936.606.292	79.598.767	-	13.744.003	1.510.526.163
	Sub Jumlah/ Sub total	123.419.661	499.934.534	-	-	49.414.034	2.550.935.533	521.495.802	-	13.744.003	3.758.943.667
10	Makassar										
	Lancar/ Current	749.749.980	798.090.654	-	75.000.000	292.082.600	11.988.514.973	3.037.056.828	-	328.062.360	17.268.547.395
	Kurang Lancar/ Substandard	-	9.722.219	-	-	-	297.751.437	104.076.571	-	-	411.550.227
	Diragukan/ Doubtful	5.825.000	22.222.000	-	-	-	18.053.800	50.079.900	-	-	96.180.700
	Macet/ Loss	157.127.267	219.637.908	-	-	-	1.098.781.137	830.269.362	-	15.701.689	2.321.517.373
	Sub Jumlah/ Sub total	912.702.247	1.049.672.781	-	75.000.000	292.082.600	13.403.101.347	4.021.482.661	-	343.764.059	20.097.795.695



Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

## Lampiran/Appendix 2

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN  
MENURUT WILAYAH DAN  
SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN  
Tanggal 31 Desember 2016 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES  
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY  
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR  
As of December 31, 2016 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**Laporan Kualitas Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program  
Kemitraan Tahun 2017 (lanjutan)**

**Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility  
Classified by Regional and Economic Sector Year 2017 (continued)**

No.	Kantor Wilayah/ Regional Office	Industri Pengolahan/ Processing Industries	Jasa Lainnya/ Other Services	Konstruksi/ Construction	Listrik, Gas, dan Air/ Electricity, Gas and Water	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ Transportation, Warehousing and Communications	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ Trading, Restaurants and Hotels	Pertanian/ Agriculture	Pertambangan/ Mining	Sosial Masyarakat/ Community Services	Jumlah/ Total
11	Malang										
	Lancar/ Current	133.333.600	371.527.000	-	-	86.361.000	6.400.386.082	42.502.603.877	-	61.320.000	48.555.531.559
	Kurang Lancar/ Substandard	-	-	-	-	-	137.589.259	299.487.667	-	-	437.076.926
	Diragukani/ Doubtful	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Macet/ Loss	5.753.233	26.564.750	-	-	10.000.000	613.936.366	1.164.752.580	-	-	1.821.006.929
	Sub Jumlah/ Sub total	139.086.833	398.091.750	-	-	96.361.000	7.151.911.707	43.966.844.124	-	61.320.000	51.813.615.414
12	Manado										
	Lancar/ Current	406.615.988	235.125.800	-	-	180.000.000	3.421.100.958	989.126.800	-	261.874.569	5.503.844.115
	Kurang Lancar/ Substandard	-	-	-	-	-	14.784.228	236.263.600	-	-	251.047.828
	Diragukani/ Doubtful	17.382.224	-	-	-	-	4.253.975	66.343.000	-	-	87.979.199
	Macet/ Loss	194.584.205	325.022.300	-	-	-	985.756.164	410.939.672	-	20.083.900	1.936.386.241
	Sub Jumlah/ Sub total	618.582.417	560.148.100	-	-	180.000.000	4.425.895.325	1.712.673.072	-	281.958.469	7.779.257.383

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN  
MENURUT WILAYAH DAN  
SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN  
Tanggal 31 Desember 2016 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES  
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY  
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR  
As of December 31, 2016 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program  
Kemitraan Tahun 2017 (lanjutan)**

**Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility  
Classified by Regional and Economic Sector Year 2017 (continued)**

No.	Kantor Wilayah/ Regional Office	Industri Pengolahan/ Processing Industries	Jasa Lainnya/ Other Services	Konstruksi/ Construction	Listrik, Gas dan Air/ Electricity, Gas and Water	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ Transportation, Warehousing and Communications	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ Trading, Restaurants and Hotels	Pertanian/ Agriculture	Pertambangan/ Mining	Sosial Masyarakat/ Community Services	Jumlah/ Total
13	Medan										
	Lancar/ Current	443.795.921	362.727.508	-	-	4.426.137.979	1.481.311.911	-	-	224.883.400	6.938.856.719
	Kurang Lancar/ Substandard	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diragukan/ Doubtful	-	-	-	-	10.900.628	7.770.000	-	-	-	18.670.628
	Maceff/ Loss	104.190.658	117.768.867	-	-	348.370.886	270.549.156	-	-	196.727.866	1.037.607.433
	<b>Sub Jumlah/ Sub total</b>	<b>547.986.579</b>	<b>480.496.375</b>	-	-	<b>4.785.409.493</b>	<b>1.759.631.067</b>	-	-	<b>421.611.266</b>	<b>7.995.134.780</b>
14	Padang										
	Lancar/ Current	286.668.100	164.402.600	-	-	4.432.011.788	643.879.284	-	-	58.333.000	5.585.294.782
	Kurang Lancar/ Substandard	-	-	-	-	-	-	-	-	27.777.600	78.211.165
	Diragukan/ Doubtful	9.849.514	13.334.000	-	-	50.433.565	-	-	-	-	73.639.514
	Maceff/ Loss	133.308.132	55.681.867	-	-	50.456.000	564.061.564	-	-	-	1.242.337.248
	<b>Sub Jumlah/ Sub total</b>	<b>429.825.746</b>	<b>233.418.467</b>	-	-	<b>5.022.167.048</b>	<b>1.207.940.848</b>	-	-	<b>86.110.600</b>	<b>6.979.482.709</b>



Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

## Lampiran/Appendix 2

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM**  
**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES**  
**PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY**  
**CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR**  
**As of December 31, 2016 and**  
**For the Year then Ended**  
**(Expressed in Rupiah)**

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**  
**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN**  
**MENURUT WILAYAH DAN**  
**SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016 dan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility**  
**Classified by Regional and Economic Sector Year 2017 (continued)**

**Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program**  
**Kemitraan Tahun 2017 (lanjutan)**

No.	Kantor Wilayah/ Regional Office	Industri Pengolahan/ Processing Industries	Jasa Lainnya/ Other Services	Konstruksi/ Construction	Listrik, Gas dan Air/ Electricity, Gas and Water	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ Transportation, Warehousing and Communications	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ Trading, Restaurants and Hotels	Pertanian/ Agriculture	Pertambangan/ Mining	Sosial Masyarakat/ Community Services	Jumlah/ Total
15	Palembang										
	Lancar/ Current	94.444.200	542.094.190	-	48.607.080	-	5.661.881.802	963.593.259	-	76.750.259	7.429.370.790
	Kurang Lancar/ Substandard	-	-	-	-	-	17.027.800	67.397.465	-	-	84.425.265
	Diragukan/ Doubtful	-	-	-	-	-	48.681.669	170.167.000	-	-	218.848.669
	Macet/ Loss	480.101.866	109.951.166	-	-	-	829.123.590	173.361.133	-	-	1.592.537.755
	Sub jumlah/ Sub total	574.546.066	652.045.356	-	48.607.080	-	6.576.714.861	1.394.518.857	-	76.750.259	9.325.182.479
16	Pekanbaru										
	Lancar/ Current	262.022.430	315.544.800	-	-	-	2.349.742.038	1.070.333.509	-	15.555.800	4.013.198.577
	Kurang Lancar/ Substandard	-	-	-	-	-	-	15.277.500	-	-	15.277.500
	Diragukan/ Doubtful	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Macet/ Loss	1.766.200	70.561.633	-	-	-	467.379.072	35.721.569	-	-	575.428.474
	Sub jumlah/ Sub total	263.788.630	386.106.433	-	-	-	2.817.121.110	1.121.332.578	-	15.555.800	4.603.904.551

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN  
MENURUT WILAYAH DAN  
SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN  
Tanggal 31 Desember 2016 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES  
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY  
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR  
As of December 31, 2016 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program  
Kemitraan Tahun 2017 (lanjutan)**

**Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility  
Classified by Regional and Economic Sector Year 2017 (continued)**

No.	Kantor Wilayah/ Regional Office	Industri Pengolahan/ Processing Industries	Jasa Lainnya/ Other Services	Konstruksi/ Construction	Listrik, Gas dan Air/ Electricity, Gas and Water	Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi/ Transportation, Warehousing and Communications	Perdagangan, Restoran dan Hotel/ Trading, Restaurants and Hotels	Pertanian/ Agriculture	Pertambangan/ Mining	Sosial Masyarakat/ Community Services	Jumlah/ Total
17	<b>Semarang</b>										
	Lancar/ Current	785.921.032	685.657.411	-	-	73.333.000	9.375.921.409	4.678.287.616	-	197.638.300	15.796.758.768
	Kurang Lancar/ Substandard	-	-	-	-	-	18.889.100	102.460.000	-	1.685.600	123.014.700
	Diragukan/ Doubtful	-	162.903	-	-	-	47.494.448	-	-	-	47.657.351
	Macev/ Loss	83.511.463	181.870.601	-	-	-	398.468.245	151.443.124	-	-	815.293.433
	<b>Sub jumlah/ Sub total</b>	<b>869.432.495</b>	<b>867.690.915</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73.333.000</b>	<b>9.840.773.202</b>	<b>4.932.190.740</b>	<b>-</b>	<b>199.303.900</b>	<b>16.782.724.252</b>
18	<b>Surabaya</b>										
	Lancar/ Current	804.436.636	430.525.800	37.500.600	-	13.542.300	9.034.744.209	2.757.985.067	-	199.277.843	13.278.012.455
	Kurang Lancar/ Substandard	48.213.710	-	-	-	-	193.906.601	37.500.000	-	19.444.200	299.064.511
	Diragukan/ Doubtful	-	46.256.000	-	-	-	159.058.947	6.251.156	-	-	211.566.103
	Macev/ Loss	288.526.100	155.522.900	-	-	-	1.281.957.080	722.102.517	-	37.249.900	2.495.388.497
	<b>Sub jumlah/ Sub total</b>	<b>1.141.176.446</b>	<b>632.304.700</b>	<b>37.500.600</b>	<b>-</b>	<b>13.542.300</b>	<b>10.679.666.837</b>	<b>3.523.838.740</b>	<b>-</b>	<b>255.971.943</b>	<b>16.284.001.566</b>



## Lampiran/Appendix 2

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM**  
**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES**  
**PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY**  
**CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR**  
**As of December 31, 2016 and**  
**For the Year then Ended**  
**(Expressed in Rupiah)**

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**  
**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN**  
**MENURUT WILAYAH DAN**  
**SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016 dan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility**  
**Classified by Regional and Economic Sector Year 2017 (continued)**

**Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program**  
**Kemitraan Tahun 2017 (lanjutan)**

No.	Kantor Wilayah/ Regional Office	Industri Pengolahan/ Processing Industries	Jasa Lainnya/ Other Services	Konstruksi/ Construction	Listrik, Gas dan Air/ Electricity, Gas and Water	Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi/ Warehousing and Communications	Perdagangan, Restoran dan Hotel/ Trading, Restaurants and Hotels	Pertanian/ Agriculture	Pertambangan/ Mining	Sosial Masyarakat/ Community Services	Jumlah/ Total
19	Yogyakarta										
	Lancar/ Current	854.695.187	1.604.063.548	-	-	-	16.324.409.311	9.162.402.386	-	187.500.050	28.133.070.482
	Kurang Lancar/ Substandard	29.167.000	59.951.100	-	-	-	196.321.700	111.206.916	-	37.166.600	433.813.316
	Diragukan/ Doubtful	-	-	-	-	-	-	65.000.000	-	-	65.000.000
	Macev/ Loss	255.392.132	347.586.967	-	-	5.221.600	1.967.045.194	620.671.033	-	-	3.195.916.926
	Sub Jumlah/ Sub total	1.139.254.319	2.011.601.615	-	-	5.221.600	18.487.776.205	9.959.280.335	-	224.666.650	31.827.800.724
	Jumlah/Total	10.107.208.031	13.128.802.141	122.222.600	234.024.380	1.141.410.201	138.036.980.180	98.086.350.346	-	2.845.106.677	263.702.104.556

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN  
MENURUT WILAYAH DAN  
SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN  
Tanggal 31 Desember 2016 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES  
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY  
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR  
As of December 31, 2016 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program  
Kemitraan Tahun 2016**

**Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility  
Classified by Regional and Economic Sector Year 2016**

No.	Kantor Wilayah/ Regional Office	Industri Pengolahan/ Processing Industries	Jasa Lainnya/ Other Services	Konstruksi/ Construction	Listrik, Gas, dan Air/ Electricity, Gas and Water	Pengangkutan, Perdagangan, dan Komunikasi/ Transportation, Warehousing and Communications	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ Trading, Restaurant and Hotels	Pertanian/ Agriculture	Pertambangan/ Mining	Sosial Masyarakat/ Community Services	Jumlah/ Total
1	<b>Banda Aceh</b>										
	Lancar/ Current	217.087.000	326.944.200	-	-	125.416.700	4.529.098.427	568.189.552	-	150.416.800	5.917.152.679
	Kurang Lancar/ Substandard	-	-	-	-	-	99.022.826	-	-	-	99.022.826
	Diragukan/ Doubtful	-	-	-	-	-	550.500	-	-	-	550.500
	Macek/ Loss	-	121.031.845	-	-	16.300.000	1.174.840.106	112.730.967	-	5.556.800	1.430.459.718
	<b>Sub jumlah/ Sub total</b>	<b>217.087.000</b>	<b>447.976.045</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>141.716.700</b>	<b>5.803.511.859</b>	<b>680.920.519</b>	<b>-</b>	<b>155.973.600</b>	<b>7.447.185.723</b>
2	<b>Bandar Lampung</b>										
	Lancar/ Current	301.399.065	23.575.334	-	-	1.993.920.074	62.533.600	3.824.854.627	-	87.720.100	6.231.469.200
	Kurang Lancar/ Substandard	-	-	-	-	-	26.178.336	200.000.000	-	-	262.533.600
	Diragukan/ Doubtful	-	-	-	-	-	324.540.284	12.726.900	-	-	38.905.236
	Macek/ Loss	17.925.133	14.609.667	-	-	-	168.365.367	-	-	-	525.440.451
	<b>Sub jumlah/ Sub total</b>	<b>319.324.198</b>	<b>38.185.001</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.407.172.294</b>	<b>4.205.946.894</b>	<b>4.205.946.894</b>	<b>-</b>	<b>87.720.100</b>	<b>7.058.348.487</b>



Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

## Lampiran/Appendix 2

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM**  
**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES**  
**PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY**  
**CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR**  
**As of December 31, 2016 and**  
**For the Year then Ended**  
**(Expressed in Rupiah)**

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**  
**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN**  
**MENURUT WILAYAH DAN**  
**SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016 dan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**Laporan Kualitas Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program**  
**Kemitraan Tahun 2016 (lanjutan)**

**Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility**  
**Classified by Regional and Economic Sector Year 2016 (continued)**

No.	Kantor Wilayah/ Regional Office	Industri/ Pengolahan/ Processing Industries	Jasa Lainnya/ Other Services	Konstruksi/ Construction	Listrik, Gas, dan Air/ Electricity, Gas and Water	Pengangkutan, Perdagangan, dan Komunikasi/ Transportation, Warehousing and Communications	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ Trading, Restaurants and Hotels	Pertanian/ Agriculture	Pertambangan/ Mining	Sosial Masyarakat/ Community Services	Jumlah/ Total
3	<b>Bandung</b>										
	Lancar/ Current	650.107.695	15.277.100	5.555.200	62.500.200	-	4.927.399.656	2.211.613.995	-	14.581.565	7.887.035.411
	Kurang Lancar/ Substandard	2.996.500	-	-	-	-	102.409.896	60.550.538	-	19.442.565	185.399.499
	Diragukani/ Doubtful	-	-	-	-	-	32.039.026	-	-	-	32.039.026
	Macek/ Loss	166.203.900	217.759.468	-	-	-	1.108.159.890	2.230.592.564	-	110.075.000	3.832.790.822
	<b>Sub jumlah/ Sub total</b>	<b>819.308.095</b>	<b>233.036.568</b>	<b>5.555.200</b>	<b>62.500.200</b>	<b>-</b>	<b>6.170.008.468</b>	<b>4.502.757.097</b>	<b>-</b>	<b>144.098.130</b>	<b>11.937.264.758</b>
4	<b>Banjarmasin</b>										
	Lancar/ Current	190.388.736	616.513.304	-	-	12.499.700	4.006.607.605	2.037.960.438	-	70.902.300	6.935.072.083
	Kurang Lancar/ Substandard	2.084.100	27.777.779	-	-	-	86.551.599	4.341.400	-	-	120.754.878
	Diragukani/ Doubtful	-	33.123.523	-	-	-	-	50.000.000	-	-	83.123.523
	Macek/ Loss	84.801.900	128.149.667	-	-	-	956.945.408	271.919.271	-	52.294.680	1.494.110.926
	<b>Sub jumlah/ Sub total</b>	<b>277.274.736</b>	<b>805.564.273</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.499.700</b>	<b>5.050.304.612</b>	<b>2.364.221.109</b>	<b>-</b>	<b>123.196.980</b>	<b>8.633.061.410</b>

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN  
MENURUT WILAYAH DAN  
SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN  
Tanggal 31 Desember 2016 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES  
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY  
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR  
As of December 31, 2016 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program  
Kemitraan Tahun 2016 (lanjutan)**

**Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility  
Classified by Regional and Economic Sector Year 2016 (continued)**

No.	Kantor Wilayah/ Regional Office	Industri Pengolahan/ Processing Industries	Jasa Lainnya/ Other Services	Konstruksi/ Construction	Listrik, Gas, dan Air/ Electricity, Gas and Water	Pengangkutan, dan Komunikasi/ Transportation, Warehousing and Communications	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ Trading, Restaurants and Hotels	Pertanian/ Agriculture	Pertambangan/ Mining	Sosial Masyarakat/ Community Services	Jumlah/ Total
5	Dempasar										
	Lancar/ Current	372.716.022	148.292.513	-	-	1.638.936.017	876.369.222	-	-	-	3.036.313.774
	Kurang Lancar/ Substandard	-	-	-	-	36.861.313	195.965.939	-	-	-	232.827.252
	Diragukan/ Doubtful	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Macek/ Loss	-	110.697.832	-	-	14.442.800	637.084.349	4.394.174.034	-	-	5.156.399.015
	<b>Sub jumlah/ Sub total</b>	<b>372.716.022</b>	<b>258.990.345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.442.800</b>	<b>2.312.881.679</b>	<b>5.466.509.195</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.425.540.041</b>
6	DKI Jakarta 1										
	Lancar/ Current	-	-	33.333.200	-	-	850.521.809	-	-	-	883.855.009
	Kurang Lancar/ Substandard	-	-	-	-	-	19.167.100	-	-	-	19.167.100
	Diragukan/ Doubtful	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Macek/ Loss	1.257.201	23.719.233	-	-	149.795.332	91.053.900	-	-	-	265.825.666
	<b>Sub jumlah/ Sub total</b>	<b>1.257.201</b>	<b>23.719.233</b>	<b>33.333.200</b>	<b>-</b>	<b>1.019.484.241</b>	<b>91.053.900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.168.847.775</b>



Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

Lampiran/Appendix 2

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM**  
**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES**  
**PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY**  
**CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR**  
**As of December 31, 2016 and**  
**For the Year then Ended**  
**(Expressed in Rupiah)**

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**  
**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN**  
**MENURUT WILAYAH DAN**  
**SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016 dan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program**  
**Kemitraan Tahun 2016 (lanjutan)**

**Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility**  
**Classified by Regional and Economic Sector Year 2016 (continued)**

No.	Kantor Wilayah/ Regional Office	Industri Pengolahan/ Processing Industries	Jasa Lainnya/ Other Industries	Konstruksi/ Construction	Listrik, Gas, dan Air/ Electricity, Gas and Water	Pengangkutan, Kendaraan, Transportasi, Warehousing and Communications	Persediaan Restoran dan Hotel/ Trading, Restaurants and Hotels	Pertanian/ Agriculture	Pertambangan/ Mining	Sosial Masyarakat/ Community Services	Jumlah/ Total
7	DKI Jakarta 2										
	Lancar/ Current	310.764.772	374.609.890	-	-	-	3.473.348.989	261.300.280	-	86.994.375	4.507.018.316
	Kurang Lancar/ Substandard	-	-	-	-	-	102.203.100	80.130.000	-	-	182.333.100
	Diragukan/ Doubtful	-	-	-	-	-	25.000.400	-	-	-	25.000.400
	Mace/ Loss	7.234.548	185.336.533	-	-	3.434.767	606.666.339	114.761.360	-	6.499.630	923.933.177
	Sub jumlah/ Sub total	317.999.320	559.946.423	-	-	3.434.767	4.207.218.838	456.191.640	-	93.494.005	5.638.284.993
8	DKI Jakarta 3										
	Lancar/ Current	94.484.676	44.425.268	-	-	-	1.380.229.326	288.361.337	-	-	1.807.500.607
	Kurang Lancar/ Substandard	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diragukan/ Doubtful	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mace/ Loss	87.105.660	689.898.463	-	-	-	912.657.687	214.060.234	-	-	1.903.722.064
	Sub jumlah/ Sub total	181.590.356	734.323.731	-	-	-	2.292.887.013	502.421.571	-	-	3.711.222.671

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN  
MENURUT WILAYAH DAN  
SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN  
Tanggal 31 Desember 2016 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES  
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY  
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR  
As of December 31, 2016 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**Laporan Kualitas Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program  
Kemitraan Tahun 2016 (lanjutan)**

**Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility  
Classified by Regional and Economic Sector Year 2016 (continued)**

No.	Kantor Wilayah/ Regional Office	Industri Pengolahan/ Processing Industries	Jasa Lainnya/ Other Services	Konstruksi/ Construction	Listrik, Gas, dan Air/ Electricity, Gas and Water	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ Transportation, Warehousing and Communications	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ Trading, Restaurants and Hotels	Pertanian/ Agriculture	Pertambangan/ Mining	Sosial Masyarakat/ Community Services	Jumlah/ Total
9	Jayapura										
	Lancar/ Current	79.584.100	16.110.800	-	-	-	1.155.904.445	297.634.500	-	70.833.400	1.620.067.245
	Kurang Lancar/ Substandard	-	-	-	-	-	59.055.600	48.600.000	-	-	107.655.600
	Diragukan/ Doubtful	-	2.747.300	-	-	-	-	-	-	-	2.747.300
	Macet/ Loss	11.921.933	354.657.634	-	-	49.414.034	1.050.082.529	82.275.100	-	13.744.003	1.562.095.233
Sub Jumlah/ Sub total	91.506.033	373.515.734	-	-	49.414.034	2.265.042.574	428.909.600	-	84.577.403	3.292.565.378	
10	Makassar										
	Lancar/ Current	772.455.476	389.848.340	-	-	9.582.900	5.006.233.540	1.522.352.700	-	190.973.102	7.891.446.058
	Kurang Lancar/ Substandard	18.471.000	30.555.400	-	-	-	179.043.788	-	-	-	228.070.188
	Diragukan/ Doubtful	20.706.000	-	-	-	-	67.632.000	33.761.100	-	-	122.099.100
	Macet/ Loss	66.202.067	237.232.408	-	-	-	899.099.925	756.174.462	-	15.701.689	1.974.410.561
Sub Jumlah/ Sub total	877.834.543	657.636.148	-	-	9.582.900	6.152.009.253	2.312.286.262	-	206.674.801	10.216.025.907	



## Lampiran/Appendix 2

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM**  
**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES**  
**PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY**  
**CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR**  
**As of December 31, 2016 and**  
**For the Year then Ended**  
**(Expressed in Rupiah)**

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**  
**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN**  
**MENURUT WILAYAH DAN**  
**SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016 dan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program**  
**Kemitraan Tahun 2016 (lanjutan)**

**Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility**  
**Classified by Regional and Economic Sector Year 2016 (continued)**

No.	Kantor Wilayah/ Regional Office	Industri Pengolahan/ Processing Industries	Jasa Lainnya/ Other Services	Konstruksi/ Construction	Listrik, Gas, dan Air/ Electricity, Gas and Water	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ Transportation, Warehousing and Communications	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ Trading, Restaurants and Hotels	Pertanian/ Agriculture	Pertambangan/ Mining	Sosial Masyarakat/ Community Services	Jumlah/ Total
11	Malang										
	Lancar/ Current	263.171.773	9.028.800	-	-	144.694.200	3.204.387.256	1.936.216.286	-	41.770.900	5.599.289.215
	Kurang Lancar/ Substandard	5.000.000	-	-	-	-	17.765.500	143.491.276	-	-	166.256.776
	Diragukani/ Doubtful	-	-	-	-	-	6.785.600	378.181.386	-	-	384.966.986
	Macet/ Loss	5.753.233	26.564.750	-	-	10.000.000	634.138.666	711.196.817	-	-	1.387.653.466
	Sub Jumlah/ Sub total	273.925.006	35.593.550	-	-	154.694.200	3.863.077.022	3.169.085.765	-	41.770.900	7.538.146.443
12	Manado										
	Lancar/ Current	131.944.500	123.517.556	-	-	12.499.987	979.650.630	889.832.600	-	73.750.000	2.221.195.273
	Kurang Lancar/ Substandard	-	21.656.000	-	-	-	176.516.100	138.687.680	-	-	336.661.780
	Diragukani/ Doubtful	29.921.167	-	-	-	-	191.437.712	7.000.000	-	-	228.358.879
	Macet/ Loss	164.663.038	307.416.300	-	-	-	762.812.852	373.927.400	-	21.083.900	1.629.903.490
	Sub Jumlah/ Sub total	326.528.705	452.589.856	-	-	12.499.987	2.110.219.294	1.419.447.680	-	94.833.900	4.416.119.422

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN  
MENURUT WILAYAH DAN  
SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN  
Tanggal 31 Desember 2016 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES  
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY  
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR  
As of December 31, 2016 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**Laporan Kualitas Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program  
Kemitraan Tahun 2016 (lanjutan)**

**Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility  
Classified by Regional and Economic Sector Year 2016 (continued)**

No.	Kantor Wilayah/ Regional Office	Industri Pengolahan/ Processing Industries	Jasa Lainnya/ Other Services	Konstruksi/ Construction	Listrik, Gas dan Air/ Electricity, Gas and Water	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ Transportation, Warehousing and Communications	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ Trading, Restaurants and Hotels	Pertanian/ Agriculture	Pertambangan/ Mining	Sosial Masyarakat/ Community Services	Jumlah/ Total
13	Medan										
	Lancar/ Current	139.026.400	15.000.000	-	-	2.915.700	1.155.586.624	223.183.200	-	60.554.800	1.596.266.724
	Kurang Lancar/ Substandard	-	-	-	-	-	35.000.100	22.917.100	-	-	57.917.200
	Diragukan/ Doubtful	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Macek/ Loss	107.477.222	117.768.867	-	-	-	396.212.044	252.132.056	-	146.727.866	1.020.318.055
	<b>Sub Jumlah/ Sub total</b>	<b>246.503.622</b>	<b>132.768.867</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.915.700</b>	<b>1.586.798.768</b>	<b>498.232.356</b>	<b>-</b>	<b>207.282.666</b>	<b>2.674.501.979</b>
14	Pedang										
	Lancar/ Current	484.791.900	95.679.800	-	-	-	2.887.340.350	341.035.192	-	66.666.400	3.875.513.642
	Kurang Lancar/ Substandard	44.722.500	-	-	-	-	140.941.233	-	-	-	185.663.733
	Diragukan/ Doubtful	-	27.777.600	-	-	-	18.720.987	-	-	-	46.498.597
	Macek/ Loss	10.791.832	27.904.267	-	-	-	419.322.744	564.061.564	-	-	1.022.080.407
	<b>Sub Jumlah/ Sub total</b>	<b>540.306.232</b>	<b>151.361.667</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.466.325.324</b>	<b>905.096.756</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66.666.400</b>	<b>5.129.786.379</b>



Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

## Lampiran/Appendix 2

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN  
MENURUT WILAYAH DAN  
SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN  
Tanggal 31 Desember 2016 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program  
Kemitraan Tahun 2016 (lanjutan)**

**Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility  
Classified by Regional and Economic Sector Year 2016 (continued)**

No.	Kantor Wilayah/ Regional Office	Industri Pengolahan/ Processing Industries	Jasa Lainnya/ Other Services	Konstruksi/ Construction	Listrik, Gas dan Air/ Electricity, Gas and Water	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ Transportation, Warehousing and Communications	Perdagangan, Restoran, dan Hotel/ Trading, Restaurants and Hotels	Pertanian/ Agriculture	Pertambangan/ Mining	Sosial Masyarakat/ Community Services	Jumlah/ Total
15	Palembang										
	Lancar/ Current	114.722.200	75.773.468	-	-	-	2.471.668.382	829.099.986	23.333.600	22.500.000	3.537.097.646
	Kurang Lancar/ Substandard	-	-	-	-	-	80.566.600	108.666.000	-	-	189.234.600
	Diragukan/ Doubtful	11.752.000	-	-	-	-	56.456.300	34.043.300	-	-	102.251.600
	Macet/ Loss	480.101.866	121.429.299	-	-	-	755.587.380	153.130.433	-	-	1.510.248.988
	Sub jumlah/ Sub total	606.576.066	197.202.767	-	-	-	3.364.280.682	1.124.939.719	23.333.600	22.500.000	5.338.832.834
16	Pekanbaru										
	Lancar/ Current	158.882.005	171.527.700	-	-	-	2.155.331.536	662.245.930	-	28.889.000	3.174.876.171
	Kurang Lancar/ Substandard	-	-	-	-	-	41.666.600	31.625.000	-	-	73.291.600
	Diragukan/ Doubtful	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Macet/ Loss	1.766.200	70.561.633	-	-	-	402.927.570	34.312.500	-	-	509.567.903
	Sub jumlah/ Sub total	158.648.205	242.089.333	-	-	-	2.599.925.706	728.183.430	-	28.889.000	3.757.735.674

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN  
MENURUT WILAYAH DAN  
SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN  
Tanggal 31 Desember 2016 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES  
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY  
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR  
As of December 31, 2016 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**Laporan Kualitas Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program  
Kemitraan Tahun 2016 (lanjutan)**

**Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility  
Classified by Regional and Economic Sector Year 2016 (continued)**

No.	Kantor Wilayah/ Regional Office	Industri Pengolahan/ Processing Industries	Jasa Lainnya/ Other Services	Konstruksi/ Construction	Listrik, Gas dan Air/ Electricity, Gas and Water	Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi/ Transportation, Warehousing and Communications	Perdagangan, Restoran dan Hotel/ Trading, Restaurants and Hotels	Pertanian/ Agriculture	Pertambangan/ Mining	Sosial Masyarakat/ Community Services	Jumlah/ Total
17	<b>Semarang</b>										
	Lancar/ Current	377.284.318	118.888.687	-	-	-	3.391.992.953	1.855.201.648	-	73.471.200	5.816.838.806
	Kurang Lancar/ Substandard	-	11.943.500	-	-	-	10.617.100	101.725.000	-	-	124.285.600
	Diragukan/ Doubtful	-	-	-	-	-	-	47.500.000	-	-	47.500.000
	Macek/ Loss	100.888.485	203.003.001	-	-	-	456.632.164	100.493.124	-	-	861.016.774
	<b>Sub jumlah/ Sub total</b>	<b>478.172.803</b>	<b>333.835.188</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.859.242.217</b>	<b>2.104.919.772</b>	<b>-</b>	<b>73.471.200</b>	<b>6.849.641.180</b>
18	<b>Surabaya</b>										
	Lancar/ Current	660.273.765	247.842.800	60.416.900	-	46.041.900	5.158.612.151	1.799.503.267	-	217.647.465	8.190.338.248
	Kurang Lancar/ Substandard	-	97.688.200	-	-	-	430.570.175	252.400.161	-	33.341.265	813.979.801
	Diragukan/ Doubtful	-	5.667.300	-	-	-	69.424.831	42.905.100	-	-	117.997.231
	Macek/ Loss	288.526.100	70.073.000	-	-	-	852.112.805	527.488.473	-	37.249.900	1.755.450.278
	<b>Sub jumlah/ Sub total</b>	<b>948.799.865</b>	<b>421.251.300</b>	<b>60.416.900</b>	<b>-</b>	<b>46.041.900</b>	<b>6.490.719.962</b>	<b>2.622.297.001</b>	<b>-</b>	<b>288.238.630</b>	<b>10.877.765.558</b>



Ikhtisar Kinerja Utama  
Laporan Manajemen  
Profil Perusahaan  
Analisa & Pembahasan Manajemen

## Lampiran/Appendix 2

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
LAPORAN KUALITAS PIUTANG PINJAMAN  
MENURUT WILAYAH DAN  
SEKTOR USAHA PROGRAM KEMITRAAN  
Tanggal 31 Desember 2016 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
STATEMENT OF LOAN RECEIVABLES  
PARTNERSHIP PROGRAM'S COLLECTIBILITY  
CLASSIFIED BY REGIONAL AND ECONOMIC SECTOR  
As of December 31, 2016 and  
For the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah)**

**Laporan Kualitas Piutang Pinjaman menurut Wilayah dan Sektor Usaha Program  
Kemitraan Tahun 2016 (lanjutan)**

**Statement of Loan Receivables Partnership Program's Collectibility  
Classified by Regional and Economic Sector Year 2016 (continued)**

No.	Kantor Wilayah/ Regional Office	Industri Pengolahan/ Processing Industries	Jasa Lainnya/ Other Services	Konstruksi/ Construction	Listrik, Gas dan Air/ Electricity, Gas and Water	Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi/ Transportation, Warehousing and Communications	Perdagangan, Restoran dan Hotel/ Trading, Restaurants and Hotels	Pertanian/ Agriculture	Pertambangan/ Mining	Sosial Masyarakat/ Community Services	Jumlah/ Total
19	Yogyakarta										
	Lancar/ Current	434.973.047	519.543.233	-	-	6.179.923.763	2.793.062.669	-	-	93.332.800	10.020.836.512
	Kurang Lancar/ Substandard	-	82.045.400	-	-	62.361.100	-	-	-	-	144.406.500
	Diragukan/ Doubtful	-	-	-	-	14.120.000	-	-	-	-	14.120.000
	Miscel/ Loss	213.723.832	678.067.089	-	-	5.221.600	2.130.058.478	-	-	-	5.077.312.060
	Sub Jumlah/ Sub total	648.696.879	1.279.655.722	-	-	5.221.600	8.386.463.341	-	-	93.332.800	15.256.674.072
	Jumlah/ Total	7.704.054.887	7.379.241.751	99.305.300	62.500.200	452.464.288	73.407.573.147	38.426.325.996	23.333.600	1.812.721.515	129.367.520.684

MEMBANGUN NEGERI MELALUI  
INTEGRATED BANKING SOLUTION  
& TRANSFORMASI UMKM



Melayani Dengan Setulus Hati

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**

Head Office

Gedung BRI I

Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46

Jakarta 10210

Indonesia

 : (62 21) 251 0244, 251 0254

 : (62 21) 250 0065, 250 0077

 : [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)